

PROSIDING

VENNAS AIHII

KONVENSI NASIONAL
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif
Hubungan Internasional

Makassar, 23 November 2016



ISSN: 2549-6689



9 772549 668881

Dewan Redaksi

Advisor

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII), Tirta N. Mursitama.
- (2) Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, H. Darwis

Head of Editorial Board

Ishaq Rahman

Editor

Pusparida Syahdan
Agussalim Burhanuddin
Ashry Sallatu
Aswin Baharuddin
Nur Utaminingsih

Desain-Layout

Satkar Ulama

Diterbitkan oleh:

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin

bersama

Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII)

Disclaimer

Setiap paper dalam prosiding ini adalah hasil karya masing-masing penulisnya sebagaimana tercantum pada setiap paper. Sebagai karya akademik, setiap penulis adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap validitas data, analisis, dan kesimpulan, serta terhadap keseluruhan isi paper.



Sambutan Pengurus Pusat AIHII

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya Konvensi Nasional (Vennas) ke-7 Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) pada tanggal 23 – 24 November 2017 dengan lancar dan sukses. Salah satu bukti keberhasilan tersebut adalah tersusunnya Prosiding Vennas ke-7 AIHII dengan tema “Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional” ini.

Vennas ke-7 AIHII merupakan salah satu pertemuan nasional terbesar dengan jumlah partisipan sebanyak 138 orang yang berasal dari 45 program studi Hubungan Internasional seluruh Indonesia dan perwakilan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bila dilihat dari jumlah abstrak yang masuk dapat dikategorikan cukup banyak yaitu 91 abstrak dan 73 di antaranya dipresentasikan di dalam pertemuan ilmiah. Pada akhirnya, jumlah artikel lengkap (full paper) yang berhasil dihimpun dalam prosiding ini sebanyak 40 artikel ilmiah.

Sebagai salah satu kegiatan tahunan, pertemuan ilmiah Vennas merupakan wahana yang ditunggu-tunggu oleh komunitas epistemik HI di Indonesia. Dalam pertemuan ilmiah ini dipresentasikan berbagai penelitian terbaru dan pemikiran mutakhir para penstudi HI di Indonesia dalam menganalisis berbagai fenomena HI yang terjadi di dunia. Banyak pemikiran menarik terutama tentang maritim Indonesia ditelaah dari sudut pandang Ilmu HI.

Pertemuan ilmiah ini sekaligus menjadi ajang *knowledge sharing* dan *knowledge creation* yang pada akhirnya mengerucut pada pencarian intelektual tentang kajian HI yang memiliki ciri khas ke-Indonesiaan. Yaitu, sebuah cara pandang yang berpijak pada identitas, budaya, kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia atas tafsir fenomena HI yang terjadi. Dengan demikian, analisis tersebut dapat menawarkan sesuatu kebaruan dalam khasanah HI di tataran global; bukan sekedar replikasi sudut pandang HI global atau kalangan “Barat” (*western*) terhadap apa yang terjadi dan dikaitkan dengan posisi dan peran Indonesia.

Perjalanan menuju hal tersebut tentu masih panjang. Banyak perdebatan dapat muncul dari berbagai kalangan komunitas epistemik HI Indonesia. Namun, jalan menuju ke sana telah dirintis dan mari terus kita kembangkan demi kemajuan AIHII dan bangsa Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan banyak terima kasih

kepada seluruh panitia Vennas ke-7 AIHII, para pengurus AIHII, anggota AIHII, Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan para pihak yang telah membantu terselenggaranya Vennas ke-7 AIHII ini dengan sukses.

Jakarta, 1 Desember 2016

Ketua Umum Pengurus Pusat
Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)

Prof. Dr. Tirta N. Mursitama, PhD



Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan-Nya kepada kita semua dalam pelaksanaan Konvensi Nasional VII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) yang berjalan sukses dan berhasil menerbitkan Buku Prosiding ini. Konvensi kali ini mengangkat tema “**Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Hubungan Internasional**”. Prosiding ini memuat rangkuman singkat mengenai materi yang dibahas oleh para narasumber dalam Seminar Nasional, dan juga memuat seluruh makalah yang dipresentasikan pada Sidang Akademik dalam rangkaian Konvensi Nasional VII AIHII di Makassar, 23 November 2016.

Tema ini dipilih dengan dasar pemikiran bahwa topik kemaritiman telah menjadi isu hangat pada level nasional maupun global. Pada level nasional, isu maritim menjadi sentral karena visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Hal ini membuka ruang bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang ada di Indonesia.

Sidang Akademik Konvensi Nasional VII terbagi dalam 4 (empat) sub tema, yaitu: (1) Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional; (2) Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN; (3) Keamanan, Demokrasi dan Masyarakat Transnasiona; dan (4) Ekonomi Politik Internasional. Selain itu, juga terdapat forum akademik dengan tema khusus, yaitu “Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE)”, dan *National Integrity System and Anti Corruption*.

Selain presentasi akademik, Konvensi Nasional VII juga diisi dengan beberapa kegiatan yang merupakan ajang pertemuan organisasi AIHII. Dalam sidang organisasi, dibahas berbagai isu keilmuan dan proses akademik di perguruan tinggi setiap anggota AIHII, mendiskusikan alternatif pengembangan, dan juga upaya-upaya untuk memperkuat organisasi.

Prosiding menyajikan seluruh makalah yang dipresentasikan selama konvensi. Seluruh penyaji pada kegiatan ini adalah peneliti Hubungan Internasional yang sebagian besarnya merupakan dosen program studi Hubungan Internasional dari 45 universitas anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia.

Akhir kata, kami dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Hasanuddin, seluruh jajaran Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII),

sponsor kegiatan, para penyaji, para peserta dan panitia yang sudah berkenan mendukung kesuksesan kegiatan ini. Kami berdoa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi niat dan usaha baik kita semua.

Makassar, 1 Desember 2016

Ketua Departemen Hubungan Internasional
FISIP Universitas Hasanuddin

H. Darwis, Ph.D



Pengantar Editor

Benua Maritim dan Arah Baru Kajian Studi Hubungan Internasional Berperspektif Indonesia

Ishaq Rahman

Head of Editorial Board (Universitas Hasanuddin, Makassar)

ishaq@fisip.unhas.ac.id

Konvensi ini mengambil tema “Benua Maritim Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional”. Tema ini dipilih dengan dua pertimbangan. Pertama, isu benua maritim saat ini sedang menjadi salah satu fokus perhatian para penstudi hubungan internasional, baik nasional maupun internasional. Pada level nasional, langkah Presiden Joko Widodo yang menjadikan tema maritim sebagai fokus kebijakan pembangunan saat ini telah mendorong peningkatan kajian dalam berbagai bidang.

Kedua, tema maritim merupakan isu hangat dalam hubungan internasional yang banyak mewarnai arah kebijakan negara-negara di dunia, yang dengan sendirinya membuka ruang kajian lebih luas dan variatif bagi para penstudi ilmu hubungan internasional. Pada tataran regional Asia Timur dan Tenggara, isu klaim berlapis terhadap Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang menempatkan Republik Rakyat Tiongkok sebagai aktor penting, beririsan dengan fenomena kebangkitan Tiongkok dalam interaksi global.

Prosiding ini menyajikan gagasan dan pemikiran dari para penstudi hubungan internasional dari seluruh Indonesia. Secara sistematis, pembagian bahasan dalam prosiding ini mengacu pada pengelompokan paper yang dipresentasikan pada konvensi. Masing-masing sub tema dalam prosiding ini menggambarkan karakter akademik yang saat ini sedang berkembang dalam kajian hubungan internasional di Indonesia.

Keamanan, Demokrasi, dan Masyarakat Transnasional

Demokrasi sedang menjadi trend global, terutama dalam 25 tahun terakhir. Setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1991, dunia internasional telah menyaksikan transisi demokrasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, hingga fenomena Arab Spring yang terjadi pada penghujung 2011. Dalam konteks

demokrasi, gagasan tentang keamanan juga mengalami pergeseran makna dari keamanan wilayah (*territorial security*) menuju keamanan manusia (*human security*), dan setelah peristiwa 9/11, menuju *pre-emptive security*. Bahkan, pada banyak negara-negara yang bertransisi kini sedang terjadi fenomena pertukaran (*tradeoff*) antara keamanan dan demokrasi (Pavone, Gomez, dan Jaquet-Chivelle, 2016). Gejolak keamanan tampak terjadi pada negara-negara yang bertransisi, meskipun pada level ancaman yang berbeda-beda dan variasi eskalasi yang dinamis.

Prosiding ini menyajikan variasi gagasan tentang keamanan, demokrasi, dan masyarakat transnasional dengan pendekatan yang beragam. Mulai dari gagasan tradisional tentang keamanan wilayah, hingga gagasan kontemporer tentang keamanan siber. Adi Rio Arianto (halaman 18) bahkan melihat realitas ini bukan saja sebagai isu keamanan siber *an sich*, tetapi telah menjangkau dimensi-dimensi geopolitik dan keseimbangan arsitektur keamanan global, melalui apa yang dia istilahkan sebagai "geometripolitika", suatu gagasan yang belum kita temukan dalam literatur mainstream. Arianto mengulas bagaimana level rasionalitas, kapabilitas, dan probabilitas senjata nuklir sebagai instrumen pemusnah massal disandingkan dengan ancaman perang siber yang lebih kontemporer.

Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional

Dinamika pemikiran teoritik dalam hubungan internasional masih terus mencari bentuk yang aplikatif dan dapat memberi penjelasan memuaskan terhadap peristiwa-peristiwa internasional. Epistemologi ilmu nampaknya semakin kokoh dengan diterimanya kesepahaman diantara para pengkaji bahwa tidak ada satu teori dan metodologi tunggal yang mampu mengayomi kompleksitas studi ini. Maka, karakter perkembangan teori akan selalu mengikuti perkembangan, yang sesuai dengan karakter ilmu-ilmu sosial secara umum.

Ada gejala "kembali"-nya pencarian metodologi terhadap aspek-aspek sosial, kultural, dan historis yang sempat diabaikan. Gagasan yang dituangkan Rizal A. Hidayat (halaman 225) menelaah pendekatan teori sosiologi sejarah dalam penelitian hubungan internasional. Anggapan pendekatan ini sebagai "*the second class theory*" sepertinya menarik untuk ditelaah kembali. Pada dekade 1990-an, beberapa peneliti sebenarnya telah membuka ruang bagi penerapan pendekatan sosial murni terhadap kajian hubungan internasional, seperti karya Yosef Lapid dan Friedrich V. Kratochwil (ed) yang berjudul: "The Return of Culture and Identity in International Relations Theory" (1996).



Pencarian pendekatan alternatif untuk menjelaskan fenomena dalam hubungan internasional telah dimulai sejak akhir dekade 1980-an. Nicholas Greenwood Onuf memperkenalkan *konstruktivisme* dalam “World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and Internasional Relations” (1989), dan secara intensif dan konsisten dipromosikan oleh Alexander Wendt melalui serangkaian artikel dan buku. Emil Radhiansyah dan Tatok D. Sudiarto (halaman 51) mencoba melakukan telaah terhadap keputusan arbitrase pengadilan internasional mengenai Laut China Selatan dengan mengadopsi gagasan konstruktivis. Begitu juga Ali Maksum (halaman 215) menggunakan pendekatan alternatif ini untuk menjelaskan isu-isu kontemporer di Asia Tenggara.

Ekonomi Politik Benua Maritim

Pendekatan ekonomi politik internasional sejak Adam Smith, John Stuart Mill, atau Immanuel Kant (dengan gagasan klasik tentang liberalisme ekonomi) maupun ide-ide tentang interdependensi yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph S. Nye, hingga pendekatan globalisasi yang antara lain diusung oleh Anthony Giddens, Thomas L. Friedman, dan puluhan akademisi dan penulis, nampaknya masih menjadi sentrum kajian, baik yang bersifat promotif maupun kritis. Sementara itu, perspektif kontemporer sebagaimana ditawarkan oleh Benjamin Jerry Cohen (yang membagi tegas antara perspektif Amerika dan Inggris) masih kurang memperoleh perhatian dalam kajian ekonomi politik internasional.

Para peneliti dalam konvensi ini didominasi oleh peminatan yang fokus pada peranan negara, kelompok negara-negara (organisasi internasional dan multilateralisme), serta perusahaan multi nasional. A. Irawan J.H (halaman 306) atau Rahmi Fitriyanti (halaman 354) membahas tentang perspektif kepentingan nasional antara Indonesia dan Tiongkok sesuai dengan karakter strategi pengembangan maritim setiap negara. Sementara Ignatius Ismanto (halaman 324) memilih perspektif multilateral dalam melihat dinamika ekonomi politik di ASEAN.

Dalam pandangan penulis, apa yang disajikan oleh para peneliti dan penstudi hubungan internasional masih bersifat tradisional dan belum berani keluar dari kungkungan perspektif-perspektif klasik ekonomi politik internasional. Tentu saja hal ini sama sekali bukan sesuatu yang salah, sebab pada tingkat global sekalipun pendekatan yang sama masih terjadi. Satu hal yang menarik adalah keberanian untuk menempatkan pendekatan ekonomi politik internasional untuk menelaah fenomena akar rumput, sebagaimana ditunjukkan dalam makalah Sri Suwartiningsih (halaman 374) yang menguraikan tentang ekonomi politik pada

masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tentu saja, kita akan kembali pada perdebatan klasik epistemologi keilmuan tentang obyek kajian studi hubungan internasional. Akan tetapi, sebagaimana penulis kemukakan di atas, selalu ada ruang yang dinamis bagi pendekatan-pendekatan alternatif dalam kajian hubungan internasional.

Perspektif Indonesia

Dari kelima panel yang tersedia, sebagian besar paper terdistribusi pada panel “Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN”. Hal ini menunjukkan bahwa *main stream* perkembangan penelitian di ranah kajian hubungan internasional Indonesia cenderung bersifat *inward looking*, yaitu lebih didominasi oleh upaya pencarian terhadap model kajian dan fokus penelitian yang menunjukkan karakter ke-Indonesia-an. Kekhasan ini juga terlihat dari hadirnya dua makalah yang mencoba mengupas tentang fenomena korupsi dalam perspektif global. Pada satu sisi, fenomena korupsi yang cenderung domestik dianalisis dengan argumen-argumen gerakan global melawan korupsi.

Salah satu kritik yang hingga kini masih mewarnai aplikasi studi hubungan internasional adalah bagaimana *membumikan* kajian ini, terutama menjadikan ilmu ini sebagai kebutuhan aktual masyarakat. Secara tradisional, ulasan atau studi tentang perang dan damai, diplomasi, kerja sama pada forum-forum yang berskala global, dan sebagainya, dinilai sebagai “kebutuhan elit” dibanding “kebutuhan masyarakat”. Di sisi lain, seiring dengan karakter interaksi global yang semakin meluruhkan batas-batas negara dan hambatan-hambatan dalam interaksi antarbangsa, terjadi pula perluasan tema dan fokus penelitian studi ilmu hubungan internasional, hingga mencakup pula tema-tema yang dinilai generik ilmu sosial.

Variasi (keluasan) dan kedalaman tema seperti inilah yang mewarnai fokus prosiding ini, bergandengan dengan isu kajian maritim sebagai tema utama.

Referensi

Vincenzo Pavone, Elvira Santiago Gomez & David-Olivier Jaquet-Chiffelle, “A Systemic Approach to Security: Beyond the Tradeoff between Security and Liberty”, ***Journal of Democracy and Security***, Vol. 12, No. 4, 2016.

Robert Howard Jackson and Georg Sørensen, ***Introduction to International Relations: Theories and Approaches***, 4th Edition. Oxford University Press, 2010.



Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”, ***International Organization***, Vol. 46, no. 2, 1992.

Daftar Isi

Dewan Redaksi	iii
Disclaimer	iv
Sambutan Pengurus Pusat AIHI.....	v
Kata Pengantar	vii
Pengantar Editor.....	ix
Benua Maritim dan Arah Baru Kajian Studi Hubungan Internasional Berperspektif Indonesia	ix
Daftar Isi	xiv
Keynote Speech.....	1
Transformasi Peta Geo-Maritim dan Diplomasi Pertahanan Indonesia, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si	1
Indonesia dan ASEAN Lima Tahun ke Depan, Prof. Dr. Yanyan Mochamad Yani.....	3
Panel 1: Keamanan, Demokrasi, dan Masyarakat Transnasional	5
Indonesia dalam Arus <i>Multi-track Regionalism</i> Asia Tenggara	7
Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21	18
Peranan Negara Negara Besar di Kawasan Pasifik Barat Daya dalam Percaturan Global	37
Dampak Keputusan Arbitrase Internasional mengenai Laut Cina Selatan terhadap Hubungan Internasional di Kawasan Asia Tenggara	51
Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam <i>Global War Against Terrorism</i>	76



The People's Republic of China Claim of South China Sea on Indonesia Sovereignty (2014 - 2015).....	92
Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Budaya (Studi Kasus: Konflik Poso)	131
Pengembangan Sistem Senjata Otonom Mematikan dan Implikasinya Terhadap Keamanan Internasional.....	145
The <i>Islamic State of Iraq and Syria</i> (ISIS): A Threat to Indonesia?	161
Menanggulangi Migrasi Ireguler di Laut: Bakamla dan Manajemen Keamanan Maritim di Indonesia	178
Dimensi Maritim Dalam Isu Ketidakamanan Energi Tiongkok Di Asia Timur	194
Panel 2: Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional	215
Isu-Isu Kontemporer Asia Tenggara: Sebuah Analisa Awal	217
Pendekatan Teori Sosiologi Sejarah (<i>Historical Sociology</i>) Dalam Penelitian Studi Hubungan Internasional.....	227
Studi Pemikiran Tan Malaka Dalam Mengkonstruksi Hubungan Internasional Perspektif Indonesia	244
Pemaknaan Kembali Konsep "Internasional" dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Komparatif Pembangunan Kota Ramah HAM, Kesepakatan Agenda 2030, Perumusan Visi ASEAN 2025 dan Kerja sama Perpajakan Global.....	264
Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia : Tinjauan Postmodernisme	286
Panel 3: Ekonomi Politik Internasional	305
Beberapa Konsiderasi Kritis bagi Sinergi Poros-Maritim (Indonesia) dan OBOR/ <i>One Belt One Road</i> (Tiongkok)?	307
Ekonomi-Politik Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).....	325
Strategi Peningkatan Ekonomi Negara Maritim Indonesia dalam Perspektif Global	340
Implikasi Jalur Sutra Maritim Cina Terhadap Pembangunan Geoekonomi Maritim Indonesia	355

Ekonomi Politik Pada Masyarakat Perbatasan Indonesia – Malaysia..	375
Tough Diplomacy on The Sea: Impact of Illegal Fishing on Indonesia-China Relations	393
Jatuhnya Harga Minyak Dunia dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomatik Saudi Arabia-Amerika Serikat.....	406
Panel 4: Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN.....	418
Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi Asean	420
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan Daya Saing Industri Indonesia	439
Diplomasi Budaya dan Penguatan Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN.....	458
Menemukan Peran Islam Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Worldview Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 2004-2014	473
Analisis Kebijakan Luar Negeri <i>One Door Policy</i> Indonesia Terhadap Bantuan Kemanusiaan Internasional	484
Diplomasi BVK Dalam Menarik Minat Wisatawan Manca Negara Ke Indonesia	498
Track Two of Multi Track Diplomacy: Non Government or Private Sector As A Strategy In Create Prosperity Indonesia Border Area With Malaysia In Facing Human Security Issues	513
Reorientasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia di Asia Tenggara Pasca Runtuhnya Rezim Soeharto.....	532
Multikulturalisme sebagai Pembentuk Gaya Diplomasi Indonesia dan Pengaruhnya Di ASEAN	556
Diplomasi Ekonomi dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Studi Komparatif antara Malaysia dan Indonesia	573
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Konektivitas ASEAN (Studi Kasus: Di Masa Pemerintahan Jokowi)....	599
Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Pariwisata Maritim (Pilar Ketiga Poros Maritim) Melalui Diplomasi Kebudayaan di Kawasan Asia Tenggara	622
Diplomasi Batik Indonesia di Era MEA.....	633

Penegakan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara, Piagam ASEAN Serta Upaya Mewujudkan Komunitas ASEAN 2015: Kasus Peradilan Khmer Merah di Kamboja (2005-2015)	647
Laut Indonesia Sebagai Magnet Asia dan Dunia.....	671
Strategi Indonesia dalam Menghadapi Kebangkitan Tiongkok pada era Presiden Joko Widodo Studi Kasus: Konflik Laut Tiongkok Selatan	689
Quo Vadis Organisasi Internasional? Studi Kasus Peran ASEAN dalam Pencemaran Udara Lintas Batas di Asia Tenggara	710
Panel 5: National Integrity System and Global Anti-corruption	729
Diplomasi Anti Korupsi: Kerja Sama Internasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia	731
Analisis Integritas Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus Liberalisasi Pelayanan Dalam Bidang Hukum di Indonesia.....	746

Keynote Speech

Transformasi Peta Geo-Maritim dan Diplomasi Pertahanan Indonesia, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si

Isu maritim menjadi penting dalam kajian Hubungan Internasional karena konsep kekuatan maritim (*maritime power concept*) dapat dihitung secara matematis. Kekuatan maritim suatu negara merupakan kombinasi dari faktor geografi, kapabilitas ekonomi, kapabilitas militer, kapabilitas teknologi, serta tujuan strategis kekuatan maritim suatu negara dan keinginan negara tersebut untuk menjalankan strategi maritim. Kekuatan maritim juga merupakan instrumen utama dalam kebijakan militer, yang juga menjadi salah satu potensi ekonomi suatu negara (khususnya sebagai sumber energi dan batas wilayah).

Terdapat lima Pilar Maritim Indonesia, yaitu budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim. Konsep benua maritim memiliki keterkaitan dengan transformasi geo-maritim di Indonesia, terutama dalam konteks nusantara yang mengembangkan integrasi nasional dalam konteks kedaulatan. Selain itu, Indonesia tengah melakukan reorientasi pembangunan yang bertumpu pada laut, mengingat posisi Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia, sebagai salah satu *checkpoint* yang terpenting di dunia, dimana lebih dari 40% dari total perdagangan dunia melalui perairan di Indonesia. Selat Malaka, misalnya, memiliki kapasitas *deadweight tonnage* sebesar 300,000 dwt, dimana angka ini lebih besar dari Terusan Suez dan Terusan Panama. Ini berarti bahwa Selat Malaka memungkinkan lebih banyak barang yang diangkut dibandingkan kedua terusan tadi.

Kompetisi politik global juga semakin kuat dimana dua pengaruh besar dunia pada saat ini, AS dan Tiongkok, semakin memfokuskan pengaruhnya pada perairan dunia, khususnya Laut China Selatan (LCS). Ini disebabkan karena pendulum geopolitik dan geoekonomi yang telah bergeser ke kawasan Asia, 70% perikanan dunia berada di Asia Pasifik, 30% produk perikanan dunia dipasok dari Indonesia, dan 10% dari tangkapan ikan dunia berada di kawasan LCS. Jalur transportasi laut kawasan Asia pun dianggap semakin penting, mengingat total nilai kargo yang mencapai USD 5 triliun per tahun.

Dalam membangun kemitraan maritim, diperlukan pertimbangan geopolitik dan geoekonomi, serta prioritas kerjasama internasional maupun regional. Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya berpotensi sebagai pintu gerbang dan pusat aktivitas ekonomi maritim dunia, tetapi juga penyangga maritim kawasan. Di samping itu, yang dapat menjadi prioritas Indonesia dalam kerjasama internasional maritim antara lain adalah *maritime governance* (pembangunan kapasitas), *maritime civil and criminal authority* (penegakan hukum), *maritime defense* (kerjasama keamanan), *maritime safety* (keamanan lingkungan dan negosiasi), *maritime response and recovery* (pencarian dan penyelamatan di laut), serta *maritime economy* (transportasi dan perdagangan).

Speaker Bio: Abdul Rivai Ras

Perwira yang telah melalui berbagai penugasan mulai dari tingkat operasional sampai pada tingkat kebijakan strategis. Ia mengikuti pendidikan Perwira Karier ABRI Angkatan I dan melanjutkan berbagai pendidikan kedinasan militer dan non militer di dalam dan luar negeri, dengan pendidikan tertinggi di bidang pertahanan serta kepemimpinan keamanan nasional pada Elliot School of International Affairs, George Washington University. Ia menempuh pendidikan non-militer program pascasarjana Manajemen Operasional-Strategik, Kajian Ketahanan Nasional, Ilmu Politik Hubungan Internasional dan program doktoral Ilmu Politik di Universitas Indonesia.



Indonesia dan ASEAN Lima Tahun ke Depan, Prof. Dr. Yanyan Mochamad Yani

Tantangan utama hubungan internasional di ASEAN adalah kehadiran pihak asing. China semakin memperkuat eksistensinya ASEAN dengan upaya membangun navigasi dan fasilitas keamanan di wilayah archipelago serta garis laut Indonesia, setelah baru-baru ini membangun pelabuhan di Sri Lanka. Aktor besar lain seperti AS juga hadir dengan menempatkan pangkalan militer dan sekutunya di sekeliling posisi silang dunia, dengan menjadikan Indonesia sebagai target strategis. Oleh karena itu, dalam menghadapi pembangunan geopolitik dan geostrategis di kawasan ini, Indonesia memerlukan *grand strategy* yang sinergis dan komprehensif mengenai kerangka diplomasi AS dan China, dan dalam waktu bersamaan tetap menjaga sentralitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara.

Tantangan lain adalah penanganan terorisme masa kini dan mendatang. Jaringan Al-Qaeda semakin merambah berbagai penjuru dunia, dengan tujuan utama menghapuskan pengaruh amerika dari Iraq dan Semenanjung Arab, menghapuskan pemerintah di kawasan tersebut, membasmi Israel dan pengaruh Yahudi dan Kristen, dan memperluas kekuasaan Islam di dunia. Untuk itu, perlu adanya perencanaan dan manajemen pertahanan yang tepat dalam menjawab tantangan ini, yang tercermin dalam politik luar negeri dan keamanan nasional.

Permasalahan batas-batas maritim dan pulau-pulau terluar Indonesia juga menjadi tantangan lain Indonesia dan ASEAN dalam lima tahun ke depan. Hingga saat ini terdapat 95 pulau dengan status pulau terdepan atau yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, termasuk di dalamnya 12 pulau yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena dikhawatirkan akan diokupasi pihak asing, seperti pulau Miangas, Marampit, Sekatung, Rondo, Dana, Fanildo, dan Batek. Diharapkan adanya *multilayer defense system* (dengan medan pertahanan penyanggah) dalam menjawab tantangan ini, dimana pada pulau-pulau terluar tersebut, dan pada wilayah perbatasan.

Tantangan terakhir adalah optimalisasi keterlibatan daerah-daerah di Indonesia dalam Komunitas ASEAN paska tahun 2015. Keterlibatan pemerintah daerah dirasa penting mengingat terdapat banyak dasar hukum kerjasama daerah dengan luar negeri. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur mengenai aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hubungan luar negeri. Bahkan lebih khusus lagi, pemerintah Jawa Barat, misalnya, telah mengeluarkan

beberapa peraturan daerah seperti Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama antara Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Diharapkan adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah daerah dalam mewujudkan kepentingan Komunitas ASEAN lima tahun ke depan, khususnya kepentingan Indonesia di ASEAN.

Yanyan Mochamad Yani

Dilahirkan di Bandung, pada tanggal 5 Oktober 1966. Jenjang Strata 1 (Drs) diraih dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran (1990). Penulis meraih gelar Strata 2, MA in International Relations (MAIR) dari Flinders University, Australia (2000) melalui beasiswa "Australian Development Scholarship", memperoleh gelar Strata 3, Ph.D in International Relations dari Auckland University, New Zealand (2004) melalui beasiswa "New Zealand Official Development Assistance (NZODA) Study Awards".



Yanyan adalah guru besar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, juga pengajar Pascasarjana Magister Ilmu Politik, Program Pascasarjana UNPAD, dan Dosen Luar Biasa di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan, Bandung. Berbagai tulisan artikel dan makalah tentang Hubungan Internasional telah dipublikasikan di berbagai media cetak nasional maupun internasional.

Panel 1: Keamanan, Demokrasi, dan Masyarakat Transnasional



Indonesia dalam Arus *Multi-track Regionalism* Asia Tenggara

Ade M. Wirasenjaya

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

adewirasenjaya@hotmail.co.id

Abstrak

Paper ini bertujuan mendiskusikan orientasi politik luar negeri Indonesia di era Jokowi dengan melihat dua determinan utama. Pertama determinan regional yang mengarah pada munculnya multi-track regionalism seiring dengan ditetapkannya Komunitas ASEAN. Meskipun negara-negara ASEAN masih tetap memegang prinsip state-led regionalism, namun berbagai perubahan yang berlangsung di kawasan ini telah melahirkan berbagai persoalan yang mendorong tampilnya aktor-aktor baru seperti terlihat dalam kemunculan trans-national advocacy networks. Determinan kedua adalah orientasi politik luar negeri Jokowi yang ingin menghubungkan kekuatan domestik dan artikulasi Indonesia dalam berbagai forum internasional. Dengan mengajukan konsep multitrack regionalism, paper ini menyimpulkan bahwa Indonesia bisa memainkan peran yang lebih signifikan karena isu-isu regional yang muncul di Asia Tenggara merupakan isu-isu yang menjadi konsen gerakan masyarakat sipil di Indonesia.

Kata kunci: *politik luar negeri Indonesia, Joko Widodo, Komunitas ASEAN, multi-track regionalism*

Pendahuluan

Sejak awal, Presiden Joko Widodo telah membuat garis yang tegas tentang arah kebijakan luar negerinya dibanding sang pendahulu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY lebih memandang panggung politik internasional sebagai *foreign policy outlet* bagi citra Indonesia yang demokratis, moderat dan sepenuhnya tak memiliki musuh sebagaimana seriiing dikemukakan dalam jargon diplomasinya: *thousand friends zero enemy*. Titik fokus politik luar negeri SBY adalah *positioning* Indonesia di dunia internasional yang diandaikan akan mendorong kapasitas domestik, Jokowi memutar pola politik luar negeri tersebut dan lebih percaya bahwa kesejahteraan menentukan kapasitas Indonesia di dunia luar. Era Jokowi seolah ingin mengembalikan lagi politik luar negeri pada prinsip dasarnya: bagaimanapun, politik luar negeri selalu lebih banyak ditentukan oleh kondisi dalam negeri ketimbang sebaliknya

(Kompas, 17 September 2014). Prinsip politik luar negeri inilah yang kemudian diturunkan dalam setidaknya empat konsep kunci politik luar negeri: Nawacita, Poros Maritim Dunia, Trisakti dan Kedaulatan.

Bagaimana eksekusi prinsip-prinsip politik luar negeri Jokowi tersebut? Bagaimana arena dan arsitektur regional yang harus dihadapi Indonesia untuk memainkan perannya dalam rangka memuluskan orientasi politik luar negeri tersebut? Tulisan ini ingin melihatnya dalam dua konteks. Pertama, pada konteks domestik akan duraikan sejumlah "kesibukan politik" yang menentukan politik luar negeri. Kedua, dinamika kawasan regional (khususnya Asia Tenggara dan ASEAN) sebagai lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia paling utama. Dan ketiga, kebutuhan untuk membangun *multitrack regionalism* dimana aktor-aktor baru kawasan datang dan muncul dengan agenda-agenda dan artikulasi non-tradisional yang kami yakini akan membawa dampak luar biasa bagi konstruksi kerjasama regional di masa-masa yang akan datang.

Kontestasi Kekuasaan Regional: Negara versus Penyandera

Politik luar negeri Indonesia era Jokowi langsung dihadapkan pada persoalan bagaimana Indonesia mengkalkulasi kekuatannya sebagai kekuatan menengah (*middle power*) dalam politik internasional. Dalam banyak publikasi tentang kapasitas dan posisi di kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia kian tertinggal dari sisi daya saing (*competitiveness*). Daya saing Indonesia terus merosot ke peringkat 41 dalam laporan World Economic Forum (WEF) tahun 2016. Bidang pendidikan Indonesia mendapat skor yang sangat rendah dalam laporan tersebut (WEF, 2016).

Persoalan di dalam negeri berimbas pada persoalan Indonesia di kawasan (regional). Problem yang segera menyita perhatian adalah posisi Indonesia nyatanya amat lemah bahkan dibanding dengan negara-negara anggota ASEAN utama seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Problem di kawasan ini semakin diperparah dengan kasus-kasus seperti kabut asap dan penyanderaan para awak ABK: dua kasus yang dengan mudah menjadi petunjuk tentang kekuatan power dan kapasitas Indonesia saat ini.

Terhitung sejak bulan Mei 2016 hingga kini, sudah lebih lima kali peristiwa penyanderaan atas WNI berlangsung. Peristiwa penyanderaan ini boleh jadi merupakan batu ujian paling besar bagi politik luar negeri Jokowi serta lingkungan regional yang harus dihadapi rejim ini. Penyanderaan yang terus berulang terhadap WNI oleh kelompok militan Abu Sayyaf dan faksi-faksinya menyisakan agenda besar ihwal perlindungan dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Penyanderaan pada gelombang sebelumnya berhasil dibebaskan oleh (pemerintah) Indonesia. Para pejabat Indonesia mengemukakan bahwa

pembebasan sandera merupakan hasil “diplomasi total” meskipun banyak pihak termasuk media internasional meragukannya. Angka tebusan yang diminta seringkali amat fantastis. Warga negara Indonesia nampaknya masih menjadi sasaran empuk bagi kelompok ini guna mendapatkan logistik dan uang tebusan.

Selain menyisakan agenda bagi politik perlindungan warna negara di tingkat domestik, kasus ini juga menunjukkan masih adanya ruang kosong dalam kerjasama regional ASEAN, khususnya yang menangani pergerakan lintas batas manusia. Ketika kawasan ini ingin diproyeksikan menjadi sebuah komunitas yang lebih bebas dan terbuka, ternyata ASEAN masih gagap dalam merespon dan mengeksekusi isu-isu non-tradisional.

Dari kasus penyanderaan yang sudah berlangsung sebelumnya, nampaknya upaya diplomasi oleh satu negara tidak cukup ampuh untuk memberi jalan pembebasan. Para pejabat Indonesia boleh saja menyebut “diplomasi total” sebagai jalan yang menempuh berbagai jalur yang mungkin dilakukan untuk menyelematkan warga negara. Tetapi terulangnya kasus penyanderaan menjadi pertanyaan, apakah diplomasi total benar-benar tentang “diplomasi yang melibatkan berbagai aktor politik luar negeri” atau diplomasi yang tunduk pada kehendak para penyandera alias melalui penebusan uang yang jumlahnya amat besar. Jika memang pembebasan sandera sebelumnya merupakan produk negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf sehingga kelompok militan itu “terenyuh dan merasa Indonesia adalah saudara mereka” lalu mengapa WNI yang melintas Perairan Sulu selalu menjadi sasaran empuk untuk dikapitalisasi para pemberontak pada hari-hari ini?

Jalur Tunggal Regionalisme

Hadirnya isu-isu non-tradisional akan menjadi sesuatu yang niscaya mengingat posisi Asia Tenggara yang amat strategis dan menggiurkan bagi lalu-lintas perdagangan global. Dari sisi demografis, kawasan Asia Tenggara saat ini menyangga lebih dari 600 juta jiwa. Jumlah itu bisa merupakan bonus bisa juga merupakan tragedi demografis. Bisa menjadi bonus manakala desain Komunitas ASEAN menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di semua negara. Sebaliknya ia akan menjadi tragedi demografis jika ketimpangan pembangunan masih terasa di satu sisi, juga kebijakan untuk mengantisipasi mobilitas manusia masih bersifat *ad hoc* dan ritualistik. Penting untuk menekankan dua hal ini, karena isu perlindungan dan keamanan manusia tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan state-sentris dan model-model penyelesaian lama sebagaimana sering mengemuka dalam berbagai perundingan dalam tubuh ASEAN. Upaya mutakhir untuk mengatasi hal ini ,yakni pertemuan tiga Menteri Pertahanan dari Indonesia, Filipina dan Malaysia di Nusa Dua, Bali (*CNN* , 2/8/16) nampaknya belum cukup memberi gambaran

yang terang benderang ihwal komitmen negara-negara di kawasan ASEAN untuk memberi proteksi kepada warga negara di kawasan ini.

Negara-negara ASEAN mungkin harus mulai memperluas objek dari perlindungan warga negara menjadi keamanan manusia (*human security*). Ketika mobilitas ekonomi dan jasa dikontrol oleh kesepakatan regional, mengapa hal serupa tidak berlangsung pada manusia? Di masa yang akan datang, mengingat jalur-jalur perdagangan laut yang akan sangat dinamis dan potesial, mendesak rasanya bagi ASEAN untuk merumuskan makna dan batas perlindungan ini. Aspek berikutnya yang juga mendesak untuk direkonstruksi adalah prinsip yang seolah "suci" di kawasan ini, yakni "tidak mencampuri urusan domestik" (*non interference principle*). Sudah lama prinsip ini menjadi moralitas regional yang dipegang dalam berbagai pola penyelesaian konflik di ASEAN. Perlu ada kebaranian bagi negara-negara ASEAN untuk mengkualifikasi ulang mana yang masuk kategori "mencampuri urusan domestik" dan "menyelamatkan keamanan dan stabilitas regional". Prinsip non-intervensi lahir dalam konteks ketika batas-batas kedaulatan negara belum porak-poranda oleh ekspansi pasar atau korporasi dan juga pergerakan manusia sebagaimana hari ini kita saksikan. Tak diragukan lagi, negara-negara ASEAN harus mulai merevisinya. Prinsip non-intervensi masih bisa digunakan misalnya pada saat ada warga negara salah satu negara ASEAN melakukan perbuatan melawan hukum atau berbuat kriminal di negara lainnya.

Dalam konteks penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf terhadap WNI misalnya, terjadi benturan klasik dalam politik internasional dimana upaya intervensi untuk menyelamatkan manusia (*humanitarian intervention*) harus berhadapan secara diametral dengan prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh pemerintah Filipina. Hal ini juga berlaku dalam kasus-kasus lainnya di negara-negara ASEAN. Padahal, kasus-kasus yang melatari semua itu adalah kasus-kasus *trans-border* dan lahir dari ruang internasional pasca-negara. Meskipun ASEAN telah mendesain ARC (*ASEAN Security Community*) sebagai produk Bali Concord II (2003), namun konstruksi tentang ancaman keamanan masih dipandang sebagai keamanan tradisional yang mengancam negara, bukan keamanan dalam konteks yang memberi perlindungan dan penyelamatan bagi manusia.

Desain regionalisme baru akan menjadi pertarungan masyarakat Asia Tenggara yang akan mengalami pertumbuhan populasi cukup signifikan menjelang dalam satu dasawarsa ke depan. Berdasarkan prediksi yang dirilis pada KTT ASEAN di Brunei Darussalam tahun 2013, jumlah penduduk 10 negara anggota ASEAN diperkirakan akan mencapai 741,2 juta jiwa pada 2035, meningkat dibandingkan 2015 yang diperkirakan sebanyak 633,1 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata ASEAN per tahun mencapai 0,85 persen dan Filipina menjadi negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi (1,44 %),

diikuti Malaysia (1,45 %), Brunei Darussalam (1,40 %), Laos (1,06 %), Kamboja (1%), Singapura (0,93 %), Indonesia (0,74 %), Vietnam (0,65 %) dan Thailand yang meningkat 0,29 % (*Sekretariat ASEAN, 2015*).

Roadmap memperlihatkan asertivitas ASEAN dalam menyongsong era baru, baik dalam merepon isu-isu politik baru seperti demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM), maupun dalam merespon isu-isu non-tradisional seperti soal penghormatan terhadap pluralisme budaya masing-masing negara hingga masalah korupsi (*Roadmap, ibid: 7-8*). Namun pada sisi lain, *Roadmap* memperlihatkan bangunan perseptual yang sangat mengindikasikan kuatnya pola-pola regionalisme yang elitis atau sering disebut regionalisme dari atas (*regionalism from above*).

Di lain sisi, pembentukan Komunitas ASEAN 2015 sesungguhnya merupakan sebuah gejala yang "ahistoris" mengingat Asia Tenggara sejak mula bukanlah sebuah konsep "kawasan". Menurut analisis ahli sejarah Asia Tenggara, Anthony Reid (1999), Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang secara historis berbeda kelahirannya dengan kawasan lain di dunia seperti Eropa Barat, India, Dunia Arab, Cina, bahkan kawasan Asia Timur yang amat dipengaruhi oleh kultur Cina (*cinized*). Bagi Reid pula, "Asia Tenggara tidak mempunyai persamaan agama, bahasa atau kebudayaan klasik yang besar dan tidak pernah menjadi bagian dari sebuah *polity* (negara) yang tunggal. Penyebutan Asia Tenggara bahkan diberikan oleh pihak-pihak luar untuk memudahkan secara geografis, yang kemudian diganti dengan istilah-istilah lain yang bahkan jauh lebih tidak memuaskan seperti India Jauh (*Further India*) atau Indo-China (*Reid, 1999: 4-5*). Reid hanya ingin menegaskan bahwa konstruksi eksternal merupakan hal yang melekat pada pembentukan kawasan Asia Tenggara sejak kelahirannya.

Salah satu karakteristik ASEAN adalah kuatnya model-model penyelesaian konflik khas Asia yang menempatkan harmoni, kooperasi dan non-intervensi. Pola-pola penyelesaian seperti itu telah menjebak ASEAN ke dalam ritualisme yang acapkali gagal menangkap perubahan drastis yang berlangsung pada level sosial dan budaya.

Gelombang Ketiga Regionalisme Asia Tenggara: Fragmentasi Aktor Kawasan

Isu-isu non-tradisional yang semula tidak menjadi perhatian dan tidak terlihat, akhir-akhir ini mulai muncul dan dipastikan akan menguat di kawasan Asia Tenggara. Isu-isu itu misalnya tentang perbatasan (*border*), lingkungan (khususnya hutan), pekerja migran serta perdagangan manusia merupakan beberapa contoh yang harus diakomodasi dalam desain regionalisme baru Asia Tenggara. Tak juga kalah pentingnya adalah isu perdagangan manusia dimana Asia Tenggara merupakan salah satu zona yang dianggap paling berbahaya di

dunia. Sekuritisasi atas problem-problem non-tradisional membutuhkan tidak hanya perubahan persepsional dari aktor tradisional, tetapi juga membutuhkan akomodasi atas persepsi lain dari aktor baru yang juga berkecambah dalam ruang transnasional Asia Tenggara hari ini.

Dilihat secara makro, fase ASEAN sebagai asosiasi kerjasama antar-negara bisa dibagi ke dalam tiga periode penting. Periode pertama dapat disebut sebagai *regionalism making process* (1960-1980 an). Periode ini merupakan periode konsolidasi negara-negara Asia Tenggara untuk bersepakat tentang bangunan kerjasama yang ingin mereka bentuk. Periode ini lebih menunjuk pada upaya membangun cetak biru kerjasama kawasan. Periode kedua merupakan fase *developmental-state regionalism* pada dua dasawarsa berikutnya (1980-an hingga awal tahun 2000 an). Periode ini muncul bersamaan dengan bekerjanya – mengutip Jayasurya (2001: 33) -- "embedded mercantilisme Asia Tenggara". Fase ini ditandai dengan bekerjanya pola produksi kapitalisme khas Asia dimana negara menjadi entitas tunggal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Akibatnya, inisiatif-inisiatif regional selalu berorientasi pada logika-logika pertumbuhan, juga pada saat yang sama mengkualifikasi aktor-aktor yang seharusnya terlibat dalam dinamika regional. Barangkali produk dari fase ini adalah makin kuatnya prinsip non-intervensi, makin elitisnya formasi ASEAN dan makin terbukanya Asia Tenggara pada pintu-pintu investasi dan perdagangan dari luar.

Sedang fase ketiga baru saja dimulai, yakni fase yang ingin kami sebut sebagai *multi-track regionalism*. Momentumnya berlangsung ketika kesepakatan Bali (2013) dilakukan dan negara-negara ASEAN bersepakat tentang peta jalan dan visi baru kawasan. Di bawah "tagline" *One Vision, One Identity, One Community*, 10 negara ASEAN sepakat untuk mencapai tiga pilar penting (ASEAN Secretariat, 2013).

Fase pertama menunjuk pada kreasi dan intrusi negara-negara Barat yang membutuhkan zona penyangga dari konflik ideologis Timur-Barat saat itu. ASEAN dibayangkan sebagai kisah sukses modernisasi Barat melalui *contagion effect* dan *demonstration effect*. Efek pertama menyangkut upaya-upaya Barat (khususnya Amerika Serikat) dalam menularkan developmentalisme di kawasan Asia Tenggara dengan cara-cara yang amat pragmatis dan efisien. Motif ini tidak lepas dari posisi dan peran Asia yang begitu penting bagi perluasan pengaruh dan kepentingan global Amerika Serikat. Seperti ditulis Robert J Lieber (2006;159), baik secara politik maupun ekonomi, Asia merupakan tempat bagi ribuan pasukan penjaga keamanan dan investasi besar-besaran dari negara Paman Sam. Amerika membangun

kerjasama keamanan dengan negara-negara penting di kawasan ini seperti Philipina, Indonesia, Viernam, India, Pakistan dan tentu saja, Korea Selatan dan Jepang. Beberapa skema khusus tentang kerjasama keamanan juga getol dilakukan Amerika Serikat melalui keterlibatan yang intensif dalam ASEAN Regional Forum (ARF) untuk terus memelihara dan memastikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman secara politik dan ekonomi.

Efek kedua -- *demonstration effect* -- menyangkut upaya-upaya kawasan melakukan akselerasi modernisasi. Untuk dua program besar tersebut, jelas kekuatan dan preferensi negara-negara Barat seperti Amerika tidak akan absen. Asia Tenggara adalah *role model* bagi penyebaran modernisasi Barat (Simpson, 2008). Kedua upaya tersebut nampaknya sukses dijalankan, baik oleh Barat sendiri maupun oleh negara-negara ASEAN pada beberapa dekade berikutnya.

Fase kedua menunjuk pada akibat langsung dari dampak munculnya konsolidasi negara sebagai aktor pembangunan (*developmental-state*) di sejumlah negara Asia, dimana Asia Tenggara digambarkan sebagai rombongan angsa yang mengikuti si Angsa utama Asia, yakni Jepang. Beberapa ilmuwan menyebut bahwa regionalisme ASEAN adalah *developmental-state regionalism* dimana negara menjadi penentu dan menjadi aktor utama. *Developmental-state* merupakan model kebijakan pembangunan yang menempatkan negara sebagai penentu dan eksekutor sekaligus. Dari sisi isu, model ini lebih memberi perhatian pada aspek ekonomi (Beeson, 2007).

Untuk waktu yang panjang, negara menjadi aktor dan eksekutor penting dalam berbagai skema regionalisme yang dicanangkan para pemimpin Asia Tenggara. Perubahan yang cukup signifikan terjadi menjelang dasawarsa 90-an ketika arus migrasi manusia dan gerakan masyarakat transnasional mulai memberi perspektif lain tentang arah regionalisme. Kekuatan hegemonik pada fase pertama, yakni Amerika Serikat, yang memberi pengaruh politik bagi pembentukan dan *road map* ASEAN pada masa-masa awal, kini secara perlahan mulai menghadapi banyak kompetitor. Hal ini juga tak lepas dari munculnya kekuatan *middle-powers* dalam politik maupun ekonomi internasional. Sedang kekuatan hegemonik pada fase kedua, si angsa Jepang, juga mulai menyusut peran-peran ekonominya sehubungan dengan munculnya kekuatan ekonomi baru dari Asia seperti Korea Selatan, India, China dan Taiwan. Daya tahan negara-negara ASEAN menghadapi krisis ekonomi tahun 1997 nampaknya menjadi titik penting bagi ASEAN untuk lebih bebas membentuk desain dan arsitektur kerjasama, dari yang semua amat longgar menjadi sebuah kerjasama yang lebih sistematis dan struktural. Inilah yang

kemudian melahirkan sebuah prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara ASEAN, yakni "ASEAN Way" .

Hampir dipastikan, rute Masyarakat ASEAN akan sangat berbeda dengan misalnya, rute Masyarakat Eropa (ME). Pada kasus ME, ada semacam keinginan untuk menjadi blok resistensi dari laju dan pengaruh Amerika Serikat. Pada rute Masyarakat ASEAN, sebagaimana sering muncul dalam sejumlah dokumen hasil serial KTT, persistensi nampaknya menjadi target besar – yakni bagaimana transformasi ASEAN sebagai penyangga kapitalisme pinggiran – bisa terus dipelihara. Selain itu, menjadikan Uni Eropa sebagai model regionalisme baru juga menyisakan persoalan karena mozaik kebudayaan kedua kawasan juga amat berbeda.

Fase "muti-track regionalism" merupakan sebuah implikasi ketimbang merujuk pada desain yang memang secara terencana dirancang oleh negara-negara ASEAN. Ada dua fenomena penting yang layak diidentifikasi mengapa fase ini merupakan sebuah fenomena penting bagi ASEAN. *Pertama*, berkurangnya regimentasi kekuatan tradisional dalam politik internasional di Asia Tenggara. *Kedua*, pada saat yang sama, terdapat pula proses berkurangnya peran negara sebagai akibat langsung proses transisi demokrasi di sejumlah negara Asia Tenggara. Fenomena pertama memunculkan makin banyaknya ruang-ruang interaksi dan kooperasi antara negara-negara ASEAN dengan berbagai aktor baru dalam hubungan internasional. Fenomena kedua ditandai dengan makin kuatnya pengaruh aktor-aktor dari arena *regional civil society* yang terlibat dalam konstruksi isu dan pembentukan jaringan. Barangkali jauh dari radar pengawasan negara, di Asia Tenggara muncul apa yang oleh Keck dan Sikkink (1999) disebut *transnational advocacy networks* atau oleh Khaldor (2007) disebut *global civil society*

Kekuatan masyarakat sipil seperti non-state organizations (NGOs) di ASEAN kini tak bisa diabaikan peran-perannya. Berbagai isu baru dalam lingkup regional mulai muncul sebagai akibat langsung globalisasi dan kehadiran aktor-aktor di luar negara yang semakin artikulatif membentuk komunitas di luar radar negara. Kekuatan masyarakat sipil seperti kaum aktivis telah merancang inisiatif-inisiatif yang menghubungkan berbagai elemen dan isu yang melintas-batas negara

Dalam isu hak asasi manusia, jejaring masyarakat sipil ASEAN yang bergiat dalam isu tersebut aktif mengajukan proposal pendirian Badan HAM ASEAN. Badan ini mencoba mengadopsi lembaga serupa yang sudah mapan di Eropa. Namun, proposal tersebut masih terbentur karena perbedaan persepsional dan visi penegakkan HAM di antara negara-negara ASEAN

sendiri. Dua isu ini – lingkungan dan HAM, memberi gambaran tentang pada aspek mana sebenarnya kedaulatan negara masih diberlakukan dan pada aspek mana yang mulai mengalami peluluhan. Barangkali karena isu HAM masih terkait langsung dengan kekuasaan sejumlah negara di kawasan ini, negara-negara HAM menggunakan asas "menghormati kedaulatan" untuk menghindari konflik. Sementara pada isu lingkungan, gagasan tersebut nampak tidak cukup kuat digunakan. Bahkan dalam isu lingkungan, pengarusutamaan (*mainstreaming*) justru dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil dan negara mengikuti semua desain, skope dan juga aksi yang dirancang masyarakat sipil (*Wirasenjaya dan Herningtyas, 2013*).

Dalam sebuah analisis, Alexander C Chandra (2009) mengemukakan tentang perlunya ASEAN mengubah jalan regionalisme dari yang terlalu elitis menjadi regionalisme yang populis. Sebenarnya di kalangan pemimpin ASEAN sendiri mulai tumbuh kesadaran untuk melibatkan sebanyak mungkin aktor dalam mengembangkan Komunitas ASEAN. Hanya saja, menurut Chandra, para pemimpin di kawasan ini lebih menyukai term *people-oriented* ketimbang *people-centred*. Keduanya jelas mengimplikasikan hal yang berbeda. Dalam tatapan Chanda: *".....the people-oriented ASEAN can be interpreted that the policies pursued by the Association's policy-makers shall be oriented toward the cocerns and interests of the people. However, under this principle, the final decision making still lies amongst the region's political elite. In contrast, ASEAN as a people-centred organization call for the grouping to place people at the heart, or centre, of its decision-making process...."*

Disukai atau tidak oleh para pengambil kebijakan di ASEAN, kehadiran masyarakat sipil trans-nasional telah menjadi aktor yang berpengaruh dalam mengajukan sudut pandang lain tentang arah regionalisme Asia Tenggara. Kelompok-kelompok masyarakat sipil tersebut lahir melalui proses perluasan norma demokrasi di sebagian besar negara ASEAN, maupun sebagai akibat langsung dari berubahnya watak hubungan internasional pada umumnya. Seperti disinggung sebelumnya, berbagai insiatif yang lahir dalam merespon isu-isu non-tradisional telah melahirkan pola-pola baru kerjasama, aliansi juga kolaborasi masyarakat sipil baik di dalam kawasan Asia Tenggara sendiri maupun yang dibangun oleh jaringan masyarakat sipil yang melintas-batas benua.

Dalam ruang-ruang baru regionalisme yang kini memunculkan aktor-aktor baru kawasan, barangkali Indonesia bisa memainkan peran yang lebih aktif dan artikulatif. Watak aktor transnasional antara lain mereka akan membangun kerjasama yang berbasis pada isu ketimbang ikatan historis. Masing-masing isu yang kini populer dalam hubungan internasional seperti

hak-hak ekonomi, sosial, budaya (hak-hak ekosob) dan perubahan iklim akan menguat. Dan semua isu itu menempatkan Indonesia sebagai ruang mobilisasi yang amat penting. Dalam isu demokrasi misalnya, Indonesia – dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang tersisa – masih dianggap menampilkan demokrasi yang lebih maju dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. *New York Time* (4/9/2014) dalam sebuah laporannya bahkan tak segan-segan menyebut Indonesia sebagai role model demokrasi Asia Tenggara. Pada masa Yudhoyono, *Bali Democracy Forum* (BDF) merupakan inisiatif yang amat strategis untuk menjadikan demokrasi sebagai *outlet* politik luar negeri. BDF bukan setidaknya bisa dijadikan panggung untuk menjelaskan pada dunia tentang "demokrasi yang dialami dan dikehendaki Asia".

Presiden Joko Widodo masih saja tersandera oleh elemen-elemen politik domestik. Ini menyulitkannya untuk mengkapitalisasi kekuatan demokratik non-negara seperti kelompok masyarakat sipil, NGO, FBO (*faith-based organizations*) dalam isu-isu baru kawasan. Di luar itu jejaring lain seperti perguruan tinggi (universitas), komunitas masyarakat lokal, jurnalis serta kelompok-kelompok baru lainnya merupakan aktor-aktor yang paralel dengan isu-isu yang dekat dengan Indonesia dan potensial menjadi isu regional seperti lingkungan, pengungsi, perdagangan manusia, dan juga isu penanganan bencana. Semua itu memberi agenda yang cukup jelas tentang perlunya Indonesia merancang desain politik luar negerinya dalam upaya membangun regionalisme multi-jalur (*multi-track regionalism*) di masa depan.***

Referensi

- ASEAN Secretariat, *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*, Jakarta, 2009.
- Beeson, Mark, *Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security and Economic Development*, 2007
- Boutin, Keneth dan Tan, Andrew, *Non-traditional Security Issues*, Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore, 2001.
- Chandra, Alexander C, *Civil Society in Search of an Alternative Regionalism in ASEAN*, International Institute for Sustainable Development, 2009
- Jayasurya, Kaniskha, "Beyond New Imperialism: State and Transnational Regulatory Governance in East Asia", dalam Hadiz, *Empire and Neoliberalism in Asia*, Routledge, USA, 2006.

- Keck, Margaret E. & Sikkink, Kathryn. *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*. Blackwell Publishers. 1999.
- Khaldor, Mary, "Democracy and Globalization", dalam *Global Civil Society Network*, 29 Oktober 2007.
- Lake, David dan Morgan, Patrick M, *Regional Orders: Building Security in New World*, Pennsylvania State University, USA, 1997.
- Linklater, Andrew, *The Transformation of Political Community*, Polity Press, 1998.
- Simpson, Bradley, *Economic With Guns*, Stanford University, 2008.
- Terrence Chong and Elies (editor), *An ASEAN Community for All: Exploring the Scope for Civil Society Engagement*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Office for Regional Cooperation in Asia, 2011.
- Wirasenjaya, Ade dan Ratih Herningtyas "ASEAN Way at the Crossroad", *The Jakarta Post*, 17 Juli 2013.

Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21

Adi Rio Arianto

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ariantoadirio@gmail.com

Abstrak

Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21 dibangun berdasarkan asumsi-asumsi dasar ilmu Geometripolitika. Geometripolitika membagi wilayah dunia menjadi delapan dimensi, yaitu daratan, udara, laut, bawah tanah, serta empat medan Geometri atau volume, yaitu ruang hampa, galaksi, siber, dan khatulistiwa. Munculnya Keamanan Siber merupakan evolusi panjang dari dimensi keamanan yang dihasilkan oleh interaksi manusia dan siber. Saya menyebut interaksi ini sebagai aktifitas "Geometripolitik." Keamanan Siber Antarbangsa mencerminkan: (1) Medan siber menghadirkan evolusi panjang Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21, (2) Iklim keamanan dunia adalah cenderung tidak stabil dan sangat berbahaya hal ini didorong oleh meningkatnya dua teknologi universal yaitu teknologi siber dan senjata nuklir, (3) Mesti ada kebijakan keamanan siber dunia yang efektif untuk mencegah terjadinya Perang Geometri Antarbangsa yang diawali oleh konflik siber menuju konflik nuklir. Potensi ancaman siber akan tetap ada, oleh karena itu penangulangannya adalah mutlak dipersiapkan. Konflik siber menjadi salah satu sumber pemicu peperangan universal yang dapat mengancam kelangsungan hidup peradaban manusia di Era Horizontal Abad 21. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat dunia agar Sistem Geometripolitik Dunia segera dibangun sebagai acuan untuk mengetahui rasionalitas, kapabilitas, dan probabilitas senjata nuklir karena berpotensi menjadi ancaman "genosida masal" terhadap kelompok ataupun rumpun manusia dari suatu bangsa dan negara Abad 21.

Kata kunci:

Keamanan Siber, Era Horizontal, Geometripolitika, Keamanan Nuklir, Perang Geometri Antarbangsa

Pendahuluan

Tahun 2000 Masehi, dunia memasuki Milenium Ketiga, dan Saya menyebut periode ini sebagai awal dari Abad Horizontal atau Era Horizontal

Abad 21. Memasuki dekade kedua Abad 21, gambaran keamanan universal antarmanusia mencerminkan manifestasi dari kekuatan universal yang dihasilkan oleh hubungan antara manusia dan teknologi paling mutakhir di Abad 21, yaitu teknologi siber dan senjata nuklir.

Di Era Horizontal, pasang-surut sistem Hubungan Antarbangsa — arsitektur kekuatan universal Era Horizontal Abad 21— cenderung memperlihatkan keseimbangan (simetri), bersifat gotong royong (multimetri), dan menghadirkan pergiliran antara periode perang dan damai di seluruh dunia. Itulah “pergiliran universal.” Dalam konteks ini, dunia sedang membangun skema Horizontalisme Antarbangsa. Itulah proses “Horizontalisasi Dunia” atau saya menyebutnya dengan istilah “Globalinium”, yaitu periode pembangunan besar-besaran Bangsa Horizontal untuk mencapai “Kekuatan Universal” yang didalamnya termasuk Indonesia sebagai negara utamanya. Globalinium berusaha menciptakan Perdamaian Universal Abad 21 hingga abad 22-28 dst, selama tujuh abad ke depan. Globalinium berusaha menciptakan Sistem Adikrasi Horizontal yang menekankan agar Hubungan Antarbangsa dibangun atas dasar “Gotong Royong”. Dengan demikian, Horizontalisme percaya bahwa penciptaan Hubungan Antarbangsa bersifat Gotong Royong dan berlaku secara universal di seluruh dunia.

Proses penciptaan ini, yang oleh Horizontalisme, merupakan bagian dari sifat alami bumi, ia bulat, bergerak melingkar, pasang-surut, silih-berganti, dan terus berputar mengelilingi matahari membentuk jalur Khatulistiwa Dunia. Dan, saya melihat dengan seksama, meminjam istilah Al-Farabi tentang “Negara dan Bangsa Utama” dan istilah Al-Jabar tentang “Keseimbangan, Kesejajaran, dan Pengurangan”, maka Bangsa-Bangsa Utama dari Rumpun Horizontal muncul atas kekuatan Geometripolitik-nya membentuk “Poros Khatulistiwa Dunia” sejajar dengan “Poros Maritim Dunia”, dan “Poros Daratan Dunia.” Poros Khatulistiwa Dunia ialah wilayah yang didiami oleh bangsa yang dilewati oleh garis “Horizon” Khatulistiwa terpanjang di dunia, itulah medan Khatulistiwa sempurna dari “Geometripolitik” Indonesia Abad 21. Adapun, Poros Maritim Dunia merupakan wilayah yang didiami oleh bangsa yang diapit oleh dua samudera—Hindia dan Pasifik, dan dua benua—Asia dan Australia, itulah medan Maritim sempurna dari “Geometripolitik” Indonesia. Sedangkan, Poros Daratan Dunia ialah wilayah yang didiami oleh bangsa terluas daratannya di Asia dan Eurasia yang secara geografis wilayahnya tidak memiliki kawasan laut sempurna, itulah medan darat tidak sempurna dari “Geometripolitik” Tiongkok dan Rusia. Penggabungan ketiga poros ini menghasilkan kekuatan universal membentuk Daerah Horizontal Dunia (DHD) didahului oleh penyusutan kekuatan universal “Daerah Atlantik Dunia (DAD).” DHD ialah wilayah teduh

dunia yang menjulang secara horizontal dari wilayah "Poros Daratan Dunia" yang dihuni oleh, Tiongkok, Rusia (Eurasia), India, dan Mongolia serta Benua Afrika hingga tumpahan terakhir geopolitik dunia, yaitu wilayah Poros Maritim Dunia dan Poros Khatulistiwa Dunia yang dihuni oleh Indonesia. Sedangkan, DAD ialah wilayah teduh dunia sepanjang abad abad 14 hingga awal abad 21 yang dihuni oleh Bangsa Eropa, Amerika, dan Australia membentuk perdamaian bangsa-bangsa Anglo-Saxon sebagai kawasan Segitiga Dunia.

Jauh sebelum dunia memasuki Era Horizontal, perang dan damai telah menjadi bagian dari siklus pergiliran universal di bumi. Di Era Horizontal, perang tidak hanya terjadi secara fisik. Dengan kemajuan teknologi, perang telah merambah dunia maya yang mengakibatkan gejolak medan siber, pun ujungnya adalah tetap mengarah pada perang fisik. Perang fisik yang paling berbahaya di Era Horizontal adalah Perang Nuklir yang melibatkan dimensi siber. Saya menyebut perang ini sebagai "Perang Geometri Antarbangsa (PGA)". Dalam analisis PGA, ada Ilmu Geometripolitika yang melibatkan delapan dimensi wilayah dunia. Salah satunya adalah dimensi siber.

Adapun, melalui tulisan ini, saya mencoba untuk memperkenalkan tentang Ilmu Geometripolitika yang tujuannya adalah mempelajari tentang keseimbangan, kekuatan, dan keamanan suatu bangsa. Ilmu Geometripolitika membagi wilayah dunia menjadi delapan medan, yaitu darat (kuadran I), udara (kuadran II), laut (kuadran III), bawah tanah (kuadran IV), serta empat jenis medan geometri atau volume, yaitu ruang hampa, galaksi, siber, dan khatulistiwa. Adapaun, medan siber menjadi pendalaman dalam tulisan ini yang dikaitkan dengan senjata nuklir, dan PGA.

PGA diramalkan terjadi seiring dengan munculnya konflik siber dan konflik nuklir antarbangsa. PGA merupakan gabungan antara Perang Siber dan Perang Nuklir. Abad 21, teknologi nuklir mampu digerakkan secara otomatis oleh mesin-mesin siber tanpa harus menggunakan bantuan manusia. Meskipun demikian, teknologi siber tetap menjadi salah satu teknologi paling canggih yang pernah digunakan oleh manusia sepanjang Era Horizontal Abad 21.

Teknologi siber akan terus berkembang. Kemampuan suatu negara dan bangsa untuk mendapatkan dan melindungi informasi yang dimiliki akan menempatkan mereka pada posisi lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang tidak cerdas menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Salah satu informasi yang paling berbahaya dan signifikan adalah terkait kemajuan dua teknologi universal, yaitu teknologi siber dan senjata nuklir. Dengan demikian, PGA adalah Perang Abad 21 yang melibatkan keamanan informasi untuk tujuan penguasaan siber dan senjata nuklir.

Geometripolitika: Evolusi Sistem, Dimensi, dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21

Keamanan siber merupakan salah satu capaian terpanjang manusia sepanjang Era Horizontal Abad 21. Keamanan siber telah memberi kontribusi signifikan bagi arsitektur keamanan dunia Era Horizontal Abad 21. Dengan demikian, negara dan bangsa haruslah mampu melakukan akselerasi keamanan seiring dengan situasi negara. Negara mesti mandiri secara fisik dan psikologi. Keamanan negara dibentuk oleh kekuatan yang mapan dari variasi ancaman. Hubungan keduanya adalah berbanding lurus.

Relasi antara teknologi siber, teknologi senjata nuklir, dan kekuatan negara, memunculkan konsep dasar ilmu Geometripolitika. Geometripolitika adalah ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan, kekuatan, dan keamanan. Ketiga sektor ini menjadi dasar penciptaan keamanan dunia. Dengan demikian, muncul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan "kekuatan negara?" Bagaimana mengukur "kekuatan negara?" Di Era Horizontal, bagaimana ciri-ciri negara yang dikatakan aman?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka sudah seharusnya memahami kemajuan aktifitas senjata nuklir. Dan, negara-negara yang dikatakan aman adalah negara-negara yang mampu menangkal serangan nuklir. Itulah bentuk dan karakter keamanan dunia Era Horizontal Abad 21. Dengan demikian, Ilmu Geometripolitik percaya bahwa penciptaan kekuatan negara dimulai layaknya penciptaan manusia yang melewati tujuh struktur tingkatan yaitu air, embrio, otot, darah, tulang, daging, dan ruh. Saya menolak analisis Hans Joachim Morgenthau yang cenderung menyamakan antara membangun kekuatan negara dan kekuatan aliansi.¹ Padahal, kemampuan negara selalu berubah-ubah baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam konteks ini, membangun kekuatan aliansi sesungguhnya berbeda dengan membangun kekuatan negara atau bangsa tunggal. Sebab, aliansi lahir didahului oleh kekuatan negara utama sebagai penggerak aliansi. Itulah manifestasi dari gotong royong antarbangsa. Selalu ada negara atau bangsa utama sebagai pemimpin kelompok. Untuk membangun kekuatan, keamanan, dan keseimbangan, suatu negara harus memahami lingkungannya. Baiklah, saya akan mengantarkan tulisan ini pada pemahaman dasar-dasar ilmu Geometripolitika.

Telah saya katakan, bahwa Geometripolitika adalah ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan, kekuatan, dan keamanan negara.

¹ lihat Hans Joachim Morgenthau, 1990, (Edisi pertama) *Politik Antarbangsa: Perjuangan untuk Kekuasaan dan Perdamaian*, Bandung: Penerbit MANNA, hal. 224-225

Geometripolitika membagi wilayah dunia menjadi delapan medan, yaitu daratan (Kuadran I), udara (kuadran II), laut (kuadran III), bawah tanah (kuadran IV), serta empat jenis medan geometri atau volume, yaitu ruang hampa, galaksi, siber, dan khatulistiwa. Dalam suatu negara, maka titik tengah dari kuadran merupakan jari-jari dan diameter lingkungan kekuatan Geometripolitik sebuah bangsa, dimana dengan menghitung jarak kekuatan ini maka kondisi geografi akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan sebuah negara dalam memenuhi kepentingannya. Oleh karena itu titik ini perlu diperhitungkan sebagai wilayah strategis dalam membangun sistem keamanan negara dan bangsa.

Geometripolitik mengalami pertumbuhan sekaligus penyusutan wilayah yaitu: Geometripolitik Vertikal Positif dan Negatif, Geometripolitik Horizontal Positif dan Negatif, serta Geometripolitik Volume. Setiap wilayah memiliki jari-jari dan tepian. Dapat diasumsikan bahwa perilaku negara dan bangsa ibarat perilaku manusia. Ia butuh rasa aman. Tingkat aman dan ancaman berbanding lurus seperti jumlah rasa aman dan ancaman yang diberikan oleh pengguna negara kepada negaranya. Sekali negara terancam maka tak ada jalan lain selain berperang lalu berdamai kembali. Sedangkan, Geometripolitik sebagai sumber kekuasaan, kekuatan, dan keamanan pada akhirnya mendedikasikan diri pada tujuan keamanan. Pada akhirnya, Geometripolitik akan menghasilkan Keamanan Universal yang dapat mengikat aktifitas manusia dengan dimensi wilayahnya. Dengan demikian, manusia tidak akan mampu menentukan kapan mesti berperang, berdiplomasi, dan berdamai jika tidak mampu menentukan posisi titik Geometripolitik sebagai identitas Keamanan Universal yang ia miliki.

Hubungannya dengan siber, dilihat dari proyeksi bangunannya, ada dua jenis keamanan, yaitu keamanan volume dan keamanan datar. Keamanan volume, yaitu keamanan sistem laser kerucut, kubus, prisma, tabung, dll. Keamanan sistem datar, yaitu sistem segitiga, bujur sangkar, jajaran genjang, trapesium, lingkaran, dll. Untuk memperkuat argumen ini, asas Aljabar tentang "Pengurangan" dan "Keseimbangan" universal merupakan filosofi dasar dari keseimbangan universal. Sebagai contohnya adalah apa yang terjadi pada benua Afrika adalah sebuah fenomena penciptaan keseimbangan universal. Pemetaan Afrika menunjukkan dalam suatu kurun tertentu, beberapa kepemimpinan antarbangsa di suatu wilayah mengalami proses "pengurangan" dan "keseimbangan" kekuatan. Inilah yang saya sebut sebagai "Pemetaan Universal." Mengapa negara-negara Afrika mesti menghadapi "pemetaan" sedemikian rupa? Tujuannya adalah untuk melakukan proses keseimbangan kepemimpinan bangsa Afrika di dunia. Inilah proses "pemetaan" untuk Afrika. Di masa depan, juga berlaku bagi pemetaan Amerika yaitu terpecahnya wilayah

dan kekuatan Geometripolitik Bangsa Amerika menjadi beberapa bangsa kecil yang saling bermusuhan satu sama lainnya. Juga Pemetaan untuk Eropa. Perubahan nama negara seperti Persia menjadi Iran, Prusia menjadi Jerman, dll juga adalah salah satu contoh fenomena Pemetaan Universal.

Lebih lanjut, Geometripolitika percaya bahwa "Keamanan Universal" adalah keamanan yang bersumber dari penggabungan antara Geopolitik, Kebijakan, dan Kekuatan Universal. Negara adalah makhluk hidup. Ia bernapas, butuh makan dan minum, butuh proyeksi serta butuh tempat tinggal, namun ia tetap dikendalikan. Jika keseimbangan terganggu, maka ia berhak memunculkan bencana. Sebagai contoh tentang penggunaan asas Geometripolitik adalah distribusi militer Amerika Serikat di seluruh dunia menggunakan bangunan Geometripolitik Horizontal Segi Lima sesuai formasi gedung Pentagon. Setiap negara dan bangsa punya dua halaman horizontal, yaitu depan dan belakang; dan dua halaman vertical, yaitu atas dan bawah. Masing-masing halaman membentuk wilayah Geometripolitik Horizontal Positif dan Negatif; dan Geometripolitik Vertikal Positif dan Negatif.

Berdasarkan konsep di atas, maka ketika muncul ancaman, dimensi siber akan berfungsi melakukan pergerakan Geometripolitik yang bersifat fleksibel. Apakah harus membentuk keamanan sistem laser prisma, kubus, segitiga, tergantung arah proyeksi. Skenarionya dapat dipahami dalam bentuk gambar bergerak. Sebagai contohnya adalah konsep *Lebensraum* Jerman yang dalam konteks ini perlu diarahkan. Meskipun belum menggunakan dimensi siber, *Lebensraum* sebagai bentuk imperialisme tak terbatasnya Hitler dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu arah Geometripolitik Horizontal Positifnya adalah ketika Jerman mampu melakukan invasi dan memperoleh perluasan atas delapan medan wilayah; sedangkan Geometripolitik Horizontal Negatifnya adalah ketika Jerman kalah lalu mengalami penyusutan atas delapan medan wilayah negaranya. Di sini, arah kekuatan Politik, Geopolitik, dan medan wilayahnya telah membentuk evolusi terakhirnya, yaitu Kekuatan Geometripolitik. Adapun, kualitas Geometripolitik ditentukan oleh kualitas manusia dalam mengolah delapan medan wilayahnya.

Pada akhirnya, keterkaitan antara Geometripolitik dan Keamanan Siber adalah terletak pada kesimbangan antara penggunaan teknologi dan medan. Dengan demikian, negara tidak semestinya menciptakan teknologi yang lambat karena ia memperlambat sistem kekuatan. Jika sistem kekuatan mengalami perlambatan, maka sistem keamanan sudah pasti mengalami perlambatan yang berujung pada kelemahan negara. Sedangkan, pergerakan interaksi antarnegarawan mesti dipercepat melalui percepatan informasi. Itulah kontribusi siber dalam Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21.

Konsep dan Kebijakan Keamanan Siber Dunia

Ada korelasi yang sangat signifikan antara penggunaan teknologi siber dan aktifitas senjata nuklir. Korelasi tersebut adalah ketika puncak teknologi senjata nuklir telah tercapai, maka negara-negara yang berada dalam situasi ini akan mengalami guncangan internal. Diantaranya yang paling berbahaya adalah akan ke mana senjata nuklir ini diuji-coba. Negara-negara ini cenderung mencari lawan sebagai proyeksi penggunaan senjata nuklir. Teknologi siber mampu mengakomodasi kebutuhan ini.

Keamanan siber semakin pesat kemajuannya yang dipengaruhi oleh penggunaan internet.² Memahami siber, pertanyaan pedomannya, yaitu (1)apa itu siber, (2)siapa pengguna siber, (3)kapan siber berfungsi, (4)dimana siber digunakan, (5)mengapa siber digunakan, dan (6)bagaimana siber difungsikan. Hal ini berfungsi melihat dunia siber dari berbagai sudut. Di Era Horizontal, manusia membutuhkan teknologi. Adapun, distribusi informasi akan saling berkesinambungan. Situasi ini pada akhirnya menciptakan situasi genting yang cenderung berbahaya, dimana bangsa-bangsa diarahkan ke dalam perang siber yang berimbas pada perang nuklir. Selanjutnya, mari membahas secara mendalam mengenai enam pedoman di atas.

Pertama, istilah Perang Informasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976 oleh Thomas Rona.³ Perang Informasi memiliki definisi sebagai segala bentuk operasi informasi yang dilakukan saat krisis atau konflik untuk meraih atau mempromosikan objektif tertentu untuk melawan musuh. Menurut Departemen Pertahanan Amerika, Perang Informasi adalah segala aksi yang dilakukan untuk mendapatkan superioriti bidang informasi yang dilakukan dengan cara mengambil informasi dari pihak musuh baik dari proses, sistem ataupun jaringan komputer yang ada, sementara waktu tetap mempertahankan informasi yang dimiliki sendiri.⁴

Sementara itu Perang Jaringan⁵ menurut John Arquilla dan David Ronfeldt adalah model konflik yang muncul di level sosial yang masih memasukkan unsur perang tradisional dimana pelaku utama menggunakan jejaring organisasi dan juga doktrin yang terkait. Pelaku utama ini biasanya berupa kelompok kecil yang saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan juga memimpin apa yang mereka kerjakan lewat internet tanpa adanya komando

² Riant Nugroho, (2014), *National Security Policy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 71

³ Fernando Duarte Carvalho and Eduardo Matues da Silva (Ed.), (2006), *Cyberwar-Netwar: Security in the Information Age*, Amsterdam: IOS Press, hal. 3

⁴ Edward Halpin dkk (Ed.), (2006) *Cyberwar, Netwar and the Revolution in Military Affairs*, New York: Palgrave McMillan, hal. xi

⁵ *Opcit*, Fernando Duarte Carvalho and Eduardo Matues da Silva, hal. 6

pusat yang jelas. Menurut George Stein target dari netwar sendiri adalah pikiran manusia. Sementara itu Cyberwar adalah perang dalam cyberspace yang masih memiliki kesamaan dengan netwar. Kedua hal ini dibedakan dengan kedudukan Perang Siber sebagai bentuk dari politik negara.

Untuk membedakannya dengan Perang Informasi maka ada tiga poin tambahan di dalamnya yaitu: (1) *Cyber warfare* merupakan tambahan untuk operasi militer (kunci utamanya adalah superior dalam informasi); (2) *Limited cyber warfare (information infrastruktur* atau struktur informasi adalah media, target dan juga senjata untuk menyerang); dan (3) *Unrestricted cyber warfare* (tidak ada perbedaan antara target sipil dan militer). Dengan demikian, ada keterkaitan yang signifikan antara Perang Siber dan keamanan. Adapun, Perang Informasi dan Perang Jaringan juga akan menjadi unsur berpengaruh dalam perang nuklir dan siber.

Kedua, terhadap "siapa" aktor aktor yang ada di dalam perang dunia maya ini sendiri, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat banyak kritik bahwa perang dunia maya sebenarnya bukanlah 'perang', karena perang tersebut tidak melibatkan dua negara. Hal ini ditegaskan oleh Jeffrey Carr dalam bukunya *Inside Cyber warfare* pada bab kedua mengenai peran aktor aktor non negara yang meningkat dalam perang dunia maya.⁶ Carr menjelaskan terjadi dua peristiwa yang menggambarkan meningkatnya aktivitas saling tukar penyerangan di dunia maya, yaitu pada kasus Georgia-Russia, dan pada kasus Arab-Israel. Menurut Andress dan Winterfeld, terdapat beberapa aktor non negara yang dapat berperan di dalam perang dunia maya. Pertama, aktor aktor individual yang dapat menjalankan serangan serangan dunia maya. Mereka sendiri terbagi oleh kemampuannya dan juga motivasinya. Kita dapat melihat contoh seperti misalnya *script kiddies*, yaitu para hacker hacker amatir yang mencoba cara cara untuk menembus sistem pertahanan jaringan internet sebuah entitas.

Ketiga, munculnya Perang Siber sekali lagi harus ditekankan kepada kemajuan teknologi. Perang siber didahului dengan kehadiran Perang Informasi dan juga Perang Jaringan. Seperti yang telah disebutka sebelumnya, Perang Siber adalah bagian dari kebijakan suatu negara. Hal ini akan dilakukan suatu negara apabila dirasa perlu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada awal 1990 sesaat setelah berakhirnya Perang Dingin, Peneliti semacam Ronfeldt dan Arquilla mulai melihat kemunculan dari model perang yang berbasis teknologi tinggi.⁷ Teori pun akhirnya dibentuk oleh mereka dan mulai mendapatkan pengakuan oleh militer Amerika Serikat pada tahun 1995.

⁶ Jeffrey Carr, (2010), *Inside Cyber warfare*, Sebastopol: O'Reilly Media, hal 15-30

⁷ *Opcit*, Edward Halpin dkk (Ed.), hal. 3

Penyerangan yang terjadi pada 11 September 2011 dikatakan telah menjadi titik balik bagi masalah informasi ini. Senjata modern mulai dilihat sebagai sistem dimana senjata dan juga mekanisme penyebaran yang berbasiskan intellegent *cybernetic nervous system* yang diatur dengan jaringan komunikasi. Komando dan juga kontrol yang kompleks. Para petarung saat ini mengetahui bahwa akan lebih efektif untuk menyerang sistem informasi ini secara langsung. Dengan adanya fakta bahwa masyarakat sangat bergantung terhadap infrastruktur informasi telah membawa mereka melakukan berbagai cara untuk mencari tahu bagaimana mengeksplor ancaman, kerawanan, dan juga kesempatan yang ada dalam hal pengumpulan informasi ini. Hal ini lah yang akhirnya dikatakan telah mendorong terjadinya Perang Siber.

Keempat, Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam memahami perang dunia maya adalah menganalisis dimana sebenarnya perang berlangsung. Hal ini disebabkan karena, pembagian wilayah/domain perang menjadi penting adanya dalam menjelaskan strategi dan taktik yang bisa diambil oleh sebuah negara. Sejauh ini, dunia telah mengenal 4 domain perang, yaitu darat, laut, udara, dan luar angkasa. Masing masing memiliki karakteristik sendiri, bahkan terkadang tiap domain memiliki argumen tersendiri mengapa domain tersebut yang paling penting, seperti Alfred Mahan yang mementingkan kekuatan laut atau Douhet yang mementingkan kekuatan udara.

Kelima, pentingnya keberadaan informasi bagi suatu negara membuat negara tersebut berusaha untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Dari masa ke masa, untuk mencapai kemenangan atau mendapatkan apa yang diinginkan, kemampuan untuk mengumpulkan informasi mengenai lawan yang dihadapi haruslah maksimal. Bocornya informasi yang kita miliki ke tangan musuh tentu saja akan memudahkan musuh tersebut untuk meyerang titik lemah. Namun sebaliknya, apabila kita dapat mengakses berbagai informasi yang dimiliki musuh maka hal tersebut akan menjadi senjata kita untuk menyerang. Dengan menyadari kepentingan dari sebuah informasi ini lah yang telah membawa beberapa pihak untuk melakukan serangan yang biasa disebut dengan *cyberattack*. *Cyberattack* ini dapat dilakukan tentu saja dikarenakan adanya kelemahan dari sistem yang ada. Pada era modern ini, negara-negara telah bergantung terhadap teknologi. Selama mereka menggunakan jaringan yang dapat mengakses dunia luar, maka akan ada kemungkinan mereka dalam bahaya untuk kebocoran informasi.⁸ Para pembajak dunia maya atau yang biasa disebut dengan *hacker* dapat mencuri informasi, memalsukan komando

⁸ Martin C. Libicki, (2009), *Cyberdeterrence and Cyber warfare*, Pittsburgh: RAND Corporation, 2009, hal. xiii

palsu terhadap sistem yang akan membuat sistem tersebut menjadi malfungsi dan menyuntikkan informasi palsu yang dapat membuat mesin atau manusia menyimpulkan hal yang salah sehingga membuat keputusan yang juga salah.

Keenam, bagaimanakah perang dunia maya itu dilaksanakan. Perang dunia maya dimana perang tersebut terjadi di dalam dunia maya – komputer, jaringan internet – dan dilaksanakan oleh aktor aktor yang seringkali adalah aktor non negara, sehingga jenis perang dan jenis senjata yang digunakan adalah senjata dan taktik yang berbeda dengan perang konvensional lainnya. Pada bagian ini kita akan melihat mengenai senjata yang dapat digunakan pada perang dunia maya, jenis strategi dan taktik yang dapat digunakan.

Selanjutnya, dalam perang nuklir, teknologi siber punya peran yang signifikan dalam menemukan informasi. Karena dari informasi siber, negara-negara akan dengan mudah menemukan kapan dan dimana perang nuklir akan digelar. Sebelum melakukan penyerangan secara fisik, negara-negara harus melakukan prakondisi awal sebagai ajang ujicoba, salah satunya adalah ujicoba penyerangan lewat dunia maya. Hal penting yang harus dilihat di dalam taktik penyerangan dunia maya adalah mengenai timing penyerangan. Hal ini berujung pada dua hal. Pertama, sebuah pihak yang ingin melaksanakan serangan dunia maya harus memikirkan mengenai masalah kerahasiaan dalam penyerangan yang ingin dilaksanakannya.

Menurut Martin Libicki, serangan pada dunia maya adalah mengenai elemen kejutan yang ada di dalam serangan tersebut.⁹ Oleh karena itu, sebuah serangan dunia maya yang bagus akan memikirkan mengenai kapan sebuah serangan itu akan dilaksanakan untuk menjaga kerahasiaannya. Kedua, setelah itu yang harus dipikirkan adalah mengenai masalah peran yang ingin diambil oleh kedua pihak dalam perang dunia maya yang terjadi. Pihak yang berseteru dalam perang tersebut dapat mengambil posisi untuk menunggu antara menjadi seseorang yang akan bereaksi secara reaktif, atau malah mengambil posisi secara proaktif. Pilihan ini akan menentukan, karena pihak yang memilih untuk menjadi pihak yang menjadi proaktif tentu memiliki pilihan strategi yang lebih luas daripada hanya menjadi reaktif, seperti menentukan tindakan serangan yang akan dilaksanakan, apakah akan menyerang, apakah akan menyerang secara cepat, kapan akan menyerang, kapan akan memulai perang, seberapa lama persiapan akan dilaksanakan, dan lain lain. Hal ini yang tentunya tidak dimiliki oleh pihak yang hanya ingin menjadi pihak yang reaktif.

⁹ *Ibid*, hal. 148

Keamanan Siber: Perang Geometri Antarbangsa (PGA)

Perang Geometri Antarbangsa Era Horizontal Abad 21 merupakan manifestasi dari dimulainya konflik awal senjata nuklir abad 21. Inilah Era Horizontal. Dekade ini sejak tahun 2000, dunia telah memasuki abad Horizontal. Periode untuk Pasca Perang Dingin telah berakhir di penghujung tahun 1999 yang berlangsung selama satu dekade, yaitu 1990-2000. Tahun 2000, dunia memasuki zona Pra Perang Dunia III atau prakondisi Perang Geometri Antarbangsa. Abad Horizontal adalah abad dimana negara-negara saling bergotong royong sesama rumpun bangsa juga saling mempertahankan diri, mendominasi, dan menciptakan postur global yang baru terhadap rumpun lain (rumpun Nir-Horizontal vs. rumpun Horizontal). Abad Horizontal menandai sebuah pergeseran besar kekuatan dunia dari Euro-Atlantik atau Daerah Atlantik Dunia (DAD) ke Asia-Pasifik termasuk wilayah Eurasia atau Daerah Horizontal (DHD). Proses ini akan menghasilkan keseimbangan baru kekuasaan dunia. Saya pikir kali ini kita akan berdiskusi tentang Pra-Perang Dunia III kaitannya dengan keamanan siber dunia.

Didukung oleh ditemukannya naskah yang hilang, *The Nostradamus Code*, oleh Michael Rathford, melalui prediksi-prediksi yang diuraikan dari makna tersembunyi, kode tersebut merujuk pada Perang Dunia III. Ini ditandai dengan fenomena awal abad 21 berupa serangan teroris Amerika Serikat atas Gedung WTC pada 11 September 2001¹⁰, perang dengan Iran, penghancuran nuklir Roma, konfrontasi antara AS dan Tiongkok-Rusia. Keseimbangan global yang baru akan mengubah status quo dunia. Kekuatan Eropa-Amerika dalam menciptakan keseimbangan maksimum dunia masih cukup signifikan. Kekuatan global masih dalam kendali Eropa-Amerika. Langkah selanjutnya adalah penting untuk menganalisa proyeksi kekuatan global baru masa depan dengan melihat konteks internasional tentang pertumbuhan kekuatan Asia, Afrika, Timur Tengah, Asia Pasifik, termasuk Australia atau Rusia. Kekuatan global akan terus bergerak bergeser secara perlahan-lahan.

Pergeseran global akan terjadi dari Eropa-Amerika ke wilayah lain. Oleh karena itu penting untuk menganalisis: Bagaimana "keseimbangan global yang baru" akan bergerak dan bergeser? Bagaimana proses keseimbangan global yang baru dihasilkan? Bagaimana Eropa-Amerika memersepsikan kekuatannya? Di manakah pergeseran akan terjadi sebagai titik Ekuilibrium (perang)? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah hingga ke titik puncaknya? Di manakah kejadiannya pergeseran akan terjadi? Untuk

¹⁰ Michel, Chossudovsky, (2014), *Skenario Perang Dunia III: Siapa Lawan Siapa? Kapan Akan Terjadi? Bagaimanakah Akhirnya?*, Jakarta: Change Publisher, hal. 39

menjawab pertanyaan ini, kuncinya adalah memahami konteks dunia dari sudut pandang keamanan Universal. Dari keamanan Universal ke perdamaian Universal, dan peradaban Bangsa Horizontal akan muncul di dunia. Pergeseran kekuatan akan terjadi dari pemegang kunci keseimbangan global yang telah tua menuju keseimbangan global yang baru. Keseimbangan global yang lama dibentuk dari Perang Dunia I (1914), Perang Dunia II (1945), dan Perang Dingin (1945-1990). Dan, keseimbangan baru dunia mulai menuju titik balik pada Pasca Perang Dingin (1990), Globalisasi, dan memasuki abad Horizontal yang diprediksi sebagai abad meletusnya Perang Dunia III atau Perang Geometri Antarbangsa. Disebut Perang Geometri Antarbangsa karena aktifitas perang ini melibatkan teknologi siber sebagai penentu dan model perangnya.

Bagaimana ini bisa dijelaskan? Saya menempatkan poin pertama. Status quo PBB saat ini sangat kompleks. Rencananya akan ada penambahan anggota baru untuk anggota tetap di Dewan Keamanan PBB yang akan datang dari Afrika, Jerman, Palestina, dan lain-lain. Namun, perlu waktu dan harus memenuhi banyak prosedur yang berada di bawah kendali oleh lima negara: Perancis, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Inggris. Perancis dan AS akan menjadi dua negara pertama yang memungkinkan status quo berubah. Di bawah proyeksi NATO, hubungan Perancis dan Amerika Serikat selalu mengalami benturan. Dan, Inggris, Tiongkok, dan Rusia akan berpikir dua kali untuk menggenapi tujuan itu.

Perancis akan melakukannya. Sebenarnya, Perancis berada dalam situasi yang kuat di bawah pemerintahan "Sarkozy", tetapi dokumen putih masih bekerja untuk mendorong pertahanan Eropa di bawah Perancis dan Jerman. Sejak Dewan NATO-Rusia dibuat pada tahun 1949, status antara Amerika Serikat dan Rusia mendapatkan harmonisasi, namun Rusia akan mereproduksi postur Eropa bersama Tiongkok. Ini akan mendorong kedua negara menciptakan keseimbangan kekuasaan baru di PBB. Sudah menjadi tradisi sebuah lama bahwa kekuasaan Dewan Keamanan PBB akan selalu berada dalam posisi status quo. Sangat mungkin terjadi kerusakan keseimbangan. Jadi, hipotesis-nya adalah: Apakah "keseimbangan global baru" sedang diciptakan?

Penciptaan keseimbangan global yang baru akan dimulai di NATO. Babak baru NATO adalah bagaimana melihat peran Amerika Serikat untuk selalu dominan di NATO. Dengan demikian, muncul paradigma Eropa I "membuat NATO berada di bawah kendali Amerika Serikat", yang berfokus

pada upaya AS untuk selalu dominan dalam tubuh NATO.¹¹ Amerika Serikat ingin NATO untuk diposisikan di bawah pengaruh dan kontrol Amerika Serikat "membuat NATO di bawah kendali Amerika Serikat". Di sisi lain negara-negara Eropa melihat dominasi Amerika Serikat di NATO sebagai ancaman bagi kedaulatan Eropa. Negara-negara Eropa melihat bahwa, jika dominasi Amerika Serikat dibiarkan terus menerus, maka dominasi akan menjadi bentuk kekuatan baru yang akan merusak keseimbangan Eropa. Akibatnya, memberikan ruang untuk saling mendominasi satu sama lain antara Eropa dan Amerika Serikat di NATO. Negara-negara Eropa berusaha untuk memposisikan Amerika Serikat di bawah kendali NATO. Dengan kata lain, muncul paradigma Eropa II, yaitu Eropa ingin "membuat Amerika Serikat berada dibawah NATO", yaitu berada di bawah kendali negara-negara Eropa.¹² Persaingan antara Eropa dan Amerika di PBB akan merembes ke NATO dan ini selanjutnya menyebabkan perpecahan besar di Eropa dan Amerika. Dengan demikian, keruntuhan Perdamaian Atlantik (Pax Amerikana) akan segera tiba dan akan diganti dengan Perdamaian Asia (Pax Asiana).

Keterkaitan persaingan di atas menunjukkan bahwa bahwa perang nuklir akan terjadi. Namun, hal tersebut mesti diukur. Untuk memahami ini, maka saya wajib menjelaskan asas keseimbangan Al-Jabar kaitannya terhadap Geometripolitika. Ini artinya, jika asas Al-Jabar diterapkan, maka kejadiannya adalah bahwa perang nuklir itu akan diimbangi oleh norma global dari kebijaksanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (MDG's), memikirkan agar bumi tetap hidup dan tidak hancur. Prinsip Al-Jabar adalah ketika ada yang berencana melakukan proses yang tidak seimbang, maka sebaliknya harus ada juga yang melakukan proses sebaliknya, mempertahankan keseimbangan yang ada, atau melakukan perlawanan terhadap pendatang baru. Namun, manusia tidak akan pernah bisa berperang bahkan berdamai sebelum mereka mampu menentukan posisinya baik secara ruang, massa dan waktu sebagai bentuk geopolitik status quo. Perang Dunia III memiliki variabel bergerak yaitu nuklir dan teknologi siber, sedangkan variabel tetap yaitu jumlah pulau aktif yang dimiliki oleh masing-masing negara, dan variabel spiral yaitu kekuatan ekonomi. Tiongkok mestilah menunjukkan jumlah seluruh kekuatannya karena itu penting untuk dihitung. Dalam hal ini kekuatan penggunaan senjata nuklir Antarbangsa dapat dikategorikan dalam tiga jenis yaitu: kapasitas, rasionalitas, dan probabilitas nuklir.

¹¹ Adi Rio Arianto, 2012, *Rivalitas Prancis-Amerika Serikat di North Atlantic Treaty Organization (NATO) Pasca Perang Dingin* (Skripsi), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Makassar: Universitas Hasanuddin, hal. 76

¹² *Ibid*, Adi Rio Arianto, hal. 76

Menjelang terbentuknya zona Pra Perang Geometri Antarbangsa, negara-negara yang tergabung dalam Rumpun Horizontal Dunia—Tiongkok, Rusia, Indonesia, India, dan Mongolia, termasuk seluruh wilayah benua Asia, Afrika dan Eurasia (disingkat TRIIMAAE) terus meningkatkan kekuatan dan keamanannya. Juga, dengan kemunculan BRICS—yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan turut mempercepat pembentukan zona Perang Geometri Antarbangsa. Sedangkan, status quo keamanan dunia yang dibangun oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) tahun 1946, nampaknya diam-diam mengalami gejolak. Gejolak ini dapat dilihat dengan cara memahami bentuk, pola dan sumber ancaman yang muncul yang pada akhirnya mendorong semua negara-negara di atas untuk melakukan langkah taktis mencegah ancaman dengan jalan memperkuat pertahanan dan keamanan negara baik dari dalam maupun dari luar negara, termasuk dalam hal ini adalah memahami kemunculan aliansi-aliansi baru di seluruh dunia.

Zona Pra Perang Geometri Antarbangsa terbentuk setelah berakhirnya zona Perang Dingin (1990) dan berakhirnya Pasca Perang Dingin (1999) yang ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru dunia, dalam hal ini munculnya negara-negara yang berasal dari rumpun Horizontal Dunia. Tanda-tanda ini semakin diperkuat dengan munculnya kerjasama antara negara-negara BRICS. Dalam situasi seperti ini, keamanan dunia mengalami perubahan bentuk, pola, dan sumber ancaman dunia, sehingga semangat negara-bangsa untuk meningkat kekuatan negara semakin luas. Untuk itu, negara-negara ini melakukan reaksi atas pergerakan menuju zona ini. Semakin luasnya kapasitas kekuatan geometripolitik dunia, meningkatnya anggaran belanja alat-alat perang militer, dan semakin gencarnya negara-bangsa dalam mereproduksi peralatan alutsista negara semakin mendorong dunia memasuki zona Perang Geometri Antarbangsa.

Indonesia merupakan salah satu calon kekuatan dunia yang terikat dalam rumpun Horizontal Dunia bersama-sama dengan Tiongkok, Rusia, India, dan Mongolia. Keberadaan Indonesia semakin diperhitungkan oleh dunia dalam membangun misi perdamaian dunia di Asia Pasifik. Catatan terkuat Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian dunia ditandai dengan keaktifan Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap DK-PBB. Indonesia tercatat telah tiga kali menjabat posisi ini, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan paling terakhir pada 2007-2008. Sebelumnya, Indonesia juga telah menjadi negara yang aktif mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian sejak tahun 1957. Dalam hal ini, penyelenggaraan perdamaian yang telah dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis dengan memandang negara lain bukan sebagai ancaman dan sebaliknya negara lain

tidak memandang Indonesia sebagai ancaman. Indonesia memiliki kekuatan terbaik dibandingkan negara Asia lainnya, seperti India dan Jepang. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh letak negara Indonesia yang diapit oleh dua samudera—Hindia dan Pasifik, dan dua benua—Asia dan Australia, dan satu kekuatan lagi, yaitu Terbentuknya Kekuatan Geometripolitik Indonesia dalam bentuk "Poros Khatulistiwa Dunia" sebagai pasangan dari "Poros Maritim Dunia", dan "Poros Daratan Dunia." Ketiga poros ini harus Equilibrium untuk menciptakan Kekuatan Universal Bangsa Horizontal di Era Horizontal Abad 21. Mengingat, Geometripolitika telah membagi medan dunia menjadi delapan wilayah yang salah satunya menempatkan dimensi Khatulistiwa sebagai salah satu sumber kekuatan universal. Poros Khatulistiwa Dunia menjadi salah satu kekuatan Indonesia memperkuat posisi Bangsa Horizontal.

Dengan posisi ini, Indonesia nampaknya memiliki pertumbuhan kekuatan yang baik, apalagi dengan bertambahnya anggaran untuk peningkatan teknologi alutsista Indonesia dalam kurun waktu 2010-2024. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer dan ekonomi baru di Asia Tenggara. Selain itu, perkembangan kekuatan Geometripolitik Indonesia meningkat sejalan dengan perkembangan Hubungan Antarbangsa yang berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan fenomena "Globalinium" sebagai bagian dari Horizontalisasi Dunia Abad 21, 22-28, dst. Horizontalisasi Dunia diarahkan untuk mempengaruhi gelombang perubahan Arsitektur Politik Antarbangsa, Keamanan Dunia, dan Perdamaian Universal Era Horizontal (Abad 21, 22-28, dst), yang merupakan periode "pergiliran universal" pergeseran episentrum dunia dari "Daerah Atlantik Dunia (DAD)" menuju "Daerah Horizontal Dunia (DHD)." Sehingga, negara dengan pulau terbanyak di dunia akan menjadi bangsa terkuat Abad Horizontal. Bagi Indonesia, ini peluang besar untuk ikut mereproduksi Keamanan Universal Era Horizontal Abad 21.

Posisi ini telah memperkuat peran Indonesia dalam jajaran negara-negara yang tergabung dalam TRIIMAAE dan BRICS. Baik di TRIIMAAE maupun di BRICS, Indonesia masih tetap menjadi anggota PBB. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar kekuatan Indonesia dalam menjalankan misi tersebut, maka kekuatan negara Indonesia perlu diperbandingkan dengan negara lain, dalam hal ini adalah Jerman. Itu juga yang memperkuat tulisan ini untuk tetap melibatkan Jerman dalam jajaran negara-negara BRICS dan TRIIMAAE dalam mereproduksi *satus quo* kemanan internasional ke depan. Jerman sudah enam kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK-PBB dan selalu diikuti dalam pengambilan keputusan bagi negara pemegang hak veto. Jerman sebagai salah satu kelompok negara G4 melihat bahwa

keanggotaan DK PBB perlu diperluas dengan tujuan untuk memperluas reproduksi status quo keamanan internasional di DK PBB. Perluasan ini sudah dilakukan sejak tahun 1973 sesuai dengan dokumen resmi Pemerintah Republik Federal Jerman: "*Seit 1973 ist Deutschland Vollmitglied der Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen (VN). Deutschland trag knapp neun Prozent des egularen VN-Haushalts und ist damit drittgrobter Beitragszahler. Deutschland ist VN-Stzstaat: seit 1996 trag Bonnden Titel "VN-Staadt", hier sind 16 Organizationen der VN zu Hause.*"

Bagi Jerman, fakta geografi ini dilihat sebagai bentuk kekuatan geopolitik untuk memperbesar peluang dalam memperkuat posisi Jerman di mata internasional, setidaknya Jerman bisa mampu mengungguli dahulu negara-negara di benua Eropa lalu memperluas pengaruhnya di luar benua Eropa.¹³ Indonesia dan Jerman memiliki misi yang sama-sama menarik perhatian dunia, terutama bila dilihat dari segi kerjasama militernya. Beberapa kerjasama militer antara Indonesia dan Jerman telah terjalin sejak dekade 90-an dan terus berlanjut hingga sekarang. Selain itu, kedua negara juga ikut terlibat dalam misi perdamaian di PBB sebagai anggota tidak tetap. Semua hal di atas merupakan indikator penting untuk digunakan dalam menganalisis kekuatan negara-negara menjelang memasuki zona Perang Geometri Antarbangsa.

Zona Pra Perang Geometri Antarbangsa ditandai dengan munculnya senjata nuklir sebagai senjata paling terkuat di dunia. Keberadaan senjata nuklir telah mengalami perkembangan secara pesat, dengan tujuan tidak hanya untuk mencegah dari munculnya ancaman di luar negara dengan cara menggunakan nuklir sebagai alat pertahanan negara tetapi juga untuk menunjukkan kepada negara lain bahwa nuklir memperkuat pertahanan negara dari berbagai ancaman terkuat. Untuk itulah nuklir menjadi alat terkuat untuk meningkatkan keamanan negara dari berbagai bentuk ancaman. Dengan demikian, mengukur keamanan negara berarti mengukur sejauh mana nuklir mengancam keamanan suatu negara. Sebagai konsekuensi-nya, maka saya perlu memaparkan kondisi keamanan dunia pada Pra Perang Geometri Antarbangsa. Ini dapat dijelaskan dengan cara memahami staus quo keamanan dunia Pra Perang Geometri Antarbangsa, negara-negara apa yang diindikasikan akan terlibat dalam mereproduksi status quo keamanan internasional, dan terakhir menjelaskan secara geopolitik dimana jantung dunia hari ini terletak yang dalam pemahaman penulis ada di Asia Pasifik, yaitu Indonesia. Hari ini Indonesia adalah "jantung dunia" yang segera akan menjadi titik perebutan bagi negara-negara besar di

¹³ Adi Rio Arianto, (2015), *Konfigurasi Geopolitik Eropa: Jerman dan Arsitektur Keamanan Eropa Pasca Perang Dingin* (Tesis), Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal. 82

dunia. Oleh karena itu saya meramalkan bahwa "Siapa yang menguasai tiga Poros utama Bangsa Horizontal, yaitu Poros Khatulistiwa Dunia, Poros Maritim Dunia, dan Poros Daratan Dunia akan menguasai tiga wilayah utama Bangsa Horizontal, yaitu Asia Pasifik, Afrika, dan Daratan Eurasia; Siapa yang menguasai tiga wilayah utama Bangsa Horizontal akan menguasai dunia secara total; dan akhirnya Keamanan Universal telah bergeser dari Euro-Atlantik (DAD) ke Asia-Pasifik (DHD). Era Horizontal adalah Era Kemakmuran Asia, Afrika, dan Eurasia".

Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk mengkaji Indonesia dari posisi dunia, sama ketika memahami Jerman di Eropa, dalam hal ini "Jerman sebagai Jantung Eropa". Oleh karena itu, Jerman sebagai jantung Eropa memiliki modal yang kuat untuk menjadi bangsa besar di Era Horizontal. Sama kuatnya ketika Jerman ingin masuk ke dalam struktur keanggotaan Dewan Keamanan tetap PBB setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB tahun 2011-2012. Jerman memiliki peluang besar untuk menduduki jabatan tersebut. Posisi geografis Jerman mendukung situasi ini sesuai pernyataan berikut: "*Deutschland liegt im Herzen Europas und ist von neun Nachbarstaaten umgeben: Frankreich, Schweiz, Ostereich, Tschechien, Polen, Danemark, Niederlande, Belgien, und Luxemburg.*" Posisi ini telah menambah nilai kekuatan Jerman di Eropa sekaligus sebagai satu-satunya negara terkuat Benua Eropa Era Horizontal dengan luas wilayah 357.021 km².

Abad 21 dunia memasuki zona Perang Geometri Antarbangsa. Indonesia telah melibatkan diri dalam aktifitas BRICS dan TRIIMAAE. Untuk menganalisis zona Perang Geometri Antarbangsa, maka beberapa pertanyaan berikut akan menjadi dasar fokus analisa ini, yaitu bagaimana kekuatan BRICS dalam reproduksi status quo keamanan dunia pada periode Pra Perang Geometri Antarbangsa? Sebagai perwakilan bangsa nir-Horizontal, bagaimana posisi Jerman terhadap negara-negara TRIIMAAE dan BRICS? Bagaimana kekuatan BRICS dan TRIIMAAE dalam reproduksi status quo keamanan dunia pada Pra Perang Geometri Antarbangsa? Bagaimana status quo keamanan internasional Pra Perang Geometri Antarbangsa?

Pertanyaan di atas mencoba mengarahkan pembaca untuk mendalami status quo keamanan dunia dalam perspektif BRICS, TRIIMAAE, dan Jerman yang terdiri dari: ancaman dan keamanan dunia dalam perspektif TRIIMAAE, BRICS, dan Jerman. Pendalaman berikutnya adalah kekuatan aliansi BRICS dalam reproduksi status quo keamanan internasional Pra Perang Geometri Antarbangsa. Juga mengarahkan pembaca untuk memahami elemen-elemen

kekuatan negara dan aliansi dilihat dari proyeksi terhadap ancaman keamanan dunia dari penggunaan senjata nuklir dan siber.

Jerman menjadi "jembatan penghubung penting" ketika pergeseran kekuatan dunia berlangsung dari Daerah Atlantik Dunia (DAD) menuju Daerah Horizontal Dunia (DHD). Dalam pemikiran saya, Jerman akan menjadi negara paling netral pasca Perang Geometri Antarbangsa. Itulah sebabnya, mengapa Jerman penting untuk dianalisis. Itulah bentuk penghormatan Jerman terhadap negara-negara utama Bangsa Horizontal. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Rusia ketika proses berakhirnya Perang Dingin dimana Rusia memberi penghormatan kepada Jerman untuk bersatu kembali. Dan, Reunifikasi Jerman menandai berakhirnya kepemimpinan Rusia di Eropa-Eurasia. Dan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa betapa Rusia adalah bangsa yang penuh sopan santun, sebagai salah satu rumpun Horizontal.

Masa Depan Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21

Dengan kemajuan teknologi, perang telah merambah dunia maya. Konsisten dengan asumsi-asumsi dasar Geometripolitika dimana munculnya pembagian wilayah dunia menjadi delapan medan menjadikan isu-isu siber menempati salah satu posisi yang sangat signifikan. Dan, sudah tentu, berbanding lurus dengan meningkatnya teknologi nuklir. Tak satupun ilmu yang bisa memberikan gambaran secara utuh mengenai hubungan antara teknologi siber, senjata nuklir, dan delapan medan wilayah di bumi selain ilmu Geometripolitika. Demikian halnya, perang masa depan adalah perang yang berkaitan dengan ruang geometri yang melibatkan delapan dimensi wilayah ini.

Perang siber kecil-kecilan, akan terus terjadi di masa depan dan akan melibatkan delapan dimensi wilayah ini. Perang siber mampu mendorong terjadinya perang nuklir. Kedua jenis perang ini secara signifikan memberikan sumbangan yang penting bagi perang konvensional, yaitu PGA. Tingginya interaksi manusia terhadap komputer dan internet sudah pasti mendorong aktifitas siber. Dengan demikian, bangsa yang mampu memaksimalkan ruang siber akan menjadi bangsa terkuat di Era Horizontal Abad 21. Berbanding lurus dengan efek senjata nuklir, maka bangsa dengan pulau terbanyak di dunia akan menjadi bangsa terkuat Abad Horizontal.

Referensi

Arianto, Adi Rio (2012), *Rivalitas Prancis-Amerika Serikat di North Atlantic Treaty Organization (NATO) Pasca Perang Dingin* (Skripsi), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Arianto, Adi Rio (2015), *Konfigurasi Geopolitik Eropa: Jerman dan Arsitektur Keamanan Eropa Pasca Perang Dingin* (Tesis), Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Carr, Jeffrey, (2010), *Inside Cyber Warfare*, Sebastopol: O'Reilly Media
- Carvalho, Fernando Duarte dan Eduardo Matues da Silva (Ed.), (2006) *Cyberwar-Netwar: Security in the Information Age*, Amsterdam: IOS Press
- Chossudovsky, Michel, (2014), *Skenario Perang Dunia III: Siapa Lawan Siapa? Kapan Akan Terjadi? Bagaimanakah Akhirnya?*, Jakarta: Change Publisher
- Halpin, Edward dkk (Ed.), (2006), *Cyberwar, Netwar and the Revolution in Military Affairs*, New York: Palgrave McMillan, 2006
- Libicki, Martin C., (2009), *Cyberdeterrence and Cyber Warfare*, Pittsburgh: RAND Corporation
- Morgenthau, 1949, *Politik Antarbangsa: Perjuangan untuk Kekuasaan dan Perdamaian*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nugroho, Riant, (2014), *National Security Policy: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peranan Negara Negara Besar di Kawasan Pasifik Barat Daya dalam Percaturan Global

Burhanuddin

Universitas Hasanuddin

boerhi76@gmail.com

Abstrak

Peran Perancis di Negara New Caledonia, French Polynesia, Wallis and Futuna terkait keberadaan isu nuklir. Bagaimanakah peran Amerika Serikat di Negara American Samoa, Guam, Hawaii, Mariana Utara. Terdapat keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh Negara-negara yang sistem pemerintahannya diatur oleh Negara koloni misalnya segala bentuk dan jenis kebijakan yang diatur dan ditetapkan oleh Negara koloni tanpa harus mempertimbangkan atau mendengar aspirasi Negara-negara teritori. Kadangkala kebijakannya merugikan bahkan cenderung mengeksploitasi masyarakat dinegara-negara teritori asing Pasifik Barat Daya. Kawasan Pasifik Barat Daya dalam percaturan Politik Global mengacu pada dua tujuan yakni mengetahui kepentingan Negara-negara besar di Kawasan Pasifik Barat Daya dan mengetahui kepentingan Negara-negara besar di Kawasan Pasifik Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif-Analitik yang memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dan relevan. dan menggambarkan kawasan Pasifik Barat Daya dan nilai strategi. Beberapa Negara besar yang berkepentingan dan menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut, misalnya Australia dan New Zealand, Amerika Serikat, Perancis, China dan Jepang kehadiran Australia dan New Zealand tidak lepas dari kedekatan dan statusnya sebagai bagian dari kawasan ini.

Kata kunci

Kawasan Pasifik Barat Daya, Politik Global, Negara Negara Besar

Latar Belakang Masalah

Sebagai mahasiswa hubungan internasional telah kita ketahui bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara yang dulunya tertekan dibawah aktivitas kolonialisme dan imperialisme yang massive kemudian

bergolak, sehingga *Decolonization* atau fenomena dekolonisasi pun mewabah menjangkiti Negara-negara jajahan, khususnya di kawasan Asia dan Afrika.

Dekolonialisasi secara harfiah merujuk pada tercapainya kemerdekaan oleh berbagai koloni dan proktektorat barat. Hal ini muncul seiring dengan gerakan intelektual yang dikenal dengan Post-Kolonialisme. Periode dekolonisasi yang sangat aktif terutama terjadi antara tahun 1946-1960, dibuka dengan kemerdekaan Pakistan dan India dari Britania Raya pada tahun 1947 dan Perang Indo-china pertama. Meskipun demikian, gerakan pembebasan nasional sebenarnya sudah sering kali terbentuk, hanya saja selalu digagalkan oleh Negara penjajah.

Dekolonisasi dapat tercapai dengan pernyataan kemerdekaan, mengintegrasikan diri dengan kekuasaan penguasa atau negara lain, atau menciptakan status "asosiasi bebas" (*free association*). Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa dalam proses dekolonisasi tidak ada alternatif selain prinsip kebebasan menentukan (*self-determination*). Dekolonisasi mungkin melibatkan negosiasi damai dan atau revolusi dengan kekerasan atau pertikaian senjata oleh penduduk asli.

Isu dekolonisasi mulai berkembang di kawasan Pasifik Barat Daya pasca Perang Dunia ke II pada sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an. Kemerdekaan wilayah-wilayah di kawasan Pasifik Barat Daya diperoleh dengan tanpa perang atau gerakan pemberontakan terhadap negara-negara kolonialnya. Semula wilayah-wilayah di kawasan Pasifik Barat Daya dikembalikan kepada negara-negara kolonialnya yaitu Australia, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru berdasarkan mandat dari PBB. Akan tetapi, berbagai tuntutan atas kemerdekaan oleh wilayah-wilayah koloni membuat negara-negara penjajah terpaksa melepaskan wilayah jajahannya di kawasan Pasifik Barat Daya.

Ternyata, tidak semua Negara di PBD serta-merta berhasil menuntut kemerdekaannya, ada juga beberapa Negara di kawasan pasifik barat daya yang maasih *inherently* menginginkan keterikatan dengan Negara koloninya, hal ini misalnya saja disebabkan oleh keterikatan baik secara politik, maupun dalam bidang ekonomi (bantuan luar negeri).

Dikatakan sebagai "Teritori Asing Pasiifik Barat Daya" karena Negara-negara yang antara lain adalah : New Caledonia, French Polynesia, wallis and futuna, American Samoa, Hawaii, Guam, Mariana Utara, Kepulauan Cocos, Natal Island, Tokelau, Kepulauan Pitcairn, dan Paskah Island, sampai saat ini masih merupakan teritori atau wilayah cakupan kekuasaan dari beberapa Negara di barat (Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Australia, Chili, dan Perancis). Oleh karena itu penulis akan mencoba menganalisa hubungan antara Negara proktektorat di kawasan PBD dengan Negara induknya dalam berbagai sektor.

Dari berbagai fenomena yang menarik di kaji di kawasan pasifik, kami kemudian merumuskan beberapa rumusan masalah agar lebih mudah dalam memahami pembahasan Negara-negara Teritori Asing Pasifik Barat Daya.?

Bagaimanakah peran Perancis di Negara New Caledonia, French Polynesia, Wallis and Futuna terkait keberadaan isu nuklir ? Bagaimanakah peran Amerika Serikat di Negara American Samoa, Guam, Hawaii, Mariana Utara? Bagaimanakah peran Australia di Kepulauan Cocos dan Natal Island? Bagaimanakah peran New Zealand di Negara Tokelau? Bagaimanakah hubungan antara Inggris dengan Kepulauan Pitcairn?. Bagaimanakah Hubungan antara pemerintahan Chili dengan Paskah Island?

Perancis

Setelah melepaskan Vanuatu, Perancis masih memiliki beberapa wilayah kekuasaan di Pasifik Selatan. Wilayah tersebut adalah Kaledonia Baru, Polinesia Perancis, serta Wallis dan Futuna. Penyebab tertundanya kemerdekaan di wilayah-wilayah tersebut adalah karena masih adanya kepentingan-kepentingan Perancis, dan keengganan masyarakatnya untuk lepas dari Perancis. Kepentingan Perancis di beberapa wilayah Pasifik Selatan terkait dengan proyek nuklir Perancis dimana laboratoriumnya terdapat di Kaledonia Baru dan tempat ujicobanya di Polinesia Perancis tepatnya di Pulau Atol Mururoa. Proyek ujicoba nuklir Perancis ini merupakan pindahan dari Aljazair semenjak negara tersebut merdeka pada tahun 1966.

New Caledonia

New Caledonia adalah sebuah pulau yang terletak di samudra Pasifik. New Caledonia merupakan Negara extra-teritori dari Perancis. Sebelum menjadi sebuah Negara teritori dari Perancis Negara ini mempunyai sejarah tersendiri. Suku asli yang mendiami pulau ini adalah suku Kanak yang diperkirakan telah hidup di pulau ini sejak 6.000 tahun yang lalu. Perancis kemudian menganeksasi wilayah ini pada tanggal 24 September 1853, sepuluh tahun kemudian pulau ini dijadikan sebagai Negara koloni dari Perancis.

Tahun 1970 suku asli Kanak yang mulai terpinggirkan ini mulai membentuk gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaan. Tahun 1984 FLNKS (Kanak National Socialist Liberation Front) yang merupakan gerakan yang mendukung kemerdekaan New Caledonia, gerakan ini juga mendirikan pemerintahan independen sementara. Hal ini menyebabkan RPCR yang merupakan gerakan yang masih loyal terhadap Perancis marah dan mengadakan konfrontasi dengan FLNKS. Konfrontasi ini berlangsung selama 1984-1988 yang menyebabkan korban jiwa. Hal ini menyebabkan Pemerintah Perancis mengajak pihak yang pro-kemerdekaan dan gerakan loyalis untuk melakukan perjanjian. Perjanjian ini memberikan otonomi yang lebih besar dan

Perancis akan memberikan bantuan untuk memperbaiki ketimpangan hidup suku kanak dengan masyarakat Perancis.

Sepuluh tahun kemudian tepatnya 5 Mei 1998, PM Perancis Jospin menandatangani *Noumea Accord* yang disetujui oleh 72% masyarakat melalui referendum tanggal 8 November 1998. Perjanjian ini mengatur bahwa New Caledonia berubah status dari wilayah luar negeri Perancis menjadi wilayah "overseas" atau "collective" dalam konstitusi Perancis. Perjanjian ini memberikan otonomi yang lebih besar sehingga New Caledonia mengubah nama, bendera, dan lagunya yang menunjukkan identitas suku Kanak.

Sumber Pendapatan terbesar dari Negara ini adalah Nikel yang menyumbang 90% pendapatan ekspor. New Caledonia merupakan Negara ketiga penghasil nikel terbesar di dunia.

Berdasarkan *Noumea Accord*, New Caledonia menjadi representasi Perancis di Uni Eropa dan Pasifik. Pada tahun 1999 Kaledonia Baru menjadi pengamat dari Forum Kepulauan Pasifik, dan mencapai keanggotaan Asosiasi pada tahun 2006.

Kemungkinan otonomi yang diberikan kepada New Caledonia hanya bertahan sampai 2018 sesuai yang diatur dalam *Noumea Accord*. Dua kemungkinan besar yang akan terjadi pada saat 2018, pertama otonomi yang diberikan akan dicabut kembali dan kedua akan diberikan kebebasan penuh.

French Polynesia

Tahun 1946 koloni ini menjadi Overseas Territory Perancis, dan Majelis Teritorial pun dibentuk untuk mengatur hubungan dalam negeri. Akhir tahun 1940-an gerakan kemerdekaan berkejolak di wilayah tersebut. Dalam referendum yang diadakan di tahun 1958, para pemilih memutuskan untuk tetap menjadi wilayah teritori Perancis daripada harus merdeka dan kehilangan bantuan ekonomi dari Perancis.

Warga Polinesia Perancis merupakan warga negara Perancis, namun untuk urusan hubungan dalam negeri tetap diurus oleh pemerintahan dalam negeri melalui Majelis teritorial terpilih. Di tahun 1977, pemerintah Perancis mengeluarkan undang-undang demi meningkatkan derajat otonomi lokal di Polinesia Perancis, sementara undang-undang yang diberlakukan di tahun 1984, 1987 dan 1990 telah meningkatkan otonomi pemerintahan wilayah teritori di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintahan Perancis bertanggung jawab atas bidang pertahanan, hubungan luar negeri dan peradilan di Polinesia Perancis. Presiden Perancis merupakan kepala negaranya, yang diwakili oleh High Commissioner.

Sebagai wilayah seberang lautan Perancis, pemerintah lokal Polinesia Perancis tidak memiliki kewenangan untuk mengatur masalah peradilan,

pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, di Polinesia Perancis tidak terdapat kekuasaan Yudikatif. Otoritas yudisial tetap dikuasai oleh Presiden Perancis. Baik struktur peradilan, maupun pekerjaannya ialah bagian dari sistem Yudisial Perancis. Polinesia Perancis sendiri memiliki berbagai tingkatan pengadilan, termasuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.

Pemerintah Polinesia Perancis mengatur hampir seluruh hubungan dalam negeri, termasuk peraturan penangkapan ikan, pertambangan dan kegiatan pelayaran; komunikasi dan penyiaran; perpajakan; pendidikan; dan juga kesehatan, dimana sistem pelayanan kesehatan Polinesia Perancis merupakan yang terbaik di kepulauan Pasifik, yang sebagian besar dananya didapatkan dari bantuan Perancis. Majelis memilih seorang Presiden Teritori, yang menjadi kepala pemerintahan teritorial. Presiden Teritori menunjuk menteri-menteri dalam kabinetnya.

Ekonomi dari polinesia perancis sangat bergantung pada bantuan ekonomi dari perancis, bantuan ekonomi datang untuk memberikan insentif bagi sektor budidaya mutiara hitam, yang menjadi produk ekspor utama, produk ini membawa 50 % dari total keseluruhan pendapatan ekspor.

Jumlah impor Polinesia Perancis beberapa kali lebih besar dari jumlah ekspornya. Selain produk makanan, jumlah barang impor terbesar yaitu produk mesin dan petrolium. Produk ekspor lainnya termasuk kelapa, induk mutiara, dan vanila. Partner perdagangan yang utama, baik impor maupun ekspor adalah Perancis, diikuti oleh AS dan Australia.

Sejak tahun 1966 Perancis memulai program tes nuklirnya di pulau-pulau tak berpenghuni di kepulauan Tuamotu, yang kemudian memunculkan peningkatan fasilitas dalam jumlah yang besar. Pertumbuhan pariwisata dan tes nuklir mengubah bentuk dasar ekonomi Polinesia Perancis dari pertanian sebagai sumber penghidupan utama menjadi jasa dan pelayanan, yang berakibat meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri.

Uji coba Nuklir kembali dilanjutkan ditahun 1995. Uji coba kali ini memercikkan api yang mengakibatkan kekacauan dalam skala besar, yang menghancurkan distrik bisnis di Papeete, bandara, dan fasilitas-fasilitas turisme dan mengakibatkan kemerosotan yang berkelanjutan di bidang pariwisata. Walaupun pihak-pihak yang terkait telah berjanji akan menanggung akibat dari kecerobohan tes nuklir, namun banyak pemuda pengangguran yang dipenuhi oleh rasa kecewa karena tidak memiliki pekerjaan memicu terjadinya huru-hara dengan tes nuklir sebagai dalih untuk melepaskan kekesalan mereka.

Di bulan Maret 1996 pemerintah Perancis menandatangani Traktat Zona Bebas Nuklir Pasifik selatan, yang melarang uji coba nuklir di daeah tersebut. Penghentian uji coba menakibatkan jumlah pengangguran yang besar, namun Perancis berjanji untuk memberikan bantuan ekonomi dalam jumlah yang besar untuk membantu kebangkitan ekonomi Polinesia Perancis. Bulan maret 2009,

pemerintah Perancis memberlakukan Undang-Undang untuk memberikan kompensasi bagi pekerja pada lokasi persenjataan nuklir Perancis.

Sebuah pengadilan di French Polynesia mulai mendengar keluhan dari mantan pekerja di lokasi tes senjata nuklir Perancis. Kasus yang didengar pertama kali berhubungan dengan pengujian nuklir di Mururoa dan Fangataufa yang berdampak pada kesehatan penduduk menjadi buruk. Delapan kasus telah diajukan, meskipun lima dari pekerja telah meninggal karena terkena penyakit dari radiasi nuklir yang ditimbulkan.

Berdasarkan pidato Presiden French Polynesia, Gaston Tong Sang, bahwa French Polynesia saat ini tengah berada pada krisis ekonomi. Untuk memulihkan perekonomian, pemerintah mengambil kebijakan untuk bergantung pada investasi publik dan dukungan inisiatif swasta. Pemerintah terus mendukung proyek-proyek penciptaan lapangan kerja.

Presiden French Polynesia, Tong Sang berpartisipasi pada pertemuan Komite Pengarah Dana dan Kerjasama Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasifik. Dirumuskan 120 proyek-proyek kerjasama regional oleh Sekretariat Tetap Pasifik. Dana kontribusi untuk tindakan kerjasama Pasifik Regional dari Perancis dan masyarakat luar negeri di Pasifik memberikan kontribusi untuk integrasi regional Kaledonia Baru, French Polynesia dan Wallis & Futuna.

Wallis and Futuna

Wallis and Futuna merupakan negara teritori asing dari Perancis sejak tahun 1961. Negara ini terletak di Laut Pasifik Selatan, berada diantara New Zealand dan Hawaii. Wallis and Futuna terdiri dari 3 pulau besar yang merupakan 3 kerajaan kecil yaitu Alo, Sigave, dan Wallis. Meskipun berada di negara itu sendiri namun ketiga kerajaan tersebut tetap berada di bawah pemerintahan Perancis.

Negara ini termasuk negara vulkanis dimana terdapat 3 gunung di pulau besarnya dan satu yang berada di pulau Alofi merupakan gunung aktif sehingga tidak ada yang mendiami pulau tersebut secara permanen karena kurangnya sumber daya terutama air.

Awalnya Wallis and Futuna merupakan 2 area yang berbeda sebelum diambil alih oleh Perancis. Wallis sendiri ditemukan oleh semorang penjelajah Inggris bernama Samuel Wallis di abad ke 18. Wallis awalnya didiami oleh suku Tonga, Futuna ditemukan oleh penjelajah dari Belanda pada abad ke 15. Namun Perancis lah yang kemudian mengambil alih Wallis and Futuna dengan mendeklarasikan protektorat di tahun 1842 dan mengambil alih secara resmi pada tahun 1886 dan 1888.

Perekonomian di Wallis and Futuna bergantung pada pertanian, yaitu taro, keladi, kentang, dan umbi – umbian lainnya serta peternakan yang kebanyakan adalah ayam dan babi. Namun teritori ini tidak dapat memproduksi

cukup makanan untuk penduduknya saja sehingga 1/3 dari impornya merupakan bahan makanan. Bahan baku untuk pembangunan merupakan impor utama dari Wallis and Futuna. Tidak ada sama sekali ekspor dari Wallis and Futuna kecuali pengiriman makanan untuk keluarga mereka yang bersekolah atau kerja di New Caledonia.

Masalah perekonomian terbesarnya adalah angka pengangguran yang cukup tinggi, dimana kira – kira hanya sekitar 1800 orang dari 15000 penduduk yang bekerja, baik itu di sektor pemerintahan dan swasta. Hal ini membuat Wallis and Futuna amat bergantung pada bantuan sosial dari Perancis. Pemerintah Perancis langsung mendanai banyak pelayanan (layanan kesehatan, edukasi, dan gaji pegawai pemerintahan).

Badan pemerintahan Wallis and Futuna terbagi 3, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Badan Eksekutif terdiri dari kepala negara yaitu Presiden Perancis yang direpresentasikan oleh seorang High Administrator, kepala pemerintahannya yang merupakan pemimpin dari seluruh pulau teritori (pemimpin Territorial Assembly), dan sebuah kabinet yang di dalamnya terdapat Badan Teritori yang terdiri dari 3 raja dan 3 anggota yang dipilih oleh High Administrator berdasarkan petunjuk dari Territorial Assembly. High Administrator ditunjuk oleh Presiden Perancis berdasarkan petunjuk dari Kementrian Perancis, dan pemimpin Territorial Assembly dipilih oleh anggota Assembly.

Dikarenakan pulau – pulau di dalamnya merupakan pulau baru sehingga kekayaan bawah lautnya kurang ditambah lagi meningkatnya temperatur air laut sehingga terjadi coral bleaching. Hal inilah yang membuat Wallis and Futuna tidak memiliki pariwisata untuk dijual layaknya negara Pasifik Barat Daya lainnya. Kemudian seringnya terjadi erosi sehingga pepohonan di Wallis and Futuna pun berkurang.

Upaya yang dilakukan dari Wallis and Futuna serta negara induknya untuk memperjuangkan keberadaan mereka adalah dengan bergabung di banyak organisasi lingkungan untuk menyatakan betapa pentingnya menjaga lingkungan sehingga dampak dari perubahan iklim dapat berkurang. Dilakukan juga migrasi masyarakat pulau – pulau kecil yang terancam dari Wallis and Futuna ke New Caledonia.

Amerika Serikat

Amerika Serikat melakukan negosiasi kemerdekaan di wilayah koloninya di Pasifik Selatan sampai lebih dari 20 tahun, yaitu dari tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Kebijakan dekolonisasi AS di wilayah Pasifik Selatan juga terkait dengan kepentingan strategisnya. Seperti pangkalan angkatan laut

AS, yang telah menjadi bagian dari AS sejak tahun 1950, dan pertimbangan pertahanan dan keamanan lainnya yang dapat kita lihat pada proses kemerdekaan Kepulauan Marshall dan FSM (gabungan pulau Yap, Truk, Ponape, dan Kosrae) yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pelepasan hak-hak mereka untuk mengendalikan masalah pertahanan. Sebagai gantinya, hak tersebut secara penuh diberikan kepada AS yaitu dengan memiliki pangkalan-pangkalan militer, termasuk penyimpanan senjata nuklir

American Samoa

Persaingan Internasional pada abad ke-19 ditentukan dengan adanya perjanjian dimana Jerman dan US membagi Samoa (1899). US secara formal mengambil hak atas bagiannya, yaitu pulau yang lebih kecil disebelah timur dengan pelabuhan yang unggul, Pago Pago.

Sistem pemerintahan American Samoa juga berkaitan erat dengan Negara induknya, Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan kepala Negara yang dipimpin oleh President Barack Obama. Akan tetapi, untuk kepala pemerintahan masih menjadi hak eksklusif dari rakyat Samoa untuk menentukan.

Tidak terdapat divisi administrasi yang resmi yang ditetapkan oleh US di American Samoa. American Samoa di administrasi oleh Office of Insular Affairs US Department of the Interior. Dibawah konstitusi US, penduduk territorial yang unincorporated, seperti American Samoa, tidak diperkenankan untuk memilih di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden US, tetapi, mereka dapat memilih pada Democratic and Republican presidential primary elections; gubernur dan letnan terpilih mengambil suara terbanyak untuk masa jabatan 4 tahun.

Kegiatan ekonomi sangat terhubung dengan US, dimana American Samoa mengatur sebagian besar perdagangannya. Penangkapan ikan tuna dan pabrik ikan tuna adalah tulang punggung utama di sector ini, dengan ikan tuna dalam kaleng yang merupakan ekspor utamanya. 2 pabrik tuna besar telah mengambil ali 80% dari mata pencaharian di American Samoa. Selain itu, sector tourism juga menjadi salah satu faktor pendukung yang besar, dikarenakan keindahan hutan dan pegunungan, yang disebut-sebut selagai yang terindah di bagian selatan Pasifik.

Isu terbaru adalah susahnya mendapatkan sumber air bersih alami di American Samoa. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara beberapa tahun belakangan ini untuk memberluar daerah perairannya dan daerah pembuatan pipa untuk mendukung adanya sumber air bersih.

Guam

Setelah Spanyol menyerahkan Guam kepada US pada 1898., pergolakan kembali terjadi dengan direbutnya Guam oleh Jepang pada 1941, yang kemudian diambil kembali oleh US pada tahun 1944 . *Eventually*, Instalasi

militer di Guam merupakan salah satu basis US yang strategis dan penting di Pasifik.

Sama halnya dengan American Samoa, yang merupakan *territorial unincorporated* dari US, dalam hal politiknya tidak berbeda. Mereka tidak memiliki divisi atau kantor administrasi, melainkan semua kebijakan yang berkaitan dengan politik terhubung dengan US melalui Office of Insular Affairs.

Begitu pula halnya dengan perihal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden US. Guam tidak diperkenankan memilih. Namun, yang memegang sebagai kepala Negara tetap adalah Presiden amerika serikat, sekalipun rakyat guam tidak diperkenankan memilih presidennya. Hanya saja yang dipilih oleh rakyat guam sendiri adalah kepala pemerintahan.

Terdapat juga beberapa *pressure group* , yaitu: Guam Commission on Decolonization; Guam Federation of Teachers' Union; Guam Waterworks Authority Workers; We Are Guahan. *Pressure group* inilah yang menunjukkan partisipasi politik masyarakat Guam terhadap negaranya.

Pada sektor ekonomi sangat bergantung pada anggaran pertahanan US, tourism, dan servis lainnya. Total gaji dan bantuan US dan pengeluaran pengadaan diperkirakan sebesar \$1,6 billion pada 2010. Selama lebih dari 30 tahun, sektor pariwisata yang didukung oleh kehidupan liar bawah laut, telah tumbuh menjadi sumber pemasukan terbesar setelah dana pertahanan nasional. Selain itu terdapat juga sector perikanan, namun kurang dapat dikembangkan.

Mariana Utara

Kepulauan Mariana Utara awalnya ditemukan dalam penjelejan laut dengan menggunakan kano oleh orang – orang dari Indonesia dan Filipina yang kemudian menjadi penduduk lokal di kepulauan ini yang bernama Chamorro. Setelah itu, Ferdinand Magellan, seorang penjelajah dari Spanyol, menemukan kepulauan ini dalam ekspedisinya mencari rempah – rempah dan emas. 147 tahun kemudian, Fr. Diego Luis de San Vitores, tiba di kepulauan tersebut dengan misi menyebarkan ajaran Katolik. Di sinilah titik kolonisasi dari Spanyol. Nama Mariana diambil dari nama Ratu Spanyol pada saat itu, Queen Maria Ana.

Pada tahun 1899, Jerman membeli Kepulauan Mariana Utara dari Spanyol dan mendudukinya hingga tahun 1914 sebelum Perang Dunia I dimulai. Pada saat itu, Jepang kemudian mengambil alih kepulauan itu melalui sebuah perjanjian rahasia dengan UK demi menjaga perdamaian di Asia selama perang. Kemudian pada tahun 1944, Amerika Serikat mengambil alih kepulauan ini. Penduduk lokal kepulauan memilih untuk bergabung dengan

Amerika Serikat dan bergabung menjadi negara persemakmuran pada bulan Januari 1978.

Perekonomian Kepulauan Mariana Utara bertumpu pada pariwisata, selain dari bantuan ekonomi dari negara induknya, Amerika Serikat. Industri pariwisatanya yang besar sehingga membuat penduduk yang menganggur berkurang. Pengunjung kepulauan ini kebanyakan berasal dari Jepang dan Korea. Pantainya yang jernih dan berpasir putih, peninggalan sejarah Perang Dunia II, batu karang, festival budaya lokal, dan hiburan modern seperti pusat belanja, hiburan outdoor dan lain sebagainya menjadi daya tarik yang tinggi bagi para turis untuk mengunjungi kepulauan ini.

Sumber ekonomi lainnya adalah pertanian dan industri garmen. Hasil dari pertaniannya antara lain kelapa, tomat dan melon. Untuk industri garmennya sendiri terdapat sebuah kontroversi yaitu meskipun dibuat di dan oleh penduduk Kepulauan Mariana Utara, namun barang – barang tersebut kemudian dilabeli "Made in USA", meskipun pada akhirnya hasil produksinya diekspor ke Amerika Serikat. Perusahaan pakaian Abercrombie & Fitch memproduksi pakaiannya di Kepulauan Mariana Utara dengan biaya yang sangat murah dan kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi.

Badan pemerintahan di Kepulauan Mariana Utara terdiri dari 3 badan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan Eksekutifnya terdiri dari kepala negara, yaitu Presiden Amerika Serikat, kepala pemerintahannya yang merupakan penduduk lokal Kepulauan Mariana Utara adalah Gubernur dan Letnan Gubernur dan kabinet yang terdiri dari 10 kepala departemen yang ditunjuk langsung oleh gubernur sesuai dengan petunjuk dari Senat.

Permasalahan di Kepulauan Mariana Utara antara lain adalah permasalahan tenaga kerja, mulai dari tenaga kerja imigran yang tidak resmi yang kebanyakan berasal dari China hingga praktek – praktek tenaga kerja yang tidak manusiawi hingga menyebabkan terjadinya tindak aborsi oleh pekerja wanita dan prostitusi. Selain itu, ancaman vulkanik yang besar membuat pulau – pulau bagian utara dievakuasi ke pulau – pulau bagian selatan.

Australia

Sekalipun merupakan Negara persemakmuran dari Inggris, tetapi Australia mampu membuktikan *bargaining* nya dengan mengklaim beberapa wilayah di Pasifik Barat Daya (Oceania), Australia tergolong Negara makmur, sebagai negara yang makmur Australia mampu mengayomi Negara-negara satelitnya, salah satunya dengan memberikan bantuan dana sebagai bentuk sokongan atas ekonomi negara-negara koloninya. Tidak sampai di situ saja,

kepulauan cocos dan natal island bahkan cenderung tidak menginginkan kemerdekaan karena berbagai kemudahan yang diberikan sebagai Negara satelit Australia.

Kepulauan Cocos

Pulau ini adalah pulau yang terdiri dari 2 atol dan 27 pulau karang. Pulau ini ditemukan oleh William Keiling 1609, tidak berpenghuni sampai abad 19. Pulau ini kemudian dianeksasi oleh Inggris tahun 1857. Aneksasi ini dibawa oleh Kapten Stephen Grenville Fremantle. Tanggal 9 November pulau ini menjadi salah satu tempat (daerah) Perang Dunia I. tanggal 23 Oktober 1955 ditransfer ke Australia berdasarkan *Cocos (keeling) Island Act 1955*. Ditahun ini juga pulau ini dinyatakan sebagai Taman Nasional Australia.

Cocos Island adalah Negara yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri. Negara ini dikelola oleh Departemen Regional Australia, Pemerintah Lokal, Seni dan Olahraga di Canberra. Sistem hukum di Christmas Island dibawah Gubernur Jenderal Australia. Hukumnya berasal dari hukum Australia. Sumber Pendapatan terbesar dari Negara ini berasal dari pariwisata makanan.

Negara ini masih sangat insten berhubungan dengan Negara Australia, karena pemerintahannya di atur langsung dari Canberra dan hukum yang dipakai adalah hukum Australia.

Natal Island

Negara ini ditemukan dan dinamakan oleh William Mynors pada hari Natal (Christmas Day) pada 1643. Tahun 1875 dilakukan eksplorasi pertama. 6 Juni 1888 dianeksasi oleh Inggris karena menemukan fosfat yang berlimpah di pulau tersebut. Pulau ini sempat menjadi target Jepang. Setelah Perang Dunia II, Pulau ini berada di bawah yurisdiksi koloni Inggris (Singapura). Pulau ini sebagai koloni yang terpisah dari 1 Januari 1958 sampai 1 Oktober 1958 ketika transfer yuridiksi Australia diselesaikan. Transfer ini dilakukan atas permintaan Australia, sehingga Australia harus membayar kompensasi £ 2,9 milyar ke Pemerintah Singapura. Transfer ini menjadikan Christmas Island menjadi Negara territory Australia. Tanggal itu dirayakan pada hari Senin pertama bulan Oktober sebagai *Territory Day*. Hampir dua pertiga dari pulau telah dinyatakan sebagai taman nasional.

Christmas Island merupakan Negara yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri. Negara ini dikelola oleh Departemen Regional Australia, Pemerintah Lokal, Seni dan Olahraga di Canberra. Sistem hukum di Christmas Island dibawah Gubernur Jenderal Australia. Hukumnya berasal dari hukum Australia. Sumber pendapatan ekonomi dari Negara ini adalah fosfat dan sedikit dari pariwisata.

Negara ini masih sangat insten berhubungan dengan Negara Australia, karena pemerintahannya di atur langsung dari Canberra dan hukum yang dipakai adalah hukum Australia.

New Zealand

Dikawasan pasifik barat daya hanya satu Negara yang menjadi daerah luar negeri dari New Zealand, meskipun ditinjau dari segi luas wilayah New Zealand yang tidak cukup luas tetapi dengan ekonominya New Zealand mampu membuat Negara Tokelau di PBD secara sukarela menyerahkan negaranya untuk menjadi Negara protektorat dari New Zealand. Pada kenyataannya, Tokelau masih sangat bergantung secara ekonomi dengan New Zealand, oleh karena itu keputusan untuk dekolonisasi kemudian di urungkan.

Tokelau

Pada mulanya ditempati oleh bangsa Polinesia yang beremigrasi dari pulau-pulau sekelilingnya. Tokelau dulunya dijadikan sebagai tempat perlindungan bangsa Inggris pada 1889. Mereka kemudian di transfer ke administrasi New Zealand pada 1925. Pemungutan suara lalu diadakan pada 2006 dan 2007 untuk mengganti status Tokelau menjadi sebuah teritori bebas.

Merupakan self-administering dari New Zealand. Tokelau dan New Zealand telah menyetujui konsep konstitusi dimana Tokelau menjadi sebuah asosiasi bebas bersama New Zealand. Referendum yang disponsori oleh UN dalam hal self-governance pada Oktober 2007 tidak mencapai 2/3 mayoritas suara untuk perubahan status politik. Sistem pemerintahan di Tokelau tidak mengenal adanya sistem eleksi. Sistem kerajaan, bersifat turun-temurun. Gubernur jendral ditentukan oleh raja; administrator ditentukan oleh Menteri Pertahanan dan Pertukaran Luar Negeri di New Zealand; dan kepala pemerintahan ditentukan oleh Council of Faipule atau Kabinet Tokelau.

Ukuran Tokelau yang kecil (hanya 3 desa), terisolasi, dan kurangnya sumber daya alam, sangat mempengaruhi terhambatnya perkembangan ekonomi dan membatasi pertumbuhan sektor pertanian untuk menjadi sumber pendapatan. Masyarakatnya sangat bergantung kepada bantuan dari New Zealand – sekitar \$10 million setiap tahunnya pada tahun 2008 dan 2009 – untuk melayani kebutuhan servis public. Bantuan New Zealand mencapai 80% terhadap budget pemerintah yang memprihatinkan. Sebuah dana perwalian internasional senilai \$32 million, didirikan pada 2004 untuk mendukung pertumbuhan sumber ekonomi independen Tokelau. Sumber utama untuk menghasilkan pendapatan yaitu berasal dari penjualan kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan), perangkai, koin-koin souvenir, dan kerajinan tangan. Uang juga dikirim dari keluarga di New Zealand kepada masyarakat di Tokelau.

Isu terbaru adalah terbatasnya sumber daya alam dan populasi penduduk yang sangat padat, menyebabkan timbulnya banyak keinginan masyarakat untuk beremigrasi ke New Zealand.

Kesimpulan

Maraknya dekolonisasi di berbagai belahan dunia ternyata tidak cukup signifikan untuk menggerakkan masyarakat pasifik barat daya agar menuntut kemerdekaan atas Negaranya masing-masing. Tidak sedikit Negara di kawasan ini yang kemudian mendapatkan kemerdekaannya, tetapi tidak sedikit pula yang meminta agar tetap menjadi proktektorat dari beberapa Negara induk (USA,UK,Perancis,New Zealand,Chili,etc) , hal ini di sebabkan oleh :

(1) Bentuk wilayah yang kepulauan, sehingga masyarakat menjadi skeptis untuk melakukan pergerakan melawan penjajah, sementara kekuatan Negara induk dalam hal militer dan ekonomi sudah cukup stabil. Di tinjau dari sisi Geografi Politik, bentuk wilayah kepulauan dapat dengan mudah diserang dan ditaklukan. Terlebih, jumlah populasi yang sedikit. Sehingga, banyak Negara kepulauan di PBD memutuskan untuk ikut menjadi satelit bagi Negara-negara induk di dunia. (2) Ketergantungan ekonomi, salah satu yang membuat Tokelau dan beberapa Negara proktektorat di PBD masih enggan lepas dari Negara induknya adalah karena bantuan serta suntikan dana yang diberikan oleh Negara induk dalam rangka mengembangkan potensi *tourism* dan memenuhi kebutuhan dasar di dalam negeri. Selain itu *source of money* yang diberikan sebagai Negara satelit cukup bervariasi, misalnya karena Guam merupakan Negara proktektorat dari amerika serikat, maka cukup mudah untuk mengalirkan dana dari World Bank dan IMF.

Intinya, hingga saat ini peranan Negara induk terhadap Negara koloninya masih sangat jelas terasa, cukup banyak kemudahan yang diberikan, baik dari segi regulasi sistem politik pemerintahan yang di aturkan oleh Negara induk, kebijakan otonomi (memilih gubernur, mengembangkan sektor pariwisata) Negara proktektorat yang di berikan oleh Negara induk. Serta suntikan finansial yang menjadi salah satu alasan kuat, mengapa Negara-negara proktektorat di PBD memilih untuk tidak merdeka.

Referensi

Dobell, Graeme. (2007). *the South Pacific : Diplomatic*

Potter, E.B. [Chester W. Nimitz](#) (1960). *Sea Power*. Prentice-Hall.

2011 Annual Report of Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme

www.everyculture.com/To-Z/Foreign-teritory-South-Pacific.html#b

www.dfat.gov.au/geo/wallis_futuna/wallisfutuna_brief.html

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wf.html#top



Dampak Keputusan Arbitrase Internasional mengenai Laut Cina Selatan terhadap Hubungan Internasional di Kawasan Asia Tenggara

Emil Radhiansyah, M.Si & Dr. Tatok D. Sudiarto, MIB

Universitas Paramadina

emil.radhiansyah@paramadina.ac.id, tatok.sudiarto@paramadina.ac.id

Abstract

Menghangatnya isu Laut Cina Selatan menjadi perhatian dunia internasional. Amerika Serikat misalnya menekankan bahwa pentingnya *non-disclaimer* terhadap kawasan tersebut karena anggapan LCS sebagai suatu laut lepas yang berpengaruh pada kebebasan navigasi. Kebijakan Amerika dalam *US Pivot to Asia* digadang-gadang sebagai bentuk perhatian AS untuk turut campur lebih dalam pada konflik LCS, salah satunya adalah kerjasama militer dengan Filipina dan penempatan 2500 pasukan marinirnya di Australia. Indonesia sebagai negara yang dipandang memiliki kekuatan untuk melunakkan Tiongkok dan menyatukan suara negara-negara Asia Tenggara dalam ASEAN di dorong untuk lebih aktif, walaupun Indonesia secara tidak langsung memiliki permasalahan yang sama terkait klaim Tiongkok atas laut natuna.

Tulisan ini mencoba menelaah pola hubungan yang terjadi di Asia Tenggara Pasca Keputusan Arbitrase Internasional pada Laut Cina Selatan melalui kebijakan luar negeri yang tertuang dalam bentuk pernyataan bersama ataupun sikap dari masing-masing negara yang terlibat dalam konflik. Tulisan ini juga mencoba melihat peran Indonesia secara konstruktif untuk turut terlibat aktif menyelesaikan masalah.

Kata Kunci:

Laut Cina Selatan, ASEAN, Kebijakan Luar Negeri, Konstruktifis

Klaim Para Pihak atas Laut China Selatan

Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut yang menghubungkan negara-negara asia tenggara dengan asia timur antara lain Tiongkok. Pengakuan terhadap nama Laut Cina Selatan berbeda-beda oleh negara-negara asia tenggara. Philipina memberikan nama Laut Luzon, Vietnam menyebutnya sebagai Nan Hai (Laut Selatan), Indonesia yang baru-baru ini mengesahkannya menjadi Laut Natuna yang merupakan laut bagian dari kepulauan natuna, walaupun secara resmi / internasional pemberian nama laut

ini adalah *South China Sea* (Laut Cina Selatan – Indonesia akronim). Permasalahan terhadap wilayah ini timbul setelah munculnya Klaim oleh Tiongkok dibawah kekuasaan Kuomintang terhadap wilayah ini pada tahun 1947 dengan mengeluarkan sebuah peta yang memasukkan wilayah laut tersebut kedalam peta nasionalnya melalui sebuah kebijakan *Dash-Lines*, kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Tiongkok Komunis dengan memasukkan Taiwan yang dianggap sebagai provinsi yang membangkang sebagai bagian dari negara Republik Rakyat Cina (RRC/ People's Republic of China, PRC). Xue Li (CASS, *Chinese Academic of Social Sciences*) dalam wawancara dengan *The Diplomat* (Huang Nan, 2016) menyatakan bahwa ada empat interpretasi yang menjadi pandangan terhadap klaim *dash-line* ini, yaitu

1. interpretasi terhadap Garis Demarkasi Maritim (*Demarcation Of Maritime Borders*),

interpretasi ini melihat bahwa Garis Demarkasi Maritim merupakan perpanjangan dari wilayah kedaulatan yang ada di wilayah laut, berarti seluruh wilayah Laut Cina Selatan merupakan sepenuhnya berada dalam kedaulatan total Tiongkok.

2. Interpretasi atas kedaulatan wilayah daratan (*sovereignty over islands*)

Interpretasi ini melihat bahwa seluruh wilayah daratan yang berada di dalam garis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Tiongkok dan wilayah laut dalam batasan 12 mil laut merupakan wilayah laut territorial Tiongkok, sementara diluarnya merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Tiongkok.

3. Interpretasi atas hak sejarah

Interpretasi ini melihat bahwa wilayah daratan yang masuk dalam garis merupakan kepemilikan Tiongkok beserta wilayah laut dalam batasan 12 mil laut, sementara wilayah laut di luarnya merupakan hak sejarah Tiongkok, namun tidak ada definisi yang jelas atas interpretasi ini

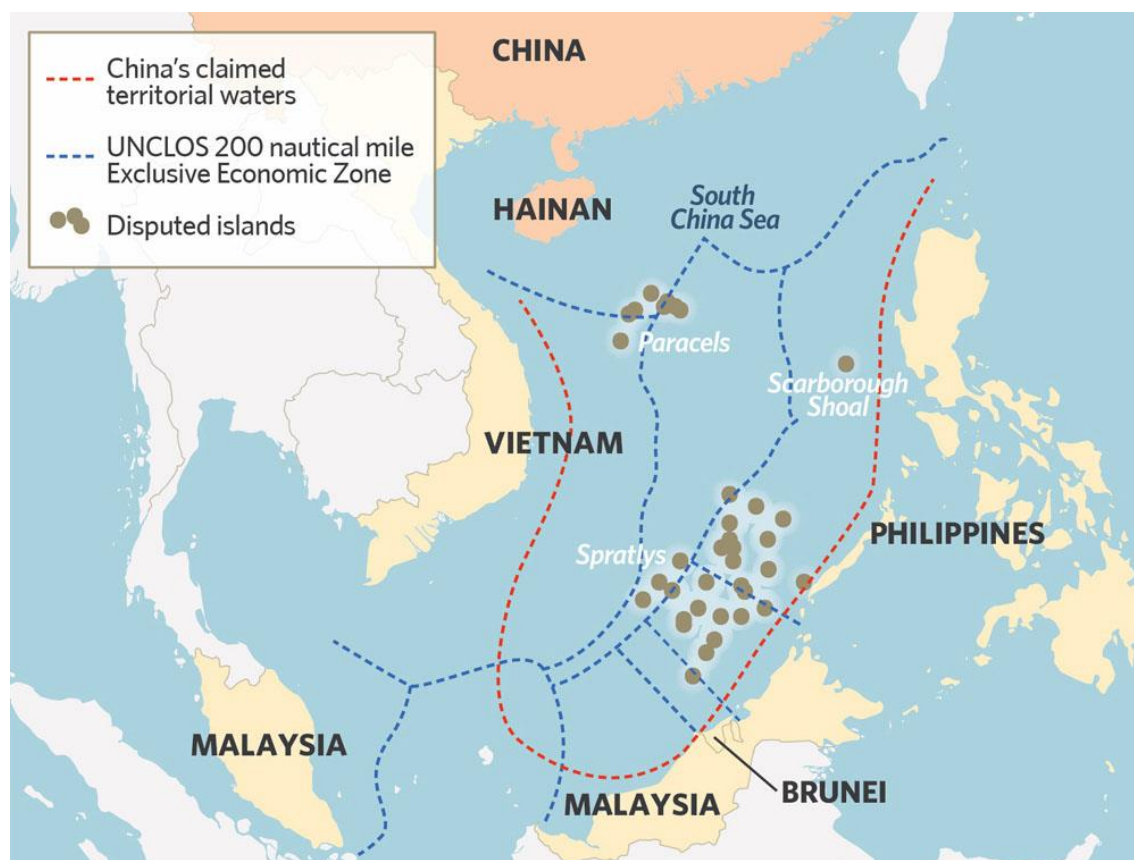
4. Interpretasi atas sejarah kelautan

Menurut Xue Li interpretasi ini hanya dilakukan oleh Taiwan sebagai sebuah kebijakan mengenai Laut China Selatan yang dikeluarkan pada tahun 1993. Klaim sejarah kelautan dinilai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan laut dalam (*internal waters*) namun lebih rendah.

Dalam klaimnya terhadap Laut China Selatan Tiongkok mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan hak sejarah yang tertuang dalam Undang Undang Tahun 1992 mengenai posisi Republik Rakyat Tiongkok dalam Wilayah Teritorial Laut dan Zona Tambahan. Kebijakan ini berlandaskan pada klaim Tiongkok yang menyebutkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah

pancing nelayan tradisional yang berasal dari provinsi Hainan sejak 2000 tahun lalu (BBC Indonesia, 2011).

Gambar 1. Peta Wilayah Laut China Selatan



Sumber: TibetanReview.net (30 Nov 2015), China Willing to nuke US to Effectuate South China Sea Claims? Diunduh dari <http://www.tibetanreview.net/wp-content/uploads/2015/12/South-China-Sea-1.jpg>; pada 18 November 2016.

Laut China Selatan melingkupi wilayah daratan dan karang laut yaitu Spratly dan Paracel. Dengan dikeluarkannya kebijakan *nine dash line* oleh Tiongkok atas dasar Hak Sejarah menyebabkan kedua wilayah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tiongkok. Hal ini disanggah oleh Vietnam, bahwa kedua wilayah tersebut merupakan hak kedaulatan Vietnam sejak abad ke-17. Kepulauan Spratly dan Paracel yang dalam Bahasa Vietnam disebut dengan Hoang Sa dan Truong Sa merupakan milik Vietnam yang dikuasai oleh Perancis pada masa Kolonial dan Vietnam Selatan pada masa Perang Dingin, kedua pulau tersebut secara tidak sah di kuasai oleh Tiongkok (PRC / Peoples Republic of China) pada saat perang Vietnam (Anthoni, 2016). Philipina merupakan salah satu pihak yang juga mengklaim bahwa sebagian Pulau di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya. Terdapat empat wilayah yang di klaim oleh Philipina di Laut China Selatan yang merupakan bagian dari kedaulatan Philipina yaitu Dangklan Scarborough

(Scarborough Shoal), Dangkan Thomas Kedua (Second Thomas Shoal), Tepian Reed (Reed Bank), dan sejumlah karang pada rangkaian kepulauan spratley (Kalayaan Island Groups/KIG) (Rosen, 2014). Klaim tersebut didasarkan pada konsesi yang diberikan oleh Spanyol kepada Amerika Serikat sebagai akibat kekalahan dalam perang Spanyol –Amerika Serikat tahun 1898 dan dinyatakan dalam Perjanjian Paris (The Treaty of Paris). Traktat tersebut diperkuat oleh Senat Philipina pada tahun 1932 dalam Undang Undang No. 4003 yang mengklasifikasikan bahwa semua wilayah air yang disebutkan dalam traktat adalah milik Philipina untuk kepentingan pengaturan penangkapan ikan, penegakan hukum, pertahanan dan pengembangan sumber daya. Undang undang ini diakui secara *de facto* oleh Amerika Serikat pada tahun berikutnya 1933 dan secara *de jure* pada tahun 1946 sebagai bentuk pengakuan atas kemerdekaan penuh terhadap Philipina. Dalam beberapa periode waktu pemerintah philipina mengeluarkan kebijakan baru mengenai klaimnya atas wilayah Laut China Selatan yang mengundang pertanyaan masyarakat internasional mengenai jalur bebas masuk internasional (*international passage*) yang berada pada Wilayah Laut Dalam Philipina, yang pada akhirnya pemerintah Philipina mengakui adanya jalur tersebut dan mengikuti ketentuan pada UNCLOS 1982.

Malaysia merupakan negara yang memiliki dua wilayah terpisah yaitu semenanjung Malaysia (*Peninsular Malaysia*) yang terdiri atas 11 negara bagian dan Malaysia timur (*East Malaysia*) dengan dua negara bagian yang semuanya tergabung dalam negara federal Malaysia. Kedua wilayah tersebut terpisah oleh 640 mil laut-Laut China Selatan. Permasalahan timbul antara Malaysia dan Tiongkok atas Laut China Selatan atas klaim Malaysia terhadap beberapa pulau, dangkan dan wilayah karang yang masuk dalam kebijakan *nine dash line* Tiongkok. Malaysia menandatangani perjanjian UNCLOS 1982 dan meratifikasinya pada 14 Oktober 1996 (Roach, 2014). Klaim Malaysia atas Laut China Selatan terletak pada laut dangkal di selatan kepulauan Spratley dan klaimnya atas wilayah zona ekonomi eksklusif (*economic exclusive zone*) yang membentang dari wilayah Sabah di Pulau Borneo Utara antara lain Swallow Reef, Erica Reef, Investigator Shoal, Mariveles Reef, Dallas Reef, Ardaiser Reef (keenam wilayah ini merupakan wilayah yang diklaim oleh Malaysia yang juga di klaim oleh negara lain). Commodore Reef/Rizal Reef, Amboyna Cay, Barque Canada Reef, James Shoal, North Luconia Shoal dan South Luconia Shoal (keenam wilayah ini diklaim oleh Malaysia namun di duduki oleh Philipina).

Salah satu negara asia tenggara yang juga meng-klaim wilayah di Laut China Selatan adalah Brunei Darussalam yang juga merupakan salah satu

pihak yang menandatangani konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang di ratifikasi pada 11 Mei 1996. Klaim Brunei adalah 12 mil laut territorial, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Namun dalam pihak yang bersengketa sangat sedikit sekali informasi mengenai klaim Brunei ataupun nota protes Brunei terhadap Tiongkok, permasalahan mendasar Brunei pada klaim adalah terhadap klaim Malaysia atas batas-batas wilayah laut territorial (World Politic Review, 2016) .

Keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional atas Laut China Selatan

Masuknya permasalahan Laut China Selatan dalam Mahkamah Arbitrase Internasional adalah atas inisiatif Philipina yang dilayangkan pada 23 Januari 2013 atas dasar *Notification and Statement of Claim* (Pemberitahuan dan Pernyataan Klaim) sebagai pihak-pihak yang menandatangani UNCLOS dan saling bersengketa. Hal ini dilakukan oleh Philipina setelah terjadinya beberapa kali insiden yang melibatkan masing-masing angkatan bersenjata (Batongbacal). Pada Januari dan Februari 2013, pemerintah Philipina melayangkan Nota Protes terhadap Tiongkok atas perlakuan Kapal Tiongkok yang menembakkan Kanon Air terhadap kapal nelayan Philipina, pada Maret 2013 Kapal Pengintai Tiongkok memblokir Kapal Laut Angkatan Bersenjata Philipina memasuki perairan Scond Thomas Shoal untuk melakukan rotasi pasukan dan pengisian suplai terhadap pos angkatan bersenjata Philipina di wilayah tersebut. Konflik ini terus berlangsung hingga tahun 2014 dimana pada bulan Mei Otoritas Philipina menangkap sekelompok nelayan Philipina dan Tiongkok yang terlibat perdagangan 500 satwa terlarang dan dilindungi pada wilayah Half-Moon Shoal yang merupakan wilayah terdekat dengan territorial Philipina yang juga di klaim oleh Tiongkok dalam kebijakan *nine-dash line*-nya, Tiongkok menuntut pemerintah Philipina untuk membebaskan nelayan asal Tiongkok tersebut.

Upaya penyelesaian atas sengketa Laut China Selatan telah dilakukan oleh ASEAN selaku organisasi regional yang memayungi kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara dengan melihat kenyataan bahwa empat dari negara yang terlibat sengketa merupakan anggota dari ASEAN. Kompleksitas yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa terlihat adanya saling tumpang tindih klaim yang dilayangkan oleh masing-masing pihak. Keengganan Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional ataupun melalui pertemuan multilateral, Tiongkok lebih memilih untuk menyelesaikannya secara bilateral dengan negara-negara yang bersengketa, hal ini karena anggapan Tiongkok yang melihat bahwa penyelesaian multilateral di bawah forum organisasi regional seperti ASEAN dianggap

menyalahi prinsip penyelesaian sengketa itu sendiri dimana tidak setiap pihak pada forum tersebut adalah pihak yang bersengketa (Luhulima, 2016). Selaku organisasi regional di wilayah asia tenggara, ASEAN tetap mencoba untuk menenggarai sengketa tersebut dengan Tiongkok. Philipina sebagai pihak yang bersengketa mencoba meyakinkan negara-negara ASEAN untuk menerapkan suatu Kode Etik (*Code of Conduct*) untuk mencegah gangguan Tiongkok lebih jauh. Melihat perkembangan sengketa, ASEAN secara aktif melobi Tiongkok untuk menciptakan suatu dialog yang komprehensif agar tercipta suatu bentuk stabilitas regional atas dasar rasa saling percaya antar pihak yang berkonflik. Tahun 2002 dicapai suatu kesepakatan politik yang tidak mengikat (*non-binding political statement*) antara ASEAN dan Tiongkok yang dikenal dengan *the Declaration on Conduct of parties* (Thayer, 2013) yaitu suatu pernyataan bersama para pihak untuk bersepakat mengenai sepuluh hal dengan tiga capaian utama yaitu (Luhulima, 2016)

1. *To promote confidence building-measures*
2. *To foster cooperation in maritime affairs*
3. *To prepare a formal and binding code of conduct*

Dalam pernyataan bersama tersebut diharapkan masing-masing pihak dapat membangun rasa saling percaya dengan menggelar beragam dialog dan saling bertukar pandangan diantara pejabat pertahanan dan perwira militer dalam bentuk bertukar informasi. Selain itu para pihak juga saling bekerjasama dalam bidang kemaritiman antara lain pertolongan pada kecelakaan laut, penelitian bersama dibidang maritim, memerangi kejahatan lintas negara yang terjadi di laut seperti perdagangan manusia, perompakan dan pembajakan di laut, perdagangan obat-obatan terlarang, serta perlindungan alam laut dan biotanya dan kerjasama dalam keselamatan navigasi dan komunikasi di laut (ASEAN, 2012).

Walaupun telah tercapai suatu deklarasi kesepakatan namun tidak dengan mudah tercapai suatu kesepakatan kode etik dalam menyelesaikan masalah, salah satunya adalah klausul yang terdapat dalam Piagam ASEAN Bab 1, Artikel 1, Paragraf ke 15 yang menyatakan "... *ASEAN has to maintain the centrality and proactive role of ASEAN as the primary driving force in its relations and cooperation with its external partners in a regional architecture that is open, transparent and inclusive*" (Luhulima, 2016). Seperti yang telah dituliskan sebelumnya bahwa sentralitas ASEAN dalam penyelesaian konflik tidak dapat diterima oleh Tiongkok karena ASEAN bukanlah pihak yang berkepentingan namun adalah Tiongkok yang menjadi aktor sentral, sehingga setiap konsultasi penyelesaian masalah haruslah dengan Tiongkok secara

langsung. Kesulitan dalam tercapainya *code of Conduct* (CoC) adalah bahwa Tiongkok menginginkan implementasi dari *Declaration of Conduct* (DoC) terlebih dahulu dan hanya akan bernegosiasi dengan ASEAN pada "Waktu yang Tepat" (*at an "Appropriate Timing"*) atau pada "Kondisi yang Tepat" (*when "appropriate Conditions"*).

ASEAN sebagai suatu entitas dimana negara-negara anggota bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui suatu forum bersama menghadapi kendala dalam menentukan rumusan klausul dalam CoC. Philipina pada tahun 2012 menyerahkan suatu *draft* CoC dengan judul *the Philippines Code of Conduct*, walaupun diterima dalam diskusi Pejabat Senior ASEAN (ASEAN Senior Official Meeting) namun tidak dengan Tiongkok. Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN Summit) ke-20 tahun 2012 di Pnom Penh, Kamboja, selaku Ketua ASEAN memaksa perlunya Tiongkok disertakan dalam pembuatan CoC yang ditolak oleh Vietnam dan Philipina dan bersikeras bahwa produk CoC haruslah merupakan produk akhir dari ASEAN dengan mengesampingkan Tiongkok dan menganggapnya sebagai partner dialog. Dalam retreat ASEAN Ministerial Meeting (AMM) dengan Kamboja selaku kepala delegasi pada 09 Juli 2012 yang diikuti oleh Indonesia, Philipina dan Vietnam mencoba untuk menghasilkan suatu Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) yang hasilnya ditolak oleh Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Nam Hong. Penolakan tersebut didasarkan pada pernyataan mengenai keberatan Philipina atas pengerahan Kapal militer Tiongkok di Scarborough Shoal dan keberatan Vietnam atas pengumuman Tiongkok mengenai kontrak blok minyak yang ada pada zona ekonomi eksklusif Vietnam. Hor Nam Hong beranggapan bahwa kedua hal tersebut merupakan masalah bilateral antara Philipina terhadap Tiongkok dan Vietnam terhadap Tiongkok dan tidak seharusnya dimasukkan dalam Pernyataan Bersama dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN. Walaupun Indonesia dan Singapura mencoba untuk memberikan penjelasan dan lobi namun Kamboja tetap pada pendiriannya.

Pada 18-19 Juli 2012 Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, membuat suatu terobosan dalam suatu bentuk *shuttle diplomacy* dengan mengunjungi lima ibukota negara asia tenggara yaitu Bangkok, Hanoi, Pnom Penh, Manila dan Singapura. Tujuan kunjungannya adalah untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang tercantum dalam enam hal prinsip (*six point principles*) yang kemudian disetujui oleh Hor Nam Hong dan seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN yaitu (Thayer, 2013):

1. *Full implementation of DoC.*
2. *Guidelines for the implementations of DoC.*
3. *The early conclusion of a regional CoC in the South China Sea.*

4. *Full respect of the universally recognized principles of international law including the 1982 United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS).*
5. *Continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties.*
6. *Peaceful resolution of dispute in accordance with the universally recognized principles of international law including the 1982 UNCLOS.*

Namun penerapan secara penuh DoC tersebut tidak ditindak lanjuti dengan baik. Masing-masing pihak belum mampu menciptakan suatu bentuk rasa saling percaya sebagaimana yang diharapkan dalam DoC. Baik Tiongkok maupun Philipina menuduh masing-masing pihak melakukan provokasi pada wilayah yang dipersengketakan. Tindakan Tiongkok dalam membangun pulau buatan (*artificial island*) dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesepakatan dalam DoC dan dalam UNCLOS 1982, terlebih dalam membangun pulau tersebut terlihat secara mencolok penempatan militer Tiongkok. Upaya Philipina mendaftarkan gugatan terhadap Tiongkok pada Arbitrase pun dirasakan sebagai suatu tindakan yang tidak diperhitungkan dan tanpa berkonsultasi dengan ASEAN, walaupun demikian Vietnam mendukung upaya Philipina tersebut. Batongbacal (Batongbacal) menyebutkan beberapa hal yang diklaim oleh Philipina yaitu

1. Klaim historis yang disampaikan oleh Tiongkok merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS), namun Philipina mengakui bahwa permasalahan mengenai kedaulatan atas wilayah daratan yang masuk bukan merupakan wewenang pengadilan untuk memutuskan.
2. Argumen Philipina bahwa Tiongkok secara tidak sah menduduki dan mengontrol delapan wilayah yang ada di Laut China Selatan.
3. Philipina menyatakan bahwa Tiongkok secara hukum melanggar atau secara tidak sah mengakui bahwa semua sumber daya yang ada dalam klaim *nine-dash line* dan melakukan eksploitasi atasnya yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Philipina.
4. Zone dalam laut China Selatan yang menjadi bagian dari wilayah domestik Philipina secara resmi disebut dengan Laut Barat Philipina.

Tuntutan Philipina dalam Arbitrase Internasional tersebut ditolak oleh Tiongkok, hal yang ditanggapi oleh Tiongkok adalah yurisdiksi pengadilan dalam menangani kasus tersebut, dalam Pernyataan Resmi mengenai posisi Tiongkok (*Position Paper*) pada Desember 2014 dinyatakan bahwa

1. Permasalahan utama adalah sengketa kedaulatan territorial atas wilayah di Spratley dan Scarborough Shoal. Tiongkok beranggapan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Philipina mengenai wilayah yang disebutkan adalah merupakan wilayah yang di klaim oleh Tiongkok

secara menyeluruh atas dasar hak sejarah dan permasalahan kedaulatan atas wilayah di dalamnya serta kegiatan yang dilakukan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari hak yang melekat pada kedaulatan tersebut.

2. Tiongkok beranggapan bahwa bila peradilan dalam menyelesaikan sengketa tidak mempertimbangkan permasalahan kedaulatan atas wilayah daratan, maka Tiongkok berpendapat bahwa peradilan tidak dapat memutuskan klaim Philipina tanpa memperhatikan batas maritime (*maritime delimitation*)
3. Atas dasar argument yang telah disampaikan atas dasar artikel 298 Tiongkok memilih untuk keluar dari pengadilan.

Pada 12 Juli 2012 Peradilan Arbitrase Internasional memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas Hak Sejarah atas Laut China Selatan yang di klaim oleh Philipina dinyatakan tidak sah.

"The Tribunal considers it beyond dispute that both Parties are obliged to comply with the Convention, including its provisions regarding the resolution of disputes, and to respect the rights and freedoms of other States under the Convention. Neither Party contests this, and the Tribunal is therefore not persuaded that it is necessary or appropriate for it to make any further declaration" (Permanent Court of Arbitration, 2016)

Pernyataan Mahakamah Arbitrase Internasional tersebut mematahkan klaim Tiongkok sekaligus mendorong masing-masing pihak untuk menghormati konvensi Hukum Laut Internasional yang telah diakui oleh para pihak. keputusan tersebut dipandang oleh Philipina bahwa Tiongkok harus menarik patroli lautnya dari wilayah Laut China Selatan yang merupakan bagian dari hak dan kadaulatan Philipina.

Landasan Teori

Hubungan internasional merupakan suatu bentuk interaksi yang terjadi antar aktor, khususnya negara, dalam memperjuangkan kehadirannya (*existence*) untuk dapat diterima oleh satu dan lainnya. Kehadiran aktor dalam interaksi internasional mewakili kebutuhan stakeholder aktor yaitu warga negara dalam bentuk kepentingan nasional. Dalam hubungan tersebut terdapat relasi kuasa yang secara tidak langsung mengatur bentuk-bentuk interaksi atau dalam kata lain membentuk norma-norma internasional. bentuk relasi kuasa terletak pada pandangan bahwa dunia internasional merupakan bentuk hubungan yang anarkis dimana masing-masing negara merupakan aktor independen yang bertindak atas dirinya sendiri dan akan berbuat apapun untuk mencapai tujuan akhirnya. Hal ini berarti interaksi antar aktor sebagai akibat bahwa kebutuhan yang ingin dicapai oleh salah satu aktor dimiliki oleh aktor

lain. Pandangan ini menyatakan bahwa dalam proses mencapai tujuannya, aktor negara harus memproduksi kekuatan yang cukup untuk menghadapi persaingan internasional. kekuatan tersebut diterjemahkan dalam bentuk penciptaan besarnya kekuatan yang dimiliki untuk menghasilkan dampak takut atau ancaman terhadap aktor negara lain sehingga aksi mempengaruhi untuk mencapai kepentingan nasional dapat dipenuhi (Zehfuss, 2004). Dengan kata lain bahwa situasi anarkis bukanlah suatu situasi yang terjadi dengan sendirinya, namun diciptakan oleh aktor negara itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Alexander Wendt, *anarchy is what state makes of it*.

Interaksi yang dilakukan oleh aktor negara dalam pencapaian kepentingan nasionalnya tidak terlepas dari identifikasi aktor terhadap identitas mereka. Pembentukan identitas sendiri merupakan landasan dasar dari kepentingan yang ingin dicapai melalui penterjemahan situasi yang terjadi. pembentukan identitas aktor terlihat dari adanya kesamaan kepentingan yang ingin dicapai oleh aktor-aktor negara terkait dengan situasi lingkungan internasional yang terjadi. hal ini mengarah kepada pembentukan kolektifitas identitas yang ditunjukkan dengan peningkatan hubungan dalam bentuk loyalitas, solidaritas dan komunitas.

Konstruktivis memandang bahwa pembentukan sistem internasional tidak cukup hanya dengan terbentuknya identitas sebagai akibat adanya kepentingan yang sama. Peningkatan hubungan atau interaksi antar aktor tercermin dari pernyataan aksi (*speech act*) yang dibuat oleh aktor-aktor. Pernyataan aksi menandai bahwa aktor akan melakukan suatu tindakan (*deeds*) atau membuat aktor lain bertindak dalam koridor yang sama, yang dalam pandangan Onuf pada akhirnya menciptakan seperangkat aturan (*rules*) yang di sepakati bersama untuk dijalankan. Dalam praktiknya aturan tersebut dapat berubah tergantung pada situasi yang dihadapi oleh aktor.

Interaksi yang dilakukan oleh aktor dalam hubungan internasional tidak hanya dibangun atas dasar adanya kepentingan yang dapat dicapai dengan pengerahan kekuatan dan mengikuti norma-norma yang dibentuk dan dijalankan. Dalam bertindak setiap aktor mempertimbangkan aksi-aksi yang dilakukan, apakah dengan melancarkan kekuatan militer, ekonomi dan politiknya suatu negara akan mendapatkan hasil yang diinginkan, atau apakah dengan mengidentifikasi identitas suatu negara dengan entitas lain atau menentanginya dalam sistem internasional akan membuat tujuannya tercapai. Aktor negara sebagaimana manusia dalam setiap interaksi yang dilakukan menimbangakan memutuskan apakah suatu aksi diperlukan atau tidak dan seberapa besar akan mempengaruhi tujuan akhirnya, dalam hal ini negara

menjalankan suatu keputusan yang dapat diterima. Dalam memutuskan rasionalitas tindakan yang dilakukan oleh aktor negara, terdapat dua faktor penting dalam pembuatan kebijakan yang menjadi dasar aksi yang dilakukan yaitu, faktor domestik dan faktor eksternal.

Dalam faktor domestik, aktor negara memperhitungkan letak strategis geografi yang di dalamnya termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Letak strategis merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh negara dalam berinteraksi, faktor ini menentukan seberapa penting posisi negara dalam percaturan regional dan internasional yang terjadi, kaitannya dengan luasnya daerah teritorial yang dimiliki oleh suatu negara, misal yang terkait dengan jalur navigasi pelayaran dan jalur perdagangan atau pipa minyak. Faktor ini juga memiliki kaitan erat dengan ketersediaan sumber daya alam, semakin luas suatu negara maka tidak sedikit kandungan sumber daya alam yang dimiliki yang berdampak terhadap pengembangan kekuatan ekonomi. Negara yang memiliki daratan dan wilayah air yang besar memiliki kekuatan dalam bidang pertambangan, pertanian dan hasil-hasil alam lainnya. Negara juga mempertimbangkan bentuk-bentuk dan tingkat ancaman yang akan dihadapinya sebagai bentuk antisipasi atas sejarah masa lalu.

Reaksi Negara Negara ASEAN Pasca Keputusan Arbitrase Internasional

Keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas dasar Hak Bersejarah atas Laut China Selatan dianggap sebagai kemenangan secara eksplisit negara-negara Asia Tenggara yang merupakan para pihak yang bersengketa dengan Tiongkok. Vietnam merupakan salah satu pihak yang mengklaim menyatakan mendukung keputusan Philipina pada tahun 2013 untuk melaporkan Tiongkok pada peradilan Mahkamah Arbitrase Internasional. Sebagai pihak terlapor Tiongkok menolak seluruh keputusan yang disampaikan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional dan menuduh Philipina telah melanggar kesepakatan dalam DoC. Tiongkok justru menuduh bahwa adanya pihak luar (*external force*) yang mencoba mengambil kesempatan untuk memojokkannya dalam kasus tersebut antara lain Amerika Serikat dan Jepang. Tiongkok justru merasa heran dengan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Philipina walaupun merupakan bagian dari kerjasama pertahanan dengan Philipina, kehadiran Amerika Serikat yang dekat dengan wilayah sengketa dianggap sebagai suatu bentuk intervensi terhadap masalah yang krusial. Tiongkok juga memperingatkan Jepang untuk tidak turut campur dalam masalah Laut China Selatan dan mengaitkannya dengan permasalahan Laut China Timur, di mana terdapat sengketa antara Jepang dan Tiongkok mengenai pulau Diaoyou (versi Tiongkok) atau pulau

Senkaku (versi Jepang). Dalam pertemuan antara Le Keqiang dan Shinzo Abe di Ulanbataar, Mongolia, Le menyatakan bahwa Tiongkok sudah berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan koridor Hukum Internasional dalam klaimnya terhadap Laut China Selatan, Shinzo Abe sebaliknya menyaraankan agar Tiongkok mengikuti ketentuan Hukum Internasional yang telah ada (Edwards, 2016). Negara negara ASEAN pun tampak terbelah antara pendukung klaim Tiongkok, Pihak Pihak yang berkepentingan dan yang berada pada posisi netral.

Bagi Philipina keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional bagaikan sebuah oase yang menyejukkan dimana Philipina menikmati buah manis kemenangan mutlak (*crowning glory*) atas klaim Tiongkok terhadap hampir 90 persent wilayah di Laut China Selatan. Hasil keputusan tersebut memberikan semangat baru bagi kebangkitan nasionalisme Philipinan yang di dera konflik vertical antara pemerintah dan kelompok bersenjata di Philipina Selatan, serta menunjukkan kepada dunia internasional khususnya terhadap Tiongkok bahwa posisi Philipina tidak dapat dipandang sebelah mata. Hasil keputusan tersebut merupakan bukti bahwa Philipina mampu membawa permasalahan tersebut ke tingkat level yang lebih tinggi dan tidak akan berhenti untuk menghentikan upaya Tiongkok mengancam kedaulatan Philipina dan stabilitas regional asia tenggara. Oleh karenanya Philipina berusaha agar keputusan arbitrase tersebut digunakan secara legal dan mengikat dalam pernyataan bersama ASEAN terhadap Tiongkok (Manhit, 2016). Walaupun Philipina merupakan pihak yang sangat berkepentingan untuk menghilangkan klaim Tiongkok terhadap wilayah kedaulatannya namun pernyataan Presiden Philipina terpilih Rodrigo Duterte menyatakan akan tetap berdialog dengan Tiongkok untuk mencapai suatu keputusan yang menguntungkan bagi kedua pihak, "*war is not an option....so, what is the other side?-Peace Talk*" (Edwards, 2016).

Vietnam menyambut gembira keputusan Arbitrase Internasional karena keputusan tersebut sarat dengan perasaan emosional dan mengandung makna strategis dalam langkah kedepan yang akan diambil oleh Vietnam. Klaim Tiongkok atas Huong Sa dan Truong Sa (Kepulauan Paracel dan Spratley) telah sampai pada batas yang tidak bisa ditolerir oleh Vietnam yang berujung kepada ketidak puasan masyarakat Vietnam terhadap pemerintah dan terjadinya kerusuhan masal yang merujuk kepada etnis tiongkok yang ada di Vietnam, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hai Binh menyatakan (Clark, 2016)

"Those actions conducted by China have seriously violated Vietnam's sovereignty and are unlawful and cannot change the fact[s] about

Vietnam's sovereignty over the Hoang Sa and Truong Sa [known as Spratly and Paracel in China] archipelagoes.

In this spirit, Vietnam strongly supports the resolution of disputes in the East Vietnam Sea through peaceful measures, including diplomatic and legal procedures, without using or threatening to use violence, in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS."

Salah satu pihak yang juga merupakan salah satu negara merasa bahwa sebagian wilayah pada Laut China Selatan adalah Malaysia. Walaupun wilayah yang di klaim Malaysia tumpang tindih dengan klaim oleh Brunei Darussalam dan Philipina, namun Malaysia memberikan perhatian lebih terhadap klaim yang dilakukan oleh Tiongkok. Keputusan mahkamah internasional tentu saja disambut gembira oleh Malaysia, walapun demikian Malaysia tetap mengajak seluruh pihak agar dapat menahan diri (*self restraint*) dari reaksi berlebihan yang dapat memanasakan situasi regional. Dalam pernyataan resmi pemerintah Malaysia yang di nyatakan oleh Menteri Luar Negeri Dato' Sri Anifah Aman yaitu

"Malaysia believes that it is important to maintain peace, security and stability through the exercise of self-restraint in the conduct of activities that may further complicate disputes or escalate tension and avoid the threat or use of force in the South China Sea" (Kyodo News, 2016)

Hasil keputusan arbitrase internasional merupakan produk dari hukum internasional yang legal dan penting dan diharapkan dapat menyatukan negara-negara ASEAN untuk menghasilkan suatu bentuk pernyataan bersama yang lebih solid. Namun pada kenyataannya Kamboja, Laos dan Myanmar tidak begitu mendukung keinginan empat dari negara yang berkonflik untuk menuntut Tiongkok bertindak maju dengan mengakui legalitas dan mengikatkan diri terhadap putusan hukum tersebut dan menghasilkan suatu Kode Etik (*Code of Conduct*) penyelesaian sengketa. Menurut Makarim Wibisono, negara negara ASEAN terlepas terlibat langsung dalam sengketa atau tidak, memiliki kepentingan yang sangat mendalam terhadap kesinambungan stabilitas dan keamanan wilayah Laut China Selatan demi keberlanjutan pembangunan di regional (Wibisono, 2016). Laut China Selatan merupakan jalur strategis perdagangan dan suplai energi dengan nilai hingga lima triliun dolar per tahun (Muhammad, 2016) serta sebagai jalur penghubung antar daratan di asia tenggara.

Kamboja merupakan negara yang paling sering menolak pembahasan mengenai isu Laut China Selatan dalam forum-forum ASEAN. Mantan Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Nam Hong, menyatakan bahwa kedudukan negaranya adalah jelas menolak keterlibatan ASEAN dalam isu tersebut.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, menilai proses dalam pengambilan keputusan dalam peradilan tersebut merupakan sebuah "konspirasi politik". Menurutnya permasalahan Laut China Selatan merupakan permasalahan bilateral antar pihak (Sokheng V. , 2016). Sikap Kamboja yang mendukung Tiongkok dianggap sebagai suatu bentuk kompensasi atas bantuan keuangan Tiongkok yang cukup besar diterima Kamboja sejak yaitu sebesar 530 juta dolar sejak tahun 2015 selama tiga tahun (Baliga, 2016). Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke 49 di Vientiane, Laos, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon tidak memberikan dukungan terhadap usaha menteri-menteri luar negeri ASEAN untuk merumuskan suatu pernyataan sikap bersama (Sokheng A. B., 2016). Dalam usaha negara negara ASEAN untuk merumuskan suatu Kode Etik dan Perumusan Pernyataan Bersama, Kamboja merasa dipojokkan untuk menyetujui rumusan yang dihasilkan. Kamboja merasa dijadikan sebagai alat untuk menghadapi Tiongkok oleh negara negara ASEAN atas desakan Amerika Serikat. Oleh karenanya Kamboja merasa perlu untuk menjaga hubungannya dengan Tiongkok dengan mengeluarkan pernyataan yang cukup pedas.

Harapan lain dalam penyelesaian masalah Laut China Selatan adalah terhadap Laos sebagai Ketua ASEAN 2016, diharapkan Laos dapat memainkan perannya untuk menjadi netral dan dapat mendorong munculnya suatu kebersatuan diantara negara-negara ASEAN. Namun tampaknya harapan ini bertepuk sebelah tangan, terlebih bagi Laos, sebagaimana Kamboja, Tiongkok merupakan *partner* dagang dan investor terbesar. Selain itu sebagai sebuah negara tanpa laut harapan akan pengertian pandangan Laos mengenai masalah kelautan patut dipertanyakan, dalam pertemuan di Vientiane merupakan peringatan 25 tahun hubungan ASEAN-Tiongkok yang berarti untuk menghormati Tiongkok, Laos akan berusaha untuk "menyenangkan" mitra dagang terbesarnya tersebut dengan mensukseskan acara peringatan tersebut.

Melihat kenyataan bahwa aliansi yang dibangun oleh Tiongkok atas Laos dan Kamboja sangat kuat, harapan lain datang terhadap Indonesia sebagai salah satu anggota sekaligus pendiri ASEAN. Indonesia digadang gadang sebagai untuk meluluhkan Tiongkok dan membawanya kepada meja perundingan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih kurang 17,000 pulau besar dan kecil, dengan jumlah penduduk +/- 270 juta jiwa merupakan mitra investasi Tiongkok yang cukup besar. Walaupun klaim *nine dash line* yang di untkap oleh Tiongkok hanya terbatas pada penguasaan wilayah laut serta kedaulatan yang terkandung di dalamnya atas wilayah kepulauan Spratley dan Paracel, namun dalam tarikan garis tersebut memasukkan sebagian wilayah Laut Natuna yang merupakan wewenang

Indonesia. Tiongkok beranggapan bahwa wilayah laut tersebut merupakan bagian dari wilayah tangkap ikan tradisional yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh nelayan nelayan asal selatan Tiongkok sejak puluhan tahun silam. Menanggapi situasi Laut China Selatan yang semakin memanas, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberlakukan sikap yang cukup keras dengan mengirimkan kapal-kapal patrol di laut natuna dengan tujuan menangkap atau mengusir nelayan illegal di wilayah tersebut, dan bila terbukti telah melanggar batas wilayah maka kapal-kapal tersebut akan ditenggelamkan. Dalam usahanya menegakkan hukum di wilayah laut natuna, kapal-kapal patrol Indonesia telah beberapa kali berhadapan dengan Kapal *Coastguard* milik Tiongkok yang disinyalir memberikan perlindungan bagi kapal-kapal nelayan asal Tiongkok yang menangkap ikan di wilayah laut natuna yang diklaim sebagai bagian dari kebijakan *nine dash line* Tiongkok. Dalam insiden yang terjadi terutama penangkapan terhadap nelayan-nelayannya, Tiongkok melayangkan Protes Diplomatik terhadap Indonesia dan meminta pembebasan tak bersyarat bagi nelayan Tiongkok.

Polemik Laut China Selatan yang meningkat dengan dimasukkannya gugatan kepada pengadilan arbitrase internasional oleh Philipina pada tahun 2013 mengundang rasa prihatin Indonesia yang memang terus berusaha menggalang kerjasama regional asia tenggara melalui ASEAN untuk menyelesaikan persoalan tersebut bersama dengan Tiongkok melalui saluran-saluran diplomatik. Pasca keputusan pengadilan arbitrase internasional yang memenangkan gugatan Philipina menimbulkan euphoria sebagian negara-negara asia tenggara yang merupakan para pihak sengketa. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, justru menyarankan agar para pihak yang bersengketa untuk tidak melakukan tindakan apapun yang justru menyulut ketegangan konflik, serta menahan diri dari pengerahan tindakan militer yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas wilayah regional. Lebih lanjut lagi Retno Marsudi menyarankan agar untuk mencapai suatu kesepakatan damai diperlukan kerjasama dari para pihak sengketa untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama (Kyodo News, 2016).

Selain Indonesia yang merasa prihatin atas peningkatan ketegangan di Laut China Selatan, Singapura pun merasakan hal serupa. Singapura merupakan negara pulau yang luasnya tidak lebih besar dari Ibukota Negara Indonesia, Jakarta, merupakan negara yang menggantungkan pendapatannya dari pelayanan terhadap kapal-kapal tanker atau besar yang menuju Laut Hindia dengan tujuan akhir Eropa, Timur Tengah dan Afirka dan Laut Pasifik dengan tujuan Jepang, Tiongkok dan Amerika Serikat. Kapal-kapal tersebut melintasi jalur perdagangan internasional di Laut China Selatan yang sangat

strategis. Peningkatan ketegangan pasca keputusan arbitrase internasional telah menyebabkan naiknya harga minyak lebih dari satu dolar atau naik sebesar dua persen menjadi 47,60 dolar per barel di pasaran dunia (Gloystein & Wallis, 2016). Lebih lanjut lagi bila terjadi pemblokiran terhadap wilayah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya biaya pengiriman via jalur laut dan akan menimbulkan dampak kerugian bagi perdagangan maritim. Kementerian Luar Negeri Singapura memberikan tanggapan terhadap keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional sebagai berikut:

1 Singapore has taken note of the Award made by the Arbitral Tribunal convened under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on 12 July 2016 on the case between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. We are studying the Award and its implications on Singapore and the wider region.

2 Singapore is not a claimant state and we do not take sides on the competing territorial claims. However, we support the peaceful resolution of disputes among claimants in accordance with universally-recognised principles of international law, including UNCLOS, without resorting to the threat or use of force. As a small state, we strongly support the maintenance of a rules-based order that upholds and protects the rights and privileges of all states.

3 Singapore values our long-standing and friendly relations with all parties, bilaterally and in the context of ASEAN. We urge all parties to fully respect legal and diplomatic processes, exercise self-restraint and avoid conducting any activities that may raise tensions in the region.

4 Singapore supports the full and effective implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea and the expeditious conclusion of a legally-binding Code of Conduct in the South China Sea. (TODAY, 2016)

Dalam pernyataan tersebut Singapura menegaskan kembali pentingnya penerapan DoC dan penyelesaian secara damai diantara para pihak sengketa dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional termasuk hukum laut internasional. Singapura bahkan menekankan pengaturan ketertiban dan perlindungan terhadap hak dan keistimewaan semua pihak.

Respon Negara Negara Non Klaim Pasca Keputusan Arbitrase Internasional

Amerika Serikat merupakan negara yang pernah menjajah Philipina sebagai kompensasi mundurnya Spanyol dari negara tersebut karena kalah perang dengan Amerika Serikat pada 1898, dan me-merdeka-kan Philipina pada tahun 1946. Pentingnya Asia bagi Amerika Serikat terlihat dari kebijakannya yang populer dalam *US Pivot to Asia Pacific* dengan tujuan utamanya mempengaruhi pembangunan tatanan kekuatan di Asia Pasifik sebagai akibat menguatnya pengaruh Tiongkok. Adapun enam garis utama usaha yang dibangun oleh Amerika Serikat terkait kebijakan tersebut yaitu memperkuat aliansi keamanan; mempererat hubungan dengan negara-negara kuat di kawasan; terlibat dalam institusi multilateral regional; memperluas perdagangan dan investasi; memperluas kehadiran militer Amerika Serikat; dan memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (Mills, 2015). Bagi Amerika Serikat peningkatan kekuatan Tiongkok di Asia patut untuk diantisipasi terutama agenda Tiongkok untuk menguasai hampir 90 persen Laut China Selatan. Bagi Amerika Serikat Laut China Selatan merupakan perairan internasional yang tidak dibenarkan adanya klaim sepihak atasnya, bagi Amerika Serikat sendiri klaim Tiongkok dapat berarti hambatan bagi manuver armada pasifiknya dan juga hilangnya kebebasan bernavigasi di laut lepas. Namun reaksi Amerika Serikat yang dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri terkesan kurang bergairah;

"The decision today by the Tribunal in the Philippines-China arbitration is an important contribution to the shared goal of a peaceful resolution to disputes in the South China Sea. When joining the Law of the Sea Convention, parties agree to the Convention's compulsory dispute settlement process to resolve disputes,"

"We encourage claimants to clarify their maritime claims in accordance with international law — as reflected in the Law of the Sea Convention — and to work together to manage and resolve their disputes. Such steps could provide the basis for further discussions aimed at narrowing the geographic scope of their maritime disputes, setting standards for behavior in disputed areas, and ultimately resolving their underlying disputes free from coercion or the use or threat of force". (Gady, 2016)

Australia selaku sekutu Amerika Serikat di Asia memberikan pandangan yang sama. Bagi Australia, menjaga stabilitas perdamaian di Asia Tenggara adalah penting. Asia Tenggara merupakan mitra dagang yang penting pada tahun 2014 tercatat total perdagangan dengan Asia Tenggara mencapai 100 miliar dolar lebih tinggi dibandingkan perdagangannya dengan Jepang, Uni

Eropa dan bahkan Amerika Serikat, bahkan Australia telah meningkatkan level perdagangan pada ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Agreement (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2016). Asia tenggara pun bagi Australia merupakan negara penyangga dari kedatangan migran yang menuju Australia. Peningkatan ketegangan di Asia Tenggara yang mengarah kepada konflik bersenjata akan berdampak terhadap terganggunya perdagangan dan membanjirnya migran ke Australia. Dalam *Media Release* Kementerian Luar Negeri Australia, Perdana Menteri Julie Bishop menyatakan tanggapannya atas keputusan pengadilan arbitrase internasional

"...The Tribunal in the Philippines' arbitration case was established in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The Tribunal's decision was not about sovereignty, but about maritime rights under UNCLOS.

Australia supports the right of all countries to seek to resolve disputes peacefully in accordance with international law, including UNCLOS.

Adherence to international law is the foundation for peace, stability and prosperity in East Asia,....

It is an opportunity for the region to come together, and for claimants to re-engage in dialogue with each other based on greater clarity around maritime rights

Australia will continue to exercise our international law rights to freedom of navigation and overflight, and support the right of others to do so...."
(Bishop, 2016)

Negara tetangga Australia seperti Selandia Baru turut memberikan tanggapan atas keputusan tersebut, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully menyatakan bahwa pentingnya masing masing pihak untuk menghormati pengaturan maritim di Laut China Selatan, kestabilan dan keamanan atas wilayah tersebut menjadi vital demi kesejahteraan asia-pasifik. McCully juga menyatakan harapannya bahwa keputusan yang dihasilkan menjadi *platform* (landasan dasar) dalam menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan yang kompleks dan mendorong setiap pihak untuk menyelesaikannya (So, 2016). Hal senada disampaikan oleh Menteri Luar Negeri India agar masing-masing pihak dapat menahan diri agar terciptanya sebuah resolusi damai atas persoalan Laut China Selatan dengan tetap mengacu kepada hukum laut internasional. Hubungan baik yang terjadi antara India dan Tiongkok tidaklah terjadi dengan sendirinya, butuh suatu bentuk kepercayaan yang dibangun oleh keduanya. India dan Tiongkok pernah terlibat perang perbatasan pada tahun 1962, 1967 dan 1987 bahkan pada tahun 2016

sempat terjadi kontak senjata antara tentara perbatasan India dan Tiongkok. Perkembangan militer Tiongkok diperbatasan mengundang kekhawatiran India akan invasi Tiongkok terhadap daerah perbatasannya, belum lagi ditambah kecurigaan India terhadap Tiongkok yang mensuplai persenjataan untuk Pakistan. Momentum hasil keputusan PCA (Permanent Court of Arbitration/ Pengadilan Arbitrase Tetap Laut China Selatan) seharusnya merupakan kesempatan bagi India untuk memojokkan Tiongkok namun pernyataan Kementerian Luar Negeri India justru bernada sebaliknya, hal ini mungkin terkait dengan hubungan ekonomi bilateral yang sudah terjalin baik diantara kedua negara.

Keputusan PCA untuk menolak klaim Tiongkok atas Laut China Selatan (LCS) dan mendukung gugatan Philipina turut pula menjadi perhatian negara negara di Eropa yang memiliki kepentingan terhadap jalur perdagangan yang melintasi LCS. Uni Eropa sebagai organisasi regional di Eropa mencoba memberikan tanggapan namun tidak secara bulat, hal ini dikarenakan di antara negara-negara anggota Uni Eropa sendiri masih terdapat perselisihan mengenai perbatasan laut yaitu Kroasia dan Slovenia yang dikhawatirkan akan dijadikan contoh dalam penyelesaian persoalan diantara keduanya. Hungaria dan Yunani menolak untuk memberikan kritik terhadap Tiongkok atas keputusan PCA dikarenakan ketergantungannya terhadap investasi Tiongkok, sementara Inggris, Jerman dan Perancis mendesak agar Tiongkok menjalankan hasil keputusan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab atas peran Tiongkok yang semakin besar pada tataran global. Pada akhirnya Uni Eropa bersepakat untuk mendorong semua pihak sengketa agar menyelesaikan persoalan Laut China Selatan melalui tindakan damai, memberikan klarifikasi mengenai klaim dan menyelesaikannya berlandaskan Hukum Internasional yang berlaku. (Emmott, 2016)

Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Pada saat Tiongkok mengeluarkan klaim mengenai *nine dash line* yang meliputi hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan, empat negara di asia tenggara menolak dengan tegas klaim tersebut, tiga diantaranya bersinggungan langsung dengan Tiongkok yaitu Vietnam, Malaysia dan Philipina, sementara Brunei Darussalaam tidak secara langsung bersengketa dengan Tiongkok namun dengan Malaysia. Eskalasi hubungan diantara negara-negara yang bersengketa langsung meningkat sehingga diperlukan suatu penyelesaian permasalahan tersebut. Munculnya Declaration of Conduct yang disepakati pada tahun 2002 diharapkan dapat memberikan terobosan dalam penyelesaian sengketa LCS dengan adanya tahapan penyelesaian. Namun ternyata DoC

yang disepakati tidak kunjung diimplementasikan dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya beberapa peristiwa serius yang melibatkan para pihak yang bersengketa. Puncak dari peristiwa-peristiwa yang berlangsung adalah dengan dimasukkannya gugatan kepada Pengadilan Arbitase Internasional oleh Philipina di tahun 2013. Tindakan yang dilakukan oleh Philipina dipandang merupakan tindakan yang sangat berani dalam menentang Tiongkok sebagai negara kuat di wilayah asia pasifik. Gugatan peradilan tersebut tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Tiongkok dengan tidak menghiraukan sama sekali permintaan peradilan untuk memberikan argumentasi bantahan terhadap gugatan. 12 Juli 2016 Peradilan Tetap Arbitrase (PAC) memutuskan untuk mengabulkan gugatan Philipina, hal yang dianggap sebagai sebuah kemenangan diplomasi hukum Philipina atas Tiongkok, yang sayangnya justru meningkatkan ketegangan baru di wilayah Laut China Selatan, Tiongkok justru semakin bertekad untuk mempertahankan wilayah tersebut.

Ketegangan wilayah Laut China Selatan tentunya tidak dapat ditepis begitu saja, Indonesia yang pada awalnya menyatakan bahwa tidak terdapat permasalahan serius dalam perbatasannya dengan Tiongkok justru kemudian memperkuat pengamanannya di wilayah Laut Natuna yang merupakan bagian dari wilayah territorial. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 memberikan nuansa baru bagi isu maritime Indonesia. Presiden terpilih memiliki visi mengenai posisi Indonesia pada sistem internasional melalui Poros Maritim Dunia. Visi ini diimplementasikan dengan memperkuat strategi pertahanan maritim Indonesia melalui kerjasama terkoordinasi Kementarian/Lembaga yang menanganinya. Kebijakan keras Indonesia yang menangkap kapal-kapal asing yang beroperasi secara illegal baik kapal nelayan ataupun tindakan yang dianggap merupakan kejahatan di laut menunjukkan betapa seriusnya Indonesia untuk memwujudkan visi tersebut.

Hingga April 2016 sebanyak 174 kapal telah ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia sembari memberikan pesan kuat kepada negara-negara di sekitar bahwa Indonesia serius dalam mengelola wilayah lautnya. Ketegangan dengan Beijing terjadi pada saat kapal patroli milik kementerian kelautan dan perikanan Indonesia (KKPI) mencegat kapal tangkap ikan nelayan Tiongkok yang berada secara illegal di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di utara pulau natuna. Pada saat kapal penangkap ikan tersebut sedang ditarik ke pelabuhan kapal patrol milik KKPI di hadang oleh dua kapal *coast guard* Tiongkok yang mencoba untuk melepaskan kapal tersebut dan meminta kapten kapal KKPI untuk melepaskan nelayan Tiongkok yang ditangkap. Walaupun Tiongkok dan Indonesia menegaskan bahwa tidak terdapat masalah perbatasan diantara keduanya dan adanya pernyataan bahwa Tiongkok

menghormati wilayah kedaulatan Indonesia. Namun kebijakan *nine dash line* Tiongkok menganggap sebagian wilayah laut natuna yang masuk dalam kebijakan Tiongkok tersebut sebagai area *traditional fishing ground* (wilayah tangkap ikan tradisional) milik Tiongkok.

Dalam sengketa Laut China Selatan Indonesia telah memainkan peran pentingnya di kawasan. Indonesia secara vocal menyuarakan pentingnya suatu kode etik yang mengikat pihak-pihak bersengketa dalam menyelesaikan secara bersama masalah saling klaim wilayah tersebut. Melalui politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, Indonesia berhasil menyatukan pandangan negara-negara asia tenggara melalui suatu tindakan yang dikenal dengan *shuttle diplomasi* yang dijalankan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada saat Pertemuan Tingkat Tinggi di Phnom Penh gagal untuk menghasilkan suatu Pernyataan Bersama ASEAN (Hellendorff & Kellner, 2014). Langkah ini seharusnya tetap dipertahankan oleh Indonesia sebagai mediator dan penengah, namun bukan berarti Indonesia harus bertindak sendirian. Dalam politik luar negeri Indonesia ASEAN merupakan sokoguru, sehingga Indonesia perlu mendorong peran aktif ASEAN dalam menciptakan terobosan-terobosan untuk menghasilkan suatu solusi bersama. Sikap Tiongkok terhadap ASEAN yang menyatakan bahwa hanya akan melibatkan ASEAN pada "waktu yang tepat" dan "kondisi yang tepat" seharusnya tidak menjadikan ASEAN 'membeku', justru peran negara sebagai individu untuk melakukan pendekatan yang dapat mencairkan situasi.

Indonesia diuntungkan oleh penolakan klaim oleh Tiongkok dengan persepsi yang sama dengan Filipina maka Indonesia dapat dengan lebih tegas dan percaya diri menegakkan hukum bagi pelanggar batas teritori laut. Ada beberapa tindakan diplomatis yang bisa diambil secara sadar oleh Pemerintah Indonesia yaitu:

Tindakan diplomatis yang berimplikasi ke dalam negeri:

- a. kepercayaan diri yang tinggi dalam penegakan hukum bagi pelanggar batas teritori laut
- b. eksplorasi kekayaan laut yang maksimal

Tindakan diplomatis yang berimplikasi ke luar negeri:

- a. bernegosiasi dengan pemerintah Tiongkok dalam rangka menyatakan sikap yang lebih tegas ASEAN terhadap keputusan arbitrase internasional, saran ini merupakan implikasi wajar dari mengalirnya dana pinjaman dari Tiongkok yang besar ke Indonesia sehingga ada kekuatan tawar lebih Indonesia ke pemerintah Tiongkok.
- b. Tetap menjadi penggerak perdamaian utama di ASEAN setelah terpecahnya pendapat negara-negara ASEAN dalam menyikapi

keputusan arbitrase internasional dan ASEAN gagal memberikan pendapat dan bulatnya tentang keputusan PAC tersebut.

Peran ini harus diambil oleh Indonesia mengingat luas wilayah, kekayaan alam, populasi, harapan terhadap peran Indonesia, hubungan baik dengan Tiongkok.

Analisa Kesimpulan

Hubungan internasional merupakan hubungan yang dibentuk secara terus menerus berdasarkan kepentingan masing-masing aktor negara. Menurut logika pemikiran Pasca keputusan PCA hubungan internasional di asia tenggara sejatinya mengalami dinamisasi yang positif karena tidak ada lagi keraguan dalam menentukan sikap. Bila sebelumnya Kamboja dan Laos harus terus menerus memperhitungkan besaran bantuan yang diterima dari Tiongkok dan untuk menjaganya diperlukan suatu bentuk timbal balik untuk tidak menjadi negara yang justru memojokkan Tiongkok menjadi pihak yang disalahkan dalam sengketa Laut China Selatan. Negara-negara anggota ASEAN harusnya menjadi lebih mantap mencapai konsensus bersama tanpa takut diintimidasi oleh Tiongkok, justru berdasarkan keputusan PCA Tiongkok seharusnya menjadi lebih lunak. Namun dalam realita hubungan yang terjadi mengalami kerumitan yang cukup tinggi, antara lain penolakan Tiongkok yang cukup keras dengan tidak mengakui hasil keputusan PCA dan justru akan mempertahankan kedaulatannya atas 90 persen di Laut China Selatan. Kompleksitas tersebut dapat meliputi derajat hubungan yang terjadi antar masing-masing pihak. Negara negara asia tenggara yang merupakan anggota dari organisasi kerjasama kawasan seharusnya memiliki rasa keterikatan yang kuat sebagai dasar pembentukan suatu identitas bersama dengan nilai nilai kesamaan sejarah masa lalu, ketakutan akan ancaman dari luar kawasan terutama dari negara-negara adikuasa, kesamaan visi, serta keinginan untuk maju bersama dan menciptakan suatu hubungan harmonis yang berlandaskan kepada pembangunan rasa kepercayaan. Namun pada kenyataannya negara-negara tersebut tidak dapat bersepakat untuk menghasilkan suatu keputusan bersama, kenyataan bahwa Kamboja lebih memilih untuk membela Tiongkok lebih berlandaskan kepada rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Tiongkok dalam pencapaian perkembangan perekonomian dan pertahanan Kamboja dan Laos, terlepas dari pendapat kedua negara tersebut yang menyatakan bahwa persoalan LCS adalah semata hubungan bilateral diantara negara-negara yang bersengketa.

Kompleksitas hubungan dalam asia tenggara dipengaruhi aktor-aktor yang berasal dari luar kawasan antara lain Amerika Serikat, Australia, Jepang,

Taiwan, Eropa dan India. Sejak Tiongkok menegaskan klaimnya atas Laut China Selatan, pihak-pihak eksternal tersebut memberikan perhatian yang cukup serius dikarenakan kepentingan mereka atas lalu lintas jalur perdagangan yang melewati Laut China Selatan. Kebijakan Amerika Serikat dalam *United States Pivot to Asia-Pacific* diharapkan membawa keseimbangan kekuatan dan keseimbangan pengaruh di kawasan, terutama bagi negara-negara asia tenggara yang merupakan para pihak sengketa. Kerjasama strategis dalam bidang pertahanan dengan Amerika Serikat dilakukan oleh Philipina dan Vietnam, tentu saja hal ini dianggap sebagai sebuah aksi provokasi terhadap Tiongkok yang kemudian memberikan reaksi keras dengan semakin sering melakukan patroli di wilayah sengketa, bahkan dikhawatirkan Tiongkok akan menerapkan kebijakan *Air Defence Identification Zone (ADIZ)* sebagaimana yang telah diterapkan terlebih dahulu dalam sengketa Laut China Timur terhadap pulau Diaoyu/Senkaku/Dok Do yang merupakan klaim dari Korea Selatan dan Jepang. Namun pasca keputusan PCA pihak eksternal memberikan tanggapan yang lebih banyak mendorong penyelesaian secara damai seraya menekankan perlunya penghormatan terhadap Hukum Internasional yang mengatur penyelesaian masalah. Tanggapan yang diberikan lebih terkesan tidak mengikat, terdapat sikap kehati-hatian pihak eksternal dalam menyikapi keputusan PCA yang bisa dilihat dari tanggapan mereka yang mencoba untuk mempelajari materi putusan dan sikap Tiongkok.

Referensi

- Anthoni, Mohammad. "gradschool.paramadina.ac.id." November 10, 2016. <http://gradschool.paramadina.ac.id/en/news/334-vietnam-pertanyakan-komitmen-china-atasi-perselisihan-wilayah-.html> (accessed November 3, 2016).
- ASEAN. *Home: ASEAN.org.* Oktober 17, 2012. http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2 (accessed November 10, 2016).
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. *Home: International Relations: Regional Architecture DFAT.Gov.* November 17, 2016. <http://dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/asean/pages/association-of-southeast-asian-nations-asean.aspx>.
- Baliga, Ananth. "China thanks Cambodia for efforts to water down ASEAN SCS statement." Juli 26, 2016.
- Batongbacal, Jay L. "Batongbacal, Jay L." *AMTI CSIS*. <https://amti.csis.org/arbitration-101-philippines-v-china/> (accessed November 10, 2016).
- BBC Indonesia. *bbc.com.* Juli 21, 2011. http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict.

- Bishop, Julie. *releases:foreignminister.gov.* Juli 12, 2016. http://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2016/jb_mr_160712a.aspx.
- Clark, Helen. *World Post: Huffington Post.com.* Juli 16, 2016. http://www.huffingtonpost.com/helen_clark/vietnam-south-china-sea-ruling_b_11022864.html (accessed November 14, 2016).
- Edwards, Sue-Lin Wong and Terrence. *Article: Reuters.com.* Juli 15, 2016. <http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-idUSKCN0ZV06F> (accessed November 14, 2016).
- Emmott, Robin. "EU's statement on South China Sea reflects divisions." Juli 12, 2016.
- Gady, Franz-Stefan. "South China Sea Verdict: US Reactions." Juli 13, 2016.
- Gloystein, Henning, and Keith Wallis. "Oil and shipping markets on edge after South China Sea ruling." Juli 12, 2016, United States ed.
- Hellendorff, Bruno, and Thierry Kellner. "Indonesia: A Bigger Role in the South China Sea?" Juli 09, 2014.
- Huang Nan, Zhang Juan, Shannon Tiezzi. "the Diplomat." *the Diplomat.com.* July 06, 2016. <http://thediplomat.com/2016/07/interview-xue-li-on-the-south-china-sea/>.
- Kyodo News. *Overseas: abs-cbn.com.* Juli 13, 2016. <http://news.abs-cbn.com/overseas/07/13/16/malaysia-singapore-indonesia-react-to-s-china-sea-ruling> (accessed November 15, 2016).
- Luhulima, CPF. "Toward a Code of Conduct on The South China Sea." *The Jakarta Post.* June 30, 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/30/toward-a-code-conduct-south-china-sea.html> (accessed November 10, 2016).
- Manhit, Dindo. *Headline: Philstar.com.* Juli 19, 2016. <http://www.philstar.com/headlines/2016/07/19/1604482/keeping-peace-post-arbitration>.
- Mills, Chris. *The United States' Asia-Pacific Policy and the Rise of the Dragon.* Australian Defence Institute, Australia: The Centre for Defence and Strategic Studies, 2015, 1.
- Muhammad, Simela Victor. "Isu Laut China Selatan Pasca-Putusan Mahkamah Arbitrase: Tantangan ASEAN." *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional,* Juli 2016.
- Permanent Court of Arbitration. "PCA-CPA.Org." *pca-cpa.org.* Juli 12, 2016. <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>.
- Roach, J. Ashley. *CNA Corporation Files.* August 2014. https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IOP-2014-U-008434.pdf.
- Rosen, Mark E. "cna.org." *www.cna.org.* 2014. https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008435.pdf (accessed 11 01, 2016).
- So, Levi A. "World leaders react to South China Sea ruling." Juli 13, 2016.



Sokheng, Ananth Baliga and Vong. "Cambodia again blocks ASEAN statement on South China Sea." Juli 25, 2016.

Sokheng, Vong. "Namhong, Australia envoy talk South China Sea." Juli 19, 2016.

Thayer, Carlyle A. "ASEAN, China and the Code of Conduct in the South China Sea." *SAIS Review of International Affairs* 33, no. Summer-Fall (2013): 77.

TODAY. "Singapore urges respect for court ruling on South China Sea." *Singapore*, Juli 12, 2016.

Wibisono, Makarim. "ASEAN and The South China Sea." Juli 3, 2016.

World Politic Review. "Brunei Maintains a Low Profile in Pressing Its South China Sea Claims." *WPR Series on the South China Sea Territorial Disputes*, January 28, 2016.

Zehfuss, Maja. *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam *Global War Against Terrorism*

Gonda Yumitro,

Universitas Muhammadiyah Malang

yumitro@gmail.com

Abstrak

Pasca 11 September 2001 dan diumumkannya *global war against terrorism*, dunia seakan terbagi menjadi dua yaitu kelompok yang bergabung bersama Amerika melawan terorisme dan kelompok pendukung terorisme. Dengan pernyataan George W Bush yang menyebutkan *either you are with us or you are with terrorist*, maka berbagai Negara pun turut melibatkan diri dalam perang melawan terorisme, tidak ketinggalan Indonesia. Apalagi Indonesia dikenal sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim dan merupakan salah satu Negara yang menjadi basis jaringan terorisme Internasional. Oleh karena itu, paper ini akan menjawab rumusan masalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam *global war against terrorism*?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan konsep *global war against terrorism* dan deradikalisasi. Dengan metode *literature review*, ditemukan jawaban bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan isu terorisme, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis baik domestik maupun eksternal, di antaranya adalah implementasi *Anti Terorisme Law*, pembangunan infrastruktur, *countering financing*, pelibatan *civil society*, dan kolaborasi dengan berbagai Negara.

Kata Kunci:

Kebijakan, Terorisme, global war, civil society, kolaborasi

Latar Belakang

Akhir-akhir ini isu terorisme kembali ramai dibicarakan dan diberitakan berbagai media. Termasuk pada bulan ini setelah peristiwa aksi damai 4 November 2016, juga terjadi serangan terorisme pada hari minggu tanggal 13 November 2016, di Gereja Oikumene, Kelurahan Sengkotek, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Amirullah; 2016). Awal tahun lalu juga muncul beberapa

kasus yang berkaitan dengan isu ISIS, pembomban Thamrin, dan kasus Siyono (Yuswantoro, 2016).

Jika dirunut ke belakang maka peristiwa teroris di Indonesia cukup banyak, termasuk yang paling besar adalah bom Bali I tahun 2002, bom Kuningan dan bom di hotel Marriot pada tahun 2003, bom di kedutaan Australia 2004, dan bom Bali 2 tahun 2005. Padahal pemerintah tentunya sudah melakukan banyak hal sebagai upaya untuk menjaga keamanan setiap warga Negara.

Yang menarik berkaitan dengan Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, muncul image bahwa terorisme selama ini banyak dilakukan oleh gerakan islam radikal dan fundamental. Apalagi sejauh ini, persoalan terorisme bukan merupakan isu baru di Indonesia, melainkan sudah berlangsung sejak orde lama, orde baru, dan di era reformasi. Namun demikian, terorisme muncul sebagai isu strategis dalam kehidupan bernegara setelah serangan 11 September 2001.

Indonesia pun menjadi salah satu sorotan dunia internasional dengan eksistensinya yang banyak diberitakan sebagai second front dari gerakan terorisme setelah Afghanistan (Bond, 2005). Apalagi muncul berbagai analisa bahwa gerakan terorisme sekarang sudah sangat terorganisir dengan baik bahkan sudah masuk pada ranah *cyber terrorism*. Belum lagi eksistensi gerakan terorisme yang sudah menjadi gerakan transnasional. Artinya pengaruh internasional akan dengan mudah masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya orang lokal pun bisa eksis pada level internasional.

Hal ini misalnya terlihat dalam kasus Abu Jandal atau sering dikenal Salim Mubarak Attamimi Al Indunesiy juga merupakan salah seorang pimpinan ISIS yang berasal dari Malang. Ia pernah mengunggah video yang berisi provokasi untuk melakukan jihad di Irak dan Syam. Sampai sekarang diberitakan bahwa keluarganya pun masih tinggal di Malang (Wahyono, 2016). Diindikasikan melalui jaringan Attamimi ini pula berbagai upaya penyebaran paham radikalisme berkembang, seperti penyebaran majalah *al-Mustaqbal* yang memuat gambar pemimpin ISIS dan bernada provokatif mendukung gerakan jihad di Syam (Ainun, 2016).

Demikian juga dengan jaringan teroris lainnya seperti Jama'ah Islamia dan Al Qaeda juga berkembang di Indonesia. Indonesia seakan menjadi Negara seksi yang menjadi salah satu sasaran strategis ancaman terorisme. Apalagi perkembangan media di Indonesia relative bebas dan memberitakan apa saja yang hangat. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi gerakan terorisme untuk bisa berkembang karena memang terdapat simboisis

mutualisme antara media dan terorisme meskipun tanpa harus dengan kesepakatan (Cole, 2006).

Dengan adanya isu hangat, media mampu meningkatkan rating mereka. Sementara terorisme hakikatnya memang membutuhkan publikasi atas apa saja yang mereka lakukan supaya efek terror yang muncul bisa menyebar luas. Kondisi ini bertambah kompleks dengan munculnya *social media* yang membuat siapapun bisa menjadi penyampai berita. Kondisi ini mengindikasikan jelasnya ancaman terorisme di Indonesia.

Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut maka menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam perang melawan terorisme selama ini?. Hal ini penting karena ternyata setelah berlalu beberapa tahun, terorisme tetap menjadi isu sentral dalam politik Indonesia. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah tadi perlu dianalisa berdasarkan komitmen dan ketepatannya untuk menyelesaikan berbagai isu terorisme di Indonesia.

Kerangka Konsep

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada makalah ini, maka digunakan dua konsep, yaitu *Global War on Terrorisme* dan deradikalisasi.

Konsep Global war on terrorism

Istilah *global war on terrorism* berkembang luas sejak terjadinya serangan 11 September 2001 di WTC dan Pentagon. Pada waktu itu, presiden Amerika Serikat G.W. Bush menyatakan *every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists* (Tuathail, 2003). Pernyataan inilah yang akhirnya dikenal sebagai *global war on Terrorism (GWOT)*. Awalnya, ada banyak istilah yang digunakan seperti *war on global terrorism, war on terrorism, war on terror, battle against international terrorism* dan *global war on terrorism*. Namun dalam perkembangannya, GWOT menjadi lebih terkenal (Record, 2003).

GWOT maknanya bahwa agenda ini merupakan agenda yang harus dilakukan oleh semua masyarakat dunia, yaitu dengan terlibat dalam perang. Perang dalam arti adanya upaya militer. Meskipun demikian tindakan militer ini ditujukan kepada satu musuh bersama yaitu terorisme.

Masalahnya adalah bahwa ketika mendefinisikan terorisme, tidak semua Negara atau ahli punya kesepahaman. Pada suatu tempat seorang teroris bisa

dianggap sebagai pahlawan oleh kelompok yang lain. Namun demikian semua sepakat bahwa terorisme mempunyai beberapa karakter seperti serangan berupa kekerasan yang sifatnya tidak legal, tujuan politis dan bukan murni kriminal, dan sasaran serangan dilakukan terhadap masyarakat sipil, sehingga memunculkan ketakutan di tengah masyarakat untuk tujuan dan target tertentu agar mereka melakukan perubahan sikap dan atau kebijakan sesuai dengan yang dilakukan pelaku (Chaerudin, 2003).

Dengan Bahasa lain bisa dinyatakan bahwa terorisme merupakan tindakan kekerasan yang serius, berusaha untuk mempengaruhi publik atau institusi, biasanya dengan cara intimidasi terhadap penduduk sipil dan dilakukan oleh aktor non Negara (Rose & Nestorovska, 2005). Atau terorisme juga dapat diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan dengan menyerang lembaga bukan militer atau militer yang tidak aktif, aparat keamanan dalam kondisi aman dan penduduk sipil serta segenap fasilitas yang dimiliki untuk memunculkan *shock* (teror) di tengah masyarakat atau melakukan intimidasi serta penekanan terhadap pemerintah, atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak sesuatu. Adapun beberapa hal yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dikategorikan sebagai terorisme dan bisa disebut sebagai tindak kriminalitas.

Dalam perkembangannya, GWOT pun menghadapi tantangan serius karena kelompok teroris secara intensif memanfaatkan perkembangan komunikasi dan teknologi. Apalagi sekarang ini kita hidup di tengah masyarakat *global market*. Selain itu, ancaman terorisme di era ini semakin serius dikarenakan sistem organisasi dan peralatan yang dimiliki oleh kelompok ini semakin canggih. Melalui penguasaan terhadap media online dengan cara ilegal, gerakan terorisme tadi mengorganisasi diri. Bahkan tidak jarang mereka melakukan *hacking* atau melakukan penjualan barang-barang terlarang seperti obat-obat terlarang yang dilakukan oleh Al Qaeda (Smith, 2005).

Lebih mengkhawatirkan lagi jika jaringan tersebut membuat mereka mampu membangun gerakan yang semakin sistematis dan mengintensifkan berbagai tindak kekerasan melalui jaringan komputer dan internet. Kondisi ini seringkali disebut sebagai *cyber terrorism* (Lewis, 2002). Artinya, gerakan terorisme tidak lagi hanya sekedar dalam negeri atau antar negara di kawasan, tetapi melalui berbagai fasilitas yang tersedia di era globalisasi, mereka semakin mudah untuk membangun jaringan transnasional yang semakin kuat.

Oleh karena itu, GWOT juga mengembangkan berbagai upaya canggih untuk menghadapi tantangan tersebut. Meskipun dalam implementasinya terkadang tidak sampai pada upaya penyelesaian akar persoalan terorisme, terutama yang berkaitan dengan psikologis pelaku teror dan atau karena

masalah ekonomi, politik, agama dan sosial – berkenaan dengan diskriminasi, kelemahan negara, konflik etnis, konflik agama, kemiskinan, tekanan akibat globalisasi, ketidaksetaraan dalam politik, tradisi kekerasan, keberadaan kelompok revolusi, konflik antar elite, dll. Padahal jika dua persoalan besar ini tidak diselesaikan, para teroris akan selalu mengintimidasi, memprovokasi serta menebar teror di tengah masyarakat.

Konsep Deradikalisasi

Deradikalisasi sebenarnya bukan ide baru melainkan sudah berlangsung sejak abad ke-17 (McCauley, 2006). Seiring dengan hangatya isu terorisme pasca serangan 11 September 2001, deradikalisasi ikut menjadi program utama yang dikembangkan di berbagai Negara. Apalagi banyak pandangan yang menilai bahwa peristiwa serangan teroris ke gedung WTC dan Pentagon tersebut telah merubah peta politik dunia menjadi hitam dan putih, kelompok terorisme dan pendukungnya serta Amerika dan sekutunya yang sepakat untuk melakukan program deradikalisasi global yang dikenal dengan istilah *global war on terrorism (GWOT)*.

Secara konseptual sebagaimana terorisme sebenarnya juga belum ada kesamaan persepsi secara utuh dalam menjalankan upaya deradikalisasi. Ada sebagian yang fokus melakukan deradikalisasi dengan merubah sikap dan tingkah laku, ada yang fokus dengan perubahan cara berfikir, dan ada pula yang mencoba memfokuskan diri pada upaya penyelesaian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak terorisme. Meskipun demikian, semua sepakat bahwa semua program ini perlu dilakukan sebagai upaya strategis yang bisa menyelesaikan persoalan sampai akhirnya berdasarkan konteks lokasi dan situasi yang berkembang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat bahwa upaya yang efektif untuk melakukan deradikalisasi hanya akan bisa dilakukan jika pemahaman secara utuh terhadap gambaran radikalisme bisa diuraikan. Keduanya mempunyai keterkaitan yang kuat karena deradikalisasi sebenarnya merupakan upaya untuk menghilangkan radikalisme. Adapun radikalisme sendiri merupakan suatu pemahaman ekstrim yang tidak bisa menerima moderasi dan perbedaan pemahaman dengan orang atau pendapat lain sehingga mendorong untuk terjadinya kekerasan politik (Della Porta & LaFree, 2012).

Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa deradikalisasi merupakan upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyebabkan terjadinya radikalisme sebagaimana didefinisikan di atas. Dengan adanya program deradikalisasi ini, maka diharapkan peluang untuk terjadinya peningkatan eskalasi kekerasan oleh kelompok terorisme bisa dicegah atau diminimalisir.

Artinya bahwa deradikalisasi merupakan upaya strategis yang bisa membuat kondisi keamanan suatu masyarakat menjadi lebih kondusif dan mengedepankan suasana dialog. Maksudnya aktor-aktor yang bertanggungjawab dalam program ini tidak boleh justru melakukan tindak kekerasan yang bisa membuat masyarakat atau opini publik malah mendukung kelompok terorisme karena perlakuan yang tidak sesuai dengan HAM oleh aparat yang bertanggungjawab (Dechesne, 2011). Jika hal ini yang terjadi maka justru program deradikalisasi akan menjadi kontraproduktif dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk secara lebih leluasa merekrut kader dalam jumlah yang lebih banyak.

Oleh karena itu, konsep deradikalisasi ini akan digunakan untuk memahami berbagai upaya yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengantisipasi perkembangan terorisme di tengah masyarakat.

Temuan-Temuan

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam paper ini, maka ditemukan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya melakukan *global war against terrorism*. Beberapa upaya tersebut bisa dikategorikan ke dalam kebijakan domestik dan kebijakan eksternal.

Kebijakan Domestik

Beberapa kebijakan domestik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai komitmen mereka dalam melakukan perang melawan terorisme, bisa diuraikan sebagaimana berikut:

Pertama, Implementasi *Anti Terorisme Law*. Menyikapi semakin maraknya serangan terorisme pasca 11 September 2001, pemerintah Indonesia mengeluarkan Indonesia's Anti-terrorism Law (ATL) pada tahun 2002, yang merupakan suatu aturan yang mengundang kontroversi dalam hukum dan politik Indonesia.

Pada waktu itu, aturan ini ditandatangani oleh presiden Megawati tepatnya tanggal 18 Oktober 2002, enam hari setelah terjadinya bom Bali. Awalnya aturan ini dibuat sebagai respon dari serang terorisme 11 September 2001. Namun karena terjadi peristiwa bom Bali, maka penyelesaian aturan tersebut dipercepat. Berdasarkan aturan dalam Perpu ini, maka siapa saja yang melakukan tindakan terorisme, ia akan diganjar hukuman antara 5 sd 20 tahun. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 6 (Butt, 2008).

Dalam perkembangannya, Perpu ini pun ditetapkan sebagai Undang-Undang pada tahun 2003, yaitu UU RI No. 16 Tahun 2003. Artinya upaya untuk penanggulangan terorisme di Indonesia pun secara hukum menjadi kuat, dan

secara politik sudah menjadi perhatian semua kalangan masyarakat utamanya DPR RI yang merupakan representasi dari suara rakyat. UU ini disahkan atas persetujuan DPR pada tanggal 4 April 2003 (Aji, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah meletakkan landasan hukum yang kuat untuk penanganan isu terorisme.

Kedua, dalam upaya implementasi Perpu Terorisme ini pula, pemerintah segera membentuk berbagai lembaga yang dinilai akan memudahkan upaya penanggulangan terorisme. Di antara beberapa lembaga yang dibentuk tersebut antarlain Densus 88 dan BNPT.

Detasemen Khusus (densus) 88 merupakan langkah cepat yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam merespon bom Bali tahun 2002. Lembaga ini diformalkan oleh Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004 dengan misi untuk melindungi setiap warga Negara Indonesia dari serangan teroris.

Namun dalam implementasinya, Densus 88 dinilai banyak merugikan umat Islam. Hal ini dikarenakan banyaknya aktifis muslim yang giat dalam menjalankan agama justru menjadi korban lembaga ini. Bahkan muncul pandangan di tengah masyarakat bahwa Densus 88 sangat subjektif, menjadi musuh Islam. Setiap kali melakukan penyergapan terhadap terduga teroris, maka mereka melakukan langkah represif dengan menyiksa bahkan membunuh. Lembaga ini pun akhirnya dinilai banyak melakukan pelanggaran HAM dan diduga menjadi alat kepentingan asing (Hilmy, 2013).

Menyikapi berbagai respon dan kontroversi lembaga ini, maka BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dibentuk dengan tujuan mengembangkan strategi dalam memerangi terorisme. Lembaga ini berdiri pada tahun 2010 berdasarkan dekret Presiden nomer 46 tahun 2010. Lembaga ini memiliki beberapa divisi, seperti divisi pencegahan, perlindungan dan divisi deradikalisasi. Fokus utama yang menjadi karakter dari lembaga ini adalah ketersediaan desk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Dengan cara ini, maka diharapkan BNPT dalam pengambilan kebijakannya melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi Islam supaya penyebaran ideology radikal bisa ditangkal (Hilmy, 2013)

Ketiga, *Countering financing*. Kita mengetahui bahwa tidak mungkin teroris bisa melakukan aksi mereka tanpa dukungan dana yang besar. Menurut World Bank dan IMF, pendanaan teroris bermakna semua hal yang sifatnya dukungan terhadap gerakan terorisme dan memotivasi, membantu merencanakan serangan atau terlibat dalam serangan itu sendiri (Biersteker & Eckert, 2007)

Oleh karena itu, dalam rangka membatasi ruang gerak tersebut, maka pemerintah Indonesia pun melakukan counter financing. Di antara hal yang dilakukan oleh pemerintah misalnya adalah dengan membatasi jumlah uang yang bisa ditransfer antara Negara, atau dibawah keluar atau masuk dari Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan PPATK untuk membantu mereka menelusuri aliran dana yang diduga kuat berkaitan dengan jaringan gerakan terorisme.

Di antara kinerja PPAT ini terlihat dalam kesuksesan mereka untuk membongkar aliran dana yang masuk ke JAT pada tahun 2010. Dalam penelusuran tersebut mereka menemukan bahwa ternyata gerakan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang merupakan organisasi bentuk Abu Bakar Baasyir, telah melakukan latihan militer di Aceh. Untuk keperluan tersebut mereka mendapatkan bantuan dana dari Amir Falah, Hariyadi Usman, dan Dr Syarif Usman yang masing-masing menyediakan dana sebesar Rp.400 juta (\$44,000), Rp.150 juta (\$16,000); Rp.200 juta (\$22,000). Selain itu, PPATK melaporkan pada 30 November 2009 bahwa ada sekitar 1.071 transaksi mencurigakan yang dinilai punya keterkaitan dengan gerakan terorisme (Acharya & Astuti, 2010)

Selain melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, upaya penanganan isu terorisme di Indonesia juga didukung dengan penegakan hukum. Di antara pasal yang khusus berkaitan dengan upaya pembatasan gerak transaksi yang terindikasi mempunyai keterkaitan dengan isu terorisme terdapat dalam undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme (Puspita & others, 2016).

Keempat, Pelibatan *civil society*. Kebijakan ini merupakan perkara yang sangat penting karena tanpa dukungan dari masyarakat, perang melawan teroris akan sulit dilakukan. Apalagi dalam kasus penanganan masalah terorisme di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jika salah dalam mengambil langkah strategis, maka bisa jadi perang melawan teroris akan menjadi kontraproduktif dan dinilai sebagai perang melawan Islam.

Civil society pada satu sisi merupakan pihak yang seringkali menjadi korban dengan adanya serangan terorisme. Pada sisi lain, *civil society* merupakan penentu legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam system yang demokratis (Beck, 2002). Oleh karena itu, *soft approach* yang dilakukan oleh aparat yang bertugas diperlukan untuk mengkomunikasikan secara intensif kepada masyarakat bahwa terorisme sebenarnya merupakan ancaman bersama. Dengan terbangunnya *mutual understanding* ini, maka

masyarakat pun akan secara aktif melibatkan diri dalam perang melawan terorisme.

Apalagi kelompok yang selama ini dinilai sebagai ajaran garis keras merupakan realitas yang ada di tengah masyarakat. Aksi kekerasan yang mereka lakukan hakikatnya merupakan respon dari berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik yang selama ini belum terpecahkan oleh pemerintah. Artinya, pelibatan *civil society* dalam perang melawan teroris merupakan langkah maju untuk memahami terorisme sampai pada akar persoalannya.

Beberapa di antara gerakan yang terlihat tersebut misalnya adalah upaya Front Pembela Islam (FPI) dibawah pimpinan Muhammad Rizieq Shihab yang berusaha untuk mengimplementasikan syariah Islam dengan cara mendatangi dan memberikan peringatan kepada pemilik tempat-tempat hiburan seperti café, diskotik, kasino, dan sejenisnya. Artinya kehadiran mereka muncul karena eksistensi realitas sosial yang kurang islami.

Demikian juga dengan kemunculan Laskar Jihad dibawah pimpinan Ja'far Umar Thalib, atau Laskar Mujahidin dibawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, kemunculan gerakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial politik dengan belum selesai berbagai persoalan di daerah minoritas muslim (Meijer, Hasan, Hendriks, & Janssen, 2012). Karena kondisi tersebut, akhirnya muncul keinginan dari mereka untuk membantu saudara seiman. Meskipun dalam realitanya, berbagai dampak psikologi, sosial dan politik baru muncul setelah itu.

Dalam hal pelibatan *civil society* ini, kami memandang pemerintah sejauh ini belum melibatkan semua elemen dan kelompok keagamaan yang ada di tengah masyarakat. Hal ini misalnya dalam kasus terbaru berkaitan dengan kasus Ahok terlihat dari upaya pemerintah yang lebih banyak fokus kepada organisasi keagamaan yang mapan saja seperti Muhammadiyah dan NU. Padahal realitanya masih banyak kelompok sosial di luar itu. Jika keras aspirasi mereka tadi terhambat, maka hal ini tentu akan berdampak negative dan kontraproduktif dalam agenda perang melawan teroris.

Kebijakan Eksternal

Selain kebijakan domestik sebagaimana dijelaskan di atas, pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa kebijakan eksternal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa serangan terorisme yang selama ini terjadi tidak hanya dilakukan oleh kelompok domestik semata, melainkan jaringan yang melampaui batas Negara, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Di antara jaringan tersebut misalnya adalah jaringan Abu Sayyap di Mindanaou Selatan dan Jaringan Jama'ah Islamiah yang melibatkan aktor-aktor

dari Indonesia dan Malaysia. Meskipun demikian, beberapa pengamat menilai bahwa potensi dari gerakan lain untuk berkembang menjadi terorisme relatif sulit di kawasan Asia Tenggara karena beberapa faktor seperti tidak adanya potensi *state sponsored terrorism* dan keberagaman etnis dan agama yang mempersulit gerak jaringan teroris (Gershman, 2002).

Meskipun demikian, hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Apalagi sebagian lain menilai bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan *second front* dari gerakan terorisme. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai persoalan dan tensi yang dihadapi sesama Negara ASEAN, dalam kasus *global war on terrorism*, maka semua Negara ASEAN bergerak bersama atas nama regionalism untuk menjaga keamanan kawasan. Di antara bukti bahwa Negara-negara ASEAN menyadari akan berbahayanya ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara terlihat dari inisiasi untuk mendeklarasikan *Joint Action to Counter Terrorism* pada tanggal 5 November 2001. Dalam pertemuan ini, mereka bersepakat untuk membangun persepsi bersama berkaitan dengan ancaman terorisme (Chow, 2005).

Dalam deklarasi ini pula mereka berhasil mendefinisikan ancaman terorisme, tetapi tidak punya kesepakatan dalam menentukan kelompok terorisme yang menjadi ancaman di kawasan. Beberapa Negara ASEAN misalnya menyatakan bahwa Jama'ah Islamiah (JI) merupakan kelompok teroris. Namun demikian, wakil presiden Yusuf Kalla dengan upaya untuk objektif terhadap kepentingan nasional Indonesia mengingat keberadaan jaringan JI banyak di Indonesia menyatakan bahwa hal tersebut tidak berarti bisa dengan melarang keberadaan JI karena JI sendiri bukanlah organisasi. Hal ini pula yang pada akhirnya menjadi inspirasi bagi Polri untuk melihat teroris lebih kepada aktor individu yang terlibat (Soesilowati, 2011)

Selain kerjasama regional sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai kerjasama bilateral dalam *global war on terrorism*. Dalam hal ini, Amerika merupakan salah satu partner strategis. Ketika *global war on terrorism* mulai dikumandangkan, maka dengan cepat Amerika meyakinkan Indonesia untuk terlibat dalam program ini.

Untuk hal tersebut, Amerika bahkan rela memberikan bantuan militer sebesar US\$ 657.4 juta, dengan rincian \$ 400,000 untuk pendidikan masyarakat sipil tentang isu pertahanan, US\$ 10 juta dollar untuk pelatihan polisi, US\$ 130 juta untuk reformasi hukum, US\$ 10 juta untuk membatu pengungsi di Maluku, US\$ 5 juta untuk membangun kembali sekolah dan infrastruktur di Aceh, US\$ 2 juta untuk membantu masyarakat Timur Leste yang memilih tinggal di Indonesia, US\$ 400 juta untuk mempromosikan perdagangan

dan investasi, dan US\$ 100 juta untuk produk Indonesia yang menggunakan *Generalized System of Preferences (GSP)* (Febrica, 2010).

Dengan besarnya bantuan yang diberikan Amerika tersebut terhadap pemerintah Indonesia, maka secara rasional bisa dipahami bahwa Amerika punya kepentingan strategis dalam perang melawan teroris di Indonesia, terutama berkaitan dengan ekonomi dan reformasi hukum sebagaimana anggaran terbesar dalam data di atas.

Selain Amerika, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan beberapa Negara tetangga seperti Australia, Singapore dan Malaysia untuk penanganan masalah terorisme. Dengan Australia, kerjasama ini sudah dimulai sejak pemerintahan Megawati dikarenakan ketika terjadi bom Bali I tahun 2002 dan bom Bali 2 tahun 2005, banyak warga Australia yang menjadi korban. Kerjasama tersebut pun semakin ditingkatkan pada masa pemerintahan SBY dalam upaya untuk mencegah dan memproteksi terjadi serangan terorisme (Haryani; 2007). Adapun kerjasama dengan Malaysia dan Singapura lebih banyak ditekankan pada penjagaan keamanan di sekitar selat Malaka.

Analisis

Dari beberapa temuan dalam pembahasan sebelumnya maka terlihat bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan banyak kebijakan baik domestik maupun eksternal dalam *global war against terrorism*. Beberapa upaya pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas patut diapresiasi karena telah menjadikan Indonesia sebagai Negara yang komitment dalam memerangi terorisme. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai persoalan serius yang perlu ditangani.

Di antara beberapa hal yang menjadi kendala kebijakan domestik berkaitan dengan komitmen untuk menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan system pendanaan (Acharya & Astuti, 2010). Adapun dalam kebijakan eksternal, isu komitmen dan kedaulatan bangsa masih merupakan diskursus yang belum menemukan solusi.

Pertama, berkaitan dengan masalah aturan hukum yang sudah dibuat misalnya, implementasi di lapangan tidak sepenuhnya sesuai aturan. Yang terjadi adalah bahwa terduga teroris selama ini banyak dihabisi di tempat tanpa melalui proses hukum berdasarkan subjektifitas aparat dalam upaya untuk melindungi diri karena ada indikasi melawan dan pelaku terror. Akibatnya, seringkali apa yang sebenarnya terjadi di balik suatu serangan terorisme tidak diketahui secara utuh kecuali hanya dari perspektif aparat yang didukung oleh

media semata. Padahal jika kita ingin melihat akar sebenarnya dari terorisme, maka upaya hukum yang berkeadilan bisa digunakan.

Kedua, demikian juga dalam hal koordinasi. Seringkali upaya yang dilakukan menonjolkan kepentingan dan eksistensi masing-masing lembaga. Pada akhirnya, upaya untuk melakukan kerjasama yang komprehensif belum sepenuhnya berjalan. Meskipun masyarakat sudah mulai dilibatkan misalnya, tetapi tidak jarang mereka hanya merupakan perwakilan dari sekelompok kecil golongan saja. Berkaitan dengan organisasi keagamaan misalnya, yang dilibatkan hanya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, padahal masih banyak organisasi-organisasi keagamaan lainnya yang justru bahkan lebih berpotensi untuk melahirkan gerakan terorisme.

Demikian juga dengan system pendanaan. Selama ini banyak yang merasa belum terpenggil untuk memerangi terorisme karena akar persoalan yang belum ditemukan, dan kecurigaan bahwa sebagian kelompok agen mendapatkan keuntungan kelompok dan golongan dalam proyek ini. Oleh karena itu, seharusnya perlu ada upaya untuk duduk bersama supaya selain *job description* masing-masing pihak jelas, konsekuensi terhadap masalah pendanaan pun bisa dikomunikasikan.

Adapun berkaitan dengan kebijakan eksternal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tetapi sebenarnya Negara-negara ASEAN tadi belum mempunyai kata sepakat dalam mendefinisikan siapa yang dinilai sebagai terorisme. Hal ini pada akhirnya tentu juga mempengaruhi komitmen antara satu Negara dan lainnya dalam upaya memerangi terorisme.

Hal lain juga yang menjadi persoalan berkaitan dengan komitmen untuk tidak saling mencampuri urusan domestik negeri lain atas nama kedaulatan bangsa. Padahal tidak jarang isu terorisme pada satu Negara berkaitan erat dengan isu sosial politik domestik Negara tersebut, seperti isu GAM di Aceh Indonesia (Chow, 2005). Pada satu aspek isu terorisme memang sering melibatkan jaringan transnasional, tetapi pada aspek yang lain upaya menemukan hubungan tersebut kecuali realita yang terjadi pada domestik masing-masing Negara cukup sulit dilakukan.

Demikian juga dengan masalah keberagaman masing-masing Negara dengan variasi isu domestik yang dihadapi serta pilihan politik luar negeri mereka. Dengan berbagai alasan tersebut, maka terlihat bahwa kolaborasi melawan terorisme baik pada level regional ASEAN maupun bilateral lebih banyak bersifat normative dibandingkan langkah konkret.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa upaya untuk memerangi terorisme perlu melibatkan berbagai aspek, dan level kebijakan. Pemerintah Indonesia disamping sudah melakukan berbagai upaya sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu meningkatkan komprehensifitas dalam upaya-upaya tersebut, termasuk di dalamnya pada level Negara, bilateral, regional dan internasional. Demikian juga, terorisme harus ditangani dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Tanpa kebijakan yang komprehensif tersebut, maka kebijakan pemerintah Indonesia dalam global war against terrorism belum akan memberikan makna signifikan.

Selain itu, dalam penanganan isu terorisme maka perlu ada keterbukaan dan evaluasi secara rutin sehingga perkembangan masing-masing tahapan yang telah disepakati bisa dijalankan. Berbagai upaya untuk semakin meningkatkan upaya implementasi komitmen yang sudah dibuat perlu dilakukan.

Referensi

- Acharya, A., & Astuti, F. (2010). Chink in the armour: tightening Jakarta's counter terrorist. Retrieved from <https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/6658/RISIS0822010.pdf?sequence=1>
- Ainun, Y. (2016). Majalah ISIS Beredar di Malang. Retrieved April 14, 2016, from <http://regional.kompas.com/read/2014/08/06/17202971/Majalah.ISIS.Beredar.di.Malang>.
- Aji, A. M. (2016). Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum). *Jurnal Cita Hukum*, 1(1). Retrieved from <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2980>
- Amirullah. (n.d.). Jusuf Kalla: Bom Samarinda Bukti Terorisme di Sekitar Kita | Tempo Nasional. Retrieved November 19, 2016, from <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/14/063820060/jusuf-kalla-bom-samarinda-bukti-terorisme-di-sekitar-kita>
- Beck, U. (2002). The terrorist threat world risk society revisited. *Theory, Culture & Society*, 19(4), 39–55.
- Biersteker, T. J., & Eckert, S. E. (2007). *Countering the financing of terrorism*. Routledge. Retrieved from <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=x14VhZbmzf4C&oi=fnd&pg>

=PP1&dq=indonesia+terrorism&ots=wLGSN1I0n4&sig=RSyryz6uYHnANf
gnb0EU4bQwfnjY

- Björger, T. (2004). *Root Causes of Terrorism: Myths, reality and ways forward*. Routledge. Retrieved from https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=fsN_AgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=types+of+terrorism+&ots=UJNEmhX3Di&sig=Qro7A2PjX0ibBMTk5BiWU2UAuoE
- Bond, C. S. (2005). *Indonesia and the changing front in the War on Terrorism*. Heritage Foundation. Retrieved from http://s3.amazonaws.com/thf_media/2005/pdf/hl875.pdf
- Butt, S. (2008). *Anti-Terrorism Law and Criminal Process in Indonesia*. University of Melbourne. Centre for Islamic Law and Society. ARC Federation Fellowship. Retrieved from http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1547786/butt_final_forwebsite2.pdf
- Chaerudin, A. (2003). *Countering transnational terrorism in Southeast Asia with respect to terrorism in Indonesia and the Philippines*. Monterey, California. Naval Postgraduate School. Retrieved from <http://calhoun.nps.edu/handle/10945/6226>
- Chow, J. T. (2005). ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11. *Asian Survey*, 45(2), 302–321. <https://doi.org/10.1525/as.2005.45.2.302>
- Cole, B. (2006). *Conflict, Terrorism and the Media in Asia*. Routledge. Retrieved from <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=aE-Hae97ZJYC&oi=fnd&pg=PP1&dq=indonesia+terrorism&ots=TQ8RrdGR1w&sig=wl88hUnb4qi7nNi8H-OYwnkMI8s>
- De Mesquita, E. B. (2007). *Correlates of public support for terrorism in the Muslim world*. Citeseer. Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.488.8562&rep=rep1&type=pdf>
- Dechesne, M. (2011). Deradicalization: not soft, but strategic. *Crime, Law and Social Change*, 55(4), 287–292.
- Della Porta, D., & LaFree, G. (2012). Guest editorial: Processes of radicalization and de-radicalization. *International Journal of Conflict and Violence*, 6(1), 4–10.
- Febriana, S. (2010). Securitizing Terrorism in Southeast Asia: Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia. *Asian Survey*, 50(3), 569–590. <https://doi.org/10.1525/as.2010.50.3.569>
- Gershman, J. (2002). Is Southeast Asia the second front? *Foreign Affairs*, 60–74.

- Haryani, S. (n.d.). The Indonesia and Australia Counter-Terrorism Cooperation: Comparison between Megawati Soekarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono Government. Retrieved from http://journal.unair.ac.id/filerPDF/2008%204%208%20COUNTER-%20TERRORISM%20COOPERATION%20INDO-AUSTRALIA_umm%E2%80%A6.pdf
- Hilmy, M. (2013). The Politics of Retaliation: the Backlash of Radical Islamists to the Deradicalization Project in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 51(1), 129–158.
- Lewis, J. A. (2002). *Assessing the risks of cyber terrorism, cyber war and other cyber threats*. Center for Strategic & International Studies Washington, DC. Retrieved from <http://www.steptoe.com/publications/231a.pdf>
- Lizardo, O. A., & Bergesen, A. J. (2003). Types of terrorism by world system location. *Humboldt Journal of Social Relations*, 162–192.
- McCauley, C. (2006). Jujitsu politics: Terrorism and response to terrorism. *Collateral Damage: The Psychological Consequences of America's War on Terrorism*, 109–128.
- Meijer, R., Hasan, N., Hendriks, B., & Janssen, F. (2012). *Counter-terrorism strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia*. Netherlands Institute of International Relations' Clingendael'. Retrieved from <http://repository.tudelft.nl/view/wodc/uuid:7d420ebd-4a2d-4060-9c49-816e4f63361c/>
- Puspita, V. I., & Others. (2016). *Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya*. Universitas Airlangga. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/33005/>
- Record, J. (2003). *Bounding the global war on terrorism*. DTIC Document. Retrieved from <http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA419754>
- Rose, G., & Nestorovska, D. (2005). Towards an ASEAN counter-terrorism treaty. *SYBIL*, 9, 157.
- Smith, P. J. (2005). Terrorism and violence in Southeast Asia. *Transnational Challenges to States and*.
- Soesilowati, S. (2011). Asean's response to the challenge of terrorism. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik (Society, Culture and Politics)*, 24, 228–241.
- Tuathail, G. Ó. (2003). "Just out looking for a fight": American affect and the invasion of Iraq. *Antipode*, 35(5), 856–870.

Wahyono, T. (n.d.). Video Seruan Jihad Milisi ISIS Asal Malang Muncul di YouTube - Kompas.com. Retrieved April 14, 2016, from <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/13/11440441/video.seruan.jihad.milisi.isis.asal.malang.muncul.di.youtube>

Yuswantoro. (2016, March 3). Malang Jadi Pelarian Jaringan Teroris Thamrin. Retrieved April 13, 2016, from <http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=26&date=2016-03-03>

The People's Republic of China Claim of South China Sea on Indonesia Sovereignty (2014 - 2015)

Hendra Manurung

President University

manurunghendra6@gmail.com

Abstract

Currently, China has not abandoned its policy of resolving the contentious South China Sea (SCS) issue through peaceful means. None of Asian countries wants a war but China's recent words and deeds are not only alarming but are moving in that direction. However, the main problem with China is that claims almost all of the SCS as its own, based on a vague U-shaped line known as the nine-dash line, an assertion that is fiercely contested by Vietnam, the Philippines, Taiwan, Malaysia and Brunei. Indonesia, which is not a claimant state, is more worried about China's unilateral claims and its assertiveness, which could threaten regional peace and stability as well as the unity of ASEAN. More alarmingly, China has now included part of Natuna Islands waters within Indonesia's Riau Islands province in its territorial map based on the nine-dash line. It is a serious external threat to Indonesia's territorial integrity and sovereignty. This research attempts to elaborate China's territorial claim on Indonesia territory which is interpreted differently by decision-makers. It used descriptive analytical methodology. It needs appropriate mechanism to prevent conflict and promote cooperation among disagreeing parties.

Keywords:

china, unilateral, south china sea, regional stability, indonesia

Introduction

Indonesia appears ready to flex its diplomatic, if not its maritime, muscle in dealings with China over a recent incident involving a Chinese coastguard vessel and an Indonesian patrol boat in the vicinity of Indonesia's Natuna Islands in the South China Sea. The arrest of a Chinese fishing vessel that Indonesia claims was fishing illegally in Indonesian territorial waters sparked a series of events that have exposed the underbelly of Indonesia's national maritime sensitivity and have the potential to sour China's key partnership in Southeast Asia.

Unlike earlier incidents, this one involved a Chinese coastguard vessel almost intruding into Indonesia's 12-nautical mile territorial sea off Bunguran (Natuna Besar) Island. China should not underestimate the significance of this threat to Indonesian national integrity.

China does not dispute Indonesia's claims to this maritime area but it asserts that Chinese fishermen have traditional fishing rights there. This is consistent with the Chinese interpretation of maritime law that would allow 'traditional fishing' in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). This thinking appears to lie at the heart of China's famous nine-dash line that surrounds a large part of the South China Sea.

Indonesia and China have no territorial dispute in the South China Sea. Indonesia has, in the past, played an active and principled part in trying to define a framework within which disputes among the various claimants to territories there — China, Vietnam, the Philippines, Taiwan, Malaysia and Brunei — might be mitigated or resolved.

Indonesia's President, Joko Widodo (Jokowi), has declared a new maritime priority for the Indonesian state. The largest archipelagic state in the world, Indonesia encompasses huge marine resources. The country has a total land area of 1.9 million square kilometers. An additional 3.2 million square kilometers of ocean lie within its borders. Indonesia's maritime priorities are an overdue and legitimate focus of national policy. Its seaways have too long been a barrier to, rather than a facilitator of, national integration. Its role as a maritime Asian nation needs to be strengthened as an enhancement to regional stability. Its neighbors, including Australia, Singapore, Malaysia as well as China and Japan have a constructive interest in this development.

This is a moment of strategic sensitivity in Sino-Indonesian relations, as the Jokowi administration struggles to implement its Global Maritime Fulcrum (Poros Maritim Dunia, PMD) concept. It tests whether Indonesia has the capacity to develop a maritime strategy that will achieve the PMD's policy goals.

The success of PMD depends on the development of a coherent maritime strategy with Indonesia's archipelagic geography as the foundation of its strategic thinking. The strategy should be based on Indonesia's foreign and maritime policy principles, the interplay between Jokowi's PMD concept and Indonesia's maritime strategic thinking and a realistic view of what the goals should be.

It explains how the squabbles around Natuna have escalated over different conceptions of the application of international maritime law.

For Jakarta, the trawler was fishing illegally and engaging in prohibited fishing practices in an exclusive Indonesian maritime zone. Because Indonesia enjoys undisputed sovereign rights and jurisdiction over these waters, the vessel and its fishermen must submit to the force of domestic law.

While for Beijing, the vessel was carrying out normal operations, although Beijing has not explicitly vouched for its fishing practices within traditional Chinese fishing grounds. Up to the perimeter enclosed by the nine-dash line in the semi-enclosed South China Sea, traditional Chinese fishermen individually enjoy non-exclusive historic fishing rights. Because Beijing reserves a vested interest and jurisdiction to ensure the preservation of this right within the nine-dash line, Jakarta should release the detained fishermen without delay.

The legal basis for both countries' actions is UNCLOS. But each side presents a different interpretation of the Convention's application and reach. The Philippines versus China arbitration winding towards a climax in The Hague should provide some answers to these impossible to reconcile Indonesian and Chinese fisheries-related interpretations.

The dominant view among scholars and practitioners sides with Jakarta. But three major points in China's favor have arisen from jurisprudential innovations before and since Manila filed its case.

First, international sea law recognizes history as a basis for entitlements in semi-enclosed seas, although the scope of jurisdiction associated with this local custom-based right in foreign EEZs is unclear.' Additionally, states are able to claim supplementary rights to UNCLOS, such as those enjoyed by Indonesian traditional fishermen, through bilateral agreement or local custom.

These supplementary historic fishing rights, regulated by international law outside UNCLOS, operate equally across each of the maritime zones created by the Convention, including, presumably, in the Natuna Exclusive Economic Zone.

This is no time for Chinese megaphone diplomacy over an incidental matter at a point of Indonesian diplomatic vulnerability. That could unwittingly change the geopolitical environment in Southeast Asia in a way that is counterproductive to constructive relations between China and, not only Indonesia, but the whole Southeast Asian region.

Asia Pacific Territorial Dispute

In order to protect its national interests and security, Indonesia has no other alternative but to seek a peaceful de-escalation of tensions between China and Japan.

The Asia-Pacific region often attracts the attention of Russia and the United States, mainly because of the presence of the central power in the region, China, and that government's relations with its neighbors. Tensions between China and Japan, as a result of territorial disputes, continue to increase concern in the region and beyond.

In this regard, two possible scenarios cause the greatest concerns. First of all, there is a concern that this tension could escalate into an armed conflict. Second, in order to protect itself from the Chinese threat, Japan may decide to develop its own nuclear weapons. Both the first and second scenarios are characterized by great ambiguity.

The first question relates to the role of the United States. If this conflict should escalate, how would the U.S. behave? Beijing knows that Washington has made firm commitments to Tokyo, implying the use of force, including nuclear weapons in case of any aggression against Japan. Undoubtedly, for China this serves as a deterrent, while in Tokyo, they certainly understand that the U.S. has not always acted in accordance with its undertaken obligations.

For example, during the Pakistan-India war in 1971, the U.S., contrary to the Mutual Defense Assistance Agreement (MDAA) signed in 1954, did not provide assistance to Pakistan. Moreover, the Americans imposed an arms embargo on both India and Pakistan. Given their close economic interdependence today, would the U.S. risk aggravating its relations with China for the sake of their obligations to Japan? This question has no simple answer.

There has been talk in Japanese expert circles to the effect that, in response to the growing Chinese threat, Japan will use appropriate means. If all the usual conventional means cannot stop the aggression of China, then a decision will have to be made as to the creation of nuclear weapons.

This approach has its fair share of uncertainties and unknowns. First, it is not a foregone conclusion that China will increase its threats against Japan. It is obvious that Beijing is interested in using the territorial dispute with Japan to put pressure on that country, and also to mobilize the masses inside China under nationalist slogans.

However, is it really in the interest of China to engage in a full-scale armed conflict with Japan? Hardly it is difficult to assume that China will engage in any military conflict with Japan for next 5 (five) years.

Second, if we imagine an apocalyptic scenario, in which China and Japan, which would have acquired a nuclear arsenal, exchange nuclear strikes against each other's territories, it is clear that China will have a chance to survive this, but Japan has absolutely no way to emerge from such a conflict.

Third, in Japan there are many people who, remembering the disaster of Hiroshima and Nagasaki, continue to strongly oppose the creation of nuclear weapons.

An important obstacle to the escalation of tensions in the Asia-Pacific region is the position of third-party countries, including Indonesia, which is interested in developing relations with China and also its neighbors. Escalation of conflicts in the region, interruption of trade and economic relations between regional countries, all this goes against Indonesia's interests.

In its relations with countries in the Asia-Pacific region, Indonesia mainly focuses on the economic aspects, avoiding emphasis on political issues. In such a way, Indonesia avoids getting involved in regional disputes between countries. It is unlikely that there is any other acceptable alternative to this approach for Indonesia.

This does not mean that Jakarta will be turning a blind eye to the dangerous trends developing in the region. First of all, a cause for concern is the situation on the Korean Peninsula and North Korea's attempts to acquire nuclear weapons. While Pyongyang is trying to convince everyone that it has already become a nuclear power, but its missile and nuclear tests put these claims to doubt.

No one in Indonesia supports those forces in Japan and South Korea that are seeking the creation of nuclear weapons. In addition, Indonesia is interested in greater transparency in China's nuclear arsenal.

Indonesia & Southeast Asia Dynamics

On 8 October 2013, with Barack Obama backing out of the major summits in the region, all eyes will be on China's Xi Jinping and his approach to the Southeast Asian countries, many of which have maritime territorial disputes with China.

The Southeast Asia became the centre of international political life, if not in the world, then at least in the Asia-Pacific Region. Issues of economic integration of the Pacific Basin are being discussed at the 25th APEC Summit, which is taking place in Bali at the moment. The political prospects of the region shall be the central topic at the 23rd ASEAN Summit and 8th East Asia Summit (EAS), which held on October 9–10, 2013 in Brunei.

Until recently, it was possible to shape the parameters of the events that were to take place in these forums. On September 13, 2013 it was officially announced that U.S. President Barack Obama, was in Southeast Asia on October 6 to 12, 2013 to attend the meetings of APEC, ASEAN and EAS, as

well as visiting Malaysia and the Philippines. Obama said that the main issues raised by the U.S. delegation during his eastern tour would be economic cooperation between America and the countries of the Asia-Pacific Region, the problems of maritime security, as well as other issues of regional and global scale.

As to these other issues, there was no mystery at the political level, the U.S. intends bring to the foreground the issue of the disputed territories in the East China and South China Seas, thereby heating up the confrontation between some countries of East Asia and China. Actually, this tactic is nothing new.

Manurung stated Indonesia borders the South China Sea, which contains the world's busiest sea lanes and sees over USD 5 trillion in cargo and as much as 50 percent of the world's oil tankers pass through its waters each year.

The United States is one of the 1st countries to establish diplomatic relations with Indonesia in 1949, following its independence from the Netherlands. Indonesia's democratization and reform process since 1998 has increased its stability and security, and resulted in strengthened U.S.-Indonesia relations.

However, U.S. needs to secure its economic relations with Indonesia and vice versa. For U.S. leaders, Indonesia plays a critical role with respect to ASEAN Single Market 2015, the South China Sea, climate change, and other specific related issues.

It was most fully expressed in 2010, when Secretary of State Hillary Rodham Clinton, at the ASEAN Regional Forum (ARF), declared as a national interest of Washington, the settlement of territorial disputes in the South China Sea. These actions fit into the concept of a strategic turn of the United States towards Asia, which have a clear objective, to strengthen existing bilateral strategic alliances between the U.S. and East Asian countries, as well as the consolidation and creation of new tactical alliances. Support for the political component of the external line in the economic field, follows the line of controversial initiatives. It is the creation of a Trans-Pacific Partnership, with Washington playing the central role. The discussion of this initiative was planned, in particular for the APEC Summit, which is an organization that is gradually losing its integrative influence.

However, the failure of Barack Obama to make a tour of South East Asia, and in particular, to attend two key summits during the political crisis in the United States, once again has made many countries in East Asia question whether the former role of the U.S. in containing China in the Pacific Rim will be maintained. Consequently, will the U.S. continue to support these countries in

their confrontation with China, one of the main centers of this being territorial disputes involving four countries of Southeast Asia, i.e.: Vietnam, Philippines, Malaysia and Brunei, and Beijing over islands in the South China Sea.

Unlike the president of the United States, the Secretary of State John Kerry presents a more controversial figure trying to convince Southeast Asian countries that Washington will not abandon its allies in the Asia-Pacific Region. During Obama's first term, Kerry showed skepticism towards a strategic U-turn in U.S. foreign policy toward East Asia.

"Let me clarify, none of what is happening in Washington, not in the least reduces our obligations to our partners in Asia," Kerry already announced. However, apparently, convincing Washington's partners in the region that the White House is ready to continue its support, in spite of domestic and foreign policy challenges in Washington, is not easy.

Reluctance to provide support, despite internal political problems, has started to worry many in the region. "We are disappointed [that the U.S. president will not come]," said Titaful Sembiring, the Minister of Communications and Information of Indonesia. The cancellation of Obama's visit to Southeast Asia, according to Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong, "cannot be regarded as useful for the United States." At an informal level, the representatives of other countries also expressed their concerns.

These sentiments will gladly be exploited by the Chinese leadership in upcoming summits. Chinese policymakers have been gradually dropping their characteristic harsh rhetoric of previous years against many countries in East and Southeast Asia. It was replacing it with the soft threats of the resurgent Chinese economy. And then Obama provided an excellent opportunity to Beijing. That Celestial Empire will dominate the meetings this week. Chinese President Xi Jinping, during his first Southeast Asian tour, certainly try to convince the state leaders of the need to maintain a constructive dialogue especially with China. Interestingly, the head of a key U.S. ally in Southeast Asia, the Philippines, President Benigno Aquino will not hold bilateral talks with his Chinese counterpart. The main weapon of Beijing here will simply be economic cooperation, Xi Jinping has already promised to almost triple, up to US\$160 billion the volume of Sino-Malaysian trade by 2017. Together with his Indonesian counterpart, he was present at the signing of 23 Sino-Indonesian economic agreements, estimated being worth US\$33 billion. Further economic carrots from China are expected at the APEC Summit.

Foreign policy will be pursued with economic power. If not to win over Southeast Asian countries, in an attempt to at least reassure them, China will

be emphasizing the central role of ASEAN in the integration processes of the Asia Pacific Region. Chances are that earlier initiatives will be brought forward, such as creating a system of collective security in the region. In this way, Beijing will strive to gradually weaken the influence of Washington. Will this be the beginning of the end of American hegemony in East Asia? Perhaps in the form, in which we see it now, yes. However, the system of international relations can expect a major shift, in the Asia-Pacific Region two other powers, which are more and more starting to assert themselves, may also take the place of the United States, these are Japan, and India. It is these two countries, which, with the blessing of Washington, now being absorbed by internal problems and paying attention to other parts of the world, could become leaders that will oppose the rising influence of China.

These clear positions can of course be adjusted under the influence of immediate needs of Russia in the Southeast Asia region. Thus, after the escalation of the crisis in Ukraine and Crimea joining Russia in 2012, Moscow needed the support of Beijing and was ready to pay any price for it.

Chinese officials made a number of statements in support of Russia's position. China condemned the sanctions imposed against Russia. Probably, at this stage, Russia will not be focusing on the need for greater openness in China's nuclear policy.

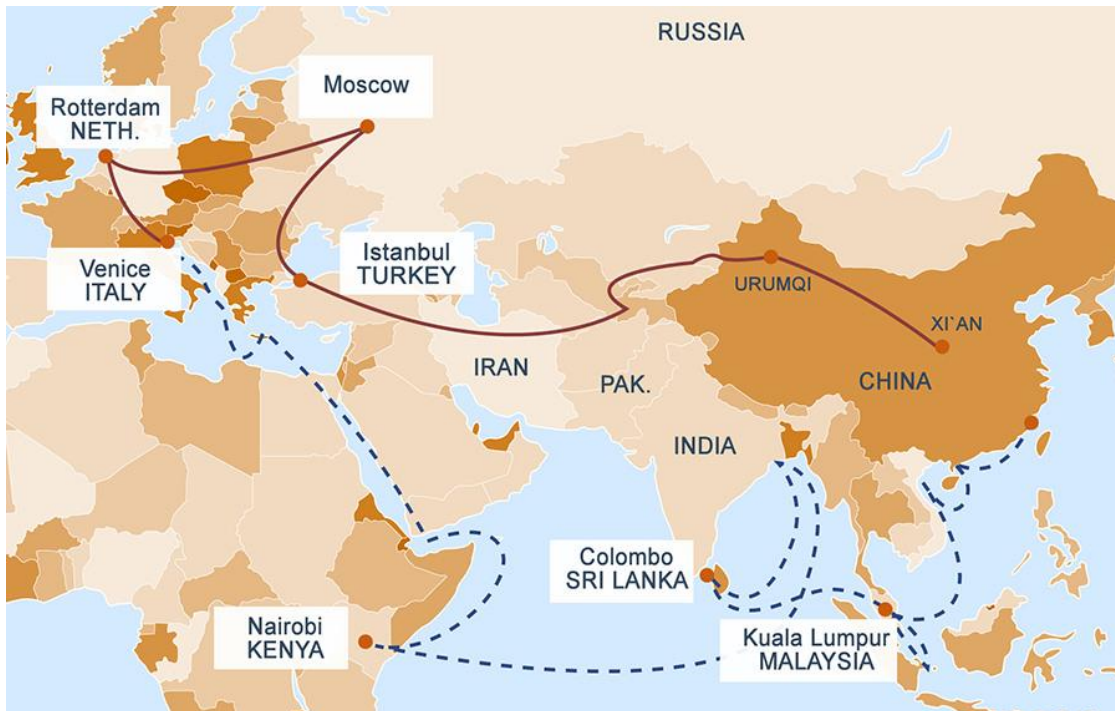
Russia will refrain from taking any steps that might displease China. However, we should not perceive this as a long-term strategy for Russia in the Asia-Pacific region. This is a temporary strategy that Moscow was forced to adopt in light of recent events.

In the long term, relations with China cannot be regarded as problem-free. That is why, while Russia holds regular military exercises with China, it is also gradually increasing the numbers of troops stationed in the eastern part of the country.

Therefore, we can see that Russia is actively developing good relations not only with China, but also with the countries that are wary of China – Vietnam, India, South Korea and Japan. Russia is helping India acquire a nuclear submarine fleet, whose main goal is to contain China in the Indian Ocean.

Taking a long-term perspective, Russia could find common ground with the United States when it comes to China. However, in the short term, Moscow and Washington are hardly ready for this.

Picture 1 China's Peaceful Rise



Xi Jin Ping Silk Road Conundrum

China has recently embarked on an ambitious plan: building a widespread infrastructural network that will connect Asia, Africa, and Europe. The “One Belt, One Road” (OBOR) plan consists of two pillars: First, the Silk Road Economic Belt; and Second, the 21st Century Maritime Silk Road (MSR). The plan, now officially known as the Belt and Road Initiative (BRI), is expected to lead to win-win cooperation, promising benefits for all those who participate.

Regardless of the optimistic rhetoric, a closer look at the MSR suggests that materializing the ambitious initiative is facing several challenges. The maritime route stretches from China’s nearby waters all the way through the Indian Ocean, home to countries that have grievances with China’s recent behavior in the international area. Although, still there are not all of these countries are participants of the MSR, their location could allow them to seriously obstruct the implementation of the initiative. If China wants to materialize the initiative, it has to return to its so-called “Peaceful Rise”.

China Interests & Indo-Pacific Major Powers Relation

China’s recent behavior has generated grievances in some of the stakeholders of the Indo-Pacific, which creates an unfriendly environment for realizing the BRI. First of all, Tokyo has adopted changes in Japan’s national

legislation, allowing it to militarily assist the U.S. or its various partners under certain conditions.

The reform fits Japan's "buck passing" strategy under which it usually defers the lion's share of balancing to an ally, e.g., the U.S., but accelerates security engagement in the incident of insufficient balancing by the partner. The reason behind Japan's national security reform seems to be the threatening the security landscape of East Asia. Beijing has been constantly strengthening its navy and it is becoming more and more domineering in territorial disagreements, including the contentious issue of the Senkaku/Diaoyu islands located in the East China Sea.

Second, the Philippines is involved in the increasingly heated South China Sea disputes, where Beijing's nine dash line competes with the claims of several other countries. China's preferred way of handling the issue is keeping it between the concerned parties bilaterally. The Philippines, however, opted to take the issue to the Hague that practically ruled in favor of Manila. Meanwhile, Beijing has installed military facilities to the disputed islands of the South China Sea, a tendency that has worried Manila and Washington, despite the controversial statements made by the recently elected Philippine President Rodrigo Duterte. Both Washington and Manila concluded a defense accord, the Enhanced Defense Cooperation Agreement in January 2016. Additionally, Manila is going to be included in the prospective Maritime Security Initiative, a capacity building pact for countries around the South China Sea, despite of President Duterte's conciliatory overtures toward Beijing.

Third, Indonesia originally showed interest in combining its "maritime fulcrum" initiative with China's BRI and steered clear from getting involved in the South China Sea disputes. However, recent incursions by Chinese fishing boats changed this situation. Some in Indonesia argue that China tactically uses fishing to assert territorial sovereignty around the Natuna Islands. As a response to China's growing assertiveness, the Indonesian Prime Minister Joko Widodo visited the disputed area on the deck of a naval ship. It seems that China's behavior is creating a gravity that draws the formerly cautious Indonesia in the disputes, further undermining the prospective implementation of the BRI.

Fourth, Vietnam is also a disputant in the South China Sea disputes. Washington has recently revoked its longstanding weapons embargo on Vietnam, and accentuated its support of Vietnam's position on the disputes. Furthermore, India will install a "satellite tracking and imaging" hub in Vietnam that offers the ability to observe China and the South China Sea as part of New Delhi's Look East policy.

Fifth, and somewhat ironically, one of the main stumbling blocks of the BRI is its very own "flagship project": the US\$46 billion China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). On the one hand, since the planned path of the project goes through Indo-Pakistani contested territories, it is one of the reasons why India, a crucially located country on the BRI, has severe grievances about the initiative as a whole. New Delhi has remained reluctant to commit itself to the MSR and launched its own regional initiatives: the Mausam Project, the Cotton Route, and the Spice Route. Observers reckon that these projects are India's challenge to the MSR. Indian Prime Minister Narendra Modi repeatedly articulated his country's commitment to safeguarding the freedom of navigation, echoing the U.S. policy. Also, New Delhi adopted a proactive naval posture, partly because of China's growing clout in the Indian Ocean region. On the other hand, the planned route of the project stretches through a rough region: terrorists have already struck targets along the prospective path of the CPEC. These attacks only exacerbate the worries about potential cooperation between Uighur combatants, Turkmen rebels, and Pakistan's Taliban. Given the great importance attached to the CPEC, the failure or success of the project will have significant implications for the region and unintended consequences on the BRI.

Finally, one overarching repercussion of recent Chinese acts is that they have invited greater U.S. presence in the Indo-Pacific region. Washington has longstanding grievances about China's recent acts related to the South and East China Sea disputes. As a champion of the freedom of navigation, the U.S. is getting deeply entangled in the disputes. In order to respond to China's behavior, Washington accelerated its engagement with the Philippines, Vietnam, and India in addition to solidifying its defense postures with Australia, Japan, Singapore, and South Korea, Taiwan, and Thailand.

China's recent behavior also seems to undermine historical-cultural ties which have been evolving throughout the course of history. China-Sri Lanka relations, for instance, were characterized by prosperous trade and deep cultural links for hundreds of years. The bilateral relationship seemed to have reached its pinnacle during the autocratic presidency of Mahinda Rajapaksa, when China has engaged in several large scale infrastructure projects in the island nation. The democratic force of the Sri Lankan public, however, ousted Rajapaksa and the new government under the leadership of Maithripala Sirisena and Ranil Wickremesinghe have decided to keep a safe distance from Beijing.

Similarly, China-Myanmar cultural and economic ties have been intimate for centuries. Until more recently, China has been supporting the military junta



of Myanmar for more than 20 years. With the country's democratic transition starting from 2011, however, bilateral relations have faced difficulties. Apparently, China's unconditional support for autocratic regimes generates negative political and public sentiments toward Beijing.

Changing the course, however, Beijing has now begun to re-engage with the democratically-elected Aung San Suu Kyi, who is closely associated with the U.S.. Unfortunately for Beijing, its three enemies (separatism, extremism, and terrorism) could find inspiration in these developments. In order to avoid this, China has to return to its "Peaceful Rise" by initially resolving the issues of the "stumbling blocks" of the BRI. Mitigating the concerns related to the CPEC is of paramount importance, since the route of the project goes through China's restive Xinjiang and Tibet provinces.

Therefore, the writer identifies that there are plenty of unexpected challenges to the BRI. The worrying part is that these challenges are created by China itself, given Beijing's uncertainty of its economic growth, brewing domestic unrest, and growing nationalism. Also, China's assertiveness invites grievances in possible BRI participants and inevitably draws increased U.S. military presence in the Indo-Pacific and the Central Asian regions. None of this is helping the implementation of President Xi's hallmark initiative to address its domestic challenges, especially the production overcapacity and the creation of new markets.

In a way, economically-driven China is unconsciously sabotaging the implementing of its own initiative. In order to overcome these issues, China has to return to the "Peaceful Rise". If China is going to adopt a way of emergence similar to that of the U.S., confrontation is likely to occur. The world needs a truly new type of major power relations put forward by Xi Jinping during the Sunnylands Summit in 2013 (U.S), reflecting the still thriving and living civilization in the world.

China Claim on South China Sea Waters

China claims almost the entire South China Sea, a strategic shipping corridor, also rich in fish and natural gas, where several South East Asian countries also have overlapping claims.

But China and Indonesia do not contest the sovereignty of the Natuna islands and the seas around them: both agree they are part of Indonesia's Riau Province.

In March 2013, armed Chinese vessels confronted an Indonesian fisheries patrol boat and demanded the release of Chinese fishermen who had been apprehended in Natuna waters.

Fearing for his safety, the captain of the Indonesian boat complied.

Similarly, in 2010, a Chinese maritime enforcement vessel compelled an Indonesian patrol boat to release another illegal Chinese trawler.

Indonesia has no plans to boost military resources in the remote Natuna Islands in response to the latest incident, the Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu said.

In February 2016, China sent fighter jets to a disputed island in the South China Sea, in a move that further ratcheted up tensions over a maritime area claimed by six nations.

Taiwanese and U.S. officials recently claimed that China deployed an advanced surface-to-air missile system on Woody Islands one of the disputed Paracel Islands, which Beijing controls in the South China Sea.

Indonesia has protested to China against what it described as an infringement of its waters by a Chinese coastguard vessel near a disputed area of the South China Sea.

The incident comes amid heightened tension in the South China Sea, in particular over China's land reclamation and over its claims to vast swathes of the resource-rich shipping corridor.

Several South East Asian countries have overlapping claims in the area though Indonesia does not, and it sees itself as an honest broker in the various territorial disputes.

Indonesia's Foreign Minister Retno Marsudi said she had met Chinese embassy representatives in Jakarta after an incident at the weekend involving the Chinese coastguard vessel, a Chinese fishing vessel, and an Indonesian patrol ship in an area known as the Natuna Sea. "At the meeting we conveyed our strong protest (over) ... the breach by the Chinese coastguard of Indonesia's sovereign rights," Ms Marsudi told a news conference (<http://www.abc.net.au/news/2016-03-21/indonesia-says-chinese-coast-guard-infringed-on-its-waters/7264368>).

Indonesian authorities attempted to detain a Chinese vessel they said was fishing illegally in its waters. Eight Chinese crew members were detained but the Chinese coastguard prevented Indonesia from securing the fishing vessel.

China said the fishing vessel was operating in "traditional Chinese fishing grounds" and has demanded the fishermen be released. "When it comes to fishery disputes, or maritime issues, China is always ready to work with Indonesia to solve these disputes through negotiations and dialogue," Chinese

embassy official Sun Weide told reporters in Jakarta after meeting the Indonesian fisheries minister (<http://www.abc.net.au/news/2016-03-21/indonesia-says-chinese-coast-guard-infringed-on-its-waters/7264368>).

It needs to be negotiated peacefully, with international law respected.

Picture 2 South China Sea Territorial Dispute



Rich in resources and traversed by a quarter of global shipping, the South China Sea is the stage for several territorial disputes that threaten to escalate tensions in the region.

At the heart of these disputes are a series of barren islands in two groups - the Spratly Islands, off the coast of the Philippines, and the Paracel Islands, off the coasts of Vietnam and China.

South China Sea Dispute (2011 – present)

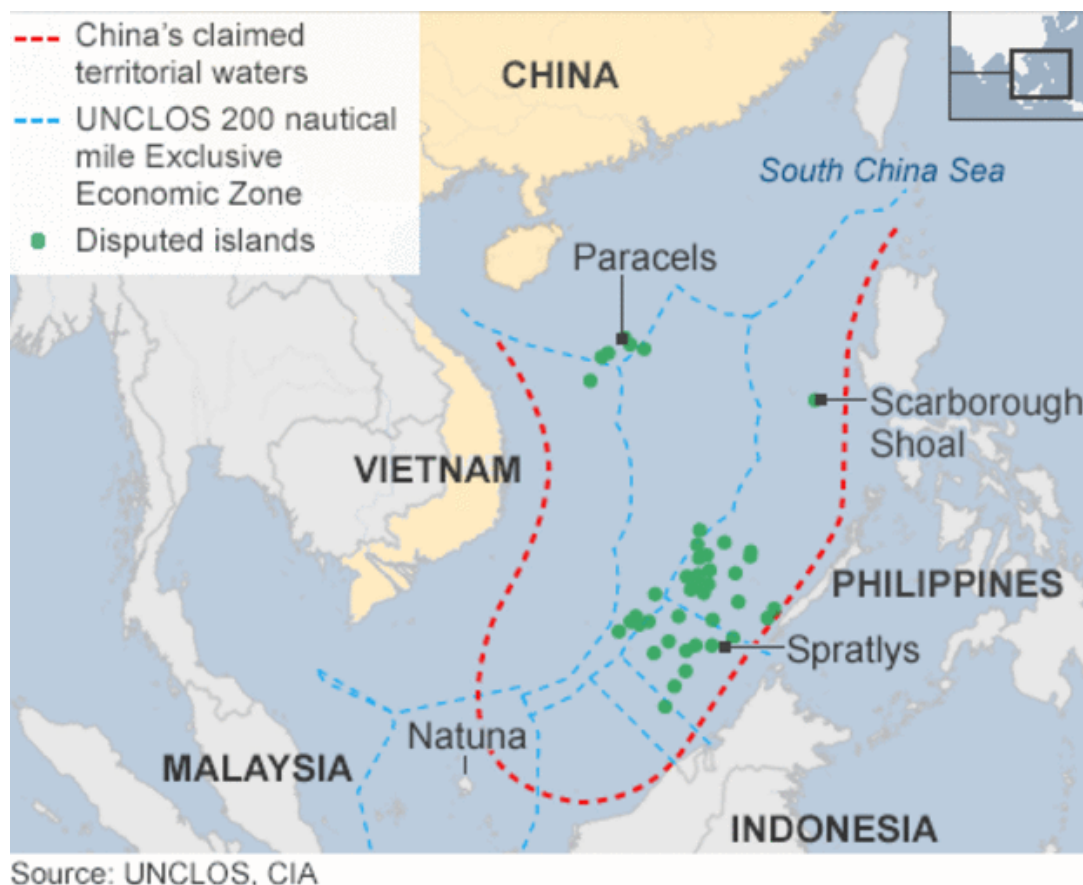
Tensions over the overlapping claims in the South China Sea (SCS) have mounted in the past months, with hostilities accelerating since the beginning of June 2011. The row between China, Vietnam and the Philippines has urged current ASEAN chair, Indonesia, to step up.

Thus, these new skirmishes have centered on the exploration of natural resources in the region, and have resulted in a spree of joint military exercises

and verbal muscle flexing from several of the region's capitals. The Philippines has made multiple reports of Chinese naval vessels trespassing into contested waters, a few of which involved physical encounters between the Chinese vessels and Philippine ships mostly fishing boats.

It has also accused China of planting new installations in contested areas of the South China Sea (SCS) and intimidating Philippine oil exploration ships. As a result of these incidents, the Philippines has bumped up military purchases and increased naval and air patrols in the region.

Picture 3 China Claimed Territorial Waters (2011)



Vietnam and China started off well with four bilateral meetings in the first months of 2011 to discuss their South China Sea positional differences. Unfortunately, a unilaterally instated fishing ban by China in early May, subsequent Chinese naval patrols in the region, and an increase of Chinese fishing boats in Vietnamese waters, has produced a relapse. The ominous 'cable cutting incidents' which followed during which the cables of Vietnamese oil exploration ships were cut in encounters with Chinese ships have further aggravated the situation. China has been quick to remind its neighbors of its indisputable sovereignty over the South China Sea islands and adjacent waters.

Vietnamese leaders replied with firm statements about their claim to the Paracels and Spratlys, and announcements of live-fire exercises by the Vietnamese navy.

Apprehension in the capitals of Vietnam, Hanoi, and the Philippines, Manila has led their leaders to seek backing from the US. This has not helped reduce tensions. Vietnam made a joint statement with the US on the importance of freedom of navigation in the SCS on 17 June 2011, to which China responded instantly by repeating that the SCS dispute should remain a matter for the claimants, not outside parties.

Meanwhile, the Philippines has explicitly declared it will request help from the US should it feel threatened by China's aggressive behavior. Although China responded with reassurances that it intends to uphold its pledge of non-violence, this message was somewhat nullified by the simultaneous announcement that China's largest patrol ship, the Haixun 31, was being dispatched to the SCS. Although officially on a mission to maintain peace in the region, the move has caused disquiet among rival claimants. Reports of a three-day military exercise by the Chinese navy near the Spratlys have done little to relieve these concerns.

Amidst deepening frictions among several South China Sea parties, current ASEAN chair Indonesia has called for a relaxing of tensions. Indonesia does not claim any of the disputed islands involved in the conflict, and lacks the history of maritime clashes with China that Vietnam and the Philippines share. However, its Exclusive Economic Zone overlaps with China's claim — based on the infamous 'nine-dotted line' map, which includes Indonesia's largest natural gas reserve. When assuming the ASEAN chair in January, Indonesia immediately voiced its concerns that inaction would lead to further escalation of enmities over SCS claims. As a result, progress on further guidelines was made top priority of the Indonesian chairmanship this year.

In the past six months Indonesia has met with several regional representatives, including China, Japan and the Philippines, to discuss the ongoing dispute. After the latest round of verbal hostilities and with more military exercises in the South China Sea imminent, Indonesia, on 17 June 2011, made another statement urging a follow up to the nearly decade-old DoC, emphasising that regional security is at stake.

The current standoff and Indonesia's diplomatic position makes one wonder whether Indonesia could offer a solution. Could it act as mediator in the SCS dispute? It holds a central position in ASEAN, which encompasses the bulk of the claimants. It maintains good relations with China and enjoys the backing of the United States. Up until now, efforts to defuse the dispute have

been thwarted by China's strict emphasis on bilateral negotiations, which reflect its desire to prevent the dispute becoming internationalized. Even ASEAN is refused as a talking partner, as the organization itself does not hold a claim. Chances are China will decline Indonesian mediation as well, given its preference for bilateral talks. Then again, Indonesia may be neutral and inoffensive enough to allow it to take a ceremonial position as mediator. It may also be a good opportunity for China to keep the US out. Similarly, although worries about squandering ASEAN unity with one of the members taking a frontrunner position will no doubt be raised, it could also be considered beneficial for ASEAN as a whole and for the ASEAN claimants' position to have one of their own take the lead.

For Indonesia, taking initiative in the region's most complex and long-standing dispute would address the prevailing underestimation of Indonesia's relevance, and help it attain the position next to the other Asian giants it so desires.

The writer suggested that Indonesia's current economic growth and future economic potential, combined with its improved political situation and increased engagement in several world forums, precipitate a larger role for Indonesia in the future. Admittedly, having Indonesia go out on a limb to offer its services and getting the other claimants to consent to negotiations is a stretch. On the other hand, desperate times call for desperate measures, and the current situation in the South China Sea certainly qualifies as an alarming situation indeed.

The ASEAN Way & Indonesia Sovereignty on Natuna Island

The ASEAN Way of security cooperation, which based on principles of sovereignty, non-intervention, peaceful resolution of conflict, and consultation and consensus decision-making – has maintained intra-ASEAN harmony since the grouping's formation On 8 August 1967.

It has also enabled ASEAN to play a central role in regional integration by successfully engaging external major powers in an overlapping regional network of ASEAN-led organizations such as the ASEAN Regional Forum, East Asia Summit and ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. However, exercising decisive influence within the wider Asia-Pacific environment is beyond ASEAN's limited strategic resources. Moreover, the consensus-seeking, shallowly institutionalized ASEAN Way approach has seemed poorly equipped to handle Chinese assertive divide-and-rule diplomacy that has accompanied its power projection in the South China Sea.

As China mounts its maritime claims and seeks to expand its regional influence relative to the United States, ASEAN is challenged to maintain intra-ASEAN unity, deepen intra-ASEAN integration and effectively engage the United States, China and other powers in safeguarding peace and stability in the region. Despite shortcomings in the ASEAN Way of security cooperation, it is argued that, given the inability of China and Japan to provide cooperative leadership in establishing an alternative multilateral security mechanism, ASEAN will continue to serve as the default instrumentality for maintaining a modest level of multilateral security cooperation in the Asia Pacific.

When examining ASEAN's role in promoting regional cooperation and integration, scholars have utilized realist, neo-liberal or constructivist perspectives, or an eclectic combination of all three (see, e.g., Acharya 2009a, Ba 2009, Busse 1999, Emmers 2012, Goh 2008, Jones & Smith 2006, Nischalke 2000, Ravenhill 2013, Sheldon 2014). While some scholars remain highly skeptical that the ASEAN Way, as currently constituted, could ever underpin a robust regional security regime (Jones & Smith 2006, Nischalke 2000), others have evaluated the grouping's contributions more positively (Acharya 2013, Ba 2012, Busse 1999, Goh, 2012, Capie 2012, Kraft 2012). In contrast to Jones and Smith's critique of ASEAN as a "fading institution" with "a peripheral rather than core role in regional growth and stability" (2006: 159, 277), Evelyn Goh argues that ASEAN "is universally acceptable as the 'driver' of regionalism", which has critically claimed a "voice" for smaller states in discussing and managing regional security affairs in a situation where great powers are suspicious of each other (Goh 2012: 105, 112). Other scholars such as David Capie, while recognizing the weaknesses underlying the process and institutionalization of the ASEAN Way of regional cooperation, nevertheless concludes that ASEAN "has proved far more resilient than many could have predicted just a few years ago" (Capie 2012: 179). Amitav Acharya, while agreeing that ASEAN has successfully functioned as the fulcrum of geopolitical stability in Asia, cautions that ASEAN leaders need to retain unity, strengthen mechanisms for cooperation, and maintain a "neutral broker image among great powers" in order to continue to play that role (2013: 21).

Guided by the principles and norms of the ASEAN Way from its inception in 1967, ASEAN has expanded from a five-member (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand) to a present day ten-member grouping (with the inclusion of Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) with 626 million people and possessing a combined GDP of \$2.4 trillion in 2014, making it the third largest economy in Asia and the seventh largest in the world (East-West Center, "ASEAN Matters for America"). In the founding ASEAN

Declaration, also known as the Bangkok Declaration, the five original members explicitly disavowed the goal of security cooperation, seeking instead to focus on economic, social, cultural, technical, scientific and educational cooperation (ASEAN, "The ASEAN Declaration").

Thus, even as the five non-communist founding members came together in establishing ASEAN as a mechanism for war prevention and conflict management, specifically to deal with the security threat posed by Vietnam, which had earlier drawn America into a protracted war in Indochina, the founding leaders did not establish a collective security institution along the lines of the US sponsored North Atlantic Treaty Organization (NATO, 1949-present) or the short-lived Southeast Asia Treaty Organization (SEATO, 1954-1977) (Acharya 2009a: 54-62). Instead of striving to emulate the European model of integration, the Southeast Asian leaders drew upon regional norms based on "the route of informality, of eschewing legal formulations and legally binding commitments, of avoiding elaborate regional, supranational institutions" (Severino 2006: 4).

The Declaration also included an important proviso making membership "open to participation to all States in the South-East Asian Region subscribing to the [declaration's] aims, principles and purposes", thus facilitating the grouping's subsequent expansion and incorporation of Myanmar as well as former adversaries Laos, Cambodia and Vietnam. The distinctive "ASEAN Way" of community building and regional cooperation is based on four "codes of conduct": (1) adherence to non-interference, non-use of force and peaceful resolution of conflict; (2) promotion of regional autonomy and collective self-reliance; (3) rejection of multilateral military pacts, but acceptance of bilateral defence cooperation pursued independently by individual member states (such as the Philippines-US and Thai-US security treaties); and (4) preference for social-cultural norms based on informal consultation (*musyawarah*) and consensus (*mufakat*) rather than legal-rational norms in decision-making (Acharya 2009a: 54-98).

These principles of sovereignty and non-interference, consensus decision-making and informality were subsequently reaffirmed in the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) of 1976 and the ASEAN Charter of 2008.¹ The TAC provided a set of behavioral norms for collective decision-making to regulate inter-governmental relations and manage intra-ASEAN disputes, as well as engage external powers in a low-key, informal and non-confrontational manner. Unlike the deeply institutionalized, rules-based European Union where member states are governed by a supranational authority with wide powers to

regulate, coordinate and enforce compliance whenever deemed necessary, a model eschewed by ASEAN member states, the ASEAN Way provides for a shallowly-institutionalized, informal incremental approach to regional integration.

The ASEAN norm of upholding national sovereignty and the right of “every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion” (ASEAN, “Treaty of Amity and Cooperation”) has necessarily confined the role of the ASEAN Secretariat to a coordinating body with no political mandate and authority to implement policies (Severino 2006: 20-22). Established in Jakarta in 1976 nine years after the body’s formation, the Secretariat not surprisingly remains understaffed and underfunded, lacking the bureaucratic and legal capacity to exercise authority independently of the collective will of its member states. The ASEAN Way norms laid the foundations for a “security community” in Southeast Asia, in contrast to other prevailing frameworks of security cooperation, such as the “collective defense” community of North Atlantic Treaty Alliance and the “collective security” community of the United Nations.

Unlike NATO and the UN, ASEAN does not impose reciprocal obligations of military assistance, and does not require members to carry out collective punishment of aggression against other members or non-member states. ASEAN member states are guided by “strict and observed norms concerning non-use of force; no competitive arms race as well as commitment by all members to “institutions and processes (formal and informal) for the pacific settlement of disputes” and “long-term prospects for war avoidance” (Acharya 2009a: 20, original parentheses). Scholars such as Donald Emmerson argue that while the ASEAN region has historically functioned as a “thin and pluralistic security community”, there is insufficient “empirical data on the existence...[of] a genuine cooperative identity among its elites” and no real assurance that ASEAN members will not fight one another in the years ahead (Emmerson 2005: 180,182, original italics).

Michael Leifer, another prominent ASEAN scholar, has argued that ASEAN was established as an “aspirant security community”, one in which member states held a “shared belief in the positive relationship between economic development and security that served to reinforce the commitment to regional reconciliation as a way of avoiding any diversion of scarce resources” away from the immediate task of providing regional stability and promoting national and regional prosperity (Leifer 1999: 27). Emphasizing the fact that “ASEAN was certainly not conceived as a political community along the lines of the European model”, Leifer stated that security and peace in ASEAN have been addressed “through the development of a culture of intramural dialogue

and consultation based on close working relationships between ministers and officials and an adherence to common norms; not through invoking legal mechanisms for dispute settlement" (ibid: 28).

In short, ASEAN can at best be described as a "nascent security" community, one that has maintained peace among its members though rivalry and competition still persist. The latter, according to Acharya, would be "muted by converging threat perceptions, expected trade benefits, an evolving common identity, and organizational emulation (learning from the experience of other multilateral organizations)" (2013: 6, original parentheses). ASEAN member states' strong resistance to a dilution of their sovereignty stems largely from the region's unhappy historical experience of western colonial rule, which ranged between some 300 years in Dutch Indonesia, 150 years in British Malaya and 100 years in French Indochina. In the decades after independence was finally achieved with Brunei becoming independent only in 1984, ASEAN political elites have continued to place high priority on retaining full sovereignty over their respective countries. Arguing that ASEAN's norms on regional cooperation can only be understood in the light of the region's history and political culture, Nikolas Busse maintains that, unlike the European nations that were intent on creating a peaceful region in the aftermath of the devastation of the Second World War by "transcending the nation-state, in Southeast Asia it was about preserving it" (1999: 47). ASEAN's resistance to the dilution of sovereignty, steadfast adherence to non-intervention and insistence on decision-making based on consultation and consensus have resulted in a cumbersome decision-making process and its moving at the pace of its least willing member and implementing decisions at the level of the lowest common denominator, i.e., policies that cause the least division among the member countries. ASEAN's shallow institutionalization and lack of rules-based enforcement mechanisms are faulted for preventing it from implementing effective policies and undertaking activities deemed necessary to bridge the gap between its rhetorical aspirations and actual performance (see, e.g., Capie 2012). Critics such as David Jones and Mark Smith argue that in not dealing with underlying tensions but by simply ignoring them, ASEAN is patently irrelevant to the evolving security order in Southeast Asia" (2006: 71).

Perceived shortcomings in other ASEAN-based organizations – namely the ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three (APT), the East Asia Summit (EAS) and ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMM Plus), are likewise attributed to the institutional, operational and normative limitations of the ASEAN Way. In all these bodies, only ASEAN states can chair or co-chair all the important meetings, shape the agenda and decide on the content of the

chairman’s statements. Yet despite such criticisms of the ASEAN Way of regional cooperation, for reasons elaborated below, “non-ASEAN states, large and small, have acknowledged [ASEAN’s] central role, either explicitly or implicitly, by seeking admission and continuing to participate in these ASEAN-centered institutions” (Capie 2012: 168). Formed in 1994, the ASEAN Regional Forum (currently comprising 27 members) was the first ASEAN-based body established to address security cooperation in the Asia-Pacific region. Reflecting the influence of the ASEAN Way, the ARF’s decision-making process is consensus-driven, nonbinding and slow-paced. The ARF’s lack of progress in moving beyond its initial goal of undertaking confidence building measures to the next two goals of preventive diplomacy and conflict resolution has particularly frustrated non-Asian members such as the US, Australia and Canada.

Therefore, by contrast, China and most other Northeast Asian states support the underlying normative principles of the ASEAN Way, particularly the principles of sovereignty and non-intervention (Capie 2012: 178). Noting the ARF’s underperformance in promoting security cooperation in the Asia-Pacific, Ralf Emmers and Tan See Seng state: “The ARF has arguably achieved its initial objective of institutionalizing great powers relations within a multilateral cooperative structure and maintaining centrality of ASEAN within that architecture.

Beyond that propitious beginning the ARF has lost momentum and is often dismissed as a “talk shop” incapable of addressing regional security affairs”(Emmers & Tan 2012: 95). The authors attribute ARF’s shortcomings to its “large membership and weak institutional structures, its strict adherence to the sovereignty and non-intervention principles as enshrined within the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) that contradict any implementation of preventive diplomacy and contrasting strategic perspectives among its key participants” (ibid: 96).

During the post-Cold War decade of the 1990’s ASEAN expanded to include Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. With the inclusion of these more authoritarian and economically less developed states (i.e., communist-governed Vietnam and Laos, military-governed Myanmar and a nominally democratic Cambodia, whose membership was postponed due to an internal political coup by strong man Hun Sen), the grouping predictably lost the relative institutional cohesiveness of the original ASEAN-5. While the ASEAN-5 were also authoritarian states when they first joined together in 1967, they have become more politically pluralistic (although Thailand has experienced democratic setbacks since 2006) and economically much more advanced.

However, the onset of the 1997-1998 Asian Financial Crisis and its impact on the domestic economies of Indonesia, Malaysia and Thailand caused internal stresses to ASEAN, which to many observers appeared to be adrift and rudderless for several years. After 2000 the grouping regained its footing under the renewed leadership of a revitalized, newly democratizing Indonesia, which in 1998 had freed itself of three decades of authoritarian rule under Suharto. Comprising some 40% of ASEAN’s population and constituting the largest country and economy in Southeast Asia, Indonesia’s democratic transition, its renewed commitment to regional and international cooperation and reinvigorated leadership in ASEAN revitalized the organization (Acharya 2009b). Under Indonesia’s chairmanship in 2003, ASEAN adopted the Bali Concord II (Declaration of ASEAN Concord II), a landmark development that sought to strengthen the institutional foundations of ASEAN through creating an integrated ASEAN Community by 2015 founded upon three “pillars”: the ASEAN Political-Security Community (APSC) to pursue security cooperation and address new transnational security and non-traditional security challenges through the establishment of the ASEAN Defense Ministers Meeting in 2006; the ASEAN Economic Community (AEC) to establish a single market and production base; and the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) to expand political and human rights through a new ASEAN Charter.

The ASEAN Charter, which came into force in 2008, made ASEAN a legal entity with new powers to establish a human rights body and set up dispute settlement and compliance mechanisms. Despite the best efforts of Indonesia and the Philippines to strengthen democratic values, rule of law and human rights promotion, modify the consensus-based decision-making process and “[suspend] any of the rights and privileges of membership” for non-compliance or serious breaches of the Charter” (cited in Heng 2009: 18), the Charter as finally ratified continued to emphasize the principles of “respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity” and “noninterference in the internal affairs” of member states. It also required member states to respect the right of every state “to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion” and to rely on peaceful settlement of disputes as well as to renounce “aggression and the threat or use of force or any other actions in any manner inconsistent with international law” (ASEAN, “The ASEAN Charter”, Article 2).

The key lesson that emerged from the ASEAN Charter ratification process is that ASEAN’s transformation into a rules-based institution backed by a robust secretariat with supranational authority to enforce decisions can be achieved only when all member countries are willing to hand over a meaningful



degree of their sovereign power to the Secretariat. At present that seems a very distant prospect, at best. ASEAN's shortcomings, manifested by its protracted and cumbersome decision-making mechanism and insistence on upholding of national sovereignty and non-intervention – have undoubtedly prevented the ASEAN Secretariat from having the institutional capacity and authority that is necessary to implement the reforms needed in realizing a fully operational ASEAN Community by 2015, the body's self-declared date of achieving effective security, economic and socio-cultural cooperation. At the same time, the ASEAN Way has successfully maintained intra-ASEAN stability and prevented wars from breaking out between member states. While it has not prevented the occasional border clashes over disputed territories, such as the on-and-off fighting between Thailand and Cambodia over ownership of the Preah Vihear temple complex, and while cross-border tensions sometimes have erupted when domestic insurgencies (in Indonesia, Philippines, Myanmar and Thailand) have spilled over borders, inter-governmental relations have remained stable and amicable, thus contributing to regional stability and facilitating inflows of foreign investments that continue to fuel the region's robust economic growth.

On 20 June 2016, Indonesia's Foreign Minister has rejected China's stance that the two Asian nations have overlapping claims in the South China Sea, where there has been a run of skirmishes between Indonesian navy ships and Chinese vessels (<http://www.abc.net.au/news/2016-06-22/no-overlapping-claims-with-china-in-indonesian-waters-says-fm/7534498>).

There are 6 (six) most serious trouble in recent decades has flared between Vietnam and China, and there have also been stand-offs between the Philippines and China. Some of the incidents include:

First, in 1974 the Chinese seized the Paracels from Vietnam, killing more than 70 Vietnamese troops; Second, in 1988 the two sides clashed in the Spratlys, with Vietnam again coming off worse, losing about 60 sailors; Third, in early 2012, China and the Philippines engaged in a lengthy maritime stand-off, accusing each other of intrusions in the Scarborough Shoal; Fourth, unverified claims that the Chinese navy sabotaged two Vietnamese exploration operations in late 2012 led to large anti-China protests on Vietnam's streets; Fifth, in January 2013, Manila said it was taking China to a UN tribunal under the auspices of the UN Convention on the Laws of the Sea, to challenge its claims; Sixth, In May 2014, the introduction by China of a drilling rig into waters near the Paracel Islands led to multiple collisions between Vietnamese and Chinese ships.

China, Vietnam, the Philippines, Taiwan, Malaysia and Brunei all have competing claims.

China has backed its expansive claims with island-building and naval patrols. The US says it does not take sides in territorial disputes, but has sent military ships and planes near disputed islands, calling them freedom of navigation operations to ensure access to key shipping and air routes.

Both sides have accused each other of militarizing the South China Sea.

There are fears that the area is becoming a flashpoint, with potentially serious regional and global consequences.

Indonesia is not part of a broader regional dispute over China's reclamation activities in the South China Sea and Beijing's claims on swathes of key waterways.

Picture 4 China's Claim Line (July 2016)



Picture 5 Indonesia Sovereignty



The China's Foreign Ministry said the two nations do not have any territorial disputes, but there were some overlapping claims on maritime rights and interests.

But Jakarta has objected to China's inclusion of waters around the Indonesian-ruled Natuna Islands within a "nine-dash line" Beijing marks on maps to show its claim on the body of water.

"Our position is clear that claims can only be made on the basis of international law. For Indonesia, we don't have overlapping claims in any form in Indonesian waters with China," Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi told reporters (<http://www.abc.net.au/news/2016-06-22/no-overlapping-claims-with-china-in-indonesian-waters-says-fm/7534498>).

China's Foreign Ministry said over the weekend that an Indonesian naval vessel fired on a Chinese fishing boat near the chain of islands on Friday, injuring one person (17 June 2016).

Indonesia's navy responded that it had fired warning shots at several boats with Chinese flags it accused of fishing illegally, but there were no injuries.

It was the 3rd reported confrontation near the Natuna Islands this year, and comes amid rising regional tensions over China's assertiveness in the South China Sea.

Also, Indonesian Vice President Jusuf Kalla said that the nation would be more assertive in protecting its exclusive right to the waters around the Natuna Islands.

Despite this more assertive stance, Ms Retno said relations between the two countries remained good.

Meanwhile, state media's China Daily said on Wednesday that cruise ships will regularly bring tourists to the Spratly Islands in the South China Sea by 2020, as tensions mount in the contested region.

Beijing asserts its sovereignty over almost all of the strategically vital South China Sea despite rival claims from its neighbors, and has rapidly built reefs into artificial islands capable of hosting military planes.

Chinese companies already operate cruises for Chinese nationals only to the Paracel Islands. A new proposal seeks to develop routes to the Spratlys, much further south, said the China Daily (<http://www.abc.net.au/news/2016-06-22/no-overlapping-claims-with-china-in-indonesian-waters-says-fm/7534498>).

Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei and the Philippines all have rival claims over portions of the Spratlys.

Chinese tourists have been allowed to travel to non-militarised areas of the South China Sea since 2013, but foreign passport-holders are not allowed to join the trips.

A previous China Daily report said the Mayor of Sansha city on the Paracels' Woody Island estimated that some 30,000 people have already visited, and "many people with a patriotic spirit want to try it" (<http://www.abc.net.au/news/2016-06-22/no-overlapping-claims-with-china-in-indonesian-waters-says-fm/7534498>). .

Indonesia's Natuna Islands could become yet another security flashpoint in the South China Sea. The islands' proximity to the disputed areas in the South China Sea, and isolation from Jakarta, makes it one of Indonesia's most vulnerable regions. Any effective security and military presence in the area will depend on local economic and infrastructure development. How will Indonesia under President Joko Widodo (Jokowi) manage this potential point of contention with the People's Republic of China (PRC) ?

More than a thousand kilometers from Jakarta, the Natuna islands are spread across 262,000 square kilometers of water, more than ten times their total land size. This presents a major geographical challenge.

The tyranny of distance compounds Indonesia's vulnerability in monitoring and controlling this northern frontier. There is no direct commercial flight between Jakarta and Ranai, the largest town in the Natuna Islands, and daily commodities must be shipped. The absence of a deep-water port prevents

larger ships from docking at Ranai, while smaller ships cannot risk sailing the rough seas during monsoon season.

Lacking effective control from Jakarta, the Natuna Islands are beset by a plethora of security problems.

Illegal fishing is rampant in the area. Indonesia claims to lose around US\$25 billion annually to illegal fishing, although this figure seems highly inflated. But even 10 per cent of this figure could still present a huge loss for a country where 11 per cent of the population live on less than US\$2 a day. The problem of illegal fishing is becoming more complicated due to the Natunas' proximity to the disputed zones in the South China Sea.

Picture 6 Indonesia's Natuna Island



Despite Indonesia officially insisting it is a non-claimant in the South China Sea disputes, in the waters northeast of the Natuna Islands Indonesia's 200-nautical-mile exclusive economic zone (EEZ) overlaps with China's nine-dash line claim.

While it does not want to overtly antagonize Beijing, Jakarta feels it must do something to challenge China's claim. Several Chinese fishing vessels have been arrested. In 2013, this triggered a brief skirmish involving one Indonesian patrol boat. But the number of Chinese vessels arrested in the area thus far pales in comparison to Vietnamese and Thai vessels.

While the Indonesian government claims that the Natunas' fisheries could yield around 500,000 tones annually, currently fishing is mostly subsistence. A lack of infrastructure, such as cold storage, adequate fishing ports and seafood processing facilities, as well as inadequate transport for the

catch, means that any substantial improvement depends on a massive capital injection, which the local government can ill-afford.

It is also crucial to develop an adequate energy supply to power the Natunas' economy. In areas beyond Ranai, power shortages result in frequent blackouts. Ironically, numerous offshore oil and gas installations dot the Natunas' seascape. Parts of its surrounding seabed are reported to contain one of the world's largest natural gas deposits.

Indonesia still seems to maintain a low military profile in the area. Its naval presence is limited to small vessels unable to safely navigate the rough seas of Indonesia's EEZ and no combat aircraft are permanently stationed at Ranai airport. Military exercises have been conducted in the Natunas since 1996, but substantial military upgrades in the Natunas would be challenging. This is due to limited infrastructure and difficult access to operational necessities, such as fuel and maintenance and repair supplies.

Attracting foreign investment, especially Chinese, could play into Indonesia's broader strategy of gaining recognition and respect for its territorial sovereignty. Despite the Natunas' lack of infrastructure, foreign investment has trickled in. Three Chinese companies are reportedly showing interest in the local seafood industry. Chinese investment could increase if Jakarta embraces Beijing's '21st Century Maritime Silk Road' to help build President Joko Widodo's own maritime vision.

But this could send the wrong signal to Beijing. Indonesia might give the impression that it is unconcerned with China's ambitions in the South China Sea. With reclamation works underway in nearby Chinese-occupied areas, the Natuna Islands could easily fall under Beijing's air and naval superiority. Airstrips in the Fiery Cross or Johnson South Reef could place Chinese frontline strike fighters much closer to Indonesia. This would make it possible for China to enforce its air defense identification zone over some parts of the Natuna Islands.

These areas could also become a base for Chinese long-distance fishermen, and their armed escorts, to operate within Indonesia's EEZ. This would increase the possibility of encounters with Indonesian fishermen and patrol vessels.

Indonesia should act immediately to develop the Natuna Islands. It can begin simply by building a power plant sufficient to meet growing local demand, thus allowing everything else to follow.

The United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), such as those enjoyed by Indonesian traditional fishermen, through bilateral agreement

or local custom. These supplementary historic fishing rights, regulated by international law outside UNCLOS, operate equally across each of the maritime zones created by the Convention, including, presumably, in the Natuna Exclusive Economic Zone (EEZ).

Therefore, there is no time for Chinese megaphone diplomacy over an incidental matter at a point of Indonesian diplomatic vulnerability. That could unwittingly change the geopolitical environment in Southeast Asia in a way that is counterproductive to constructive relations between China and, not only Indonesia, but the whole Southeast Asian region.

Conclusion

Indonesia's government insists that Indonesia and China will not clash over the South China Sea, and that the two nations will solve this problem diplomatically.

For Natuna local people, it is obvious how much that stability is prized among the local population. This island is a picturesque, idyllic place. Still, it stands on the frontline of a potential clash between Indonesia and China.

Although the possibility may seem remote at the moment, Indonesia has to balance its interests delicately while making sure it keeps its outer borders safe.

Back on dry land, and overlooking the vast expanse of the South China Sea, it's hard to imagine how this tiny backwater of a place could become a flashpoint in any conflict. There are fewer than 100,000 people on Natuna, most of them fisherman and farmers. Life moves very slowly here - but what's at stake is what's in the waters off the coast of Natuna. It consists of billions of dollars of fish and natural gas reserves that Indonesia says it owns.

And the Indonesian army is taking no chances. It is increasing its forces on the island - deploying US-bought Apache helicopters and sending another battalion here in 2015. Natuna is the furthestmost island in Indonesia, and it's on Indonesia border in the South China Sea. Indonesia needs to add more forces here. It shouldn't wait till something happens before Indonesia adds more men. Indonesia has seen Malaysia and China already get into scuffles over competing claims. Before something happens Indonesia should act rather than after something happens.

The South China Sea is a contested waterway, such as: China, Malaysia, the Philippines and Vietnam all lay claim to it. Indonesia does not have any territorial interests in these waters, but look closely at the map, and it's a different story.

Natuna Island is located up north in the South China Sea and the potential conflict zone where China's nine-dash line and Indonesia's exclusive economic zone off the coast of Natuna overlap. Rival countries have wrangled over territory in the South China Sea for centuries, but tension has steadily increased in recent years.

Its islets and waters are claimed in part or in whole by Taiwan, China, Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Brunei.

China has backed its expansive claims with island-building and naval patrols, while the US says it opposes restrictions on freedom of navigation and unlawful sovereignty claims by all sides.

The South China Sea is a dispute over territory and sovereignty over ocean areas, and the Paracels and the Spratlys. It is two island chains claimed in whole or in part by a number of countries. Alongside the fully fledged islands, there are dozens of rocky outcrops, atolls, sandbanks and reefs, such as the Scarborough Shoal.

Although largely uninhabited, the Paracels and the Spratlys may have reserves of natural resources around them. There has been little detailed exploration of the area, so estimates are largely extrapolated from the mineral wealth of neighboring areas.

The sea is also a major shipping route and home to fishing grounds that supply the livelihoods of people across the region.

China claims by far the largest portion of territory. It is an area defined by the nine-dash line, which stretches hundreds of miles south and east from its most southerly province of Hainan.

Beijing says its right to the area goes back centuries to when the Paracel and Spratly island chains were regarded as integral parts of the Chinese nation, and in 1947 it issued a map detailing its claims. It showed the two island groups falling entirely within its territory. Those claims are mirrored by Taiwan.

However, critics say China has not clarified its claims sufficiently, and that the nine-dash line that appears on Chinese maps encompassing almost the entirety of the South China Sea includes no coordinates.

It is also not clear whether China claims only land territory within the nine-dash line or all the territorial waters within the line as well.

Vietnam hotly disputes China's historical account, saying China had never claimed sovereignty over the islands before the 1940s. Vietnam says it has actively ruled over both the Paracels and the Spratlys since the 17th Century, and has the documents to prove it.

The other major claimant in the area is the Philippines, which invokes its geographical proximity to the Spratly Islands as the main basis of its claim for part of the grouping.

Both the Philippines and China lay claim to the Scarborough Shoal, known as Huangyan Island in China. It is a little more than 100 miles (160km) from the Philippines and 500 miles (800km) from China.

Malaysia and Brunei also lay claim to territory in the South China Sea that they say falls within their economic exclusion zones, as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Indonesia and Brunei does not claim any of the disputed islands. But Malaysia claims a small number of islands in the Spratlys.

China prefers bilateral negotiations with the other parties. But many of its neighbours argue that China's relative size and clout give it an unfair advantage.

Some countries have argued that China should negotiate with the Association of South East Asian Nations (ASEAN), a 10 member regional grouping that consists of Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Brunei, Laos, Vietnam, Myanmar and Cambodia. However, China is opposed to this, while ASEAN is also divided over how to resolve the dispute.

The Philippines has sought international arbitration instead. In 2013, it announced it would take China to an arbitration tribunal under the auspices of the UN Convention on the Laws of the Sea, to challenge its claims.

In July 2016, the tribunal backed the Philippines' case, saying China had violated the Philippines' sovereign rights.

China had boycotted the proceedings, and called the ruling ill-founded. It says it will not be bound by it.

References

- ABS-CBS News. 2014. "DFA: Treaty ensures US will come to PH defense in disputed seas", 30 April.
- Acharya, A. 2014. "Power Shift or Power Paradigm Shift? China's Rise and Asia's Emerging Security Order", *International Studies Quarterly*, 58, pp. 158-173.
- Acharya, A. 2013. "ASEAN 2030: Challenges of Building a Mature Political and Security Community", *ADB Working Paper Series #44*, Tokyo: Asian Development Bank Institute, October 2013.
- Acharya, A. 2009a. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, Redwood City: Stanford University Press.

- Acharya, A. 2009b. "Indonesia: Asia's Emerging Democratic Power?", Canada-Asia Viewpoints, 16 October. Ang, C. G. 1999. "The South China Sea Dispute Re-visited", IDSS Working Paper 4, Singapore: Institute of Defence and Diplomacy Studies, August.
- Association of Southeast Asian Nations. 2014. "Chairman's Statement of the 24th ASEAN Summit", 11 May, available on: <http://www.asean.org/news/asean-statement-communications/item/chairman-sstatement-of-the-24th-asean-summit-moving-forward-in-unity-to-a-peaceful-and-prosperouscommunity> [accessed on June 22, 20146].
- Association of Southeast Asian Nations. 2012. "ASEAN's Six-Point Principles on the South China Sea", 20 July, available on: <http://www.cfr.org/asia-and-pacific/aseans-six-point-principles-southchina-sea/p28915> [accessed on 16 January 2016].
- Association of Southeast Asian Nations. 2008. "The ASEAN Charter", available on: <http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf> [accessed on 10 October 2016].
- Association of Southeast Asian Nations. 2007. "ASEAN Leaders Sign ASEAN Charter", Media Release, 20 November, available on: <http://www.asean.org/news/item/media-release-asean-leaderssign-asean-charter-singapore-20-november-2007> [assessed on 22 October 2016].
- Association of Southeast Asian Nations. 2002. "Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea 2002", available on: <http://www.asean.org/asean/externalrelations/china/item/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea> [accessed on 8 October 2016].
- Association of Southeast Asian Nations. 1976. "Treaty of Amity and Cooperation", available on: <http://www.asean.org/news/item/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-indonesia-24february-1976-3> [accessed on 8 October 2016].
- Association of Southeast Asian Nations. 1967. "The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)", available on: <http://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkok-declaration> [accessed on 15 November 2016].
- Ba, A. 2012. "ASEAN centrality imperiled?: ASEAN institutionalism and the challenges of major power institutionalization", Emmers, R. ed., ASEAN and the Institutionalization of East Asia, London & New York: Routledge, pp. 122-137.

- Ba, A. 2009. (Re)Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism and the Association of Southeast Asian Nations, Redwood City: Stanford University Press.
- Bader, J. et al. 2014. "Keeping the South China Sea in Perspective", The Foreign Policy Brief, Washington, DC: Brookings, August.
- Beckman, et al. 2013. Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Busse, N. 1999. "Constructivism and Southeast Asian Security", The Pacific Review, 12, (1), pp. 3960.
- BBC News. 2014. "Vietnam anti-China Protest: Factories Burnt", 15 May.
- BBC News. 2014. "China says South China Sea land reclamation 'justified'", 10 September.
- Campbell, K & R. Ely. 2014. "Far Eastern Promises: Why Washington Should Focus on Asia", Foreign Affairs, 93 (3), May/June, pp. 106-116.
- Cao, Q. 2014. "A Sea of False Accusations: The Philippines' legal challenge over South China Sea disputes is untenable", China Institute of International Studies, 22 April, available on: http://www.ciis.org.cn/english/2014-04/22/content_6839866.htm [accessed on 10 June 2016].
- Capie, D. 2012. "Explaining ASEAN's resilience: Institutions, path dependency, and Asia's emerging architecture", Emmers, R. ed., ASEAN and the Institutionalization of East Asia, London & New York: Routledge, pp.168-179.
- "China's Position Paper on the New Security Concept", available on: <http://www.chinaun.org/eng/xw/t27742.htm> [accessed on July 20, 2016].
- "Chinese Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei's Remarks on Comments by the US State Department Official on the South China Sea", 8 February 2014, available on: <http://brisbane.chineseconsulate.org/eng/fyrth/t1127014.htm> [accessed on 16 June 2016].
- Clinton, H. 2011. "America's Pacific Century", Foreign Policy, 11 October.
- Clinton, H. 2010. "America's Engagement in the Asia-Pacific", 28 October, available on: <http://www.cfr.org/asia-and-pacific/clintons-speech-americas-engagement-asia-pacific-october2010/p23280> [accessed on 28 January 2016].

- Dutton, P. 2013. "The Sino-Philippine Maritime Row: International Arbitration and the South China Sea", *East and South China Seas Bulletin*, Center for a New American Security, #10, 15 March.
- East-West Center, Institute of Southeast Asian Studies & US-ASEAN Business Council. 2014. *ASEAN Matters for America, America Matters for ASEAN*, available on: <http://www.slideshare.net/andrewwilliamsjr/asean-matters-for-america-and-america-matters-toasean-2014> [accessed on 2 October 2016].
- Emmers, R. ed. 2012. *ASEAN and Institutionalization of East Asia*, London & New York: Routledge.
- Emmers, R. & S. S. Tan. 2012. "The ASEAN Regional Forum and preventive diplomacy: A review essay", Emmers, R. ed. 2012. *ASEAN and Institutionalization of East Asia*, London & New York: Routledge, pp. 89-102.
- Emmerson, D. 2005. "Security, Community, and Democracy in Southeast Asia: Analyzing ASEAN", *Japanese Journal of Political Science*, 6, (2), pp.165-185.
- Goh, E. 2012. "Institutions and the great power bargain in East Asia: ASEAN's limited 'brokerage role'", Emmers, R. ed., *ASEAN and the Institutionalization of East Asia*, London & New York: Routledge, pp. 105-121.
- Goh, E. 2008. "Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies", *International Security*, 32 (3), pp.113-157.
- Goodman, M. & E. Ratner. 2014. "China Scores and What the United States Should Do Next", *Foreign Affairs*, 23 November, available on: <http://www.foreignaffairs.com/articles/142384/matthew-goodman-and-ely-ratner/china-scores> [accessed on 30 October 2016].
- Haddick, R. 2012. "Salami Slicing in the South China Sea: China's slow patient approach to dominating Asia," *Foreign Policy*, 3 August.
- Hagel, C. 2013. "Remarks by Secretary Hagel at the IISS Asia Security Summit", Shangri-La Hotel, Singapore, 1 June, available on: <http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5251> [accessed on 5 January 2014].
- Harding, B. 2013. "Don't Underestimate the ADMM+", *PacNet #65R*, 19 August, available on: <http://csis.org/publication/pacnet-65r-dont-underestimate-admm> [accessed on February 2, 2016].

- Heng, P.K. 2009. "A Constructivist Perspective of the Regional Order in Southeast Asia: Norms Transformation in ASEAN and the ASEAN Charter", *Tamkang Journal of International Affairs*, 13 (2), October, pp. 1-32.
- Ho, B. 2012. ASEAN centrality in a rising Asia, RSIS Working Paper #249, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 13 September.
- Huxley, T. 1995. *Insecurity in the ASEAN Region*, London: Royal United Services Institute for Defence Studies.
- Ji, Y. 2013. "Deciphering Beijing's Maritime Security policy and Strategy in Managing Sovereignty Disputes in the South China Seas," RSIS Policy Brief, Singapore, October.
- Jones, M.J. & M.L.R. Smith. 2006. *ASEAN and East Asian International Relations: Regional Delusion*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Kerry, J. 2014. "Remarks at US-ASEAN Ministerial Meeting", 26 September, available on: <http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/09/232229.htm> [accessed on 28 September 2016].
- Kraft, H. 2012. "Driving East Asian regionalism: The reconstruction of ASEAN's identity", Emmers, R. ed., *ASEAN and the Institutionalization of East Asia*, London & New York: Routledge, pp. 6173.
- Kurlantzick, J. 2007. *Charm Offensive: How China's Soft Power is Transforming the World*, New Haven: Yale University Press.
- Landler, M. 2010. "Offering to Aid Talks, U.S. Challenges China on Disputed Islands", *New York Times*, 24 July.
- Leifer, M. 1999. "The ASEAN peace process: a category mistake", *Pacific Review*, 12 (1), pp. 25-38. Ma, Z. 2013. "The Evolving Security Situation in Asia and the Role of China", 3 December, available on <http://www.lv.china-embassy.org/eng/zgyw/t1105034.htm> [accessed on June 11, 2016].
- Manurung, Hendra. 2015. "U.S. – Indonesia Strategic Relations". *The President Post Indonesia*, December 2015, available on <http://www.thepresidentpost.com/wp-content/uploads/2015/12/The-President-Post-English-Edition-December-2015.pdf>.
- McHale, S. 2012. "Conflict Over the South China Sea: Identity Politics Meets History", *Policy Commentary*, Washington DC: Sigur Center for Asian Studies, March.

- Nischalke, T. I. 2000. "Insights from ASEAN's Foreign Policy Co-operation: The 'ASEAN Way', a Real Spirit or a Phantom", *Contemporary Southeast Asia*, 22, (1) pp. 89-113.
- Page, J. 2014. "China Sees Itself as Center of New Asian Order", *Wall Street Journal*, 9 November, available on: <http://online.wsj.com/articles/chinas-new-trade-routes-center-it-on-geopolitical-map1415559290?mod=ST1> [accessed on 12 October 2016].
- Rajagopalan M. & G. Torode. 2014. "China's civilian fleet a potent force in Asia's disputed seas", *Reuters*, 5 March.
- Ravenhill, J. 2013. "Economics and Security in the Asia-Pacific Region", *The Pacific Review*, 26 (1), pp. 1-15.
- Reuters. 2014. "Malaysia navy chief denies Chinese incursion", 29 January.
- Russel, D. 2014. "Maritime Disputes in the South China Sea", Testimony before the House Committee on Foreign Affairs Subcommittee on Asia and the Pacific, Washington, DC, 5 February, available on: <http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2014/02/221293.htm> [accessed on 10 February 2016].
- Schofield, C. 2012. "Parting the Waves: Claims to Maritime Jurisdiction and the Division on Ocean Space", *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 1 (1), April, pp. 40-58.
- Severino, R. 2006. *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Shekhar, V. 2014. "Maritime Silk Route: China's foothold in the Indian Ocean?", *Jakarta Post*, 25 February.
- Sheldon, S. 2014. "ASEAN and Southeast Asia", Shambaugh D. & M. Yahuda, eds. *International Relations of Asia*, 2nd edition, Lanham MD: Rowman & Littlefield, pp. 225-245.
- "Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free-Zone Treaty (Treaty of Bangkok)" 2013. *Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes*, James Martin Center for Nonproliferation Studies, available on: <http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/seanwfvz.pdf> [accessed on July 10, 2016].
- Storey, I. 2012. "China Pushes on the South China Sea, ASEAN Unity Collapses", *China Brief*, 12 (5), 3 August.
- Storey, I. 2011. *Southeast Asia and the Rise of China: The Search for Security*, London: Routledge.

- Sun, Y. 2014. "China's New Calculations in the South China Sea", *Asia Pacific Bulletin*, # 267, 10 June.
- Sutter, R. 2009. *The United States in Asia*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Tang, S. M. 2014. "A Test of Friendship", *New Straits Times*, 18 February.
- Thayer, C. 2013a. *New Commitment to a Code of Conduct in the South China Sea?*, Washington DC: National Bureau of Asian Research, 9 October.
- Thayer, C. 2013b. *South China Sea in Regional Politics: Indonesia's Efforts to Forge ASEAN Unity on a Code of Conduct*, Paper presented to 3rd Annual Conference on managing Tensions in the South China Sea, Center for Strategic and International Studies, Washington, DC, June 5-6.
- Thayer, C. 2013c. *Deference/Defiance: Southeast Asia, China, and the South China Sea*, Paper presented at workshop, "The Deer and the Dragon: Southeast Asia and China in the 21st. Century," co-sponsored by Southeast Asia Forum, Shorenstein Asia-Pacific Research Center, Stanford University and the China Program, Institute of Defence and Security Studies, S. Rajaratnam School of International Studies, November.
- Thayer, C. 2013d. *Chinese Assertiveness and the U.S. Rebalancing: Confrontation in the South China Sea?*, Paper presented to the Panel on the South China Sea: The New Crucible in U.S.-China Relations? Annual Conference of the Association for Asian Studies, San Diego, 22 March.
- Thayer, C. 2012. "ASEAN'S Code of Conduct in the South China Sea: A Litmus Test for CommunityBuilding?", *The Asia-Pacific Journal*, 10 (34), 4, 20 August.
- Tiezzi, S. 2014. "US Admiral: 'We would help' Philippines against China", *The Diplomat*, 14 February.
- Till, G. 2009. "The South China Sea Dispute: an international history", Bateman S. & R. Emmers, eds., *Security and International Politics in the South China Sea: Toward a cooperative management regime*, London & New York: Routledge.
- Tweed, D. 2014. "South China Sea Tensions Seen Dominating ASEAN Ministers Meeting", *Bloomberg Businessweek*, 8 August.
- Wang, J. 2011. "China's Search for a Grand Strategy: A Rising Great Power Finds Its Way", *Foreign Affairs*, 90 (2), pp. 68-27.

Zhang, F. 2009. "Rethinking the 'Tribute System': Broadening the Conceptual Horizon of Historical East Asian Politics", *Chinese Journal of International Politics*, vol. 2, pp. 545-574.



Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Budaya (Studi Kasus: Konflik Poso)

Muh, Novan Prasetya
Universitas Potensi Utama Medan
muhnovanprasetya@gmail.com

Abstrak

Konflik Poso merupakan musibah demokrasi dan telah merusak nilai-nilai demokrasi dan budaya di Indonesia serta kerukunan antar umat beragama. Kerusuhan Poso pertama pada tahun 1998 terjadi bersamaan dengan transisi politik di Kabupaten Poso (Gery Van Klinken, 2005)¹. Ada sintimen keagamaan yang melatarbelakangi pemilihan tersebut. Pemenangan pasangan Piet I dan Mutholib Rimi tidak lepas dari identitas agama dan suku. Semenjak itu agama dijadikan kambing hitam pada setiap konflik yang terjadi di Poso. Perseteruan kecil, semacam perkelahian antar persona pun bisa menjadi pemicu kerusuhan yang ada di sana. Secara umum konflik yang terjadi di Poso berlatar belakang agama, namun sebenarnya ada berbagai kepentingan golongan yang mewarnai konflik tersebut. Penulis berharap dalam tulisan ini dapat ditemukan alternatif lain dalam resolusi konflik Poso untuk memperkuat metode yang sudah di tempuh.

Kata kunci:

Konflik Poso, Resolusi, Multikultural, Budaya, Masyarakat.

Pendahuluan

Setelah satu dekade lebih konflik Poso terjadi, mungkin bagi kita yang tidak mengalami langsung konflik Poso pada saat itu, menganggap konflik tersebut hanyalah sebuah goresan kelam bagi bangsa ini yang sedikit demi sedikit mulai kita lupakan tapi bagi masyarakat Poso, konflik yang menimpa mereka tidak akan hilang hingga langit terbelah dan bumi luluh lantah seperti sebuah tanda lahir yang terus ada hingga akhir hayat. Sebelum penulis mulai membahas Resolusi konflik Poso yang di lakukan Pemerintah Pusat hingga Daerah dan peran masyarakat akar rumput yang juga sangat menentukan terjadinya Resolusi tersebut. Ada baiknya mari kita lebih dahulu kembali merefleksikan awal mula konflik Poso terjadi. Seperti yang diutarakan Hc.Kelman, membahas

¹Fajar Purwawidada, 2014, *Kontra Terorisme Indonesia*.

dinamika suatu hubungan antara kondisi masa sekarang dengan sejarah masa lalu harus diperhatikan dengan seksama agar hasil yang ingin dicapai dalam Resolusi dapat berjalan dengan baik².

Poso adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah. Komposisi utama penduduk Poso terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang. Dan jika dilihat secara geografisnya Poso merupakan daerah yang menjadi salah satu alat pendirian Bangsa dan Negara Indonesia dengan luas wilayah 14.433,76 km² dengan letak geografis 0,35-1,20 LU dan 120,12-122,09BT. Poso yang memiliki wilayah administratif 13 kecamatan yang membawahi 211 desa dan 29 kelurahan, dengan berbagai macam masyarakat yang hidup dari beragam etnis dan agama.³ Secara sosio-kultural, masyarakat Poso menggunakan bahasa Bere'e dalam berkomunikasi sehari-hari, mengingat kekerabatan mereka dengan semboyan "Sintuwu Maroso" yang berarti "Persatuan yang Kuat" yang bertahan sangat lama setidaknya hingga meledaknya konflik sosial tahap pertama pada akhir tahun 1998.

Penduduk asli terdiri atas suku Kaili, Pamona, Mori, dan Wana. Penduduk pendatang berasal dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Toraja), Jawa, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur. Pendatang dari Jawa, Bali, dan Lombok masuk ke Poso lewat program transmigrasi, baik swakarsa maupun mobilisasi pemerintah. Khusus mengenai kaum pendatang, di Poso pun terbentuk sejumlah asosiasi mereka seperti Paguyuban Bugis-Makassar, Paguyuban Masyarakat Jawa, Paguyuban Masyarakat Gorontalo, Paguyuban Masyarakat Bali, Paguyuban Masyarakat Lombok, dan sebagainya para kaum pendatang. Sesungguhnya aneka Paguyuban ini dapat digunakan sebagai jembatan komunikasi antar etnis yang efektif jika perannya dimaksimalkan serta didukung penuh oleh pemerintah selaku regulator politik.

Agama dominan di Poso adalah Islam dan Kristen Protestan, di samping sejumlah pemeluk Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Proporsi penduduk penganut Kristen Protestan dan Islam relatif berimbang. Agama Islam utamanya dipeluk kaum pendatang Jawa, Lombok, Gorontalo, Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar) serta sebagian warga asli yaitu suku Kaili. Warga beragama Kristen umumnya merupakan penduduk asli suku Pamona dan Mori serta para

² Arthur Clarke, *An Interview with Herbert Kelman*: Article 1997b:14

³ George J. Aditjondro, *Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya*, Makalah ProPatria, Yogyakarta. 7 Januari 2004.

pendatang Manado dan Minahasa (Sulawesi Utara), Toraja, dan Nusa Tenggara Timur. Tabel di bawah memuat komposisi penduduk tersebut.⁴

Tabel 1. Komposisi Penganut Agama di Poso

No.	Wilayah Hukum (polsek)	Islam %	Protestan %	Katolik %	Hindu %	Buddha %
1	Poso Kota	57.60	40.43	1.5	0.24	0.23
2	Poso Pesisir	56.12	35.73	0.34	7.81	-
3	Lage	31.88	67.69	0.30	-	0.13
4	Pamona Utara	15.44	82.06	0.10	2.35	0.05
5	Pamona Timur	3.92	95.51	0.52	0.05	-
6	Pamona Selatan	34.58	56.97	0.25	8.20	-
7	Lore Utara	11.63	85.73	2.64	-	-
8	Lore Tengah	4.45	95.21	0.34	-	-
9	Lore Selatan	6.45	92.97	0.58	-	-

Sumber : (P2P-LIPI,2004)

Sejarah Awal Mula Konflik

Poso mempunyai sejarah panjang di mana beberapa komunitas agama tinggal berdampingan dalam ketegangan namun tanpa kekerasan berarti. Islam masuk ke perairan Poso melalui pedagang Muslim dari Bugis dan Arab, sedangkan penduduk di datarantinggi tetap tidak beragama. Pada akhir 1800, Belanda melebarkan penjajahan ke wilayah ini dan dataran tinggi. Perpindahan agama mereka membuat mereka mendapatkan status yang lebih baik di antara orang Belanda. Pusat Gereja Kristen Reformasi didirikan di Tentena disekitar danau Poso, Orang asli Poso dikenal sebagai Pamona.⁵ Di Tentena, komunitas asli bersatu karena pengalaman penjajahan yang sama dan jaringan gereja yang kuat. Identitas Pamona menjadi kompleks dan diperdebatkan awalnya merupakan kelompok yang berdasarkan geografis dan bahasa di dataran tinggi, tetapi karena daerah perairan menjadi Muslim dan daerah dataran tinggi menjadi Kristen, dimensi keagamaan Kristen juga dipakai. Maka pengalaman penjajahan menghasilkan identitas berorientasi sekitar agama, juga mengarahkan ke komunitas-komunitas yang semakin

⁴M. Tito Karnavian. *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. Gramedia. Jakarta. 2008h.5.

⁵Lasahido, Tahmidy, *Suara dari Poso, Kerusuhan, Konflik dan Resolusi*, (Jakarta: YAPPIKA, 2003).

terpisahkan secara geografis. Selama jaman Soeharto, istilah Pamona yaitu *Sintuwu Maroso* ('Kuat ketika bersatu' atau 'Kesatuan yang Kuat') dipropagandakan oleh Pemerintah sebagai usaha untuk menyatukan penduduk dataran tinggi dan perairan, namun hanya sedikit hasilnya. Poso menjadi semakin beragam etnisnya selama era Soeharto karena migrasi spontan dari Sulawesi Selatan dan transmigrasi yang disponsori pemerintah dari Jawa dan Bali yang dimulai sejak awal 1950an.

Jalan layang Trans-Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Utara dan Selatan memfasilitasi migrasi, terutama bagi mereka yang datang secara sukarela diluar program transmigrasi pemerintah pusat. Banyak orang Bugis dari Sulawesi Selatan pergi ke Poso pada 1980an karena kesempatan menjanjikan di perdagangan coklat. Pada 1997, hampir duapertiga penduduk Poso adalah Muslim dan sepertiga adalah Kristen. Seiring waktu Institusi politik menjadi semakin didominasi oleh umat Muslim. Ketika kebijakan nasional berpihak kepada Islam pada akhir dekade Orde Baru, hal ini memperdalam persepsi komunitas terhadap keberpihakan ekonomi dan politik terhadap Muslim dimasa lalu dan menimbulkan diskriminasi untuk Kristen padasaat ini dan masa depan. Dengan bertambahnya jumlah pendatang Muslim, dan meningkatnya dominasi mereka disektor ekonomi, ketegangan antara dua komunitas agama tersebut bertambah, terutama mengenai kekuatan politik.

Walaupun ketegangan antara umat Muslim dan Kristen telah berkembang sebelum 1998, Sebelum meletus konflik Desember 1998 dan diikuti oleh beberapa peristiwa konflik lanjutan, sebenarnya Poso pernah mengalami ketegangan hubungan antar komunitas keagamaan (Muslim dan Kristen) yakni tahun 1992 dan 1995. Tahun 1992 terjadi akibat Rusli Lobolo (seorang mantan Muslim, yang menjadi anak bupati Poso, Soewandi yang juga mantan Muslim) dianggap menghujat Islam, dengan menyebut Muhammad nabinya orang Islam bukanlah Nabi apalagi Rasul. Sedangkan peristiwa 15 Februari 1995 terjadi akibat pelemparan masjid dan madrasah di desa Tegalrejooleh sekelompok pemuda Kristen asal desa Mandale. Peristiwa ini mendapat perlawanan dan balasan pemuda Islam asal Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan pengrusakan rumah di desa Mandale. Kerusakan-kerusakan "kecil" tersebut kala itu diredam oleh aparat keamanan Orde Baru, sehingga tak sampai melebar apalagi berlarut-larut. Memang, setelah peristiwa 1992 dan 1995, masyarakat kembali hidup secara wajar. Namun seiring dengan runtuhnya Orde Baru, lengkap dengan lemahnya peran "aparat keamanan" yang sedang digugat disemua lini melalui berbagai isu,

kerusakan Poso kembali meletus, bahkan terjadi secara beruntun dan bersifat lebih masif.

Dan akhirnya Konflik yang akan di kenang sepanjang masa terjadi, Konflik kekerasan komunal di Poso dimulai pada 24 Desember 1998 Malam Natal dan bulan Ramadhan. Walaupun urutan kejadiannya diperdebatkan, kebanyakan menyatakan dimulai dengan adanya 3 pemuda Kristen yang mendatangi mesjid Darussalam di kampung Sayo dan memukul seorang pemuda di dalam Mesjid pada tengah malam tanggal 24 Desember menjelang dini hari tanggal 25 Desember.⁶ Kejadian ini membuat umat Muslim merasa terancam dan mereka menyerang rumah warga Kristen. Berita ini cepat tersebar dan banyak orang berusaha masuk kota Poso dari daerah sekelilingnya. Umat Muslim datang dari Tokorondo, Parigi dan Ampana, sedangkan umat Kristen yang dipersenjatai parang datang dari Sepe, Silanca dan Tentena. Kerusakan berlanjut hingga tanggal 29 Desember, meluas melewati perbatasan kota dan masuk ke kota-kota disepanjang 3 jalan jalur utama.

Walaupun konflik ini mencerminkan perpecahan keagamaan, namun juga dipicu oleh elit setempat yang diduga mendorong kekerasan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh seorang mantan wakil bupati, "*Konflik di Poso bukan karena agama. Selama konflik seseorang membakar gereja-gereja dan mesjid-mesjid untuk memperpanjang konflik. Untuk apa? Makin lama kerusakannya, makin banyak uangnya. Seseorang mendapatkan keuntungan dari konflik ini.*"⁷ Suatu hal yang menjadi perdebatan khusus adalah siapa yang menjadi bupati. Kebiasaan yang berlaku di Poso adalah untuk mengisi posisi tersebut dengan umat Kristen dan Muslim secara bergantian, sesuatu yang tidak dilakukan oleh bupatinya, Arif Patanga yang adalah seorang Muslim. Setelah kekerasan selama seminggu itu, hanya ada beberapa serangan yang dilakukan baik oleh umat Kristen maupun Muslim hingga April 2000, yang menandai dimulainya konflik tahap kedua.

Jeda kekerasan ini dikarenakan adanya pemilihan umum nasional di Juni 1999 dan pemilihan bupati di Oktober 1999, di mana elite politik berusaha mendapatkan dukungan dari kedua komunitas. Pada 16 April 2000, terjadi perkelahian antara pemuda Muslim dan Kristen di terminal bis Poso di kampung Lombogia, daerah yang di dominasi umat Kristen. Umat Muslim mulai menyerang rumah di Lombogia dan membakar gereja utamanya. Umat Kristen melakukan pembalasan. Tahap ketiga konflik dimulai di bulan Mei 2000

⁶Sinansari, *Rusuh Poso Rujuk Malino*, (Jakarta: Cahaya Timur, 2002). Lihat juga: Lasahido, Tahmidy, *Suara dari Poso, Kerusakan, Konflik dan Resolusi*, (Jakarta: YAPPIKA, 2003).

⁷Wawancara Johari Efendi & Akiko Horiba dengan mantan wakil Bupati, Poso, 12 Maret 2010.

ketikakelompok Kristen yang dikenal sebagai Pasukan Kelelawar atau ninja yang dipimpin oleh Fabianus Tibo membunuh 3 orang di kampung Mo-Engko. Kekerasan meningkat secara signifikan ketika serangan dilakukan ke kampung Situwu Lemba, atau dikenal sebagai Kilo Sembilan. Kelurahan ini adalah daerah transmigrasi suku Jawa Muslim dan mempunyai pesantren bernama Wali Songo. Sekitar 70 orang dibunuh atau hilang dalam penyerangan tersebut.

Kota Poso menjadi target dan membuat banyak Muslim mengungsi dari kota. Penyerangan Kilo Sembilan memicu umat Muslim disekitarnya untuk angkat senjata. Hal ini juga membuat tentara Indonesia menurunkan lebih banyak anggotanya. Pada Agustus 2000, Presiden Abdurrahman Wahid diundang oleh empat Gubernur Sulawesi untuk pertemuan damai, mengumpulkan 14 ketua adat dari kabupaten Poso. Inisiatif yang dikenal sebagai *Rujuk Sintuwu Maroso* ini diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pejabat kabupaten Poso dan 4 Gubernur di Sulawesi tapi hanya sedikit hasilnya. Pada April 2001, kemarahan yang memuncak dari komunitas Muslim terlihat dengan permintaan mereka untuk hukuman mati atas 3 orang Kristen Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus Dasilva yang dituduh terlibat dalam penyerangan Kilo Sembilan. Kelompok ekstrim dari luar Poso juga mengeluarkan amarahnya dan pada Juli 2001, beribu-ribu anggota Laskar Jihad (kaum militan Muslim yang berbasis di Jawa) tiba di Poso, menandai dimulainya tahap keempat dari konflik. Keterlibatan mereka di konflik ini mengubah dinamikanya, memberikan tambahan yang signifikan untuk umat Muslim, yang menyerang dan membakar perkampungan Kristen disekitar kota Poso. Konflik ini menjadi sangat satu pihak sekarang.

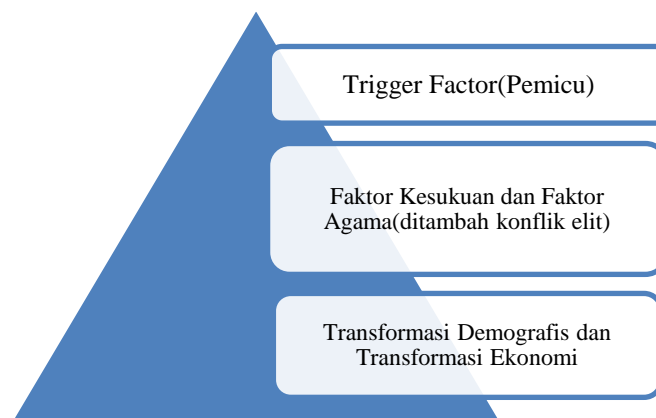
Pada Desember 2001, serangan yang dikoordinasi oleh kelompok-kelompok Muslim terjadi di beberapa kampung, dari Betalembah ke Sanginora, menandai dimulainya tahap kelima dari konflik. Pemerintah pusat mengirim 2000 petugas untuk mencoba mengatasi kekerasan di Poso, sehingga total petugas keamanan menjadi sekitar 3500 di daerah itu. Pada saat yang sama, Pemerintah menggagasi pembicaraan politik yang memuncak menjadi Deklarasi Damai Malino (Malino I) yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2001 oleh para pemimpin Muslim dan Kristen. Deklarasi ini menyerukan semua pihak untuk mengakhiri semua kekerasan, dan walaupun ada kekurangannya, mempunyai beberapa hasil. Bentrokan langsung antara dua komunitas ini berkurang, walaupun kadang-kadang masih terjadi pemboman dan penembakan yang sebagian besar dilakukan oleh kelompok Muslim. Dan ketiga orang Kristen yang dicurigai melakukan

penyerangan Kilo Sembilan diadili pada September 2006, yang akhirnya memicu protes yang berakibat kekerasan.

Keberhasilan mengurangi kekerasan ini sebagian dikarenakan petugas keamanan, yang kepercayaannya bertambah setelah Malino I ditandatangani dan menjadi makin bertekad untuk menahan mereka yang melakukan penyerangan. Kemungkinan puncaksemuanya ini adalah serangan polisi pada 2007 ke Tanah Runtuh, yang merupakan markas Laskar Mujahidin dan Laskar-laskar setempat, yang merupakan daerah yang dihindari sebelumnya. Namun, kenyataan bahwa konflik yang bertahun-tahun ini telah menjadikan komunitas tersebut terpisah di mana Muslim berpusat disekitar Poso dan Kristen disekitar Tentena juga telah menghilangkan motivasi dan kemampuan untuk melakukan penyerangan.⁸

Analisis Konflik

Piramida Akar Konflik Poso Tomagola⁹



Pada lapisan tengah piramida beroperasi sejumlah faktor suku dan agama yang berkelindan dengan faktor-faktor politik. Dua transformasi di lapisan bawah piramida lalu merembes ke atas dan menempatkan penganut Islam dan Kristen berbasis suku secara diametral. Transformasi struktural masuk dalam kesadaran kolektif masing-masing umat beragama. Mulai lapisan tengah piramida konflik inilah membuat warga setiap agama mulai bertarung. Pertama, pertarungan dilakukan dalam arena politik dengan memperebutkan berbagai posisi strategis, baik dalam partai-partai politik maupun dalam pemerintahan. Selama masing-masing pihak berhasil meraih posisi strategis dalam *power-sharing* secara berimbang, pertarungan tidak

⁸ Aditjondro, George, *Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya*, (Jakarta, ProPatria 2004); Arianto, Sangaji(2005), *Rumput Kering di Balik Anyir Darah Konteks Etno Religius dari Tragedi Kemanusiaan Poso*, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka, 2005).

⁹ Thamrin Amal Tomagola *dikutip oleh* M. Tito Karnavian *dalam bahasan tiap lapisan dalam sumber ini.*

meletup dalam bentuk konflik fisik. Berakhirnya masa jabatan bupati lama dan dimulainya pemilihan bupati (dan sekwilda baru) membuka arena pertarungan baru yang gagal diselesaikan secara politik.

Kedua, pertarungan politik yang merambat ke bawah, dari elit ke tengah-tengah massa. Situasi ini menciptakan ketegangan tinggi (*high tension*) antara kedua komunitas pendatang dan lokal yang masing-masing menggunakan simbol agama sebagai identitas. Puncak piramida diisi faktor-faktor penyulut konflik (aktivitas provokator) serta stereotip-stereotip *labeling* psikologi sosial serta dendam yang semakin menguat seiring bertambahnya durasi kekerasan. Perkelahian antar pemuda dari kedua pihak merupakan pemicu yang meletupkan ketegangan dan potensi konflik yang mengendap sebelumnya. Terlebih, ini ditambah kekecewaan institusional yang telah lama menumpuk di pihak umat Kristen. Kegamangan umat Kristen menerima kenyataan baru membuat suhu konflik meningkat tajam dan keharmonisan hidup Poso adalah pengganti tak ternilai harganya. Ketika korban berjatuhan, spiral kekerasan pun lepas kendali.

Piramida konflik Poso dikelilingi faktor lingkungan yang mempengaruhi intensitas konflik. Menurut Tomagola, lingkungan ini berupa aneka faktor kontekstual yang memfasilitasi terjadinya konflik komunal, yang terdiri atas faktor berkonteks lokal, nasional, dan internasional. Konteks lokal terdiri atas: Komposisi dan konfigurasi suku-suku yang bermukim di Poso; Pola pemukiman eksklusif dan tersegregasi menurut garis suku yang tumpang tindih dengan garis agama, pola tempat tinggal yang membedakan kita dan mereka, persaingan sengit antara lembaga-lembaga agama dalam memperluas teritori masing-masing dan membiakkan pengikut (Islamisasi, Kristenisasi), dan hancurnya lembaga-lembaga adat karena ulah pemerintah pusat dan sikap tidak bersahabat yang diperlihatkan oleh berbagai lembaga agama.

Konteks nasional pun ikut mempengaruhi konflik komunal yang terjadi di Poso. Dan sedikit bisa digambarkan terdiri atas tiga kondisi.¹⁰ Pertama, semakin dominannya para politisi Islam berbasis perkotaan di panggung perpolitikan nasional. Para politisi Iramasuka (Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan) yang didominasi tokoh asal Bugis semakin menguat posisinya mengitari Habibie (presiden RI waktu itu). Kedua, perkembangan di panggung nasional memberi angin dan peluang para politisi Islam berbasis perkotaan yang berasal dari suku Bugis berperan di Sulawesi secara keseluruhan.

¹⁰Arianto, Sangaji (2005), *Rumput Kering di Balik Anyir Darah Konteks Etno Religius dari Tragedi Kemanusiaan Poso*, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka, 2005)

Ketiga, mirip dengan kecenderungan Golkar merangkul para Kyai di Banjar (Kalimantan Selatan), di Poso juga terjadi hal yang sama. Dalam pemilihan Bupati Poso, jelas Golkar tidak akan mendukung calon PPP yang berbasis Islam pedesaan dan lebih memilih mendukung Abdul Muin Pusadan yang terhitung Islam modernis.

Faktor internasional berwujud ke dalam dua bentuk. Pertama adanya upaya pemanfaatan medan konflik Poso oleh jaringan Islam regional, yang menggunakannya sebagai *training ground* sekaligus mekanisme rekrutmen anggota baru jaringan mereka. Kedua, bias peliputan pers internasional yang merugikan umat Islam di Poso maupun di Maluku karena dikesankan seolah umat Islam-lah yang secara unilateral beraksi menyerang umat Kristen di wilayah itu.

Setelah sekian lama Konflik yang berlarut-larut Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), LSM nasional sampai LSM internasional dan bahkan Individu-individu dari akar rumput mulai melakukan beberapa resolusi dalam beragam bentuk. Penulis mencoba menuliskan inisiatif Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan Resolusi pasca konflik.

Setelah konflik yang berlarut-larut, korban jiwa dalam jumlah yang banyak dari kedua belah pihak, laporan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Poso pada 5 Desember 2001 menyatakan bahwa korban tewas selama konflik berlangsung dalam 3 fase mencapai 577 jiwa, belum termasuk mereka yang luka berat dan ringan. Konflik telah menyisakan trauma psikis yang mendalam dihati masyarakat yang mengalaminya. Dendam dan frustrasi sosial karena sanak keluarga terbunuh dan harta benda habis terbakar. Perasaan sesama masyarakat korban konflik memunculkan solidaritas sosial dengan mengatasmakan agama. Hal demikian akan semakin mempertajam friksi antara dua pihak yang pernah berkonflik dan akan menjadi potensi untuk timbulnya konflik baru.

Bertambahnya *blow up* isu agama yang banyak di selewengkan dari kebenaran menambah eskalasi konflik dan semakin meluas serta timbulnya solidaritas masyarakat dari luar dan berusaha masuk ke wilayah konflik untuk kemudian bergabung dengan komunitas yang sama sehingga menjelma menjadi konflik berdarah-darah yang kemudian sangat sulit dipulihkan. Ketika konflik berdarah berlangsung di Poso terlihat juga adanya faktor-faktor lain yang turut menambah bara api konflik, seperti adanya indikasi keberpihakan petugas dengan kelompok yang berkonflik dan peluang yang cukup besar bagi masuknya bala bantuan untuk mereka yang berkonflik terhadap bantuan dari luar lokasi. Faktor-faktor ini lah yang menyebabkan konflik semakin

meningkat dari waktu ke waktu dan membuat semakin menderitanya masyarakat Poso sendiri.

Resolusi Konflik Melalui Deklarasi Malino dan Pendekatan Budaya.

Konflik Poso yang berlarut-larut telah mengundang perhatian masyarakat Indonesia. Banyaknya korban jiwa dari masing-masing pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan bahkan kelompok-kelompok Masyarakat, mendorong untuk melakukan perdamaian antara pihak yang berkonflik. Akhirnya, pada tanggal 18-20 Desember 2001 perdamaian antar kedua belah pihak diselenggarakan di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang dinamakan "Deklarasi Malino". Penyatuan etnis melalui "Deklarasi Malino" diharapkan dapat melukis kembali keadaan Poso yang damai, tentram, dan sejahtera sebagaimana sebelum terjadi konflik. Adapun naskah Deklarasi Malino dapat dilihat pada halaman berikut.

Nilai kearifan lokal yang dikenal masyarakat Poso, Sintuwu, perlu dipupuk dan diperkenalkan kepada generasi muda setempat. Sintuwu adalah mufakat bersama untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama. Karena konflik yang terjadi sejak 1998 di Poso, nilai kearifan lokal ini seolah luntur dan dilupakan. Dengan memegang nilai sintuwu maka masyarakat Poso bisa bekerjasama dengan penuh kekeluargaan dalam rasa kebersamaan satu komunitas. Kegiatan bersama dalam konteks sosial dan agama ini disebut sebagai Mesale atau rasa tanggungjawab sosial dalam membantu anggota masyarakat yang lain melakukan tugasnya. Sintuwu juga mengandung pengertian adanya nasialapale atau keterbukaan dalam keterbukaan menerima keyakinan agama, bahasa, adat istiadat yang berbeda, rasa solidaritas dan kekeluargaan yang meningkat diantara sesama warga, serta rasa simpatik dan penghargaan antar sesama. Selain itu terkandung makna membetulungi dan mombepelae atau kepedulian sosial yaitu semangat saling membantu dan bahu membahu. Kearifan lokal Poso lain yang bisa dimaksimalkan adalah tradisi padungku yang merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Apabila nilai ini dikembangkan sebagai bagian dari penyelesaian konflik di Poso maka perdamaian abadi akan bisa diwujudkan.

DEKLARASI MALINO UNTUK POSO¹¹

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang mewakili masyarakat Muslim dan Kristiani Poso serta kelompok-kelompok yang ada, setelah mengalami dan menyadari bahwa konflik dan perselisihan yang berlangsung selama tiga tahun terakhir ini di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali, telah membawa penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat, maka dengan hati yang lapang serta jiwa terbuka, sepakat:

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati, dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Pernyataan kesepakatan ini kami buat dengan ikhlas dan iktikad baik untuk menjalankan.

Realisasi dari pertanyaan ini, akan dilaksanakan dengan agenda serta rencana sebagai berikut:

- I. Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum (Lampiran I)
- II. Komisi Sosial Ekonomi (Lampiran II)

Pemantauan pelaksanaan rencana tersebut, dilakukan oleh Tim Pemantau Nasional dan Kelompok Kerja (pokja) yang dibentuk di daerah.

Dibuat di: Malino

Keragaman agama, etnik, dan budaya, tanpa disadari telah menciptakan building block yang mengganggu harmoni kohesi dan interrelasi sosial. Hal ini sebenarnya merupakan akibat dari sistem otoritarian Orde Baru yang tidak merancang kerukunan dan kedamaian antar etnis dan agama dengan basis keragaman melainkan dengan basis keseregaman. Karena itu,

¹¹ Sumber: <http://blogs.unpad.ac.id/boenga/2011/08/24/deklarasi-malino-untuk-poso/>

begitu Orde Baru jatuh, konflik yang tertahan pun mencuat. Nilai-nilai kearifan lokal semacam itulah yang dilupakan pemerintah ketika melakukan proses perdamaian di Poso. Sehingga keadilan dan kesetaraan di bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi antara masyarakat asli dan pendatang tidak bisa terwujud. Padahal nilai kearifan lokal adalah bagian penting kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga tidak seharusnya pendekatan budaya lokal dipindahkan dari upaya menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat yang heterogen seperti di Poso.¹²

Kesimpulan

Pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan konflik Poso berupa Deklarasi Malino pada akhir tahun 2001. Namun, Deklarasi Malino nampaknya belum cukup meredam konflik dan berbagai kericuhan kembali terjadi pasca Deklarasi Malino dengan permasalahan yang sama. Kondisi demikian menunjukkan bahwa konflik Poso merupakan konflik yang telah mendarah daging dan diperlukan profesionalitas serta keterlibatan oleh seluruh elemen masyarakat dalam penyelesaiannya. Peningkatan rasa kepercayaan terhadap antar golongan menjadi topik utama yang harus diperhatikan untuk mewujudkan perdamaian di Poso. Serta mencoba mengadakan perundingan pimpinan dari kelompok bertikai dan usaha memeberikan materi tentang nilai-nilai toleransi perbedaan sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses perdamaian di wilayah Poso.

Selama ini pendekatan keamanan selalu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di Tanah Air, termasuk dalam menyelesaikan konflik di Poso yang mulai terjadi pada 1998. Pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud komunikasi para pihak yang berkonflik kerap kali dipinggirkan. Padahal masyarakat Poso memiliki kearifan lokal yang bermakna luhur untuk menciptakan keharmonisan dan perdamaian masyarakatnya. Untuk menciptakan perdamaian yang permanen di Poso, mediasi kedua pihak yang berkonflik yakni masyarakat Poso beragama Islam dengan yang beragama Kristen perlu dilakukan. Sebab mediasi bisa menjembatani kepentingan-kepentingan kedua pihak untuk diwujudkan tanpa mencederai kepentingan manapun. Dengan mediasi maka akan ditemukan jalan bersama bagi kedua pihak yang bertikai sehingga kesenjangan sosial dan ketidakadilan, tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Selain itu perlu promosi dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik di Poso merupakan

¹² Nurvita indarini, <https://akupunmenulis.wordpress.com/2009/07/22/pendekatan-budaya-sebagai-sarana-penyelesaian-konflik-di-poso>.

pendekatan terbaik dan efektif. Nilai kearifan lokal Poso adalah "Sintuwu Maroso" yang merupakan mufakat bersama untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama. Selain itu juga memaksimalkan nilai kearifan lokal lainnya yakni tradisi padungku yang merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Promosi nilai kearifan lokal ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal kepada anak-anak sejak dini dan melalui organisasi masyarakat setempat. Kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang baik dan kuat, serta nilai-nilai luhur budaya lokal yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan di Poso. Sebab kondisi itu akan membuat upaya pihak yang sengaja menghembuskan isu etnis dan agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan tujuan membuat masyarakat terprovokasi dan bersikap anarkis tidak akan tercapai. Dengan demikian perdamaian di Poso akan bersifat permanen.

Referensi

- Dick Baly, Handout kuliah Conflict Theory (Early Warning, Mediation and Negotiation)
- Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, dan Hugh Mial, Contemporary Conflict Resolution, Cambridge: Polity Press, 2005
- George J. Aditjondro, *Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya*, Makalah ProPatria, Yogyakarta. 7 Januari 2004.
- Patria, 2013. *Kenangan Pahit, Desember 1998 Kerusuhan Poso Meletus*, Berita Kawanua. 26 Desember 2013.
- Rohaiza Ahmad, dkk, 2011. *Pengelolaan Konflik di Indonesia - Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan Poso*.
- Hasrullah, 2009. *DENDAM KONFLIK POSO*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arianto Sangaji, Konflik Poso Untungkan Aparat dan Pemodal, <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=2322&lang>
- Eddy MT Sianturi, Konflik Poso dan Resolusinya, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=7>
- Lukman S Thahir, Refleksi Hubungan Keagamaan di Poso Sebelum dan Pasca Konflik; Menuju Kehidupan Damai, <http://www.interfidei.or.id/pdf/DS270603.pdf>
- Soetandyo Wignjosebroto Konflik: Masalah, Fungsi, dan Pengelolaannya, <http://www.balitbangjatim.com/upload/artikel/KONFLIK%20Sutandyo.doc>
- Sofyan IH, Dimensi Budaya dalam Situasi Konflik, http://www.kongresbud.budpar.go.id/2003/utusan_sulawesi_tengah.htm
- Syamsul Alam Agus, Operasi Pemulihan Keamanan di Poso dan Kekerasan yang Terpelihara, <http://www.kontras.org/poso/tulisan/Operasi%20Pemulihan%20Keamanan%20di%20Poso.doc>



Pengembangan Sistem Senjata Otonom Mematikan dan Implikasinya Terhadap Keamanan Internasional

R. Mokhamad Luthfi, Nanda Avalist

Universitas Al Azhar Indonesia

luthfi@uai.ac.id

Abstrak

Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan teknologi lainnya telah membuat negara-negara maju menciptakan sistem senjata otonom yang mematikan (*lethal autonomous weapon system/LAWS*). Meskipun belum ada senjata otonom yang sepenuhnya tidak melibatkan manusia dalam pengambilan keputusan, arah pengembangan teknologi senjata yang benar-benar otonom telah berjalan mendekati kenyataan. Potensi penggunaan LAWS yang dapat menentukan sendiri hidup dan mati musuhnya tanpa intervensi operator dalam konflik bersenjata, telah menjadi tantangan bagi perdamaian dan stabilitas global. Menggunakan konsep *revolution in military affairs (RMA)* sebagai kerangka analisa, LAWS diyakini sebagai RMA berikutnya setelah penemuan mesiu, bom atom, dan peluru kendali yang presisi. Tulisan ini akan menjelaskan pengembangan LAWS dan implikasinya terhadap Keamanan Internasional dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Diketahui, berbagai organisasi internasional telah memulai pembahasan LAWS sejak 2013 dalam kerangka Konvensi PBB Tahun 1980 mengenai Senjata Konvensional Tertentu (*United Nations Convention on Certain Conventional Weapons*). Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam kaitan pengembangan LAWS dan implikasinya dengan keamanan internasional, antara lain; potensi perlombaan sistem senjata otonom yang mematikan antar negara yang memproliferasi sistem senjata otonom, implikasi LAWS yang berpeluang semakin mudahnya konflik terjadi dan memperlama konflik, serta kerentanan teknologi yang membuatnya dapat malfungsi, diambil alih aktor non negara, dan lainnya. Diyakini, pengembangan teknologi LAWS tidak akan terhindarkan dan akan hadir dalam waktu beberapa dekade mendatang.

Kata kunci:

LAWS, Sistem Senjata Otonom, Keamanan Internasional, RMA

Pendahuluan

Dalam konflik bersenjata yang terjadi pada akhir-akhir ini, kita dapat menyaksikan bahwa manusia dapat tidak terlibat dan berada secara langsung dalam pertempuran. Perkembangan teknologi telah membuat manusia dapat mengendalikan sebuah sistem dari jarak jauh untuk melakukan berbagai tugas seperti pengumpulan informasi dan gambar, terbang mengikuti titik-titik rute yang telah ditetapkan sebelumnya, atau lepas landas dan mendarat dengan otomatis. Pesawat nirawak atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau populer pula dengan *drone*, merupakan sistem yang memiliki kemampuan melakukan berbagai tugas tersebut. *Drone* bahkan dapat meluncurkan peluru kendali (rudal) dan membunuh lawannya sesuai dengan perintah pilot pengendali yang berada sangat jauh dari lokasi pertempuran. Sistem senjata seperti *drone* ini dinilai memiliki tingkat otomatisasi yang tinggi (*highly automated*), namun belum dapat digolongkan kepada sistem senjata otonom karena masih dikendalikan dibawah supervisi dan kendali langsung manusia (Asaro 2012, 690). Selain pesawat, sistem nirawak lainnya yang memiliki otomatisasi yang sangat tinggi telah digunakan dalam kapal selam, kapal permukaan, dan wahana darat. MQ-1 Predator, MQ-Reaper, RQ-4 Global Hawk, dan Wasp merupakan contoh pesawat nirawak angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) yang telah operasional dalam berbagai konflik. Sementara itu, Korea Selatan menggelar robot Samsung SGR-A1 di zona demiliterisasi, perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Perkembangan berikutnya dari sistem senjata tersebut adalah berkurangnya kendali manusia dalam keputusan menargetkan dan menembak. Sistem otonom memiliki kemampuan dalam memilih target dan mengotorisasi penggunaan kekuatan yang mematikan (*lethal force*) kepada suatu target setelah mereka dihidupkan. Saat ini, beberapa negara maju telah dan sedang mengembangkan sistem senjata yang otonom berupa *unmanned combat aerial vehicle* (UCAV). Saat ini, AS terus menguji coba Northrop Grumman X47B yang dapat terbang dari landasan di darat maupun dari kapal induk. Sementara Inggris juga tengah mengembangkan British Aerospace (BAe) Taranis, dan Perancis telah memperlihatkan UCAV produksinya dengan nama Dassault nEUROn. Bagi Inggris, BAe Taranis di proyeksikan untuk operasional pada tahun 2030. Rusia juga tercatat pernah mengembangkan Mikoyan Skat dan India sedang mengembangkan AURA.

Pengembangan UCAV ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dalam teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan robotika, serta kemampuan mesin untuk belajar (*machine*

learning). Teknologi inilah yang berperan dalam merealisasikan *lethal autonomous weapons system* (LAWS).¹ LAWS dapat digelar dalam lingkungan dan situasi yang kompleks dan dinamis, lengkap dengan kemampuan canggih untuk dapat beradaptasi dalam melakukan tugas serangan dengan sedikit atau bahkan tanpa intervensi manusia (Boulainin 2016, 1). Terdapat beberapa istilah lain yang digunakan untuk merujuk kepada LAWS antara lain: robot pembunuh (*killer robots*) dan *lethal autonomous robotics*.

LAWS memang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tentara dalam perang, apakah itu sebagai bagian dan perpanjangan dari tentara manusia, atau bahkan menjadi pengganti manusia dalam medan perang. Potensi keterlibatan sistem senjata otonom yang mematikan ini mendapatkan beragam perhatian. Mulai dari penerimaan moral (*moral acceptability*), kesesuaiannya dengan hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, serta dampak negatifnya terhadap stabilitas dan hubungan antar negara. Dari paparan di atas, pertanyaan menarik yang perlu diajukan adalah bagaimana implikasi sistem senjata otonom mematikan terhadap keamanan internasional?

Untuk mendapatkan jawaban dan melakukan analisa, penulis menggunakan konsep *revolution in military affairs* (RMA). Metode penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah desain riset kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atas berbagai sumber pustaka dan data yang diperoleh. Studi literatur menurut Neuman berdasar atas asumsi bahwa pengetahuan berakumulasi dan bahwa manusia belajar dari dan membangun pengetahuan dari yang peneliti lain telah lakukan. Dari tipe studi literatur, penulis menetapkan kepada tipe *context review*, yang mana penulis menghubungkan studi yang spesifik (sistem senjata otonom yang mematikan) dengan bagian dari pengetahuan yang lebih besar yaitu keamanan internasional (Neuman 2006, 111-112).

Lethal Autonomous Weapon System Sebagai Revolution in Military Affairs Berikutnya

Definisi Revolution in Military Affairs

Dalam kajian strategis dan kebijakan pertahanan, *revolution in military affairs* (RMA) menjadi perdebatan yang utama dan signifikan setelah berakhirnya perang dingin. Perdebatan ini berkisar antara apakah RMA sedang berlangsung dan bagaimana implikasinya terhadap masa depan peperangan. RMA diyakini akan berimplikasi luas kepada berbagai isu vital antara lain: apa

¹ Penulisan selanjutnya akan menggunakan akronim LAWS untuk sistem senjata otonom yang mematikan (*lethal autonomous weapon system*).

peran kekuatan militer dalam sistem internasional, negara mana (atau bahkan aktor non negara) dan strategi militer apa yang memiliki keunggulan, bagaimana bentuk operasi militer dan perang di masa depan, apa sistem dan teknik yang baru untuk intervensi militer atau penggunaannya dalam konflik, serta apakah paradigma peperangan pada saat ini akan berevolusi atau berubah secara radikal? Berbagai pertanyaan inilah yang muncul dalam pembahasan RMA. Meski teknologi tidak selalu menjadi kunci kemenangan dalam kemenangan dan bukanlah sebuah penawar konflik, teknologi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang dapat dipahami sebagai dapat mengubah perang (Benbow 2004, 9).

Menurut Elinor Sloan (E. C. Sloan 2002, 3), Terdapat beberapa variasi definisi RMA yang dikembangkan oleh analisis kajian strategis. *Pertama*, RMA didefinisikan sebagai perubahan revolusioner dalam bagaimana perang di jalankan dan dimenangkan, sebuah perubahan yang seringkali dapat dikenali dengan melihat angkatan bersenjata yang menjalankan RMA dapat mengalahkan angkatan bersenjata yang tidak menjalankannya. Definisi tersebut menangkap sifat esensial dari RMA. *Kedua*, RMA adalah pergeseran paradigma dalam sifat dan pelaksanaan operasi militer yang membuat usangnya satu atau lebih kemampuan dari pemain dominan. Definisi ini menggarisbawahi karakteristik yang menentukan dari RMA. *Ketiga*, RMA adalah perubahan besar dalam sifat peperangan yang disebabkan oleh inovasi aplikasi teknologi yang dengan kombinasi perubahan dramatis dalam doktrin militer, operasional, dan konsep organisasional, mengubah secara mendasar karakter dan pelaksanaan operasi militer. Definisi ini menekankan elemen spesifik inovasi teknologi sebagai penyebab RMA. Definisi ketiga merupakan definisi yang disampaikan oleh Andrew Marshall, Direktur *Office of the Net Assessment* pada Tahun 1991 (E. Sloan 2008, 3).

Sejarah *Revolution in Military Affairs*

Sejarah memperlihatkan bahwa pengembangan teknologi perang, metode, satu inovasi militer atau kombinasi dari berbagai perubahan tersebut telah mengubah pelaksanaan pertempuran. Sejak abad ke-14, Andrew Krevinevich berpendapat bahwa RMA telah terjadi sebanyak sepuluh kali. Dimulai dari perang seratus tahun (*Hundred Years War*) antara Inggris dan Perancis dengan penggunaan pasukan infanteri pemanah yang menggantikan pasukan kavaleri, revolusi artileri dengan perbaikan teknologi dalam kanon yang membuat meningkatnya kekuatan tembakan artileri. Krevinevich juga berpendapat bahwa perubahan dramatis dalam perang juga terjadi dalam

Revolusi Napoleonik dengan introduksi *lévee en masse* yang memperbesar jumlah pasukan Napoleon secara dramatis.

Penggunaan telegraf, kereta api, kapal perang dengan mesin turbin dan lunas berbahan logam pada Perang Dunia (PD) I, mekanisasi, penggunaan teknologi dirgantara (aviasi), dan pemanfaatan informasi pada PD II, dan teknologi nuklir merupakan RMA yang pernah terjadi dalam sejarah. Dalam Perang Teluk I, Clifford Rogers menyatakan bahwa teknologi yang digunakan berimplikasi kepada perubahan besar bagi aktor ofensif dan defensif. Keunggulan dalam kecepatan, mobilitas, dan efek kejut, diyakini mengurangi efektivitas aktor yang berada dalam posisi defensif dan sebaliknya memberikan keuntungan bagi aktor yang ofensif (E. C. Sloan 2002, 21-24).

Bukti bahwa Perang Teluk I (The Iraq Wars) pada 1991 merupakan sebuah RMA dijelaskan oleh Keith L. Shimko. Dalam analisisnya, mengingat RMA memperlihatkan perubahan dalam karakter peperangan, terdapat tiga potensi aspek revolutif pada Perang Teluk I, antara lain: dominasi kekuatan udara, mengandalkan kepada kemampuan menghancurkan target dengan presisi (*precision targeting*), dan peningkatan dramatis dalam teknologi informasi dan kesadaran situasi (*situational awareness*) (Shimko 2010, 79). Shimko, mengutip John Warden, menyatakan bahwa Perang Teluk I sebagai *hyper war* yang mengkapitalisasi teknologi tinggi, akurasi yang tidak pernah ada sebelumnya, kejutan strategis dan operasional melalui teknologi siluman (*stealth*), dan kemampuan untuk melakukan serangan secara simultan terhadap jaringan strategis dan operasional kunci yang dimiliki Irak. Warden, menggarisbawahi bagaimana teknologi stealth dan kemampuan meluncurkan senjata presisi telah merevolusi kekuatan udara secara khusus.

Penggunaan kekuatan udara untuk melakukan serangan secara presisi juga merupakan kunci sukses bagi militer AS dalam kampanye militer di Afghanistan pada saat Operation Enduring Freedom. Begitupun juga kampanye militer AS yang kedua di Irak dalam Operation Iraqi Freedom (Goldman and Mahnken 2004, 2). Keberhasilan AS ini memperlihatkan bahwa pasukan militer AS berhasil dalam memproyeksikan kekuatan pada jarak yang sangat jauh dengan jumlah pasukan yang relatif kecil. Goldman menambahkan bahwa meskipun teknologi telah berperan besar dalam kesuksesan militer AS di Afghanistan dan Irak, kampanye militer AS masih berlangsung dan belum tercapai perdamaian sepenuhnya.

Revolution in Military Affairs dan Sistem Senjata Otonom yang Mematikan

Salah satu inovasi teknologi yang diyakini sebagai bagian dari RMA yang sedang berlangsung adalah kehadiran pesawat nirawak atau *unmanned aerial vehicles* (UAV). UAV dapat berperan sebagai bagian kunci dari jaringan dan

dapat berperan sebagai sistem sensor dan senjata (Dombrowski and Gholz 2006, 32). Saat ini, penggunaan UAV dalam operasi militer untuk melakukan tugas pengintaian dan pengamatan oleh organisasi militer telah digunakan tujuh puluh negara dari lima puluh negara yang memiliki kemampuan mengembangkannya. Pesawat nirawak bersenjata (*armed drone*) diketahui sedang dikembangkan oleh dua puluh tiga negara (Davis, et al. 2014). Adapun, negara yang pernah menggunakan *armed drone* adalah AS, Inggris, dan Israel (Bieri and Dickow 2014, 3)

Dalam aspek teknologi, kehadiran UAV merupakan titik berangkat bagi sebagian teknologi robotik otonom dan memelopori robotika militer. UAV yang dipiloti dari jauh memiliki kemampuan untuk mengemban misi yang lama tanpa membahayakan personil militer. Namun, kesulitan dapat muncul terkait pita lebar (*bandwidth*) dan sinyal yang dapat mengganggu pengendalian UAV. Untuk mengatasi masalah tersebut, logika militer melangkah kepada penguatan otonomi wahana dan mengaplikasikan berbagai sensor. Sistem tersebut akan semakin canggih dan perlahan melepaskan intervensi pilot dari berbagai tugas yang rumit (Bieri and Dickow 2014, 2). Selain di wahana angkasa, penelitian dan pengembangan robotika militer juga telah dilakukan di wahana darat (*unmanned ground vehicle*) dan laut (*unmanned underwater vehicle* dan *unmanned surface vehicle*).

Penggunaan robotika militer, selain menjauhkan operator manusia dari bahaya yang terjadi di pertempuran, juga untuk menyasati ketidakmampuan manusia dalam menangani stress, bahaya, dan berkurangnya stamina. Dalam sistem senjata otonom seperti ini, manusia secara progresif dihapus dari rantai pengambilan keputusan dan tanggung jawab (Bieri and Dickow 2014, 3).

Dalam direktif Departemen Pertahanan AS No. 3000.09 pada Tahun 2012, sistem senjata otonom didefinisikan sebagai berikut:

"a weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator. This includes human-supervised autonomous weapon systems that are designed to allow human operators to override operation of the weapon system, but can select and engage targets without further input after activation" (Foy 2014, 49).

Dalam definisi tersebut, jelas bahwa sistem senjata otonom dapat memilih dan menyerang targetnya tanpa intervensi oleh operator manusia setelah diaktifkan, meskipun tetap terdapat peluang operator manusia untuk membatalkan otonomi sistem senjata tersebut abila diperlukan. Definisi senada juga diadopsi oleh Human Right Watch yang menyatakan bahwa *"any robot that*

can select and engage target without human input, even if there is human oversight, will qualify as fully autonomous robot" (Foy 2014, 49). Definisi dari Human Right Watch juga mengindikasikan bahwa manusia semakin tidak diperlukan dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih dan menyerang target.

Docherty menyatakan bahwa keterlibatan manusia dalam simpul pembuatan keputusan oleh sistem senjata otonom terkait pemilihan target dan keputusan menyerang, dikategorikan dalam tiga cara: pertama, *human in the loop* (manusia dalam simpul pembuatan keputusan), bermakna bahwa robot dapat memilih dan menyerang hanya dengan perintah manusia, kedua, *human on the loop* (manusia di atas simpul pembuatan keputusan), bermakna robot dapat memilih dan menyerang target di bawah supervisi operator manusia yang dapat membatalkan dan mengambil alih aksi robot, dan ketiga, *human out of the loop* (manusia di luar simpul pembuatan keputusan), bermakna bahwa robot dapat memilih dan menyerang target tanpa intervensi atau interaksi dengan operator (Boulainin 2016, 1). Pesawat nirawak yang ada saat ini, diketahui masih berada pada tingkat otonomi pertama yang masih melibatkan operator manusia sebagai pilot dan yang memberikan keputusan dalam pemilihan dan penyerangan target (*human in the loop*).

Sistem senjata yang sepenuhnya otonom pada saat ini dapat dikatakan belum ada. Namun, beberapa sistem senjata terus meningkat kemampuan otonominya dan semakin mendekati status otonom secara penuh. Para ahli juga mempercayai bahwa pengembangan dan introduksi sistem senjata otonom merupakan hal yang tidak terhindarkan dan akan muncul dalam waktu yang tidak lama mengingat telah tersedianya teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan sistem senjata otonom yang mematikan. Angkatan Udara AS dalam rencananya bahkan telah menganjurkan bahwa sistem penerbangan yang otonom secara penuh akan dimungkinkan pada Tahun 2025 (Foy 2014, 50-51).

Penggunaan sistem senjata yang otonom juga dinilai memiliki keuntungan. Tidak seperti manusia, mesin tidak merasakan kelaparan, tidak merasa takut, tidak terpengaruhi tekanan psikologis dan emosi ketika perang, tidak lupa akan perintah dan dianggap akan lebih baik melakukan tugasnya daripada manusia (Foy 2014, 52). Dalam aspek operasional dan taktis, penggunaan sistem senjata otonom dikalkulasi lebih efisien dibandingkan senjata yang dioperasikan manusia. Begitupun dalam taktis di medan operasi dimana sistem senjata otonom dapat beroperasi tanpa istirahat sepanjang catu daya dapat diisi ulang.

Teknologi sistem senjata otonom yang mematikan yang saat ini sedang dikembangkan negara-negara maju merupakan senjata yang segera

operasional dalam beberapa tahun mendatang. Sistem senjata otonom memiliki kemungkinan sebagai RMA berikutnya mengingat teknologi ini tidak terlepas dari upaya untuk mempertahankan keunggulan strategi militer oleh negara maju yang kemudian berdampak pula terhadap bagaimana intervensi militer dapat dijalankan dalam berbagai konflik.

Introduksi sistem senjata otonom yang mematenkan diyakini dapat mengubah bagaimana perang dijalankan dan dimenangkan oleh negara dengan keunggulan strategi militer yang menggunakan sistem senjata otonom, mengingat semakin berkurangnya keterlibatan tentara manusia di medan pertempuran dari pihak yang menggunakan strategi pengerahan sistem senjata otonom tersebut. Keunggulan inilah yang berpeluang memberikan kemenangan yang menentukan bagi pihak pengguna sistem senjata otonom.

Kehadiran sistem senjata otonom juga dapat membuat *obsolete* senjata yang masih mengandalkan manusia sebagai operator sepenuhnya dan membuat pelaksanaan perang menjadi kontras antara mesin/robot melawan senjata yang dikendalikan manusia. Perubahan juga dapat terjadi dalam doktrin, operasional, dan organisasional ketika robotika militer ini menjadi bagian yang menambah kekuatan militer atau bahkan menggantikan tentara dalam pertempuran. Hal ini akan mengubah secara mendasar karakter dan pelaksanaan operasi militer.

Analisis dan Pembahasan

Meskipun sistem senjata otonom dianggap memiliki keuntungan, implikasi lain terhadap keamanan internasional juga menjadi perhatian. Implikasi negatif terhadap perdamaian dan destabilisasi keamanan regional dan internasional merupakan sejumlah kekhawatiran berbagai pihak atas pengembangan sistem senjata otonom tersebut.

Pengembangan Sistem Senjata Otonom dan RMA

Proliferasi sistem senjata otonom mematenkan dan diyakini dapat memberikan keunggulan strategis bagi negara yang mengembangkannya, dapat memicu terjadinya perlombaan pengembangan sistem tersebut. Hal ini dapat terlihat manakala berbagai negara telah dan sedang mengembangkan sistem senjata otonom yang diawali dengan penguasaan teknologi kunci seperti pengembangan pesawat nirawak.

Tabel 1. Negara Dengan Kepemilikan Pesawat Nirawak

No	Keterangan	Jumlah Negara
1	Negara dengan kemampuan mengembangkan pesawat nirawak	50
2	Negara memiliki pesawat nirawak	70
3	Negara yang mengembangkan pesawat nirawak bersenjata	23
4	Negara yang pernah menggunakan pesawat nirawak bersenjata	3

Sumber: dari berbagai sumber, data diolah kembali oleh penulis

Tiga negara antara lain, AS, Inggris, dan Israel diketahui telah menerjunkan pesawat nirawak bersenjata ke dalam konflik yang sedang dihadapi. Pesawat nirawak yang dioperasikan masih mengandalkan manusia dalam simpul keputusan pemilihan dan penyerangan target. Jumlah negara yang memiliki pesawat nirawak memiliki potensi untuk terus bertambah seiring dengan perlombaan sistem senjata tersebut.

Merujuk kepada definisi RMA pertama yang memaknai RMA dari sifat esensialnya, pengembangan pesawat nirawak apabila dilihat sebagai implementasi RMA, dimana angkatan bersenjata yang mengembangkan pesawat nirawak bahkan mempersenjatainya dapat mengalahkan angkatan bersenjata yang tidak melakukannya. Persepsi seperti ini dapat dikaitkan dengan besarnya negara yang ingin menggunakan dan mengembangkan pesawat nirawak.

Implikasi Sistem Senjata Otonom yang Mematikan Terhadap Konflik

Penggelaran sistem senjata tanpa awak juga dapat berimplikasi terhadap jatuhnya korban jiwa sipil diluar targetnya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan kelompok hak asasi manusia Reprieve, meski dikendalikan oleh manusia, *drone* bersenjata mengakibatkan kematian warga sipil yang lebih banyak daripada target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kampanye militer Presiden Obama dalam menggunakan *drone* bersenjata di berbagai konflik sampai dengan November 2014, percobaan penyerangan terhadap 41 orang target yang telah ditetapkan, mengakibatkan kematian manusia sebanyak 1147 orang. Data yang lain menyebutkan bahwa dari 33 target yang berhasil dimatikan, dalam prosesnya juga membunuh 947 orang lainnya.

Menurut data dari Council for Foreign Relations (CFR), sebanyak 500 serangan *drone* bersenjata telah mengakibatkan kematian 3674 orang, termasuk dalam jumlah tersebut adalah anak-anak.²

Serangan *drone* bersenjata yang mengakibatkan kerusakan tambahan (*collateral damage*) berupa kematian warga sipil yang tidak bersalah. Membuat kekhawatiran akan besarnya korban jiwa dalam perang. Namun, meski jumlah kematian warga sipil sangat banyak, hal ini belum menjadi sebuah restriksi akan penggunaan *drone* bersenjata. Hal inilah yang menambah kekhawatiran bahwa kehadiran sistem senjata otonom akan membolehkan negara untuk melakukan penggunaan kekerasan dalam konflik tanpa konsultasi dan prosedur yang memadai.

Penggunaan sistem senjata otonom dapat membuat negara semakin tergodanya untuk terlibat dalam konflik bersenjata atau peperangan dalam waktu yang singkat karena minimalnya pasukan militer manusia dalam zona konflik. Konflik bahkan juga dapat terus berlangsung secara kontinyu mengingat mesin dapat beroperasi dalam kurun waktu yang lama dan dapat ditinggalkan untuk terus melakukan patroli. Berbeda dengan manusia yang terbatas dalam operasinya. Hal ini dikhawatirkan memiliki dampak sosial dan psikologis sebagaimana halnya ranjau darat yang tertinggal pasca konflik masih dapat membahayakan.

Penyerangan oleh *drone* bersenjata dan kemampuannya untuk beroperasi dalam kurun waktu yang lama dan cukup dikendalikan dari jarak yang jauh, memperlihatkan bahwa karakter perang berubah secara dramatis dalam operasionalnya sebagaimana definisi RMA. Seorang pilot *drone* tidak berada dalam lokasi pertempuran sehingga tidak membahayakan dirinya, namun di lain pihak juga tidak memiliki kesadaran situasi sepenuhnya di lokasi sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan tambahan jatuhnya warga sipil yang tidak bersalah. Hal ini pula lah yang dapat menjadi dasar bagaimana sistem senjata otonom dapat berdampak negatif terhadap terjadinya konflik.

Dalam pertempuran, kehadiran sistem senjata otonom akan meningkatkan kecepatan pertempuran. Dalam ujicoba prototipe, pengujian dilakukan dalam kecepatan supersonik dan hipersonik. Hal ini akan berdampak kepada kebutuhan perangkat otonom yang juga memiliki kecepatan. Karena proses pengambilan keputusan yang melibatkan manusia tidak cukup cepat, maka manusia sangat dimungkinkan hanya memiliki sedikit kendali terhadap

² Spencer Ackerman, 41 Targeted but 1147 Killed: US Drone Strikes-the Facts on the Ground, www.theguardian.com, Senin, 24 November 2014 dapat diakses pada <https://www.theguardian.com/us-news/2014/nov/24/-sp-us-drone-strikes-kill-1147> diakses 14/11/16

sistem. Dengan demikian, konflik bersenjata dapat berlangsung dengan cepat (Control 2015). Hal tersebut memiliki kemiripan tatkala implementasi RMA dalam Perang Irak I (1991), Perang Operasi Enduring Freedom dan Operation Iraqi Freedom (Perang Irak II, 2001-2003) yang berlangsung dengan cepat dalam menduduki Baghdad dengan korban jiwa yang relatif minimal (Shimko 2010, 158). Hal tersebut mengonfirmasi keunggulan dalam kecepatan, mobilitas, dan efek kejut, yang dapat mengurangi efektivitas aktor yang berada dalam posisi defensif (E. C. Sloan 2002, 21-24).

Sistem Senjata Otonom yang Mematikan dan Kerentanannya

Sebagai mesin, sistem senjata otonom tetap memiliki kerentanan dalam penggunaannya. Selain malfungsi perangkat, kerentanan akan terjadinya *error* dalam sistem senjata otonom dapat bersumber dari kesalahan pemrograman, penurunan sambungan komunikasi dengan operator, serangan siber dari pihak lawan, dan upaya *jamming* untuk mengganggu operasional sistem senjata otonom tersebut. Kerentanan ini juga dapat berpeluang terjadinya pengambilalihan sistem senjata otonom oleh pihak lawan yang akan membuat pengendalian sistem senjata otonom menjadi tidak dapat diprediksi.

Teknologi sistem senjata otonom juga dikhawatirkan dapat jatuh kepada aktor non negara mengingat semakin mudahnya difusi teknologi dan menurunnya biaya pembuatan dalam robotika. Kepemilikan sistem senjata otonom oleh aktor non negara berpotensi membahayakan keselamatan manusia dan keamanan negara mengingat aktor non negara tidak memiliki tanggung jawab dalam penggunaannya (Control 2015).

Pengaturan Sistem Senjata Otonom yang Mematikan

Sejak Tahun 2013, pengaturan sistem senjata otonom telah diperkenalkan dalam kerangka *United Nation (UN) Convention on Certain Conventional Weapon* 1980 (CCW) (Boulanin 2016, 2). Perhatian utama bagi sistem senjata otonom ini adalah apakah LAWS sesuai dengan prinsip dasar proporsionalitas, pembedaan pada target, dan kehati-hatian dalam melakukan serangan. Pada bulan Mei 2014 Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) mengagedakan pembahasan sistem senjata otonom mematikan dengan mengundang para ahli internasional untuk membahas aspek teknis mengenai sistem senjata otonom, dasar hukum, etika, dan pertimbangan akan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam pembahasan di konferensi dan pertemuan informal mengenai sistem senjata otonom, terdapat narasi yang saling bersaing antar negara berdasarkan posisinya masing-masing (Boulanin 2016, 9), antara lain:

- a. Negara mendukung pelarangan sistem senjata otonom mematikan: Bolivia, Ekuador, Ghana, Kuba, Mesir, Pakistan, Palestina dan Zimbabwe.
- b. Negara mendukung kendali manusia atas sistem senjata otonom (*meaningful human control/MHC*) merupakan negara-negara yang menerima kendali manusia sebagai kerangka yang memungkinkan pembahasan pengaturan sistem senjata otonom, antara lain: Austria, Cili, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Yunani, Irlandia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Belanda, Norwegia, Sierra Leone, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, dan Swiss.
- c. Kekuatan militer negara barat, merupakan negara-negara yang tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan pengaturan sistem senjata otonom. Negara-negara ini merupakan negara dengan kekuatan militer signifikan dan menilai bahwa sistem otonom dapat memberi keuntungan militer. Negara-negara ini juga yang dianggap dapat mempengaruhi norma dan praktik sistem senjata otonom dalam beberapa dekade ke depan. Negara-negara ini antara lain: AS, Australia, Kanada, Perancis, Israel dan Inggris.
- d. Kekuatan militer negara lainnya, merupakan negara dengan kapabilitas militer yang meningkat, yang juga menilai peningkatan kapabilitas militer yang dihasilkan dari sistem senjata otonom. Namun, negara-negara ini mengkhawatirkan terjadinya perlombaan senjata dan lantang dalam menyuarakan risiko terhadap stabilitas strategis dengan pengembangan sistem senjata otonom tersebut. Negara-negara ini adalah Rusia, Tiongkok, dan India.

Pembahasan mengenai sistem senjata otonom yang semakin mendetail dan substantif juga dilaksanakan di UN CCW pada Bulan November 2015 di Jerman. Pembahasan sistem senjata otonom juga akan berlangsung dalam *Fifth Review Conference of the CCW* pada Bulan Desember 2016. (Boulantin 2016, 2) Terselenggaranya pembahasan ini secara multilateral di PBB mengindikasikan bahwa sistem senjata otonom yang mematikan ini sedang berkembang dan kemungkinan besar akan beroperasi di masa depan.

Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri, sistem senjata otonom yang mematikan (LAWS) saat ini tengah dikembangkan beberapa negara maju. Kehadiran teknologi pelopornya dapat terlihat dalam penggunaan pesawat nirawak bersenjata (*armed drone*) yang telah digunakan dalam konflik di berbagai negara.



Kehadiran sistem senjata otonom diproyeksikan akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Menggunakan kerangka *analisa revolution in military affairs* (RMA), sistem senjata otonom dapat dikatakan sebagai RMA berikutnya.

Perlu disadari bahwa kehadiran sistem senjata otonom dapat berimplikasi terhadap keamanan internasional, yaitu kemungkinan adanya perlombaan senjata antara negara-negara yang mengembangkan sistem senjata otonom. Selain itu, kehadiran sistem senjata otonom dinilai dapat mempermudah konflik terjadi karena negara dapat tergoda untuk melakukan aksi militer namun tanpa penggunaan manusia di medan perang. Konflik juga dapat berlangsung lebih lama mengingat keberadaan sistem senjata otonom di zona konflik dapat berlangsung tanpa henti dan dikendalikan dari jarak yang jauh.

Sistem senjata otonom juga memiliki peluang kerentanan dalam teknologinya yang dapat dikhawatirkan menjadi malfungsi, jatuh kepada aktor non negara, dan bertindak diluar otoritas operator karena telah diambil alih oleh pihak lawan.

Terkait dengan peluang berkurangnya keterlibatan dan kendali manusia akan sistem senjata otonom, PBB telah membahas sistem senjata otonom dalam kerangka UN CCW 1980, sejak tahun 2013 dengan menggelar berbagai pertemuan informal para ahli dan konferensi yang dihadiri negara.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UAI yang telah membiayai presentasi hasil penelitian paper ini dalam Konvensi Nasional AIHII VII di Makassar, 22-24 November 2016.

Referensi

- Anthoni, M. (2016, November 10). gradschool.paramadina.ac.id. Dipetik November 3, 2016, dari <http://gradschool.paramadina.ac.id:334-vietnam-pertanyakan-komitmen-china-atasi-perselisihan-wilayah-.html>
- Asaro, P. (2012). On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, and the Dehumanization of Lethal Decision-Making. *International Review of the Red Cross*, 687-709.
- ASEAN. (2012, Oktober 17). Home: ASEAN.org. Dipetik November 10, 2016, dari ASEAN.org: http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2

- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2016, November 17). Home: International Relations: Regional Architecture DFAT.Gov. Diambil kembali dari dfat.gov.au: <http://dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/asean/pages/association-of-southeast-asian-nations-asean.aspx>
- Baliga, A. (2016, Juli 26). China thanks Cambodia for efforts to water down ASEAN SCS statement.
- Batongbacal, J. L. (t.thn.). Batongbacal, Jay L. Dipetik November 10, 2016, dari AMTI CSIS: <https://amti.csis.org/arbitration-101-philippines-v-china/>
- BBC Indonesia. (2011, Juli 21). Diambil kembali dari [bbc.com](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict): http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict
- Benbow, T. (2004). *Understanding the Revolution in Military Affairs*. London: Brassey's.
- Bieri, M., & Dickow, M. (2014, November). *Lethal Autonomous Weapons Systems: Future Challenges*. *CSS Analyses in Security Policy*, hal. 1-4.
- Bishop, J. (2016, Juli 12). [releases:foreignminister.gov](http://foreignminister.gov.au). Diambil kembali dari foreignminister.gov.au: http://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2016/jb_mr_160712a.aspx
- Boulanin, V. (2016, March). *Mapping the Debate on LAWS at the CCW Taking Stock and Moving Forward*. *Non Proliferation Papers* , hal. 1-15.
- Clark, H. (2016, Juli 16). *World Post: Huffington Post.com*. Dipetik November 14, 2016, dari [Huffingtonpost.com](http://www.huffingtonpost.com): http://www.huffingtonpost.com/helen_clark/vietnam-south-china-sea-ruling_b_11022864.html
- Control, I. C. (2015, April). *LAWS: Ten Problem for Global Security*. Geneva, Switzerland.
- Davis, L. E., McNerney, M. J., Chow, J., Hamilton, T., Harting, S., & Byman, D. (2014). *Armed and Dangerous? UAVs and U.S. Security*. California: Rand Corporation.
- Dombrowski, P., & Gholz, E. (2006). *Buying Military Transformation: Technological Innovation and the Defense Industry*. New York: Columbia University Press.
- Edwards, S.-L. W. (2016, Juli 15). *Article: Reuters.com*. Dipetik November 14, 2016, dari [Reuters.com](http://www.reuters.com): <http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-idUSKCN0ZV06F>
- Emmott, R. (2016, Juli 12). *EU's statement on South China Sea reflects divisions*.
- Foy, J. (2014). *Autonomous Weapon System: Taking the Human Out of International Humanitarian Law*. *Dalhousie Journal of Legal Studies*, 47-70.
- Gady, F.-S. (2016, Juli 13). *South China Sea Verdict: US Reactions*.
- Gloystein, H., & Wallis, K. (2016, Juli 12). *Oil and shipping markets on edge after South China Sea ruling*. (L. Feast, Penyunt.) (South China).
- Goldman, E. O., & Mahnken, T. G. (2004). *The Information Revolution in Military Affairs in Asia*. New York: Palgrave Macmillan.

- Hellendorff, B., & Kellner, T. (2014, Juli 09). Indonesia: A Bigger Role in the South China Sea?
- Huang Nan, Z. J. (2016, July 06). the Diplomat. Diambil kembali dari the Diplomat.com: <http://thediplomat.com/2016/07/interview-xue-li-on-the-south-china-sea/>
- Human Rights Watch & Harvard Law School's International Human Rights Clinic. (2013, October). Fully Autonomous Weapons: Questions and Answers. New York.
- Kyodo News. (2016, Juli 13). Overseas: abs-cbn.com. Dipetik November 15, 2016, dari abs-cbn.com: <http://news.abs-cbn.com/overseas/07/13/16/malaysia-singapore-indonesia-react-to-s-china-sea-ruling>
- Luhulima, C. (2016, June 30). Toward a Code of Conduct on The South China Sea. Dipetik November 10, 2016, dari The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/30/toward-a-code-conduct-south-china-sea.html>
- Manhit, D. (2016, JuLi 19). Headline: Philstar.com. Diambil kembali dari Philstar.com: <http://www.philstar.com/headlines/2016/07/19/1604482/keeping-peace-post-arbitration>
- Mills, C. (2015). The United States' Asia-Pacific Policy and the Rise of the Dragon. Australian Defence Institute. Australia: The Centre for Defence and Strategic Studies.
- Muhammad, S. V. (2016, Juli). Isu Laut China Selatan Pasca-Putusan Mahkamah Arbitrase: Tantangan ASEAN. *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, VIII(No.13).
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education.
- Permanent Court of Arbitration. (2016, Juli 12). PCA-CPA.Org. Diambil kembali dari [pca-cpa.org](https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf): <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>
- Roach, J. A. (2014, August). Diambil kembali dari CNA Corporation Files: https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IOP-2014-U-008434.pdf
- Rosen, M. E. (2014). cna.org. Dipetik 11 01, 2016, dari www.cna.org: https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008435.pdf
- Shimko, K. L. (2010). *The Iraq Wars and America's Military Revolution*. New York: Cambridge University Press.
- Sloan, E. (2008). *Military Transformation and Modern Warfare: A Reference Handbook*. Connecticut: Praeger Security International.
- Sloan, E. C. (2002). *The Revolution in Military Affairs Implication for Canada and NATO*. Quebec: McGill-Queen's University Press 2002.
- So, L. A. (2016, Juli 13). World leaders react to South China Sea ruling.

- Sokheng, A. B. (2016, Juli 25). Cambodia again blocks ASEAN statement on South China Sea.
- Sokheng, V. (2016, Juli 19). Namhong, Australia envoy talk South China Sea.
- Thayer, C. A. (2013). ASEAN, China and the Code of Conduct in the South China Sea. SAIS Review of International Affairs, 33(Summer-Fall), 77.
- The United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). (2014). Framing Discussions on the Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies. Geneva , Switzerland .
- TODAY. (2016, Juli 12). Singapore urges respect for court ruling on South China Sea. Singapore.
- Wibisono, M. (2016, Juli 3). ASEAN and The South China Sea.
- World Politic Review. (2016, January 28). Brunei Maintains a Low Profile in Pressing Its South China Sea Claims. WPR Series on the South China Sea Territorial Disputes.
- Zehfuss, M. (2004). Constructivism in International Relations: The Politics of Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

The *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*: A Threat to Indonesia?

Sukawarsini Djelantik
Parahyangan Catholic University
sukedj@unpar.ac.id

Abstract

Democratization process in the Middle East and North Africa (MENA), well known as the *Arab Spring*, led to increased instability in the region. The establishment of Islamic State (IS) following the Arab Spring, had threatened not only MENA region, but also spread to other regions. IS has posed a significant security threat in Indonesia and other ASEAN members with its abhorrent crimes including suicide bomb attacks. Not only related to political and military, the threat also affected on human security; include economic, community, social, and other forms of harm to the overall livelihood and wellbeing of individuals. An example of IS atrocity was bomb explosion in Central Jakarta on January 2016. Through official statement, IS claimed responsibility on bomb attack and conducted by its *khalifah* troops. Other bombs that failed to explode were targeted all over the country from Sabang in Northern Sumatra, to Merauke in Papua. Other threats related to recruitment process of new IS member using conventional and social media. IS Propaganda contents using social media emphasized on violent, human rights violations, and the use of children troop, had led the ban of IS by the Indonesian government. Therefore, to combat IS the government need to cooperate intensively with other stakeholders with concern to human security issues. Beside addressed to domestic community, cooperation should also involve other states in the region, and international level. This paper aimed to answer question: "what human security issues caused by IS in Indonesia?" Further question related to the effectiveness of the above mentioned cooperation to reduce human security threats.

Key words:

terrorism, securitization, cooperation, regionalism, Southeast Asian region.

Background; About ISIS/IS

The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), or later known as the *Islamic State (IS)* declared on 9 April 2013 by Abu Bakar Al Baghdadi in Syria. ISIS become one of the most important jihadist group against the government of Syria and have established a military base in Iraq. In 2013, IS took over the city of Raqqa in Syria, and later, on 4 January 2014 annexed the city of Fallujah and Ramadi (Iraq). On 9 – 11 June 2014, ISIS seized Mosul, the second largest city in Iraq, and later Tikrit, and making ISIS a threat for the Middle East. ISIS is funded by rich individuals from various Arabic countries, especially Kuwait and Saudi Arabia, that favors the fight against President Bashar Al-Assad. Now, ISIS occupied a number of oil field in the east of Syria, and re-sold the oil supply to Syrian government.¹ ISIS generate other income from kidnapping act and foreign citizen ransom. In the last four years, ISIS and other militant organization generates at least 70 million USD from ransom money.

By the end of July 2014, ISIS changed its name into *Islamic State (IS)* to widen the scope of Islamic caliphate in the world.² Roughly 80% of Western combatant in Syria are predicted to have joined this organization. ISIS claimed to have combatant from England, France, Germany, and the US.³ The emergence of ISIS was influenced by many factors, namely the failure of democratization in Iraq, Egypt, Libya, Yemen, and Syria. This condition creates instability, sectarian conflicts, even civil war. Nowadays, many border areas became the home of the jihadist. With the exception of Egypt, Iran, and Turkey, almost every border area in the Middle East are fragile towards leadership changes. This explain why Egypt and very strict in watching and guiding its border area. The failure of *Arab Spring* in Syria had also triggered disputes. The weakening of Iraqi government since the fall of Saddam Hussein compliment the border of Iraq-Syria to be the capital for terrorist, just like the border of Afghanistan-Pakistan in 1980s-1990s. On the other hand, Bashar Assad regime, supported by Iran and the Hezbollah, were involved in a battle against terrorism, even deploying the *salafi jihadi* when demand for new regime was strongest. ISIS would not be as strong as it is now if not for its coalition with various parties and marginalize local tribes. Even the elite circle of Saddam

¹ <http://www.nu.or.id/a.public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,53669-lang,id-c,internasional-t,Bagaimana+Sejarah+Terbentuknya+ISIS+-phpx>, accessed on July 28th, 2015.

² <http://www.euronews.com/2014/06/30/isil-renames-itself-islamic-state-and-declares-caliphate-in-captured-territory/>, accessed on August 19th, 2015.

³ <http://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>, accessed on August 19th, 2015.



Hussein's regime is holding grudge towards the Iraqi government and become the supporter of IS.

ISIS in Indonesia

ISIS has come to Indonesia, with membership from the northern most part of Indonesian Province of Aceh. According to BIN, there were approximately 514 Indonesian citizens that have joined ISIS. Their biggest motivation to join is because they wanted to live where Islamic Sharia would be implemented. ISIS wants to continue the battle, and became a reason ideology factor still matters. Second, the monthly salary, ISIS could offer up to USD 2000 per month. There are children and family that receives USD 200 a month plus other allowance such as education, health, and many more.

The exit gateway from Indonesia to Syria is mostly conducted via Turkey. Using *Qatar Air*, the potential members stopped at Doha, then continue their journey to Istanbul using local transportation, some also went to border area. If the situations declared safe, they would continue their journey. As much as 16 Indonesian citizens have arrived in Syria by the end of January 2015. During one-month gap, they accommodated in a safe house. Their identities and provincial origin was still subject of speculation. Members of ISIS from Indonesia departed to Syria related to existing terrorist group, *Jamaah Islamiyah*. A significant actor responsible for recruiting ISIS members is Aman Abdurrahman of *Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)*.

ISIS is appealing to Indonesian that previously in touch with radical network. After many members of radical groups have successfully arrived in Syria, other family members, close friends, and local community appealed to join. Another successful campaign was supported by the effective use of social media. They communicate via *Whatsapp*, *Google Plus*, *Facebook*, but mostly *Whatsapp*. Another motivation was to live in country that implements Islamic Syariah. ISIS also spread its influence through education, especially after a Malay-speaking media called the *Daulah Islamiyah* was introduced in Syria developed by Malay speaking journalists. They believes that beside fighting in the battle field, jihad could also conducted by writing and publish a media like *Al-Mustaqbal*. ISIS had also publish video on Indonesian children practicing war at *Azzam Media*.⁴

⁴ CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150319160810-112-40369/isis-di-indonesia-juga-pakai-media-sosial/>, accessed on August 9th, 2015.

Human Security in Global Context

The United Nations development Program (UNDP), as indicated by its 1994 report, increasingly recognize the importance of human security as a policy framework. The central question behind the idea of human security is: "How safe and free are we as individuals?" It is not a new question, but it is one that is attracting the interest of both policy makers and thinkers. There have always been two major components of human security: freedom from fear and freedom from want. This idea was recognized right from the beginning of the establishment of United Nations.⁵ The governments, international organizations, non-government organizations (NGOs), and ordinary citizens are in a position to explore that question as never before and to act to enlarge the envelope of safety and freedom.⁶ The idea of human security emerged as the world confronted by many conflicts and emergencies. Behind those war and conflicts, lies a silent crisis, related to underdevelopment, global poverty, population pressures, and thoughtless degradation of environment. This is not a crisis that will respond to emergency relief or to fitful policy interventions but requires a long, quiet process of sustainable human development.⁷ To address the issues, UNDP divided human security into seven main categories: economic, food, health, environmental, personal, community, and political security.⁸ The emergence of ISIS in Indonesia had threatened Indonesian security, especially in economic, personal, community and political. How ISIS have threatened Indonesian individual and as a nation would be discussed below.

Economic Security Threat

ISIS violence and terrorist activities in several provinces have damaged buildings and infrastructures. The government and business owners have to rebuild damaged. The budget that should be allocates for other development project have to be relocate to rebuild. Another form of economic threat is related to the promise of given monthly salary. Under economic downturn, this proposal is attracted many sympathizers. Where does ISIS acquire fund to run its organization and to attract membership? ISIS factually is the wealthiest terrorist group which controls at least 11 oil fields in Iraq and Syria with revenue around

⁵ UNDP, opcit, p. 24.

⁶ Kanti Bajpai, 2000, Human Security: Concept and Measurement, Kroc Institute Occasional Paper #19:OP:1

August 2000: <http://n.ereserve.fiu.edu/010030477-1.pdf>, accessed on September 29th, 2016.

⁷ UNDP report, op.cit, p. 24-25.

⁸ UNDP report, op.cit, p. 24-25.

2 millions Pound sterling or Rp. 38 trillion per day.⁹ As ISIS controls most of Syria's oil fields and crude, is the militant group's biggest single source of revenue. ISIS recently had controlled several important facilities that formerly belong to the Iraqi and Syrian governments that snatched since 2012. Some of oil fields that fallen under ISIS control are Sasan, Ajeel, dan Sadid in Iraq, as well as huge oil field in in Baiji, Fallujah, Aksas and Tikrit. To market the illegal crude oil overseas, ISIS used the international black market routes with below the market price. The price was 15 pound sterling per barrel or around Rp 290.000. The legal crude oil price is more than 50 pound sterling per barrel.¹⁰ ISIS also controls the Qayyara field near Mosul in Northern Iraq that produces about 8,000 barrels a day of heavier oil that is mostly used locally to make asphalt.

ISIS's main oil producing region is in Syria's eastern Deir Ezzor province, where production was somewhere between 34,000 to 40,000 barrels a day. The price of the oil depends on its quality. Some fields charge about USD 25 a barrel. Others, like al-Omar field, one of Syria's largest, charge USD 45 a barrel, higher than the international oil price. A new air campaign on ISIS oil by the US-led coalition have effectively disrupting ISIS's crude extraction. Before the coalition strikes, Isis was estimated to earn about USD 1.5 m a day. Although it is difficult to determine a definitive oil production figure for ISIS controlled areas, but it is clear production levels have dropped in the Syrian fields since they were taken over by the militants. Most oil fields in the area are aging and the group does not have the technology or equipment needed to maintain them. Even now, however, oil is still a major revenue stream for ISIS's central leadership.

Though many believe that ISIS relies on exports for its oil revenue, it profits from its captive markets closer to home in the rebel-held territories of Northern Syria, Eastern Territories held by the Syrian Kurdish militia, and in its own self-proclaimed "caliphate" straddling the border between Syria and Iraq. Local revenues like taxes could keep the ISIS economy churning. An investigation indicates ISIS earns at least as much from taxation, extortion and confiscation as oil. Other revenue obtained from zakat, fees and confiscations fund the salaries that attract recruits and finance services such as street cleaning and bread subsidies that ISIS touts as proof of statehood.¹¹

⁹ <http://www.infospesial.net/41194/lowongan-manajer-isis-gaji-rp-2-7-miliar/> /infospesialcom @infospesial, diakses tanggal 28 September 2016.

¹⁰ <http://www.infospesial.net/41194/lowongan-manajer-isis-gaji-rp-2-7-miliar/> /infospesialcom @infospesial

¹¹ <https://www.weforum.org/agenda/2015/12/how-isis-runs-its-economy/>, accessed on September 28th, 2016.

The group sells most of its crude directly to independent traders at the oil fields. As it adjusted to the strikes, local traders say Isis managed to maintain its production but has struggled to maintain its profit margins. Isis would collect the crude in large pits where truckers fill up. These collection areas are often set ablaze during air strikes. To make up for lost profits, Isis has been trying to grab more cash at once by offering traders a "licence" that allows them to skip to the head of the queue and get 1,000 barrels of oil at once. The bulk of oil refineries are in Isis-controlled Syria. The few in rebel-held territories have a reputation for lower quality output than the refineries in the east. The refineries produce petrol and mazout, a heavy form of diesel used in generators, a necessity as many areas have little or no electricity. Because the quality of the petrol can be inconsistent and is more expensive, Mazout is in greater demand. Traders say ISIS has its own tankers that supply crude to its refineries from oil fields regularly. The group also appears to retain many of its earlier contracts with unaffiliated gas stations and other refineries.

There are larger ISIS controlled markets in towns like Manbij or al-Bab in Aleppo's eastern countryside. Traders here must present a document proving they have paid zakat, a tithe, to buy oil without tax. Traders from rebel-held Syria who have not paid the tithe, must pay a tax of SL200 per barrel, or about USD 0.67. Some privately-owned markets also levy taxes. Al-Qaim market, one of the largest in the region, charges buyers and sellers about SL100 (USD 0.30) per barrel of crude purchased. As the wealthiest terrorist group, ISIS provides good salaries to its troops. Average income of ISIS troops is USD 50 (Rp 659 thousands) per month. According to Congressional Research Service, the salary of ISIS soldier between USD 400-1.200 per month. However, the amount had been decreased, and in 2016 a soldier only obtained USD 50 per month.¹² The salary excluded of family allowances and parents. For militant's wife, the allowance is USD 50, and each child is USD 35 (Rp. 460 thousands). Slaves got USD 50 and slave's child allowance is USD 35. Parents of militant is USD 50. Lately the amount of salary cut down especially to those living in Raqqa, Suriah, claimed as ISIS's capital.¹³ Even though the salary cut-down following ISIS decreasing economy after US led coalition air strikes.¹⁴ The decrease of fund also effected to the numbers of recruited overseas membership. Lately

¹² <http://bisnis.liputan6.com/read/2416333/intip-besaran-gaji-tentara-isis>, accessed on September 28th, 2016.

¹³ <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160428070552-120-127122/dokumen-rahasia-ungkap-nilai-gaji-tentara-isis/>, accessed on September 28th, 2016.

¹⁴ <http://international.sindonews.com/read/1104083/42/gaji-militer-isis-dan-bonus-budak-seks-kini-rp660-ribu-bulan-1461643627>, accessed on September 28th, 2016.



only about 200 new foreign soldier joined ISIS. The number is decreased from last year that arrived 1500 – 2000 newly recruited monthly. Another sources of fund was from looting, taking hostages of foreign nationals, ransom demands from the victim families that facing death sentences.

The success of ISIS recruitment process in Indonesia was due to its effective campaign. Nowadays, ISIS had change strategy, from violence to ideological approach to build a civilization and demonstrated the best aspects of living in ISIS's controlled area. The strategy had successfully moved people to hijrah, especially in recent condition when Indonesian economy was decreased after the global economic crisis.¹⁵ The potential members promised would be paid USD 500 per month, as well as housing facilities and family allowances. Another promised was ability to conduct pilgrimage as the fifth obligation as being Moslem. Members that attracted to this offer mostly uneducated, having employment problem, and inexperience.

Threat to Personal and Community Security: terrorism and violence

Most people derive security from their membership in a group, a community, an organization, a racial or ethnic group that can provide a cultural identity and a reassuring set of values. Such groups also offer practical support. The extended family system, for example, offers protection to its weaker members, and many tribal societies work on the principle that heads of households are entitled to enough land to support family, the reason land distributed accordingly. Ethnic and religion tensions are on the rise, often over limited access to opportunities. Political security is also one of the most important aspects of human security is that people should be able to live in a society that honor their basic human rights.

The existence of ISIS became the biggest terrorist threat in 2016. Its also indicated the government's failure to provide security to its people. Since ISIS burst on the scene by seizing swaths of territory in Iraq and Syria in 2014, the jihadist group has rewritten the strategy used by other groups that preceded it, including al-Qaeda. ISIS now is the top national security problem for Indonesian authorities. ISIS will expand its territory outside Syria and Iraq, into several regions in Africa, Middle East, Balkan, Caucasus, and Asia. ISIS had actively been recruits new members in Western Balkan, including Serbia, Kroasia, Bosnia, and Herzegovina, Albania, Kosovo, Macedonia and Montenegro. In those regions, ISIS planned to increase its strikes. ISIS also plan to recruit

¹⁵ ISIS Jebak Kelompok Ekonomi Lemah Lewat Iming-Iming Uang, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/23/ody3dx382-isis-jebak-kelompok-ekonomi-lemah-lewat-imingiming-uang>, accessed on September 28ⁿ, 2016.

membership in Southeast Asia, in an aim to declare a province in Eastern parts of Indonesia or in the Southern Philippines in 2017. Since 2015, the Command of Katibah Nusantara (Nusantara Brigade) based in Syria, a fighting unit of ISIS with Malay's speaking members from Malaysia and Indonesia, have instructed their groups in Southeast Asia to attack ISIS's targets domestic and international from 2015-2016.

Another threat came from the fact that ISIS would attack anti-ISIS's targets. ISIS would also use the new operation wings that have been supported by foreign soldiers. As happen in Paris attack in 2016, the external ISIS wing recently had complemented its internal wing. Moreover, the refugees and asylum seekers that flee from conflict zone are vulnerable of ISIS's ideology. ISIS tends to exploit the vulnerable members to attack its enemy overseas. If the Iraqi and Syrian refugees are not well integrated to the culture of receiving states, they could become a direct strategic threat sooner or later. Last but not least, the anti-ISIS coalition under US leadership, Saudi Arabia, and Russia, will not unite to confront their common enemy. However, the cooperation would be on intelligent sharing, increasing military capability, and to develop new techniques to overcome, isolate and to destroy ISIS from several fronts.¹⁶

Indonesia and the world should prepare to confront more ISIS attacks. Indonesia is the 13th country outside Syria and Iraq that become terrorist target.¹⁷ An example of ISIS's attack was Jakarta's bomb blast in January 2014. The main actor of Indonesian ISIS is Bahrun Naim, that wanted to lead the *Katibah Nusantara*.¹⁸ The above facts indicated that ISIS is a political threat to Indonesia.

Social Security Threat: Recruitment Process through Social Media

The group have innovate the use of social media to encourage westerners to either travel to become a fighter with the group, or to encourage attacks at home. The success of ISIS in recruiting new member is inseparable from its activity in social media. ISIS uses propaganda in various social media effectively and shows how to made advantage out it in today's era of

¹⁶ Rohan Gunaratna, Peta terorisme Tahun 2016, 30 desember 2015, <http://www.benarnews.org/indonesian/opini/peta-terorisme-tahun-2016-12302015161357.html>, accessed on September 28th, 2016.

¹⁷ The countries are France, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia, Saudi Arabia, Yemen, Bangladesh, Kuwait, Afghanistan, and Turkey. See: <http://www.benarnews.org/indonesian/opini/peta-terorisme-tahun-2016-12302015161357.html>, accessed on September 28th, 2016.

¹⁸ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_sarinah_far_enemy_laji, accessed on September 28th, 2016.

technology. IS have least 46 thousand accounts in *Twitter*.¹⁹ Most accounts are controlled in Syria, Iraq, and Saudi Arabia.²⁰

In late 2014, at least a thousand ISIS's accounts were blocked.²¹ It is estimated that there is 46-70 thousand IS's account that are still operating. Each account has, on average, a thousand followers. IS has sent threat to *Twitter* after *Twitter* executive claimed to have freeze 2000 *Twitter* every week. The threat reflects how ISIS had more and more dependent towards social media in its operation. Even though *twitter* have tried to tackle ISIS's threats, propaganda, and recruitment by freezing those accounts, sympathy remain flows and thousands of other accounts are still active. The accounts administered by fanatic groups, and they send messages repeatedly and knows how to maximize its impact. Even though ISIS's accounts in *Twitter* are closed regularly, they keep making new accounts and maintaining their strong online presence.²² This organization had tried to expand their reach into other alternative social media, such as *Quitter*, *Friendica*, and *Diaspora*.²³ *Quitter* and *Friendica* immediately erase ISIS from their site.²⁴

On November 2006, not long after the establishment of IS, *The Al-Furqan Institute* was established, dedicated to produce CD, DVD, posters, pamphlets, and other web-propaganda products. The main outlet of IS media was *I'tisaam Media Foundation*, formed on March 2013. Products from this foundation were distributed through *Global Islamic Media Front* (GIMF).²⁵ On 2014, ISIS created *Al Hayat Media Center*, targeting Western audience and

¹⁹ J.M. Berger and Jonathan Morgan, *The ISIS Twitter Census: Defining and Describing The Population of ISIS Supporters on Twitter*: http://www.brookings.edu/~media/research/files/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf., accessed on September 15th, 2015.

²⁰ Sukawarsini Djelantik, 2015, *Komunikasi Melalui Media Sosial oleh The Islamic State (IS) di Indonesia*, in *Komunikasi Internasional dalam Era Informasi dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Research paper report, LPPM-UNPAR, 2016.

²¹ <http://dunia.tempo.co/read/news/2015/03/07/115647858/hasil-studi-ada-46-ribu-akun-twitter-pendukung-isis>, accessed on August 19th, 2015.

²² <http://blog.adl.org/extremism/isis-faces-resistance-from-social-media-companies>, accessed on August 19th, 2015.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Jihadology, <http://jihadology.net/2013/03/08/new-statement-from-the-global-islamic-media-front-announcement-on-the-publishing-of-al-iti%E1%B9%A3am-media-foundation-a-subsiary-of-the-islamic-state-of-iraq-it-will-be-released-via-gimf/>, accessed on August 19th, 2015.

producing publications in English, German, Russian, and French.²⁶ Also on the same year, ISIS launch *Ajnad Media Foundation*, that produce jihadi *nasheed*.²⁷

The usage of social media by ISIS is more advanced than most US company.²⁸ Information dissemination via *Twitter* for example is conducted by doing the *hashtag* campaign, pushing *tweets* through popular *hashtag* and taking advantage of software application.²⁹ One example is *#CalamityWillBefallUS* hashtag campaign. Participants were encouraged to send messages using that hashtag in both English and Arabic, preferably in English.³⁰ The headline of the news publication based on Al Qur'an chapter 46 verse 31, saying "O our people, respond to the Messenger of Allah and believe in him; Allah will forgive for you your sins and protect you from painful punishment".³¹

ISIS is capable in projecting and promoting its ability. For example, ISIS's *hashtag* constantly beat its main competitor in Syria, *Jabhat Al-Nusra*, even though both had relatively the same amount of online supporter. ISIS registers more than 10.000 messages with its *hashtag* per day, while *Al Nusra* only registers 2500 to 5000 messages a day. This is reason why Iraqi Communication Ministry acknowledged ISIS's online influence and try to freeze this militant organization by closing internet access in conflict area. The Iraqi government have closed access in several provinces like Anbar, Diyala, Kirkuk, Ninewa, and Salahuddin, and have once again close the access to *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, and *Skype*. Meanwile, the Ministry ordering a new restriction on *Tango* and *Instagram*.³²

Coalition group and special force operation continue to target Al-Qaeda's propaganda ability. US had recorded a major victory by captive Khalid Abdul Fatah Daud Mahmud Al-Mashadani, also known as Abu Shahedve. Mashadani, formerly the Information Minister of Al-Qaeda as well as the intermediary between Al-Qaeda's leader in Iraq, between Abu Ayyub, Al-Masri and Osama

²⁶ <http://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>, accessed on August 19th, 2015.

²⁷ Jihadist News, <https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/isil-launches-qajnad-media-foundationq-to-specialize-in-jihadi-chants.html>, accessed on August 19th, 2015.

²⁸ The Atlantic, <http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/>, accessed on August 19th, 2015.

²⁹ Extremism and Terrorism, <http://blog.adl.org/extremism/isis-propaganda-campaign-threatens-u-s>, accessed on August 19th, 2015.

³⁰ Ibid

³¹ <http://jihadology.net/category/al-furqan-media/>, accessed on August 20th, 2015.

³² International Business Times, <http://www.ibtimes.com/isis-attacks-twitter-streams-hacks-accounts-make-jihadi-message-go-viral-1603842>, accessed on August 19th, 2015.

bin Laden and Ayman Al-Zawahiri. The arrest of Mashadani reduces Al-Qaeda's operation activity, and making it possible for Iraqi multinational power to close down Al-Qaeda's media cell all across Iraq. The following question indicated the development of social media usage by terrorist organization:

"Since the search by multinational force, we have opened 8 media offices and Al-Qaeda's cell, arrest and killed 24 member of propaganda cell, and have found 23 terabytes of information. Recently, 4 members of Al-Furqan Media in Mosul were arrested, including Emir Mosul Media, former leader of Mosul Media that established an Al-Qaeda communication center in Baghdad, a foreign terrorist from Saudi Arabia expert in video editing, special effect, and computer graphic. Media cell have also been destroyed in Baghdad, Diyala, Tarmiyah, Samara, and Karma, causing the decrease of *Al-Qaeda's* propaganda effort in few months. There's nothing left of Al-Qaeda in Iraq."³³

ISIS had developed propaganda techniques just like its preceding terrorist organization such as *Al-Qaeda* and *Al-Shabaab*. Beside uses media to spread messages and recruiting new members, foreigners included, also to encourage its supporter to take part in the process. More foreigners members were recruited, which demonstrated the effectiveness of communication through social media. Recent report demonstrated that between 12-15 thousands foreign combatants, including 100 US citizens, are involved in conflict in Syria and Iraq. Although it's difficult to determine whether social media plays an important role in recruitment, ISIS online propaganda is often directed to foreigners.³⁴ Media applications for radical movement had been apply previously, as ISIS used *Dawn of Glad Tiding App* on *Google Play* to gain *Twitter* support and to gain support.

In Indonesia, *Facebook* account advertised IS through t-shirt sales. The t-shirts has slogan like "Mujahidin All Across the World Unite", "Fight for Freedom to Death", and "We Support ISIS". These online sales through website own by Indonesian online entrepreneur. Sites that promote ISIS through t-shirts sales are no longer exist, most probably because it has been blocked by Indonesian Ministry of Information. Just like *Facebook*, *Twitter* also applies similar rule of banning any direct message that promotes violence and threat. *Twitter* is also against the use of this social media for any law breaking activity including service promotion or illegal activity. International users have to agree

³³ http://www.longwarjournal.org/archives/2008/06/us_targets_al_qaeda.php, accessed on August 20th, 2015.

³⁴ <http://www.adl.org/combating-hate/international-extremism-terrorism/c/isis-islamic-state-social-media.html#.Vk2xP9rLDc>, accessed on September 15th, 2015.

to abide all local law regarding the usage of online services and acceptable content.³⁵

Social media are also used to recruit membership candidate. An ISIS recruiter, Winston Al Noob, stated that the success of ISIS lays on the minimum standard or even no standard or terms and condition at all to join them. However, ISIS pays special attention to its potential recruit through social media. Words like: "Want to fight? Unhappy? Ready to do something different with your life?" and message like "How about joining this great organization?" Picture in *Instagram* under the *hashtag* #JihadOfOne is potentially used as membership recruitment.

Another ISIS's propaganda message in one of its office in France says: "Join ISIS, Rule the World". A source confirmed that ISIS aware that its potential recruits have other option, but they smartly exist to outperform government soldier recruitment program. "No one force you to wear this belt. We want the world to know that we are now in danger". Omar Abu Al-Twitter, a social media expert says: "Most combatants have never worn that kind of belt ever since they became the member of Son of Iraq". Discipline and rules was not vital factor in the organization hierarchy. A new recruit does not have to deal with complicated code of conduct like in most Western country. *Al-Noob* added: "Western soldiers often said things like: 'Killed those Babies!' We did that too. Urinating on corpses and killing puppies. Actually, violence to other human being is requirement for promotion within ISIS. Therefore, the values introduced in the West and soldier's discipline wasn't our concern. A man could put his hand inside his pocket all day if his hand is put in a gun's trigger while wearing a bomb equipped vest." There's only a few, if none, requirements to become a member of ISIS, because age, education, and nationality, doesn't matter when it comes to building a caliphate.

Backgrounds are of course checked, but ISIS doesn't care whether their members are a psychiatrist, a beginner, or a rap musician to be. In US, many children recruited simply because their resentment towards their parents. ISIS's new member are armed with strong sense of belonging and community by given various activities before being departed to Syria. Message like: "Bring your own sword (scimitar)" proved to be quite popular. Other potential recruits are drawn by the prospect to continue their study using the ISIS's Jihad Fund. After the 9/11, anybody that is interested in joining ISIS is recommended to

³⁵ <http://www.vocativ.com/world/syria-world/isis-tries-outwit-social-networks/>, accessed on September 19th, 2015.

contact local FBI office. Applicants for this fund are encourages sending its personal contact information and recent address.³⁶

Brainwash Using Social Media

Users of social media have increased exponentially since 2004. On its first year after introduced, *Facebook* only received about a million users, increased into more than a billion people users are registered. A study conducted by *Pew* indicated that 72% of internet users also social media user. Moreover, people nowadays tend to spend more times on online media rather than traditional media. Social media and mobile internet user spend 57% of media consumption per day. Research from *eMarketer* on 2013 stated that on special social network such as *Instagram* (photo sharing), *LinkedIn* (professional network), and *Pinterest* (private sharing media) more than ten of its users' login at least once a week.

Video posted on *Youtube* and *Facebook* contain jihad material as well as radicalization process. All radicalization, from the first appeal of jihad, missionary endeavor, to its last deadly mission, are done online through social media platform. *Facebook's* page is used to delivers the desires to die as a *shahid* and promoting organization like Al-Qaeda in Syria and Yemen. Suicide bomb perpetrators were once very active in social media and post Al-Qaeda's flag on their *Facebook* page.

Social media are actively used because it is the most popular among viewers, and it enables terrorist organization to move to mainstream area. Moreover, it's dependable, free, and easy to use. Lastly, social network enables terrorist to reach target directly. Contrary to the old model of internet sites where terrorist have to wait for visitors. Social networking sites enables terrorist to use narrow targeted strategy, ubiquitously known as narrowcasting. Narrowcasting aims to deliver message to certain segment of the community based on values, preferences, demographic attributes, or subscribes. Online page, video, chats, pictures, and this information are design to match a profile of a certain social group. This method enables terrorist to target its messages to teenagers.

Social media also offers technical advantages for terrorist, such as sharing, uploading and downloading files and videos no longer require complex computer devices. The usage of smartphone and social media platform creates simple, free, and fast access for everybody. Social media are used by terrorist to delivers their content to the mainstream media. Reporters are now relying on *Twitter*, *Facebook*, and *YouTube* as a valuable source of information. Pushing

³⁶ See: <http://www.duffelblog.com/2014/09/isis-recruits-westerners/#ixzz31EU1jj72>, accessed on September 19th, 2015.

many media staffs to open a *Twitter* account and interact with community, sharing stories, and bringing terrorist material closer to that outlet. For those reasons, social media might be a conventional media gateway for terrorist in information stream: from users of social media, to their own public or mass media. Another reason for terrorist to use social media to use this platform in such a large scale since a social media have become a new war zone, a war zone for terrorism. Therefore, to use social media to fight against terrorism, especially against ISIS's propaganda, we need soldiers, weapons, and new form of trainings. This is a challenge for all of us: to retake the virtual territory that has been occupied by the terrorist for so long.³⁷

The spread of ISIS ideology on line would able to recruit, radicalize and militarize the vulnerable groups, both in Muslims or non-Muslims countries. In territorial community, migrant groups, ISIS ideology that full of hatred tend to find way to replace mainstream Muslim ideology. Server in US and European countries hosts about 80 to 90 % social media sites with ISIS propaganda. The threat will always appear under weak leadership, no political will, and lack of strategy between the government and its counterparts to fight against ISIS propaganda. Cooperation needed to destroy ISIS platform and communication strategy. Otherwise, the threat will remain if ISIS social media remain alive.

Conclusion

Global challenges to human security arises because threats within countries rapidly spill beyond national frontiers. International terrorism violence can travel from one country to another through conventional way and information technology. While the number of terrorism victims may not look high, the fear that these attacks spread among the world's population at large is immense. The focus of terrorist activity tends to move around the world.

To protect human security, and as respond to UNDP's recommendation, the Indonesian governments need to adopt policy measures. Indonesia should also fully cooperate in the endeavor to provide security against the use of violence and terrorist activities regionally and globally. To this end, a new framework of international cooperation for development should be devised, taking into account the indivisibility of global human security-that no one is secure as long as someone is insecure anywhere. In this sense, global cooperation through the United Nations needs to be increased in form of preventive diplomacy. The cooperation is compulsory as well as recognizing the

³⁷ ISIS Watch Indonesia: <https://www.facebook.com/no2terrorid/posts/886489778028514>, accessed on September 19th, 2015.



roots of conflict and war today that often related to poverty, social injustice and environmental degradation. Furthermore, these efforts should be supported through preventive development initiatives. Furthermore, today's framework of global institutions be reviewed and redesigned to prepare those institutions fully for doing their part in tackling the urgent challenges of human security, all within the framework of a paradigm of longer-term sustainable human development.

Parallel to the campaign against ISIS, the Indonesian government must work towards preventing the group from influencing the Islamic community virtually, by working hard, and strongly regulate the information. The regulations related to the used of internet for peaceful and educational purposes through policy as well as implemented strong legal enforcement to prevent the misuse for ISIS interests. To prevent the spread of ISIS propaganda through social media, the government also must build partnership with business community, civil society and other community. To end ISIS from exploit sophisticated technology the government must develop a confidential network by recruiting academics and technology experts. The government should also conduct de-radicalization programs both online and offline. Last but not least, the conduct of de-radicalization program to rehabilitate previous victims should also be intensified. Failures to respond on several aspects would disturb relationship of religious and ethnic communities. The failure would also influence the harmony of global, regional and national relationship to increase public welfare.

Reference

Bajpai, Kanti, 2000, Human Security: Concept and Measurement, Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice, Occasional Paper #19:OP:1, August.

Djelantik, Sukawarsini, 2015, Komunikasi Melalui Media Sosial oleh *The Islamic State* (IS) di Indonesia, in Komunikasi Internasional dalam Era Informasi dan Perubahan Sosial di Indonesia, Research paper report, LPPM, UNPAR, 2016.

<http://www.nu.or.id/a.public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,53669-lang,id-c,internasional-t,Bagaimana+Sejarah+Terbentuknya+ISIS+-phpx>.

<http://www.euronews.com/2014/06/30/isil-renames-itself-islamic-state-and-declares-caliphate-in-captured-territory/>.

<http://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>.

CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150319160810-112-40369/isis-di-indonesia-juga-pakai-media-sosial/>

<http://www.infospesial.net/41194/lowongan-manajer-isis-gaji-rp-2-7-miliar/>
[@infospesial](http://infospesial.com), diakses tanggal 28 September 2016.

[@infospesial](http://www.infospesial.net/41194/lowongan-manajer-isis-gaji-rp-2-7-miliar//infospesialcom)

<https://www.weforum.org/agenda/2015/12/how-isis-runs-its-economy/>

<http://bisnis.liputan6.com/read/2416333/intip-besaran-gaji-tentara-isis>.

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160428070552-120-127122/dokumen-rahasia-ungkap-nilai-gaji-tentara-isis/>.

<http://international.sindonews.com/read/1104083/42/gaji-militan-isis-dan-bonus-budak-seks-kini-rp660-ribu-bulan-1461643627>.

ISIS Jebak Kelompok Ekonomi Lemah Lewat Iming-Iming Uang,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/23/ody3dx382-isis-jebak-kelompok-ekonomi-lemah-lewat-imingiming-uang>.

Rohan Gunaratna, Peta terorisme Tahun 2016, 30 Desember 2015,
<http://www.benarnews.org/indonesian/opini/peta-terorisme-tahun-2016-12302015161357.html>.

The countries are France, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia, Saudi Arabia, Yemen, Bangladesh, Kuwait, Afghanistan, and Turkey. See:
<http://www.benarnews.org/indonesian/opini/peta-terorisme-tahun-2016-12302015161357.html>.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118.

J.M. Berger and Jonathan Morgan, The ISIS Twitter Census: Defining and Describing The Population of ISIS Supporters on Twitter:
http://www.brookings.edu/~media/research/files/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf.
<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/03/07/115647858/hasil-studi-ada-46-ribu-akun-twitter-pendukung-isis>.

<http://blog.adl.org/extremism/isis-faces-resistance-from-social-media-companies>.

Jihadology, <http://jihadology.net/2013/03/08/new-statement-from-the-global-islamic-media-front-announcement-on-the-publishing-of-al-iti%E1%B9%A3am-media-foundation-a-subsiary-of-the-islamic-state-of-iraq-it-will-be-released-via-gimf/>

<http://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>.

Jihadist News, <https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/isil-launches-gainad-media-foundationq-to-specialize-in-jihadi-chants.html>.

The Atlantic, <http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/>.

Extremism and Terrorism, <http://blog.adl.org/extremism/isis-propaganda-campaign-threatens-u-s>.

<http://jihadology.net/category/al-furqan-media/>

International Business Times, <http://www.ibtimes.com/isis-attacks-twitter-streams-hacks-accounts-make-jihadi-message-go-viral-1603842>.

http://www.longwarjournal.org/archives/2008/06/us_targets_al_qaeda.php

<http://www.adl.org/combating-hate/international-extremism-terrorism/c/isis-islamic-state-social-media.html#.Vk2xP9IrLDc>.

<http://www.vocativ.com/world/syria-world/isis-tries-outwit-social-networks/>

Read more: <http://www.duffelblog.com/2014/09/isis-recruits-westerners/#ixzz31EU1jj72>.

ISIS Watch Indonesia:

<https://www.facebook.com/no2terrorid/posts/886489778028514>.

Menanggulangi Migrasi Ireguler di Laut: Bakamla dan Manajemen Keamanan Maritim di Indonesia

Tangguh Chairil, Ratu Ayu Asih Kusuma Putri & Dennyza Gabiella,

Universitas Bina Nusantara

tangguchairil@hotmail.com, ratuayuasih@gmail.com,

dennyza.gabiella@gmail.com

Abstrak

Dalam menanggulangi migrasi ireguler di wilayah laut Indonesia, peran badan-badan keamanan maritim di Indonesia perlu ditingkatkan. Indonesia telah memiliki Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Dibentuk dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) pada 2014, kedudukan Bakamla diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Pembentukan Bakamla didorong oleh ekspektasi agar Indonesia memiliki instansi keamanan maritim sipil tunggal yang berbasis pada pendekatan *single agency, multi tasks*, setelah secara historis manajemen keamanan maritim Indonesia terdiri dari berbagai instansi seperti TNI AL, POLRI, Bea Cukai, KPLP, KKP, Imigrasi, KLHK, dan Kemdikbud. Menggunakan kerangka konsep penanggulangan migrasi ireguler dan manajemen keamanan maritim, *paper* ini akan menganalisis dan mengevaluasi peran Bakamla dalam menanggulangi migrasi ireguler di laut. *Paper* ini juga akan melakukan perbandingan antara implementasi sebelum pembentukan Bakamla dan sekarang.

Kata kunci

migrasi ireguler, keamanan maritim, Bakamla

Pendahuluan

"Kalau suatu negara seperti Amerika mau menguasai samudra dan dunia, dia mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan" – Tan Malaka, *Medilog*

Pentingnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diilustrasikan dari pernyataan Tan Malaka di atas. Indonesia menjadi jalur transportasi vital yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Atlantik, belahan bumi sebelah

utara dan selatan garis khatulistiwa. Tidak hanya dari segi letak, namun Indonesia memiliki wilayah laut dan perairan yang lebih luas dibanding daratannya. Keunggulan geografis ini menuntut kesiapan dan kesiagaan yang tidak kalah unggul, terutama dalam menjaga dan menghadapi tantangan-tantangan keamanan yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Seiring dengan visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, pemerintah pun mulai melakukan berbagai upaya penguatan lini pertahanan keamanan lautnya. Tulisan ini akan mengkaji manajemen keamanan laut Indonesia dengan memfokuskan pada isu migrasi ireguler dan secara khusus melihat peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menangani isu tersebut.

Konsep migrasi ireguler secara umum mencakup isu penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan manusia (*human trafficking*), pekerja ilegal (*illegal labour migrants*) dan pengungsi (*refugees*). Seringkali isu-isu migrasi tersebut terjadi secara tumpang tindih dalam waktu yang bersamaan sehingga memerlukan keterlibatan berbagai lembaga bahkan negara. Migrasi ireguler didorong oleh berbagai faktor di antaranya konflik internal dan eksternal yang menyebabkan instabilitas keamanan di negara asal hingga dorongan ekonomi. Isu migrasi ireguler (*irregular migration of persons*) semakin menjadi perhatian pemerintah Indonesia beberapa dekade belakangan ini seiring dengan meningkatnya tensi dan intensitas konflik di berbagai belahan dunia. Secara berkala, Indonesia pada dasarnya sudah menjadi negara persinggahan bagi pencari suaka yang ingin masuk ke wilayah Australia. Secara hukum internasional, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi secara permanen di wilayahnya karena tidak menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1961. Sebagian besar pencari suaka yang melewati wilayah Indonesia berasal dari kawasan Asia Tengah seperti Afghanistan, Pakistan, dan Srilanka; Timur Tengah seperti Iran, Palestina, dan Irak; Myanmar dan Somalia (UNHCR, 2016).

Meningkatnya tensi konflik etnis di Myanmar menyebabkan masuknya ribuan pencari suaka ke perairan utara Indonesia pada tahun 2015. Situasi ini kemudian lebih dikenal dengan krisis manusia perahu asal Rohingya. Meskipun secara yurisdiksi hukum internasional Indonesia berwenang untuk menghalau kapal para pencari suaka tersebut, pemerintah Indonesia dengan dasar kemanusiaan bersedia menampung penumpang kapal untuk sementara. Hanya saja permasalahan menjadi semakin rumit karena tidak semua penumpang kapal adalah pencari suaka melainkan juga mencakup migran ekonomi (*economic migrants*) asal Bangladesh (Cunningham, 2015). Hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan sindikat penyelundup manusia (*people smugglers*) maupun perdagangan manusia (*human traffickers*). Ditinjau dari

sudut pandang penegakan hukum, aparat keamanan laut memegang peran sentral dalam mencegah dan menangani ancaman kejahatan lintas batas tersebut.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibentuk secara resmi untuk menggantikan lembaga pendahulunya, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bakorkamla sendiri sudah terbentuk sejak tahun 1972 dengan fungsi pokok untuk melakukan koordinasi pengamanan laut di Indonesia. Pembentukan Bakamla memperluas kewenangan Bakorkamla hingga mencakup penegakan hukum secara langsung atas pelanggaran di wilayah perairan, tidak hanya sebagai koordinator. Untuk menjalankan kewenangan ini, Bakamla pun diperkuat dengan kapal-kapal patroli, helikopter, pesawat serta alat pengintai (Wijaya, 2014).

Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Secara struktur lembaga ini berada di bawah koordinasi Menkopolhukam serta Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut (Perpres RI, 2014). Lembaga ini merupakan gabungan dari berbagai lembaga yang memiliki kewenangan terkait kawasan laut dan perairan di Indonesia, seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) khususnya Direktorat Polisi Air Badan Pemelihara Keamanan (Polair) POLRI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (KPLP), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Intelijen Negara (BIN), Markas Besar TNI (Mabes TNI), Kejaksaan Agung (Kejagung). Ditinjau dari segi struktur organisasi, Bakamla dipimpin oleh seorang Kepala berikut Sekretaris Utama yang membawahi tiga bidang, yaitu Bidang Kebijakan dan Strategi, Bidang Operasi dan Latihan, serta Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama (BAKAMLA, n.d.).

Secara ideal, selain menjadi ‘penjaga pantai (*coast guard*)’, Bakamla diharapkan mampu melanjutkan fungsi lembaga pendahulunya secara efektif sebagai unit koordinasi (*coordinating body*) dalam penegakan hukum di wilayah perairan di Indonesia. Namun sebagai lembaga yang baru terbentuk, kewenangan Bakamla masih bersinggungan dengan lembaga-lembaga lain yang sudah lebih dulu diberikan mandat penegakan hukum di laut. Tercatat hingga tahun 2013, terdapat 13 lembaga yang memiliki kewenangan serupa (CNN Indonesia, 2015). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, misalnya, memberikan tugas penegakan hukum dan penjagaan keamanan laut nasional kepada TNI AL. Pada UU tersebut, penegakan hukum oleh Angkatan Laut mencakup penanganan ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yang menjadi yuridiksi nasional (TNI AL, 2004). Terlihat bahwa meskipun merupakan lembaga sipil, Bakamla sendiri selalu dipimpin oleh perwira aktif TNI AL karena akan mengoperasikan aset-aset TNI AL. Connie Rahakundini, Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Studies berargumen bahwa hingga saat ini, tumpang tindih kewenangan ini belum terselesaikan karena kekhawatiran munculnya resistensi internal dalam lembaga ketika terjadi peralihan kewenangan (CNN Indonesia, 2015).

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan, Bakamla dirancang untuk mampu melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia melalui aktifitas patroli keamanan dan keselamatan serta pengintaian. Bakamla tidak hanya diharapkan menjaga wilayah perairan dari ancaman keamanan, namun pula memberikan bantuan pertolongan ketika terjadi kecelakaan di perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia (BAKAMLA, n.d.). Jika dikaitkan dengan isu migrasi ireguler, seringkali patroli keamanan laut menghadapi dilema antara menghalau kapal-kapal pencari suaka yang terombang-ambing di perairan Indonesia atau membawa masuk kapal-kapal tersebut untuk diberikan bantuan kemanusiaan. Kondisi pencari suaka seringkali sudah memprihatinkan karena kekurangan bahan makanan, ketiadaan sanitasi dan kapal yang tidak layak untuk bertahan di kondisi laut yang berbahaya.

Pada bagian-bagian selanjutnya di tulisan ini akan dipaparkan isu migrasi ireguler yang terjadi di Indonesia dan pola penanganan yang sudah dilakukan terutama terhadap isu-isu yang terjadi melalui jalur perairan. Kemudian secara lebih komprehensif akan dilakukan analisis terhadap keterlibatan serta peran Bakamla dalam penanganan isu tersebut. Akhirnya, tulisan ini akan secara umum mengevaluasi manajemen keamanan maritim Indonesia.

Analisis Penanganan Migrasi Ireguler di Indonesia

Modus penyelundupan manusia ke wilayah Australia melalui perairan Indonesia sering kali dilakukan melalui pesisir pantai di wilayah Nusa Tenggara Timur. Imigran ireguler masuk dengan beberapa cara, termasuk penggunaan visa resmi melalui bandar udara internasional. Dari situ, kemudian para pencari suaka akan dibawa dengan menggunakan kapal motor yang tidak layak berlayar sehingga diharapkan akan tenggelam di dekat perairan Australia. Ketika kapal pencari suaka tenggelam, menurut aturan Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea [UNCLOS]*) 1982, kapal-kapal resmi yang berlayar di perairan tersebut wajib untuk memberikan pertolongan dan membawa penumpang kapal tersebut ke daratan terdekat (Hall, 2012, 387).

Tingginya minat imigran ireguler untuk menuju Australia menimbulkan permasalahan bagi aparat keamanan laut Indonesia yang menjadi ujung tombak pengawasan di wilayah perbatasan. Sebagai salah satu negara transit yang mengungkapkan komitmennya pada forum *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)* 2001 untuk menyelesaikan permasalahan imigran ireguler dengan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia dihadapkan pada dilema antara menjaga keamanan domestik dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah meningkatkan usaha untuk mengontrol pergerakan imigran ireguler dan sindikat perdagangan manusia yang berada wilayahnya. Akan tetapi, Indonesia belum melakukan perubahan berarti dalam penguatan penegakan hukum. Sebagai akibatnya, penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Indonesia dalam menghadapi kedatangan para imigran ireguler cenderung lebih bersifat reaktif, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa negara transit yang lain. Permasalahan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi sebelumnya bukan merupakan topik yang populer di Indonesia, sementara pencegahan masuknya imigran ireguler memperoleh perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia sebelum Bali Process. Dengan kata lain, Indonesia secara umum lebih mengutamakan perlindungan perbatasan daripada perlindungan manusia (Missbach, 2015, 162).

Karena belum menandatangani Konvensi Terkait Status Pengungsi PBB (*Convention Relating to the Status of Refugees*) 1951 beserta Protokol Terkait Status Pengungsi PBB 1967, Indonesia menjadi lemah dalam hal kerangka legislatif terkait perlindungan pencari suaka dan pengungsi yang menjadi bagian dalam kelompok imigran ireguler. Komitmen Indonesia dengan menjadi

bagian dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* [ICCPR]) dan Konvensi Antipenyiksaan PBB (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) hanya memberikan efek perlindungan minimum terhadap pencari suaka. Upaya perubahan hukum dan peundang-undangan dalam menyikapi semakin pentingnya isu imigran ireguler juga lebih difokuskan kepada kriminalisasi praktek penyelundupan manusia daripada perlindungan pencari suaka (Missbach, 2015, 160).

Salah satu dasar peraturan perundang-undangan menyangkut perihal suaka adalah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 2, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Akan tetapi, sayangnya ketentuan ini belum pernah dioperasionalkan dalam bentuk undang-undang. Pada 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tanpa menyebut ‘pencari suaka’ maupun ‘pengungsi’. Istilah yang digunakan untuk menyebut para imigran ireguler antara lain orang asing, imigran gelap, dan korban penyelundupan atau perdagangan manusia. Undang-undang ini belum menjadi payung perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka, namun Pasal 86 menyatakan “Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia”.

Pada 2015, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees* [UNHCR]) mencatat terdapat 13.548 imigran ireguler yang tinggal di wilayah Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 5.957 pengungsi and 7.591 pencari suaka. Karena pendekatan yang dilakukan terhadap imigran ireguler masih cenderung lebih berat ke upaya kriminalisasi imigran gelap, para pencari suaka yang belum tervalidasi sebagai pengungsi oleh UHNCR menjadi subjek detensi di bawah hukum Indonesia. Para pencari suaka tersebut sebagian besar tinggal di 13 rumah detensi imigrasi (rudenim) yang tersebar di beberapa wilayah di tanah air (UNHCR, 2016). Situasi di 13 buah rudenim yang ada di Indonesia bervariasi karena tidak ada peraturan atau hukum nasional yang mengatur pengelolaan rudenim-rudenim tersebut. Isolasi, ketidakjelasan status, kurangnya fasilitas, dan pengalokasian ruang yang melebihi kapasitas yang seharusnya menjadi tantangan kemanusiaan yang dihadapi oleh para imigran ireguler yang tinggal di rudenim. Dalam dilema antara pendekatan kemanusiaan atau keamanan dalam kebijakan terhadap imigran ireguler, pemerintah lebih cenderung mengambil pendekatan keamanan. Hal ini terlihat dari kebijakan detensi dan isolasi sebagai proses

pengamanan yang dijalankan terhadap imigran ireguler, yang menjadi pilihan karena diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran batas wilayah. Pendekatan kemanusiaan mendapat perhatian lebih kecil dalam kebijakan isolasi dan detensi ini, sehingga mengundang kritik dari komunitas internasional. Praktik detensi yang dilakukan terhadap pencari suaka dan pengungsi merupakan pelanggaran terhadap norma-norma dalam peraturan UNHCR terkait pengungsi. Meskipun kebijakan detensi ini bersifat sementara, pencari suaka sering kali diperlakukan sebagai pelaku kejahatan kriminal tanpa kejelasan kapan mereka dapat memperoleh suaka (Missbach, 2015).

Ketiadaan klasifikasi imigran ireguler ke dalam berbagai kategori dalam kerangka hukum merupakan sumber dilema Indonesia dalam penanganan masalah ini. Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi HAM dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan (prinsip *non-refoulement*), namun di sisi lain terjadinya migrasi ke wilayah Indonesia secara ireguler membawa potensi terjadinya berbagai kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan terorisme. Oleh karena itu, keamanan nasional juga menjadi dimensi yang tidak kalah penting dari penegakan HAM.

Dalam Panduan Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dipaparkan bahwa posisi Indonesia dalam penanganan imigran ilegal, pengungsi dan pencari suaka sebagai berikut (Anwar, 2016).

1. Imigran ilegal diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.
2. Imigran ilegal yang mendaftarkan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka ke UNHCR berada di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunggu proses penentuan status sebagai pengungsi dan pencari suaka.
3. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi PBB di Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, namun Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1948 di tentang HAM, berkewajiban Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka sebagai suatu tindakan kemanusiaan.
4. Indonesia pada dasarnya menolak keberadaan pengungsi dan tidak menghendaki wilayahnya dijadikan tempat transit pencari suaka dan

pengungsi, oleh karena itu Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memberantas praktek-praktek penyelundupan manusia.

5. Indonesia bukan negara pihak dari Konvensi PBB di Jenewa Tahun 1951 tentang status pengungsi, namun dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka, Pemerintah Indonesia mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang HAM.
6. Penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak dapat ditangani sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama komprehensif yang melibatkan negara asal, transit dan tujuan, serta lembaga internasional lainnya. Untuk itu Pemerintah Indonesia memberikan mandat kepada UNHCR dalam penentuan status pengungsi dan pencari suaka, serta bekerja sama dengan IOM terkait masalah tempat penampungan dan kebutuhan dasar hidup sehari-hari para pencari suaka dan pengungsi sampai mereka mendapat solusi selanjutnya.

Pada poin ke-4, dapat dilihat bagaimana Indonesia memandang masuknya imigran ireguler sebagai akibat dari praktik penyelundupan manusia. Dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pencari suaka dan pengungsi, Indonesia masih sangat bergantung pada bantuan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (*International Organization for Migration* [IOM]).

Selanjutnya, *paper* ini akan membahas manajemen keamanan di laut dan apakah pendekatan berbasis HAM telah diterapkan oleh aparat penjaga keamanan laut di bawah koordinasi Bakamla sejak para imigran ireguler tersebut ditemukan di wilayah perairan Indonesia.

Manajemen Keamanan Maritim di Indonesia

Dalam menanggulangi migrasi ireguler di wilayah laut Indonesia, peran badan-badan keamanan maritim di Indonesia perlu ditingkatkan. Wilayah laut seluas 3.288.681 km² dijaga oleh tidak kurang dari 12 instansi nasional atau *stakeholder* keamanan maritim. Manajemen keamanan maritim antarinstansi ini dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), instansi yang sebelumnya berdiri dengan nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Sebelumnya, tugas utama Bakorkamla hanya mengoordinasi pengamanan laut Indonesia (Wijaya 2014). Kini, Bakamla memiliki wewenang yang lebih lengkap untuk turun langsung mengamankan wilayah perairan Indonesia dan menegakkan hukum atas pelanggaran di laut (Gultom 2014).

Instansi keamanan maritim lainnya di Indonesia mencakup TNI AL, Polair, KKP, KPLP, Bea Cukai, KLHK, Kemdikbud, Imigrasi, Kemenko

Polhukam, Kemdagri, Kemlu, BIN, Mabes TNI, dan Kejagung. TNI AL terutama bertanggung jawab untuk perlindungan kedaulatan maritim Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sedangkan Polair bertanggung jawab atas penegakan hukum di laut teritorial. KKP bertugas atas perlindungan lingkungan laut, KPLP bertugas atas keselamatan navigasi dan keamanan pelabuhan, sementara Bea Cukai bertugas atas penerimaan pajak. Selain itu, Imigrasi, Kemenko Polhukam, Kemdagri, Kemlu, BIN, Mabes TNI, dan Kejagung hanya menjaga koordinasi informasi tanpa mengirimkan aset apapun ke laut (Supriyanto dan Rusdi 2013).

Terkait berbagai instansi tersebut, Alman Helvas Ali (2016, 128-130) mengungkapkan bahwa hal ini disebabkan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian kewenangan penegakan hukum di laut kepada instansi-instansi berbasis daratan. Perundang-undangan tersebut memiliki beberapa kekurangan yang menonjol, antara lain sebagai berikut: (1) Asas yurisdiksi bersifat umum, yaitu hanya menyebut wilayah perairan Indonesia secara luas tanpa batasan apapun, padahal penegakan hukum di laut bersifat khusus dan berbeda dengan penegakan hukum di darat, di mana di laut subjek hukum adalah kapal dan bendera kapal dan bukan orang seperti di darat. (2) Tidak mengacu pada semangat efisiensi dan *cost effectiveness* dalam penegakan hukum di laut.

Menurut Ali (2016, 130), manajemen keamanan maritim Indonesia, termasuk penegakan hukum di laut, memiliki beberapa ciri sebagai berikut: (1) Tidak ada kebijakan dan strategi nasional yang komprehensif dan solid, termasuk di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Perundang-undangan tumpang tindih dalam hal penegakan hukum. (3) Senantiasa bersifat sektoral. (4) Asas *lex specialis derogat legi generali* lebih sering diabaikan oleh penegak hukum sendiri.

Karut-marut manajemen keamanan maritim ini menyebabkan persaingan antarinstansi. Ristian Atriandi Supriyanto dan Siswanto Rusdi (2013) mengungkapkan bahwa otoritas Bakorkamla dahulu sering dipotong atas dasar kepentingan instansi yang seharusnya berkoordinasi dengannya. Kesatuan tujuan dapat dicapai pada tingkat strategis, namun koordinasi tingkat operasional di lapangan dan di laut masih tambal sulam/tidak merata. Misalnya, Bakorkamla sering sulit menyelaraskan standar operasional prosedur (SOP) dari berbagai instansi, memanfaatkan aset laut mereka di bawah satu komando, menempatkan sumber daya bersama-sama, serta menetapkan misi dan tujuan kepada para pemangku instansi. Pada kenyataannya, masing-masing instansi cenderung menggunakan caranya sendiri. Selain itu,

Bakorkamla kekurangan dana, perlengkapan, maupun staf untuk melakukan operasinya.

Tabel 1 Matriks hubungan Undang-Undang dengan berbagai instansi yang saat ini terlibat dalam penanganan masalah di laut

	TNI AL	POLRI	Bea Cukai	KPLP	KKP	Imigrasi	KLH	Kehutanan	Kemdikbud
TZMKO 1939 Psl 14 Perompakan dll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					
5/1983 ZEEI	<input checked="" type="checkbox"/>								
5/1990 KSDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
6/1996 Perairan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
41/1999 Kehutanan		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
17/2006 Kepabeanan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
17/2008 Pelayaran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					
32/2009 LH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		
45/2009 Perikanan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				
11/2010 Cagar Budaya									<input checked="" type="checkbox"/>
6/2011 Keimigrasian		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			

Sumber: Ali 2016, 129

Menurut Supriyanto dan Rusdi (2013) serta Ali (2016, 132-134), masalah lainnya adalah terkait kepentingan instansi untuk menciptakan instansi penjaga pantai. Pembentukan KPLP di Kemenhub telah mengintensifkan persaingan dengan Bakorkamla, di mana KPLP akan diletakkan langsung di bawah kantor Presiden sementara Kemenhub akan mengawasi pelaksanaan hariannya. Hal ini menyebabkan Bakorkamla merasa subordinasi oleh *stakeholder*-nya sendiri, kemudian menyerahkan konsep Bakamla sebagai saingan KPLP, yang juga

melapor kepada Presiden tetapi dalam pengawasan operasional Menkopolhukam. Daerah abu-abu tanggung jawab antara Bakorkamla dan KPLP cukup lebar, sementara kedua lembaga bersaing untuk diakui dan direpresentasikan sebagai penjaga pantai Indonesia. Hingga akhirnya Bakamla dibentuk pada 2014, KPLP tidak berada di bawah Bakamla, namun masih terintegrasi dengan Bakamla (Jurnal Maritim 2015).

Terkait rivalitas Bakamla-KPLP, Siswanto Rusdi (2015) justru mendukung Presiden memperkuat KPLP sebagai instansi penjaga pantai. Rusdi menilai terdapat indikasi bahwa Bakamla akan diarahkan untuk menjadi instansi padat keamanan (*security heavy*) dengan kekuatan militer, bukan hanya menjadi lembaga sipil. Pembentukan Bakamla masih didorong oleh perspektif keamanan dalam memandang masalah di laut, sedangkan masalah nyata masih diabaikan, termasuk kualitas kapal yang substandar dan awak kapal yang tidak bersertifikat. Perspektif keamanan ini terlihat bahwa meskipun merupakan lembaga sipil, Bakamla sendiri selalu dipimpin oleh perwira aktif TNI AL, yaitu Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit (2015-2016) dan Laksamana Madya TNI Arie Soedewo (2016-sekarang).

Bakorkamla berubah menjadi Bakamla pada 2014 didorong oleh ekspektasi agar Indonesia memiliki instansi keamanan maritim sipil tunggal yang berbasis pada pendekatan *single agency, multi tasks*. Untuk mendorong optimalisasinya, Bakamla telah mengusulkan percepatan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Patroli Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia menjadi PP serta menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan dan Keselamatan Laut. Ali (2016, 134-136) mengungkapkan bahwa konten RUU tersebut antara lain perubahan nomenklatur Bakamla menjadi Badan Nasional Keamanan Laut, perumusan rencana induk keamanan laut oleh Dewan Keamanan Laut Nasional, dan hak penyidikan oleh Badan Nasional Keamanan Laut.

Menurut Ali (2016, 134-136), perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla tidak akan membawa perubahan terhadap kondisi manajemen keamanan maritim Indonesia saat ini, namun hanya mengubah nomenklatur 'koordinasi' menjadi 'sinergi'. Di lain pihak, Bakamla tidak akan dengan mudah dapat mempraktikkan sinergi, yang terbukti dari rivalitas selama ini. Konstruksi manajemen keamanan maritim yang diusung oleh Bakamla dinilai melestarikan *status quo* dan masih jauh dari ekspektasi *single agency, multi tasks*. Hal ini tidak lepas dari pendekatan terhadap domain maritim semata didorong oleh

perspektif ekonomi belaka, yaitu bagaimana domain maritim dapat mendukung kegiatan ekonomi, bukan perspektif maritim yang lebih luas dan komprehensif.

Analisis Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Penanganan Isu Migrasi Ireguler

Dalam analisis tentang peran Badan Keamanan Laut dalam menangani isu migrasi ireguler di wilayah perairan Indonesia, ada beberapa hal yang perlu untuk digarisbawahi. Isu migrasi ireguler sendiri tidak hanya seputar pengungsi atau pencari suaka, namun mencakup imigran ekonomi dan imigran ilegal lainnya. Di dalamnya terdapat pula aspek kejahatan lintas negara ketika ada indikasi keterlibatan organisasi penyelundupan atau perdagangan manusia. Terkait aspek-aspek di atas, bentuk pelanggaran hukum dan kedaulatan secara jelas terlihat. Pola penanganan pun menjadi lebih lugas diserahkan kepada aparat keamanan. Hal ini yang tidak terjadi pada isu pencari suaka atau pengungsi yang berusaha masuk atau melewati wilayah maritim Indonesia.

Khusus untuk isu pencari suaka atau pengungsi, penulis melihat adanya kesenjangan (*gap*) antara pendekatan kemanusiaan dan pendekatan hukum yang dipakai oleh berbagai pemangku kepentingan yang kewenangannya saling bersinggungan pada isu tersebut. Hal inilah yang menyebabkan komitmen pemerintah Indonesia secara internasional untuk menangani persoalan pengungsi dan pencari suaka melalui pendekatan kemanusiaan berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

Pada pertengahan 2015, Indonesia dan Malaysia dituding melakukan 'maritime ping-pong' atau kebijakan menolak ribuan pencari suaka asal Rohingya yang terlantar di Selat Malaka masuk ke negaranya dan mendorong mereka kembali ke negara asal (*boat push-back*). PBB dan IOM pun kemudian memperingatkan negara-negara tersebut untuk mengizinkan para imigran yang terlantar tersebut untuk mendarat. Direktur Jenderal IOM William Lacy Swing mengatakan, "*In the name of humanity, let these migrants land*" (Graham-Harrison, 2015). Dalam perspektif penegakan hukum dan kedaulatan, masuknya kapal asing ke dalam wilayah perairan Indonesia merupakan sebuah pelanggaran dan berpotensi untuk memunculkan ancaman bagi negara. Sehingga, penghalauan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh aparat keamanan laut. Terlebih, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pencari suaka tersebut karena tidak menjadi bagian dari Konvensi Pengungsi 1951. Akan tetapi, jika dilihat melalui perspektif kemanusiaan, tindakan Indonesia merupakan sebuah pelanggaran kemanusiaan; hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh sebuah negara yang sudah berkomitmen untuk menjunjung tinggi HAM.

Sama halnya dengan manajemen keamanan maritim, isu migrasi ireguler juga melibatkan berbagai pemangku kebijakan dari berbagai sektor. Sama halnya dengan Bakamla, badan koordinasi bagi para pemangku kebijakan dalam isu migrasi ireguler berada di bawah Kemenko Polhukam. Terkait isu migrasi ireguler, Kemenko Polhukam melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor KEP-10/MENKO/POLHUKAM/1/2013 tentang Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi, dan Pencari Suaka (P2MP2S). Desk ini bertugas melakukan *monitoring*, menyinkronkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan penyelundupan manusia, pengungsi, dan pencari suaka. Salah satu fungsi tugas yang penting dari desk ini adalah terkait pengembangan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka penanganan penyelundupan manusia, pengungsi, dan pencari suaka.

Pada praktiknya, Desk P2MP2S pun mengakui bahwa salah satu tantangan dalam penanganan migrasi ireguler adalah belum terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik dan efektif dengan pemangku kebijakan lain. Penanganan isu ini melibatkan, di antaranya, Ditjen Imigrasi Kemendikhum, IOM, UNHCR, TNI, POLRI, badan intelijen, serta pemerintah daerah. Persinggungan kewenangan terjadi mulai dari deteksi masuknya imigran, intersepsi dan/atau evakuasi, penampungan, penentuan status, hingga jaminan HAM. Jika ditinjau dari fungsinya, desk ini juga menitikberatkan adanya optimalisasi penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan manusia dan sindikat yang terlibat.

Meskipun diberikan wewenang khusus dalam penanganan migrasi ireguler, Desk P2MP2S tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk bertindak sebagai lembaga koordinator. Pada dasarnya, Kemlu sudah mengajukan sebuah Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.¹ Akan tetapi, rancangan Perpres ini masih dalam tahap pembicaraan dengan berbagai lembaga pemerintah yang akan terlibat dalam implementasinya. Aturan hukum ini diharapkan dapat mengurai simpul koordinasi yang selama ini terjadi dalam penanganan isu migrasi ireguler di Indonesia.

Rancangan Perpres ini mencakup aspek penemuan, pencarian, dan pertolongan pengungsi yang ditemukan di wilayah Indonesia. Penemuan pengungsi di wilayah perairan dalam rancangan Perpres ini diatur dari mulai pasal 5 hingga 17. Dalam aturannya, disebutkan bahwa penemuan pengungsi

¹ Dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengungsi dari Luar Negeri ini diperoleh dari Desk P2MP2S Kemenko Polhukam. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemlu untuk mencari rujukan mengenai faktor pendorong diajukannya Rancangan Perpres ini.

dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh berbagai lembaga, di antaranya TNI, POLRI, kementerian yang berwenang di bidang perhubungan, Bakamla, dan kementerian lain yang melaksanakan tugas di wilayah perairan.

Rancangan Perpres ini terlihat lebih mencerminkan aspek kemanusiaan dibandingkan aspek penegakan kedaulatan. Hal ini diperlukan karena penanganan pengungsi dan pencari suaka akan berbeda dengan imigran ekonomi atau imigran ilegal lainnya. Misalnya, pada Pasal 9 diatur bahwa pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat harus segera diberikan tindakan berupa pemindahan ke kapal penolong dan dibawa ke daratan jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam. Tata cara penemuan pengungsi tersebut kemudian diserahkan kepada kepala lembaga-lembaga yang berwenang. Yang kemudian perlu dicermati adalah rancangan Perpres ini pun mengakui ketiadaan koordinasi yang terpusat dalam manajemen keamanan maritim di Indonesia. Bakamla masih dilihat sebagai lembaga subsider bagi garda maritim lain, seperti TNI AL dan POLRI.

Berdasarkan temuan di atas, ada beberapa hal yang bisa dicermati. Pertama, tumpang tindih kewenangan tidak hanya terjadi pada sektor manajemen keamanan maritim, namun juga pada sektor penanganan migrasi ireguler. Kedua, belum ada payung hukum yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan migrasi ireguler serta koordinasi antar lembaga dalam praktik operasionalnya. Ketiga, tidak adanya sinkronisasi kebijakan dan komunikasi efektif ini menyebabkan kebijakan dari pemangku kepentingan terkait isu migrasi ireguler tidak sampai kepada pemangku kepentingan di sektor keamanan maritim.

Kesimpulan

Menggunakan kerangka konsep penanggulangan migrasi ireguler dan manajemen keamanan maritim, *paper* ini telah menganalisis dan mengevaluasi peran Bakamla dalam menanggulangi migrasi ireguler di laut. *Paper* ini juga telah melakukan perbandingan antara implementasi sebelum pembentukan Bakamla dan sekarang. Berdasarkan temuan yang telah diungkapkan sebelumnya, terdapat beberapa masalah dalam penanganan migrasi ireguler di laut Indonesia oleh Bakamla dan para pemangku kepentingan manajemen keamanan maritim.

Pertama, terdapat tumpang tindih kewenangan pada manajemen keamanan maritim serta pada penanganan migrasi ireguler. Dalam manajemen keamanan maritim di Indonesia, tumpang tindih peraturan perundang-undangan menyebabkan persaingan antarinstansi keamanan maritim. Perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla diharapkan dapat mengatasi karut-marut tersebut dengan mempraktikkan sinergi antarinstansi, namun pada kenyataannya tetap

melestarikan *status quo* seperti sebelumnya dan masih jauh dari ekspektasi *single agency, multi tasks*. Sementara itu, dalam penanganan migrasi ireguler, belum terjadi pembagian tugas dan kewenangan para pemangku kebijakan karena belum ada payung hukum yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan migrasi ireguler serta koordinasi antar lembaga dalam praktik operasionalnya. Jika Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri belum dapat diselesaikan, akan muncul hambatan dalam menyinergikan antara penanganan migrasi ireguler dengan pendekatan kemanusiaan dan manajemen keamanan maritim dengan pendekatan keamanan. Ketiga, tidak adanya sinkronisasi kebijakan dan komunikasi efektif ini menyebabkan kebijakan dari pemangku kepentingan terkait isu migrasi ireguler tidak sampai kepada pemangku kepentingan di sektor keamanan maritim; atau dengan kata lain antara Desk P2MP2S yang menjadi koordinator penanganan migrasi ireguler dan Bakamla yang menjadi lembaga pengelola keamanan maritim.

Referensi

- Ali, A. H. (2016). Badan Keamanan Laut: Solusi atau Bagian dari Masalah Keamanan Maritim Indonesia. In B. Sukadis, & M. A. Dato (Eds.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015* (pp. 127-142). Jakarta: Lesperssi.
- Anwar, C. (2016, Februari). Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. *Poin-Poin Jawaban Wawancara*. Jakarta: Kemenko Polhukam.
- Bakamla. (n.d.). *Tugas dan Fungsi Bakamla*. Retrieved from Badan Keamanan Laut Republik Indonesia: bakamla.go.id
- CNN Indonesia. (2015, Oktober 5). *Tumpang Tindih Aturan Penegakan Hukum Maritim*. Retrieved Oktober 9, 2016, from CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004163018-20-82691/tumpang-tindih-aturan-penegakan-hukum-maritim/>
- Cunningham, S. (2015, Juni 3). *Myanmar's Rohingya Boat People Are Safe For Now - But Root Issues Unsolved*. (Forbes Asia) Retrieved November 10, 2016, from Forbes Asia: <http://www.forbes.com/sites/susancunningham/2015/06/03/myanmars-rohingya-boat-people-are-safe-for-now-but-root-issues-unsolved/#5dfc64573973>
- Graham-Harrison, E. (2015, Mei 17). *Burma's boatpeople 'faced choice of annihilation or risking their lives at sea'*. Retrieved November 15, 2016, from The Guardian:

<https://www.theguardian.com/world/2015/may/17/rohingya-burma-refugees-boat-migrants>

Gultom, H. E. (2014, Oktober 2). *Bakorkamla Resmi Berubah Menjadi Bakamla*. Retrieved Oktober 8, 2016, from Tribunnews.com:

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/02/bakorkamla-resmi-berubah-menjadi-bakamla>

Hall, J. M. (2012). Sink or Swim: The Deadly Consequences of People Smuggling. *Indiana International and Comparative Law Review* , 12 (2).

Jurnal Maritim. (2015, April 1). *KPLP Tidak di Bawah Bakamla*. Retrieved Oktober 11, 2016, from Jurnal Maritim:

<http://jurnalmaritim.com/2015/04/kplp-tidak-di-bawah-bakamla/>

Missbach, A. (2015). *Troubled Transit: Assylum Seekers Stuck in Indonesia*. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.

Perpres RI. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut*. Retrieved from bakamla.go.id:

<http://bakamla.go.id/style/peraturan/Perpres-Bakamla-No.178.pdf>

Rusdi, S. (2015, Februari 11). *The dilemma of Indonesia's coast guard*.

Retrieved Oktober 11, 2016, from The Jakarta Post:

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/02/11/the-dilemma-indonesia-s-coast-guard.html>

Supriyanto, R. A., & Rusdi, S. (2013, Januari 2). Maritime Security Agencies in Indonesia: More Not Merrier. *RSIS Commentaries No. 001/2013* , pp.

<https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/CO13001.pdf>.

TNI AL. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004*.

Retrieved from Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut:

<http://www.tnial.mil.id/TroopInfo/Instruksi/tabid/107/articleType/ArticleView/articleId/7684/Default.aspx>

UNHCR. (2016). *Laporan Statistik Bulanan: Januari 2016*. UNHCR. Jakarta: UNHCR.

Wijaya, I. (2014, Desember 6). *Bakorkamla Akan Ganti Nama, Ini Kewenangan Barunya*. Retrieved Oktober 8, 2016, from Tempo.co:

<https://m.tempo.co/read/news/2014/12/06/078626706/bakorkamla-akan-ganti-nama-ini-kewenangan-barunya>

Dimensi Maritim Dalam Isu Ketidakamanan Energi Tiongkok Di Asia Timur

Uni W. Sagena

Universitas Mulawarman

unisku@yahoo.com

Abstract

The issue of energy insecurity for China is one of the current issues in its international relations studies. This issue began to emerge when the country was originally known very rich in energy is gradually losing its energy security status, causing a variety of regional even global implications. China then suffered dependence on energy imports from abroad (oil and gas) that makes China face a variety of threats, whether the traditional or even non-traditional. One of the main threat is the increased risk and a threat to China's maritime security posed by its dependence on energy trade and transport through the sea lane of East Asia. China threat perception arises both from the state and non-state actors that get it involved tension or conflict with other countries in the region. This article uses the geo-strategic approach with a qualitative analysis method to explore the region's maritime dimension in energy issues of China since the post-Cold War era until now. This article argues that: 1) the main character of China's energy insecurity in East Asia is related to the maritime dimension; 2) China's energy insecurity makes the country actively and aggressively seek the new energy sources and suppliers, including in the dangerous maritime and conflict-prone zone; 3) threats to maritime dimension influence the country to change the energy search strategy by avoiding energy maritime route in East Asia and find alternative pathways for the safer transportation. This article is useful to understand the changing behavior of the countries that want to pursue energy security and to understand maritime constellation in a region based on the energy issue.

Kata Kunci

maritime, energy insecurity, China, East Asia

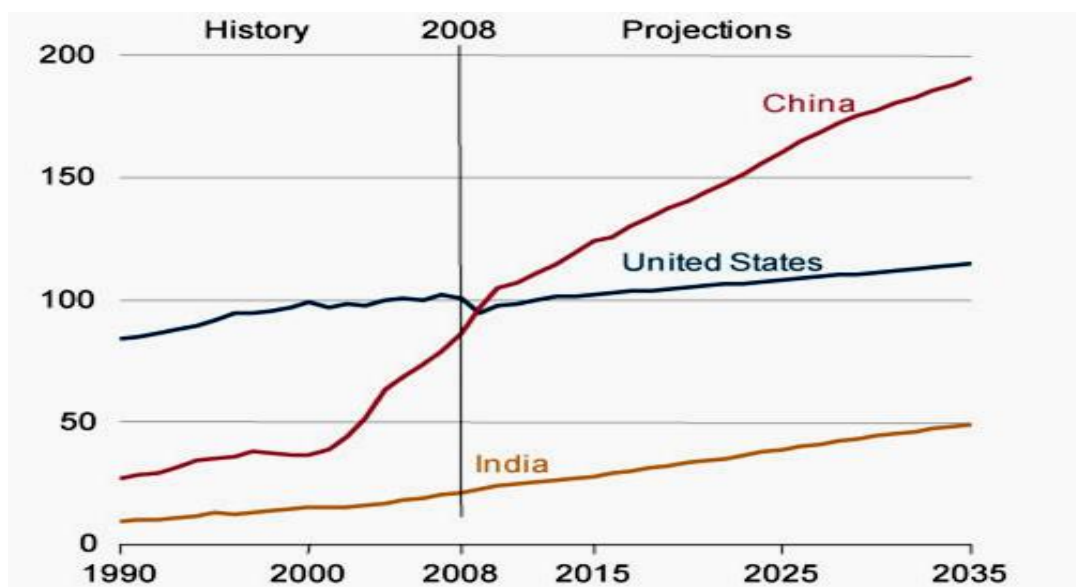
Latar Belakang

Tiongkok merupakan negara yang dikenal sangat besar, baik dari segi wilayah dan kepadatan penduduk yang sedang gencar melakukan modernisasi di berbagai sektor. Negara raksasa ini sedang mengalami periode industrialisasi besar-besaran sehingga berpengaruh pada permintaan dan konsumsi energi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Pada awalnya, Tiongkok adalah negara yang sangat kaya energi, namun kemudian terjadi pengurangan produksi sehingga terjadi kesenjangan antara *demand* dan *supply* energy dalam negeri.

Lambat laun, Tiongkok kehilangan statusnya sebagai negara produsen dan eksportir bahan bakar bumi (minyak dan gas) yang berakibat pada munculnya situasi ketidakamanan energi (*energy insecurity*) negara tersebut. Selanjutnya, Tiongkok mengalami ketergantungan impor bahan bakar fosil dari negara-negara produsen (awalnya negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara) yang dikenal kaya energi. Sejak tahun 2003, impor minyak Tiongkok sudah mendahului Jepang. Tiongkok bahkan telah menjadi konsumen minyak terbesar kedua di belakang Amerika Serikat serta menjadi antara lima negara importir minyak terbesar dunia (Mikkal E. Herberg 2004: 348).

Banyak prediksi internasional mengenai masa depan permintaan minyak Tiongkok yang diyakini besar kemungkinannya akan mendahului posisi Amerika Serikat sebagai negara pengguna energi terbesar di dunia seperti dalam diagram diagram 1 berikut ini:

Gambar 1. Perbandingan Kebutuhan Energi Cina, Amerika Serikat dan India



Sumber: www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm

Tren peningkatan kebutuhan energi yang drastis tersebut berimplikasi secara internal dan eksternal. Secara eksternal, Tiongkok memasuki babak-babak baru luar negerinya yang dikenal dengan "*go-out strategy*" dalam usahanya mengejar sumber-sumber bahan bakar fosil di berbagai kawasan demi mengejar keamanan energinya. Babak-babak baru tersebut penuh risiko kemudian mempengaruhi hubungan internasionalnya di berbagai kawasan, terutama di Asia Timur. Asia Timur yang dimaksudkan dalam artikel ini terdiri dari dua sub-region, Asia Timur Laut (tempat Tiongkok berada) dan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok.

Faktor energi ini yang diyakini semakin menambah dan memperparah hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya di Asia Timur yang memang sudah memiliki sejarah konflik yang panjang, yang cukup serius dan berliku terkait masalah kedaulatan, sejarah dan perbatasan. Namun, dengan munculnya isu ketidakamanan energi Tiongkok tersebut, membuat pola hubungan Tiongkok di kawasan ini semakin menyita perhatian dunia dan menimbulkan problematika serta dilema tertentu. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai risiko atau "*probability of unwanted events*" dalam konteks keamanan energi menurut perspektif Tiongkok sejak era pasca Perang Dingin sampai masa sekarang. Berbagai hasil studi literatur mengungkapkan situasi Tiongkok belakangan ini teramat khawatir dengan berbagai risiko energi yang cenderung rawan, terutama karena letak geografisnya yang memiliki wilayah dataran yang sangat luas dan garis pantai yang cukup panjang serta berbatasan langsung dengan berbagai negara, baik darat maupun laut.

Karena itu, penulis menganggap perlu dan penting untuk mengkaji risiko-risiko tersebut bagi memahami perilaku kontemporer Tiongkok sebagai negara yang mengalami ketergantungan terhadap pasokan minyak dan gas dari area-area yang penuh konflik dan kurang aman sehingga menambah perspektif ancaman Tiongkok. Alasan kedua adalah isu keamanan energi bagi Tiongkok baru belakangan ini saja menguat dalam kepentingan nasionalnya yang awalnya kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah komunis Tiongkok. Konstalasi dan eskalasi keamanan di Asia Timur semakin meningkatkan perhatian pemerintahnya terhadap isu energinya. Alasan ketiga adalah isu energi inilah yang mempengaruhi perubahan sikap negara Tiongkok dan mengubah fokusnya dalam memandang geopolitiknya. Yang awalnya menitikberatkan pertahanan dan keamanan darat menjadi lebih memperhatikan keamanan dan pertahanan maritimnya. Risiko seperti ini bersifat geopolitik yaitu faktor geografis sebagai pendekatan untuk menganalisis rencana politik, diplomasi, maupun pertimbangan militer suatu negara dalam sebuah negara

atau kawasan. Dengan kata lain, pertimbangan keamanan dan strategi energi Tiongkok di Asia Timur ini didasari oleh keadaan geografis Tiongkok dan kondisi kawasan Asia Timur yang penuh risiko dan ancaman keamanan dengan dimensi maritim yang kuat. Terakhir, sikap agresif Tiongkok memoderenkan armada maritimnya adalah juga salah satu faktor yang memunculkan teori yang cukup populer yaitu “*China`s threat theory*”.

Untuk mengkaji hal tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didukung data-data kuantitatif dalam mengeksplorasi dimensi maritim yang dimaksudkan dalam isu keamanan energi Tiongkok pasca Perang Dingin hingga sekarang. Adapun struktur artikel ini adalah latar belakang yang berisi gambaran mengenai kondisi ketidakamanan energi Tiongkok dan kondisi umum Asia Timur. Bagian kedua adalah permasalahan yang akan diangkat untuk selanjutnya dieksplorasi lebih jauh dalam bagian analisis. Bagian ketiga adalah kerangka konseptual mengenai keamanan energi yang dielaborasi dengan konsep keamanan maritim sebagai acuan kajian ini. Dilanjutkan dengan bagian keempat berisi temuan-temuan mengenai jenis-jenis resiko keamanan energi di Asia Timur yang berciri dan berdimensi maritim. Bagian kelima adalah analisis mengenai bagaimana karakter dan dimensi maritim Asia Timur tersebut berpengaruh secara tradisional, non-tradisional, dan secara struktural. Secara **tradisional** yaitu mempengaruhi eskalasi dan konstalasi hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya yang diwarnai dengan berbagai risiko bersifat tradisional (berupa potensi konflik energi antara Tiongkok dengan negara-negara tetangganya di perbatasan maritime yang kaya energi) juga secara **non-tradisional** berupa bahaya dan gangguan SLOCs Asia Timur. Selain itu juga akan dianalisis bagaimana faktor **struktur** energi regional di Asia Timur yang berbagi masalah keamanan energi dengan Tiongkok sebagai pemasok energi utama bagi pasar dunia, yang juga mengalami kemunduran seperti Tiongkok sehingga melemahkan posisi negara-negara pemasok di wilayah ini. Bagian terakhir adalah kesimpulan yang berisi rumusan dan saran untuk penelitian yang lebih lanjut.

Permasalahan

Setelah menjelaskan kondisi ketidakamanan energi Tiongkok dan posisinya di Asia Timur, hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah bagaimana Tiongkok memandang situasi maritim di Asia Timur dalam konteks keamanan energinya. Dengan kata lain, bagaimana karakter maritim yang ada di kawasan Asia Timur ini menambah perspektif ketidakamanan energi Tiongkok sehingga menimbulkan berbagai pertimbangan keamanan dan strategi baru Tiongkok di

sektor maritimnya. Adapun asumsi utama artikel ini adalah: *pertama*, Asia Timur merupakan kawasan berdimensi maritime yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah Komunis Tiongkok karena merupakan kawasan paling rentan risiko dan memiliki tingkat ancaman yang lebih luas dan kritis, baik secara tradisional maupun non-tradisional. *Kedua*, pasokan dan pengiriman utama energi Tiongkok yang diimpor dari Timur Tengah melalui jalur laut di kawasan ini, namun sayangnya, Tiongkok kurang memiliki kontrol (*less control*) bagi memastikan kelancaran pasokan dan penghantarannya di kawasan ini dari berbagai gangguan, ancaman bahaya sepanjang aliran dan penghantarannya.

Kerangka Konsep

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan konsep keamanan energi sebagai bagian keamanan nasional yang akan dielaborasi dengan konsep keamanan maritim.

Konsep Keamanan Energi

Dasar konsep keamanan energi sebenarnya terbentuk dari konsep energi (*energy*) dan keamanan (*security*). Masuknya isu energi dalam penelitian keamanan melalui proses yang disebut dengan sekuritisasi isu (*securitization*), yaitu proses pengidentifikasian isu tertentu apakah politik maupun selain politik yang bertujuan untuk menjadikan isu tersebut sebagai agenda atau program keamanan. Sekuritisasi dapat juga dilihat sebagai bentuk lain dari politisasi isu (Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, 1998: 23). Istilah sekuritisasi pertama kali diperkenalkan oleh Ole Waever (1995) tentang bagaimana sebuah isu ancaman tertentu (*threats*) diubah oleh aktor sekuritisasi (*securitizing actor*), menjadi masalah keamanan bagi objek rujukannya (*referent object*). Sekuritisasi melampaui bidang politisasi yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer atas nama keamanan yang sering dilakukan oleh para elit politik secara khusus atau terbatas (Ole Waever 1995: 57).

Hubungan erat antara energi, politik, dan keamanan berikutnya menjadi perhatian ramai. Penelitian beberapa ahli internasional, diantaranya Kevin Rosner (2010), Phillip E. Cornell (2009), Haider A. Khan (2007), John R. McCaskill (2007), dan Williamson Murray (2002) mengungkap hubungan antara energi, keamanan nasional dan juga kekuasaan negara. Ketiga- tiga elemen inilah menurut beberapa ahli tersebut semestinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan keamanan nasional. Nilai penting energi bagi suatu negara harus dilihat dalam perspektif kekuasaan pada tingkat nasional, karena energi sangat mempengaruhi stabilitas negara itu sendiri.

Menurut Kevin Rosner (2010), energi eksis dalam bentuk apapun yang diperlukan oleh negara baik bagi kebutuhan transportasi, militer, maupun ketika terjadi konflik atau perang. Justru itu, tantangan penting bagi seorang pemimpin negara saat ini adalah berusaha memastikan keamanan energi di negara yang dikelolanya dengan jalan memperoleh sumber-sumber energi yang semakin menurun. Adapun konsep aman secara sederhana didefinisikan sebagai kondisi yang bebas dari segala bentuk risiko atau *unwanted events* seperti bahaya, kecemasan, ancaman, dan ketakutan dari sektor energi. Konsep ini berlaku luas dan dapat diaplikasikan baik bagi pihak konsumen, produsen, importir, maupun eksportir energi (Sagena dan Mustamin, 2016:4).

Konsep Keamanan Maritim

Sebagaimana keamanan energi, keamanan maritim juga merupakan salah satu istilah baru dalam ilmu hubungan internasional. Ia merupakan cabang baru dari isu-isu keamanan. Antara keduanya memiliki kaitan erat bahkan saling tergantung (*interdependent*) dan sulit dipisahkan (Keyuan Zou (2009:136). Tanpa adanya keamanan maritim, maka keamanan energi tidak dapat dipertahankan dalam realitasnya. Berbagai risiko timbul karena kaitan antara energi, keamanan negara, dan lingkungan keamanan maritim dalam konteks Asia Pasifik menimbulkan istilah "wicked problems" – yaitu istilah yang merujuk pada kompleksitas masalah maritim yang timbul di kawasan ini, seperti dijelaskan oleh Sam Bateman (2011:2) "... *they are pressing and highly complex issues for policy formulation that involve many causal factors and high levels of disagreement about the nature of a problem and the best way to handle it*".

Kompleksnya isu dan solusi terhadap masalah keamanan maritim ini berpengaruh pada belum ada kesepakatan internasional atau definisi yang baku tentang keamanan maritim (*maritime security*). Ada yang melibatkan ancaman keamanan non-tradisional dalam definisi mereka (bagi negara kepulauan seperti Indonesia, Philipina dan Jepang). Namun, ada juga sebagian negara yang tidak nyaman jika dalam konsep keamanan maritim memasukkan isu ancaman lingkungan laut atau *illegal fishing* (bagi negara zona maritim kecil seperti Thailand, Korea Selatan, dan Singapura). Ini berarti, dalam konsep keamanan maritim pun terdapat perbedaan persepsi antar aktor dalam mendefinisikannya. Hal ini memunculkan risiko perbedaan pendapat tentang indikator keamanannya sehingga berpotensi melahirkan konflik.

Di sisi lain, konsep ini juga membuka ruang bagi aktor-aktor internasional untuk melahirkan konsensus bersama dalam mendefinisikan kesamaan pun perbedaan pendapat yang diperlukan. Seperti yang diusulkan oleh Christian

Bueger (2015) dalam membangun kerangka berpikir yang meliputi: 1) keamanan maritim dapat dipahami dalam matriks hubungannya dengan konsep lain, seperti keamanan laut, *Seapower*, ekonomi biru dan ketahanan; 2) kerangka sekuritisasi memungkinkan untuk mempelajari bagaimana ancaman maritim yang dibuat dengan klaim politik berbeda diperlukan untuk mengungkap kepentingan politik dan ideologi yang berbeda; 3) teori praktek keamanan memungkinkan studi tentang aktor apa yang sebenarnya dilakukan ketika mereka mengklaim untuk meningkatkan keamanan maritim.

Bueger membangun matriks konsep keamanan maritim ke dalam empat bagian yang saling berhubungan, yaitu yang berkaitan dengan *marine environment (marine safety)*, *economic development (blue economy)*, *national security (sea power)*, *human security (resilience)*. Dalam konteks kajian artikel ini, hubungan keamanan maritim dengan keamanan energi Tiongkok terletak pada matriks mengenai *marine safety* (seperti kecelakaan kapal-kapal di laut, gangguan maritime) serta keamanan nasionalnya (seperti *arms proliferation* dan *inter-state dispute*). Kedua hal ini merupakan prioritas penting dalam pertimbangan strategis Tiongkok untuk membangun *sea power* untuk melindungi keamanan energinya di wilayah maritim yang rawan seperti konflik dan berbahaya serta untuk melindungi pengirimannya yang diangkut dengan kapal-kapal tanker raksasa melalui jalur laut internasional.

Untuk itu, hubungan antara keduanya akan terlihat dalam bagaimana Tiongkok memandang maritim Asia Timur dalam konteks keamanan energinya.

Temuan-Temuan

Artikel ini menemukan bahwa sumber risiko yang diidentifikasi dalam artikel ini adalah risiko yang mengandung dimensi politik-militer, baik dari negara (*state*) maupun (*non-state*). Risiko berdimensi politik-militer menurut pakar energi dari Tiongkok, Chen Shaofeng (2009: 11), berarti "*the risk of loss of investment returns or the disruption of trade resulting from political changes or instability in a country*". Sumber risiko yang ditimbulkan oleh aktor negara (*state actors*) maupun aktor bukan negara (*non-state actors*) dikhawatirkan akan menargetkan gangguan dan ancaman selama proses menyediakan pasokan, fasilitas-fasilitasnya produksi, sampai proses transportasi energi ke daratan Tiongkok. Dalam konteks keamanan energi, keadaan geografisnya itu membuat Tiongkok cenderung menghadapi berbagai risiko keamanan yang mengandung bahaya tersembunyi karena kemunculannya yang sering kali tidak disadari dan sulit diantisipasi, baik dari hulu ke hilir - yaitu: (1) risiko gangguan politik dan militer di beberapa wilayah pemasok utama energinya (faktor hilir); (2) risiko kecelakaan dan gangguan yang dapat merusak prasarana dan

fasilitas produksi energinya (faktor hilir); serta (3) risiko keamanan di jalur pengiriman atau pegangkutan energi hingga sampai ke konsumen dalam negerinya (faktor hulu). Risiko-risiko tersebut dilihat sebagai potensi ancaman serius bagi keamanan pasokan dan pengiriman energi Tiongkok dari luar negeri.

Temuan lainnya adalah dalam usaha pencarian pembekal dan jalur pengiriman energinya, Tiongkok menghadapi dua risiko secara simultan dan dari semua arah. *Pertama* adalah risiko politik yang tinggi (*high political risks*) yang melibatkan kawasan dan negara-negara pemasok energi Tiongkok yang situasinya kurang stabil karena adanya konflik internal. Contohnya adalah kawasan Asia Tenggara, Asia Timur Laut, Asia Barat (Timur Tengah) dan negara-negara Afrika yang dapat membahayakan keselamatan aktivitas energi Tiongkok. *Kedua* adalah risiko politik yang rendah (*low political risks*), contohnya adalah negara-negara pemasok energi yang berasal dari daerah wilayah Asia Tengah. Meskipun status negara pemasok energi Tiongkok ini masih baru dan memiliki masalah internal, namun hal ini cenderung masih dapat dikontrol oleh pemerintah Tiongkok karena lokasinya yang dekat dengan perbatasan darat Tiongkok di sebelah barat. Persepsi ancaman keamanan energi Tiongkok tidak terlepas dari kondisi-kondisi *high political risks* dan *low political risks* tersebut.

Singkatnya, artikel ini menemukan beberapa hal yang menunjukkan karakter dan kentalnya dimensi maritim dalam perspektif ketidakamanan energi Tiongkok yang secara serius menunjukkan problem besar bagi pemerintah, yang kami petakan secara sederhana berikut ini: 1) secara tradisional, persepsi ancaman Tiongkok dari negara-negara tetangganya yang berbatasan langsung secara maritim dengannya dan memiliki sengketa maritim sejak lama. Sengketa antar negara ini sangat berpotensi mengakibatkan konflik maritim di kawasan *overlapping* area yang kaya energi seperti di Laut Cina Timur dan Laut Cina Timur; 2) secara non-tradisional, persepsi ancaman Tiongkok juga berasal dari non-state actors yaitu pelaku-pelaku kejahatan maritim seperti perompak laut (*piracy*), *sea robbery*, potensi terorisme maritime.

Analisis

Alasan kajian dimulai dari karakter wilayah Asia Timur ini yaitu karena risiko-risiko keamanan energi terbesar yang timbul dari kasus Tiongkok berasal dari letak geografisnya yang cukup rentan di bagian pesisir laut. Selain itu, wilayah maritim Asia Timur Laut adalah halaman depan atau "pintu masuk" ke Tiongkok melalui SLOCs Asia Tenggara. Selain itu, di wilayah Tiongkok juga menghadapi persaingan-persaingan energi dengan negara-negara tetangganya

seperti Jepang, India, Korea Selatan yang turut tergantung pada pasokan energi global, khususnya minyak dan gas alam. Cina harus berbagi dengan negara-negara industri ini yang turut memiliki kebutuhan dan permintaan energi yang begitu tinggi.

Selain itu, kehadiran angkatan laut Amerika Serikat sebagai pengawal utama yang menguasai arus lalu lintas dan keselamatan Sea Lanes of Communications (SLOCs) wilayah yang merupakan negara saingan dan lawan tradisional Tiongkok. Singkatnya, wilayah ini adalah daerah yang kurang aman (*less secure*) bagi Cina memperoleh persediaan tenaganya bahkan dapat memicu sumber konflik baru di perbatasan maritim yang kaya energi dan dapat memicu gesekan di sepanjang SLOCs kawasan Asia Timur ini. Selain itu, SLOCs di Asia Tenggara adalah lokasi *hot spot* utama terjadinya kecelakaan laut yang melibatkan kapal-kapal tanker minyak dunia sehingga minyak yang tumpah ke lautan yang merusak kehidupan alam laut seperti data yang ditemukan oleh organisasi WWF.

Dengan arti lain, kaitan keamanan energi dan maritim di Asia Timur ini terlihat dari daerah-daerah maritim yang tidak aman bagi Tiongkok karena rentan dengan berbagai risiko tabrakan energi yang melibatkan tetangga Tiongkok sehingga dikhawatirkan menjadi sumber konflik baru yang berdimensi energi. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Laut Cina Timur (East China Sea), Laut Cina Selatan (South China Sea), dan Selat Malaka (Malacca Strait). Area-area ini adalah penyumbang terbesar kekhawatiran Tiongkok bahkan regional seperti faktor geo-politik dan strategis di kawasan ini sebagai jalur utama pelayaran kapal-kapal minyak Cina seperti dalam gambar 2.

Singkatnya, karakter keamanan energi Tiongkok yang bertautan dengan keamanan maritim di Asia Timur seperti terlihat pada peta di atas, sangat menantang Cina dan dikhawatirkan dapat menjadi sumber konflik baru di wilayah ini. Berikut dibahas peristiwa atau situasi-situasi tertentu yang melibatkan kepentingan dan keamanan energi Tiongkok di wilayah tersebut yang cukup memberi argumen mengapa daerah tersebut sangat bernilai dan strategis bagi Tiongkok sehingga negara tersebut sangat peduli masalah energi di daerah ini.

Gambar 2. Peta Rute Maritim Kapal Minyak di Asia Timur



Sumber: www.energy-daily.com

Potensi Konflik Energi Tiongkok-Jepang di Laut Cina Timur

Laut Cina Timur (East China Sea) adalah area paling strategis bagi Tiongkok, namun di situ pulalah ada potensi konflik energi yaitu perselisihan energi maritim dengan Jepang. Ketegangan kedua negara ini senantiasa mendapat perhatian banyak utamanya perselisihan mereka dekat perbatasan maritim yang kaya minyak dan gas.

Dimulai sejak dua dekade terakhir, Tiongkok telah mengalihkan pencarian sumber persediaan energinya dari sumur-sumur minyak di daratan (*onshore*) ke wilayah pesisir luar (*offshore*) di dekat Laut Cina Timur. Sumur-sumur minyak dan gas di daratan yang berusia antara 40 sampai 50 tahun berada di daerah di Daqing, Jilin, Shengli yang dekat dengan perbatasan Tiongkok-Rusia dan Korea - namun lading minyak ini telah anjlok produksinya. Sumur-sumur yang berusia lebih muda pula adalah di Tarim Basin, wilayah Xianjiang, yang dekat perbatasan Tiongkok-negara Asia Tengah. Sementara sumur-sumur yang terbaru ditemukan dalam 10 tahun terakhir ini adalah di daerah pesisir Laut Cina Timur (dan Laut Cina Selatan). Area-area tersebut dapat dilihat dalam peta berikut ini:

Gambar 3. Lokasi Sumur Minyak China di Wilayah Pesisir Luar Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan



Sumber: Cina OGP (1999 Vol. 2)

Yang paling menarik minat dan perhatian pemerintah Tiongkok adalah persediaan dan pasokan minyak dan gas yang terpercaya terletak di wilayah maritim Kepulauan Senkaku (Jepang), yang disebut juga Diaoyudao (oleh Tiongkok) atau Diaoyutai (oleh Taiwan). Perbedaan nama atau istilah tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi hak milik kepulauan di wilayah perbatasan negara-negara Asia Timur Laut tersebut. Kasus perebutan sumber energi di perbatasan maritim itu membuktikan apa yang dikenal sebagai "*energy nationalism*" karena ia telah bercampur dengan masalah kedaulatan negara.

Secara geografis, Kepulauan Diaoyutai tersebut terletak 120 mil sebelah timur laut Taiwan, 200 mil sebelah timur Tiongkok Daratan, dan 200 mil dari bagian tenggara Okinawa, Jepang (Reinhard Drifte 2003: 49). Kawasan ini diduga secara kuat memiliki sumber hidrokarbon, perikanan dan deposit logam dasar laut (*sea-floor deposits of metals*) dan cadangan minyak yang signifikan. Kandungan gas alam sebesar 200 miliar meter kubik yang terpancang di Laut Cina Timur membuat area tersebut diperebutkan sampai berpotensi menjadi "*sea of confrontation*" (Sean Curtin 2005).

Konflik perbatasan di daerah tersebutnya sebenarnya sudah lama ketika Jepang memulai penerokaannya mencahari sumber-sumber minyak dan gas di sana. Tiongkok pula pernah protes keras terhadap perjanjian bilateral Jepang-Korea Selatan yang disebut dengan "The Agreement concerning Joint Development of the Southern Part of the Continental Shelf Adjacent". Perjanjian ini ditandatangani pada Januari 1974 tentang eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Timur.

Namun, tabrakan laut ini lebih sering terjadi karena belakangan ini Tiongkok makin agresif mengeksplorasi dan membangun fasilitas pengeboran sumur-sumur minyak dan gas yang dekat dengan wilayah perbatasan maritim yang disengketakan tersebut. Tiongkok mengklaim wilayah laut itu sebagai bagian dalam EEZ (Exclusive Economic Zone) Tiongkok sejak ia menjadi bagian dari pembaharuan alam Tiongkok di landasan kontinennya (continental shelf). Kegiatan dan sikap agresif Tiongkok di area tersebut di antaranya adalah:

Pertama, masuknya kapal-kapal penelitian (*research vessels*) Tiongkok, kapal ikan dan kapal militer angkatan laut Tiongkok (PLAN) beberapa kali ke dalam zona EEZ yang turut diklaim Jepang. Namun, Tiongkok dan Jepang tidak setuju mengenai garis pembatasan (*demarcation*) atas beberapa kawasan eksplorasi gas alam yang tersebar di dasar laut tersebut. *Kedua*, Tiongkok telah pula melakukan langkah-langkah pengeboran (*drilling*) minyak dan gas di wilayah perbatasan sejak awal tahun 1980-an dan telah membuktikan niatnya itu untuk mengembangkannya secara mandiri sepanjang kemampuan teknologinya memungkinkannya melakukan itu (Reinhard Drifte 2003: 57-59). Salah satu insiden pernah terjadi di Chuanxiao Gas Fields, yang terletak dekat garis perbatasan Cina. Pada bulan April 2005, terjadi peristiwa pemicu konflik di wilayah tersebut ketika perusahaan minyak Tiongkok, CNOOC, mengumumkan akan memulai kegiatan produksinya di lapangan gas tersebut. Tahun itu juga, Tiongkok telah mengerahkan kapal-kapal perangnya (*warships*) memantau dekat ladang gas tersebut sehingga menimbulkan protes dari rakyat Jepang karena berjarak hanya lima kilometer dari garis perbatasan yang diklaim Jepang. Meskipun Tiongkok akhirnya menawarkan eksplorasi bersama di area tersebut namun Jepang menolak menerima dan meminta Tiongkok untuk membekukan rencananya untuk memompa gas di sana.

Penolakan, ketegangan, dan kemarahan Jepang tersebut sebab Jepang pun mengakui wilayah tersebut adalah hak miliknya. Bagi Jepang, wilayah laut tersebut adalah EEZ miliknya berdasarkan letak medan tersebut berada pada 200 mil (370 km) dari pantai Jepang. Garis perbatasan yang tumpah tindih tersebut dapat dilihat pada gambar 4.

Sebagai balasannya, pemerintah Jepang juga mulai memberikan hak pengeboran (*drilling rights*) kepada perusahaannya, Teikoku Oil Corporation, di daerah-daerah bencana (B.Kong 2005:51). Ketegangan tetap muncul setelah dua putaran pembicaraan bilateral gagal menyelesaikan sengketa tersebut. Saling bantah membantah seperti ini terus berlanjut dan semakin membuktikan persaingan kedua negara akan sumber-sumber energi di sekitar wilayah maritim tersebut.

Gambar 4. Lokasi Ladang Gas Tiongkok di perbatasan yang tumpang tindih di Laut Cina Timur



Sumber: www.rigzone.com

Perseteruan energi Tiongkok-Jepang juga dekat dengan daerah perairan lainnya yang cukup penting, yaitu Selat Taiwan (Taiwan Strait) yang letaknya dekat Laut Cina Timur. Tiongkok menganggap Taiwan adalah bagian kawasan yang mencoba untuk memisahkan diri. Justru itu, Tiongkok menganggap Jepang dan Amerika Serikat turut campur membantu Taiwan memisahkan diri secara permanen dari Tiongkok dengan memberi bantuan militer seperti kapal-kapal perang dan pesawat tempur. Jepang sendiri berharap agar Taiwan dan Tiongkok terpisah sebab jika tidak, Jepang mengkhawatirkan Tiongkok menjadikan Taiwan sebagai pangkalan sub-marine yang dapat memperluas kontrol maritimnya di Laut Cina Timur. Artinya, jalur Selat Taiwan ini juga salah satu isu yang menambah risiko perselisihan Tiongkok-Jepang di Laut China Timur.

Aktivitas energi Tiongkok di perbatasan itu direspon serius oleh Jepang. Media konservatif Jepang, misalnya, memperlihatkan persepsinya terhadap aktivitas energi Tiongkok. Seperti koran Jepang, Yaori Shimbung (18 April

2005), mengistilahkan wilayah sengketa maritim tersebut sebagai *sea of confrontation* atau *sea of conflict*. Malahan karena lonjakan peningkatan penggunaan energi Tiongkok, banyak kalangan di Jepang yang menjuluki Tiongkok sebagai negara " *the resource-gorging country* ". Dalam kasus energi, Jepang lebih berpengalaman menghadapi krisis dan tidak seagresif Tiongkok sebab masalah kekurangan energi bukanlah isu yang baru bagi Jepang. Rakyat dan pemerintah telah terbiasa dengan kondisi alam yang sangat miskin sumber-sumber energi penting, terutama minyak dan gas. Padahal negara itu sangat membutuhkannya untuk menjalankan roda industri dan pembangunan ekonominya yang sangat cepat dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Jepang tidak memiliki satupun sumur minyak utama (*oil fields*), karena itu ia sangat tergantung kepada berbagai sumber eksternal untuk memenuhi seluruh kebutuhan minyaknya (Ken Koyama 1997)

Beberapa kali protes rakyat Jepang ditujukan kepada aktivitas energi Tiongkok, mereka sangat serius memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi di area tersebut sehingga sering menimbulkan perasaan anti-Tiongkok di Jepang maupun sebaliknya, anti-Jepang di Tiongkok. Artinya, perselisihan energi yang sengit tersebut telah menimbulkan sentimen nasionalisme di kalangan rakyatnya dan menjadi hambatan politik pemerintah. Justru itu muncul istilah yang sering digunakan para ahli tentang hal ini (William T. Tow (2007: 163, Herberg 2004, Herberg 2005) yaitu "*energy nationalism*" - yaitu unsur keamanan energi tumpang tindih dengan faktor nasionalisme dan kedaulatan di wilayah perbatasan yang disengketakan antara negara di wilayah ini.

Potensi Konflik Energi China-ASEAN di Laut Cina Selatan

Daerah yang turut menyediakan sumber-sumber pasokan energi bagi Tiongkok tetapi kurang aman keadaannya adalah kawasan Laut Cina Selatan (South China Sea), terutama di Kepulauan Sparty (Spartly Islands). Area ini juga memiliki isu klaim tumpang tindih (*overlapping claims*) antara Tiongkok, Taiwan, dan negara-negara ASEAN yaitu Brunai Darussalam, Malaysia, Philippines, dan Vietnam. Meskipun ada hukum laut UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) namun ianya memiliki problem lain, seperti dikatakan oleh Bateman (2011: 4):

"... The roots causes of which lie in basic conflicts of interest between countries on Law of the Sea issues, and the" built-in "ambiguity of UNCLOS in several of its key regimes. Also, disagreement can arise over what contitutes costumary practice with particular regimes. This ia evident, for example, with the use of territorial sea straight baselines by regional countries. "

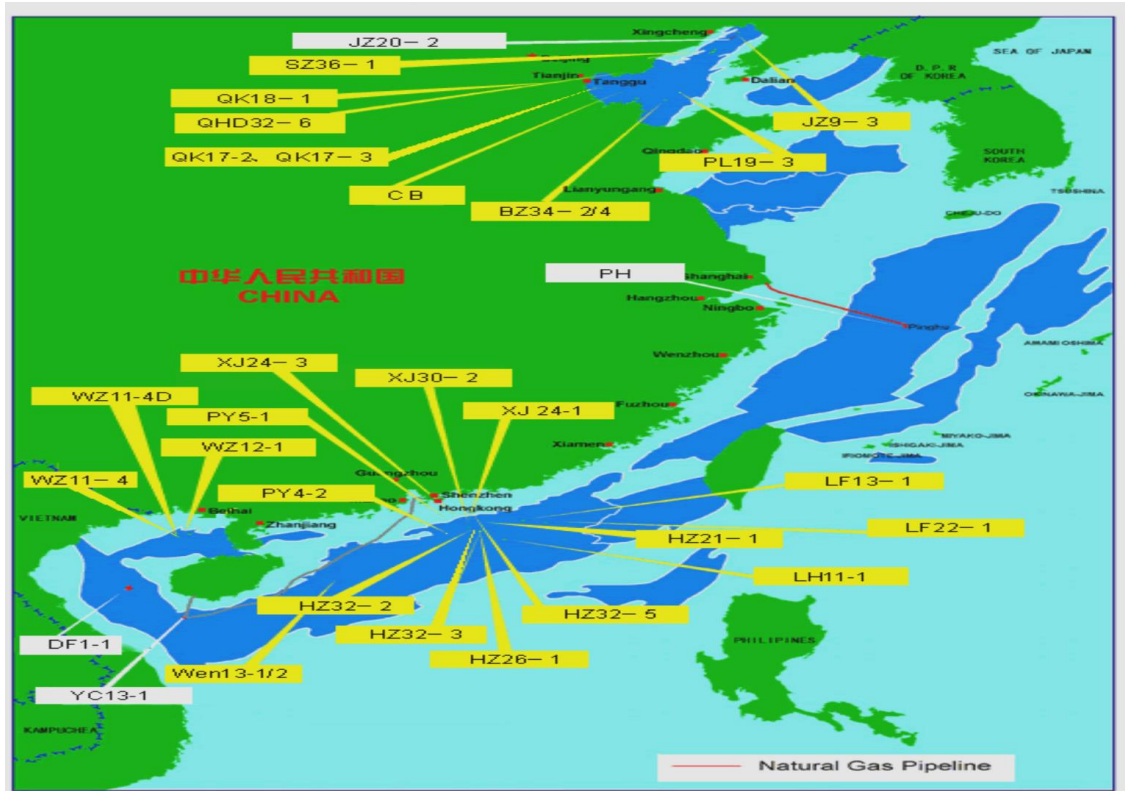
Dua kali kasus tabrakan bersenjata pernah terjadi di kepulauan Laut China Selatan, yaitu tahun 1973 dan 1988 antara Tiongkok dengan Vietnam. Bahkan sejak dekade 1990-an, ketegangan Tiongkok dan tetangganya semakin sering terjadi. Pertama kalinya Tiongkok menyajikan tuntutan atas wilayah sengketa dengan tetangga-tetangganya dimulai sejak awal tahun 1995, hanya beberapa bulan setelah ia berubah menjadi negara pengimpor minyak (Paul French dan Sam Chambers (2010: 74). Karena itu, Tiongkok makin agresif dan terus menjadi pemain kunci di Laut Cina Selatan dan mulai terlibat perselisihan dengan pemain utama lainnya, seperti Vietnam.

Kasus berikut terjadi tahun 1995, terjadi ketegangan antara Tiongkok-Phillippina atas area Mischief Reef yang banyak disoroti oleh media massa. Demikian pula dengan penangkapan pelaut dan kapal-kapal ikan sering terjadi dan mereka saling menyalahkan karena menginvasi wilayah sengketa tersebut. Juni 2002, Tiongkok melaksanakan latihan perang di Laut Cina Selatan lalu ditentang oleh Vietnam, namun Tiongkok berpendapat bahwa aktivitas mereka di lautan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Terakhir tahun 2010, Tiongkok terlibat perselisihan dengan Vietnam dan keterlibatan Amerika Serikat. Tak ada yang meragukan bahwa sengketa antara Tiongkok dengan negara-negara tersebut adalah karena kandungan energi yang berlimpah di daerah itu, sebab minyak dan gas diyakini sebagai faktor utama dalam sengketa di Kepulauan Sparty (Keyuan Zou 2009: 140).

Delapan sedimen sumur minyak (basin) ditemukan di wilayah Sparty yaitu sepanjang 410,000 kilometer persegi dan 260.000 kilometer persegi antaranya diklaim secara sepihak oleh Tiongkok dalam area *U-shape line*. Zou menyebutkan bahwa dalam delapan sedimen basin tersebut berisi 34.97 milyar ton persediaan minyak, termasuk yang telah ditemukan yaitu sebanyak 1.182 miliar ton minyak dan 8.000 miliar meter kubik gas alam. Masih banyak lagi jumlah hidrat gas (juga dikenal sebagai flammable ice) di Laut Cina Selatan. Kekayaan energi tersebut membuat Laut Cina Selatan sering disebut juga dengan julukan sebagai "*a second Persian Gulf*" (Keyuan Zhou 2009: 140).

Perusahaan-perusahaan nasional minyak dan gas Tiongkok sudah aktif dan agresif melakukan eksplorasi di daerah-daerah maritim dekat perairan Laut Cina Selatan. Produksi minyak di daerah ini lingkungan 2,5 juta barrels perhari dan telah meningkat secara berangsur-angsur beberapa tahun lampau tepat setelah Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam meningkatkan produksinya (Hongyi Lai 2009: 38).

Gambar 5. Lokasi Eksplorasi Perusahaan Energi Cina di Laut Cina Selatan

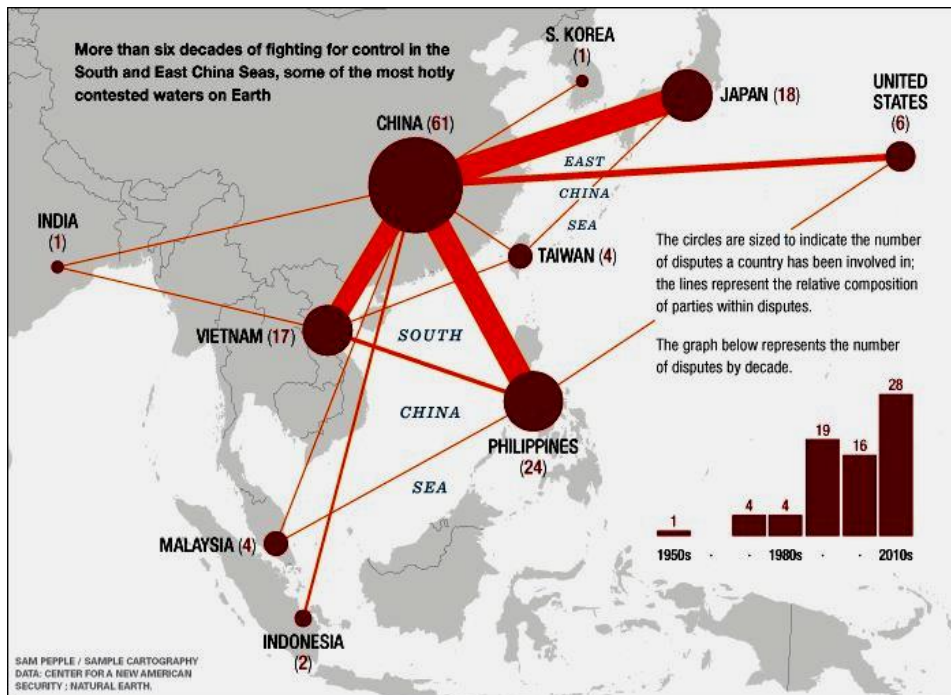


Sumber: CNOOC website (dalam B.Kong 2005: 36)

Akibat eksplorasi perusahaan-perusahaan energi Tiongkok di perairan Laut Cina Selatan telah memperkeruh hubungannya dengan negara-negara ASEAN di daerah kepulauan Spratly (Spartly Islands), terutama dengan Vietnam, Philippines, Malaysia, dan Brunei. Situasi inilah yang dikuatiri dapat menimbulkan konflik energi, seperti dikatakan oleh Robert Manning (2000b: 86), "the logic of energy security is based on an interrelationship of resource scarcity and territorial dispute that leads to conflicts".

Jumlah sengketa Tiongkok dengan tetangga-tetangganya di Asia Timur menunjukkan peningkatan dari dekade 1950-an (1 sengketa), meningkat pada dekade 1980-an (4 sengketa), meningkat lagi dekade 2000-an (28 sengketa) (gambar 6). Sementara keterlibatan armada laut Amerika Serikat yang mengontrol SLOCs daerah ini menambah pemain di antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Demikian pula dengan keterlibatan India, Jepang yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat membuat pihak-pihak yang berkepentingan di area tersebut bertambah banyak. Jumlah sengketa dan jalinan antara pihak-pihak tersebut dapat dilihat dalam skema di bawah ini. Jelas terlihat bahwa Tiongkok memiliki sengketa maritim terbanyak di Laut Cina Selatan dibandingkan negara-negara lainnya.

Gambar 6. Peta Konflik di Laut China Timur dan Selatan.



Sumber: <http://www.foreignaffairs.com>

Risiko Gangguan Maritim Non-State

Risiko lainnya, ketidakselamatan energi yang dihadapi Tiongkok tidak berhenti sampai masalah perselisihan energi di perbatasan yang dipersengketakan saja, melainkan terus menerus menjadi masalah pengiriman pasokan energi Tiongkok yang mayoritas dikirim dengan kapal-kapal tanker yang membawa pasokan minyak atau gas impor Tiongkok dari Timur Tengah dan Afrika melalui sandi SLOCs Asia Timur ini. Masalah baru pula dari isu pengiriman ini yaitu menjadi rawan menerima gangguan selama aliran pasokan tersebut dikirim dengan kapal-kapal tanki asing. Pembatasan dapat dikenakan oleh negara-negara Timur Tengah dan Afrika mayoritas dibawa berlayar melalui SLOCs dan beberapa choke points Selat Melaka yang berbahaya.

Pada masa kini, pelaku-pelaku kejahatan di laut didukung dengan senjata api yang modern dan kerap menggunakan kekerasan, serta menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan mereka bergerak dengan tanggap dan cepat. Perompakan dilakukan dengan cara mencuri isi kapal, mencuri kapal, membunuh awak kapal, menyandera dan menculik awak kapal untuk mendapatkan uang tebusan dari para pemilik kapal. Aksi-aksi ini dilakukan tidak hanya pada saat kapal melintas tetapi juga terhadap kapal yang

sedang berlabuh. Taktik yang mereka lakukan dengan cara menyerang kapal dengan naik ke dek kapal di malam hari pada saat awak kapal sedang lengah atau istirahat. Yang diserang bukan hanya kapal-kapal bermuatan kecil malah sasaran utama adalah kapal-kapal tanker yang memuat bahan-bahan energy vital seperti LNG, gas, dan minyak (lihat gambar 7). Modus demikianlah yang telah menimbulkan rasa teror terhadap para pemilik kapal baik maupun awak-awak kapal tersebut.

Gambar 7. Serangan terhadap Kapal-kapal Tanker



Pandangan Tiongkok mengenai posisi strategis Selat Malaka cukup signifikan. Paradigm baru keamanan Tiongkok melihat lautan sebagai sumber ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Tiongkok mengalami kekhawatiran akan ancaman kelancaran arus *supply* dari negara-negara tersebut sehingga dapat mengganggu ketergantungan Tiongkok terhadap bekalannya minyak mereka. Kapal-kapal tanker Tiongkok selalu melintasi Selat Malaka dalam perjalanan mereka membawa minyak dari Timur Tengah. Karena itu dalam kepentingan ekonomi Tiongkok, selat ini harus terjamin keamanannya dari segala ancaman yang bisa menghalanginya kelancaran bekalannya energi menuju daratan Tiongkok. Kekhawatiran ini menjadi salah satu alasan mengapa Tiongkok semakin memperkuat kekuatan maritimnya dengan memodernisasi angkatan lautnya (PLA Navy) untuk melindungi wilayah perairannya sendiri serta untuk menjamin kelancaran pelayaran kapal-kapal yang mengangkut keperluan energinya dari gangguan perompak dan dari pemanfaatan laut untuk tujuan kejahatan lainnya (Peter Howarth, 2006:46).

Selain itu, Cina juga menghadapi "Malacca Dilemma" - istilah ini dijelaskan Hu Jintao pada akhir tahun 2003 – dalam memutuskan strategi maritim mana yang tepat ditempuh oleh Cina menanggulangi kerawanan maritim di Selat Malaka tersebut dengan mempertimbangkan respon dan implikasinya terhadap negara-negara tetangga lainnya di Selat Malaka (Marc Lanteigne, 2008). Terdapat keinginan untuk menerapkan strategi unilateralisme untuk menjamin keamanan di Selat Malaka secara sendiri namun strategi demikian dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi keras dari negara-negara sekitar Selat Malaka.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal: *pertama*, perilaku Tiongkok yang semakin agresif meningkatkan kemampuan maritime dengan melakukan modernisasi angkatan lautnya (PLA-Navy) bukan hanya semata-mata menjaga kedaulatan maritim, melainkan juga untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya membawa sendiri bekalannya dengan kapal-kapal tankernya sendiri (tidak ingin hanya menyewa saja dari negara lain); *kedua*, didasari keinginan kuat Tiongkok untuk mengamankan jalur laut yang rawan gangguan maritim dengan cara mengontrol sendiri kapal-kapal tanker miliknya dengan kapal-kapal perangnya sendiri; *ketiga*, motif ekonomi politik berada dibalik sikap agresifnya di lautan sekaligus memiliki motif militer untuk bersiap-siap jika keadaannya mengharuskannya untuk berperang demi mengamankan bekalannya energi dan rutennya; *keempat*, hasil yang dapat diperoleh Tiongkok dari memastikan keamanan energi (didukung kekuatan maritimnya) dapat meningkatkan statusnya sebagai negara superpower (economic power and sea power yang dikembangkan secara serentak); *kelima*, isu keamanan energi bagi Tiongkok berarti pula menjaga keamanan maritimnya. Dalam konteks Asia Timur dan bagi Tiongkok, keamanan maritim dan energi merupakan bagian yang tidak terpisahkan bahkan menjadi paradigm keamanan baru dalam pertimbangan strateginya. Energi dan maritim juga merupakan dua perkara penting yang menjembatani kepentingan tradisional Tiongkok dengan kepentingan non-tradisionalnya.

Dengan kata lain, isu keamanan energi bagi Tiongkok tidak hanya berkaitan dengan sumber-sumber energi semata-mata, melainkan juga terkait erat dengan masalah politik, kedaulatan negara, nasionalisme, dan keamanan maritim, ekonomi-politik, strategis militer, maupun menurut sejarah hubungan China dengan negara-negara ini. Ini adalah realitas betapa permasalahan energi China di Asia Timur terlampaui rumit dan telah tumpang tindih dengan dimensi-

dimensi lain sehingga menjadi isu penting yang patut diperhitungkan dalam pertimbangan keamanan China.

Referensi

- Bateman, Sam. 2011. Solving "wicked problems" of maritime security. Dalam *Contemporary Southeast Asia* 33(1): 1-28.
- Bouger, Christian. 2015. *What is maritime security?* Marine Policy, Volume 53, March 2015, Pages 159–164. Elsevier.
- Buzan, Barry, Waever, O. and de Wilde, J. 1998. *Security: a new framework for analysis*, Boulder, USA dan London: Lynne Rienner.
- Cornel, Phillip E. 2009. Energy security as national security: defining problems ahead of solutions. Thursday, 19 February 2009 15:12.
- Curtin, J Sean. 2005. *Sea of confrontation: Japan-China territorial and gas dispute intensifies*. <http://japanfocus.org>. [1 Desember 2009]. 10:12 pm.
- Drifte, Reinhard. 2003. *Japan's security relations with China since 1989: from balancing to bandwagoning?*. London: RoutledgeCurzon.
- Herberg, Mikal. 2011. *China's energy rise and the future of U.S.-China energy relations*. <http://newamerica.net/publications/policy>. [4 Mac 2012] 3:55 am
- Hongyi, Lai. 2009. Introduction: understanding and enhancing energy and maritime security in Asia. Dlm. Hongyi Lai (ed.). *Asia energy security: the maritime dimension*. New York: Palgrave Macmillan.
- Howarth, Peter. 2006. *China's Rising Sea Power The PLA Navy's Submarine Challenge*. London; Routledge.
- Ken, Koyama. 2003. Energy security in Northeast Asia. Paper dibentangkan dalam *international workshop on "cooperative measures in Northeast Asian petroleum sector: focusing on Asian premium issues*. September 6, 2003. The palace hotel, Seoul. www.ieej.com. [15 April 2009] 2:16 am.
- Khan, Haider A. 2007. *China's energy security with special reference to Japan*. <http://ssrn.com/abstract=990185>. [25 Ogos 2009] 11:00 pm.
- Kong, B. 2005. *An anatomy of China's energy insecurity and its strategies*. USA: Pacific Northwest national laboratory
- Lanteigne, Marc. 2008, China's Maritime Security and the "Malacca Dilemma", dalam *Asian Security* 4 (2), London: Routledge.
- Manning, Robert A. 2000. *The Asia energy factors*. St. Martin's Press.
- McCaskill, John R. 2007. *Energy security: the nexus of national security and energy policy*. <http://www.dtic.mil>. [3 Mac 2012] 2:39 am.

- Rosner, Kevin. 2010. [Closing the gap between energy & national security policy](#). Journal of energy security. <http://www.ensec.org>. [2 Februari 2012] 2:21 am.
- Tow, William . 2007. Strategic dimension of energy competition in Asia. Dlm. Michael Wesley (ed.). *Energy security in Asia*. US & Canada: Routledge
- Uni W.Sagena. 2009. *Memahami keamanan tradisional dan non-tradisional di Selat Malaka: Isu-isu dan interaksi antar aktornya*. Jurnal Dependensia, terbitan Prodi HI UNMUL
- Uni W.Sagena, M.Hasyim Mustamin. 2016. *Understanding energy security concept: approach, perception, and the relevance of East Kalimantan Province*. Paper dipresentasikan pada Borneo Research Council Conference dalam rangka Dies Natalis Universitas Mulawarman.
- Yaori Shimbung. 18 April 2005.
- Website:
- <http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm>
- <http://www.foreignaffairs.com>
- <http://www.energy-daily.com>
- <http://www.rigzone.com>

Panel 2: Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional



Isu-Isu Kontemporer Asia Tenggara: Sebuah Analisa Awal

Ali Maksum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

amaksum@gmail.com

Abstract

This article discusses four contemporary issues in Southeast Asia which significantly became public attention. The four issues will be highlighted are Suu Kyi's victory in the Myanmar 2015 general election, Southeast Asian haze, Tanjung Datu disputes, and the Indonesia-Malaysia football “clash”. The aim of the discussion is to understand these particular issues as well as to reveal preliminary conclusion at the end of each section. This qualitative analysis depicts that the dynamics of Southeast Asia were vary with some characteristics. Nevertheless, regionalism which generally perceived as one of the Southeast Asian value is practically uneasy to be implemented. Eventually, under the spirit of “ASEAN Way” they are continually to conduct bilateralism policy on the diplomatic affairs among them.

Keywords:

Southeast Asia, regionalism, ASEAN, Indonesia.

Pengantar

Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat dinamis. Sehingga menarik banyak pakar dan peneliti untuk selalu melihat lebih jauh tentang konstelasi politik di Asia Tenggara (Singh, 2007). Demikian halnya dengan empat isu yang menjadi fokus dalam penulisan ini juga menjadi salah satu perhatian masyarakat Asia Tenggara. Politik Myanmar, ASEAN, Indonesia dan Malaysia adalah antara bidang-bidang kajian yang sangat penting untuk diketahui. Dengan melihat empat peristiwa kontemporer tersebut bisa dilihat bagaimana corak dan dinamika politik ASEAN khususnya yang terus menghadapi berbagai tantangan terutama pasca Perang Dingin. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya dibahas empat peristiwa tersebut.

Kemenangan Aung San Suu Kyi dan Politik Regional

Pemilu Myanmar digelar pada 8 November 2015. Hasilnya partai oposisi Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi, Partai *National League for Democracy*

(NLD) menang mutlak hampir 86% dari total suara yang terdaftar. Kemenangan tersebut menjadikan NDL mempunyai 235 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan 135 di Dewan Nasional (DPD) (Myanmar Times, 13 November 2015). Sebelumnya, hasil penghitungan cepat (*quick count*) juga menunjukkan NLD selalu unggul hampir 47% parlemen (*BBC News*, 11 November 2015). Artinya, partai NLD hampir bisa menyapu bersih seluruh total suara pemilih sebesar 90%.

Dengan kemenangan ini tentu saja muncul harapan akan perbaikan demokrasi dan pembangunan di Myanmar setelah sekian lama di bawah rezim militer. Namun dengan kemenangan tersebut tampaknya belum menjamin Aung San Suu Kyi bakal mulus memerintah Myanmar karena politik dalam negeri Myanmar sendiri yang cukup kompleks.

Sebagaimana Orde Baru di Indonesia, rezim militer Myanmar juga terbentuk melalui kudeta militer. Junta militer di Myanmar berkuasa mulai tahun 1962 pasca terjadinya kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Sejak itulah, Myanmar diperintah dengan tangan besi sebelum akhirnya "berakhir" pada tahun 2011 yang didahului referendum tahun 2008 dan serangkaian peristiwa politik lain termasuk pecahnya konflik horizontal antara pihak militer dan kelompok-kelompok separatis.

Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang, Presiden Myanmar Thein Sein tetap mengucapkan selamat kepada Suu Kyi yang memimpin dalam perolehan suara. Bagaimanapun, secara *de facto* militer Myanmar masih berkuasa dengan berbagai intrik agar dinilai telah melakukan proses "demokrasi."

Berkaca pada pemilu sebelumnya, kemenangan Suu Kyi telah dikebiri oleh rezim penguasa. Misalnya pada pemilu 1990, NLD secara meyakinkan menang pemilu dan mengalahkan partai berkuasa *Union Solidarity and Development Party (USDP)*. Namun justru dengan kemenangan tersebut memberangus karier politik Suu Kyi. Pasalnya penguasa menjatuhkan hukuman tahanan rumah kepada peraih Peraih Nobel Perdamaian 1991 tersebut.

Suu Kyi yang sudah berumur tujuh puluh tahun lebih, mempunyai tugas berat untuk melanjutkan proses demokrasi politik di Myanmar. Antara isu penting yang menjadi sorotan kepemimpinan Suu Kyi adalah terkait persoalan Rohingya. Bahkan pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama mengecam habis-habisan terkait posisi Suu Kyi dalam kasus Rohingya. Dalai Lama menilai Suu Kyi cenderung diam dan tidak melakukan apa-apa terkait diskriminasi atas etnis Rohingnya oleh komunitas Buddha Myanmar.

Walaupun politik Myanmar penuh dengan spekulasi. Perubahan konstelasi politik di Myanmar tampaknya akan terus berlangsung. Faktanya, Suu Kyi gagal menjadi Presiden Myanmar dan militer lebih memilih Htin Kyaw yang seorang sipil menjadi Presiden Myanmar ke 9. Namun ada hal yang menarik untuk dianalisis.

Pertama, kemenangan sulit dan bersusah-payah Suu Kyi dan Partai NLD menjadi bukti bahwa "campur tangan asing" pada akhirnya masih mendominasi perpolitikan di kawasan ini tidak terkecuali Myanmar. Artinya, tanpa bantuan asing (AS) Suu Kyi sulit untuk menang dalam Pemilu kali ini.

Kedua, kemenangan Suu Kyi belum aman untuk merebut kursi kepemimpinan Myanmar. Karena selain militer masih berkuasa, pencalonan Suu Kyi bertentangan dengan Pasal 59F Konstitusi Myanmar tentang larangan anggota keluarga berkewarganegaraan ganda. Karena dua putra Suu Kyi kini berpaspor Inggris.

Ketiga, perubahan politik Myanmar tidak lepas dari hasil kunjungan Sekretaris Negara AS Hillary Clinton ke Yangon tahun 2011 untuk membawa "perubahan." Hasilnya, citra Myanmar naik dan terpilih sebagai Ketua ASEAN 2014. Selain itu, militer Myanmar yang awalnya pro-Tiongkok secara mengejutkan juga berusaha membersihkan dari pengaruh anasir-anasir komunis Tiongkok melalui tindakan represif atas pemberontak Kokang di Myanmar utara berbatasan langsung dengan Tiongkok.

Artinya, konstelasi dan perubahan politik di Myanmar tidak lepas dari kepentingan global yang memang menginginkan Myanmar berubah. Dalam konteks hubungan internasional, jelas melalui pemilu Myanmar, AS ingin melakukan sesuatu untuk mengimbangi kekuatan (*balance of power*) terhadap Tiongkok di Asia Tenggara yang semakin mengkhawatirkan AS.

Kabut Asap dan Kompleksitas ASEAN

Bagi negara-negara ASEAN yang bertetangga langsung dan sangat dekat dengan Indonesia terutama Singapura dan Malaysia, sangat merasakan dampak bencana kabut asap. Dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pembukaan lahan baru dan masuknya investasi asing sektor perkebunan kelapa sawit, praktik pembakaran lahan sudah menjadi kebiasaan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, beberapa perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam aksi pembakaran lahan adalah dimiliki investor dari Singapura dan Malaysia. Trend keterlibatan investor kedua negara dalam insiden pembakaran lahan nampaknya sudah ada sejak bencana asap tahun-tahun sebelumnya.

Bencana asap di Indonesia ternyata juga telah menjadi masalah tahunan di Malaysia dan Singapura. Imbasnya jelas, aktivitas kehidupan masyarakat setempat terganggu dan masalah kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah kedua negara. Di Malaysia misalnya, Kementerian Pendidikan terpaksa menutup sekolah-sekolah di lima negara bagian di kawasan Semenanjung Malaysia seperti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Pemerintah Singapura juga melakukan langkah serupa dengan menutup kurang lebih 2.045 sekolah. Bahkan panitia ajang balapan Singapore Grand Prix F1 sempat was-was dengan isu asap.

Walaupun hasil investigasi menunjukkan keterlibatan oknum dari negara tersebut, namun perspektif mereka dalam kasus kabut asap tetap sama. Mereka berpandangan bahwa "Indonesia adalah pengeksport asap." Perspektif demikian tentu sangat tidak tepat dan sangat mengganggu hubungan bilateral yang sudah lama berjalan baik. Apalagi, sebagai sesama anggota ASEAN Indonesia, Malaysia dan Singapura harus menjaga stabilitas politik kawasan. Tanpa disadari, bencana kabut asap juga telah mereduksi solidaritas ASEAN disaat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015.

Sejak awal, visi akhir pemberlakuan MEA tidak lain adalah mengintegrasikan ekonomi kawasan demi kesejahteraan bersama. Visi tersebut tidak lain merujuk kepada kesuksesan Uni Eropa (EU) yang telah dirintis sejak tahun 1957 melalui perjanjian Roma (*Treaty of Rome*). Namun menurut Dewi Fortuna Anwar (1996) ASEAN selama ini lebih terkenal dengan pencapaiannya yang cemerlang dalam bidang politik dan diplomasi dibandingkan bidang ekonomi. Namun pembentukan ASEAN yang dilatarbelakangi oleh konstelasi Perang Dingin dan untuk menjaga stabilitas politik kawasan pasca Konfrontasi juga dipuji karena keberhasilannya dalam membina perdamaian global.

Hal tersebut menunjukkan kapabilitas organisasi ASEAN belum mampu setanding dengan EU. Struktur EU yang dibina di atas landasan kesadaran saling ketergantungan yang tinggi (*interdependence*) antar anggotanya, memiliki kewenangan dan kebijakan untuk melakukan langkah-langkah strategis melampaui batas negara. Sebab, struktur organisasi EU didukung oleh institusi supra-nasional yaitu Pengadilan Uni Eropa (*European Court*) dan Parlemen Uni Eropa (*European Parliament*). Sehingga jika terjadi kasus-kasus yang merugikan kepentingan anggota, EU memiliki wewenang dan kuasa untuk menindak negara-negara tersebut.

Dalam konteks kasus kabut asap, sikap negara anggota ASEAN terutama Malaysia dan Singapura cenderung paradok dengan visi organisasi menjelang MEA 2015 yang membutuhkan kesadaran tinggi untuk bekerjasama.

Perubahan tersebut antaranya ditentukan oleh beberapa faktor yang sangat erat kaitannya dengan geopolitik Asia Tenggara.

Pertama, dalam pelaksanaannya ASEAN seringkali masih berhadapan dengan benturan dan ketidakcocokan antar anggotanya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan hubungan bilateral. Walaupun dikatakan ASEAN sebagai organisasi yang multilateral namun faktanya hampir kesemua anggota ASEAN bertindak secara bilateral. Menurut Amitav Acharya (1998) negara-negara ASEAN lebih memilih menggunakan jalur diplomasi bilateral dibandingkan multilateral yaitu ASEAN. Dalam istilah lain tersebut sebagai *"thinking multilaterally but acting bilaterally"* atau berfikir secara multilateral tetapi tindakannya bilateral.

Kedua, relevansi ASEAN sebagai organisasi Asia Tenggara sedikit banyak mengalami degradasi pasca Perang Dingin. Karena, tidak bisa dipungkiri, berdirinya ASEAN tidak terlepas dari desakan negara-negara adi kuasa terutama AS untuk membendung pengaruh komunis di Indo-China waktu itu. Selain itu, ASEAN yang dinahkodadi Indonesia juga bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan pasca Konfrontasi 1963-1965. Artinya, ASEAN masih melakukan proses konsensus yang tidak mudah di tengah ancaman global yang semakin beragam. Era Perang Dingin, cukup membedakan komunis atau kapitalis. Pasca Perang Dingin, isu keamanan internasional semakin kompleks dan melibatkan banyak aktor intelektual non-negara, mulai dari isu terorisme hingga ancaman kerusakan lingkungan termasuk kabut asap.

Ketiga, situasi internasional demikian berdampak kepada pola dan arah kebijakan negara-negara ASEAN. Walaupun banyak pengamat seringkali mengangkat tema-tema regionalisme dan urgensi kepentingan ASEAN, namun pada faktanya ASEAN tidak memainkan peran signifikan ketika terjadi berbagai kasus. Misalnya Malaysia dan Indonesia (Ambalat), Malaysia dan Singapura (Pulau Pedra Branca), Malaysia dan Filipina (kepemilikan Laut Sulu, Sabah) termasuk dalam bencana kabut asap (Indonesia, Malaysia dan Singapura).

Keempat, melihat kepada respon Singapura dan Malaysia dalam kasus kabut asap, nampaknya Indonesia, Singapura dan Malaysia perlu merekonstruksi ulang hubungan multilateral mereka. Ketiga negara harus mampu mengendalikan keadaan dengan melakukan kerjasama secara intensif dan komprehensif. Selain itu, mutlak dibutuhkan sebuah konsensus bersama dalam mengatasi isu kabut asap. Namun dalam kasus kabut asap juga memunculkan diskursus baru tentang definisi ancaman dalam hubungan internasional yang ternyata bisa dimobilisasi oleh siapa saja misalnya masyarakat dan media melalui berbagai saluran yang sangat bebas. Fenomena kabut asap juga bisa menjadi parameter sejauhmana sensitivitas negara-

negara tersebut terhadap sebuah masalah yang melibatkan hajat hidup banyak pihak. Bahkan menurut Alexander Wendt (1992) dalam "Anarchy is what states make of it" terjadinya bencana kabut asap bisa dijadikan cara untuk melihat sikap dan kebijakan sebenarnya negara-negara tersebut terhadap Indonesia.

Politisasi Sengketa Tanjung Datu RI-Malaysia

Kasus sengketa perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Tanjung Datu, Kalimantan Barat kembali menambah deretan panjang permasalahan hubungan diplomatik dua negara serumpun. Bagaimanapun, sebagai bangsa yang cinta damai sudah sepatutnya mendudukan masalah ini dengan pikiran jernih. Apalagi sengketa tersebut selalu berada pada situasi ekonomi dan politik Indonesia tidak stabil atau mungkin mendekati kacau akibat ulah para elit politik.

Temuan komisi I DPR-RI terkait "isu" pergeseran dan pembangunan beberapa insfastruktur oleh pemerintah Malaysia di wilayah perbatasan, jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama jelas terkait bagaimana upaya pemerintah menjaga perbatasan. Kedua, terkait upaya pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Namun, jika diteliti lebih lanjut ternyata sudah terjawab dengan adanya peran TNI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang bertanggung jawab mengelola perbatasan. Nah, jika ternyata upaya tersebut telah dilakukan mengapa isu pergeseran tapal batas wilayah Tanjung Datu yang disinyalir sudah berlangsung lima tahun baru terkuak?

Jika mundur sejenak kebelakang, masalah perbatasan RI-Malaysia sebenarnya sudah tertampung dalam forum *Joint Border Committee* (JBC). Menurut pernyataan mantan Menlu Hassan Wirajuda kalau terjadi pergeseran, dengan mudah dikembalikan tanpa sengketa. Hal ini sudah tentu telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan tidak perlu diragukan lagi kinerjanya. Namun berkali-kali juga hubungan RI-Malaysia tersandung masalah perbatasan seperti di Tanjung Datu atau sengketa di Kepulauan Riau terkait insiden tangkap-menangkap antara satgas DKP RI dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM).

Politisasi mungkin perspektif yang cukup rasional dalam melihat sengketa RI-Malaysia. Setidaknya pendapat ini berdasarkan beberapa alasan.

Pertama, carut-marutnya politik dalam negeri sehingga isu sengketa RI-Malaysia terkesan untuk "mengalihkan" isu politik di Jakarta. Hal ini juga terjadi pada kasus Ambalat di mana menurut penelitian Clive Schofield dari Universitas Wollongong dan Ian Storey dari Universitas Hawaii, kasus Ambalat

sengaja di *blow-up* untuk menutupi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM waktu itu.

Kedua, tesis Schofield dan Storey tentang Ambakat mungkin juga tepat di implementasikan dalam sengketa Tanjung Datu. Betapa tidak, masyarakat dengan mata kepala sendiri melihat carut-marutnya situasi politik di Jakarta. Mulai isu *reshuffle*, terorisme, buruknya persiapan Sea Games dan panasnya kasus korupsi seperti di Kemenakertras, Sesmenpora hingga menyeret konflik KPK-DPR terkait keterlibatan Badan Anggaran DPR (BANGGAR). Sehingga sangat rasional apabila sengketa Tanjung Datu masuk dalam skenario politik tersebut.

Ketiga, pemerintah dengan segala kekuatan infrastruktur politiknya dinilai kurang “memberdayakan” mandat yang telah diberikan rakyat melalui Pemilu 2009 sebanyak 60% kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia, mantan Presiden Suharto pernah mengatakan, mengapa SBY tidak bisa menggunakan mandatnya yang tidak saya dapatkan sewaktu menjadi presiden? Pernyataan ini mungkin ada benarnya melihat semakin rumitnya permasalahan bangsa yang tak kunjung usai hingga menyeret isu-isu sensitif RI-Malaysia yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan damai seperti ketika era Presiden Suharto.

Pemerintah patut mencermati saran PBB melalui UNDP bahwa semua negara sudah waktunya fokus kepada pembangunan manusia dibanding melulu mengurus batas wilayah kedaulatannya dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebebasan berpolitik dalam rangka menuju kesejahteraan ekonomi. Sehingga, rakyat yang sebenarnya pemegang penuh kedaulatan tidak termarginalkan dan diperalat oleh “penumpang gelap” elit politik dengan dalih “nasionalisme buta”/ “Chauvinisme”.

Akhirnya, terpulang kepada “kecerdasan” elit politik dalam mengelola isu-isu yang sedang berkembang untuk membangun bangsa dan bukan untuk mengacaukan suasana. Rakyat sudah bosan dengan tingkah para elit politik. Nasionalisme itu penting, tetapi lebih penting lagi rakyat hidup aman, tenteram dan sejahtera.

Sepak Bola dan *Duel El Clasico* “ Melayu”

Menjelang laga Indonesia vs Malaysia dalam lanjutan babak penyisihan Grup B Piala AFF 2012 bisa dipastikan memanas luar dalam. Sehingga “*Duel El Clasico*” atau laga klasik Indonesia vs Malaysia memang pantas diberikan kepada laga tersebut. Kita masih ingat dua tahun lalu ketika final Piala AFF 2010, duel kedua negara berlangsung memanas. Bahkan timnas Malaysia harus dikawal dengan panser Polda Metro Jaya pasca final pertama di Bukit

Jalil, yang diwarnai dengan "diteror" sinar laser. Begitu juga dengan duel kali ini, dipastikan memanas pasca isu pemukulan terhadap salah seorang suporter Timnas Indonesia. Apalagi, isu ini semakin panas setelah beredar video di Youtube yang diduga melecehkan Indonesia dengan kata-kata kotor.

Kalau diteliti lebih jauh, sentimen pertandingan Indonesia vs Malaysia di ajang sepak bola sangat mirip dengan duel Polandia vs Russia pada kejuaraan Euro 2012 di Polandia dan Ukraina. Suporter kedua pihak terlibat baku hantam hingga cukup merepotkan aparat kepolisian Kota Warsawa. Penyebabnya cuma satu, "rakyat" Polandia trauma dengan kebangisan tentara Rusia yang pernah menyerbu Polandia. Begitu juga dengan duel antara Iran vs AS dalam ajang Piala Dunia 1998 di Perancis yang akhirnya dimenangkan Iran 2-1 juga penuh dengan sentimen politik. Di beberapa kawasan sentimen politik juga terus mewarnai di setiap pertandingan sepak bola antara Korea Utara-Korea Selatan, India-Pakistan, Jepang-Korea Selatan, China-Jepang dan lain-lain. Sehingga, demikian banyaknya duel-duel dalam pertandingan sepak bola yang membawa-bawa sentimen politik ke arena stadion.

Melihat perjalanan kedua Timnas di Piala AFF 2012, kedua negara sebenarnya senasib. Indonesia misalnya, dilanda konflik internal PSSI vs KPSI. Belum lagi masalah pendanaan yang kembang kempis pasca penolakan Kemenpora karena dinilai bukan Timnas "terbaik." Dengan istilah lain, keberangkatan Indonesia ke Malaysia benar-benar seperti Bonek Persebaya yang terkenal nekat. Begitu juga Malaysia, sebenarnya dilanda konflik internal pasca hasil buruk Timnas Malaysia dalam beberapa laga uji coba menjelang bergulirnya Piala AFF. Selain itu pelatih K. Rajagobal posisinya sedang terancam dipecat. Bahkan, pasca kekalahan 0-3 dari Singapura, Timnas Malaysia menjadi bulan-bulanan media setempat. Namun melihat laga terakhir, kedua tim terlihat "bangkit" setelah Indonesia mematahkan kutukan 14 tahun tidak pernah menang dengan Singapura. Sedangkan Malaysia berhasil menjawab keraguan publik Malaysia dengan menghajar Laos 4-1.

Namun, ada yang menarik juga dalam pertandingan Indonesia vs Malaysia. Pada waktu pertandingan di gelar di Bukit Jalil, suporter Indonesia terlihat cukup banyak dan bahkan "berani." Sebaliknya pada waktu pertandingan di gelar di Gelora Bung Karno, suporter Malaysia sangat sedikit. Mengapa demikian? Jawabannya cukup jelas, para suporter tersebut mayoritas adalah warga Indonesia yang mencari nafkah di Malaysia atau TKI, walau ada juga yang berprofesi lain namun minoritas. Apabila suporter kedua negara berfikir waras dan jernih, sentimen dan ketegangan dalam duel "el clasico" tidak perlu, menguras energi dan sia-sia belaka. Mengapa? Karena beberapa sebab.

Pertama suporter Malaysia lupa bahwa, berkat “hasil karya” para suporter Indonesia bangunan Stadion Bukit Jalil tegak berdiri kokoh. Begitu juga dengan menara kebanggaan warga Malaysia *Petronas Twin Towers* adalah hasil “bantuan” suporter Indonesia. Sehingga tidak ada alasan untuk “mengutuk” suporter Indonesia. Demikian halnya dengan suporter Indonesia, harus ingat bahwa kenyamanan bekerja di Malaysia adalah sebuah peluang berharga yang diberikan suporter Malaysia. Bahkan, coba cek satu per satu telepon seluler mereka, pasti ada lagunya Wali Band, Rosa dan Dewa 19. Jadi tidak ada alasan untuk “menghujat” suporter Malaysia.

Kedua, secara ekonomi kedua negara saling tergantung. Ingat, warga Indonesia saat ini yang “berkarya” di Malaysia mencapai 2 juta orang. Jumlah ini kurang lebih 10% dari total penduduk Malaysia. Artinya, setiap 10 orang Malaysia terdapat 1 orang Indonesia. Belum lagi jika dilihat dari segi *remittance* atau aliran uang ke dalam negeri mencapai 30 % Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebaliknya Malaysia sangat diuntungkan dengan iklim investasi yang menjanjikan di Indonesia. Ingat, di Indonesia ada beberapa perusahaan Malaysia dari CIMB Bank hingga Air Asia. Belum lagi banyak “ikatan keluarga” antara warga Indonesia dan Malaysia. Apabila kedua negara bersitegang, tidak bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian yang akan dialami.

Ketiga, “ketegangan” suporter kedua negara nyaris tidak ada gunanya. Karena, ketegangan ini hanya menguntungkan pihak ketiga yang berkeinginan memecah belah kedua bangsa serumpun. Kita tidak bisa membayangkan jika konflik terbuka terjadi, tentara Malaysia akan berteriak “Allohu Akbar!” dan tentara Indonesia juga sama “Allohu Akbar!” Nah, ironis bukan? Sedangkan beberapa minggu yang lalu, kedua negara sama-sama “mengutuk” kekejaman Israel. Namun, selang beberapa hari “persatuan” itu tampaknya pudar menjelang duel *el clasico* “Melayu” dan diwarnai beberapa insiden yang cukup menyedihkan.

Tampaknya kedua negara perlu menyegarkan kembali nilai-nilai sportifitas, kesopanan dan toleransi sebagai sesama “orang timur.” Bahkan sejatinya hal itu sebagai peringatan bagi kita khususnya kepada para pengurus PSSI dan KPSI yang tengah berseteru serta untuk meredakan beberapa konflik antar elit dan konflik horizontal. Betapa indahnya rakyat Malaysia yang tergila-gila dengan sinetron “bawang merah bawang putih.” Bahkan gara-gara sinetron tersebut, sidang kabinet ditunda beberapa saat. Begitu juga, betapa indahnya anak-anak Indonesia menirukan gaya dialek Melayu setelah menonton serial kartun Upin-Ipin. Hal ini jelas menunjukkan

bahwa kedua bangsa serumpun tidak bisa dipisahkan. Ibarat pepatah Melayu "sedangkan lidah lagi tergigit, apalagi suami istri, apalagi tetangga."

Kesimpulan

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa dinamika politik Asia Tenggara sangat beragam dan tentunya memiliki arti strategis bagi kekuatan luar terutama Amerika Serikat. Walaupun ASEAN dan budaya Asia Tenggara yang mengutamakan "kekeluargaan" dalam kerangka "ASEAN Way", namun dalam pelaksanaannya negara-negara anggota seolah berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya ASEAN kurang kompak dalam menghadapi isu-isu bersama misalnya bencana asap. Negara-negara ASEAN lebih mengutamakan kerja sama bilateral dengan negara yang bersangkutan. Tidak dipungkiri antara negara ASEAN juga menyimpan masalah tersendiri misalnya Indonesia-Malaysia, Malaysia-Singapura, Myanmar-Thailand sehingga jalur bilateral lebih dipilih dibanding multilateral via ASEAN. Artinya isu-isu kontemporer di Asia Tenggara menunjukkan kecenderungan bahwa regionalisme ASEAN sedang menghadapi tantangan besar terutama terkait isu Laut China Selatan dan isu-isu lain yang memerlukan kerja sama dan kekompakan negara ASEAN.

Referensi

- Anwar, Dewi Fortuna. (1996). Regionalism versus Globalism: A Southeast Asian Perspective. *Korean Journal of Defense Analysis*, 8(2), 29-52.
- Acharya, Amitav. (1998). Culture, security, multilateralism: The 'ASEAN way' and regional order. *Contemporary Security Policy*, 19(1), 55-84.
- BBC News, 11 November 2015.
- Myanmar Times, 13 November 2015. NLD wins absolute majority in parliament.
- Schofield, Clive and Ian Storey (2005). Energy Security and Southeast Asia: The Impact on Maritime Boundary and Territorial Disputes. *Harvard Asia Quarterly* 9(4). dalam <http://www.asiaquarterly.com/content/view/160/> .
- Singh, D. (2007). Political and Security Dynamics of South and Southeast Asia. ISEAS–Yusof Ishak Institute. Retrieved August 24, 2016, from Project MUSE database.
- Wendt, Alexander (1992). Anarchy is What States Make of It. *International Organization* (46), 391-425.

Pendekatan Teori Sosiologi Sejarah (*Historical Sociology*) Dalam Penelitian Studi Hubungan Internasional

Rizal A.Hidayat

Universitas Al Azhar

rizal.aditya@uai.ac.id

Abstrak:

Tulisan ini mencoba mengeksplorasi penggunaan pendekatan salah satu teori alternatif dalam Hubungan Internasional, yaitu Sosiologi Sejarah (*Historical Sociology*). Sebagai sebuah pendekatan teori, *sosiologi sejarah* saat ini masih belum begitu banyak digunakan dalam ragam analisis fenomena politik internasional kontemporer. Dan tentunya terkait dengan berbagai isu strategis yang menjadi mainstream penelitian studi hubungan internasional dewasa ini. Hal ini disebabkan oleh dua argumentasi mendasar yang diajukan dalam tulisan ini, yaitu sosiologi sejarah masih menduduki "The Second Class Theory", dan para *proponent* pendekatan teori ini memiliki latar belakang keilmuan yang bertolak belakang dari studi hubungan internasional, namun memiliki kontribusi kuat dalam memberikan nuansa alternatif mengenai perilaku aktor, tatanan internasional, unit analisis maupun level analisis.

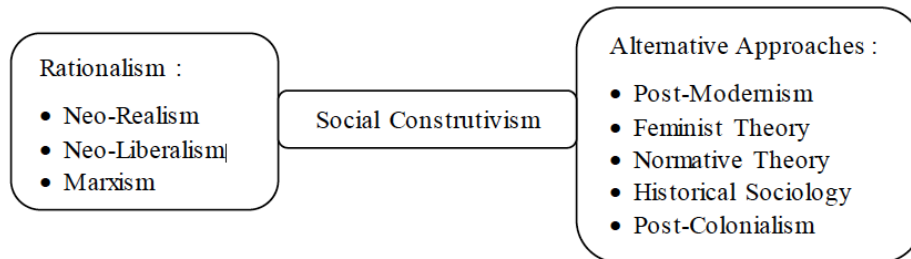
Kata Kunci:

sosiologi sejarah, naratif, studi kasus, moralitas, budaya dan emosi

Pendahuluan

Penggunaan pendekatan teori alternatif dalam Hubungan Internasional berkembang sebagai reaksi umpan balik terhadap hegemoni pendekatan teori rasionalisme sepanjang konflik ideologis dalam perang dingin, dan berakhir sejalan dengan perkembangan globalisasi yang merubah pergeseran isu strategis, unit analisis dan level analisis dalam studi hubungan internasional. Dari pergeseran isu strategis, unit analisis dan level analisis dalam setiap penelitian hubungan internasional, maka perkembangan teori-teori hubungan internasional tidak hanya menjadikan relasi antar aktor yang terlibat lebih dari sekedar relasi bilateral, namun menjadikan teori-teori alternatif dalam hubungan

internasional lebih kompleks dan bervariasi dalam menganalisis setiap fenomena politik internasional, di samping menjadikan teori-teori hubungan internasional tersebut sebagai teori politik internasional dalam sebuah sistem dunia/internasional yang anarkis dikarenakan satu sama lain berusaha saling mendominasi untuk tujuan dan kepentingan tertentu (kekuasaan) dalam ranah politik internasional itu sendiri. Output perkembangan globalisasi teoritis dalam studi hubungan internasional di atas dapat digambarkan dalam skema perkembangan sebagai berikut (Baylis and Smith, 2000: 275):



Dengan demikian *positioning* teori-teori alternatif di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh Baylis dan Smith berusaha menempatkan dua kategori perdebatan teoritis dengan satu teori sebagai jembatan gap dalam meminimalisir kedua pendekatan teori yang dipakai. Dalam skema di atas, teori-teori alternatif yang dimaksud terdiri dari Teori Post-Modernisme, Feminisme, Normatif, Sosiologi historis, post-kolonialisme.

Pendekatan teori *historical sociology* dalam teori alternatif pada umumnya dalam hubungan internasional merupakan jawaban atas kritik terhadap teori-teori hubungan internasional yang terlebih dahulu *establish* sebagai dampak kemunculan perang-perang dunia yang terjadi sampai dengan selesainya konflik ideologi pada era perang dingin, dimana menempatkan *state centris/ government system* sebagai unit analisa utama dalam setiap kajian hubungan internasional.

Secara kronologis, perkembangan pendekatan teori *historical sociology* memasuki abad ke-21 melengkapi pendekatan teori alternatif yang berangkat dari dua *mainstream* alur utama dalam studi hubungan internasional:

- 1) Alur utama *pertama* studi HI terdiri atas tiga sub alur dimana yang pertama, hubungan internasional dipelajari melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang jadi berita utama dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian. Asumsinya adalah bahwa kesalahpahaman dan konflik antar bangsa bisa dihindari kalau peristiwa-peristiwa penting diikuti dan ditelaah secara seksama. Kedua, hubungan internasional waktu itu dipelajari melalui studi tentang organisasi internasional. Ini didasarkan pada

asumsi bahwa konflik bisa dikelola dan diselesaikan kalau dapat diciptakan suatu aturan main atau tertib hukum yang didukung oleh perangkat organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa. Orientasi pendekatan ini adalah reformis. Ketiga, Studi hubungan internasional pada masa itu adalah model analisa yang menekankan ekonomi internasional. Dengan berdasar pemikiran Marxis-Leninis, aliran analisa ini menggunakan variabel-variabel ekonomi untuk menjelaskan terjadinya konflik dan perang internasional di masa sebelumnya. Di Amerika Serikat berkembang analisis yang menyebutkan bahwa yang mendorong negeri itu terlibat dalam perang dunia I adalah kepentingan kaum usahawan, industrialis dan penanam modal besar (Mas'oed, 1994:15). Secara ontologis, alur pertama menunjukkan bahwa pada awalnya hubungan internasional berfokus pada segala hal yang menjadi pokok inti permasalahan yang terjadi dalam Perang Dunia I. Konstruksi pengetahuan yang dibangun masih berkuat pada studi hubungan ineternasional yang bermuara pada konflik antar negara-bangsa, atau studi konflik yang menjelaskan persoalan perang dan damai dalam sistem internasional. Hubungan konfliktual antar negara, organisasi internasional yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan faktor peran aktor ekonomi politik domestik yang melibatkan negaranya ke dalam perang dengan negara lain masih mendominasi obyek pengetahuan yang dikonstruksi dalam studi hubungan internasional dalam ini berupa politik antar negara-bangsa dalam konteks hubungan konfliktual terbuka (perang).

- 2) *Alur utama kedua* dalam studi hubungan internasional secara ontologis merefleksikan perubahan studi hubungan internasional setelah perang dunia kedua yang melahirkan paradigma realis yang lebih positifis dalam mengkontruksi perilaku negara dalam arena kekuasaan internasional. Paradigma realis, yang mendominasi teorisasi hubungan internasional selama kurang lebih dua dasawarsa sesudah perang dunia II, merupakan wujud dari upaya mengembangkan pendekatan teoritis yang sekaligus bisa mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku negara dalam hubungan internasional dan bisa memberikan kerangka preskriptif bagi para negarawan dalam membuat keputusan. Dengan demikian, dua alur utama dalam obyek studi hubungan internasional diatas masih berada pada aktor negara. Perilaku negara sangat erat kaitannya dengan perjuangannya dalam rangka memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam arena hubungan antar negara-bangsa pada tatanan struktur politik internasional.
- 3) *Alur utama ketiga* menunjukkan perubahan obyek studi yang tidak hanya berlaku pada aktor negara dalam arena internasional, namun juga terjadi

pada aktor non negara dan masyarakat internasional. Globalisasi melahirkan aneka konstelasi politik global yang dominasinya tidak hanya dipengaruhi oleh aktor negara, namun juga dipengaruhi oleh eksistensi aktor non negara dalam arena politik internasional. Globalisasi tidak hanya bicara persoalan perang dan damai secara utuh, namun juga mengenai studi kesinambungan dan perubahan aspek-aspek lain di luar kuasa politik formal global. *Kedua*, studi politik global kontemporer menunjukkan berkurangnya arti penting kontrol wilayah. *Ketiga*, studi politik global hari ini mengungkapkan betapa rapuhnya perbatasan negara-bangsa dan betapa mudahnya orang, ide dan barang dapat berpindah melintasi negara-bangsa (Mansbach dan Rafferty, 2012:VII).

Bagaimana mendeskripsikan pendekatan teori sosiologi historis dalam konteks penelitian ilmiah dalam studi Hubungan Internasional? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, maka tentunya harus dipahami dulu mengenai *apakah sosiologi historis itu sendiri?*, kemudian *keterkaitan pendekatan teori sosiologi historis itu sendiri terhadap elemen-elemen kunci karakteristik penelitian ilmiah, berikut ragam isu strategis yang relevan diterapkan pada strategi penelitian tersebut?* Yang pertama mengenai pengertian pendekatan sosiologi historis itu sendiri. Pendekatan teori sosiologi historis tidak dapat dipahami sedemikian rupa, jika kita tidak mengawalinya dari pengertian hakiki sosiologi historis yang berangkat dari contoh-contoh teori yang masuk dalam pendekatan teori ini. *Kedua*, terkait dengan aplikasinya dalam penelitian ilmiah yang inheren dengan pertimbangan filsafat ilmu (pertimbangan ontologis, epistemologis dan aksiologis).

Pembahasan

Pendekatan Teori *Historical Sociology*

Pertanyaan pertama terkait dengan beberapa beberapa ide/gagasan maupun asumsi dasar. *Kedua*, para teoritis dan hasil karya mereka. Dan *ketiga*, isu-isu konseptual yang meliputinya.

Mengenai ragam ide/gagasan dan berbagai asumsi mendasar dari pendekatan teori *Historical Sociology* yang dibangun adalah :

- 1) struktur sosial adalah hasil dari serangkaian proses sosial yang kompleks (di dalam suatu negara-bangsa)
- 2) Negara-bangsa dihasilkan dari berbagai interaksi kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja di dalam negara (domestic) dan masyarakat internasional
- 3) Modernisasi dihasilkan dari terjadinya fenomena industrialisasi, demokratisasi, urbanisasi dan individualisasi

Kedua, mengenai teoritisi berdasarkan sudut pandang ketiga ide atau asumsi dasar di atas, maka salah satu teoritisi yang mempengaruhi perkembangan sosiologi sejarah dalam hubungan internasional melalui karya monumentalnya adalah Michael Mann (1988) dengan *IEMP Model Of Power Organization* (IEMP: Ideologi, ekonomi, militer dan politik). Di luar Mann sebenarnya paling tidak terdapat dua *proponent* kontributor dari perkembangan *Historical Sociology*. Keduanya adalah James Tilly (*Nation-State*) dan Emmanuel Wallerstein (*World System*).

Penulis mengambil pemikiran Mann sebagai salah satu contoh teoritisi *Historical Sociology* di atas didasarkan pada penilaian dasar penulis sendiri, bahwa pada dasarnya perilaku domestik negara dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang mendominasinya. Masing-masing kekuatan sosial memiliki struktur sosial tersendiri yang terbentuk melalui serangkaian proses sosial yang menjadikan terwujudnya negara-bangsa yang bersangkutan. Masing-masing kekuatan dengan demikian akan bekerja di dalam negara tersebut dan dalam masyarakat internasional sehingga modernisasi pada negara-bangsa yang bersangkutan tidak hanya dipengaruhi faktor domestik akan tetapi juga faktor internasional melalui relasinya dengan kekuatan-kekuatan sosial internasional.

Kekuatan-kekuatan sosial yang dimaksud merupakan refleksi kepemilikan *power* yang dari Inti pemikiran Mann diorganisasikan melalui elemen-elemen kekuasaan berupa ideologi, ekonomi, militer dan politik. Sehingga menurut Mann (Baylis and Smith, 2005:277): "*The struggle to control IEMP power organizations provides the central drama of social development. Societies are structured primarily by entwined IEMP power*".¹ Jadi Mann menegaskan bahwa perkembangan sosial di dalam suatu negara-bangsa merupakan pusat aktivitas perjuangan negara dalam rangka mengontrol pengorganisasian kekuasaan ideologi, ekonomi, militer dan politik. Kontrol terhadap kekuasaan ideologi, ekonomi, militer dan politik didasarkan pada tiga aspek landasan kekuasaan (*three aspects of power*):

- *Distributive power and collective power*
- *Power may be extensive or intensive*
- *Power may be authoritative or diffused*

Distribusi *power* maupun *collective power*, atau kemampuan *power* untuk

¹ Mann mengembangkan pemikirannya mengenai Model IEMP Power ini dalam tulisannya dengan judul : *The Sources of Social Power, Vol.2 : The Rise of Classes and Nations-States, 1760-1914, Cambridge, Cambridge University Press. 1993*. Pemikiran awal IEMP Power oleh Mann ditulis dalam Vol.1 pada tahun 1988 dengan judul : *The Sources of Social Power, Vol.1 : A History of Power From The Beginning To 1760 AD, Cambridge, Cambridge University Press. 1988*. 5

diimplementasikan secara ekstensif maupun justru intensif, apakah secara otoritatif atau justru sebaliknya bagi Mann merupakan pengejawantahan sumber-sumber kekuasaan yang memobilisasi perkembangan sosial suatu negara-bangsa digerakkan oleh sumber-sumber kekuasaan berupa ideologi, ekonomi, militer dan politik. Dengan demikian keempat sumber kekuasaan di atas dalam memobilisasi perkembangan sosial negara-bangsa oleh Mann dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) *Ideological power derives from the human need to find ultimate meaning in life, to share norms and values, and to participate in aesthetic and ritual practices. Control over ideology bring general social power.*
- 2) *Economic power derives from the need to extrac, transform, distribute and consume the resources of nature. It is precularly powerful because it combines intensive cooperation with extensive circuits of distribution, exchange and consumption. This provide a stable blend of intensive and extensive power and normally of authoritative and diffused power.*
- 3) *Military power is the social organization of physical force. It derives from the necessity of organized defence and the utility of aggression. Military power has both intensive and extensive aspects, and it can also organize people over large areas. Those who monopolize it can wield a degree of general social power.*
- 4) *Political power derives from the usefulness of territorial and centralized regulation. Political power means state power. It is essentially authoritative, commanded and willed from a centre.*

Dengan demikian pemikiran Mann sebenarnya menekankan pada perkembangan sosial masyarakat suatu negara-bangsa yang terbentuk dari hasil perjuangan atas kontrol ideologi, ekonomi, militer dan politik. Terbentuknya masyarakat dari negara-bangsa yang bersangkutan, terstruktur secara terikat dari interaksi kekuasaan antar kelas sosial yang terwujud dari basis ideologi, ekonomi, militer dan politik.

Kemudian karakteristik *ketiga* berisi kandungan isu-isu strategis yang ditekankan pada kajian pendekatan teori sosiologi historis. Beberapa isu strategis yang diangkat dalam pendekatan teori sosiologi historis merefleksikan empat faktor utama ketika pendekatan teori digunakan dalam penelitian hubungan internasional. Linklater dalam *Theories of International Relations: Historical Sosiology* (2009: h.140-148), membagi Keempat faktor utama kajian analisis isu strategis dalam pendekatan teori sosiologi historis adalah sebagai berikut :

- 1) *Power and production : development of material power and systems of production. The spread of industrial capitalism and the expansion of state power which includes its capacity to wage ever more destructive forms of warfare explain that development.*
- 2) *Power and Interdependence*
- 3) *System and society*
- 4) *Morality, culture and the emotions : the idea of structure suggest the brute realities of economic power and coercive capabilities that form major external constraints on human action*

Dengan demikian faktor *power* dan produksi; *power* dan interdependensi; sistem dan masyarakat; moralitas, budaya dan emosi seperti yang dimaksud oleh Mann dapat digerakkan oleh basis-basis kekuasaan yang bersumber dari ideologi, ekonomi, militer dan politik. Sejauh mana aspek-aspek *power* mampu memobilisasi salah satu dari keempat jenis isu strategis dalam pendekatan *historical sociology* yang ada tersebut di atas, tergantung dari seberapa besar *power* yang ada digunakan oleh kelompok-kelompok sosial yang mendominasi struktur sosial suatu negara-bangsa. Basis-basis kekuasaan masing-masing hidup dalam struktur sosial yang di dalamnya penuh dengan interaksi berbagai macam kelompok sosial dominan, yang dalam sistem politik domestik menjadi perilaku suatu negara-bangsa yang homogen atau heterogen terhadap hubungannya dalam politik internasional dan antar kawasan. Dalam hal ini, model IEMP Mann berguna memperdalam pemahaman kita mengenai negara itu sendiri, suatu langkah pertama dalam mengevaluasi suatu tingkat di mana kekuatan negara berubah di bawah pengaruh kekuatan globalisasi segala hal pada akhir abad 20 (Griffiths, 1999:242-243).

Pendekatan Teori *Historical Sociology* Dalam Penelitian Hubungan Internasional

Terkait dengan aplikasinya dalam penelitian ilmiah yang inheren dengan pertimbangan filsafat ilmu (pertimbangan ontologis, epistemologis dan aksiologis). Pendekatan teori sosiologi historis akan relevan jika digunakan ke dalam beberapa karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut²:

<i>Characteristic</i>	<i>Narrative Research</i>	<i>Grounded Theory</i>	<i>Case Study</i>
Focus	<i>Exploring the life of an individual</i>	<i>Developing a theory grounded in data from</i>	<i>Developing an in-depth description and</i>

² Di samping karakteristik penelitian *narrative*, *grounded research* dan *case study*, maka secara keseluruhan identifikasi Creswell ditambah dengan karakteristik penelitian fenomenologi dan Etnografi.

		<i>the field</i>	<i>analysis of a case or multiple cases</i>
Type of Problem Best Suited For Design	<i>Needing to tell stories of individual experiences</i>	<i>Grounding a theory in the views of participants</i>	<i>Providing an in-depth or understanding of a case or cases</i>
Discipline Background	<i>Drawing from the humanities including anthropology, literature, history, psychology and sociology</i>	<i>Drawing from sociology</i>	<i>Drawing from psychology, law, political science, medicine</i>
Unit Of Analysis	<i>Studying one or more individuals</i>	<i>Studying a process, action, or interaction involving many individuals</i>	<i>Studying an event, a program, an activity, more than one individual</i>
Data Collection Form	<i>Using primarily interview and documents</i>	<i>Using primarily interviews with 20-60 individuals</i>	<i>Using multiple sources, such as interview, observations, documents, artifacts</i>
Data Analysis Strategies	<i>Analyzing data for stories, "restorying" stories, developing themes, often using a chronology</i>	<i>Analyzing data through open coding, axial coding, selective coding</i>	<i>Analyzing data through description of the case and themes of the case as well as cross-case themes</i>
Written Report	<i>Developing a narrative about the stories of an individual's life</i>	<i>Generating a theory illustrated in a figure</i>	<i>Developing a detailed analysis of one or more cases</i>

Sumber: Creswell, 2013:78-79

Kemudian dari ketiga karakteristik penelitian kualitatif di atas, level-level analisis yang dibutuhkan adalah sebagai berikut (Goldstein and Pavehouse, 2007:16) :

1. Level Global: *North-South Gap, World regions, European Imperialism, UN, Religious Fundamentalism, Terorism, World Environment, Technological Change, Information Revolution, Global Telecommunications, Worldwide Scientific and Bussines Communities*
2. Level Interstate: *Power, Balance of Power, Alliance Formation and Dissolutions, Wars, Treaties, Trade Agreements, IGOs, Diplomacy, Summit Meetings, Bargaining, Reciprocity*
3. Level Domestik: *Nationalism, Ethnic Conflict, Type of Government, Democracy, Dictatorship, Domestic Coalitions, Political Parties and*

Elections, Public Opinion, Gender, Economic Sectors and Industries, Military-Industrial Complex, Foreign Policy Bureaucracies

4. Level Individual: *Great Leaders, Crazy Leaders, Decision Making in Crisis, Psychology of Perception and Decision, Learning, Assassinations, Accidents of History, Citizen Participation (voting, rebelling, going to war, etc)*

Pendekatan Teori *Historical Sociology* dalam Demokratisasi Indonesia

Agar dapat dipahami secara komprehensif keterkaitan relasi antara pendekatan penelitian kualitatif dan level analisis, maka penulis akan mengeksplorasi relasi keduanya melalui nasionalisme dan konflik etnis di Indonesia. Relevansi korelasi keduanya begitu penting dengan menggunakan model IEMP Mann dalam hal ini. Eksplorasi akan menggunakan contoh hasil analisis melalui kerangka dasar pemikiran yang dikembangkan dari penelitian Jacques Bertrand mengenai Nasionalisme dan Konflik etnis di Indonesia.³

Meskipun Bertrand secara eksplisit tidak mengajukan model IEMP Mann dalam penelitiannya. Namun dalam hal ini secara implisit dapat dijelaskan bahwa kekuatan-kekuatan sosial yang terlibat dalam konflik etnis menjelang dan sesudah awal orde reformasi memiliki keterkaitan dengan mobilisasi kekuasaan, yang berangkat dari kepemilikan distribusi kekuasaan formal akan IEMP Mann ini dalam setiap perkembangan sejarah nasionalisme Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dengan demikian hal tersebut mempengaruhi peran Indonesia dalam arena politik regional/kawasan maupun global.

Bertrand menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakteristik studi kasus terkait dengan level domestik mengenai nasionalisme dan konflik (kekerasan) etnis. *Isu strategis yang diangkat terkait dengan demokrasi Indonesia yang selalu mengalami konflik identitas sosial setiap mengalami fase demokratisasi.* Penelitian dilakukan melalui kompilasi beberapa konflik yang terjadi di Indonesia yang menyertai transisi rezim orde baru menuju orde reformasi yang terdesentralistik. Bertrand menggambarkan transisi demokrasi tersebut sebagai titik-titik simpang kritis, model kebangsaan dan hubungan-hubungan etnis, berdasarkan pengalaman sejarah nasionalisme Indonesia.

Ketika demokratisasi berawal pada 1998, karenanya, ledakan kekerasan etnis merupakan akibat dari pilihan yang mengikat mengenai model kebangsaan dan lembaga-lembaga yang menentukan hubungan-hubungan

³ Dalam penelitian tersebut secara garis besar Bertrand menyimpulkan bahwa lengsernya rezim orba pada 1998 lebih didasarkan pada perpecahan di kalangan elite. Yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah perpecahan di kalangan elite distimulus oleh persoalan struktur fundamental sistem politik. Bertrand menyebutnya sebagai pengeroposan struktur fundamental rezim.

etnis. Krisis keuangan dan politik yang mengakibatkan jatuhnya Soeharto bukanlah sebab kekerasan etnis sesudahnya. Krisis tersebut memicu suatu periode reformasi kelembagaan, di mana debat-debat, demonstrasi dan bentuk-bentuk tindakan politik lainnya bertujuan tidak saja untuk mendefinisikan lembaga-lembaga demokrasi yang baru, tetapi juga untuk merundingkan klaim-klaim atas representasi etnis dan akses pada sumber-sumber daya (Bertrand, 2012:8).⁴ Bertrand menganalisis dua faktor yang menjelaskan aspek ledakan kekerasan etnis: *pertama*, ia menyajikan suatu keterangan mengenai bagaimana lembaga-lembaga membentuk dan memodifikasi identitas etnis melalui periode sejarah Indonesia yang berbeda-beda. Pilihan-pilihan mengikat atas lembaga yang menentukan hubungan di antara kelompok-kelompok etnis dan suku-bangsa dalam suatu negara membatasi kemungkinan-kemungkinan ditawarkan pada setiap periode reformasi kelembagaan. *Kedua*, pilihan-pilihan tadi juga dibatasi oleh konsep bangsa dan model-model kebangsaan baik yang implisit maupun eksplisit dalam lembaga-lembaga tersebut. Kedua aspek ledakan konflik (kekerasan) etnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: *pertama*, menekankan peran kalangan elite (negara, militer dan musuh-musuh politik mereka) di Jakarta, yang biasanya dikenal sebagai tesis "provokasi". *Kedua*, memfokuskan pada elite lokal dan perebutan sumber daya dan kekuasaan. *Ketiga*, memusatkan perhatian pada kekesalan-kekesalan daerah dan kaitannya kebijakan-kebijakan negara.

Menarik pemikiran awal yang ingin ditekankan oleh Bertrand dalam hal ini bahwa krisis keuangan dan politik yang memiliki dimensi internasional telah memicu keterlibatan mobilisasi atas ketiga faktor kelompok sosial dalam struktur ekonomi politik orde baru di atas yang menyumbang peran besar dalam ledakan transisi orde baru yang pada hakekatnya merupakan suatu periode titik-titik simpang kritis kelembagaan kebangsaan Indonesia dalam bentuk model kebangsaan dan hubungan-hubungan etnis.

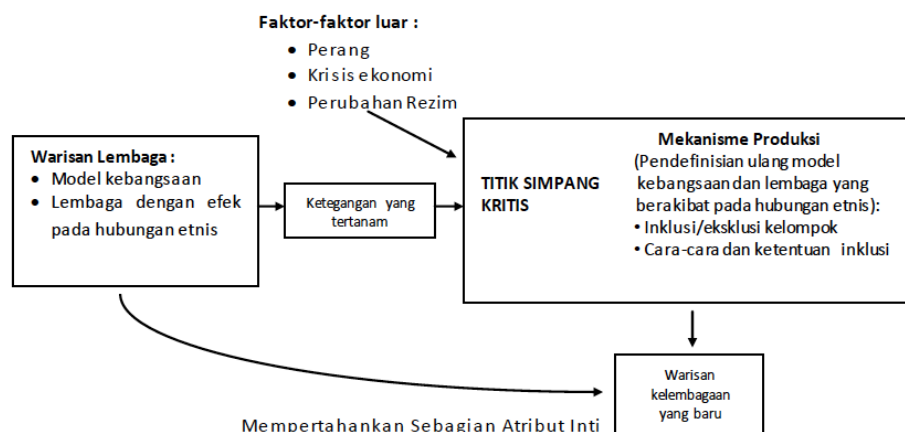
Titik-titik simpang kritis dipicu oleh faktor luar atau muncul dari ketegangan yang tercipta oleh bentuk-bentuk hubungan etnis yang terlembagakan sebelumnya. Pada titik-titik simpang ini, kekerasan cenderung terjadi ketika kecemasan muncul dan kelompok-kelompok etnis menjadi tidak yakin mengenai kompromi dan tatanan lembaga masa lalu. Kekerasan dan perundingan-perundingan selama periode tak menentu ini berkembang di sekitar prinsip pertama (inklusi/eksklusi) atau prinsip kedua (ketentuan-ketentuan inklusi) dari suatu model kebangsaan. Suatu pola baru hubungan etnis

⁴ Krisis keuangan dan politik memiliki dimensi ekonomi-politik internasional yang pada akhirnya memaksa Presiden Suharto menyetujui perjanjian keuangan dengan IMF dengan berbagai macam implikasi politik yang semakin membawa eskalasi pertarungan negara vs pasar dalam ekonomi politik Indonesia yang semakin menunjukkan arah neoliberalisme. Mengenai pertarungan negara vs pasar, Budi Winarno menggambarkannya sebagai kemenangan pasar dengan kapitalisme keuangan globalnya (Budi Winarno. 2009. *Pertarungan Negara vs Pasar*. Yogyakarta : MedPress)

dibangun pada titik simpang ini dan membuka jalan bagi periode baru hubungan-hubungan yang terlembagakan di antara kelompok-kelompok dan, biasanya, bersifat tidak begitu keras. Secara mendasar, lembaga-lembaga baru bisa mencerminkan suatu model kebangsaan yang baru, tetapi, yang lebih sering, ia merupakan ketentuan-ketentuan baru mengenai inklusi yang menjawab kekesalan-kekesalan dan ketegangan sebelumnya. Meski titik-titik simpang kritis bisa berakhir dengan hasil-hasil yang lebih stabil dan damai, ketika terurai ia meningkatkan kecenderungan konflik etnis. Batas-batas kompromi etnis menjadi kabur. Capaian-capaian dan perolehan, hak-hak istimewa, atau ketidakadilan masa lalu naik ke permukaan dengan adanya debat mengenai konfigurasi-konfigurasi lembaga baru. Ketika debat-debat berlangsung, model kebangsaan bisa menjadi terbuka juga untuk perundingan ulang-ulang, dan karenanya untuk pembongkaran kembali masalah-masalah fundamental menyangkut bangsa dan negara itu sendiri (Ibid : 39-40).

Bagan

Titik-Titik Simpang Kritis, Model Kebangsaan dan Hubungan-Hubungan Etnis



Sumber: Bertrand, 2012

Contoh penelitian yang dilakukan Bertrand dengan gambaran titik-titik simpang kritis di atas, sebenarnya menggambarkan eksistensi pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menyumbang input terhadap warisan model kelembagaan negara-bangsa Indonesia sebelumnya. Faktor internalnya adalah setelah mengalami konversi berupa ketegangan yang tertanam akibat konflik identitas yang bermuara pada model kebangsaan dan lembaga pada efek pada hubungan etnis sebagai warisan kelembagaan sebelumnya, maka dihasilkan warisan kelembagaan yang baru dengan mekanisme produksi model kebangsaan dan bentuk kelembagaan yang menekankan aktualisasi ekspresi politik tentang inklusi/eksklusi, berikut cara-cara dan ketentuan inklusi yang berarti pendefinisian ulang model kebangsaan dan lembaga yang berakibat

pada hubungan etnis.

Melalui IEMP Mann, pendekatan sosiologi historis membantu kita memahami analisa titik-titik simpang kritis model kebangsaan dan kelembagaan suatu negara pluralis yang sedang mengalami transformasi sistem politik yang terdemokratisasikan seperti dalam kasus Indonesia dengan menginterpretasikan elemen-elemen isu strategis pendekatan sosiologi historis sebagai berikut :

1. *Power and production*: penyebaran kapitalisme industri (Oligarki pasar) yang didukung oleh ekspansi rezim militeristik orde baru dalam kapasitasnya yang menyebabkan bentuk-bentuk destruktif perang/konflik (kekerasan fisik) yang mempengaruhi perkembangan demokrasi Indonesia.⁵
2. *Power and Interdependence*: IEMP Power model menunjukkan dalam kasus nasionalisme dan konflik etnis di Indonesia bahwa konstelasi kekuatan ekonomi politik Indonesia digerakkan oleh akselerasi institusionalisasi ideologi (Pancasila) yang berbenturan dengan sub ideologi pluralisme etnis Indonesia yang terpinggirkan dari kebutuhan dan tuntutan eksklusinya. Kekuatan sistemik dari institusionalisasi ideologi negara-bangsa Indonesia ini kemudian digunakan sebagai *justification tools of power* ke dalam bentuk-bentuk eksklusifisme sistem politik ekonomi jaminan institusi militer dan ekonomi yang didalamnya terdapat para elite kelompok pendukung Presiden Suharto. Dalam konteks IEMP *power*, semua unsur memiliki ketergantungan satu sama lain dalam kontrol kuat rezim represif yang masing-masing para elite kelompok loyalis di atas hidup di dalam masing-masing kekuatan institusionalisasi ideologi, ekonomi, militer dan politik (supra struktur politik : Legislatif, eksekutif dan yudikatif).
3. *System and society*: perubahan konstelasi ekonomi politik internasional sebagai respon dari globalisasi ekonomi dunia menghadirkan apa yang disebut oleh George Soros sebagai *reforming global capitalism* di era *open society*.⁶ Hal ini dipadu dengan kekuatan kapitalisme Indonesia

⁵ Penjelasan Bertrand terkait perpecahan di kalangan elite dan ketidakstabilan sistem politik menjelang kejatuhan rezim orde baru 1998 politik, menolak anggapan sebagian besar para ilmuwan politik yang menurutnya menganalisis kejatuhan rezim tersebut akibat perebutan kekuasaan, sumber daya dan representasi di sekitar Presiden Suharto, para jenderal, serta sekelompok kecil lingkaran dalam rezim itu. Selanjutnya menurut Bertrand, para ilmuwan politik tersebut berpendapat bahwa elite politik lainnya saling berebut pengaruh dan perlindungan dari kelompok tadi, sementara hanya segelintir orang melawan secara terbuka.

⁶ Secara eksplisit Soros juga menjelaskan bahwa *open society* merupakan momentum kini dalam sejarah masyarakat global yang berdiri di atas pondasi arsitektur keuangan global dan politik global. Untuk lebih lengkap baca George Soros. 2006. *Open Society – Reforming Global Capitalism*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

yang cenderung oligarkis dalam konsentrasi kekuatan-kekuatan sosial dari kelompok elite yang mengontrol sistem politik dan ekonomi Indonesia.

4. *Morality, culture and the emotions*: Moralitas, budaya dan emosi yang menyertai produk sejarah transisi demokrasi dalam titik-titik simpang kritis dan model kebangsaan negara-bangsa Indonesia meninggalkan sejumlah eksplanasi konflik identitas (etnis dan agama) dalam rangka mempertemukan sintesis dua bentuk mekanisme produksi titik simpang kritis (inklusi/eksklusi kelompok dan cara-cara berikut ketentuan inklusi) yang sarat akan unsur-unsur moralitas, kultur dan emosi dalam konteks pluralism masyarakat Indonesia. Eksplanasi yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan sejumlah identifikasi identitas tertanam sebagai warisan konflik identitas dari masing-masing kelompok yang bertikai. Klinken mendeskripsikan identitas tertanam ini ke dalam berbagai macam karakteristik konflik komunal seperti⁷ : Perasaan ingin populer dan kenapa para pengikut mau turut serta, kepentingan kelas melawan kepentingan komunal, motivasi ketakutan ketimbang mencium peluang, kaum elit lokal yang suatu saat menjadi domba yang pasif dan di lain waktu adalah serigala bagi satu sama lain dan melejitnya berbagai identitas yang sebelumnya tidak dipolitisir (Klinken, 2007:232-235).

Pendekatan teori sosiologi historis dalam hal ini memberikan sumbangan konseptual dan empiris terhadap perkembangan dinamika sejarah demokratisasi Indonesia. Keduanya mewarisi setiap perjalanan titik-titik simpang kritis warisan dan model kebangsaan yang digerakkan dari konflik antar kelompok identitas tertanam akan kebutuhan dan tuntutan mekanisme produksi inklusi dan eksklusivitas dalam wadah nasionalisme Indonesia.

Dengan demikian persoalan nasionalisme dan konflik etnis ditinjau dari karakteristik penelitian kualitatif melalui pendekatan teori sosiologi historis menyimpulkan output jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus yang dirangkum dalam tabel penjelasan karakteristik di bawah ini:

Tabel
Karakteristik Penelitian Studi Kasus

⁷ Klinken tidak secara langsung menyebutkan persoalan transisi warisan kelembagaan negara-bangsa terkait beberapa episode konflik komunal yang terjadi. Namun setiap episode merupakan gambaran kohesif akan transisi demokrasi sebagai respon atas kekacauan sistem politik menjelang perubahan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih reformatif daripada sebelumnya.

Focus	<i>Studi kasus</i>
Type of Problem Best Suited For Design	<i>Mengembangkan sebuah deskripsi mendalam yang dihasilkan dari analisis akan kasus per kasus dari konflik komunal (etnis) pada periode demokratisasi Indonesia pra dan pasca reformasi 1998</i>
Discipline Background	<i>Menyediakan pemahaman komprehensif akan sebab-sebab konflik komunal (etnis)</i>
Unit Of Analysis	<i>Politik domestik dalam konteks nasionalisme, demokrasi dan konflik etnis</i>
Data Collection Form	<i>Analisis data diambil dari sumber-sumber multiple seperti hasil interview (in-depth), hasil-hasil observasi sebelumnya, telaah dokumen-dokumen relevan maupun artefak-artefak konflik</i>
Data Analysis Strategies	<i>Hasil collecting data kemudian dianalisis dalam bentuk pendeskripsian secara cross case dari masing-masing tema konflik</i>
Written Report	<i>Hasil Analisis detail secara keseluruhan secara cross case menunjukkan karakteristik aktor-aktor yang terlibat konflik komunal (etnis). Pembentukan aktor (kelompok/elite kelompok yang bertikai) membentuk nasionalisme Indonesia melalui titik-titik simpang kritis transisi demokrasi sebagai respon terhadap warisan kelembagaan sebelumnya (model kebangsaan dan lembaga dengan efek pada hubungan etnis)</i>

Karakteristik penelitian studi kasus dalam konteks warisan kelembagaan yang dijelaskan Bertrand di atas pada akhirnya merelevansikan hubungan kausal dari tipologi kontestasi politik lokal Indonesia melalui titik-titik simpang kritis warisan dan model kebangsaan yang menstimulus terjadinya konflik antar kelompok identitas tertanam. Kelompok-kelompok identitas yang membutuhkan dan menuntut mekanisme produksi inklusi dan eksklusi. Dan kebutuhan dan tuntutan mekanisme produksi inklusi dan eksklusi ini pada hakekatnya dipengaruhi oleh dua faktor gerakan kontestasi politik lokal Indonesia. *Pertama*, yaitu motif gerakan dan *yang kedua*, konteks gerakan. Keduanya menjelaskan perseteruan politik yang berada dalam pigura kontestasi politik lokal dalam transisi demokrasi Indonesia dari orde baru kepada orde reformasi pasca 1998 dalam bingkai nasionalisme Indonesia.

Pendeskripsian hubungan kausal tersebut diatas dapat digambarkan melalui diagram berikut di bawah ini:

Tabel:

Konstelasi Politik Lokal Yang Dipengaruhi Oleh Motif dan Konteks Gerakan Perseteruan Politik

Konstelasi Politik Lokal (A) = (B)+(C)	Motif Gerakan Perseteruan Politik (B)	Konteks Gerakan Perseteruan Politik (C)
<p>□□ <i>Bagaimana pola dinamika politik lokal</i> (tipe dinamika konflik politik)</p>	<p>Benar tidak kegeraman masyarakat di jalanan sesungguhnya melebihi apa yang bisa dijelaskan hanya sekedar sebagai alat pencapai kepentingan kaum elit lokal. (resistensi kelompok masyarakat di jalanan memiliki makna lebih dari sekedar alat pencapaian kepentingan kaum elit lokal)</p>	<p>Perasaan populer dan kenapa para pengikut mau turut serta (<i>contoh : konflik etnis kalbar</i>)</p>
<p>□□ <i>Apakah ada pola tertentu yang muncul dari berbagai daerah?</i> (pola konflik politik)</p>	<p>Warga negara biasa tampak kurang tergerak oleh keluhan tentang beratnya tekanan ekonomi daripada rasa terkoyaknya identitas (<i>why</i>)</p>	<p>Kepentingan kelas vs kepentingan komunal (<i>contoh : konflik Poso</i>)</p>
<p>□□ <i>Bagaimana efek dinamika politik daerah terhadap konsolidasi demokrasi di tingkat daerah</i> (efek dinamika konflik politik)</p>	<p>Bukankah orang berbuat sesuatu lebih karena ketakutan dibanding karena mencium sebuah peluang politis?</p>	<p>Motivasi Ketakutan dari-pada mencium peluang politik (<i>contoh : kasus Ambon</i>)</p>
<p>□□ <i>Aktor seperti apa yang cenderung menguasai politik lokal? Institusi macam apa yang menjadi kendaraan politik elit lokal</i> (hegemoni aktor dan institusi politik)</p>	<p>Bagaimana mungkin para elit lokal yang dulu begitu pasif dan dengan patuh mengikuti perintah penguasa Orba, kemudian mendadak menjadi musuh bebuyutan setelah tahun 1987 ?</p>	<p>Kaum elit lokal yang suatu saat menjadi pengi-kut pasif dan di lain wak-tu adalah serigala bagi satu sama lain . (<i>contoh : Maluku Utara, Kalteng</i>).</p>
<p>□□ <i>Apakah ada polarisasi, friksi atau konflik yang merupakan fungsi dari struktur tradisi dan kultur lokal</i> □ <i>Apakah jaringan politik berbasis cultural bisa membentuk aliansi politik dominan di tingkat lokal</i> (polarisasi dan jaringan konflik politik)</p>	<p>Bukankah identitas-identitas etnik sangat sulit dipolitisir pada tahun sebelum semua terjadi, dan jika benar, bagaimana mungkin mereka begitu mudah digerakkan pasca 1998?</p>	<p>Melejitnya secara tiba-tiba berbagai identitas yang sebelumnya tidak dipolitisir, pembentukan aktor-aktor baru. (<i>contoh : Kalteng dan Kalbar</i>)</p>

Sumber: diolah dari Baswedan, 2007 dan Klinken, 2010.

Kesimpulan

Meskipun tidak tertutup kemungkinan pendekatan teori *historical sociology* bisa diaplikasikan pada level analisis global dan interstate, namun jika mengacu kepada karakteristik-karakteristik penelitian kualitatif seperti yang telah dijelaskan oleh Creswell di atas, maka pendekatan teori *historical sociology* akan lebih bermakna secara ontologis, epistemologis maupun

aksiologis pada tataran *intrastate*. Dalam artian mencakup level domestik dan individual.

Kita kembali diingatkan pada relevansi ketiga ide dan asumsi dasar yang menjadi pemikiran utama pendekatan teori sosiologi *historical sociology* dalam penjelasan awal di atas. Sintesis kesimpulan yang bisa didapat terkait level analisis domestik dan individu adalah: dikarenakan struktur sosial adalah hasil dari serangkaian proses sosial yang kompleks di dalam suatu negara-bangsa, maka hasilnya adalah di dalam struktur sosial itu terdapat kekuatan-kekuatan sosial dominan yang menjadi kekuatan struktur politik di dalam suatu sistem politik negara-bangsa yang bersangkutan. Kekuatan-kekuatan sosial dominan ini memiliki basis-basis *power* di dalamnya yang bersumber dari ideologi, ekonomi, militer dan politik, sehingga mempengaruhi jalannya distribusi kekuasaan secara kolektif, ekstensif dan otoritatif.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian hubungan internasional yang menggunakan pendekatan teori *historical sociology* harus berangkat terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi dalam interaksi-interaksi politik antar berbagai kekuatan sosial politik dalam mempengaruhi struktur politik yang ada dari sistem politik yang dianut oleh negara-bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian penekanannya terfokus pada apa yang terjadi dalam dinamika politik lokal di negara-bangsa tersebut. Dinamika politik lokal ini menghasilkan fenomena isu strategis yang dimunculkan dari hasil pergolakan politik yang terjadi pada negara-bangsa tersebut. Tidak terkecuali dalam kasus perseteruan (*contentious*) politik di Indonesia, yang menghasilkan tipologi konstelasi politik lokal yang dipengaruhi oleh faktor motif dan konteks gerakan politik sebagai kelanjutan akan warisan kelembagaan dan model kebangsaan dalam bingkai nasionalisme Indonesia.

Terkait juga dengan penulisan paper ini, maka penulis sekaligus menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M UAI dalam memberikan dukungan sepenuhnya sehingga tulisan ini bisa diselesaikan sesuai dengan batas akhir waktu yang ditetapkan.

Referensi

- Bertrand, Jacques. 2012. *Nasionalisme dan Konflik Etnis Di Indonesia*. Terjemahan : Achmad Munjid. Jakarta : Ombak.
- Baylish, John and Smith, Steve (eds). 2005. *The Globalization Of World Politic – An Introduction to International Relations*. New York : Oxford University Press.

- Burchill, Scott., Linklater, Andrew., Devetak, Richard., *et.al.* 2009. *Theories Of International Relations*. New York : Palgrave Macmillan.
- Baswedan, Anies. 2007. *Politik Lokal Di Indonesia*. Dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry Van Klinken. Jakarta: KITLV&Yayasan Obor Indonesia
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design – Choosing Among Five Approach*. California : Sage.
- Griffiths, Martin. 1999. *Fifty Key Thinkers In International Relations*. New York : Routledge
- Goldstein, Joshua S. & Pevehouse, Jon C. 2007. *International Relations : 2006-2007 Edition*. New York : Pearson Longman.
- Klinken, Gerry Van. 2007. *Perang Kota Kecil – Kekerasan Komunal dan Demokratisasi Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Dan KITLV.
- Mas'ood, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional – Teori dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES. 15
- Mansbach, Richard W. & Rafferty, Kirsten L., 2012. *Pengantar Politik Global*. Terjemahan : Amat Asnawi. Bandung : Nusa Media.
- Soros, George. 2006. *Open Society : Reforming Global Capitalism*. Terjemahan: Sri Koesdiyantinah. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Studi Pemikiran Tan Malaka Dalam Mengkonstruksi Hubungan Internasional Perspektif Indonesia

Virtuous Setyaka, S.IP., M.Si.

Universitas Andalas

Abstrak

Hubungan Internasional adalah sebuah ilmu yang dinamis dalam perkembangannya baik secara ontologis maupun epistemologis. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan dan pengakuan atas positivisme dan post-positivisme dengan segala turunan dan varian jalan keilmuan yang disepakati. Termasuk diantaranya adalah reflektivisme dan teori-teori kritis yang menyatakan bahwa ada relasi kuasa dalam pengembangan dan perkembangan keilmuan khususnya ilmu-ilmu sosial dan politik, terutama Hubungan Internasional. Penulis mengajukan proposal penelitian dengan judul di atas karena ketertarikan untuk menindaklanjuti pengetahuan dan pengalaman tersebut dan berkontribusi dalam mengonstruksi Hubungan Internasional perspektif Indonesia.

Kata kunci:

Pemikiran, Tan Malaka, Teori, Hubungan Internasional, Indonesia.

Latar Belakang

Setiap bangsa dan peradabannya di dunia memiliki perangkat kehidupannya masing-masing sesuai dengan situasi alamiah dan kondisi sosial mereka. Salah satu perangkat kehidupan tersebut adalah pengetahuan yang diserap dari pengalaman kehidupan mereka dan diabstraksikan menjadi ilmu pengetahuan. Hubungan Internasional (HI) adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dinamis dalam perkembangannya baik secara ontologism, epistemologis, dan metodologis. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan dan pengakuan atas positivisme dan pospositivisme dengan segala turunan dan varian jalan keilmuan yang disepakati. Termasuk diantaranya adalah reflektivisme dan teori-teori kritis yang menyatakan bahwa ada relasi kuasa dalam pengembangan dan perkembangan keilmuan khususnya ilmu-ilmu sosial dan politik, terutama HI. Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse (2014) menuliskan bahwa HI

sebagai sebuah bidang kajian memperhatikan hubungan-hubungan di antara pemerintahan-pemerintahan di dunia. Namun hubungan-hubungan tersebut tidak dapat dipahami dalam isolasi karena terkoneksi dengan aktor-aktor lainnya seperti Organisasi Internasional (OI), Korporasi Multinasional, dan individu-individu; dengan struktur-struktur sosial lainnya dan berbagai proses (ekonomi, budaya, dan politik domestik); dan berbagai pengaruh geografis dan sejarah¹.

Sejarah keberadaan kajian HI di Indonesia dapat dikategorisasikan sebagai studi poskolonial dengan Jurusan HI pertama diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tahun 1950 sebagai bagian dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Berikutnya di universitas lainnya mengikuti pada tahun 1950-an dan 1960-an dan tidak diketahui banyak tentang kurikulumnya. Pengarahan atau agenda riset yang dilakukan di awal-awal tahun untuk memproduksi lulusan yang mengisi pos-pos administrasi dan birokrasi negara, khususnya hubungan luar negeri². Sampai saat ini masih dalam tahapan perkembangan, sehingga masih sulit untuk dibandingkan dengan studi serupa di negara-negara Eropa. Juga dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Dalam kajian HI di Indonesia belum dipakai perspektif keindonesiaan dalam analisis HI. diperkuat dengan kelangkaan karya HI Indonesia dalam hal pemikiran atau sudut pandang/perspektif. Dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia, sudah mulai terlihat munculnya karya Bantarto Bandoro, Rizal Sukma, hingga penulis-penulis baru. Pemikiran-pemikiran dan karya-karya tentang politik luar negeri Indonesia diperlakukan bukan sebagai alat berpikir, tetapi lebih sebagai objek kajian. Dalam epistemologi, pemikiran di Indonesia jarang digunakan dalam metode deduksi. Padahal bila pengetahuan Indonesia dalam kajian hubungan internasional dibangun, dapat juga diterapkan metode deduksi. Cara membangunnya dengan menyusun pengetahuan, pemikiran dari masa kuno, klasik, hingga kontemporer mengenai kemanusiaan dan hubungan internasional kontemporer. Selain dengan membangun generalisasi dari membangun rujukan tersebut, perspektif HI juga bisa dibangun dengan membangun teori dengan mengambil simpulan dari hasil penelitian-penelitian yang dihasilkan dari kehidupan nyata³.

¹ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse (2014), *International Relations*, Edisi 10, 2013-2014, Pearson, h. 3 - 4.

² Leonard C. Sebastian dan Irman G. Lanti (2010), "Perceiving Indonesian Approaches to International Relations Theory", dalam Amitav Acharya dan Barry Buzan (ed), *Non-Western International Relations Theory Perspectives on and Beyond Asia*, London dan New York: Routledge, h. 163.

³ Irfa Puspitasari, Baiq L.S.W. Wardhani, dan Radityo Dharmaputra, "Pemetaan Studi Hubungan Internasional di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif", *Jurnal Global & Strategis*, Th. 8, No.1. Januari- Juni 2014. Hal 147-167.

Untuk kajian mengenai pemikiran Tan Malaka, salah satu karya yang ditemukan adalah dari Ahmad Fauzan (2006) dengan judul *Pemikiran Politik Tan Malaka (Kajian Filsafat Politik)*. Dituliskan bahwa Tan Malaka mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya agar terlepas dari belenggu penjajah imperialis. Ekspansi ideologi-ideologi modern mewarnai pergerakan perjuangan Indonesia, yaitu perkembangan Pan Islamisme di Timur Tengah yang mengambil bentuk Sarekat Islam dan Sosialisme-Komunisme yang tumbuh di Rusia, mendorong kelahiran Partai Komunis Indonesia (PKI). *Massa Aksi* dan *Naar de Republiek* adalah sebagian dari karya Tan Malaka yang memberikan pemahaman terhadap kondisi masyarakat Indonesia, cara berjuang, dan bentuk negara yang tepat untuk Indonesia. Karya-karya yang ditulis secara sistematis tersebut mendapat simpati dan menjadi panduan pergerakan Indonesia oleh para *founding fathers* Indonesia. Menurut Fauzi, Tan Malaka menjelaskan bahwa Indonesia hanya dapat merdeka apabila menguasai dengan baik situasi dan kondisi masyarakat dengan analisis materialisme dialektis dan materialisme historis. Tan Malaka berasumsi seperti halnya para Marxis bahwa keberhasilan Kaum Proletar (Murba) pasti terjadi, karena pertentangan dalam masyarakat kapitalisme tidak dapat terelakkan dengan kata lain telah menjadi kepastian sejarah. Dibutuhkan suatu organisasi revolusioner yang mengatur massa bergerak. Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia 100 % bersifat menyeluruh, kebebasan mengatur diri sendiri (*self determination*) hanya dan hanya jika telah diperoleh kemerdekaan politik tanpa adanya intervensi pihak (bangsa dan negara) lain. Untuk mewujudkannya maka dibutuhkan langkah-langkah revolusi dengan bersenjatakan kaum Murba Indonesia (Buruh, Tani, Intelektual, Pedagang, dan lain-lain)⁴.

Permasalahan

Indonesia adalah sebuah negara-bangsa poskolonial, lahir dan membangun peradabannya sejak terjadinya penjajahan kolonialis imperialis dari Barat atas negeri-negeri yang kemudian dikenal keberadaannya di dunia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara. Tan Malaka adalah salah satu tokoh Indonesia yang dihormati banyak orang bukan hanya sebagai salah satu pejuang dan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya secara praktik melakukan berbagai bentuk aktivitas perlawanan terhadap penjajahan kolonial

⁴ Ahmad Fauzan (2006), *Pemikiran Politik Tan Malaka (Kajian Filsafat Politik)*, Skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin, Jurusan Aqidah dan Filsafat (AF), Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

imperialis. Lebih dari itu Tan Malaka berhasil menyelaraskan antara pemikiran dan tindakan: merangkai filosofi, teori, dan aksi sebagai kesatuan gerak emansipatori Indonesia. Bahkan dengan mengorganisasikan dan menginstitusionalisasikan perjuangannya menjadi sebuah bentuk negara (republik). Permasalahannya adalah bagaimana menjadikan pemikiran Tan Malaka dalam mengkonstruksi HI perspektif Indonesia?

Kerangka Konsep

Perspektif adalah sebuah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain untuk membentuk pengetahuan. HI sebagai ilmu pengetahuan selama ini lebih dikenal dan diketahui berpusat di dan dikembangkan dalam kerangka berpikir dinamika masyarakat Amerika Utara, Inggris, dan Eropa Barat. HI termasuk disiplin ilmu yang muda dibandingkan yang lainnya dalam Ilmu Sosial yang dikristalisasikan antara 1920-an dan 1930-an. Indonesia sangat mungkin untuk menghasilkan sebuah eksplorasi studi pada pendekatan non-Barat untuk teori HI yang inovatif dan emansipatoris⁵.

Ada tiga tahapan pra-teorisis menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi (2012) dalam teorisis HI, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Epistemologi adalah cara-cara dan berbagai hal di mana kita bisa mengetahui sesuatu, setidaknya apa yang kita pikir kita tahu tentang dunia. Ontologi merujuk pada bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita melihat atau memahami esensi segala sesuatu di sekitar kita. Istilah metodologi dan metode-metode, sebagian penstudi HI menyebutnya sebagai sebuah strategi riset yang berjalan di atas konstruksi formal dari hipotesis-hipotesis dan teori-teori. Mungkin untuk diuji misalnya melalui aplikasi metode-metode statistik. Sebagian lainnya lebih menyukai pada jalur penggunaan indikator-indikator nonkuantitatif atau kasus dan studi kasus komparatif, metode-metode historis, dan argument beralasan yang juga disebut sebagai pendekatan-pendekatan tradisional atau kualitatif untuk membangun teori. Teori dapat dipahami secara sederhana sebagai sebuah cara membuat dunia atau sebagiannya lebih mudah atau lebih baik dimengerti. Bagi Kenneth Waltz yang menawarkan sebuah teori yang lebih formal dari politik internasional untuk menjelaskan secara umum tendensi-tendensi dan pola-pola dari perilaku diantara negara-negara, menyebut bahwa "teori-teori menjelaskan hukum-hukum"⁶. Kerja teoritis dalam HI menurut Lepgold & Nincic (2001) dan Viotti & Kauppi (1993) terdiri dari

⁵ Leonard C. Sebastian dan Irman G. Lanti (2010), "Perceiving Indonesian Approaches to International Relations Theory", dalam Amitav Acharya dan Barry Buzan (ed), *Non-Western International Relations Theory Perspectives on and Beyond Asia*, London dan New York: Routledge, h. 148-173.

⁶ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi (2012), *International Relations Theory*, Pearson, h. 2 - 6.

upaya-upaya para Ilmuwan Sosial untuk mencatat proses-proses, isu-isu, dan luaran-luaran umum dalam terma-terma yang saling berhubungan⁷.

Dua sumber mayoritas yang potensial dalam membentuk keilmuan dan teorisasi adalah riset dengan detil dari perilaku para politisi khususnya elit serta pemimpin dan eksplorasi yang detil dari pemikiran politik yang setidaknya dipengaruhi kultur politik di suatu wilayah geografis tertentu. Teori menurut peneliti adalah abstraksi dari realitas yang praktikal dalam arti perilaku manusia dengan beragam jenis dan varian bentuk gerak yang dilakukan sebagai aktor sekaligus agen dalam dinamika sosial-politik. Gerak tersebut dilakukan untuk mempertahankan atau merubah tatanan sosial-politik di berbagai tingkat arena dengan berbagai media atau instrumen. Dalam penelitian atau riset HI, aktor atau agensi yang merupakan pelaku atau subjek biasanya disebut sebagai unit analisis. Sedangkan arenanya disebut sebagai tingkat analisis yang merefleksikan struktur sosial dalam hubungan internasional.

Teori yang baik memiliki beberapa karakter, pertama, memiliki konsistensi logika dan validitas empiris yang didalamnya memiliki penjelasan logis dengan bukti-bukti valid menghasilkan panduan yang akurat pada kausalitas koneksi yang membentuk berbagai peristiwa. Kedua, komplit dalam artian tidak meninggalkan keraguan terhadap relasi kausalitas dalam kerja (Van Evera 1997). Ketiga, kekuatan penjelasan atau *explanatory power*, yaitu kemampuan untuk mencatat fenomena yang nampaknya mistis atau susah dijelaskan secara komprehensif (Rapaport 1972). Keempat, teori mampu memberikan penjelasan yang penting dalam berbagai fenomena yang dibutuhkan agar tidak membingungkan. Kelima, teori lebih berguna ketika kaya dengan kemampuan preskriptifnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan rekomendasi (Van Evera 1997). Keenam, teori-teori lebih bernilai ketika dapat digunakan untuk menyatakan secara jelas, sebaliknya, teori yang sulit untuk dipahami tidak lebih berguna karena membutuhkan lebih banyak waktu bagi pengguna potensial untuk menguasainya⁸.

Di dalam realitas praktik, sebuah ilmu pengetahuan yang diklaim netral, tidak berpihak, dan objektif sepenuhnya seperti yang diketahui secara umum dalam Positivisme, mendapat bantahan oleh Pospositivisme yang menyatakan sebaliknya. Para Pospositivis menyebutkan bahwa ada relasi kuasa dan

⁷ Stephen M.Walt, *The Relationship Between Theory and Policy in International Relations*, 10.1146/annurev.polisci.7.012003.104904, Annu. Rev. Polit. Sci. 2005.8:23-48. Downloaded from arjournals.annualreviews.org. by University of California - Santa Cruz on 11/30/07.

⁸ Stephen M.Walt, *The Relationship Between Theory and Policy in International Relations*, 10.1146/annurev.polisci.7.012003.104904, Annu. Rev. Polit. Sci. 2005.8:23-48. Downloaded from arjournals.annualreviews.org. by University of California - Santa Cruz on 11/30/07.

pengetahuan di dunia, dalam konteks itu maka tidak mengherankan sekaligus menjadi bukti tentang adanya dominasi tertentu dalam ilmu pengetahuan. Salah satu perspektif dalam HI adalah Marxisme, sebuah teori yang berpegang bahwa penindasan kelas yang lebih berkuasa dan mengeksploitasi yang kurang berkuasa dengan mengabaikan pembagian yang fair atau adil atas kelebihan yang diciptakan. Kelas tertindas mencoba untuk mendapatkan kekuasaan dalam rangka memenuhi kesejahteraan mereka. Proses ini disebut sebagai perjuangan kelas sebagai salah satu cara untuk melihat relasi politik di antara yang kaya dan yang miskin dan tentu saja di berbagai kawasan di dunia⁹. Perspektif Marxisme dalam HI memberikan dasar dalam teori-teori kritis untuk mengetahui dan memahami adanya dominasi dan hegemoni ilmu pengetahuan dalam realitas dinamika hubungan internasional. Dalam HI Marxist, Robert Biel (2000) menuliskan bahwa alat analisis yang digunakan biasanya menggunakan pemikiran Karl Marx yang disebut sebagai pendekatan Materialisme Historis. Aspek-aspek pendekatan Marxist khususnya dalam ekonomi politik internasional, menurut Biel biasanya sebagai berikut¹⁰:

1. Keberadaan Kelas Pekerja yang memiliki hak-hak kemerdekaan dan kepentingan-kepentingan Kelas dalam menjaga kebutuhan hidup mereka di tengah-tengah sistem kapitalisme yang ada dan mengidentifikasi luaran atau hasil dari periode transformasi tertentu yang menguntungkan bagi mereka.
2. Metode dialektik yang dalam tingkatan objektif adalah pengakuan atas identitas sebuah fenomena yang ditentukan oleh kekuatan kontradiksi di dalamnya, dan pada tingkatan subjektif perubahan yang terjadi adalah melalui aksi manusia yang diinginkan atas dasar pengakuan kemungkinan objektif dalam situasi yang nyata.
3. Konsep akumulasi kapital berbeda dari yang seringkali digunakan dalam ekonomi konvensional dan merujuk pada kerja manusia yang teralienasi.
4. Relasi pusat – pinggiran atau perspektif dependensia adalah kreasi teoritik besar generasi awal para penstudi radikal seperti WEB Du Bois, Walter Rodney, Samir Amin, dan sebagainya.

Selain itu, HI Marxis juga terinspirasi oleh Teoritisi Marxis Italia yaitu Antonio Gramsci yang terkenal karena penggunaan istilah hegemoni untuk merujuk kepada kompleksitas ide-ide atau gagasan-gagasan yang digunakan oleh para penguasa untuk mendapatkan persetujuan bagi legitimasi mereka

⁹ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse (2014), *International Relations*, Edisi 10, 2013-2014, Pearson, h. 104.

¹⁰ Robert Biel (2000), *The New Imperialism, Crisis and Contradictions in North/South Relations*, London dan New York: Zed Books, h. ix – x.

dan menjaganya untuk terus berlangsung dengan mengurangi kebutuhan penggunaan kekuatan (fisik) demi tujuan yang sama¹¹. Muncul kajian tentang dominasi Amerika Serikat dalam studi HI dengan teori-teori yang ada di dalamnya. Salah satu penkaji tersebut adalah Helen Louise Turton (2016) dalam karyanya yang berjudul *International Relations and American Dominance, A diverse discipline*. Di dalam buku tersebut disimpulkan hasil kajian Turton sebagai berikut:

Tabel

Dominasi Amerika dan Keragaman dalam Disiplin Hubungan Internasional

Definisi Dominasi	Bukti Dominasi	Kecenderungan Disiplin
Pengaturan Agenda	Tidak	Independen dari elit-elit pembuatan kebijakan luar negeri Amerika; pluralisme ontologi global
Dominasi Teoritis	Ya dan Tidak	Dominasi Amerika dalam terma volume teori riset yang diproduksi; pluralisme teori global, pada kemunculan teori HI non-Barat
Dominasi Metodologis	Tidak	Pluralisme mtodologi global; preferensi metodologi nasional berbeda
Dominasi Institusional	Ya	Dominasi institusional Amerika; parokialisme nasional; internasionalisasi global
Penjaga Gerbang	Tidak	Pluralism dan dorongan internasionalisasi; praktik-praktik penjaga gerbang melalui <i>fits & standards</i> ; peran penjaga gerbang dari indikator-indikator dan metrik-metrik

Sumber: Helen Louise Turton (2016) *International Relations and American Dominance A diverse discipline*, London dan New York: Routledge, 141

Amitav Acharya menawarkan konsep awal dari teori non-hegemonik tatanan internasional. Teori non-hegemonik tatanan internasional menyatakan bahwa tatanan internasional bukan hanya fungsi dari kekuatan dan preferensi aktor hegemoni (atau negara kuat). Sebuah tatanan internasional non-hegemonik dapat didefinisikan sebagai pola interaksi yang relatif stabil antara kelompok negara tanpa hegemoni dari kekuatan besar secara individu atau kolektif. Asumsinya sebagai berikut: (a) pelaku utama / agen di dalam hubungan internasional adalah negara, kelompok sosial, dan organisasi internasional; (b) sistem internasional anarki, namun hegemoni bukan solusi alami atau tak terelakkan untuk anarki; resistensi terhadap hegemoni mungkin lebih kecenderungan alami; (c) struktur sistem internasional baik material dan

¹¹ Antonio Gramsci, *The Modern Prince and Other Writings*. International Publishers, 1959. Stephen Gill, ed.

Gramsci, Historical Materialism and International Relations. Cambridge, 1993. Robert W. Cox, *Production, Power, and World Order: Social Forces in the Making of History*. Columbia, 1987.

ideasional dan karenanya perlawanan terhadap hegemoni bisa menjadi material dan ideasional; (d) kerjasama internasional mungkin tidak hanya untuk mengorganisasi perlawanan, tapi juga sosialisasi, mencari aktor hegemoni; dan (e) aktor non-hegemonik tidak hanya penerima pasif dari ide-ide yang universal atau barang kolektif, tapi peminjam aktif dan eksportir. Contoh tatanan internasional non-hegemonik adalah difusi ide-ide politik India di Asia prakolonial, sistem sungai Cina, komunitas keamanan Uni Eropa, dan peran Indonesia postkolonial di Asia Tenggara¹².

Dari pemaparan tersebut, maka sangat mungkin sekali untuk mengkonstruksi Teori HI berperspektif Indonesia dengan mengambil karya-karya para Pemikir Politik dari Indonesia yang menguraikan tentang hubungan atau relasi sosial antar bangsa dan negara. Dalam memahami perspektif atau sudut pandang, selain berdasarkan pada konteks kewilayahan atau geografi keilmuan (*geosciences*) sebagai tempat dari mana para pemikir atau teoritis berasal, maka dapat juga didasarkan pada filsafat dan paradigma yang dikembangkan secara keilmuan. Konteks *geosciences* tersebut memungkinkan para pemikir atau teoritis mendapatkan pengalaman praktis dalam membentuk keilmuannya. Sedangkan konteks filsafat dan paradigma tersebut lebih cenderung mempertimbangkan latar belakang pemikiran individu dalam penalaran untuk membentuk keilmuannya.

Analisis

"...saya lahir dalam keluarga Islam yang taat...ketika sejarahnya Islam buat bangsa Indonesia masih boleh dikatakan pagi, diantara keluarga tadi sudah lahir seorang Alim Ulama...Ibu Bapa saya keduanya taat dan orang takut kepada Allah dan jalankan sabda Nabi", demikian pengakuan Tan Malaka dalam karyanya *Islam dalam Tinjauan Madilog* (1948)¹³. Tan Malaka sepanjang hidupnya berkawan dan berdiskusi dengan orang-orang seperti Lenin, Stalin, Trotsky, Sun Yat Sen, dan lain-lain¹⁴. *Tan Malaka (1897-1949) dipilih sebagai ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1921, tetapi pada tahun berikutnya dia dipaksa untuk meninggalkan Hindia Belanda oleh pihak otoritas koloni. Setelah proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, dia kembali ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajahan*

¹² Amitav Acharya, "Nonhegemonic International Relations: A Preliminary Conceptualization", *School of Sociology, Politics, and International Studies*, University of Bristol Working Paper No. 10-08. Makalah ini disampaikan pada Konvensi Asosiasi Studi Internasional, San Francisco, 2008.

¹³ Tan Malaka (1948), *Islam dalam Tinjauan Madilog*, Sumber: Penerbit Widjaja, Jakarta 1951. Kontributor: Diketik oleh Abdul, ejaan diedit oleh Ted Sprague (Feb 2008).

¹⁴ Diskusi dengan Ben Ibratama Nur dalam grup WA Tan Malaka Institute, November 2016.

Belanda. Dia menjadi ketua Partai Murba (Partai Proletar)), yang dibentuk pada tahun 1948 untuk mengorganisir kelas pekerja oposisi terhadap pemerintahan Soekarno. Pada bulan Februari 1949 Tan Malaka ditangkap oleh tentara Indonesia dan dieksekusi¹⁵.

Bagi Tan Malaka, menuliskan pemikiran-pemikirannya adalah cara-cara untuk (1) mengisi hari-harinya ketika dipenjara, (2) mengabdikan kepada partai dan rakyat, (3) menghubungkan golongan terpelajar (intelektual) pribumi atau penduduk Indonesia¹⁶. Sejarah hidup Tan Malaka selain dikenang sebagai salah satu pemikir, juga pelaku perjuangan dalam memerdekakan Indonesia dari penjajahan atau kolonialisme/imperialisme yang dilakukan oleh negara bangsa lainnya. Tan Malaka dipenjara oleh pemerintahan kolonial karena pemikiran dan aktivitas politiknya dalam melawan kolonialisme/imperialisme tersebut. Selain bergabung, membentuk, dan memimpin partai politik, juga mengorganisir aktivitas politik lainnya diantaranya membentuk dan memimpin Persatuan Perjuangan, Tan Malaka adalah seorang Guru sekaligus pemikir yang menuliskannya dalam berbagai karya. Berikut ini adalah karya-karya Tan Malaka:

Tabel
Karya-Karya Pemikiran Tan Malaka

No.	Tahun	Tanggal dan Bulan	Judul Karya	Keterangan
1	1921	Oktober	Parlemen atau Soviet?	Sumber: Terbitan Yayasan Massa, 1987 Ditulis oleh Tan Malaka pada bulan Oktober 1921 di Semarang
2	1921		SI Semarang dan Onderwijs	Sumber: Yayasan Massa, terbitan tahun 1987
3	1922	12 November	Komunisme dan Pan-Islamisme	Penerjemah: Arief Chandra, Agustus 2009 <i>sebuah pidato yang disampaikan oleh tokoh Marxis Indonesia Tan Malaka pada Kongres Komunis Internasional ke-empat pada tanggal 12 Nopember 1922. Menentang thesis yang didraf oleh</i>

¹⁵ <https://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/1922-PanIslamisme.htm>, 10/11/2016, 09:48.

¹⁶ Tan Malaka (1925), "Interupsi" dalam *Naar de "Republiek Indonesia*, yang ditulis di Kanton, Cina pada April 1925, dan diterbitkan kembali oleh Yayasan Massa pada tahun 1987.

				<i>Lenin dan diadopsi pada Kongres Kedua, yang telah menekankan perlunya sebuah "perjuangan melawan Pan-Islamisme", Tan Malaka mengusulkan sebuah pendekatan yang lebih positif.</i>
4	1925	April	Menuju Republik Indonesia (Naar de 'Republiek Indonesia')	Karya Penting Sumber: Yayasan Massa, terbitan tahun 1987
5	1926	Januari	Semangat Muda	Sumber: Ditulis oleh Tan Malaka pada bulan Januari 1926 di Tokyo
6	1926		Aksi Massa	Ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1926 di Singapura. Sumber: Diambil dari buku "Aksi Massa" terbitan Teplok Press, 2000.
7	1943		Madilog	Karya Penting. Sumber: Terbitan Widjaya, Jakarta, tahun 1951. Bab III diambil dari terbitan Pusat Data Indikator, 1999.
8	1945	24 November	Politik	Ditulis oleh Tan Malaka di Surabaya, 24 November 1945 Sumber: Tulisan ini diambil dari buku <i>Merdeka 100%</i> , cetakan pertama, Oktober 2005, dengan ijin dari penerbit Marjin Kiri. Buku ini mengandung tiga tulisan Tan Malaka: <i>Politik, Rencana Ekonomi Berjuang</i> , dan <i>Muslihat</i> .
9	1945	28 November	Rencana Ekonomi Berjuang	Ditulis oleh Tan Malaka di Surabaya, 28 November 1945 Sumber: Tulisan ini diambil dari buku <i>Merdeka 100%</i> , cetakan pertama, Oktober 2005, dengan ijin dari penerbit Marjin Kiri. Buku ini mengandung tiga tulisan Tan Malaka: <i>Politik, Rencana Ekonomi Berjuang</i> , dan <i>Muslihat</i> .
10	1945	2 Desember	Muslihat	Ditulis oleh Tan Malaka di Surabaya, 2 Desember 1945 Sumber: Tulisan ini diambil dari buku <i>Merdeka 100%</i> , cetakan pertama, Oktober 2005, dengan ijin dari penerbit Marjin Kiri. Buku ini mengandung tiga tulisan Tan

				Malaka: <i>Politik, Rencana Ekonomi Berjuang, dan Muslihat.</i>
11	1945		Manifesto Jakarta	
12	1946	4-5 Januari	Situasi Politik Luar dan Dalam Negeri	Pidato dalam Kongres Persatuan Perjuangan tanggal 4-5 Januari 1946
13	1946	10 Juni	Thesis	Sumber: Penerbit Murba, Jakarta
14	1948	16 April	Kuhandel di Kaliurang	
15	1948	6 Mei	Getrennt Marschieren Vereint Schlagen (Berpisah Kita Berjuang, Bersama Kita Memukul)	Sumber : Teks asli tulisan Tan Malaka tahun 1948
16	1948	17 Mei	GERPOLEK (GERilya - POLitik - EKonomi)	
17	1948	31 Juli	Pandangan dan Langkah Partai Rakyat	
18	1948	7 November	Uraian Mendadak	Pidato Tan Malaka di depan Kongres Peleburan Tiga Partai, 7 November 1948
19	1948	16 Desember	Proklamasi 17-8-1945, Isi dan Pelaksanaannya	Kongres Rakyat Indonesia Bulan Desember 1948
20	1948		Pandangan Hidup	
21	1948		Islam dalam Tinjauan Madilog	Sumber: Penerbit Widjaja, Jakarta 1951
22	1948		Sambutan Murba	
23	1948		Hukum Revolusi	
24	1948		Dari Ir. Soekarno sampai ke Presiden Soekarno	Sumber: Yayasan Cahaya Kita, Jakarta 1966 Tulisan ini adalah bagian dari otobiografi Tan Malaka "Dari Penjara ke Penjara" yang diterbitkan terpisah sebagai buku saku.

25	1948		Keterangan Ringkas tentang Program Maksimum	
26	1948		Nasrani-Yahudi dalam Tinjauan Madilog	Sumber: Cetakan ke 2, Penerbit: Toko Buku dan Percetakan "Nusantara", Bukit Tinggi, 1948.

Naar de Republiek Indonesia (1925)¹⁷

Tan Malaka menyebut dirinya "menafsirkan keadaan international dan nasional", penafsiran tersebut dilakukannya dengan uraian pada Bab I berjudul "Situasi Dunia". Dimulai dengan menganalisis dampak Perang Dunia tahun 1914 sampai 1918 dalam pengertian ekonomi telah membagi dunia menjadi dua bagian. Pertama, negeri-negeri kalah perang seperti Jerman, Austria, Hongaria dan Turki. Juga Rusia, dimana kaum buruh telah memegang kekuasaan dalam bidang ekonomi. Negeri-negeri kalah perang sangat menderita karena kekurangan bahan-bahan makanan, hasil-hasil pabrik-pabrik modal dan bahan mentah untuk industri-industri. Perjanjian Versailles mewajibkan Jerman membayar ratusan juta mark emas (sebagai pampasan perang) kepada negeri-negeri sekutu setiap tahun, menjadikan Jerman sebagai setengah jajahan. Lebih ironis lagi, melalui "Rencana Dawes", Jerman tidak diperbolehkan menghasilkan barang-barang dagangan yang lebih baik dan lebih murah daripada barang-barang dagangan negeri sekutu, sebagaimana halnya sebelum terjadi perang besar (Perang Dunia 1914-1918). Jerman kehilangan semua tanah jajahan, kehilangan pasaran hasil-hasil industrinya sekaligus kehilangan pasokan bahan-bahan mentah, dirampasnya kapal-kapal niaganya atau hancurnya perdagangan internasionalnya yang berdampak sangat berat untuk membangun kembali industrinya tanpa bantuan dari luar terutama dari Amerika Serikat. Akhirnya menjadikan Jerman pada saat itu tidak menjadi saingan negeri-negeri sekutu di tanah jajahan (Indonesia, India, dan sebagainya) dan di negeri-negeri setengah jajahan (Tiongkok, Persia, dan Turki). Di negeri-negeri ini semua pengaruh Amerika Serikat sangat pesat perkembangannya. Demikian juga Austria merosot menjadi negeri setengah jajahan yang terikat dibidang ekonomi dan tak mampu mengadakan tantangan bagi negeri lain. Kedua, negeri-negeri yang memenangkan perang, yaitu

¹⁷ Tan Malaka (1925), "Keterangan pada Cetakan Kedua" dalam *Naar de "Republiek Indonesia*, yang ditulis di Tokyo, Jepang pada Desember 1925, dan diterbitkan kembali oleh Yayasan Massa pada tahun 1987.

Perancis, Italia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Perancis, Inggris, Italia sekalipun tergolong pemenang perang, karena biaya perang yang tinggi maka harus menembalikan uang pinjamannya disertai dengan bunga.

Aksi Massa (1926)¹⁸

Dalam karya ini Tan Malaka menuliskan pemikirannya tentang kemerdekaan dari imperialisme yang harus dilakukan dengan cara-cara revolusioner di Indonesia. Di dalamnya Tan Malaka menjelaskan pada bagian awal tentang revolusi dan sejarah Indonesia. Penjelasan tentang Indonesia diletakkan dalam konteks interrelasi antara struktur internasional dan domestik yaitu adanya pengaruh luar negeri dalam interaksi Bangsa Indonesia asli yang dipengaruhi oleh Hindu sampai Islam dan lain-lain. Pada bagian berikutnya Tan Malaka menjelaskan tentang imperialisme, di dalamnya dijelaskan tentang berbagai cara pemerasan dan penindasan, sebab-sebab perbedaan, akibat dari berbagai macam cara pemerasan dan penindasan dengan membandingkan yang terjadi di India, Filipina, dan Indonesia. Tan Malaka kemudian menjelaskan lebih detil tentang kapitalisme Indonesia yang masih muda, tumbuh tidak dengan semestinya, dan ditutup dengan penjelasan tentang kapital Indonesia yang internasional. Lalu Tan Malaka menjelaskan keadaan rakyat Indonesia yang disebutnya hidup dengan kemelaratan, kegelapan, dan kelaliman serta perbudakan. Pada bagian akhir Tan Malaka menjelaskan tentang keadaan sosial dan keadaan politik, kemungkinan revolusi di Indonesia dan perkakasnya, tentang gerakan kemerdekaan di Indonesia, dan ditutup dengan federasi Republik Indonesia. Selain itu juga dilengkapi dengan lampiran rancangan untuk program proletar di Indonesia.

Madilog (1943)¹⁹

Madilog adalah singkatan dari Materialisme Dialektika Logika, di dalam karyanya ini Tan Malaka menjelaskan tentang logika mistika, filsafat, ilmu pengetahuan, dialektika, logika, dan peninjauan dengan Madilog. Ini adalah karya Tan Malaka yang paling terkenal dan dianggap salah satu karya penting. Tan Malaka menuliskan karyanya ini selama lebih kurang delapan bulan dari 15 Juli 1942 sampai dengan 30 Maret 1943. Membaca Madilog ini menunjukkan sangat kritisnya seorang Tan Malaka, bahkan pada bagian pendahuluan, ia menuliskan bahwa "Indonesia sebenarnya belum bertanggung berumur sendiri".

¹⁸ **Sumber:** Diambil dari buku "Aksi Massa" terbitan Teplok Press, 2000.

¹⁹ **Sumber:** Terbitan Widjaya, Jakarta, tahun 1951. Bab III diambil dari terbitan Pusat Data Indikator, 1999. Kontributor: Diketik oleh Abdul, ejaan diedit oleh Ted Sprague. Dimuat di MIA pada tanggal 13 Juni 2007.

Maksudnya belum mempunyai sistem kalender sendiri sementara bangsa-bangsa lain memilikinya. Pernyataan itu juga dapat dibaca sebagai bukti kecintaan Tan Malaka atas eksistensi bangsanya seutuhnya. Pembacaan mengapa Tan Malaka memunculkan Madilog dan tidak menuliskan historisitas dalam materialism historis disebabkan adanya perbedaan historisitas Barat dengan Indonesia²⁰. Dari Madilog dapat ditarik pelajaran, diantaranya metode berpikir "jembatan keledai" dan dialektika. Konsistensi logika pada suatu sistem dapat diuji dengan metode dialektika. Jembatan keledai adalah metode untuk memperbesar kapasitas memori berpikir manusia²¹. Jembatan keledai adalah jembatan yang paling ringan dan mudah untuk dilewati, ini sebuah analogi yang digunakan Tan Malaka untuk mempermudah pencatatan ilmu pengetahuan dalam menyimpannya dengan ingatan. Madilog berisi tentang teori berpikir yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan masyarakat Indonesia yang pada saat itu menjadi cara berpikir baru dan maju dengan mengindonesiakan cara berpikir Barat yang berdasarkan pada pembuktian (Materialisme). Tan Malaka dikenal dengan salah satu jargonnya "belajarliah ke Barat tapi jangan menjadi peniru, jadilah Murid Timur yang cerdas"²².

Gerpolek (1948)

Dalam Gerpolek, Tan Malaka menjelaskan tentang pertama, Indonesia bukanlah negara kapitalis-imperialis, namun sebuah republik yang baru berdiri sebagai sebuah negara-bangsa modern dari hasil dialektika keruntuhan feodalisme dan kolonialisasi (imperialisme-kapitalisme) oleh bangsa lain melalui perang antar negara (kolonialisme) maupun perang ekonomi (imperialisme) yang didukung oleh korporasi/perusahaan dagang pada saat itu. Kedua, situasi dan kondisi tersebut maka mendorong keharusan bagi Rakyat Indonesia untuk melakukan perang rakyat sekaligus perang ekonomi dengan strategi perang gerilya. Menurut Tan Malaka, ketika nasib rakyat dipercayakan kepada para elit politik dan pemerintahan negara di republik yang baru berdiri dan perkembangannya justru mengambil cara-cara kompromis (gencatan senjata, berunding, dan berdiplomasi), maka tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itulah mengapa jargon sekaligus semangat Merdeka 100 % harus digelorakan. Ketiga, peperangan yang dilakukan harus dipahami pada tiga konteks, yaitu perang untuk kemerdekaan nasional untuk merebut wilayah yang telah dijajah; perang kemerdekaan politik untuk merebut kedaulatan politik nasional; dan perang ekonomi untuk menjamin kesejahteraan rakyat,

²⁰ Diskusi dengan Ben Ibratama Nur dalam grup WA Tan Malaka Institute, November 2016.

²¹ Diskusi dengan Syafrizal Harun dalam grup WA Tan Malaka Institut, November 2016.

²² Diskusi dengan Ben Ibratama Nur dalam grup WA Tan Malaka Institute, November 2016.

kemakmuran bangsa, dan keberdayaan republik. Ketika kemerdekaan nasional dan politik haruslah dalam posisi sepenuhnya 100 %, ternyata Tan Malaka masih mentoleransi bahwa jaminan ekonomi minimal harus dimiliki dan dikuasai sebesar 60 %. Secara tersirat, Tan Malaka menyadari tidak sepenuhnya kepemilikan dan penguasaan ekonomi bisa dilakukan sampai 100 %. Oleh sebab itu maka Tan Malaka menyebut soal konsesi, yang sesungguhnya tidak sekedar bermakna politis, namun juga ekonomis. Dengan kata lain, persoalan konsesi kemudian menjadi persoalan politik ekonomi atau ekonomi politik yang harus disikapi dan ditindaklanjuti dengan berhati-hati. Sebab melalui konsesi itulah sebuah negara-bangsa bisa saja merasa merdeka 100 % secara nasional dan politis, namun tidak secara ekonomis. Keempat, strategi gerpolek yang dilakukan dalam perang rakyat dan perang ekonomi kemudian menggabungkan persenjataan selayaknya yang harus dimiliki oleh Sang Gerilya. Pilihan politik ekonominya adalah koperasi, bukan korporasi yang harus diselenggarakan oleh Sang Gerilya, yaitu semua orang yang mencintai negerinya dan mencintai kemanusiaan dan keadilan sosial, tanpa terkecuali.

Keterangan Ringkas tentang Program Maksimum (1948)

Tan Malaka mempercayai bahwa menurut materialisme dalam sejarah (historical materialism), maka masyarakat dunia seluruhnya bergerak menuju ke zaman Sosialisme. Di zaman Sosialisme, maka semua sumber penghidupan dalam masyarakat sudah dimiliki, dikendalikan dan dikerjakan oleh masyarakat pekerja itu sendiri. Pemikiran Tan Malaka tentang demokrasi yaitu pemerintahan untuk dan oleh rakyat (Murba). Dalam pemerintahan Murba maka formula politik terlaksana menjadi pemerintah dari kaum proletar, untuk proletar dan oleh proletar. Dengan demikian (seandainya tak ada birokrasi dalam pemerintahan), maka tiap-tiap pemilihan umum dalam dunia demokrasi akan menaruhkan kekuasaan pada kaum buruh yang terbanyak jumlahnya. Dalam pemerintahan demokratis maka tentara atau militer juga dari, oleh, dan untuk rakyat (Murba). Selain itu, dalam konstitusi yang demokratis harus mendudukkan dengan jelas hak-hak rakyat (Murba) dalam politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dalam ekonomi politik, pemikiran Tan Malaka diantaranya adalah nasionalisasi, mekanisasi, rasionalisasi dan kolektifisasi dari perusahaan vital yang penting seperti perkebunan, pertambangan, industry, dan transportasi; menasionalisasi ekspor dan impor; menasionalisasi bank; dan membangun industri berat. Di bidang atau sektor sosial, Tan Malaka menyebutkan tentang pendidikan (pengajaran dan kebudayaan) atas dasar mekanisasi kolektifisasi.

Nasran-Yahudi dalam Tinjauan Madilog (1948)

Tan Malaka menjelaskan dinamika masyarakat Barat melalui tiga tingkat hukum Dialektika: (1) dari zaman Eropa sebelum Isa, sampai ke Feodalismenya zaman tengah (476-1492); (2) dari zaman Feodalisme sampai ke zaman Kapitalisme; dan (3) zaman kapitalisme itu berlaku (dari abad 15-16 sampai sekarang di Eropa Barat, kecuali Rusia). Dalam dialektika tersebut maka terjadi perubahan teknik ekonomi pada masyarakat Barat yang mengubah susunan sosial politiknya, dengan demikian maka susunan kelas baru menimbulkan jiwa (psychology) menurut filsafat dan politik baru pula.

Temuan-Temuan

Dari berbagai karya tersebut dapat diketahui bahwa Tan Malaka adalah seorang pemikir politik secara umum. Sebagai seorang pemikir politik Indonesia, Tan Malaka membagi perkembangan masyarakat Indonesia menjadi tiga periode, yaitu periode Indonesia Asli, periode Hindu sampai Belanda, dan periode Indonesia merdeka dan Sosialistik . Indonesia sebagai kata untuk menyebut negara bangsa baru muncul di akhir Abad 19 Masehi yang secara de facto pada 17 Agustus 1945 jam 10.00 (dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia), sedangkan secara de jure pada tahun 1948 . Karya-karya Tan Malaka banyak membicarakan tentang ilmu pengetahuan, dan karya yang paling komplet adalah Madilog. Dalam menulis karya-karyanya, Tan Malaka selalu didasarkan pada sebab-sebab tertentu (yang material). Karya paling awal adalah Parlemen atau Soviet? yang ditulis mulai tahun 1919 ketika menjadi Guru di Deli. Karya ini ditulis dua tahun setelah Revolusi Bolshevik di Rusia. Dalam karya ini Tan Malaka menawarkan Indonesia merdeka dan kelak berbentuk parlemen atau soviet . Dari pemaparan di atas, menurut Peneliti, dapat diketahui dan dipahami bahwa Tan Malaka adalah seorang Marxis karena Materialisme Historis adalah pemikiran Karl Marx. Marxisme dan Komunisme bagi Tan Malaka adalah alat atau instrumen berpikir dan bertindak khususnya dalam melawan kolonialisme/imperialisme dengan mengambil pembelajaran dari Rusia di bawah kepemimpinan Lenin dan Kawan-Kawan.

Sesuai dengan konsep-konsep dalam HI, Tan Malaka menjelaskan tentang (1) hubungan dagang luar negeri dan hubungan sosial politik dengan kaum Murba (Kelas Buruh.Proletar) di luar negeri atas dasar persamaan status; dan (2) berusaha menjadi anggota United Nations Organizations (UNO)/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi internasional yang lain atas dasar persamaan status, demokrasi dan tujuan pemerintahan dunia

kemurbaan²³. Tan Malaka memberikan deskripsi analisis tentang perang, perjanjian internasional, dan pembagian dunia menjadi tiga karakter: negeri-negeri penjajah, negeri-negeri setengah jajahan, dan negeri-negeri jajahan. Dalam deskripsi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa Tan Malaka selayaknya para pemikir HI lainnya yang menjelaskan tentang struktur dan sistem internasional yang berlaku. Khususnya para pengkaji ekonomi politik internasional Marxist maupun Non-Marxist, setidaknya para pemikir strukturalis. Selain itu, untuk melengkapi "Thesisnya" Tan Malaka merumuskan gagasan "Gabungan Aslia" - Asia-Australia - sebagai konsepsi untuk penyusunan tata politik dunia baru; makin lama makin jelas perdamaian dunia tidak mungkin dipertahankan dalam konfigurasi dan susunannya yang ada sampai menjelang tibanya Abad ke-XXI dewasa ini²⁴. Dalam Aslia, Tan Malaka membagi dua dalam delapan kawasan yang sama besar. Pembagian dunia menurut kawasan tersebut dilakukan dengan dasar pemahaman untuk perimbangan kekuatan di dunia²⁵. Dalam konteks kekinian, Aslia adalah sebuah gagasan tentang regionalisme atau regionalisasi sebagai salah satu dari strategi untuk menghadapi dinamika global dalam hubungan internasional.

Tan Malaka adalah seorang pemikir dan teoritis HI perspektif interseksis dalam artian pemikiran dan teori-teorinya dibentuk dari jalinan pemikiran hasil dialektika antara pengaruh budaya Minangkabau, Islam, Barat (Marxisme), dan Indonesia (lebih tepatnya keindonesiaan di mana, Tan Malaka berkontribusi membentuknya dalam karyanya Madilog). Madilog atau materialisme, dialektika, dan logika, adalah sebuah epistemologi interseksis yang dihasilkan Tan Malaka. Sedangkan salah satu konsepsi teoritik yang khas dari Tan Malaka dan menjadi milik Indonesia adalah Murba atau musyawarah rakyat banyak, dapat dipahami sebagai demokrasi sosialisme keindonesiaan. Murba dalam pengertian yang sebenarnya adalah dari Bahasa Sansekerta yang artinya masyarakat miskin yang mempunyai otot (tenaga fisik) dan otak (pemikiran). Tan Malaka menggunakan istilah Murba untuk menyebut Proletar Indonesia sebagai korban dari kolonialisme/imperialisme Kapitalis dari negara-bangsa lainnya. Sedangkan musyawarah rakyat banyak adalah pengertian yang dikembangkan oleh para pengikut pemikiran Tan Malaka. Murba sebagai pemikiran yang kemudian juga dimanifestasikan menjadi sebuah partai politik.

²³ Tan Malaka (1948), *Keterangan Ringkas Tentang Program Maksimum*, <https://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/1948-Keterangan.htm>, 10/11/2016, 10:41.

²⁴ W. Suwanto, mantan ketua umum Partai Murba hasil keputusan Kongres ke-V tahun 1960 di Bandung, dan mantan anggota DPA RI, dalam "Pendahuluan untuk Penjelasan" pada Tan Malaka (1921), *Parlemen atau Soviet?*, Jakarta: Yayasan Massa, 1987.

²⁵ Diskusi dengan Ben Ibratama Nur dalam grup WA Tan Malaka Institute, November 2016.

Sebagai pemikiran adalah Proletar Indonesia yang harus diselamatkan dan sebagai partai politik mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 dan salah satu partai yang kalah namun banyak mendapatkan tawaran Menteri dari Presiden Soekarno²⁶. Selain itu juga ada konsepsi Merdeka 100 % yang merupakan sebuah jawaban atau *counter* atas kompromi (dalam perjanjian internasional) Linggarjati, Renville, Roem Rojen, dan Konferensi Meja Bundar (KMB) ala Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, dan Mohammad Hatta. Kemudian Aslia yang merupakan gagasan regionalism dengan dasar kemiripan kondisi geografis dan situasi model produksi antara Asia dan Australia. Bahkan ketika di Filipina, Tan Malaka mendeklarasikan PARI yang sebagian diketahui orang sebagai Partai Rakyat Indonesia, namun lebih dari itu adalah Proletaria Asia Republik Internasional²⁷.

Kesimpulan

Tan Malaka adalah seorang pemikir dan teoritis HI Indonesia yang interseksis, pemikiran dan teori-teorinya dibentuk dari jalinan pemikiran hasil dialektika antara pengaruh budaya Minangkabau, Islam, Barat (Marxisme), dan Indonesia (lebih tepatnya keindonesiaan di mana, Tan Malaka berkontribusi membentuknya dalam karyanya Madilog). Madilog atau materialisme, dialektika, dan logika, adalah sebuah epistemologi interseksis yang dihasilkan Tan Malaka. Selain itu konsep-konsep yang khas dari Tan Malaka seperti Murba, Gerpolek, Merdeka 100 %, Aslia, PARI, dan sebagainya, merupakan langkah berikutnya dalam teorisasi yang dilakukannya sebagai bagian dari keilmuan keindonesiaan yang juga bisa disebut sebagai Teori HI Indonesia. Untuk melengkapi hasil penelitian ini maka perlu penelitian lebih lanjut dalam mengkonstruksi HI perspektif Indonesia.

Referensi

Ahmad Fauzan (2006), *Pemikiran Politik Tan Malaka (Kajian Filsafat Politik)*, Skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin, Jurusan Aqidah dan Filsafat (AF), Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

²⁶ Diskusi dengan Ben Ibratama Nur dalam grup WA Tan Malaka Institute, November 2016.

²⁷ Diskusi dengan Ben Ibratama Nur dalam grup WA Tan Malaka Institute, November 2016.

Amitav Acharya (2008), "Nonhegemonic International Relations: A Preliminary Conceptualization". Makalah dimuat dalam School of Sociology, Politics, and International Studies, University of Bristol Working Paper No. 10-08, dan disampaikan pada Konvensi Asosiasi Studi Internasional, San Francisco, 2008.

_____ dan Barry Buzan (ed), *Non-Western International Relations Theory Perspectives on and Beyond Asia*, London dan New York: Routledge.

Antonio Gramsci, 1959. *The Modern Prince and Other Writings*. International Publishers.

Cita Aisyah Nurani Putri dan Sumarno (2016), "Masa Muda Soekarno dan Transformasi Pemikiran Politiknya dari HOS Tjokroaminoto di Surabaya pada Tahun 1916-1921", Jurnal Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 4, No. 1, Maret 2016.

Gumilar Rusliwa Somantri (2005), "Memahami Metode Kualitatif", Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, NO. 2, Desember 2005, halaman 57-65.

Irfa Puspitasari, Baiq L.S.W. Wardhani, dan Radityo Dharmaputra (2014), "Pemetaan Studi Hubungan Internasional di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif", Jurnal Global & Strategis, Th. 8, No.1. Januari- Juni 2014. Halaman 147-167.

Joko Susanto (2012), "Menuju Trajektori Baru: Sebuah Manifesto untuk Studi Hubungan Internasional Indonesia", Global & Strategis, Th. 6, No. 2, Juli-Desember 2012, halaman 135-169.

Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse (2014), *International Relations*, Edisi 10, 2013-2014, Pearson.

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi (2012), *International Relations Theory*, Pearson.

Robert Biel (2000), *The New Imperialism, Crisis and Contradictions in North/South Relations*, London dan New York: Zed Books.

Robert W. Cox, 1987. *Production, Power, and World Order: Social Forces in the Making of History*. Columbia.

Stephen Gill, ed. 1993. *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*. Cambridge,

Stephen M. Walt, *The Relationship Between Theory and Policy in International Relations*, 10.1146/annurev.polisci.7.012003.104904, Annu. Rev. Polit.

Sci. 2005.8:23-48. Downloaded from arjournals.annualreviews.org. by University of California - Santa Cruz on 11/30/07.

Virtuous Setyaka (2016), “Membaca Ulang Pemikiran Tan Malaka Dalam Gerpolek”, makalah dalam Dialog Kebangsaan 2 “Politik Pergerakan Kemerdekaan di Minangkabau” diselenggarakan Tan Malaka Institute dalam rangka Memperingati 119 tahun Tan Malaka dan Menyambut Ramadhan 1437 H di Galeri Taman Budaya, Jl. Diponegoro 19 Padang, Sumatera Barat, Indonesia pada Kamis 02 Juni 2016, Jam 10.00-16.00 WIB.

_____ (2016), “Imaji Kebangsaan dan Ironi Kepartaian: Kajian dan Kontekstualisasi Gagasan Peradaban Lintas-Nusa Tan Malaka dalam *Naar de 'Republiek Indonesia'*” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional 71 Tahun Indonesia Merdeka, Jaringan Kebangsaan Antar-Nusa diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sumatera Barat, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumatera Barat, di Convention Hall, Universitas Andalas, Padang pada 23 – 24 Agustus 2016.

<https://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/>

Pemaknaan Kembali Konsep "Internasional" dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Komparatif Pembangunan Kota Ramah HAM, Kesepakatan Agenda 2030, Perumusan Visi ASEAN 2025 dan Kerja sama Perpajakan Global

Yulius P Hermawan

Universitas Katolik Parahyangan

purwadi@unpar.ac.id

Abstrak

Sejak kelahirannya sebagai disiplin ilmu, konsepsi internasional dirumuskan seiring dan sejalan cara pandang Westphalian yang menempatkan yurisdiksi, teritorialitas, kedaulatan dan negara sebagai istilah-istilah kunci/induk untuk memahami hubungan internasional. Ini ditunjukkan baik oleh teori-teori besar (established traditions) maupun teori-teori alternatif. Dalam kurun waktu hampir sembilan puluh tahun, seolah-olah terjadi 'keajegan' atau bahkan kemandegan makna dari konsepsi internasional. Paper ini akan memetakan pemaknaan "internasional" dalam konsep "hubungan internasional" dengan mencoba keluar dari peta "perspektif Westphalian konvensional". Argumen yang dibangun mengacu pada pentingnya pemaknaan yang lebih dekat dengan fenomena terkontemporer yang lebih kompleks dari tatanan Westphalian. Empat kasus akan dilihat untuk melihat seberapa jauh telah terjadi "perluasan/pengayaan" makna konsep internasional, yaitu Gerakan Pembangunan Kota HAM, Perumusan Agenda 2030, Visi ASEAN 2025 dan Kerjasama Perpajakan Global. Paper ini menunjukkan 'perluasan pemaknaan' konsepsi internasional yang dalam perspektif historisisme bersifat progresif terutama dalam kasus pembangunan Kota Ramah HAM dan perumusan Agenda 2030, sementara konservatisme pemaknaan tetap menonjol dalam perumusan visi ASEAN 2025. Dalam kasus kerjasama perpajakan global, ditemukan komplikasi dalam menghadapi masalah yang bersifat Post Westphalian dengan pijakan tatanan Westphalian.

Kata kunci:

Internasional, Teorisasi, Yurisdiksi, Suprateritorialitas

Introduksi

Hubungan Internasional merupakan disiplin yang unik jika melihat pada pokok bahasan yang dijadikan subjek kajiannya, yaitu hubungan internasional. Perbedaan antara nama disiplin dan pokok bahasan hanyalah pada penggunaan kapital pada dua konsep kunci yang dipakai. Namun demikian tersirat suatu makna yang sangat vital dari jati diri disiplin yang sifatnya multidisipliner ini, yaitu pokok bahasan disiplin ini bersifat kompleks dan multi aspek. Jantung dari disiplin ini adalah konsep "internasional" yang selama ini telah diinterpretasikan secara beragam oleh para teoretisi Hubungan Internasional. Cara interpretasi terhadap konsep "internasional" seringkali menjadi pijakan untuk melihat apakah seseorang penstudi adalah pengikut Realis, Liberalis, Mazhab Inggris (English), Marxis, Strukturalis atau Poststrukturalis, atau perspektif-perspektif alternatif dan normatif lainnya.

Paper ini memaparkan upaya pemaknaan konsep internasional dalam kajian disiplin Hubungan Internasional. Kajian ini secara khusus akan menyusun narasi tentang pendefinisian-pendefinisian konsepsi internasional dengan merujuk pada empat fenomena hubungan internasional, yaitu gerakan pembangunan kota ramah HAM, kesepakatan global tentang Agenda 2030, proses perumusan visi ASEAN 2025 dan kerjasama perpajakan global. Paper ini akan menunjukkan 'perluasan dan pengayaan pemaknaan' konsepsi internasional yang dalam perspektif historisisme bersifat progresif terutama dalam kasus pembangunan Kota Ramah HAM dan perumusan Agenda 2030, sementara konservatisme pemaknaan tetap menonjol dalam perumusan visi ASEAN 2025. Dalam kasus kerjasama perpajakan global, ditemukan suatu perangkat perspektif Westphalian untuk menyelesaikan masalah global yang bersifat Post Westphalian.

Spektrum yurisdiksi dan keaktoran dalam pemaknaan konsep "Internasional"

Dunia hari ini telah mengalami perubahan penting yang membuatnya berbeda dengan dunia pada pasca Perang Dunia Pertama ketika disiplin Hubungan Internasional pertama kali dilahirkan di Wales, Inggris. Namun cara penstudi HI melihat dunia hari ini sepertinya tetap tidak berbeda dengan cara penstudi HI melihat dunia pada era pasca Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama mencerminkan suatu dampak akumulatif yang dahsyat dari cara berpikir Westphalian yang menempatkan kedaulatan di atas yurisdiksi dan teritori negara sebagai sesuatu yang tidak dapat diintervensi dan dinegosiasikan. Negara memegang kendali untuk mengontrol segala bentuk peristiwa yang terjadi di wilayah teritorialnya.

Salah satu inti penting dari perspektif Westphalian yang merasuki cara berpikir penstudi HI selama hampir sembilan puluh tahun ini adalah konsepsi “hubungan internasional” yang dimaknai dalam dua spektrum: (1) batas yuridiksi; dan (2) keaktoran. Dalam spektrum yuridiksi, hubungan internasional didefinisikan sebagai “interaksi lintas batas negara” (*across national boundary interaction*). Pendefinisian seperti ini menempatkan batas-batas teritori negara sebagai “keutamaan” untuk membedakan hubungan internasional dengan politik domestik. Dengan demikian, “teritori negara” ditempatkan sentral dalam pemaknaan konsep “internasional”.

Perspektif Westphalian juga meresapi cara berpikir penstudi HI dalam melihat spektrum “keaktoran.” Hubungan internasional didefinisikan sebagai hubungan antar aktor dari dua bangsa yang berbeda. Dalam hal ini penstudi umumnya secara implisit melekatkan konsep bangsa dan negara sebagai dua hal yang berhubungan sangat kuat. Sehingga yang dimaksud hubungan antara dua bangsa yang berbeda juga bermakna hubungan antara aktor dari dua negara yang berbeda atau lebih. Secara singkat, istilah “hubungan antar bangsa” dimaknai sama dengan istilah “hubungan antar negara”. Sehingga sekalipun saat ini diakui muncul beragam aktor hubungan internasional, pengklasifikasian pluralisme aktor tetap menempatkan sentralitas negara; bahkan di banyak literatur, pluralisme ini sering disederhanakan dengan dikotomi *state* (negara) dan *non-state actors*.

Tabel 1. Dua Spektrum Pemaknaan Konsep Internasional

Spektrum	Pemaknaan	Wujud
Batas yuridiksi/ teritorialitas	Melintas batas yuridiksi negara (<i>across national boundary</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antar kedaulatan 2. Lintas kedaulatan 3. Antar teritori 4. Lintas teritori/Suprateritorial 5. Global (seperti Isu Global, Politik Global, Perekonomian Global, Tata kelola Global) 6. Dunia (Politik Dunia, Perekonomian Dunia, Masyarakat Dunia/<i>World Society</i>). <p>Dimensi ke-<i>negara</i>-an (intergovernmentalisme)</p>
Keaktoran	Melibatkan aktor-aktor yang berasal dari sedikitnya dua bangsa yang berbeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antar negara 2. Antar pemerintah 3. Antar pemerintah daerah <p>Dimensi ke-<i>non-negara</i>-an (transnasionalisme)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antar individu beda bangsa negara 2. Antar kelompok individu beda bangsa

negara

3. Antara negara dan individu dari negara lain namun tidak dikontrol oleh negara asal individu tersebut

4. Korporasi transnasional

5. INGOs

Sumber: Dimaknai dari Interpretasi oleh Penulis

Cara berpikir tatanan Westphalian juga berpengaruh terhadap agenda riset dalam disiplin Hubungan Internasional. Penstudi telah mengenal beragam tingkat analisa dan dapat berargumen berbeda tentang berapa banyak seharusnya tingkat analisis yang dapat dikembangkan untuk memahami atau melakukan eksplanasi atas fenomena hubungan internasional sebagai subjek kajiannya (Buzan, 1995). Namun berapapun jumlah level analisis tersebut, level negara merupakan salah satu yang selalu ada di setiap literatur tentang peringkat analisa. Mereka yang berargumen dua level, pasti akan menyebut negara sebagai salah satu dari dua level tersebut: (1) negara dan sistem internasional; atau (2) negara dan individu. Mereka yang menyebut tiga tingkat analisis akan menempatkan juga negara di dalamnya (individu, negara dan sistem internasional). Peneliti yang percaya pada satu tingkat analisa bukan negara, seringkali harus mengkaitkan tingkat analisisnya dengan negara sebagai variabel dependen supaya kajiannya dapat dikategorikan sebagai penelitian Hubungan Internasional.

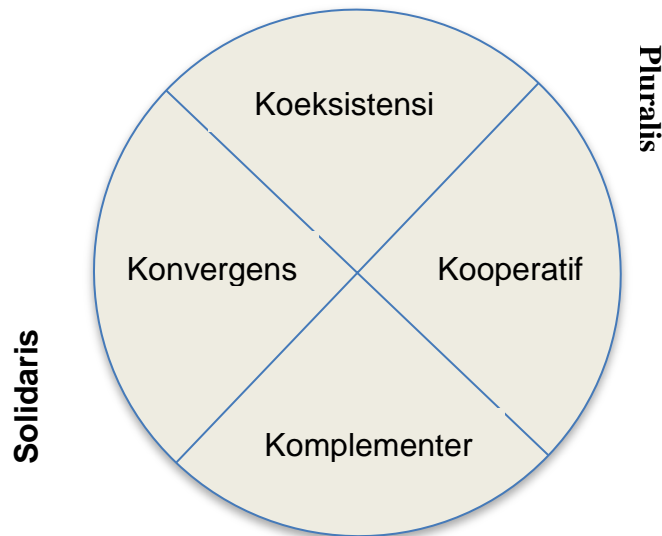
Dewasa ini fenomena hubungan internasional telah menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks dari apa yang dibayangkan oleh teori-teori yang ada dalam Hubungan Internasional, baik di dimensi keaktoran maupun dimensi ruang interaksi (batas yuridiksi). Dalam konteks ini, konsep internasional didefinisikan sebagai “multi-subjek”: “antar individu yang berbeda bangsa”, “antar kelompok individu dari dua atau lebih bangsa”, transnasional, transgovernmental dan interregional.

Kajian tentang perkembangan ‘multi aktor’ ini telah dimulai oleh Keohane dan Nye (1971) pada awal tahun 1970an dengan memunculkan konsep “transnationalism”. Interaksi transnasional, didefinisikan sebagai “*the movement of tangible or intangible items across state boundaries when at least one actor is not an agent of a government or an intergovernmental organization*” (Keohane dan Nye, 1971: 332). Dua puluh tahun kemudian, perumusan konsepsi transnasional tidak jauh berbeda dengan rumusan Keohane dan Nye. Misalnya, Viotti dan Kauppi, 1999: 498) mendefinisikan transnasionalisme sebagai “*Interactions and Coalitions across state boundaries that involve such diverse nongovernmental actors as multinational corporations and banks, interest groups, religious groups and terrorist networks.*”

Definisi Keohane dan Nye (1971) dan Viotti dan Kauppi (1997) tersebut menunjukkan pengayaan dimensi keaktoran dan problematika dimensi

jurisdiksional terkait kemampuan kontrol dari negara terhadap interaksi tersebut. Aktor bisa kedua-duanya non negara; atau satu non negara dan yang lain negara, sejauh tidak ada kontrol dari negara asal aktor non negara. Yang ditekankan adalah siapapun dari bangsa manapun bisa berhubungan dengan siapapun dari bangsa lain, tanpa dikontrol oleh otoritas negara di mana mereka tinggal ataupun menjadi warga negara. Mereka juga tidak harus merepresentasikan kepentingan negara mereka, melainkan mengejar kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri secara individual ataupun kelompok mereka.

Gambar 1. Posibilitas Relasi Keaktoran



Sumber: Disusun oleh peneliti dengan mengembangkan secara bebas inspirasi konsepsi *World Society* Barry Buzan (2004).

Yang menarik kemudian untuk dikaji lebih mendalam adalah relasi di antara aktor negara dan aktor-aktor internasional baru tersebut. Rosenau (1990) menyebut relasi antar aktor-aktor (Negara dan non Negara) tersebut dengan konsepsi "koeksistensi".

Namun perkembangan hubungan internasional di abad ke-21 memperlihatkan gambaran interaksi di antara aktor-aktor internasional tersebut yang tidak sekedar "koeksis" tetapi "saling mempengaruhi". Dari sifat saling mempengaruhi ini, relasi negara dan aktor non negara secara hipotetik dapat berkembang menjadi relasi kooperatif, relasi saling melengkapi/ komplementer dan bahkan relasi konvergensi. Sekalipun harus diakui terjadi juga relasi koeksistensial-fragmentatif yang sifatnya kompetitif ataupun konfliktual di antara aktor negara dan non negara.

Dimensi ruang interaksi tempat di mana aktor-aktor berinteraksi menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Penemuan baru di bidang

teknologi komunikasi dan transportasi membuat interaksi antar aktor menjadi sangat mudah. Ruang interaksinya jauh lebih luas dari teritori yang selama ini didefinisikan oleh para penstudi Hubungan Internasional. Dalam konteks ini, batas-batas yuridiksi negara menjadi kabur. Implikasinya adalah negara kehilangan kemampuan untuk mengontrol interaksi yang dilakukan warganya, terutama interaksi yang melibatkan lintas yurisdiksi negara.

Pada tahun 1990an kajian tentang transnasionalisme ini menjadi sangat berkembang dengan istilah-istilah baru seiring dengan terjadinya turbulensi dalam politik dunia di era pasca perang dingin (Rosenau, 1990). Sebagian para pengkaji mengkaitkan perubahan ini dengan munculnya tatanan Post-Westphalia. Linklater (1996) mendiskusikan kewarganegaraan dan kedaulatan di Negara Post Westphalia. Smith (2000) mencermati hubungan transnasionalisme dengan kewarganegaraan. Portes (1997) menemukan munculnya komunitas transnasional. Foner (2007) melihat interaksi lintas batas nasional telah menjadi tantangan bagi "*nationally bounded citizenship*."

Kajian berkembang lebih lanjut dengan pemikiran tentang bagaimana mengelola perluasan aktivitas transnasional dan hubungannya dengan peran negara. Shotwell (2001) melihat pentingnya aturan-aturan global untuk menangani masalah-masalah terkait dengan berkurangnya kemampuan sistem berbasis negara tradisional. Schaferhoff, 269 ystem 269 al Kaan (2007) membangun konsepsi tentang *Transnational Public-Private Partnership* dalam Hubungan Internasional, yang mereka pandang sebagai suatu tipe tata kelola hibrid, di mana aktor negara dan non negara seperti transnational corporations dan NGOs memainkan fungsi dalam mengelola isu-isu global baru. Kobrin (2008) mengkaitkan hubungan transnasional yang dilakukan oleh *transnational corporations* dengan tata kelola global dan berargumen bahwa sistem internasional sekarang sedang mengalami sebuah transisi menuju tata internasional post Westphalian. Vaughan (2011) menemukan beragam potensi bentuk dan manifestasi sistem negara post-Westphalian dan berargumen bahwa institusi-institusi dan praktik-praktiknya diperlukan supaya penduduk dunia dapat membentuk suatu *masyarakat internasional pengganti* dan mengelola urusan-urusan mereka yang saling tergantung sama satu lainnya. Zajak (2014) mengkaji dampak intervensi aktivis, evolusi dan interaksi institusional terhadap proses konvergensi selektif antara norma global dan praktik dalam konteks *Post-Westphalian Landscape*.

Dari penelusuran teoretis terhadap perkembangan terkini hubungan internasional, terlihat adanya pengayaan makna konsep internasional: baik pengayaan dimensi aktor maupun perluasan dimensi ruang interaksi. Hubungan di antara kedua dimensi tersebut melahirkan konsepsi baru tentang

masyarakat dunia/masyarakat global yang ruang aktivitasnya suprateritorial. Fenomena ini juga telah menuntut munculnya tata kelola global baru yang memiliki kompetensi untuk mengelola masalah-masalah baru, yang tidak dapat dijangkau dan ditangani oleh otoritas negara.

Pengayaan Makna Konsep Internasional

Empat kasus menjadi kajian empirikal untuk melihat pengayaan dimensi aktor dan perluasan dimensi ruang interaksi, serta implikasinya bagi munculnya kebutuhan pada institusi-institusi baru. Di masing-masing kasus tersebut dilihat seberapa jauh konsepsi internasional telah berkembang dari pendefinisian konvensional yang melekat dalam tatanan Westphalian. Dua dimensi yang akan dilihat adalah: dimensi keaktoran dan relasi di antara mereka (koeksistensi, kooperatif, komplementer, atau konvergensi), dan dimensi batas yuridiksi (*state territory* atau suprateritorialitas).

Pembangunan Kota HAM

Gerakan pembangunan kota ramah HAM adalah inisiatif dari organisasi non pemerintah internasional (INGO) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk "membumikan" penegakan HAM di level kota atau kabupaten.

INGO tersebut adalah: *The People's Movement for Human Rights Education (PDHRE)* yang dibentuk tahun 1989 dan bergerak secara internasional dengan suatu keyakinan terhadap kekuatan pembelajaran HAM dalam transformasi ekonomi dan sistem. INGO yang bermarkas di New York ini bekerjasama secara langsung dan tidak langsung dengan jaringan CSO yang berafiliasi dengannya maupun partner di lebih dari enam puluh negara di seluruh. Tujuan jaringan ini adalah untuk membangun dan memajukan pembelajaran HAM sebagai gaya hidup. PDHRE mengharapkan kerjasama ini dapat "*enable women and men to re-imagine their lives and discover their own power to define the destiny of their community*".¹

Pendekatan di tingkat kota didasarkan pada argumentasi pada realitas bahwa 2 milyar penduduk dunia saat ini tinggal di daerah kota. Sehingga kota merupakan mikroskomos dari suatu negara. Empat milyar perempuan dan laki laki, kaum muda dan anak-anak tinggal di kota dalam jangka lima belas hingga duapuluh tahun; Dengan keberagaman penghuni kota dan isu-isu yang terkait, kota menghadapi situasi di mana tidak ada pengetahuan yang melekat, sistem dukungan, atau panduan bagaimana hidup satu sama lain dan bagaimana

¹ <http://www.pdhre.org/projects/hrcommun.html>

mereka dapat mempraktikkan nilai-nilai moral dalam dunia yang sedang mengalami perubahan cepat seperti saat ini.²

Kota yang pertamakali mengembangkan Kota HAM adalah Rosario, Argentina sejak 1997 melalui pelatihan kepada polisi untuk mengedepankan pendekatan HAM. Sejak itu gagasan bergulir ke kota-kota lain di dunia, termasuk Graz – Austria, Santa Cruz – Bolivia, Bihac – Bosnia, Porto Alegre – Brazil, Edmonton, Winnipeg – Canada, Temuco, Valparaiso – Chile, Bongo, Newton, Wa, Nimamobi, Walewale – Ghana, Nagpur – India, Korogocho – Kenya, Kita, Kati, Kayes, Sikasso, Timbuktu – Mali, Bucuy Municipality – Philippines, Musha – Rwanda, Thies – Senegal, Mogale – South Africa, Kaohsiung – Taiwan.³

Di Indonesia, kota yang sudah berkomitmen dan mengimplementasikan untuk membangun kota HAM adalah Poso, Bojonegoro dan Wonosobo (INFID, 2015). Perwujudan kota HAM di kota-kota tersebut mendapat dukungan dan pendampingan dari INFID. Contoh kota lain yang berkomitmen membangun diri sebagai Kota HAM adalah Bandung. Walikota Bandung telah mendeklarasikan komitmen untuk membangun Bandung sebagai Kota HAM pada tanggal 2 April 2015⁴; dan telah menandatangani piagam Deklarasi HAM pada tanggal 11 Desember 2015 yang berisikan langkah-langkah implementasi pembangunan Bandung sebagai kota HAM.⁵ Pembangunan Bandung sebagai kota Ramah HAM didukung oleh Paguyuban Hak Asasi Manusia (Paham) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).⁶

Gambar 2. Penggiat Pembangunan Kota HAM

² Ibid.

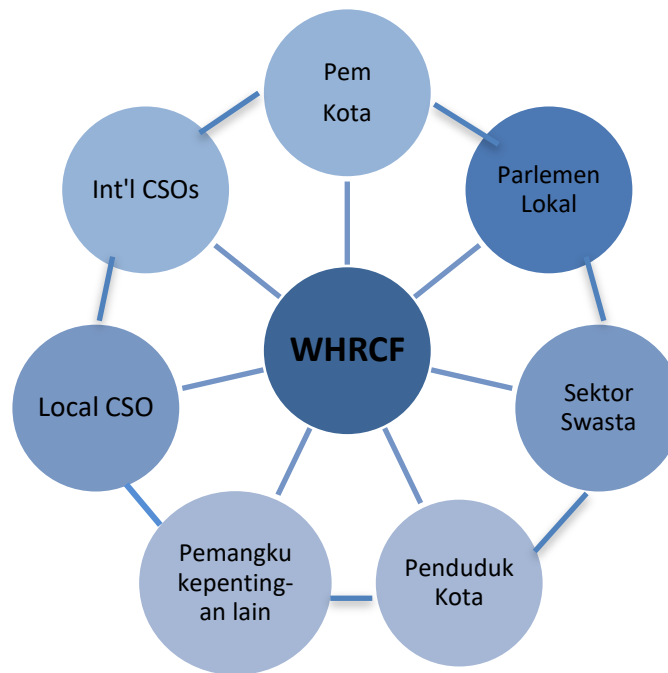
³ Ibid.

⁴ "Kota Bandung menjadi Kota Hak Asasi Manusia," <http://infobandung.co.id/kota-bandung-menjadi-kota-hak-asasi-manusia/>

⁵ <http://regional.kompas.com/read/2015/12/11/11112941/Bandung>.

Canangkan.Diri.sebagai.Kota.Ramah.HAM.

⁶ Ibid.



Sumber: Divisualisasikan oleh penulis berdasarkan dokumen Deklarasi Kota HAM

Gerakan pembangunan kota HAM berkembang dengan munculnya jaringan antar pemerintah daerah dan CSO yang berkomitmen dan terlibat dalam proses pembangunan Kota HAM. The World Human Rights Cities Forum (WHRCF) dibentuk pada tahun 2011 dan mengadakan pertemuan setiap tahun di Gwangju, Republik Korea.⁷ Pada pertemuan pertama di tahun 2011, para bupati/walikota dan CSO mendeklarasikan the Gwangju Declaration on Human Rights Cities yang diadopsi pada 17 Mei 2011. WHRCF ini menjadi suatu pendekatan dalam *“human rights governance in the local context where local governments, local parliaments, civil society, private sector organizations and other stakeholders work together to improve the quality of life for all inhabitants in the spirit of partnership based on human rights standards and norms.”*⁸ WHRCF menjadi forum yang mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai negara dan aktivis penggiat HAM untuk mempromosikan penegakan nilai-nilai yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Negosiasi Kesepakatan Agenda 2030 Transforming Our World

Kesepakatan Agenda 2030 muncul sebagai hasil refleksi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan aktivis CSO bahwa tujuan yang dicanangkan dalam Millenium Development Goals pada tahun 2000 belum

⁷ http://www.whrcf.org/page.php?page_code=E20100.

⁸ Ibid.

tercapai secara penuh. Kemiskinan, kebodohan, malnutrisi, penyakit serta masalah-masalah kemanusiaan lain tetap menjadi isu besar pada tahun 2015. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil peran sangat penting dalam proses membangun kesepakatan baru di antara bangsa-bangsa di dunia: yaitu *17 Goals to transform our world* (17 tujuan untuk mentransformasikan dunia kita), -suatu agenda baru yang ambisius untuk menghapus kemiskinan pada tahun 2030 dan secara universal mempromosikan kesejahteraan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan bersama.⁹

Gambar 3. Pemangku Kepentingan Perumusan Agenda 2030



Sumber: Visualisasi oleh Penulis berdasarkan Dokumen Agenda 2030

Perumusan konsensus global baru ini merupakan proses yang sangat panjang di mana pentingnya peran aktor negara dan non negara diakui secara formal. Peran sentral negara dalam proses ini sangat sentral, namun ruang partisipasi dibuka pula untuk aktor-aktor non negara. Jika sejarahnya merujuk pada UN Conference on Environment and Development Agenda 21 (KTT Rio) di tahun 1992 sebagai cikal bakal Agenda 2030, ada sembilan sektor masyarakat utama ("major groups"), yang mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan berkelanjutan. Mereka termasuk "*women, children and youth, indigenous peoples, non-governmental organizations, local authorities, workers and trade unions, business and industry, the scientific and technological community, and farmers.*"¹⁰

⁹ <http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/08/transforming-our-world-document-adoption/>

¹⁰ <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9486ANilo%20Civil%20Society%20&%20Other%20Stakeholders.pdf>.

KTT Rio +20 yang menghasilkan dokumen *The Future We Want*, memberi penguatan lagi bagi partisipasi seluruh sektor. Ditegaskan bahwa proses pembuatan keputusan, perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan penting dan partisipasi aktif dari "regional, national and subnational legislatures and judiciaries" dan juga semua *major groups*, pemangku kepentingan lain termasuk komunitas lokal, kelompok sukarelawan dan yayasan, kaum migrant dan keluarga, serta lansia dan penyandang disabilitas."¹¹ Proses perumusan SDGs sebagai elaborasi agenda pembangunan post-2015 yang baru berjalan dalam dua jalur: (1) *General Assembly Open Working Group for Sustainable Goals*, di mana perwakilan dari pemerintah, sector swasta dan Civil Society berkontribusi di dalamnya; (2) *the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing (IECSDF)* yang telah menyelenggarakan dengar pendapat interaktif dengan Civil Society.

PBB juga menyelenggarakan konsultasi global di lebih seratus negara dengan melibatkan agen-agen PBB, negara anggota dan masyarakat sipil. Konsultasi tematik dibuat secara *online* sehingga dapat melibatkan partisipasi yang sangat luas. Dalam negosiasi-negosiasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, negara-negara anggota telah menyelenggarakan pertemuan dengan *major groups* dan pemangku kepentingan lain untuk mendapatkan masukan kongkrit. *Major groups* juga mendapat kesempatan untuk memberikan input dan komentar tertulis atas rancangan dokumen (*outcome documents*) yang sedang dalam proses negosiasi antar negara.¹²

Keterlibatan masyarakat sipil juga besar dalam proses negosiasi perumusan *Addis Ababa Action Agenda (AAA)* yang fokus pada isu pendanaan Agenda 2030. Masyarakat sipil membentuk *FfD Global Civil Society Coalition* sebagai wadah masyarakat sipil untuk mendiskusikan posisi, strategi dan usulan kongkrit bagi pendanaan SDGs.¹³

Pasca disepakatinya Agenda 2030, negara-negara anggota PBB juga mengakui peran penting masyarakat sipil dan *major groups* lain seperti sektor swasta dan *indigineous people* dalam proses implementasi di tingkat nasional dan sub-nasional melalui perumusan. Di tingkat global, telah disepakati suatu High-level Political Forum (HLPF) dalam UN ECOSOC, untuk melakukan review atas pelaksanaan agenda 2030. Keterlibatan *major groups* dan pemangku kepentingan lain menjadi salah satu agenda penting, di mana HLPF

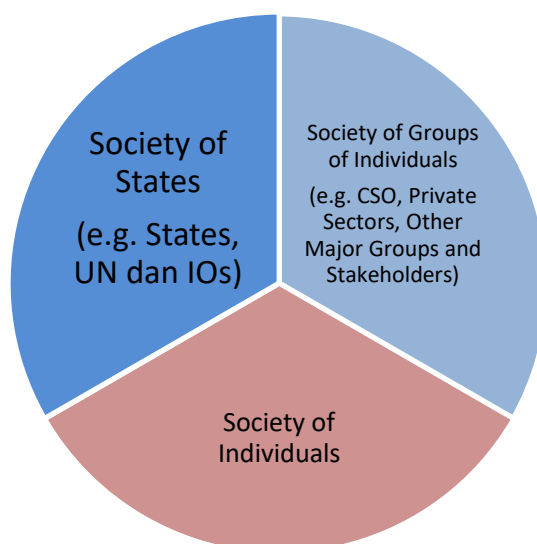
¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

juga mengharapkan mereka untuk memberikan laporan tentang kontribusi mereka pada implementasi agenda. Ini dipertegas lagi dalam resolusi PBB 67/290 tentang "Format and organizational aspects of the high-level forum" di mana *Major Groups* didorong untuk secara otonom membentuk mekanisme koordinasi yang efektif untuk berpartisipasi dalam HLPF tersebut

Gambar 4. Pemaknaan Masyarakat Internasional dalam Agenda 2030



Sumber: Dikembangkan dari konsepsi *World Society* Barry Buzan (2004) secara luwes

Yang menarik dari dibangunnya kemitraan antara negara dan non negara tersebut adalah: dimensi keaktoran menjadi sangat pluralistik dengan semakin luasnya ruang partisipasi di tingkat global, nasional dan sub-nasional. Di tingkat global, setiap aktor yang terlibat dalam proses negosiasi perumusan agenda 2030 didorong untuk menggagas suatu inisiatif yang sifatnya "across jurisdictional borders". Sehingga kasus perumusan agenda 2030 ini menunjukkan adanya pengayaan dari makna hubungan internasional *beyond Westphalian system*, sekalipun peran negara tetap sentral dalam perumusan dokumen formal hasil negosiasi intergovernmental dalam wadah PBB, serta implementasinya di tingkat nasional dan sub nasional.

Perumusan Visi ASEAN 2025 Forging Ahead Together

Perumusan visi ASEAN 2025 merupakan refleksi dan komitmen pemimpin-pemimpin ASEAN untuk melanjutkan proses pembentukan komunitas ASEAN pasca "realisasi" visi komunitas ASEAN 2015 yang

dirumuskan delapan tahun sebelumnya.¹⁴ Ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan sentral tentang apa yang akan dilakukan ASEAN pada periode pasca 2015 setelah selama delapan tahun sebelumnya pemimpin-pemimpin ASEAN mendengung-dengungkan pembentukan komunitas ASEAN 2015. Dokumen *ASEAN 2025 Forging Ahead Together* ditandatangani dalam KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Nopember 2015.

Dokumen visi ASEAN 2025 menegaskan penekanan sentralitas "*people of ASEAN*" sebagai basis dan arah proses dan aktivitas ASEAN selama sepuluh tahun kedepan. Di antara tujuan-tujuan yang dicanangkan adalah "*Greater emphasis on the peoples of ASEAN and their well-being*" dan "*Engage all nationals of ASEAN Member States through effective and innovative platforms to promote commitment and identification with ASEAN policies and regional interests.*"¹⁵ Di masing-masing pilar komunitas ASEAN, konsep kerakyatan (*people-ness*) sebagai pusat gerak ASEAN juga dirumuskan secara eksplisit. Di pilar komunitas politik keamanan, ditegaskan di antara tujuan ASEAN, adalah "*A rules-based, people-oriented, people-centered ASEAN in a region of peace, stability and prosperity.*" Di pilar komunitas ekonomi, di antara tujuan ASEAN adalah: suatu kawasan yang terkoneksi di mana "*improvements in transport linkages and infrastructure help peoples and business move efficiently and work more productively across borders, expand market reach and strategically source goods and services.*" Di pilar komunitas sosio-kultural, salah satu tujuan ASEAN adalah suatu komunitas inklusif yaitu "*people-oriented, people-centred and promotes a high quality of life and equitable access to opportunities for all, and engages relevant stakeholders in ASEAN process.*"¹⁶

Seberapa jauh perumusan visi ASEAN yang menempatkan *people* (rakyat) di posisi yang sangat vital tersebut telah melibatkan partisipasi masyarakat luas? ASEAN telah dikritik sebagai forum yang sangat *state centric* di mana peran negara sangat dominan dan determinan dalam proses ASEAN. Seluruh proses formal ASEAN, dari Senior Official Meetings (SOM) hingga KTT, selalu didominasi oleh perwakilan dari pejabat-pejabat pemerintah negara anggota ASEAN. Ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam negosiasi tersebut sangat minimal. ASEAN 2025 dapat dilihat sebagai jawaban terhadap kritik tersebut.

¹⁴ <http://asean.org/asean-2025-at-a-glance/> diakses 13 Nopember 2016.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Lihat dokumen ASEAN 2025, <http://www.asean.org/storage/2015/12/> ASEAN-2025-Forging-Ahead-Together-final.pdf.

Dalam perumusan dokumen ASEAN 2025, inti prosesnya bersifat *state centric*, namun memberikan ruang untuk konsultasi publik. Dalam hal ini ASEAN membentuk dan memberikan mandat khusus kepada High Level Task Force (HLTF) yang terdiri dari sepuluh perwakilan tingkat tinggi dari negara-negara anggota ASEAN. HLTF yang diketuai oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2015 mengemban mandat untuk mengembangkan dan memformulasikan visi besar ASEAN dalam sepuluh tahun mendatang. Formulasinya dituangkan dalam suatu dokumen yang akan diserahkan pada KTT ASEAN di bulan Nopember 2015. Untuk memastikan bahwa visi tersebut representative dan inklusif, HLTF berkewajiban untuk melakukan konsultasi dengan organ-organ ASEAN dan Badan sektoral ASEAN untuk memperoleh pandangan dan input khusus sesuai dengan bidang ekspertis dan tanggung jawab. HLTF juga melakukan konsultasi dengan perwakilan sektor bisnis, akademi dan CSO di tingkat nasional dan regional.¹⁷

Konsultasi dengan kelompok masyarakat telah diselenggarakan di tingkat nasional dan regional di mana kelompok masyarakat sipil berinisiatif untuk melakukan pertemuan untuk membahas masukan bagi dokumen visi ASEAN 2025. Di tingkat nasional, CSO, akademisi dan peneliti di masing-masing negara anggota ASEAN bertemu dan memberikan gagasan mereka terkait dengan inisiatif ASEAN 2025 dan merumuskan masukan tertulis pada proses formal. Di tingkat regional, CSO, akademisi dan peneliti yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN bersama-sama duduk dan membahas masukan yang dapat diberikan pada proses formal. Kontribusi juga telah diberikan secara *online*.

¹⁷ <http://asean.org/asean-community-vision-2025-2/>

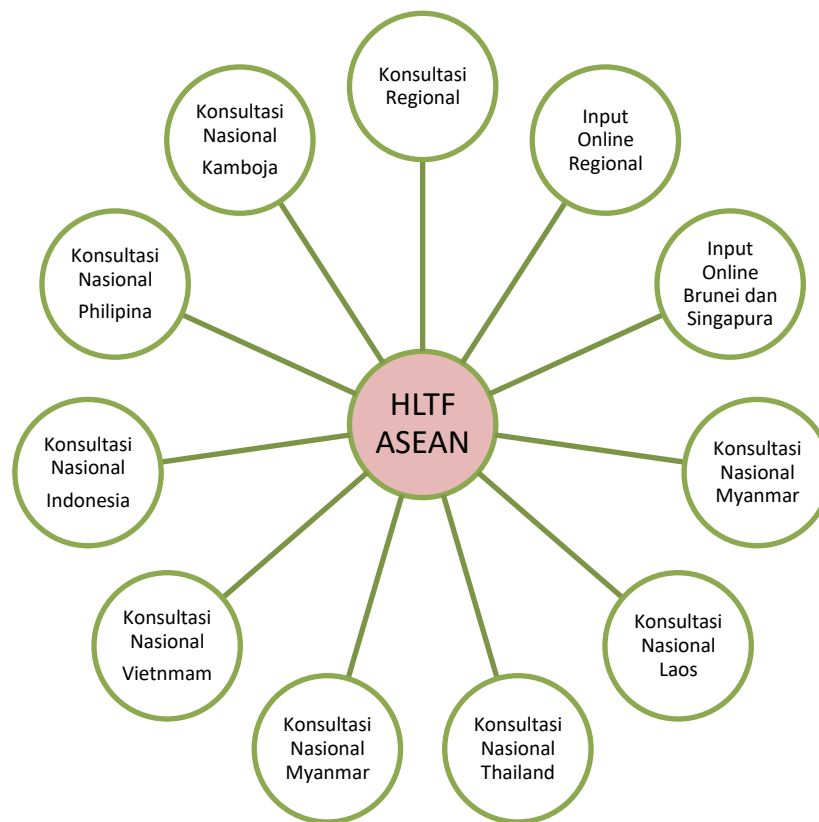
Tabel 2. Konsultasi Nasional dan Regional Proses Perumusan Dokumen ASEAN 2025

Konsultasi nasional/input online		Peserta
Negara	Tanggal	
Kamboja	14 Mei 2015	23 kelompok masyarakat sipil
Philipina	14-15 Mei 2015	36 kelompok masyarakat sipil dan akademisi
Indonesia	15 Mei 2015	22 kelompok masyarakat sipil, akademisi dan peneliti
Vietnam,	18 Mei 2015	13 kelompok masyarakat sipil dan peneliti
Myanmar,	19 Mei 2015	22 kelompok masyarakat sipil
Thailand,	19 Mei 2015	15 kelompok masyarakat sipil
Laos,	21 Mei 2015	10 kelompok masyarakat sipil
Input online dari Brunei		2 kelompok masyarakat sipil
Input online dari Singapura		1 lembaga think thank (Think Centre)
Konsultasi Regional di Jakarta, 24-27 Mei 2015		31 kelompok sipil dan peneliti, ditambah akademisi dari Kanada dan Australia
Input online dari jaringan dan organisasi regional		6 jaringan dan organisasi kelompok masyarakat regional
Input online dari organisasi internasional		2 kelompok masyarakat sipil internasional, yaitu: (1) Transparency International International; dan (2) Gay and Lesbian Human Right Commission (IGLHRC)

Sumber: HRWG dan WEAVE (2015). "Civil Society's Inputs. ASEAN Vision 2025 and Its Attendant Documents", 27 Mei 2015"

Terdapat antusiasisme besar dari kalangan masyarakat sipil terhadap perumusan Dokumen Asean 2025 seperti ditunjukkan jumlah peserta dan partisipasi konsultasi nasional di masing-masing negara dan dalam konsultasi regional. Namun, seberapa luas ruang tersebut disediakan masih terbatas, karena pertemuannya dilakukan rata-rata dalam satu hari. Transparansi proses juga masih terbatas karena draft dokumen yang dibahas dalam HLTF bersifat rahasia, sehingga pembahasan di tingkat nasional menjadi terbatas. Draft yang kemudian diajukan oleh kelompok masyarakat sipil mengacu pada draft dokumen yang telah disediakan oleh HLTF, tanpa memberikan sesuatu yang baru. Seberapa jauh draft tersebut menjadi pertimbangan proses formal di HLTF juga masih tidak jelas, karena anggota-anggota HLTF sangat mengedepankan perspektif masing-masing negara.

Gambar 5. Relasi Masyarakat Sipil dan ASEAN dalam Perumusan Dokumen Visi ASEAN 2025



Sumber: Divisualisasikan penulis dari HRWG dan Weave (2015).

Kerjasama Perpajakan Global

Kasus kerja sama perpajakan global menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit daripada tiga kasus lain yang menjadi kajian perbandingan dalam paper ini. Kerja sama ini dipandang penting karena banyak perusahaan transnasional seperti Google, Amazon, Starbucks, melakukan upaya untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak dengan memanfaatkan celah-celah hukum nasional yang berlaku di suatu negara atau bahkan melakukan penggelapan pajak yang melanggar hukum di suatu yuridiksi. Kerja sama ini sifatnya *state centric* di mana negara bekerja sama satu sama lain untuk melawan para pelaku penggelapan ataupun penghindaran pajak khususnya dari korporasi transnasional yang aktivitas bisnisnya bersifat suprateritorial dan melintas batas yuridiksi. Kasus ini menunjukkan bahwa di satu sisi, dunia telah memasuki era post Westphalian, tetapi penanganan terhadap kasus tersebut masih memakai pendekatan Westphalian.

Inisiatif kerja sama internasional di perpajakan telah dikembangkan

oleh OECD sejak tahun 1997¹⁸ Fokusnya adalah bagaimana memastikan wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Ditekankan pentingnya pertukaran informasi di antara negara-negara terutama menyangkut pajak yang wajib dibayarkan oleh para pelaku bisnis transnasional. OECD telah membuat suatu standar yang disebut dengan *OECD Standar Magnetif Format (SMF)* untuk pertukaran informasi. Pada tahun 2003, Uni Eropa mengadopsi *EU Savings Directive* untuk memastikan transparansi pajak global. Pada tahun 2010, Amerika Serikat mengadopsi *the Foreign Account Tax Compliance (FATCA)*; ini menjadi momen politik penting untuk mengembangkan suatu standar bagi kerja sama dalam pertukaran informasi tentang pajak secara otomatis.

Inisiatif ini kemudian menjadi salah satu prioritas di G20, forum yang berisi negara-negara maju dan *emerging economies*. Pada KTT G20 di Los Cabos tahun 2011, OECD memberikan laporan tentang beragam program pertukaran informasi perpajakan. Pemimpin-pemimpin G20 melihat pentingnya kerja sama dalam pertukaran informasi dan bersepakat untuk menjadikan perpajakan internasional sebagai agenda penting dalam proses G20. Pada tahun 2013, G20 menunjukkan kepentingan yang lebih besar lagi untuk mengadopsi standar AEOI global dan meminta OECD untuk mengembangkan suatu standar pelaporan umum (*Common Reporting Standard/CRS*). Pada tahun 2014, CRS disepakati untuk diadopsi pada tahun 2017 atau 2018 tergantung kesiapan negara-negara untuk menerapkannya. Sembilan puluh empat yuridiksi berkomitmen untuk menerapkannya sesuai dengan kesiapan masing-masing. Pada bulan Oktober 2014, langkah penting dibuat dengan penandatanganan *CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)* yang mensyahkan operasionalisasi pertukaran informasi. Pada bulan Juli 2016, total 101 yuridiksi mengikatkan diri pada komitmen penerapan AEOI.¹⁹

Pada tahun 2016, G20 bersepakat untuk menugaskan Global Forum untuk melakukan proses peer review dalam rangka memonitor efektivitas dari pertukaran otomatis menyusul diimplementasikannya CRS. Ini ditegaskan pada komunike pemimpin G20 di KTT Hangzhou bulan September 2016.²⁰

Apakah kerjasama tersebut akan berhasil masih harus dikaji lebih lanjut. Namun jika dilihat pada perspektif pelaku penggelapan dan penghindaran pajak, kajian tentang kerja sama perpajakan global ini menjadi menarik.

¹⁸ Sejarah singkat tentang AEOI dapat dilihat pada situs OECD, <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/>

¹⁹ OECD, 26 Juli 2016, www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf.

²⁰ Ibid

Analisis siapa pelaku penggelapan dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa isu pengembangan kerja sama di bidang perpajakan jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan oleh perspektif Westphalian. Skema kerja sama saat ini menekankan pada peningkatan transparansi di antara negara-negara. Negara-negara berkomitmen untuk siap memberikan informasi perpajakan jika diminta oleh mitra negara lain. Dengan demikian laporan pembayaran pajak oleh 'wajib pajak' baik individual maupun korporasi bersifat terbuka. Sehingga ini dapat menutup celah pelaporan ganda ataupun manipulatif oleh wajib pajak.

Skema ini bisa berjalan bila para aktor transnasional di bidang ekonomi tersebut patuh untuk mendaftarkan aktivitas bisnisnya ke yurisdiksi tertentu dan kemudian tunduk terhadap aturan yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Dengan demikian yurisdiksi memiliki kontrol penuh terhadap para aktor transnasional tersebut. Justru persoalannya yang rumit adalah aktivitas transnasional tersebut sifatnya "melintas batas yurisdiksi" yang membuat sulit bagi aktor transnasional untuk secara sukarela memastikan pendaftaran korporasinya di yurisdiksi tertentu.

Gambar 6. Hubungan Negara dan Para Pelaku Penggelapan/Penghindaran Pajak



Sumber: Divisualisasikan oleh Penulis berdasarkan Hermawan dan Indraswari (2016).

Dalam Hubungan Internasional, perilaku penghindaran dan penggelapan pajak ini merefleksikan melonggarnya hubungan antara *nation* dan *state*. Dalam konteks post Westphalian, nasionalisme tidak lagi relevan untuk menjadi acuan

ketaatan warga negara kepada negara. Tesis ini tercermin pada perilaku pejabat negara, politisi partai dan keluarga mereka yang dalam perspektif Westphalian seharusnya menjadi model "negarawan". Ikatan rasa memiliki bangsa (*sense of belonging*) seharusnya terwujud dalam bentuk kesediaan mereka untuk mematuhi aturan yang berlaku di negara tempat mereka mengabdikan. Namun nyatanya, pejabat negara, politisi dan keluarga memisahkan secara ekstrim antara kepentingan individu/keluarga dan kepentingan negara.

Kesimpulan

Paper ini telah mengkaji secara komparatif empat kasus empirikal untuk melihat seberapa jauh telah terjadi pengayaan makna internasional dalam konsepsi hubungan internasional yang berbasis pada perspektif Westphalian konvensional di masing-masing kasus tersebut. Terdapat sejumlah temuan dari kajian ini seperti yang akan dipaparkan berikut ini.

Pertama, telah terjadi pengenduran makna yurisdiksi/teritorialitas yang menjadi inti dari cara pandang Westphalian terhadap makna internasional sebagai "antar negara" dalam kasus kerjasama di bidang perpajakan global. Ini ditunjukkan dengan munculnya aktor-aktor transnasional yang menjadi pelaku penggelapan dan penghindaran pajak yang ruang aktivitasnya melintasi batas yurisdiksi teritorial negara. Bahkan kajian atas kasus ini menunjukkan telah terjadinya perubahan fundamental dari hubungan *nation* (bangsa) dan *state* (negara), dan munculnya konsepsi baru "suprateritorialitas yang menembus batas-batas yurisdiksi kebangsaan dan kenegaraan". Namun sekalipun terjadi perubahan fundamental dari perilaku warga yang terlibat dalam aktivitas transnasional, cara menangani perilaku penggelapan pajak dan penghindaran pajak tetap berpedoman pada perspektif Westphalian: yang mendudukan kembali negara sebagai agensi utama dan menempatkan kembali batas-batas yurisdiksi yang menjadi kewenangan negara untuk mengontrol aktivitas transnasionalisme tersebut.

Kedua, konsepsi transnasionalisme dan inter-governmentalisme bersifat komplementer dalam kasus perumusan gerakan pembangunan kota HAM dan Agenda 2030. Tesis koeksistensi state-centrisme dan transnasionalisme telah dimaknai lebih mendalam dengan terjalinnya kerjasama antara aktor-aktor transnasional dan aktor negara. Transnasionalisme dan transgovernmentalisme bersifat komplementer, bukan sekedar koeksistensial. Gerakan sosial yang berupaya merealisasikan komitmen global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperkaya pendekatan HAM yang selama ini menjadi tanggung jawab negara (level pemerintah pusat) ke tingkat daerah di mana pemerintah daerah bersama-sama dengan aktor transnasional

mengambil tanggung jawab dalam perwujudan HAM di tingkat lokal. Kemitraan organisasi non pemerintahan (NGOs) dan pemerintah daerah dari sejumlah negara telah melahirkan pendekatan baru dalam penegakan norma universal yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata.

Demikian pula dalam kasus perumusan Agenda 2030 ditemukan pengayaan makna internasional dari konsepsi hubungan internasional. Inisiatif Agenda 2030 muncul dalam PBB. Upaya perumusannya telah mengedepankan prinsip partisipatoris PBB yang memberi ruang luas bagi negara dan CSOs. Sekalipun tanggungjawab perwujudannya menempatkan peran *leading* negara untuk merancang peta jalan nasional, namun kemitraan seluruh aktor lokal, nasional, regional dan universal menjadi sangat vital dalam proses implementasinya.

Kasus pembangunan kota HAM dan perumusan Agenda 2030 ini menunjukkan progress, dari koeksistensi ke kooperatif, dan dari kooperatif menuju konvergensi. Bukan sekedar negara yang bertanggung-jawab untuk mengamankan nilai dan norma-norma universal, tetapi juga aktor-aktor transnasional yang secara konsisten melakukan advokasi terhadap nilai-nilai dan norma universal tersebut.

Dalam kasus perumusan visi ASEAN 2025, ditemukan upaya artifisial dalam pengayaan makna internasional. Prosesnya masih sangat *state-centric*, sekalipun dalam teks *outcome document* ruang partisipasi bagi anggota komunitas ASEAN menjadi inti visi baru ASEAN. Terdapat 'gairah dan antusiasime' dari CSOs untuk terlibat aktif dalam peroses perumusannya, namun seberapa jauh output dari ruang publik dalam faktanya belum 'sepenuhnya' menjadi masukan dalam proses di ruang formal (negosiasi intergovernmental). Ini merupakan ironi karena proses perumusan visi ASEAN yang inklusif masih berjalan secara eksklusif.

Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa makna hubungan internasional pada saat ini menunjukkan empat tingkatan pengayaan dan kedalaman, yaitu koeksistensi, kooperatif, komplementari dan konvergensi. Ini dapat dimaknai sebagai adanya pergerakan positif dari spektrum Pluralist ke spektrum Solidaritas. Pergerakan ini sekaligus memperkuat tesis tentang transisi tatanan Westphalian menuju Post Westphalian.

Temuan-temuan ini berimplikasi pada perluasan agenda riset dalam Hubungan Internasional. Cara pandang lima level analisis yang didasarkan pada perspektif Westphalian mengalami perluasan yang lebih kompleks. Terdapat jaringan suprateritorial yang melintas batas level negara yang lebih luas daripada yang diasumsikan oleh level negara dan hubungan internasional yang lebih dinamis di level global dan regional daripada yang diasumsikan level

global dan regional. Kajian Hubungan Internasional tidak lagi memadai kalau hanya merumuskan analisisnya secara sederhana pada level negara (dengan atribut ketunggalan/*unitary*) maupun pada level global (dengan atributnya sebagai sistem negara). Yang bisa dikembangkan lebih lanjut adalah *network analysis* seperti yang dilakukan oleh Hafner-Burton, Kahler dan Montgomery (2009), namun dengan memberikan penekanan yang memadai pada lintas level atau varian baru di antara level-level analisis yang ada.

Referensi

- Buzan, B. (1995). "The Level of Analysis Problem in International Relations Reconsidered," dalam Booth, K dan Smith, S. (eds). *International Relations Theory Today*. Cambridge: Polity Press.
- Dingwerth, K. (2007) *The New Transnationalism, Transnational Governance and Democratic Legitimacy*. Palgrave MacMillan.
- Engle, E.A. (2005) "The Transformation of the International Legal System: The Post-Westphalian Legal Order."
[https://www.qu.edu/prebuilt/pdf/SchoolLaw/.../08_23QLR23\(2004-2005\).pdf](https://www.qu.edu/prebuilt/pdf/SchoolLaw/.../08_23QLR23(2004-2005).pdf).
- Foner, N. (2007). *Engagemnet Across National Borders, Then and Now*. Fordham Law Review. 75 (5), Article 8.
- Hafner-Burton, E.M, Kahler, M dan Montgomery, A.H. (2009). "Network Analysis for International Relations," *International Organization*, 63 (3), July 2009, 559-592.
- Kreuder-Sonnen, C dan Zangl, B (2015). "Which post-Westphalia? International organizations between constitutionalism and authoritarianism", *European Journal of International Relations*, Oktober 2014.
- Linklater, A. (1996). "Citizenship and Sovereignty in the Post-Westphalian State," *European Journal of International Relations* March 1996, 2: 77-103.
- Portes, A. (1997). *Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities*. Princeton University, WPTC-98-01.
- Shotwell, Charles B., (2001) "International Law and Institutions: A Post-Westphalian Landscape", in Kugler, R.L and Frost, E.L *The Global Century: Globalization and National Security*. Washington DC: National Defense University Press, 2001, 761-783.
- Smith, M.P. (2000). "Transnationalism and Citizenship". Paper delivered at the Plenary Session of the International Conference on Immigrant Societies and Modern Education, August 31 – September 3, 2000. Dipublikasikan di

Yeoh, B, et.al. *Approaching Transnationalisms*. Boston: Kluwer, 2003, 15-38.

Vaughan, M. (2011). "After Westphalia, Whither the Nation State, Its People and Its Governmental Institutions?" Paper presentasi di the International Studies Association Asia-Pacific Regional Conference, 29 September 2011.

Zajak, S. (2014) *Pathways of Transnational Activism. A Conceptual Framework*. MPIfG Discussion Paper 14 (5).

Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia : Tinjauan Postmodernisme

Yusran, Afri Asnelly

Universitas Budi Luhur Jakarta

yusran_ubl@yahoo.com

Abstraks

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo diawali dengan perhatian besar terhadap sektor maritim yang otomatis merubah haluan kebijakan luar negeri Indonesia. Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) berhadapan dengan banyak permasalahan yang penyelesaiannya lebih efektif menggunakan *hard power*, yang menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi Politik Luar Negeri Bebas Aktif (PLNBA). Tantangan itu muncul karena penggunaan *hard power* telah menggeser *soft power* yang mendasari PLNBA. Tulisan ini mengkaji tantangan PLNBA dalam mewujudkan Indonesia sebagai PMD dengan menggunakan tinjauan postmodernisme. Postmodernisme dipilih karena merupakan pendekatan HI yang mempertimbangkan nilai-nilai dan menghargai hal-hal yang bersifat lokal atau partikular. Sehingga sesuai dengan PLNBA yang sarat akan nilai-nilai luhur Pancasila yang spesifik di Indonesia.

Kata kunci

Politik Luar Negeri Bebas Aktif, *Soft Power*, *Hard Power*, Postmodernisme, dan Poros Maritim Dunia.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo menjadikan upaya mewujudkan Indonesia sebagai PMD sebagai salah satu pokok kebijaksanaan utama pemerintahannya. Namun cita-cita sebagai PMD tidak mudah diraih karena banyak persoalan yang menjadi tantangan Indonesia dalam mewujudkannya. Salah satu tantangan terberat diantaranya menurut Badan Informasi Geospasial (2015) adalah pencegahan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUUF). Oleh karena itu Doktrin Indonesia sebagai PMD diturunkan dalam konsep 'restorasi maritim Indonesia', dengan langkah mengatasi pasar

gelap ikan tuna dan pemanfaatan ZEE, memberantas *illegal fishing* (IUUF), ekspansi budidaya laut, dan mengembangkan padat karya di sektor maritim (Nainggolan, 2015).

Disamping itu Indonesia sebenarnya juga memiliki persoalan lain yang juga sama pentingnya untuk dipertimbangkan, namun tampaknya tidak dimasukkan dalam restorasi maritim Indonesia. Sejarah mencatat beberapa kali Indonesia menghadapi persoalan sengketa perbatasan. Sengketa perbatasan menjadi masalah fundamental karena pada umumnya terjadi di wilayah perairan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Dimana, lokasi tersebut merupakan bagian dari 'peta maritim' sebagai objek yang dioptimalkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD.

Indonesia masih mempunyai sepuluh masalah perbatasan maritim dengan negara-negara di sekitar yang belum selesai hingga saat ini (Suhartono, 2010). Pengalaman pahit konflik perbatasan yang berujung pada kekalahan Indonesia juga harus menjadi catatan penting. Sebagai contoh lepasnya Sipadan-Ligitan dari Indonesia. Dalam studi Setyanto (2012), langkah Indonesia mengajak Malaysia untuk berunding adalah tepat berdasarkan prinsip PLNBA Indonesia. Tetapi faktanya dalam kasus tersebut, "kekuatan" adalah kata kunci agar negara dapat terus mempertahankan kekuasaan. Dari studi ini dapat dikatakan bahwa PLNBA yang dijalankan Indonesia untuk masalah perbatasan di wilayah maritim Indonesia berujung pada kegagalan karena Indonesia tidak menjadikan "kekuatan" (*hard power*) sebagai kata kunci.

Secara fundamental Politik Luar Negeri Bebas Aktif (PLNBA) merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia dalam Pancasila (Besar, 2005). Secara politis, PLNBA Indonesia berpedoman pada amanat konstitusi. Prinsip dasar "Bebas Aktif" memberi kandungan atau cerminan kepentingan nasional yang hendak diperjuangkan dan dipertahankan melalui mekanisme diplomasi (Departemen Luar Neri RI, 2005). Dari sini jelas bahwa PLNBA sarat akan nilai dan identik dengan penggunaan jalur diplomasi melalui mekanisme *soft power*.

Meskipun belum teruji menyelesaikan masalah sengketa perbatasan yang menimbulkan kerugian di bidang maritim, pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa penggunaan unsur kekuatan lebih efektif dalam menyelesaikan tantangan PMD. Penggunaan *hard power* menjadi pilihan kebijakan utama untuk mengantisipasi IUUF. Menurut data yang dirilis Mina Bahari (2015), kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal yang melakukan IUUF telah menurunkan hampir 80 persen kasus pencurian ikan di Indonesia. Meskipun aksi tersebut menuai *complaint* dari pihak asing.

Kendati ada pro dan kontra atas kebijakan itu, namun dapat dijadikan sebagai pembanding yang mengarah pada konklusi bahwa penggunaan unsur kekuatan dengan mekanisme *hard power* memberikan hasil yang jauh lebih menguntungkan bagi Indonesia dibanding menggunakan *soft power*. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah penggunaan *hard power* sesuai dengan prinsip PLNBA yang selama ini menjadi ciri kebijakan luar negeri Indonesia?

Penggunaan *soft power* maupun *hard power* merupakan pilihan dengan konsekuensi masing-masing. Namun yang menjadi catatan penting dalam permasalahan ini, ternyata tidak semua persoalan yang berkaitan dengan maritim dapat ditempuh dengan menggunakan prinsip PLNBA. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD butuh langkah tegas karena dalam perjalanannya sering menemukan permasalahan yang penyelesaiannya lebih efektif jika menggunakan *hard power*. Ini tentunya merupakan tantangan bagi PLNBA yang notabene identik dengan penggunaan *soft power*. Tantangan inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini.

Sebagaimana disebutkan di atas, PLNBA merepresentasikan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga pada dasarnya PLNBA sarat akan nilai-nilai. Tulisan ini menggunakan postmodernisme sebagai sudut pandang mengingat postmodernisme dalam kajian HI dapat mengkaji pengetahuan yang tidak bebas nilai. Sehingga tulisan ini akan menjawab permasalahan : Bagaimana tantangan politik luar negeri bebas aktif dalam mewujudkan Indonesia sebagai PMD dari tinjauan Postmodernisme?

Postmodernisme dalam Kajian Hubungan Internasional

Kemunculannya dalam HI

Dalam usianya yang hampir mencapai satu abad, SHI telah banyak mengalami perkembangan baik secara epistemologis, ontologis dan metodologis. Hingga saat ini ada empat perdebatan besar yang menandai perkembangan epistemologis dalam HI. Debat pertama terjadi dalam kurun waktu 1930-1950an, antara kelompok idealis (utopian liberalism) dengan kelompok realis. Perdebatan ini mengendurkan dominasi realisme dan membenarkan marjinalisasi internasionalisme liberal. Perdebatan pertama ini bersifat substansi (Ashworth 2002). Debat kedua terjadi pada dekade 1960an yang terjadi antara kelompok tradisional vs. behavioralis. Perdebatan kedua ini bersifat metodologi (Kaplan, 1966).

Debat ketiga terjadi sepanjang dekade 1970-1980an yang merupakan perlawanan pemikiran Marxis baru terhadap perspektif mainstream neoliberal

dan neorealist (Jackson dan Sorensen, 1999). Perdebatan bersifat "epistemologi" yang menampilkan perdebatan antara pendekatan positivis dan postpositivis. Debat keempat berlangsung setelah tahun 1980-an dan ruang lingkup perdebatan adalah secara epistemologis. Debat keempat merupakan era munculnya perspektif-perspektif kritis dan postmodernis (Jackson dan Sorensen, 1999). Keempat perdebatan tersebut tidak menghasilkan pihak yang kalah maupun yang menang, namun memiliki makna besar dalam memperluas dan memperdalam kajian HI. Kemunculan postmodernisme dalam kajian HI adalah pada debat keempat.

Paradigma yang berbasis post-positivis

Postmodernisme diusung oleh kelompok post-positivis. Post-positivis memiliki perbedaan yang mendasar dengan positivis yang sebelumnya mendominasi pendekatan dalam kajian HI. Pertama, kaum positivis menganggap bahwa fenomena sosial bisa dijelaskan melalui penggunaan metode saintifik, sedangkan post-positivis beranggapan penelitian yang obyektif (bebas nilai) terhadap fenomena sosial sulit tercapai. Kedua, positivis menganggap bahwa pengetahuan obyektif yang didapat melalui pemodelan, teori ataupun konsep adalah kebenaran faktual, sedangkan post-positivis beranggapan fenomena sosial tidak bisa diteliti melalui pendekatan saintifik (Jackson dan Sorensen, 1999). Bagi post-positivis penelitian terhadap fenomena sosial tidak akan menghasilkan kebenaran obyektif, karena bentuk dari ilmu sosial yang tidak netral. Terdapat faktor sejarah, budaya dan politik yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosial (Hasan, 2010). Dari perbedaan tersebut inti pemikiran postmodernisme adalah post-positivis, yang dapat membantu memahami fenomena HI yang terkait dengan nilai-nilai. Walau bagaimanapun mencoba untuk berada pada rel saintifik, namun tidak dapat dinafikan bahwa ilmu sosial tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah dan budaya serta unsur-unsur yang bersifat parsial atau spesifik.

Reaksi terhadap modernisme

Postmodernisme erat kaitannya dengan perjalanan modernisme karena dianggap sebagai reaksi dari perkembangan modernisme yang menuai banyak kritik. Gambaran umum modernisme adalah positivistik, teknosentrik, dan rasionalistik. Modernisme mengandalkan logika keilmuan dalam memahami fenomena yang ada disekitarnya. Modernisme meyakini bahwa dunia harus diciptakan secara homogen dengan standarisasi-standarisasi internasional dan meyakini bahwa perdamaian dunia dapat dijaga jika ada satu kekuatan yang

mengawasi dan mengatur sistem tatanan internasional. Dengan pemahaman keilmuan yang tinggi diharapkan tidak terjadi perang atau persengketaan (Devatak, 1996). Giddens (1991) berpandangan bahwa "sisi gelap" modernisasi semakin meningkatkan solidaritas pemikir postmodernis. Modernisme yang 'mendewakan' sains, material dan universalisme yang diwujudkan dalam globalisasi terlalu jauh menggeser nilai-nilai partikular yang menyertai keberadaan manusia yang tidak selalu bersifat material.

Dengan demikian kemunculan postmodernisme sangat berhubungan dengan fenomena modernisme. Dengan melihat sisi lemah modernisme, postmodernisme seolah ingin mengingatkan bahwa meskipun modernitas telah dicapai, namun ada sisi-sisi fundamental yang tidak bisa ditinggalkan dari realitas ilmu sosial, terutama yang berkaitan dengan nilai. Hal itu dikarenakan manusia sebagai subjek dan objek ilmu sosial tidak selalu bisa dipandang dari hal-hal yang material saja.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif : Nilai Luhur Indonesia dan Pelaksanaannya dari Masa ke Masa

Untuk mencapai kepentingan nasional dalam kancah internasional, masing-masing negara memiliki 'gaya' politik luar negeri masing-masing. Ada yang menonjolkan unsur-unsur kekuatan militer, liberal, sosialis, dan lain sebagainya yang mencerminkan kepribadian dan kepentingan masing-masing. Bagi Indonesia sendiri, PLNBA adalah prinsip utama dalam upaya pencapaian kepentingan nasional.

PLNBA memiliki dasar yang kuat dalam landasan dan pelaksanaannya. Landasan idiil PLN adalah dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Landasan konstitusional PLN adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13. Prinsip Bebas Aktif adalah landasan operasional PLN Indonesia (Windiani, 2010). Nilai-nilai Pancasila menjawai pembentukan PLNBA Indonesia. PLNBA menjadikan diplomasi sebagai mekanisme utama dalam penyelenggaraan PLN Indonesia. (Alami, 2008).

Pelaksanaan PLNBA mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan prioritas kebijakan luar negeri masing-masing presiden Indonesia. Menurut Sukma (2004), pada masa Soekarno prinsip bebas-aktif digunakan untuk menjaga hubungan Indonesia di dunia internasional agar tidak cenderung terhadap salah satu diantara dua blok besar (Amerika Serikat dan Uni Soviet)

pada saat itu. Pada masa Soeharto, prinsip bebas-aktif juga ditujukan untuk menjaga netralitas Indonesia diantara dua blok tersebut. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet, Indonesia membuka diri terhadap kerjasama-kerjasama pembangunan yang berasal dari barat. Pada masa Habibie politik luar negeri Indonesia tetap melanjutkan politik luar negeri era Suharto.

Pada masa Abdurrahman Wahid perumusan politik luar negeri berpola "arus-balik". Gusdur menjaring dulu opini dunia atas konsep kebijakan melalui diplomasi. Setelah itu, baru dirumuskan *platform* politik luar negerinya (Kompas, 2000). Politik 'Bebas Aktif' juga dianut oleh pemerintahan Megawati. Politik luar negeri Megawati menunjukkan sebuah lanjutan dari orde baru dengan penekanan pada politik bebas aktif (Sukma, 2004). Masa Susilo Bambang Yudhoyono PLNBA dijalankan dengan konsep diplomasi total (Muina, 2011). Di masa SBY penggunaan diplomasi Indonesia dianggap spektakuler dan banyak mendapatkan pujian dari massa internasional (Mashad, 2011).

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa PLNBA secara fundamental sangat sarat akan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Walaupun terjadi perubahan 'gaya' dalam pelaksanaannya oleh pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, namun *soft power* dalam PLN Indonesia masih terlihat dengan sangat jelas. Kondisi ini memperlihatkan kecerdasan Indonesia dalam memadu-padankan hal-hal universal yang berlaku di lingkungan internasional dengan nilai-nilai luhur yang terdapat di internal bangsa Indonesia. Sehingga masyarakat dunia selalu mengenal Indonesia dengan identitasnya sebagai bangsa yang ramah dengan ciri ketimuran yang sangat identik dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya melalui PLNBA yang khas di dunia.

Dengan memahami postmodernisme dan fakta PLNBA yang berbasiskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam Pancasila, maka PLNBA dapat dikaitkan dengan postmodernisme yang dimaksud. Argumen ini kuat berdasarkan nilai-nilai spesifik bangsa Indonesia yang mendasari terciptanya PLNBA. Karena berbasis nilai-nilai Pancasila maka PLNBA bukanlah sesuatu yang universal dan berlaku di seluruh dunia. Melainkan sesuatu yang parsial dan spesifik yang menjadi ciri khas dan hanya berlaku di Indonesia.

Cita-Cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia : Peluang dan Tantangan

Dengan perkembangan situasi ekonomi dunia yang dilanda krisis berkepanjangan, gagasan PMD menjadi solusi bagi Indonesia untuk tetap bisa maju dan berkembang menjadi negara besar di kawasan. Ketahanan maritim pun pada akhirnya baru dapat tercipta jika budaya maritim, ekonomi maritim, dan konektivitas maritim sudah terwujud (Wijyanto, 2015). Oleh karena itu, PMD

dapat menjadi harapan sekaligus peluang baru bagi Indonesia untuk mengatasi masalah perekonomian yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan fundamental dalam pembangunan Indonesia.

Namun untuk mewujudkan PMD terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya IUUF yang untuk mengantisipasinya pemerintah telah menyusun langkah restorasi maritim seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Faktanya, pemberantasan IUUF mendapat sorotan yang jauh lebih besar dibandingkan langkah restorasi lainnya. Sorotan terhadap pemberantasan IUUF muncul akibat kebijakan keras yang ditempuh pemerintah Indonesia akibat kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Pada 5 Desember 2014, TNI-AL menenggelamkan 3 kapal Viet Nam yang terbukti melakukan *illegal fishing* di perairan Natuna. Pada hari yang sama, Polisi Air RI menenggelamkan 3 kapal Filipina di perairan Talaud. Kemudian, pada 21 Desember 2014, Kapal Century-4 dengan ukuran 250 GT dan Century-7 asal Thailand berbendera Papua Nugini dengan ukuran 200 GT ditenggelamkan di perairan Ambon (Afrida, 2015). Pada 12 Maret 2015, 3 kapal milik Filipina telah diledakkan dan ditenggelamkan di Pulau Buaya, Sorong (Republika, 2015). Pada 20 Maret 2015, dua kapal Malaysia telah diledakkan di depan dermaga Polisi Air Polda Kalimantan Timur. Tindakan tegas yang kian keras ditunjukkan oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti pada 20 Mei 2015, di Hari Kebangkitan Nasional, dengan meledakkan 41 kapal asing yang telah selesai tuntas proses pengadilannya (Kompas, 2015).

Akibat tindakan keras pemerintah Indonesia, Viet Nam mengirimkan Nota Diplomatik dari Hanoi yang disampaikan ke Kemlu yang berisi protes dan seruan pembebasan bagi para nelayan mereka yang ditangkap. Sementara itu, Pemerintah Filipina yang juga telah mengirimkan Nota Diplomatik mempertanyakan kasus penembakan/pembakaran dan penenggelaman atas kapal-kapalnya, serta penangkapan atas nelayan-nelayannya, yang telah dituding melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah hukum Indonesia. Secara khusus, Filipina menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran ketentuan UNCLOS90 akibat kebijakannya yang dinilai berlebihan tersebut. Reaksi negatif datang dari Thailand. Thailand enggan dipersalahkan dalam kasus tuduhan kegiatan *illegal fishing*, sebab menurut mereka yang terjadi di lapangan, mereka menggunakan nama-nama Indonesia di kapal-kapal mereka karena itu praktek yang lazim. Mereka menggunakan jasa broker yang mengurus perizinan, dengan membayar sejumlah uang. Demikian juga dengan Malaysia, ketika kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing* baru dijalankan Pemerintah

Indonesia, Menlu Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman, mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut (Nainggolan, 2015).

Namun banyak pihak yang menyayangkan adanya diskriminasi pemerintah dalam kebijakan IUUF. Pada 27 Desember 2014, kapal berbendera Panama, Hai Fa, berbobot 4.306 gross ton (GT), atau yang terbesar selama ini terlibat dalam *illegal fishing*, milik warga negara Tiongkok, telah ditangkap KRI John Lie-358 di perairan pelabuhan Wanam, Merauke, Papua. Sayangnya, kapal ini, sekalipun telah dinyatakan bersalah, hanya dikenakan denda Rp. 200 juta subsidi 6 bulan penjara, pada sidang Maret 2015. Kalangan diplomat asing sempat menilai Menteri KKP Susi Pudjiastuti telah bertindak diskriminatif, tidak berani mengambil tindakan keras yang sama terhadap kapal-kapal besar Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sangat memang aktif melakukan pembelaan terhadap nelayannya, dan yang lebih tampak mengada-ada adalah upaya pihak Kedubes Tiongkok untuk mengaitkannya dengan prospek investasinya yang begitu besar di Indonesia, dalam mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur PMD. Menurut mereka hal itu perlu diprioritaskan ketimbang kasus kapal-kapal nelayan Tiongkok yang telah tertangkap dan terbukti melakukan kegiatan *illegal fishing*, yang harus dihukum itu (Nainggolan, 2015).

Langkah tegas dan keras yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya adalah bagian dari usaha untuk mencapai PMD. Di pihak internal Indonesia penenggelaman dan pembakaran kapal mendapat dukungan karena tindakan IUUF dapat meminimalisir kerugian. Akan tetapi tidak semua pihak yang menyetujui tindakan keras tersebut. Upaya mencapai PMD melalui kebijakan berbasis *hard power* ini menuai protes dari pihak asing. Selain itu fakta yang terjadi juga membuat kalangan diplomat asing menilai adanya diskriminasi pemerintah Indonesia karena sikap yang berbeda saat berhadapan dengan China.

Disamping itu, pihak asing barangkali juga terkejut atas penggunaan *hard power* oleh pemerintah saat ini. Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya permasalahan serupa mungkin bisa diselesaikan menggunakan jalan damai dan pembayaran ganti kerugian dimana kesemuanya ditempuh melalui mekanisme *soft power* yang menggunakan jalur diplomasi dan negosiasi. Namun tidak untuk saat ini, karena pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menggunakan *hard power*.

Tinjauan Postmodernis pada Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Pro dan kontra kebijakan berbasis *hard power* yang diterapkan pemerintahan Jokowi adalah fakta yang menjadi problematika tersendiri dalam

upaya mencapai PMD. Tetapi tulisan ini tidak mengkaji tentang benar atau salahnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik dari sudut pandang internal maupun eksternal. Penulis memiliki sudut pandang tersendiri dalam melihat pro dan kontra ini. Penulis mengamati bahwa penggunaan kebijakan berbasis *hard power* yang menjadi pilihan pemerintah saat ini tampak tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip PLNBA yang selama ini berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan PLNBA dari masa ke masa sudah sangat jelas oleh pemerintahan Indonesia sebelumnya. Bahkan PLNBA juga yang membuat masyarakat dunia mengenal Indonesia sebagai bangsa yang ramah dan identik dengan penggunaan *soft power*. Indonesia selalu membuka ruang diplomasi dan negosiasi ketika menemukan masalah dengan pihak eksternal. Bahkan Indonesia juga dipuji dunia atas diplomasi totalnya. Namun atmosfer pada pemerintahan kali ini sangat berbeda terutama pada penanganan IUUF. Hingga saat ini belum ditemukan kesimpulan tentang penggunaan *hard power* dalam upaya mewujudkan PMD, apakah memang sesuai dengan PLNBA yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia ataukah tidak.

Dalam pandangan penulis, langkah restorasi maritim untuk mencapai PMD dalam aspek pemberantasan IUUF merupakan tantangan bagi PLNBA yang selama ini telah begitu lekat dengan imaji politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Penggunaan *hard power* yang dilakukan kontinyu otomatis akan merubah imaji dunia internasional terhadap Indonesia. Lambat laun Indonesia akan meninggalkan terminologi PLNBA demi menunjukkan kegigihan usaha untuk mencapai posisi sebagai PMD. Penulis melihat ini sebagai tantangan tersendiri bagi eksistensi PLNBA karena sudah jelas penggunaan *hard power* tidak termasuk dalam prinsip PLNBA. PLNBA pada prinsipnya menempuh mekanisme *soft power* yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang mendasari keberadaan PLNBA dan identik dengan jalur diplomasi dan negosiasi. Oleh karena itu jika ditinjau dari sudut pandang postmodernis, eksistensi PLNBA sebagai ciri khas bangsa Indonesia mengalami pergeseran akibat praktek penggunaan *hard power* yang dilakukan pemerintah untuk mencapai PMD. Berikut ini beberapa tantangan PLNBA dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai PMD yang ditinjau dari sudut pandang postmodernisme:

Tantangan terbaikannya nilai-nilai khas fundamental dalam PLNBA di tengah pusaran modernitas yang universal

Menurut Calhoun (1990), postmodernisme menolak penjelasan yang harmonis, universal, dan konsisten yang merupakan bagian identitas dasar yang membuat kokoh dan tegaknya modernisme. Kaum postmodernis mengkritik dan menggantikan semua itu dengan sikap menghargai kepada perbedaan dan penghormatan kepada nilai-nilai yang khusus (partikular dan lokal). Dari pendapat Calhoun ini diketahui bahwa postmodernisme sangat menghargai adanya perbedaan yang disebabkan oleh sesuatu yang khas atau partikular. Ataupun sesuatu yang bersifat lokal yang mungkin saja berlaku di suatu tempat namun tidak berlaku di tempat lain.

Jika ditelaah terkait permasalahan ini, penggunaan *hard power* dapat dibenarkan secara hukum karena telah diberlakukan secara universal. Namun pada faktanya Indonesia secara mendasar memiliki nilai partikular yang tidak diberlakukan secara universal oleh negara-negara lain di dunia. Maka dari itu sebagian kalangan menilai penggunaan *hard power* menjadi sesuatu yang dipandang berlebihan.

Salah satu tantangan yang dihadapi PLNBA dalam upaya pemerintah mencapai PMD adalah telah terjadinya 'pengabaian' terhadap prinsip utama PLNBA yang berdasarkan Pancasila, secara sadar ataupun tidak. Barangkali tidak terbesit keinginan pemerintah untuk mengesampingkan nilai-nilai Pancasila dalam prinsip PLNBA, namun fakta dari penggunaan *hard power* yang dilakukan, secara jujur harus dikatakan tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila yang menjadi dasar utama dari prinsip PLNBA.

Pancasila memiliki pengaruh yang sangat kuat sebagai landasan PLNBA. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila juga menjadi nilai utama dalam membentuk PLBNA. Menurut Besar (2007), untuk memahami kebijakan PLNBA Indonesia bila dikaitkan dengan penjabaran dari sila-sila Pancasila penerapannya dapat dianalisis berdasarkan sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila, dimana kebijakan pemerintah dalam melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain agar tidak terpengaruh dengan ideologi dari negara lain yang tidak sesuai dengan falsafah negara Indonesia. Dengan demikian PLN Indonesia harusnya dilandasi oleh nilai-nilai ideologi Pancasila yang sangat berbeda penerapannya dengan ideologi lain.

Idiologi Pancasila menghendaki penyelenggara negara agar supaya memiliki nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak merugikan kepentingan publik. Karena semua agama meyakini setiap perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban setelah kita menghadap kepada sang Pencipta. Idiologi Pancasila dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan

sangat mengedepankan *sense of humanity*, berbeda dengan kebijakan ideologi liberal dan komunisme. Paham liberal maupun paham komunis tidak dapat dilaksanakan bila ditinjau dari sila ke-tiga Pancasila, dimana sila persatuan Indonesia memaknai bahwa kehidupan antara kita telah dirakit untuk dapat bisa menyatu dalam bentuk apapun tanpa perbedaan etnis, keyakinan dan wilayah (Besar, 2007).

Sila ke-empat Pancasila mengandung makna pelaksanaan paham demokrasi sekaligus prosedur demokratik pengambilan keputusan. Namun dalam pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia lebih mengedepankan demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berperilaku, tidak seperti demokrasi liberal yang lebih mengajarkan kebebasan, begitu juga dengan sistem pengambilan keputusan. Demokrasi pancasila sangat menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam rangka pengambilan keputusan. Namun dalam setiap pelaksanaan pengaruh ideologi liberal melalui globalisasi masyarakat Indonesia dan lembaga-lembaga negara telah terpengaruh dengan sistem pengambilan keputusan yang lebih mengedepankan sistem *voting* yang diajarkan lewat ideologi liberal ketimbang pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat. Pada sila ke-lima, nilai-nilai keadilan menurut konsep Pancasila adalah relasi antara kewajiban dan hak, keadilan dapat dilihat apabila subyek lebih dari satu yang dikenai tindakan tersebut (Besar, 2005).

Dengan memahami nilai-nilai Pancasila yang mendasari prinsip terbentuknya PLNBA tersebut, kita bisa memahami kenapa selama ini cara Indonesia menyelesaikan masalah-masalah dengan pihak asing yang jelas-jelas merugikan kepentingannya sangat berbeda dengan negara-negara lain pada umumnya. Dalam menjalankan politik dan kebijakan luar negerinya, Indonesia bukan liberal dan bukan pula komunis, tapi melandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Indonesia sangat jarang bahkan selama ini belum tersorot dalam menggunakan *hard power* untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Namun kali ini penggunaan *hard power* sudah ditemukan dalam kebijakan restorasi maritim untuk mencapai PMD, khususnya pada persoalan IUUF. Kali ini Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi sangat tegas dan bahkan tidak membuka ruang negosiasi pada pihak-pihak asing yang tersangkut masalah IUUF dengan Indonesia.

Pada dasarnya kehadiran postmodernisme juga bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan perspektif lokal di dalam konteks global. Tidak semua unsur harus ditransformasikan menjadi bentuk yang universal, tetap ada kondisi-kondisi yang mempertahankan perspektif lokal (Braman,

2003). Jika dilihat dari sudut pandang postmodernisme, nilai-nilai Pancasila yang menjadi prinsip pembentuk PLNBA bisa dikategorikan sebagai nilai-nilai partikular atau perspektif lokal yang dimaksud. Dimana dalam postmodernis nilai-nilai tersebut dihargai keberadaanya. Berbeda dengan dengan konseptualisasi universal yang terdapat dalam modernisme yang bebas nilai. Dalam pengamalan yang sesungguhnya PLNBA seharusnya tidak boleh dipaksa agar menjadi universal ataupun terkontaminasi oleh modernisme yang dapat mengancam eksistensi nilai lokal. Pancasila memiliki nilai-nilai fundamental yang partikular dan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Didalamnya terdapat nilai-nilai khusus yang tidak diberlakukan secara universal oleh negara-negara lain di dunia. Indonesia sendiri tidak perlu untuk menggeser perspektif lokal tersebut dan mentransformasikannya menjadi universal. Biarlah perspektif lokal itu tetap menjadi ciri khas Indonesia dalam berpolitik luar negeri.

Tindakan sepihak pembakaran dan penenggelaman kapal serta tidak membuka ruang diplomasi bagi negara yang bermasalah, menunjukkan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait masalah tersebut. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pengamalan sila ke-4 Pancasila yang mendasari PLNBA. *Hard power* yang ditunjukkan melalui penenggelaman dan pembakaran kapal tentunya bukan hasil kemufakatan dengan pihak yang bermasalah. Oleh karena itu jika tindakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk meraih kepentingan nasionalnya tidak sesuai dengan pengamalan yang seharusnya, maka eksistensi nilai-nilai tersebut berada dalam kondisi terabaikan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa PLNBA yang diilhami oleh nilai-nilai luhur Pancasila sedang menghadapi tantangan, karena tidak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan persoalan dengan pihak asing.

Tantangan tersisihnya nilai-nilai saat berhadapan dengan modernisasi yang identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Postmodernisme memiliki ide cita-cita, ingin meningkatkan kondisi sosial, budaya dan kesadaran akan semua realitas serta perkembangan dalam berbagai bidang. Postmodern mengkritik modernisme yang dianggap telah menyebabkan sentralisasi dan universalisasi ide di berbagai bidang ilmu dan teknologi, dengan pengaruhnya yang mencengkram kokoh dalam bentuknya yang bernama globalisasi dunia. Namun pada kenyataanya, modernisasi melalui bentuknya yang bernama globalisasi tersebut sudah terlanjur menguasai dunia dan bahkan peradaban saat ini. Sehingga aspek-aspek modernitas dijustifikasi sebagai ciri-ciri kemajuan (Giddens, 1991).

Modernisasi dengan globalisasinya sebenarnya juga dilihat dari dua sisi yang berbeda oleh banyak kalangan. Ada yang menilai sebagai peluang untuk mempermudah dan meningkatkan kehidupan. Namun ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk permasalahan baru bagi masyarakat di dunia. Menurut Lukum (2009), kemajuan di bidang teknologi disatu sisi ikut dinikmati negara-negara yang sedang berkembang, tetapi disisi yang lain negara berkembang itu harus membayar mahal untuk mendapatkan teknologi yang diperlukan untuk industri sehingga menjadi tergantung kepada negara-negara besar. Sementara itu serbuan informasi telah merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya negara-negara yang sedang berkembang yang dipaksa untuk meniru nilai-nilai barat atau westernisasi.

Post-modernisme dan modernisme memang mengusung dua sisi yang berbeda satu sama lainnya, dan tampaknya akan sangat sulit untuk mempertemukan keduanya dalam satu ruang kebijakan sekaligus. Tetap akan ada hal-hal yang saling bertentangan antara satu sama lainnya. Demikian pula dengan kebijakan untuk mencapai PMD ini. Di satu sisi kecangihan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi prasyarat mutlak sebagai langkah teknis untuk mencapai PMD. Namun disisi lain, belum mampunya Indonesia untuk memenuhinya secara sendiri membuat Indonesia juga akan tetap bergantung kepada negara-negara maju yang sudah memiliki hak paten atas teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai PMD. Akibatnya Indonesia juga harus selalu melakukan penyesuaian demi penyesuaian terhadap lingkungan internasional. Kondisi inilah yang sangat rentan bagi penyerapan modernitas secara masif oleh masyarakat Indonesia di segala lapisan. Akhirnya modernitas menjadi suatu keniscayaan yang seringkali tidak dibarengi dengan filter yang seimbang. Sehingga tanpa disadari lambat laun nilai-nilai partikular yang dimiliki bangsa Indonesia semakin tersisih dan berganti dengan hal-hal yang berbau modernitas dan universal.

Akan tetapi PMD tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi juga mustahil untuk terwujud dalam situasi dunia saat ini. Karena PMD pada dasarnya membasiskan upaya pada penggunaan alat-alat canggih. Seperti yang dikatakan Nainggolan (2015), PMD sebagai sebuah konsep yang dijabarkan secara luas, mencakup pengembangan infrastruktur pelabuhan, kehadiran kapal-kapal dan fasilitas asing di berbagai pelabuhan Indonesia, serta konektifitas wilayah melalui jalur transportasi laut yang bebas hambatan (tol laut) dari dan menuju jalur pelayaran internasional. Badan Informasi Geospasial (2015) juga mengatakan bahwa kebutuhan untuk membangun pertahanan maritim dengan teknologi canggih merupakan salah satu tantangan yang harus dijawab untuk mencapai cita-cita sebagai PMD. Demikian pula BPPI

(2015) yang menyatakan bahwa dalam hal mewujudkan kebijakan PMD, pemerintah perlu membangun kekuatan pertahanan maritim yang didukung teknologi satelit dan sistem *drone*.

Dengan mendasarkan pencapaian PMD pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu akan sejalan pula dengan upaya penyelesaian jika pemerintah menemukan masalah. Jika mengambil contoh pada kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal melalui teknologi peledakan yang modern, maka jelas terlihat bahwa upaya pencapaian PMD sulit untuk dipisahkan dari penggunaan *hard power*. Penggunaan *hard power* jelas dipilih jika menggunakan kalkulasi untung rugi karena tidak memerlukan proses yang panjang dan berbelit serta dapat menunjukkan ketegasan sikap Indonesia di kalangan internasional. Sedangkan penggunaan *soft power* akan berbelit, membutuhkan waktu yang pajang, dan menunjukkan sikap lemah Indonesia di kalangan internasional.

Realitas ini menggambarkan sebetulnya dilema. Di satu sisi mencapai PMD sangat tergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta komponen modernitas lainnya. Namun di lain sisi komponen-komponen modernitas tersebut sangat berpotensi menyisihkan nilai-nilai partikular yang terdapat dalam bangsa Indonesia. Jika melihat kembali aspek-aspek PLNBA seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kondisi seperti ini termasuk tentangan bagi eksistensi PLNBA dalam upaya Indonesia mencapai posisi sebagai PMD, karena nilai-nilai partikular dapat tersisih saat berhadapan dengan modernitas yang identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tantangan penggunaan bahasa yang tertinggal oleh pengutamaan birokrasi

Dalam postmodernisme, terdapat ide yang menekankan pentingnya bahasa (Hermeneutik, Filologi) dalam kehidupan manusia dengan segala konsep dan analisisnya yang kompleks. Ini sebagai antitesa atas kondisi modernisme atas kuasa tafsir oleh mesin birokrasi ilmu pengetahuan (Calhoun, 1990). Ide yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa ini sejalan dengan penerapan PLNBA yang menekankan pada penggunaan *soft power* dengan mengutamakan negosiasi dan diplomasi.

Ide ini jelas berbeda dengan pilihan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencapai PMD. Dalam Mina Bahari (2015) dirilis bahwa Menteri Susi mengatakan: "Penenggelaman kapal tidak harus melalui prosedur pengadilan yang berbelit-belit". Dalam hal ini artinya Menteri Susi tidak membuka ruang diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan masalah

tersebut, dan lebih memilih tindakan tegas sepihak demi menyelematkan kepentingan nasional Indonesia. Sehingga dapat ditegaskan bahwa penggunaan *hard power* tidak mengutamakan penggunaan bahasa, tapi lebih didominasi oleh pengutamaan birokrasi.

Jika melihat ide postmodernisme yang menekankan pentingnya bahasa, kebijakan berbasis *hard power* seperti ini tidak sejalan dan menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi jika penggunaan bahasa menjadi keutamaan, ketegasan sikap akan mengalami penurunan karena penggunaan bahasa identik dengan diplomasi dan negosiasi. Di sisi lain tindakan itu dibutuhkan untuk memberikan efek jera dan meminimalisir kerugian di pihak Indonesia. Dilema seperti ini juga merupakan tantangan bagi PLNBA yang pada pelaksanaannya identik dengan diplomasi dan negosiasi.

Menurut pihak Angkatan Laut, di fora internasional, dalam beberapa kesempatan mereka menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah negara lain, justru ada yang lebih keras lagi. Bahkan dalam beberapa kasus tindakan Pemerintah Australia membakar dan menenggelamkan kapal pelakunya, tanpa peduli dengan nasib orang-orang di dalamnya. Para nelayan dan nakhoda kapal dipaksa keluar dari kapal dan berenang mencari selamat masing-masing (Nainggolan, 2015).

Modernisme memberlakukan universalitas dalam suatu pemahaman disebut *grand-narratives* atau *meta-narratives*. Sedangkan postmodernisme menolak jika segala sesuatu harus dimetanasarifkan karena tidak semua aspek dapat diperlakukan sama. Postmodernisme menghargai dan mempercayai hal-hal yang bersifat lebih kecil atau *local-narratives* (Turner, 2000). Jika mengamati tindakan Australia dan negara-negara lain di dunia merupakan sebetulnya 'meta-naratif' yang berlangsung di dunia internasional terhadap pemberantasan IUUF.

Jika dibandingkan dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh negara lain dalam kasus yang serupa, tindakan Indonesia mungkin lebih manusiawi karena sasarannya hanya pada kapal dan tidak mengancam keselamatan awaknya. Di negara dengan paham liberal seperti Australia tersebut tindakan tegas semacam itu mungkin dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri mereka. Meskipun legal, namun di Indonesia kebijakan seperti itu masih dipertanyakan karena prinsip kebijakan luar negeri Indonesia tidak sama dengan negara-negara lain di dunia.

Seperti yang telah dijelaskan, nilai-nilai luhur Pancasila yang disung dalam prinsip PLNBA tidaklah sama dengan nilai-nilai yang berlaku secara universal misalnya pada negara-negara yang menganut paham liberal. Oleh

karena itu kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal yang ideal di negara lain, belum tentu ideal jika dilakukan oleh Indonesia yang mendasarkan pada PLNBA yang berbasis nilai Pancasila dan mengutamakan penggunaan bahasa melalui diplomasi dan negosiasi. Jika kebijakan demi kebijakan *hard power* untuk mencapai PMD berlangsung secara terus menerus, sangat dikhawatirkan akan terjadinya pengabaian terhadap prinsip PLNBA di masa selanjutnya. Dalam sudut pandang postmodernisme kondisi ini tentunya merupakan tantangan bagi eksistensi PLNBA.

Kesimpulan

Dengan potensi maritim yang dimiliki, Indonesia berpeluang menjadi PMD. Namun tantanganannya cukup berat karena Indonesia harus menyelesaikan banyak persoalan melalui restorasi maritim Indonesia. Dalam menjalankan restorasi maritim untuk mencapai PMD Indonesia memilih menggunakan kebijakan dengan mekanisme *hard power* terutama dalam penanganan IUUF. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra karena dinilai berlebihan. Tidak menyoal pada benar atau salahnya kebijakan tersebut. Hanya saja dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan *hard power* untuk mencapai posisi sebagai PMD tidak sepenuhnya sejalan dengan PLNBA yang selama ini menjadi ciri khas politik dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Penggunaan *hard power* memang berlaku universal dan digunakan juga oleh negara lain untuk masalah IUUF. Namun hal ini masih dipandang 'aneh' jika dilakukan oleh Indonesia karena selama ini Indonesia selalu membuka kesempatan bagi terselenggaranya mekanisme *soft power* dalam menyelesaikan masalah dengan pihak asing. Jika dikaji melalui sudut pandang postmodernisme penggunaan *hard power* yang berlaku universal dalam pembakaran dan penenggelaman kapal tidak konsisten terhadap pelaksanaan nilai-nilai lokal Pancasila yang terkandung dalam PLNBA. Pancasila yang bersifat khas, spesifik, ataupun partikular yang identik dengan mekanisme *soft power* telah menjadi ciri bangsa Indonesia selama ini. Dengan demikian penulis mengamati dalam upaya mencapai posisi sebagai PMD, PLNBA mendapat tantangan baru akibat penggunaan *hard power* yang ditempuh pemerintah. Oleh karena itu agar tidak mengalami kehilangan makna dalam situasi dan kondisi saat ini, PLNBA perlu dikaji kembali agar tidak terabaikan dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai PMD.

Referensi

- Afrida, Nani (2015) *Illegal Fishing: Susi torpedoed Navy over Chinese vessel*, The Jakarta Post, February 26.
- Alami, A, N. (2008). "Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia" dalam Ganewati Wuryandari dkk. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 42-43.
- Ashworth, Lucian M. (2002). *Did the Realist-Idealist Great Debate Really Happen? A Revisionist History of International Relations*. London: SAGE Publications.
- Besar, Abdulkadir (2005). *Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Keniscayaan Metode Berfikir*. Jakarta: Penerbit Pustaka Azhari.
- Besar, Abdulkadir (2007). *Politik Idiologi*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Gajah Mada Pasca Sarjana Program Studi Ketahanan Nasional.
- Braman, S. (2003). *From the Modern to the Postmodern: The Future of Global Communications Theory and Research in A Pandemonic Age*. In Mody, B. (Ed.), *International and development communication: A 21st-century perspective*. Thousand Hills, CA: Sage Publications. Hlm. 109-23.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015). Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hlm. 19.
- Calhoun, Craig, (1990). *Postmodernism as Pseudohistory: Continuity In the Complexities of Social Action*. Chapel Hill: University of North Carolina.
- Devetak, Richard (1996). "Postmodernism" dalam Burchill, Scott and Linklater, Andrew. *Theories of International Relations*. London: Macmillan Press.
- Giddens, Anthony (1991). *The Consequences of Modernity*. Cambridge : Polity Press.
- H.J. de Graaf dan Th.G.Th.Pigeaud (1985). *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa; Peralihan dari Majapahit ke Mataram*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Hasan, Elnur (2010). *The Theory Of Postmodernism As A Contemporary International Relations Theory*. Turki: Turan Strategical Researches Center Turkish Nationalist Think-Thank Organisation. Hlm. 143.
- Jackson, Robert dan Georg Sørensen (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Jayanto, Satria, Dwi (2014). *Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Menyelesaikan Konflik Gosong Niger*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, , ejournal.hi.fisip-unmul.org Vol. 2 (3): 625-640 ISSN 0000-0000
- Kaplan, Morton, A. (1966). *The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations*, *World Politics*, Vol. 19, No. 1, (Oct., 1966). Hlm. 1-20.
- Kardono, Priyadi, dkk. (ed.) (2015). *Paradigma Geomaritim : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi*. Jakarta: Badan Informasi Geospasial.
- Kompas, 4 Maret 2000.
- Lukum, Roni, *Peran Idiologi Pancasila Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Sebagai Solusi Menghadapi Pengaruh Globalisasi*,

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-9fDkjlrQAhXJQ48KHavpAasQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Frepository.ung.ac.id%2Fget%2Fkaryailmiah%2F76%2Fperan-ideologi-pancasila-dalam-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia-sebagai-solusi-menghadapi-pengaruh-globalisasi.pdf&usq=AFQjCNHINgBjX9DRhYDbwL8_IqTr7NtxJA&bvm=bv.137132246,d.c2l

- Mashad, D. (2011). "Indonesia Menjawab Tantangan Global" dalam Genawati Wuryandari dkk. *Politik Luar Negeri Indonesia: Ditengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & P2P-LIPI. Hlm. 204.
- Muina, M, R. (2011). "Politik-Keamanan Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia" dalam Genawati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia: Ditengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & P2P-LIPI.
- Nainggolan, Poltak, Partogi (2015). *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Azza Grafika. Hlm. xix-xx.
- Nainggolan, Poltak, Partogi (2015). *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya*, *Politica*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.
- Nainggolan, Poltak Partogi (2015). *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa (2005). *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa Periode 1966 – 1995 Jilid IVA*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2005. Hlm. 14.
- Supriyatno, Makmur (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 361-367.
- Suhartono, Agus, "Membangun Budaya Maritim dan Kearifan Lokal Indonesia: Perpektif TNI Angkatan Laut", Makalah dipresentasikan pada *International Conference on Indonesian Studies (ICSSIS) 2010*, tanggal 9 Agustus 2010 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Sukma, Rizal (2004). *Islam in Indonesia Foreign Policy*, Taylor & Francis e-Library.
- Sulistyo, Tri, Asmoro ed. (2015). Jakarta: Majalah Mina Bahari, Edisi Khusus.
- Turner, Bryan (2000). *Teori-Teori Modernitas dan Postmodernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanto, Andi (2015) dalam Seminar Nasional "Penanggulangan *Maritime Transnational Organized Crimes* Menuju Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" di Kementerian Luar Negeri, 2 Maret 2015.
- Windiani, Reni (2010). *Politik Luar Negeri Indonesia Dan Globalisasi*, *Jurnal Ilmu Politik Politika*, Vol. 1 No. 2, 2010
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4894>



Panel 3: Ekonomi Politik Internasional



Beberapa Konsiderasi Kritis bagi Sinergi Poros-Maritim (Indonesia) dan OBOR/One Belt One Road (Tiongkok)?

Dr. A. Irawan J. H

Universitas Katolik Parahyangan

Abstrak

Perkembangan abad-21 yang ditandai oleh Rising-China menimbulkan harapan sekaligus kekhawatiran terutama bagi wilayah sekitar dan negara tetangganya. Pada tahun 2013 Tiongkok telah mencanangkan OBOR (One Belt One Road) sebagai rencana ekonomi jangka panjangnya, yang mencakup inter-kontinental. Pada tahun yang sama Indonesia membentuk Poros-Maritim. Tulisan ini difokuskan pada persoalan yang dihadapi Indonesia, baik yang telah terjadi maupun yang mungkin akan terjadi, terkait koeksistensi kedua strategi diatas. Interaksi antar negara yang seyogyanya dilakukan dengan mengedepankan kerjasama hanya dapat terlaksana bila national-interest para pihak terpenuhi. Dalam paper ini penulis mengajukan gagasan bahwa OBOR dan Poros-Maritim dapat saling menguntungkan bila potensi persoalan pada dua titik kritis, dari sudut kepentingan Indonesia, ditangani dengan baik: Selat-Malaka dan Natuna (Laut Tiongkok Selatan/LTS).

Keywords:

One Belt One Road, Poros-Maritim, Maritime-Security, national-interest.

Pendahuluan

Kerjasama perlu senantiasa dikedepankan dalam interaksi antar bangsa. Keohane menyatakan bahwa "The more tightly intertwined and interdependent the ... interactions among states, the greater the incentives for long-term cooperation in order to avoid disrupting these ties"¹. Sayangnya hal ini tidak senantiasa terjadi, dan hubungan antar negara seringkali juga diwarnai oleh konflik, bahkan perang. Secara alamiah, negara akan bergerak menurut apa yang dipandang sebagai *national-interest*-nya. *National-interest*² negara

¹ Robert O. Keohane; *Power and Governance in a Partially Globalized World*; Routledge; London and New York; 2002, hal. 54.

² Andrew Heywood; *Global Politics*; palgrave; UK; 2011, antara lain hal. 57.

kemudian diinterpretasikan dalam *strategy* atau kebijakannya, dimana salah satu jenisnya adalah kebijakan luar negeri (*foreign-policy*). Strategi negara dibentuk secara internal, secara sepihak, dan sosialisasinya dimasyarakat internasional dilakukan secara parsial. Akibatnya mungkin sekali terjadi berbagai interpretasi. Tidak mustahil bahwa kebijakan atau strategi dibuat berdasarkan asumsi-asumsi sepihak. Ini adalah realitas hubungan antar negara, dan terhadapnya perlu dilakukan berbagai respons. Reaksi negara terhadap strategi yang dibangun negara lainnya dapat amat berbeda³. Reaksi dapat bersifat permisif, menerima begitu saja tanpa memberikan respon yang berarti. Reaksi dapat juga bersifat adaptif, mengikuti strategi yang dikemukakan negara lain. Namun respon dapat juga bersifat reaktif, membentuk strategi lain yang berlawanan dengan strategi yang dikemukakan negara yang disebut pertama. Atau tentunya respon dapat bersifat gabungan dari berbagai posisi ini.

Sebagaimana yang telah dituliskan oleh berbagai referensi⁴, abad-21 ditandai oleh *Rising-China*. *Rising-China* berlangsung secara bertahap. Pertama adalah peletakan landasan domestiknya yang didasari pertanian, dengan penutupan terhadap pengaruh asing. Hal ini menyebabkan pada era Mao Zedong Tiongkok dikenal sebagai negara Tirai-Bambu. Kedua adalah pembukaan diri yang melandaskan diri pada industrialisasi, yang dilakukan pertama kali oleh Deng Xiao-Ping. Dan ketiga adalah pembukaan diri yang kedua, dimana Tiongkok akan tidak sekedar membuka pintunya terhadap investasi asing, namun akan menjadi pelaku investasi-investasi asing di berbagai kawasan. Hal ini dilakukan oleh Xi-Jinping, terutama sejak tahun 2013 melalui strategi ekonomi lintas kawasannya yang seringkali disebut OBOR (*One Belt One Road*). Ini adalah suatu strategi jangka panjang (diprojektikan untuk dimulai tahun 2021-2049) dengan membuat suatu jalur perdagangan dan energy Tiongkok yang membentang dari Tiongkok sampai Eropa dan Afrika, tidak menyertakan Amerika-Serikat dan Jepang. Jalur ini juga mempunyai titik-titik yang dekat dengan territorial Indonesia, yang terletak di Selat-Malaka dan Natuna. Indonesia perlu memberikan respon yang tepat terhadap strategi ini, terutama pada dua lokasi tersebut, dimana kepentingan Indonesia mungkin sekali bersinggungan dengan kepentingan Tiongkok. Upaya penghindarian terjadinya konflik (termasuk dengan pengerahan kekuatan militer), atau pembangunan kerjasama patut mendapat perhatian khusus pada lokasi-lokasi

³ Marijke Breuning; "Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction"; Palgrave Macmillan; NY; 2007; hal. 152-153.

⁴ Jeffrey N. Wasserstrom; *China in the 21th. Century: What Everyone Needs to Know*; Oxford University Press; Oxford; 2010. Juga baca Oded Shenkar; *The Chinese Century: The Rising Chinese Economy and Its Impact on the Global Economy, and the Balance of Power, and Your Job*; Wharton; 2005.

tersebut. Hal ini juga mengingatkan bahwa pada tahun yang sama (2013), presiden Indonesia Joko-Widodo juga telah mencanangkan strateginya, yakni pembentukan Poros-Maritim. Dengan mengacu pada berbagai hal diatas, maka paper ini akan difokuskan pada pertanyaan: **"Apa saja konsiderasi kritikal yang perlu dikedepankan agar terbuka peluang sinergi Poros-Maritim dan OBOR?"**

Tulisan ini akan terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, kedua adalah bagian teoritis yang akan mengusung konsepsi *Maritime-Security* dan *Strategy dan Foreign Policy*. Ketiga adalah pembahasan tentang Poros-Maritim dan OBOR. Bagian keempat membahas isu Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan (LTS) terutama Natuna.

Bagian Teoritis

Bagian teoritis ini akan terbagi dalam dua bagian, *Maritime-Security* dan *Foreign Policy*. *Maritime-Security* diperlukan untuk mengetahui elemen-elemen pembentuknya. Sedangkan *Foreign-Policy* dibutuhkan untuk mendalami bagaimana respon-respon yang tersedia bagi suatu negara ketika negara lain mencanangkan strategi jangka panjangnya.

Bauer⁵ menyatakan bahwa *Maritime Security* terdiri dari empat pilar yang menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda. Pertama adalah *national-security*, yang dalam hal ini berarti perlunya dibangun *sea-power* untuk menjamin keamanan negara pada matra laut. Disini akan dipertanyakan sejauh mana kekuatan laut yang dibangun telah dapat menjamin kedaulatan suatu negara di matra laut. Pihak yang mendapat perhatian khusus disini adalah angkatan laut. Kedua adalah *marine-safety*, yang mempertanyakan sejauh mana keamanan pelayaran dan kamanan mereka yang profesinya terkait dengan laut dapat terselenggara bersamaan dengan konservasi lingkungan laut. Pelaku yang sering disorot adalah mereka yang mengadakan eksplorasi laut dan para perompak. Ketiga, *marine-security* terkait dengan potensi ekonomi laut. Disini ditekankan bahwa eksplorasi nilai ekonomi yang dilakukan dilautan harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan "*blue-economy*" dan "*blue-growth*" (Rio+20 World Summit 2012). Pelaku yang disorot disini tentunya adalah perusahaan dan negara yang melakukan ekplorasi laut. Keempat adalah *human security*, dimana dinyatakan disini bahwa pengamanan terhadap mereka-mereka yang hidup disekitar laut perlu mendapat perhatian. Contohnya adalah nelayan dan mereka yang bertempat tinggal dipesisir pantai. Akibatnya *illegal-fishing* mendapat perhatian khusus. Apabila kita mengacu

⁵ Christian Bueger, Cardiff University, "What is Maritime Security?"; in *Marine Policy*, 2015; p. 3-5.

pada konsepsi Bauer, keberadaan OBOR menimbulkan pertanyaan pada *National-Security* dan *Economic-Development* pada persoalan Natuna; dan pada *Human-Security* pada isu Selat Malaka.

Agak berbeda dengan Bauer, Rahman mengedepankan lima dimensi *marine-security*⁶: "*security of the sea itself*"; "*ocean-governance*"; "*maritime border protection*"; "*military activities at sea*"; dan "*security regulation of the maritime transportation system*". Pertama adalah "*security of the sea itself*" yang tetap harus menerima kenyataan bahwa ada rivalitas negara-negara dalam penggunaan samudera. Kedua adalah "*ocean-governance*", yang ditujukan untuk menciptakan suatu lingkup samudera yang aman bagi penggunanya disatu pihak, namun juga harus menjaga kepentingan negara secara individual, melalui penguatan suatu "*ocean-regime*". Acuan yang dapat dipakai adalah prinsip-prinsip LOSC (*Law of the Sea Convention*; 1982) yang masih belum disepakati bersama. Ketiga adalah "*maritime border protection*". Setelah adanya konsep Zona Ekonomi Eksklusif yang dikemukakan tahun 1970-an maka negara-negara (terutama kepulauan) berlomba-lomba untuk secara maksimal mengklaim wilayah lautnya mengikuti ketentuan didalamnya. Namun bersamaan dengan hak yang diperoleh, ZEE juga menyatakan perlu adanya kemampuan yang ditunjukkan secara terus menerus, untuk mempertahankan klaim yang dilakukan. Tanpa adanya kemampuan ini, klaim tersebut hanya bersifat simbolis semata, tidak bersifat efektif. Keempat adalah "*military activities at sea*" yang dalam hal ini digarisbawahi pentingnya demilitarisasi lautan. Sayangnya control persenjataan laut sampai saat ini masih belum banyak berkembang, karena adanya berbagai permasalahan. Kelima adalah "*security regulation of the maritime transportation system*" yang menekankan tentang keamanan pelayaran laut, baik untuk individu maupun untuk fungsi komersial. Hal ini terutama menjadi penting setelah adanya peristiwa *Nine-Eleven*. Merujuk pada konsep Rahman, maka persoalan yang dihadapi Indonesia sehubungan dengan pengusungan OBOR adalah "*maritime border protection*" pada isu Natuna, dan "*security regulation of the maritime transportation system*".

Mengingat OBOR dan Poros Maritim adalah suatu *policy* yang mempunyai dimensi internasional, maka beberapa konsep yang terkait dengan *foreign policy* juga dikemukakan disini. *Grand Policy* adalah *strategy* jangka

⁶ Chris Rahman; "Concepts of Maritime Security"; Centre for Strategic Studies: New Zealand; 2009; p.31-42.

panjang suatu negara⁷. Hal ini biasanya dikembangkan dari sejarah suatu bangsa, juga peran dan semangat yang dipandang menjadi identitas mereka. Hal-hal ini kemudian diproyeksikan untuk diaplikasikan pada masa depan yang cukup panjang, yang kecenderungannya diinterpretasikan dengan gejala yang sudah tampak saat ini. Contohnya disini adalah *grand-policy* AS setelah berakhirnya Perang-Dingin; *grand-policy* China dalam masa globalisasi. OBOR adalah aplikasi *grand-strategy* China, dari tahun 2021-2049, yang didasari persepsi *positioning* China sebagai negara besar, bukan lagi bagian dari negara berkembang, dalam dunia dimana hegemoni AS menurun.

Kebijakan luar negeri suatu negara perlu merespons kondisi eksternalnya yang berubah. Dalam konteks ini Marijke⁸ menjelaskan setidaknya ada dua posisi yang dapat menjadi pilihan, dimana masing-masing mempunyai alasannya yang berbeda. Pertama adalah mengambil posisi berlawanan, baik karena kepentingan sendiri untuk lepas dari ketergantungannya (*counterdependent foreign policy*) maupun karena adanya kepentingan untuk memuaskan public domestik (*compensation*). Kedua adalah mengambil posisi searah, baik karena kepentingannya sendiri (*consensus-oriented foreign policy*) maupun tekanan negara yang mendominasinya (*compliant foreign-policy*). Posisi lain yang dapat dikemukakan adalah menekankan kebijakan yang berbeda pada issue yang berbeda. Misalnya disini adalah mengambil posisi berlawanan ketika menyangkut masalah territorial, secara bersamaan mengambil posisi yang searah dalam masalah ekonomi.

Poros-Maritim (Dunia)

Maritime-Security, yang merupakan salah satu butir dari Nawacita, dapat dijabarkan dalam Lima Pilar Poros Maritim⁹, untuk membuatnya lebih operasional. Program Poros Maritim dibentuk dengan menekankan pada pembentukan budaya maritim; kedaulatan pangan maritime; pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritime (termasuk didalamnya membangun industry perkapalan dan wisata bahari); diplomasi maritime; dan pembangunan kekuatan kelautan. Ini adalah pengertian luas dari Poros Maritim (*Global-Maritime Fulcrum*). Budaya maritime perlu untuk diperkenalkan kembali,

⁷ Michael D. Swaine and Ashley J. Tellis; "Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present, and Future"; Project Air Force / RAND; post 2000; lihat juga Kenneth Christie (ed.); "United States Foreign Policy and National Identity in the 21th. Century"; Routledge; London; 2008.

⁸ Marijke Breuning; "Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction"; Palgrave Macmillan; NY; 2007, hal. 152-153.

⁹ Endah Murniningtyas (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam); disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional: "Ekonomi Maritim: Pengelolaan Ekonomi Maritim yang Mandiri dan Berkelanjutan"; Wakatobi, 25 Januari 2015. Baca juga Tempo, 13 November 2014.

dibangkitkan, dan diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Hal ini akan mengakibatkan perubahan paradigma dalam melihat laut, bukan sebagai batas tetapi sebagai area dimana berbagai aktivitas dan potensi dapat dikembangkan. Kedua adalah dengan membangkitkan kemampuan untuk menjadikan lautan sebagai sumber pangan nasional. Hal ini amat relevan terutama mengingat luas lautan Indonesia yang bahkan melebihi luas daratannya. Ketiga adalah pengembangan fasilitas-fasilitas maritime, untuk membangun konektivitas, dalam lingkup nasional. Keempat adalah intensifikasi diplomasi-maritime yang penting dalam interaksi Indonesia dengan negara-negara tetangga, disamping dengan negara besar. Dan kelima pembangunan kekuatan laut, yang merupakan prasyarat agar batas-batas teritorial laut dan keamanan aktivitas bahari dapat terjamin. Yang perlu juga difahami adalah bahwa Poros-Maritim bukan merupakan suatu strategi menutup wilayah laut Indonesia dari aktivitas lalu-lintas laut internasional. Hal ini terlihat dari pengakuan Indonesia akan tiga ALKI¹⁰ yang menjamin kebebasan kelautan bagi pihak asing, sesuai dengan UNCLOS 82.

Walaupun merupakan suatu reduksi, namun untuk tujuan analisa ada perlunya untuk melihat pengertian sempit strategi ini. Poros Maritim akan dibangun dalam tiga tahap¹¹. Pertama adalah pengembangan empat pelabuhan utama: Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makasar. Ini adalah sasaran jangka pendek. Kedua adalah pengembangan pelabuhan-pelabuhan "feeder" yang masing-masing akan terkoneksi dengan empat pelabuhan utama yang telah disebut diatas. Ini merupakan sasaran jangka menengah. Dan ketiga adalah pembentukan Tol-Laut yang membentang dari Belawan sebagai koridor barat sampai ke Sorong sebagai koridor Timur. Hal yang merupakan sasaran jangka panjang ini akan menjamin lalu-lintas barang dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Pada tahap yang selanjutnya akan dibangun Tol-Laut, yakni dengan menambahkan pembangunan pelabuhan Sorong sebagai titik paling timur di Indonesia.

Agus Suhartono¹² menekankan bahwa perlu adanya keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan kelautan Indonesia dengan penyelenggaraan kehidupan internasional yang bertanggung jawab dalam

¹⁰ Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dibarat, ALKI II di tengah, dan ALKI III di timur. ALKI memberi hak pihak asing (kapal dan pesawat internasional) untuk menggunakannya.

¹¹ Muh. Dimiyati (Deputi Sumber Daya IPTEK, Kemenristek dan Dikti; Jakarta, 10 Desember 2014; "Pemikiran Kecil Tentang Kontribusi Strategis IPTEK untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia", data Departemen Perhubungan.

¹² Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono; Jabatan terakhir Kasal 2009-2010, Panglima TNI 2010-2013. Dalam Sarasehan "Indonesia Poros Maritim Dunia" topic bahasan "Kedaulatan Maritim Indonesia"

memandang PM. Keseimbangan tersebut akan berhubungan dengan hak lintas transit, hak lintas damai, dan hak lintas alur laut kepulauan. Untuk melaksanakannya diperlukan pemenuhan aspek yuridisnya, instrument untuk melaksanakannya, dan institusi hukum bila terjadi kasus. Realisasi Poros-Maritim membutuhkan kerja keras yang sungguh-sungguh. Sedangkan Muhamad Dimiyati¹³ menyatakan ada beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam mewujudkannya. Pertama adalah sumberdaya manusia; kedua penguatan infrastruktur maritime; ketiga ketersediaan dana yang besar yang kemungkinan harus melibatkan pihak luar (investasi asing).

Selanjutnya Forum Rektor Indonesia¹⁴ menyatakan bahwa ada sebelas sector utama yang perlu dikembangkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari Poros Maritim. Potensi kebaharian Indonesia dapat dikatakan amat besar. Selanjutnya Dewan Rektor Indonesia juga mengemukakan tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan Poros Maritim. Misalnya adalah mengatasi perompakan, konflik antar nelayan, pencurian ikan, penyelundupan manusia, dan batas wilayah laut (h.49-53).

OBOR sebagai Strategi Ekonomi Jangka Panjang Inter-kontinental Tiongkok

OBOR merupakan strategi ekonomi jangka panjang Tiongkok yang terutama ditujukan untuk membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur bagi kelancaran arus barang dan jasa dalam jalur yang membentang dari Tiongkok sampai Eropa Barat dan Afrika. OBOR dikembangkan dari *China's Silk Road*, suatu jalur perdagangan yang telah dilakukan masyarakat Tiongkok jaman dahulu. Ide Silk Road dikemukakan kembali oleh Wang Jisi, seorang professor dari Universitas Beijing, tahun 2012. Ia menyatakan perlunya mengembangkan tiga Silk-Roads: ke Asia Tenggara, ke Asia Selatan, dan ke Asia Tengah. OBOR (*yidai-yilu*) adalah suatu strategi jangka panjang yang dikembangkan oleh Xi-Jinping sejak sekira tahun 2013, dari SREB (*Silk Road Economic Belt*) dan "*The 21th. Century Maritime Silk Road*"¹⁵. Yang pertama dikembangkan Xi-Jinping untuk mendukung perdagangan dengan Asia Tengah, sedangkan yang kedua mendorong interaksi yang lebih intens lagi dengan ASEAN. Sekarang tentunya cakupannya jauh lebih luas dari dua kawasan tersebut. OBOR dikatakan sebagai suatu kerjasama terbuka, tanpa ikatan politik (walaupun

¹³ Muh. Dimiyati (Deputi Sumber Daya IPTEK, Kemenristek dan Dikti; Jakarta, 10 Desember 2014; "Pemikiran Kecil Tentang Kontribusi Strategis IPTEK untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia", data Departemen Perhubungan.

¹⁴ Naskah Akademik 2015 Forum Rektor Indonesia; hal. 49-53.

¹⁵ European Council on Foreign Relations (China Analysis); "One Belt, One Road: China's great Leap Outward.

ketika peran Tiongkok didalamnya menjadi demikian dominan pengaruhnya menjadi sesuatu yang sulit untuk diabaikan). OBOR merupakan sebuah strategi kolosal yang mau tidak mau akan merubah peta ekonomi global. Hal ini dikarena ia akan menyertakan 65 negara, 55% GNP dunia, 70% penduduk dunia, dan 75 cadangan energy global.

Xi-Jianping yang merupakan tokoh yang menginisiasi OBOR ditempatkan sebagai penerus modernisasi Tiongkok. Tokoh yang pertama adalah Mao Zedong yang mengisolasi Tiongkok dan mengembangkan pertanian; yang kedua Deng Xiao Ping yang membuka Tiongkok untuk investasi asing; dan yang ketiga adalah Xi-Jinping. Xi-Jinping dipandang sebagai tokoh yang melakukan China's Second Opening. Bila Deng Xiao Ping membuka Tiongkok untuk dijadikan lokasi industry dari investor-investor asing; maka Xi-Jinping adalah orang yang membuat Tiongkok yang sudah terbuka untuk melakukan investasi-investasi diluar negeri. Hal ini dirasa perlu untuk dilakukan karena masa pertumbuhan tinggi yang didasari oleh proses industry di Tiongkok, yang dijalankan oleh buruh murah, telah lewat. Jadi diperlukan suatu strategy baru, yakni dengan menekankan pada investasi luar negeri oleh Tiongkok, dalam suatu jalur yang disebut OBOR.

Arti Penting OBOR

Pelaksanaan OBOR penting bagi Tiongkok dalam memenuhi tujuan jangka panjang yang bersifat menyeluruh. Cakupan inter-kontinental dari strategi ini membuat batas antara *domestic policy* dan *foreign policy* menjadi baur. OBOR merupakan proyek mercusuar yang amat penting bagi Tiongkok, sejak kepemimpinan Xi-Jinping. Ada beberapa penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan munculnya OBOR sebagai suatu strategi jangka panjang Tiongkok, yang sekaligus menjadi tujuan-tujuannya¹⁶. Pertama, OBOR sekedar merupakan perluasan dari strategi "Go-West" yang salah satu pokok pentingnya adanya stabilitas di provinsi Xinjiang. Kedua, Tiongkok ingin merubah cadangan devisa dan surat-surat berharganya menjadi sesuatu yang lebih merefleksikan pengaruhnya. Ketiga, OBOR mencerminkan telah terjadinya orientasi politik luar negeri Tiongkok. Keempat, OBOR dimaksudkan sebagai pencapaian di luar Tiongkok yang diperuntukkan terutama bagi kelangsungan Partai Komunis Tiongkok, dalam kondisi merosotnya pamor partai komunis terutama dengan disintegrasi Uni-Sovyet. Kelima, pencapaian OBOR penting bagi Tiongkok untuk mengatasi kondisi ekonomi jangka pendek

¹⁶ CSS Analyses in Security Policy; No. 195; September 2016; Editor Christian Nunlist; "One Belt, One Road: China's Vision of Connectivity", p. 3.

yang menekannya, yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya, yang berakar dari industrinya yang “over-capacity”¹⁷. Mesin industry Tiongkok yang telah di “set” untuk melakukan produksi masal dengan efisien mengalami *over-production*. Implikasinya adalah bahwa produk-produk Tiongkok tidak akan sepenuhnya dapat diserap pasar global. Bila ini terjadi secara terus menerus tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian luar biasa bagi Tiongkok, karena biaya akan menjadi lebih besar dari pemasukan. Dengan landasan pemikiran ini maka dimunculkan OBOR. Strategi ini diarahkan untuk secara lebih kuat mengakses Eropa sebagai pasar utama Tiongkok, dengan secara gradual merubah struktur industry menuju high-quality products, sekaligus mempersiapkan beberapa lokasi (Asia-Tengah, Timur-Tengah, dan Afrika) sebagai pemasok energinya. Keenam, OBOR ditujukan untuk membangun sarana-sarana infrastruktur darat dan laut disepanjang jalurnya. OBOR akan membuka enam corridor ekonomi baru bagi Tiongkok¹⁸. Mereka adalah: New Eurasian Land Bridge; China-Mongolia-Russia Corridor; China-Central Asia-West Asia Corridor; China-Indochina Peninsula Corridor; China-Pakistan Corridor; and Bangladsh-China-India-Myanmar Corridor. Ketujuh, 13 provinsi *China* akan terkoneksi dengan dunia luar dengan OBOR¹⁹. Provinsi-provinsi di pantai timur (Jiangsu, Zhejiang, Fukian, Guangdong, Hainan) akan langsung terhubung dengan *Maritime Silk Road*. Provinsi Xinjian akan merupakan core yang terhubung dengan the Silk Road Economic Belt (jalur darat), Provinsi Yunnan akan terkoneksi khususnya ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa provinsi dengan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Barat (Qinghai, Gansu, Shaanxi, dan Ningxia). Kedelapan, proyek ini juga dimaksudkan untuk menyediakan pusat-pusat pasokan energy bagi Tiongkok, *String of Pearls*²⁰. Industrialisasi Tiongkok yang massif telah menjadi tulang punggung perekonomiannya selama lebih dari tiga dekade. Untuk melakukan ini dengan berhasil perlu pasokan energy yang terus menerus dalam jumlah besar. Selama ini Tiongkok mendapatkannya dari Timur-Tengah, Afrika, dan sebagian kecil dari Asia. Pasokan energy harus dipelihara, karena tanpanya industrialisasi tidak dapat dilakukan dengan berhasil. Untuk itu Tiongkok telah menetapkan sekian banyak pusat-pusat energy di lingkup global, yang disebutnya sebagai “pearls”. Lokasi-lokasi ini antara lain Piraeus port facility,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Foreign and Commonwealth Office (China-Britain Business Council); A Role for UK Companies in Developing China's Initiative: New Opportunities in China and Beyond; 2015/2016.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Christina Lin; The Washington Institute for Near East Policy; The New Silk Road: China's Energy Strategy in the Greater Middle East; Policy Focus #109; April 2011.

port Sudan facility, potential Aden naval base, Gwandar naval base and surveillance facilities, potential IPI extension to Kashgar, Hambantota port facility, Chittagong port facility, Irrawaddy transportation corridor, Sittwe deep-water port facility, intelligent-gathering facility (in the ocean, near Myanmar and Thailand), Kra canal, oil drilling and survey, Woody island airfield, Hainan island airfield and port (the last three ones are located in the SCS) ²¹.

Modalitas dan Tantangan Tiongkok untuk Pelaksanaan OBOR: Konsistensi, Institutionalisasi, dan Pendanaan

OBOR sebagai suatu strategi ekonomi inter-kontinental didukung oleh beberapa modalitas penting yang telah dimiliki Tiongkok. Pertama adalah adanya kesinambungan kebijakan jangka panjang di Tiongkok. Kedua, OBOR didukung oleh koordinasi antar lembaga. Ada setidaknya tiga institusi negara yang terkait langsung dan bertanggungjawab terhadap implementasi OBOR ²². OBOR sejak 2014 ditangani secara khusus oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, dan Kementerian Perdagangan. Ketiga, Tiongkok telah menyediakan capital dalam jumlah yang cukup besar, yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar. Ada beberapa sumber pendanaan OBOR ²³ yang secara keseluruhan berjumlah sekira 100 miliar dollar AS (bahkan beberapa referensi menyatakan lebih dari ini). Pertama dari Central-Asia-focused Silk Road Fund (sekira 40 miliar \$US, diambil dari cadangan devisa yang melimpah), AIIB / Asia Infrastructure Investment Bank (sekira 50 miliar \$US; atau bahkan 100 miliar menurut CSS), dan dari BRICS-led New Development Bank (sekira 10 miliar \$US, atau bahkan 100 miliar menurut CSS). Secara lebih luasnya, pembiayaan OBOR akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak ²⁴. Bank-bank Tiongkok akan dilibatkan ²⁵ misalnya China Development Bank, China Export-Import Bank (sekira 80 miliar US\$ in 2015), China Agriculture Development Bank. Selain bank-bank tersebut, juga akan disertakan investasi dari pemerintahan provincial Tiongkok dan bank-bank di level ini ²⁶. Pembiayaan

²¹ Ibid, peta di halaman 20.

²² European Council on Foreign Relations (China Analysis); "One Belt, One Road: China's great Leap Outward.

²³ Ibid.

²⁴ Alessandro Arduina; China's One Belt One Road: Has the European nion Missed the Train?"; Policy Report; Mar Uch 2016; RSiS (S. Rajaratnam School of International Studies; Policy Report; March 2016.

²⁵ CSS Analyses in Security Policy; No. 195; September 2016; Editor Christian Nunlist; "One Belt, One Road: China's Vision of Connectivity", hal. 3.

²⁶ Lihat juga CSS Analyses in Security Policy, No. 195, September 2016, Ed. Christian Nunlist; One Belt One Road: China's Vision of Connectivity", hal. 3.

juga akan berasal dari perusahaan (swasta dan pemerintah) dimana proyek dilakukan.

Ada berbagai tantangan dalam merealisasikan OBOR. Zhang mengajukan beberapa permasalahan eksternal yang bersifat politik dalam implementasi OBOR²⁷. Yang pertama adalah persepsi bahwa OBOR mempunyai motivasi strategic bagi Tiongkok. Kedua adalah ketegangan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya yang sudah tampak dalam masalah Laut Tiongkok Selatan. Yang ketiga adalah potensi penentangan dari negara-negara besar: AS, Rusia, dan India. Terhadap pemikiran Zhang ini Chu menambahkan bahwa yang menjadi problema utama dari OBOR adalah stabilitas politik yang tidak dapat diprediksi di negara-negara yang dimasukkan kedalam skema tersebut.

Dalam pelaksanaannya OBOR perlu mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan ekonomi domestik, agar program ini dapat dilakukan secara berhasil. Jia menyatakan bahwa keberhasilan OBOR akan ditentukan oleh kemampuan Tiongkok untuk membalans OBOR dengan kondisi perekonomian domestiknya²⁸. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan agar ROI (Return of Investment) yang dilakukan Tiongkok bersifat efektif sehingga tidak jatuh dalam perangkap hutang; juga agar Tiongkok membatasi peran pemerintah dalam program-program OBOR (Huang, hal. 5); dan agar investasi melibatkan sector swasta (An Jianglin, hal. 5).

Natuna dan Selat Malaka: Titik-titik Singgung Terdekat OBOR dan Poros Maritim

Setidaknya ada tiga persoalan yang secara umum dihadapi Indonesia secara umum dalam masalah kelautan. Pertama adalah persoalan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Kedua adalah praktek illegal-fishing oleh kapal-kapal asing. Dan ketiga adalah perompakan dan penculikan²⁹.

Selat Malaka

Selat Malaka merupakan daerah yang beresiko bagi lalu-lintas perkapalan. Walaupun demikian ia tetap menjadi pilihan karena dapat mengurangi jarak tempuh laut, yang tentunya mempunyai konsekuensi financial, sehingga tidak perlu mengambil jalan memutar. Selat Malaka tetap

²⁷ European Council on Foreign Relations (China Analysis); "One Belt, One Road: China's great Leap Outward.

²⁸ Ibid, hal. 5.

²⁹ Iis Gindarsah dan Adhi Priamarizki, Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns, RSIS (S. Rajaratnam School of International Studies, Indonesia Security Doctrine.

penting mengingat rencana pembuatan jalur potong di Thailand juga masih tidak terealisasi.

Negara-negara yang langsung berbatasan dan bertanggung-jawab terhadap keamanan selat ini adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura (*littoral states*). Berbagai persoalan membayangi daerah ini. Pertama adalah perompakan; kedua terorisme; dan ketiga adalah adanya praktek perekonomian ilegal yang akut³⁰. Walaupun tampak sebagai aktivitas-aktivitas yang berbeda, perompakan dan terorisme dapat terkait satu sama lain. Wilayah-wilayah tertentu yang merupakan basis terorisme seringkali mengembangkan keahlian untuk melakukan ini. Selanjutnya hasil perompakan ini akan berguna untuk membeli persenjataan dan peralatan-peralatan untuk melakukan perompakan yang lebih canggih dan berhasil. Perompakan bermotivasi uang, sedangkan terorisme mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pesan politik. Namun keduanya dapat terjalin sehingga tidak dapat dipisahkan.

Penyerangan di Selat-Malaka memang telah menjadi kekhawatiran berbagai pihak, dengan seringnya hal itu terjadi³¹. Dari tahun 1996-1998 kurang dari duapuluh serangan yang terjadi. Namun kemudian terjadi lonjakan yang ekstrim dari tahun 1998-pertengahan 2000, dari sekira 10 kali sampai sekira 62 kali. Setelah itu terjadi penurunan sampai sekira rata-rata 30 kali antara tahun 2002-2005. Namun dapat diamati bahwa sekarang tengah terjadi intensifikasi perompakan, yang juga terkait dengan organisasi terorisme, yang dimulai dari tahun 2015-an (berita-berita terakhir). Keamanan Selat-Malaka juga merupakan kepentingan dari berbagai negara besar. Misalnya disini adalah AS, Tiongkok, Jepang, dan India. Hampir semuanya menggunakan selat ini sebagai jalur lalu lintas perdagangannya, untuk memasok minyak. Bagi Tiongkok keamanan pelayaran Selat-Malaka penting karena merupakan jalur pengadaan minyak bagi industrinya. Seiring dengan pembentukan OBOR, Tiongkok juga mencanangkan pengadaan *String of Pearls*, yang merupakan suatu opsi untuk memasok energy (minyak) dari Timur-Tengah dan daerah lainnya tanpa melalui Selat-Malacca. Bagi Tiongkok dikenal "*The Malacca Dilemma*", dimana selat ini dipandang penting namun keselamatan pelayaran pada lokasi ini sulit dijamin.

Pengamanan Selat Malaka terutama dilakukan secara bersama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Namun kerjasama pengamanan selat tidak terbatas dilakukan oleh ketiga *littoral states* ini, namun menyertakan

³⁰ FFP (Fund for Peace): Patricia Taft and Filipe Umana; Threat Convergence: Transnational Security Threats in the Straits of Malacca"; 2012.

³¹ Sam Bateman, Catherine Zara Raymond, Joshua Ho; Safety and Security in the Malacca and Singapore Straits; Institute of Defence and Strategic Studies (Policy Paper); 2006.

berbagai negara lain. Kerjasama dapat berbentuk bilateral, trilateral, maupun ekstra-regional³². Contoh-contoh dari kerjasama ini misalnya³³ adalah sebagai berikut. Dalam ASEAN misalnya telah diadakan konferensi tahun 1997 yang melahirkan *Declaration of ASEAN Declaration of Transnational Crime*. Selanjutnya adalah STRAITREP (*Ship Reporting System in the Malacca Straits*); yang merupakan kesepakatan untuk pelaporan kapal yang melewati selat, untuk mendukung keamanan pelayaran; yang dilakukan oleh 3 negara littorial. Tahun 1995 AS telah menginisiasi latihan laut bersama (*CARAT/Cooperation Afloat Readiness and Training*), terutama dengan negara-negara littorial. Setelah 9/11 kerjasama ini dikembangkan juga untuk menangani masalah terorisme. Jepang juga merupakan negara yang berkepentingan terutama dalam pengamanan terhadap perompakan. Tahun 1999 pada ASEAN + Summit Jepang mengusulkan pembentukan *Ocean Peace Keeping (OPK)*, yang karena berbagai permasalahan gagal untuk dilakukan.

Kerjasama pengamanan Selat-Malaka makin intensif setelah 9/11, dengan meningkatnya konsiderasi pengamanan dari tindakan terorisme. Pada 2002 *Senior Official Meeting on Transnational Crime* di Kuala Lumpur menyepakati *Plan of Action to Combat Transnational Crime (POACTC)*³⁴. Ini merupakan upaya mengkoordinasikan upaya untuk menangani transnational crime ditingkat nasional, bilateral, dan regional. Jepang pada tahun 2001 di ASEAN+3 meeting membentuk *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP)*³⁵. Suatu pusat sharing informasi dibentuk di Singapura (*ISC/Information Sharing Centre*). Upaya lain adalah usulan tahun 2004 tentang pembentukan RMSI (*Regional Maritime Security Initiative*) oleh AS. Usulan ini diajukan oleh Admiral Thomas Fargo (Commander of the US Pacific Command) di depan *House of Representative*. Ide dasarnya adalah untuk memungkinkan patroli yang dilakukan kapal-kapal AS untuk menimbulkan efek jera pada pelaku-pelaku perompakan dan terorisme. Namun kehadiran AS disana ditentang Indonesia sehingga tidak jadi dilaksanakan. Selanjutnya adalah FPDA (*Five Power Defence Agreements* (UK, Australia, New Zealand, Malaysia, dan Singapore). Implementasinya misalnya dalam latihan bersama tahun 1997, diikuti dengan

³² FFP (Fund for Peace): Patricia Taft and Filipe Umana; *Threat Convergence: Transnational Security Threats in the Straits of Malacca*; 2012.

³³ Massey, Anthony Shintaro; *Maritime Security Co-operation in the Strait of Malacca* (a thesis); Calhoun (The Naval Postgraduate School; Institutional Archive; 2008; hal. 26-30.

³⁴ Massey, Anthony Shintaro; *Maritime Security Co-operation in the Strait of Malacca* (a thesis); Calhoun (The Naval Postgraduate School; Institutional Archive; 2008; hal. 40-46.

³⁵ Neil A. Quartaro, *The Challenges of the Jolly Roger: Industry Perspective on Piracy*, The National Bureau of Asian Research, November 2010, p. 46. Dalam tulisan ini dijelaskan juga tentang keikutsertaan Tiongkok, Korea Selatan, India, Srilanka, dan Bangladesh.

aktivitas yang sama namun mengalami intensifikasi tahun 2003 dan 2004. Juga penting untuk dikemukakan Operasi MALSINDO (Malaysa, Singapore, Indonesia) tahun 2004 dimana *litoral states* berkomitmen untuk mengadakan patrol terkoordinasi di selat. Ini diikuti oleh perkembangan tahun 2005 dimana disetujui *Eyes in the Sky Initiative* (EiS).

Masalah Laut Tiongkok Selatan dan Natuna

Abad-21 ditandai dengan Rising-China³⁶, yang dimulai oleh Deng Xiao-Ping dan kemudian dilanjutkan oleh Xi-Jinping. Deng mengadakan *the First China Opening*, dengan membuka Tiongkok (timur) bagi modal asing untuk membangun industrialisasinya yang efisien. Xi-Jinping mengadakan *the Second China Opening* dengan membentuk *New Silk Road* dan kemudian *Maritime Silk Road*, dimana keduanya kemudian disebut OBOR (*One Belt One Road*). Strategi ini akan membuat suatu jalur ekonomi antara Tiongkok dengan Eropa dan Afrika, yang akan diisi dengan sejumlah besar proyek-proyek pembangunan infrastruktur. LCS adalah wilayah penyangga bagi Maritime Silk Road Tiongkok³⁷. Pengamanan LCS memungkinkan Tiongkok mengontrol suatu segmen OBOR (dalam hal ini Maritime Silk Road) yang cukup luas.

Beberapa tahun sebelumnya (2009) Tiongkok mencanangkan *Nine Dash-Line* yang mengklaim hampir keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan, berdasarkan sejarah jelajah nelayannya. Hal ini menimbulkan persoalan karena adanya tumpang-tindih dengan wilayah beberapa negara ASEAN³⁸. Indonesia berposisi untuk tidak memasukkan diri sebagai *claimant*, sehingga dapat memainkan peran sebagai *honest broker*. Namun aktivitas nelayan Tiongkok sampai ke wilayah Natuna yang kemudian ditangkap oleh angkatan laut RI, dan kemudian lepas karena bantuan *coast-guard China* telah memperlihatkan keinginan Tiongkok untuk mengklaim wilayah laut Natuna sebagai teritorial penangkapan ikannya. Bahwa wilayah kepulauan Natuna masuk kedalam peta *Nine-Dash-Line* diperkuat dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menyatakan bahwa nelayan China tidak melanggar wilayah Indonesia. Jadi lokasi dimana kapal Tiongkok itu beroperasi, dan kemudian ditangkap oleh Angkatan Laut RI, diklaim sebagai wilayah Tiongkok! Bila hal ini dibiarkan maka Tiongkok akan merasa mempunyai hak *de facto* terhadap wilayah Natuna.

³⁶ Seminar Nasional: Strategi Operasional TNI Angkatan Udara dalam Menghadapi Eskalasi Konflik Laut China Selatan (oleh Markas Besar Angkatan Udara Sekolah Staf dan Komando); Gedung Merdeka; 24 Oktober 2016 (Dr. Darmansyah Djumala, MA; Brigjen Much. Nakhier).

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

Masalah Laut Tiongkok Selatan, Natuna dalam hal ini, dapat menjadi persoalan sensitif karena tiga alasan³⁹. Pertama hal ini telah melemahkan upaya Indonesia selama ini yang mengupayakan negara-negara yang bersengketa untuk mematuhi *Code of Conduct*. Selain itu persoalan LTS dan Natuna dapat menggerogoti kohesifitas ASEAN. Kedua, militer Indonesia merasa bahwa persoalan Natuna dapat menjadi titik api yang sensitif dalam persoalan LTS. Dan ketiga persoalan Natuna dapat menimbulkan munculnya antipati internal terhadap mereka yang berketurunan Tiongkok, disamping potensi nasionalisme yang ditujukan pada pihak luar.

Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk mengisyaratkan kehadirannya di Natuna, terutama terhadap Tiongkok. Beberapa diantaranya adalah pengadaan *cold-storage* raksasa untuk mendinginkan ikan dan produk laut, diperuntukkan terutama untuk mendukung industry perikanan. Lainnya adalah pembangunan dermaga apung di utara Natuna, pembangunan kompleks militer untuk satu kompi marinir, pembangunan gudang amunisi, pembangunan landas pacu yang dapat digunakan untuk pendaratan Sukhoi. Pada 26 Juni 2016 Joko Widodo mengadakan rapat diatas kapal perang Imam Bonjol; selain mengunjungi Morotai dan pulau Myangas yang merupakan pulau-pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Diharapkan dengan ini maka Tiongkok akan mundur dari Natuna. Adalah tidak rasional bagi Tiongkok untuk membuat persoalan dengan Indonesia untuk memperbutkan Natuna, walaupun kawasan itu diduga kaya energi. Adalah lebih menguntungkan untuk membangun kerjasama ekonomi dengan Indonesia, bukan untuk berkonfrontasi. Jangan dilupa juga realisasi strategi OBOR, yang membutuhkan diplomasi yang intens, yang tentunya akan terganggu bila Indonesia membawa kasus ini ke forum internasional. Uni-Eropa sebagai tujuan pasar utama Tiongkok selain AS amat peka dengan hal ini.

Kesimpulan

Konsiderasi kritikal perlu difokuskan pada dua titik penting dimana PM dan OBOR bersinggungan, secara langsung atau tidak, Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan (Natuna dalam hal ini). Kedua strategi dapat disinergikan bila tersedia kondisi-kondisi tertentu pada kedua titik ini, sebagaimana akan dipaparkan berikut.

PM dan OBOR bersinggungan amat dekat di Selat-Malaka, dengan telah ditetapkannya Pelabuhan Belawan sebagai salah satu titik PM yang akan pertama dikembangkan. Dengan OBOR maka arti penting Selat Malaka makin

³⁹ Iis Gindarsah dan Adhi Priamarizki, *Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns*, RSIS (S. Rajaratnam School of International Studies, Indonesia Security Doctrine).

meningkat, karena disamping telah lama menjadi jalur utama perdagangan internasional menjadi urat nadi perekonomian dan energy Tiongkok (sebelum jalur *String of Pearls* selesai dibangun). Dengan adanya OBOR, keamanan pelayaran Selat-Malaka menjadi kepentingan Tiongkok. Mengingat keamanan pelayaran di selat ini sering diganggu oleh pembajakan dan terrorisme, maka berbagai upaya pengamanannya perlu dilakukan. Indonesia dalam hal ini perlu lebih serius lagi mengupayakan pengamanan pelayaran diwilayah ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan lebih jauh lagi upaya-upaya unilateral, bilateral, regional, maupun extra-regional. Sebagai tambahan, perlu difikirkan untuk lebih lagi menunjukkan kehadiran Indonesia diwilayah ini, misalnya dengan mengembangkan sarana angkatan laut, walaupun tidak perlu terlalu besar. Dengan pengembangan Pelabuhan Belawan dan kehadiran angkatan laut Indonesia di Selat-Malaka, maka kehadiran Indonesia sekaligus keamanan pelayaran selat dapat dirasakan dengan jelas.

PM dan OBOR tidak terlalu dekat bersinggungan di LTS, juga di Natuna. Tetapi persoalan di wilayah ini dapat menjadi titik api yang berbahaya, karena adanya klaim territorial. LTS penting bagi Tiongkok karena merupakan daerah penjangga OBOR, dan penting bagi Indonesia karena Natuna merupakan wilayah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying (dikutip AFT 23/6/2016) menggaris bawahi bahwa Tiongkok tidak pernah menyatakan kepemilikan atas Natuna, walaupun mengakui adanya tumpang tindih batas ZEE (dengan Indonesia). Untuk tetap menjaga tetap beradanya Natuna dan perairannya sebagai wilayah territorial RI, maka kehadiran Indonesia diwilayah tersebut harus benar-benar jelas. Upaya yang telah dilakukan selama ini perlu diapresiasi. Misalnya pengusiran kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok yang beroperasi diwilayah ini, pembangunan fasilitas barak untuk sekira seribu marinir di Natuna, pembangunan bandara Ranai yang dilengkapi dengan fasilitas pendaratan pesawat tempur, pengadaan rapat Presiden Joko Widodo diatas KRI Imam-Bonjol 383 yang berhasil mengusir kapal nelayan Tiongkok beberapa waktu berselang, dan juga pembangunan *giant cold-storage* untuk menunjang aktivitas perikanan diwilayah tersebut.

Walaupun penulis memandang bahwa Indonesia mempertimbangkan dengan penuh harapan langkah-langkah Tiongkok dalam mengembangkan kawasan ini, antara lain dengan pencanangan OBOR, namun kerjasama kedua negara akan amat sulit dilakukan bila persoalan Natuna tidak terselesaikan dengan memuaskan, tetap menjadi wilayah NKRI. Bila hal ini tidak terjadi, maka berbagai usulan positif Indonesia melewati ASEAN (seperti CoC dan DoC), dan posisi Indonesia sebagai *non-claimant*, yang kesemuanya ditujukan untuk

penyelesaian damai persoalan LTS, sulit untuk dapat diteruskan. Hal ini tentunya akan berdampak kontra-produktif terhadap stabilitas Asia-Tenggara.

Perlu pula diingat bahwa keberhasilan OBOR merupakan prioritas bagi Tiongkok, yang salah satu persyaratannya adalah keberhasilan pelaksanaan diplomasinya dengan sekira 65 negara yang dilewati jalur ini. Merupakan hal yang kontra-produktif bagi Tiongkok untuk memaksakan klaim teritorialnya di Natuna, suatu wilayah di tepi *Nine-Dash Line* nya, dengan akibat bahwa Indonesia akan mempersoalkannya di forum internasional.

Referensi

- Alessandro Arduina; *China’s One Belt One Road: Has the European Union Missed the Train?*; Policy Report; Mar Uch 2016; RSiS (S. Rajaratnam School of International Studies; Policy Report; March 2016.
- Anthony S. Massey; “Maritime Security Cooperation in the Strait of Malacca”; University of Washington; 2002; for Master of Arts in Security Studies.
- Christian Bueger, Cardiff University, “What is Maritime Security?”; in *Marine Policy*, 2015; p. 3-5.
- Christina Lin; *The Washington Institute for Near East Policy*; *The New Silk Road: China’s Energy Strategy in the Greater Middle East*; Policy Focus #109; April 2011.
- CSS Analyses in Security Policy; No. 195; September 2016; Editor Christian Nunlist; “One Belt, One Road: China’s Vision of Connectivity”.
- Departemen Perhubungan; dalam Muh. Dimiyati (Deputi Sumber Daya IPTEK, Kemenristek dan Dikti; Jakarta, 10 Desember 2014; “Pemikiran Kecil Tentang Kontribusi Strategis IPTEK untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia”.
- Departemen Perhubungan; dalam Muh. Dimiyati (Deputi Sumber Daya IPTEK, Kemenristek dan Dikti; Jakarta, 10 Desember 2014; “Pemikiran Kecil Tentang Kontribusi Strategis IPTEK untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia”.
- Endah Murniningtyas (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam); disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional: “*Ekonomi Maritim: Pengelolaan Ekonomi Maritim yang Mandiri dan Berkelanjutan*”; Wakatobi, 25 Januari 2015. Baca juga *Tempo*, 13 November 2014.
- European Council on Foreign Relations (China Analysis); “One Belt, One Road: China’s great Leap Outward.

FFP (Fund for Peace): Patricia Taft and Filipe Umana; *Threat Convergence: Transnational Security Threats in the Straits of Malacca*; 2012.

Foreign and Commonwealth Office (China-Britain Business Council); *A Role for UK Companies in Developing China’s Initiative: New Opportunities in China and Beyond*; 2015/2016.

Iis Gindarsah dan Adhi Priamarizki, *Indonesia’s Maritime Doctrine and Security Concerns*, RSiS (S. Rajaratnam School of International Studies, Indonesia Security Doctrine).

Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono; *Jabatan terakhir Kasal 2009-2010, Panglima TNI 2010-2013. Dalam Sarasehan “Indonesia Poros Maritim Dunia”* topic bahasan “*Kedaulatan Maritim Indonesia*”

Marijke Breuning; *“Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction”*; Palgrave Macmillan; NY; 2007.

Michael D. Swaine and Ashley J. Tellis; *“Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present, and Future”*; Project Air Force / RAND; post 2000; lihat juga Kenneth Christie (ed.); *“United States Foreign Policy and National Identity in the 21th. Century”*; Routledge; London; 2008.

Naskah Akademik 2015 Forum Rektor Indonesia.

Seminar Nasional: *Strategi Operasional TNI Angkatan Udara dalam Menghadapi Eskalasi Konflik Laut China Selatan* (oleh: Markas Besar Angkatan Udara Sekolah Staf dan Komando); Gedung Merdeka; 24 Oktober 2016 (Dr. Darmansyah Djumala, MA; Brigjen Much. Nakhier).

Ekonomi-Politik Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Ignatius Ismanto

Universitas Pelita Harapan

Ignatius.ismanto@uph.edu

Abstrak

Sejak Perang Dingin berakhir, ASEAN telah mengambil peran yang aktif dalam pembentukan berbagai forum kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dikenal sebagai arsitek pembangunan regional karena peran aktifnya dalam pembentukan berbagai forum kerjasama regional. Pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) merupakan salah satu forum ekonomi regional yang menarik perhatian. Pertama, RCEP sebagai Regional Trade Agreement (RTA) yang dibangun pada 2012 itu dipandang sebagai suatu potensi kekuatan ekonomi yang besar, khususnya dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional dan global. Kedua, RCEP juga telah menjadi forum ekonomi regional yang telah menarik keterlibatan negara-negara besar, khususnya China seiringan dengan kebangkitannya sebagai kekuatan global. Kalangan pemimpin ASEAN menyadari pentingnya sentralitas dan kolektivitas bagi ASEAN dalam forum kerjasama ekonomi regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar itu. Gagasan kolektivitas telah menginspirasi kalangan pemimpin ASEAN dalam upaya memperdalam proses integrasi ekonomi mereka. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik, kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji kepentingan ASEAN dalam pembentukan RCEP di tengah perubahan ekonomi-politik regional sejak Perang Dingin berakhir. Kepentingan ASEAN dalam pembentukan RCEP yang melibatkan kepentingan negara besar merupakan respon ASEAN dalam menghadapi lingkungan eksternal yang telah berubah. Upaya itu menjadi strategi ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan. Namun, upaya ASEAN dalam menanggapi lingkungan eksternal yang berubah itu akan sangat ditentukan oleh faktor internal yaitu kemampuannya dalam mendorong integrasi ekonomi di antara mereka.

Kata Kunci:

RCEP, TPP dan Sentralitas ASEAN)

Pengantar

Pembentukan forum kerjasama ekonomi kawasan melalui Perjanjian Perdagangan Regional atau *Regional Trade Agreement* (RTA) merupakan fenomena yang meluas, yang menyertai perubahan ekonomi global dewasa ini. Uni Eropa merupakan manifestasi pembentukan RTA yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Eropa. Demikian pula, NAFTA serta MERCOSUR merupakan bentuk RTA yang menarik keterlibatan sejumlah negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Amerika Latin. APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) merupakan forum kerjasama ekonomi yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara baik secara individual maupun secara kolektif yang tergabung dalam ASEAN ikut terlibat dalam keanggotaan berbagai forum RTA. Bahkan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN secara kolektif telah berperan aktif dalam pembentukan sejumlah forum RTA yang melibatkan negara-negara besar di Asia. Kalangan pemimpin ASEAN selalu menekankan pada pentingnya sentralitas ASEAN dalam menghadapi kepentingan negara-negara besar. Salah satu RTA yang dibentuk ASEAN yang melibatkan negara-negara besar itu adalah pembentukan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*). RCEP merupakan forum regional yang menarik keterlibatan negara-negara: Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru serta China sebagai kekuatan ekonomi global. Peran aktif ASEAN dalam pembentukan forum-forum kerjasama ekonomi regional tidak-lah berlangsung dalam ruang yang hampa politik. Perubahan ekonomi-politik global dan regional di kawasan Asia merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan bagi ASEAN dalam pembentukan forum-forum regional. Setidaknya ada dua isu yang menarik, yang penting untuk dikaji dari perubahan ekonomi-politik global itu, yaitu: (i) kebangkitan China sebagai kekuatan global yang oleh ASEAN sering dipandang sebagai peluang, tetapi sekaligus sebagai ancaman, serta (ii) meningkatnya persaingan antara China dan Amerika Serikat di kawasan Asia. Dimensi politik, karena itu, merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan bagi ASEAN dalam pembentukan forum regional RCEP. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji: (i) kepentingan ASEAN dalam pembentukan RCEP, serta (ii) tantangan ASEAN dalam pembentukan forum regional itu.

RTA dan Perubahan Ekonomi Global

Salah satu fenomena yang menyertai perubahan ekonomi global akhir-akhir ini adalah pembentukan forum kerjasama ekonomi regional. Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) telah menjadi sarana yang umumnya digunakan dalam pembentukan forum kerjasama ekonomi regional itu. Kerjasama ekonomi

regional dapat terjadi antar negara dalam kawasan (regional) yang sama, atau yang sering disebut “inter-regionalism”. Kedekatan geografis umumnya telah menjadi salah satu pertimbangan pembentukan forum kerjasama ekonomi regional itu. Namun, kerjasama ekonomi itu juga dapat terjadi antar negara dalam kawasan yang berbeda, yang disebut “trans-regionalism”. Sebanyak 581 rancangan pembentukan RTA yang diajukan pada organisasi perdagangan internasional WTO. Dari jumlah itu, sebanyak 377 telah disetujui oleh WTO. Pembentukan RTA diharapkan tidak melemahkan sistem perdagangan multilateral yang selama ini dikelola oleh WTO. Bagaimana menjelaskan fenomena meningkatnya pembentukan regionalisme ekonomi, khususnya yang berkembang sejak Perang Dingin berakhir? Apa sesungguhnya yang mendorong sejumlah negara membentuk forum-forum kerjasama ekonomi regional. Apakah regionalisme ekonomi itu akan memperkuat atau memperlemah sistem perdagangan multilateral? Pandangan yang optimis melihat bahwa pembentukan forum kerjasama ekonomi regional itu dapat menjadi sarana yang konstruktif dalam menyikapi perubahan ekonomi global. Pembentukan forum kerjasama ekonomi regional, karenanya, dipandang sebagai strategi yang ditempuh dalam menyikapi perubahan ekonomi global. Pandangan yang optimis ini melihat bahwa pembentukan forum kerjasama ekonomi regional dipandang sebagai batu loncatan (*stepping stone*) dalam mendorong globalisasi ekonomi. Sebaliknya, pandangan yang pesimis melihat bahwa pembentukan forum kerjasama ekonomi regional akan memperlemah sistem perdagangan multilateral. Pembentukan forum kerjasama ekonomi regional merupakan upaya proteksi yang ditempuh oleh sejumlah negara dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak menentu dan akan merugikan mereka. Pandangan pesimis ini, karenanya, melihat pembentukan forum kerjasama ekonomi regional itu sebagai kendala, *stumbling block* dalam menghapai perubahan ekonomi global dewasa ini.

Pembentukan forum kerjasama ekonomi regional yang dirintis melalui RTA dimaksudkan untuk mendorong atau memperdalam proses integrasi ekonomi antar negara-negara yang membangun kesepakatan dalam kerjasama ekonomi itu. Apakah yang dimaksud dengan proses integrasi ekonomi itu? Proses integrasi ekonomi yang dimaksudkan disini merupakan keterbukaan ekonomi yang lebih memungkinkan peningkatan arus barang dan jasa, investasi, atau bahkan mobilitas tenaga kerja antar negara. Cohn (2008, hal. 141) menjelaskan 5 (lima) tahapan menuju integrasi ekonomi regional, yaitu: (i) Free Trade Area, (ii) Custom Union, (iii) Common Market, (iv) Economic Union dan (v) Political Union.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pembentukan FTA (Free Trade Area) merupakan tahapan awal dari proses integrasi ekonomi kawasan, tahapan integrasi ekonomi yang paling dangkal. Pada Tahapan awal ini negara-negara yang menjadi anggota FTA sepakat untuk menurunkan tarif terhadap sejumlah komoditi yang disepakati. Namun, penting untuk dicatat bahwa penurunan tarif ini hanya berlaku bagi negara anggota yang membangun kesepakatan, negara anggota. Bagaimana dengan negara yang bukan anggota? Sedangkan negara-negara lain yang bukan anggota FTA tidak bisa menikmati penurunan tarif itu. Dengan demikian, FTA dapat mendiskriminasikan negara lain, yaitu negara-negara yang tidak menjadi anggota forum kerjasama ekonomi itu. FTA tampak berbeda dengan prinsip non-diskriminasi yang dikembangkan dalam sistem perdagangan multilateral WTO, dimana setiap negara anggota WTO dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara anggota WTO yang lain.

Custom Union (CU) merupakan tahapan integrasi ekonomi yang lebih dalam dari Free Trade Area (FTA). CU tidak hanya mengurangi atau menghilangkan tarif bea masuk bagi masing-masing negara anggota atau yang disebut internal tariff, tetapi juga "menyamakan" penetapan tarif bea masuk bagi negara yang bukan anggota (external tariff). Tahapan integrasi ekonomi yang lebih dalam dari CU adalah Pasar Bersama (*Common Market*). Pada tahapan ini, setiap negara tidak saja membuka peluang bagi peningkatan arus perdagangan (barang & jasa), serta investasi, tetapi juga pergerakan (mobilitas) tenaga kerja. Dalam tahapan integrasi ekonomi pasar bersama, kebebasan arus factor produksi semakin terbuka. Tahapan integrasi ekonomi yang lebih dalam dari pasar bersama adalah Economic Union. Pada tahapan ini, masing-masing negara anggota mulai mengharmoniskan kebijakan nasional (seperti: pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, perburuhan/ketenaga-kerjaan dsb.), termasuk penggunaan mata uang bersama. Tahapan integrasi ekonomi yang paling dalam adalah Political Union yang dengan dibentuknya parlemen bersama.

Tabel 1: Tahapan Integrasi Ekonomi Kawasan

	FTA	CU	CM	EU	PU
Penurunan Tarif	x	X	x	X	X
Penyeragaman Kepabeaan		X	x	X	X
Kelancaran Faktor Produksi (x	X	X
Harmonisasi				X	X

Kebijakan
Ekonomi

Harmonisasi
Regulasi Politik

X

Sumber: Theodore H. Cohn, *Global Political Economy*, New York: Pearson International Inc., 2008, hal. 141

Setidaknya ada 2 (dua) persepektif yang hendak dipakai dalam memahami RTA, yaitu perspektif Liberalisme dan persepektif Realisme. Perspektif Liberalisme yang bertolak dari asumsi bahwa sistem global bersifat harmoni dan saling menguntungkan memandang RTA dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi global. Sedangkan Realisme yang melihat sistem global bersifat konflikktual memandang bahwa RTA dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengaruh atau meraih kekuasaan. RCEP merupakan bentuk RTA dan hendak dikaji dari kedua perspektif tersebut.

Kolektivitas ASEAN dan Perubahan Ekonomi-Politik Global

ASEAN merupakan forum kerjasama regional (ekonomi, budaya dan politik dan keamanan) yang berdiri pada 1967, yaitu pada masa Perang Dingin¹. Semula ASEAN hanya beranggotakan 5 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Philipina². Meskipun ASEAN merupakan forum kerjasama ekonomi, kalangan pemimpin ASEAN awalnya tidak pernah berkeinginan untuk mendorong atau memperdalam integrasi ekonomi di antara mereka. Keinginan dan kesadaran untuk mendorong integrasi ekonomi itu berkembang justru setelah Perang Dingin berakhir. Dengan demikian ide atau gagasan integrasi ekonomi kawasan bagi negara-negara ASEAN sesungguhnya merupakan prakarsa yang relative baru. Komitmen kalangan pemimpin ASEAN dalam mendorong integrasi ekonomi mereka itu diperkuat dengan pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang diperkenalkan pada 1992. Komitmen untuk memperdalam proses integrasi ekonomi ASEAN itu semakin kuat dengan pencanangan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan singkatan MEA. Apa yang sesungguhnya melatar-belakangi kalangan pemimpin ASEAN dalam mendorong proses integrasi ekonomi kawasan itu?

¹ Masa Perang Dingin ini ditandai oleh tajam persaiangan antara dua kekuatan besar, yaitu antara: (i) kekuatan kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan sekutunya, dan (ii) kekuatan Sosial-Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan sekutunya. Kawasan Asia Tenggara merupakan arena persaingan pengaruh kedua kekuatan besar itu.

² Keanggotaan ASEAN bertambah dengan masuknya Brunei Darussalam (1984). Setelah Perang Dingin berakhir, sejumlah negara lain ikut menjadi anggota ASEAN, yaitu: Vietnam (28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (23 Juli 1997) serta Kamboja (16 Desember 1998)

Keinginan kalangan pemimpin ASEAN untuk mendorong integrasi ekonomi itu sesungguhnya merupakan respon terhadap perubahan ekonomi-politik global. Perubahan ekonomi global yang semakin kompetitif dan sifatnya yang tak menentu telah mempengaruhi sikap pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu, khususnya dalam membangun pentingnya "kolektivitas ASEAN". Sikap kolektivitas ASEAN itu awalnya tampak saat ASEAN menyikapi pendirian forum kerjasama ekonomi regional yang pertama kali diperkenalkan di kawasan Asia, yaitu Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang didirikan pada 1989, yaitu setelah Perang Dingin berakhir. Bila disimak dari dokumen sejarah, sikap kalangan pemimpin ASEAN semula sangat ragu terhadap keterlibatan ASEAN dalam APEC yang melibatkan kepentingan negara-negara besar, seperti: Amerika Serikat dan Jepang. Apa yang sesungguhnya melatar-belakangi kecemasan ASEAN itu? Kalangan pemimpin ASEAN menkhawatirkan bahwa keanggotaan ASEAN dalam APEC akan melemahkan kohesivitas dan solidaritas anggota dalam organisasi regional yang relative baru berdiri itu. Gagasan terhadap pentingnya konsep kolektivitas ini menjadi semangat bagi ASEAN untuk terlibat dalam forum kerjasama regional yang melibatkan negara-negara besar. Sehubungan dengan itu, keanggotaan ASEAN dalam forum-forum regional itu bersifat kolektif, bukan individual. Kekawatiran ASEAN sangat beralasan. Mengingat forum regional dapat menjadi sarana atau instrument bagi negara-negara besar untuk memperjuangkan kepentingannya mereka. Semangat kolektivitas ASEAN dalam berbagai forum regional itu diharapkan memberikan *bargaining power* bagi ASEAN, yaitu sebagai negara yang relative lebih lemah, dalam menghadapi kepentingan negara-negara yang lebih besar.

Didukung semangat kolektivitas itu, tampaknya kalangan pemimpin ASEAN semakin terpacu untuk mengambil peran aktif dalam pembentukan berbagai forum kerjasama regional yang melibatkan negara-negara besar, baik dalam forum kerjasama ekonomi, politik dan keamanan. Kalangan pemimpin ASEAN selalu menekankan penting konsep "sentralitas ASEAN" dalam menyikapi perubahan ekonomi-politik di kawasan Asia Tenggara. Sentralitas ASEAN yang dimaksudkan disini adalah gagasan yang menekankan pentingnya peran aktif ASEAN dalam menyikapi perubahan kawasan. ASEAN berharap menjadi pendorong utama dalam pembentukan berbagai forum regional yang dapat mawadahi kepentingan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Petri dan Plummer (2014, hal. Xi) melihat bahwa sentralitas ASEAN itu merupakan semangat ASEAN dalam mempertahankan "kohesi regional, memperdalam proses integrasi ekonomi regional dan meningkatkan pengaruh internasionalnya" dalam menyikapi perubahan ekonomi-politik kawasan.

Manifestasi sentralitas ASEAN itu tercermin dari peran aktif ASEAN dalam pembentukan berbagai forum regional yang diprakarsai oleh ASEAN dengan melibatkan negara-negara besar dalam forum regional itu. Bahkan, gagasan sentralitas itu tidak saja sebatas pada peran aktif memfasilitasi berfungsinya suatu institusi atau forum, tetapi juga ikut berperan dalam mempengaruhi perilaku negara yang terlibat dalam forum itu. Sesungguhnya isu yang paling penting dari konsep sentralitas itu adalah dengan mempertanyakan apa motivasi ASEAN untuk berperan aktif dalam pendirian forum-forum regional.

ASEAN telah memainkan peran aktif ASEAN dalam pembentukan sejumlah institusi regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar. ASEAN, karenanya, dipandang sebagai arsitek pembangunan regional. ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum kerjasama regional di bidang politik dan keamanan yang dirintis oleh ASEAN pada 1994 dengan melibatkan Amerika Serikat, China, India, dan Rusia dalam forum itu. Peran aktif ASEAN dalam forum itu dimaksudkan untuk mencegah dominasi negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana dikemukakan Ho (2012, hal. 2) bahwa "the challenge for ASEAN in responding to global-political economic changes is to build on ASEAN centrality without losing its focus and become divided over great power rivalry in the region". Mencegah dominasi negara-negara besar, karenanya, menjadi *grand design* bagi agenda politik ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Kebijakan politik luar negeri yang ditempuh negara-negara ASEAN, karenanya, diarahkan untuk mencegah intervensi dan dominasi negara besar. Itulah sebabnya ASEAN selalu menekankan pentingnya prinsip menjunjung kedaulatan negara (*sovereignty*) dan menolak intervensi negara (*non-intervention*). Prinsip-prinsip itulah yang dikenal dengan ASEAN Way dan menjadi dasar bagi ASEAN dalam membangun kerjasama regional.

ASEAN telah aktif dalam pembentukan sejumlah forum kerjasama ekonomi regional yang melibatkan negara-negara besar, yaitu melalui formula ASEAN plus One: (i) ASEAN-China FTA, (ii) ASEAN-South Korea FTA (AKFTA), (iii) ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), (iv) ASEAN-Australia and New Zealand FTA (AANFTA) serta (v) ASEAN-India FTA (AIFTA). Keenam negara itu merupakan mitra ASEAN. Mereka menerima prinsip-prinsip ASEAN Way yaitu dengan kesediaan mereka menyetujui *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. Keenam negara mitra ASEAN itu akhirnya membentuk forum kerjasama ekonomi regional yang lebih luas, yang disebut RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*). Bagi ASEAN, pembentukan forum kerjasama ekonomi regional yang melibatkan negara-negara besar itu

tampaknya juga tidak mengabaikan realitas politik, yaitu persaingan negara-negara besar itu dalam meraih dan mempertahankan pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara. RCEP merupakan forum kerjasama ekonomi regional yang sarat dengan muatan politik. Apa dimensi politik dari forum kerjasama ekonomi regional itu? Bagi kalangan Realist yang menekankan pada isu *power* dan *security* melihat bahwa pembentukan forum kerjasama ekonomi regional RCEP dapat dipandang sebagai instrument ekonomi yang sangat diperlukan untuk mendukung agenda politik ASEAN, yaitu dalam mewujudkan stabilitas kawasan di Asia Tenggara.

Dimensi Politik Pembentukan RCEP

Pembentukan RCEP merupakan fenomena yang menarik karena melibatkan keanggotaan sejumlah negara-negara besar di kawasan Asia, seperti: China, Jepang, Korea Selatan, India dan Australia. ASEAN menjadi mendorong utama (*driving force*) pembentukan forum kerjasama ekonomi regional itu. RCEP, karena itu, dapat dipandang sebagai pencerminan sentralitas ASEAN dalam menanggapi perubahan ekonomi-politik kawasan. Amerika Serikat tidak terlibat dalam forum kerjasama RCEP itu. Apakah ini berarti ASEAN mendiskriminasikan Amerika Serikat? RCEP merupakan forum kerjasama ekonomi regional yang dicanangkan di tengah meningkatnya persaingan negara-negara besar di Asia. Ada sejumlah isu menarik dalam pembentukan forum RCEP ini, yaitu: (i) keterlibatan China sebagai kekuatan ekonomi dunia dalam forum itu, (ii) meningkatnya persaingan antara China dan Amerika Serikat di kawasan Asia, terlebih Amerika Serikat tidak dilibatkan dalam forum RCEP. Sejumlah kalangan menilai bahwa China akan memanfaatkan forum regional RCEP untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia. Menkaji dimensi politik dari forum kerjasama ekonomi regional RCEP, karenanya, menjadi isu yang sangat penting dalam melihat tantangan bagi ASEAN dalam menjaga stabilitas serta kemakmuran ekonomi kawasan. Sehubungan dengan itu, persaingan negara-negara besar di Asia menjadi aspek yang tak dapat diabaikan. Dari persaingan negara-negara besar itu, hubungan Amerika Serikat dan China merupakan aspek yang paling penting.

Asia Tenggara dalam catatan sejarah merupakan kawasan yang selalu menjadi ajang atau arena pertarungan kepentingan negara-negara besar. China dan India, misalnya, kekuatan besar pada masa lalu yang selalu bersaing untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Demikian pula, pada masa kolonialisme, persaingan bangsa-bangsa Eropa juga telah menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi daerah-daerah koloni mereka. Selama masa Perang Dingin, kawasan Asia Tenggara juga menjadi

arena persaingan serta perebutan pengaruh antara 2 (dua) kekuatan besar, yaitu antara Blok Barat dan Timur. Blok Barat merupakan representasi kekuatan ideologi kapitalisme yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Sedangkan Blok Timur merupakan representasi ideologi Komunisme yang didukung oleh Uni Soviet dan China. Selama masa Perang Dingin, Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk membendung meluasnya pengaruh Komunisme, termasuk di kawasan Asia. Amerika Serikat memberikan perhatian yang besar terhadap kawasan serta sejumlah negara yang dipandang strategis dalam mendukung kepentingan AS itu. Amerika Serikat juga memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan payung stabilitas keamanan di kawasan itu. Setelah Perang Dingin berakhir, peta dan struktur kekuatan politik global telah mengalami perubahan. Struktur kekuatan politik global tidak lagi dicirikan oleh bipolar, yaitu persaingan dua kekuatan, tetapi berkembang menjadi multi-polar, yaitu berkembangnya kekuatan-kekuatan baru, seperti: China dan India. Bagi kalangan Realisme, perubahan struktur kekuasaan global itu menjadi aspek yang sangat menarik dalam mengkaji perilaku negara.

Kebangkitan China sebagai kekuatan global merupakan isu yang menarik bagi ASEAN. Bagaimana ASEAN menghadapi perubahan politik global itu? Dari perspektif ASEAN, kebangkitan China dipandang sebagai peluang tetapi sekaligus juga merupakan ancaman (Egberink dan Putten, 2011). Mengapa ASEAN melihat kebangkitan China itu sebagai ancaman? Salah satu kekawatiran ASEAN terhadap China adalah bagaimana China akan menyelesaikan isu lama, yaitu sengketa Laut China Selatan yang melibatkan sejumlah negara ASEAN, yaitu: Philipina, Vietnam, Malaysia dan Brunai Darussalam. Kemajuan ekonomi China sejak 1990an telah mendorong negara itu melakukan modernisasi militernya. Peningkatan kemampuan militer (*military capability*) yang ditopang oleh kekuatan ekonomi China itu telah mendorong kekawatiran negara-negara tetangganya, terlebih mereka yang memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan China di masa lalu. ASEAN berharap agar China tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan itu. Persepsi ASEAN yang melihat kebangkitan China sebagai ancaman itu tampaknya yang mendorong kepentingan ASEAN untuk tetap mempertahankan kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia. Apakah kebangkitan China sebagai kekuatan global akan mendorong stabilitas atau memicu instabilitas kawasan? Bagaimana ASEAN menyikapi kecemasan dalam menghadapi potensi ancaman China.

Teori Balance of Power menjelaskan bagaimana perilaku negara dalam menyikapi perubahan struktur kekuasaan global. Ada 2 (dua) strategi yang

ditempuh negara dalam menyikapi ancaman, yaitu: balancing dan banwagoning. Balancing merupakan upaya yang ditempuh negara dengan melawan negara yang menjadi sumber ancaman. Strategi balancing dapat ditempuh secara internal maupun eksternal. Secara internal, negara yang terancam itu membangun kekuatan militer, meningkatkan kemampuan defensivenya. Sedangkan secara eksternal, negara membangun aliansi dengan negara lain yang sama-sama menghadapi ancaman dari negara yang berpotensi membahayakan mereka. Di samping balancing, juga dikenal strategi banwagoning yang umumnya ditempuh oleh negara-negara yang lebih lemah dalam menghadapi negara yang lebih kuat. Strategi banwagoning ini juga dapat dibedakan dalam dua pola yang berbeda. Pertama yaitu dengan menjalin kerjasama dengan negara yang menjadi sumber ancaman. Cara ini ditempuh dengan harapan agar negara yang kuat yang dapat menjadi potensi ancaman itu tidak menyerangnya. Kedua yaitu menjadi "the winning side", menjadi partner dengan negara yang kuat dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi (Schweller dalam Roy, 2005, hal. 307).

Dilihat dari teori *balance of power*, pembentukan forum kerjasama ekonomi regional RCEP yang dirancangkan oleh ASEAN dengan melibatkan China dalam forum regional itu dapat dipandang sebagai strategi bandwaging. ASEAN berharap bahwa kerjasama ekonomi regional RCEP tidak saja memberi manfaat ekonomi, tetapi juga ikut mendukung terbangunnya rasa saling percaya dalam pemulihan hubungan ASEAN-China. Dilihat dari dimensi politik, RCEP dapat dipandang sebagai instrumen ekonomi untuk memperkuat agenda politik ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan.

Tantangan bagi ASEAN

Bagaimana ASEAN mengelola persaingan dan konflik kepentingan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara telah menjadi isu dan strategi bagi ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan. Strategi itu diwujudkan melalui peran aktif ASEAN dalam pembentukan berbagai forum regional yang melibatkan keanggotaan negara-negara besar. ASEAN selalu menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan. Konsep sentralitas tercermin dari peran dan inisiatif ASEAN dalam memfasilitasi pembentukan forum kerjasama regional, termasuk dari upaya ASEAN dalam melembagakan 'aturan main'³, yaitu mewujudkan kepentingan ASEAN dalam

³ "Aturan main" yang menjadi kepentingan ASEAN dalam tulisan ini yaitu tercermin dari upaya melembagakan prinsip-prinsip ASEAN Way dalam pelembagaan institusi. Prinsip-prinsip ASEAN Way itu meliputi pentingnya untuk menghormati kedaulatan negara, non-intervention serta menekankan pada musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan

menjaga solidaritas internal anggotanya. Solidaritas internal ASEAN, karenanya, merupakan aspek yang penting dalam sentralitas ASEAN itu. Apakah yang dimaksud dengan solidaritas itu dan bagaimana solidaritas itu dibangun? Solidaritas ASEAN oleh kalangan pemimpin ASEAN seringkali diperjuangkan dengan menjaga kesatuan ASEAN sebagai "kekuatan kolektif" dari negara-negara ASEAN dalam menghadapi perubahan ekonomi-politik global yang tidak menentu. ASEAN sebagai kekuatan kolektif akan memberikan pengaruh yang lebih besar (*bargaining power*) dalam menghadapi kepentingan negara-negara besar daripada ditempuh secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara ASEAN. Solidaritas dan kolektivitas akan menjadikan ASEAN semakin kuat, khususnya dalam menghadapi kekuatan eksternal, yaitu kepentingan negara-negara yang lebih besar. Pembentukan RCEP merupakan pencerminan gagasan sentralitas ASEAN. Forum kerjasama ekonomi regional itu digagas oleh ASEAN. RCEP bukanlah inisiatif negara-negara besar, seperti: China, Jepang atau-pun India. ASEAN memainkan peran yang aktif dalam membidani pembentukan forum regional yang melibatkan kepentingan ekonomi negara-negara besar. ASEAN yang 'kuat', dengan demikian juga menjadi aspek yang penting bagi ASEAN dalam menghadapi kepentingan ekonomi negara-negara yang lebih besar, seperti: China, Jepang atau-pun Australia.

Peran aktif ASEAN dalam pembentukan berbagai RTA (*Regional Trade Agreement*) merupakan respon ASEAN secara kolektif dalam menyikapi perubahan ekonomi global. Pembentukan RCEP karena itu juga dapat dipandang sebagai strategi kolektif ASEAN dalam menanggapi perubahan ekonomi global yang tidak menentu, serta di tengah persaingan negara-negara besar di kawasan Asia. ASEAN yang kuat secara ekonomi menjadi aspek yang penting dalam forum regional RCEP. ASEAN yang kuat yang dimaksudkan adalah ASEAN yang secara ekonomi semakin dalam terintegrasi di antara negara-negara anggotanya. Namun sayang, integrasi ekonomi ASEAN hingga dewasa ini relative masih terlalu dangkal⁴. Integrasi ekonomi ASEAN yang relative masih dangkal itu akan membatasi ASEAN dalam memanfaatkan forum kerjasama ekonomi regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar. Hadi Soesatro (1995, hal 319-320) pernah menggunakan istilah "ASEAN is too big, but too small" untuk menggambarkan ekonomi ASEAN. Pengertian *too big* menggambarkan ekonomi negara-negara ASEAN yang sangat beragam dalam kemajuan ekonomi mereka. Ekonomi negara-negara

⁴ Persentase volume perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN (*intra ASEAN trade*) diperkirakan hanya sekitar 24 persen (lihat Laporan ASEAN, 2012, hal 56). Meskipun upaya untuk mendorong kelancaran arus perdagangan itu telah dimulai sejak 1992. Sebagai gambaran, perdagangan antar negara di kalangan Uni Eropa saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 70 persen.

ASEAN yang sangat beragam itu menjadi kendala bagi integrasi ekonomi ASEAN. Integrasi ekonomi yang dangkal itu tercermin masih relative rendahnya arus perdagangan antar negara-negara ASEAN. Kalangan pemimpin ASEAN pun telah menyadari penting integrasi ekonomi kawasan itu. Pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 1992 merupakan upaya ASEAN untuk mendorong integrasi ekonomi internal di kalangan negara-negara ASEAN. Demikian pula, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai ditempuh pada 2016 merupakan upaya integrasi ekonomi yang lebih dalam dibandingkan pembentukan AFTA. Upaya untuk memperdalam integrasi ekonomi ASEAN masih menjadi tantangan serius. Integrasi ekonomi internal yang lebih dalam bagi kalangan negara-negara anggota ASEAN merupakan basis bagi ASEAN dalam mengambil manfaat ekonomi yang lebih besar dalam pemebentukan RCEP (Fukunaga, 2014)

Pembentukan RCEP oleh kalangan Liberal juga sering dipandang sebagai upaya untuk mengatasi persoalan yang dikenal "*noodle bowl*", yaitu mengatasi kerumitan terhadap komoditi yang diatur oleh sejumlah regulasi karena keterlibatan negara dalam pembentukan sejumlah RTA. Forum kerjasama ekonomi regional RCEP, walaupun digagas oleh ASEAN, sangat penting artinya bagi China. RCEP dipandang sebagai instrument strategis bagi China, khususnya dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan Asia. China akan memainkan peran leadership dalam kerjasama ekonomi kawasan, yang selama ini diyakini akan menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi global. Dilihat dari dimensi politik, RCEP karenanya dapat dipandang sebagai sarana bagi China dalam menanamkan dan memperluas pengaruhnya di kawasan Asia.

Satu hal yang menarik bahwa keterlibatan China dalam forum-forum kerjasama ekonomi regional dan multilateral sejak 1990an justru semakin meningkatkan keterkaitan (integrasi) ekonomi Asia Timur dengan ekonomi China sebagai kekuatan ekonomi global. Sebaliknya, perubahan ekonomi kawasan itu semakin melemahkan saling ketergantungan ekonomi Asia Timur dengan ekonomi Amerika Serikat. Persoalan ekonomi ini sangat berpotensi memperburuk hubungan China dan Amerika Serikat. Tidaklah mengherankan bila Amerika Serikat memanfaatkan forum kerjasama ekonomi regional *Trans Pacific Cooperation* (TPP) sebagai instrumen Amerika Serikat untuk membendung meluasnya pengaruh China di kawasan Asia Pasifik. TPP sesungguhnya bukan-lah forum kerjasama ekonomi trans-regional yang baru⁵.

⁵ TPP awalnya merupakan forum kerjasama perdagangan di antara sejumlah negara: Chili, Selandia Baru, Singapura dan Brunai Darussalam.

Forum itu telah dibentuk pada 2005. Namun sejak AS menjadi anggota dalam forum itu pada 2009, TPP berkembang menjadi kekuatan regional yang besar di Asia Pasifik. AS sendiri sendiri-pun sebelumnya telah aktif dalam pembentukan forum kerjasama ekonomi trans-regional di kawasan Asia Pasifik yaitu APEC pada 1989. Bagi AS, APEC awalnya merupakan sarana untuk mempertahankan kegiatan ekonomi di kawasan Asia. Bahkan dalam perkembangannya, forum APEC –pun juga mengundang keanggotaan China dalam forum itu. Namun, AS tampaknya melihat APEC tidak meraih kemajuan yang berarti. Sifat kelembagaan APEC yang bersifat *non-legal binding* seringkali dipandang sebagai kelemahan forum itu (Das, 2014, hal. 37). Di samping itu, perbedaan yang tajam antara AS dan China dalam kebijakan terhadap perdagangan internasional⁶, mendorong AS untuk memanfaatkan TPP dalam memperjuangkan kepentingan ekonominya di kawasan Asia. AS sangat berkepentingan untuk memainkan peran kepemimpinan dalam forum TPP ini, dan tidak melibatkan China dalam keanggotaan forum itu. Akankah TPP mengakhiri peluang China dalam meraih surplus perdangan yang selama ini diraihinya dalam perdagangan antara China dan AS? Jagdish Bhagwati (Thomson, 2013) memberikan kajian yang menarik bahwa TPP dipandang sebagai “political response to China’s new aggressiveness, built therefore in a spirit of confrontation and containment, not of cooperation”.

Apakah RCEP dan TPP akan menjadi forum kerjasama regional yang saling bersaing atau saling melengkapi? Kekuatan RCEP dan TPP dapat dilihat pada Tabel 2. RCEP akan dipimpin oleh China, dan sebagai sarana yang strategis bagi China dalam memperluas pengaruhnya di kawasan Asia. Sebaliknya, TPP akan dipimpin oleh Amerika Serikat. Petri dan Plummer (2012, hal 2) menilai bahwa TPP merupakan instrument ekonomi yang digunakan untuk mendukung agenda politik Amerika Serikat, yaitu untuk mengimbangi menguatnya pengaruh China di kawasan Asia. Namun, kehadiran TPP ini sangat berpotensi melemahkan kohesi dan solidaritas ASEAN. Mengingat keanggotaan TPP lebih bersifat *individual country*. Tidak semua negara ASEAN menjadi anggota TPP. Sejumlah anggota ASEAN yang menjadi anggota TPP adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Vietnam. TPP juga sering dipandang sebagai forum kerjasama ekonomi regional yang menuntut kualitas yang tinggi, termasuk perlindungan terhadap

⁶ Dalam forum perdagangan internasional WTO, Amerika Serikat seringkali mengecam China terhadap kebijakan perdagangan internasionalnya yang dianggap bertentangan dengan regim perdagangan internasional, seperti: pemberian subsidi kepada perusahaan milik negara, pengendalian terhadap harga produk ekspor. China juga dikecam karena lemahnya negara itu dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta, kebijakan pemerintah China dalam pengendalian proyek-proyek pembangunan serta kebijakan pemerintah China dalam pengendalian mata uang Yuan.

hak intelektual. Tingginya tuntutan dan regulasi hak paten dalam TPP itu tidak hanya menjadi beban bagi empat negara ASEAN anggota TPP, tapi juga berimbas pada enam negara ASEAN lain, yaitu mempertajam perbedaan kelembagaan ekonomi di kalangan negara-negara ASEAN sendiri nantinya. Bukan tidak mustahil bahwa perbedaan kelembagaan ekonomi itu berpotensi menjadi salah satu kendala bagi ASEAN, khususnya dalam memperdalam integrasi internal ekonomi negara anggotanya. Persaingan antara Amerika Serikat, kekuatan yang selama ini berkepentingan untuk mempertahankan status hegemoninya, dan China sebagai kekuatan baru seiring dengan kebangkitan ekonominya membawa tantangan yang tidak menguntungkan bagi RCEP serta peran sentralitas ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan di Asia Tenggara.

Tabel 2 Perbandingan RCEP dan TPP

RTA	Market Size (billion)	Nominal GDP (trillion US \$)	GDP PPP (trillion US \$)	Total Merchandise Trade (trillion US \$)
RCEP	3,1 (45,4%)	20,5 (28,6%)	26,7 (32,1)	10,1 (27,9%)
TPP	0,79 (11,2%)	28,1 (39,2 %)	26,9 (32,4%)	9,5 (20,3%)

Sumber: Djatmiko Bris Witjaksono, RCEP: Lesson Learned from ASEAN plus One, Diskusi Terbatas, 9 Juni 2014

Referensi

- Cohn, Theodore H., *Global Political Economy*, New York: Pearson International Inc, 2008
- Das, Sanchita Basu, *Trends in Southeast Asia: Political Economy of RCEP and TPP: An ASEAN Perspective*, Singapura: ISEAS, 2014.
- Egberink, Fenna dan Frans-Paul van der Putten, ASEAN, China's Rise and Geopolitical Stability in Asia, Clingendael Paper No. 2 diunggah dari <https://www.clingendael>, 14 November 2016.
- Ho, Benyamin, "ASEAN's Centrality in A Rising China", *Working Paper*, No. 249, Rajaratnam School of International Relation (RSIR), Singapura: 13 September 2012.
- Petri, Peter A dan Michael G. Plummer, "the Trans Pacific Partnership and Asia Pacific Integration: Policy Implication", *Policy Brief*, 12 (6), 2012.
- Roy, Denny, "Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagoning?", *Contemporary Southeast Asia* (27), 2, 2005

Soesastro, Hadi, “The Asia-Pacific Region on the Threshold of the 21 st Century: Trends and Goals”, *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXIII (4), 1995

Thomson, Mark, “Trade Partnership Competition: TPP Vs RCEP” April 2013, diunggah dari <http://aspistrategis.org.au>

Strategi Peningkatan Ekonomi Negara Maritim Indonesia dalam Prespektif Global

Lilik Salamah
Universitas Airlangga

Abstrak

Dengan disahkannya Konvensi Hukum Laut 1982, secara yuridis perjuangan panjang Indonesia atas konsep Negara Kepulauan telah berhasil. Berdasar konsep tersebut wilayah dan kekayaan laut Indonesia makin melimpah. Berbagai kebijakan telah dilakukan namun sayang keberhasilan secara formal ini belum diimbangi dengan keberhasilan secara substansial. Kemajuan teknologi dan globalisasi sejatinya makin mempermudah peningkatan pendapatan nasional terutama masyarakat pantai yang kesehariaanya bergantung dan mengembangkan ekonomi kelautan, namun realitanya tidak demikian. Menyadari akan hal ini, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program restorasi menuju Negara Maritim, mengembalikan samudra laut sebagai kejayaan negara masa depan. Tulisan ini menganalisis kenapa pemerintah sebelumnya kurang berhasil, dan langkah apa yang harus dilakukan agar cita mewujudkan industri ekonomi maritime tercapai. Globalisasi merupakan tantangan yang tak terelakkan, negara berperan besar dalam menggerakkan bagian -bagiannya. Strategi Hub- Spoke secara integrative kiranya akan bisa menghadapi tantangan tersebut.

Kata kunci

Negara maritime, globalisasi, Strategi Hub – Spoke.

Latar Belakang

Kejayaan nusantara --Indonesia-- sebagai negara maritime sudah sejak lama diakui internasional. Tersurat dalam sejarah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya menembus beberapa wilayah Asia Tenggara , dan keberadaanya sangat disegani oleh negara lain. Namun sayang kejatuhan Sriwijaya menjadikan wilayah nusantara terpecah bahkan kemudian tak berdaya, begitu juga kejatuhan kerajaan Majapahit dan kerajaan Demak yang kemudian menjadi jatuh dibawah kungkungan kolonialisme Eropa(Hall, 1986:213).

Posisi geografis Indonesia terletak di tengah perlintasan dunia antara dua Samudra, dan *center of gravity* di sekitar garis khatulistiwa memang mempunyai nilai sangat tinggi. Wilayah Nusantara Indonesia ini memiliki iklim tropis yang sangat mendukung sumber kekayaan nabati maupun kekayaan hayati dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan nabati berupa hasil hutan, peladangan dan pertanian terutama rempah-rempah menjadi kebutuhan negara-negara Eropa. Demi kelangsungan industrinya yang berkembang sejak abad ketigabelas, mereka harus melanglang buana mencari daerah jajahan di luar Eropa, tak terkecuali wilayah kepulauan Indonesia.

Para kolonialis Eropa -- Spanyol, Portugis, dan terutama Belanda yang menduduki lebih dari tiga abad— dapat menjajah wilayah nusantara dengan strategi menguasai daerah-daerah pinggir lebih dulu kemudian memantapkan pendudukannya pada daerah-daerah strategis. Misalnya, Portugis dibawah pimpinan Alfonso d’Albuquerque tahun 1511 bisa menguasai Malaka, kemudian tahun 1513 bisa menguasai Ternate dan Tidore Begitu juga Belanda dibawah pimpinan Cornelis de Houtman tahun 1596 mendarat di Banten, yang kemudian diperkuat dengan ekspidisi kedua dibawah pimpinan Jacob Van Neck dengan mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Strategi penguasaan daerah pinggir -- wilayah pantai – sebagai langkah awal penguasaan merupakan strategi yang lazim dipakai oleh para kolonial, misal juga dilakukan oleh Inggris, Spanyol, maupun Perancis ketika menguasai negara-negara di Asia Tenggara (Tarling, 1999).

Sejak awal merdeka, pemerintah Indonesia menyadari akan pentingnya peran dan posisi wilayah laut bagi keamanan dan kesejahteraan negara. Berkaitan dengan ini dicetuskanlah Deklarasi Juanda 1957, suatu deklarasi tuntutan kedaulatan wilayah laut Indonesia berdasar azas negara kepulauan yang saat itu dianggap sebagai gaung perlawanan atas rezim hukum laut karena masalah kedaulatan negara atas wilayah laut masih jadi polemik.

Pada tahun 1958 dicapai Konvensi Hukum Laut tentang hak kedaulatan laut, yaitu wilayah territorial dan contiguous zone, continental shelf, laut bebas, dan konservasi. Sementara itu konsep negara kepulauan tidak diatur dan tidak diakui. Pada saat permasalahan ini belum selesai secara internasional, pemerintah Indonesia meneguhkan sikapnya atas deklarasi tersebut dengan Ketetapan MPR No. IV/ 1973 tentang Wawasan Nusantara, suatu konsep yang mendasarkan pada *archipelago state* yang kemudian diimplementasikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Ada beberapa fondasi pemikiran yang mendasari kepentingan konsep negara kepulauan Indonesia. a). Secara sejarah dan geopolitik, wilayah Indonesia merupakan hamparan pulau yang tidak terpisahkan. b). Secara

psychology nenek moyang kita adalah para pelaut tangguh dimana mereka punya filosofi semangat bekerja tanpa mengenal lelah.c). Geoekonomi wilayah kepulauan Indonesia kaya akan sumberdaya alam yang potensial baik nabati maupun hayati. d). Arti strategis untuk keamanan teritori dan kelangsungan ekonomi. Kelima, secara politis untuk meneguhkan prinsip negara kesatuan . Semua pemikiran ini ditujukan untuk terwujudnya keamanan dan kesejahteraan sebagaimana tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Kekukuhan Indonesia dalam menegakkan konsep Wawasan Nusantara didasarkan pada dua pemikiran bahwa wilayah nusantara terdiri sekitar 17.448 buah pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah sekitar 3,1 juta km², memiliki panjang pantai kira-kira 81.000 km ini merupakan "wilayah terbuka" yang didalamnya terdapat tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dengan beberapa buah chokepoints jalur pelayaran perdagangan internasional. Kondisi ini tentu sangat rawan bagi keutuhan dan keamanan nasional sebagaimana telah terbukti dalam catatan sejarah diatas . Disamping itu panjang pantai sekitar 81.000 km (kedua terpanjang di dunia setelah Canada) merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem yang secara biologis sangat kaya kearagaman hayati. Sementara itu laut yang demikian luas dengan ragam pulau yang mayoritas kecil memberikan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi misal ikan, terumbu karang , serta berbagai sumber energi alam berupa mangan, minyak dan gas bumi serta berbagai mineral langka bernilai ekonomis sangat tinggi.

Perjuangan panjang pemerintah Indonesia -- juga negara kepulauan lainnya -- akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkannya UNCLOS (*United Nations Conference on The Law of the Sea*) 1982 mengakui rezim negara kepulauan. Bagi Indonesia, ada Tiga hal yang sangat menguntungkan atas berlakunya konvensi ini (Muchtar Kusumaatmadja, 1983). Pertama, penambahan wilayah. Menurut Mochtar kusumaatmadja, Luas wilayah Indonesia secara kasar semula hanya 2.027.087 km² (darat), dengan ratifikasi tersebut kini menjadi kurang lebih 5.193.250 km² (darat dan laut) jadi ada penambahan wilayah laut sekitar 3.166.163 km². Kedua, konsep Negara kepulauan menjadikan ribuan pulau yang ada di Indonesia sebagai satu kesatuan dimana hubungan antar pulau merupakan satu bagian yang disebut *internal water* dimana selat dan wlayah laut diantara pulaua-pulau yang semula sebagai perairan internasional sekarang menjadi perairan nasional Indonesia dan pelabuhan serta pelayaran antar pulau menjadi hak kedaulatan sepenuhnya pemerintah Indonesia, dengan demikian pemerintah Indonesia punya hak kedaulatan makin integrative. Ketiga , penambahan wilayah berarti

kekayaan laut juga bertambah, terlebih bila wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana yang juga telah diatur dan diakui hukum internasional bisa diaktualkan dengan kemampuan teknologi canggih.

Kebijakan Pemerintah

Dalam rangka mengembangkan ekonomi nasional yang berkaitan dengan kelautan, pemerintah saat itu telah melakukan serangkaian kebijakan yaitu : legalisasi wilayah laut, Pemantapan pertahanan keamanan, Pengembangan perkapalan dan pelayaran , serta pengembangan industry ekonomi dan industri penopang kelautan. Untuk legalisasi wilayah, pemerintah menetapkan UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati. Dua tahun kemudian, pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS II sebagaimana tertuang dalam Undang-undang no. 17/1985. Dengan ratifikasi itu berarti telah menempatkan Indonesia sebagai *international legal person* yakni hak dan kewajiban negara atas hukum laut telah sah dan diakui secara internasional.

Masalah pertahanan keamanan tidak hanya dari ancaman eksternal terutama pada wilayah-wilayah perbatasan melainkan juga keamanan jaminan kelangsungan ekonomi dan kenyamanan nelayan dalam mengembangkan usaha mereka. Keamanan wilayah dan kekayaan laut merupakan keamanan strategis yang harus dilakukan secara komprehensif, untuk itu sejak tahun 1972 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang terdiri dari TNI AL, Polri, Kejaksaan dan Kementrian terkait sebagai kesatuan bersama dalam keamanan integritas kepulauan.

Sebagai negara kepulauan yang punya jalur strategis bagi pelayaran internasional, maka pemerintah melakukan kebijakan Pengembangan Perkapalan dan Pelayaran. Pemerintah menyadari bahwa banyak kapal asing yang melakukan pelayaran nasional Indonesia artinya secara kalkulasi rasional pajak yang diserap negara dari pelayaran tersebut tentu sangat besar . Suatu hal yang bisa dikembangkan antara lain adalah potensi pendapatan nasional dari pajak armada pelayaran, dan bongkar muat. Berkaitan dengan ini pemerintah melakukan penerapan *azas cabotage* (azas monopoli atas hak angkut perdagangan oleh kapal berbendera Indonesia) sebagaimana telah diatur dalam Inpres No5 Tahun 2005. Mantan Menteri Perhubungan (1973-1978), Emil Salim menyebut bahwa azas cabotage tidak hanya menguntungkan ekonomi negara tetapi juga sangat menguntungkan secara sosial politik (Kompas 4/10/ 2012). Dengan azas ini membuka lapangan kerja, mulai dari jalur utama, jalur penunjang, dan

jalur perintis, disamping itu juga memberi peluang usaha karena dengan maraknya pelayaran nasional bisa menumbuhkan sentra-sentra perdagangan dikawasan tersebut, dan yang tak kalah pentingnya adalah tumbuhnya interaksi sosial makin intens antar wilayah oleh para nelayan dan pelaut Indonesia sehingga kontrol keamanan wilayah bisa lebih terkendali dibanding oleh kapal asing yang rawan penyelundupan dan tindak kriminal.

Berkaitan dengan kebijakan ini, menurut Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafii Djamal dalam laporannya memaparkan, bahwa dalam kurun dua tahun sejak diterbitkan Inpres No.5 tahun 2005, jumlah kapal telah bertambah sebanyak 1.196 unit (19,79%). Jumlah itu setara dengan kapasitas 1,1632 juta gros ton (GT) atau 24,89% dari kapasitas angkut. Begitu juyga kapasitas armada kapal nasional telah meningkat dari 6.041 unit (5,666 juta GT) pada Maret 2005 menjadi 7.237 unit (7,298 juta GT) pada Agustus 2007 (Dephub, 8/9/2012) . Penambahan kapal tersebut sebagian besar berasal dari pengalihan bendera kapal – kapal milik perusahaan angkutan laut nasional dari sebelumnya berbendera asing. Selain itu, penambahan armada kapal tersebut berkat pembangunan kapal baru dan dari pengangkatan kapal bekas. kondisi ini menjadikan pelayaran nasional makin meningkat terbukti hingga Desember 2010 sebanyak 9.945 unit dengan kapasitas muatan mencapai 14,4 juta gross tonnage (GT). Menurutnya, angka tersebut merupakan prestasi gemilang pemerintah dalam mengoptimalkan pemberdayaan pengusaha pelayaran niaga nasional. Sebagai pembandingan, jumlah kapal niaga nasional semula hanya berjumlah 6.014 unit saja dengan kapasitas 6 juta ton, namun sejak dikeluarkan diberlakukan ketentuan *asas cabotage* dilaksanakan, jumlah armada niaga nasional meningkat 3.931 unit dengan total nilai investasi tidak kurang dari Rp 78 triliun," (Kompas 4/10/ 2012) .

Seiring dengan ini juga digalakkan pengembangan industry perkapalan dan industry galangan kapal. Pemerintah telah menggandeng Institute Tehnologi Sepuluh Nopember (ITS) dan PT PAL Indonesia (Persero) untuk program perkapalan dengan membuat berbagai kapal pesanan baik dari pemerintah maupun luar negeri. Pemerintah juga telah melakukan serangkaian kebijakan industry pendukung antara lain, Pengembangan Industri pariwisata dan industry makanan khas daerah maupun kerajinan rakyat.

Globalisasi dan Realita Indonesia

Berbicara globalisasi, tidak mungkin mengabaikan domain maritime yang telah memberi andil besar dalam perkembangannya. Ditemukaknya mesin uap dan mesin indutri telah mebnghantarkan negara-negara Eropa melakukan perjalanan global melalui laut melalang buana ke berbagai negara. (Tarling,

1999) . Disadari atau tidak, laut berkontribusi besar dalam menunjang proses globalisasi. Kemajuan teknologi dan informasi pada era 1980an menjadikan globalisasi makin meningkat begitu pula arti laut bagi kehidupan manusia justru semakin vital. Sam Tangredi (2002), seorang ahli strategi yang menyoroti relasi antara globalisasi dan kekuatan maritim, mengatakan "*the dominant facilitator of the process of globalization has always been the sea.*" Bahwa laut merupakan media transportasi dan media pelintasan ide dan barang.

Globalisasi ekonomi menjadikan meningkatnya keterkaitan ekonomi nasional melalui perdagangan, aliran keuangan, maupun investasi asing langsung (*foreign direct investment*) melalui perusahaan-perusahaan multinasional (Steger 2002,). Artinya, globalisasi disatu sisi telah menumbuhkan kekuatan ekonomi besar yang dengan keberdayaannya bisa menguasai pasar maupun proses ekonomi didalamnya, tapi disisi lain juga menimbulkan "ketidak berdayaan ekonomi" bagi kelompok pinggiran , kelompok negara marjinal . Jika globalisasi telah menyatukan masyarakat sebagai system dunia, maka negara merupakan bagian dari system tersebut , dimana negara yang "kurang berdaya" merupakan negara pinggiran, yang tentunya bisa terkalahkan oleh negara pusat yang kuat.

Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian kebijakan pengembangan ekonomi berbasis kelautan diatas, tetapi hasilnya belum maksimal . Artinya pengembangan peran dan potensi laut sebagaimana yang diidealkan dalam kerangka negara kepulauan - negara maritime yang diidealkan secara faktual masih menghadapi berbagai persoalan terutama pada era globalisasi. Misal, dalam hal kesejahteraan rakyat pelaut, meski telah dilakukan upaya pemberdayaan untuk peningkatan penghasilan nelayan tetapi realitanya belum tercapai . Menurut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Rohmin Dahuri, potensi hasil laut Indonesia itu 57,7 juta ton per tahun namun baru tergarap 9 juta ton/tahun. Penghasilan sebagai pelaut juga belum menjanjikan hal ini terlihat dari makin berkurangnya pelaut. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan (Kiara) mrncatat terjadi penurunan jumlah nelayan , tahun 2004 mencapai 4 juta orang menjadi 2,2 juta orang pada tahun 2012. Penuruan terjadi karena pekerjaan sebagai nelayan tidak prospektif. Fenomena tersebut sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau sekitar 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,juta orang (Jawa Pos, 16/2/2015).

Begitu juga dalam hal pelayaran national yang mengembangkan konsep Cabotage dengan menambah armada nasional , realitanya masih banyak

kapal atau armada asing "enggan" melakukan bongkar muat di wilayah perairan Indonesia dan masih banyak kapal angkut dan kapal offshore tidak berbendera Indonesia sehingga potensi penerimaan negara dari sektor transportasi laut masih terbilang lemah. Menurut Oentoro, hal ini bisa terjadi karena pengusaha Indonesia sulit bersaing dengan perusahaan luar negeri yang umumnya memiliki kapal lebih besar dan lebih canggih (Investor Daily, 14/1/ 2008). Sementara itu dalam hal pengamanan laut, meski pemerintah Indonesia telah menambah armada pertahanan laut namun kasus gangguan keamanan laut misal pencurian ikan oleh nelayan asing, penyelundupan, human trafficking sering terjadi, bahkan beberapa kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh kapal asing sering tidak bisa terkejar oleh petugas Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya masalah ini karena senjata dan prasarana keamanan militer termasuk kapal operasi kalah modern dibanding kapal "pengganggu" tersebut.

Restorasi Maritim

Dari realita diatas terlihat bahwa meski pemerintah telah mengembangkan ekonomi berbasis kelautan tetapi belum berhasil maksimal. Setidaknya ada dua yang menjadi penyebabnya. Pertama, warisan kolonial Belanda. Sesuai dengan pengembangan dan kebutuhan industrinya, Belanda yang menjajah lebih dari tiga abad itu lebih memfokuskan pada pengembangan pertanian dan perkebunan terutama di Jawa. Akibatnya, setelah merdeka masyarakat maupun pemerintah lebih berorientasi pada pengembangan pembangunan ekonomi darat. Sebagai negara kepulauan, laut merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, namun dalam kenyataan mayoritas bangsa Indonesia lebih berorientasi kepada kehidupan daratan. Padahal sejarah mencatat, jiwa dan budaya nenek moyang punya ikatan kuat pada laut.

Kedua, penekanan strategi pertumbuhan oleh rezim Order Baru. Bahwa untuk meningkatkan hasil pembangunan nasional lebih cepat maka pemerintah lebih menekankan pada strategi pertumbuhan yakni pembangunan lebih berfokus pada daratan karena infrastukturnya lebih siap. Bahkan pembangunan lebih banyak dikembangkan pada pulau Jawa daripada di luar jawa. Akibatnya disparitas wilayah pembangunan menjadi timpang.

Menyadari realitas diatas serta menyadari akan arti penting wilayah laut kepulauan Indonesia yang sangat potensial dalam aspek ekonomi, politis dan strategis maka Presiden Jokowi Widodo mencanangkan program Negara Maritim. Menurut Daniel M,Rosyid, negara maritime adalah negara yan mampu mengelola kepentingan maritimnya secara efektif demi kedaulatan

politik dan kemandirian ekonomi (Soesilo, 2015:84). Dalam pidato setelah pelantikannya tanggal 20 Mei 2014 di Gedung MPR, dihadapan ratusan anggota MPR serta sejumlah mantan presiden dan pejabat tinggi negara sahabat, Senin (20/10), menyatakan:

"Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi Kita telah selat dan teluk. Kini saatnya mengembalikan semuanya, sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritime" (<http://www.hukumonline.20/10/2014>)

Pidato ini merupakan penegasan Presiden Joko Widodo dari pernyataan maupun dokumen yang disampaikan pada Komisi Pemilihan Umum tentang program kabinetnya bila menang pemilihan umum. Program Nawacita (sembilan program) antara lain dalam bidang ekonomi, akan memperkuat kemandirian ekonomi dengan cara menggerakkan ekonomi rakyat yang strategis dan memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia serta mendorong *land-reform*. Sementara pada bidang politik, menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal yang berkaitan dengan kemaritiman, dicanangkan pembangunan infrastruktur jalan baru sepanjang 2000 Kilometer dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua; membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama; membangun 10 bandara baru dan merevovasi yang lama; membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya, serta akan membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan berbagai sekolah kejurua. Disamping itu juga akan dikembangkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, industry pariwisata sektor maritime (Kompas 16/06/2014). Misi dari program ini adalah penekanan pada pengembangan maritime, yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi diatas mengemban sejumlah program, di antaranya: pembangunan Angkatan Laut yang kuat, peningkatan keamanan

di laut, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi maritim, serta penguatan dan pengembangan budaya bahari.

Tekad untuk pengutamakan pembangunan laut ini juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo pada East Asia Summit IX di Naypyidaw, Myanmar, 13 November 2014. Bahwa untuk mencapai agenda pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dengan lima pilar utama. Pertama, akan membangun kembali budaya maritim Indonesia yani bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat. Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Laut harus menyatukan nasional dan harmonisasi kerjasama dan kedaulatan secara internasional. Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritime (F. Luhulima). Kelima pilar tersebut ditujukan agar Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Untuk implementasi program tersebut, pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Maritim dan menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Program yang dijalankan antara lain, penenggelaman kapal pencuri ikan, moratorium perizinan usaha penangkapan ikan (Permen – KP Nomor 56/2014), pengelolaan dan zonasi taman wisata perairan (Permen- KP Nomor 28/2014), sampai kebijakan larangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*), dan rajungan (*Portunus pelagius_ sp*) yang tertuang dalam Permen- KP Nomor 1/2015. Beliau juga mengeluarkan larangan _penggunaan alat peangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine net) yang dituangkan dalam Permen –KP Nomor 2/2015_.

Kemudian dalam rangka untuk mewujudkan "Tol Laut", pemerintah Joko

Widodo meningkatkan kapasitas pelabuhan yang dikelola Pelindo I, II, III dan IV. Menurut Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Sujanto, pemerintah berupaya menghubungkan Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong (Papua) dengan kualitas layanan dan tarif layanan yang sama. Dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara pemerintah membangun Terminal Teluk Lamong, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE), serta merevitalisasi alur pelayaran barat Surabaya (Jawa Post, 23/5/2015) Dengan pembangunan ini diharap transit maupun bongkar muat kapal nasional maupun internasional makin mudah dan ramai. Pemerintah juga menggandeng negara lain , misal kerjasama “Enhancing Regional Maritime Cooperation” dengan Korea Selatan tentang pengembangan kapal selam.

Perlu Strategi Hub – Spoke

Melihat program pemerintahan Joko Widodo mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim tampaknya sudah komprehensif, artinya telah mengena pada berbagai aspek utama bertumpu pada optimalisasi laut secara integral yakni menjadikan laut sebagai kesatuan ekonomi nasional. Masalahnya, strategi Apa yang harus dilakukan ?

Sebagaimana dikatakan diatas , ada dua hal yang menjadikan ketertinggalan wilayah laut dalam akselerasi pembangunan nasional Indonesia yaitu faktor structural kebijakan kolonialis serta pemilihan prioritas strategi pembangunan. Disamping kedua hal tersebut, rezim pemerintah sebelumnya menjalankan kebijakan kurang integrative, artinya kebijakan pemerintah pusat dan daerah maupun pemerintah dengan pihak swasta – rakyat pelaku pembangunan kurang bersinergi sehingga terkadang berjalan sendiri-sendiri. Misal, ketika ditemukan atau ditanggap illegal fishing di wilayah perairan laut Indonesia, sering tidak bisa “menyelesaikannya” secara tuntas karena koordinasi kewenangan dan tugas masing-masing Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) kordinasinya tidak jelas sehingga masing-masing kurang bertanggung jawab dan merasa sudah ada yang melakukan hal itu. Tidak ada kordinasi yang erat antara Bakorkamla dengan pemerintah propinsi yang punya wilayah pantai, yang seharusnya dilibatkan secara aktif sebagai “penjaga pinggir” atas segala kejadian di sekitar wilayahnya. Kondisi ini diperparah senjata dan prasarana keamanan militer termasuk kapal operasi kalah modern dibanding kapal “pengganggu” tersebut, padahal sebagai negara kepulauan yang mengembangkan konsep maritime seharusnya punya pertahanan laut yang tangguh.

Begitu juga dalam pengembangan pariwisata, pemerintah pusat kurang terintegrasi dengan pemerintah daerah, begitu juga antar pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah sering berjalan sendiri bahkan kurang koordinasi antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia punya nilai strategis untuk ditingkatkan sebagai wisata nasional yang integral. Artinya, masing-masing pulau dengan kekayaan alam dan budayanya bisa dikemas sebagai satu paket yang tak terpisahkan. Ini akan berhasil dengan baik bila ada koordinasi antar pemerintah, pemerintah provinsi serta berbagai dinas terkait yang harus bekerjasama dengan berbagai biro perjalanan wisata dalam dan luar negeri. Dengan demikian wisatawan asing tidak hanya kenal Bali, melainkan juga akan mengunjungi beberapa wilayah lain. Dua keuntungan yang diraih oleh pemerintah bila hal ini dilakukan yaitu keuntungan ekonomi berupa pajak dan devisa, serta makin tumbuhnya perekonomian rakyat terutama pada sentra-sentra pusat wisata, dan keuntungan sosial politik berupa kebanggaan dan integritas kesatuan nasional.

Dalam hal pengembangan ekonomi sektor maritime juga kurang terintegrasi dengan pemerintah pusat secara terpadu. Belum adanya lembaga yang berwenang penuh baik di pusat maupun di daerah yang mempunyai wewenang penentu dalam pembangunan maritim secara utuh sehingga masing – masing pelaku pembangunan dalam menyusun perencanaan sangat terikat pada sektornya sendiri tanpa adanya sistem koordinasi baku lintas sektor. Misal, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi daerah pesisir mestinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergandeng tangan berbagai instansi departemen industry, departemen pariwisata, departemen pertanian, departemen sumberdaya manusia –dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja—serta departemen pendidikan sebagai agen yang menanamkan nilai-nilai kemaritiman dan sebagainya.

Pemerintah hendaknya melakukan strategi *Hub and Spoke*, suatu strategi terpadu dibawah kendali pemerintah pusat. Sue Delve, Manager Maketing Canada Cartage menggambarkan strategi ini seperti jeruji-jeruji roda sepeda yang bergerak bersama dalam putaran dibawah kendali titik pusat (central -- as – sebagai pusat jaringan).

" ...As technology has developed, the logistics sector has found faster and more cost-effective ways of shipping freight. The hub-and-spoke model was born from industry's efforts to develop more efficient networks. To better understand the hub-and-spoke system, imagine an

intricate bicycle wheel, with the hub as the strategic center of the network, and the spokes radiating out to (www.inboundlogistics.com).

Dengan strategi ini dia sebagai manager pemasaran berhasil menguasai antar benua dimana masing-masing wilayah berjalan efisien dibawah control management pusat secara efisien. Jika sebelumnya transportasi dan distribusi industry dilakukan dengan operasi point-to-point maka diubah menjadi strategi sentral – perwilayahan sehingga berjalan bersinergi secara terkordinasi sehingga capaiannya bisa maksimal.

Mengacu pada strategi diatas, kiranya perlu penataan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pembangunan maritim yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah secara terkordinir dengan pemerintah pusat sehingga terjadi penataan, perencanaan, pengelolaan dan pengendalian secara terpadu.

Mengingat cita industry ekonomi maritime berkaitan dengan sumberdaya manusia, maka pemberdayaan dan semangat budaya politik kemaritim juga harus digalakkan Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, “ bahwa reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru ternyata baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional, belum menyentuh paradigma, mindset atau budaya politik kita “. Revolusi mental yang dicanangkan hendaknya dioperasionalkan melalui serangkaian kebijakan berbagaia instasi misal kurikulum sekolah, pemberdayaan tenaga oleh mentri social dan sebagainya. Untuk pengembangan pembangunan nasional kiranya juga perlu digalakkan berbagai penelitian dan pelatihan oleh berbagai pihak sehingga penguasaan maritime juga dibarengi dengan dukungan penguasaan tehnologi .

Pembangunan dan pengembangan dilakukan beriring antara sector darat dan sector laut. Berbagai industry yang menunjang ekonomi maritime juga digalakkan. Alangkah sejahteranya bila wilayah pantai terdapat industry perikanan, industry pengalengan ikan yang terkordinir dan bekerja secara sinergi antar pulau yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pusat untkuk dieskpor ke negara lain. Alangkah indahnya wilayah pantai yang tergarap secara struktural dan terkordinir sehingga menambah asset destinasi wisata yang membanggakan. Paket wisata Indonesia dalam “ Paket Wisata Kepulauan” disatu sisi akan mempererat dan meneguhkan nasionalisme kebangsaan, disisi lain bisa mengenalkan dan mendapatkan masukan devisa tinggi dari para pelancong mancanegara.

Simpulan

Konsep Negara kepulauan Indonesia yang sudah diakui legal internasional

merupakan perjuangan panjang. Berbagai kebijakan sudah dilakukan namun sayang hasilnya belum optimal karena kebijakannya belum bersinergi secara integrative. Globalisasi telah mempermudah hubungan antar negara maupun antar sub-negara, untuk itu ada kerjasama terpadu antara pemerintah daerah – pemerintah pusat serta antar berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat keseluruhan sebagai sinergi strategi yang terpadu sebagaimana jerudi roda sepeda . Ibarat becak, pemerintah adalah roda belakang yang mendorong dan menggerakkan roda depan -- pemerintah daerah dan rakyat—menuju suatu pulau yang harus digapai yaitu Negara Maritim Indonesia.

Referensi

- Baylis, John., Smith, Steve., et al. (2008) *The Globalization of World Politics*, New York: Oxford University Press Inc.
- Hall, D.G.E, (1986), *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya: Usaha Nasional
- Kusumaatmadja, Prof.Dr. Mochtar , (1983), *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta
- Kaplan, Robert (2010), *Monsoon: The Indian Ocean and The Future of American Power*, New York: Random House.
- Rosyid, Daniel M, (2015) “ Strategi dan Kebijakan Maritim Indonesia”, dalam Susilo.I.Basis, *Kemaritiman Indonesia : Problem dan Strategi Maritim Indonesia*, Surabaya: Intelegensia Medika dan Cakra Studies Global Strategis
- Salamah, Lilik , “ Dukungan Pemerintah Terhadap Sinergi Industri Maritim dengan Ekonomi Nasional” dalam Susilo.I.Basis, *Kemaritiman Indonesia : Problem dan Strategi Maritim Indonesia*, Surabaya: Intelegensia Medika dan Cakra Studies Global Strategis
- Tarling, Nicholas, (1999), *Souteast Asia from 1800 to 1930*, Cambridge University.
- Tangredi, Sam. (2002), *Globalization and Maritime Power*, Washington: National Defense University Press.
- Till, Geoffrey.(2009), *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*, 2nd ed., New York: Routledge.
- Steger, Manfred B.(2002)., *Globalism, The New Market Ideology*, (terj. Heru Prasetya),Yogyakarta: Lafadl Pustaka.

Media - Internet

"Azas cabotage Tetap dilaksanakan, Kecuali Untuk Kegiatan Offshore" , diakses dari <http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-laut/2838>, (28 Sep 2012).

Bakrie, Connie Rakahundi, "Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal", dalam, *Tribunnews.com*. diakses 15 Oktober 2012

Connie Rakahundi Bakrie, "Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal", diakses dari *Tribunnews.com*. (15 Oktober 2012).

Emil salim, " Cabotage untuk Merah Putih" *Kompas* 4 Oktober 2012

"Industrialisasi Perikanan Import" By Redaksi - Fri Jun 22, 5:10 am dalam <http://indomaritimeinstitute.org/?p=1807> (25 September 2012)

Investor Daily 14 Januari 2008

Jawa post, 16/02/2015

Krasnev, Stephen D. Krasnev (Ed.) *International Regimes* , Itacha and London :Cornel University Press,

"Megah, Teluk Lamong Bisa Disandari Kapal Besar", *Jawa Pos*, 23/5/2015

Otto, Ben (2014) President Jokowi Orders 'Shock Therapy' For Illegal Fishing Boats, *The Wall Street Journal*, Desember 9, tersedia di: <http://blogs.wsj.com/indonesiarealtime/2014/12/09/president-jokowi-orders-shock-therapy-for-illegal-fishing-boats/> (diakses 20 Juni 2015).

PAL selesaikan kapal kedua pesanan Kemenhan Surabaya (BisnisKepri.com) dalam <http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2011/03/pal-selesaikan-kapal-kedua-pesanan-kemenhan/> (28 September 2012)

"Penerapan Azas Cabotage Memberikan Hasil Signifikan" , diakses dari <http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-laut/2178> (28 September 2012)

Widhiarto, Hasyim (2014), Jokowi Declares War on Illegal Fishing, *The Jakarta Post*, November 18, tersedia di: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/18/jokowi-declares-war-illegal-fishing.html> (diakses 20 Juni 2015)

<http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2011/03/pal-selesaikan-kapal-kedua-pesanan-kemenhan/> (28 September 2012)

<http://politik.kompasiana.com/2014/06/16/visi-negara>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5444da964de33/kebijakan-maritim-jadi-prioritas-jokowi> Senin, 20 Oktober 2014

<http://politik.kompasiana.com/2014/06/16/visi-negara>



Implikasi Jalur Sutra Maritim Cina Terhadap Pembangunan Geoekonomi Maritim Indonesia

Rahmi Fitriyanti, S.Sos., M.Si.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

pipitfitriyanti77@gmail.com

Abstrak

Paper ini bertujuan menganalisa implikasi Jalur Sutra Maritim (JSM) Cina terhadap pembangunan Poros Maritim Dunia (PMD) RI dengan focus pada aspek geoekonomi maritim. Kerangka pemikirannya mengacu pada Perspektif Neorealis, Teori *Sea Power*, dan konsep geoekonomi. Karakter negara dalam sistem internasional identik secara fungsional berdasarkan tekanan strukturnya. Meski secara fungsional sama, tiap negara memiliki kemampuan yang berbeda. Karenanya, unit analisisnya adalah negara yang direpresentasikan oleh kebijakan maritimnya masing-masing. Teori *Sea Power* relevan dalam mengkaji pengaruh implikasi JSM yang sangat *outward looking* dan berperspektif regional terhadap pembangunan geoekonomi PMD yang *inward looking* namun berperspektif global. Kajian ini dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang difokuskan pada pengumpulan data alamiah (*naturalistic*) untuk mengetahui implikasi ekspansionis JSM. Hasil temuannya jika dikaitkan dengan struktur keamanan di Asia Timur dan Asia Tenggara, maka Indonesia akan menanggung sejumlah kerugian, yakni, munculnya ancaman terhadap landasan polugri Indonesia yang bebas aktif dengan adanya persaingan dua kekuatan maritim *great powers*, yaitu Cina dan AS di sekitar kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, Indonesia harus mengeluarkan biaya besar dalam membangun kekuatan geoekonomi maritimnya untuk mengimbangi persaingan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas struktur geopolitik Asia Timur dan Asia Tenggara.

Kata Kunci

Jalur Sutra Maritim Cina, Poros Maritim Dunia RI, neorealis, *sea power*, geoekonomi maritim

Pendahuluan

Konsep kemaritiman modern diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di hadapan parlemen India pada 22 Agustus 2007. Abe dalam pidatonya mengenai “*Confluence of the Two Seas*”¹ memperkenalkan istilah “Indo-Pasifik” sebagai wilayah laut yang terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Bagian Barat dan Tengah serta perairan Indonesia yang menghubungkan kedua samudera tersebut.²

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, juga memberlakukan kebijakan “*Pivot to the Pacific*” atau “*Rebalancing toward Asia*”³ pada November 2011 di hadapan Parlemen Australia sebagai respon AS terhadap kebangkitan Cina di Asia Pasifik dan peran lebih besar yang akan dimainkan AS dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer, kebijakan luar negeri, serta kebijakan ekonomi AS.⁴

Sementara, kebangkitan ekonomi Cina diikuti kebijakan Presiden Cina, Xi Jinping, dengan memperkenalkan visi Jalur Sutra Maritim (JSM) Abad ke-21 (*21st Century Maritime Silk Route Economic Belt*)⁵ di hadapan parlemen Indonesia pada Oktober 2013.

Visi JSM ini telah disampaikan sebelumnya dalam *Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit* pada 13 September 2013 yang terdiri dari empat elemen: 1) Pembangunan konektivitas maritim yang lebih baik. 2) Dibangunnya kerjasama yang kuat di bidang ekonomi dan industri maritim. 3) Perlu adanya kerjasama dalam bidang keamanan maritim. 4) Memperluas kerjasama dalam budaya maritim.⁶

Kebijakan ini merupakan bagian dari *11th Year Plan (2006-2010)* dan *Report on Marine and Ocean Industries Development in China (2006)*, yakni, peningkatan *people’s awareness* akan pentingnya laut dan samudera, mengamankan hak-hak yang berkaitan dengan laut dan samudera, konservasi

¹ <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>, diunduh pada Minggu, 31 Mei 2015.

² <http://www.the-american-interest.com/2013/10/10/the-indo-pacific-whats-in-a-name>, diunduh pada Minggu, 31 Mei 2015

³ ME Manyin, et al. (N/A). *Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” toward Asia*. Washington DC: Congressional Research Service.

⁴ *Ibid.*

⁵ http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content_17008940.htm, diunduh pada Minggu, 31 Mei 2015

⁶

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1077762.shtml, Xi Jinping Delivers Speech at SCO Summit, and Raises Four-Point Proposal, 2013/09/13, diunduh pada Sabtu, 31 Januari 2015

ekosistem laut, pengembangan sumber daya laut, *integrated governance of ocean*, serta Jalur Sutra Maritim.

Dalam visinya tersebut, Cina berkomitmen membangun prasarana transportasi laut dari Cina melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika yang disponsori Cina. Visi JSM serupa dengan Marshall Plan pasca Perang Dunia II. Langkah ini ditindaklanjuti dengan menawarkan investasi "*Maritime Silk Fund*" sebesar USD40 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) di lokasi-lokasi strategis yang dilalui rute Jalur Sutra Cina.

Tujuannya adalah membangun pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) di lokasi-lokasi strategis yang dilewati rute JSM Cina agar dapat mengendalikan jalur pelayaran strategis dunia (*sea line of communication*), pasar untuk produk Cina (*market*), serta sumber daya alam untuk energi, bahan mentah, dan bahan baku ke Cina (*resources*).⁷ Ketiga akses tersebut memang merupakan rebutan *great powers*, antara lain, AS, Cina, Jepang, India, dan Eropa yang bertujuan mengungguli persaingan kekuatan militer, kekuatan finansial, serta penguasaan teknologi.⁸

Serangkaian peristiwa kemaritiman yang mendahului PMD RI menunjukkan fenomena kontestasi dalam ekonomi politik internasional di antara kekuatan-kekuatan besar (*great powers*), yaitu, AS, Cina, India, dan Jepang. Tujuannya adalah memperebutkan akses dan kendali atas tiga hal utama di sepanjang rute pelayaran antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik: jalur pelayaran, pasar, dan sumber daya alamnya.

Fenomena bangkitnya kemaritiman *great powers* ini terjadi sebelum Indonesia mencanangkan visi PMD pada Oktober 2014. Keempat kekuatan besar tersebut memiliki kekuatan nasional yang mampu bersaing di level regional dan global melalui kekuatan militer, kekuatan finansial, serta penguasaan teknologi.

Pada saat yang hampir bersamaan, berdasarkan *Data Food Agriculture Organization 2012*, Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Cina dan India. Perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat sekitar 40 cekungan minyak di wilayah

⁷ http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content_17008940.htm. Diunduh pada Minggu, 31 Mei 2015.

⁸

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgithshzzfh_665686/t1077762.shtml, Xi Jinping Delivers Speech at SCO Summit, and Raises Four-Point Proposal. 2013/09/13. Diunduh pada Sabtu, 31 Januari 2015.

perairan Indonesia. Namun, hanya sekitar 10 persen yang telah dieksplor dan dimanfaatkan.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritimnya karena pengelolaannya belum optimal. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, seperti, industry bioteknologi kelautan, perairan dalam (*deep ocean water*), wisata bahari, energy kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, industri maritime, serta pariwisata bahari sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Menyadari pentingnya perlindungan aset kekayaan bahari Indonesia terhadap berbagai ancaman eksternal dan internal, Presiden RI, Joko Widodo, menjadikan perwujudan Poros Maritim Dunia RI sebagai fokus utama dalam pemerintahannya. Sebagaimana dikemukakan dalam pidato pelantikannya, Jokowi menegaskan pentingnya mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim.

Laut Indonesia harus dilihat sebagai pemersatu; tidak hanya pemersatu kawasan sebagai bangsa, tetapi juga mengintegrasikan aktivitas pembangunan dan ekonomi antardaerah yang terwujud dalam suatu kebijakan nasional berbasis pembangunan laut. Realisasi koordinasi kebijakan nasional ini bertujuan agar Indonesia dapat memosisikan diri sebagai Poros Maritim kawasan dan dunia. Pada dasarnya, Poros Maritim ini bertujuan mengangkat kembali identitas bangsa sebagai suatu kekuatan maritim di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Karenanya, Indonesia akan memanfaatkan secara optimal potensi geografis, geostrategis, dan geoekonomi yang merupakan faktor penting bagi dinamika hubungan internasional di kedua samudera (Marsudi, KOMPAS: 19 September 2014). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim merupakan suatu gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Karenanya, penegakan kedaulatan wilayah laut RI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan

⁹ <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/22/308561/potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, diunggah oleh Indrita Hardiana, S.H./Benedita Trixie., S.I.P. *) Bidang Pertahanan dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Deputi Polhukkam Setkab, diakses pada 14 September 2015.

kuantitas SDM kelautan merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai PMD.¹⁰

Semangat kemaritiman kontemporer Indonesia ini dilandasi oleh Visi, Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014: "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian". Sementara, visinya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat."

Dengan demikian, PMD RI adalah visi pembangunan nasional untuk menjadi "pusat" kegiatan ekonomi regional dan global dengan memanfaatkan berbagai sumber dan aktivitas kelautan. Isu ini kemudian diangkat sebagai isu global dalam beberapa forum internasional, seperti, APEC, *East Asia Summit (EAS)*, maupun G-20.

Penyampaian lima pilar PMD melalui forum global pertama kali dikemukakan Presiden dalam *The 9th East Asia Summit (EAS)* di Naypyidaw, Myanmar, pada Kamis, 13 November 2014 dengan rincian sebagai berikut:¹¹ 1) **Budaya Maritim Indonesia**, yakni membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai negara bahari. 2) **Ekonomi Maritim**, yakni mengelola dan melestarikan sumber daya maritim bangsa. 3) **Konektivitas Maritim**, yakni memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, maupun pariwisata laut. 4) **Diplomasi Maritim**, yakni optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerjasama bilateral serta multilateral di bidang maritim. 5) **Keamanan Maritim**, yakni mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

Berdasarkan kontestasi geoekonomi maritim tersebut, maka Indonesia perlu memiliki strategi pembangunan geoekonomi maritim komprehensif dan sinergis yang terukur, terarah, serta terencana dengan menjadikan PMD RI sebagai landasan untuk menghadapi implikasi JSM Cina demi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Terutama dalam mengantisipasi berbagai kerugian akibat implikasi negatif JSM Cina. Dengan demikian, tujuan realisasi

¹⁰ <http://www.presidentri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>, dipublikasikan pada 13 November 2015, pk. 12.54 WIB, diunduh pada Selasa, 2 Februari 2016.

¹¹ <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/558043-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-asean-soal-poros-maritim>. Diunggah oleh Aries Setiawan dan Ni Kumara Santi Dewi pada Jum'at, 14 November 2014 pukul 01.04 WIB. Diunduh pada 14 September 2015 pk. 10.00 WIB.

pembangunan PMD agar menjadikan Indonesia sebagai kunci stabilisator geoekonomi dan geopolitik di level regional maupun global dapat tercapai.

Hal ini penting untuk menganalisa potensi dan ancaman atas implementasi JSM yang merugikan PMD, berbagai potensi dan kelemahan Indonesia, fokus kepentingan nasional, serta strategi pencapaiannya. Karenanya, perlu didefinisikan dengan jelas berbagai peluang dan ancaman regional maupun global guna menentukan respon dalam menghadapi semua itu.¹²

Sebab, peningkatan daya saing yang kompetitif di ASEAN akibat ekspansi visi regional JSM Cina dengan perspektifnya yang *outward looking* juga akan mengubah realitas geoekonomi dan geopolitik ASEAN¹³ yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsubregional yang mempengaruhi solidaritas regional secara keseluruhan. Begitu pula dengan belum adanya konsep yang jelas dan komprehensif mengenai visi PMD serta sifatnya yang masih sektoral. Masih banyaknya keterbatasan dalam hal kapasitas supra maupun infrastruktur dan kemampuan teknologi yang memadai guna mewujudkan kebijakan tersebut juga menimbulkan persoalan tersendiri.

Persoalan ini menarik dikaji mengingat adanya kesamaan tujuan ekonomi dalam kebijakan PMD dan JSM. Bedanya, PMD memiliki visi global tapi dengan perspektif *inward looking*. Sedangkan JSM memiliki visi regional dengan perspektif *outward looking*. Jika dicermati lebih lanjut, tampak jelas bahwa isi dari kelima pilar PMD Indonesia hampir sama dengan empat elemen JSM Cina. Kecuali, konsep Diplomasi Maritim yang memang tidak terdapat dalam JSM karena dianggap sudah tercakup dalam keempat elemennya.

Kedua visi antara PMD dan JSM juga memiliki sejumlah perbedaan. Keempat elemen JSM Cina ditujukan kepada negara-negara asing yang bersifat *outward looking* (internasionalis). Sebaliknya, lima pilar PMD Indonesia ditujukan untuk entitas domestik yang bersifat *inward looking* (isolasionis).

JSM juga telah memiliki keunggulan sarana dan prasarana ekonomi yang sudah mapan¹⁴, sehingga Cina telah lebih dulu siap dan berpeluang

¹² <http://www.cmu.edu/ir/cirp-research/grand-strategy.html>

¹³ Journal of Current Southeast Asian Affairs, Rini Suryati Sulong. 2012 p. 13. The Kra Canal and Southeast Asia Relations, at Journal of Southeast Asia Current Affairs, 31, 4, 109-125. Published by GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press. ISSN: 1868-4882 (online) dalam <http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/view/584&prev=search> The Kra Canal and South East Asia Relations

¹⁴ <http://beritaintrik.com/read/mengapa-presiden-jokowi-gandeng-china.html#sthash.B1tDg27f.dpbs>. Submitted by Setyo on Tue, 04/28/2015 – pk. 14:20 WIB

besar untuk bersikap ekspansif dalam mewujudkan ambisi Jalur Sutranya. Sementara pada saat yang sama, visi PMD belum memiliki kejelasan konsep mengenai rute maritim yang realisasinya paling memungkinkan sekalipun. Berbeda dengan Cina yang telah mengimplementasikan JSM-nya, baik itu melalui Jalur Mutiara (Darat) maupun Jalur Sutra Maritim (Laut) secara *outward looking* di tingkat regional dan global.

Dengan demikian, permasalahan yang akan dikaji adalah **“Bagaimana implikasi Jalur Sutra Maritim terhadap geoekonomi Poros Maritim Dunia untuk mewujudkan kepentingan *inward* dan *outward looking* Indonesia?”**

Analisisnya menggunakan pola pikir deduktif-kualitatif yang mengacu pada kerangka pemikiran Hubungan Internasional, yaitu berdasarkan Perspektif Neorealis, Teori *Sea Power*, serta konsep geoekonomi. Karenanya, kajian ini difokuskan pada implikasi atas visi ekspansif agresif JSM Cina yang sangat *outward looking* terhadap PMD RI yang bersifat defensif dan *inward looking* berdasarkan sudut pandang Neorealis.

Perspektif Neorealis dan Teori *Sea Power*

Pendekatan Neorealis ini penting untuk mengkaji implikasi geoekonomi maritim dalam studi HI sesuai konteks kekinian karena belum banyak dimanfaatkan dalam mengkaji fenomena HI terkait aspek kemaritiman. Selain itu, pendekatan ini juga lebih reflektif terhadap Teori *Sea Power* beserta konsep geoekonomi maritim.

Asumsi-asumsi dasar yang terdapat dalam Neorealis sejalan dengan konteks kekinian dalam perkembangan geoekonomi maritim, yaitu sebagaimana dikemukakan Kenneth Waltz dalam bukunya “*Theory of International Politics*” (1979): 1). Kondisi anarki hubungan negara dengan aktor lainnya menggambarkan negara dan aktor lainnya berinteraksi dalam lingkungan yang anarkis, yakni di mana tidak ada otoritas sentral untuk memaksakan hukum dan norma atau melindungi kepentingan komunitas global yang lebih luas, 2). Struktur sistem sebagai penentu utama perilaku negara sangat mempengaruhi tingkah laku aktor, 3). *Self interest* memaksa negara yang hidup dalam kondisi anarki memilih *self help* daripada bekerjasama. Artinya, setiap negara berorientasi pada kepentingan nasional. Sistem anarki yang kompetitif mendorong mereka untuk mandiri dibanding bekerja sama, 4). Negara adalah aktor rasional yang memiliki strategi untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian, serta 5). Masalah utama dalam

sistem yang anarki adalah mempertahankan hidup. Karenanya, setiap negara memandang negara lain sebagai musuh yang potensial dan mengancam keamanan nasionalnya. Ketidakpercayaan dan ketakutan ini kemudian menciptakan kondisi dilema keamanan yang mempengaruhi kebijakan negara.¹⁵

Terkait dengan pandangan tersebut, maka ekspansi kebijakan JSM Cina terbentuk karena sistem internasional yang anarki. Dalam sistem yang kompetitif, kondisi anarki ini menciptakan kebutuhan bagi Cina untuk memperkuat geopolitiknya demi bertahan hidup. Dalam sistem anarki, negara dengan kekuatan yang lebih besar memiliki pengaruh yang lebih besar.

Sejalan dengan pandangan Neorealis terhadap pengembangan *power* dalam sistem internasional yang anarki, maka *power* yang dibangun Cina melalui kekuatan geopolitik maritimnya lebih dari sekedar akumulasi sumber-sumber militer. Artinya, Cina memiliki kemampuan menggunakan *power*-nya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem, yaitu kemampuan gabungan dari negara-negara yang dilalui Jalur Sutra Maritimnya.

Dalam sistem, negara dibedakan dari kekuasaannya, bukan fungsi. Di sinilah *power* berperan memberi sebuah negara tempat atau posisi dalam sistem internasional yang membentuk perilaku negara. Posisi kebijakan JSM Cina dan PMD RI disebabkan karena kesamaan perilakunya. Kedua negara adalah unit yang sama secara fungsional karena Cina dan Indonesia memiliki pengalaman dan sejarah bahari serupa dalam menghadapi hambatan-hambatan maritim yang dihadirkan oleh sistem anarki. Keduanya sama-sama berjuang mempertahankan posisi untuk memperkuat geoekonomi maritimnya masing-masing. Namun, kebijakan Cina yang lebih ekspansif disebabkan perbedaan kapabilitas maritimnya yang lebih kuat untuk saat ini. Kondisi sistem yang anarki inilah yang memotivasi Cina bersikap ekspansif untuk menguasai maritim internasional. Menurut Waltz, negara yang mempunyai *power* besar sangat berperan dalam perubahan struktur internasional.

Sementara, Teori *Sea Power* Alfred Thayer Mahan juga relevan dalam mengkaji implikasi JSM yang sangat *outward looking* dan berperspektif regional terhadap pembangunan geoekonomi PMD yang *inward looking* namun berperspektif global. Meskipun Perspektif Neorealis dan Teori *Sea Power* tersebut bertolak belakang, namun terdapat relevansi yang saling melengkapi dalam mengkaji implikasi JSM Cina terhadap geoekonomi PMD RI. *Sea power* sebagai sumber kekuatan geoekonomi dipengaruhi oleh kekuatan internal, yakni mulai dari sumber daya hingga penguasaan iptek yang melandasi

¹⁵ Kenneth Neal Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. MA: Addison-Wesley Pub. Co.

kekuatan geoekonomi maritim Cina sehingga memberikan implikasi tertentu bagi pembangunan geoekonomi maritim Indonesia.

Sea Power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara. Jika kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan negara. Sebaliknya, jika kekuatan laut diabaikan akan berdampak merugikan atau bahkan meruntuhkan negara tersebut. Pemberdayaan *sea power* ini identik dengan kekuatan maritim yang menentukan kejayaan suatu bangsa.

Dalam teorinya, Mahan mengemukakan enam komponen kekuatan maritim dalam suatu bangsa: 1) Posisi Geografi; 2) Bentuk Fisik Wilayah; 3) Luas Wilayah; 4) Jumlah Penduduk; 5) Watak atau Karakter Rakyat; dan 6) Sikap Pemerintah. Karenanya, pengaruh faktor dominan lainnya seperti unsur geoekonomi, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM, SDA, serta perkembangan industri dan jasa maritim sebagai penggerak pembangunan kekuatan maritim turut dipertimbangkan.

Menurut Mahan, *sea power* tidak hanya berimplikasi militer. Namun, juga memiliki tujuan (geo) ekonomi serta aspek lainnya terkait tiga elemen pokok yang melekat pada "kekuatan laut", yaitu, 1) kontrol lalu lintas komersil dan perdagangan internasional; 2) kemampuan operasi tempur Angkatan Laut (AL) dan penggunaan instrumen AL dalam aspek diplomasi; serta 3) sebagai penggetar (*deterrence*) dan pengaruh politik pada masa damai. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kekuatan maritim ini adalah memiliki posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, serta yang terpenting dipengaruhi oleh karakter pemerintahannya.¹⁶

Artinya, *Sea Power* yang berimplikasi militer ini juga memiliki tujuan (geo) ekonomi sebagai sumber kekuatan geoekonomi internal, yakni mulai dari sumber daya hingga penguasaan iptek yang mempengaruhi kapabilitas ekonomi maritim. Karenanya, kemampuan negara dalam mengendalikan dan melindungi sektor kelautannya merupakan kunci keberhasilannya dalam perdagangan internasional untuk menentukan posisi geoekonominya.

Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh implikasi asimetrisnya kekuatan maritim dalam lingkungan internasional yang anarki akan mengubah pola interaksi serta peta kekuatan geoekonomi di antara negara-negara maritim, baik itu di tingkat regional maupun global. *Sea power* sebagai sumber kekuatan geoekonomi terkait dengan kekuatan internal mulai dari sumber daya hingga penguasaan iptek yang mempengaruhi kekuatan ekonomi maritim. *Sea*

¹⁶ <https://catatanmap.wordpress.com/2014/12/18/membaca-poros-maritim-dunia-dan-posisi-silang-indonesia-dari-perspektif-geopolitik/>, Kamis, 18 Desember 2014

power sebagai sumber kekuatan geoekonomi maritim terkait dengan kekuatan internal, yakni mulai dari sumber daya hingga penguasaan iptek yang mempengaruhi struktur kekuatan geoekonomi maritim Indonesia dalam menghadapi berbagai implikasi negatif JSM Cina.

Kekuatan ini terdapat pada potensi aset kekayaan bahari Indonesia berikut ini:

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sjarif Tjitjip Soetardjo, potensi kekayaan laut di Indonesia mencapai USD1.2 triliun per tahun. Sedangkan potensi laut Indonesia mencapai enam kali lipat APBN. Total potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai Rp7.200 triliun per tahun, atau enam kali lipat dari APBN 2011 senilai Rp1.299 triliun. Nilainya sama dengan satu setengah kali PDB saat ini.¹⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mencatat, potensi bisnis sektor kelautan Indonesia mencapai Rp3.000 triliun per tahun. Nilai potensi kelautan tersebut meliputi potensi di sektor perikanan USD32 miliar, sektor wilayah pesisir USD56 miliar, sektor bioteknologi USD40 miliar, sektor wisata bahari USD2 miliar, sektor minyak bumi USD21 miliar, serta di sektor transportasi laut USD20 miliar.¹⁸ Menurut anggota DPR RI, Yudi Widiana Adia, Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi nilai perdagangan USD1.5 juta per hari, atau setara dengan sekitar Rp20 miliar per hari. Berdasarkan data Badan Pangan Dunia (FAO), akumulasi nilai total perekonomian dari sektor kelautan Indonesia jika diberdayakan dengan optimal, diperkirakan mencapai USD3 triliun hingga USD5 triliun, setara dengan Rp41.100 triliun sampai Rp68.500 triliun per tahun.¹⁹ Selain keuntungan yang diperoleh dari posisi strategis maritim Indonesia dan investasi di bidang perikanan, ternyata Indonesia juga masih menyimpan potensi yang besar di bidang eksplorasi sumber daya alam bawah laut. Kekayaan minyak yang berada di bawah laut Indonesia diperkirakan mencapai 40.1 miliar barel dan gas bumi 217.7 triliun kaki kubik. Namun

¹⁷ <http://indochinatown.com/2015/01/29/poros-maritim-indonesia-Cina-2/>, diunggah pada 29 Januari 2015

¹⁸

https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Dorong_Investasi_Kemaritiman__KKP_Gelar_Indonesian_Ocean_Investment_Summit&level2=newsandopinion&level3=industries&level4=agriculture&news_id=42138&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=BANKING&popular=&search=y&q=

¹⁹ Seperti yang dilansir oleh *kompas.com* pada 21 Oktober 2014.

hingga saat ini, Indonesia baru mampu mengeksplorasi pemanfaatan atas kekayaan tersebut sekitar 15 persennya saja.²⁰

Pembangunan Geoekonomi Maritim

Seluruh karakteristik pembangunan geoekonomi maritim terdapat dalam lima pilar PMD sebagai cita-cita nasional dalam kebijakan pemerintahan Jokowi. Cita-cita tersebut merupakan tujuan pembangunan yang diimplementasikan melalui penguatan geoekonomi maritim sesuai tujuan Nawacita, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar program-program pembangunan dapat berjalan sesuai prioritas pembangunan, maka visi dan misi pembangunan geoekonomi maritim haruslah selaras dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Meski saat ini posisi geoekonomi maritim Indonesia masih belum kuat, Indonesia merupakan negara yang sangat strategis, berada di garis khatulistiwa, berdekatan dengan Singapura sebagai pintu perlintasan dunia. Luas wilayah Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena sama dengan setengah dari luas wilayah Asia Tenggara. Termasuk wilayah maritim, hutan tropis, hasil tambang dan minyak bumi, serta memiliki jumlah penduduk yang banyak.

Kajian Implikasi JSM Cina terhadap PMD RI

Letak strategis Indonesia di posisi silang dunia mengakibatkan Indonesia berada pada persilangan jalur perdagangan dan pelayaran internasional, baik itu dari wilayah Pasifik dan Asia Timur menuju kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa, maupun sebaliknya. Artinya, Indonesia menjadi wilayah tempat transitnya berbagai macam kepentingan negara-negara pengguna jalur perdagangan.

Posisi strategis ini membawa konsekuensi logis terkait pertahanan dan keamanan negara di laut, yakni munculnya ancaman yang mempengaruhi konsep dan strategi pertahanan Negara akibat konstelasi geografis Indonesia serta pengaruh globalisasi pasca Perang Dingin, maupun perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis.²¹

Dalam hal ini, kepentingan ekonomi maritim Indonesia yang sifatnya *inward looking* ternyata serupa dengan ideologi ekspansionis Cina melalui Jalur Sutra Maritimnya yang bersifat *outward looking*. Fenomena kepentingan JSM Cina yang memiliki tujuan serupa dengan PMD RI, secara tidak langsung

²⁰ Pengamat Energi, Iskandar, sebagaimana diberitakan oleh beritasatu.com

²¹ Barry Buzan & Ole Weaver. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge: Cambridge University Press. p. 8

menimbulkan implikasi yang dapat menghambat Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritimnya.

Fokus kajian ini terletak pada implikasi JSM Cina (sebagai *great power*) terhadap realisasi PMD berdasarkan *existing condition* terkait berbagai kelemahan PMD RI. Pengaruh tersebut muncul akibat kepentingan JSM yang dilandasi sejumlah faktor domestik dan eksternal Cina, yaitu untuk menaklukkan pasar internasional dalam menggeser hegemoni AS melalui visi Jalur Sutra Maritimnya.

Ekspansinya ini dilatarbelakangi ketergantungan ekonomi Cina dalam memenuhi pasokan kebutuhan sumber-sumber energi, SDA, dan bahan mentahnya untuk keberlangsungan proses industrialisasinya, pasar bagi hasil produktivitas Cina, penguasaan terhadap akses jalur perdagangan internasional demi keberlangsungan ekonomi Cina, serta *bubble economy* yang menimpa Cina.

Faktor-faktor tersebut mendorong agresivitas Cina dalam mengejar kepentingan nasionalnya melalui JSM sebagai strategi untuk membangun kekuatan geoekonomi yang bersifat *outward looking* dengan perspektif regional. Sementara, peningkatan kapabilitas geoekonomi yang terbentuk di level regional Asia juga turut memperkuat struktur geopolitik Cina pada level tersebut. Di sisi lain, tindakan ekspansif JSM Cina telah menimbulkan persepsi ancaman terhadap PMD RI karena kedua negara memiliki kesamaan kepentingan nasional di bidang geoekonomi maritim dan geopolitiknya.

Meskipun mulanya JSM hanya memiliki perspektif regional, namun melalui ekspansi yang didukung kapabilitas maritimnya, Cina tak hanya mendominasi geoekonomi maritim dan geopolitik di level regional, tapi juga pada level global. Karenanya, demi mengimbangi kebijakan ekspansif JSM, maka PMD harus membangun kekuatan maritim yang relatif sama. Tujuannya untuk membalikkan posisinya yang inferior agar seimbang dalam interaksi maritimnya dengan JSM.

Namun jika dilihat berdasarkan perspektifnya, kedua visi antara PMD RI dan JSM Cina memiliki sejumlah perbedaan. Keempat elemen JSM Cina ditujukan kepada negara-negara asing yang bersifat *outward looking* (internasionalis). Sebaliknya, lima pilar PMD ditujukan untuk entitas domestik yang bersifat *inward looking* (isolasionis).

Ruang lingkup PMD yang bersifat domestik ini terletak pada unsur-unsur berikut: (1) Budaya maritim yang hendak dibangunnya adalah budaya bangsa Indonesia, (2) ekonomi maritim yang hendak dibangun pun adalah ekonomi Indonesia, (3) konektivitas maritim yang hendak dibangun juga

terutama yang berada di Indonesia, serta (4) keamanan maritimnya juga dibatasi untuk wilayah maritim Indonesia saja.²²

Perbedaan lainnya terdapat pada keunggulan yang telah dimiliki JSM. Dengan memiliki sarana dan prasarana ekonomi yang sudah mapan, Cina telah lebih dulu siap dan berpeluang besar untuk bersikap ekspansif dalam mewujudkan ambisi Jalur Sutranya. Namun, Cina tetap membutuhkan kerjasama ekonomi yang sinergis dengan negara-negara lain yang masuk ke dalam rute pelayarannya guna memasarkan produk maupun mensuplai kebutuhan energi, bahan mentah, dan bahan baku industrinya.

Selain itu, jika ruang lingkup JSM ditujukan untuk level regional sebagai penghubung Asia dengan Timur Tengah, Afrika Timur, dan Eropa, maka PMD justru berambisi untuk menjadi pusat penyeimbang aktivitas maritim dunia. Sayangnya, dalam kebijakan PMD ini pemerintah belum memberikan konsep yang jelas mengenai rute maritim yang realisasinya paling memungkinkan sekalipun.

Dengan menjadikan PMD sebagai landasan pembangunan Indonesia ke depan, maka Indonesia harus menunjukkan sikap progresif dan visioner dengan mengedepankan model pembangunan geoekonomi yang tepat agar dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari situasi tersebut. Setidaknya, Indonesia mampu meminimalisir implikasi negatif JSM Cina sehingga tidak terjepit atau terjebak dalam tarik-menarik pengaruh maupun kepentingan ambisi dua kekuatan besar dunia, yaitu Cina maupun Amerika Serikat.

Hal ini penting untuk mengantisipasi *existing condition* yang mengindikasikan bahwa implikasi kebijakan JSM Cina dapat diasumsikan lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya bagi kepentingan pembangunan geoekonomi PMD RI. Jika dikaitkan dengan struktur keamanan di Asia Timur dan Asia Tenggara, maka Indonesia akan menanggung sejumlah kerugian.

Pertama, munculnya ancaman terhadap landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan adanya dua kekuatan *great powers*, yaitu Cina dan Amerika Serikat di sekitar kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Indonesia.

Kedua, Indonesia harus mengeluarkan biaya besar dalam membangun infrastruktur Poros Maritimnya. Rencananya, Presiden Jokowi akan mengembangkan dua pelabuhan sebagai *hub* internasional, yakni, Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, di Selat Melaka; dan Pelabuhan Bitung,

²² Untung Surapati, Yohanes Sulaiman, dan Ian Montratama, *Global Maritime Axis: An Indonesian Grand Strategy*, ISDR, Jakarta, 2014, h. 20

Sulawesi Utara. Nantinya, barang dari dan ke Asia Timur masuk melalui Bitung, sementara dari dan ke Eropa melalui Kuala Tanjung. Perkiraan sementara, dibutuhkan dana USD5 hingga USD6 miliar untuk merealisasi tol laut dengan membangun 20 pelabuhan sebagai *hub feeder*.²³

Ketiga, adanya kesamaan ambisi Indonesia dan Cina untuk menjadi pusat maritim di tingkat kawasan, di mana hubungan di antara keduanya turut mempengaruhi stabilitas struktur geopolitik Asia Timur dan Asia Tenggara.

Terakhir, berdasarkan serangkaian kajian yang dilakukan tim riset *Global Future Institute*, keputusan untuk mengikutsertakan Bitung, Sulawesi Utara, sebagai hub internasional Bitung sebagai pintu ke Asia Timur bukanlah opsi yang cukup menguntungkan bagi Indonesia karena 1). Bitung berpotensi menjadi sasaran geopolitik Cina dalam menguasai Bitung sebagai wilayah yang mempunyai akses pelabuhan dan bandara yang cukup strategis, 2). Perkembangannya akan terhambat oleh menajamnya konflik antara AS dan Cina di kawasan Asia Tenggara yang memperburuk hubungan antara Filipina (sebagai sekutu tradisional AS) dan Cina terkait klaim wilayah Laut Cina Selatan.

Dengan demikian, kerjasama maritim Indonesia dan Cina pada kenyataannya lebih banyak menguntungkan Cina daripada Indonesia. Karenanya, meski pemerintahan Jokowi serius untuk membangun keseimbangan baru dalam menghadapi dominasi pengaruh Amerika dan sekutu-sekutu baratnya di Asia Tenggara, sudah saatnya Indonesia mencari format baru kerjasama strategis bidang maritim dengan negara lain.²⁴

Oleh karena itu, mengacu pada kondisi geografis Indonesia yang bercirikan maritim, maka pemerintahan Jokowi memerlukan model pembangunan maritim yang sejalan dengan doktrin pertahanan defensif-aktif. Terutama mengingat fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasinya diwujudkan melalui kekuatan maritim untuk menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman.

Sea power ini diproyeksikan oleh kekuatan dan lingkungan maritim yang kondusif untuk mencegah pihak lain memasuki dan menguasai teritorial laut suatu negara. Karena kepentingan ekonomi, politik, dan militer yang akan menjadi taruhannya, maka keunggulan teknologi, pengetahuan, dan

²³ http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16983&type=99#.Vbo1AfkpTfY, diunggah pada 23 Januari 2015 oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute, diunduh pada 31 Mei 2015.

²⁴ *Ibid.*

pemahaman di bidang kelautan sangat penting dalam memberikan arah bagi strategi kemaritiman Indonesia.

Fokus utama PMD dengan mewujudkan *sea power* adalah untuk memberdayakan sumber daya maritim bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkuat *power* Angkatan Laut.²⁵ Sistem internasional turut memberikan insentif kepada negara untuk melakukan ekspansi hanya dalam kondisi tertentu.

Di bawah system anarki, banyak cara yang digunakan negara untuk meningkatkan keamanannya dengan mengurangi keamanan negara lainnya. Dilema keamanan menyebabkan negara khawatir tentang satu sama lain, kelangsungan masa depannya, serta kekuasaan relatifnya. Karenanya, dapat dipahami bahwa ideologi ekspansionis ekonomi Cina melalui kebijakan Jalur Sutraya mendorong peningkatan *over-expansion* dan *power* relatifnya. Persepsi ini terwujud dalam berbagai cara yang seringkali intimidatif terhadap negara lain dengan memobilisasi sumber dayanya di luar negeri.

Para pemimpin negara (terutama negara-negara kecil) tidak memiliki banyak pilihan dalam membuat keputusan bagi kebijakan luar negerinya karena akan selalu ditekan dan dipaksa oleh sistem internasional yang didominasi *great powers*.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka interaksi yang terjadi berupa interaksi maritim yang asimetris sifatnya, yaitu, interaksi antara negara superior maritim dan negara inferior maritim yang berkembang dalam struktur politik internasional. Interaksi maritim dalam sistem internasional tersebut disusun berdasarkan pendekatan kekuatan ekonomi politik yang tersentralisasi pada kekuatan geoekonomi *great power*. Sifatnya yang asimetris berimplikasi terhadap arah kebijakan maritim suatu negara.

Bagi negara kepulauan yang kaya dengan aset maritimnya namun memiliki *power* dan posisi geoekonomi maritim yang lemah, posisi inferior ini memunculkan kebutuhan terhadap model kebijakan maritim yang terkendali. Kebijakan ini lahir dari tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah guna mengubah posisi asimetris tersebut dengan keluar dari lingkungan maritim yang didominasi *great powers*.

Persepsi terhadap ancaman asing dan konsep kepulauan juga turut menjadi pertimbangan determinan kebijakan luar negeri yang berorientasi maritim. Bagi negara yang inferior secara maritim dan posisi interaksinya berada di bawah dominasi *great powers* harus mengkalkulasikan kebijakan

²⁵ Jakarta Globe, "Indonesia Far from Becoming 'Maritime Axis', Academic Says," Jakarta, 21 Agustus 2014

maritimnya secara terarah, terukur, dan terencana guna membangun geoekonomi maritim yang menguntungkan bagi penguatan posisinya di dalam struktur internasional. Terutama dengan memobilisasi sumber dayanya secara maksimal hingga bahkan mampu melakukan ekspansi maritim pada level global.

Munculnya persepsi ancaman atas ekspansi maritim *great powers* akan mendorong negara kepulauan untuk membentuk suatu model komprehensif sebagai formula untuk mengidentifikasi, memperhitungkan, dan memprediksi faktor-faktor tantangan yang ada dan akan muncul di kemudian hari.

Model tersebut digunakan untuk memotivasi negara kepulauan dalam memprediksi dan memperhitungkan berbagai peluang dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam melindungi maupun mempertahankan kedaulatan dan aset-aset maritimnya. Hal ini dilakukan dengan memberdayakan kapasitas berikut aset-aset maritimnya secara maksimal sehingga mampu melepas ketergantungan ekonominya terhadap *great powers*.

Tanpa memiliki ketergantungan ekonomi terhadap *great powers* di sektor maritim, maka negara kepulauan akan leluasa memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Mekanisme kemandirian ekonomi ini penting bagi negara yang inferior tersebut dalam meningkatkan pemberdayaan kapasitas geoekonomi maritimnya dalam posisi bertahan. Penguatan kemampuan bertahannya secara geoekonomi akan mendorongnya untuk keluar dari dominasi maritim *great powers* dan bahkan mempertahankan status quo di sektor maritim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan geoekonomi yang perlu dikembangkan adalah kemampuan bertahan secara maritim sesuai faktor geografi yang mengacu pada persepsi ancaman maritim yang berkembang dalam struktur internasional. Penguatan terhadap posisi geoekonomi maritim tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara lain, diawali oleh kerjasamanya di kawasan. Terutama dengan negara yang berbatasan langsung dan memiliki kesamaan kepentingan maritim.

Perwujudan Kepentingan *Inward* dan *Outward Looking* PMD RI

Jika PMD mampu menjadi kekuatan maritim superior di kawasan, maka PMD tak lagi hanya menjadi objek bagi kepentingan JSM Cina. Dengan membangun kekuatan kapabilitas maritimnya, maka PMD RI akan mampu mengantisipasi berbagai ancaman JSM dan memperkuat posisi sebagai subjek maritim hingga pada level global.

Realisasi PMD tentu membutuhkan seluruh komponen defensif-aktif di bidang maritim. Karena kepentingan JSM Cina telah menimbulkan persepsi yang menekan, maka ekspansinya harus direspon secara maksimal oleh Indonesia. Respon yang tepat dilandasi oleh strategi geoekonomi maritim berdasarkan perspektif PMD yang *inward looking*. Namun, prediksi terhadap masa depan kekuatan geoekonomi PMD RI yang memiliki visi global juga perlu dikaji berdasarkan perspektif *outward looking*.

Kemampuan defensif-aktif ini hanya akan berhasil jika negara inferior mampu membebaskan diri dari pengaruh kekuatan dominasi *great powers*. Oleh karena itu, negara inferior harus mampu membangun kekuatan maritimnya secara swasembada dengan memanfaatkan dan mengelola sendiri kapasitas geoekonomi maritimnya. Kemampuan ini bertujuan memperkuat struktur geoekonomi maritim melalui penguatan sektor armada niaga, armada tempur (AL dan AU), membangun pangkalan di seberang lautan, serta membangun mentalitas bangsa yang berorientasi maritim.

Implementasinya diawali dengan membentuk geostrategi komprehensif untuk memformulasikan geoekonomi maritim dan geopolitik yang berperspektif *inward looking* dengan visi domestic, sekaligus *outward looking* pada level bilateral antara Cina dan Indonesia. Tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, serta mengelola aset-aset maritim secara maksimal sesuai kapabilitasnya dan memberdayakannya bagi kepentingan sektor ekonomi domestik.

Penguatan geoekonomi maritim ini dilakukan dengan mendorong penguatan kapabilitas geo finansial dan geo teknologi maritim yang difokuskan untuk menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi domestik. Kemudian, dilanjutkan dengan meningkatkan perspektif maritimnya menjadi *outward looking* pada level regional guna membangun kekuatan geoekonomi di kawasan.

Secara bertahap, penguatan geoekonomi maritim akan mendorong Indonesia membangun kekuatan geoekonominya secara komprehensif melalui kerjasama maritim pada level bilateral dan regional untuk bersama menangkis dan mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang akan muncul melalui tekanan-tekanan maritim *great powers* (JSM Cina).

Perspektif *outward looking* tersebut kemudian ditingkatkan hingga pada level global. Dengan terbentuknya kekuatan geoekonomi maritim di tingkat regional, maka secara bertahap Indonesia akan mampu menghadapi dan mengatasi ekspansi maritim *great powers*. Bahkan, Indonesia mampu menempatkan posisinya sebagai kekuatan superior dalam interaksi maritim pada sistem internasional yang anarki.

Penutup

Kerjasama JSM Cina seharusnya berimplikasi positif terhadap PMD RI. Akan tetapi, fenomenanya justru mengindikasikan bahwa implementasi JSM berpengaruh negatif terhadap PMD. Berdasarkan kecenderungan tersebut, maka kerugian lebih besar harus ditanggung Indonesia daripada keuntungannya yang relatif lebih kecil.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi berbagai implikasi negatif ekspansi JSM Cina, memprediksi arah pembangunan goekonomi maritim Indonesia berdasarkan implementasi PMD RI, membentuk geostrategi pembangunan goekonomi PMD, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang muncul akibat implikasi tersebut terhadap pembangunan goekonomi maritim Indonesia.

Karena Indonesia belum memiliki geostrategi yang komprehensif dan sinergis untuk membangun goekonomi yang memperkuat struktur geopolitik Poros Maritimnya, maka pembentukan geostrategi tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi implikasi kebijakan JSM Cina. Tujuannya adalah memberikan gambaran secara makro, mikro, maupun secara komprehensif mengenai implikasi negatif kebijakan JSM Cina terhadap PMD RI. Kemudian menganalisis bagaimana pembentukan geostrategi pembangunan goekonomi maritim yang sinergis untuk mewujudkan kebijakan PMD dan mengontrol implikasi negatif pengaruh-pengaruh kebijakan maritim eksternal.

Referensi

Buku

- Buzan, Barry & Weaver, Ole. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kenneth Neal Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. MA: Addison-Wesley Pub. Co.
- Lamy, Steven L. 2001. "Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neoliberalism", in John Baylis and Steve Smith (eds.) *The Globalization of World Politics 2nd Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Scott Burchill and Andrew Linklater, *Theories of International Relations*, ST Martin's Press INC.,
- Sorensen, George and Robert Jackson. 1999. *Introduction to International Relations*. New York.

Untung Surapati, Yohanes Sulaiman, dan Ian Montratama, *Global Maritime Axis: An Indonesian Grand Strategy*, ISDR, Jakarta, 2014

Jurnal

Journal of Current Southeast Asian Affairs, Rini Suryati Sulong. 2012 p. 13. The Kra Canal and Southeast Asia Relations, at Journal of Southeast Asia Current Affairs, 31, 4, 109-125. Published by GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press. ISSN: 1868-4882 (online) dalam <http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/view/584&prev=search> The Kra Canal and South East Asia Relations

Suntingan

ME Manyin, et al. (N/A). *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" toward Asia*. Washington DC: Congressional Research Service.

Jakarta Globe, "Indonesia Far from Becoming 'Maritime Axis', Academic Says," Jakarta, 21 Agustus 2014

Pengamat Energi, Iskandar, sebagaimana diberitakan oleh beritasatu.com Seperti yang dilansir oleh *kompas.com* pada 21 Oktober 2014.

Rujukan Elektronik

<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>, diunduh pada Minggu, 31 Mei 2015.

<http://www.the-american-interest.com/2013/10/10/the-indo-pacific-whats-in-a-name>, diunduh pada Minggu, 31 Mei 2015

http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content_17008940.htm, diunduh pada Minggu, 31 Mei 2015

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1077762.shtml, Xi Jinping Delivers Speech at SCO Summit, and Raises Four-Point Proposal, 2013/09/13, diunduh pada Sabtu, 31 Januari 2015

<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/22/308561/potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, diunggah oleh Indrita Hardiana, S.H./Benedita Trixie., S.I.P. *) Bidang Pertahanan dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Deputi Polhukkam Setkab, diakses pada 14 September 2015.

<http://www.presidentri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>, dipublikasikan pada 13 November 2015, pk. 12.54 WIB, diunduh pada Selasa, 2 Februari 2016.

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/558043-pidato-lengkap-jokowi-di-ktl-asean-soal-poros-maritim>. Diunggah oleh Aries Setiawan dan Ni Kumara Santi Dewi pada Jum'at, 14 November 2014 pukul 01.04 WIB. Diunduh pada 14 September 2015 pk. 10.00 WIB.

<http://www.cmu.edu/ir/cirp-research/grand-strategy.html>

<http://beritaintrik.com/read/mengapa-presiden-jokowi-gandeng-china.html#sthash.B1tDg27f.dpbs>. Submitted by Setyo on Tue, 04/28/2015 – pk. 14:20 WIB

<https://catatanmap.wordpress.com/2014/12/18/membaca-poros-maritim-dunia-dan-posisi-silang-indonesia-dari-perspektif-geopolitik/>, Kamis, 18 Desember 2014

<http://indochinatown.com/2015/01/29/poros-maritim-indonesia-Cina-2/>, diunggah pada 29 Januari 2015

https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Dorong_Investasi_Kemaritiman_KP_Gelar_Indonesian_Ocean_Investment_Summit&level2=newsandopinion&level3=industries&level4=agriculture&news_id=42138&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=BANKING&popular=&search=y&q=

<http://sholehelthorsy.blogspot.com/2009/05/geopolitik-geoekonomi-dan-geostrategi.html>, diunggah oleh Diposkan oleh Nor Soleh el-Thorsy, pada Kamis, 21 Mei 2009, pk. 14.04 WIB

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16983&type=99#.Vbo1AfkpTfY, diunggah pada 23 Januari 2015 oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute, diunduh pada 31 Mei 2015.

Ekonomi Politik Pada Masyarakat Perbatasan Indonesia – Malaysia

Sri Suwartiningsih

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

sri.suwartiningsih@staff.uksw.edu

Abstrak

Masyarakat di kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, propinsi Kalimantan Barat merupakan masyarakat Dayak yang hidup berdampingan dengan masyarakat wilayah Gumbang, distric Bau, Sarawak, Malaysia. Meskipun mereka berbeda negara, namun kehidupan mereka tampak harmonis dan dapat melakukan transaksi ekonomi. Untuk itu penelitian tentang kehidupan masyarakat perbatasan penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aktifitas ekonomi yang ada pada masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia, yang kemudian dianalisis dalam perspektif ekonomi politik internasional.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dan jenis penelitian kualitatif fenomenologi. Penelitian ini melihat secara nyata fenomena yang ada. Yang menjadi unit amatan pada penelitian ini adalah masyarakat di kecamatan Jagoi Babang, kecamatan Bengkayang, propinsi Kalimantan Barat dan masyarakat Gumbang, distirc Bau, Sarawak, Malaysia.

Hasil penelitian diperoleh bahwa kehidupan masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia terlihat harmonis dan adanya aktifitas ekonomi dengan menggunakan mata uang rupiah dan ringgit. Perbedaan negara tidak menjadi penghambat dalam melakukan transaksi ekonomi diantara dua masyarakat beda negara ini. Negara memberikan kebebasan kepada masyarakat perbatasan dalam melakukan transaksi ekonomi, baik dari segi barang yang dijual belikan, harga, dan kuantitas barang yang diperdagangkan. Negara Malaysia memberikan tempat (pasar) sebagai wadah transaksi perdagangan masyarakat perbatasan yang dibuka setiap hari sabtu dan minggu.

Kata Kunci

ekonomi politik, harmonis, transaksi, dua negara.

Latar Belakang

Jagoi Babang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Indonesia. Wilayah ini terletak di perbatasan Kalbar-Sarawak (batas sebelah timur, kurang lebih 1 jam ke Kota Sarawak). Jagoi Babang berjarak 115 km dari Kabupaten Bengkayang atau sekitar 2 jam dari Kantor Pemda Bengkayang. Kecamatan ini terdiri atas 6 Desa dan 14 dusun dengan jumlah KK 1679 dan 6948 jiwa. Kebanyakan penduduk adalah pedagang, pengrajin anyaman rotan, dan berkebun. Hal yang menjadi ciri khas dari kecamatan ini adalah kerajinan Bidai dan barang-barang yang terbuat dari rotan. Selain itu, adat istiadat yang masih cukup kental, masyarakat yang hangat dan masih sangat mengenal istilah gotong royong serta bangunan rumah adat yang masih berdiri tegak.

Wilayah Gumbang, distric Bau, Sarawak merupakan wilayah di perbatasan yang membentang luas dan dikelilingi tanaman hutan lindung serta sebagian kecil kelapa sawit. Penduduk di wilayah Gumbang memiliki mata pencaharian petani dan berdagang. Secara topografi wilayah Gumbang hampir sama dengan di Jagoi Babang, tetapi yang membedakannya adalah keadaan lingkungan yang bersih.

Perbedaan kondisi fisik di wilayah Malaysia. Jalan di wilayah bagian perbatasan Malaysia memiliki jalan yang mulus dan tidak berlubang, sumber pangan yang mudah diperoleh, sarana pendidikan yang memadai, sarana kesehatan yang layak dan sarana transportasi yang mudah. Keadaan fisik yang berbeda ini ternyata tidak menghambat interaksi antara warga negara Indonesia di perbatasan dan warga negara Malaysia di perbatasan.

Harmoni sosial yang tercipta dalam komunitas masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia ini telah menjadi sebuah fakta sosial. Harmoni sosial ini menjadi sesuatu yang unik oleh karena biasanya pada komunitas masyarakat yang berbeda negara sering diwarnai oleh disharmoni sosial atau keretakan-keretakan dalam hubungan sosial antar individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Dengan keadaan sosial yang harmoni, maka masyarakat di perbatasan dapat melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama.

Salah satu aktifitas penting di daerah perbatasan adalah ekonomi. Masyarakat yang tinggal di perbatasan di Indonesia dapat melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat yang berada diperbatasan di Sarawak, Malaysia. Menarik untuk dikaji adalah transaksi ini terjadi dengan menggunakan uang rupiah dan ringgit. Untuk itu kajian tentang ekonomi politik internasional dalam kasus transaksi perdagangan antara masyarakat di perbatasan adalah penting.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana transaksi perdagangan masyarakat di kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia dan di wilayah Gumbang, Distric Bau, Sarawak, Malaysia dapat terjadi padahal mereka adalah masyarakat dari dua negara yang berbeda? Dengan demikian artikel ini akan menguraikan fenomena ekonomi politik diantara dua masyarakat yang berbeda negara, yaitu Malaysia dan Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena transaksi perdagangan di masyarakat perbatasan Indonesia –Malaysia khususnya di wilayah kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, Pontianak, Kalimantan Barat dan di wilayah Gumbang, Distric Bau, Sarawak, Malaysia dengan kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Tinjauan Pustaka: Harmonisasi Sosial

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang dalam melangsungkan kehidupannya tidak dapat sendiri. Sebagai makhluk sosial, setiap orang tidak akan pernah hidup dengan dirinya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain yang ada di sekitarnya. Seseorang akan selalu butuh dengan yang lain, tidak hanya untuk saling bantu dan tolong menolong, tapi juga untuk membangun komunitas sosial yang saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam; suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, adalah sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dielakkan oleh setiap individu. Namun disitulah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tepo seliro dan toleransi, yang akhirnya akan melahirkan persatuan dan saling cinta mencintai.

Sebagai negara yang heterogen dan pluralis, pada kenyataannya, di tengah masyarakat kita berbagai perbedaan itu kerap menjadi bom waktu dan sumbu pemicu terjadinya konflik horizontal berkepanjangan. Tentu banyak variabel penyebab munculnya berbagai konflik. Bahkan bisa jadi konflik membara dapat muncul dari sebuah komunitas yang berasal dari latar belakang budaya, ekonomi, suku dan pendidikan yang sama. Konflik seperti ini kerap terjadi pada masyarakat Indonesia yang hidup di pedalaman dan tidak memiliki pendidikan memadai untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi di tengah

mereka, sehingga bagi mereka bahasa otot jauh lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut ketimbang bahasa otak.

Perbedaan budaya, kultur dan tradisi suatu wilayah dengan wilayah yang lain juga akan menghasilkan karakter yang berbeda. Inilah salah satu kekayaan bangsa kita yang terdiri dari banyak suku yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pelbagai perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu munculnya sebuah konflik bila tidak dikelola dengan baik.

Apalagi perbedaan negara sangat membutuhkan kesadaran untuk saling dapat berinteraksi, karena selain berbeda budaya juga berbeda ideologi, visi dan misi. Menurut Paulus (2005 : 169 dalam Lukum, 2011) Integrasi nasional suatu bangsa pada dasarnya membutuhkan secara seimbang tiga kekuatan pengikat yaitu : *Pertama*, Adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar, ideologi dan cita-cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (integrasi normatif). *Kedua*, Adanya rasa ketergantungan fungsional dan manfaat nasional dan manfaat fungsional yang konkrit dari tiap-tiap daerah dengan terintegrasi dalam suatu Negara kesatuan (integrasi Fungsional). *Ketiga*, Adanya kekuatan yang berwibawa dari pemerintah pusat untuk menjaga komitmen tiap-tiap daerah untuk berintegrasi sehingga tercipta suatu kestabilan dan keteraturan (integrasi koersif).

Penelitian tentang harmonisasi sosial sudah dilakukan oleh Suwartiningsih, (Suwartiningsih, 2011) dengan hasil penelitian : Harmoni sosial yang tercipta dalam komunitas masyarakat Nias telah menjadi sebuah fakta sosial yang layak untuk dianalisis dan diteliti. Upaya harmoni apa yang dilakukan oleh masyarakat Nias yang agamis-pluralistik ini yang menjadi modal dasar bagi terciptanya harmoni sosial tersebut? Penelitian dilakukan di Kota Gunungsitoli dengan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian bahwa kearifan lokal : *Banua dan fatalifusöta, Emali dome si so ba lala, ono luo na so yomo, Sebua ta'ide'ide'ö, side'ide'ide mutayaigö* dan Pemahaman dan penekanan nilai-nilai keagamaan yang kuat bagi pemeluk-pemeluknya yang agamis-pluralistik memiliki hubungan yang sangat erat terhadap terciptanya dan terpeliharanya harmoni sosial yang ada di dalamnya.

Selain itu La Aru Hutagaol, Papin , 2012 meneliti tentang implikasi proses interaksi sosial antara Cina-Melayu dalam proses harmonisasi sosial di RT Kampung Jawa. Dalam penelitian ini berangkat dari frame teori kajian sosiologi kebudayaan, namun dalam penelitian tidak memfokuskan pada hasil asimilasinya, akan tetapi lebih melihat pada pengelolaan asimilasi tersebut yang dipandang pada peranan masyarakat kedua etnis tersebut. Penelitian ini hanya menggambarkan bentuk-bentuk dari hasil dari pengelolaan asimilasi

serta peranan kedua etnis tersebut didalam menjaga dan menjalankan perannya masing-masing. Hasil penelitian, Pertama, Proses interaksi sosial antara etnis Cina-Melayu di Kampung Jawa sudah lama terjadi, kedua etnis tersebut dapat berproses secara baik karena di dasari dari latar belakang yang sama-sama sebagai masyarakat pendatang pada dahulunya dan berpikir bahwa tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya kerjasama dalam mempertahankan hidup. Kedua, Kesadaran dari masing-masing kedua masyarakat tersebut, dalam memaknai tentang arti kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, sehingga terbentuk pola pikir untuk saling toleran, tahu menempatkan diri, dan saling membantu antara satu dengan lainnya, dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama.

Ekonomi Politik Internasional

Dalam kerangka memahami tentang makna ekonomi politik internasional, maka selayaknya harus dipahami definisi dari ekonomi politik secara umum. Definisi dari ekonomi politik internasional hampir sama dengan ekonomi politik, yaitu keterkaitan antara ekonomi dan politik, tetapi yang membedakan antara ekonomi politik internasional dan ekonomi politik saja adalah skala. Hal ini merupakan lanjutan perubahan dari ekonomi politik menuju ekonomi politik internasional dalam kajian Hubungan Internasional. Selain itu terdapat percampuran antara ilmu politik, ilmu sosial dan ilmu ekonomi. Ekonomi politik lebih membahas tentang kegiatan seputar pemerintahannya serta dampak bagi negaranya. Sedangkan ekonomi politik internasional membahas tentang tindakan politik suatu negara yang mempengaruhi kegiatan ekonomi internasional baik secara langsung maupun tidak langsung (Prima, 2011)

Ekonomi politik internasional menempatkan negara dan pasar sebagai subjeknya. Dimana kedua subjek tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Negara identik dengan wadah dalam berpolitik dan pasar identik dengan wadah dalam melakukan kegiatan perekonomian. Hubungan antar keduanya ini tidak dapat dipisahkan karena dalam kegiatan politik luar negeri biasanya mengkaitkan kedua subjek tersebut (Gilpin, 2001).

Dalam Ekonomi Politik Internasional terdapat tiga aliran utama dalam memandang dari efek global, yaitu liberalisme, marxisme, dan nasionalisme (Gilpin, 2001). Kaum liberalisme beranggapan bahwa integrasi masyarakat ke dalam ekonomi dunia merupakan suatu tindakan yang positif bagi pembangunan politik serta kesejahteraan rakyat. Selain itu perdagangan dianggap sebagai alat untuk menumbuhkan perekonomian suatu negara. Dari kaum nasionalisme beranggapan bahwa kemajuan ekonomi yang dihasilkan di

negara maju akan membawa pengaruh buruk yaitu kemunduran dalam perekonomian negara-negara berkembang. Mereka juga memandang bahwa perdagangan hanyalah alat eksploitasi bagi negara-negara berkembang. Sedangkan kaum marxisme berpendapat bahwa integrasi antara politik serta ekonomi tak lebih dari upaya negara kapitalis untuk melakukan penghapusan hak-hak di negara berkembang.

Era dewasa ini, hubungan antara ekonomi dan politik semakin tidak terpisahkan. Kedua hal tersebut seperti siklus yang saling melengkapi dan menyokong satu sama lain seperti terlihat dalam *intra state-war* serta *in state war*. Selain itu, perpaduan antara politik dan ekonomi juga terlihat dalam masalah-masalah pembuatan kebijakan luar negeri serta *merger* perusahaan-perusahaan multinasional. Adanya kecenderungan dimana persoalan ekonomi juga mempengaruhi keputusan politik suatu negara, maka lahirlah studi Ekonomi Politik Internasional. Dalam Ekonomi Politik Internasional yang merupakan *intersection* antara ilmu politik yang terwujud melalui bentuk *state* dan ilmu ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk *market* merupakan pusat analisis dari studi Ekonomi Politik Internasional. Hal ini terjadi dikarenakan antara negara dan pasar saling memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana tidak mungkin diantara mereka untuk berjalan sendiri (Ariani, 2012).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kajian ilmu ekonomi politik internasional ini dijadikan suatu negara untuk mencapai tujuan negara atau *national interest*. Hal itu ditunjukkan dengan terdapatnya keterkaitan antara negara dan pasar dalam ekonomi politik internasional. Dengan negara yang mengkaitkan dua hal tersebut maka negara tersebut memiliki *power* untuk memberikan pengaruh terhadap perekonomian internasional. Lebih jauh lagi, baik politik internasional maupun ekonomi internasional telah secara nyata masuk ke sendi-sendi perekonomian suatu negara dari skala kecil maupun skala besar. Oleh karena itulah diperlukan ilmu ekonomi politik internasional ini untuk menghadapi persaingan yang terjadi dalam dunia.

Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab rumusan penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *fenomenologi*, yaitu pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal, tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Lexy, 2007). Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif.

Unit amatan dan unit analisa untuk tahun pertama adalah masyarakat di kec. Jagoi Babang dan Lokasi penelitian di Kecamatan Jagoi Babang,

kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan pada tahun ke dua di wilayah Gumbang, distric Bau, Sarawak, Malaysia

Penulis mempergunakan tiga (3) teknik pengumpulan data yaitu interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber/partisipan dari wilayah kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan partisipan dari wilayah Gumbang, distric Bau, Sarawak, Malaysia. Observasi juga dilakukan di 2 wilayah, terutama adalah pada saat adanya ritual Gawai baik di wilayah Indonesia (Sebujit bulan Juni, tahun 2015) dan di wilayah Malaysia, di Gumbang Juni 2016.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai buku dan dokumen lainnya, yang dipakai dalam membangun landasan teoritis yang akan menjadi tolak ukur untuk menganalisa hasil interpretasi data penelitian lapangan (J.D. Angel, 2007). Data sekunder adalah monografi kecamatan, catatan kependudukan, koran, dll.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, propinsi Kalimantan Barat dan di wilayah Gumbang, Distric Bau, Sarawak-Malaysia. Berlangsung pada bulan April-Juni 2015 dan April-Juni 2016.

Gambaran Umum Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia

Interaksi Masyarakat Perbatasan

Ketika masuk di Kecamatan Jagoi Babang, nampak pemandangan yang sangat menarik. Di sepanjang jalan nampak pepohonan yang rimbun hijau, lahan pertanian tumbuh subur, masyarakat nampak ramah kepada para pendatang. Menurut data kependudukan Kecamatan Jagoi Babang, desa Jagoi memiliki kurang lebih 102 KK, kebanyakan pendudukan adalah pedagang dan pengrajin anyaman rotan, dan berkebun.

Pada saat masuk ke wilayah Gumbang, melewati terlebih dahulu wilayah Sirikin. Sepanjang perjalanan terlihat tanaman hijau dengan lingkungan jalan yang bersih. Tanaman kelapa sawit tidak sebanyak yang berada di perbatasan Indonesia. Namun secara sekilas model rumah dan tata letak rumah penduduk sama antara wilayah kecamatan Jagoi Babang dengan wilayah di kecamatan Jagoi Babang.

Pada saat bertemu dengan penduduk, ada kesamaan bentuk fisik. Demikian juga, dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di perbatasan. Mereka memiliki bahasa yang sama, karena pada kenyataannya mereka adalah berasal dari keturunan Dayak Bidayuh. Jadi para penduduk di wilayah

perbatasan ini memiliki nenek moyang yang sama. Untuk itu mereka juga memiliki beberapa aktifitas kebudayaan yang sama .

Hubungan masyarakat perbatasan antara Jagoi Babang dengan Sarawak dapat dikatakan harmonis. Dalam bidang kerjasama perdagangan, ada etika yang disepakati oleh masyarakat lokal. Misalnya, masyarakat Jagoi akan jualan barang ke Sarawak, maka untuk menyeberang ke perbatasan harus menggunakan jasa ojek. Selanjutnya tukang ojek yang akan mengantar ke Sarawak. Biasanya tukang ojek perbatasan sudah memiliki kartu *pass*, sehingga hal ini mempermudah urusan penyebrangan. Begitu juga sebaliknya pedagang dari Malaysia, melakukan hal yang sama.

Ritual Adat

Sama seperti komunitas etnik lainnya di Indonesia, masyarakat Bidayuh juga menjalankan berbagai ritual adat yang diwarisi dari leluhurnya. Salah satu di antaranya adalah ritual gawai (gawa'). Gawai dapat disebut sebagai sebuah upacara syukuran atas segala anugerah dan berkah yang telah diterima atau sebagai permohonan ampun kepada penguasa alam semesta.

Umumnya, ritual adat terkait erat dengan sistem kepercayaan dan dapat menciptakan kesatuan, persatuan dan solidaritas kelompok (Durkheim, 1975). Begitu pula upacara gawai di kalangan masyarakat Bidayuh di Jagoi telah menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas kelompok dengan masyarakat Bidayuh di district Bau, Sarawak meskipun mereka berbeda kewarganegaraan.

"Tanggal 1 Juni yang lalu, saya dan kaum kerabat di Jagoi pergi ke 'seberang' (Sarawak) untuk menghadiri upacara gawai. Leluhur kami berasal dari sana jadi kami yang pergi ke sana. Setiap tahun, pada bulan Juni pelintas batas dari Jagoi dan Bau bebas keluar masuk batas negara untuk mengikuti upacara adat gawai.." (*wawancara dengan Bpk Ahau Kadoh, ketua Perhimpunan Forum Masyarakat Adat, Jagoi, 11/6*)

Bahwa ritual adat dapat menciptakan kesatuan dan persatuan serta solidaritas kelompok, terlihat sangat kental pada upacara Gawai Nyobeng yang diselenggarakan pada 15 Juni 2015 di Desa Hlibuei, kecamatan Siding. Disebut Gawai Nyobeng, karena pada upacara gawai ini ditabuh alat musik tradisional yang disebut sibak (tifa panjang ± 7 meter yang tergantung pada rumah adat). Aktivitas menabuh alat musik tradisional itu disebut sibang/nibang, dan dari situ muncul kata nyibang atau nyobeng.

Gambar 1

Rumah adat di Sebujit, Keluarga Malaysia datang ke Sebujit

(Acara Gawai Juni 2015 di wilayah Sebujit, Kalimantan Barat)



Sumber : Data primer, 2015

Upacara Gawai Nyobeng di Sebujit ini dirayakan secara meriah selama tiga hari (dahulu, tujuh hari tujuh malam). Kaum kerabat mereka di kampung Padang Pan, district Bau, Sarawak diundang hadir. Begitu pula sanak saudara mereka yang berada di daerah lain, pulang ke kampung tersebut untuk merayakan gawai (mirip tradisi lebaran di masyarakat Jawa). Pemerintah Kabupaten Bengkayang diundang hadir, dimana Bupati nya diberi kehormatan membuka acara Gawai Nyobeng tersebut.

Gambar 2

Rumah adat di wilayah Gumbang, menari bersama, silaturahmi (Acara Gawai juni 2016 di wilayah Gumbang, Sarawak)



Sumber : Data primer, 2016

Di antara upacara gawai yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak-Bidayuh, upacara Gawai Nyobeng di Sebujit dianggap masih terpelihara keasliannya, baik dalam ritual penyembahan menurut sistem kepercayaan leluhur yang masih dipelihara, maupun dalam ritual penyambutan tamu undangan yang dilempari dengan telur untuk menguji ketulusan hati para tamu. Karena itu, acara ini mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara untuk datang ke situ menyaksikannya. Rasa kesatuan dan solidaritas kelompok seperti itu hanya bisa langgeng apabila ritual-ritual adat seperti gawai ini bisa terus berlangsung.

Pada tanggal 2 Juni 2016 diadakan ritual adat Gawai di kampung Gumbang, Sarawak. Pada ritual ini yang menjadi tuan rumah adalah

masyarakat suku Dayak Bidayuh yang berada di kampung Gumbang, Sarawak. Sedangkan yang menjadi tamu kehormatan adalah masyarakat suku Dayak Bidayuh yang berasal dari Jagoi Babang dan sekitarnya. Ritual Gawai dilakukan bergantian setiap tahunnya. Dengan demikian komunikasi masyarakat berbeda negara ini tetap berlangsung karena adanya media ritual Gawai ini.

Adanya ritual Gawai memberikan kesempatan para anggota keluarga saling bersilaturahmi/berkunjung. Pada saat gawai di Jagoi Babang, maka keluarga yang dari Sarawak datang ke Jagoi Babang. Masing-masing keluarga berkumpul di rumah adat. Para anggota keluarga dapat saling bertemu dan bercengkerama. Mereka makan bersama yang disediakan oleh tuan rumah. Acara ini berjalan selama 3 hari. Di bawah ini beberapa foto acara Gawai.

Kekerabatan (Suku / Klen)

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Jagoi Babang adalah suku Dayak-Bidayuh. Suku Dayak Bidayuh ini mendiami wilayah di sekitar kecamatan Jagoi Babang, Seluas, Siding hingga ke district Bau di negara bagian Sarawak, Malaysia. Hubungan kekerabatan antar anggota klen terus dipelihara hingga kini, sekalipun mereka sudah berada di dua wilayah yang terpisah karena politik (negara). Jika ada anggota kerabat yang sakit atau tertimpa kemalangan, mereka akan saling mengunjungi tanpa mempedulikan kewarganegaraannya. Sebab dalam pandangan masyarakat Bidayuh/Bedayuh, tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur mereka sudah ada sebelum munculnya negara (Indonesia dan Malaysia), karena itu negara tidak berhak membatasi hubungan kekerabatan yang sudah berlangsung sejak dahulu kala.

"Bulan lalu saya pergi ke district Bau di Sarawak untuk mengunjungi famili saya di sana yang melangsungkan perkawinan anaknya. Tidak ada hambatan saat kami melintasi pos perbatasan Malaysia karena mereka (polisi di pos perbatasan) sudah mengerti maksud dari kunjungan kami" (*wawancara dengan pak Nogian, Kepala Dusun Jagoi, 12/6*)

"Kakek saya dulu berasal dari Sebujiit Atas. Ketua adat Sebujiit adalah cucu sepupu saya. Kami masih bersaudara. Kalau saudara-saudara saya dari Sebujiit datang ke Sarawak, kami bisa membantu mereka mencari pekerjaan di sana. Tolong menolong seperti ini sudah berlangsung sejak dulu" (*wawancara dengan pak Thomas, ketua adat Padang Pan, district Bau, Sarawak, 15/6*)

Indonesia dan Malaysia. *We are unity in diverse*. Dalam pandangan kami orang Bidayuh, Indonesia dan Malaysia adalah satu, dan saya

percaya presiden Indonesia akan memelihara budaya suku Dayak-Bidayuh seperti yang sudah diperlihatkan dengan menempatkan rumah adat (*baluk*) di Jakarta (TMMI)", (*potongan sambutan dato' Saputa Lubis dalam acara Gawai Nyobeng di Sebujit, 15/6*)

Kekerabatan ini pun terbukti pada saat upacara Gawai di kampung Gumbang, Sarawak-Malaysia. Seperti yang dikatakan oleh ibu Oli (wawancara 2 Juni 2016), beliau mengatakan :

Keluarga saya berasal dari Seluas. Saya ikut suami di Sarawak sudah 15 tahun. Anak-anak bisa sekolah gratis di sini. Tapi saya tidak pindah warga Negara. Nanti anak kalau sudah dewasa biarlah yang memilih. Saya tetap menjalin persaudaraan dengan semua keluarga di Indonesia. Kami adalah kerabat.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat membuktikan bahwa harmonisasi social yang terjadi di masyarakat perbatasan Indonesia – Malaysia, khususnya masyarakat Jagoi Babang Kalimantan Barat Indonesia dan masyarakat Gumbang-Sarawak, karena mereka satu kerabat dari suku Dayak. Dengan satu keturunan inilah membuat ikatan kekerabatan mereka tetap terjaga meskipun mereka beda negara.

Ekonomi Politik Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia

Untuk melakukan pembahasan dari aspek ekonomi politik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, maka akan diuraikan dalam beberapa unsur ekonomi. Pertama-tama akan disajikan sumber transaksi ekonomi dibidang pertanian, dibidang usaha rumah tangga, dan transaksi perdagangan dua negara.

Keadaan Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian terdapat beberapa komoditas yang dihasilkan dan diperdagangkan antara lain : jahe, talas, ubi kayu, ubi rambat, kacang tanah, timun, buncis, petai, jengkol, cabe, dan terung asam. Komoditas tersebut umumnya dijual di Pasar Kaget Serikin dan memberi harapan bagi pendapatan masyarakat, karena itu perhatian dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah seperti bantuan modal usaha, pembinaan dan pelatihan bagi petani sangat diharapkan.

Komoditas utama tanaman pangan adalah padi, baik padi sawah maupun padi ladang. Sehubungan dengan hal ini, Kec. Jagoi Babang sementara mengembangkan padi varietas beliah (beras merah) yang sangat potensial pasarannya di Pasar Kaget Serikin (Sarawak).

Komoditas perkebunan utama di wilayah Kecamatan Jagoi Babang adalah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pihak Swasta Nasional

dengan luas lahan kurang lebih. 26.348 Ha. Sayangnya perkebunan sawit yang dimiliki rakyat setempat hanya seluas 671 Ha, akibat kekurangan modal, terutama bibit.

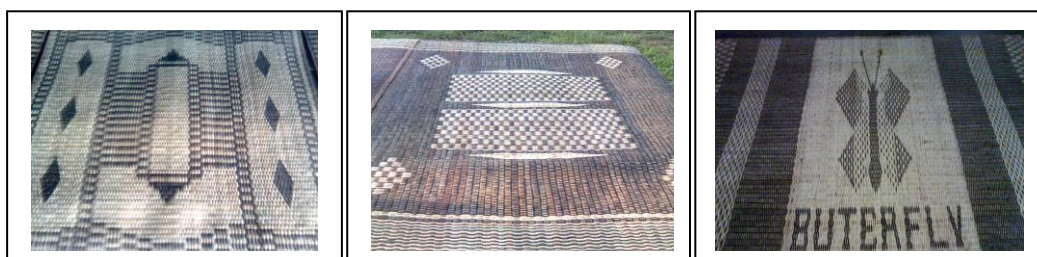
Komoditi perkebunan rakyat lainnya adalah kakao, lada dan karet yang diusahakan oleh masyarakat setempat. Namun saat ini kondisinya kurang menguntungkan karena kekurangan modal usaha dan kurangnya pengetahuan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang tersedia. Meskipun harga karet tergilas oleh krisis global namun masih tetap menjanjikan sebagai sebuah usaha perkebunan rakyat. Permintaan akan bibit karet oleh masyarakat di enam desa dalam wilayah Kecamatan Jagoi Babang yang tercatat dalam usulan sektor perkebunan tahun 2012 ternyata sangat sangat tinggi. Sayang, permintaan petani tentang bibit tanaman perkebunan yang tersebut di atas masih belum bisa dipenuhi oleh pihak pemerintah daerah setempat.

Keadaan Sektor Industri Rumah Tangga

Sektor industri rumah tangga di Kecamatan Jagoi Babang yang paling menonjol adalah usaha anyaman bidai (tikar rotan), takin dan anyaman bubu. Hampir setiap rumah tangga menekuni usaha ini. Jumlah produk bidai yang dapat dihasilkan \pm 2500 lembar per bulan dan sebagian besar dipasarkan ke Serikin (Sarawak Malaysia). Sektor ini perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah, baik berupa bantuan permodalan, pelatihan tenaga trampil dalam upaya peningkatan mutu produk. Pemasaran produk juga sebaiknya ke pasar dalam negeri dan di beri hak paten (label). Berikut adalah gambar beberapa contoh anyaman bidai yang dihasilkan masyarakat kecamatan Jagoi Babang.

Gambar 5

Anyaman Bidai dengan berbagai motif



Sumber : Data primer. 2015

Keadaan sumber daya manusia di Kecamatan Jagoi Babang masih sangat rendah, demikian pula dengan tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan masih rendah dibanding dengan penduduk di negara tetangganya di Sarawak. Rumah tangga miskin di kecamatan ini mencapai 573 dari 1.740 total rumah tangga, atau sekitar 30,66%.

Lapangan kerja yang terbatas telah mengakibatkan banyaknya anggota masyarakat mencari kerja di Sarawak sehingga intensitas pelintas batas cukup tinggi. Selain itu aktivitas perekonomian masyarakat lebih berorientasi pada negara tetangga, karena akses untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari lebih mudah, dekat dan murah bila dibandingkan di negara sendiri. Di wilayah ini ada ungkapan, '**garuda di dadaku, ringgit di perutku**'. Makanya tidak heran jika pemerintah berupaya mengajak masyarakat setempat untuk mencintai uang rupiah, seperti terlihat pada gambar di halaman berikut.

Perdagangan lintas batas melalui Kecamatan Jagoi Babang (Jagoi Babang–Serikin, Bau) telah berlangsung lama. Penduduk yang bermukim disekitar wilayah perbatasan mempunyai hubungan emosional dengan penduduk Serikin (Sarawak-Malaysia Timur). Komoditas yang diperdagangkan relatif terbatas meliputi barang-barang keperluan sehari-hari. Seiring dengan kemajuan jaman frekuensi perdagangan juga meningkat, demikian juga nilai dan volumenya juga meningkat. Perdagangan Lintas Batas yang terjadi saat ini adalah para pedagang asongan yang masuk ke wilayah Sarawak membawa barang dagangan dan menjualnya disuatu tempat sehingga terbentuklah '**Pasar Tradisional' Pasar Kaget**' di wilayah Serikin (Sarawak).

Para pedagang tersebut tidak hanya berasal dari kabupaten Bengkayang saja melainkan dari luar Bengkayang juga, misalnya: pedagang asal Kabupaten Sambas, pedagang asal Kota Singkawang, Pontianak, bahkan ada pula dari pulau Jawa.

Gambar 3.

Baliho Berisi Ajakan untuk Mencintai Uang Rupiah Terletak di tengah-tengah desa Jagoi



Sumber : Data primer, 2015

Jenis barang yang diperdagangkan di Pasar Kaget Serikin seperti: ikan segar, sayur mayur, rempah-rempah, buah-buahan, pakaian jadi, barang-barang dari kulit, keramik hias, barang-barang kerajinan dari anyaman rotan, mainan anak-anak, rokok kretek, mie instan, dan makanan tradisional, serta aksesoris. Aktivitas Pasar Kaget ini hanya berlangsung selama dua hari dalam seminggu, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu, dengan jumlah pedagang kurang lebih 400 orang/lapak. Dampak positif yang diperoleh pedagang-pedagang tersebut adalah mereka menerima bayaran berupa uang Ringgit Malaysia. Sebaliknya pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun Kecamatan Jagoi Babang yang berbatasan langsung dengan Serikin, tidak memperoleh keuntungan material, sementara Kampung Serikin (District Bau, Sarawak) dapat menikmati pendapatan berupa retribusi pasar dari para pedagang yang berjualan di sana. Selain itu mereka juga memperoleh pendapatan berupa pajak dari penginapan-penginapan yang tumbuh disekitar kawasan Serikin sebagai tempat mangkalnya para pedagang yang menginap.

Sayangnya, hingga kini Pemerintah Kabupaten Bengkayang belum menyediakan pasar, pergudangan dan terminal bongkar-muat serta terminal angkutan di kecamatan Jagoi Babang. Seandainya fasilitas infrastruktur tersebut bisa dibangun di kecamatan Jagoi Babang, maka akan terdapat peluang dan keuntungan yang diperoleh, antara lain :

- Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan memperoleh PAD melalui retribusi pasar, sewa ruko, gudang, retribusi parkir dan lain-lain.
- Tumbuhnya usaha-usaha penunjang misalnya penginapan, rumah makan, warung-warung dari masyarakat sekitar pasar.
- Membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar Kecamatan Jagoi Babang.
- Situasi kecamatan akan lebih terbuka dan ramai aktivitas perdagangannya dan pedagang-pedagang tetap memperoleh uang ringgit dari para pembeli yang berasal dari Sarawak.

Dengan kata lain, himbauan kepada masyarakat untuk lebih mencintai rupiah tidak ada gunanya jika tidak diikuti dengan tindakan nyata pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sektor perdagangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi Negara Indonesia adalah beberapa barang dagangan kebutuhan masyarakat di Jagoi Babang, yang sebenarnya tersedia juga di Kalimantan tetap mereka lebih memilih membeli dari Sarawak. Hal itu disebabkan harganya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Sebagai contoh : gal elpiji kalau beli milik Indoneis 1 tabung 12 kg

seharga Rp.150.000 – Rp. 200.000,- tetapi kalau miliki Malaysia hanya seharga Rp. 90.000,-. Demikian juga dengan pakaian, minuman, sabun, dan peralatan dapur, harganya lebih murah dibanding produk Indonesia.

Negara memegang peranan penting dalam proses perdagangan antara masyarakat di Sarawak dan di Kalimantan Barat. Negara Malaysia tidak absen, karena memberikan tempat untuk berdagang. Para petugas lintas batas pun memberikan kemudahan pada saat hari sabtu dan minggu bagi para pedagang dari Kalimantan Barat, khususnya dari kecamatan Jagoi Babang. Dengan demikian yang perlu ditingkatkan adalah peranan Negara Indonesia dalam mendukung warganya di perbatasan untuk memberdayakan melalui ekonomi perdagangan internasional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa harmonisasi social yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Jagoi Babang karena adanya perekat kekerabatan sebagai simpul utama dan dilengkapi dengan simpul ekonomi sebagai kebutuhan pokok bersama. Perbedaan Negara tidak menjadi penghambat dalam melakukan praktek ekonomi diantara warga Negara yang berbeda Negara. Mereka dapat melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan mata uang ringgit dan rupiah. Barang dagangan disesuaikan dengan kepemilikan dari masing-masing Negara. Dari warga Indonesia yang dijual adalah hasil pertanian dan usaha rumah tangga. Sedangkan dari Malaysia adalah pakaian dan kebutuhan energy serta produk-produk makanan dan minuman modern.

Perdagangan yang dilakukan diantara warga negara Malaysia dan Indonesia merupakan sarana interaksi masyarakat dari negara yang berbeda, sehingga mata uang yang digunakan juga dapat dengan rupiah dan ringgit. Masyarakat di Malaysia dapat terpenuhi kebutuhannya dengan membeli barang dagangan dari masyarakat Indonesia, sementara masyarakat Indonesia juga dapat memperoleh kebutuhan dengan membeli dagangan dari masyarakat Malaysia.

Negara memiliki peranan yang berbeda. Negara Malaysia menyediakan tempat di Serikin untuk digunakan pasar bersama, menarik retribusi, menyediakan penyewaan mobil, penyewaan penginapan, dan mempermudah lalu lintas batas. Sementara Indonesia, warganya melakukan sendiri tanpa kehadiran negara. Penentuan harga juga diserahkan kepada masyarakat di Malaysia. Dengan demikian terkesan negara absen.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih diucapkan kepada DIKTI yang telah memberikan dana penelitian melalui program STRANAS dan UKSW melalui BP3M dan FISKOM sudah mengijinkan melaksanakan penelitian ini.

Referensi

- Ariani, Dipa Patricia, 2012, http://diba-p-a-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-42330-Ekonomi%20Politik%20InternasionalPengertian%20Ekonomi%20Politik%20Internasional.html. Diunduh 8 nop 2016 jam 22.00 WIB.
- Berger, Peter L., *Piramida Korban Manusia, Etika Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005)
- Engel, J D., *Metode Penelitian Sosial dan Teologi Kristen* (Salatiga: Widya Sari Press, 2005)
- Darmaputera, Eka., *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2005)
- Fromm, Erich., *Akar Kekerasan, Analisis Sosio-psikologis atas Watak Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Garang, Phil J., *Nias: Membangun Harapan Menapak Masa Depan* (Jakarta: Yayasan Tanggul Bencana Indonesia, 2007)
- Giddens, Anthony., *Problematika Utama dalam Teori Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Gilpin, Robert. 2001. "The Nature of Political Economy", dalam *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Princeton: Princeton University Press, pp. 25-45
- Gilpin, Robert. 2001. "The Study of International Political Economy", dalam *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Princeton: Princeton University Press, pp. 77-102
- Hämmerle, Johannes Maria, 2001, *Asal Usul Masyarakat Nias: Suatu Interpretasi* (Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias, 2001)
- J. D. Engel, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Teologi Kristen*(Salatiga: Widya Sari Press, 2005) , 32
- Koentjaraningrat., *Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 1997)
- La Aru Hutagaol, Papin, 2012, *Interaksi Etnis Cina-Melayu dalam Mengelola Proses Harmonisasi Sosial (di RT Kampung Jawa, Kelurahan Koba, Kabupaten Bangka Tengah-Koba) Program Studi Sosiologi FISKOM-UKSW* <http://repository.library.uksw.edu/handle/123456789/2006>
[diunduh 12-11-2013](http://repository.library.uksw.edu/handle/123456789/2006)

- Lexy J. Maleong., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 14
- Lukum, Roni. 2011. Membina Harmonisasi Kehidupan Antar Etnis di Propinsi Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. <https://www.google.co.id/#q=teori+harmonisasi+sosial&safe=strict> diunduh 12-11-2013
- Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Plaisier, Arie Jan., *Manusia, Gambar Allah, Terobosan-terobosan dalam Bidang Antropologi Kristen* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002)
- Prima, A. Putra, http://ari-p-p-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-73680-Ekonomi%20Politik%20InternasionalPengertian%20Ekonomi%20Internasional%20d%20am%20Hubungan%20Internasional.html. Diunduh 1-11-2016 jam 19.30 WIB.
- Pramudianto (ed.), *Nias Rescuing and Empowering Authority* (Tangerang: Sirao Credentia Center, 2005)
- Ravenhill, John. 2008. "The Study of Global Political Economy", dalam John Ravenhill, *Global Political Economy*, Oxford: Oxford University Press, pp. 18-25
- Samiyono, David, *Panduan Penulisan dan Tata Cara Penyelenggaraan Ujian Skripsi dan Thesis* (Salatiga: Fakultas Teologi UKSW, 2009)
- Santoso, Gempur, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- , *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010)
- Suwartiningsih, Sri, Zega (2012), *Kearifan Lokal Masyarakat Kota Gunungsitoli, Kotamadya Nias, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia*. M.SA, F.Theologia.
- Suzuki, Peter, *The Religious System and Culture of Nias Indonesia*, Disertasi s'Gravenhage, 1959
- Sztompka, Piötr, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2010)
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Lain-lain:

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Nias/

<http://www.almanar.co.id/artikel-asatidzah/indahnyaharmoni-sosial.html/>

[http://www.yayasankorpribali.org/artikel-dan-berita/59-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umat-beragama.html /](http://www.yayasankorpribali.org/artikel-dan-berita/59-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umat-beragama.html/)

<http://www.scribd.com/doc/61508852/KEARIFAN-LOKAL><http://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-identitas-sosial/>

<http://itsnasahma.blogspot.com/2010/11/teori-identitas-sosial.html>
<http://sosiologidakwah.blogspot.com/2009/03/harmoni-sosial-berbasis-ketuhanan.html/>



Tough Diplomacy on The Sea: Impact of Illegal Fishing on Indonesia-China Relations

Susy Tekunan

Universitas Pelita Harapan

susy.tekunan@uph.edu

Abstrak

Indonesian new administration under the leadership of president Jokowi adopts a tough stance on the violation of maritime resources in the largest archipelagic country. Consistent with the initiative of The Minister of Maritime Affairs and Fisheries, Susi Pudjiastuti, is known and applauded domestically for her reform and policy that aim to protect the local fishermen. The paper is looking at the impact of this strong maritime policies, especially the sinking of illegal fishing vessels, to Indonesian foreign diplomacy with China. It will observe the reason for proportionally less Chinese fishing vessels being destroyed in comparison with vessels with other flag. This qualitative preliminary research will include interview with the Indonesian foreign ministry regarding the impact of this policy to the relations between the two countries and the coordination between the ministries. The purpose of this paper is to analyze the impact of international political economy to influence or more precisely dilute such strong policy implemented in Indonesia. It aims to find both the cause and effect for the decision to hit certain vessels yet to leave others intact.

Kata Kunci

maritime policy, illegal fishing, political leverage, Indonesia China

Introduction

Indonesia new administration under president Jokowi adopts a significant measure of turning to the sea with its maritime fulcrum initiative. The focus on the maritime strength is not a pristine concept but it was in fact a target aimed by the early Indonesian youth to achieve great nation of land and sea, the very conception that translate an Indonesian term for the motherland is "tanah air" which literally translated into land and sea.

Global Maritime Fulcrum is seen as a revisit from this original determination to pay proper attention to the mass of water since Indonesia is

the largest archipelagic country in the world. With 54,716 km, Indonesia has the second longest coastline in the world after Canada.¹ The various domestic and international challenges in Indonesia has directed more attention toward people and land management especially with the severe lack of infrastructure in many areas in Indonesia, especially the remote areas out of sight from the central government in Java. The early formation of the country in 1945 was jumbled with intense competing political interest between individuals and groups that governing has not been centered as it should have been.

With the common understanding in regards to Jokowi's lack of foreign policy experience, he engaged two highly experienced foreign policy advisors. Luhut Panjaitan, being Jokowi's oldest supporter, is lauded for his successful record in maintaining Indonesia-Singapore relations during one of the most challenging time for the two countries. Luhut's diplomatic approach was considered cooperative and reasonable during his time serving as an ambassador to Singapore.² As a retired general, his security expertise and counter-terrorism experience, Luhut serves as Jokowi's foreign policy advisor on security. The second advisor is Rizal Sukma who serves as the executive director of the Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Rizal led the intense preparation for the only foreign-policy presidential debate during the campaign. He played an instrumental role in drafting the foreign policy section of Jokowi's vision mission statement. As part of this paper, it is important to know the foreign-policy decision makers in the administration to know the characteristics and tendencies of this government.

Three main challenges of the global maritime fulcrum are illegal fishing, human trafficking and climate change.³ The illegal fishing in Indonesian waters has been a serious offense for a long period of time. Only recently there has been heightened attention with the new strong measures to cut the practices by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Susi Pudjiastuti. Out of the three challenges, I will focus on the illegal fishing practices that includes the disputed areas with China.

¹ "Indonesia," accessed November 2, 2016, <http://www.nationsencyclopedia.com/geography/Indonesia-to-Mongolia/Indonesia.html>.

² "Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi," Lowy Institute, 2016, accessed November 2, 2016, <https://www.lowyinstitute.org/publication/indonesian-foreign-policy-under-president-jokowi>.

³ Institute of Defence and Strategic Studies, *Event Report Institute of Defence and Strategic Studies INDONESIA'S GLOBAL MARITIME FULCRUM CHALLENGES AND TRAJECTORIES*, (RSIS, 2015), https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/07/ER160714_Global-Maritime-Fulcrum.pdf.

The South China Sea issue has been the largest territorial dispute in the region with China increasing aggressiveness and its refusal to honor the court tribunal decision, threaten the stability and peace in the region.⁴ I will look into Indonesian position on the issue as well as any special measures for China for the violation of Indonesian maritime sovereignty as political bargaining chip to maintain relationship with the economic super power. By April 2016, Indonesian government has destroyed only one Chinese vessel out of 174 illegal fishing vessels. The low presentation of Chinese vessels being destroyed is seen as Indonesian hesitation to provoke China. This view is denied by the Minister Susi claiming that vessels from any countries will be treated the same under Indonesia's laws.

Research Method

The research adopts qualitative method with literature study on the relations between China and Indonesia. Insights from forum discussions regarding this issue including the maritime power that includes Hasyim Djalal and ambassador Arif Havas Oegroseno will also be a part of the consideration in this study. Interview with the foreign ministry particularly the Asian section should help to provide more understanding of Indonesia China relations in the recent years. Most of the sources for this study will come from official report and previous study on the Global Maritime Fulcrum as well as Indonesia relations with China especially with the maritime territorial dispute of South China Sea.

As an exploratory research, this study aims to find the recent position of Indonesian foreign relations with China especially with the implementation of Global Maritime Fulcrum. Indonesian government under Jokowi implemented strong measures to send out the message that it is serious in the new focus of the water resources and maritime potentials. This research aims to find answers for (1) the latest development regarding Indonesia China relations (2) the implementation of the Global Maritime Fulcrum especially regarding illegal fishing practices in Indonesian waters (3) the impact of the Global Maritime Fulcrum initiative to Indonesia China relations. Through the findings, the research should shed some light into the relations between two countries under Jokowi administration, especially in the new focus into maritime power and potentials.

The purpose of this research is to provide a preliminary analysis on the recent development of the current Indonesian government especially regarding its foreign relations with China. Since the main foreign policy implemented by

⁴ "After the South China Sea Arbitration," June 21, 2016, accessed November 2, 2016, <http://thediplomat.com/2016/06/after-the-south-china-sea-arbitration/>.

the Jokowi administration is the Global Maritime Fulcrum initiative that includes the illegal fishing eradication, the study focuses on the impact of this policy with its most powerful neighbor outside ASEAN.

The study will look at the enforcement on the policy to fight illegal fishing in the Indonesian water and its impact to the countries with illegal vessel. The assumption that Indonesian strong policy by bombing the illegal fishing vessels will strain its relations with countries which the vessels originated. The study will observe any special measures directed toward countries with stronger ties with Indonesia despite of the violation. The fear of consequences from the harsh policy may threaten political and economic relations that Indonesia has been building with certain neighboring countries. From the previous administration under SBY, Indonesia has been closely courting U.S. and China for economic interest. Does the effort rise above the maritime fulcrum policy or in the fear of offending the Chinese, Indonesian government need to halt itself from destroying Chinese ships without appearing to play favoritism against other violators?

This analytical study hopes to formulate a practical explanation in regards to the political balancing of the Jokowi's administration and to present the situation with Indonesia China relations through this maritime-focus foreign policy of Indonesia.

Indonesian Maritime Doctrine

As the second largest archipelagic nation, Indonesia has an incredible maritime potential that has not been maximized. From the beginning of the 10th century during the time of Sriwijaya kingdom in the geographical location that will later be called as Indonesia, heterogenic culture is the reflection from the local maritime communities.⁵ Maritime culture promotes trade as the main economic engine and with the high flow of traders increases the openness in the society unlike the agrarian culture that is apparent in the Javanese hierarchical structure of the society.⁶

Trade relations with China and India go back to the beginning of the 5th century as a result of Mongol and Tibetan attack and the damage of road that halted the flow of goods from the northern to southern part of China. This situation pushed China to seek alternative trade route to the South through the

⁵ Yulianti, "Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (August 2014).

⁶ Ibid.

sea.⁷ The shift of Indonesian maritime focus occurred is a result of European colonization in Indonesia, especially the Dutch control over the coasts for economic and political benefits. The decline of maritime focus through the impact of colonization further exacerbated by the intensification of internal political challenges that captured the attention of the government since independence. Jokowi's inauguration speech in October 2014 reminded the importance and the great strength of Indonesian maritime potential.⁸ This is the first commitment of an Indonesian president to build the legacy of his administration on the maritime doctrine. The global maritime fulcrum has been widely discussed and analyzed both domestically and regionally to determine the impact to regional relations especially to its immediate neighbors.

There are five key areas of the Global Maritime Fulcrum which are maritime culture, marine resources, archipelagic connectivity, maritime diplomacy and naval development.⁹ Each of this area aim to cultivate the national maritime identity and contribute to the positive impact of the maritime security and stability. In the initial campaign of Jokowi and his running mate, Yusuf Kalla, the foreign policy focus on the vision and mission statement was divided into four main sections and the first one focuses on foreign policy with maritime orientation. This foreign policy focus is further elaborated into five areas¹⁰:

1. To execute maritime diplomacy to expedite territorial border disputes including land border with 10 Indonesian neighbors;
2. To Guarantee integrity of the Republic of Indonesia, maritime sovereignty and security/ prosperity of the most outer islands;
3. To safeguard the natural resources and exclusive economic zones (EEZ);
4. To intensify defense diplomacy and;
5. To diminish maritime rivalries among big countries and to push for territorial dispute settlement in the region.

The recent measure that Jokowi administration implemented through the ministry of maritime affairs and fisheries is the harsh consequences of the illegal, unreported and unregulated fishing activities in Indonesian waters.

⁷ Yuliati, "Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (August 2014).

⁸ Ade Marboen, "Joko Widodo: Jalesveva Jayamahe," *Antara News (Google+)*, October 20, 2014, <http://www.antaraneews.com/berita/459658/joko-widodo-jalesveva-jayamahe>.

⁹ Iis Ginarsah and Adhi Priamarizki, *Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns*, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies, 2014).

¹⁰ "Visi Misi Jokowi - JK," KPU, May 20, 2014, accessed November 14, 2016, <http://webcache.googleusercontent.com/>.

Global Maritime Fulcrum and The Silk Road of the 21st Century

China has initiated the new Silk Road as its direction to bring connectivity, safety and diplomacy. The Chinese president grasped the opportunity to woo Indonesia with its maritime doctrine by connecting it and complementing it with the Chinese New Silk Road initiative. During the first state visit that Jokowi pays to Beijing in 2015, President Xi effectively woo the Indonesian president by supporting the maritime initiative through the Asian Infrastructure Investment Bank and the Silk Road Fund to invest in the maritime infrastructure in Indonesia.¹¹ Grasping the opportunity when it presents itself gives a heads up for the Chinese to win over the heart of the Indonesian government for partnership and collaboration between the two governments. With the intensifying competition of interests in the region between the U.S. and China, the Chinese move supporting Jokowi maritime doctrine that represents the national pride and identity, is crucial to set a friendly tone with Indonesia.

The New Silk Road initiative with complimentary partnership with Indonesia plans to build two sea ports in Indonesia as part of the long-term water map in the region. The partnership between China and Indonesia represents a new level of relations between the two country. Indonesia follow the policy of free and active that aims to maintain good relations with as many countries as possible. As ASEAN, it adopts the principle of non-interference to protect sovereignty.

Threading a Fine Line

Settling territorial disputes in the region, including Indonesia's dispute with neighbors is listed as two separate points in the 5-point key areas in the administration's maritime oriented foreign policy focus. It is then apparent that for Indonesia, territorial dispute settlement is a significant agenda in the regional politics. The largest dispute threatening the region is South China Sea challenge with China as the main aggressor going against most members of ASEAN. Indonesia is not officially a claimant state but as the largest nation in ASEAN, it is often seen and gladly take the role of the leader of the regional institution. Jokowi also mentioned that Indonesia has an interest to maintain the regional peace and stability¹² and the South China Sea issue is one of the

¹¹ "The 'global maritime fulcrum' and the US-Indonesia Partnership," October 27, 2015, accessed November 15, 2016, <http://thediplomat.com/2015/10/how-the-global-maritime-fulcrum-can-elevate-the-us-indonesia-partnership/>.

¹² "Will Indonesia's South China Sea Policy Change Amid China's Assertiveness?," March 24, 2016, accessed November 14, 2016, <http://thediplomat.com/2016/03/will-indonesias-south-china-sea-policy-change-amid-china>



biggest threat for the region that put ASEAN's achievement of the past four decades at risk. During the campaign, Jokowi takes the position of non-meddling with the disputing countries. Since Indonesia is not a claimant state, we should not be involved in the dispute. After Jokowi became president, his statement represents the country's position for being an honest broker. This effort has not been welcomed by Beijing since multilateral involvement is rejected, including the decision by the International Tribunal ruling regarding the South China Sea.

Indonesia is flexing its muscle by showing force through the sinking of IUU fishing boats including one from China. An analysis on the issue projects that the main target Indonesia is aiming toward with this show of force is China, even though it is giving special treatment for Chinese boats to avoid provoking China as the largest power in the Asia region.¹³ The analysis further discussed that the dispute of the water around Natuna island and the escalating tension between Chinese and Indonesians fishing boats and naval forces has created unwanted tension in Jakarta. With the dispute in the Natunas, Indonesia is putting up forces and sinking vessels as a response, even though they are not Chinese vessels. China is testing to challenge the status quo in the Natunas and Indonesia is playing along with its response in rejecting to become the pushovers in the regional dispute.¹⁴

China is Indonesia's largest trading partner with 49.2 billion dollars bypassing the U.S., Singapore and Japan. Indonesia administration also realizes how much it relies on China for investment, especially in infrastructure to push growth.¹⁵ Early on in Jokowi's presidency, Jokowi and Xi Jinping discussed closer partnership that will booth both countries closer economic relations. In 2013, even before Jokowi was elected, Indonesia and China has deepened relations from strategic partners to comprehensive strategic partners that include better people –to-people relations as well as military cooperation. With this close partnership and the potential economic contribution China will make to Indonesia's growth, the government careful steps with this draconic partner would be seen as reasonable move.

¹³ Karlis Salna, *Indonesia to Sink 71 Foreign Fishing Boats Amid South China Sea Tensions*, (Bloomberg), August 15, 2016, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-15/indonesia-to-destroy-71-boats-in-display-of-maritime-sovereignty>.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ "China and Indonesia Under Jokowi: Show Me The Money," *The Diplomat*, accessed November 14, 2016, <http://thediplomat.com/2015/01/china-and-indonesia-under-jokowi-show-me-the-money/>.

During a Foreign Policy Conference in Jakarta in 2016, Tim Huxley from IISS said that illegal fishing operations has been rampant in the Indonesian waters due to abandonment. The measure to put a lid on this illegal activity is a professional lawful enforcement that is being implemented by other countries such as Australia and the U.S. consistently. It is time for Indonesia to implement this measure due to the loss of maritime resources that should be prevented and be the source of prosperity for the people in the fishing villages by the coasts. The lack of enforcement was partly due to the high cost and lack of ability to implement this measure from the lack of coordination and will. The vast area of the Indonesian water as well as the difficulties in taming the sea, has made the job for the maritime enforcement often is lacking appreciation.

If sinking illegal fishing vessels is simply a professional measure, Indonesia should have a valid argument to sink fishing vessels from any country that break the Indonesian law. Pudjiastuti has denied the claim that Chinese vessels enjoyed special treatment because of its political and economic influence with Jakarta. The popular minister said that she will not treat violators any differently and would rather resign if she was forced to let go of any foreign vessels for any reason. Pudjiastuti reveals that she talked to various ambassadors whose boats are captured to allow them to redeem their boats back after they pay the accumulated unpaid overdue taxes. The discussions include one with Chinese representative in Indonesia regarding the illegal present of Chinese ship in the Natunas that was captured in May 2016. She mentioned that China should honor the IUU law that has been agreed by both countries to maintain good relations with Indonesia.

Executing the Maritime Doctrine: The Harsh Reality

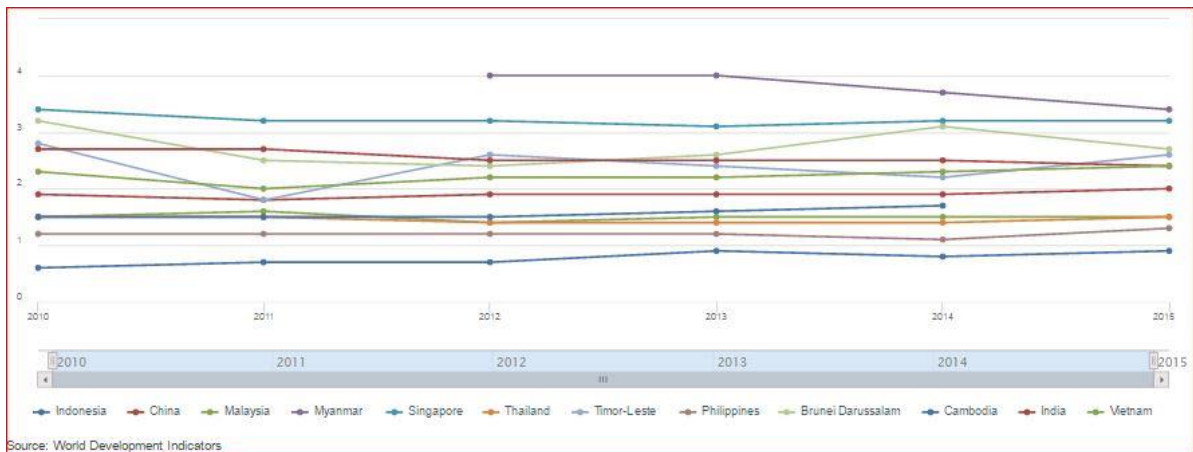
The global maritime fulcrum requires a significant amount of increase in defense funding with clear blueprint for execution. Indonesian defense budget is meager in comparison to the size of the body of Indonesian water. Indonesia military spending is 0.9% from total GDP or the amount of U\$ 7 Billion in 2014. The percentage is the lowest even among the ASEAN countries. Jokowi administration has set the goal to increase the defense budget to 1.5% by 2019 or U\$ 20 billion by 2020. Even this number is not impressive in the regional comparison since it is still among the lowest except from the Philippines but 1.5% is more at par with the rest of the world. China with its recent aggression in the region has also been increasing its defense budget that the latest reached 2% of GDP. Indonesia has increased its defense budget since 2010 from 0.6% to 0.7% and continues to increase it up to 0.9% in 2013. The lack of defense budget can serve as a sign of national confidence or simply a lack of



oversight. With the escalating tension in the region, especially with Chinese aggression on the South China sea, countries in the region raise their concern over the security threat. Defending the nation from the maritime front requires substantial upgrade on the naval equipment that includes off-shore patrol vessels, naval aviation, maritime surveillance and anti-submarine capabilities.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indonesia	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9
China	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0
Malaysia	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5
Myanmar	4.0	4.0	3.7	3.4
Singapore	3.4	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2
Thailand	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5
Timor-Leste	2.8	1.8	2.6	2.4	2.2	2.6
Philippines	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3
Brunei Darussalam	3.2	2.5	2.4	2.6	3.1	2.7
Cambodia	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	..
India	2.7	2.7	2.5	2.5	2.5	2.4
Vietnam	2.3	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4

Source: World Bank Data



Source: World Bank Data

Aside from the lack of defense budget, there is also a lack of coordination among the involving parties in the government. The Maritime Sovereignty Deputy at Indonesia's Coordinating Ministry for Maritime issues, Ambassador Arif Havas Oegroseno, said that Indonesian water is often difficult to maneuver, there are areas where the waves can get to significantly high and there is no other way to include many government bodies to work together and coordinate.¹⁶ Public myths about the involvement of many government bodies to handle the sea is an extreme exaggeration but there is coordination especially among the immigration office, custom, the Navy, water police and Indonesian Ocean Security or the Indonesian Coastguard. Despite of this claim, more comprehensive partnership and collaboration is required to ensure the

¹⁶ *Indonesia as a Maritime Fulcrum: The Score Card 2 years Later*, Conference on Foreign Policy Indonesia (2016).

effective implementation of the policy. For instance, upon the question that the Navy was not supporting the IUU fishing policy enforcement, the military spokesperson said that there is no clear directive and law of what the Navy should do to enforce the violation. The military acts within very careful guidelines and so far it is not receiving the direction. The lack of coordination from the government entities relating to the IUU fishing practices contributes to the ineffectiveness of enforcement implementation.¹⁷

Conclusion

The long history of Indonesia China relations has come to a new era with the new administration in Indonesia eager to change the course of the nation toward high economic growth and to unleashed the great maritime resources it possesses. Despite of the good intention and apparent potential for partnership between the two countries, there are security challenges that touch upon the very focus of Indonesian government. The maritime doctrine that includes regional security serves to prevent the turmoil in the region from escalating aggression from China in regards to the South China Sea issue. This delicate diplomatic situation must be danced with strategic balance to prevent provoking the dragon and to lose all the economic benefit it offers.

The sinking illegal fishing boat activities is a popular nationalistic policy proposed by Minister Pudjiastuti to the president. It was approved despite of there are critiques that it will create tensions between countries. However, it is also the practice that has been enforced by many countries. Indonesian law number 45 chapter 6, 2009 serves as the basis for giving the consequences for violators in the form of sinking or burning foreign fishing vessel based on sufficient preliminary evidence.¹⁸ Despite of this, law enforcement of this violation has been at most abandoned and Indonesia continually loses 30 million US Dollars annually. Indonesia has the right or even applauded to fight this war since to protect national resources from being stolen by foreigners instead of helping the local fishermen increase their standard of living through the abundant maritime resources. The crackdown on illegal fishing is an initiative that is consistent with the maritime doctrine of the administration as well as economic consideration of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries.

¹⁷ "Penanganan Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Perlu Serius Dan Menyeluruh," December 26, 2014, accessed November 15, 2016, <http://www.voaindonesia.com/a/penanganan-pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-perlu-serius-dan-menyeluruh/2574278.html>.

¹⁸ *Info Singkat VI 24 II P3DI Desember 2014 28*, (n.p., 2014), http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf.

The political clout that comes with this action is mostly related to China as the country with significant interest in the region with its territorial dispute. The most recent conflict involving the capturing of a Chinese fishing boat in the Natunas that is recognized as part of Indonesian EEZ. China rejected Indonesian claim and insists that the boat is not in Indonesian water. Natunas is the only source of contention between Indonesia and China on the South China Sea claim and with the enforcement of the fishing law, it has the potential to create tension on sovereignty issues. In short, Indonesia realizes the consequences of provoking China and should avoid the potential conflict due to economic reason: (1) China pledged substantial investment to push forward Indonesian maritime doctrine with the New Silk Road and (2) China is its largest trading partner. At the same time, with the escalation of South China Sea issue with no end in sight, Indonesia also needs to project some power and flexes its muscles to avoid being seen as a pushover. Lastly, Indonesia is not ready to face China with its limited defense capacity including in technology and human resources. It is only prudent for Indonesia to defend its position while working toward more amiable solution for specifically the Natunas as well as the larger South China Sea issue to maintain regional peace and stability.

References

- Yuliati. "Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (August 2014).
- Carr, Andrew. *Strategy Toward Indonesia*. The Centre of Gravity Series: ANU, 2015.
- Indonesia as a Maritime Fulcrum: The Score Card 2 years Later. 2016.
- Connelly, Aaron L. "Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi." 2016. Accessed November 2, 2016. <https://www.lowyinstitute.org/publication/indonesian-foreign-policy-under-president-jokowi>.
- Gindarsah, Iis and Adhi Priamarizki. *Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns*. Singapore: Rajaratnam School of International Studies, 2014.
- Hamilton-Hart, Natasha and Dave Mcrae. *INDONESIA: BALANCING THE UNITED STATES AND CHINA, AIMING FOR INDEPENDENCE*. Sydney: The United States Studies Centre, 2015. <http://ussc.edu.au/ussc/assets/media/docs/publications/Emerging-Asia-Reports/MacArthur-Indonesia-ONLINE.pdf>.

- Liow, Joseph Chinyong. "Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies and Obstacles Ahead." July 28, 2016. Accessed November 10, 2016. <https://www.brookings.edu/articles/indonesia-as-a-maritime-power-jokowis-vision-strategies-and-obstacles-ahead/>.
- Marboen, Ade. "Joko Widodo: Jalesveva Jayamahe." *Antara News* (Google+), October 20, 2014. <http://www.antaraneews.com/berita/459658/joko-widodo-jalesveva-jayamahe>.
- Parameswaran, Prashanth. "China and Indonesia Under Jokowi: Show Me The Money." Accessed November 14, 2016. <http://thedi diplomat.com/2015/01/china-and-indonesia-under-jokowi-show-me-the-money/>.
- Parameswaran, Prashanth and The Diplomat. "What's Behind Indonesia's South China Sea Rhetoric Amid US-China Tensions?" October 30, 2015. Accessed November 14, 2016. <http://thedi diplomat.com/2015/10/whats-behind-indonesias-south-china-sea-rhetoric-amid-us-china-tensions/>.
- . "Will Indonesia's South China Sea Policy Change Amid China's Assertiveness?" March 24, 2016. Accessed November 14, 2016. <http://thedi diplomat.com/2016/03/will-indonesias-south-china-sea-policy-change-amid-chinas-assertiveness/>.
- Quirk, Sean, John Bradford, and The Diplomat. "The 'global maritime fulcrum' and the US-Indonesia Partnership." October 27, 2015. Accessed November 15, 2016. <http://thedi diplomat.com/2015/10/how-the-global-maritime-fulcrum-can-elevate-the-us-indonesia-partnership/>.
- Rosen, Mark E and The Diplomat. "After the South China Sea Arbitration." June 21, 2016. Accessed November 2, 2016. <http://thedi diplomat.com/2016/06/after-the-south-china-sea-arbitration/>.
- Salna, Karlis. "Indonesia to Sink 71 Foreign Fishing Boats Amid South China Sea Tensions." (Bloomberg), August 15, 2016. <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-15/indonesia-to-destroy-71-boats-in-display-of-maritime-sovereignty>.
- Tiezzi, Shannon. "China's 'new silk road' Vision Revealed." May 9, 2014. Accessed November 10, 2016. <http://thedi diplomat.com/2014/05/chinas-new-silk-road-vision-revealed/>.
- Wardah, Fathiyah. "Penanganan Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Perlu Serius Dan Menyeluruh." December 26, 2014. Accessed November 15, 2016. <http://www.voaindonesia.com/a/penanganan-pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-perlu-serius-dan-menyeluruh/2574278.html>.

- Wijaya, Indra. "Indonesia to Build Military Base in Natuna." 2012. Accessed November 10, 2016. <http://en.tempo.co/read/news/2014/09/10/055605767/Indonesia-to-Build-Military-Base-in-Natuna>.
- Worldfolio, The. "Implementing the Indonesian Vision." September 20, 2016. Accessed November 15, 2016. <http://www.theworldfolio.com/interviews/implementing-the-indonesian-vision/3453/>.
- "Indonesia." Accessed November 2, 2016. <http://www.nationsencyclopedia.com/geography/Indonesia-to-Mongolia/Indonesia.html>.
- "Visi Misi Jokowi - JK." May 20, 2014. Accessed November 14, 2016. <http://webcache.googleusercontent.com/>.
- Event Report Institute of Defence and Strategic Studies INDONESIA'S GLOBAL MARITIME FULCRUM CHALLENGES AND TRAJECTORIES. RSIS, 2015. https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/07/ER160714_Global-Maritime-Fulcrum.pdf.
- Info Singkat VI 24 II P3DI Desember 2014 28. n.p., 2014. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf.

Jatuhnya Harga Minyak Dunia dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomatik Saudi Arabia-Amerika Serikat.

Tia Mariatul Kibtiah

Universitas Bina Nusantara

Abstrak

Jatuhnya harga minyak dunia yang dimulai di penghujung Tahun 2015, berimbas pada perekonomian beberapa negara produsen minyak terbesar dunia, yakni Venezuela, Nigeria, Rusia, Irak, termasuk Saudi Arabia. Untuk mengatasi defisit, pemerintah Saudi melakukan berbagai langkah cepat, diantaranya, pemotongan anggaran pada sektor publik yaitu memangkas pemberian subsidi listrik dan air bersih. Ada beberapa penyebab turunnya harga minyak dunia, yakni membanjirnya shale gas dari Amerika Serikat ke seluruh market dunia, kenaikan dollar AS, Iran membanjiri dunia dengan minyak. Amerika kini tengah menjalin kedekatan dengan Iran yang *notabene* merupakan "musuh bebuyutan" Saudi Arabia. Sejumlah kerjasama dimulai dengan persetujuan Washington atas nuklir Iran pada 14 Juli 2015 di Wina Austria. Kesepakatan itu telah memberi konsensi pada Iran untuk mengembangkan nuklirnya dengan alasan demi kepentingan masyarakat Iran. Ketidakharmonisan juga terlihat saat Raja Salman menolak undangan Presiden Obama di tempat istirahat kepresidenan Amerika Serikat Camp David, saat pertemuan negara-negara Teluk pada Tahun 2015 lalu.

Kata kunci

Amerika Serikat, Saudi Arabia, Minyak, Hubungan Diplomatik

Latar Belakang

Masalah minyak di Timur Tengah selalu menjadi pembahasan yang menarik. Negara di seluruh dunia membutuhkan minyak dan sumber energi tersebut berada di wilayah Timur Tengah. Persoalan politik dan ekonomi di kawasan ini tidak bisa dipisahkan (MacQueen, 2013). Dengan adanya sumber daya alam yang dibutuhkan orang banyak, Timur Tengah terutama negara-negara Teluk, terus berkembang menjadi wilayah yang pertumbuhan ekonominya sangat baik, yakni; Saudi Arabia, Uni mirat Arab, Oman, Qatar, Bahrain dan Kuwait. Mereka terhimpun dalam beberapa organisasi

perdagangan internasional dan pengekspor minyak. Seperti OPEC, APEC, OAPEC, G20, G8, GCI, Liga Arab dan lain-lain. Negara-negara ini memiliki *bargain position* dengan negara lain karena minyak yang mereka miliki. Minyak juga menjadi *external power* dalam ekonomi global. Benjamin Mac Queen dari Monash University menyebutnya sebagai "politik minyak". Secara langsung atau tidak langsung, minyak menjadi elemen terpenting bagi Kawasan Timur Tengah dalam menjalankan kebijakan luar negerinya (MacQueen, 2013). GDP (Gross Domestic Product) per kapita Qatar mencapai 102.700 dollar AS, Uni Emirat Arab mencapai 48.500 dollar AS, Bahrain mencapai 27.300, Kuwait mencapai 40.700 dollar AS, dan Saudi Arabia mencapai 24.000 dollar AS. Dengan angka-angka tersebut, pertumbuhan ekonomi negara-negara penghasil minyak ini sangat baik (MacQueen, 2013).

Namun tidak semua negara-negara di Timur Tengah kaya akan minyak. Ada beberapa negara yang tertinggal perekonomiannya seperti Yaman, karena bukan wilayah penghasil minyak. Bahkan Yaman masuk pada salah satu negara termiskin di dunia. Yaman, konsentrasi di bidang pertanian. Namun angka kemiskinan negara ini kian bertambah ketika dilanda perang saudara. Ada pula negara-negara yang menjadi *service sector* seperti Israel, Turki, Tunisia. Mereka tidak mengandalkan sumberdaya alam minyak dalam mengembangkan ekonominya. Menjadi distributor komoditi pangan, bergerak di bidang ekspor-impor menjadi pilihan negara-negara bukan penghasil minyak ini. Israel misalnya, menekankan pada sektor pariwisata sebagai salah satu andalan pemasukan negara. Ketiga negara ini (Turki, Israel, Tunisia-red), mengembangkan perekonomiannya dengan menekan laju inflasi serta konsentrasi dalam pemberantasan korupsi. Alhasil, perekonomian negara-negara ini tumbuh stabil meski harga minyak turun saat ini (MacQueen, 2013).

Negara yang paling terkena imbas dari turunnya harga minyak adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia dikenal sebagai produsen minyak terbesar dunia. Dengan minyak, Saudi bisa mengendalikan politik dunia bahkan politik Amerika Serikat. Minyak ditemukan pertama kali di Saudi Arabia Pada Tahun 1923. Presiden Direktur SOCAL (Standar Oil of California) Ernest Thompson menemukan sumber minyak di daerah Dammam. Pada Tahun 1932, SOCAL melaporkan penemuannya kepada pemerintah Amerika Serikat. Namun tidak direspon dengan baik. Sementara pihak Saudi belum mengetahui bahwa di wilayahnya terdapat sumber minyak yang besar ([www. state gov](http://www.state.gov)). Baru Tahun 1933 ARAMCO (Arabian Oil Company) didirikan. Tahun 1940-an, keuntungan ARAMCO terus naik dengan pesat. Namun kepemilikan saham masih berbagi dengan pihak Amerika Serikat atau sekitar 50 persen-50 persen. Pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz Ibn Saud, *Agreement* baru ditandatangani.

Tahun 1980, Saudi memiliki hak penuh atas ARAMCO (Sihbudi, 2007). Kekuatan minyak Saudi terus kian membesar. Seiring itu pula hubungan diplomatik Saudi-Amerika Serikat makin membaik. Tahun 2010, ARAMCO memperoleh keuntungan dari minyak sekitar 182 miliar dolar, dengan total keuntungan seluruh perusahaan mencapai 800 miliar dollar AS. Ini menunjukkan betapa besarnya ARAMCO. Menurut Majalah FORBES, perusahaan minyak milik Saudi ini merupakan 20 perusahaan terbesar dunia Tahun 2012. Termasuk didalamnya Exxon Mobile, Royal Dutch Shell, PetroChina, Petrobras, Chevron, Gazprom, TOTAL, BNP Paribas, dan ConocoPhillips.

Fluktuasi Harga Minyak Pasca Perang Arab-Israel

Namun tak selamanya harga minyak dunia melejit dan membuat negara Saudi kaya raya. Ada masanya harga minyak turun. Hal tersebut terjadi pada bulan Oktober Tahun 1973. Ini disebabkan karena negara-negara Arab penghasil minyak yang tergabung dalam OAPEC (The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries), yang terlibat perang dengan Israel mengembargo minyak yang diekspor ke Amerika Serikat (MacQueen, 2013). Harga minyak saat itu mencapai 1,67 dollar AS per barel. Sebagian sumber mengatakan, Tahun 1970 ketika perang Arab-Israel terjadi, harga minyak dunia berada di kisaran 2 dollar AS per barel. Harga kecil itulah yang mendorong negara-negara produsen minyak melakukan nasionalisasi atas perusahaan minyak asing di negara masing-masing. Embargo yang dilakukan negara-negara Arab penghasil minyak menyebabkan harga minyak naik menjadi 12 dollar AS per barel. Harga minyak dunia semakin naik tajam ketika terjadi Revolusi Iran Tahun 1979 sampai 1985 yang diikuti perang Irak-Iran. Minyak mencapai 38 dollar AS per barel atau sekitar 100 dollar AS per barel untuk *realnya* sekarang. Hasil riset Maiza Rahman, dari 216 korporasi, negara-negara industri mampu menghemat biaya produksi serta mencari sumber-sumber minyak di kawasan lain. Dengan demikian, produksi minyak mereka dikurangi dan membanjirnya minyak dari negara-negara non OPEC Tahun 1986. Minyak kembali jatuh ke harga 10 dollar AS per barel. Dari tahun 1986 hingga Tahun 2000, karena melimpahnya ketersediaan minyak, maka harga minyak berada di kisaran 18 dollar AS per barel. Mulai Tahun 2003, harga mulai menanjak 41,5 dollar AS per barel. Tahun 2005 mencapai 56,6 dollar AS per barel, Tahun 2006 mencapai 66 dollar AS per barel, Tahun 2007 mencapai 72,2 dollar AS per barel. Kenaikan tersebut dipicu oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang diikuti meningkatnya permintaan, pasokan ketat, bencana alam, gangguan fasilitas di atas rantai pasokan, pelemahan nilai dollar, yang semuanya

mendorong aktivitas di pasar berjangka. Tahun 2007-2008, Amerika Serikat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi akibat krisis perumahan hingga melemahnya dollar AS. Harga minyak mengangkasa hingga 147 dollar AS per barel. Krisis tersebut merambah ke krisis perekonomian dunia. Konsumsi minyak menjadi turun sehingga terjun kembali ke level 50 dollar AS per barel ada November, 2008. (<http://litbang.esdm.go.id/images/stories/buku/2/bab4.pdf>)

Dari fluktuasi harga minyak tersebut, Amerika Serikat mulai fokus dengan isu dan kebijakan politik Timur Tengah terutama dengan Saudi Arabia. Hubungan baik yang dimulai era Presiden Amerika Serikat Nixon ini terus berlanjut hingga George Walker Bush. Dengan hubungan diplomatik yang hangat ini, harga minyak Saudi Arabia menjadi stabil (MacQueen, 2013). Amerika Serikat terus membina hubungan baik dengan negara-negara produsen minyak di Jazirah Arab terutama Saudi Arabia. Area ini didominasi penuh oleh Amerika Serikat, mulai dari organisasi internasional, ekonomi dan militer. Misalnya, dari total 25 miliar dollar AS, sekitar sepertiga telah diterima kawasan ini. Pada masa Obama bahkan masuk pada anggaran *human security* dalam kebijakan luar negerinya (MacQueen, 2013).

Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Saudi Arabia

Hubungan diplomatik Amerika Serikat-Saudi Arabia dimulai pada Tahun 1930-an dimana Amerika Serikat mengakui kerajaan Saudi sebagai negara yang berdaulat pasca memberontak dari pemerintahan Ottoman Empire. Kemudian berlanjut dengan ditemukannya kilang minyak di Saudi Arabia tepatnya di daerah Damam. Nasionalisasi kilang minyak baru dilakukan pihak pemerintah Saudi pada Tahun 1988 dan resmi *Arabian Oil Company* (ARAMCO) yang semula berbagi dengan pihak Amerika, menjadi milik pemerintah Saudi (www.state.gov). Selain di bidang minyak, hubungan diplomatik Saudi juga dipererat dengan hubungan militer. Pada masa Presiden Franklin D Roosevelt, kedua negara ini resmi menyatakan diri memiliki hubungan yang kuat di bidang militer. Roosevelt menyatakan bahwa keamanan Kerajaan Saudi Arabia sangat vital bagi Amerika Serikat. Amerika akan melindungi kedaulatan Kerajaan Saudi Arabia. Hubungan ini kian erat dengan terjadinya Revolusi Iran Tahun 1979. Shah Reza Pahlevi pemimpin Iran yang merupakan sahabat dekat dan koalisi Amerika Serikat, digulingkan pemimpin Revolusi Ayatollah Khomeini. Saudi Arabia dan Amerika Serikat bekerjasama menyerang Iran untuk menghentikan langkah Revolusi Khomeini. Keduanya harus menerima kemenangan Khomeini menurunkan rezim Pahlevi. Hubungan keduanya baru terganggu saat invasi Irak dibawah pemerintahan Saddam Hussein ke Kuwait Tahun 1990. Saudi merasa khawatir dengan ambisi Saddam

untuk memperluas wilayah hingga ke kerajaannya. Sementara saat itu, Saddam merupakan koalisi Amerika Serikat juga dalam berbagai sektor termasuk minyak. Namun itu tidak berlangsung lama. Amerika Serikat menepati janjinya untuk menjadi garda terdepan melindungi Saudi Arabia dari rongrongan negara-negara sekitarnya termasuk dari ambisi Saddam. Tentara Amerika Serikat dibawah George W Bush mengirimkan 400 ribu tentara ke Kuwait untuk melindungi Kuwait yang menjadi koalisi permanen Saudi dan letak negaranya yang berdekatan dengan Saudi. Sejak peristiwa tersebut, hubungan diplomatik Saudi-Amerika Serikat tidak mengalami kendala. Mereka bekerja sama dalam semua bidang terutama ekonomi dalam hal ini aliran minyak Saudi ke Amerika dan Eropa.

Kejadian 11 September Tahun 2001 yang menghancurkan Gedung WTC (World Trade Center) sebagai simbol kekuatan ekonomi Amerika yang melibatkan beberapa warga negara Saudi, membuat hubungan keduanya mulai terusik kembali. Menurut laporan tim *Commission Report*, pelaku adalah Osama bin Laden pemimpin al-Qaeda yang memiliki jaringan teroris dunia. Keluarga korban meminta diusut tuntas keterlibatan Saudi dalam serangan tersebut. Keterlibatan Saudi dalam serangan 11 September tersimpan dalam sebuah dokumen setebal 28 halaman yang berisi jaringan warga Saudi yang hidup di Amerika Serikat dan kemungkinan memantau melancarkan aksi 11 September tersebut. Pada masa pemerintahan George W Bush, dokumen itu tersimpan rapat-rapat. Bush menilai, dokumen itu menyangkut keamanan nasional Amerika Serikat. Menurut dokumen itu, ada hubungan antara Khaled al-Muhdar dan Nawaf al-Hazami, dua orang pelaku penyanderaan pesawat dengan dua orang pejabat Saudi yang salah satunya memiliki hubungan dengan duta besar Saudi Arabia di Amerika Serikat (abcnews.go.com). FBI dan CIA melakukan investigasi dan membantah adanya hubungan pemerintah Saudi dengan pelaku teroris WTC. Pada masa akhir jabatannya, Obama menyampaikan masalah itu ke publik dan menjadi perbincangan hangat di kongres Amerika Serikat. Dokumen itu tidak pernah terpublish sampai sekarang, namun masyarakat Amerika Serikat sadar bahwa Saudi ikut berperan atas kejadian WTC. (The 9/11 Commission Report, Avalon.law.yale.edu)

Kejadian tersebut tidak menyebabkan hubungan diplomatik kedua negara hancur. Minyak menjadi perekat tak mudah pupusnya hubungan Saudi-Amerika Serikat. Saudi Arabia akhirnya bebas dari dakwaan karena mengancam investasinya di Amerika sebesar 9.800 Triliun akan ditarik jika RUU keluarga korban untuk mengajukan tuntutan kepada Kerajaan Saudi dibuka di Kongres Amerika Serikat (The 9/11 Commission Report,

Avalon.law.yale.edu). Seorang hakim bernama George Daniels menyatakan Saudi Arabia tidak terlibat atas kejadian runtuhnya Gedung WTC di New York Amerika Serikat karena tidak cukup bukti. Keterangan dari seorang tahanan Amerika Serikat bernama Zacarias Moussaoui bahwa seorang pangeran Saudi Arabia membantu pendanaan serangan tersebut, tidak dianggap valid. Kerjasama bilateral terus dilanjutkan. Amerika tetap menjadi sekutu Saudi Arabia dalam politik global termasuk konflik Suriah dan Yaman. Keduanya menghalau kekuatan Rusia dan Iran yang *pro* terhadap Bashar al-Assad. Meski dalam pidatonya akan memerangi ISIS, namun Obama secara implisit memberikan dukungan atas peran Saudi di Suriah dan Yaman. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri pertemuan GCC (Gulf Cooperation Council).

“Since I took office, we’ve intensified our security cooperation with our Gulf Cooperation Council partners-Saudi Arabia, The United Arab Emirates, Kuwait, Oman, Qatar and Bahrain. At a time extraordinary challenges across the Middle east-including conflicts that have caused untold human suffering-the united states and our GCC partners cooperate extensively, countering terrorist groups like al-Qaeda and now ISIL; opposing the Assad regime’s war against the Syrian people; supporting the legitimate government of Yemen; and opposing Iran’s destabilizing actions across the Middle east. I invited our GCC partners here today to deepen our cooperation and to work together to resolve conflict across the region,”. (www.whitehouse.gov)

Hubungan kembali tegang dengan adanya kesepakatan nuklir Iran. Saudi Arabia yang tidak memiliki hubungan baik dengan Iran kecewa atas disetujuinya kesepakatan nuklir Iran oleh Amerika Serikat. Ada beberapa *point* dari kesepakatan nuklir tersebut yang membuat Saudi kecewa diantaranya pencabutan embargo ekonomi Iran. Dengan pencabutan tersebut, Saudi melihat hal ini akan menjadi ancaman untuk Kawasan Timur Tengah. Iran akan leluasa memainkan perannya di Timur Tengah termasuk mendukung kelompok Houthi di Yaman dan Assad di Suriah. Namun *deal* tersebut tidak membatalkan keputusan Amerika Serikat yang dihadiri juga oleh negara-negara P5+1 yang terdiri dari Prancis, Cina, Rusia, Inggris, Amerika Serikat dan Jerman di Vienna, Austria Tahun 2015. Saudi memainkan harga minyak sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan nuklir Iran. Saudi menahan *supply* sehingga terjadi kenaikan harga. Dengan ditahannya produksi minyak, maka minyak mentah akan langka di pasaran. Berdasarkan hukum ekonomi, suatu barang langka di pasar maka harga akan melambung tinggi. Efek dari harga yang melambung tinggi, maka akan berpengaruh juga pada harga kebutuhan pangan masyarakat. Harga minyak dunia akan berpengaruh dengan besarnya biaya

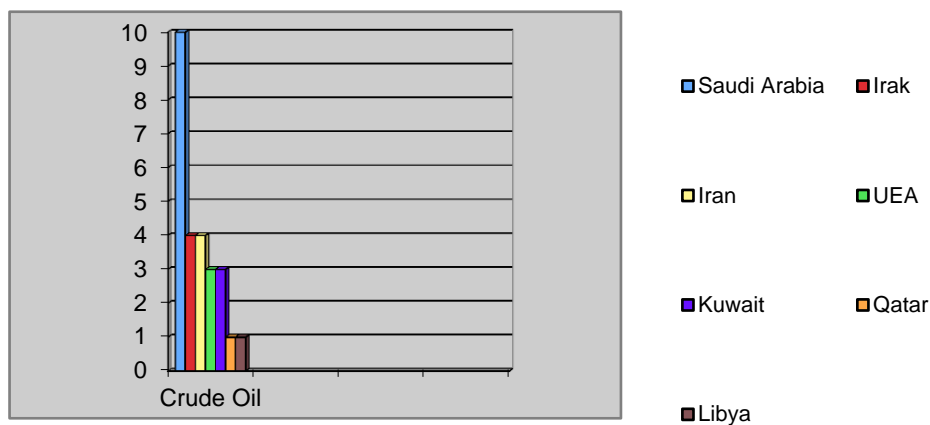
transportasi, harga barang dan jasa dan ketersediaan beberapa produk seperti bahan makanan, air dan kebutuhan lainnya. Jika harga minyak terlalu tinggi, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan sehingga dapat terjadi inflasi. Ini yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara jatuh. Namun jika harga minyak terlalu rendah, akan terjadi pemborosan pada penggunaan minyak. Investor tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada industri perminyakan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada negara produsen minyak seperti negara-negara anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Selain kekhawatiran negara-negara anggota OPEC, jatuhnya harga minyak juga dapat berpengaruh terhadap lajunya perekonomian Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat terus melakukan intervensi terhadap negara-negara produsen minyak seperti Irak, Iran, negara-negara Teluk termasuk Saudi Arabia. Amerika sangat khawatir jika kontrol minyak jatuh ke tangan pihak anti Barat karena ketergantungan Barat khususnya Amerika pada minyak impor. Maka dilakukanlah berbagai skenario konflik di Timur Tengah termasuk penggulingan Saddam Hussein sebagai presiden Irak. Selama ini produksi minyak Irak telah terganggu karena terbatasnya investasi dan kondisi politik domestik Irak. Ketika ditanya mengapa pihak Amerika Serikat melancarkan serangan ke Irak pada Perang Teluk 1991, Menteri Luar Negeri AS saat itu James Baker mengatakan, karena pekerjaan. Menurut Baker, penciptaan kesempatan lapangan pekerjaan yang ada akan anjlok jika Saddam sepenuhnya mengontrol suplai minyak dari teluk Parsi atau Saddam bertindak sesuai keinginannya dalam mengontrol harga minyak. Pada April 2003, ada pertemuan antara para eksekutif perusahaan minyak Amerika Serikat dengan Dick Cheney dengan para pejabat Departemen Luar Negeri Amerika. Topik yang dibahas mengenai penataan industri minyak Irak pasca-Saddam. Saat itu, kubu garis keras yang dimotori Cheney dan Rumsfeld menghendaki kontrol penuh AS atas minyak Irak yang ditolak kubu Menteri Luar Negeri Amerika Collin Powell (Sihbudi, 2007). Ini sebagai bukti, betapa Amerika Serikat sangat berkepentingan atas kawasan Timur Tengah. Satu persatu negara-negara penghasil minyak dapat dikuasai. Jika tidak dapat dikuasai, maka Amerika akan melakukan intervensi politik terhadap negara tersebut termasuk pada Saudi Arabia.

Kekuatan Minyak Saudi Arabia

OPEC adalah organisasi yang menghimpun negara-negara penghasil minyak. Selama ini OPEC berusaha menjaga harga minyak tetap stabil; tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah karena jika tidak stabil, akan merugikan negara-negara anggota OPEC. Meski demikian, Saudi Arabia paling signifikan

memiliki pengaruh dalam memainkan harga minyak. Saudi merupakan negara produsen minyak terbesar dunia. Saat ini berdasarkan data perdagangan Saudi dari Tahun 1973-2016, negara monarki ini berhasil memproduksi minyak mentah sekitar 10625.00 pada 2016. Pemerintah Saudi Arabia menyatakan bahwa negaranya mampu memproduksi minyak mentah hingga 12,5 juta barel per hari. Namun data ini tidak sepenuhnya benar. Berbagai spekulasi bisa terjadi dalam data minyak Saudi Arabia yang dikenal kerahasiaannya. Alasannya, jika Saudi sudah mendekati limit produksinya, maka Saudi akan memiliki kesempatan untuk merespon gejolak pasokan yang disebabkan geo politik atau bencana alam global. (<http://id.tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production>)

Grafik Crude Oil (Minyak Mentah) di Timur Tengah



Pesaing Saudi Arabia di Timur Tengah dalam produksi minyak mentah adalah Iran. Iran dapat memproduksi minyak mentah di level tertinggi hingga 6677.00 data terakhir dari website *tradingeconomics*, Iran mampu memproduksi minyak mentah hingga 3920.00. Direktur Eksekutif Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC), Ali Kardor menyatakan bahwa Iran pada 2016 ini akan terus meningkatkan produksi minyak mentahnya hingga 4 juta barel per hari. Presiden Iran Hasan Rouhani langsung memantau produksi minyak Iran di Yadavaran termasuk perkembangan produksi minyak di Utara Azadegan dengan kapasitas produksi 75 barel per hari. Iran akan terus kembali merebut kuota produksi minyak di OPEC pasca kesepakatan nuklir yang selama ini didominasi Saudi Arabia. (<http://theiranproject.com/blog/2016/11/13/photos-pres-rouhani-unveils-three-oil-projects>). Produksi minyak Iran juga semakin kuat dengan dukungan investasi dan kerjasama dengan Cina. Sejak 2004, Iran-Cina menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) untuk pengembangan

ladang minyak Iran di Yadavaran dengan pihak perusahaan minyak milik Cina, Sinopec. Iran mengekspor minyak sebesar 180 ribu barel per hari ke Cina untuk men-support ekonomi Cina (Kusuma, 2008).

Interdependensi Theory

Kerjasama Amerika Serikat-Saudi Arabia selalu menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Kedua negara ini mengalami pasang surut dalam hubungan bilateralnya. Namun setiap masalah dari mulai konflik Timur Tengah hingga jatuhnya Gedung WTC, tidak membuat kedua negara ini bermusuhan. Ada perekat yang tak bisa dipisahkan yakni tersedianya minyak mentah di Kawasan Saudi Arabia. Maka penelitian ini akan dibahas menggunakan teori interdependensi yang sudah banyak digunakan para peneliti. Teori ini lahir dari kaum liberalis seperti Immanuel Kant, Adam Smith, John Stuart Mill, John Hobson, Woodrow Wilson dan John Maynard Keynes yang melihat antara negara selalu ada interaksi ekonomi, sosial, budaya. (Moravcsik Andrew, 1997; 2003). Kemudian teori ini dikukuhkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye serta dipopulerkan oleh Richard N Cooper. Keohane dan Nye menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional tidak terlepas dari kepentingan nasional setiap negara. Masing-masing tidak ada yang seimbang dalam ketergantungan satu sama lain. Amerika tidak bisa dikatakan lebih bergantung pada Saudi atau sebaliknya Saudi lebih bergantung pada Amerika. Ini disebabkan oleh pengaruh politik global.

Interaksi tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Teori interdependensi sering digunakan para peneliti untuk mengkaji hubungan antar negara atau *region*. Dengan adanya saling ketergantungan antar negara, maka konflik bisa diminimalisir. Selama rentang waktu tahun 30-an hingga sekarang, Amerika Serikat-Saudi Arabia nyaris tidak ada konflik bersenjata. Hal ini disebabkan karena adanya ketergantungan yang kuat diantara mereka. Amerika Serikat tergantung dengan minyak Saudi dalam memperkuat ekonomi serta militernya, Saudi tergantung dengan posisi Amerika sebagai negara *super power* yang memiliki kekuatan militer besar untuk melindungi Saudi dari segala ancaman non sekutu Saudi di Timur Tengah terutama Iran. Kondisi renggang hanya terjadi ketika Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama menyetujui kesepakatan nuklir Iran. Namun hal itu bisa dinetralisir dengan jumlah investasi Saudi Arabia di Amerika Serikat yang mencapai triliunan dollar AS. Meski pada akhirnya, Saudi menarik jumlah investasi mereka dalam bentuk saham, obligasi, modal usaha, *real estate* dan lain-lain. Mereka menarik investasi tersebut dengan alasan khawatir dibekukan karena permintaan dari aliran garis keras di Amerika Serikat. Aliran garis keras di Amerika bahkan

menuntut kompensasi kerugian untuk peristiwa WTC 9/11 sebesar 100 triliun dollar AS. Saudi memindahkan sejumlah investasi mereka ke sistem keuangan Eropa. Kepala Financial Advisors Bakheet (perusahaan konsultan berbasis di Riyadh) mengatakan, ia percaya penarikan dana tersebut terjadi meski sulit mengidentifikasi repatriasi modal. Namun setelah reda peristiwa WTC 9/11, hubungan Saudi-Amerika kembali membaik. Hal itu tetap tidak menyebabkan konflik berkepanjangan apalagi perang. Interdependensi (saling ketergantungan) antara Saudi-Amerika sudah sangat *massive*. Faktor kekecewaan pada satu sektor tak membuat kedua negara ini berperang. (money.cnn.com)

Turunnya Harga Minyak tak Memicu Konflik

Banyak persoalan yang dihadapi Saudi-Amerika namun tidak membuat hubungan kedua negara ini berakhir konflik. Faktor utama yang menyebabkan Saudi-Amerika menjalin koalisi permanen dalam tataran politik global adalah karena minyak Saudi Arabia dalam jumlah besar dan kuatnya militer Amerika Serikat. Turunnya harga minyak hanya memicu renggang tapi tidak akan menyebabkan konflik. Cadangan minyak Saudi sekitar 262 miliar barel atau sekitar seperempat (*one quarter*) cadangan minyak dunia dan sebesar 8,7 kalinya Saudi menjadi supplier minyak mentah untuk menopang perekonomian Amerika Serikat. Export minyak mentah Saudi ke Amerika Serikat per hari mencapai 9,1 barel pada tahun 2000. Jumlah tersebut terus naik seiring dengan pertumbuhan pembangunan di Amerika Serikat (Bandow, 2003)

Kerjasama di bidang militer antara Saudi dan Amerika nampak jelas pada Perang Teluk III disaat Saddam menyerang Kuwait (Lewis, 2012). Saddam mulai terus mendekat ke arah Selatan yakni perbatasan Saudi-Kuwait. Maka Tahun 1990, Bush menelepon Raja Fahd akan ancaman Irak terhadap Saudi dan meminta negara-negara Arab untuk mengecam serangan Saddam terhadap Kuwait. Amerikapun mengirimkan armada lautnya, menambah 5000 angkatan darat terdiri dari F.155, F.165, C.130s, KC.135s. Amerika juga mengirim 3000 personil militernya di Saudi Arabia untuk berjaga-jaga jika Irak melakukan invasi hingga ke Saudi Arabia (Bandow, 2003). Pada konflik di Yaman, Amerika juga turut membantu Saudi Arabia. Saudi yang mendukung pemerintah Yaman dari pemberontak Houthi mengirim jet tempur yang dipasok Amerika. Pentagon memberikan dukungan strategis pada Saudi dan mengirim penasihat militernya. Tidak hanya itu, Washington juga memberikan dukungan penuh pada Riyadh sehingga Saudi leluasa menyerang seluruh wilayah Yaman tanpa khawatir adanya kecaman dan sanksi internasional. (parstoday.com). Dukungan Saudi terhadap Yaman karena negara itu merupakan negara tetangga dengan perbatasan cukup panjang sebelah utara Yaman. Kondisi

Yaman yang tidak stabil menyebabkan Saudi ikut campur konflik internal Yaman. Saudi khawatir konflik Yaman mengganggu sistem monarkinya. (Cafiero Giorgio, Wagner Daniel, 2015).

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 yang diprediksi menjauhkan Amerika dengan Saudi, tidak akan terjadi. Dalam kampanyenya, Trump justru akan meninjau ulang kesepakatan nuklir Iran dan sanksi embargo terhadap Iran yang menjadi pesaing Saudi di Timur Tengah. Trump akan lebih fokus pada imigran ilegal, ekonomi Amerika, pendapatan pajak, dan melepas negara-negara yang selama ini diberi subsidi oleh Amerika. Kebijakan tersebut menggambarkan bahwa tak ada kaitannya kemenangan Trump yang rasis terhadap imigran muslim dari Syria dengan hubungan diplomatik Saudi-Amerika Serikat. (www.economy.com analysis by Zandi Maric, Lafakis Chris, White and Ozimek Adam, 2016).

Kesimpulan

Hubungan diplomatik Saudi Arabia-Amerika Serikat tidak akan menimbulkan konflik besar. Hal itu disebabkan karena Saudi memiliki seperempat cadangan minyak dunia. Saudi menjadi supplier minyak terbesar ke Amerika Serikat untuk menopang perekonomian Amerika. Sementara Amerika Serikat menjadi pelindung Saudi dengan kekuatan militernya dari ancaman negara-negara kuat lainnya di Timur Tengah terutama Iran setelah tumbangannya Saddam Husain. Ada beberapa hal yang membuat hubungan keduanya sempat terganggu seperti perang Arab-Israel, peristiwa WTC 9/11, kesepakatan nuklir Iran, turunnya harga minyak. Namun semua itu tak akan mengubah hubungan diplomatik keduanya selama cadangan minyak Saudi masih besar. Terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika, tidak berdampak pada hubungan Saudi-Amerika. Program kerja Trump pada 100 hari pertama langsung membidik imigran ilegal dan fokus pada ekonomi domestik Amerika. Jika hubungan dengan Saudi menguntungkan pihak Amerika, maka Trump justru akan mempererat kerjasama dengan Saudi Arabia.

Referensi

- MacQueen, B. (2013). *Middle East Politics*. (N. Aguilera, Ed.) London, London: SAGE Publications Inc.
- Reus-Smit, D. S. (2008). *The Oxford Handbook Of International Relations* (First ed.). (R. E. Godin, Ed.) New York, US: Oxford University Press.
- Lewis, B. (2012). *Reflections Of A Middle East Historian* (First ed.). New York, US: The Penguin Groups.

Silverstein, K. (2014). *The Secret World Of Oil* (First ed.). London, London: Verso.

Sihbudi, R. (2007). *Menyandera Timur Tengah* (First ed.). (T. MR, Ed.) Jakarta, Jakarta: Mizan Publika.

Kusuma, D. (2008). *China Mencari Minyak* (First ed.). (P. G. Natalia Soebagjo, Ed.) Jakarta, Jakarta: CCS FIB University of Indonesia.

Bandow, D. *The US Alliance With Saudi Arabia, CATO Handbook For Congress*.

Washington DC, US: CATO Institute.

Baxer Alex, Cafiero Giorgio. *GCC, Iran Look to Sea Trade to Reduce Dependence on Oil*. Middle East Institute, 2016.

Cafiero Giorgio, Wagner Daniel. *Saudi Arabia and al-Qaeda Unite in Yaman*. Foreign policy journal

Andrew Moravcsik. *Liberal Theory of Internatinal Politics*. Princeton University, 1997.

(<http://litbang.esdm.go.id/images/stories/buku/2/bab4.pdf>)

www.whitehouse.gov

(The 9/11 Commission Report, Avalon.law.yale.edu, *We Have Some Planes*)

(<http://theiranproject.com/blog/2016/11/13/photos-pres-rouhani-unveils-three-oil-projects>).

(abcnews.go.com)

www.state.gov

(www.economy.com analysis by Zandi Maric, Lafakis Chris, White and Ozimek Adam, 2016).

(parstoday.com).

www.foreignpolicy.com

(money.cnn.com)

Panel 4: Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN



Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi Asean

Achmad Zulfikar

Universitas Hasanuddin

apa@kabarfikar.com

Abstrak

Masyarakat ASEAN telah mulai berlaku sejak 31 Desember 2015 dengan tiga pilar yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Pekerja migran Indonesia/ tenaga kerja Indonesia (PMI/TKI) memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan penempatan PMI/TKI pada tahun 2011 sebanyak 586.802 orang, selanjutnya 494.609 orang (2012), 512.168 orang (2013), 429.872 orang (2014) dan 275.736 orang di tahun 2015. Statistik tersebut menunjukkan angka yang cukup signifikan. Fakta yang menarik dari migrasi pekerja Indonesia di kawasan Asia Tenggara yakni Malaysia menjadi negara penempatan dengan jumlah terbesar. Disusul Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. Keempat negara anggota ASEAN ini berada di antara 25 negara penempatan TKI/PMI dari sebaran 170 negara. Teori konvergensi menjadi kerangka teoretik yang digunakan dalam kajian ini. Metode yang digunakan yakni studi pustaka untuk menelusuri sumber-sumber informasi yang relevan dengan kajian ini. Kajian ini menyimpulkan bahwa TKI/PMI berpeluang untuk mengakses lapangan kerja yang telah disepakati bersama oleh negara anggota ASEAN melalui *Mutual Recognition Agreements* (MRA), namun demikian profesi yang telah disepakati MRAs masih membutuhkan dukungan untuk pengembangannya dari pemerintah Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan tantangan yang dihadapi yakni profil TKI/PMI yang masih didominasi oleh tenaga kerja informal, sehingga diperlukan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan minat sebagai tenaga kerja formal.

Kata Kunci:

Pekerja Migran Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Asia Tenggara

Pendahuluan

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang didirikan 8 Agustus 1967 dalam dokumen pendiriannya, *The ASEAN Declaration/The Bangkok Declaration* menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pertama didirikannya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kejayaan di kawasan guna memperkuat dasar bagi sebuah komunitas yang sejahtera dan damai di Asia Tenggara. Adapun maksud dan tujuan kedua untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ASEAN tersebut, sejak 31 Desember 2015 Indonesia bersama 9 negara anggota ASEAN lainnya yakni: Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja telah memasuki babak baru dalam kerangka ASEAN Community. Komunitas ini terdiri atas tiga pilar yakni: *ASEAN Political and Security Community (APSC)*/Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN, *ASEAN Economic Community (AEC)*/Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*/Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Indonesia saat ini telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Topik yang menarik untuk dikaji dari MEA yakni pasar tunggal ASEAN dan basis produksi yang terdiri atas lima elemen antara lain: (1) barang (*free flow of goods*), (2) jasa (*free flow of services*), (3) investasi (*free flow of investment*), (4) modal (*free flow of capital*) dan (5) tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*). Elemen yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini terkait tenaga kerja terampil. Sumber daya manusia merupakan kekuatan Indonesia dikarenakan negara ini memiliki jumlah penduduk terbesar di antara negara anggota ASEAN dan juga negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Sehingga Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengekspansi pasar tenaga kerja di ASEAN dengan pekerja migran Indonesia/tenaga kerja Indonesia (PMI/TKI) yang dimiliki.

Statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan penempatan PMI/TKI pada tahun 2011 sebanyak 586.802 orang, selanjutnya 494.609 orang (2012), 512.168 orang (2013), 429.872 orang (2014) dan 275.736 orang di tahun 2015. Statistik tersebut menunjukkan angka yang cukup signifikan. Fakta yang menarik dari migrasi pekerja Indonesia di kawasan Asia Tenggara yakni Malaysia menjadi negara penempatan dengan jumlah terbesar. Disusul Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. Keempat negara anggota ASEAN ini berada di antara 25 negara penempatan TKI/PMI dari sebaran 170 negara.

Beberapa kajian mengenai tenaga kerja di negara anggota ASEAN dan kaitannya dengan masyarakat ASEAN pernah dipublikasikan oleh Nguyen Huy Hoang (2013), Aniceto C. Orbeta, Jr (2013) dan Natenapha Wailerdsak (2013) dan Achmad Zulfikar (2015). Hoang dalam publikasinya menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN merupakan peluang bagi negara anggota CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam) dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar dapat berintegrasi dalam pasar tenaga kerja ASEAN. Selanjutnya, Orbeta Jr. dalam publikasinya menyatakan bahwa pergerakan pekerja tidak terampil dan semi terampil seyogyanya dapat diakomodasi dalam masyarakat ekonomi ASEAN agar penerapannya dapat lebih baik dengan didasarkan pada realita bahwa sektor agrikultur, manufaktur dan jasa didominasi oleh pekerja tidak terampil dan semi terampil yang mendominasi migrasi kerja di ASEAN.

Kemudian, Wailerdsak menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN menjadi salah satu motivasi pemerintah Thailand untuk meningkatkan investasi di luar negeri, khususnya negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan daya kompetisi dan menyelesaikan permasalahan kekurangan tenaga kerja. Sedangkan, Zulfikar menyatakan bahwa pemetaan posisi pekerja migran Indonesia menuju masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 masih mengkhawatirkan. Profesi yang ditekuni oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri hampir didominasi sektor informal yakni bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Apabila dikaitkan dengan MEA 2015, maka profesi ini tidak menjanjikan untuk mendongkrak daya tawar pekerja Indonesia dalam MEA 2015. Hal ini sekaligus menunjukkan ironi bahwa bangsa Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja terampil di ASEAN.

Nilai kebaruan (*novelty*) dari makalah ini yakni mengurai lebih lanjut mengenai peluang dan tantangan pekerja migran Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN setelah pemberlakuannya sejak 31 Desember 2015 atau tepat ketika memasuki awal tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya baik yang dilakukan oleh peneliti dari Viet Nam, Filipina dan Thailand bahkan kajian dari penulis pada publikasi sebelumnya masih melihat implikasi yang akan ditimbulkan jika MEA diberlakukan, sedangkan makalah ini memotret kondisi jelang satu tahun pemberlakuan MEA.

Kerangka Teoretik: Regionalisme

Di dalam studi Hubungan Internasional, Regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan studi kawasan (*area studies*). Bahkan dalam aplikasi analisis, istilah region (kawasan) dengan regionalisme seringkali tumpang tindih. Oleh karena itu, definisi tentang regionalism akan banyak

mengambil dari definisi-definisi yang berkembang dalam studi kawasan. Menurut Mansbaach dalam Nuraeni S dkk. (2010:1), region atau kawasan adalah "pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional". Lebih lanjut, Coulumbis dan Wolfe dalam Nuraeni S dkk. (2010:1-2) menyatakan ada empat kriteria untuk menunjuk sebuah kawasan yang ditentukan oleh tujuan analisis, salah satu yang terkait dengan ASEAN yakni kriteria geografis yakni mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti: Eropa dan Asia, termasuk Asia Tenggara.

Teori konvergensi (*convergence theory*) dikemukakan oleh Hurrel yang merupakan salah satu dari tiga cara bagaimana faktor-faktor domestik terkait dengan regionalisme kontemporer, selain regionalisme dan state coherence dan tipe rezim dan demokratisasi. Teori ini memahami dinamika kerjasama regional dan integrasi ekonomi dalam kerangka bertemunya atau bersatunya berbagai pilihan kebijakan domestik dari negara-negara. Menurut Hurrel dalam Nuraeni S dkk. (2010:62-63) teori konvergensi memang terlihat sangat menekankan pada permasalahan ekonomi dan kebijakan perekonomian suatu negara, namun kita dapat menggunakan teori ini pada tataran permasalahan yang lebih umum dalam regionalisme kontemporer.

Masyarakat ekonomi ASEAN bersama dua pilar lainnya merupakan kebijakan yang telah disepakati 10 negara anggota ASEAN. Kebijakan yang menjadi fokus dalam kajian ini yakni bidang ketenagakerjaan. Negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa potensi penyerapan tenaga kerja di antara negara-negara anggota ASEAN sangat tinggi. Utamanya, Indonesia sebagai anggota dengan luas wilayah terbesar diantara negara anggota ASEAN yang lain. Dalam konteks ketenagakerjaan, negara anggota ASEAN dapat dibagi ke dalam dua pihak yakni negara pengirim (*sending countries*) dan negarap penerima (*receiving countries*). Indonesia, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam merupakan negara pengirim, sedangkan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand merupakan negara penerima. Tetapi hal yang mempertemukan kepentingan negara-negara ini yakni mereka dapat memasuki pasar tenaga kerja satu sama lain sebagai satu kawasan. Teori ini akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan pekerja migran Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.

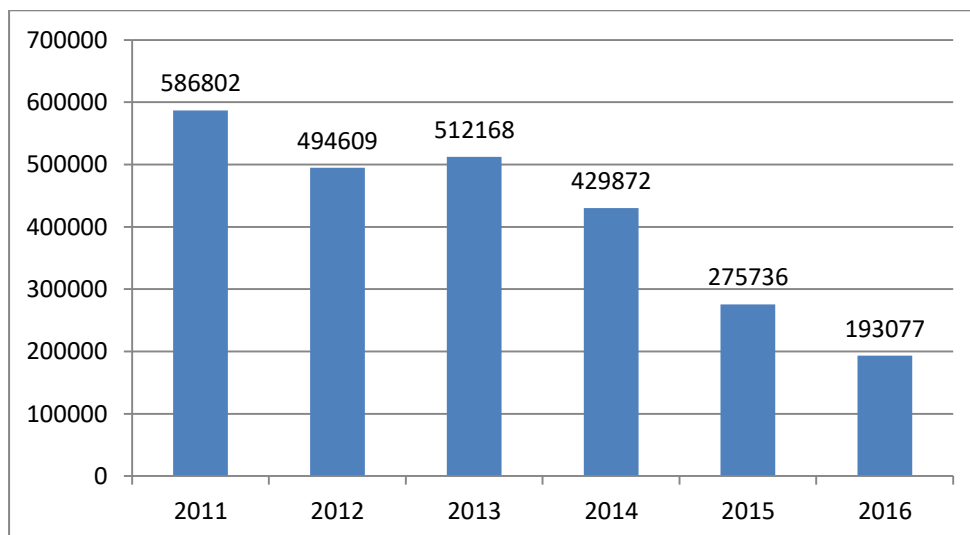
Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Pekerja Migran Indonesia di Negara Anggota ASEAN

Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. (Pasal 1 UU No. 39 Tahun 2004) Pasal 35 UU No. 39/2004 menjelaskan syarat-syarat TKI untuk bekerja di luar negeri, antara lain: (1) berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, kecuali bagi calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan/rumah tangga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun; (2) sehat jasmani dan rohani; (3) tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; (4) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP atau yang sederajat; (5) terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan di daerah tempat tinggalnya; (6) memiliki dokumen lengkap.

Penjelasan di atas secara jelas mendefinisikan bahwa pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia dengan kriteria: 1) memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, 2) hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan 3) menerima upah. Hal ini berlaku untuk PMI/TKI yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperangkat standar bagi pekerja migran Indonesia juga telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penyimpangan/pelanggaran atas standar tersebut dapat mengakibatkan pekerja migran Indonesia tidak dapat dipenuhi hak-haknya.

Grafik 1. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011-Okt. 2016



Sumber: Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Thn. 2016 (BNP2TKI)

Pekerja migran Indonesia seperti yang telah didefinisikan merupakan PMI/TKI yang legal dan telah melalui serangkaian prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Perekrutan TKI ini bisa difasilitasi oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)/Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). maupun Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Selain berperan sebagai fasilitator penempatan, BNP2TKI/BP3TKI juga mengawasi proses penempatan yang difasilitasi oleh PPTKIS.

Data di atas menunjukkan penempatan TKI dari tahun 2011 hingga 2016 mengalami penurunan signifikan. Walaupun pada tahun 2013 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya, yang terus berlanjut hingga Oktober 2016. Pekerja migran Indonesia tersebar di 150 negara berdasarkan 25 negara penempatan dengan jumlah TKI terbesar dipaparkan sebagai berikut:

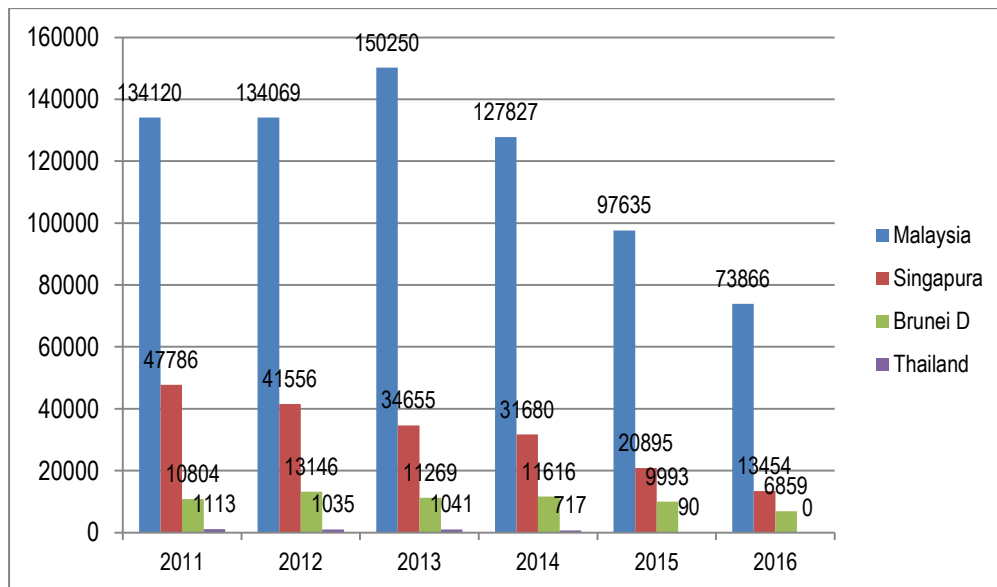
Tabel 1. Negara Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia (2011-Okt. 2016)

No.	Negara	Tahun					
		2011*	2012**	2013**	2014**	2015**	2016***
1.	Malaysia	134.120	134,069	150,250	127,827	97,635	73,866
2.	Taiwan	78.865	81,071	83,544	82,665	75,303	63,018
3.	Saudi Arabia	137.835	40,655	45,394	44,325	23,000	12,096
4.	Hongkong	50.301	45,478	41,769	35,050	15,322	11,755
5.	Singapura	47.786	41,556	34,655	31,680	20,895	13,454
6.	Uni Emirat Arab	39.917	35,888	44,505	17,962	7,619	2,273
7.	Qatar	16.616	20,380	16,237	7,862	2,460	1,119
8.	Korea Selatan	11.392	13,593	15,374	11,848	5,501	3,545
9.	Amerika Serikat	13.749	15,353	15,021	9,233	1,029	226
10.	Oman	7.306	10,719	10,719	10,719	6,766	864
11.	Brunei Darussalam	10.804	13,146	11,269	11,616	9,993	6,859
12.	Bahrain	4.379	6,328	5,384	5,472	2,570	110
13.	Jepang	2.508	3,293	3,042	2,428	468	-
14.	Italia	3.408	3,691	3,746	1,295	1,516	737
15.	Kuwait	2.723	2,518	2,534	1,714	210	788
16.	China	1.072	1,967	2,055	915	108	57
17.	Spanyol	1.484	1,746	1,417	889	268	91
18.	Turki	1.016	1,209	1,518	1,246	1,108	489
19.	Afrika Selatan	1.272	1,388	905	587	113	-
20.	Mauritius	478	982	1,017	838	144	-
21.	Thailand	1.113	1,035	1,041	717	90	-
22.	Belanda	592	798	1,176	796	52	-
23.	Kepulauan Fiji	556	970	848	902	246	-
24.	Australia	526	945	1,012	644	77	-
25.	Jerman	299	697	1,168	556	194	107
26.	Lainnya	59.059	17,017	16,568	11,664	3,049	1.623
Total		586.802	494,609	512,168	429,872	275,736	193,077

Sumber: Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun *2011-2013, **2015, ***Okt. 2016 (BNP2TKI)

Data di atas menunjukkan Malaysia merupakan negara tujuan dengan penempatan tertinggi setiap tahun selama 6 tahun terakhir (2011-2015). Di posisi berikutnya adalah Taiwan, Saudi Arabia, Hongkong dan Singapura di urutan kelima. Lebih lanjut, kondisi TKI di Negara Anggota ASEAN dipaparkan sebagai berikut:

Grafik 2. Kondisi TKI di Negara Anggota ASEAN



Sumber: Diolah oleh Penulis dari data BNP2TKI

Penempatan pekerja migran Indonesia/Tenaga kerja Indonesia (PMI/TKI) di negara-negara anggota ASEAN pada data Negara Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia menunjukkan hanya empat negara yang masuk dalam 25 besar negara penempatan yakni Malaysia (urutan 1), Singapura (urutan 5), Brunei Darussalam (urutan 11) dan Thailand (urutan 21). Data di atas lebih spesifik menunjukkan kondisi TKI di negara-negara tersebut. Jika diperhatikan secara seksama, penempatan TKI di Malaysia relatif stabil pada 2011 dan 2012, kemudian terjadi peningkatan pada 2013 dan penurunan kembali pada 2014. TKI pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga yang terjadi di Singapura dan Brunei Darussalam. Bahkan, penempatan TKI di Thailand sampai Oktober 2016 belum ada. Selanjutnya dipaparkan posisi/jabatan yang ditempati oleh TKI di negara penempatan, sebagai berikut:

Tabel 2. Jabatan TKI di Negara Penempatan Periode 2011-2015

No.	Jabatan	Tahun				
		2011*	2012**	2013**	2014**	2015**
1.	Dosmetic Worker	267.231	164.981	168.318	133.390	52.328
2.	Caregiver/Caretaker	48.492	52.565	48.188	49.069	44.941
3.	Plantation Worker	39.622	36.478	47.598	47.790	38.526
4.	Operator	40.847	40.347	46.799	38.836	35.187
5.	Deck Hand	-	12.283	11.249	10.410	1.166
6.	Lainnya	191.610	187.955	190.016	150.377	103.588
Total Keseluruhan		586.802	494,609	512,168	429,872	275,736

Sumber: Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun *2011-2013 & **2015 (BNP2TKI)

Data di atas menunjukkan 5 jabatan teratas yang ditempati oleh TKI di negara penempatan. Posisi pertama ditempati oleh TKI yang bekerja sebagai *domestic worker* / penata laksana rumah tangga, selanjutnya *caregiver/caretaker* di posisi kedua, posisi ketiga ditempati *plantation worker*, posisi keempat oleh *operator* dan posisi kelima ditempati *deck hand*. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri masih berada pada kategori tenaga kerja tidak terampil/berketerampilan rendah seperti *domestic worker*/penata laksana rumah tangga, *caregiver/caretaker* dan *plantation worker*. Maupun tenaga kerja semi-terampil pada posisi operator maupun *deck hand*.

Berdasarkan data di atas maka dapat dipahami bahwa kondisi pekerja migran Indonesia di negara anggota ASEAN menempatkan Malaysia sebagai negara penempatan dengan jumlah terbesar mencapai hampir seperempat dari jumlah penempatan TKI setiap tahunnya, diikuti Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. Sedangkan tenaga kerja yang ditempatkan juga masih berada pada kategori tidak terampil dan semi terampil.

2. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia terhadap Mutual Recognitions Agreements (MRAs)

Arus bebas tenaga kerja terampil ASEAN (*free flow of skilled labour*) merupakan poin kelima dari karakteristik pasar tunggal dan basis produksi sebagaimana telah disebutkan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015. Dalam cetak biru tersebut disebutkan bahwa penguatan melalui riset kapabilitas dari setiap negara anggota ASEAN untuk mempromosikan kemampuan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pengembangan pasar tenaga kerja berbasis jaringan informasi diantara negara

anggota ASEAN merupakan salah satu bagian penting dalam kesepakatan MEA 2015. (ASEAN, 2011:29-30)

Berdasarkan cetak biru tersebut, jadwal strategi untuk MEA 2015 khususnya arus bebas tenaga kerja terampil ASEAN di bagi ke dalam dua aksi prioritas yakni tahun 2008-2009 dan 2014-2015. Fase yang seharusnya sudah dilalui oleh negara anggota ASEAN dalam fase 2008-2009 dengan dua poin aksi yakni: (1) menyelesaikan *Mutual Recognition Agreements* (MRAs) untuk bidang jasa profesional utama, termasuk sektor jasa investasi tahun 2008, dan (2) mengembangkan kompetensi inti (mengacu kepada kemampuan dan kualifikasi) untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan terhadap prioritas sektor jasa tahun 2009. Sedangkan fase 2014-2015 dengan poin aksi untuk mengembangkan kompetensi inti (mengacu ke kemampuan dan kualifikasi) untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan terhadap seluruh sektor jasa tahun 2015. (ASEAN, 2011:54)

Paparan di atas memang tidak spesifik menyebutkan bidang prioritas yang disepakati oleh negara anggota ASEAN, dikarenakan cetak biru tersebut akan diturunkan lagi ke dalam kesepakatan yang bersifat teknis. Dikutip dari website Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap 8 profesi yang menjadi prioritas karena *Mutual Recognition Agreements* (MRA)-nya telah ditandatangani oleh negara anggota ASEAN. Delapan profesi prioritas yakni akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi dan pariwisata. (Kemenaker, 2014)

Sebagai tindaklanjut kesepakatan MRA ini, pemerintah pun terus berupaya untuk memperkuat kerjasama antara negara anggota ASEAN dalam menetapkan dan memperluas kerjasama implementasi MRA melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membangun pusat pelatihan kejuruan. Selain itu, disiapkan juga pelatihan dasar untuk kompetensi dan sistem sertifikasi, akselerasi standar kompetensi nasional, serta menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memperkuat sistem kerja sama dengan lembaga yang terkait. (Kemenaker, 2014)

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan sejumlah negara di kawasan ASEAN telah memiliki kerangka untuk mempromosikan pergerakan bebas tenaga kerja terampil. Tetapi, terdapat pula sebagian negara lain belum memiliki kerangka tersebut meliputi kualifikasi nasional penuh sekaligus penerapan sertifikasi tenaga kerja. Pelaksanaan MEA diakui Menaker dapat menimbulkan dampak negatif terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia jika

tenaga kerja kita tidak menyiapkan kompetensinya dengan baik. (Kemenaker, 2014) Dalam kesempatan lain, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan dibutuhkan soliditas kuat antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal itu dengan lebih meningkatkan sinergisitas program kegiatan ketenagakerjaan. (Pikiran Rakyat, 2016)

Penjelasan dari pemerintah seperti yang telah dipaparkan di atas memberikan penegasan bahwa baru delapan profesi prioritas yang disepakati oleh negara anggota ASEAN untuk diintegrasikan antara lain: akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi dan pariwisata. Namun tidak menutup kemungkinan ada lagi sektor yang bertambah seiring kesepakatan MRAs yang terus diupayakan oleh negara anggota ASEAN untuk disepakati. Selengkapnya kondisi setiap profesi yang telah disepakati dalam MRAs dipaparkan sebagai berikut:

Akuntansi

Jasa akuntansi merupakan salah satu sektor jasa yang penting untuk menegakkan regulasi terkait dengan keuangan. Kondisi akuntan di Indonesia pada 2013 menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tercatat 13.933 akuntan. Sementara di Singapura, asosiasi akuntan setempat mencatat 25.842 akuntan. Malaysia sebanyak 29.413 akuntan dan Thailand sebanyak 51.298 akuntan. Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) membutuhkan akuntan yang berkualifikasi dan profesional yang mampu mendukung aktivitas ekonomi. Indonesia perlu menghasilkan akuntan yang memiliki sertifikasi profesi berstandar internasional. Hal ini untuk mempertemukan antara penawaran dan pasar tenaga kerja. Lembaga jasa keuangan membutuhkan kolaborasi antara lembaga pendidikan profesional, pemerintah, asosiasi profesi dan swasta untuk meningkatkan minat angkatan kerja muda untuk menjadikan akuntan sebagai profesi yang menjanjikan.

Dalam hal sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas akuntan Indonesia memerlukan percepatan. Daya saing akuntan Indonesia tidak hanya pada tingkat kawasan ASEAN tetapi juga pada tingkat global. Hal yang penting untuk diperhatikan bahwa keunikan standar akuntan di Indonesia juga menjadi keunggulan bagi akuntan Indonesia. Hal yang juga perlu diperhatikan yakni kekurangan infrastruktur pendidikan, utamanya pendidikan profesional perlu mendapat perhatian melalui kebijakan pemerintah.

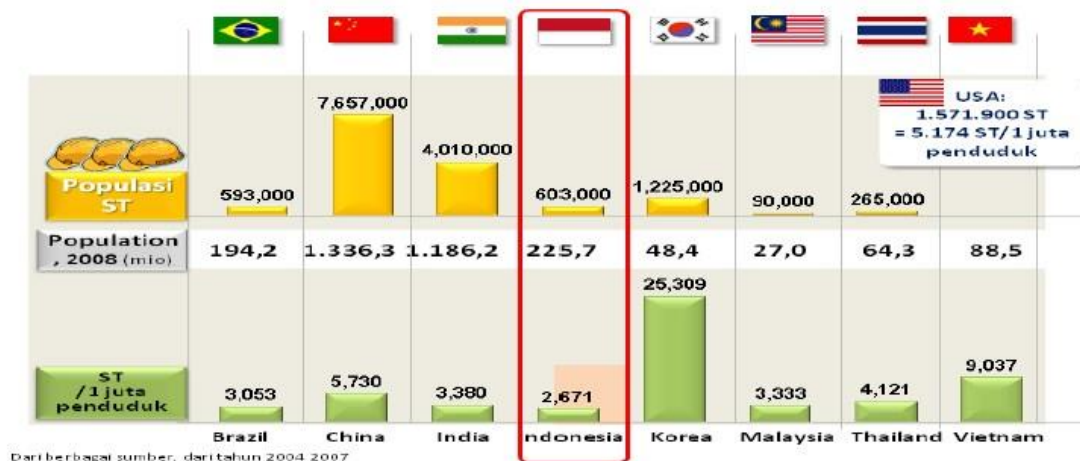
Teknik

Tujuan dari MRAs di sektor (jasa) teknik yakni memfasilitasi perdagangan dan aktivitas ekonomi yang simultan diantara para pihak melalui kompetensi sumber daya manusia yang memenuhi standar, kualifikasi,

sertifikasi dan lisensi. Dalam sektor teknik, MRAs ditujukan untuk memfasilitasi perpindahan jasa teknik profesional dan pertukaran informasi untuk mengadopsi praktik terbaik dalam standar. Di Indonesia teknik berdasarkan kurikulum yang diterapkan terbagi ke dalam 12 tipe antara lain: (1) Teknik Sipil, (2) Teknik Mesin, (3) Teknik Elektro, (4) Teknik Fisika, (6) Teknik Perminyakan, (6) Teknik Industri, (7) Geodesi, (8) Teknik Kelautan, (9) Teknik Kimia, (10) Teknik Lingkungan, (11) Teknik Pertambangan dan (12) Teknik Penerbangan.

Sementara jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN yang lain pembagian keteknikan di Indonesia sangat berbeda. Salah satu indikator dalam menentukan kondisi yang dihadapi insinyur di Indonesia adalah pemenuhan insinyur di dalam negeri untuk melihat pertumbuhan lulusan teknik yang dihasilkan setiap tahun di Indonesia. Data yang diperoleh dari Persatuan Insinyur Indonesia menyebutkan bahwa sarjana teknik di Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan Malaysia. Selengkapnya pada grafik berikut:

Grafik 3. Populasi Sarjana Teknik



Sumber: Persatuan Insinyur Indonesia (PII), 2013

Grafik di atas menunjukkan bahwa populasi sarjana teknik di Indonesia per 1 juta penduduk masih sangat kecil dibandingkan dengan Viet Nam, Malaysia dan Thailand. Indonesia masih kekurangan 1,2 juta insinyur. Padahal Indonesia idealnya memiliki 2 juta insinyur, sementara saat ini hanya memenuhi 600-700 ribu. Menurut PII, jika permintaan semakin meningkat dan pada tahun 2030 tidak ada perubahan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan yang cepat dari tingkat rekayasa untuk setiap tahun sekitar 15.000 kekurangan insinyur Indonesia akan diisi tenaga kerja asing.

Survei

Surveyor adalah warga negara dari negara-negara anggota ASEAN yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana di sebuah universitas atau

perguruan tinggi dalam program survei yang telah diakui oleh otoritas kompetensi. Kedua, survei profesional mengacu pada surveyor yang memiliki pengalaman atau keahlian teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas kompetensi.

Sektor survei ini di semua negara ASEAN diselenggarakan oleh instansi pemerintah, sementara pada sektor lain MRAs didelegasikan kepada asosiasi profesional dalam koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Salah satu alasan mengapa demikian adalah karena bidang survei pemetaan berhubungan langsung dengan otoritas geografis suatu negara dengan kata lain juga terkait dengan menyatakan kedaulatan dari segi geografi.

Di Indonesia, yang merupakan representasi dari pemerintah Indonesia di bidang survei dalam kerangka MRAs didelegasikan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG atau sebelumnya dikenal sebagai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan). Selain itu, tidak semua informasi yang dimiliki oleh lembaga bidang geospasial dapat dipublikasikan. Di Indonesia, bidang survei dan pemetaan sangat penting karena situasi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau yang membentang di wilayah Indonesia. Surveyor berkualitas tinggi dibutuhkan untuk dapat menyediakan produk-produk pemetaan yang komprehensif di Indonesia.

Tabel 3. Kompetensi Surveyor Pemetaan

Education		Qualification	Training / Experience
Academic	Vocational		
S3		IX VIII	Expert 3 Expert 2
S2		VII	Expert 1
S1	D4	VI	Technician / Analyst 3
	D3	V	Technician / Analyst 2
SM / high school	D2	IV	Technician / Analyst 1
	D1	III II	Operators 3 Operators 2
SD / elementary school		I	Operators 1

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2013

Ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat sebagai gambaran umum dari kompetensi pekerja survei di Indonesia. Pertama, secara umum kualitas tenaga kerja survei Indonesia sangat baik. Jika dilihat berdasarkan kategorisasi kompetensi pekerja survei Indonesia umumnya di atas kualifikasi VII, yang berarti bahwa rata-rata, sudah pada tingkat Ahli/Expert 1 ke atas. Bahkan, jika dibandingkan dengan kualitas pekerja survei dengan negara-negara ASEAN lainnya, kualitas survei di Indonesia jauh lebih baik. Namun, sayangnya tidak ada data kuantitatif untuk mendukung penjelasan ini.

Hal yang perlu mendapat perhatian juga yakni pertama tidak adanya data primer termasuk jumlah pekerja atau ahli survei di Indonesia termasuk kebutuhan per-tahun terhadap survei, jumlah lulusan perguruan tinggi yang berkaitan dengan survei seperti bidang geografi, geologi, ilmu bumi dan ilmu terkait lainnya. Kedua, ketiadaan asosiasi surveyor profesional Indonesia. Jika melihat kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal organisasi profesi di bidang pemetaan sangat disayangkan bahwa penyerapan lulusan dari sarjana yang berkaitan dengan survei di Indonesia masih rendah. Hal ini dikarenakan peluang untuk mengembangkan ilmunya terkait pendidikan dan kemampuan yang didapatkan dari perguruan tinggi belum memadai.

Arsitektur

Arsitek adalah seseorang yang merancang bangunan dan memberikan saran implementasi serta bertindak sebagai pengawas dan pelaksana bangunan. Inti dari arsitek yang merancang atau mendesain, jasa arsitektur atau jasa konstruksi memberikan kontribusi pada distribusi pekerjaan sektor jasa. Arsitektur memiliki daya saing yang baik, pekerja terampil di bidang arsitek berdasarkan kualifikasi nasional terdiri dari teknisi/mandor/tukang las. Sementara kualifikasi untuk ahli dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu ahli utama, ahli menengah dan ahli muda. Klasifikasi terkait ASEAN dibagi menjadi dua kategori untuk jasa arsitek disebut ASEAN architect (AA), sedangkan untuk insinyur disebut the ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE). Kuantitas jasa arsitek di Indonesia masih kurang memadai, mengacu pada jumlah anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) hanya 14.842 orang.

Hal yang perlu diperhatikan dari sektor arsitektur ini antara lain: pertama kualitas pendidikan arsitektur yang tidak merata. Hanya ada sekitar 140 perguruan tinggi yang tersebar dari Jakarta ke Maluku Utara dan penyebarannya berpusat di pulau Jawa. Kedua, durasi waktu penyelesaian pendidikan arsitektur yakni 4 tahun yang dipersyaratkan secara nasional yakni 5 tahun. Kedua hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah yakni meninjau lembaga pendidikan dimana semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan arsitek. Namun hal yang juga penting yakni memperhatikan kualitas daripada kuantitas sebagai faktor penentu keberhasilan sumber daya manusia Indonesia di ASEAN dan pasar global yang kompetitif.

Keperawatan

Perawat adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang layanan yang mereka secara resmi dan secara administratif telah mendapat pengakuan dan lisensi dari pihak berwenang yang ditunjuk oleh masing-masing negara.

Hanya perawat yang memiliki daya saing tinggi yang memiliki kesempatan untuk bisa bersaing di "pasar" jasa perawat. Selain itu, peran Negara menjadi titik sangat penting dalam menentukan dan meningkatkan kualifikasi tenaga keperawatan untuk dapat memanfaatkan secara optimal pelayanan keperawatan dalam era masyarakat ekonomi ASEAN.

Profesi keperawatan memiliki pangsa terbesar dalam persentase tenaga kesehatan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Di Indonesia, proporsi perawat dalam jumlah sebanyak 173.948 orang, diikuti oleh bidan. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan dan dinamika global, mencatat bahwa perawat merupakan salah satu profesi yang mengalami kecenderungan meningkat dalam dekade terakhir kebutuhan tidak hanya di tingkat ASEAN tetapi juga secara global. Pesatnya pertumbuhan lansia yang melonjak drastis menjadi salah satu faktor tingginya permintaan untuk perawat. Berdasarkan data dari Kemenerian Kesehatan, perkiraan tenaga kesehatan dari luar negeri meningkat pesat dan perawat menempati porsi terbesar dari kebutuhan estimasi kenaikan tingkat permintaan terus melambung pada tahun 2014 sebanyak 9.280, sebanyak 13.100 di 2019 dan 2025 sebanyak 16.920. Sehingga dapat dikatakan ada peluang besar bagi perawat Indonesia di pasar tenaga kerja ASEAN.

Tabel 4. Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dari Luar Negeri

No.	Health Workers	2014	2019	2025
1.	Nurse	9280	13100	16920
2	Physician Specialist	1440	1800	2160
3	General Practitioners	400	500	600
4	Dentist	40	50	60
5	Midwife	400	500	600
6	Medical technician	400	500	600
7	SKM	200	250	300

Sumber: Pusat Perencanaan dan Pemanfaatan SDM Kesehatan, BPPSDMK, Kementerian Kesehatan, 2011

Hal yang dikhawatirkan yakni terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan sumber daya manusia, masalah yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan peningkatan daya saing tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, dari segi kualitas, standar kualitas profesi keperawatan belum memenuhi standar, seperti profesi

keperawatan terlalu umum dan kebijakan yang tumpang tindih yang dibuat oleh pemerintah seperti proses sertifikasi dan pendidikan keperawatan yang minimal dan hanya terkonsentrasi di pulau Jawa. Kurangnya fasilitas pendukung terkait ketersediaan lembaga pendidikan keperawatan berkontribusi terhadap tantangan perawat untuk bersaing di pasar tenaga kerja ASEAN.

(Tenaga) Kesehatan

Sektor jasa praktisi medis merupakan salah satu sektor pelayanan kesehatan yang trennya sedang meningkat. Di Indonesia, jumlah permintaan dokter dari luar negeri diperkirakan akan terus meningkat hingga 2.160 spesialis dan 600 dokter umum di tahun 2025.

Tabel 5. Estimasi Penawaran Dokter dari Luar Negeri ke Indonesia

No.	Health Workers	2014	2019	2025
1	Physician Specialist	1440	1800	2160
2	General Practitioners	400	500	600
Total		1840	2300	2760

Sumber: CIT Thailand, 2012

Berdasarkan data dari International Centre for International Trade of Thailand (2012) kualitas praktisi medis profesional (dokter) Indonesia ditempatkan pada kualitas menengah, dan harus bersaing dengan Filipina dan Vietnam. Situasi ini persis situasi yang dihadapi oleh profesi keperawatan. Kondisi ini memaksa masuknya aliran dokter dari luar negeri, namun demikian pemerintah telah membuat regulasi bagi dokter asing di Indonesia. Kondisi tenaga kesehatan/praktisi medis/dokter di Indonesia cukup baik dikarenakan sinergi antara asosiasi profesi di bidang kedokteran dan pemerintah seperti Kementerian Kesehatan terjalin. Namun demikian, liberalisasi pelayanan kesehatan dan sektor medis perlu memperhatikan dua hal berikut, yakni sektor kesehatan merupakan sektor penting yang terkait dengan keamanan negara dan sektor kesehatan perlu dilindungi dari sektor bisnis.

Perawatan Gigi

Praktisi perawatan gigi di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya mengalami ketertinggalan. Hal ini dapat dilihat dari rasio dokter gigi per 10.000 penduduk. Indonesia memiliki rasio dokter gigi di bawah Myanmar. Indonesia berada dalam posisi yang sejajar dengan Laos 0,4 dokter gigi per 10.000 penduduk. Berikut adalah tabel penjelasan di atas:

Tabel 6. Angka Dokter Gigi per-10.000 Populasi

Country	The Number of Dentists Per 10,000 Population
Singapore	3,3
Brunei Darussalam	2,1
Malaysia	1,4
Myanmar	0,5
Indonesia	0,4
Laos	0,4
Cambodia	0,2
Philipine	not available
Thailand	not available
Vietnam	not available

Sumber: World Trade Organization (WTO), 2013

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dokter gigi memerlukan peningkatan dari segi jumlah yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Kualitas dokter gigi Indonesia agar dapat berkompetisi dengan negara lain, termasuk negara-negara anggota ASEAN memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Dari sisi pemerintah, kedokteran gigi perlu diperhatikan lebih serius. Karena karakteristik sektor ini, termasuk eksklusif dan terbatas yang dapat mengaksesnya. Kerjasama diantara institusi yang relevan dengan asosiasi profesional juga perlu diintensifkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan untuk pengembangan sektor ini.

Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang ditetapkan sebagai prioritas dalam liberalisasi sektor jasa ASEAN. Secara global, diperkirakan bahwa sektor pariwisata menyumbang sekitar 9% dari PDB di seluruh dunia. Karena karakter yang khas, sektor ini merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai kalangan di masyarakat. Di negara-negara anggota ASEAN, pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkembang sangat baik. Laporan the ASEAN Tourism and Travel Competitiveness yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa kontribusi pariwisata terhadap PDB gabungan negara-negara ASEAN mencapai 4,6 persen. Dalam hal pekerjaan, sektor pariwisata diharapkan dapat secara langsung mempekerjakan sekitar 9,3 juta orang di seluruh ASEAN. Dalam persen, jumlah itu membentuk sekitar 3,2 persen dari total lapangan kerja. Secara tidak langsung, sektor ini juga berdampak pada 25 juta pekerjaan di negara-negara anggota ASEAN.

Salah satu isu penting dalam liberalisasi sektor jasa ASEAN adalah terbatasnya jumlah profesional pariwisata yang memiliki sertifikasi formal. Namun dari segi kualitas Indonesia sudah cukup baik dalam bidang ini. Keuntungan lain, dalam kaitannya dengan persaingan untuk pasar domestik di

Indonesia terkait erat dengan atraksi wisata. Tentu saja masyarakat Indonesia secara alami memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap negara sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain ASEAN. Tentu saja hal ini juga berlaku untuk pelaku industri pariwisata di masing-masing negara anggota ASEAN. Infrastruktur adalah masalah terbesar dalam pariwisata. Infrastruktur transportasi darat Indonesia masih jauh di belakang. Penting untuk diingat bahwa MRAs di bidang pariwisata mendorong mobilitas tenaga kerja terampil di bidang pariwisata, itu berarti, bahwa profesional pariwisata Indonesia dapat mengambil kesempatan untuk meningkatkan daya saing mereka jika mampu mengambil keuntungan dari infrastruktur pendukung pariwisata. Misalnya, membuka usaha pariwisata di Singapura adalah dan mengintegrasikannya dengan pariwisata Indonesia (misalnya paket ASEAN).

Sektor pariwisata ini memiliki keunggulan jika dibandingkan delapan profesi yang lain dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Ketua Komite Tetap Sistem Sertifikasi Kompetensi SDM, Sumarna Abdurahman dikutip dari Tempo (2014) mengemukakan bahwa saat ini tenaga kerja sektor pariwisata sudah mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), lembaga pendidikan, dan latihan serta Lembaga Sertifikasi Profesi. Walaupun demikian dikutip dari Suara Pembaruan (2014), Sumarna tetap mengkhawatirkan sektor pariwisata ini akan disesaki oleh tenaga kerja asal Thailand dikarenakan mereka sudah belajar bahasa Indonesia sekarang, sehingga jangan heran kalau pemandu di Bali nanti dari Thailand.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Statistik negara penempatan TKI menunjukkan bahwa Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand telah menjadi negara tujuan. Jika dilihat dari paparan kondisi ketenagakerjaan Indonesia terhadap *Mutual Recognition Agreements* (MRAs) yang dipersyaratkan untuk kebebasan bergerak bagi 8 profesi dalam masyarakat ekonomi ASEAN, maka profesi di bidang pariwisata yang memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat, hal ini didukung kesiapan sumber daya pendukung yang telah terintegrasi MRAs. Hal ini berarti TKI/PMI memiliki peluang untuk mengakses lapangan kerja yang telah disepakati bersama oleh negara anggota ASEAN melalui *Mutual Recognition Agreements* (MRA), namun demikian profesi yang telah disepakati MRAs masih membutuhkan dukungan untuk pengembangannya dari pemerintah Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan tantangan bagi Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN yakni TKI/PMI yang masih didominasi oleh tenaga kerja

informal/berketerampilan rendah, sehingga diperlukan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan minat sebagai tenaga kerja formal dengan melakukan inovasi pelayanan di bidang ketenagakerjaan, utamanya yang terkait dengan 8 profesi MRAs.

Referensi

- Afriana, Linda dan Rishang Haryo Tutuko. (2015). *Mapping and Role of Indonesian Skilled Workers and ASEAN Services Liberalization for Creating Strategic Value Different Sectors in the Mutual Recognition Agreement (MRA) Framework*. Prosiding. International Conference on ASEAN Studies. Yogyakarta: ASEAN Studies Center Universitas Gadjah Mada.
- Association of Southeast Asian Nations. (2011). *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- Bank Indonesia. (2009). *Laporan Survei Nasional Pola Remitansi TKI Tahun 2008*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Caporaso, James A. dan David P. Levine. (2008). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cipto, Bambang. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hoàng, Nguyen Huy. (2013). *Toward an Integrated ASEAN Labor Market Prospects and Challenges for CLMV Countries*. VNU Journal of Economics and Business Vol. 29, No. 5E (2013) 34-42.
- Kementerian Luar Negeri. (2012). *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2011). *Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kemenakertrans.
- Kotler, Philip dkk. (2011). *Merebut Pasar ASEAN: Peluang dan Tantangan Bisnis di Asia Tenggara*. Bandung: Kaifa.
- Luhulima, CPF., dkk. (2008). *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Orbeta Jr, Aniceto C. (2013). *Enhancing Labor Mobility in ASEAN: Focus on Lower Skilled Workers*. Discussion Paper Series. Filipina: Philippine Institute for Development Studies.

Streans, Jill dan Lloyd Pettiford. (2009). *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suparman, Nuraini, Deasy Silvy, dan Arfin Sudirman. (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wailerdsak, Natenapha. (2013). *Impacts of the ASEAN Economic Community on Labour Market and Human Resource Management in Thailand*. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 2, Issue 2 (June) 2013.

Zulfikar, Achmad. (2015). *Mapping the Position of Indonesian Migrant Workers towards ASEAN Economic Community 2015*. Makalah. Disajikan pada 1st International Conference of Journal Government and Politics di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 14 Maret 2015.

Internet

Kementerian Ketenagakerjaan. (2014). *Hadapi MEA 2015 Pemerintah Fokus Siapkan 8 Profesi Prioritas*. <http://ppid.depnakertrans.go.id/hadapi-mea-2015-pemerintah-fokus-siapkan-8-profesi-prioritas>. Diakses 1 November 2016.

Tempo. (2014). *Hanya Tenaga Kerja Ini yang Siap di Pasar Bebas?*. <http://www.tempo.co/read/news/2014/05/02/090574773/Hanya-Tenaga-Kerja-Ini-yang-Siap-di-Pasar-Bebas>. Diakses 2 November 2016.

Pikiran Rakyat. (2016). *Di Era MEA TKA Tak Bisa Dibendung*. <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/01/21/358010/di-era-mea-tka-tak-bisa-dibendung>. Diakses 5 November 2016.

Suara Pembaruan. (2014). *Indonesia Terancam Jadi Pasar Tenaga Kerja ASEAN*. <http://sp.beritasatu.com/home/indonesia-terancam-jadi-pasar-tenaga-kerja-asean/54233>. Diakses 7 November 2016.

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan Daya Saing Industri Indonesia

Aknolt Kristian Pakpahan
Universitas Katolik Parahyangan
pakpahan@unpar.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 berhubungan erat dengan daya saing industri nasional (Indonesia). Implementasi MEA 2015 mau tidak mau mendorong semua negara-negara peserta MEA 2015 untuk mempersiapkan diri dalam persaingan yang baru dalam konteks regional. Empat karakteristik MEA 2015 menggambarkan bagaimana peningkatan daya saing industri dan produk-produk industri yang dihasilkan merupakan kewajiban utama semua negara peserta MEA. Salah satu solusi untuk mempersiapkan diri sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional adalah melalui konsep kluster bisnis yang diperkenalkan oleh Michael E. Porter. Tulisan ini akan terbagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai apa itu MEA 2015 dan apa saja karakteristik yang melekat didalamnya. Bagian kedua akan membahas konsep kluster bisnis dan implementasinya di Indonesia. Bagian ketiga akan menjelaskan bagaimana kluster bisnis dapat dijadikan salah satu upaya Indonesia untuk bisa terlibat aktif dalam aktifitas ekonomi regional dalam konteks MEA 2015. Bagian terakhir akan menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan sektor industri nasional agar Indonesia mampu menjadi bagian aktif dalam implementasi MEA 2015.

Kata kunci:

globalisasi, integrasi ekonomi regional, daya saing industri

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Gagasan mengenai MEA 2015 sebenarnya lahir dari realisasi Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) setelah dilakukan pertemuan *ASEAN Concord II* atau dikenal dengan nama Bali Concord II pada tahun 2003. Masyarakat ASEAN memiliki tiga pilar yang menjadi kunci kerjasama negara-

negara anggota ASEAN.¹ Ketiga pilar tersebut antara lain adalah Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community-ASC*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*), dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community-ACSC*).² MEA merupakan pilar kedua dari Masyarakat ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN dengan cara menciptakan alur perdagangan bebas antarnegara dan kemudahan kerjasama ekonomi yang dapat menjadi kunci dari kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Pilar ini adalah salah satu pilar yang paling berpengaruh dari aktifitas ekonomi ASEAN dan menjadi etalase pentingnya kawasan Asia Tenggara dalam tataran global. Dalam implementasinya, MEA memiliki empat karakteristik yaitu: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi kompetitif, pembangunan ekonomi yang merata, dan integrasi ke arah perekonomian global.³

Keempat pilar ini adalah elemen utama MEA yang harus dilengkapi dan diselesaikan prosesnya pada tahun 2015.⁴ Jika digambarkan, empat karakteristik tadi akan terlihat pada gambar dibawah:



¹ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

² Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

³ Marketing Association of Thailand. *What is AEC?*, diakses pada 25 Oktober 2016, <http://www.marketingthai.or.th/wp-content/uploads/2012/05/Media-Flash-Issue-114.pdf>.

⁴ Keng, Chiam Heng. (2009). *The Three Pillars of ASEAN Community: Commitment to the Human Right Process*. Human Right Commission of Malaysia. Paper dipresentasikan pada 5th Roundtable Discussion on Human Rights in ASEAN – Towards an ASEAN Human Rights System: Role of Institutions and Related Activities. Bangkok, 15-16 Desember 2009, diakses pada 20 Oktober 2016, <http://www.suhakam.org.my/wp-content/uploads/2013/11/the-three-pillar.pdf>.

Penjelasan masing-masing karakter adalah sebagai berikut.

1. Pasar tunggal dan basis produksi. Karakteristik pertama merujuk pada keinginan untuk menciptakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. ASEAN percaya bahwa menciptakan satu pintu akan lebih efektif dari pada membuat sepuluh pintu berbeda.⁵ Basis produksi yang ingin dikembangkan bertujuan untuk memudahkan adanya investasi atau pendirian perusahaan di seluruh wilayah ASEAN. Pilar pertama atau pasar tunggal dan basis produksi terdiri atas lima elemen utama yaitu; arus bebas lalu lintas barang, arus bebas lalu lintas jasa, arus bebas lalu lintas investasi, arus bebas lalu lintas modal, dan arus bebas lalu lintas tenaga kerja.⁶

Arus bebas lalu lintas barang mencakup eliminasi tarif dan pajak untuk barang-barang keluar masuk negara-negara ASEAN dan eliminasi hambatan non-tarif yang ada dalam pelaksanaan masuk keluar barang luar negeri.⁷ Sejauh ini, ASEAN telah memiliki hasil yang signifikan dalam meminimalisir tarif yang ada lewat adanya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*.⁸ Sebagai pendukung lanjutan dari AFTA, ASEAN juga telah merevisi ulang *The Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)* untuk meningkatkan arus bebas lalu lintas barang di kawasan ini.⁹

Arus bebas lalu lintas jasa berpusat pada kemudahan bagi perdagangan jasa antarnegara. Sektor yang diutamakan dalam perdagangan jasa ini adalah transportasi udara, *e-ASEAN* (didirikan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi elektronik di ASEAN), kesehatan dan pariwisata, dan jasa logistik.¹⁰ Untuk meningkatkan standar kualitas jasa ASEAN, maka kesepakatan mengenai *Mutual Recognition Arrangements (MRA)* harus diselesaikan, khususnya pada jasa arsitektur, jasa akuntansi,

⁵ Invest ASEAN. *Single Market and Production Base*, diakses pada 30 Oktober 2016, <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economic-community/view/670/newsid/758/single-market-and-production-base.html>.

⁶ Marketing Association of Thailand. *What is AEC?*, diakses pada 25 Oktober 2016, <http://www.marketingthai.or.th/wp-content/uploads/2012/05/Media-Flash-Issue-114.pdf>.

⁷ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

⁸ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

⁹ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

¹⁰ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

kualifikasi survei, dan praktisi medis.¹¹ Di tahun 2015, MRA diharapkan sudah dapat dilengkapi secara penuh.¹²

Arus bebas lalu lintas investasi adalah elemen ketiga dari pasar tunggal dan basis produksi.¹³ Sebuah rezim investasi bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik investasi langsung asing (FDI) maupun investasi intra-ASEAN.¹⁴ Investasi yang dimaksud adalah investasi antarnegara ASEAN. Lewat *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, peluang untuk berinvestasi secara bebas dan mengetahui potensi bisnis-bisnis lokal maupun internasional dapat diarahkan.¹⁵

Arus bebas lalu lintas tenaga kerja terampil adalah elemen kelima dari pasar tunggal dan basis produksi. Arus ini berfokus pada tindakan yang dicanangkan dalam cetak biru ASEAN menyangkut pemfasilitasan untuk pemudahan keluarnya visa dan *employment passes* bagi pekerja yang terlibat dalam perdagangan *cross-border*.¹⁶ Tindakan terkait arus bebas lalu lintas tenaga kerja juga berkaitan dengan arus bebas lalu lintas jasa untuk keterkaitannya dengan profesionalisme dan standarisasi perkerja terampil.

2. Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif. Kawasan Ekonomi Kompetitif memiliki enam elemen utama yaitu; kebijakan kompetisi, proteksi kompetisi, hak kekayaan intelektual, perkembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*.¹⁷

Kebijakan Kompetisi merupakan langkah-langkah pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perilaku perusahaan dan struktur

¹¹ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

¹² Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

¹³ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

¹⁴ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

¹⁵ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement—A Guide Book for Business and Investors*, diakses pada 29 Oktober, 2016, <http://www.asean.org/resources/item/asean-comprehensive-investment-agreement-a-guidebook-for-business-and-investors>.

¹⁶ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

¹⁷ Marketing Association of Thailand. *What is AEC?*, diakses pada 25 Oktober 2016, <http://www.marketingthai.or.th/wp-content/uploads/2012/05/Media-Flash-Issue-114.pdf>.

industri dan pasar.¹⁸ Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan budaya persaingan yang sehat. Delapan dari negara-member ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam telah mengesahkan peraturan kompetisi dan akan disusul Kamboja dan Laos diperkirakan di akhir tahun 2015.¹⁹ Kebijakan Kompetisi ini merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh *ASEAN Experts Group on Competition (AEGC)*.²⁰ AEGC membuat Pedoman Regional ASEAN terhadap Kebijakan Kompetisi yang membahas mengenai kebijakan persaingan sehat. Kebijakan Kompetisi sendiri memiliki dua elemen yaitu: *pertama*, suatu kebijakan yang mempromosikan adanya kompetisi di antara negara-negara ASEAN dan *kedua*, sekumpulan hukum dan peraturan terkait persaingan atau kompetisi yang berfungsi untuk mencegah adanya tindakan yang menyimpang dari kompetisi yang sehat.

Memahami Perlindungan Terhadap Konsumen, ASEAN menyadari pentingnya peran masyarakat sebagai konsumen dan bukan hanya sebagai wirausaha. Demi membangun ekonomi ASEAN yang lebih menyatu, maka proteksi terhadap hak konsumen adalah hal yang ASEAN perhatikan dengan mengembangkan *ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection (ACCCP)* yang menghubungkan konsumen ASEAN dengan jaringan pemerintahnya (seluruh negara ASEAN termasuk).²¹ Proteksi konsumen dimaksudkan menjadi bagian dari terwujudnya ASEAN yang kompetitif namun bersifat adil dan sehat.

Kekayaan intelektual merupakan aset yang dapat dimiliki, dijual, dilisensikan, atau bahkan berikan secara sukarela.²² Bidang yang diperhatikan oleh badan ini adalah terkait dengan hak paten, hak cipta,

¹⁸ Association of South East Asia Nations. *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*, diakses pada 30 Oktober 2016, <http://www.asean.org/images/2012/publications/ASEAN%20Regional%20Guidelines%20on%20Competition%20Policy.pdf>.

¹⁹ Association of South East Asian Nations. *Competition Policy*, diakses pada 29 Oktober 2016, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/competition-policy>.

²⁰ Association of South East Asian Nations. *Competition Policy*, diakses pada 29 Oktober 2016, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/competition-policy>.

²¹ Association of South East Asian Nations. *Consumer Protection*, diakses pada 29 Oktober 2016, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/consumer-protection>.

²² Association of South East Asian Nations. *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan*, diakses pada 29 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/documents/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%202011-2015.pdf>.

desain, dan merk dagang sebagai bagian dari perlindungan terhadap kekayaan intelektual.²³

Pengembangan infrastruktur ASEAN berfokus pada sektor-sektor infrastruktur dan transportasi yang memudahkan adanya kerjasama ekonomi di ASEAN.²⁴ ASEAN berencana untuk membangun jaringan infrastruktur yang memudahkan terjadinya perdagangan antarnegara dan mudahnya alokasi barang. Transportasi darat, air, dan udara, ketiganya masuk menjadi bagian pengembangan infrastruktur ASEAN yang mendukung kerjasama antarnegara.

Dengan adanya *e-commerce*, ASEAN telah membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan perdagangan secara *online*.²⁵ Infrastruktur yang legal dan jelas mengenai perdagangan *online* adalah tujuan dari keberadaan *e-commerce*.

3. Pembangunan Ekonomi Yang Merata. Pembangunan ekonomi yang merata dapat dicapai melalui dua program ASEAN terkait hal ini yaitu *SME Development* dan inisiatif untuk integrasi ASEAN.

Pertama, Pembangunan Usaha Kecil Menengah/UKM (*SME Development*). UKM merupakan usaha yang dampaknya besar terhadap pembangunan ekonomi di ASEAN, mengingat jumlahnya yang sangat banyak dan pengaruhnya yang besar terhadap PDB negara. UKM dapat mempengaruhi PDB negara hingga sebanyak 53% dari total PDB keseluruhan dan dapat mempengaruhi ekspor hingga 31% dari total ekspor negara.²⁶ Hal terkait pembangunan UKM telah diurus dalam *ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) 2004-2014* yang membahas mengenai percepatan laju pengembangan UKM, optimisme bahwa perbedaan menjadi hal yang baik di ASEAN terkait hal

²³ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan*, diakses pada 29 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/documents/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%202011-2015.pdf>.

²⁴ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

²⁵ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

²⁶ Association of South East Asian Nations. *Small and Medium Enterprises*, diakses pada 1 November, 2016, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/small-and-medium-enterprises>.

ini, dan dukungan terhadap pasar yang kompetitif lewat fasilitas informasi, pasar, tenaga kerja, keuangan dan teknologi.²⁷

Kedua, Inisiatif untuk Integrasi ASEAN (IAI). Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mempersempit adanya kesenjangan pembangunan di ASEAN dan untuk menciptakan ASEAN yang bertindak sebagai satu kesatuan regional. Untuk mencapai hal ini, diperlukan adanya perkembangan ekonomi oleh negara-negara *CLMV* (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam).²⁸ IAI menawarkan asistensi atau pendampingan terkait pembangunan ekonomi yang merata di seluruh ASEAN, khususnya dengan memfokuskan pada pembangunan ekonomi *CLMV*.

4. Integrasi ke Arah Perekonomian Global. ASEAN ingin memunculkan identitas baru dimana ASEAN dipandang kuat secara ekonomi pada tataran global dan ASEAN diakui sebagai bagian penting dari rantai pasokan dunia.²⁹ Integrasi ini dapat diraih dengan dua strategi yaitu:³⁰ Pendekatan kooperatif terhadap hubungan ekonomi eksternal dan dengan meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global.

Pertama, pendekatan kooperatif terhadap hubungan ekonomi eksternal dimana ASEAN harus mengutamakan "ASEAN Centrality" yang mencakup perjanjian *Free Trade Area* (FTA) dan *Comprehensive Economic Partnership* (CEP). Pendekatan kooperatif dapat berupa revisi terhadap FTA dan CEP menjadi lebih baik dan merekatkan ASEAN, dan berupa pembuatan suatu sistem koordinasi yang ditonjolkan untuk menciptakan pendekatan yang seragam dalam ASEAN.

Kedua, meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global dimana untuk melebur dan menjadi bagian penting dalam perekonomian global, ASEAN perlu meningkatkan partisipasinya dalam jaringan pasokan global. Tindakan-tindakan yang terkait mengenai usaha ASEAN meningkatkan partisipasinya adalah untuk mengadopsi standar internasional terhadap produk dan jasa yang diterima secara global, dan untuk mengembangkan asistensi yang komprehensif terhadap negara-

²⁷ Association of South East Asian Nations. *Small and Medium Enterprises*, diakses pada 1 November, 2016, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/small-and-medium-enterprises>.

²⁸ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

²⁹ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

³⁰ Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

negara ASEAN yang kurang berkembang dengan memacu produktivitas dan industrialisasi di negara-negara terkait.

Klaster Bisnis di Indonesia

Konsep klaster bisnis (industri) telah menarik perhatian para akademisi, pembuat kebijakan (pemerintah), dan juga organisasi-organisasi multilateral untuk meneliti lebih lanjut mengenai pentingnya klaster bisnis bagi perekonomian nasional dan lokal/daerah sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelompok ini percaya bahwa implementasi klaster bisnis akan memberikan keuntungan terhadap pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya, Enright and Ffowcs-Williams menemukan bahwa banyak negara dan pemerintah daerah dapat mengembangkan perekonomiannya dengan menerapkan konsep klaster bisnis.³¹

Konsep mengenai klaster bisnis dapat dilacak dari konsep lokal ekonomi Alfred Marshall³², Michael Storper³³, and Masahisa Fujita et al³⁴ dalam menghadapi ketatnya kompetisi ekonomi global. Akan tetapi, konsep klaster bisnis menjadi terkenal setelah Michael Porter menerbitkan buku mengenai klaster bisnis.³⁵ Porter dikenal sebagai pionir teori pembangunan ekonomi dimana ia menawarkan konsep klaster bisnis untuk meningkatkan daya saing produk suatu negara dan mendorong pembangunan ekonomi.

Secara sederhana, klaster dapat didefinisikan sebagai konsentrasi sekelompok perusahaan sejenis dalam satu kawasan. Porter sendiri mendefinisikan klaster sebagai sekelompok perusahaan yang terlibat dalam aktifitas sejenis atau berhubungan melalui berbagai bentuk.³⁶ Atau dalam definisi yang lebih lengkap klaster didefinisikan sebagai:

"... geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, firms in related industries, and associated

³¹ Enright, Michael J. & Ffowcs-Williams, Ifor. (2000). *Local Partnership, Clusters, and SME Globalization*. Paper dipresentasikan pada Enhancing the Competitiveness of SMEs in the Global Economy: Strategies and Policies. Conference for Ministers Responsible for SMEs and Industries Ministers. Bologna, Italy, 14-15 Juni 2000. Hal. 13.

³² Lihat Marshall, Alfred (1890). *Principles of Economics*. 8th ed. London: MacMillan.

³³ Lihat Storper, Michael (1997). *The Regional World: Territorial Development in a Global Economy*. London: Guildford Press.

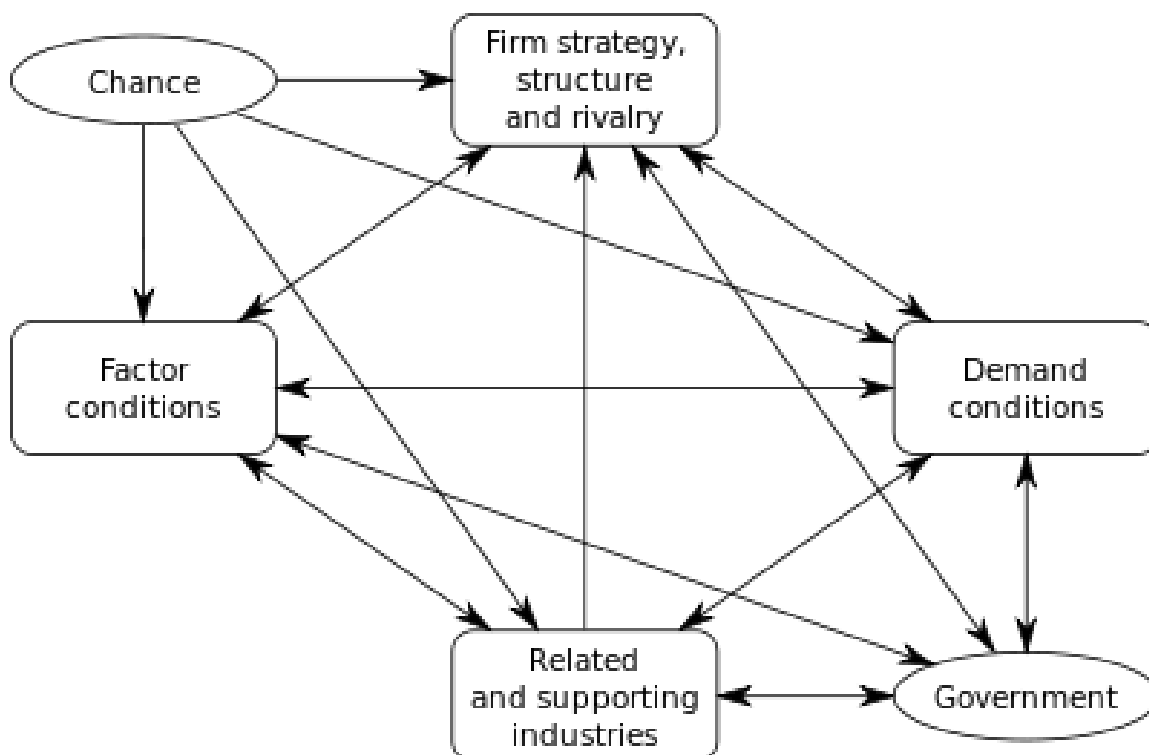
³⁴ Lihat Fujita, Masahisa; Krugman, Paul & Venables, Anthony J. (2001). *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. Massachusetts: The MIT Press.

³⁵ Lihat Porter, Michael (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press dan Porter, Michael (1998). *On Competition*. Harvard: Harvard Business School Press.

³⁶ Porter, Michael (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press. Hal. 131.

institutions (for example, universities, standards agencies, and trade associations) in particular fields that compete but also cooperate".³⁷

Jika melihat konsep kluster bisnis yang diungkapkan oleh Michael Porter, gambar berikut yang dikenal sebagai *the Diamond Theory* (Teori Berlian) dapat menjelaskan apa dan bagaimana konsep kluster bisnis bekerja.



Kotak pertama, *firm strategy, structure, and rivalry* diartikan oleh Porter sebagai: "... how companies are created, organized, and managed, as well as the nature of domestic rivalry."³⁸ Termasuk di dalamnya adalah: bagaimana struktur perusahaan dan strategi bisnis yang dijalankan serta bagaimana menata (menciptakan) kerjasama dan persaingan dengan perusahaan didalam kluster bisnis. Ada konsep utama kluster bisnis menurut Porter, yakni *co-competition* yang diartikan sebagai *cooperation* (kerjasama) dan *competition* (persaingan) dalam waktu bersamaan.³⁹ Menurut Porter, dalam kluster bisnis, persaingan menjadi kunci utama. Porter (1990) menyebutkan bahwa persaingan domestic (antar perusahaan) dapat menekan perusahaan-

³⁷ Porter, Michael (1998). *On Competition*. Harvard: Harvard Business School Press. Hal. 197-198.

³⁸ Porter, Michael (2008). *On Competition: Update and Expanded Edition*. Boston: A Harvard Business Review Book. Hal.. 182.

³⁹ Pakpahan, Aknolt Kristian (2014). *The Development of Business Clusters in Indonesia: The Cases of Cibaduyut and Plered, West Java*. Baden-Baden: Nomos Verlag and Bloomsbury. Hal. 13.

perusahaan untuk memproduksi produk dan menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen.⁴⁰

Kotak kedua, *factor conditions* dihubungkan dengan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, dan modal. Menurut Porter, *factor conditions* ditopang oleh lima *inputs*⁴¹ yakni: kualitas sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan bahan mentah, kehadiran lembaga pengetahuan seperti universitas dan lembaga penelitian, ketersediaan lembaga keuangan untuk mendukung keberadaan perusahaan dalam klaster bisnis, dan kesiapan fasilitas infrastruktur dalam mendukung keberadaan suatu klaster bisnis.

Kotak ketiga, *demand conditions* diartikan sebagai adanya pasar lokal dan permintaan lokal. Pentingnya pasar lokal dan permintaan lokal (diartikan sebagai pembeli) adalah mereka dapat menekan perusahaan-perusahaan untuk memproduksi produk dengan kualitas yang baik sekaligus menekan perusahaan untuk selalu memperbaiki kualitas produk sekaligus berinovasi.

Kotak keempat, *related and supporting industries* diartikan sebagai kelompok-kelompok yang mendukung keberadaan klaster bisnis. Termasuk didalamnya universitas, lembaga penelitian, dan asosiasi dagang. Mereka inilah yang diharapkan mampu membantu perusahaan-perusahaan dalam klaster bisnis untuk melakukan efisiensi produksi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dan berkontribusi pada inovasi-inovasi baru.

Di Indonesia sendiri, jejak pengembangan klaster bisnis sudah dimulai pada era Orde Baru (pemerintahan Presiden Soeharto) yang meluncurkan rencana pembangunan lima tahunan yang menekankan pada pembangunan sektor industri. Noer Soetrisno (2009) menyebut program ini sebagai strategi tinggal landas industri.⁴² Contoh nyata rencana pembangunan sektor industri adalah dengan dibentuknya PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) pada tahun 1976.

Tahap pertama pengembangan klaster industri (bisnis) dimulai pada tahun 1970-an dengan adanya Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil/BIPK.⁴³ Kemudian, pada era pemerintahan Presiden Susilo

⁴⁰ Porter, Michael. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press. Hal. 107.

⁴¹ Porter, Michael. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press. Hal. 74-75.

⁴² Soetrisno, Noer. (2009). *Pengembangan Klaster IKM/UKM di Indonesia: Pengalaman dan Prospek*. Paper dipresentasikan pada Workshop Pengembangan Klaster UKM di Surakarta 26-28 Oktober 2009.

⁴³ Lihat Wee, Thee Kian (2006). Policies for Private Sector Development in Indonesia. *ADB Institute Discussion Paper No. 46* dan Tambunan, Tulus (2005). *Promoting Small and Medium*

Bambang Yudhoyono, ada dua keputusan penting terkait dengan pengembangan kluster industri di Indonesia. Pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mengenai Roadmap Pengembangan Kluster Industri Nasional pada tahun 2009. Tujuan dari dua keputusan penting tersebut adalah membangun sektor industri yang kuat sekaligus memperbaiki daya saing industri melalui pendekatan kluster bisnis/industri.

Kluster Bisnis dan Peningkatan Daya Saing

Pendekatan kluster bisnis menjadi penting bagi peningkatan daya saing produk. Penelitian empiris menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang ditempatkan dalam satu kluster bisnis mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada perusahaan yang ditempatkan di lokasi yang berbeda satu sama lain. Sebelumnya, para pelaku bisnis jarang bertemu atau melihat secara langsung kompetitornya ketika melakukan proses produksi. Hasilnya, mereka melewatkan kesempatan untuk saling tukar menukar informasi mengenai produk mereka dan kesempatan pasar yang ada sekaligus bekerjasama untuk meningkatkan kualitas produk untuk bersaing pada pasar potensial yang ada. Hal ini disebabkan selama ini para pelaku bisnis hanya melihat perusahaan lain sebagai kompetitor utama dan bukan sebagai partner yang potensial. Disini, kluster bisnis dapat dilihat sebagai cara terbaik untuk mengurangi kecenderungan tadi sekaligus membawa ide-ide baru untuk membangun kerjasama antar perusahaan melalui konsep kluster bisnis.

Kluster bisnis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mempromosikan kerjasama dan persaingan dalam waktu bersamaan. Menurut Barkley dan Henry (2001), kerjasama dalam kluster akan terjadi secara alami karena kluster dapat dilihat sebagai kumpulan dari aktifitas yang terintegrasi (*integrated activities*), kumpulan sumber daya baik manusia dan alam, serta kumpulan pengetahuan.⁴⁴ Menurut Barkley dan Henry, tujuan utama perusahaan dalam suatu kluster adalah meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan para pekerja.

Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia. *Journal of Small Business and Management*, Vol. 43, No. 2, hal. 138-154., Hill, Hal (2001). Small and Medium Enterprises in Indonesia: Old Policy Challenges for a New Administration. *Asian Survey*, Vol. 41, No. 2, hal. 248-270.

⁴⁴ Barkley, David L. & Henry, Mark S. (2001). *Advantages and Disadvantages of Targeting Industry Cluster*. Clemson University Public Service Activities. REDRL Research Report 09-2001-01. Dapat diakses pada http://cherokee.agecon.clemson.edu/redrl_rpt3.pdf.

Bersama dalam satu lokasi juga menciptakan persaingan dalam hal tidak saja menghasilkan kualitas produk yang lebih baik (dengan harga yang kompetitif) akan tetapi juga menjual lebih banyak (secara kuantitas) dan menarik calon pembeli. Kompetisi adalah mengenai pertarungan diantara perusahaan-perusahaan. Hal ini termasuk: persaingan dengan dengan perusahaan lain di dalam atau di luar klaster, persaingan untuk menarik pembeli/konsumen, dan persaingan untuk menjamin pasokan bahan-bahan produksi dari *suppliers*.

Kerjasama dan persaingan dalam klaster bisnis pada akhirnya akan memberikan beberapa keuntungan. Porter menyebutkan setidaknya ada tiga keuntungan dalam melakukan kerjasama dan persaingan dalam klaster bisnis.⁴⁵ Pertama, klaster bisnis akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kedua, klaster bisnis akan mendorong lahirnya inovasi produk, dan ketiga klaster bisnis akan mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan baru sekaligus memperbesar klaster yang sudah ada. Penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut.

Klaster dan Produktivitas

Berada dalam satu lokasi yang sama memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan terkait akses terhadap para pekerja, informasi, penggunaan teknologi, dan memotivasi perbaikan produk (dan proses produksi). Klaster bisnis dapat menurunkan biaya untuk merekrut para pekerja. Bahkan, klaster bisnis yang dianggap sukses dapat menjadi daya tarik bagi para pekerja yang memiliki kualifikasi baik (*high-skilled worker*). Hal ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri karena klaster bisnis akan lebih mudah menghasilkan produk dan meningkatkan produktivitas karena hadirnya para pekerja dengan kualifikasi baik.

Klaster bisnis yang sukses juga dapat menjadi daya tarik kehadiran industri pendukung (seperti *suppliers*). Kehadiran para *suppliers* ini juga dikarenakan adanya jaminan pembelian dari perusahaan-perusahaan di dalam klaster bisnis. Di sisi lain, kehadiran para *suppliers* ini dapat mengurangi biaya transportasi bahan-bahan mentah.

Seperti yang telah disebutkan diatas, kedekatan juga menjadi keuntungan bagi para perusahaan dan *suppliers* dimana *suppliers* akan mengetahui dengan persis kebutuhan yang dibutuhkan oleh klaster bisnis. Berkaitan dengan teknologi, dengan adanya kedekatan *suppliers* dan klaster bisnis, para *suppliers* dapat dengan mudah membantu perusahaan-perusahaan

⁴⁵ Porter, Michael. (1998). *On Competition*. Harvard: Harvard Business School Press.

dalam mempersiapkan mesin-mesin industri sekaligus menyediakan layanan perawatan mesin industri. Hal ini yang dirasa dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam klaster bisnis.

Klaster dan Inovasi

Klaster bisnis tidak saja menghasilkan perbaikan (kualitas) produk akan tetapi juga mempromosikan adanya inovasi-inovasi produk. Porter (seperti dikutip Huggins dan Izushi, 2011)⁴⁶ menyatakan ada tiga tipe inovasi yang dapat dihasilkan oleh klaster bisnis: inovasi produk, inovasi sistem pemasaran, dan inovasi proses produksi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kedekatan dalam satu lokasi cenderung untuk meningkatkan skala persaingan dan mempromosikan adanya inovasi baru. Dalam hal produk, setiap perusahaan akan berusaha menghasilkan produk yang berbeda (dengan kualitas yang lebih baik) dengan kompetitornya. Kebanggaan akan hadirnya konsumen dalam membeli produk-produk mereka diyakini akan menjadi tuntutan utama dalam klaster-klaster bisnis yang pada akhirnya menekan perusahaan-perusahaan untuk selalu memperbaiki kualitas produk dan melakukan inovasi produk.

Klaster dan Formasi Baru

Klaster selalu menghasilkan formasi klaster yang baru. Formasi klaster yang baru diartikan sebagai semakin berkembang dan meluasnya klaster bisnis yang ada. Bisa semakin banyak perusahaan yang ada di dalam klaster atau perusahaan pendukung (*related and supporting industries*) yang semakin banyak.

Apa Selanjutnya?

Melihat penjelasan mengenai klaster bisnis dan mulai berjalannya MEA 2015, mau tidak mau pemerintah Indonesia harus mempersiapkan para pelaku bisnis untuk berperan aktif dalam MEA 2015. Pada pidato dalam Pembukaan Mukhtar Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa dalam era MEA 2015 sudah seharusnya kita menjadi pemain dan bukan penonton. Hal ini diartikan bahwa: *pertama*, para pelaku bisnis/industri harus ikut erta dan berperan aktif dalam kompetisi MEA 2015,

⁴⁶ Huggins, Robert dan Izushi, Hiro. (2011). *Competition, Competitive Advantage, and Cluster: The Ideas of Michael Porter*. Dalam: Huggins, Robert dan Izushi, Hiro (eds). *Competition, Competitive Advantage, and Cluster: The Ideas of Michael Porter*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 12.

dan *kedua*, produk Indonesia harus mampu bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh Negara lain.

Melihat kembali empat karakteristik MEA 2015, dapat terlihat jelas bahwa mau tidak mau kita harus ikut berperan aktif dalam MEA 2015. Pasar tunggal dan basis produksi dapat dimaknai sebagai satu klaster bisnis dalam skala yang besar yakni regional atau kawasan. Disini industri nasional Indonesia bisa menjadi pelaku tunggal atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang ada di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah harus menyiapkan struktur bisnis dan industri yang kuat agar supaya produk kita mampu bersaing pada MEA 2015. Masalah-masalah mendasar yang biasa dihadapi oleh sektor industri seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajerial, permodalan, aspek teknologi dalam proses produksi, sistem pemasaran, dan infrastruktur harus dibenahi terlebih dahulu.⁴⁷ Beberapa solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (para pekerja) sekaligus meningkatkan kemampuan manajerial mereka. Tidak dapat disangkal, dalam konteks persaingan regional (atau bahkan global) kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama peningkatan daya saing produk. Berikutnya, pemerintah harus mau melakukan 'investasi' pada klaster-klaster bisnis agar supaya ada perbaikan kualitas produk dan sistem produksi dengan diberikannya mesin-mesin industri yang baru. Lalu berkaitan dengan masalah permodalan, pemerintah harus berani menyediakan skema bantuan modal yang baru kepada para pelaku usaha (bisnis ataupun klaster bisnis) yang mampu menjamin ketersediaan modal jika sektor bisnis dan klaster bisnis ingin melebarkan sayap bisnisnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mampu memberikan jaminan kepada lembaga keuangan bahwasanya sektor bisnis (terutama UKM) adalah tulang punggung perekonomian nasional dan sudah seharusnya mendapatkan bantuan keuangan. Berkaitan dengan fasilitas infrastruktur, mau tidak mau pemerintah harus bisa menyediakan ketersediaan infrastruktur yang baik bagi kelangsungan operasional klaster bisnis. Contoh sederhana adalah ketersediaan air bersih dan pasokan listrik.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memberikan jaminan bahwa klaster-klaster bisnis yang dibuat sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2009 akan terus menerus mendapatkan dukungan finansial dan non-finansial dari pemerintah. Masalah yang biasanya muncul adalah:

⁴⁷ Lihat Pakpahan, Aknolt Kristian. (2013). Increasing Small and Medium Enterprises Capacity in the Cibaduyut Footwear Business Cisuter, West Java in a Globalized World. Dalam Dhont, Frank; Webster, Tracy Wright, dan Curaming, Rommel A. (2013). *Between the Mountain and the Sea: Positioning Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Unievrsvity Press.

pertama, pada awal berdirinya suatu klaster bisnis pemerintah menyiapkan segala sesuatunya. Akan tetapi setelah klaster bisnis tersebut berjalan, biasanya perhatian pemerintah beralih ke sektor atau isu lain. *Kedua*, pemerintah harus mampu memberikan penjelasan dalam konteks otonomi daerah mana klaster bisnis yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (dalam hal ini kementerian terkait) dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Jika melihat roadmap pengembangan klaster industri yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian, ada klaster yang disebut sebagai unggulan nasional dan unggulan daerah (provinsi/kota/kabupaten). Sudah menjadi rahasia umum bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah dan juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat lemah. Pemerintah harus mampu menyelesaikan atau setidaknya membagi peran, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Hal lain yang juga menjadi perhatian penulis, peningkatan daya saing melalui implementasi klaster bisnis di Indonesia harus menekankan adanya konsep *coo-petition*. Penulis menemukan bahwa salah satu faktor terbesar penghambat peningkatan daya saing dalam klaster bisnis adalah pola pikir (*mindset*) yang memang tidak membiasakan masyarakat kita untuk berkompetisi.⁴⁸ Prinsip gotong royong, budaya Jawa *mangan ora mangan anggere kumpul* merupakan salah satu contoh nyata bagaimana seak kecil masyarakat kita tidak dibiasakan dengan persaingan. Dalam konteks budaya Indonesia, harmonisasi antar manusia menjadi perhatian utama. Konsep ini juga yang kemudian menghasilkan manusia-manusia (para pelaku bisnis) yang tidak memiliki semangat bersaing. Pemerintah harus mampu memberikan pemahaman bahwa persaingan (dalam konteks yang positif) akan memberikan keuntungan kepada semua pihak. Era MEA 2015 dapat dijadikan momentum bahwa persaingan adalah hal yang wajar dalam aktifitas ekonomi/bisnis.

Daya saing produk Indonesia juga berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini daya saing pekerja Indonesia. Jika melihat data Indeks Daya Saing Global Negara-Negara ASEAN tahun 2014, terlihat posisi Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Skor daya saing Indonesia adalah 4,6 dibawah Singapura dengan skor 5,6; Malaysia dengan skor 5,2; dan Thailand dengan skor 4,7. Tidak dapat dipungkiri dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki sumber modal manusia yang sangat besar namun belum dikelola dengan baik. Rahman dalam tulisannya memaparkan tiga hal utama yang harus dilakukan dalam meningkatkan daya

⁴⁸ Pakpahan, Aknolt Kristian (2014). *The Development of Business Clusters in Indonesia: The Cases of Cibaduyut and Plered, West Java*. Baden-Baden: Nomos Verlag and Bloomsbury. Hal. 219-226.

saing tenaga kerja menjelang MEA.⁴⁹ Ketiga hal tersebut berkaitan dengan kebijakan dari sisi pendidikan, kebijakan dari sisi produktivitas, dan kebijakan dari sisi upah. Kebijakan dari sisi pendidikan dapat dilakukan dengan menyesuaikan kurikulum. Kebijakan dari sisi produktivitas dapat dilakukan dengan menetapkan standar kualifikasi dan sertifikasi. Kebijakan dari sisi upah berkorelasi dengan kebijakan peningkatan produktivitas karena peningkatan produktivitas akan meningkatkan upah.

Menurut Mankiw dan Taylor ada tiga elemen penting dalam upaya peningkatan modal manusia yaitu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.⁵⁰ Pengembangan pengetahuan tenaga kerja Indonesia bisa dimulai dari bangku sekolah atau kuliah. Dengan mempersiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau dunia industri saat ini. Pengembangan keterampilan bisa didukung dengan peningkatan jumlah pelatihan dan reorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan. Penetapan standar kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan pelatihan juga bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya, pengembangan pengalaman tenaga kerja Indonesia bisa didapat melalui peningkatan jumlah program magang, agar tenaga kerja Indonesia memiliki pengalaman bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Penutup

Implementasi MEA 2015 sudah berjalan hampir setahun. Mau tidak mau, Indonesia harus mampu ikut serta secara aktif dalam implementasi MEA 2015. Cara yang paling mudah berpartisipasi aktif adalah dengan ikut serta menjadi pemain sekaligus berkompetisi dengan pelaku bisnis/industri negara lain. Kata kunci untuk dapat berkompetisi adalah dengan memiliki daya saing produk sehingga produk kita bisa bersaing dalam tataran regional. Sayangnya sektor bisnis/industri nasional kita masih dianggap belum memiliki daya saing produk. Ada beberapa masalah yang dihadapi berkaitan dengan ketidaksiapan daya saing produk kita. Pertama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (pekerja) yang belum dikategorikan sebagai *high-skilled worker*, masalah mendasar yang biasa dihadapi oleh sektor bisnis/industri, pembagian

⁴⁹ Rahman, M. Ari Sabillah. (2015). Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1. Hal. 127-129.

⁵⁰ Mankiw, N. Gregory dan Taylor, Mark P. (2014). *Economics*, 3rd edition. Hampshire: Cengage Learning EMEA. Hal. 480.

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, hingga pola pikir masyarakat Indonesia yang belum memiliki jiwa bersaing.

Beberapa solusi yang dapat ditawarkan adalah berfokus pada peningkatan kualitas para pekerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas produk yang dihasilkan sehingga produk Indonesia memiliki daya saing produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. MEA 2015 harus dimaknai sebagai pintu masuk agar produk nasional Indonesia dapat terintegrasi dengan perekonomian global sehingga pada akhirnya akan meningkatkan posisi Indonesia dalam perekonomian global dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

Association of South East Asian Nations. *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

Association of South East Asian Nations. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement—A Guide Book for Business and Investors*, diakses pada 29 Oktober, 2016, <http://www.asean.org/resources/item/asean-comprehensive-investment-agreement-a-guidebook-for-business-and-investors>.

Association of South East Asia Nations. *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*, diakses pada 30 Oktober 2016, <http://www.asean.org/images/2012/publications/ASEAN%20Regional%20Guidelines%20on%20Competition%20Policy.pdf>.

Association of South East Asian Nations. *Competition Policy*, diakses pada 29 Oktober 2016, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/competition-policy>.

Association of South East Asian Nations. *Consumer Protection*, diakses pada 29 Oktober 2016, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/consumer-protection>.

Association of South East Asian Nations. *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan*, diakses pada 29 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/documents/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%202011-2015.pdf>.

Association of South East Asian Nations. *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan*, diakses pada 29 Oktober 2016, <http://www.asean.org/archive/documents/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%202011-2015.pdf>.

- Association of South East Asian Nations. *Small and Medium Enterprises*, diakses pada 1 November, 2016, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/small-and-medium-enterprises>.
- Barkley, David L. & Henry, Mark S. (2001). *Advantages and Disadvantages of Targeting Industry Cluster*. Clemson University Public Service Activities. REDRL Research Report 09-2001-01. Dapat diakses pada http://cherokee.agecon.clemson.edu/redrl_rpt3.pdf.
- Invest ASEAN. *Single Market and Production Base*, diakses pada 30 Oktober 2016, <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economic-community/view/670/newsid/758/single-market-and-production-base.html>.
- Enright, Michael J. & Ffowcs-Williams, Ifor. (2000). *Local Partnership, Clusters, and SME Globalization*. Paper dipresentasikan pada Enhancing the Competitiveness of SMEs in the Global Economy: Strategies and Policies. Conference for Ministers Responsible for SMEs and Industries Ministers. Bologna, Italy, 14-15 Juni 2000.
- Fujita, Masahita; Krugman, Paul & Venables, Anthony J. (2001). *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. Massachusetts: The MIT Press.
- Hill, Hal (2001). Small and Medium Enterprises in Indonesia: Old Policy Challenges for a New Administration. *Asian Survey*, Vol. 41, No. 2.
- Huggins, Robert dan Izushi, Hiro. (2011). Competition, Competitive Advantage, and Cluster: The Ideas of Michael Porter. Dalam: Huggins, Robert dan Izushi, Hiro (eds). *Competition, Competitive Advantage, and Cluster: The Ideas of Michael Porter*. Oxford: Oxford University Press.
- Keng, Chiam Heng. (2009). The Three Pillars of ASEAN Community: Commitment to the Human Right Process. Human Right Commision of Malaysia. Paper dipresentasikan pada 5th Roundtable Discussion on Human Rights in ASEAN – Towards an ASEAN Human Rights System: Role of Institutions and Related Activities. Bangkok, 15-16 Desember 2009, diakses pada 20 Oktober 2016, <http://www.suhakam.org.my/wp-content/uploads/2013/11/the-three-pillar.pdf>.
- Mankiw, N. Gregory dan Taylor, Mark P. (2014). *Economics*, 3rd edition. Hampshire: Cengage Learning EMEA.

- Marketing Association of Thailand. *What is AEC?*, diakses pada 25 Oktober 2016, <http://www.marketingthai.or.th/wp-content/uploads/2012/05/Media-Flash-Issue-114.pdf>.
- Marshall, Alfred (1966 (1890)). *Principles of Economics*. 8th ed. London: MacMillan.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. (2013). Increasing Small and Medium Enterprises Capacity in the Cibaduyut Footwear Business Cluster, West Java in a Globalized World. Dalam Dhont, Frank; Webster, Tracy Wright, dan Curaming, Rommel A. (2013). *Between the Mountain and the Sea: Positioning Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pakpahan, Aknolt Kristian (2014). *The Development of Business Clusters in Indonesia: The Cases of Cibaduyut and Plered, West Java*. Baden-Baden: Nomos Verlag and Bloomsbury.
- Porter, Michael (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press.
- Porter, Michael (1998). *On Competition*. Harvard: Harvard Business School Press.
- Porter, Michael (2008). *On Competition: Update and Expanded Edition*. Boston: A Harvard Business Review Book.
- Rahman, M. Ari Sabillah. (2015). Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1.
- Soetrisno, Noer. (2009). *Pengembangan Kluster IKM/UKM di Indonesia: Pengalaman dan Prospek*. Paper dipresentasikan pada Workshop Pengembangan Kluster UKM di Surakarta 26-28 Oktober 2009.
- Storper, Michael (1997). *The Regional World: Territorial Development in a Global Economy*. London: Guildford Press.
- Tambunan, Tulus (2005). Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia. *Journal of Small Business and Management*, Vol. 43, No. 2.
- Wee, Thee Kian (2006). Policies for Private Sector Development in Indonesia. *ADB Institute Discussion Paper No. 46*.

Diplomasi Budaya dan Penguatan Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN

Asma Amin S.IP, MA

Universitas Sulawesi Barat

Abstrak

Pembentukan Masyarakat ASEAN bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan damai, stabil, makmur yang dipersatukan oleh hubungan kemitraan secara dinamis serta menciptakan masyarakat yang saling peduli. Selain itu, *ASEAN Community* dibentuk untuk mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. Namun demikian, wacana yang berkembang maupun praktek kebijakan yang bergulir sejauh ini cenderung didominasi oleh kepentingan pembangunan Komunitas Ekonomi ASEAN. Sebaliknya, signifikansi pembangunan Komunitas Sosial Budaya cenderung dikesampingkan. Padahal, perspektif tentang komunitas ASEAN harusnya bersifat *holistic* dan *integrated*, karena pada hakikatnya ketiga pilar itu sama-sama fondasi yang akan dapat saling mempengaruhi kokohnya bangunan Komunitas ASEAN. Makalah ini akan membahas diplomasi budaya sebagai sebuah *soft power* dalam penguatan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Tulisan ini berpendapat bahwa diplomasi budaya sangat relevan dan signifikan bagi pencapaian Masyarakat ASEAN, khususnya penguatan pilar Komunitas Sosial budaya. Hal ini karena diplomasi budaya menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh diplomasi politik, ekonomi dan terutama diplomasi militer, kemampuan untuk meyakinkan pihak lain melalui budaya, nilai-nilai, serta ide dan tidak melalui kekerasan. Berbeda dengan diplomasi konvensional yang bergantung pada aktor-aktor formal maupun negara, konsep dari diplomasi budaya ini memberikan ruang yang lebih luas dari keterlibatan aktor-aktor non negara. Analisis makalah ini berbasis pada penggunaan data-data sekunder maupun data primer.

Kata kunci :

Komunitas Sosial budaya, Diplomasi budaya, *soft power*, aktor negara dan aktor non negara.

Pendahuluan

Akhir tahun 2015 lalu merupakan realisasi kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*). Pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan damai, stabil, makmur yang dipersatukan oleh hubungan kemitraan secara dinamis serta menciptakan masyarakat yang saling peduli. Selain itu, *ASEAN Community* dibentuk untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. Untuk itu tiga pilar pembangunan telah dicanangkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, yaitu Komunitas Politik-Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.¹ Namun demikian, wacana yang berkembang maupun praktek kebijakan yang bergulir dalam lima tahun terakhir ini (2009-2015) terkait agenda masyarakat ASEAN ini cenderung didominasi oleh kepentingan pembangunan pilar pertama saja, yaitu pilar komunitas Ekonomi ASEAN. Sebaliknya, urgensi dan kepentingan pembangunan pilar ketiga, yakni komunitas Sosial Budaya ASEAN cenderung dinegasikan.²

Perspektif tentang komunitas ASEAN harusnya bersifat *holistic* dan *integrated*, karena pada hakekatnya ketiga pilar itu, baik politik-keamanan, ekonomi serta sosial budaya adalah sama pentingnya dan bersifat saling mempengaruhi dalam membentuk Komunitas ASEAN. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh dalam pidato pelantikannya : "*Our integration would be incomplete without the good work done and to be done in the social and cultural pillar*".³ Tampaknya isu pilar ketiga ini "*less sexy*" dibandingkan dengan isu pilar pertama maupun pilar kedua.⁴

Pilar masyarakat sosial budaya ASEAN pada dasarnya memberikan ruang dimana aktor negara dan aktor non negara di kawasan dapat bersinergi secara lebih luas dan secara lebih intensif, karena jangkauan dari 34 agenda kerja pada pilar ketiga ini dapat merengkuh kepentingan banyak kelompok dalam masyarakat di kawasan ini, termasuk mereka yang berada di akar

¹ _____, (2012). **ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-20 tahun 2012**. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal. 11.

² Nurul Isnaeni, Asra Virgianita, & Shofwan Al Banna Chaeruzard. (2015). **Corporate Social Responsibility (CSR): Mendorong peran strategis Kelompok bisnis dalam penguatan pilar komunitas sosial-budaya ASEAN**. Makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional Asosiasi Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) ke VI, 25-28 November 2015 di Hotel Golden Palace Lombok . Hal.2

³ Ibrahim Almuttaqi. **ASEAN's Role in Corporate Sosial Responsibility**. The Jakarta Post. 06 November 2015. Dalam <http://www.the-jakartapost.com/news/2013/01/29/asean-s-role-corporate-social-responsibility>, diakses pada 13/11/2016.

⁴ Nurul Isnaeni, Asra Virgianita, & Shofwan Al Banna Chaeruzard. *Op.cit.* Hal. 3

rumpun (*grass-roots level*) dan cenderung dimarginalkan, seperti perempuan, pekerja migran dan *indigenous people*. Oleh karena itu sangat dimungkinkan bahwa penguatan pilar ketiga ini justru akan dapat berkontribusi kepada penguatan pilar pertama maupun kedua. Mekanisme kerja dalam implementasi agenda penguatan komunitas Sosial Budaya ASEAN potensial mendorong terbangunnya *multi-stakeholders partnership* ataupun *cross-sector partnership*, bukan sekedar *public private partnership* yang notabene banyak dilakukan dalam penguatan pilar Komunitas Ekonomi ASEAN.

Salah satu isu yang cukup signifikan dalam upaya penguatan pilar komunitas sosial budaya adalah melalui diplomasi budaya. Diplomasi budaya menggunakan hasil-hasil kebudayaan sebagai manifestasi utamanya. Seperti misalnya melalui promosi kebudayaan yang dimiliki oleh suatu negara melalui mode pertukaran edukasi, seni dan budaya populer seperti literatur, musik, dan film. Selain itu, adaptasi terhadap lingkungan perpolitikan dunia saat ini memaksa diplomasi budaya untuk menyesuaikan pelaksanaannya melalui cara-cara yang lebih bervariasi, melibatkan baik aktor negara maupun aktor non negara seperti (tapi tidak terbatas pada) organisasi-organisasi privat, akademisi, *philanthropists*, *missionaries* dan pelaku seni dalam melakukan misi-misi kebudayaan.

Melalui tulisan ini diharapkan adanya pemahaman yang lebih komprehensif tentang agenda dan tujuan komunitas ASEAN, bahwa semua pilar adalah sama pentingnya untuk dikaji dan diperkuat keberadaannya. Selain itu, melihat sejauh mana peran diplomasi budaya, khususnya yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka memperkuat pilar komunitas sosial budaya ASEAN. Struktur pembahasan akan diawali dengan menjelaskan tujuan, elemen dan prioritas dari Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Selanjutnya akan peranan diplomasi budaya dalam penguatan Pilar Komunitas sosial budaya. Selanjutnya akan membahas tentang diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam penguatan pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN: Tujuan, Elemen dan Program Prioritas.

Komunitas Sosial budaya ASEAN (*ASEAN Socio Cultural Community*, selanjutnya ditulis *ASCC*) bersifat terbuka dan dinamis berdasarkan pendekatan kemasyarakatan (*people-centered approach*). Komunitas sosial budaya ASEAN mencakup kerjasama yang luas dan multisektor. *ASCC* memiliki tujuan utama untuk merealisasikan komunitas ASEAN yang berbasis pada manusia dan tanggungjawab sosial yang memiliki semangat solidaritas

dan persatuan dengan adanya suatu identitas bersama serta membangun masyarakat yang saling peduli dan berbagi dimana kesejahteraan dan kualitas hidup manusia meningkat.

Guna mewujudkan semua itu, warga ASEAN harus menciptakan “rasa ke-kita-an” (“*we feeling*”) dalam pembentukan sebuah komunitas. Di samping itu, masyarakat ASEAN perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial yang tinggi sehingga warna ASEAN akan berkembang menjadi komunitas yang saling peduli dan berbagi (*caring and sharing community*). Dengan demikian, masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota sehingga dapat saling menghargai identitas nasional masing-masing serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai dan makmur kepada generasi penerus. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya komunitas Sosial Budaya, telah disusun cetak biru komunitas sosial budaya ASEAN untuk memberikan pedoman (*guidelines*) bagi negara anggota ASEAN dalam menyongsong terbentuknya komunitas ASEAN tahun 2015 melalui pilar sosial budaya.⁵

Cetak biru diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (*people-centred*) serta memperkuat kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa “ke-kita-an” (*we feeling*) terhadap ASEAN. Cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN memuat enam elemen utama (*Core Element*) dan 339 Rencana Aksi (*Action-line*). Secara logis, setiap agenda dalam proses pelaksanaan maupun pencapaian tujuannya akan memiliki implikasi masing-masing. Baik yang bersifat peluang maupun hambatan. Secara lebih lengkap berikut penjelasan tentang keenam elemen ASCC.⁶ **Pertama**, adalah **Human Development** (A), ASEAN berkeinginan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas dari manusia-manusianya dengan memberikan akses dan kesempatan yang setara untuk membangun. Ada enam program yang dicanangkan untuk mewujudkan agenda pertama ini, diantaranya adalah pengembangan pendidikan yang berkualitas, pengembangan sistem informasi dan teknologi yang mendorong inovasi dan perkembangan iptek serta penguatan keterampilan kewirausahaan kepada kelompok-kelompok marjinal, seperti perempuan, para penyandang cacat, orang lanjut usia dan pemuda, serta pengembangan kapasitas pelayanan publik.

⁵ _____, (2012). **ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-20 Tahun 2012**. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal. 54

⁶ ASEAN Secretariat (2009). **ASEAN Socio Cultural Community Blue Print**. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Elemen **kedua**, tentang ***Social Welfare and Protection*** (B), mencanangkan tujuan ASEAN untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ASEAN melalui peningkatan dan perlindungan sosial. Ada tujuh program yang diagendakan, yaitu pengentasan kemiskinan, pengembangan jaring pengaman sosial, penguatan keamanan dan ketahanan pangan, pemberian akses kepada fasilitas kesehatan dan gaya hidup yang sehat, peningkatan kapabilitas untuk mencegah penyakit menular, pemberantasan obat-obat berbahaya dan terlarang, pembangunan masyarakat yang punya daya tahan terhadap bencana.

Pada elemen **ketiga** yaitu ***Social Justice and Rights*** (C), ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan mengarusutamakan HAM ke dalam kebijakan dan semua aspek kehidupan, termasuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada kelompok-kelompok minoritas dan termarginalkan, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang cacat dan para pekerja migran. Terkait agenda ini ada tiga program yang dicanangkan, yaitu mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan kepada kelompok-kelompok minoritas, perlindungan hak para pekerja migran dan mempromosikan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

Elemen **keempat**, yakni ***Ensuring Environmental Sustainability*** (D), ASEAN ingin mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di seluruh kawasan, dengan mempromosikan lingkungan yang bersih dan hijau, melestarikan sumber-sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mengelola dengan bijak sumber-sumber daya alam yang terbaharukan (seperti: hutan, air, tanah) maupun tidak terbaharukan (seperti: energi fosil). Dalam tujuan ini terdapat sebelas program, antara lain terdiri dari: merespon isu-isu lingkungan hidup global, mengelola dan mencegah polusi lingkungan lintas batas (yaitu asap dan limbah berbahaya), mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui edukasi dan partisipasi publik, mempromosikan teknologi ramah lingkungan, mempromosikan standar hidup yang berkualitas di kawasan urban (kota), mengharmonisasikan database dan kebijakan lingkungan, mempromosikan pemanfaatan yang berkelanjutan dari ekosistem kawasan pesisir dan kelautan, mempromosikan manajemen lestari dari sumber-sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, mempromosikan manajemen sumber daya hutan, pertanian dan lingkungan yang berkelanjutan, merespon perubahan iklim dan berbagai dampaknya, serta mempromosikan manajemen hutan yang lestari (SFM).

Elemen **kelima** adalah ***Building the ASEAN Identity*** (E), yaitu bahwa ASEAN akan mengarusutamakan dan mempromosikan kesadaran yang lebih

luas dan nilai-nilai bersama (*common values*) dalam semangat persatuan dan keberagaman di setiap tingkatan dalam masyarakat. Terdapat empat agenda dalam tujuan ini, yaitu mempromosikan kesadaran tentang ke-ASEAN-an dan rasa memiliki sebagai bagian dari komunitas, menjaga sekaligus mempromosikan warisan budaya ASEAN, mempromosikan kreativitas dan industri budaya, mengikutsertakan seluruh komunitas.

Elemen **keenam** adalah ***Narrowing the Development Gap*** (F). Tujuan strategis dari elemen terakhir ini adalah mengurangi gap pembangunan, khususnya pembangunan sosial di antara negara-negara ASEAN-6 dan kelompok negara anggota CLMV dan dalam ASEAN sendiri dimana kantong-kantong kemiskinan dan keterbelakangan berada.

Diplomasi Budaya : Perannya dalam Penguatan Pilar Komunitas Sosial Budaya

Sebelum membahas lebih jauh mengapa diplomasi budaya penting dan signifikan dalam penguatan ASCC, tentunya penting memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud diplomasi budaya dan posisi diplomasi budaya sebagai *soft power*. Istilah diplomasi budaya seringkali digunakan secara bergantian dengan propoganda, diplomasi publik, dan pertukaran budaya.⁷ Diplomasi budaya memperoleh konotasi negatif yang dianggap sebagai "manipulasi atas materi budaya serta agen-agen diplomasi budaya tersebut untuk tujuan-tujuan propoganda".⁸ Kesan ini terutama muncul selama masa perang dingin. Beberapa pihak lainnya berargumen bahwa diplomasi budaya mendasari diplomasi publik, dan sering kali digunakan untuk menjelaskan perilaku diplomatik yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat melalui elemen-elemen budaya, walaupun terdapat beberapa hal yang dapat membedakan keduanya. Di sisi lain, secara lebih positif dan terutama di era sekarang, diplomasi budaya diartikan sebagai pertukaran budaya. Diplomasi budaya menggunakan hasil-hasil kebudayaan sebagai manifestasi utamanya. Seperti misalnya melalui promosi kebudayaan yang dimiliki oleh suatu negara melalui mode pertukaran edukasi, seni dan budaya populer seperti literatur, musik, dan film. Banyak dari instrumen diplomasi budaya ini yang masih dipergunakan hingga saat ini. Menurut US Dept. Of state 1959 "diplomasi budaya sebagai sebuah kontak langsung dan berkelanjutan antar-masyarakat dari negara yang berbeda (yang ditujukan) untuk membantu membentuk

⁷ Anthony Haigh. (1974). ***Cultural Diplomacy in Europe***. Strasbourg: Council of Europe. Hal. 21.

⁸ Friederich Charles Barghoorn. (1976). ***The Soviet Cultural Diplomacy: The Role of cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy***. Westoort, CT: Greenwood Press. Hal. 10-11.

kepercayaan serta pemahaman internasional yang lebih baik dimana relasi antar-pemerintah dapat terlaksana".⁹ Adaptasi terhadap lingkungan perpolitikan dunia saat ini memaksa diplomasi budaya untuk menyesuaikan pelaksanaannya melalui cara-cara yang lebih bervariasi, melibatkan baik aktor negara maupun aktor non-negara seperti (tapi tidak terbatas pada) organisasi-organisasi privat, akademisi, *philanthropists*, *missionaries* dan pelaku seni dalam melakukan misi-misi kebudayaan.

Lalu bagaimana diplomasi budaya dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penguatan pilar komunitas sosial budaya?. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan diplomasi budaya sebagai *soft power*.¹⁰ Budaya, terutama yang menarik bagi masyarakat lain, adalah salah satu sumber penting dari *soft power*. Dalam nosinya, Joseph Nye menyatakan bahwa supremasi, baik militer maupun ekonomi saja tidaklah cukup untuk menjamin keberlangsungan negara dalam perpolitikan dunia kontemporer, maka dari itu, sebuah konsep tentang *soft diplomacy* dalam bentuk diplomasi budaya sangat dibutuhkan sebagai salah satu alternatif bagi negara,¹¹ khususnya dalam kasus ini adalah penguatan pilar komunitas sosial budaya di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena diplomasi budaya menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh diplomasi politik, ekonomi, dan terutama diplomasi militer, kemampuan untuk meyakinkan pihak lain melalui budaya, nilai-nilai, serta ide, dan tidak melalui kekerasan menggunakan dengan kapabilitas militer, politik, maupun ekonomi. Walaupun diplomasi budaya tidak dapat diukur secara kuantitatif, diplomasi budaya dapat beroperasi di dunia, dimana *power* tersebar ke seluruh negara-negara di dunia dan saling ketergantungan sebagai etos kerjanya.

Selain itu, dalam pilar masyarakat sosial budaya ASEAN pada dasarnya memberikan ruang dimana aktor negara dan aktor non negara di kawasan dapat bersinergi secara lebih luas dan secara lebih intensif, karena jangkauan dari 34 agenda kerja pada pilar ketiga ini dapat merengkuh kepentingan banyak kelompok dalam masyarakat di kawasan ini, termasuk mereka yang berada di akar rumput (*grass-roots level*) dan cenderung dimarginalkan, seperti perempuan, pekerja migran dan *indigenous people*. Hal ini sejalan dengan cara kerja diplomasi budaya yang melibatkan peran aktor-aktor selain negara. Keterlibat aktor non negara dalam berbagai kasus sangat efektif dalam kasus dimana dua negara dalam keadaan tegang.

⁹ US Dept. Of state 1959

¹⁰ Jessica Gienow, Hect C.E & Mark C Donfried. (2010). *The Model of Cultural Diplomacy: Power Distance and the Promise of Civil Society, Searching for A Cultural Diplomacy*, New York: Berhann Books. Hal. 21.

¹¹ Joseph S.Nye. (2011). *The Future of Power*. New York: Public Affairs. Hal.8

Hal yang utama yang perlu ditekankan, bahwa cetak biru Masyarakat ASEAN, khususnya ASCC elemen kelima: ***Building the ASEAN Identity***, dimana di dalamnya terdapat empat agenda dalam tujuan ini, yaitu mempromosikan kesadaran tentang ke-ASEAN-an dan rasa memiliki sebagai bagian dari komunitas, menjaga sekaligus mempromosikan warisan budaya ASEAN, mempromosikan kreativitas dan industri budaya, mengikutsertakan seluruh komunitas pada dasarnya sejalan dan merupakan inti dari diplomasi budaya itu sendiri. Sehingga sangatlah tepat, ketika diplomasi budaya ini menjadi alternatif utama dalam rangka penguatan pilar Komunitas sosial budaya.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya terkait peran diplomasi budaya dalam penguatan ASCC, bahwa diplomasi budaya memiliki beberapa kekuatan utama. *Pertama*, diplomasi budaya adalah koneksi 2 arah, bukan pelaksanaan unilateral. Dengan demikian, diplomasi budaya memberikan ruang bagi dialog yang mengarah pada pembentukan rasa saling percaya. Rasa percaya diri akan menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial yang tinggi sehingga warga ASEAN akan berkembang menjadi komunitas yang saling peduli dan berbagi (*a caring and sharing community*).

Kedua, diplomasi budaya dapat meningkatkan pemahaman di antara masyarakat dan budaya karena diplomasi budaya menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya. Melalui diplomasi budaya, masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota sehingga dapat saling menghargai identitas nasional masing-masing serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai dan makmur kepada generasi penerus.

Ketiga, diplomasi budaya beroperasi dalam rentang waktu yang panjang sehingga dapat menghubungkan pihak-pihak dari kelompok yang berkonflik, bahkan pada keadaan hubungan diplomatik yang negatif. Oleh karena itu, diplomasi budaya dapat bertindak sebagai satu-satunya solusi yang efektif ketika muncul ketegangan dan konflik.¹²

Diplomasi Budaya Indonesia di Asia Tenggara

Indonesia secara aktif ikut melaksanakan kegiatan diplomasi budaya ASEAN bekerjasama dengan ASEAN Secretariat, ASEAN Foundation dan bilateral dengan anggota ASEAN. Beberapa kegiatan sebagai salah satu bentuk diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia yang dapat

¹² Chyntia P. Scheneider. (2006). ***Cultural Diplomacy: Hard to define, but You'd Know it if you Saw it***. The Brown Journal of World Affairs. Fall/Winter. Vol.XIII. Issues I. Hal 196.

menguatkan Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Berikut daftar diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia selama periode 2011-2016.¹³

1.	ASEAN YOUTH EXPO 2014	
	Description	To welcome the ASEAN Community 2015, government of Indonesia hosts the ASEAN Youth Expo 2014. The aim is to unite, inspire and motivate young people who participate in this event. All the participants or delegats will take part and contribute to their big dreams as ASEAN youth and foster great unity to ASEAN countries. With the them 'Gateway to ASEAN', This year's event will have two events taking place simultaneously: two days of experiential workshop activities for delegates and expos of culture, scholarship and career. Both of the events are aimed to foster ASEAN Youth better in welcoming ASEAN Youth Community.
	Iniciator	Ministry of Youth and Sports Republic of Indonesia
	Funding	Sampoerna Agro, Koperasi Siswa Bangsa, ACNOL
	Intermediate	Time: August 8-11 2014; Purposes: proactive, to present the uniqueness culture from ASEAN Countries especially for young generation and provides an opportunity for job scholars seekers; Media/public opinion: strategic communication, to enhance the young generations knowledge about ASEAN culture and also giving jobs and scholarship opportunity. Goverment: partially linked Public Diplomacy instrument: International Public Relations.
	source	http://aseanyouthcommunity.com
2.	ASEAN FUN RUN AND VILLAGE	
	Description	The ASEAN Fun Run is a 5-kilometer marathon that starts from Monas, travels along Jl. Thamrin and returns to Monas. Meanwhile, the ASEAN Village features a tourism, cultural and culinary exhibition, as well as performing arts. The ASEAN 5K Fun Run and the ASEAN Village are the first event of their kind to promote the ASEAN Community among Indonesia on a large scale. The succes of these events will eventually reflect the growing concern of Indonesia in the progres of the ASEAN Community 2015
	Iniciator	Student of Junior Diplomatic Training batch 38 at the School of Foreign Services
	Funding	Indonesia Ministry of foreign Affairs, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

¹³ Yulius Purwadi Hermawan dan Ratih Indraswari. (2014). *Diplomasi Budaya di Kawasan Asia Tenggara*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan. Hal. 42-49.

		Sunpride, Nestle Pure Life, Tourism Authority Thailand, AirAsia, RS. M.H. Thamrin, Milo, Nescafe
	Intermediate	Time: Auguts 10 2014 ; Purposes : Proactive, to increase knowledge about the ASEAN Community 2015, celebrate the 47th ASEAN Day and promote ASEAN's potential in tourism, culture and culinary tourism. Media/Public Opinion: Strategic Communication, to enchance publik awareness about ASEAN Community in a healthy and fun way. Government: Partially linked; Public Diplomacy instrument: International Public Relations.
	Source	http://www.asean-frv.com/index.php/2014-07-03-19-08-39/info
3.	ASEAN JAZZ FESTIVAL 2013	
	Description	Performance of finest International Jazz musician and also from Indonesia, organized by Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia
	Iniciator	Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia
	Funding	Indonesia Government
	Intermediate	Time: July 22-23 2013 Purposes: proactive, to promote better relationship between jazz community throughout ASEAN which hopefully will help the building of ASEAN sense of brotherhood. Stategic communication: using music as a unifying factor to let internation among ASEAN citizens. Government: partially linked Public diplomacy instrument: International Public Relations
	source	http://www.aseanjazzfestival.com
4.	ASEAN PLUS CULINARY FESTIVAL 2011	
	Description	An event to exchange and to introduce the richness of each ASEAN member states culinary organized by Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, in cooperation with Sentra Kelapa Gading, Indonesia Chef Association (ICA)
	Iniciator	Indonesia Chef Association
	Funding	Indonesia Chef Assosiation, Ministry of foreign Affairs of Indonesia
	Intermediate	Time: September, 17-19 2011. Purpose: proactive, to introduce ASEAN culinary richness; Media/Public Opinion: strategic communication, to stimulate the curiosity, especially from Indonesia citizens to know more about other ASEAN countries. Government : partially linked. Public diplomacy instrument: International Public Relations.

	Source	http://www.thejakartapost.com/news/2011/09/18/culinary-festival-brings-asean-delicacies.html
5.	ASEAN FAIR 2011	
	Description	Set of events consists of ASEAN Art Exhibition, ASEAN Textil Exhibition, ASEAN Biggest Flag Parade, ASEAN Music Festival, ASEAN Arts Festival, and ASEAN Culinary Festival.
	Iniciator	Ministry of foreign affairs and Ministry of Tourism and Creative Economy of Indonesia
	Funding	The Government of Indonesia
	Intermediate	Time: November, 1-23 2011. Purposes: strategic communication, besides to promote ASEAN richness in culture and cuisines, this event are held also to emphasize the on going ASEAN High Level Meeting at the time. Media/Public Opinion: strategic communication, to foster awareness of ASEAN as a communal effort to achieve more prosperous and integrated ASEAN. Government: partially linked. Public Diplomacy instrument: International Public Relations.
	Source	Http://www.tempo.com/read/news/2011/11/06/105365120/Semarak-ASEAN-Fair-2011
6	ASEAN TEX 2013	
	Description	An exhibition for textil and garment industry owner across ASEAN. Also there are symposium, business communication panel and other relevant activities.
	Iniciator	Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Indonesia Textile Associations)
	Funding	New World Media International Pte Ltd (Indonesian Company)
	Intermediate	Time: November, 14-16 2013 Purpose: proactive, to facilitate bussiness entities, both small and big bussiniess, to meet and colaborate in order to achieve higher quality product. Media/Public opinion: Strategic commination, by invited thousand of people involved in bussines (producers, distributors, seller, etc). Government: partially linked. Public diplomacy instrument: corporate diplomacy, this event is held in accordance to enhance cooperation between bussinies entities across ASEAN
	Source	http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/07/18290744/ASEAN.Tex.dan.Street.Wear.Asia.2013.Digelar.di.Bandung
7.	YOUNG ENVOYS FOR ASEAN COMMUNITY	
	Description	The commissioning of young envoys to have a dialogue related to

		Indonesia's diplomacy towards ASEAN Community with other young envoys in Thailand, The Philippines, and Singapore.
	Iniciator	Directorate of Public Diplomacy of Ministry of Foreign Affairs Indonesia
	Funding	The Government of Indonesia
	Long Term	Time: August 20-26 2011. Purposes: proactive. Media/Public Opinion: Building favorable condition. Government: Partially Linked. Public Diplomacy instrument: exchanges.
	source	http://dunia.news.viva.co.id/news/read/242323-promosidiplomasi-kemli-pilih-78-duta-belia
8.	ASEAN LITERACY FESTIVAL 2014	
	Description	An event created as an facilitator for writers, artists, and public as general who come from ASEAN countries to know each others deeper. This event featured workshops, art performances, poems reading, talkshows with writers, literature for kids, communiy corner, publishers corner, and etc.
	Iniciator	Yayasan Muara
	Funding	Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, Hivos
	Intermediate	Time: March 21-23 2014. Purposes: proactive. Media/Public Opinion: Building favorable condition; Government: partially linked; Public Diplomacy instrument : International Public Relations.
	Source	http://www.gatra.com/budaya-1/seni/48981-asean-literar-festival-digelar-21-23-maret-2014.html
9.	THE 9th ASEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY WEEK	
	Description	An event consists of 4th ASEAN Science Congress and Conferences, ASEAN Flagships Workshops, Southeast Asia Europe Union (EU)-NET Bibliometrics Workshop and Sustainable EU—ASEAN Environment Research, and an exhibition that displays inventions of researchers from ASEAN countries. The event to promote science and technology was part of the regional organization's three major ccooperation pillars that consisted of politics, economy and culture
	Iniciator	ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN COST)
	Funding	-
	Intermediate	Time: August 18-27, 2014.

		<p>Purposes: proactive. Media/Public Opinion: Strategic communication. Government: Partially linked; Public Diplomacy instrument: International Public Relations.</p>
	Source	http://www.seaeu.net/object/event/131
10.	D' ACADEMY ASIA (SEASON 1)	
	Description	Merupakan acara realitas musik dan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut tingkat Asia. Melibatkan 20 peserta dari 4 negara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia.
	Iniciator	Indra Yudhistira, diproduksi oleh Indonesia Entertainment Produksi
	Funding	Indosiar, Royal Brunei Airlines, Tolak Linu Herbal Sido Muncul, Trinity Optima Production, Warner Music Group.
	Long term	<p>Time: November 16-December 29, 2015.</p> <p>Purposes: Proactive. Acara ini diharapkan membangkitkan rasa cinta terhadap musik dangdut di negara-negara tetangga Asia, sehingga secara tidak langsung dapat memperkenalkan budaya Indonesia di negara lain. Acara ini juga telah semakin mempererat hubungan di antara negara peserta, karena selain melibatkan peserta di luar Indonesia, dalam acara ini juga dilibatkan komentator dan juri dari negara peserta.</p> <p>Media/Public Opinion: Strategic communication. Government: Partially linked; Public Diplomacy instrument: International Public Relations.</p>
	Source	http://id.m.wikipedia.org/wiki/D%27Academy_Asia
11.	D' ACADEMY ASIA (SEASON 2)	
	Description	Merupakan acara realitas musik dan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut tingkat Asia. Melibatkan 36 peserta dari 6 negara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand dan Timur Leste.
	Iniciator	Indra Yudhistira, diproduksi oleh Indonesia Entertainment Produksi
	Funding	Indosiar, Royal Brunei Airlines, Tolak Linu Herbal Sido Muncul, Trinity Optima Production, Warner Music Group.
	Long term	<p>Time: October 23- December , 2016. (masih berlangsung)</p> <p>Purposes: Relationship. Acara ini merupakan kelanjutan dari acara DA 1 yang diharapkan akan berkelanjutan. Kegiatan sebelumnya telah berhasil menumbuhkan rasa cinta dan mengenalkan dangdut di negara-negara peserta yang lain. Hal ini secara tidak langsung dapat memperkenalkan budaya Indonesia di negara lain. Acara ini juga telah semakin mempererat hubungan di antara negara peserta, karena selain melibatkan peserta di luar Indonesia, dalam acara ini juga dilibatkan komentator dan juri dari negara peserta dengan jumlah negara yang semakin banyak.</p>

	Media/Public Opinion: Strategic communication. Government: Partially linked; Public Diplomacy instrument: International Public Relations.
Source	http://poskotanews.com/2016/10/19/dangdut-academy-asia-2-gigelar/

Penutup

Perbedaan profil politik, ekonomi dan sosial budaya yang dimiliki oleh sepuluh negara anggota ASEAN, adalah suatu yang esensial untuk membangun fondasi hubungan antar personal yang kuat. Pembentukan kepercayaan (*trust building*) menjadi sangat penting dan hal ini tidak dapat diraih tanpa adanya suatu upaya pengenalan antara masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan adalah melalui diplomasi budaya.

Diplomasi budaya sebagai sebuah *soft power* diharapkan dapat meningkatkan dan membangun kepedulian akan komunitas ASEAN terutama dalam penguatan Pilar Komunitas Sosial Budaya yang selama ini terkesan tidak seimbang dibandingkan dengan pilar lainnya. Diplomasi budaya dapat menjembatani perbedaan serta gap sosial yang terdapat di antara masyarakat ASEAN karena pada dasarnya diplomasi budaya adalah proses pembangunan identitas yang nantinya akan melahirkan saling percaya, saling menghargai dan rasa ke-kita-an (*we feeling*). Selain itu, diplomasi budaya menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh diplomasi politik, ekonomi, dan terutama diplomasi militer, kemampuan untuk meyakinkan pihak lain melalui budaya, nilai-nilai, serta ide, dan tidak melalui kekerasan menggunakan dengan kapabilitas militer, politik, maupun ekonomi.

Kegiatan kultural diplomasi yang dilakukan oleh ASEAN, khususnya dalam tulisan ini oleh Indonesia, merupakan bentuk dari penjabaran argument bahwa kultural diplomasi tidak dipergunakan sebagai *immidiate respon* (propoganda politik) namun sebagai suatu kontinuitas. Oleh sebab itu juga, diplomasi budaya baik sebagai jalan alternatif jika hubungan politis antara negara di dalam komunitas (maupun dengan negara luar lainnya) terganggu.

Dapat disimpulkan, secara garis besar diperlukan suatu upaya bersama dalam menjalankan diplomasi budaya baik dari aktor negara maupun non negara. Sehingga pencapaian ASEAN *community* khususnya penguatan Pilar Komunitas Sosial Budaya akan dapat tercapai melalui pembentukan identitas ASEAN.

Referensi

- Almuttaqi Ibrahim. **ASEAN's Role in Corporate Sosial Responsibility**. The Jakarta Post. 06 November 2015. Dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/29/asean-s-role-corporate-social-responsibility>, diakses pada 13/11/2016.
- ASEAN Secretariat (2009). **ASEAN Socio Cultural Community Blue Print**. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Barghoorn, Friederich Charles. (1976). **The Soviet Cultural Diplomacy: The Role of cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy**. Westoort, CT: Greenwood Press.
- Gienow Jessica, Hect C.E & Donfriend Mark C. (2010). **The Model of Cultural Diplomacy: Power Distance and the Promise of Civil Society, Searching for A Cultural Diplomacy**, New York: Berhann Books.
- Haigh Anthony. (1974). **Cultural Diplomacy in Europe**. Strasbourgh: Council of Europe.
- Hermawan Yulius Purwadi dan Indraswari Ratih. (2014). **Diplomasi Budaya di Kawasan Asia Tenggara**. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.
- Isnaeni Nurul, Virgianita Asra, & Chaeruzard Shofwan Al Banna. (2015). **Corporate Social Responsibility (CSR): Mendorong peran strategis Kelompok bisnis dalam penguatan pilar komunitas sosial-budaya ASEAN**. Makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional Asosiasi Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) ke VI, 25-28 November 2015 di Hotel Golden Palace Lombok.
- Nye Joseph S.. (2011). **The Future of Power**. New York: Public Affairs.
- Schneider Chyntia P. (2006). **Cultural Diplomacy: Hard to define, but You'd Know it if you Saw it**. The Brown Journal of World Affairs. Fall/Winter. Vol.XIII. Issues I.
- US Dept. Of state 1959
- _____, (2012). **ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-20 tahun 2012**. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Menemukan Peran Islam Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Worldview Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 2004-2014

Andi Purwono

Universitas Wahid Hasyim

Abstract

This paper is the study of Islam role in Indonesia foreign policy and try to answer simple question, how is the role of islam in indonesian foreign policy. In contrast with previous studies in Islam and Indonesia foreign policy stressing Islam as source of identity as approach, this paper use Islamic worldview as variable of role. Using some cases in Soesilo Bambang Yudhoyono administration between 2004-2014, this paper show that Islamic worldview of president exist and affect his policies.

Keywords:

foreign policy, Islam, identity, worldview, substantial

Latar Belakang

Tulisan ini adalah studi tentang peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia pasca Orde Baru dengan fokus kajian pada pandangan keagamaan presiden. Riset ini dimulai dengan pertanyaan sederhana, yaitu bagaimana peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Topik ini penting untuk dikaji mengingat sampai saat ini belum ada penelitian atau kajian ilmiah yang mendalam, komprehensif dan terstruktur dengan baik tentang Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia pasca Orde Baru, khususnya kajian mengenai peran *religious worldview* pembuat kebijakan.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Islam diasumsikan memiliki signifikansi yang besar dalam politik termasuk politik luar negeri Indonesia. Kalau kita menengok perjalanan sejarah bangsa, Islam memang diakui dinilai telah memainkan perannya dalam diplomasi kemerdekaan. Para mahasiswa Indonesia yang belajar Islam di negara-negara Timur Tengah dicatat berkontribusi besar dalam mencari dukungan internasional bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka melakukan hal itu melalui kedekatan dan solidaritas keislaman.

Pada tahap sejarah berikutnya, peran Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia nyaris tidak disebut. Riza Sihbudi memang menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan Timur Tengah dan berbagai isu kawasan itu tidak bisa dipisahkan dari pengaruh faktor Islam. Namun penulis lain menilai bahwa Islam dinilai absen dalam politik luar negeri Indonesia.

Ketidakhadiran Islam dalam riset terdahulu bisa kita telusuri disebabkan oleh pendekatan dalam melihat peran Islam sebagai identitas, yaitu dengan menunjukkan ada tidaknya alasan solidaritas keagamaan dalam kebijakan luar negeri. Suryadinata dengan eksplisit menyebut solidaritas Islam tidak pernah menjadi dasar dan pertimbangan politik luar negeri Indonesia. Perwita, Azra, Anwar, Leifer dan Sukma meski tidak secara eksplisit namun bisa dibaca bahwa mereka melihat Islam dalam peran itu terutama ketika menunjukkan bahwa bukan solidaritas keislaman yang menjadi alasan politik luar negeri. Wicaksana secara eksplisit juga mengemukakan bahwa ia melihat peran Islam sebagai identitas. Pada saat bersamaan, ketika mereka menunjukkan ketidakhadiran alasan Islam tersebut, mereka mempertentangkan Islam dengan konstitusi, Pancasila, atau nilai universal lain.

Pendekatan di dalam melihat Islam seperti itu mengundang sejumlah kritik. Pertama, dalam konteks hubungan Islam dan negara, riset terdahulu tersebut cenderung sekularistik. Padahal, Indonesia juga bukan negara sekular sehingga substansi dan nilai agama tidak hadir dalam kebijakan negara. Di sisi lain, Indonesia bukan negara theokrasi sehingga sulit bagi kita menemukan Islam sebagai alasan resmi/ formal dalam ucapan maupun tulisan dari para pembuat kebijakan luar negeri.. Karenanya, perspektif substansialistik, dan bukan sekularistik dan theokratik lah yang menurut penulis lebih tepat dipakai untuk melihat peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia.

Kedua, mempertentangkan Islam dengan Pancasila atau nilai universal lain seperti keadilan dan kemanusiaan merupakan tindakan gegabah. Dikotomi Islam versus Pancasila atau nilai universal lain tidaklah tepat. Bagi sebagian besar muslim Indonesia, Islam kompatibel dengan Pancasila dan memiliki universalitas di dalam ajarannya.

Ketiga, cara menemukan peran Islam yang hanya dilandaskan pada keberadaan alasan solidaritas keislaman terlalu menyederhanakan persoalan. Akibatnya, ada pandangan peneliti terdahulu yang menarik untuk dikritisi seperti Islam hadir dalam bentuk *constrain* saja bukan motivator, dan tidak ada substansi Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Secara konseptual, Islam bisa dilihat juga pada peran lain di ranah worldview, legitimasi, dan peran

organisasi keislaman sebagaimana akan dipaparkan kemudian dalam tulisan ini.

Sepanjang sejarah, agama memang membentuk identitas politik signifikan dan memainkan peran penting dalam politik global. Namun, sejauh mana agama memiliki dampak yang bisa dilacak dalam politik luar negeri adalah persoalan yang belum memiliki jawaban pasti. Dalam pandangan Dawisha, analisa pengaruh Islam dalam politik luar negeri menurutnya memang harus dilakukan dengan hati-hati.

Karenanya, tulisan ini mencoba menggunakan konseptualisasi Fox dan Sandler sebagai landasan berfikir bahwa politik luar negeri dipengaruhi oleh solidaritas keagamaan, *worldview keagamaan* pembuatnya, pencarian legitimasi politik pembuatnya di mata kelompok agama, dan oleh aktifitas tuntutan dan dukungan organisasi keagamaan. Secara khusus, hanya peran *worldview* yang akan diteliti.

Agama memang mempengaruhi pandangan dunia (*worldview*) individu dan kelompok dan akan mempengaruhi pola pikir dan perilakunya. Apakah kita menyebut *worldview*, kepercayaan (*belief*), norma, atau nama lain, ia adalah cara yang kuat dimana agama berkaitan dengan perilaku individu dan masyarakat. Kekuatan agama di aspek ini bisa dilihat ketika ia mengarahkan dan membatasi politik luar negeri melalui kepercayaan pembuat kebijakan dan kepercayaan serta harapan (*expectations*) konstituennya.

Worldview Keislaman Presiden SBY

Selain variabel sistem internasional dan negara, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh pembuat kebijakannya. Di tingkat analisa ini, kebijakan luar negeri bisa dipengaruhi oleh nilai, pemikiran, persepsi, dan karakter pembuat kebijakan. Dalam konteks itu, Islam sebagai agama bisa mempengaruhi karena ia bisa berperan sebagai nilai dan sistem keyakinan yang menuntun dan membatasi (*guide and constrain*) perilaku para pembuat kebijakan.

Untuk melihat peran pandangan keislaman, politik luar negeri Indonesia terhadap dunia Islam dan kasus berdimensi Islam di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dipilih dengan beberapa pertimbangan. Pertama, era SBY menandai perubahan menarik ketika artikulasi identitas Islam muncul dan disebut sebagai pola baru dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia terlihat terus berupaya memasukkan Islam moderat sebagai *image* dalam politik global. Kedua, banyak langkah kebijakan yang dilakukan dalam upaya Indonesia menjadi jembatan Islam- Barat serta jembatan antar dunia Islam, seperti *interfaith dialogues*, berbagai konferensi Islam internasional, hingga mediasi konflik. Langkah itu sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya

pemantapan perdamaian dunia sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMN 2004-2009. Langkah kebijakan tersebut diduga kuat bisa menunjukkan peran pandangan keislaman SBY dalam kebijakannya

Dalam menanggapi publikasi karikatur nabi di majalah *Jyllan Posten* Denmark, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memandangnya sebagai gejala Islamophobia di Barat yang berbahaya dan harus dibendung. Dalam pandangan SBY, sebagai muslim, dan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, suara Indonesia akan didengar. Oleh karenanya ia kemudian melakukan dua langkah penting yaitu menulis artikel di *The International Herald Tribune* yang dimuat pada 10 February 2006. Dalam artikelnya SBY menyatakan pandangannya bahwa berbeda non-Muslim yang memandang penggambaran Nabi Muhammad tidak terlalu penting, bagi komunitas Muslim di dunia, hal tersebut secara spiritual adalah teramat penting. Selama 14 abad terakhir, kaum Muslim mematuhi norma ketat yang melarang gambaran visual sang Nabi. Ketika norma ini dilanggar dan Nabi dicemooh untuk tujuan humor, kaum Muslim merasa diserang keyakinannya. Oleh karenanya ia menyerukan langkah-langkah nyata yang dibutuhkan dunia untuk keluar dari krisis akibat hal itu. Langkah itu antara lain tidak semata memandang dalam perspektif kebebasan berekspresi, tidak memuat ulang (duplikasi) karikatur lebih lanjut. Artikel ini mendapat apresiasi internasional.

Langkah kedua yang dilakukan adalah bersama pemerintah Norwegia mensponsori Global Inter-Media Dialogue (GIMD) yang dilaksanakan di Bali dengan tema "Freedom of Expression and Diversity: The Media in a Multicultural World". Dalam pandangan SBY, ini penting dilakukan karena ada jurang persepsi yang menganga akibat banyak media yang tidak mengerti Islam. Sejak serangan terror 11 September, dunia Islam menjadi lebih disorot oleh Barat. Namun, sorotan tersebut belum diimbangi oleh pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh tentang Islam. Hal-hal yang dibahas dalam GIMD I di antaranya adalah profesionalisme jurnalistik, *global code of conduct* dalam jurnalistik dan tanggung jawab media dalam mempromosikan toleransi. Melalui Global Inter-Media Dialogue diakui bahwa media mempunyai peranan penting untuk membangun dialog dan memperluas saling pengertian antarperadaban, budaya, dan agama. Pelaksanaan GIMD I memiliki makna penting dan mendapat apresiasi luas publik internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Norwegia kembali mensponsori GIMD II di Oslo pada tanggal 4—5 Juni, dan GIMD III pada tanggal 7—8 Mei 2008 di Bali dengan tema "Ethical Journalism in Extreme Conditions: the Challenge of Diversity".

Di kasus lain, peran Indonesia dalam menyikapi konflik Irak juga menegaskan keberadaan pandangan keislaman Susilo Bambang Yudhoyono. Konflik sektarian di Irak merupakan isu yang mendapat perhatian di DK-PBB. Sikap Indonesia adalah menegaskan pentingnya upaya pemulihan keamanan dan stabilitas di Irak. Terkait dengan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan gagasan solusi yang terdiri dari tiga komponen, yakni: rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai, penarikan mundur pasukan asing secara bertahap dan menggantinya dengan pasukan penyangga dari negara-negara Islam moderat, serta memajukan rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi Irak. Untuk mendorong proses rekonsiliasi, Indonesia telah menyelenggarakan konperensi internasional antar tokoh Islam (Sunni dan Syiah) di Bogor pada tanggal 3-4 April 2007 yang didukung oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya NU dan Muhammadiyah.

Dalam pidato pembukaan konferensi, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa sikapnya yang bersedia mengambil peran dalam setiap upaya perdamaian dan keadilan sosial di manapun di dunia, termasuk bersedia membantu menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di Irak, adalah refleksi dari panggilan Islam dan juga panggilan konstitusi Indonesia yang mengamanahkan hal itu. Pernyataan ini secara tegas menunjukkan bahwa motivasi kebangsaan dan keagamaan menjadi dua hal yang hadir secara bersama. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa antara keduanya tidak perlu dipertentangkan.

Di kesempatan lain, pernyataan itu diulanginya dengan menyebut bahwa peran serta dalam berbagai upaya perdamaian dunia itu juga merupakan refleksi dari makna *salam* dan damai yang harus ditaburkan oleh umat Islam dan bahkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai keislaman dalam pandangan dunia Soesilo Bambang Yudhoyono juga bisa kita lihat pada surat terbukanya ketika merespon krisis Gaza tahun 2014. SBY menyatakan akan berusaha sekuat tenaga menjaga dan mempertahankan garis Islam Indonesia yang moderat, rukun dan toleran di tengah pengaruh global yang sering menyebarkan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Hal itu disebabkan karena dirinya mengaku sebagai seorang muslim yang mencintai keadilan, kedamaian, kemanusiaan, dan demokrasi. Upaya menjaga dan mempertahankan moderasi itu menurutnya tidak bisa didapatkan begitu saja namun harus diusahakan perwujudannya. Pernyataan tersebut menunjukkan pandangan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki paham moderat yang mengedepankan mencintai keadilan, kedamaian, kemanusiaan, dan demokrasi.

Pernyataan yang senada kembali diulang termasuk ketika menyampaikan pidato konferensi tahunan para petinggi perusahaan se-Asia

Pasifik, atau APEC CEO Summit, di Honolulu, hari Sabtu 12 Nopember 2011 dengan mengatakan bahwa budaya, semangat, dan hakikat kehidupan yang sebenarnya di Indonesia adalah moderat, Islam yang moderat, sehingga harus dijaga. Karena itu Indonesia akan bisa menjadi contoh negara di mana demokrasi, Islam, dan modernitas dapat hidup berdampingan secara damai. Pandangan yang sama disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Negeri Hassan Wirajuda bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kepentingan untuk menampilkan wajah Islam yang sebenarnya, Islam yang *rahmatan lil 'alamiin*, dan Islam moderat merupakan aset politik luar negeri Indonesia yang sangat kuat.

Ketika membuka Konferensi Kerjasama antarParlemen OKI, SBY menggunakan pilihan kata *brother and sister, in the name of islam*, dan *ummah*. SBY juga mengajak merspon Islamophobia dengan cara nirkekerasan yaitu dengan dialog dan memproyeksikan Islam sebagai agama perdamaian. Ia mencontohkannya dengan dialog antariman dan dialogantarmedia yang dilakukan dimasa pemerintahannya.

Ketika meresmikan masjid komunitas Indonesia pertama di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (26/7/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap dan berpesan agar rumah Tuhan ini benar-benar menjadi *house of peace, love, and tolerance*. Dan komunitas di masjid ini menjadi *the community of peace, love, and tolerance*. Presiden SBY juga meminta jamaah Imaam Center (Indonesian Muslim Association in America (Imaam) Center/ Pusat Komunitas Islam Indonesia di Amerika atau) untuk membuka ruang bagi persahabatan dengan sesama umat Islam dari negara lain maupun masyarakat Amerika. Dengan bersikap inklusif seperti itu diharapkan bisa menghilangkan prasangka buruk yang selama ini dikenakan kepada umat Islam. Presiden juga mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam.

Menanggapi serangan militer Israel di jalur Gaza pada Desember 2008 secara terstruktur hingga menimbulkan korban jiwa ratusan orang tak berdosa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggapnya sebagai ironi di tahun baru Islam. SBY mengirimkan surat keprihatinan dan permohonan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB Ban Ki Moon. Indonesia berpendapat DK PBB harus sidang secara formal untuk mengeluarkan resolusi yang memaksa Israel menghentikan serangan-serangan, dan kemudian dua belah pihak Israel dan Palestina bisa kembali masuk ke perdamaian. Pemerintahan SBY juga mengirim dana bantuan sebesar satu



juta dollar AS. Dana ini di luar bantuan obat-obatan yang akan dikirim ke wilayah konflik.

Dalam menyikapi krisis dan tragedi kemanusiaan di Gaza akibat serangan Israel pada Juli 2014, SBY menulis surat terbuka untuk pemimpin seluruh dunia agar bisa mendorong tragedi kemanusiaan di Palestina dihentikan. Surat terbuka tersebut bahkan sudah dipublikasikan oleh harian *The Straits Times* pada 31 Juli 2014. Dalam suratnya SBY menyatakan bahwa sebagai seorang muslim dan seorang Presiden yang saat ini tengah memimpin sebuah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, tentu saya tidak hanya bersedih dan marah. Untuk itu ia juga aktif melaksanakan diplomasi beserta para menteri dan diplomat Indonesia, termasuk dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Terkait kondisi dalam negeri ia menyatakan berupaya sekuat tenaga untuk menjaga dan mempertahankan garis Islam Indonesia yang moderat, rukun, dan toleran, di tengah pengaruh global yang sering menyebarkan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme.

Pandangan terhadap ISIS dan kelompok teroris Boko Haram bisa ditemui dalam pernyataan SBY dan Sekretaris Jenderal OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) Iyad Ameen Madani. Di sela-sela Pertemuan ke-6 United Nations Alliance of Civilisations (UNAOC), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) Iyad Ameen Madani, di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Kamis (28/8/2014). Pertemuan tersebut digelar. Pada kesempatan itu SBY menyatakan bahwa negara-negara anggota OKI termasuk Indonesia harus bahu membahu menjelaskan ajaran Islam yang sesungguhnya. Apa yang diajarkan oleh ISIS dan Boko Haram telah menyimpang dari itu semua.

Kesimpulan

Paparan-paparan di atas mengarahkan kita pada beberapa kesimpulan berikut. Pertama, sebagai pandangan dan sistem kepercayaan, Islam bisa ditemukan perannya dalam politik luar negeri Indonesia melalui pandangan dunia para pembuat kebijakannya. Pandangan dunia yang berasal dari sistem kepercayaan itu menjadi motivasi sekaligus penuntun kebijakan luar negerinya.

Kedua, kehadiran Islam sebagai motivasi dan penuntun kebijakan itu seringkali berbarengan dengan alasan keindonesiaan (Pancasila dan UUD 1945). Ini bisa dipahami karena memang antara keduanya sejalan. Selain itu, dalam perspektif hubungan agama dan negara, presiden SBY berada pada ranah substansialis.

Kesimpulan ketiga yang bisa ditemukan adalah bahwa derajat kejelasan peran pandangan keislaman terhadap kebijakan luar negeri berbeda pada masing-masing kasus. Pidato SBY pada pembukaan konferensi rekonsiliasi Irak di Bogor tahun 2006 merupakan contoh yang paling jelas. Meski tidak selalu diucapkan secara eksplisit, kasus yang lain juga menunjukkan peran pandangan keislaman dalam kebijakan.

Dalam konteks kontribusi teoritik, kesimpulan tersebut sekaligus mengkritisi pandangan yang menyebut bahwa dalam kebijakan luar negeri Indonesia, Islam hadir dalam bentuk *constrain* saja bukan motivator. Kasus-kasus yang ditunjukkan membuktikan bahwa Islam bisa hadir memberi motivasi. Kesimpulan juga mengkritisi pandangan yang menyebut kehadiran Islam dalam politik luar negeri Indonesia lebih berupa form saja bukan substansi. Keberadaan *islamic worldview* pada kebijakan luar negeri, terutama yang ditegaskan SBY, justru menunjukkan sebaliknya, bahwa kebijakan itu memuat substansi Islam, meski kebijakannya tidak selalu disebutkan dengan kata Islam.

Referensi

Buku

- Carlsnaes, Walter, Risse, Thomas, and Simmons, Beth A. 2013. *Handbook Hubungan Internasional* (Bandung: Nusamedia)
- Dawisha, Adeed. *Islam in Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983)
- Djalal, Dino Pati. 2008. *Harus Bisa ! Seni Memimpin Ala SBY* (Jakarta: Red & White)
- Fox, Jonathan and Shmuel Shandler. 2004. *Bringing Religion Into International Relations* (New York: Palgrave Macmillan)
- Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme* (Bandung: Nuansa)
- Hassan, M. Zein. 1980. *Diplomasi Revolusi Kemerdekaan Indonesia: Perjuangan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Kegley Jr., Charles W. And Eugene R. Wittkopf. 1997. *World Politics: Trend and Transformation 6th edition* (New York: St. Martin's Press)
- Mansbach, Richard W. dan Raffery, Kirsten L. 2012. *Pengantar Politik Global* (Bandung: Nusamedia)

- Madjid, Nurcholis dkk. 2007. *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Perwita, Anak Agung Banyu, 2007. *Indonesia and the Muslim World: Between Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond* (Copenhagen: NIAS)
- Reid, A. 2012. *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant* (Singapore, ISEAS)
- Sahal, Akhmad dan Munawir Aziz (eds.). 2015. *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis* (Bandung: PT Mizan Pustaka)
- Shaffer, Brenda. ed. 2006. *The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy* (Belfer Center Studies in International Security)
- Shoelhi, Mohammad. 2009. *Diplomasi Damai Presiden SBY* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Sukma, Rizal. 2003. *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and Dilemma of Dual Identity* (London: Routledge Curzon)
- Suryadinata, Leo. 1997. *Indonesia's Foreign Policy Under Suharto: Aspiring to International Leadership* (Singapore: Times Academic Press)
- . 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Weatherbee, D. 2013. *Indonesia in ASEAN: Vision and Reality* (Singapore: ISEAS)
- Wicaksana, I. G. W. 2012. *Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special Focus on Jakarta-Islamabad Relations* (University of Western Australia, 2012).
- Wirajuda, Hasan. 2014. *The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management* (Phd thesis in The London School of Economics and Political Science)

Jurnal

- Abd. Rahman, Suranta. 2007. Diplomasi RI di Mesir dan Negara- negara Arab Tahun 1947 dalam *Wacana*, Vol. 2, Oktober 2007.
- Anwar, Dewi Fortuna. 2010a. "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia", dalam *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 3, (2010)
- 2010b. , The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy dalam *Southeast Asian Affairs* 2010.
- 2011. 'The Impact of Domestic Politics and Asian Regional Affairs on Indonesian Foreign Policy', *Southeast Asian Affairs*, 2011

Azra, Azyumardi. 2000. "Islam in Indonesian Foreign Policy: Assessing Impacts of Islamic Revivalism during the Soeharto Era" dalam *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 3, 2000.

Suryadinata, Leo. 2009, "Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia" dalam *Asian Survey* Vol. 35, No. 3 (2009)

Wicaksana, IG Wahyu. *Islam Dalam Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia*

-----, Islamic Identity, Elite Interest and Foreign Policy in Indonesia dalam *Indonesian Journal of Social Sciences* Volume 4 Nomer 2.

Warner, Carolyn M. and Stephen G. Walker. 2011. Thinking About the Role of Religion in Foreign Policy: A Framework for Analysis dalam *Foreign Policy Analysis* 7 No. 1. (2011)

Dokumen

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri. 2005. *Himpunan Pidato/ Sambutan Menteri Luar Negeri Tahun 2004* (Jakarta: BPPK Kemenlu)

Transkripsi Paparan Lisan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2008 DR. N. Hassan Wirajuda, 8 Januari 2008

Sambutan Presiden RI pada Buka Puasa bersama dengan pimpinan dan anggota DPD RI di kediaman Ketua DPD RI Jalan Denpasar Raya Blok C Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009.

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2004-2009.

Internet

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/14/07/31/n9ki51-isi-surat-terbuka-sby-tentang-krisis-kemanusiaan-di-gaza> diakses pada 10 Desember 2015 pukul 12.46.

<http://www.voaindonesia.com/a/presiden-sby-indonesia-bisa-jadi-contoh--133765683/100686.html> diakses pada 13-8-2016 jam 08.54.

<http://internasional.kompas.com/read/2014/09/27/18200861/Presiden.SBY.Resmikan.Masjid.Indonesia.Pertama.di.Washington>

<http://internasional.kompas.com/read/2008/12/29/16263368/SBY.Konflik.Gaza.Ironi.Tahun.Baru.Islam>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/07/31/16171861/Ini.Surat.Terbuka.SBY.untuk.Pemimpin.di.Seluruh.Dunia.Terkait.Gaza>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/10220191/Presiden.SBY.dan.Sekjen.OKI.Bahas.Perkembangan.ISIS.dan.Boko.Haram>

<https://www.kemenag.go.id/berita/387579/presiden-jokowi-indonesia-sumber-pemikiran-islam-dunia>

Analisis Kebijakan Luar Negeri *One Door Policy* Indonesia Terhadap Bantuan Kemanusiaan Internasional

Anita Afriani Sinulingga, Silsila Asri, Putiviola Elian Nasir

Universitas Andalas

Abstrak

Indonesia dikenal dengan julukan sebagai "Laboratorium dan Hipermarket Bencana Dunia". Penamaan tersebut dirasa tepat melihat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Berbagai bentuk bantuan kemanusiaan yang diterima dari lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa bencana alam memang telah menjadi perhatian besar masyarakat dunia. Jika pada pemerintahan sebelumnya, lembaga donor internasional lebih leluasa dan secara langsung dapat memberikan bantuan kepada LSM lokal dan/ atau masyarakat, saat ini lembaga-lembaga internasional tersebut wajib melakukan penyesuaian dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah yang cenderung lebih "selektif". Kebijakan penanggulangan bencana tersebut dikenal "One Door Policy" atau "One Gate Policy". Lebih lanjut, artikel ini bertujuan menganalisis perubahan orientasi dalam penerimaan bantuan kemanusiaan internasional sebagai refleksi Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada tahun 2010-2016.

Kata kunci:

One Door Policy, bantuan kemanusiaan, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan julukan sebagai "Laboratorium dan Hipermarket Bencana Dunia". Penamaan tersebut dirasa tepat melihat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Indonesia berpeluang mengalami setidaknya 8 (delapan) jenis bencana alam yaitu bencana gempa bumi, tsunami, banjir kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung dan gunung api. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004 merupakan salah satu bencana terbesar yang melanda Indonesia dan merupakan titik tolak bangkitnya kesadaran dan solidaritas masyarakat dunia terhadap isu bencana. Berbagai bentuk bantuan kemanusiaan yang diterima dari lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa bencana alam memang telah menjadi perhatian besar masyarakat

dunia. Dalam isu ini, sekat-sekat wilayah negara bangsa tidak lagi berarti ditandai oleh besarnya donasi kemanusiaan yang diberikan secara sukarela dari berbagai bangsa di dunia.

Keterbatasan kemampuan baik teknis, finansial maupun dalam hal pengalaman yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia memerlukan bantuan kemanusiaan internasional melalui lembaga-lembaga donor internasional. Secara umum regulasi terkait bantuan kemanusiaan internasional yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang dijelaskan dalam perangkat perundangan adalah sebagai berikut. Pemberian bantuan kemanusiaan yang berasal dari lembaga internasional didasari dengan prinsip yang paling mendasar untuk menghormati kedaulatan negara. Sementara itu, bantuan kemanusiaan asing ini dilatarbelakangi oleh dampak bencana yang melampaui kemampuan pemerintah untuk menanggulangi. Faktor lain sebagai respon dari pemerintah untuk menerima tawaran bantuan internasional disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terkena bencana.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme masuknya bantuan internasional diawali dengan dengan pernyataan resmi pemerintah untuk menerima tawaran bantuan. Terkait dengan jenis dan jumlah bantuan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menentukan setelah dilakukan kaji cepat. Kemudian BNPB akan mengirimkan surat edaran kepada organisasi internasional yang berisi, antara lain laporan singkat tentang kejadian bencana, lamanya waktu tanggap darurat, kebutuhan mendesak logistik/peralatan, dan kebutuhan personil yang professional. Kebijakan penanggulangan bencana tersebut dikenal "One Door Policy" atau "One Gate Policy" dimana dana bantuan bencana luar negeri harus melewati BNPB. Jika pada pemerintahan sebelumnya, lembaga donor internasional lebih leluasa dan secara langsung dapat memberikan bantuan kepada LSM lokal dan masyarakat, saat ini lembaga-lembaga internasional tersebut wajib melakukan penyesuaian dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah yang cenderung lebih "selektif". Lebih lanjut dijelaskan dalam rangkaian regulasi tentang penanggulangan bencana bahwa lembaga donor internasional hanya dibatasi partisipasinya dalam masa tanggap darurat untuk turun langsung ke lokasi bencana, setelah diberikan izin oleh pemerintah Indonesia.

Lebih jauh, era pemerintahan Jokowi, isu penanggulangan bencana juga dituangkan dalam target Nawacita, yakni menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan tiga indikator utama, antara lain internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penurunan tingkat kerentanan, dan peningkatan

kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019 dijelaskan bahwa peningkatan kerja sama dalam penanggulangan bencana alam merupakan salah satu prioritas penting Indonesia mengingat rentannya posisi Indonesia terhadap bencana alam sehingga Indonesia terus mendorong upaya-upaya dalam rangka memperkuat komitmen dan kerja sama di bidang tersebut. Sebagai sokoguru politik luar negeri Indonesia, ASEAN menjadi prioritas utama bagi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerangka kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Hal ini dibuktikan melalui pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

Selain kerangka kerjasama dalam lingkup ASEAN, Indonesia juga bermitra dalam isu bencana melalui kerangka Kerja Sama Selatan - Selatan dan Triangular (KSST). Dalam kerangka kerjasama tersebut, Indonesia telah memberikan kontribusi bagi negara lain, baik bantuan barang maupun *capacity building*. Penelitian ini lebih jauh akan melihat perubahan orientasi kerjasama internasional dalam wujud kemitraan Indonesia dengan lembaga kemanusiaan internasional dalam isu penanggulangan bencana. Dalam era pemerintahan Joko Widodo, kemitraan Indonesia dengan lembaga donor internasional cenderung selektif dengan membatasi ruang gerak aktifitasnya serta dalam pemilihan mitra luar negeri yang lebih berorientasi kepada ASEAN melalui AHA Centre dan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangulasi (KSST).

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan perubahan orientasi pemerintah Indonesia dalam penerimaan bantuan kemanusiaan internasional pada tahun 2010-2016. Selanjutnya tujuan kedua adalah menganalisis perubahan orientasi dalam penerimaan bantuan kemanusiaan internasional sebagai refleksi Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada tahun 2010-2016.

Kerangka Konseptual: Negara dalam Isu Penanggulangan Bencana

Negara atau pemerintahan yang berada di wilayah rawan bencana seringkali dihadapkan pada dilemma pembuatan kebijakan untuk menanggapi bencana yang datang secara tiba-tiba. Respon dunia internasional yang juga muncul secara simultan untuk memberikan bantuan kemanusiaan perlu ditanggapi dengan kebijakan yang tepat agar bantuan kemanusiaan tersebut bekerja tepat sasaran dan tidak mengerosi kedaulatan negara bersangkutan. Tidak semua bantuan kemanusiaan yang diterima oleh negara yang tertimpa bencana dan tidak semua negara yang juga dengan serta merta menerima bantuan bencana. Ketika bencana tsunami dan angin topan di Asia, beberapa negara yang tidak mengizinkan bantuan kemanusiaan internasional beroperasi

mengatasi bencana dalam negerinya antara lain Myanmar, India, Srilanka, Bangladesh dan lain-lain.

Negara merupakan aktor utama yang bertanggung jawab dalam merespon bencana di wilayah teritorialnya. Hal ini dengan jelas tertuang dalam resolusi PBB No. 46/182 berbunyi :

The sovereignty, territorial integrity and national unity of States must be fully respected in accordance with the Charter of the United Nations. In this context, humanitarian assistance should be provided with the consent of the affected country and in principle on the basis of an appeal by the affected country.

Each State has the responsibility first and foremost to take care of the victims of natural disasters and other emergencies occurring on its territory. Hence, the affected State has the primary role in the initiation, organization, coordination, and implementation of humanitarian assistance within its territory¹

Kutipan artikel resolusi tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pada piagam PBB bahwa bantuan kemanusiaan disediakan dengan persetujuan negara yang tertimpa bencana dan dengan prinsip pertimbangan negara bersangkutan. Negara adalah aktor yang utama dan paling bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap korban bencana dalam wilayah teritorialnya. Dengan demikian, negara sebagai *unitary actor* harus melakukan tindakan mitigasi yang pertama kali dan negara juga yang memutuskan untuk menyeleksi bantuan kemanusiaan yang akan diterima. Selain itu, kedaulatan negara harus dihormati dalam proses pendistribusian bantuan kemanusiaan.

Pada prinsipnya ada 4 peran dan tanggung jawab negara sehubungan dengan bantuan kemanusiaan:

1. Negara bertanggung jawab untuk meminta bantuan dan mengundang bantuan internasional saat krisis.
2. Negara bertanggung jawab memberikan bantuan dan perlindungan.
3. Negara bertanggung jawab untuk memonitor dan mengkoordinasikan bantuan eksternal.
4. Negara bertanggung jawab untuk menyusun regulasi dan kerangka legal dalam mengelola bantuan bencana.²

Kebijakan untuk menerima bantuan kemanusiaan dalam menangani bencana alam menjadi sebuah dilemma bagi negara karena ada kekhawatiran

¹Paul Harvey, Loc. cit

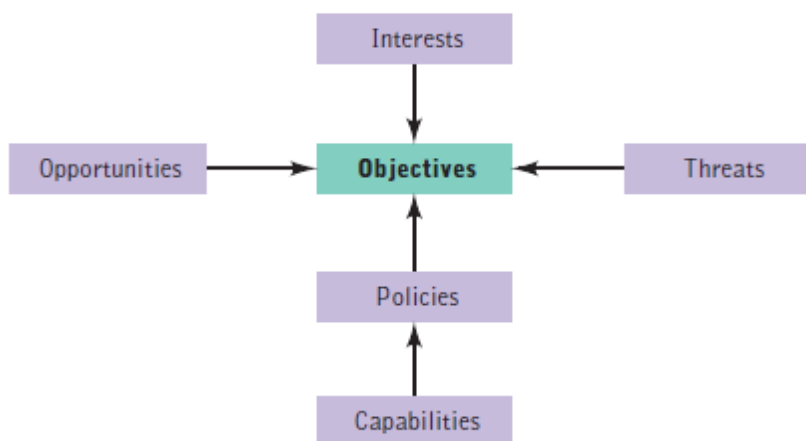
²Paul Harvey, ibid

akan tererosinya kedaulatan negara dan prestise atau kebanggaan negara dalam percaturan politik internasional. Kebijakan untuk menerima bantuan kemanusiaan merupakan 'samaritan's dilemma', karena diasumsikan akan menciptakan ketergantungan komunitas yang tertimpa bencana terhadap bantuan itu sendiri.³

Kedaulatan merupakan hal terpenting bagi sebuah negara. Kedaulatan dimanifestasikan dalam dimensi domestik dan eksternal. Aspek eksternal kedaulatan berpijak pada 'sovereign equality' yang berarti negara berupaya memelihara independensinya dalam hubungan dengan negara lain atau aktor internasional lainnya. Dimensi internal mengacu pada hak setiap negara berdaulat untuk menentukan kebijakan terbaik bagi warga negara, termasuk menerima atau menolak bantuan kemanusiaan.⁴ Dalam dimensi kedaulatan ini terkandung juga kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Dengan demikian negara memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan yang tepat dalam memberikan perlindungan serta menolong warga negaranya yang tertimpa bencana.

Kebijakan untuk menerima bantuan kemanusiaan internasional terkait bencana merupakan bagian dari kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan menerima atau menolak bantuan kemanusiaan internasional adalah salah satu bentuk perilaku negara yang mempertimbangkan berbagai hal, termasuk kepentingan nasional, kapabilitas, ancaman dan juga kesempatan yang dihadapi oleh negara tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Viotty dan Kauppi dalam skema di bawah ini :

Tabel 1. Elemen-elemen untuk Memahami Perilaku Negara



Sumber: Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *Understanding State Behaviour*

³ Erik Warker, Loc Cit.

Tujuan nasional setiap negara dalam merespon bencana adalah memberikan bantuan dan melindungi warga negaranya yang tertimpa bencana. Dalam kondisi kritis pun negara tetap harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif setiap kebijakan yang diambil. Menurut Viotty dan Kauppi, perilaku negara selalu mempertimbangkan ancaman, kapabilitas dan kesempatan yang dimiliki.⁵ Dalam hal menangani bencana, kebijakan untuk menerima atau menolak bantuan atau menerima bantuan dari pihak tertentu adalah dengan mempertimbangkan kapabilitas nasional untuk menangani bencana tersebut. Pilihan negara untuk membangun kerjasama bilateral maupun bilateral dalam mengelola bencana juga dipengaruhi pada kapabilitas nasional serta pertimbangan ancaman yang mungkin diterima oleh negara.

Ancaman yang seringkali menjadi bahan pertimbangan negara dalam menerima bantuan kemanusiaan internasional adalah intervensi pihak asing terhadap kedaulatan. Dalam beberapa pengalaman penanganan bencana yang dialami agen kemanusiaan internasional sering kali gagal dalam pendekatan dengan pemerintah dan komunitas lokal. Pemerintah lokal merasa diintervensi dan tidak secara independen mengelola serta memutuskan yang terbaik bagi masyarakatnya. Ancaman lainnya adalah ketergantungan akan bantuan kemanusiaan internasional. Negara berdaulat akan selalu berupaya untuk meminimalisir ketergantungannya terhadap negara atau aktor lain. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kemudian membuat negara yang telah mengalami bencana dan masih dalam kondisi rawan bencana untuk meningkatkan kapabilitas nasionalnya dalam menangani bencana mulai dari tahap persiapan sampai pada proses rekonstruksi dan rehabilitasi.

Selain dari itu, pertimbangan lain dalam kebijakan negara untuk mengenai kerjasama pengelolaan bencana dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh kondisi geopolitik. Negara rawan bencana saat ini sedang berupaya meningkatkan kerjasama penanganan bencana pada lingkungan terdekat, misalnya lebih mengutamakan kerjasama kawasan. Berdasarkan kerangka pemikiran bahwa bencana bersifat politik dan bantuan kemanusiaan tidak terlepas dari aktivitas politik, maka suatu negara yang berdaulat akan mempertimbangkan banyak aspek dalam membuat kebijakan terkait bencana. Di samping itu negara sebagai aktor yang paling bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan bantuan pada warga negaranya, selayaknya untuk meningkatkan kapasitasnya menangani bencana mengandalkan sumberdaya nasional. *Self sufficiency* merupakan terminologi yang sering digunakan untuk

⁵Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International relations and world politics*, United State of America", Pearson Education, 2013, hal 187

sebuah negara yang berupaya untuk mengandalkan sumberdaya nasional dan meminimalisir intervensi bantuan kemanusiaan.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan didisain berupa penelitian deskriptif. Desain riset seperti ini bermanfaat untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagai objek yang diteliti melihat masalah tersebut⁶. Penelitian ini lebih mengutamakan kualitas data yang diperoleh melalui analisis dari data-data yang diperoleh melalui media sekunder.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari arsip-arsip atau dokumentasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Review literatur merupakan metode yang penting dilakukan dalam penelitian ini dimana untuk mendapatkan pemahaman terhadap berbagai pendekatan, konsep serta metode yang tepat digunakan untuk menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu kemitraannya dengan lembaga donor internasional. Hal tersebut dapat ditemukan dalam buku-buku, jurnal, working paper yang terkait dengan isu dalam penelitian.

b. Review Dokumen

Review dokumen dilakukan dengan membaca dan menganalisis dokumen lembaga yang terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan. Dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini antara lain peraturan perundangan yang berlaku dan rencana strategis kementerian/ lembaga negara. Dokumen lainnya yaitu dokumen/ laporan pelaksanaan program yang dapat dilihat di dalam laporan monitoring evaluasi, laporan berkala, laporan kemajuan, dan lain-lain.

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Kemanusiaan Internasional dalam Menanggulangi Bencana di Indonesia 2010-2016

Indonesia telah beberapa kali mengalami bencana besar yang mengundang banyak aliran bantuan kemanusiaan internasional. Tsunami pada

⁶ Moleong;2000 hal 3

tahun 2004 yang melanda Aceh, disusul dengan beberapa bencana alam lainnya seperti meletusnya gunung merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Tsunami di Sumatera Barat 2009, letusan gunung api Sinabung, kecelakaan Pesawat, banjir bandang dan longsor di beberapa daerah, telah menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia dalam mengelola penanggulangan bencana terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan internasional.

Dalam menerima bantuan kemanusiaan internasional, Indonesia juga mengalami '*samaritan dilemma*'. Pemerintah Indonesia, di satu sisi membutuhkan bantuan kemanusiaan internasional dalam hal pendanaan dan teknologi penanggulangan bencana. Di sisi lain, ketika menerima bantuan kemanusiaan internasional, pemerintah Indonesia juga akan menghadapi berbagai persoalan. Pertama, menerima bantuan luar negeri menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Kedua, dalam beberapa kasus, ada intervensi asing dalam pembuatan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia, yang artinya mengerosi kedaulatan negara dan kedaulatan Pemerintah Indonesia. Ketiga, beberapa studi menunjukkan adanya kegagalan aktor internasional dalam merekonstruksi masyarakat tertimpa bencana. Berbagai bentuk bantuan tidak dapat diterima oleh komunitas dan pemerintah lokal disebabkan oleh kurangnya pengetahuan aktor internasional tersebut tentang struktur adat dan budaya komunitas lokal, serta juga bantuan yang mereka salurkan tidak tepat sasaran. Keempat, munculnya dependensi masyarakat (komunitas) terhadap bantuan kemanusiaan internasional dan berakibat pada keengganan untuk memaksimalkan kapabilitas diri sendiri.

Ketika terjadi tsunami tahun 2004, tentara Amerika dan Australia langsung ke lokasi bencana mengulurkan bantuan makanan pokok dan penanganan medis untuk para korban supaya bertahan hidup. Beberapa waktu kemudian, ratusan Non-Government Organizations (NGO) internasional maupun nasional, dan lembaga bantuan dunia lainnya berdatangan untuk membangun kembali NAD dan Nias.⁷ Kejadian yang sama juga terjadi pada bencana meletusnya gunung merapi di Yogyakarta dan Jawa tengah dan gempa tsunami di Sumatera Barat. Tanggapan segera dari pihak asing ini yang langsung pada masyarakat tertimpa bencana, seakan menunjukkan Pemerintah dan Bangsa Indonesia tidak memiliki kapabilitas untuk menangani bencana dengan segera sebagaimana halnya negara-negara maju.

⁷Djuneidi Saripurnawan, Aceh Pasca Tsunami: Dampak Negatif Bantuan yang Berlebihan, diakses pada <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20071218143534>, 13 November 2016

Pembelajaran utama mengenai kehormatan Bangsa dan Negara Indonesia diperoleh dari penanggulangan bencana tsunami Aceh 2004. Lembaga Internasional pemerintah maupun non-pemerintah yang memberikan bantuan kemanusiaan pada saat itu mempertanyakan kapasitas nasional dan lokal dalam menanggulangi bencana. Kapasitas nasional dalam koordinasi dinilai tidak jelas sehingga banyak lembaga internasional memutuskan untuk membuat inisiatif mereka sendiri dan mereka berpikir bahwa koordinasi dengan pemerintah lokal tidak akan membawa kesuksesan penanganan bencana. Sebagaimana kesimpulan yang dikutip dari *Tsunami Evaluasi Coalition* untuk Indonesia yang ditulis oleh Elizabeth Scheper berikut :

*The official disaster management structures at provincial and district levels had no contingency plans and were unable to provide operational capacity and coordination for national and international responses. There were no clear coordination procedures for national or international actors, making the initial relief response ineffective. In the absence of national coordination capacity, international agencies were left to initiate and coordinate their immediate relief responses on their own*⁸

Masuknya begitu banyaknya lembaga kemanusiaan ke daerah-daerah bencana pasti menimbulkan banyak kesulitan. Kedatangan sejumlah besar pekerja baru yang sebagian besar tidak dapat berbicara bahasa daerah, menimbulkan tekanan cukup besar dalam sistem daerah.⁹ Permasalahan awal yang sering muncul adalah pengkoordinasian bantuan kemanusiaan yang berdatangan dalam jumlah besar dengan berbagai macam bentuk bantuan. Pada umumnya masing-masing aktor dan organisasi yang memberikan bantuan memiliki mekanisme sendiri dan enggan untuk dikoordinir oleh pihak lain.¹⁰

Setiap organisasi pemberi bantuan kemanusiaan, khususnya yang mengatasnamakan negara tertentu, masing-masing memiliki perbedaan tujuan. Di samping, tujuan yang bersifat moral dan kemanusiaan, setiap bantuan luar negeri memiliki esensi politik dari tujuan kebijakan luar negeri negara pendonor. Indonesia sebagai negara penerima bantuan, seringkali harus dihadapkan pada benturan kepentingan dan mekanisme penyaluran bantuan yang berbeda dari masing-masing donor. Tidak jarang pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendapat kritikan dan desakan karena dianggap tidak memiliki sistem dan

⁸Sisira Jayasuriya dan Peter McCawley. *The Asian Tsunami: Aid and Reconstruction After Disaster*. Tokyo : Asian Development Bank Institute, 2011

⁹Ibid

¹⁰Elizabeth Scheper, *Impact Of The Tsunami Response On Local And National Capacities*, TEC Capacities Evaluation: Indonesia, April 2006

pengelolaan dana bantuan yang baik. Klaim dari donor mengenai transparansi dan pertanggungjawaban dana yang tidak terpenuhi berakibat pada pelarangan pemerintah lokal dan lembaga lokal untuk ikut campur dalam program-program yang ada. Dalam prakteknya, dalam penyaluran bantuan tsunami, banyak donor terutama lembaga internasional tidak bersedia menyerahkan pengelolaan keuangan program ke lembaga nasional. Klaim dan kebijakan lembaga donor tersebut mengakibatkan pejabat pemerintah penerima bantuan merasa bahwa pendekatan ini kurang menghargai kepemilikan nasional di negara mereka sendiri.¹¹ Lebih jauh lagi, kebijakan lembaga donor dan program-program penanggulangan bencana yang mereka jalankan secara langsung maupun tidak mengerosi kedaulatan negara penerima bantuan dan keadaan ini telah terjadi di Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia perlu untuk memperbaharui kapasitas nasional dalam menanggulangi bencana.

Fenomena ketiga juga ditemui dalam proses penanggulangan bencana di Indonesia yang melibatkan bantuan kemanusiaan internasional khususnya dalam pemulihan bencana Tsunami Aceh dan Gempa di Sumatera Barat. Lembaga internasional kurang memperhatikan nilai-nilai agama dan adat setempat, dimana penduduknya yang mayoritas muslim. Dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi, proses pembangunan sedikit sekali melibatkan para pemuka adat dan tokoh masyarakat.¹²

Bantuan yang disalurkan pada masyarakat yang tertimpa bencana tidak hanya berupa barang, namun juga dalam bentuk uang tunai yang berakibat pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan menjadi tinggi, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk memobilisasi sumberdaya yang mereka miliki untuk memulihkan kehidupan. Pemberian bantuan saat rekonstruksi dan rehabilitasi saat bencana tsunami Aceh bahkan menimbulkan gejala *Ducth diseases*, dimana seluruh barang-barang yang diperlukan untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi serta barang kebutuhan pokok melonjak naik, sebagai akibat banyaknya uang beredar dan permintaan meningkat.¹³

Fenomena Samaritan dilemma yang dihadapi negara ini mendorong pemerintah untuk membangun kapasitas nasional dalam menanggulangi bencana baik, dari segi kebijakan, infrastruktur dan teknologi. Pemerintah Indonesia berupaya untuk lebih *self help* dalam menghadapi bencana dan memiliki proyeksi di masa yang akan datang menjadi negara yang memberikan bantuan terhadap negara lain yang mengalami bencana.

¹¹Sisira Jayasuriya dan Peter McCawley

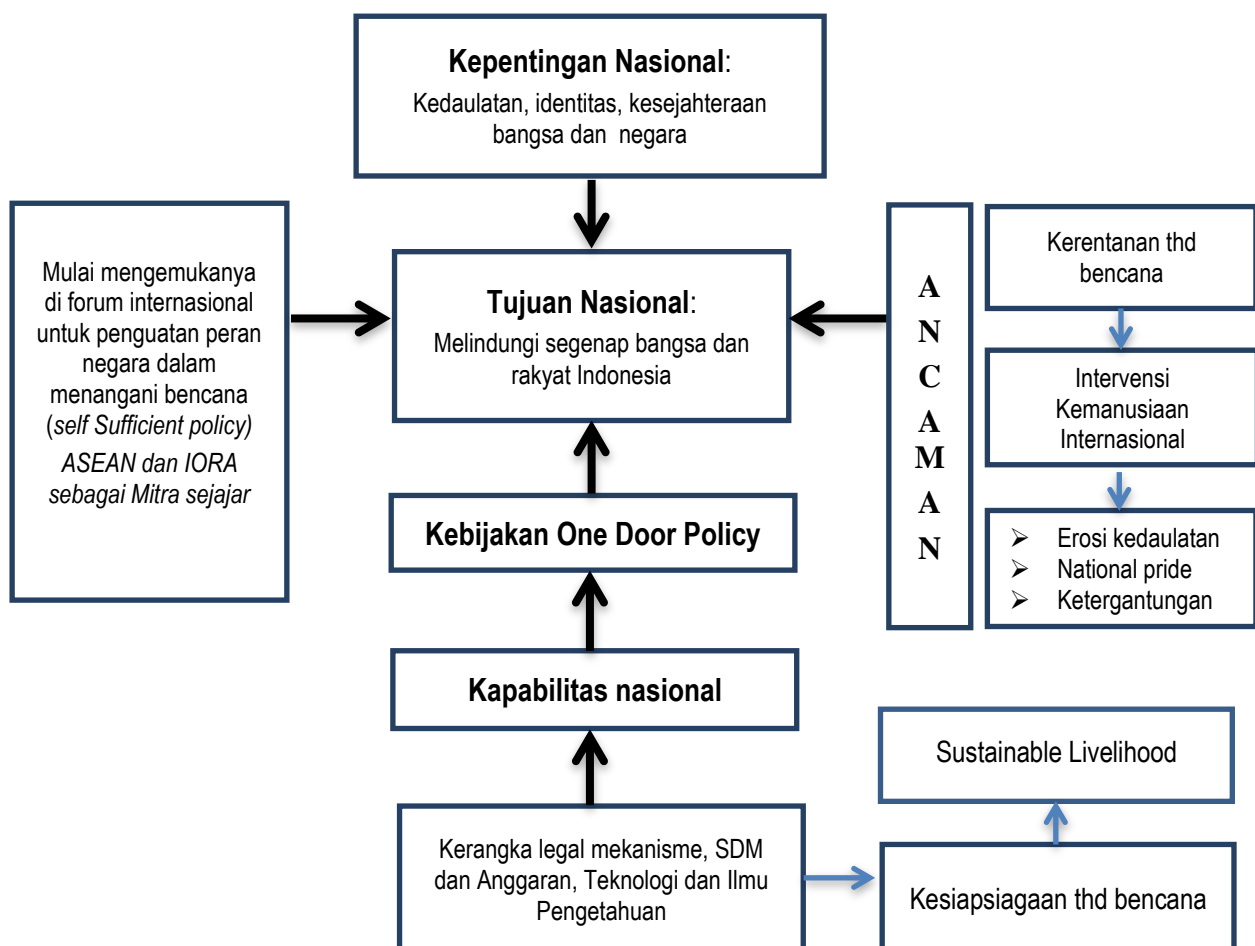
¹²Elizabeth Scheper, hal 33

¹³Sisira Jayasuriya dan Peter McCawley

Analisis Perubahan Orientasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penerimaan Bantuan Kemanusiaan Internasional

Berangkat dari pemikiran Viotty dan Kauppy mengenai perilaku suatu negara yang selalu mempertimbangkan, kepentingan nasional, kapasitas, ancaman, dan kesempatan dalam membuat suatu kebijakan dan tindakan, maka perubahan orientasi kebijakan sebagai negara yang berdaulat dan bermartabat sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki kapasitas untuk melindungi segenap bangsa, rakyat dan wilayahnya. Belajar dari pengalaman, Pemerintah Indonesia secara berkesinambungan berupaya untuk membangun mekanisme dan kapasitas nasional untuk menanggulangi bencana dan mengurangi resiko terhadap bencana. Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi bencana sejak tahun 2010 dapat dianalisis dengan bagan 4.1 di bawah ini.

Bagan 4.1 Skema Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana Indonesia



Sumber: diolah oleh peneliti

Kapasitas nasional diwujudkan dalam bentuk kemandirian nasional yang meliputi kemandirian masyarakat, kemandirian pemerintah dan kearifan dunia usaha. Dalam rencana strategis penanggulangan bencana 2015-2019, kemandirian adalah fokus utama dalam pembangunan termasuk dalam perencanaan penanggulangan bencana. Salah satu bentuk kemandirian ini diwujudkan dengan penanganan bencana yang menimpa sejak tahun 2014-2016 dengan mengandalkan kemampuan nasional. Meskipun pada akhirnya, Pemerintah meminta bantuan pada empat negara untuk mengatasi asap yakni Rusia, Singapura, Jepang dan Malaysia.¹⁴

Indonesia yang dikaruniai kekayaan alam melimpah juga berpotensi untuk mengalami peningkatan bencana setiap tahunnya seiring dengan semakin tingginya tingkat degradasi lingkungan dan perubahan iklim yang ekstrim. Ancaman bencana ini menjadi pintu masuk juga bagi intervensi kemanusiaan komunitas internasional yang memiliki berbagai macam tujuan. Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan asing. Selain meningkatkan kemandirian nasional, Indonesia menggunakan *soft diplomacy* membangun kemitraan yang sejajar dengan sesame negara berkembang dan rawan bencana, baik secara multilateral maupun bilateral. Kemitraan ini sejajar ketika tidak ada yang bersifat mendikte dan tidak menciptakan ketergantungan sebelah pihak. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah Indonesia lebih mendekatkan diri dengan negara kawasan dan negara selatan.

Kesimpulan

Perubahan orientasi dan kebijakan penanggulangan bencana didasarkan pada pengalaman masa lalu yang mengajarkan Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam menanggulangi bencana. Pelajaran berharga dimana kedaulatan negara tererosi dan tidak dihargainya nilai-nilai budaya, serta dependensi masyarakat terhadap bantuan yang tercipta, mendorong pemerintah untuk lebih berorientasi membangun kemandirian dalam menanggulangi bencana. Kemandirian nasional merupakan kemandirian masyarakat rawan bencana, kemandirian pemerintah dan kearifan dunia usaha nasional merupakan tiga pilar kemitraan yang berupaya dibangun untuk mengatasi bencana. Dalam ruang lingkup global dan regional, Indonesia lebih berorientasi pada ASEAN dan negara anggota IORA sebagai mitra kerjasama dalam menanggulangi bencana. Indonesia yang diwakili BNPB secara aktif terlibat dalam aktivitas Disaster Risk reduction (DDR) ASEAN yang dipusatkan pada AHA Centre.

¹⁴Bcc Indonesia, Lima negara bantu Indonesia atasi kabut asap, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151009_indonesia_negara_bantuasap

Referensi

- A. Harmer and L. Cotterrell, *Diversity in Donorship: The Changing Landscape of Official Humanitarian Aid*, HPG Report 20, London: ODI, 2005.
- ALNAP, *The role of national governments in international humanitarian response to disasters*, 26th ALNAP Meeting in Kuala Lumpur 16-17 November 2010, Meeting Background Paper
- C. Foley, *Mozambique: A Case Study in the Role of the Affected State in Humanitarian Action*, HPG Working Paper, London: ODI, 2007.
- Damon Coppola, *Investigation of the Political Implications of Disasters; Requiring International Assistance*, MEM Crisis, Disaster and Risk Management
- Erik Warker, *Disaster Politics: International Politics and Relief Efforts*, Harvard International Review
- G. Price and M. Bhatt, *India: A Case Study in the Role of the Affected State in Humanitarian Action*, HPG Working Paper, London: ODI, forthcoming 2009
- Gema BNPB, Vol. 4 No. 3, Desember 2014
- Gema BNPB, Agustus 2015
- I.N. Bhakti, "Kerangka Dasar Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia" dalam R.S.Inayati, et.a, *Peluang dan Kendala Politik Luar Negeri RI*, PPW-LIPI, 1998
- Jayasuriya, Sisira dan Peter McCawley. *The Asian Tsunami: Aid and Reconstruction After Disaster*. Tokyo : Asian Development Bank Institute, 2011
- Lassa, Jonathan dkk, 2009, *Pengelolaan risiko Bencana Berbasis komunitas (PRBBK)*, Grasindo, Jakarta.
- Lennart Wohlgemuth, *Perspective: Humanitarian Assistance*, Centre for African Studies
- Lexy Moleong, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Maarif, Syamsul. *2nd Regional Workshop of ASEAN Cooperation Project on Utilization of Space Based Technologies for DRR di Bogor*, 26 Juni 2012.
- Maarif, Syamsul *Pikiran Dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia*, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012)
- M. Leifer, *Indonesia's Foreign Policy*, George Allen and Unwin, USA, 1983
- Michael D. Selves, *The Politics Of Disaster*

- Paul Harvey, *Towards good humanitarian government: The role of the affected state in disaster response*, HPG Policy Briefs and Reports , London: ODI, 2010 dalam www.odi.org.uk/hpg
- Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics*, United State of America", Pearson Education, 2013
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala BNPB No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
- Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019
- Ringkasan Kajian Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional dalam Rangka Penyusunan Draft RPJM tahun 2015-2019, Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun 2014
- Sunario, "Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam teori dan praktek" dalam S.Hartono, et al, *Semangat Kebangsaan dalam Politik Luar Negeri Indonesia*, Angkasa Bandung, 2002
- Scheper, Elizabeth. Impact Of The Tsunami Response On Local And National Capacities, TEC Capacities Evaluation: Indonesia, April 2006
- Saripurnawan, Djuneidi. Aceh Pasca Tsunami: Dampak Negatif Bantuan yang Berlebihan, diakses pada <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20071218143534>, 13 November 2016
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Y.M.Yani, "Perspektif-perspektif Politik Luar Negeri : Teori dan Praksis", Paper yang dipresentasikan pada Seminar mengenai Sistem Politik Luar Negeri, 2008.
- BBC Indonesia, Lima negara bantu Indonesia atasi kabut asap http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151009_indonesia_negara_bantuasap

Diplomasi BVK Dalam Menarik Minat Wisatawan Manca Negara Ke Indonesia

Asep Kamaludin & Laode Muhamad Fathun

UPN "Veteran" Jakarta

keisya01@yahoo.com, lm_fathun@yahoo.co.id

Abstract

This paper will explain about diplomacy BVK (visa-free visits) related to Indonesia's strategic efforts in realizing the tourism industry wonderful Indonesia. The methodology used is descriptive method as the type of writing and techniques of primary and secondary data collection, accompanied by qualitative data analysis techniques. Results: strategic policy Indonesia in realizing wonderful program by using diplomacy BVK stated in Presidential Decree No. 15 of 1983 on Tourism Development Policy is changed by Presidential Decree No. 39 in 1986. Basically the entire foreign travelers are exempt from the obligation to have a visa. Transformation of domestic legislation in realizing Indonesia as a world tourism destination countries contained in the various strategic policy as a form of diplomacy attract the influx of foreign tourists to Indonesia. This strategic policy as a form of seriousness Indonesia to make the industry. tourism as one of the foundations of the national economy or tourism. That effort began to publish Presidential Decree on Visa Free for a Short Visit, enhanced by Presidential Decree on Visa Free Visits. Diplomacy BSK give preferential policies to attract a number of countries visited ecotourism in Indonesia as seen from the number of countries from 15 countries BVKS BSK + 75 countries Free Visit Visa (total 90 countries). Then, issued Presidential Decree No. 21 2016 on Visa Free Stay Free visas for 169 countries. Thus the purpose of the State as one of the world's tourism it is important for Indonesia to use tourism as an instrument of diplomacy. BVK diplomacy strategic policy is clear evidence of the seriousness of the government in building eco-tourism as one of the foundations of the national economy.

Keywords:

diplomacy BVK, wonderful Indonesia, Ecotourism, tourists

Pendahuluan

Pola hubungan internasional di abad 21 ini memasuki era yang sangat kompleks. Upaya negara dalam membangun hubungan di antara mereka tidak lagi berfokus pada *high politics* isunya dominasi terkait dengan militer.

Walaupun tidak bisa pula isu tersebut di hilangkan secara mutlak. Transformasi isu dalam hubungan internasional termasuk bervariasinya isu-isu baru dalam hubungan internasional yang juga di tambah dengan munculnya aktor-aktor negara menandai hubungan internasional memasuki zaman hybrid. Hybrid yang dimaksud adalah proses hubungan internasional sangat datar dari aktor individu sampai pada *global governance* Konteks inilah hubungan internasional tidak lagi dimaknai dengan dengan pola "*international relation*" tetapi menjadi "*global relation*". *International relational* lebih bersifat *high politic* dan sifatnya vertikal.

Kontelasi pergeseran tersebut membawa transformasi model kebijakan luar negeri banyak negara termasuk Indonesia. Fokus pembangunan negara tidak lagi dominan di arahkan pada pembangunan militer secara komprehensif. Hal ini cenderung didasari oleh pembangunan dalam bidang militer dalam konteks wilayah Indonesia tidak terlalu prioritas sebab baik wilayah domestic dan regional berada dalam kontelasi politik internasional yang damai. Disinilah perbedaan itu terjadi ketika Jokowi memimpin Indonesia sejak tahun 2014 yang lalu memberikan pola tata kelola pemerintahan yang berbeda dari pendahulunya yakni SBY.

Transformasi pembangunan nasional di zaman Jokowi lebih di arahkan pada pembangunan ekonomi sebagai fondasi nasional. Hal ini didasari pada karakter *holistic* Jokowi dalam mengambil kebijakan sebagai mantan seorang pebisnis. Hal ini berpengaruh pula pada model kebijakan Jokowi sebagai pemimpin dan "manager" Indonesia sampai tahun 2019. Arah kepemimpinan Jokowi lebih bersifat "ekonomi politik" di banding ketika SBY yang "politik ekonomi". Ekonomi politik di maksudkan adalah pola pemerintahan yang dibentuk oleh Jokowi lebih dominan terkait dengan upaya control ekonomi terhadap politik. Dalam arti segala sendi-sendi fondasi ekonomi harus di genjot kembali sebagai upaya mendapatkan devisa negara (Fathun, 2016). Asumsi terjawab ketika Jokowi memprioritaskan sejumlah bidang-bidang "basah" sebagai fondasi ekonomi nasional. Hal itu berkaitan dengan (1) bidang energi, (2) pangan, (3) infrastruktur, (4) maritim dan (5) pariwisata. Dari kelima objek tersebut merupakan sejumlah bidang yang penting di bangun oleh Jokowi. Terkait dengan infrastruktur sebenarnya bukan objek pembangunan tetapi lebih berhubungan dengan pendukung dari empat objek lainnya. Dari kelima bidang tersebut salah satu prioritas pemerintah adalah bidang pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu objek vital dalam membangun Indonesia. Hal ini didasari oleh keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia disertai dengan keanekaragaman budaya, etnik, bahasa, kuliner kerajinan

tangan merupakan fondasi membangun Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Mengapa dikatakan kreatif sebab hal ini berkaitan dengan inovasi yang di ciptakan oleh sejumlah daerah untuk menghasilkan pundi-pundi ekonomi tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Dalam arti bahwa hal ini berkaitan dengan tingkat kreatifitas dalam memanfaatkan budaya, kuliner, kondisi geografi daerah dan bidang lainnya sebagai objek daya Tarik wisatawan mancanegara. Hal inilah yang mendasari bahwa pembangunan pariwisata merupakan pembangunan yang strategis dalam fondasi ekonomi Indonesia, sebab sudah bisa dipastikan bahwa ketika wisatawan asing berkunjung ke Indonesia akan pula menikmati ekonomi kreatif ainya seperti kuliner, kerajinan, tarian dll yang awalnya datang untuk berkunjung di daerah tersebut.

Upaya Indonesia dalam memaksimalkan wilayah geografis sebagai objek wisata dan ekonomi kreatif lainnya tentunya membutuhkan cara komunikasi yang efektif, efisien dan damai. Komunikasi yang efektif itulah yang dimaknai dengan diplomasi. George F. Kennan salah satu ahli yang memberikan definisi diplomasi sebagai *diplomacy as an art and international relations in a universal context* (Harold Nicolson, 1974) Begitu pula dikatakan oleh Zainal Abidin Partao bahwa diplomasi adalah "suatu cara komunikasi dengan pemilihan kata serta kalimat yang dilakukan berbagai pihak-pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang diakui untuk meraih kepentingan kita sendiri (Zainal Abidin Partao. 2007:35). Dengan demikian bahwa bisa di definisikan bahwa diplomasi adalah upaya persuasive dalam menyampaikan gagasan dan ide secara persuasif agar orang lain memahami maksud dan tujuan kita. Intinya diplomasi berbicara tentang mempengaruhi orang lain atau istilahnya *soft power*. Penyampaian gagasan tersebut bisa dibentuk melalui respon kebijakan untuk mencapai tujuan nasional atau kepentingan nasional.

Dalam konteks Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia bahwa kepentingan nasional merupakan prinsip, nilai, ideologi, yang harus diperjuangkan, maka untuk memperjuangkan kepentingan nasional ditempuh melalui diplomasi. Namun diplomasi sebagai upaya mempengaruhi orang lain harus membutuhkan objek sebagai instrument menyampaikan gagasan tersebut. Diplomasi hanya berkaitan dengan tata cara penyampaian sedangkan penyampaian itu membutuhkan instrument. Dalam hal itulah paper ini menyebutkan diplomasi BVK (bebas visa kunjungan) sebagai instrument menarik masuknya wisatawan asing di Indonesia.

Diplomasi BVK yang kami maksudkan adalah instrumen respon kebijakan nasional di pemerintahan Jokowi berupa memberikan bebas visa kunjungan kepada sejumlah negara. Hal ini dilakukan untuk menarik sebanyak mungkin

wisatawan asing masuk ke Indonesia. Kebijakan strategis ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu fondasi ekonomi nasional atau ekowisata. Upaya tersebut mulai di terbitkan Kepres tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang disempurnakan dengan Kepres tentang Bebas Visa Kunjungan. Diplomasi BSK memberikan kebijakan khusus untuk menarik minat sejumlah Negara melakukan kunjungan ekowisata di Indonesia yang terlihat dari jumlah Negara BSK dari 15 negara BVKS + 75 negara Bebas Visa Kunjungan (total 90 negara). Kemudian, diterbitkan Perpres No. 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Bebas visa bagi 169 negara. Dengan demikian bahwa sebagai salah satu tujuan negara pariwisata dunia maka penting bagi Indonesia menggunakan pariwisata sebagai instrument diplomasi. Kebijakan strategis diplomasi BVK merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah membangun ekowisata sebagai salah satu fondasi ekonomi nasional.

Keseriusan pemerintah membangun industri wisata sebagai objek wisata dengan slogan wonderful Indonesia merupakan langkah kongkrit pemerintah untuk melihat dirinya sebagai negara yang indah. Dalam arti sebagai pembuktian diri atau *soft power* bahwa dibalik keindahan alam dan keanekaragaman di Indonesia, warga Indonesia bisa hidup dengan damai, sejahtera, dan adil dan makmur. Artinya pemerintah Indonesia menyadari betul ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh manusia setelah capek dalam bekerja. Hal itulah yang dimaksudkan dengan hiburan atau wisata. Wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Pada dasarnya Wisatawan berkunjung ke suatu destinasi pariwisata karena *seeks various psychic and physical experiences and satisfaction* (mencari pengalaman dan kepuasan yang bersifat psikis dan fisik). Lebih lanjut R.W. McIntosh menjelaskan bahwa motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan adalah sebagai berikut: 1. *Pleasure* (bersenang-senang), dengan tujuan melarikan diri untuk sementara dari rutinitas sehari-hari; 2. *Relaxation, rest and recreation* (beristirahat untuk menghilangkan stress), dengan tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan mengunjungi lingkungan yang berbeda dengan yang dilihatnya sehari-hari, di mana lingkungan tersebut memberikan kesan damai dan menyehatkan; 3. *Health* (kesehatan), yaitu berkunjung ke tempat-tempat yang dapat membantu menjaga kesehatan atau menyembuhkan penyakit; 4. *Participation in sports* (olah raga yang bersifat rekreasi); 5. *Curiosity and culture* (rasa ingin tahu dan motivasi yang berkaitan dengan kebudayaan), yang

saat ini semakin meningkat kualitasnya karena perkembangan teknologi informasi dan peningkatan kualitas pendidikan.

Motivasi yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kunjungan dalam hal ini adalah keinginan untuk melihat destinasi pariwisata yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi orang yang menyelenggarakan aktivitas budaya yang sangat penting, seperti festival musik, festival seni, teater dan sebagainya; 6. *Ethnic and family* (kesamaan etnik dan kunjungan kepada keluarga). Khusus berkaitan dengan kesamaan etnik, orang dapat termotivasi untuk mengunjungi suatu tempat karena dianggap sebagai tempat tinggal/kelahiran nenek moyangnya. 7. *Spiritual and Religious* (alasan yang bersifat spiritual dan keagamaan); 8. *Status and prestige* (menunjukkan status sosial dan gengsi), dengan tujuan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang memiliki status sosial dan gengsi yang tinggi karena mampu berwisata ke suatu destinasi pariwisata tertentu; dan, 9. *Professional or business* (melakukan aktivitas yang berkaitan dengan profesi/pekerjaan), misalnya aktivitas menghadiri suatu sidang atau konferensi (Basuki Antariksa, 2011:1-2).

Dalam konteks inilah pemanfaatan objek di atas merupakan upaya membangun ekonomi wisata atau ekowisata. Konsep ekowisata tidak mengedepankan faktor pertumbuhan ekonomi, melainkan menjaga keseimbangan antara kegiatan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya (Yulianda, 2007). Lanjut Latupapua (2008) mengatakan bahwa Ekowisata merupakan konsep dan istilah yang menghubungkan pariwisata dengan konservasi, ekowisata sering dipahami sebagai pariwisata berwawasan lingkungan, jenis wisata ini merupakan salah bentuk pariwisata alternatif yang menonjolkan tanggungjawab terhadap lingkungan (Arip Bayu Adi Dkk :2013:49-60). Dengan demikian potensi yang terlihat pada indikator di atas secara keseluruhan ada di Indonesia. Dengan menyasar hal itulah prioritas pemerintah menggenjot pariwisata melalui respon kebijakan diplomasi BVK merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi nasional. Oleh sebab itulah paper ini akan menjelaskan strategi yang di terapkan pemerintah untuk mendukung diplomasi BVK sebagai upaya membangun ekonomi wisata.

PEMBAHASAN

Produktivitas Pariwisata Indonesia

Isu pariwisata adalah salah satu isu yang menjadi instrumen negara untuk menarik devisa Negara dari tingkat kepuasaan menikmati alam oleh pariwisata. Artinya negara tidak perlu berkontak fisik secara langsung untuk

meraih devisa negara, cukup dengan merawat sejumlah tempat detinasinya sebagai objek penarik simpati wisatawan asing. Mengutip Renstra Kempar dan data BPS pengembangan kepariwisataan difokuskan kepada 7 minat khusus, yaitu: (1) wisata budaya dan sejarah; (2) wisata alam dan ekowisata; (3) wisata olahraga rekreasi meliputi: menyelam, selancar, kapal layar, treking dan mendaki, golf, bersepeda, dan maraton; (4) wisata kapal pesiar; (5) wisata kuliner dan belanja; (6) wisata kesehatan dan kebugaran; dan (7) wisata konvensi, insentif, pameran dan event. Pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dampak kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2014 sebesar Rp. 391,49 triliun, 4,01% dari PDB nasional. Penciptaan PDB di sektor pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan nusantara, anggaran pariwisata pemerintah, pengeluaran wisatawan mancanegara, dan investasi pada usaha pariwisata yang meliputi: (1) Usaha daya tarik wisata; (2) Usaha kawasan pariwisata; (3) Jasa transportasi wisata; (4) Jasa perjalanan wisata; (5) Jasa makanan dan minuman; (6) Penyediaan akomodasi; (7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensidan pameran; (9) Jasa informasi pariwisata; (10) Jasa konsultan pariwisata; (11) Jasa pramuwisata; (12) Wisata tirta; dan (13) Spa. Di tahun 2014 ekonomi kreatif menciptakan nilai tambah sebesar Rp. 716,69 triliun, 7,06% dari PDB nasional, melalui 14 subsektor industri kreatif, yaitu: Arsitektur; Desain; Fesyen; Film, Video, dan Fotografi; Kerajinan; Teknologi Informasi dan Piranti Lunak; Musik; Pasar Barang Seni; Penerbitan dan Percetakan; Periklanan; Permainan Interaktif; Riset dan Pengembangan; Seni Pertunjukan; dan Televisi dan Radio.

Kontribusi ekonomi kreatif ini belum memperhitungkan subsektor kuliner yang juga memiliki potensi tinggi. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain pencipta nilai tambah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyerap banyak tenaga kerja. Tahun 2014, dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 10,32 juta orang, 9,00% dari tenaga kerja nasional. Di tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 12,30 juta tenaga kerja, 10,73% dari total nasional. Strategi *pro-poor* dan *pro-job* sangat sesuai pada kedua sektor. Sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2014 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US\$ 11,17 miliar, meningkat dari US\$ 10,05 miliar di tahun 2013. Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2014 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 8,8 juta di tahun 2013 dan menjadi 9,44 juta ditahun 2014, tetapi bersumber dari

peningkatan rata-rata pengeluaran per kunjungan dari US\$ 1.142,24 di tahun 2013, menjadi US\$ 1.183,43 di tahun 2014. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif menyumbang ekspor yang jauh lebih tinggi dari nilai impornya. Ekonomi kreatif menciptakan devisa melalui kontribusi net trade, mencapai 5,90% dari total nasional, atau senilai Rp 126,62 triliun di tahun 2014.

Mengutip Laporan Akuntabilitas Kemnetrian Pariwisata tahun 2015 menuliskan bahwa Keadaan kepariwisataan Indonesia tahun 2015 secara makro menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap PDB Indonesia sebesar 4,23% atau senilai Rp. 461,36 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai US\$ 11,9 milyar, dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12,16 juta orang. Pada kondisi mikro, juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 10,4 juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 255,20 juta perjalanan. Disisi lain lain, salah satu indikator penting yaitu aspek daya saing kepariwisataan, berdasar penilaian *WEF (World Economic Forum)* posisi Indonesia juga meningkat signifikan dari ranking 70 dunia menjadi ranking 50 di tahun 2015. Pertumbuhan pariwisata Indonesia yang melebihi rata-rata dunia, sebagai mana tercatat di tahun 2015 sebesar 10,63 % memberikan kepercayaan diri Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan target kunjungan wisman pada tahun 2016 dari 10 juta menjadi 12 juta.

Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah mencapai 255 juta perjalanan, Jumlah penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 11,3 juta orang. Tidak hanya itu, branding Wonderful Indonesia pada tahun 2015 naik 100 peringkat, dari semula tanpa peringkat menjadi peringkat ke-47, serta diraihnya berbagai penghargaan internasional untuk beberapa kategori, seperti; *UNWTO Award 2015*, *ASEANTA Award 2015*, *World Halal Destination 2015*.

Sektor pariwisata juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2015 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US\$ 11,9 miliar US\$ atau setara Rp. 163 trilliun (meningkat 113% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai angka devisa sebesar US\$ 11,17 miliar). Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2015 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 9,4 juta di tahun 2014 dan menjadi 10,4 juta di tahun 2015, tetapi juga bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran per kunjungan dari US\$ 1.183,43 di tahun 2014, menjadi US\$ 1.190 di tahun 2015. Dengan

kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran wisatawan.

Sedangkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tahun 2016 menunjukkan bahwa wisatawan asing mencapai 12 juta orang dengan pendapatan nasional mencapai 172 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 11,7 juta orang. Sedangkan target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2019 ingin mencapai masuknya wisatawan asing sebanyak 20 juta orang disertai dengan tingkat pendapatan nasional sebesar 240 triliun yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 juta orang. Hal ini juga membuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa auntuk menaikkan tingkat kompetitif Indonesia menjadi 30 dari urutan 50. Dengan demikian bahwa pentingnya ekonomi wisata adalah menjadi prospek yang potensial untuk membangun Indonesia. Hal ini pual sesuai dengan arahan presiden pada 15 Juni 2015 dalam Rencana Kerja Pemerintah /RKP Tahun 2016. Oleh sebab itulah, dengan adanya diplomasi BVK merupakan salah satu isntrumen pemerintah dalam menaikkan angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

Diplomasi BVK Indonesia

Upaya pengelolaan sector industri pariwisata Indonesia merupakan kebijakan yang strategis. Hal ini bukan hanya berhubungan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan dari industry pariwisata tersebut akan tetapi *image* yang di bentuk sebagai negara tujuan wisata harus meningkat setiap tahunnya. Tentu hal tersebut berkaitan dengan gengsi Indonesia yang sudah diketahui dunia akan potensi alamnya namun tidak didasari dengan tingkat kompetitif yang baik dalam ukuran global. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut salah satunya cenderung adalah prioritas kebijakan dalam merespon kebutuhan wisata nasional maupun tujuan wisata internasional. Untuk itulah kebijakan –kebijakan yang dibentuk saat ini merupakan konstruksi yang menunjukkan upaya pemerintah serius menggarap potensi wisata sebagai salah satu tonggak membangun ekonomi nasional.

Hal ini tertuang dalam arahan presiden pada desember 2014 yang menyatakan bahwa Industri pariwisata merupakan cara yang paling cepat untuk mendatangkan devisa apabila promosi dan pembangunan jaringan dikelola dengan baik. Pariwisata dapat ditingkatkan secara cepat apabila aspek promosi dikelola dengan baik dan benar dikutip dari Seminar Digital Diplomacy dengan Pemateri Velly Asvaliantina, Kedeputusan Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 28-29 September 2016 Di Jakarta). Dukungan kebijakan tersebut adalah bukti kongkrit keseriusan Jokowi membangun industry wisata sebagai salah satu asset nasional.

Berhubungan dengan maksimalisasi pemanfaatan ruang pariwisata sebagai instrumen objek diplomasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sstruktural untuk menarik masuknya wisatawan asing. Seperti yang telah di sampaikan sebelumnya bahwa diplomasi berhubungan dengan cara berkomunikasi dalam seni menyampaikan gagasan dengan cara persuasif maka dalam konteks untuk menarik masuknya wisatawan asing pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan. Hal ini berkaitan dalam istilah penulis bahwa dikeluarkannya instrument BVK tersebut sebagai media dan instrument diplomasi Indonesia untuk menginternasionalisasi wisata Indonesia. Adanya program *wonderful* Indonesia merupakan bukti bagaimana Indonesia berupaya membangun ekonomi wisata.

Mengapa hal ini dikatakan sebagai media diplomasi, karena diplomasi pada poinnya adalah berkaitan dengan instrument kebijakan dan implemntasinya dalam mempengaruhi orang lain. Diplomasi BVK disini maksudnya adalah membuat instrument kebijakan yang di internasionalisasi atau memberikan hak istimewa kepada 169 negara di dunia untuk berwisata ke Indonesia dengan bebas visa kunjungan dalam tempo tertentu. Hal ini didasari oleh Kepres No. 15 tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata sebagaimana telah dirubah dengan Kepres No. 39 tahun 1986, kebijakan tersebut pada dasarnya mengisaratkan bahwa seluruh wisatawan asing harus bebas visa. Setelah itu, Kepres No. 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 43 tahun 2011. Bebas Visa Kunjungan hanya bagi 15 Negara Mulai diberlakukan Visa kunjungan saat kedatangan/VOA. Kemudian , Kepres No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang telah direvisi menjadi Kepres No. 104 tahun 2015 15 negara BVKS + 75 negara Bebas Visa Kunjungan (total 90 negara). Setelah itu, diterbitkan Perpres No. 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Bebas visa bagi 169 negara. Dalam website Dijen Imigrasi RI mengisaratkan ada dua hal yang harus di miliki oleh wisatawan asing yang termasuk dalam 169 negara tersebut apabila ingin berkunjung yakni: a) Memiliki Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan , b) Memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara laian. Dalam konteks inilah terlihat jelas upaya internasionalisasi Indonesia melalui kebijakan diplomasi BVK untuk memperluas jaringan masuknya wisatwan asing untuk mengejar target yakni 20 juta pengunjung sampai 2019.

Strategi Maksimalisasi Diplomasi BVK

Upaya menginternasionalisasi kebijakan wisata Indonesia dengan *branding* "pesona Indonesia atau wonderful Indonesia sudah terlihat

dampaknya ketika munculnya kebijakan diplomasi BVK. Hal tersebut terlihat pada branding Wonderful Indonesia pada tahun 2015 naik 100 peringkat, dari semula tanpa peringkat menjadi peringkat ke-47, serta diraihinya berbagai penghargaan internasional untuk beberapa kategori, seperti; UNWTO *Award* 2015, ASEANTA *Award* 2015, *World Halal Destination* 2015. Sejumlah prestasi di tunjukan dengan membuat branding wonderful Indonesia seperti meraih peringkat ke 47 sebagai branding terbaik dunia versi *Travel and Tourism Competitiveness Index World Economic Forum*, selain itu meraih 3 penghargaan dari UNWTO tahun 2015 yang dilengkapi dengan 3 penghargaan di ajang ASEANTA 2015 dan 3 penghargaan di *World Travel Halal Tourism* 2015.

Berikut adalah sejumlah negara yang mengunjungi Indonesia:

Tabel 1.
Kunjungan Wisatawan Mancanegara Per Pasar Tahun 2015

NO	PASAR	TARGET	REALISASI
1	Singapura	1.905.000	1.519.430
2	Malaysia	1.665.000	1.200.202
3	China	1.335.000	1.324.851
4	Australia	1.170.000	1.035.325
5	Eropa	855.000	898.016
6	Jepang	560.000	492,077
7	KoreaSel	390.000	338,671
8	USA	260.000	251,221
9	India	230.000	271,252
10	Timteng	197.000	182,143
11	Filipina	275.000	271,252
12	Thailand	165.000	89,577
	Lainnya	993.000	2,308,951
Total		10.000.000	10.406.759

Sumber : LAK Kementerian Pariwisata – 2015

Adapun lokasi wisata yang menjadi favorit adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Pintu Masuk Wisatawan

PINTU MASUK	TARGET 2015	CAPAIAN
BALI (Ngurah Rai)	3.720.000	3,923,970
DKI JAKARTA	2.600.000	2,304,275
BATAM	1.510.000	1.545.818
TANJUNG UBAN	400.000	304.010
SUMATERA UTARA (Kuala Namu)	250.000	197.818
SUMATERA BARAT (Minangkabau)	50.000	42.330
RIAU (Sultan Syarief Kasim II)	30.000	25.337
JAWA BARAT (Husein Sastranegara)	180.000	159.647
JAWA TENGAH (Adi Soemarmo)	30.000	7.885
D.I. YOGYAKARTA (Adi Soecipto)	90.000	81.278
JAWA TIMUR (Juanda)	250.000	200.851
NTB (BIL)	40.000	70.217
KALIMANTAN BARAT (Entikong)	30.000	24.852
KALIMANTAN TIMUR (Sepinggan)	20.000	7.865
SULAWESI UTARA (Sam Ratulangi)	30.000	19.465
SULAWESI SELATAN (Hassanudin)	20.000	13.091
OTHER PORT	490.000	548.145
PLB	-	370.869
KITAS	-	306.540
T O T A L	10.000.000	10.406.759

Sumber : LAK Kementerian Pariwisata – 2015

Tabel 1 dan tabel 2 memasukkan data wisatawan dari Pos Lintas Batas (PLB) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian ("PP No. 32/1994"), Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah

satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Dari dua tabel tersebut disimpulkan Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Jumlah kunjungan terbesar wisatawan mancanegara ke Indonesia, adalah: Singapore sebanyak 1.519.430 wisman, China sebanyak 1.324.851 wisman, Malaysia sebanyak 1.200.202 wisman, Australia sebanyak 1.035.325 wisman, dan Jepang sebanyak 492.077 wisman. Berdasarkan pintu masuk utama secara kumulatif, sebagai berikut: Ngurah Rai sebanyak 3.923.970 wisman, Soekarno Hatta sebanyak 2.304.275 wisman dan Batam sebanyak 1.545.818 wisman. Kesuksesan kunjungan pertumbuhan wisatawan asing ke Indonesia yakni 7,2% mengalahkan indeks kunjungan pertumbuhan ASEAN hanya 5,1% dan pertumbuhan dunia 4,4%.

Mengutip LAK Kementerian Pariwisata tahun 2015 Pemasaran pariwisata Indonesia di kancah mancanegara memiliki strategi yang pertama adalah DOT (*Destination, Origin, Time*), yaitu:

1. **Destination** – melihat destinasi wisata mana sajakah yang diminati oleh masing-masing wisatawan, dengan cara melihat *dashboard* atau demografi dari masing-masing wisatawan.
2. **Origin** – merupakan strategi untuk melihat asal negara dari masing-masing wisatawan. Kemudian data ini akan dijabarkan menjadi sebuah data demografi atau dashboard mengenai ciri-ciri, kegemaran, tipe, waktu libur, hari raya, dsb.
3. **Time** – waktu merupakan strategi penting untuk mensinkronisasikan waktu libur/Hari Libur dari masing-masing negara asal wisatawan dengan event/festival yang diselenggarakan di Indonesia.

Setelah DOT, BAS merupakan strategi pemasaran pariwisata Indonesia selanjutnya adalah:

1. **Branding** adalah upaya untuk mempromosikan pariwisata melalui penempatan iklan di Website, Media Ruang, TV, dan Media Cetak, mengadakan festival di mancanegara, dan mengadakan famtrip dengan mendatangkan sekelompok wisatawan asing sesuai dengan paket wisata yang ditawarkan.
2. **Advertising** adalah salah satu strategi pemasaran pariwisata mancanegara melalui pemasangan iklan di Media Cetak (koran dan majalah), di *event-event* mancanegara, *blocking sale* di televisi, pembuatan bahan-bahan promosi, dan kerja sama promosi dengan pelaku industri pariwisata.
3. **Selling** adalah memfasilitasi penjualan Paket Wisata yang dibuat oleh industry melalui *Tradeshows* dan *Sales Mission*.

Untuk mencapai target pemerintah pada tahun 2019 dengan asumsi mencapai pengunjung wisata 20 juta orang memang hal yang tidak mudah. Hal tersebut disadari pula oleh sejumlah *stakeholders* terkait target tersebut. Untuk memberi semangat yang berhubungan dengan target pemerintah maka seperti arahan presiden tanggal 24 Juni 2015 yang menyakan bahwa terkait masalah wisata di Indonesia, presiden menyampaikan apabila ada paket destinasi dan produk pariwisata yang belum menarik agar segera diperbaiki. Adapun sejumlah tempat-tempat pariwisata yang sudah ada, tetapi belum laku, perlu ada perbaikan dan ditingkatkan promosinya. Selanjutnya, dalam arahan Presiden 15 Oktober 2015 menginstruksikan fokus dan konsentrasi pada 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas. Perlu sebuah langkah nyata di lapangan, sehingga 10 destinasi wisata tersebut benar-benar dapat terlihat perubahan, baik perubahan di bidang lingkungan, penataan pedagang, perbaikan manajemen promosi daerah, dan perbaikan infrastruktur, terutama air bersih, listrik, jalan dan kamar mandi dan lain-lain. Fokus terhadap 10 destinasi wisata. Apabila pengembangan 10 destinasi wisata berhasil, diharapkan mampu memancing daerah-daerah di sekitarnya untuk sukses. Dikutip dari Penulis Mengikuti Seminar Digital Diplomasi, 28-29 September 2016 di Jakarta Ruang Auditorium CSIS).

Maksimalisasi upaya diplomasi BVK sebagai instrument memancing masuknya wisatwan asing bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut yakni:

- (1) pemerintah Indonesia harus fokus dalam mengembangkan pariwisata sebagai sektor industri ekonomi kreatif tertuang dalam paket kebijakan ekonomi nasional,
- (2) pembangunan infrastruktur pariwisata yang menyangkut komponen: integrasi *planning* pembangunan infrastruktur, dan program pendukungnya,
- (3) program institusi terkait dengan keterlibatan institusi dan *stakeholders* dalam implementasi dan eksekusi program,
- (4) kebijakan finansial pemerintah terkait kolaborasi lembaga donor, investor dalam pengembangan industri wisata,
- (5) kebijakan bebas visa singkat harus terus di kuatkan inetrnasionalisasinya sebagai wadah promosi kebijakan dan
- (6) kebijakan program 'new bali', yakni Program 10 "Bali Baru" Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Gunung Bromo & Gunung Semeru (Jawa Timur), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara) atau beberapa tempat lainnya yang selama ini belum

terekspose Namun ada beberapa tempat yang menjadi prioritas ekowisata bahari di Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Dimulai dari pulau Nias yang merupakan sebuah pulau kecil di Sumatra Barat dengan tujuan wisata bahari Pantai Sorake, Pantai Fofola, Pantai Hoya, Pantai Onolimbu dll. Kemudian bergeser ke pulau Sabang dan sekitarnya dengan objek wisata Pulau Weh, Pantai Gapang, Pantai Iboih, Pulau Rubiah, Pantai Paradiso, Danau Aneuk Laot. Setelah itu ada Raja Empat dan sekitarnya dengan objek wisata Pulau Kofiau, Misool, Waigeo Selatan dan Barat, Kepulauan Ayau. Kemudian Anambas, dengan objek wisata 19 pulau, di ikuti oleh Wakatobi dengan objek TN Wakatobi (Pulau Wangiwangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomea, Pulau Binongko). Masih daerah Sulawesi yakni di Bunaken dengan objek wisata TN Bunaken (Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Manado Tua, Pulau Montehage, Pulau Nain). Kemudian ada pulau Lombok dengan tujuan wisata TN Gunung Rinjani, Segenter, Desa Bayan, Senaru, Air terjun Sendang Gile, Gunung Rinjani, Tetebatu, Air terjun jukut dan yang terakhir Pulau Flores dengan objek wisata Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Sabolo Besar, Danau Kelimutu.

(7) promosi berbasis digital *diplomacy* berhubungan dengan cara mempromosikan pariwisata melalui internet seperti media sosial dan media web masing-masing lembaga terkait.

Oleh sebab itulah, yang perlu diperhatikan adalah koordinasi di antara semua *stakeholders* , dalam hal ini yang harus ditekankan adalah korelasi antara actor yang bermain, kepentingan nasional dan teknologi informasi. Dalam kombinasi tersebut harus di utamakan bahwa kemajuan pariwisata Indonesia harus menjadi kepentingan bersama bukan tugas kelembagaan. Namun yang perlu diperhatikan adalah walaupun pariwisata menjadikan ekowisata tetapi penjagaan dan perawatan wilayah harus terjaga, hal ini berkaitan dengan konservasi lingkungan, atau kehidupan fauna dan flora yang ada di wilayah tersebut terutama wisata bahari.

Kesimpulan

Berlakunya implementasi diplomasi BVK merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menginternasionalisasi kepentingan pariwisata Indonesia di dunia internasional. Peluang tersebut dengan strategi memberikan akses khusus kepada 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia. Target utamanya adalah menarik sebanyak mungkin wisatawan asing yang kondisi tersebut bias berefek pada akses pendapatan nasional. Dengan target 20 juta pengunjung dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 juta pekerja domestic disertai upaya meningkatkan tingkat kompetitif Indonesia dalam bidang pelayanan pariwisata

adalah strategi kongkrit pemerintah untuk mengkapitalisasi sumberdaya produktif dalam bidang eko wisata.

Kapitalisasi sektor pariwisata dengan sejumlah maksimalisasi diplomasi BVK seperti *Branding, Advertising, selling* adalah sejumlah langkah nyata pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa nasional yang potensial. Perbaikan infrastruktur, kebijakan finansial, pembukaan wilayah new bali disertai teknik e diplomasi merupakan kombinasi antara kebijakan dan strategi implementasi. Oleh sebab itulah sudah saatnya Indonesia membangun sector wisata yang kompetitif terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan anggaran APBN.

Daftar Pustaka

- Antariksa, Basuki, (2011). *Analisis Awal Masalah Kerjasama Internasional Dalam Pengurangan Dampak Perubahan Iklim Melalui Pariwisata*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata: Jakarta.
- Bayu , Arip Dkk , (2013). *Jurnal Mina Laut Indonesia*.Vol.1 No.1 FPIK UNHALU: Kendari.
- Harold Nicolson. (1974). *Diplomacy Ten and Now dalam Theory and practice of international relation* , Wiliam C Olson dan Fred A Soedarman 2nd Edition, Prentice Hall : New Jersey.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*: Jakarta.
- Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014: Jakarta.
- Muhamad Fathun, Laode, (2016). *Paradiplomacy Menuju Kota Dunia Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar*, *Jurnal Indonesian Perspectives*. Vol.1.No.1. Universitas Diponegoro: Semarang Jawa Tengah.
- (2016). *Traansformasi Isu-Isu Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin: Magister Hubungan Internasional*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.
- Yoeti , Oka A,(1987). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Aksara : Bandung.
- <http://datacenter.bappedakaltim.com/data/pramusrenbangnasb/Multilateral%20Plan%20Pariwisata.pdf> Di Akses pada 15 Oktober 2016 Pukul 20.18 WIB.

Track Two of Multi Track Diplomacy: Non Government or Private Sector As A Strategy In Create Prosperity Indonesia Border Area With Malaysia In Facing Human Security Issues

Dadang Ilham K. Mujiono
Mulawarman University
dhadank_copilot@yahoo.co.id

Abstrak

The decision to made Sebatik Island as the Front Border of The Republic of Indonesia substantively has a goal to develop that area in every aspect of human life. This island has a characteristic which has a border between land and sea with our neighbor country, Malaysia. As the front area of Indonesia, Sebatik island should be served an advanced facility, in order to make this island grows and attracts people to come and do their activities. However this island apparently similar as "The Kitchen" of Indonesia territory, not as "The Porch". Moreover, this condition is getting worse because more than 90% depending of majority of people in Sebatik, to Malaysia in every aspect of their life. The methodology of this study is descriptive analysis which will present and explain about the problem in border area and try to solve it with 2 concepts above. According the data and research found that people who live in Sebatik Island are more enjoy and most welcome to do their activities in order to continue their life in Tawau Malaysia. Because in Tawau serve many of basic facilities, where in Sebatik Island does not exist. Moreover Sebatik Island as the front area of Indonesia seems like sleeping town which almost none of activities happen in this island.

Keywords:

Border area, track 2 multi-track diplomacy, human security

Latar Belakang

Kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya keberadaan infrastruktur penunjang masyarakat yang berada di kawasan perbatasan antar negara. Kawasan perbatasan antar negara memiliki keunikan tersendiri. Dapat dinalogikan sebagai "teras" sebuah rumah. Seyogyanya teras sebuah rumah pastilah memiliki kondisi yang serba bagus

dan indah untuk dilihat. Namun apabila dapur sebuah rumah sebagian besar kondisinya terbalik dengan apa yang berada di teras rumah, karena apa yang tidak disukai dari si pemilik rumah pasti akan diletakkan di dapur rumah. Analogi ini merupakan konsep yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat yang bermukim di kawasan perairan dan perbatasan. Masyarakat yang bermukim di perairan khususnya sedang berusaha mengembalikan fungsi utama perairan atau alur sungai sebagai jalur transportasi dan bukan sebagai tempat pembuangan akhir. Sedangkan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan sedang berusaha untuk menciptakan wilayah perbatasan sebagai teras dari pada sebuah negara yang berdaulat. Salah satu usahanya adalah memberikan masukan kepada pemerintah agar mengubah arah kebijakan pembangunan yang awalnya bersifat *state centric*¹ menuju *people centric*².

Berdasarkan regulasi pengelolaan kawasan perbatasan yakni 1. UU nomor 26 tahun 2007, kawasan perbatasan ditetapkan sebagai kawasan strategis dan dimensi pertahanan dan keamanan. Kemudian 2. UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025, diterangkan bahwa pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan selain keamanan juga kesejahteraan. Kemudian 3. UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, dengan substansi kawasan perbatasan dikelola oleh pusat dan daerah serta dibentuk suatu badan pengelola tingkat pusat dan daerah³.

Jika dilihat dari 3 regulasi tersebut sudah ditekankan bahwa perbatasan merupakan kawasan yang istimewa dalam artian kawasan yang strategis berdimensi pertahanan dan keamanan. Memiliki dimensi pertahanan dan keamanan merupakan hal yang selalu melekat di wilayah perbatasan. Secara umum wilayah perbatasan yang ada di Indonesia selalu mengedepankan aspek keamanan dan pertahanan. Ini terbukti dengan penekanan dari pemerintah bahwa pentingnya mengedepankan aspek militeristik di wilayah perbatasan dengan munculnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, dimana Kawasan perbatasan harus dikelola dengan mengedepankan aspek keamanan dan kesejahteraan rakyat diperbatasan⁴.

Pemerintah dalam hal ini cenderung beranggapan bahwa wilayah perbatasan merupakan sarang dari pada kelompok atau organisasi ekstrimis

¹ fokus pada pembangunan keamanan tradisional yang berlandaskan pada keamanan militeristik

² fokus pada pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat

³ Kajian Manajemen Perbatasan Di Kalimantan Fokus Inovasi Pendidikan di Wilayah Perbatasan, PKP2A III LAN. Hal. 13

⁴ Ibid.

atau bahkan teroris. Sehingga harus mengedepankan aspek militer. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal keamanan ini sebenarnya tidaklah salah. Karena pada hakikatnya wilayah terluar sebuah negara harus dijaga dengan kekuatan penuh melalui persenjataan militer agar kondisi di dalam negara tersebut dapat terhindar dari ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi dan berawal dari wilayah terluar sebuah negara dalam hal ini wilayah perbatasan. Namun perlu diingat bahwa wilayah perbatasan juga memiliki segudang permasalahan yang sampai sekarang pun belum dapat terselesaikan. Dimensi permasalahan yang ada diperbatasan Indonesia terdiri dari aspek sosial, ekonomi budaya dan keamanan. Lebih lanjut aspek utama yang menjadi masalah krusial di wilayah perbatasan adalah ekonomi.

Jika dilihat dari sudut pandang geopolitik, wilayah perbatasan tentunya memiliki segudang potensi untuk menjadi suatu wilayah yang memiliki daya saing di dalam sebuah negara dan negara tetangga. Tidak kalah pentingnya, geografi sebuah negara juga menjadi faktor penting di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Di dalam konteks hubungan internasional sendiri, kondisi geografi menjadi ruang pertemuan kebijakan yang tidak terlepas dari nilai-nilai geografis yang dimiliki negara dalam mencapai kepentingan nasional yang dimiliki⁵. Geopolitik sebuah negara dimana terdapat berbagai kondisi yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan tentunya akan termanifestasikan dengan geostrategi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini kawasan perbatasan seperti yang penulis singgung sebelumnya bahwa terkesan dikarenakan rawan akan tindakan-tindakan kejahatan oleh karena itu geostrategi yang ditentukan oleh pemerintah berfokus pada kemandirian militeristik atau bermuara kepada state centric.

Dasar sebuah negara mengutamakan keamanan teritorial jika dilihat dari sudut pandang geostrategi dilatarbelakangi oleh ancaman yang ditujukan kepada wilayah suatu negara tersebut, dengan kata lain fokus *military force projection*⁶ hanya ditujukan untuk menghadapi konflik yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dan lebih diutamakan untuk menunjukkan kemampuan sebuah negara untuk mempertahankan, mengolah dan mengontrol pusat-pusat sumber daya, rute perdagangan dan kawasan-kawasan vital. Dasar tersebut barangkali yang menjadikan pemerintah sangat fokus terhadap penekanan keamanan pada kawasan perbatasan dari sejak kawasan perbatasan ditentukan sampai akhir tahun 2012⁷.

⁵ Geopolitik dan Geostrategi : Konflik Perbatasan di Kawasan Asia Tenggara, Prasojo & Yugalastarob Komeini, Pengantar Kajian Strategis, Graha Ilmu, 2013, Hal. 126.

⁶ Ibid

⁷ Studi Persepsi Masyarakat Perbatasan

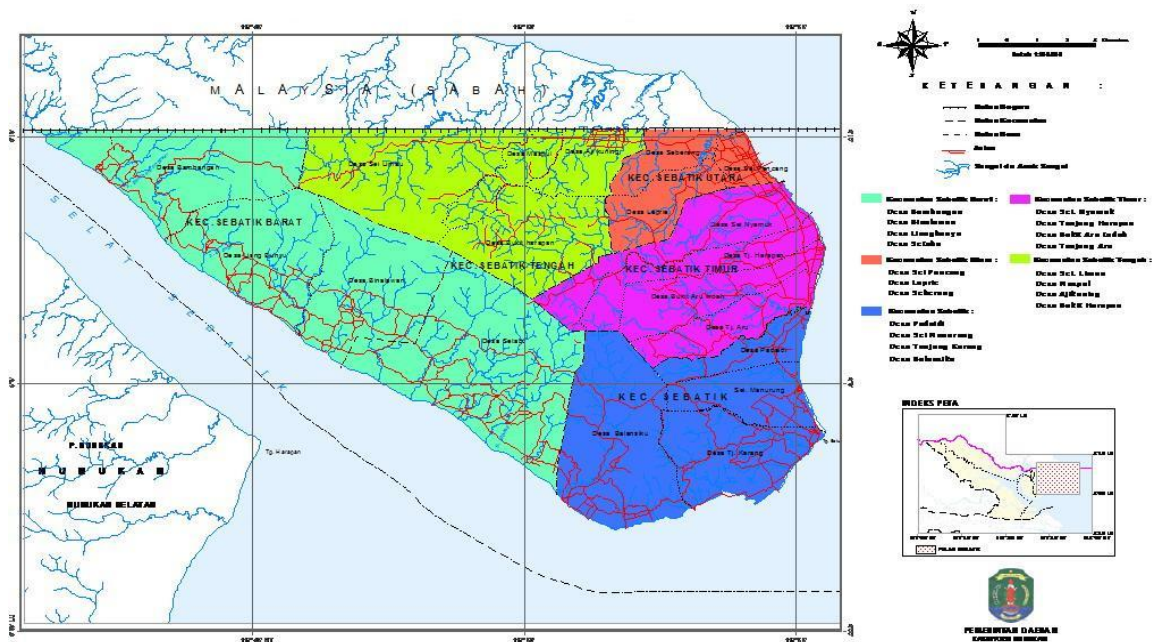
Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang geoekonomi, budaya kawasan perbatasan tidaklah berkutat pada permasalahan keamanan semata, melainkan seperti yang telah penulis singgung sebelumnya, dimensi ekonomi menjadi masalah utama yang ada di kawasan perbatasan. Lebih lanjut, permasalahan yang tidak henti-hentinya dalam hal dimensi ekonomi justru membuat masalah-masalah lain bermunculan, sehingga apabila pemerintah tidak dapat menentukan masalah utama di kawasan perbatasan, sampai kapanpun kawasan perbatasan khususnya yang ada di Indonesia hanya akan berkutat pada masalah keamanan, seharusnya dengan kondisi yang ada di kawasan perbatasan Indonesia dalam hal ini dalam menyelesaikan masalah ekonomi, implementasi geostrategi yang akan diperoleh tentulah akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

Berangkat dari fenomena di atas, Indonesia memiliki banyak kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Salah satunya adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia yakni yang berada di Kecamatan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Secara administratif pulau ini dibagi menjadi dua bagian. Di bagian utaranya merupakan wilayah Sabah, Malaysia dan di bagian selatannya merupakan wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur⁸.

Pulau Sebatik dengan luas wilayah sekitar 247,5 km², dan secara geografis terletak pada 117°40'BT-117°54' BT dan 4° 02'LU-4°10'LU, sebelum dimekarkan wilayah Sebatik Indonesia terdiri dari dua kecamatan yakni Sebatik Induk dan Sebatik Barat. Namun sekarang daerah ini tengah dimekarkan sehingga menjadi lima kecamatan, antara lain: Sebatik Induk, Sebatik Barat, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, dan Sebatik Timur.

Gambar 1: Peta Pulau Sebatik Setelah Pemekaran

⁸ Data BPS Kabupaten Nunukan Tahun 2011.



Sumber : Data BPS Kabupaten Nunukan 2011

Kemudian posisi Pulau Sebatik sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tepatnya Distrik Tawau Negara Bagian Sabah – Malaysia, dianggap memiliki nilai strategis dan menjadi kepentingan nasional sehingga menjadi salah satu daerah perbatasan dengan prioritas utama untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan di mana pada pasal 9 ayat (2) berbunyi “Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan”.

Sebagai daerah perbatasan yang pada saat ini menjadi perhatian pemerintah dan tuntutan masyarakat untuk dapat lebih diperhatikan dalam pembangunan berbagai sektor, maka Pulau Sebatik kembali dikemarkan dari 2 (dua) kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan yang ditandai dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik Tengah, Sebatik Utara, dan Sebatik Timur. Pemekaran ini ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Agustus 2011 yang ditindak lanjuti dengan pengisian Struktur pemerintahan Kecamatan pada pelantikan tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 821.2/1992/BKDD-III/X/2011.

Kerangka Konseptual

Dalam penulisan karya ilmiah ini, konsep yang digunakan di dalam menganalisis permasalahan yakni Human Security dan Multi Track Diplomacy.

Human Security

Konsep *Human Security*⁹ diawali dengan memahami mengenai keamanan dan kehidupan sosial, kemudian konsep ini juga membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam melindungi segenap masyarakat yang berada di dalam negara tersebut. Kemampuan negara dalam melindungi warga negaranya yang berada dalam konsep *Human Security* sudah mulai berkembang pada awal tahun 1990an dan abad 20, ketika individu membutuhkan kesejahteraan dan hak-hak istimewa dari pemerintah. Basis dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut telah terinstrumentalkan sebagai konsern atau fokus pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan.

PBB sebagai organisasi internasional melalui UNDP (*United Nations Development Program*) melakukan usaha untuk mendorong pembangunan berbagai aspek terhadap kesejahteraan umat manusia dan memberikan peringkat kepada negara yang sangat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya dan aktif dalam proses ini.

UNDP merumuskan *human security* dalam beberapa komponen sebagai berikut¹⁰: (1) keamanan ekonomi (*assured basic income*), (2) keamanan pangan (*physical and economic access to food*). (3) keamanan kesehatan (*relative freedom from disease and infection*), (4) keamanan lingkungan (*access to sanitary water supply, clean air and a non-degraded land system*), (5) keamanan sosial (*security of cultural identity*), (6) Keamanan individual (*security from physical violence and threat*), dan (7) keamanan politik (*protection of basic human rights and freedom*).

Dengan demikian tujuan dari pada *Human Security* adalah menjamin kelangsungan hidup dan martabat serta harga diri umat manusia, sehingga *Human Security* harus menjangkau lebih dari sekedar melindungi kehidupan manusia dalam situasi konflik¹¹.

⁹ Human Security and The UN, Critical History, S. Neil MacFarlane and Yuen Foong Khong. United Nations Intellectual Histories Project Series, Indiana University Press, Bloomington and Indiana. P. 23

¹⁰ National Security, Human Security, HAM dan Demokrasi, J. Kristiadi, tersedia http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_dan_ham_jk.pdf,

¹¹ The distinction between horizontal and vertical dimensions of security was drawn by Emma Rothschild, 'What is Security', *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences* (Summer 1995).

Kemudian relevansi konsep *Human Security* dengan tema yang penulis angkat mengenai pembangunan di daerah perbatasan memiliki hubungan erat dengan 7 komponen konsep *Human Security* yang telah dirumuskan oleh UNDP. Maka dengan demikian untuk menjawab rumusan masalah dan membimbing penulis di dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memandang konsep *Human Security* menjadi pilihan yang tepat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa konsep *Human Security* meliputi berbagai komponen dalam mensejahterakan masyarakat. Komponen terpenting adalah ekonomi dan pembangunan, namun komponen keamanan jelas tidak tertinggal di dalam mensejahterakan masyarakat agar kedaulatan tetap terjaga. Konsep *Human Security* memberikan penjelasan dalam hal perekonomian dan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia khususnya yang berada di daerah perbatasan terluar Indonesia – Malaysia, pemerintah pusat dan daerah dirasa masih kurang bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan di daerah perbatasan dikarenakan berbagai permasalahan salah satunya yaitu kurangnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan roda perekonomian daerah perbatasan.

Multi Track Diplomacy¹²

Dalam usaha menciptakan perdamaian di dalam sebuah negara, kawasan dan menjadikan rezim maka diperlukan sebuah pertimbangan – pertimbangan beberapa cara untuk mencapai tujuan perdamaian tersebut. Salah satu cara tersebut melalui Multi Track Diplomacy (MTD). MTD merupakan sebuah konsep yang memandang sebuah perdamaian dapat dicapai melalui beberapa track yang dimiliki, dan menjadikan track tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Lebih khusus dalam kehidupan dunia internasional. kata MTD tersebut berasal dari sebuah kerangka konseptua; yang didesain untuk merefleksikan aktivitas yang memiliki afiliasi dan berkontribusi terhadap penciptaan dan mempertahankan perdamaian internasional. Ada 3 tujuan secara umum konsep MTD ini, diantaranya :

1. Untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik antara kelompok atau negara melalui meningkatkan komunikasi, pengertian dan hubungan yang telah terjadi.
2. Untuk mengurangi tensi ketegangan dan salahpahaman dengan cara memberikan pemahaman akan esensi seorang manusia dan

¹² Diamond Luise, John Mc. Donald Ambassador. *Multi Track Diplomacy, A Systems Approach to Peace*, Third Edition. Kumarian Press. 1996. P. 1

menghilangkan "wajah musuh" dan memberikan pemahaman secara langsung bahwa ruh atau esensi seorang manusia adalah seseorang yang mencintai perdamaian.

3. Untuk memberikan efek pemikidan dan tindakan kedepan khususnya track 1 (government) untuk menyelesaikan permasalahan melalui akar atau awal sumbu permasalahan dan mencoba mencari jalan melalui jalur diplomatic dan negosiasi secara firmal untuk membentuk kerangka kebijakan.

Lebih lanjut, konsep ini memiliki 9 tracks, di antaranya : 1. Track One (Government). 2. Track Two (Nongovernment / Professional). 3. Track Three (Business). 4. Track Four (Provate Citizen). 5. Track Five (Research, Training and Education). 6. Track Six (Activism). 7. Track Seven (Religion). 8. Track Eight (Funding). 9. Track Nine (Communication and Media).

Dalam membahas permasalahan kali ini, penulis menggunakan Track 2 Nongovernment / Professional (T2). T2 dalam prakteknya memiliki beberapa kegiatan yang bersifat tidak formal, di antaranya NGO, masyarakat, dan kelompok – kelompok lainnya yang memiliki interaksi untuk menyelesaikan konflik, dan terkadang kelompok ini juga saling bebkerjasama dengan pihak ketiga di dalam menyelesaikan sebuah kasus yang sedang terjadi. Tujuan dari T2 ini adalah kegiatan yang dapat membantu untuk menciptakan perdamaian dengan cara mendorong adanya komunikasi yang kuat antara 2 kelompok yang bertikai, pemahaman satu sama lainnya, dan kerjasama antara kedua aktor tersebut untuk mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan. Lebih lanjut T2 meyakini di dalam menciptakan perdamaian yang dimaksud, tidak harus serta merta dilaksanakan di meja – meja formal atau rapat – rapat yang selalu melibatkan pemerintah atau T1.

Melalui T2, maka penciptaan komunikasi antara 2 kelompok yang bermasalah melalauai peningkatan komunikasi, fokus pada membangun rasa saling percaya, dan membentuk kerangka kerja atau frame work perdamaian tersebut melalui kerja sama bersama. T2 juga bisa dianggap sebagai perpanjangan tangan T1 karena T2 meyakini bahwa T1 terkadang tidak dapat menyelesaikan permasalahan akar dengan metode yang digunakan oleh pemerintah atau jalur official, sehingga memerlukan bantuan T2 dalam setting tidak formal dalam menyelesaikan situasi tersebut.

Kemudian di dalam mendukung perdamaian tersebut, T2 di dukung oleh aktor yang kapabel dalam fungsinya sebagai "peace maker" yakni kalangan professional, di antaranya psikolog, para pekerja, kelompok – kelompok yang berpengalaman dalam pergerakan sosial, komunitas – komunitas, akademisi.

Lebih lanjut dalam T2 ini aktor yang paling berpengaruh dalam menciptakan tujuan akhir dari track ini adalah kalangan akademisi, dan sebagian dari mereka juga memiliki pengalaman yang luas di dalam menciptakan proses perdamaian.

Pembahasan dan Analisis

Dalam pembahasan kali ini akan disinkronkan antara permasalahan yang ada di Pulau Sebatik berdasar pada konsep *Human Security* yang menerangkan bahwa konsep tersebut memiliki 7 komponen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini komponen terpenting adalah ekonomi dan pembangunan, namun komponen keamanan jelas tidak tertinggal di dalam mensejahterakan masyarakat agar kedaulatan tetap terjaga. Konsep *Human Security* memberikan penjelasan bahwa *People* atau Individu menjadi center dari perdebatan dan analisis dalam proses pembuatan suatu kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah¹³.

Sebagaimana yang telah penulis singgung sebelumnya mengenai 7 komponen konsep *Human Security*, menerangkan konsep ini tidak hanya fokus pada permasalahan keamanan yang sering kali menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia pada saat ini, namun konsep ini telah berkembang dan beradaptasi dengan kondisi global pada saat sekarang, khususnya setelah pasca perang dingin, sehingga konsep ini sekarang tidak hanya bergelut pada aspek Keamanan Militeristik namun juga fokus pada pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di suatu negara.

Lebih lanjut konsep ini juga memiliki poin inti salah satunya menjaga *people* / masyarakat dari berbagai isu – isu yang dibahas dalam *Human Security*. Dalam artian jika berbicara *Human Security*, pasti akan menimbulkan pertanyaan "sebenarnya *secure* dari apakah *people* / masyarakat tersebut?". Lebih lanjut hal ini tentu sangat menjadi patokan dari pengaplikasian dari konsep *Human Security* agar dapat relevan digunakan dalam penelitian kali ini.

Mengutip ungkapan Kofi Annan yang mengatakan bahwa "penyakit kronis di dunia ini adalah Kemiskinan" sehingga menurut penulis poin pertama dari pengaplikasian Konsep ini adalah melihat bagaimana Masyarakat *Secure* atau terjaga dan terhindar dari pada Kemiskinan. Lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman mengenai relevansi konsep yang penulis gunakan, berikut penulis sajikan aplikasi dari 7 komponen *Human Security* dan keterkaitannya dengan implikasi terhadap pembangunan di Pulau Sebatik yang kurang maksimal.

¹³ Ramesh Thakur, *The United Nations, Peace and Security*. Cambridge University press, 2006. p. 74.

Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi masyarakat yang bermukim di Pulau Sebatik memiliki implikasi dari rendahnya perputaran roda perekonomian karena tidak adanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung perekonomian masyarakat pulau Sebatik mengakibatkan bergantungnya masyarakat dalam berbagai aspek dengan Malaysia. Ketergantungan tersebut mencapai lebih dari 90% seperti yang sudah penulis jabarkan di bab sebelumnya. Sehingga dengan ketergantungan tersebut, maka masyarakat dengan terpaksa harus memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya dari negara tetangga. Selain itu hasil alam yang dihasilkan harus dijual ke Malaysia karena ketidakmampuan masyarakat pulau Sebatik untuk membeli dan mengolah menjadi produk siap pakai.

Salah satu penyebab harus dijualnya semua hasil alam ke negara tetangga karena lokasi pulau Sebatik yang cukup sulit untuk dijangkau. Hal ini menjadi satu dari beragam masalah serius yang harus segera diselesaikan. Jika melihat perbandingan dengan pembangunan sarana moda transportasi di Pulau Jawa misalnya, mayoritas daerah yang tersebar dapat dijangkau dengan akses darat.

Selain itu fasilitas pengolahan ikan pun juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Sebatik. Pemerintah daerah sudah mengetahui bahwa mayoritas masyarakat Pulau Sebatik berprofesi sebagai Nelayan, dan masyarakat Kabupaten Nunukan mayoritas bekerja sebagai Petani. Namun mengapa pemerintah tetap bersikeras membuat fasilitas pengolahan ikan di Kabupaten Nunukan. Dengan tidak pahamnya pemerintah akan kebutuhan masyarakat Pulau Sebatik, maka jelas seperti yang penulis singgung sebelumnya semua hasil tangkapan nelayan harus dijual ke Malaysia.

Keamanan Pangan (*physical and economic access to food*).

Dalam hal keamanan pangan, disini sangat terlihat bahwa peran pemerintah sangatlah kurang. Terbukti dengan seluruh kebutuhan pangan masyarakat di daerah perbatasan 90% dipasok dari Malaysia. Produk – produk Indonesia yang menjangkau sampai ke daerah perbatasan hanya Indomie dan Rokok¹⁴.

Dengan bergantungnya masyarakat Pulau Sebatik dalam hal kebutuhan pangan kepada Malaysia, kembali rasa percaya masyarakat akan pemerintah sangatlah menurun. Justru masyarakat lebih cenderung menghargai pemerintah Malaysia karena berbagai macam jasa dan produk yang ditawarkan

¹⁴ Interview bersama Sdr. Kamal, tokoh pemuda masyarakat Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur.

kepada masyarakat daerah perbatasan. Selain harga kebutuhan pangan yang dijual dengan harga yang sangat murah pelayanannya pun juga sangat memuaskan. Hal ini berbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Keamanan Kesehatan (Relative freedom from disease and infection),

Dengan pemahaman akan arti pentingnya kesehatan bagi masyarakat Pulau Sebatik sebenarnya dapat mencegah masyarakat dari berbagai penyakit yang dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat sendiri. Berdasarkan hasil interview yang telah dilakukan oleh penulis dengan Kepala TU Puskesmas Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Ibu Rahcmila, SKM. Menerangkan bahwa masyarakat Pulau Sebatik masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya kesehatan. Berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat mayoritas adalah Diare dan penyakit pernapasan atau biasa yang disebut sebagai Ispa. Selain itu, perilaku pola makan yang kurang baik juga menjadi faktor tingginya angka penderita penyakit diare masyarakat Pulau Sebatik.

Kemudian relevansi dengan poin ketiga dari pada konsep *Human Security* ini, maka dapat dianalisis bahwa masyarakat Pulau Sebatik masih belum terbebas dari berbagai macam penyakit yang dapat menjangkiti kapan saja dan dimanapun. Dengan berbagai faktor yang menyebabkan banyaknya jenis penyakit yang diderita masyarakat maka peran pemerintah dalam hal kesehatan sangat diperlukan. Pulau Sebatik sendiri sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga hanya memiliki pusat pelayanan kesehatan setingkat Puskesmas. Sedangkan rumah sakit hanya dimiliki oleh Kabupaten Nunukan¹⁵.

Gambar 2.

Kondisi Puskesmas Induk Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur

¹⁵ Interview bersama Ibu Rachmila, SKM., KTU Puskesmas Induk Desa Sungai Nyamuk.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Hasil wawancara penulis dengan salah satu pasien puskesmas Desa Sungai Nyamuk juga mengatakan dalam hal bantuan kesehatan kerap kali tidak merata. Dalam artian seharusnya masyarakat miskin menerima bantuan tersebut, namun masyarakat mampu dalam hal ekonomi yang mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan karena terdapat indikasi nepotisme dalam pembagian bantuan kesehatan kepada masyarakat. Jika indikasi ini terus berlanjut dan semakin tingginya biaya berobat di dalam negeri, dan yang seharusnya bantuan kesehatan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat membayar biaya berobat, maka tidaklah heran negara tetangga yang akan menjadi solusi masyarakat miskin untuk berobat. Seperti yang sudah penulis singgung di bab sebelumnya bahwa biaya berobat di Tawau Malaysia jauh lebih murah 4 kali lipat dibandingkan di dalam negeri.

Dengan demikian sekalipun peran pemerintah sudah cukup baik dalam hal pengadaan tenaga medis, namun jika melihat kenyataan kondisi di lapangan maka peran tersebut dirasa masih kurang, khususnya terhadap penyediaan tenaga medis spesialis dan berbagai fasilitas kesehatan. Ketika pemerintah tidak memberikan perhatian khusus dalam aspek kesehatan, maka berdasarkan konsep *Human Security*, masyarakat masih belum *Secure* atau terbebas dari berbagai macam ancaman jenis penyakit.

Keamanan Lingkungan (Access to sanitary water supply, clean air and a non-degraded land system).

Kemudian pada poin ke empat ini, penulis juga mendapatkan berbagai informasi dari masyarakat yang mengeluhkan mengenai susahya memperoleh air bersih. Khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Sebatik Tengah Desa Aji Kuning yang berbatasan langsung dengan Tawau Malaysia. Masyarakat tinggal di daerah dengan tekstur berbatuan di mana tidak ada mata air sama sekali. Sehingga masyarakat sangat menggantungkan pada air hujan. Keterbatasan akses air bersih tersebut dikarenakan fasilitas PDAM di Pulau Sebatik tidak dapat beroperasi secara maksimal. Penuturan salah satu narasumber mengatakan bahwa PDAM hanya berfungsi setelah adanya hujan. Lebih lanjut jika sudah tidak ada hujan selama 2 hari, maka PDAM akan berhenti beroperasi¹⁶.

Keamanan Sosial (security of cultural identity),

Dalam hal identitas kebudayaan, masyarakat Pulau Sebatik sebenarnya sudah banyak dipengaruhi oleh budaya – budaya melayu dari Malaysia sendiri. Sekalipun mayoritas penduduk adalah perantau dari Sulawesi dan bersuku Bugis. Namun pada kenyataanya budaya Melayu sangatlah kental dalam perilaku kehidupan sehari – hari masyarakat Pulau Sebatik.

Gambar 3.

Bentuk Rumah Masyarakat Pulau Sebatik (1)



Sumber: Dokumentasi Penulis

Hal ini dibuktikan dengan bentuk dari pada rumah tempat tinggal yang dihuni oleh masyarakat. Hampir semua rumah memiliki tipe yang sama. Yakni rumah panggung dari kayu, di mana rumah seperti itu banyak ditemukan di

¹⁶ Interview bersama Sdr. Argo, Masyarakat Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur.

Malaysia. Salah satu narasumber mengatakan bahwa tipe rumah tersebut merupakan gabungan dari adat Melayu dan Bugis.

Gambar 4.
Bentuk Rumah Masyarakat Pulau Sebatik (2)



Sumber: Dokumentasi Penulis

Sebagaimana telah penulis singgung berulang kali, bahwa masyarakat tidak terlalu memperdulikan persoalan klaim – klaim budaya yang kerap kali dipersoalkan oleh pemerintah. Karena pada kenyataan memang tidak ada perselisihan mengenai klaim budaya tersebut. Kedua masyarakat dapat menjalin hubungan dengan baik sehingga permasalahan dapat dicegah.

Berbeda halnya dengan respon pemerintah yang selalu berlebihan jika adanya klaim – klaim budaya yang dilakukan oleh Malaysia atau pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, dan seketika pemerintah dibuat ribut serta sibuk akan hal tersebut. Namun dilain pihak masyarakat daerah perbatasan sendiri memiliki permasalahan yang lebih penting dari pada persoalan klaim budaya. Namun di sini penulis belum melihat adanya respon cepat dari pemerintah akan permasalahan tersebut.

Keamanan Individual (security from physical violence and threat),

Berbicara mengenai keamanan masyarakat di Pulau Sebatik, umumnya masyarakat cukup terjaga kondisi dalam hal berbagai aspek keamanan. Ini

dikarenakan dapat bertugasnya dengan baik para aparat keamanan, yakni polisi dan militer. Lebih lanjut kedua masyarakat antara Malaysia dan Indonesia juga tidak memiliki perselisihan yang dapat memicu konflik, karena kenyataannya kedua masyarakat berbeda negara ini memiliki tingkat interaksi yang sangat intens dalam berbagai bidang.

Keamanan Politik (Protection of basic human rights and freedom).

Pada komponen terakhir dari konsep *Human Security* ini, yakni perlindungan dari pemenuhan hak – hak manusia dan kebebasan untuk memilih dianggap merupakan bagian yang dapat menjadi poin utama dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Sebatik. Sebagaimana yang telah penulis sajikan bahwasannya terdapat berbagai permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan dengan banyaknya permasalahan tersebut, pemerintah kerap kali tidak dapat meresponnya dengan cepat dan tepat sasaran. Dengan permasalahan yang banyak tersebut, menurut penulis jelas terdapat pelanggaran – pelanggaran hak asasi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan tentunya masyarakat belum *Secure* dari pemenuhan hak – haknya sebagai warga negara yang berdaulat.

Dalam artian masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari yang seharusnya disediakan oleh pemerintah dengan berbagai pasokan kebutuhan pokok, sesuai dengan tugas pemerintah. Tidak tepatnya bantuan – bantuan yang diberikan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin), lebih lanjut masyarakat yang tidak mendapatkan haknya seperti memperoleh fasilitas – fasilitas prima seperti sarana jalan, kebutuhan akan air bersih dan pendidikan yang belum maksimal, merupakan permasalahan yang seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah.

Berdasarkan contoh – contoh permasalahan tersebut menurut penulis, sangat jelas bahwasannya masyarakat belum mendapatkan hak – haknya sebagai warga negara Indonesia. Justru hak – hak tersebut diperoleh masyarakat Pulau Sebatik dari pemerintahan Malaysia.

Solusi

Penerapan Track 2 MTD

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa T2 berafiliasi pada aktor – aktor profesional dan memiliki pengalaman akademik yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada. Dalam kasus ini, maka salah satu cara yang ditempuh di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Pulau Sebatik dengan mengunjungi pulau tersebut bersama – sama akademisi Universitas Mulawarman yang terdiri dari dosen dan

mahasiswa sebanyak 17 orang. Adapun program yang dilakukan secara umum ada 3, yakni :

Program Bantuan Sosial Pendidikan

Merupakan bantuan sosial pendidikan di antaranya berupa bantuan materi, buku, tenaga pengajar sementara, dan memberlakukan program "adik asuh" bagi mahasiswa yang datang ke pulau tersebut. Program ini dilakukan dengan memilih 17 anak didik yang sedang duduk di bangku kelas 1 sd 7 sekolah dasar, dan diutamakan bagi mereka yang tidak mampu. Sebagian dari mereka adalah anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia. Selain memberikan program bantuan pendidikan ini, setelah diberikannya bantuan pendidikan, maka masing – masing dari mahasiswa tersebut menjadikan masing – masing dari anak didik tersebut sebagai adik asuh dan saling berkomunikasi sampai sekarang dan saling membantu dalam mendukung pendidikan anak didik tersebut, harapannya sampai ke jenjang perguruan tinggi melalui bantuan beasiswa dan informasi pendidikan di perguruan tinggi yang ada di kota.

Sosialisasi Pemahaman Bela Negara dan Motivasi

Dilaksanakan di SMA 1 Pulau Sebatik dimana dalam kegiatan ini dilaksanakan pula pemberian informasi – informasi terkait dengan ketersediaan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang tersebar di kota Samarinda. Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud untuk menciptakan rasa bela negara terhadap negara mengingat permasalahan yang telah disebutkan di atas, bahwa banyak masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk lebih nyaman melanjutkan kehidupan di Tawau Malaysia karena keterbatasan yang dimiliki oleh Indonesia sehingga berrefleksi terhadap nasionalisme yang dimiliki. Oleh karena itu hal ini penting untuk ditanamkan di generasi muda khususnya mereka yang duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA agar tetap menjaga keutuhan NKRI khususnya yang ada di perbatasan. kemudian informasi beasiswa pun juga dijadikan salah satu program penting agar mendorong anak didik mau melanjutkan pendidikan agar terciptanya pembaruan dan kemajuan di daerah , khususnya dalam hak ini Pulau Sebatik.

Civitas Akademika sebagai perpanjangan tangan masyarakat Pulau Sebatik

Menjadikan civitas akademika sebagai perpanjangan tangan masyarakat dan pemerintah dalam saling memberikan informasi terkait kondisi Pulau Sebatik dan kebijakan – kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan di

perbatasan Indonesia. Lebih lanjut program ini bertujuan untuk menciptakan saling komunikasi terus bejalan, dan khususnya memberikan informasi kepada masyarakat yang bermukim terkait dengan program – program yang dimiliki oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini ditempuh melalui 1 mahasiswa membawahi 1 adik asuh dan keluarga yang dimilikinya sehingga jalur komunikasi tidak terputus. Tidak hanya berhenti pada poin komunikasi, dalam kegiatan – kegiatan yang dimiliki oleh mahasiswa, misalnya pada saat pelaksanaan hari – hari besar dilakukan pengumpulan – pengumpulan bantuan sosial seperti buku, pakaian, uang dan sebagainya lalu dikirim ke Pulau Sebatik dan diberikan kepada adik – adik yang asuh tersebut.

Kesimpulan

Masyarakat daerah perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur – Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Distrik Tawau, Negara bagian Sabah – Malaysia meamandang isu perbatasan sebagai isu – isu yang bersifat *people centric*. Dalam artian masyarakat lebih mementingkan isu - isu pembangunan dan ekonomi dibandingkan dengan isu - isu keamanan atau militer.

Lebih lanjut masyarakat yang bermukim di Pulau Sebatik, sangat menginginkan adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah, mengenai sektor pembangunan dan pemenuhan berbagai sarana dan prasarana, yang dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Pulau Sebatik, serta adanya pemenuhan kebutuhan pokok sehari – hari.

Lebih lanjut sekalipun pemerintah telah menetapkan Pulau Sebatik sebagai salah satu garda terdepan NKRI, namun kenyataan dilapangan Pulau Sebatik tidak lebih seperti daerah yang tidak terurus dan jauh dari pada pembangunan, tidak seperti apa yang ada di Pulau Jawa dan ibu kota. Sedangkan negara tetangga Malaysia, semakin hari semakin maju dan jauh meninggalkan pembangunan di Pulau Sebatik.

Dengan berbagai banyaknya permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Sebatik, jelas cepat atau lambat rasa nasionalisme masyarakat akan terkikis. Oleh karena itu dengan semakin terkikisnya rasa nasionalisme masyarakat Pulau Sebatik, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat Pulau Sebatik khususnya masyarakat yang benar – benar tidak merasakan adanya pembangunan dan perhatian dari pemerintah, akan lebih condong memilih Malaysia untuk menggantungkan hidup dibandingkan Indonesia.

Saran dan Rekomendasi

Pemerintah seharusnya lebih paham akan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di perbatasan, sehingga arah kebijakan tidak harus selalu mengarah pada peningkatan aspek militer, namun sudah harus mengarah pada aspek ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Lebih lanjut pemahaman akan wilayah perbatasan sebagai putward looking harus berubah menjadi inward looking. Dimana seperti penulis singgung sebelumnya di awal, perbatasan haruslah seperti "teras" atau "pekarangan" sebuah rumah dan bukan sebagai "dapur" atau "halaman belakang". Mengingat perbatasan merupakan daerah terluar sebuah negara dan sebenarnya merupakan cerminan kemajuan sebuah negara dapat dilihat dari majunya wilayah perbatasan yang mereka miliki.

Lebih lanjut, karena T1 dalam hal ini pemerintah dirasa kurang mampu memberikan efek langsung terhadap perkembangan daerah perbatasan, maka T2 dirasa penting untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Pulau Sebatik, dan tentunya dukungan dari pemerintah terhadap aktor yang ada di T2 menjadi sangatlah penting agar terciptanya kesejahteraan dan tujuan akhir dari MTD yakni perdamaian bagi seluruh masyarakat.

Referensi

Data BPS Kabupaten Nunukan Tahun 2011.

Diamond Luise, John Mc. Donald Ambassador. Multi Track Diplomacy, A Systems Approach to Peace, Third Edition. Kumarian Press. 1996. P. 1

Geopolitik dan Geostrategi : Konflik Perbatasan di Kawasan Asia Tenggara, Prasojo &

Yugolastarob Komeini, Pengantar Kajian Strategis, Graha Ilmu, 2013, Hal. 126.

Human Security and The UN, Critical History, S. Neil MacFarlane and Yuen Foong Khong.

United Nations Intellectual Histories Project Series, Indiana University Press, Bloomington and Indiana. P. 23

Kajian Manajemen Perbatasan Di Kalimantan Fokus Inovasi Pendidikan di Wilayah

Perbatasan, PKP2A III LAN. Hal. 13

Mujiono, Dadang Ilham Kurniawan, STUDI PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI

ISU – ISU DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA TAHUN 2012, Tidak dipublikasikan.

National Security, Human Security, HAM dan Demokrasi, J. Kristiadi, tersedia http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_dan_ham_jk.pdf,

Ramesh Thakur, The United Nations, Peace and Security. Cambridge University press, 2006.

p. 74. (UNDP, Human Development Report 2005. International Cooperation at a Crossroads : Aid, Trade and Security in an Unequal World (New York: Oxford University Press, 2005)p. 93.)

The distinction between horizontal and vertical dimensions of security was drawn by Emma

Rothschild, 'What is Security', *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences* (Summer 1995).

Reorientasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia di Asia Tenggara Pasca Runtuhnya Rezim Soeharto

H. Darwis. MA, Ph.D
Universitas Hasanuddin
dbundhy@yahoo.com

Abstrak

Since ASEAN has been established in 1967, Indonesia has played an important role in ASEAN. However Economic Crisis in 1997/1998 and the increasing of religious conflict and terrorism activities in Indonesia has diminished Indonesian role in ASEAN. The Research focuses on the change of Indonesian foreign policy orientation in ASEAN diplomacy. The main question the study seeks to address the extent of the impact of the economic crisis and political and security issues have an impact on reducing the role of Indonesia in Southeast Asia and why Indonesia has actively played a significant diplomatic role outside the context of ASEAN. This study uses qualitative research techniques. Primary data were collected through interviews with key informants such as academics and Indonesian foreign policy actors especially Indonesian diplomats and observers in the field of international relations and foreign policy. Secondary data were collected from the various libraries and other educational institutions in Malaysia and Indonesia. This study was conducted eight (8) months. The purpose of this study was to provide input to the Department of Foreign Affairs on the implementation of Indonesian foreign policy in Southeast Asia. This study assumes that the post- Suharto Indonesia foreign policy more focused on domestic issues and no longer plays an important role in ASEAN. Indonesian leaders are reluctant to use ASEAN as a mechanism in achieving Indonesia's national interests in the region after the Asian economic crisis in 1997/1998. As a result, the lead is more likely to play an important role in various issues and the use of economic cooperation outside ASEAN to achieve the national interests of Indonesia.

Keywords:

Politik luar negeri Indonesia, Malaysia, krisis ekonomi

Pendahuluan

Sejak awal pendirian, ASEAN telah memiliki prestasi yang cukup terpuji dalam mengatasi pelbagai isu politik, keamanan, sosial-budaya dan ekonomi regional

(Mutalib 1997:75). ASEAN menjelma sebagai salah satu wilayah percobaan yang paling berhasil dalam dunia politik, khususnya dalam membatasi pelbagai konflik kawasan (Acharya 2006:156) dan mempromosikan perkembangan sosio-ekonomi di wilayah Asia Tenggara. ASEAN berubah menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi dan berkembang paling cepat di dunia. Kebanyakan negara anggotanya, khususnya negara-negara pendiri, mencatatkan pertumbuhan yang tinggi dalam Pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang lebih dari 6 persen sepanjang dua dekade terakhir ini (Asian Development Bank 2008:4).

Wilayah ASEAN tidak saja dinamis dalam bidang ekonomi, tetapi juga terkait dengan persoalan politik dan keamanan. Kawasan ASEAN berusaha menghindari berbagai konflik bilateral dan kawasan yang berpotensi berkembang meluas sampai ke Semenanjung Indocina dan diperburuk oleh campur tangan negara-negara adidaya di wilayah-wilayah yang berkonflik. Dengan membebaskan diri dari pengaruh negara adikuasa yang berkepentingan atas konflik-konflik tersebut, ASEAN telah memainkan sebuah peranan penting dalam mengurangi deretan konflik internal dan kawasan, yang paling tidak, menimbulkan kestabilan kawasan di wilayah ASEAN (Nischalke 2000: 89). Keberhasilannya dalam memelihara keamanan wilayah dan perkembangan ekonomi yang dinamis telah meningkatkan citra ASEAN sebagai salah satu organisasi yang paling berhasil di dunia, bahkan mungkin kedua setelah Uni Eropa (Stefanova 2005).

Sebagai anggota pendiri ASEAN, Indonesia memainkan peranan mencolok dan menjadi aktor utama dalam perkembangan organisasi regional ini. Indonesia telah menunjukkan peranan utamanya dalam keselamatan dan keamanan Asia Tenggara lebih dari 30 tahun melalui kedudukannya yang penting di ASEAN yang disokong oleh kestabilan dan lamanya masa pemerintahan Soeharto (Dibb 2001: 836). Bagi Indonesia, ASEAN bukan saja menjadi sebuah wahana resmi dalam menampung beragam kepentingan nasionalnya di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi sebetuk arena dalam memainkan peranan politik dan ekonomi antarbangsa yang lebih luas. Sebenarnya, bahkan sebelum pembentukan ASEAN, Indonesia sebagai negara besar di region ini, telah lama mencari-cari bentuk peranan kepemimpinan berskala kawasan di wilayah Asia Tenggara.

Walau bagaimanapun juga, peranan Indonesia di Asia Tenggara tampak menurun semenjak Krisis Moneter Asia pada tahun 1997 yang berdampak terhadap dunia ekonominya. Krisis tersebut bukan saja mengacau-balaukan keadaan politik, ekonomi dan sosial Indonesia, tapi juga menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto pada 1998. Hal tersebut memberikan suatu pandangan regional

bahwa Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang mengalami krisis ekonomi yang paling buruk (Hoa & Harvie 2000: 125)

Situasi tersebut kian keruh dengan meningkatnya pelbagai konflik etnik dan keagamaan khususnya di Ambon, Maluku, Poso di Sulawesi, Sampit di Kalimantan Tengah, serta memaraknya pertumbuhan gerakan-gerakan separatis di Aceh, Papua, dan aktivitas teroris yang diikuti dengan beberapa peristiwa ledakan bom di Bali, Jakarta, dan Sulawesi. Semua ini memaksa pemerintah Indonesia untuk memberi perhatian yang lebih terhadap urusan-urusan dalam negeri dibanding dengan beragam isu luar negeri (Rabasa & Chalk 2001:5), terutama pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999 hingga 2001). Peranan Indonesia di ASEAN tampak jelas tidak terfokus pada persoalan regional termasuk dalam forum ASEAN (Dalpino 2011).

Di pihak lain, semakin aktifnya Vietnam, Thailand, dan Malaysia dalam berbagai forum ASEAN menyebabkan peranan Indonesia di Asia Tenggara tidak tampak signifikan. Setelah berakhirnya Era Perang Dingin, tiga negara tersebut menunjukkan perkembangan untuk memainkan peranan yang lebih nyata dalam persoalan-persoalan di Asia Tenggara. Malaysia dan Thailand misalnya berperan penting dalam dinamisasi perekonomian ASEAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, timbul beberapa pertanyaan penting yang akan dijawab dalam penelitian ini: Bagaimanakah kewujudan kebijakan politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto? Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia setelah runtuhnya Rezim Soeharto? Bagaimana dampak krisis ekonomi dan isu-isu domestik yang telah terjadi di Indonesia terhadap perubahan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di Asia Tenggara?

Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada dampak krisis ekonomi Asia 1997/1988 yang menyebabkan runtuhnya Rejim Soeharto serta merosoknya kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat menguraikan pola hubungan antar negara secara jelas dengan menggunakan sumber-sumber data yang tepat.

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dan Kuala Lumpur. Pemilihan kedua lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan kualitas data yang akan dikumpulkan. Di Jakarta misalnya, selain mempunyai perpustakaan yang lengkap dari berbagai universitas dan intitusi internasional juga terdapat Departemen Luar Negeri RI yang mempunyai sumber data yang akurat dan diplomat-diplomat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan hubungan

internasional. Sedangkan Kuala Lumpur dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kota tersebut terdapat beberapa lembaga kajian Asia Tenggara yang mempunyai reputasi yang cukup baik, sehingga memudahkan peneliti untuk pengumpulan data primer maupun sekunder.

Data Primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pakar yang ahli dalam kebijakan politik Indonesia serta orang-orang yang terlibat dan pelaksana politik luar negeri Indonesia di Asia Tenggara. Proses wawancara ini dilaksanakan di Jakarta dengan menggunakan peralatan Audio Visual seperti tape rekorder dan peralatan lainnya untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui sumber-sumber data berupa buku-buku, dokumen, surat kabar jurnal, terbitan berkala dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan Indonesia dan ASEAN telah diterbitkan di Indonesia maupun di luar negeri khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data sekunder tersebut, peneliti telah memilih beberapa institusi pendidikan dan institusi lainnya seperti Perpustakaan Universitas Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di Kuala Lumpur. Alasan pemilihan lembaga-lembaga pendidikan tersebut selain mempunyai kelengkapan koleksi buku dan jurnal tentang politik luar negeri Indonesia juga lembaga-lembaga tersebut mempunyai fokus kajian pada kawasan Asia Tenggara. Semua data dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang lebih menekankan kepada analisis data induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep-konsep dan paradigma yang telah diformulasikan kedalam kerangka analisis.

Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Kepemimpinan Rejim Soeharto Di Asia Tenggara

Usaha Soeharto dalam meningkatkan kerjasama regional Asia Tenggara terus dilakukan. Bersama negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia mendirikan kerjasama kawasan ASEAN pada tahun 1967 dengan tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kemunculan gagasan pendirian ASEAN antara lain karena timbulnya keragu-raguan di kalangan negara-negara pendiri terkait perubahan peranan kekuatan luar di wilayah ini. Meski keselamatan beberapa negara masih bergantung pada kekuatan luar, mereka melihat bahwa persaingan negara adidaya dapat menjerumuskan kawasan tersebut.

Pada era Soeharto, Indonesia berkeinginan dan kepentingan memainkan peranan penting di kawasan Asia Tenggara (Smith, 2000: 14). Presiden

Soeharto tanpa henti melakukan beberapa upaya demi memperbaiki ekonomi dan kestabilan politik yang telah hancur sewaktu kepemimpinan Orde Lama. Soeharto juga menempatkan negara-negara Asia Tenggara sebagai lingkaran pertama dalam pencapaian kepentingan nasionalnya. Memandangkan kedekatannya secara geografi, memungkinkan Indonesia untuk lebih intensif membina hubungan baik dengan negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara demi keberlangsungan hidup bangsa terutama dengan menjalin kerjasama kawasan melalui ASEAN.

Indonesia merupakan negara terbesar dan berpotensi menjadi negara dominan di kawasan. Meski demikian, Indonesia memilih melaksanakan politik luar negeri yang lebih pragmatis serta bebas dan aktif. Perubahan politik luar negeri Indonesia yang *low-profile*, menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama, dan saling menghormati telah membuktikan niat baik rezim Soeharto untuk membawa Asia Tenggara menjadi kawasan yang aman dan damai. Ia pula menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada campur tangan pihak asing (Emmers 2005: 650). Sikap Indonesia tersebut secara tidak langsung memberi peranan penting dalam menentukan asas dan arah kerjasama wilayah yang lebih baik dalam mencipta kestabilan dan keamanan kawasan.

Pemikiran lain yang digagas oleh Indonesia dalam forum ASEAN adalah konsep daya tahan negara dan daya tahan kawasan yang dipedomani sejak tahun 1976. Konsep tersebut merupakan sumbangan utama Indonesia ke ASEAN. Istilah "daya tahan negara" dan "daya tahan kawasan" merupakan terjemahan dari konsep "ketahanan nasional". Indonesia yang melambangkan perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan dan kelemahan sosio-ekonomi yang dihadapinya selepas kemerdekaan. Sebagai suatu konsep keamanan yang dapat pengukuhan semua elemen dalam keseluruhan pembangunan suatu negara, yang terdiri dari daya tahan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Kedua dokumen penting ASEAN, yakni Deklarasi ASEAN Concord dan TAC, dijadikan pedoman dalam Pertemuan Puncak ASEAN pada tahun 1976 di Bali, menggagas prinsip daya tahan sebagai pendekatan yang digalang bersama bagi keamanan dalam negeri dan kawasan. Kestabilan dalam negeri setiap negara anggota ASEAN memberi sumbangan penting kepada keamanan internasional. Setiap negara anggota berkewajiban meminimalisir ancaman terhadap kestabilan, dan mengukuhkan daya tahan negara dan kawasan. Hal ini dapat dilakukan mendayagunakan pembangunan ekonomi dan sosial demi memperbaiki keadaan hidup rakyat (Pushpanathan 2009: 1).

Keinginan Indonesia untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas dari dominasi negara besar dapat terwujud apabila anggota ASEAN mulai sadar akan pentingnya memfokuskan diri mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan damai. Indonesia menyampaikan gagasan tersebut sejak awal pembentukan ASEAN pada tahun 1967, dan terus berupaya untuk mewujudkan zona tersebut. Atas anjuran Malaysia, para pemimpin ASEAN sepakat menandatangani Perjanjian ZOPFAN tahun 1971. Selepas penandatanganan ini, Indonesia kembali memainkan peranan penting dengan mengusulkan agar Asia Tenggara menjadi kawasan bebas dari penyebaran senjata nuklir. Bagi pandangan Indonesia, meningkatnya konflik ideologi di kawasan yang dapat memperbesar kemungkinan penyebaran senjata nuklir. Karena itu, diperlukan upaya menghalang penyebaran senjata nuklir baik secara vertikal maupun horizontal. Masa-masa awal ASEAN masih kesulitan mewujudkan zona bebas nuklir di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, para pemimpin ASEAN menyepakati menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir. Ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian SEANWFZ pada tahun 1995 yang telah diakui oleh negara-negara besar (Severino 2008:14).

Indonesia juga berperan penting menentukan hubungan di antara negara-negara anggota demi menciptakan kehidupan kawasan yang harmoni. Pada Persidangan Puncak ASEAN I di Bali tahun 1976, Indonesia berhasil menyakinkan negara-negara ASEAN bahwa mereka memerlukan suatu norma-norma atau tatacara untuk hidup berdampingan secara baik dan harmoni seperti dalam perjanjian ASEAN Concord dan TAC (Severino 2008:14). Selepas kedua perjanjian tersebut ditandatangani, ASEAN sepakat menjadikannya sebagai norma atau cara utama bagi mereka dalam berhubungan dengan dunia internasional dan saling menghormati serta tidak turut masuk campur dalam masalah-masalah dalam negeri sesama negara ASEAN. Kesediaan negara-negara ASEAN untuk menguatkuasakan perjanjian tersebut telah memberi kesan positif bagi perkembangan dan kejayaan ASEAN (Emmers 2005:651).

Ujian bagi kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara terjadi kala Jakarta diberikan kepercayaan menjadi pengantara dalam penyelesaian konflik Kamboja atau yang dikenal sebagai Perang Indochina III (1978-1991). ASEAN percaya bahwa Indonesia mampu membantu menyelesaikan konflik tersebut. Keyakinan itu muncul karena Indonesia telah mempunyai hubungan yang kukuh dengan Vietnam. Indonesia bersama negara lainnya juga telah lama mengupayakan perdamaian tersebut sebagai bagian dari bentuk solidaritas terhadap nasib rakyat Vietnam (Severino 2007: 28). Indonesia bersama-sama

dengan Australia dan Prancis misalnya, berusaha mencari cara untuk menyelesaikan konflik Kamboja demi mewujudkan keselamatan kawasan. Mereka juga setuju untuk menjadi pengantara bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut demi mengurangi ketegangan konflik. Oleh itu, Indonesia melaksanakan "dual-track" diplomasi, tatkala Jakarta melaksanakan komunikasi politik dua arah dengan Vietnam di samping menguatkan komitmen terhadap formula ASEAN itu (Country Studies 2010).

Upaya lain Indonesia yang berhasil adalah mengusulkan persidangan internasional yang melibatkan semua pihak yang bertikai di Kamboja dan beberapa negara kawasan untuk memperoleh pandangan berkaitan dengan penyelesaian konflik tersebut. Di antara persidangan itu adalah Jakarta Informal Meeting (JIM) I & II pada tahun 1988-1989 yang dilaksanakan di Jakarta dan Bogor. Kemudian, Paris International Conference on Cambodia pada tahun 1990 yang diselenggarakan di Paris.

Keberhasilan Indonesia memainkan peranan diplomasi dalam konflik tersebut tak ayal menempatkan Menlu RI Ali Alatas sebagai Ketua Konferensi Paris 1991. Dalam persidangan ini, ASEAN bersama Prancis memberi mandat untuk menggelar pemilihan umum di Kamboja dengan pengawasan PBB pada tahun 1993. Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Indonesia yang mewakili ASEAN untuk mengambil peran dalam perundingan penyelesaian damai di Kamboja. Pertemuan tersebut berhasil mengambil kesepakatan untuk menyetujui adanya dua partai gabungan dalam pemerintahan penguasa di Kamboja di bawah pengawasan PBB atau UNTAC (Country Studies 2010).

Selain konflik Kamboja, Indonesia aktif pula memainkan peranan penting dalam penyelesaian sengketa yang berpotensi mengganggu keamanan kawasan, seperti konflik Laut China Selatan. Keinginan Indonesia tersebut lantaran tidak terlibat dalam konflik ini. Indonesia pun tidak hendak menunjukkan eksistensi sebagai salah satu negara berkuasa di wilayah Asia Tenggara. Konflik tersebut tidak saja melibatkan negara ASEAN (Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Filipina), tetapi juga Tiongkok dan Taiwan. Konflik Laut China Selatan semakin bertambah getir lantaran Beijing sering melakukan manuver yang mengarahkan terjadinya konflik terbuka terutama dengan Taiwan (To 1990:150). Sejak konflik ini memburuk pada awal dasawarsa 1990-an, lewat ASEAN, Indonesia beberapa kali menganjurkan forum-forum seperti bertajuk *Managing Potential Conflicts in the South China Sea* (Hasjim Djalal 2011).

Kepemimpinan Indonesia diuji sejak awal ketika Filipina yang tengah dilanda kisruh politik domestik mencoba berkeras menganjurkan Pertemuan

Puncak ASEAN ke-3 di Manila. Negara-negara ASEAN khawatir mengirimkan delegasi masing-masing sehingga pertemuan tersebut nyaris batal. Namun keputusan Presiden Soeharto yang tetap menghadiri persidangan tersebut memberi keyakinan negara-negara ASEAN agar tetap melaksanakan Pertemuan Puncak ini di Manila pada tahun 1990 (Severino 2007:29). Indonesia kembali menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin ASEAN ketika Soeharto bersama pemimpin ASEAN lainnya menolak gagasan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohammad, mengenai pendirian East Asian Economic Group (EAEG) pada tahun 1990. Alasan penolakan Soeharto adalah usulan pendirian EAEG tidak pernah dirundingkan dengan negara ASEAN lainnya. Akibatnya, para pemimpin ASEAN tidak setuju membahas rencana tersebut. Penolakan ini membuat Malaysia mengubah rencana tersebut menjadi East Asia Economic Caucus pada tahun 1991 (Emmers 2005:625).

Perubahan Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia Setelah Runtuhnya Regim Soeharto

Pada masa pemerintahan rezim Orde Baru, Indonesia berhasil memainkan peranan penting di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam bidang keamanan kawasan, kerjasama ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia bersama dengan negara Asia Tenggara lainnya pun berhasil meletakkan dasar bagi kerjasama kawasan Asia Tenggara melalui pendirian ASEAN pada tahun 1967. Ini menjadikan kawasan tersebut menjadi salah satu kawasan yang disegani di dalam perbincangan politik internasional.

Peranan Indonesia di Asia Tenggara mengalami perubahan ketika Krisis Moneter Asia 1997/1998 melanda Indonesia. Keadaan tersebut diperburuk lagi dengan munculnya sejumlah kerusuhan politik dan konflik domestik menyusul jatuhnya rezim Soeharto, sebagaimana yang telah dibahas di dalam bab-bab sebelum ini. Dalam bagian ini dipaparkan bahwa kendati Indonesia telah menjadikan Asia Tenggara sebagai gelanggang utama pelaksanaan kebijakan luar negeri dan memainkan peranan kepemimpinan yang penting dalam pertumbuhan pemerintahan antar-bangsa khususnya ASEAN, namun selepas kejatuhan Suharto, Indonesia tidak lagi menjadikan ASEAN dan Asia Tenggara sebagai arena utama dalam pencapaian kepentingan nasionalnya.

Perubahan politik luar negeri Indonesia tersebut sejalan dengan pandangan Realisme Neoklasik yang menekankan bahwa perubahan politik luar negeri sebuah negara dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang bertindak sebagai variabel antara (*intervening variable*) dalam perubahan rencana kebijakan luar negeri sebuah negara. Perubahan politik luar negeri Indonesia tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor domestik, yaitu dampak

krisis ekonomi, peralihan kepemimpinan, dinamisnya konflik dalam negeri, masalah kerusuhan, masalah HAM, dan keterbukaan media serta tingginya tuntutan kelompok penekan di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto.

Perubahan lingkungan sekitar khususnya perubahan sistem politik internasional dari dua kutub menjadi multi-kutub dan isu-isu ideologi dan keamanan tidak lagi menjadi agenda utama. Tetapi isu-isu sosial politik internasional setelah selesainya Perang Dingin menjadi faktor utama yang mendorong Indonesia mengesampingkan orientasi ulang pelaksanaan politik luar negeri di peringkat internasional. Akibatnya Indonesia mulai memainkan peranan penting pada panggung politik internasional di luar ASEAN, seperti G20 dan APEC.

Bagian berikut mengurai terperinci tentang dinamika politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN pasca rezim Soeharto. Dalam sub bab ini menjelaskan bagaimana perubahan fokus kebijakan luar negeri Indonesia pasca-Soeharto, mulai dari kepemimpinan Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

1. *Presiden B.J. Habibie*

Keberadaan B.J Habibie sebagai Presiden ke III menggantikan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 mendapat tentangan dari berbagai pihak. Sebahagian kelompok masyarakat berpandangan bahwa pelantikan Habibie tidak sah sebab tidak melalui persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara kelompok pendukung berpandangan bahwa ia dibenarkan oleh Undang Undang bila negara dalam keadaan darurat, sehingga B.J Habibie dapat melanjutkan sisa masa pemerintahan Soeharto (1998-2003). Sementara pihak mahasiswa dan beberapa pemimpin partai politik tetap berpandangan bahwa pemerintahan Habibie merupakan lanjutan dari rezim Orde Baru. Ketidakstabilan politik tersebut diperparah lagi dengan dengan konflik-konflik domestik dan kerusuhan di beberapa daerah semakin marak yang dipicu dengan isu-isu agama (FICA 2011). Hal tersebut diperparah lagi dengan adanya kerusuhan yang menewaskan 1.200 etnik Tionghoa (Singh 2000:258).

Peristiwa-peristiwa domestik ini makin menyulitkan Presiden Habibie mendapat kepercayaan dari masyarakat kendatipun Habibie terus berusaha meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa pemerintahannya tidak sama dengan rezim Soeharto. Dilain pihak, negara-negara pendonor, seperti AS dan negara-negara Eropa, yang selalu mengaitkan bantuannya dengan politik dalam negeri Indonesia dan mendesak Habibie untuk melepaskan Timor Timur dari NKRI sebab (Murphy 2005:165). Portugal berpandangan bahwa proses penyatuan Timor Timur tidak sah dan telah terjadi pelanggaran HAM yang serius di

wilayah tersebut. Oleh karena itu, Isu Timor Timur kerap dikaitkan dengan bantuan ekonomi yang diberikan kepada Indonesia, terutama dari AS dan Australia. Malahan, Kongres AS kembali melanjutkan penghentian sementara bantuan pelatihan militer karena Indonesia tak mampu mencegah terjadinya pelanggaran HAM di wilayah tersebut (He 2005:15).

Habibie juga mendapat desakan masyarakat internasional, terutama AS dan Australia, untuk menyelenggarakan referendum di Timor Timur. Perdana Menteri Australia ketika itu, John Howard mengirim surat pribadi pada Desember 1998, agar Habibie dapat mempertimbangkan untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri (*right of self determination*) kepada rakyat Timor Timur (Downer 2000:5). Keputusan Habibie untuk melaksanakan referendum mengejutkan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Timor Timur yang pro-integrasi dengan Indonesia (Detik Online, 20 Februari 2007). Alasan Habibie memberi referendum rakyat Timor Timur, selain untuk menaikkan citra pemerintahannya, itu ditempuh demi menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa era pemerintahannya berlainan dengan Orde Baru. Ia juga berpandangan bahwa keputusan tersebut dapat memudahkan Indonesia mendapatkan sokongan ekonomi dari negara donor untuk memulihkan pembangunan ekonomi Indonesia (He 2005:16).

Masalah-masalah domestik yang terjadi itu juga mempengaruhi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di ASEAN. Hubungan Indonesia dengan negara tetangganya menjadi kurang harmonis pada era Habibie. Singapura tidak terlalu senang bila Habibie menjadi presiden. Ini berkaitan dengan masalah pribadi kedua pemimpin negara, dan juga masalah ekonomi serta kesukuan. Singapura membatalkan bantuannya sebesar USD 5 miliar lantaran konflik kesukuan dalam kerusuhan Mei 2008. Singapura juga ragu-ragu bahwa bantuan tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi karena banyaknya kasus korupsi di Indonesia (Murphy 2005: 263). Sikap Singapura tersebut menyebabkan hubungan keduanya memburuk. Habibie lantas membatalkan rencana kunjungannya ke Singapura. Dalam suatu pertemuan, Habibie menyatakan bahwa Singapura tidak menunjukkan semangat persahabatan seperti negara-negara maju lain, terutama AS dan Jepang yang proaktif membantu memulihkan ekonomi Indonesia pasca krisis keuangan 1998. Ia juga sadar bahwa Singapura tidak senang atas kepemimpinannya sebagai presiden yang ke-3 (Smith 2000:57).

Hubungan Indonesia dengan Malaysia juga terganggu akibat hubungan Habibie secara pribadi dengan pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim. Kedekatan keduanya disokong oleh hubungan rapat antara kedua organisasi keagamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Institut Kajian

Dasar (IKD), yang telah berlangsung selama tujuh tahun. Pada awal kepemimpinannya, Habibie berusaha untuk memperbaiki hubungan baiknya dengan Malaysia. Selain karena negara jiran mempunyai kesamaan budaya dan etnik, Malaysia juga memberikan dukungan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Hubungan Indonesia-Malaysia mulai memburuk ketika Anwar Ibrahim ditangkap oleh pihak pemerintah pada 20 September 1998. Sebagai bentuk dukungan dan simpati Habibie membatalkan lawatan resminya ke Malaysia serta memutuskan untuk tidak menghadiri Pertemuan Puncak APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) yang diadakan pada 17-18 November 1998. Pembatalan kunjungan Habibie ini menandai hubungan yang tak harmonis antara Jakarta dan Kuala Lumpur yang selama ini terjalin dengan baik selama 32 tahun (Leo Suryadinata 1999:126). Selama kepemimpinan B.J Habibie, peranan Indonesia di Asia Tenggara menyusut. Ini disebabkan, selain Habibie lebih fokus ke masalah domestik, ia juga lebih menitikberatkan hubungannya dengan negara-negara Eropa, terutama Jerman.

2. Presiden K.H.Abdulrahman Wahid

Terpilihnya K.H. Abdulrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke 4 menggantikan Habibie pada tahun 1999. Gus Dur harus menghadapi sejumlah masalah domestik, seperti pemulihan ekonomi dan penyelesaian beberapa konflik komunal dan kelompok separatis. Konflik yang terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua bukan hanya mengganggu keamanan dan kesatuan nasional Indonesia, juga menjadi sorotan masyarakat internasional, terutama berkaitan dengan pelanggaran HAM. Tingginya tuntutan pemulihan ekonomi dan transformasi politik serta desakan masyarakat internasional terhadap kepemimpinan Gus Dur untuk menyelesaikan masalah HAM pasca krisis Timor Timur, mengharuskan kebijakan luar negeri Indonesia lebih tegas dan terbuka terhadap negara-negara Barat, khususnya AS dengan sekutunya. Untuk itu, Gus Dur mengadakan lawatan ke AS dan negara-negara Eropa demi meyakinkan mereka bahwa Indonesia bertekad melaksanakan pemerintahan yang demokratis dan terus mengupayakan pemulihan ekonomi dalam negeri.

Upaya Gus Dur mendapat sambutan hangat dari AS dan sekutunya, terutama Australia dan Jepang. Ketiga negara ini bahkan bersedia memberikan sokongan ekonomi kepada Indonesia, baik melalui perjanjian bilateral maupun lainnya. Namun dukungan tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada pemerintahan Gus Dur sebab negara-negara tersebut masih menuntut Indonesia untuk menyelesaikan masalah HAM di Indonesia, khususnya di Timor Timur. Gus Dur dituntut untuk mengadili siapa pun pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan menuntut Wiranto meletakkan jabatan sebagai

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam kabinet Gus Dur (Vermonte 2011). Desakan negara-negara Barat tersebut membuat Gus Dur kecewa sehingga kebijakan luar negeri Indonesia kemudian lebih diarahkan pada negara-negara Asia dengan memakai pendekatan yang disebut "look toward Asia policy". Pendekatan tersebut lebih berorientasi pada kerjasama dengan negara-negara Asia yang bertujuan mengimbangi dominasi dan pengaruh negara-negara Barat di Asia, terutama AS. Gus Dur bahkan mengusulkan pembentukan kesepakatan baru negara-negara Asia yang dikenal sebagai "poros Indonesia, Tiongkok, dan India". Gagasan tersebut bentuk baru dari gagasan lama Soekarno, yaitu "Newly Emergence Force" pada tahun 1960-an (Smith 2000: 512).

Sikap kebijakan luar negeri yang cenderung berorientasi ke Asia Timur dan Timur Tengah menyebabkan Gus Dur mengesampingkan perhatian terhadap ASEAN yang selama ini menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Tuntutan ekonomi dan politik dalam negeri yang kian tinggi menyebabkan Gus Dur lebih menggantungkan harapan pada bantuan negara-negara Barat dan Timur Tengah untuk memulihkan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia ketimbang negara ASEAN yang juga sebagian besar dilanda krisis moneter. Gus Dur kembali melemahkan posisi politik luar negerinya pada forum ASEAN ketika ia berusaha membujuk Singapura untuk menyetujui pendirian Forum Pasifik Barat pada Pertemuan Puncak ASEAN di Singapura pada November 2000 dan mengusulkan Timor Leste dan Papua Nugini menjadi anggota ASEAN. Namun usulan tersebut ditolak oleh Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew. Penolakan itu menimbulkan kemarahan Gus Dur dan menyebut Lee Kuan Yew sebagai orang "tamak" dan anti Melayu (South China Morning Post, 12 January 2001).

Secara umum, kepemimpinan Gus Dur dalam menyelesaikan pelbagai masalah domestik dianggap lemah. Ia juga gagal dalam perjuangan politik luar negeri demi memenuhi kepentingan nasional Indonesia, terutama upaya memulihkan ekonomi dalam negeri. Perkara-perkara tersebut menyebabkan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Gus Dur semakin mendapat tekanan berkaitan dengan tuduhan penyalahgunaan keuangan negara yang dikenal sebagai "Bulog Gate" dan "Brunei Gate". Skandal "Bulog Gate" berkaitan dengan penerimaan sejumlah uang dari Badan Usaha Logistik Negara (BULOG). Sedang "Brunei Gate" adalah sebutan penyalahgunaan bantuan keuangan Sultan Brunei sebesar USD 2 juta untuk Indonesia dalam membantu korban tsunami di Aceh. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan Gus Dur bersalah dalam kedua kasus tersebut. Akhirnya, pada 21

Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memecat Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke empat (The Jakarta Post, 25 Agustus 2000).

3. Megawati Soekarno Putri

Pada era B.J. Habibie dan Gus Dur, politik luar negeri Indonesia lebih difokuskan pada perbaikan ekonomi dan konflik domestik dalam rangka meningkatkan stabilitas dalam negeri, namun setelah Megawati menjadi Presiden Indonesia secara perlahan mulai normal, dalam pengertian stabilitas politik dan ekonomi sudah mulai pulih kembali sehingga Indonesia mulai aktif kembali dalam arena politik internasional mulai dari ASEAN maupun di luar ASEAN (29 Mei 2012). Meski demikian, Megawati masih berhadapan dengan masalah dalam negeri yang hampir sama, yaitu pemulihan ekonomi dan konflik-konflik dalam negeri serta kasus-kasus pelanggaran HAM. Megawati juga dituntut menyelesaikan masalah HAM yang gagal dilakukan oleh Gus Dur untuk memenuhi keinginan negara-negara Barat (Rachmianto, 2001). Negara Barat dan organisasi hak-hak asasi manusia internasional menekan Indonesia terkait dengan kerusuhan dan pelanggaran HAM oleh pihak militer di beberapa daerah konflik di Indonesia, seperti Maluku, Papua, dan Timor Timur (Murphy 2005: 270). Oleh karena demikian, Megawati lebih berfokus pada penyelesaian konflik domestik dan berusaha memperbaiki hubungan baik Indonesia dengan negara-negara Barat, juga dengan negara ASEAN. Megawati berusaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara Barat, terutama Australia, yang selama ini mengalami pasang surut.

Selama Orde Baru, hubungan Indonesia dan Australia kurang harmoni diakibatkan perlakuan buruk tentara dan penembakan beberapa wartawan Australia di Timor Timur (Kompas, 19 Februari 2009). Usaha Megawati memperbaiki hubungan tersebut, selain bertujuan untuk memulihkan hubungan baik dengan negara jiran, juga karena Australia merupakan salah satu aktor utama di kawasan Asia Pasifik yang dapat membantu penyelesaian masalah politik domestik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah HAM di Timor Timur. Presiden Megawati kemudian menjemput Perdana Menteri Australia ketika itu, John Howard, untuk berkunjung ke Indonesia. Kunjungan John Howard pada bulan Agustus 2001 merupakan lawatan kedua negara yang pertama ketika Megawati berkuasa.

Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Megawati kembali mendapat tantangan ketika AS menyatakan perang melawan teroris pasca tragedi 11 September 2001. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, AS sangat berharap pada Indonesia agar dapat memainkan peranan penting dalam

menumpas kelompok teroris di dunia. Harapan AS ini mendapat sambutan baik oleh Megawati dengan melakukan lawatan balas ke AS. Walau Megawati mengutuk keras aksi serangan 11 September di WTC sebagai rasa simpati terhadap rakyat AS, tetapi ia tetap mengkritik perlakuan militer AS di Afganistan dan Pakistan. Dalam lawatan tersebut, pemerintahan George Bush memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar USD 657 juta dan berjanji untuk menghentikan embargo penjualan peralatan militer kepada Indonesia serta melanjutkan pelatihan militer setelah menghentikannya akibat isu Timor Timur (He 2005:34).

Meski Megawati dipandang serius menyikapi isu teroris, namun masalah politik domestik masih menjadi agenda serius politik luar negeri Indonesia, terutama berkenaan dengan konflik Aceh, Papua, dan Timor Timur. Untuk mengurangi tekanan internasional, Megawati melibatkan Henry Dunant Center (HDC) dalam menyelesaikan konflik di Aceh. Namun usaha tersebut tetap tak mampu meredakan konflik yang sedang terjadi. Megawati juga gagal menyelesaikan konflik di Papua. Untuk berhadapan dengan gerakan OPM, Megawati menawarkan otonomi khusus. Keputusan ini mendapat sambutan baik, mulai dari dalam maupun dari luar negeri. Namun keupayaan ini kembali tersendat akibat peristiwa pembunuhan ketua presidium Theys Eluay oleh tentera yang memicu kemarahan masyarakat Papua, yang berbuntut terjadinya bentrok serta pe-nembakan terhadap dua pekerja Freeport berkebangsaan AS pada Agus-tus 2002 (Tempointeraktif, 03 Januari 2003). Kejadian ini menimbulkan kecaman dan kritikan dari masyarakat internasional terhadap Megawati yang tidak bisa menyelesaikan peristiwa ini secara tuntas. Bahkan Kongres AS kembali mengkaitkan bantuannya dengan masalah Papua.

Selain masalah domestik menarik perhatian Megawati, Indonesia berupaya memperbaiki hubungan dengan negara ASEAN. Ini berkaitan dengan terjadinya salah paham dengan Malaysia dan Singapura, hubungan yang diwariskan pada masa Habibie dan Gus Dur, sehingga hubungan kedua negara kurang harmoni. Megawati juga menekankan akan kembali memainkan peranan penting di peringkat ASEAN (Dewi Fortuna Anwar, 2003). Oleh itu, Megawati mengutamakan lawatan pertamanya ke negara ASEAN untuk membuktikan bahwa ASEAN masih merupakan prioritas bagi politik luar negeri Indonesia, seperti pada masa Soeharto. Megawati kemudian mengadakan lawatan pertamanya ke sembilan negara ASEAN antara 20-29 Agustus 2009 (Weatherbee, 2005:151). Niat baik Megawati itu mendapat tantangan ketika terjadi kerusuhan di Malaysia yang melibatkan sekumpulan pekerja Indonesia. Kerajaan Malaysia mengancam memulangkan hampir 2 juta pekerja Indonesia sebagai buntut rusuhan yang terjadi. Meski Megawati telah mengutus wakil

presiden, Hamzah Haz sebagai utusan Indonesia untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Mahathir Mohammad agar keputusan tersebut dibatalkan, tetapi ia gagal. Kerajaan Malaysia tetap memulangkan para perusuh tersebut kembali ke Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan hubungan kedua negara mengalami penurunan (Dewi Fortuna Anwar 2003: 82-3).

Masalah isu demokrasi di Myanmar, Megawati juga berkeinginan memainkan peranan penting dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Namun upaya tersebut mendapat tentangan dari Perdana Menteri Thailand, Thaksin Sinawatra. Keberatan Thaksin terhadap Indonesia, selain disebabkan oleh keinginan Thailand untuk berperanan dalam isu keamanan di kawasan Asia Tenggara, ia juga berkepentingan meredam pemberontakan Islam di Thailand Selatan yang selama ini telah banyak menyita perhatian pihak pemerintahnya (Murphy 2005: 279).

Untuk mengembalikan peranan Indonesia di kawasan Asia Tenggara memang tak mudah. Tantangan utama yang harus dihadapi Megawati adalah masalah domestik terutama soal ekonomi, politik, dan keamanan yang tidak stabil sehingga Megawati lebih fokus kepada masalah dalam negeri dibanding masalah kawasan ASEAN. Pada pihak lain, Megawati sebagai pemimpin dianggap lemah sehingga banyak permasalahan domestik maupun kawasan yang tidak dapat diselesaikan tuntas sehingga bebannya kian berat.

4. Susilo Bambang Yudoyono (SBY)

Pada awal pemerintahan SBY, Indonesia dilanda berbagai bencana alam terutama peristiwa tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004. Namun hal itu justru menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Barat serta mempercepat proses penyelesaian konflik Aceh. Perhatian dan bantuan masyarakat internasional yang begitu besar terhadap peristiwa tsunami di Aceh telah membuka peluang bagi SBY dalam membina hubungan baik dengan negara-negara Barat yang selama ini mempunyai persepsi buruk terhadap Indonesia akibat peristiwa Timor Timur tahun 1999.

Australia dan AS misalnya, yang semula menekan Indonesia berkaitan dengan isu HAM justru paling pertama memberikan bantuan kepada korban tsunami di Aceh yang kemudian diikuti oleh beberapa negara donor dan negara-negara lainnya (Harian Merdeka, 28 Desember 2004). Peristiwa tsunami juga kian memudahkan proses perdamaian antara pihak Indonesia dan GAM. Kedua pihak bersetuju untuk gencatan senjata dan melakukan perundingan demi mencari penyelesaian konflik Aceh (Kamarulnizam Abdullah: 2005). Meski perundingan ini mendapat tentangan dari kalangan militer, tetapi SBY bersikukuh berunding dengan GAM. Melalui perantara Crisis

Management Initiative (CMI), akhirnya GAM bersetuju untuk tidak memisahkan diri dari NKRI dan menerima otonomi khusus. Pada 15 Agustus 2005, perwakilan Indonesia Hamid Awaluddin dan Malik Mahmud yang mewakili GAM sepakat menandatangani Memorandum Kesepahaman (MoU) Helsinki (Djalal 2010).

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN kurang bersinar pada masa B.J Habibie, Gus Dus, dan Megawati karena ketiganya lebih menitikberatkan pada penyelesaian masalah-masalah dalam negeri. Olehnya demikian, SBY ingin mengembalikan peranan Indonesia di ASEAN, terutama berkaitan dengan masalah keamanan, demokrasi, dan HAM. Demi menyelesaikan masalah-masalah tersebut, diperlukan suatu kesamaan pandangan dan komunitas yang berpadu satu sama lainnya dengan dasar aturan yang jelas. Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya di ASEAN ketika berhasil mendorong terbentuknya pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga aspek, yakni Komunitas Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosio-budaya ASEAN. Ketiga tonggak ini ter- maktub dalam langkah tahapan yang disahkan pada Pertemuan Puncak ASEAN ke-14 di Hua Hin, Thailand, 24 Oktober 2009. Indonesia mengharapkan bahwa para pemimpin ASEAN berkomitmen mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN yang semula dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 (The Jakarta Post, 01 Juli 2013).

Setelah terpilih sebagai Ketua ASEAN pada 2011, Indonesia lebih menitikberatkan perhatian pada penguatan HAM dan proses demokrasi. Sebagai ketua ASEAN pada tahun 2011, Indonesia telah mengambil beberapa inisiatif mekanisme penyelesaian sengketa di antara negara-negara anggota ASEAN di antaranya Indonesia mengusulkan berdirinya ASEAN Initiative Talk for Peace and Reconciliation yang disahkan pada KTT ASEAN di Kamboja. Sedangkan masalah Myanmar juga mengalami kemajuan. Meskipun Amerika Serikat menghendaki agar Myanmar itu diasingkan dari negara-negara Asia Tenggara, tetapi ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia justru memberikan kesempatan kepada Myanmar untuk menjadi ketua ASEAN 2014.

Pada pemilihan umum presiden 8 Juli 2009, SBY terpilih untuk kedua kalinya dan semaiikan membaiknya citra Indonesia sejalan dengan peranannya yang semakin aktif di pelbagai organisasi dan forum internasional, membawa Indonesia menjadi salah satu anggota G-20. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota forum ekonomi tersebut. Sejak Indonesia menjadi anggota G-20, SBY telah tampil memperjuangkan pelbagai kepentingan negara-negara berkembang, terutama terkait dengan masalah pembangunan dan penertiban pengaturan keuangan dunia serta masalah-masalah korupsi yang banyak merugikan negara-negara berkembang. Dalam

Pertemuan Puncak di Seoul, Korea Selatan, pada 11-12 November 2010, Indonesia dan negara G-20 lainnya berhasil turut mendorong pendirian Global Financial Safety Net (GFSN) dan Anti-Corruption Working Group (ACWG) setelah Indonesia dan Prancis terpilih menjadi Co-Chair Anti-Corruption Working Group (KBS News, 12 Desember 2010). Tampilnya Indonesia dalam Forum G-20 tidak hanya membawa manfaat bagi negara-negara berkembang, tetapi juga bagi ASEAN. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia dalam memainkan perannya berusaha membawa agenda kepentingan ASEAN pada forum G-20.

Karena kebijakan global yang diterapkan oleh negara maju ke negara berkembang kadangkala tidak sesuai dengan keadaan negara-negara berkembang sehingga kita selalu gagal dalam penerapannya. Oleh karena itu, melalui keanggotaan Indonesia di G20, ASEAN secara kolektif bisa mempengaruhi keputusan G-20 untuk perbaikan ekonomi negara-negara ASEAN. Dalam proses pengambilan keputusan di G20, Indonesia dan ASEAN dapat saling melengkapi. Jika Indonesia berbicara atas nama G20 maka ASEAN dapat mendukung Indonesia dan sebaliknya jika Ketua ASEAN berbicara di forum G20 maka Indonesia dapat mem-backup ASEAN (12 April 2012). Indonesia berkepentingan membawa ASEAN ke forum G20 sebagai perwakilan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Sikap negara-negara G-20 yang mau menerima ASEAN sebagai mitra bicara disambut baik oleh para pemimpin ASEAN. kedudukannya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB selama November 2007, Indonesia mengambil inisiatif menyelenggarakan perdebatan terbuka dengan tema "The role of regional and subregional organization in the maintenance of international peace and security" (UN News Center 2007). Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkuat peranan organisasi-organisasi kawasan dan sub-kawasan dalam memelihara perdamaian dan keamanan rantau kawasan dan internasional, serta mengenal dan mengembangkan modalitas bagi peningkatan sumbangannya kepada Majelis Keamanan PBB dalam menjalankan mandatnya.

Dilain Pihak, Indonesia pada masa SBY juga memainkan peranan penting dalam penegakan HAM di dunia. Tahun 2007, Indonesia kembali terpilih menjadi Ketua Dewan HAM dengan memperoleh dukungan suara dari 165 negara anggota PBB. Meski masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan di Indonesia, tetapi ini menunjukkan banyak kemajuan yang sangat signifikan. Laporan Human Rights Practices Report yang diterbitkan oleh Bureau of Democracy, Human Rights and Labor AS pada tahun 2009 menyatakan bahwa penegakan HAM di bawah kepemimpinan SBY telah

mengalami perbaikan signifikan. Pemerintahan SBY mulai menghormati hak sipil di Indonesia berbanding rezim sebelumnya. Rezim Soeharto adalah yang terburuk dalam pelanggaran HAM di Indonesia. Selama tahun 2009, Indonesia juga dipandang terus menghasilkan kemajuan dalam penguatan demokrasi, salah satunya terlihat dari sikap pemerintah yang memproses aparat tinggi dalam kasus korupsi. Hal tersebut dinyatakan oleh Makmur Keliat, Pengurus Program Studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia di Jakarta melalui wawancara pada 09 Maret 2012.

Sebelumnya, Indonesia menjadi tumpuan masyarakat internasional dengan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur yang menjadi agenda penting di Majelis HAM PBB (Human Right Council) semenjak tahun 1999. Setelah Indonesia berusaha melakukan pendekatan dengan pemerintahan Timor Leste, akhirnya kedua negara sepakat mendirikan Majelis Kebenaran dan Persahabatan yang bertujuan mengadakan pengusutan terhadap kasus pelanggaran HAM. Berdasarkan laporan hasil kerja majelis tersebut, kedua negara setuju mengakhiri kasus pelanggaran HAM antara Indonesia dan Timor Leste. Pengertian yang baik dan dukungan dari banyak negara, termasuk Dewan Keamanan PBB pada sidangnya 16 Agustus 2008, telah menutup satu bagian sejarah kelim hubungan Indonesia –Timor Leste.

Kesimpulan

Kejatuhan rezim Soeharto berdampak terhadap keadaan politik dan keamanan dalam negeri Indonesia yang juga turut mempengaruhi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Dinamisnya konflik domestik dan berubahnya sistem politik internasional telah pula berdampak pada setiap tahap kepemimpinan dalam perancangan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga fokus dan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia berbeda antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain.

Pada masa B.J. Habibie (Mei 1998-Oktober 1999), terjadi ketidakstabilan politik dan keamanan akibat jatuhnya Soeharto. Kerusuhan massa marak terjadi dan merata di banyak tempat. Olehnya itu, Habibie lebih menumpukan perhatian pada politik dalam negeri, terutama demi memperoleh keabsahan pemerintahan. Ia berusaha meyakinkan warga Indonesia bahwa pemerintahannya tidak sama dengan rezim Soeharto. Habibie juga banyak mendapat desakan internasional berkenaan isu pelanggaran HAM di Timor Timur. Keadaan domestik yang kritis menyebabkannya kurang memikirkan masalah politik luar negeri terutama terhadap ASEAN.

Ketidakstabilan ekonomi, politik, dan keamanan masih terjadi ketika Habibie diganti oleh Abdulrahman Wahid atau Gus Dur (Oktober 1999-Juli

2001). Isu-isu seperti pemulihan ekonomi dan penyelesaian beberapa konflik komunal dan kelompok separatis memerlukan perhatian serius. Gus Dur sebagai pemimpin kerap mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan perdebatan banyak kalangan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ia sangat terbuka dengan pihak-pihak pemberontak dalam upayanya menyelesaikan konflik. Gus Dur berpandangan, politik luar negeri yang lebih tegas dan terbuka terhadap negara-negara Barat, khususnya AS dengan sekutunya dapat membantu menyelesaikan permasalahan domestik Indonesia. Oleh karena itu, ia banyak melakukan lawatan kerja ke luar negeri untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat internasional. Namun ia kecewa ketika sadar bahwa bantuan ekonomi yang diberikan kepada Indonesia tidak tulus. Pada akhirnya Gus Dur kembali menggunakan pendekatan "look toward Asia policy" yang lebih mendekatkan diri kepada negara-negara Asia untuk mengimbangi dominasi dan pengaruh negara-negara Barat di Asia. Pernyataan-pernyataan Gus Dur yang seringkali kontroversi dipandang bisa mencederai kesatuan negara. Hal tersebut pada akhirnya melemahkan kuasanya.

Peranan Indonesia di ASEAN semakin kurang ketika Megawati menjadi presiden setelah Gus Dur (Oktober 1999 - Juli 2001). Memandangkan ketidakstabilan yang masih terjadi, Megawati lebih berfokus pada penyelesaian konflik dalam negeri. Meski demikian, Megawati juga berusaha memperbaiki hubungan baik Indonesia dengan negara-negara Barat dan negara-negara ASEAN yang kurang harmoni ketika Gus Dur berkuasa. Megawati mengadakan lawatan pertamanya ke sembilan negara ASEAN sebagai bukti bahwa ASEAN masih merupakan prioritas bagi politik luar negeri Indonesia. Meski demikian, peranan Indonesia di ASEAN kurang cemerlang akibat masalah-masalah domestik yang membelit Indonesia. Di sisi lain, ketidakmampuan ASEAN memenuhi kepentingan nasional Indonesia setelah krisis keuangan 1997/1998 membuat Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati cenderung mengesampingkan perhatiannya di ASEAN sehingga ketiga presiden tersebut berusaha mencari peluang kerjasama ekonomi baru di luar ASEAN.

Keberadaan politik dalam negeri yang tetap tidak stabil pada masa Megawati menjadi keutamaan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Oktober 2004-2014). Politik luar negeri Indonesia masa SBY lebih menumpukan kepada upaya pemulihan ekonomi, menciptakan iklim demokratis, memelihara kedaulatan wilayah, dan kesatuan Indonesia serta meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Kejayaan SBY memperbaiki kondisi dalam negeri berhasil mengangkat citra SBY di mata dunia internasional. Dengan menggunakan "Diplomasi pencitraan", Indonesia mulai

berperan aktif tidak saja di level kawasan tetapi juga di ranah global. Di level kawasan Asia Tenggara, Indonesia mempertahankan kehadiran dan keaktifan memainkan peranan penting dalam berbagai forum ASEAN. Sedang di ranah global, Indonesia aktif berperan di berbagai forum internasional, utamanya di forum APEC dan forum-forum PBB serta membina hubungan baik dengan negara-negara adikuasa utamanya AS dan negara Eropa lainnya. Sebagai pencapaian puncak, Indonesia terpilih sebagai anggota G-20 dan beranggapan keanggotaannya tersebut mewakili kepentingan negara berkembang, terutama ASEAN.

Referensi

- Abad, M.C., Jr. 1996. Re-engineering ASEAN, *Contemporary Southeast Asia*, 18(3): 237-253.
- Akrasanee, N & D Stifel. 1994. A vision of Southeast Asia in the year 2000: towards a common economic regime. *Contemporary Southeast Asia* 16(1): 1-11.
- Ali Alatas. 2001. *A voice for a just peace, a collection of speeches*. Singapore: ISEAS.
- Acharya, Amitav. 2008. *Asia rising, who is leading*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Acharya, Amitav. 2006. Constructing Security and Identity in Southeast Asia, *Brown Journal of World Affairs* XII(2): 155-165.
- Andy Rachmianto. 2001. Politik Luar Negeri Pemerintahan Megawati. *Kompas*. 09 Agustus.
- Arase, D. 1995. *Buying power, the political economy of Japan's foreign aid*. Colorado: Lynne Rienner.
- Arik Yudianto. 2010. Sejarah munculnya dwifungsi ABRI. *Kompas*. 12 Januari.
- Ba, A. D. 2003. China and ASEAN: re-navigating relations for 21st Century Asia, *Asian Survey* XLIII(4): 623-628.
- Bacharuddin Jusuf Habibie. 2006. *Detik-detik yang menentukan: jalan panjang Indonesia menuju demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Bantan Nugroho. 1996. Indonesia Foreign Policy And ASEAN, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. Dalhousie University Halifax, Nova Scotia.
- B.P Habeahan. 1999. *Sidang Istimewa dan Semanggi Berdarah*. Depok: Permata AD Depok

- Bandoro Bantarto (pnyt). 1996. *Agenda dan penataan keamanan di Asia Pasifik*. Jakarta: CSIS.
- Benedict Ang Kheng Leong. 1998. Indonesian foreign policy: change and continuity amidst a changing environment. *Journal of the Singapore Armed Forces*. 24(2): 1-8.
- Baylis, J & S. Smith (pnyt). 2005. *The Globalization of world politics: An introduction to international relations*. New York: Oxford.
- Baumann, R., Rittberger, V., Wolfgang, W. 2001, No realist foreign policy theory, Dlm Rittberger, V. (ed), *German foreign policy since unification: theories and case studies*. Manchester: Manchester University Press.
- Chandra, C Alexander. 2004. Indonesia's non state actors in ASEAN: a new regionalism agenda for Southeast Asia, *Contemporary Southeast Asia* 26(1): 155-174.
- Camilleri, J. A. 1973. *An introduction to Australia foreign policy*. Milton: the Jacaranda Press.
- Castro, R. 1994. U.S Grand strategy in Post Cold war Asia Pacific. *Contemporary Southeast Asia* 30(3). 342-353.
- Catley, B. 1997. Hegemonic America: the benign Superpower. *Contemporary Southeast Asia* 18(4): 377-399.
- Dewi Fortuna Anwar. 1994. *Indonesia in ASEAN, foreign policy and regionalism*. Singapura: ISEAS.
- Dewi Fortuna Anwar. 2002. Hatta dan Politik luar negeri Indonesia. *Kompas*. 09 Agustus.
- Dosch, Jörn. 2006. The impact of democratization on the making of foreign policy in Indonesia, Thailand and the Philippines. *Südostasien aktuell* (5): 42-70.
- Dosch, Jörn. 2004. The United States in the Asia Pacific. Dlm M.K. Connors, R. Davidson & J. Dosch. *The new global politics of the Asia Pacific*. New York: Reuledge Curzon.
- Daljit. S. 2012. *Southeast Asian affairs*. Singapore: ISEAS.
- Dalpino, C. E. 2001. Indonesia at the Crossroads. *Global politics*. <http://www.brookings.edu/comm/policybriefs/pb89.htm>. [26 May 2007].
- Daquila, T. C. 2007. *The transition of Southeast Asia economies*. New York: Nova Science Publisher.
- Elina Noor & Mohammad Jawhar Hassan (pnyt). 2002. *Terrorism: perspectives for the Asia Pacific*. Kuala Lumpur: ISIS Malaysia.

- Emmers, R. 2003. *Cooperative security and the balance of power in ASEAN and The ARF*. London: Routledge.
- Emmers, R. 2005. Regional hegemonies and the exercise of power in Southeast Asia, *Asian Survey*, XLV (4): 645-655
- Faustinus Andrea. 2007. Masyarakat ekonomi ASEAN. *Kompas*. 7 Agustus
- Ferguson, R. J. 2004. ASEAN concord II: policy prospect for Foreign policy open to ridicule. *South China*. 2001. *Morning Post* 12 January.
- Fry, G. W. 2008. *Global organizations: the association of Southeast Asian Nations*. New York: Chelsea House.
- Folker, J. S. 2002. *Theories of international cooperation and the primacy of anarchy : explaining U.S. international policy-making after Bretton Woods*. New York: SUNY Press.
- Faustinus Andrea. 2007. Masyarakat ekonomi ASEAN. *Kompas*. 07 Agustus.
- Ganewati Wuryandari (pnyt). 2008. *Politik luar negeri Indonesia di tengah pusaran domestik*. Jakarta: P2P-LIPI.
- Gordon, Bernard K. 1966. *The dimension of conflict in Southeast Asia*. New Jersey: Printice Hall Inc.
- Goldstein, Joshua S. & Jon C Pevehouse. 2010. *International relations*. Edisi Kelima. New York: Pearson.
- G.V.C. Naidu. 2000. Multilateralism and regional security: can the ASEAN regional forum really make a difference? *Asia Pacific Issues*, Analysis from the East-West Center 45.
- Hadi Soesastro, Anthony L Smith & Han Mui Ling (pnyt). 2003. *Govern in Indonesia, challenges facing the Megawati presidency*. Singapore: ISEAS.
- Haggart, Stephen. 2000. *The political economy of the Asian financial crisis*. Washington DC: Institute for International Economics.
- Hagan, J. D. 1995. Domestic Political Explanations in the analysis of foreign policy. Dlm. J.A. Rosati, J.D. Hagan & M.W. Sampson III. Foreign policy Imran Lim. 1996. *Growth triangles in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: ISIS.
- Imam Cahyo (pnyt). 2008. Menjinakkan metakuasa global, suara Indonesia untuk globalisasi yang lebih adil. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan, *Tempointeraktif*, 17 Desember 2002.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2002/12/17/brk,20021217-30_id.html. [11 Februari 2010].

- Indonesia, ASEAN, and the Third Indochina War. <http://countrystudies.us/indonesia/99.htm>. [17 April 2010].
- Lee Lai To. 1990. Managing potential conflict in South China Sea: political and security Issues. A paper presented in the Workshops Managing Potential Conflicts in the South China Sea in Bali Indonesia, 22-24 January.
- Leifer, M. 2005. *Selected works on Southeast Asia*. Singapore: ISEAS.
- Leifer, M. 1986. *The balance of power in East Asia*. London: Maretmillan.
- Leifer, M, 1983, *Indonesia's foreign policy*, London: Allen and Awin.
- Luhulima C.P.F. 2008. *Masyarakat Asia Tenggara menuju komunitas ASEAN 2015*. Jakarta: Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI.
- Mahendra Siregar. 2010. Indonesia, G20 dan Komitmen anti korupsi. Round Table discussion. *International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)*, Jakarta 30 November 2010.
- Makie, J.A.C. 1974. *Konfrontasi the Indonesia – Malaysia dispute 1963 – 1966*. London: Oxford University press.
- Marciel, S. A. 2008. US engagement in Southeast Asia. *Indonesian Quaterly CSIS Jakarta*, Desember, 36: 3-4.
- Pacini, M. C. & Siow You. 1997. *ASEAN in the new Asia*. Singapore: ISEAS, 1997.
- Panglima TNI: Pelanggaran HAM di Aceh Jangan Berlaku Surut. 2005. *TempoInteraktif*. 18 Agustus
- Chachavalpongpun, P. 2010. *Reinventing Thailand: Thaksin and his foreign policy*. Bangkok: Institute of Southeast Asian Studies and Silkworm Books.
- Pandey, A.N. 1980. *South And Southeast Asia 1945-1979, problems And policies*. London: MaretMillan Press.
- Papp S, Daniel. 2002. *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*: United Kingdom: Longman.
- Priatna, P. 2007. Empat puluh tahun ASEAN. *Kompas*, 07 Agustus.
- VermontWeatherbee, D. E. 2005. *Indonesian foreign policy, a wounded phoenix, Southeast Asia Affairs*. Singapore: ISEAS.
- Weatherbee, D. E. (edit). 1985. *Southeast Asia Divided, the ASEAN-Indochina crisis*. New York: Westview Press.
- Weinstein, F. B. 1976. *Indonesia foreign policy and the dilemma of Dependence, from Sukarno to Soeharto*, Ithaca: Cornell University Press.

Wendzel, R. L. 198. *International Politics: Policy makers and Policy making*, New Jersey: John Wiley & Son.

Yulius P Hermawan. 2011. *The Role of Indonesian in the G20, Background, role and objective of Indonesia's membership*, Jakarta: Fredrich Ebert Stiftung.

Zamroni Salim. Indonesia in the G20: benefits and challenges amidst national interests and priorities.
http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/G20_E-Book/chapter_10.pdf [20 Maret 2011].

Multikulturalisme sebagai Pembentuk Gaya Diplomasi Indonesia dan Pengaruhnya Di ASEAN

Flavianus D. Melsasail

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Abstrak

Perjalanan panjang ASEAN dari terbentuknya hingga saat ini tidak lepas dari peran Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memang memegang prinsip *equality* atau persamaan bagi seluruh negara anggota, namun demikian pengaruh besar Indonesia membuatnya menjadi *primus inter pares* atau yang terkuat dari yang sederajat. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya peran Indonesia di Asia Tenggara antara lain jumlah penduduk yang besar dan dianggap memiliki potensi sumber daya manusia yang menjanjikan; wilayah luas terbentang mencapai 2 juta km² menempatkannya sebagai negara terluas di Asia Tenggara sekaligus menjanjikan potensi sumber daya alam yang besar; letak geografis yang strategis karena berada di jalur perdagangan dunia membuat Indonesia memiliki akses besar ke sumber ekonomi; sistem pemerintahan yang demokratis pun menjadi kekuatan dan dianggap menjadi contoh, negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia yang menjadikan Indonesia dianggap sebagai jembatan antara barat dan islam ditambah multikulturalisme yang membentuk gaya diplomasi Indonesia. Faktor-faktor inilah yang menjadi modal kekuatan Indonesia sebagai negara dengan pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci:

Indonesia, power, multikulturalisme, demokrasi

Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan pengaruh besar dalam kancah politik dunia. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia menginisiasi pembentukan Konfrensi Asia Afrika yang menghimpun negara-negara baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Tidak tanggung-tanggung, pertemuan tersebut berlanjut sebagai sebuah gerakan untuk tidak memihak dan terlibat perebutan pengaruh antara Amerika Serikat atau Uni Sovyet dalam perang

dingin. Gerakan yang kemudian dikenal sebagai *non-aligned movement* semakin memperkuat pandangan bahwa Indonesia adalah negara dengan pengaruh besar.

Setelah Soekarno turun, presiden Soeharto sebagai penerus pimpinan kekuasaan turut mewarisi pengaruh yang terbangun sebelumnya sehingga Soeharto tidak kesulitan untuk masuk dan diterima di kancah internasional. Ini adalah keuntungan yang besar bagi Soeharto untuk semakin memperluas pengaruh Indonesia. Dimulai dengan mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia yang sebelumnya condong konfrontatif menjadi lebih kooperatif (Sukma, 2012: 78), Indonesia bersama empat negara tetangga di kawasan (Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand) sepakat untuk membuat sebuah kerjasama kawasan yang kemudian dikenal dengan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Perubahan kebijakan membuat Indonesia semakin meneguhkan perannya di kancah Internasional yang berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia dengan semakin bertambahnya Investor asing di Indonesia. Hal ini terlihat dari total GDP Indonesia yang meningkat tajam dalam kurun waktu 10 tahun awal masa presiden Soeharto seperti ditunjukkan tabel di bawah ini.

The Indonesian GDP 1965-1975.

Year	Current Prices (in thousand million rupiahs)
1965	24
1966	316
1967	848
1968	1,994
1969	2,718
1970	3,340
1971	3,672
1972	4,564
1973	6,753
1974	10,708
1975	12,643

Data tabel dari B.R Mitchell dalam Mohd. Noor Mat Yazid, *The Indonesian Economic Development after 1965: Development State, Radical Politics and Regional Cooperation. Scientific online Vol.1. Number 3. 2014.*

Berkat pengaruh dan peran Indonesia yang kuat, ASEAN kemudian mempertimbangkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis sekaligus penambah posisi tawar negara-negara kawasan dan ASEAN. Melihat hal ini,

Indonesia kemudian diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN melalui Hartono Rekso Darsono. Melalui pertimbangan yang sama juga lah kemudian disepakati bahwa gedung sekretariat ASEAN dibangun di Jakarta, Ibukota Indonesia.

Pengaruh dan peran strategis Indonesia di kancah Internasional ditentukan oleh setidaknya empat faktor yang menjadi kekuatan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara kawasan lainnya antara lain figur pemimpin, sistem pemerintahan, wilayah dan jumlah penduduk. Figur pemimpin menjadi penting karena menjadi penentu pengambilan kebijakan. Sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis menjadikan Indonesia lebih terbuka terhadap hal-hal baru termasuk ide dan gagasan. Dua hal ini adalah bentuk dari *soft power* Indonesia. Sementara wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar secara tradisional merupakan bagian dari *hard power*.

Selain keempat faktor di atas sebenarnya Indonesia masih memiliki faktor kekuatan lain pembentuk pengaruh dan peran Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara kawasan lainnya. Faktor itu adalah masyarakat Indonesia yang multikultur.

	Jumlah Penduduk	Jumlah Etnis	Jumlah Bahasa
Brunei Darussalam	423 ribu	11	15
Filipina	101 juta	41	187
Indonesia	255 juta	1,128	719
Kamboja	15,5 juta	24	27
Laos	6,8 juta	49	84
Malaysia	30 juta	60	132
Myanmar	53,8 juta	100	118
Singapura	5,5 juta	6	24
Thailand	68 juta	50	74
Vietnam	88 juta	54	109

Data Perbandingan Jumlah Populasi, Etnis dan Bahasa dikutip oleh penulis dari berbagai sumber (www.ethnologue.com; www.iwgia.org)

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 255 juta jiwa yang datang dari 1,128 etnis di berbagai daerah dan memiliki 719 bahasa yang terdaftar. Sementara negara dengan penduduk terendah adalah Brunei dengan 423 ribu jiwa dan terdiri dari 11 etnis yang dikenali serta memiliki setidaknya 15

bahasa yang dikenali. Data di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat di negara Asia Tenggara cenderung multikultur dengan jumlah etnis terendah yang terdaftar adalah Singapura (6 etnis). Namun demikian ada hal yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya yakni jumlah penduduk dari banyak etnis itu merata dengan kata lain tidak ada etnis yang dominan (mencapai 50% dari total populasi), sementara di negara lainnya di dominasi suku tertentu seperti suku Burma di Myanmar 95%, China di Singapura 75%,. Faktor multikulturalisme yang seimbang di Indonesia dapat menciptakan situasi masyarakat terbiasa pada perbedaan, mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian, kerjasama antar golongan di suatu daerah. Hal-hal inilah yang menurut penulis turut memperkuat pengaruh dan peran Indonesia di dunia karena Indonesia menjadi negara yang terbuka, mengedepankan cara-cara soft seperti dialog dalam penyelesaian konflik (hal ini tercermin dalam sikap politik luar negeri Indonesia) mendorong aktivitas internasional yang bersifat kolejial. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka tulisan ini akan memaparkan bagaimana situasi multikultur yang seimbang dapat menjadi kekuatan Indonesia dalam memainkan perannya dan memberikan pengaruh di dunia khususnya kawasan Asia Tenggara.

Tinjauan Teoritis

Dalam rangka memahami lebih lanjut pengaruh Multikulturalisme Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang membangun *Soft power* nya maka perlulah kita mengerti dahulu beberapa konsep yang digunakan untuk menganalisis. Konsep yang digunakan antara lain *power* dan multikulturalisme. Konsep *power* digunakan untuk memetakan apa itu *power*? Apa saja yang bisa dikategorisasikan sebagai *power*? bagaimana *power* itu bekerja dan mempengaruhi aktor-aktor internasional lainnya? Sementara konsep multikulturalisme digunakan untuk melihat bagaimana kondisi multikultur Indonesia dapat mempengaruhi perilaku diplomasi Indonesia sekaligus menjadi kekuatan Indonesia.

Power

Power seringkali digunakan sebagai indikator untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu negara bagi negara lainnya. Modal kuat untuk melihat pengaruh suatu negara adalah kemampuan atau kekuatan militernya. Seberapa besar kekuatan suatu negara maka akan berdampak pada pengaruhnya. Logikanya sederhana, karena semakin besar kekuatan militer suatu negara akan menciptakan ketidakamanan bagi negara lainnya dan apabila negara lain tersebut tidak mampu mengimbangi kekuatan militernya maka bekerjasama atau menjadi aliansi menjadi pilihan yang rasional. Catatannya kerjasama

maupun aliansi yang berlaku akan ada dalam pengaruh atau kendali negara dengan kekuatan militer paling kuat. Sebagai contoh ketika pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet di mana kedua negara tersebut adalah negara dengan kekuatan militer paling kuat pada masanya dan saling bersaing pengaruh satu sama lain. Hampir tidak ada negara lain yang memiliki kemampuan militer sama atau bahkan mendekati kekuatan militer mereka, akibatnya tidak ada negara lain yang muncul menjadi pesaing keduanya dalam memperebutkan pengaruh di dunia. Ketidakmampuan negara lain untuk bersaing dengan AS dan USSR pada saat itu membuat beraliansi dengan salah satu dari keduanya menjadi pilihan paling realistis dengan konsekuensi bahwa aliansi berada di bawah kendali dua negara tersebut.

Walaupun *power* seringkali digunakan sebagai indikator untuk melihat besar pengaruh, namun belum ada definisi sah tentang *power* itu sendiri. Banyak orang mencoba menjelaskan apa itu *power*? Bagaimana *power* bekerja? Mengapa *power* menjadi penting? Dari berbagai pertanyaan itu tidak ada satupun jawaban yang memuaskan dan dapat digunakan sebagai satu konsensus untuk mendefinisikan *power*. Joseph Nye Jr berpendapat *power* seperti cuaca di mana orang mencoba meramalkannya tetapi tidak satu orang pun yang mampu untuk memastikannya (2004).

Dalam keseharian kita dapat melihat *power* sebagai kemampuan untuk memerintah seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu (Dahl, 1961). *Power* terlihat sederhana namun sebenarnya sesuatu yang sangat kompleks (Barnett & Duvall, 2005: 66-67) dan multidimensional (Stefano Guzzini, 2013). Contoh saat atasan kita meminta untuk mengerjakan sebuah teks pidato untuknya dalam sambutan acara formal lalu kita pun membuatnya tanpa bisa menolak. Ini akan berbeda apabila ada seorang teman juga meminta kepada kita untuk melakukan hal yang sama tetapi kita kemudian memiliki preferensi untuk menolaknya. Mengapa kita tidak dapat menolak atasan kita sementara kita dapat menolak atas permintaan yang sama teman kita? Apa yang menjadi perbedaan antara atasan dan seorang teman kita? *Power* adalah kemampuan agar orang lain dapat melakukan apa yang dikehendaki, hanya saja tidak semua orang memiliki kemampuan itu.

Kita perlu memahami bahwa kemampuan untuk memerintah dan mempengaruhi preferensi orang lain itu ditentukan oleh beberapa faktor penentu antara lain kemampuan militer, kemampuan ekonomi dan perilaku aktor. Lewat faktor penentu ini juga kita dapat memisahkan *power* dengan indikator yang dapat dihitung (*Hard power*) dan yang tak dapat dihitung (*Soft power*) (Joseph Nye Jr, 2004).

Hard power

Hard power sebenarnya dekat dengan pandangan realis klasik yang memberikan penekanan pada pentingnya suatu negara untuk mengamankan dirinya sendiri. Asumsi dasarnya adalah bahwa konflik dan persaingan merupakan praktek lazim yang dilakukan oleh negara untuk memperebutkan pengaruh dalam sistem internasional yang anarki. Demi kepentingan itu kemudian negara memperkuat sarana militernya agar siap bersaing dan juga berperang mengantisipasi kemungkinan perang akibat persaingan internasional. Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori *hardpower* antara lain persenjataan (termasuk jumlah senjata, teknologi persenjataan, sarana dan prasana kemiliteran), jumlah penduduk, wilayah, juga kemampuan ekonomi.

Pandangan tradisional realisme melihat pentingnya pengamanan negara dengan menciptakan situasi *deterrence* di mana meyakinkan pihak lain tidak akan mampu mengalahkannya. Tidak jarang negara-negara mempertontonkan kemampuan militernya dengan cara mengkolonisasi negara lainnya seperti pada periode sebelum perang dunia ke 2, atau melalui cara pameran-pameran senjata pada era sekarang ini. *Hard power* bekerja dengan cara memberikan ancaman kekerasan secara fisik pada pihak lain.

Soft power

Kita memahami bahwa kekuatan militer dan ekonomi adalah cara yang paling sering digunakan oleh negara untuk memberikan pengaruhnya. Namun sebenarnya di luar kekuatan ancaman ada hal lain yang bisa mempengaruhi perilaku satu negara agar mengikuti apa yang diinginkan oleh negara lainnya. Contoh, sesaat setelah perang dunia ke-2 berakhir, dunia terpolarisasi pada kekuatan major Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Banyak negara di dunia hampir tidak punya pilihan untuk memihak pada salah satunya dikarenakan *hard power* yang mereka miliki. Saat dunia berada dua pilihan negara tadi, Indonesia lewat Soekarno muncul dan dengan tegas menekankan bahwa Indonesia menolak untuk memihak pada salah satunya. Praktis Indonesia seakan menjadi oase bagi negara-negara Asia-Afrika yang sebagian besar baru saja mendapatkan kemerdekaannya. Banyak negara Asia Afrika kemudian berdiri dibelakang Indonesia dan mengikuti Indonesia, Kedua *major power* pun tidak bisa menggunakan kekuatannya terhadap negara-negara yang berada di belakang Indonesia. Indonesia menjadi aktor penting di dunia dan berdiri diantara Amerika Serikat serta Uni Sovyet padahal secara ekonomi dan militer sangatlah timpang. Dari situ kita dapat melihat bahwa ada hal lain yang mampu mempengaruhi perilaku negara selain kekuatan militer dan ekonomi.

Soft power memberikan penekanan pada kemampuan untuk mempengaruhi melalui perilaku yang ditunjukkan seseorang sehingga menarik

orang lain untuk mengikutinya. Kita memberikan contoh pada orang lain apa yang harus dilakukan sehingga orang tersebut dapat mengikuti apa yang harus mereka lakukan. *Soft power* bekerja dengan cara misterius (Joseph Nye, 2004 : 5) karena sulit menjelaskan bagaimana seseorang dapat terpengaruh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain. Menurut Joseph Nye, *soft power* menjelaskan bahwa kekuatan *soft power* ada pada pendekatan persuasive berupa ajakan, argumen dan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk merubah keputusannya (2004). Asumsinya berangkat dari pemikiran bahwa kebijakan negara diambil oleh kepala pemerintahan. Sementara pertimbangan dibuat oleh kepala negara, pilihan-pilihan dapat dimunculkan melalui pendekatan persuasive tadi sehingga mempengaruhi keputusan (kebijakan negara).

Dari penjelasan di atas kita dapat membagi *power* kepada dua bentuk yakni *hard power* dalam bentuk kekuatan militer dan ekonomi dan *soft power* dalam bentuk argument, perilaku, dan bersifat *persuasif*.

Multikulturalisme

Manusia diciptakan berbeda baik rupa, warna kulit dan bentuk rambut serta dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda adat, tradisi, budaya dan bahasa. Dewasa ini, banyak kata digunakan untuk menggambarkan perbedaan-perbedaan itu, majemuk, plural, beragam, multikultur dll. Setiap kata deskriptif tadi sebenarnya tidak hanya menggambarkan perbedaan saja tetapi juga hubungan antar masyarakat yang berbeda itu. Plural adalah kata yang digunakan untuk menyiratkan kemajemukan dan tidak menjelaskan apa-apa tentang hakikat kemajemukan itu. Pada hal ini, subordinasi dan dominasi identitas tetaplah eksis. Berbeda dari pada itu, kata beragam merujuk pada kemajemukan yang menempatkan setiap perbedaan memiliki keyakinan budaya mereka sendiri tanpa bisa menemukan cara bersama untuk melihat perbedaan itu (Gupreet Mahajan, 1994). Sebagai contoh pluralisme, Bangsa kulit putih Amerika pada abad 19 mengakui eksistensi orang kulit hitam tetapi tidak mengakui hak-hak mereka malah menempatkan mereka sebagai masyarakat kelas dua. Saat telah ada pengakuan hak-hak terhadap hak warga kulit hitam namun bangsa kulit putih tetap menganggap mereka sebagai orang lain, maka situasi itu lah yang disebut sebagai beragam.

Berbeda dari plural dan beragam, multikulturalisme digunakan untuk merujuk suatu kondisi di mana masyarakat hidup harmonis dalam perbedaan dan menerimanya sebagai bagian dari mereka. Situasi multikultur menggambarkan hubungan yang *equal* antar komunitas atau etnis masyarakat tanpa melihat perbedaan jumlah seperti dikemukakan oleh Edward A. Tiryakian

bahwa multikulturalisme adalah sebuah kritik normative yang mencoba menghilangkan deprivasi kelompok minoritas dalam ruang publik (Edward A. Tiryakian 2004: 9). Dengan kata lain masyarakat multikultur memberikan hak yang serupa pada kelompok-kelompok berbeda sekaligus mengakui mereka sebagai bagian komunitas masyarakat yang lebih besar (Kymlicka, 1995).

Masyarakat multikultur dianggap menjadi jalan keluar bagi persoalan perbedaan masyarakat. Perbedaan sering kali menghadapkan manusia pada situasi sulit di mana masyarakat cenderung menganggap kehadiran "yang lain" sebagai ancaman. Perbedaan nilai, norma dan pandangan satu kelompok dapat dianggap sebagai hal yang aneh, tidak umum oleh satu kelompok masyarakat sehingga dianggap sebagai ancaman bagi kebiasaan yang sudah terbentuk. Hal ini sering terjadi dalam Masyarakat yang secara kultural dan historis adalah komunitas homogen. Mereka seringkali kaku dalam berhadapan dengan kelompok lain dan kemudian berkonflik atau berperang karena ketidaktahuan mereka akan perbedaan nilai yang dibawa oleh setiap kelompok masyarakat. Di sinilah multikulturalisme hadir sebagai jalan keluar dengan melihat pengakuan kelompok satu sama lain sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar.

Peran dan Pengaruh Indonesia Di ASEAN

Sejarah menggambarkan bahwa Indonesia adalah aktor penting di Asia Tenggara. Sejak jaman pemerintahan presiden Soekarno dengan kebijakannya yang konfrontatif sampai dengan sekarang Indonesia tetap memainkan peran strategis di kawasan Asia Tenggara. Tidak jarang kebijakan pemerintah Indonesia menjadi acuan bagi organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Peran Indonesia bagi ASEAN dapat kita telusuri sampai awal mula organisasi itu mulai di mana Indonesia adalah salah satu pendiri organisasi kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara atau *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). ASEAN memang didirikan berdasarkan kesepakatan lima negara (Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand), namun momentum tersebut dicapai setelah ada perubahan kebijakan pemerintah Indonesia pada jaman presiden Soeharto untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara tetangga.

Sejak bersama empat negara lain mendirikan ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam ASEAN secara ide maupun prakteknya. Dimulai dengan menginisiasi pertemuan untuk membahas Asia Tenggara sebagai zona bebas dan damai dan salah satu peran pentingnya adalah ide untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai zona damai dan bebas, Indonesia berperan besar membentuk norma ASEAN dalam menolak menjadi ASEAN

sebagai pakta pertahanan serta mendorong cara-cara penggunaan senjata dalam penyelesaian konflik yang kemudian diakui sebagai bagian dari nilai dan norma yang berlaku di ASEAN (ASEAN, 1971). Dalam perkembangan terkini, Indonesia juga berperan penting dalam usahanya mengusung nilai Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di kawasan Asia Tenggara sehingga muncul lah *ASEAN's Intergovernmental Commission on Human Rights* (Garnaut, 2012). Lewat pertemuan di Bali yang menghasilkan *Bali Concord I* (2001) dan *Bali Concord II* (2003) Indonesia juga berperan penting dalam rencana pembentukan *Asean Security Community* (ASC) di mana mengingatkan kembali bahwa ASEAN adalah zona independen dan mengedepankan stabilitas keamanan kawasan sebagai inti dari roda organisasi (Roberts, 2005).

Peranan Indonesia juga luas dalam upaya penciptaan stabilitas kawasan dengan menjadi penengah di berbagai konflik yang melibatkan negara-negara anggota. Tercatat beberapa kali Indonesia berusaha menjadi penengah antara lain, Konflik Thailand dan Kamboja terkait sengketa kuil *Preah Vihear* dengan membentuk forum-forum informal yang mempertemukan kedua negara; Sengketa laut China Selatan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara (Brunie, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Indonesia sendiri) melalui pertemuan bersama menyatakan sikap ASEAN yang secara tidak langsung meningkatkan posisi tawar ASEAN di mata internasional. Terbaru, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mencoba melakukan pendekatan kepada Myanmar dalam penyelesaian persoalan etnis Rohingya di Myanmar dengan cara menyatakan sikap Indonesia sebagai salah satu negara terkena dampak migrasi etnis Rohingya karena kebijakan pemerintah Myanmar.

Argumen Pembentuk Pengaruh

Sejarah perkembangan ASEAN tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh Indonesia. Sebagai salah satu pendiri organisasi bersama Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, Indonesia adalah negara yang sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik dunia sehingga posisi Indonesia di ASEAN turut menambah posisi tawar ASEAN di mata dunia. Banyak argumen yang mencoba menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi tersendiri di kawasan Asia Tenggara mengingat peran dan pengaruhnya yang besar. Lewat peran dan pengaruh yang dimilikinya, Indonesia menjadi *primus inter pares* atau yang terkuat dari yang sederajat.

Pengaruh dan peran besar Indonesia di kawasan ditentukan oleh hal-hal yang menjadi kelebihan Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lainnya di kawasan. Hal-hal pembentuk pengaruh itu antara lain wilayah, jumlah penduduk, kekuatan ekonomi dan militer (*hard power*) serta sistem

pemerintahan yang demokratis (*soft power*). Dari total luas wilayah ASEAN yang mencapai 4,46 juta km², Indonesia memiliki luas 2 juta km² atau mencapai 45% total wilayah ASEAN. Dengan luas wilayah yang besar tentu saja memberikan keuntungan melalui kemungkinan potensi sumber daya alam yang besar baik daratan maupun lautan.

Tabel Negara Asia Tenggara dan Luas Wilayahnya

Country	Capital City	Area (sq mi/sq km)
Brunei	Bandar Seri Begawan	2,227/5,765
Cambodia	Phnom Penh	69,900/181,040
Indonesia	Jakarta	736,000/2,000,000
Laos	Vientiane	91,430/236,800
Malaysia	Kuala Lumpur	127,316/329,749
Myanmar (Burma)	Nay Pyi Daw	261,969/678,500
Philippines	Manila	117,187/300,000
Singapore	Singapore	271/704
Thailand	Bangkok	198,270/514,000
Timor-Leste	Dili	5,794/15,007
Vietnam	Hanoi	127,243/331,114

Sumber: US Department of State "Country of Background Notes" dalam Donald Weatherbee, 2009

Di samping wilayah yang luas, Indonesia juga memiliki keuntungan lain yakni posisi strategis Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua daratan luas menjadikannya sebagai jembatan penghubung baik barang maupun jasa. Jumlah volume perdagangan yang tinggi di wilayah Indonesia menambah nilai tawar di mata negara-negara kawasan dan dunia. Sebagai catatan bahwa selat malaka adalah jalur utama perdagangan minyak dunia.

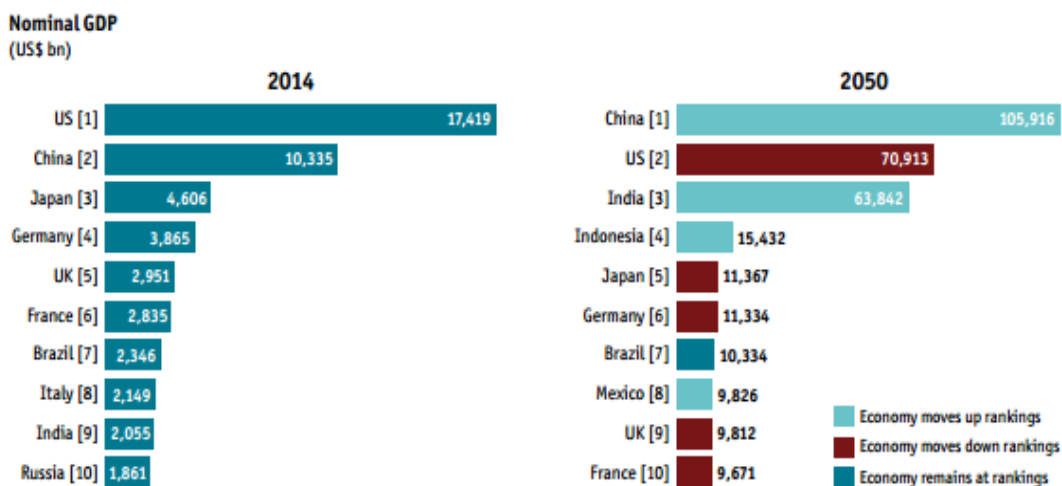


Sumber: <http://www.mizzima.com/business-features/new-china-silk-road>

Jumlah penduduk Indonesia turut menambah posisi strategis Indonesia. Secara tradisional, salah satu ukuran bagi kekuatan suatu negara adalah militer termasuk di dalamnya tentara dan penduduk lainnya yang dapat dilatih sebagai tentara. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 255 juta jiwa yang menempatkannya sebagai negara nomor 4 dengan populasi terbesar di dunia di bawah China, India dan Amerika Serikat. Jumlah masyarakat yang besar tentu saja menambah kekuatan Indonesia di sektor sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Tidak hanya sampai di situ, banyaknya jumlah penduduk turut memberikan keuntungan bagi ekonomi karena secara tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial yang bila diurus dengan baik oleh pemerintah akan berdampak pada peningkatan jumlah investasi. Keuntungan berikutnya Indonesia pun tidak akan kekurangan tenaga kerja untuk kepentingan ekonomi.

Kekuatan ekonomi Indonesia saat ini juga menjadi salah satu hal mengapa Indonesia menjadi aktor yang penting di kawasan. Indonesia saat ini menduduki peringkat teratas untuk urusan *Gross Domestic Product* (GDP) yang mencapai 880 Miliar dollar (terbesar di Asia Tenggara) dengan tingkat pertumbuhan 5% dan diprediksi meningkat menjadi 6-7 % setelah tahun 2017. Indonesia bahkan diramalkan menduduki peringkat 4 dunia ekonomi terbaik pada tahun 2050 di bawah China, Amerika Serikat dan India.

Top ten economies in 2050 at market exchange rates



Source: The Economist Intelligence Unit.

Sumber: The Economist Intelligence Unit dalam www.nextbigfuture.com/2015/06/eiu-gdp-forecasts-to-2050.html

Dari sudut pandang kekuatan militer, Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 255 juta memiliki jumlah tentara terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah personel mencapai 876 ribu dan *manpower* 130 juta orang, jumlah itu terbesar di kawasan Asia Tenggara sekaligus menempatkannya di urutan 14 negara dengan kekuatan militer terkuat versi *globalfirepower* (GFP). Sebagai perbandingan negara ASEAN yang mendekati Indonesia adalah Vietnam diperingkat 17 dengan jumlah tentara mencapai 5,4 juta personel dan *manpower* sebanyak 50 juta orang.

Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia dan Vietnam

Country:	<u>Indonesia</u>	<u>Vietnam</u>
GFP Rank:	14 (of 126)	17 (of 126)
Total Population:	255,993,674	94,348,835
Manpower Available:	130,000,000	50,650,000
Fit-for-Service:	107,540,000	41,505,000
Reaching Military Age Annually:	4,500,000	1,640,000
Active Military Personnel:	476,000	415,000
Active Military Reserves:	400,000	5,040,000
Aircraft (All Types):	420	289
Helicopters:	152	150

Sumber : CIA.Gov dalam *globalfirepower.com*

Selain wilayah yang luas dan strategis serta jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga dianggap unggul karena sistem demokrasi yang dianut sebagai sistem pemerintahannya. Indonesia saat ini menduduki peringkat 49 sebagai negara paling demokratis di dunia berdasarkan *Global Democracy Index* yang dikeluarkan oleh *The Economist Intelligence Unit* pada tahun 2015, tertinggi diantara anggota ASEAN lainnya.

	Rank	Overall score	Electoral process and pluralism	Functioning of government	Political participation	Political culture	Civil liberties
Indonesia	49	7.03	7.75	7.14	6.67	6.25	7.35
Philippines	54	6.84	8.33	5.71	6.67	4.38	9.12
Malaysia	68	6.43	6.92	7.86	5.56	6.25	5.59
Singapore	74	6.14	4.33	7.50	5.56	6.25	7.06
Thailand	98	5.09	4.50	3.93	5.56	5.00	6.47
Cambodia	113	4.27	3.17	5.71	3.33	5.00	4.12
Myanmar	114	4.14	3.17	3.57	4.44	6.88	2.65
Vietnam	128	3.53	0.00	3.93	3.89	6.88	2.94
Laos	155	2.21	0.00	3.21	1.67	5.00	1.18

Tabel diambil dari *The Economist Intelligence Unit* pada tahun 2015

Indonesia sebagai negara yang paling demokratis diantara negara anggota lainnya memberikan keuntungan bagi perannya diantara negara-negara demokratis lainnya. Rizal Sukma dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa sistem demokrasi yang anut Indonesia menempatkannya sebagai jembatan atau penghubung antara dunia barat dan Islam mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama islam terbesar di dunia (dalam Anthony Reid, 2012). Sebagai negara paling demokratis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dapat menjadi bisa menjadi contoh bagi penegakan demokrasi dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara. Sejauh ini, Indonesia telah berhasil menjadi inisiator bagi penegakan Hak Asasi Manusia dengan disepakatinya "*Draft of action for security communities*" (Roberts 2005)

Multikulturalisme sebagai Kekuatan Pengaruh Indonesia

Sudah sempat di singgung bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar dan paling beragam di kawasan Asia Tenggara dengan 1,128 etnis dan 719 bahasa serta komposisi etnis mayoritas hanya 40 %. Hal ini tidak dimiliki oleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Namun banyaknya jumlah etnis dan bahasa tidak semata-merta membuat Indonesia menjadi negara yang multikultur. Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa multikulturalisme memberikan pengakuan dan hak yang serupa pada semua komunitas atau etnis yang ada. Maka kita perlu terlebih dahulu membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang multikultur.

Indonesia adalah negara yang unik dengan 1,128 etnis dan 719 berbeda. Masing-masing etnis hampir memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda satu sama lain. Sebelum Indonesia hadir, etnis-etnis tadi sudah ada dalam bentuk kerajaan kecil yang menyadari bahwa mereka berada dalam keberagaman tapi tidak dalam satu kesatuan. Kerjasama antara kerajaan-kerajaan nusantara dalam di berbagai sektor menggambarkan bahwa mereka adalah komunitas yang berbeda dengan identitas dan budaya yang berbeda pula. Setelah Indonesia hadir lewat deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, etnis-etnis yang berbeda tadi mengikat diri satu sama lain dan menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis kemudian mengikat perbedaan tersebut lewat semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) dan Pancasila sebagai *way of life* masyarakat Indonesia.

Pancasila adalah pengikat dari etnis-etnis yang berbeda di Indonesia. Lewat pancasila, komunitas masyarakat yang berbeda memiliki jaminan bahwa keberadaan serta hak- hak mereka diakui tanpa melihat jumlah masing-masing. Pancasila menolak dominasi satu kelompok tertentu lewat sila persatuan

Indonesia. Pancasila secara normative adalah pegangan bagi perbedaan dan kunci bagi multikulturalisme di Indonesia. Namun demikian, secara politis perlu ada penjelasan bagaimana Pancasila dapat bekerja di atas sebagai sebuah norma. Arend Lijphart seperti ditulis Matthijs Bogaards mengemukakan konsep demokrasi sebagai jalan menuju multikulturalisme (2006). Menurut Lijphart, multikulturalisme dapat tercapai dengan demokrasi dengan catatan ada *power sharing* (pembagian kekuasaan) antara kelompok-kelompok masyarakat. Indonesia dengan komunitas mayoritas etnis mencapai 40% memberikan ruang bagi komunitas-komunitas lain untuk menunjukkan eksistensinya. Ini dapat terlihat dari kondisi politik Indonesia sekarang yang mengedepankan politik representative di mana kepala daerah di berbagai tempat di Indonesia pasti merepresentasikan kelompok masyarakat setempat.

Lewat Pancasila sebagai norma dan demokrasi sebagai cara ini lah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang multikultur. Sebagai negara yang multikultur karena prinsip dan cara Indonesia tentu memperoleh keuntungan tersendiri. Keuntungannya tentu saja Indonesia menjadi negara yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Lewat keterbukaan itulah memperoleh keuntungan yang besar dengan menjadi negara dengan pengaruh kuat di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia terbiasa dengan perbedaan dan negosiasi. Sudah menjadi budaya di Indonesia bahwa keputusan/kebijakan perlu diambil dengan memberi ruang dialog terlebih dahulu. Perbedaan pendapat menjadi hal yang biasa dalam dialog, namun hal itu justru menjadi penting demi memperoleh informasi yang jelas dan masukan yang bisa menjadi pertimbangan pengambil keputusan. Secara kultural praktek-praktek dialog dilakukan oleh hampir semua etnis di semua daerah di Indonesia. Kebiasaan kultur tersebut terbawa dalam ruang dialog antar etnis sehingga membentuk suatu budaya bangsa yang diamini oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kebiasaan berkumpul dan bermufakat (negosiasi) terbawa dalam gaya diplomatik Indonesia yang memberikan ruang dialog dalam setiap upaya pengambil keputusannya. Ini dapat dilihat dari paparan ide Indonesia membetuk nilai dan norma ASEAN dalam hal menolak penggunaan senjata dalam penyelesaian konflik di kawasan (ASEAN, 71). Indonesia mendorong pentingnya menciptakan stabilitas kawasan lewat *ASEAN security community* (ASC) dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Prakteknya jelas terlihat pada saat Indonesia mendorong dan memfasilitasi pertemuan informal antara Thailand dan Komboja dalam penyelesaian konflik kuil *Preah Vihear*.

Indonesia yang terbiasa dengan perbedaan memudahkan Indonesia untuk diterima di dunia Internasional. Kebiasaan dalam kehidupan yang

beragam membuat Indonesia memiliki banyak cara *persuasive* yang dapat membuatnya dengan mudah diterima di berbagai tempat. Melalui demokrasinya Indonesia dapat diterima oleh kalangan negara barat karena dianggap memiliki kesesuaian ide sehingga dapat menjadi jembatan bagi negara barat dan timur. Indonesia pun diterima oleh kelompok-kelompok minoritas di tempat lain karena memiliki pengalaman kelompok minoritas di dalam negeri. Indonesia bisa masuk sampai ke daerah konflik di Filipina selatan lewat pendekatan islam yang notabene adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia juga menjadi contoh yang baik bagi negara-negara kawasan dalam keberagaman. Indonesia yang beragam memilih demokrasi untuk menjamin kehidupan bernegara dan kemudian dianggap berhasil. Melalui hal ini, tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara di kawasan yang juga beragam etnis-budayanya untuk meniru pengelolaan keberagaman seperti Indonesia. Tanpa tendensius, tetapi capaian berupa kesepakatan negara-negara kawasan untuk mendorong hak asasi manusia dalam "*Draft of action for security communities*" sebagaimana diusulkan oleh Indonesia adalah bentuk dari keterbukaan mereka mencontoh Indonesia.

Multikulturalisme telah menjadi salah satu kekuatan tak terlihat (*soft power*) Indonesia dalam memberikan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara lewat gaya diplomasi dan menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang berpengaruh di dunia dan khususnya Asia Tenggara. Pengaruh Indonesia dikarenakan keunggulan dan potensinya yang tidak dimiliki negara lain di kawasan. Dilihat dari bentuk *hardpower* Indonesia memiliki keunggulan disektor wilayah yang strategis dan luas dengan potensi ekonomi serta sumber daya alam yang besar; sektor jumlah penduduk yang besar memberikan Indonesia keunggulan untuk ketersediaan tenaga kerja; sektor jumlah penduduk juga turut menyumbang *manpower* untuk kepentingan militer; Di sektor kemiliteran, Indonesia adalah negara paling kuat di Asia Tenggara dihitung berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana perang; Di sektor ekonomi, walaupun Indonesia pernah beberapa kali terkena krisis ekonomi, Indonesia membuktikan diri juga selalu bangkit dari keterpurukan. Dengan GDP paling besar dibanding dengan negara Asia Tenggara lainnya dan tingkat pertumbuhan mencapai 6-7% setiap tahun hingga diprediksi menjadi negara ke 4 dengan ekonomi terbesar di dunia sudah tentu menambah nilai tambah Indonesia di kawasan dan dunia. Pengaruh Indonesia semakin diperkuat dengan adanya keunggulan *softpower* lewat sistem

pemerintahan yang demoratis serta multikulturalisme yang membentuk gaya diplomasi Indonesia sehingga Indonesia dapat diterima oleh berbagai aktor internasional.

Referensi

- ASEAN (1971), "Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration: Adopted by the Foreign Ministers at the Special ASEAN Foreign Ministers Meeting" Association of Southeast Asian Nations, Kuala Lumpur
- Barnett, Michael & Raymond Duvall, "Power in Internationa Politics", International Organization, Vol.59, No.1
- Bogaards, Matthijs (2006), "Democracy and Power-Sharing in Multinational States:Thematic Introduction", International Journal on Multicultural Studies, Vol.8, No.2
- Dahl, Robert (1961), "Who Govern? Democracy and Power in an American City", Yale University, New Haven
- Kymlicka, Will (1995), "Multiculturalism Citizenship: a Liberal Theory on Minority Rights", Clarendon Press, Oxford
- Majahan, Gurpreet (1994), "Rethinking Multiculturalism", dalam Hikmat Budiman (Ed.) "Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme Indonesia", Interseksi Foundation, Jakarta
- Nye, Joseph, Jr (2004), "Soft Power, The Maens to Success in World Politics", Public Affairs, New York
- Reid, Anthony (2012), "IndonesiaRepositioning of Asia's Third Giant", ISAES Publishing, Pasir Panjang
- Roberts, Christopher (2005), "The ASEAN Charter : A Crossroads for the Region?" IDSS Commentaries
- Sukma, Rizal (2012), "Indonesian Foreign Policy: Domestic Politics and International Posture: Constraints and Possibilities", dalam Anthony Reid (Ed.) "Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant", ISAES Publishing, Pasir Panjang
- Tiryakian, Edward A. (2004), "Assesing Multiculturalism Theorically: E Pluribus Unum, Sic et Non", dalam John Rex & Gurharpal Sing (Ed.) "Governance in Multiculturalism Studies", Ashgate Publishing Limited, London
- Yazid, Mohd. Noor Mat (2014) "The Indonesian Economic Development after 1965: Development State, Radical Politics and Regional", Cooperation Scientific online Vol.1, No.3

Sumber Internet

www.ethnologue.com

www.iwgia.org

www.mizzima.com/business-features/new-china-silk-road

www.nextbigfuture.com/2015/06/eiu-gdp-forecasts-to-2050.html

www.globalfirepower.com

www.eiu.com



Diplomasi Ekonomi dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Studi Komparatif antara Malaysia dan Indonesia

Fredy Tobing, Rakhmat Syarip

Universitas Indonesia

Abstrak

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) atau kerjasama diantara negara berkembang masih menjadi isu pinggiran. Negara-negara berkembang masih lebih fokus pada penguatan kerjasama Utara-Selatan, yang memungkinkan mereka untuk mengakses permodalan, pasar yang komplementer, dan teknologi tinggi. Meski demikian, KSS sebenarnya memiliki potensi besar untuk memenuhi kepentingan ekonomi suatu negara. Tulisan ini berupaya untuk mengevaluasi pelaksanaan KSS oleh Malaysia dan Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan konteks Diplomasi Ekonomi kedua negara. Studi-studi yang sudah ada masih berfokus pada isu kelembagaan KSS di level domestik (khususnya untuk kasus Indonesia) dan belum menyentuh aspek diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan instrumen penting untuk mencapai agenda dan kepentingan ekonomi suatu negara, khususnya dalam hubungannya dengan negara-negara Selatan. Penulis berargumen bahwa, dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia menjadi aktor yang jauh lebih aktif dalam menjalankan diplomasi ekonomi ke negara-negara berkembang. Ada dua faktor penting yang menjelaskan hal tersebut. Pertama, dari sisi perencanaan pembangunan, Malaysia secara strategis melakukan *linkage* antara KSS dengan agenda diplomasi ekonomi. Sementara itu dari sisi Indonesia, *linkage* seperti ini belum muncul. Kedua, dari sisi hubungan negara dan swasta domestik, Malaysia terlihat memiliki koordinasi intensif antara kedua aktor ini dalam program-program KSS-nya. Ada dukungan politik dari negara agar swasta domestik melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, terutama ke negara-negara berkembang. Di Indonesia, model koordinasi seperti ini belum muncul karena swasta domestik cenderung berkonsentrasi pada penguasaan pasar domestik yang besar.

Kata kunci:

Kerjasama Selatan-Selatan, diplomasi ekonomi, perencanaan pembangunan, hubungan negara-swasta domestik

Pendahuluan

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) pada dasarnya merupakan berbagai macam kolaborasi dan kerjasama internasional diantara negara berkembang, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan lain-lain.¹ Istilah 'Selatan' muncul sebagai identifikasi geografis, dimana negara-negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi Selatan. Dalam konteks yang sama, istilah negara 'Utara' mengaju pada negara-negara maju yang sebagian besar terletak di belahan bumi Utara, seperti Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa Barat, dan Jepang. KSS berawal dari inisiatif sejumlah negara berkembang, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Myanmar, dan Sri Lanka untuk membentuk Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat.

KAA menjadi simbol solidaritas dan pemersatu di antara negara-negara Selatan dan termanifestasi lebih lanjut dalam berbagai macam komitmen kerjasama. Kerjasama teknik diidentifikasi sebagai bentuk kerjasama paling potensial dimana negara-negara berkembang saling tukar-menukar *expertise* dan pengetahuan di bidang teknik dan pembangunan, memberikan pelatihan dan seminar, serta mengirimkan tenaga ahli ke sesama negara berkembang. Pada perkembangannya, model kerjasama teknis ini mulai diadaptasi dalam berbagai pertemuan multilateral terkait dengan bantuan luar negeri. *Buenos Aires Plan of Action on Technical Cooperation among Developing Countries* pada tahun 1978 menjadi salah satu pertemuan awal yang mengadaptasi pola bantuan teknis dalam KSS, untuk kemudian diikuti oleh berbagai pertemuan lain, diantaranya *Accra Agenda for Action* di Accra, Ghana, pada tahun 2008, *High Level United Nations Conference on South-South Cooperation* di Nairobi, Kenya, 2009 dan *High-Level Events on South-South Cooperation and Capacity Development* di Bogota, Kolombia, 2010.

Berbagai macam pertemuan internasional tersebut mengapresiasi kerjasama teknik dan KSS sebagai bagian dari kerjasama pembangunan internasional. Konferensi Nairobi tahun 2009 menyebutkan posisi KSS sebagai bagian integral dari pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs).² Sementara itu, Pertemuan Bogota menyebutkan tentang pentingnya posisi KSS sebagai jembatan yang menghubungkan Negara-Negara Utara di satu sisi

¹ United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC), 2016, "What Is South-South Cooperation?", diakses dari http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html

² "High Level United Nations Conference on South-South Cooperation Outcome Document", Konferensi Nairobi, Kenya, 1-3 Desember 2009.

dengan negara-negara miskin dan berpenghasilan rendah di sisi lain.³ Negara-Negara Utara selama ini dikenal sebagai pemberi bantuan internasional (*Official Development Assistance/ ODA*), baik dalam wujud bantuan ekonomi (hibah, utang luar negeri, dan sebagainya) maupun bantuan teknologi. Khususnya untuk yang terakhir, permasalahan muncul karena perbedaan level pembangunan dan teknologi yang terlalu jauh antara negara maju dan negara miskin membuat transfer bantuan teknologi menjadi kurang efektif. KSS dipandang sebagai solusi penting dalam permasalahan tersebut mengingat negara Selatan lain, terutama yang telah menjadi negara berpenghasilan menengah, kini telah menjadi penyedia bantuan teknis dan teknologi. KSS dipandang memiliki keunggulan karena negara-negara Selatan ini memiliki level pembangunan dan teknologi yang mirip, sehingga lebih mudah diadaptasi oleh negara-negara miskin dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, KSS mengadopsi skema Kerjasama Triangular, dimana negara Utara berperan sebagai lembaga donor yang menyediakan pendanaan, sementara Negara berkembang berpenghasilan menengah menjadi penyedia bantuan teknis, dan negara miskin atau berpenghasilan rendah menjadi penerima bantuan. Kondisi ini meningkatkan posisi politik dan prestise negara-negara berkembang dalam isu pembangunan internasional. Negara berkembang kini tidak hanya sekedar menjadi resipien, tapi juga bisa menjadi penyedia bantuan internasional.

Meski demikian, perlu disadari bahwa definisi dan peran negara berkembang dalam KSS sebagaimana termaktub dalam dokumen-dokumen internasional di atas masih sangat terbatas. Negara berkembang memang memiliki peran baru sebagai penyedia bantuan teknis (atau sebagai *provider*), hanya saja peran ini baru sekedar sebagai bagian dari upaya penciptaan *development effectiveness*. *Development effectiveness* sendiri merupakan terminologi yang muncul dalam diskursus bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara Utara. Disini, peranan negara Selatan dan KSS hanyalah sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian agenda-agenda donor tradisional. Kondisi ini tentunya tidak sepenuhnya salah, mengingat tujuan utamanya tetap pada pencapaian agenda-agenda pembangunan global seperti MDGs, selain juga faktor kebermanfaatan yang tentunya dirasakan oleh negara-negara miskin dan berpenghasilan menengah. Hanya saja, perlu disadari bahwa pembatasan definisi dan peran ini bersifat reduksionis karena mengurangi peran lebih besar yang bisa dimainkan oleh negara berkembang.

³ High Level Events on South-South Cooperation and Capacity Development, "Bogota Statement toward Effective and Inclusive Development Partnership", pertemuan Bogota, Kolombia, pada tanggal 25 Maret 2010

Tulisan ini memandang bahwa KSS perlu didefinisikan secara lebih luas dari sekedar *development effectiveness*.⁴ Negara berkembang seharusnya memiliki peran yang jauh lebih aktif dalam mendefinisikan KSS. Negara berkembang juga seharusnya menjadi aktor yang otonom untuk menentukan pencapaian keberhasilan sebuah KSS yang dijalkannya. Dalam konteks tersebut, tulisan ini berupaya untuk menghubungkan konsep KSS dalam kerangka diplomasi ekonomi negara berkembang. KSS harus mulai dilihat dalam ukuran pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Mengingat level pembangunan negara berkembang yang masih dalam taraf 'membangun', KSS memiliki potensi besar untuk turut mendorong kemakmuran negara-negara berkembang yang terlibat. KSS harus mulai dilihat sebagai instrumen kerjasama perdagangan, investasi dan lain-lain diantara negara berkembang. Dengan demikian, formulasi KSS seharusnya mulai bergeser dari sekedar Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB) menjadi Kerjasama Ekonomi antar Negara Berkembang (KENB). KSS pun memiliki bobot yang lebih tinggi karena menjadi instrumen alternatif sumber pertumbuhan ekonomi global yang selama ini selalu didominasi oleh negara-negara maju.

Tulisan ini merupakan riset evaluatif yang mengkomparasikan pelaksanaan KSS oleh Malaysia dan Indonesia dari sisi diplomasi ekonomi. Malaysia dan Indonesia dipilih karena kedua negara merupakan aktor yang sangat aktif dalam menyelenggarakan KSS. Kedua negara dikenal diantara negara-negara berkembang lain karena memiliki beragam kemampuan teknis yang tepat guna dan mudah diadaptasi. Kedua negara ini juga sama-sama berada dalam kategori negara berpendapatan menengah dengan status *Asian Tigers*, dengan demikian berada pada posisi yang tepat untuk menjadi penyedia bantuan KSS.

Tulisan ini berargumen bahwa Malaysia terlihat lebih aktif dalam mengaitkan diplomasi ekonomi dalam KSS-nya dibandingkan Indonesia. secara konkret, hal ini terlihat jelas dalam besarnya volume perdagangan dan investasi asing (khususnya *outward investment*) Malaysia ke negara-negara Selatan. Malaysia juga unggul dari Indonesia dalam hal kunjungan wisatawan negara-negara Selatan dan banyaknya mahasiswa asing dari negara Selatan yang

⁴ Poin ini disampaikan juga oleh Siti Nikmah dari *International NGO Forum for Indonesian Development* (INFID), dalam *Focus Group Discussion (FGD) I – Pemetaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia: Perspektif Akademisi dan Civil Society Organizations (CSOs)*, pada tanggal 28 September 2016, di kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat. Hanya saja, Nikmah berfokus pada peranan CSO dalam KSS yang lebih banyak bersifat membangun gerakan dan jejaring transnasional untuk menolak ketimpangan ekonomi global, daripada sekedar *development effectiveness*. Sementara itu, tulisan ini berfokus pada aspek diplomasi ekonomi yang belum tereksplorasi dalam definisi dan diskusi KSS selama ini.

belajar di institusi domestik negara tersebut. Lebih jauh, tulisan ini menemukan bahwa ada dua faktor yang penting yang bisa ditemukan pada kasus Malaysia (dan tidak ditemukan pada kasus Indonesia) yang menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, Malaysia memiliki sistem perencanaan KSS yang jelas, dimana diplomasi ekonomi secara eksplisit dihubungkan dengan agenda pelaksanaan kebijakan luar negeri dan KSS. Indonesia sendiri mengadopsi pola yang berbeda dimana KSS lebih dinilai sebagai peningkatan peran internasional Indonesia. Kedua, Malaysia melakukan koordinasi intensif antara pemerintah dan swasta domestik dalam program-program KSS. Patronase negara atas swasta domestik tercermin dalam KSS dimana negara mendorong perusahaan-perusahaan domestik untuk mencari pasar internasional. Hal ini tidak ditemui di Indonesia dimana koordinasi pemerintah dan swasta domestik lebih mengarah pada penguasaan pasar domestik yang besar dibandingkan mengambil peluang ekonomi internasional dalam KSS.

Setelah bagian pendahuluan ini, pembahasan akan berlanjut dengan perspektif teoritis yang digunakan dalam tulisan ini. Bagian berikutnya akan berkonsentrasi pada pengalaman KSS Malaysia dan Indonesia. Analisis keunggulan Malaysia dan kelemahan Indonesia akan menyertai pembahasan dengan fokus pada dua variabel utama, yaitu faktor perencanaan dan koordinasi negara-swasta. Bagian terakhir ditutup dengan kesimpulan.

Perspektif Ekonomi Nasionalisme dalam Diplomasi Ekonomi ala Asia Timur

Diplomasi adalah relasi dan bentuk hubungan antar negara atau antara negara dengan entitas lain dalam kerangka politik internasional yang dilakukan oleh pemerintah dan dengan cara-cara yang damai (*"the conduct of relations between states and other entities with standing in world politics by official agents and by peaceful means"*).⁵ Definisi diplomasi seperti ini mengambil bentuk yang sangat tradisional dan diwarnai oleh nuansa Perang Dingin dan isu-isu keamanan. Diplomasi dicirikan dengan pelaksanaannya yang rahasia, meliputi negosiasi informal, bersifat elitis (meliputi hanya Kementerian Luar Negeri), dan terpisah dari isu-isu domestik. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock mengkritik pendekatan ini karena meniadakan perkembangan dunia dimana integrasi regional dan demokratisasi menjadi fitur utama pasca Perang Dingin. Diplomasi Ekonomi menjadi bagian penting dari tren tersebut dan memerlukan pendefinisian yang lebih tepat.

⁵ H. Bull, 1995 sebagaimana dikutip dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, "What is Economic Diplomacy?", dalam Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock (eds.), *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*, 3rd Edition (Surrey, Inggris dan Burlington, AS: Ashgate Publishing, 2011), hlm. 2

Menurut Bayne dan Woolcock, ada sejumlah karakter penting dalam diplomasi ekonomi suatu negara. Yang pertama, sebagai pengaruh dari globalisasi, karakter "internasional" dalam diplomasi ekonomi pada akhirnya selalu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh isu "domestik". Perbedaan antara kedua arena ini menjadi makin *blur* dan setiap keputusan diplomasi ekonomi harus selalu mempertimbangkan konteks domestik. Kedua, diplomasi ekonomi dewasa ini meliputi makin banyak aktor negara dan non-negara. Aktor negara tidak lagi terbatas pada Kementerian Luar Negeri, tapi juga berbagai macam kementerian dan agensi yang terkait dengan isu-isu ekonomi, misalnya Kementerian Perdagangan, Keuangan, Pertanian, dan lain-lain. Aktor-aktor non-negara pun tidak lagi bisa diabaikan, terutama swasta domestik yang umumnya memiliki pengaruh besar dalam setiap tindakan negara. Ketiga, diplomasi ekonomi meliputi berbagai instrumen dan isu. Diplomasi ekonomi bisa melibatkan baik kerjasama sukarela atau *soft* maupun instrumen 'kekerasan' yang memanfaatkan skema *reward and sanction*. Diplomasi ekonomi juga meliputi seluruh isu diplomasi komersial, seperti pertukaran barang dan jasa (perdagangan), investasi asing, ODA, dan sebagainya. Keempat, berbeda dengan diplomasi lain, diplomasi ekonomi selalu meliputi aspek pengembangan pasar (*market development*), seperti ekspansi pasar, pencarian *economies of scale*, dan efisiensi.⁶

Definisi diplomasi ekonomi di atas cukup luas dan bersifat aktual dengan konteks dunia dewasa ini. Diplomasi tidak lagi menjadi milik segelintir elit saja, tapi meliputi lebih banyak aktor di dalam dan di luar negara. Isu yang diambil pun lebih luas. KSS sendiri bisa masuk dalam definisi tersebut, dimana instrumen bantuan teknis dan kerjasama ekonomi menjadi bagian integral dari kebijakan diplomasi ekonomi sebuah negara. Salah satu hal implisit yang perlu ditekankan disini adalah diplomasi ekonomi selalu terkait dengan pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi ekonomi tidak dilakukan dalam ruang vakum yang bebas kepentingan; diplomasi ekonomi selalu memiliki motif sebagai refleksi dari aktor-aktor di belakangnya.

Kawasan Asia Timur memiliki diskursusnya sendiri mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi. Jepang dan Tiongkok menjadi dua negara yang cukup aktif menggunakan berbagai macam instrumen diplomasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. ODA merupakan salah satu instrumen yang paling umum dipakai Jepang dan Tiongkok, walaupun Tiongkok lebih suka menggunakan label "kerjasama ekonomi" dibandingkan "ODA" yang memiliki kedekatan makna dengan "bantuan dari negara maju". Menurut Hidetaka

⁶ Disarikan dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, *Ibid.*, hlm. 2-5

Yoshimatsu dan Dennis Trinidad, bantuan luar negeri dari Jepang memiliki ciri khas, dimana aspek "economic-security" dan "diplomasi komersial" menjadi bagian yang integral.⁷ Pemberian ODA atau kerjasama ekonomi tidaklah gratis.

Sebagai contoh, sebagai bagian dari kebijakan pemulihan hubungan baik dengan Asia Tenggara pasca Perang Dunia II, ODA yang Jepang berikan bukanlah bantuan cuma-cuma, melainkan produk-produk komersial dengan harga murah dari swasta domestik Jepang. Berbagai macam bantuan infrastruktur yang Jepang berikan hingga sekarang ini pun memiliki sejumlah persyaratan, misalnya menggunakan skema pinjaman komersial dari perbankan Jepang, keharusan menggunakan perusahaan-perusahaan Jepang dalam menjalankan proyek bantuan, dan mengimpor berbagai peralatan yang dibutuhkan dari swasta domestik Jepang.⁸

Dengan demikian, terlihat jelas diplomasi ekonomi Jepang disini selalu melibatkan pencarian keuntungan ekonomi bagi swasta-swasta domestiknya, baik melalui perdagangan maupun finansial. Sementara itu, James Reilly menjabarkan bahwa skema yang serupa juga dijalankan dalam kerjasama ekonomi Tiongkok dengan negara-negara Afrika dan Asia Tenggara. Dengan menggunakan skema "Angola Model", kerjasama ekonomi Tiongkok bertujuan untuk mencari energi (minyak, batu bara, gas, dan lain-lain) dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi domestiknya.⁹ Skema "Angola Model" juga melibatkan diplomasi komersial ala Jepang seperti keharusan menggunakan skema pinjaman dari perbankan Tiongkok, perusahaan-perusahaan konstruksi dari Tiongkok, mengimpor berbagai macam peralatan dari Tiongkok, bahkan hingga menggunakan pekerja-pekerja tak terlatih dari Tiongkok.

Tiongkok secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan kerjasama ekonominya dengan negara berkembang adalah pencairan keuntungan komersial. Laporan *State Council* tahun 1995 secara jelas menyatakan prinsip kerjasama ekonomi Tiongkok dengan negara berkembang adalah keuntungan mutual (*mutual beneficiary*) lewat skema pinjaman dan peluang ekspor bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok. Selain itu, *China's White Paper on Foreign Aid* tahun 2006 juga menyatakan bahwa tujuan kerjasama tersebut adalah mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok agar *go international* dan

⁷ Yoshimatsu Hidetaka dan Dennis Trinidad, "Development Assistance, Strategic Interests and the China Factor in Japan's Role in ASEAN Integration", *Japanese Journal of Political Science*, Vol. 11, No. 2, 2010, hlm. 199-219

⁸ *Ibid.*

⁹ James Reilly, "China and Japan in Myanmar: Aid, Natural Resources and Influence", *Asian Studies Review*, Vol. 37, No. 2, 2013, hlm. 141-157

membuka pasar luar negeri, mencari sumber daya alam, dan mengeksport produk-produk berteknologi tinggi.¹⁰

Secara konseptual, model diplomasi ekonomi seperti ini merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas kawasan Asia Timur. Nasionalisme ekonomi menjadi aspek penting yang membuat negara-negara tersebut mengintegrasikan ODA dengan kemakmuran ekonominya. Mereka menilai bahwa kemakmuran ekonomi merupakan sebuah kepentingan nasional yang harus dikejar lewat berbagai macam instrumen kebijakan negara. Swasta domestik menjadi aktor yang juga penting disini mengingat diplomasi ekonomi diarahkan untuk pencarian keuntungan komersial bagi mereka, baik bagi eksportir, penyedia pinjaman perbankan, maupun perusahaan konstruksi. Negara dan swasta domestik juga terlihat berkoodinasi intensif dalam rangka menunjang pencapaian kepentingan nasional. Sebagai hasilnya, baik Jepang maupun Tiongkok banyak mengambil manfaat dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang.

Dalam perspektif yang lebih luas, model nasionalisme ekonomi dalam skema ODA dan kerjasama ekonomi ini merupakan "gejala" dari dinamika negara-masyarakat yang telah mengakar dalam di Asia Timur. Akademisi-akademisi seperti Chalmers Johnson dan Robert Wade mengasosiasikan kemajuan ekonomi Asia Timur sebagai wujud dari dinamika negara dan masyarakat ini.¹¹ Menurut Johnson dan Wade, meskipun negara-negara di kawasan terlihat 'liberal' dengan melakukan kebijakan berbasis ekspor, 'proteksionisme' dan 'peran negara'-lah yang justru menjadi kunci kemajuan ekonomi kawasan ini. Negara secara aktif membantu mitra juniornya, dalam hal ini swasta domestik, untuk mencapai kekompertifan internasional lewat berbagai instrumen proteksi temporer, seperti tarif, subsidi, pajak, *licensing*, dan lain-lain. *Strategic infant industry* seperti inilah yang pada akhirnya memunculkan perusahaan-perusahaan raksasa dari Asia Timur, seperti Toyota, Honda, Samsung, Huawei, dan lain-lain. Sebagai warisan Konfusius dan kultur politik otoriter, negara di Asia Timur memang menjadi aktor politik domestik yang sangat dominan, sementara *society* jauh lebih kecil dan cenderung mengikuti keinginan negara. Negara sendiri memiliki kapasitas transformatif, seperti kemampuan administratif mumpuni dan relatif insuler dari korupsi, yang

¹⁰ Disarikan dari *Ibid.*

¹¹ Chalmers Johnson, *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975* (Stanford, California: Stanford University Press, 1982); Robert Wade, *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990)

membuatnya mampu membawa bangsanya berada pada level pembangunan yang sama dengan negara-negara Barat.

Diplomasi ekonomi ala nasionalisme ekonomi inilah yang akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai pengalaman Malaysia dan Indonesia dalam KSS. Kedua negara ini juga terletak di kawasan Asia Timur dan sedikit banyak memiliki karakter yang mirip dengan Jepang, China, Korea dan lain-lain. Negara memiliki posisi yang dominan terhadap masyarakat baik di Malaysia maupun Indonesia, selain juga mewarisi kultur otoriter yang sangat umum ditemui di Asia Timur (otoriterisme ala *United Malay National Organization*/UMNO di Malaysia dan ala Suharto di Indonesia).

Model diplomasi ekonomi seperti ini membutuhkan setidaknya dua buah syarat. Yang pertama, pentingnya perencanaan pembangunan. Segala macam kebijakan negara dilakukan melalui proses perencanaan yang sistematis dan menjadi *guidance* dari seluruh proyek pembangunan. Dalam hal ini, cerminan diplomasi ekonomi dalam KSS akan tercermin dalam dokumen dan arah kebijakan pembangunan. Termasuk yang krusial disini, tentunya, adalah koherensi antara KSS dengan kebijakan luar negeri. Yang kedua, fungsi koordinatif antara negara dan swasta domestik menjadi faktor yang penting. Di Asia Tenggara, negara menginkorporasi swasta domestik dalam pola relasi *patron-client* dalam rangka mempertahankan keberlangsungan rezim dan mendapatkan dukungan politik.¹² Sebagai timbal baliknya, negara menyediakan berbagai rente ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menjamin keuntungan ekonomi bagi swasta-swasta domestik.¹³ Koordinasi negara dan swasta inilah yang akan dilihat dalam pelaksanaan KSS di Malaysia dan Indonesia.

KSS Malaysia: Kombinasi Kerjasama Teknik dan Ekonomi diantara Negara-Negara Berkembang

Sejak tahun 1990, Malaysia sudah memiliki agen tersendiri yang khusus menangani KSS yang dilakukannya, yaitu *Malaysian Technical Cooperation Program* (MTCP). Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah *Economic Planning Unit*, yaitu Unit yang berada langsung di bawah Kantor Perdana Menteri. Sejak tahun 2010, MTCP berpindah nomenklatur dan kini ada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Malaysia cukup serius dalam memberikan pendanaan MTCP ini. Sebagaimana terlihat pada tabel I,

¹² Erick M. Kuhonta, "Studying States in Southeast Asia", dalam Erick M. Kuhonta, Dan Slater, dan Tuong Vu (eds.), *Southeast Asia in Political Science: Theory, Region and Qualitative Analysis* (Stanford, California: Stanford University Press, 2008)

¹³ *Ibid.*

pada tahun 1980-1985, MTCP hanya menerima sekitar 45 juta ringgit, tapi anggarannya terus meningkat dan pada tahun 2001-2005 mencapai 160 juta ringgit. Pendanaan ini terus berlanjut dan mencapai 200 juta ringgit pada kurun waktu 2006-2010.

Tabel I – Alokasi Anggaran Pemerintah Malaysia untuk MTCP

Tahun	Alokasi Anggaran (Juta Ringgit)
1980-1985	45
1986-1990	45
1991-1995	65
1996-2000	95
2001-2005	160
2006-2010	200

Sumber: Herizal Hazri dan Tang Siew-Mun, 2011, "Malaysian Technical Cooperation Program: Helping friends in Need", *paper* yang dipresentasikan pada 4th High Level Forum on Aid Effectiveness, di Busan, Korea Selatan, 29 November-1 Desember 2011. Diakses dari

<http://asiafoundation.org/resources/pdfs/EmergingAsianApproachestoDevelopmentCooperationConferencePapers.pdf>

MTCP memberikan berbagai pelatihan, pengiriman tenaga ahli dan aktivitas-aktivitas lain dalam kerangka KSS. Umumnya, aktivitas ini berfokus pada perkebunan kelapa sawit, manajemen sumber daya manusia, pengembangan perkotaan, dan lain-lain yang diberikan oleh sekitar 30 institusi publik dan privat. Malaysia juga memberikan banyak beasiswa pendidikan tinggi agar ada lebih banyak mahasiswa negara Selatan yang belajar di Malaysia, misalnya untuk bidang ekonomi, ilmu komputer, akuntansi, ilmu sosial, administrasi bisnis, biologi, kimia, teknik, dan lain-lain. Malaysia terlihat memiliki fokus kawasan tertentu untuk menjadi target KSS-nya. Negara-negara Asia Tenggara menjadi target utama dengan jumlah peserta sebanyak 900 orang pada tahun 2005. Selanjutnya, negara-negara Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi penyumbang terbesar kedua, yaitu sebesar 400 orang pada tahun 2006. Hingga November 2009, MTCP telah memiliki lebih dari 21.000 alumni.¹⁴

¹⁴ Syamsul Hadi, et.al., *Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan* (Jakarta: JICA, 2010)

Di sisi lain, Malaysia juga menjadi negara yang sangat aktif melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara berkembang. Malaysia terlibat dalam kerjasama ekonomi Brunei-Indonesia-Malaysia-the Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Malaysia juga secara konkret membuat perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement/ FTA*) dengan banyak negara berkembang. Malaysia memiliki FTA dengan Tiongkok dan India lewat mekanisme ASEAN-China dan ASEAN-India FTA. Sementara itu, Malaysia juga memiliki banyak skema FTA bilateral, misalnya dengan Chile, India, Pakistan, Turki, dan *Gulf Cooperation Council* (GCC). Malaysia juga menandatangani *preferential trade agreement* dengan negara-negara D-8 dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).¹⁵

KSS Indonesia: Fokus pada Kerjasama Teknik

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif dalam menjalankan program KSS. Antara tahun 1960an sampai awal 1980an, Indonesia merupakan penerima manfaat dari bantuan-bantuan teknis ini. Meski demikian, seiring dengan kemajuan ekonomi Indonesia, sejak tahun 1981 Indonesia mulai terlibat memberikan bantuan-bantuan teknis ke sesama negara Selatan. Antara tahun 1981-2010, Indonesia memberikan pelatihan-pelatihan teknis untuk negara-negara Selatan dengan total peserta sebanyak 7.072 orang yang berasal dari 112 negara.¹⁶ Negara-negara Asia Tenggara menempati sekitar 41 persen dari total peserta, diikuti oleh Asia Selatan (23 persen), Afrika (20 persen) dan Kepulauan Pasifik (9 persen).¹⁷

Program KSS Indonesia umumnya diberikan dalam format bantuan teknis. Bantuan teknis ini maksudnya adalah sejumlah program peningkatan kapasitas yang bersifat teknis dan aplikatif bagi kegiatan pembangunan di negara-negara berkembang lain. Indonesia dipandang memiliki berbagai macam *best practices* yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi problema-problema pembangunan di negara-negara lain. Terdapat lima macam bentuk bantuan teknis yang ditawarkan Indonesia. Pertama, pelatihan merupakan bentuk yang paling umum. Peserta dari negara Selatan akan datang langsung ke Indonesia untuk mengikuti serangkaian program pelatihan, seperti sesi

¹⁵ Asian Development Bank (ADB), "Tabel 1. FTA by Status (Cumulative)", terakhir dimodifikasi pada tahun 2016, diakses dari <https://aric.adb.org/fta-trends-by-status>

¹⁶ Ibnu Purna Muchtar (Sekretariat Negara), "Kebijakan Kerjasama Teknik Selatan-Selatan dan Tantangannya", presentasi pada *Seminar Nasional Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan*, 29 Juli 2010, di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.

¹⁷ *Ibid.*

kelas, praktikum, turun lapangan, dan lain-lain. Kedua, Indonesia menawarkan format seminar dan *exchange views* (forum pertukaran pembelajaran). Program ini umumnya memiliki durasi lebih singkat dan berlangsung dua arah, dimana pihak Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain. Ketiga, Indonesia mengirimkan sejumlah tenaga ahlinya ke negara-negara berkembang. Tenaga ahli dari Indonesia akan memberikan sesi kelas, praktik, dan pendampingan langsung di negara-negara mitra. Keempat, Pemerintah Indonesia, umumnya melalui Kementerian Pendidikan, memberikan beasiswa, baik gelar (*degree*) maupun non-gelar (*non-degree*) kepada mahasiswa dari negara-negara berkembang. Kelima, Indonesia juga turut memberikan hibah. Hibah dari Indonesia biasanya berupa *in-kind* dan bukan berwujud uang tunai, misalnya alat-alat pertanian yang kerap kali diberikan oleh Kementerian Pertanian.

Setelah 30 tahun lebih memberikan bantuan teknis, Indonesia telah dikenal memiliki *expertise* atas sejumlah kemampuan teknis tertentu. Indonesia kini memiliki setidaknya empat buah kategori *flagship programs* yang banyak diminati negara-negara berkembang.¹⁸ Pertama, untuk kategori Isu Pembangunan, Indonesia dikenal memiliki keunggulan teknis di bidang Manajemen Bencana, Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Komunitas, Pertanian, dan Infrastruktur. Kedua, Indonesia juga punya *expertise* di bidang *Good Governance & Peace Building*, seperti demokrasi, resolusi konflik, dan penegakan hukum. Kategori ini mulai berkembang sejak tahun 2010, dimana transisi demokrasi Indonesia dari masa Orde Baru telah menghadirkan sejumlah *expertise* baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Ketiga, keunggulan Indonesia juga muncul di isu ekonomi. Termasuk dalam kategori ini adalah *microfinance*, manajemen makroekonomi, promosi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan *public finance*. Terakhir, program-program lain dimana Indonesia juga unggul, seperti penyiaran dan produksi TV, teknologi komunikasi, dan lain-lain.

Terkait dengan pelaksanaan KSS, Indonesia memiliki lebih dari 30 agen pelaksana (*implementing agency*). Meski demikian, ada sejumlah agen pelaksana yang sangat aktif dan telah dikenal sejak lama, misalnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, dan Kementerian Pertanian. Selain itu, ada banyak agen pelaksana yang kini berada dalam naungan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PKM), misalnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

¹⁸ National Coordination Team on South-South and Triangular Cooperation (NCT-SSTC), *Annual Report of Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) 2015* (Jakarta: NCT-SSTC, 2015)

(BKKBN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Faktor Perencanaan Pembangunan

A. Malaysia: Dimensi Ekonomi sebagai Bagian Integral dari Kebijakan Luar Negeri

Secara struktural, Malaysia merupakan negara yang sangat bergantung pada pasar luar negeri. Berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, Malaysia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, sehingga sangat bergantung pada ekonomi internasional. Secara historis, Malaysia juga merupakan negara yang terbuka dimana Inggris sebagai negara kolonialnya selalu memberlakukan pasar bebas dan ekspor-impor untuk berbagai komoditas yang dihasilkan Malaysia. Kondisi ini terus terefleksi hingga dewasa ini. Sebagaimana terlihat pada tabel II, Malaysia memiliki rasio perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sangat tinggi. Pada tahun 1980, rasionya adalah sebesar 95,4 persen dan kemudian meningkat hingga mencapai 146,7 persen pada tahun 2010. Rasio perdagangan terhadap PDB merupakan indikator yang seringkali digunakan untuk menunjukkan tingkat keterbukaan sebuah negara. Sebagai pembandingan, dalam tabel II terlihat bahwa Indonesia relatif lebih tertutup dengan tingkat keterbukaan sekitar 40-60 persen.

Tabel II – Rasio Perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (Persen)

	1980	1990	2000	2010
Indonesia	42,0	41,5	66,1	41,4
Malaysia	95,4	133,4	192,1	146,7

Sumber: data.worldbank.org diakses pada tanggal 28 Oktober 2014, 11:24 PM

Kondisi struktural sebagai negara dagang (*trading nation*) ini pada akhirnya membentuk wajah politik luar negeri Malaysia. Politik luar negeri Malaysia bukanlah sekedar isu "politik dan keamanan", tapi isu ekonomi menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan. Kementerian Luar Negeri Malaysia menggariskan sejumlah poin penting, sebagaimana terlihat pada Kotak I. Poin 1 kebijakan luar negeri menegaskan prinsip pragmatisme Malaysia. Poin ini dipertegas kembali pada poin 2, dimana ada tiga faktor pembentuk kebijakan luar negeri Malaysia, dimana salah satunya adalah status negara tersebut sebagai negara dagang. Kemudian poin 4 membahas secara lebih spesifik terintegrasinya dimensi ekonomi tersebut dengan menegaskan

kebijakan luar negeri yang memfasilitasi perdagangan, menarik investasi asing, dan membentuk *image* Malaysia sebagai negara yang stabil dan damai. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Perdana Menteri (PM) Mahathir Muhammad mendorong pembentukan *East Asian Economic Group* (EAEG) pada tahun 1990an, dimana integrasi perekonomian antar negara Asia Timur (kecuali Jepang, sebagian besar negara di kawasan ini merupakan negara berkembang berstatus *emerging market*) akan diperkuat. Pilihan kebijakan luar negeri seperti ini dibuat mengingat integrasi regional Eropa (Uni Eropa) dan Amerika Utara (*North American Free Trade Area/ NAFTA*) memberikan perlakuan diskriminatif lewat tarif yang lebih tinggi untuk produk-produk Malaysia yang secara tradisional bergantung pada pasar di negara-negara maju tersebut.¹⁹ EAEG muncul sebagai respons untuk menggalang solidaritas negara-negara berkembang di Asia Timur, menandingi kedua blok perdagangan tersebut, dan mencari pasar alternatif bagi produk-produk Malaysia. Selain itu, motif Malaysia mendukung masuknya negara-negara Indochina sebagai anggota ASEAN pun bisa dijelaskan dari perspektif ini. Selain kebutuhan untuk menciptakan Asia Tenggara yang stabil, Malaysia berupaya mencari pasar-pasar baru di Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.²⁰

Kotak I – Butir-Butir Kebijakan Luar Negeri Malaysia

Poin 1: "...*Malaysia continues to pursue an independent, principled and **pragmatic** foreign policy, founded on the values of peace, humanity, justice and equality...*"

Poin 2: "...*Malaysia's foreign policy is largely influenced and shaped by three factors, namely its strategic location in Southeast Asia, its attributes as **a trading nation** as well as its unique demography...*"

Poin 4: "...*under the present leadership of Prime Minister YAB Dato' Sri Najib Tun Razak, Malaysia continues **to promote a forward-looking and pragmatic foreign policy that facilitates trade, attracts foreign investment as well as project Malaysia as a stable and peaceful country...***"

Sumber: Ministry of Foreign Affairs Malaysia, 2014, "Malaysia's Foreign Policy", diakses dari kln.gov.my/web/guest/foreign_policy

Ciri khas lain dari kebijakan luar negeri Malaysia adalah prinsip *equidistant*. Prinsip ini dibuat untuk menjaga posisi Malaysia sebagai negara

¹⁹ Yumiko Okamoto, "The Reluctant Bilateralist: Malaysia's New Trade Strategy", dalam Vinod K. Aggarwal dan Sujiro Urata (eds.), *Bilateral Trade Agreements in the Asia-Pacific: Origins, Evolution and Implications* (New York and London: Routledge, 2006).

²⁰ K.S. Dhillon, *Malaysian Foreign Policy in the Mahathir Era 1981-2003: Dilemmas of Development* (Singapore: NUS Press, 2009), hlm. 127-138

yang tidak berpihak pada salah satu superpower (AS atau Uni Soviet) selama masa Perang Dingin. Prinsip ini mengandung arti Malaysia berupaya mengambil jarak yang sama dan berimbang ('*equidistant and balance relationship*') dengan AS dan Uni Soviet.²¹ Integral dalam pemikiran ini adalah perlunya Malaysia mengambil posisi *non-aligned*. Inilah sebabnya Malaysia, dimulai dari era PM Mahathir, berupaya untuk lebih dekat dengan negara-negara Selatan. Malaysia menjadi aktor penting dalam berbagai organisasi seperti Gerakan Non-Blok, ASEAN, dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).²² Sejak tahun 1980an, tidak mengherankan jika Malaysia dikenal sebagai *champion* atau penyuar kepentingan negara-negara berkembang dengan sikap yang relatif tegas terhadap negara-negara Barat.

Karakter *trading nations* dan *non-alignment* ini pada akhirnya mendorong Malaysia untuk berinteraksi secara ekonomi dengan negara-negara Selatan. Bagi Malaysia, penguatan hubungan mutual diantara negara-negara berkembang merupakan hal yang imperatif untuk mencapai kepentingan nasionalnya, selain juga menaikkan taraf hubungan Selatan-Selatan ini ke level yang lebih tinggi. Malaysia mem-*follow up* KSS-nya dengan membentuk agen yang secara khusus menangani kerjasama ekonomi. Sejak tahun 1992, Malaysia telah mendirikan *Malaysian South-South Cooperation* (MASSCORP) untuk menghubungkan pebisnis domestik dengan mitra-mitra di negara Selatan, khususnya melalui promosi dagang dan investasi. Hal ini tergambar jelas dalam tujuan MASSCORP, misalnya: a) menciptakan *joint venture* antara perusahaan domestik Malaysia dengan pebisnis negara Selatan, baik untuk proyek di Malaysia maupun di negara Selatan terkait; b) mendorong keterlibatan perusahaan domestik Malaysia pada privatisasi badan usaha milik negara di negara Selatan; c) memberikan *business intelligence* terkait peluang-peluang bisnis di negara Selatan lain.²³

MASSCORP sendiri merupakan entitas bisnis dengan status *Berhad* atau perusahaan. Dewan Direksi MASSCORP berisikan pengusaha-pengusaha Malaysia yang memang memiliki *expertise* dalam berbisnis di negara-negara Selatan. MASSCORP juga memiliki sejumlah *Country Directors* yang bertanggung jawab atas ekspansi bisnis ke berbagai kawasan negara berkembang, seperti untuk wilayah Afrika; Kamboja, Laos dan Micronesia;

²¹ J. D. Ciorciari, *The limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers Since 1975*, (Washington, D. C.: Georgetown University Press, 2010), hlm. 151

²² *Ibid.*

²³ Syamsul Hadi, et.al. (2010). *Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan*. (Jakarta: JICA)

Amerika Latin dan Myanmar; Filipina; Tiongkok; dan Argentina.²⁴ MASSCORP juga merupakan *shareholder company* yang mengumpulkan berbagai macam perusahaan domestik Malaysia dalam satu *platform* dan beraktivitas di berbagai sektor, seperti perkebunan, produk, manufaktur, pertanian, telekomunikasi, konstruksi, perbankan, pertambangan, minyak dan gas, turisme, dan lain-lain.²⁵

Selain MASSCORP, Malaysia juga memiliki entitas lain terkait pengembangan bisnis ke negara-negara Selatan. *Malaysian South-South Association* (MASSA) dibentuk pada tahun 1991 setelah kunjungan Presiden Mahathir Muhammad ke Chile, Brazil dan Argentina.²⁶ Anggota MASSA berisikan pengusaha-pengusaha domestik dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi ke negara-negara berkembang. MASSA terutama berfungsi sebagai pusat informasi yang mengidentifikasi peluang-peluang bisnis di negara Selatan untuk kemudian didiseminasikan kepada pengusaha-pengusaha domestik.²⁷ MASSA memiliki koneksi yang sangat baik ke pemerintah dengan posisinya yang berada langsung di bawah Kantor Perdana Menteri dan dengan Menteri Perdagangan dan Industry (*Minister of International Trade and Industry*) sebagai penasihatnya.²⁸

B. Indonesia: Ketiadaan Perencanaan dalam Perumusan KSS

Indonesia tercatat sudah memberikan bantuan teknis selama 35 tahun atau sejak tahun 1981. Meski demikian, pada kenyataannya bantuan-bantuan teknis ini diberikan secara *ad-hoc*. Indonesia memberikan bantuan teknis selama ada permintaan dari negara donor atau negara penerima bantuan.²⁹ Hal ini tentunya problematis karena pemberian bantuan tidak dilakukan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia atau arah strategi pemberian bantuan internasional Indonesia. KSS seolah-olah hanya menjadi kegiatan rutin tanpa perlu ada perumusan jelas arah perencanaan dan implementasinya. Dengan situasi seperti ini, tampaknya terlalu jauh jika mengharapkan Indonesia sudah mengintegrasikan model diplomasi ekonomi dalam KSS-nya.

²⁴ MASSCORP, n.d., "FAQs- Frequently Asked Questions", diakses dari <http://www.masscorp.net.my/FAQ.htm> pada tanggal 22 November 2016, pukul 0:05

²⁵ MASSCORP, "Shareholder-Companies", diakses dari <http://www.masscorp.net.my/Shareholders.htm> pada tanggal 22 November 2016 pukul 0:05 WIB

²⁶ MASSCORP, "MASSA – Malaysia South-South Association", diakses dari <http://www.masscorp.net.my/Massa.htm> pada tanggal 22 November 2016 pukul 0:11 WIB

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Center for Strategic and International Studies (CSIS), *Study on Policy Implementation and Funding Partnership Strategy of South-South and Triangular Cooperation* (Jakarta: JICA and NCT-SSTC, 2014), hlm. 75

Permasalahan di Indonesia ternyata lebih dasar lagi: Indonesia belum memiliki arah kebijakan pengembangan KSS-nya.

Meskipun sudah memberikan bantuan teknis sejak tahun 1981, hanya sedikit sekali dokumen formal kebijakan yang menyebutkan tentang KSS. Penyebutan KSS secara eksplisit baru muncul pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Buku II RPJMN, Bab IV, Sub-bab 6.2 tentang Bidang Politik Luar Negeri menyatakan bahwa KSS adalah "...manifestasi kerjasama antar negara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, *mutual benefit*, dan *non-interference*...". Di satu sisi, dokumen RPJMN ini penting karena akhirnya menyebutkan KSS sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia. Dokumen ini juga penting karena menyebutkan sejumlah prinsip pelaksanaan KSS Indonesia. Di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa dokumen ini bersifat "rencana pembangunan nasional", yang tentunya sangat general dan belum spesifik. Hingga saat ini, Indonesia belum punya UU yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan KSS. Hal-hal seperti motivasi, arah kebijakan, instrumen kebijakan, dan lain-lain masih belum muncul dalam dokumen-dokumen formal Indonesia. Dengan demikian, tidak mengherankan jika KSS Indonesia selama ini dijalankan secara *ad-hoc* dan *demand-driven* dari negara penerima bantuan.

Produk-produk hukum tentang KSS Indonesia umumnya baru memaparkan tentang kegiatan administrasi dan koordinasi antar-kementerian. Sebagai contoh, Keputusan Presidium Kabinet No. 81/U/4/1967 berisikan tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Bantuan Teknik Luar Negeri, dimana Indonesia sebagai penerima bantuan teknis memerlukan payung hukum terkait dengan penampungan kebutuhan tiap-tiap kementerian, menampung tawaran bantuan teknik dari negara lain, dan berbagai hal administrasi lainnya.³⁰ Fungsi yang sama juga muncul dalam Keputusan Presiden No. 60/M/1981 tentang Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN), meskipun ada penambahan fungsi administrasi mengingat saat itu Indonesia mulai menjadi negara pemberi bantuan teknis.³¹ Setelahnya, ada Keputusan Menteri/ Kepala Bappenas No. 67/M.PPN/HK/05/2011 (kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri/ Kepala Bappenas No. 51/M.PPN/HK/03/2013) yang mengatur tentang pembentukan *National Coordination Team on South-South and Technical Coordination* (NCT-SSTC).³² NCT-SSTC ini merupakan forum koordinasi lintas kementerian yang berisikan empat kementerian utama, yaitu Bappenas,

³⁰ Hadi, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 77-78

³¹ *Ibid.*, hlm. 77-78

³² CSIS, *Op. Cit.*, hlm. 45

Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan, dalam menjalankan KSS Indonesia. NCT-SSTC inilah yang kini sedang menyusun *draft Grand Design* dan *Blueprint* KSS Indonesia. Dokumen *Grand Design* dan *Blueprint* inilah yang diharapkan bisa menjawab desain besar arah kebijakan Indonesia.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika *objectives* dari KSS Indonesia belum terformulasikan dengan baik. Dalam konteks ini, tentunya diplomasi ekonomi pun belum terwakili dalam KSS Indonesia. Formasi PKKTLN dan NCT-SSTC yang disebutkan di atas pun dengan jelas tidak memasukkan kementerian-kementerian utama bidang perekonomian, seperti Kementerian Perdagangan atau Perindustrian, sehingga terlihat bahwa diplomasi ekonomi belum terwakili dalam kebijakan KSS Indonesia. Walaupun ada Kementerian Keuangan, tugas lembaga ini lebih ke arah penyediaan pendanaan, bukannya mewakili diplomasi ekonomi. Lebih jauh, tampaknya *objectives* KSS Indonesia selama ini lebih ke arah penciptaan "solidaritas" diantara negara-negara berkembang. Kata ini muncul dalam berbagai dokumen terkait KSS dan wawancara yang dilakukan oleh CSIS terhadap sejumlah kementerian.³³ Permasalahannya, meskipun ini tujuan yang 'mulia', 'solidaritas' terkesan terlalu dangkal dan tidak merepresentasikan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia hanya sekedar 'berbuat baik' atau sekedar menunjang 'peran internasional Indonesia' di mata negara-negara berkembang.

Faktor Koordinasi Negara-Swasta

A. Malaysia: Koordinasi Intensif Negara-Swasta untuk Ekspansi Pasar Luar Negeri

Melekatnya diplomasi ekonomi dalam KSS Malaysia bisa dijelaskan dalam konteks hubungan patronase antara negara dan swasta domestik yang telah mendarah-daging dalam politik Malaysia. Malaysia sendiri merupakan negara tipikal post-kolonial dimana terjadi ketegangan antar etnis dan ketimpangan ekonomi. Sebagai negara penjajah, Inggris memberikan privilese ekonomi kepada etnis minoritas Cina, sementara *power* politik diberikan kepada etnis mayoritas Melayu. Sebagai akibatnya, tercipta situasi dimana minoritas etnis Cina menjadi sangat kaya, sementara penduduk mayoritas Melayu hidup dalam kemiskinan. Pasca kemerdekaan, *United Malay National Organizations* (UMNO) muncul sebagai partai politik berkuasa yang mendorong kebijakan afirmatif terhadap penduduk Melayu. Kebijakan ini dikenal sebagai *New Economic Policy* (NEP), dimana upaya koreksi ketimpangan dilakukan melalui

³³ *Ibid.*, hlm. 73-74

pemberian beasiswa, konsesi dagang, lisensi, dan proteksi pasar untuk etnis Melayu. Kondisi ini menyuburkan iklim patronase dimana swasta domestik Melayu akhirnya bergantung pada proyek-proyek negara untuk mencari keuntungan ekonomi. Pebisnis-pebisnis tersebut pun kemudian masuk menjadi anggota UMNO dan menjadi suara yang sangat berpengaruh untuk melanggengkan skema patron-klien ini. Di Malaysia, patronase penting karena menjadi elemen kunci penciptaan stabilitas domestik.

Dengan kondisi ini, diplomasi ekonomi Malaysia dalam KSS bisa dilihat sebagai upaya patronase negara untuk mencari keuntungan politik bagi pengusaha-pengusaha domestik, terutama etnis Melayu. Patronase pun tumbuh subur dengan memanfaatkan kondisi struktural Malaysia sebagai negara dagang yang sangat terbuka. Pada tahun 1986, Pemerintah Malaysia meluncurkan *Industrial Coordination Act (ICA)* untuk menarik lebih banyak investasi asing ke Malaysia, dimana investasi-investasi ini diwajibkan untuk melakukan *joint venture* dengan pengusaha domestik.³⁴ Pencarian pasar luar negeri juga penting karena pasar domestik yang terbatas membuat Malaysia harus mencari pasar-pasar lain agar swasta domestik bisa tetap tumbuh. Dalam konteks ini, target utama memang adalah negara-negara maju dengan karakter produk yang komplementer, seperti Uni Eropa, Jepang, dan AS. Meski demikian, pasar-pasar alternatif juga terus diupayakan, misalnya dengan mendukung masuknya negara-negara Indochina ke dalam ASEAN agar perusahaan-perusahaan Malaysia bisa masuk untuk berinvestasi dan melakukan penetrasi pasar.³⁵

Selain itu, perlu ditekankan bahwa negara juga memiliki kebutuhan yang besar untuk tetap mempertahankan dukungan dari etnis Melayu. Dalam konteks ini, berbagai skema FTA yang dijalankan Malaysia pun bisa dijelaskan. Kedekatan ekonomi Malaysia dengan Tiongkok memang bisa dijelaskan secara geoekonomi karena status Tiongkok sebagai negara berkembang paling pesat dengan pasar terbesar di Asia. Di sisi domestik, kebijakan ini penting karena mendapat dukungan dari etnis Cina. Selain itu, FTA-FTA yang Malaysia lakukan dengan Pakistan dan Turki menjadi penting agar tetap mendapat dukungan dari etnis Melayu.³⁶ Pemerintah harus menghilangkan kesan bahwa pemerintah melakukan kebijakan yang berimbang dan tidak memihak salah satu etnis. Pakistan dan Turki merupakan negara-negara mayoritas muslim, dengan demikian memiliki afiliasi religius dengan etnis Melayu yang mayoritas

³⁴ Dhillon, *Op. Cit.*, hlm. 83-84

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Shankaran Nambiar, "Malaysia's new links in the global economic system", terakhir dimodifikasi pada 15 Februari 2012, diakses dari <http://www.eastasiaforum.org/2012/02/15/malaysia-s-new-links-in-the-global-economic-system/>

beragama Islam. Pemerintah Malaysia pun menjadi sangat aktif dalam OKI dan *Developing-8* (D-8) karena faktor yang sama. Untuk OKI dan D-8, Pemerintah Malaysia meyakini kerjasama *preferential trade agreement* untuk semakin memperkuat solidaritas diantara negara-negara muslim.

B. Indonesia: Minimnya Koordinasi Negara-Swasta untuk Ekspansi Pasar Luar Negeri

Di Indonesia, koordinasi negara dan swasta lebih banyak diarahkan pada pencarian rente di pasar domestik. Pola relasi yang terbangun selama pemerintahan Suharto adalah hubungan patron-klien dimana pemerintah memberikan rente-rente ekonomi kepada swasta domestik, sementara swasta domestik memberikan dukungan politik kepada pemerintah.³⁷ Pola ini berjalan sangat stabil selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa. Rente yang diberikan negara umumnya berupa pasar domestik agar bisa sepenuhnya dikuasai swasta domestik. Oleh karena itu, sektor manufaktur, kehutanan, perbankan, dan lain-lain banyak menjadi lumbung profit bagi pengusaha-pengusaha yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Presiden Suharto. Terlebih lagi, negara juga hadir sebagai pelaku aktivitas ekonomi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjamur dan menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan pencari rente ekonomi. Banyak proyek-proyek negara yang akhirnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta domestik.³⁸

Masalahnya, pola hubungan ini tidaklah *sustainable*. Pola relasi yang muncul mengarah pada pelanggaran proteksionisme, dengan demikian tidak ada usaha strategis untuk meningkatkan kompetisi pengusaha swasta domestik pada pasar internasional. Pasar domestik Indonesia begitu besar, dimana penduduknya menjadi yang terbesar keempat di dunia. Indonesia juga memiliki karunia kekayaan alam yang melimpah. Kedua hal ini akhirnya membuat swasta-swasta domestik lebih nyaman untuk berbisnis di dalam negeri dan enggan mencari pasar di luar negeri. Kondisi ini terus berlanjut pasca jatuhnya rezim Suharto. Banyak swasta domestik yang beradaptasi dengan demokratisasi dan menjadi pemain penting dalam sistem ini, khususnya dalam hal melanggar patronase lewat skema *money politics*, baik untuk pemilihan nasional maupun lokal. Lippo Group merupakan satu diantara

³⁷ Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2005)

³⁸ *Ibid.*

berbagai kelompok swasta domestik yang memilih untuk tetap berfokus pada pasar domestik.³⁹

Di sisi lain, ekspansi swasta domestik Indonesia ke luar negeri bukannya tidak ada. Sejumlah pengusaha swasta memilih untuk melebarkan sayap ke pasar regional dan internasional, dengan harapan untuk mendiversifikasi resiko. Jika Indonesia mengalami krisis, maka perusahaan-perusahaan ini masih bisa bertahan lewat sayap bisnisnya di luar negeri. Salim Group merupakan salah satu swasta domestik yang kini bermain di pasar internasional. Pada tahun 1997, 35 persen bisnisnya telah berada di luar negeri terutama di Singapura dan Hongkong.⁴⁰ Meski demikian, Salim Group juga mengembangkan sayap ke negara-negara berkembang, seperti dengan membeli *Philippine Long Distance Telephone* dan *real estate ventures* di Filipina serta membangun industri pengolahan makanan dan properti di Tiongkok.⁴¹ Lewat salah satu anak perusahaannya, Indofood, Salim Group juga telah hadir di Afrika, misalnya di Nigeria. Poin penting yang muncul disini adalah perusahaan-perusahaan ini berekspansi tanpa ada koordinasi atau dukungan negara di belakangnya. Pilihan tersebut muncul sebagai pilihan bisnis semata. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga diketahui memfasilitasi pengusaha-pengusaha Indonesia ke kawasan Afrika dengan mendirikan pusat promosi dagang *House of Indonesia* di Johannesburg, Afrika Selatan dan Harare, Zimbabwe.⁴² Pusat promosi ini dibangun dan dijalankan sepenuhnya oleh swasta.

Di sisi lain, pemerintah sendiri tampaknya memang kurang maksimal dalam memfasilitasi agenda diplomasi ekonomi ini. Berbagai program pelatihan yang Indonesia tawarkan dalam KSS sebenarnya punya potensi besar untuk diteruskan dalam kerjasama perdagangan dan investasi. Herliantin, Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singasari, Malang Jawa Timur, menyampaikan bahwa banyak sekali peserta pelatihan yang belajar di institusinya yang berminat membeli produk-produk inseminasi buatan dari BBIB.⁴³ Hanya saja, walaupun minatnya sudah ada, institusinya mengalami kesulitan dalam melakukan promosi, sehingga peluang bisnis tersebut akhirnya tidak tercapai. BBIB pun masih kesulitan memasarkan produknya ke negara-negara Selatan lain. Kondisi seperti ini juga diakui oleh Tri Mumpuni, Direktur

³⁹ Christian Chua, *Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital* (London & New York: Routledge, 2008), hlm. 100-104

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Hadi, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 120

⁴³ Herliantin, Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singasari, Malang, Jawa Timur, dalam *Rapat Kick-off Penelitian Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan*, pada tanggal 28 Januari 2010, di kantor Bappenas, Jakarta

Institut Bisnis Ekonomi dan Kerakyatan (IBEKA). Pemerintah Indonesia cenderung melihat KSS sebagai proyek semata tanpa ada *follow-up* atau keberlanjutan.⁴⁴ Pemerintah biasanya tidak menjalankan *monitoring and evaluation*, apalagi tindakan lanjutan berupa kerjasama perdagangan dan investasi.⁴⁵ Sementara itu, seorang peneliti CSIS menyatakan bahwa tampaknya memang ada keengganan dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk mengaitkan KSS dengan diplomasi ekonomi.⁴⁶ Pemerintah ingin mempertahankan citra positif Indonesia yang membantu negara-negara berkembang dengan tulus tanpa ada agenda apapun. Model Tiongkok dipandang sebagai model yang kurang baik karena dianggap mengambil keuntungan dari sesama negara Selatan. Dengan kondisi tersebut, tidaklah mengherankan bahwa, baik swasta domestik maupun pemerintah, akhirnya tidak berkoordinasi satu sama lain dan membuat agenda diplomasi ekonomi menjadi tidak relevan.

Tabel III – Perbandingan antara KSS Malaysia dan Indonesia

	Malaysia	Indonesia
Perencanaan Pembangunan	<p>Linkage yang kuat antara Diplomasi Ekonomi dan KSS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai pragmatisme, <i>trading nations</i>, dan dimensi ekonomi dalam kebijakan LN Malaysia • Pembentukan MASSCORP dan MASSA untuk memfasilitasi ekspansi swasta domestik ke negara-negara Selatan 	<p>Ketiadaan linkage antara diplomasi ekonomi dan KSS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada dokumen formal yang secara spesifik merinci motivasi, arah, dan instrumen kebijakan KSS Indonesia • KSS dijalankan secara <i>ad-hoc</i> dan <i>demand-driven</i>
Hubungan Negara dan Swasta Domestik	<p>Koordinasi intensif dalam program-program KSS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara mendorong swasta domestik untuk <i>go international</i> karena pasar domestik yang kecil • KSS dijalankan untuk mendapatkan dukungan politik dari etnis Cina dan Melayu 	<p>Minimnya koordinasi dalam program-program KSS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swasta domestik cenderung berorientasi ke dalam karena pasar domestik yang besar • Ekspansi swasta domestik ke luar negeri merupakan kebijakan bisnis yang otonom tanpa ada dukungan dari negara

⁴⁴ Wawancara dengan Tri Mumpuni, Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), pada hari Jumat, 11 November 2016, di kantor IBEKA, Kebon Jeruk, Jakarta.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Shafiah F. Muhibat, CSIS, pada *Focus Group Discussion (FGD) II Pemetaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia: Perspektif Akademisi dan Civil Society*, pada hari Selasa, 25 Oktober 2016, di FISIP UI, Depok, Jawa Barat

Kesimpulan

Malaysia dan Indonesia memiliki pengalaman yang berbeda dalam melaksanakan KSS. Malaysia dipandang sebagai aktor yang cukup berhasil dalam menjalankan KSS-nya dibandingkan Indonesia. Ada dua faktor utama yang menjelaskan hal ini. Pertama, Malaysia secara strategis telah mengaitkan aspek diplomasi ekonomi dengan KSS-nya. Secara eksplisit, Malaysia telah menggunakan prinsip-prinsip pragmatisme, *trading nations*, dan *non-alignment* dalam kebijakan luar negerinya. Hal inilah yang secara sistematis menjadi rujukan bagi pelaksanaan KSS Malaysia yang tidak hanya berorientasi pada pemberian kerjasama teknik semata, tapi juga menjalankan fungsi kerjasama ekonomi atau diplomasi komersial dengan negara-negara berkembang. Malaysia juga membentuk MASSCORP dan MASSA sebagai agen penting untuk memfasilitasi ekspansi perdagangan dan investasi swasta domestik Malaysia ke negara-negara berkembang. Di sisi lain, Indonesia terlihat belum memiliki *linkage* yang nyata antara KSS dengan diplomasi ekonomi. Di Indonesia, tampaknya masalahnya lebih mendasar lagi karena hingga kini KSS sendiri belum memiliki arahan, instrumen, dan motivasi kebijakan yang nyata. Baru belakangan inisiatif ke arah ini mulai dibangun dengan mencantumkan KSS dalam RPJMN 2010-2014 dan pembentukan NCT-SSTC. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika KSS Indonesia dijalankan secara *ad-hoc* dan *demand-driven* sesuai *request* dari negara penerima bantuan atau donor asing. Faktor kedua yang berperan adalah bentuk koordinasi antara negara dan swasta dalam isu KSS. Malaysia menjadi negara yang memiliki koordinasi intensif antara dua aktor ini, mengingat pasar domestik yang kecil membuat negara mendorong swasta domestik untuk berkelembangan ke luar negeri. Selain itu, ada komitmen politik yang nyata karena komitmen KSS Malaysia didukung oleh kebutuhan yang nyata dari rezim berkuasa untuk mencari dukungan politik dari etnis Cina dan Melayu. Sementara itu di Indonesia, model koordinasi seperti ini tidak ditemukan. Pasar domestik yang besar akhirnya mendorong patronase negara yang mengizinkan swasta domestik untuk mengakses keuntungan ini. Dengan demikian, tidak ada dukungan politik yang nyata untuk mendorong aktivitas swasta domestik ke luar negeri; walaupun ada, umumnya ekspansi tersebut murni berasal dari kebijakan bisnis swasta domestik tanpa sokongan dari negara.

Kedepannya, Indonesia perlu memaksimalkan diplomasi ekonomi dalam kebijakan KSS-nya. Meskipun terlambat, inisiatif yang sudah ada dalam NCT-SSTC, khususnya untuk membuat *Grand Design* dan *Blueprint* KSS Indonesia perlu didukung. Elemen penting yang harus diperhatikan disini adalah perlunya memasukkan aspek diplomasi ekonomi dalam desain perencanaan tersebut

agar lebih mewakili kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah juga perlu untuk menggandeng pihak-pihak yang berkepentingan dalam diplomasi komersial Indonesia, misalnya Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan swasta domestik agar manfaat KSS bisa dirasakan secara maksimal. Lebih jauh, berkaca pada kasus Malaysia, dukungan politik menjadi elemen penting yang membuat berhasilnya program KSS negara tersebut. KSS didorong oleh kebutuhan nyata untuk mengakomodasi kepentingan swasta domestik, etnis Cina dan Melayu di dalam negeri. Dukungan politik seperti ini pada akhirnya menjadi stimulus yang nyata untuk mendorong konsistensi penguatan diplomasi ekonomi dalam KSS. Di Indonesia, hal ini menjadi *lesson learned* yang penting agar KSS tidak lagi dijalankan hanya oleh birokrasi saja, tapi melalui dukungan politik yang nyata bagi penguatan swasta domestik.

Referensi

- Asian Development Bank (ADB). "Tabel 1. FTA by Status (Cumulative)". Terakhir dimodifikasi pada tahun 2016. Diakses dari <https://aric.adb.org/fta-trends-by-status>
- Bayne, Nicholas dan Stephen Woolcock. 2011. "What is Economic Diplomacy?". Dalam Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock (eds.). *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations. 3rd Edition*. Surrey, Inggris dan Burlington, AS: Ashgate Publishing.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2014. *Study on Policy Implementation and Funding Partnership Strategy of South-South and Triangular Cooperation*. Jakarta: JICA and NCT-SSTC.
- Chua, Christian. 2008. *Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital*. London & New York: Routledge.
- Ciorciari, J. D. 2010. *The limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers Since 1975*. Washington, D. C.: Georgetown University Press.
- Dhillon, K.S. 2009. *Malaysian Foreign Policy in the Mahathir Era 1981-2003: Dilemmas of Development*. Singapore: NUS Press.
- Focus Group Discussion (FGD) I – Pemetaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia: Perspektif Akademisi dan Civil Society Organizations (CSOs)*. 28 September 2016. Kampus FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
- FGD II Pemetaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia: Perspektif Akademisi dan Civil Society*. 25 Oktober 2016. FISIP UI, Depok, Jawa Barat.

- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Hadi, Syamsul et.al. 2010. *Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan*. Jakarta: JICA.
- Herliantin, Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singasari, Malang, Jawa Timur. 2010, Jan. 28. *Rapat Kick-off Penelitian Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan*, di kantor Bappenas, Jakarta.
- High Level Events on South-South Cooperation and Capacity Development. "Bogota Statement toward Effective and Inclusive Development Partnership". *Pertemuan Bogota, Kolombia*. 25 Maret 2010.
- "High Level United Nations Conference on South-South Cooperation Outcome Document". Konferensi Nairobi, Kenya. 1-3 Desember 2009.
- Johnson, Chalmers. 1982. *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Kuhonta, Erick M. 2008. "Studying States in Southeast Asia". Dalam Erick M. Kuhonta, Dan Slater, dan Tuong Vu (eds.). *Southeast Asia in Political Science: Theory, Region and Qualitative Analysis*. Standford, California: Standford University Press.
- MASSCORP. "FAQs- Frequently Asked Questions". Diakses dari <http://www.masscorp.net.my/FAQ.htm> pada tanggal 22 November 2016, pukul 0:05 WIB.
- MASSCORP. "MASSA – Malaysia South-South Association". Diakses dari <http://www.masscorp.net.my/Massa.htm> pada tanggal 22 November 2016 pukul 0:11 WIB.
- MASSCORP. "Shareholder-Companies". Diakses dari <http://www.masscorp.net.my/Shareholders.htm> pada tanggal 22 November 2016 pukul 0:05 WIB.
- Muchtar, Ibnu Purna. 2010, Jul. 29. "Kebijakan Kerjasama Teknik Selatan-Selatan dan Tantangannya". Presentasi pada *Seminar Nasional Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan* di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.
- Nambiar, Shankaran. "Malaysia's new links in the global economic system", terakhir dimodifikasi pada 15 Februari 2012. Diakses dari <http://www.eastasiaforum.org/2012/02/15/malaysia-s-new-links-in-the-global-economic-system/>

- National Coordination Team on South-South and Triangular Cooperation (NCT-SSTC). 2015. *Annual Report of Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) 2015*. Jakarta: NCT-SSTC.
- Okamoto, Yumiko. 2006. "The Reluctant Bilateralist: Malaysia's New Trade Strategy". Dalam Vinod K. Aggarwal dan Sujiro Urata (eds.). *Bilateral Trade Agreements in the Asia-Pacific: Origins, Evolution and Implications*. New York and London: Routledge.
- Reilly, James. 2013. "China and Japan in Myanmar: Aid, Natural Resources and Influence". *Asian Studies Review*, Vol. 37, No. 2.
- United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC). "What Is South-South Cooperation?". Terakhir dimodifikasi pada 2016. Diakses dari http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html
- Wade, Robert. 1990. *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Wawancara dengan Tri Mumpuni, Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA). 11 November 2016. Kantor IBEKA, Kebon Jeruk, Jakarta.
- Yoshimatsu, Hidetaka dan Dennis Trinidad. 2010. "Development Assistance, Strategic Interests and the China Factor in Japan's Role in ASEAN Integration". *Japanese Journal of Political Science*, Vol. 11, No. 2.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Konektivitas ASEAN (Studi Kasus: Di Masa Pemerintahan Jokowi)

Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si

Universitas Andalas

Abstract

Tourism is one of the important sectors in the economic development of a country. This is evidenced by the revenue contribution of state revenues generated from the tourism sector. ASEAN in contexts of socio-cultural have made mutual agreement in the form of ASEAN socio-culture community 2015. ASEAN socio-culture has many areas in discussion section. One sector of the sector is the development of tourism for the member states of ASEAN. Concrete development of what will be done by other ASEAN community is forming an increasing connectivity among members. The Connectivity is purposing to acceleration ASEAN community regulation for the sake of good achievement for all member states. Government is the most important actor in selecting and determining a policy that will be taken by the state to implement a regulation to increase the capacity of the country in all sectors. ASEAN Connectivity and Indonesia's policy in the reign of Joko widodo be uniqueness. Researchers want to analysis the policy that is undertaken by Indonesia as one of the members of ASEAN countries in making a policy on tourism development in the face of ASEAN connectivity.

Keyword:

Tourism, connectivity, policy, government, ASEAN

Wilayah Asia Tenggara dengan wadah organisasi regional ASEAN memiliki potensi yang besar untuk menjadi sebuah kawasan pariwisata yang banyak diminati oleh turis-turis baik lokal, regional maupun internasional. Untuk kawasan Asia Pasifik, UN-WTO mengungkapkan bahwa Asia Tenggara merupakan wilayah yang memiliki kunjungan wisatawan internasional terbesar

di Asia.¹ Kontribusi tersebut juga berasal dari wisatawan yang berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara. Dalam tulisan Lesnussa, UN-WTO juga mengungkapkan bahwa Indonesia diprediksikan oleh WTO (World Tourism Organization) pada tahun 2010 akan mengalami pertumbuhan 4,2 % per tahun dalam prospek industri pariwisatanya.²

Sebagai negara yang berada di wilayah regional Asia Tenggara, Indonesia tergabung dalam *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) yang merupakan organisasi intra kawasan di Asia Tenggara yang beranggotakan sepuluh negara dengan penduduk berkisar 600 juta orang, GDP 2,2 triliun US dollar, dan total perdagangan 678,2 triliun US dollar.³

Di tingkat ASEAN, dalam perjalanannya pada tahun 2015 yang lalu dibentuklah Komunitas ASEAN yang bertujuan untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa keperluan untuk menyesuaikan cara pandang, agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal, serta meningkatkan solidaritas, kohesivitas dan efektifitas kerjasama menjadi suatu hal yang penting. ASEAN yang pada awalnya hanya terfokus pada kerjasama ekonomi, mulai meningkatkan kerjasama lainnya dalam bidang politik keamanan dan sosial budaya. Hal inilah yang kemudian mendasari pembentukan Komunitas ASEAN 2015, yang dilandasi oleh tiga pilar, yaitu *ASEAN Political Security Community*, *ASEAN Economic Community*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community*.⁴

Sebagai bagian dari perwujudan Komunitas ASEAN 2015, komunitas yang pada awalnya akan direncanakan pada tahun 2020 ini, dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 2015 yang diresmikan melalui *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina pada Januari 2007. Oleh karena itu, agar dapat mempercepat terbentuknya ASEAN yang terhubung dengan baik, yang akan berkontribusi secara lebih kompetitif dan kuat, serta dapat membawa orang-orang, barang, dan modal menjadi lebih terintegrasi bersama, maka

¹ Is Prayini, "Pengaruh Destination Branding terhadap Tourist Retention Pada Wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Thailand", (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hal 1.

² Nurhayati Lesnussa, "Pengaruh Citra Keamanan Nasional Indonesia terhadap Jumlah Wisatawan di Indonesia (Studi Kasus : Indonesia Visit Year 2008)", 2009. hal 1.

³ http://www.asean.org/images/2013/resources/publication/Infrastructure_investor.pdf di download tanggal 28 Juni 2013

⁴ Lihat Buku ASEAN Selayang Pandang, Hal. 1

dibentuklah sebuah gagasan untuk sebuah program yang disebut *ASEAN Connectivity*.⁵

Konektivitas ASEAN

ASEAN Connectivity atau Konektivitas ASEAN adalah istilah yang digunakan untuk keterhubungan fisik, lembaga, dan individu yang akan memfasilitasi arus modal, barang, jasa, dan orang-orang di wilayah tersebut untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih besar, memfasilitasi masalah keamanan dan politik, dan mendukung inisiatif sosial dan budaya dalam rangka realisasi Komunitas ASEAN 2015. Ide Konektivitas ASEAN sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva pada acara pembukaan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-42, pada 20 Juli 2009 di Phuket. Sebagai ketua ASEAN, Perdana Menteri Abhisit mengusulkan bahwa sebuah "konektivitas komunitas" harus menjadi salah satu tujuan dari ASEAN Community 2015.⁶

Dalam pelaksanaan Konektivitas ASEAN, dibentuk sebuah *master plan* yang diberi nama *Master Plan on ASEAN Connectivity*. Dalam master Plan tersebut dijabarkan beberapa keterhubungan yang berindikasi pada pengembangan guna pencapaian 3 pilar utama ASEAN Community yang meliputi sektor Ekonomi, Politik dan keamanan serta sosial budaya.⁷ Keterhubungan ini meliputi tiga hal yakni konektivitas fisik, Institusi/lembaga, dan individu.⁸ Dari ketiga keterhubungan ini, masing-masing keterhubungan meliputi beberapa sektor. Pada keterhubungan fisik, sektor yang dinaungi antara lain adalah sektor transportasi, teknologi dan informasi (ICT) serta energi.⁹ Keterhubungan institusi/lembaga meliputi enam sektor antara lain liberalisasi perdagangan, investasi, kesamaan perjanjian, regional transport, prosedur lintas batas, dan program pembangunan kapasitas.¹⁰ Sedangkan pada keterhubungan individu, sektor yang dibawahinya antara pendidikan dan budaya serta sektor pariwisata.¹¹ Keterhubungan ketiga bidang ini dijabarkan secara sederhana dalam bentuk diagram yang diambil dari buku *Master Plan on ASEAN Connectivity*.¹²

⁵ BPPK ASPASAF, "ASEAN Connectivity in Indonesian Context", Jakarta, Kementerian Luar Negeri RI, 2011, hal 1.

⁶ BPPK ASPASAF, "ASEAN Connectivity in Indonesian Context", Jakarta, Kementerian Luar Negeri RI, 2011, hal 1

⁷ ASEAN Secretary, "Master Plan on ASEAN Connectivity", Jakarta, Asean Secretary, 2011, Hal 2

⁸ Ibid, Hal 2

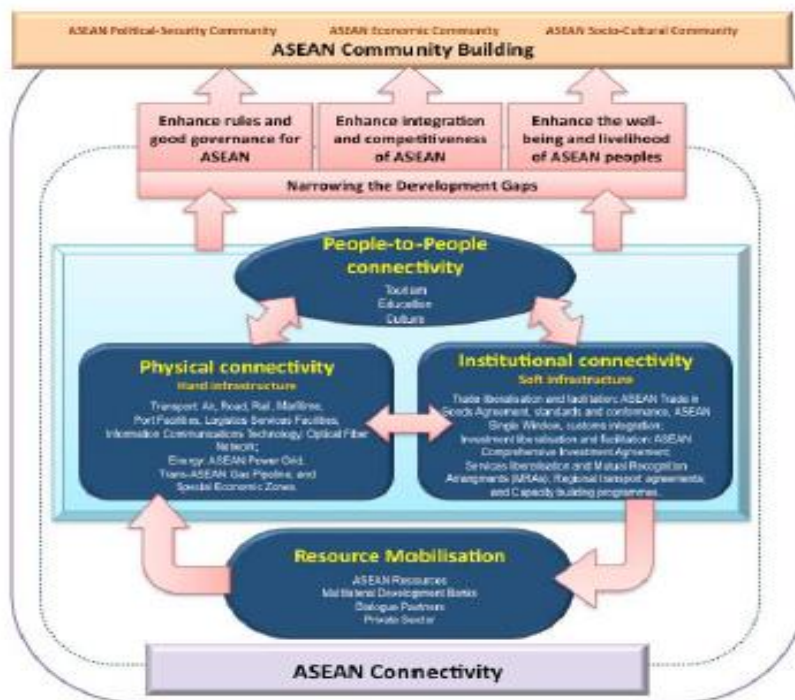
⁹ ASEAN Secretary, "Master Plan on ASEAN Connectivity", Jakarta, Asean Secretary, 2011, Hal 2

¹⁰ Ibid, Hal 2

¹¹ Ibid, Hal 2

¹² Ibid, Hal 3

Diagram 1 : Interaksi antara Komunitas ASEAN dan Konektivitas ASEAN



Sumber : Master Plan on ASEAN Connectivity

Konektivitas Individu (People to People Connectivity)

- (3) Konektivitas individu yang membawahi sektor pendidikan dan kebudayaan serta pariwisata bertujuan untuk mengembangkan inisiatif guna mempromosikan dan berinvestasi dalam pendidikan dan pembelajaran jangka panjang, mendukung pengembangan sumber daya manusia, mendorong inovasi dan kewirausahaan, mempromosikan pertukaran budaya ASEAN, dan mempromosikan pariwisata dan pengembangan industri terkait.¹³
- (4) Dari tujuan yang dipaparkan diatas terlihat jelas penggambaran mengenai bagaimana pariwisata coba dikembangkan melalui penjabaran kongkrit yang lebih spesifik dalam ranah kajian konektivitas ASEAN. Merujuk pada keterhubungan individu pada sektor pariwisata, sedikitnya menganalisis ada tiga perhatian utama yang disampaikan pada *Master Plan on ASEAN Connectivity* di bidang pariwisata. Perhatian ini meliputi inisiatif dalam bidang pariwisata yang dibentuk dalam *roadmap* mengenai integrasi sektor pariwisata pada tahun 2004-2010 guna mendukung ASEAN sebagai destinasi wisata serta proses liberalisasi pariwisata yang berindikasi pada pelayanan, pengkatan infrastruktur pariwisata, peningkatan kemampuan

¹³ ASEAN Secretary, "Master Plan on ASEAN Connectivity", Jakarta, Asean Secretary, 2011, Hal 7

para pekerja dalam bidang pariwisata, setya peningkatan partisipasi sektor pariwisata dalam pengembangan sektor pariwisata.¹⁴

- (5) Selain itu, perencanaan mengenai strategi pencapaian juga dibuat dalam pencapaian konktivitas ASEAN guna pencapaian hasil dari komunitas ASEAN melalui pembentukan ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015.¹⁵ Integrasi sektor pariwisata dalam kawasan juga menjadi fokus yang penting melalui harmonisasi persyaratan visa, pengembangan jaminan pihak ketiga, standarisasi jasa pariwisata, peningkatan infrastruktur dan fasilitasi pariwisata guna masuknya turis di seluruh wilayah dari berbagai negara.¹⁶

Pariwisata Dalam Konteks ASEAN

Pariwisata dalam pendefinisian United Nations World Tourism Organization (UNWTO) adalah sebuah fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang menyebabkan perpindahan orang ke suatu negara atau tempat yang bukan daerah asalnya dengan tujuan personal ataupun professional serta bisnis.¹⁷ Pariwisata dipercaya sebagai sebuah industri yang mampu tumbuh dan berkembang secara cepat.¹⁸ Negara-negara anggota ASEAN merupakan actor yang cukup atraktif dalam potensi tujuan wisata didunia.¹⁹

Pariwisata dalam konteks ASEAN memiliki cara pandang yang cukup berbeda dari negara-negara atau kawasan-kawasan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan promosi pariwisata yang dilakukan selama ini bukan hanya dititik beratkan pada pembangunan dan pengembangan ekonomi saja, akan tetapi juga pada pengenalan terhadap idiologi dan symbol dari identitas dan etnik.²⁰

Peningkatan sektor pariwisata di negara-negara ASEAN menjadi salah satu prioritas para anggota. Kepedulian akan bidang pariwisata yang berkemungkinan besar mampu memberikan pemasukan besar bagi negara-negara ASEAN ditunjukkan dengan pembentukan Sub-Committee of Tourism (SCOT) dibawah komite ASEAN yang menangani masalah perdagangan dan pariwisata. SCOT ini dibentuk pada tahun 1976 dengan tujuan dasar untuk memluai pengembangan pada sektor pariwisata regional dalam bidang promosi, pemasaran, serta penelitian.²¹

¹⁴ *Ibid*, Hal 28

¹⁵ *Ibid*, Hal 28

¹⁶ ASEAN Secretary, "Master Plan on ASEAN Connectivity", Jakarta, Asean Secretary, 2011, Hal 28

¹⁷ UNWTO, www.unwto.org diakses pada 13 Oktober 2016 pada pukul 22.05 WIB

¹⁸ Vannarith chheang, "Tourism and Regional Integrastion in Southeast Asia", Tokyo, IDE-JETRO:2013, Hal 13

¹⁹ *Ibid*, Hal 13

²⁰ Sofield, "Rethinking and reconceptualizing social and culture in southeast and south asian tourism development", Oxford, Butterworth Heinemann:2000, Hal 15

²¹ Plan of action on ASEAN Cooperation in tourism. http://asean.org/?static_post=plan-of-action-on-asean-cooperation-in-tourism diakses pada 14 oktober 2016 pada pukul 00.10 wib

Pengembangan mengenai sektor pariwisata ASEAN berlanjut dengan dibentuknya sebuah pertemuan yang berguna untuk mendorong kepariwisataan negara-negara ASEAN untuk terus maju dan berkembang. Pertemuan ini diberi nama ASEAN Tourism Forum (ATF) di Genting Highland, Malaysia pada tahun 1981.²² ATF secara definisi adalah sebuah kerjasama regional yang berupaya mempromosikan wilayah ASEAN sebagai salah satu tujuan wisatawan. Dalam pembentukannya, ATF memiliki 5 tujuan mendasar. Tujuan-tujuan tersebut meliputi;

1. Mempromosikan ASEAN sebagai tujuan yang atraktif di berbagai sisi;
2. menciptakan dan meningkatkan kesadaran bahwa ASEAN sebagai kawasan tujuan turis yang kompetitif dikawasan asia pasifik;
3. menarik lebih banyak turis untuk datang ke masing-masing negara ASEAN;
4. Mempromosikan perjalanan internal ASEAN;
5. Memperkuat kerjasama antar sektor dalam industri pariwisata ASEAN.²³

Pada awal pembentukan *ASEAN Tourism Forum*, acuan pengembangan pariwisata negara-negara ASEAN didasarkan kepada *Roadmap for Integration of Tourism Sector* (RITS) yang dimulai pada tahun 2015 hingga 2010.²⁴ Dalam perjalanan waktu, disusun sebuah strategi baru yang semakin efektif dalam peningkatan sektor pariwisata negara-negara ASEAN. Hal ini ditunjukkan dengan Penigkatan pengembangan kerjasama mengenai pariwisata di negara-negara ASEAN semakin menunjukkan keseriusan dimana pada pertemuan ke-10 ATF di Brunei Darussalam, disepakati sebuah rencana kerja jangka panjang mengenai pariwisata ASEAN. Kesepakatan jangka panjang ini dikenal dengan ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015.

ATSP 2011-2015 ini berujuan untuk membangun sebuah blueprint terkait dengan kebijakan, produk, dan proyek dalam arena pemasaran, pengembangan produk, standar, pengembangan sumber daya manusia, investasi dan komunikasi antar negara ASEAN.²⁵ ATSP ini juga nantinya diharapkan mampu untuk dikembangkan dalam bentuk implementasi lokal bagi negara-negara ASEAN guna penigkatan nilai tawar dibidang pariwisata agar

²² Lady Amalia, Efektivitas ASEAN Torism Strategic Plan 2011-2015 di Indonesia, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 1, Februari 2016, Hal 258

²³ <http://www.atfcambodia.com/atfobjective.php> Diakses pada 14 oktober 2016 pada pukul 00.25 wib

²⁴ Lady Amalia, Efektivitas ASEAN Torism Strategic Plan 2011-2015 di Indonesia, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 1, Februari 2016, Hal 258

²⁵ Memanfaatkan kerjasama pariwisata ASEAN untuk mendorong industri pariwisata Indonesia http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Asean%20Tourism_Suska%20&%20Yuventus%20Effendi.pdf diakses pada 14 oktober 2016 pada pukul 00.45 wib

mampu memberikan kontribusi peningkatan pemasukan bagi negara masing-masing.²⁶

Rencana strategi pariwisata ASEAN atau ATSP 2011-2015 yang dibentuk melalui ASEAN Regional Forum meliputi 3 arahan strategi dasar. Arahan Strategi tersebut meliputi;

1. Pengembangan produk-produk kawasan yang eksperiensial dan pemasaran kreatif serta strategi investasi;

Pengembangan Produk-produk kawasan dan pemasaran serta strategi investasi merupakan arahan strategi pertama dalam mengembangkan pariwisata dikawasan ASEAN. Arahan ini akan diimplementasikan dalam aksi strategis yang akan mendukung terciptanya tujuan dari rencana strategi ini dibuat. Pada arahan strategi pertama, ditemukan setidaknya ada tiga aksi strategi yang akan dilakukan. ketiga hal tersebut meliputi;

- a. Pengembangan dan penerapan strategi pemasaran pariwisata untuk wilayah ASEAN;
- b. Pengembangan paket wisata kawasan atau sub-kawasan;
- c. Peningkatan kebijakan hubungan eksternal dan prosedur pariwisata ASEAN.²⁷

Pemaparan ini tergambar jelas pada table berikut:

STRATEGIC DIRECTION 1 DEVELOP EXPERIENTIAL REGIONAL PRODUCTS AND CREATIVE MARKETING AND INVESTMENT STRATEGIES		
STRATEGIC ACTIONS		
1.1 Develop and Implement a Tourism Marketing Strategy for the ASEAN Region	1.2 Develop Experiential and Creative Regional/Sub Regional Circuits & Packages Together with Investment Strategies	1.3 Enhance the External Relation Policies and Procedures of ASEAN Tourism
ACTIVITIES		
1.1.1 Develop an ASEAN tourism marketing strategy which will create a brand, target markets, communication strategy, distribution approach and implementation structure. 1.1.2 Establish a market research group to provide analytical information on tourism trends and situation on a regular basis.	1.2.1 Develop packages for regional corridors, circuits and clusters for nature-based tourism. 1.2.2 Develop packages for regional corridors, circuits and clusters for cultural and heritage tourism (tangible and intangible). 1.2.3 Develop packages for regional corridors, circuits and clusters for community-based tourism. 1.2.4 Develop packages for regional corridors and circuits for cruise tourism and river-based tourism. 1.2.5 Work with CCI and CCS in reducing barriers and encouraging investment in product development.	1.3.1 Create a public relation policy and program to publicize and promote the objectives and activities of the ASEAN NTOs. 1.3.2 Develop policies and procedures for cooperating with dialogue partners to support the implementation of the ATSP. 1.3.3 Develop policies and procedures for cooperating with international organizations to support the implementation of the ATSP. 1.3.4 Develop communication systems and policies for communicating with the essential private sector stakeholders.

Sumber: ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015

²⁶ Ibid

²⁷ Ibd

2. Peningkatan kualitas pelayanan dan sumberdaya manusia ;

Peningkatan kualitas pelayanan dan sumberdaya manusia merupakan arahan strategi kedua dari ATSP 2011-2015. Arahan kedua ini memiliki tiga aksi strategis meliputi ;

- a. Pengembangan seperangkat standar pariwisata asean dalam proses sertifikasi;
- b. Pelaksanaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) guna pariwisata ASEAN yang professional;
- c. Pemberian Kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengembangan bagi masyarakat.²⁸

Penjelasan signifikan akan dijabarkan dalam bentuk table yang dikutip dari ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 sebagai berikut :

STRATEGIC DIRECTION 2		
INCREASE THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES, SERVICES AND FACILITIES IN THE REGION		
STRATEGIC ACTIONS		
2.1 Develop a Set of ASEAN Tourism Standards with a Certification Process	2.2 Implement the MRA on ASEAN Tourism Professionals and its Requirements	2.3 Provide Opportunities for Increased Knowledge and Skill Development
STRATEGIC ACTIVITIES		
2.1.1 Revise and develop an ASEAN green hotel standard with a certification process.	2.2.1 Develop tools and implement human resource development programs for housekeeping division.	2.3.1 Establish policies and procedures for the development of capacity building programs (including the process to be followed, assessment systems and the criteria to assess initiatives that will get ASEAN backing.)
2.1.2 Revise and develop an ASEAN homestay standard with a certification process.	2.2.2 Develop tools and implement human resource development programs for front office, food and beverage services, food production, travel agencies and tour operation divisions.	2.3.2 Develop a yearly human resource development plan based on regional priorities.
2.1.3 Revise and develop an ASEAN public toilet standard with a certification process.	2.2.3 Develop tools to monitor the tourism labor market situation in each ASEAN Member State that would support the implementation of MRA on Tourism Professionals.	
2.1.4 Develop an ASEAN spa services standard with a certification process.		
2.1.5 Develop ASEAN tourism security and safety guidelines.		
2.1.6 Enhance the ability of ASEAN tourism to address the climate change issue.		

Sumber: ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015

(6)

3. Peningkatan dan percepatan fasilitas pelayanan serta konektivitas ASEAN.²⁹

(7) Arahan strategi ketiga ini lebih berfokus pada fasilitas yang diberikan dan keterbubungan satu sama lain guna percepatan hasil peningkatan

²⁸ Ibid, Hal. 32

²⁹ ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015, http://asean.org/?static_post=asean-tourism-strategic-plan-2011-2015-2 diakses pada 15 oktober 2016 pada pukul 08.06 wib

pariwisata di negara-negara anggota ASEAN. Arahan strategi ini memiliki dua indikator aksi yakni;

- a. Pengajuan mengenai visa tunggal untuk kawasan ASEAN ;
- b. Kerjasama dengan badan-badan ASEAN yang relevan guna memperluas konektivitas.³⁰

Aktivitas-aktivitas yang mendukung jalannya arahan dan aksi strategis dibagian ini juga dipaparkan secara jelas dalam tabel yang diambil dari sumber yang sama yakni ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015.

STRATEGIC DIRECTION3 ENHANCE AND ACCELERATE TRAVEL FACILITATION AND ASEAN CONNECTIVITY	
STRATEGIC ACTIONS	
3.1 Advocate for a Single Visa for the ASEAN Region	3.2 Work with Other ASEAN Bodies to Expand Connectivity through Air, Water, Rail and Ground Transportation
STRATEGIC ACTIVITIES	
3.1.1 Continue to work towards a single visa for the region by identify obstacles and opportunities and working with the relevant groups within ASEAN.	3.2.1 On a consistent basis identify and clearly define land-based, air and maritime obstacles and opportunities to increase connectivity into and within the region.
3.1.2 Define the case for and advocate the implementation of an e-visa system.	3.2.2 Work closely with the relevant ASEAN bodies to ensure the adoption and implementation of NTO priority activities.
3.1.3 Explore the possibility for innovative visa arrangements that facilitate travel (e.g. sub-regional visas).	

Sumber: ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015

Kebijakan Pariwisata Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi

Dibawah pemerintahan presiden Joko Widodo, sektor pariwisata menjadi sektor yang dijadikan prioritas dalam pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini tertuang jelas dalam IMEPP dimana sektor pariwisata dijadikan sektor kelima dalam prioritas pembangunan setelah Infrastruktur, maritim, energi dan pangan.³¹ Tahun 2016 juga merupakan tahun percepatan bagi pemerintahan presiden joko widodo, dimana dalam arahnya pada sidang cabinet awal tahun lalu, tepatnya tanggal 4 januari 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan 8 arahan yang dimana dua dari arahan tersebut adalah mendorong percepatan pembangunan pariwisata Indonesia. Arahan tersebut

³⁰ Ibid,

³¹ Slide persentasi mengenai "Strategi Pengembangan Kepariwisata Indonesia" dipaparkan oleh Dadang Rizki Ratman,SH.M.PA, Hal 28

antara lain adalah memajukan dilapangan pada 10 destinasi wisata nasional serta harus ada sistem yang terintegasi dalam promosi perdagangan, pariwisata dan investasi.³²

Selain itu, dalam agenda prioritas NAWACITA dibutir keenam juga disebutkan mengenai peningkatan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni industri manufaktur, industry pangan, sektor maritime, dan pariwisata.

Melalui dukungan yang begitu besar, kementerian pariwisata mencoba membuat kebijakan mengenai strategi pariwisata Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019. Kebijakan ini dinamai program peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia. Kebijakan dan strategi Pariwisata ini kemudian diturunkan kedalam lima strategi dasar. Kelima strategi dasar tersebut antara lain adalah;

Pengembangan destinasi dan Industri pariwisata.

1. Pembangunan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata:
 - (1) Perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional),
 - (2) Peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata;
2. Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan:
 - (1) Pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan,
 - (2) Pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan pariwisata terpadu, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;
3. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat:
 - (1) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata;
 - (2) Pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi peningkatan sadar wisata, dan pengembangan potensi usaha masyarakat di bidang pariwisata;
4. Pengembangan industri pariwisata:
 - (1) Peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata;
 - (2) Pengembangan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;

³² Ibid, Hal 29

(3) Peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata.

(8) Beberapa kegiatan strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata meliputi :

1. Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata melalui Penyusunan Masterplan dan Rencana Detail KSPN/KPPN (dekonsentrasi); koordinasi strategis lintas sektor pembangunan KSPN serta sinergi program dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah; pengembangan kawasan ekonomi khusus zonasi pariwisata melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Dewan KEK Nasional dalam mempersiapkan proposal penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Zonasi Pariwisata; koordinasi lintas sektor pendukung infrastruktur aksesibilitas dan amenities pariwisata dengan Kementerian terkait;
2. Pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan melalui pengembangan wisata kuliner dan spa, pengembangan wisata sejarah dan religi, pengembangan wisata tradisi dan seni budaya, pengembangan wisata perdesaan dan perkotaan, pengembangan wisata bahari, pengembangan wisata ekologi dan petualangan, pengembangan kawasan wisata dan pengembangan wisata konvensi, olahraga dan rekreasi.
3. Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penataan organisasi pengelola destinasi (*Destination Management Organisation/ DMO*), penguatan kelompok sadar wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, serta internalisasi sadar wisata dan sapta pesona

(9) Peningkatan kemitraan industri pariwisata melalui penerapan pedoman green hotel, penyusunan SNI usaha jasa dan usaha sarana pariwisata, fasilitasi investasi usaha pariwisata, pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal dalam bidang pariwisata.³³

1. Pengembangan Pemasaran pariwisata Mancanegara;
2. Pengembangan Pemasaran pariwisata Nusantara
3. Pengembangan kelembagaan pariwisata;
4. Pengembangan dukungan management.³⁴

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

Pemasaran Pariwisata Mancanegara, diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara, melalui promosi dan pengelolaan segmen pasar yang terfokus, mencakup pada:

³³ Ibid, Hal 109-111

³⁴ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia "Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2011-2019". Hal 109

1. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
2. mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar berdasarkan wilayah (Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika);
3. meningkatkan promosi produk wisata tematik (wisata alam, budaya, buatan) sesuai fokus pasar.

Beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, antara lain:

- (10) 1) Branding Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Utama Wisata Dunia melalui media elektronik, digital/non digital serta sosial media untuk pasar mancanegara antara lain: Discovery Channel, Fox, MNC, Google Indonesia, Trip Advisor, Amazing Race;
- (11) 2) Perumusan Isi Pesan (Content) Promosi Pariwisata Terintegrasi antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- (12) 3) Pemasaran pariwisata dengan pendekatan BAS, DOT dan POS;
- (13) 4) Promosi Wisata Kuliner Nusantara di fokus pasar; dan
- 5) Promosi Wisata Tematik (Maritim).³⁵

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

Pemasaran Pariwisata Nusantara, diarahkan untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah, melalui promosi yang mencakup 3 (tiga) produk utama:

- (1) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan;
- (2) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan
- (3) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu. Pengembangan strategi pemasaran pariwisata nusantara dikembangkan melalui strategi yang terfokus yang mengintegrasikan antara aspek Pemasaran (DOT), aspek Promosi (BAS, dan aspek Media (POS), sebagaimana tergambar diatas.

Kegiatan strategis dalam kerangka pengembangan pemasaran pariwisata nusantara meliputi:

- 1) *Branding Pesona Indonesia* terintegrasi dengan semua stakeholder pusat dan daerah melalui media elektronik, digital/non digital dan sosial media

³⁵ Ibid, Hal 111-112

antara lain: Metro, Kompas Group, MNC, serta melibatkan partisipasi BUMN/BUMD dan private sektor;

2) Promosi event-event daerah sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata tersebut, meliputi : Wisata Alam, antara lain : Festival Danau Toba, Festival Danau Sentani, Festival Raja Ampat; Wisata Budaya, antara lain : Festival Keraton Ambon, Festival Kuliner Nusantara di beberapa ibukota propinsi; Wisata Buatan, antara lain : *Tour de Singkarak* (TdS) di Sumatera Barat, Jakarta Maraton; Wisata Bahari, antara lain: Festival Bahari Tambora, Sail Karimata, Peringatan Hari Nusantara, dsb.

3) Kampanye Budaya Maritim dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara sebagai puncak acara;

4) Pekan Wisata Maritim di Kawasan Tengah atau Timur Indonesia;

5) Pekan Wisata Kuliner Nusantara dan Regional;

6) Promosi wisata pertemuan, konvensi perjalanan insentif dan pameran serta wisata olahraga;

7) Pendataan dan Pengembangan Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisatawan Nusantara.³⁶

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan diarahkan untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDM nya yang kompeten, kredibel, dan inovatif serta komunikatif, melalui:

- (14) a. Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan kepariwisataan
- (15) b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi
- (16) c. Pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan di tingkat nasional dan internasional
- (17) d. Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan Perguruan tinggi pariwisata
- (18) e. Peningkatan kompetensi SDM aparatur kepariwisataan
- (19) f. Pendirian lembaga diklat pariwisata
- (20) g. Akselerasi transformasi kelembagaan kepariwisataan yang terkendali dan dinamis

Kegiatan strategis dalam kerangka pengembangan kelembagaan pariwisata meliputi:

- (21) a. *Pilot Project* Revolusi Mental dan Restorasi Sosial Masyarakat di 10 Daerah Potensial untuk Destinasi Wisata; dan,

³⁶ Ibid, hal 114-115

- (22) b. *Pilot Project* Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata di 5 Daerah.³⁷

Pengembangan Dukungan Manajemen

- a. Peningkatan kualitas layanan Pusat Informasi dan peningkatan aktivasi saluran media sosial (Social Media), seperti: facebook, twitter, instagram, path dan youtube.
- b. Peningkatan kualitas kinerja pengelolaan APBN Kementerian Pariwisata menuju status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
- c. Peningkatan sarana dan prasarana Kementerian Pariwisata.³⁸

Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia di masa Pemerintahan Jokowi

Pada pemaparan sebelumnya, sudah dijabarkan mengenai bentuk kongkrit dari *ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015* dengan elemen-elemen penjelas tentang arah strategi yang ingin dibentuk oleh ASTP 2011-2015. Pengembangan ide dalam makalah ini juga didukung dengan data mengenai arah kebijakan pariwisata Indonesia di masa Pemerintahan Jokowi melalui penjabaran strategi dan arah kebijakan yang ingin dibentuk. Kedua data tersebut akan dijadikan landasan dasar analisis untuk melihat pengimplementasian *ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015* pada kebijakan pariwisata yang dibuat dimasa pemerintahan Jokowi.

Penulis berangkat dari 3 arah strategi yang dimuat dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015* yang kemudian akan diturunkan kedalam kebijakan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Analisis ini meliputi :

Implementasi Pengembangan Produk-produk kawasan dan pemasaran serta strategi investasi.

Dalam arah strategi mengenai pengembangan produk kawasan dan pemasaran serta strategi investasi, *ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015* menurunkannya kedalam tiga poin dasar diantaranya Strategi pemasaran, Paket wisata kawasan dan sub-kawasan serta hubungan eksternal dan prosedur pariwisata ASEAN meliputi Investasi.³⁹ Penulis akan mencoba menganalisis tiga poin dasar ini yang diimplementasikan dalam kebijakan pariwisata Indonesia.

Strategi Pemasaran Pariwisata untuk Wilayah ASEAN

³⁷ Ibid, Hal 115

³⁸ Ibid, Hal 115

³⁹ ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015, http://asean.org/?static_post=asean-tourism-strategic-plan-2011-2015-2 diakses pada 15 oktober 2016 pada pukul 08.06 wib

Dalam poin ini terlihat bahwa strategi pemasaran pariwisata diimplementasikan oleh kebijakan pariwisata Indonesia melalui dua poin pengembangan pemasaran pariwisata Indonesia yang meliputi pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara dan pengembangan pariwisata Nusantara.⁴⁰ Pengembangan strategi pemasaran pariwisata Indonesia yang dibagi menjadi dua jenis yakni mancanegara dan nusantara juga memiliki poin-poin pengembangan tersendiri. Pada pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pemerintah lebih menekankan pada peningkatan citra kepariwisataan, mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran sesuai dengan fokus pasar berdasarkan wilayah yang salah satunya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, peningkatan promosi produk wisata baik wisata alam, budaya maupun buatan juga menjadi fokus dalam pengembangan pemasaran pariwisata Indonesia di tingkat Mancanegara.⁴¹

Pada pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, pemerintah lebih menekankan kepada peningkatan jumlah segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah melalui tiga produk utama yakni wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desaserta Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.

Paket Wisata Kawasan dan Sub-Kawasan

Pada bagian ini pengembangan paket wisata kawasan dan sub-kawasan, terlihat bahwa pemerintah Indonesia mengimplementasikan bagian ini melalui kebijakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata. Dalam pengembangan destinasi dan industri pariwisata, ada beberapa indikator yang digunakan antara lain adalah Pembangunan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata meliputi perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional).⁴²

Peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenities, dan ekosistem pariwisata serta Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan meliputi Pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, serta Pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan pariwisata terpadu, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi juga di indikasikan sebagai

⁴⁰ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia "Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2011-2019". Hal 109-115

⁴¹ Ibid,

⁴² ibid, Hal 109

sebuah bentuk implementasi dari pengembangan paket wisata kawasan dan sub-kawasan.

Dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam kebijakan pariwisata memusatkan perhatian pada pengembangan 10 destinasi yang dianggap akan menjadi sektor paling memberikan kontribusi besar pariwisata Indonesia. 10 lokasi destinasi wisata yang menjadi fokus prioritas antara lain adalah;

1. Danau Toba di Sumatera Utara
2. Tanjung Kelayang di Bangka Belitung
3. Kepulauan Seribu di DKI Jakarta
4. Tanjung Lesung di Banten
5. Borobudur di Jawa Tengah
6. Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur
7. Mandalika di Nusa Tenggara Barat
8. Wakatobi di Sulawesi Tenggara
9. Pulau Morotai di Maluku Utara
10. Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur.⁴³

Dengan fokus pada pengembangan destinasi wisata baru, diharapkan nantinya pola pikir mengenai Indonesia hanyalah Bali mampu di ubah dengan membentuk pola pikir baru bahwa Indonesia memiliki Bali-bali lain nya yang tidak kalah dengan Bali yang sebenarnya. Dengan mengembangkan destinasi baru ini, diharapkan nantinya pariwisata Indonesia mampu berkembang lebih pesat dari sebelumnya.

Peningkatan Hubungan Eksternal dan Prosedur Pariwisata meliputi strategi investasi

Pada bagian ini, penulis mencoba untuk melihat bagaimana hubungan eksternal yang dibangun serta strategi investasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui kebijakan yang dibuat dibagian Pengembangan pariwisata yang diturunkan kedalam pengembangan industry pariwisata tentang peningkatan kemitraan usaha pariwisata serta investasi dibidang pariwisata. Peningkatan hubungan eksternal dijelaskan dalam kebijakan Indonesia dalam bidang pariwisata adalah mengenai peningkatan kemitraan usaha yang dilakukan dibidang pariwisata itu sendiri melalui kemitraan dengan pihak-pihak yang dianggap mumpuni dan memiliki arah kemajuan bersama di bidang pariwisata Indonesia. Diharapkan nantinya kemitraan yang terjalin akan memberikan

⁴³ Slide persentasi mengenai "Strategi Pengembangan Kepariwisata Indonesia" dipaparkan oleh Dadang Rizki Ratman, SH.M.PA,

dampak positif dalam bentuk investasi guna pengembangan bidang pariwisata yang semakin maju.

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas pelayanan dan sumberdaya manusia menjadi poin kedua dalam pelaksanaan *ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015*. Pembahasan mengenai bagian ini diturunkan kedalam tiga elemen utama yakni pengembangan seperangkat standar pariwisata ASEAN dalam proses sertifikasi, Pelaksanaan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* guna pariwisata ASEAN yang profesional, serta pemberian kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengembangan masyarakat.

Indonesia melalui kebijakan pariwisata menekankan pada pengembangan sumberdaya manusia yang diharapkan bisa menjadi salah satu komponen yang mempercepat jalannya pengembangan pariwisata Indonesia. pengembangan sumberdaya manusia dimasukkan dalam program yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia agar pengembangan pariwisata mampu merata kesua daerah di Indonesia. Pengembangan pariwisata ini meliputi:

1. sertifikasi kompetensi SDM di bidang pariwisata di 34 provinsi di Indonesia
2. peningkatan kualitas SDM aparatur kementerian pariwisata dan pelatihan dasar SDM bidang pariwisata di 34 Provinsi
3. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang 100% terserap di pasar kerja dan seleksi masuk sekolah tinggi, akademi dan politeknik pariwisata (SBM-STAPP)⁴⁴

Pengembangan seperangkat standar pariwisata ASEAN dalam proses sertifikasi

Pada bagian ini setidaknya ada dua elemen besar dari kebijakan Indonesia mengenai pariwisata yang mendukung berjalannya pengembangan seperangkat standar pariwisata ASEAN dalam proses sertifikasi. Elemen tersebut meliputi pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang diturunkan kedalam kebijakan pengembangan industri pariwisata yang meliputi Pengembangan standar dan sertifikasi usaha pariwisata serta peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata.

Elemen kedua adalah pengembangan dukungan manajemen yang diturunkan kedalam tiga poin utama antara lain Peningkatan kualitas layanan pusat informasi dan peningkatan aktivasi saluran media sosial (Social Media),

⁴⁴ Ibdj,

seperti: facebook, twitter, instagram, path dan youtube. Poin kedua adalah Peningkatan kualitas kinerja pengelolaan APBN Kementerian Pariwisata menuju status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dan poin ketiga meliputi peningkatan sarana dan prasarana Kementerian Pariwisata.

Pelaksanaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) guna pariwisata ASEAN yang profesional

Pada elemen kedua dari pengembangan seperangkat standar pariwisata ASEAN dalam proses sertifikasi, tidak ditemukan secara implisit mengenai turunan poin ini didalam kebijakan pariwisata yang dibuat pada masa pemerintahan Jokowi. Hanya saja peneliti percaya bahwa dengan keikutsertaan Indonesia di ASEAN sudah menjadi indikasi bahwa Indonesia telah mendukung pelaksanaan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* yang bertujuan untuk membentuk pariwisata ASEAN yang profesional.

Pemberian Kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengembangan bagi masyarakat.

Penulis melihat elemen ini menjadi elemen yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata, karena dengan dukungan sumberdaya manusia yang memadai dan mumpuni untuk sektor pariwisata, pengembangan pariwisata akan sangat mudah dilakukan hingga memberikan dampak yang sangat signifikan baik di sektor domestik maupun regional serta internasional. Indonesia dengan arah kebijakannya, cukup memberikan peluang besar didalam pengembangan sumberdaya manusia baik di masyarakat awam maupun profesional yang berkecimpung langsung dibidang pariwisata itu sendiri. Pengimplementasian mengenai elemen ini terdapat didalam Pengembangan destinasi dan industry pariwisata yang diturunkan kedalam peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat dengan melalui peningkatan sadar wisata pada masyarakat serta pengembangan potensi usaha masyarakat di bidang pariwisata.

Dibagian lain, elemen ini juga diimplementasikan oleh Indonesia melalui pengembangan kelembagaan pariwisata yang dimuat dalam beberapa poin yakni optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan kepariwisataan, peningkatan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi, peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan Perguruan tinggi pariwisata, peningkatan kompetensi SDM aparatur kepariwisataan, serta Pendirian lembaga diklat pariwisata.

Peningkatan dan percepatan fasilitas dan pelayanan serta konektivitas ASEAN

Elemen ini membawahi dua poin besar yakni pengajuan mengenai visa tunggal untuk kawasan ASEAN serta kerjasama dengan badan-badan yang relevan guna memperluas konektivitas. dua poin besar ini akan coba analisis lebih mendalam oleh peneliti melalui penjabaran sebagai berikut.

Pengajuan Mengenai Visa Tunggal untuk Kawasan ASEAN

Sebagai kawasan yang mencoba untuk mengembangkan komunitas dan mewujudkan konektivitas yang semakin erat, ASEAN melalui ASEAN Tourism Strategic Forum 2011-2015 mengajukan perencanaan untuk pembentukan visa tunggal bagi kawasan ASEAN, hanya saja implementasi ini masih dalam tahapan rencana. Indonesia sendiri tidak memiliki arah kebijakan yang terfokus untuk mengimplementasikan visa tunggal ASEAN. Hanya saja setiap negara ASEAN sudah mengimplementasikan dan melaksanakan bebas Visa kunjungan wisata bagi warga negara dari negara ASEAN untuk berkunjung ke berbagai negara ASEAN dengan limitasi waktu yang ditentukan oleh masing-masing negara ASEAN.

Kerjasama dengan badan-badan ASEAN yang relevan guna memperluas konektivitas

Elemen ini didukung baik oleh Indonesia dengan membuat sebuah kebijakan pariwisata yang berindikasi pada pengembangan kelembagaan yang diturunkan kedalam pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan di tingkat nasional maupun internasional.

Dari penjabaran diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa arah kebijakan pariwisata Indonesia sebagian besar sudah mengimplementasikan ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 guna percepatan pengembangan pariwisata baik di sektor internal maupun disektor eksternal untuk menciptakan konektivitas ASEAN. Kesimpulan tersebut ditarik dari data mengenai kebijakan pariwisata Indonesia yang dianalisis dengan kesesuaian dan dukungan untuk ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015, hingga didapat penyederhanaan kesimpulan melalui tabel yang dirancang peneliti sebagai berikut;

Tabel

Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 didalam kebijakan pariwisata Indonesia di masa pemerintahan Jokowi

ATSP 2011-2015	Implementasi kebijakan pariwisata di masa pemerintahan Jokowi
1. Implementasi pengembangan produk kawasan dan pemasaran serta strategi investasi	
A. Strategi pemasaran pariwisata ASEAN	<p>(23) Strategi pemasaran mancanegara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan citra kepariwisataan, mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran sesuai dengan fokus pasar berdasarkan wilayah yang salah satunya adalah negara-negara dikawasan Asia Tenggara. b. peningkatan promosi produk wisata baik wisata alam, budaya maupun buatan <p>(24) Strategi Pemasaran Nusantara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan jumlah segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah melalui tiga produk utama yakni wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desaserta Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu
B. Pengembangan Paket Wisata Kawasan dan Sub-Kawasan	<p>Pengembangan destinasi dan Industri pariwisata.</p> <p>(25) Pembangunan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata:</p> <p>(26) (1) Perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional),</p> <p>(27) (2) Peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata;</p>

	<p>(28) Pengembangan Destinasi Wisata alam, (29) budaya, dan buatan: (30) (1) Pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, (31) (2) Pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan pariwisata terpadu, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi</p> <p>(32) Pengembangan industri pariwisata: Peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata</p>
<p>C. Peningkatan Hubungan Eksternal dan Prosdur pariwisata meliputi Strategi investasi</p>	<p>Pengembangan destinasi dan Industri Pariwisata</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pengembangan industri pariwisata:</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata</p>
<p>2. Peningkatan kualitas pelayanan dan sumberdaya manusia</p>	
<p>A. Pengembangan seperangkat standar pariwisata asean dalam proses sertifikasi</p>	<p>Pengembangan destinasi dan Industri Pariwisata</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pengembangan industry pariwisata</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan standar dan sertifikasi usaha pariwisata - Peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata. <p>Pengembangan Dukungan Manajemen</p>

	<p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas layanan Pusat Informasi dan peningkatan aktivasi saluran media sosial (Social Media), seperti: facebook, twitter, instagram, path dan youtube. - Peningkatan kualitas kinerja pengelolaan APBN Kementerian Pariwisata menuju status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). - Peningkatan sarana dan prasarana Kementerian Pariwisata
<p>B. Pelaksanaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) guna pariwisata ASEAN yang professional</p>	
<p>C. Pemberian Kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengembangan bagi masyarakat</p>	<p>Pengembangan destinasi dan Industri Pariwisata</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi peningkatan sadar wisata, dan pengembangan potensi usaha masyarakat di bidang pariwisata</p> <p>Pengembangan Kelembagaan Pariwisata</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan kepariwisataan - Peningkatan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi - Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan Perguruan tinggi pariwisata

	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi SDM aparatur kepariwisataan - Pendirian lembaga diklat pariwisata
3. Peningkatan dan percepatan fasilitas pelayanan serta konektivitas ASEAN	
a. Pegajian mengenai visa tunggal untuk kawasan ASEAN	
b. Kerjasama dengan badan-badan ASEAN yang relevan guna memperluas konektivitas.	<p style="text-align: center;">Pengembangan Kelembagaan Pariwisata</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(33) Pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan di tingkat nasional dan internasional</p>

Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Pariwisata Maritim (Pilar Ketiga Poros Maritim) Melalui Diplomasi Kebudayaan di Kawasan Asia Tenggara

Harits Dwi W, M.A dan Bagus Subekti N, M.A

Universitas Respati Yogyakarta

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Kondisi ini dapat menjadi prioritas bagi Negara dalam membangun perekonomian suatu bangsa. Pembangunan ekonomi Negara dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi laut melalui industri pariwisata, khususnya pariwisata maritim yang merupakan salah satu bagian dari pilar ketiga poros maritim. Pariwisata maritim dapat dijadikan sebagai instrumen diplomasi oleh Indonesia untuk bersaing secara kompetitif dalam bidang pariwisata di kawasan regional Asia Tenggara. Kondisi ini sangat signifikan apabila dilakukan dengan tepat dan serius oleh pemerintah. Penulis berargumen bahwa pariwisata maritim memiliki potensi yang cukup besar bagi pembangunan Indonesia, melalui industri pariwisata maritim di masa depan. Penulis menggunakan pendekatan diplomasi kebudayaan yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana diplomasi kebudayaan berperan sebagai instrumen dalam mempromosikan industri pariwisata Indonesia di kawasan regional.

Kata kunci

Diplomasi Kebudayaan, Industri Pariwisata

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah sangat luas dari Pulau Sabang sampai Merauke dan termasuk negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Kondisi tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu Negara tujuan wisatawan di Asia Tenggara.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadi potensi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Potensi ini dapat dilihat dari keindahan pulau yang terbentang dari ujung barat hingga ujung timur. Keindahan alam menjadi salah satu keunggulan khususnya wisata bahari, dimana Indonesia

memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Keadaan tersebut memiliki ruang bagi seluruh *stakeholder* yang ada di Indonesia untuk mengupayakan nilai tambah (*creating values*) dalam industri pariwisata.

Meningkatkan kualitas dalam industri pariwisata menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah, swasta ataupun masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ranking Indonesia di Asia Tenggara yang menempati urutan ke-4. Secara posisi Indonesia masih kalah bersaing dengan Singapura, Thailand dan Malaysia. Meskipun ditinjau dari segi luas wilayah dan kekayaan alam, Indonesia memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan Singapura, Thailand maupun Malaysia, namun kenyataannya Indonesia masih menempati posisi di bawah Negara-negara tersebut. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk lebih serius lagi dalam mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia serta lebih cerdas dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui diplomasi kebudayaan.

Indonesia memiliki UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dengan ini pemerintah memiliki amanah untuk menerapkan kebijakan terkait pembangunan industri pariwisata. Di lain pihak, Indonesia memiliki keunggulan dari negara lain jika dilihat sebagai *comparative advantage*. Beberapa contoh Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang sering dikunjungi turis lokal maupun internasional yaitu Bali, Lombok, Bunaken ataupun Raja Ampat. Daerah tersebut merupakan salah satu tempat favorit bagi para wisatawan yang datang ke Indonesia. Hal ini harus menjadi prioritas bangsa Indonesia, dimana sebagian besar negara ini adalah lautan. Lautan yang potensial mempertegas posisi wisata bahari (*marine tourism*) sebagai salah satu pariwisata berkualitas yang harus dikembangkan selain *Eco Tourism, Adventure, Heritage, Religi & Wisata Ziarah, Art & Culinary Tourism*, dan lain-lain. Dilihat dari aspek pembangunan ekonomi sangat menjanjikan apabila industri pariwisata bahari dapat dijadikan sebagai aset di masa yang akan datang.

Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam meningkatkan perekonomian Negara. Potensi kelautan yang sangat kaya, telah menempatkan posisi pariwisata maritime (bahari) sebagai salah satu pionir utama dalam mencapai tujuan ekonomi Indonesia. Dengan menjadikan objek pariwisata sebagai admosfir bagi kedatangan turis-turis dunia khususnya ASEAN, pariwisata telah menjadi contoh nyata bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi kebudayaan. Kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan perekonomian berusaha dijawab dengan menerapkan dilomasi kebudayaan, yaitu menawarkan pariwisata bahari ke luar negeri khususnya wilayah ASEAN sebagai poin ketiga dalam poros maritim yang juga merupakan unggulan utama pariwisata berkualitas di Indonesia. Namun pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah terkait dengan upaya untuk meningkatkan pariwisata tersebut. Sehingga dari sini penulis ingin menjawab pertanyaan tentang "Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan

Pariwisata Maritim (Pilar Ketiga Poros Maritim) Melalui Diplomasi Kebudayaan Di Kawasan Asia Tenggara?"

Rumusan Masalah

Bagaimana Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Pariwisata Maritim (Pilar Ketiga Poros Maritim) Melalui Diplomasi Kebudayaan Di Kawasan Asia Tenggara ?

Kerangka Konseptual

Diplomasi Kebudayaan

Riset ini menggunakan konsep diplomasi kebudayaan guna memahami tujuan dari kepentingan nasional Indonesia dalam mengembangkan sektor perekonomian khususnya dalam bidang pariwisata maritim. kebudayaan adalah satu dari 3 sumber kemampuan *soft power* (kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negerinya). Sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Nye dalam bukunya *Soft Power : The Means to Success in World Politics*, *soft power* diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan pilihan-pilihan bagi orang lain, yaitu kemampuan untuk memikat pihak lain agar rela memilih melakukan suatu hal yang dikehendaki tanpa perlu untuk memintanya. Joseph Nye melihat potensi yang besar dari budaya pada era ini sebagai satu kekuatan yang krusial dalam memberikan daya tarik tersendiri bagi bangsa lain. Daya tarik tersebut dapat memperkuat hubungan kerjasama antar Negara demi mencapai kepentingan nasionalnya terutama dalam bidang ekonomi.

Pada abad modern diplomasi menjadi metode yang dipilih oleh suatu Negara untuk mencapai tujuan-tujuannya secara damai. Dalam perkembangan dunia dewasa ini, *soft power* telah menjadi sesuatu yang penting, karena *Soft power diplomacy* yang berwujud *culture, ideas, values, policies* ataupun *achievement* itu, sering kali membuat formula diplomasi menjadi semakin kuat dan menjadi wujud lain dari apa yang dilakukan pada tingkat formal. Hal ini diperkuat oleh J.W. Fulbright dalam buku S.L Roy yang berjudul Diplomasi, yang berpendapat bahwa dunia setelah ini akan lebih dipengaruhi oleh seberapa baik suatu Negara dalam mengkomunikasikan nilai-nilai kebudayaan masyarakatnya kepada Negara lain. Mengingat perang sudah bukan lagi menjadi instrument pilihan untuk mencapai kepentingan nasional suatu Negara, maka diplomasi kebudayaan menjadi satu alternative bagi setiap Negara seperti Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Kebudayaan merupakan hasil dari upaya budi daya yang dilakukan manusia. Dengan kreatifitasnya manusia berusaha menjadikan satu hal yang biasa menjadi lebih unik dan memiliki nilai. Dalam hal ini Indonesia berupaya mengolah

pariwisata maritim sedemikian rupa agar dapat menjadi suatu yang menarik dan memiliki nilai seni dan kebudayaan di mata dunia khususnya kawasan ASEAN. Perhatian dunia terhadap kebudayaan Indonesia memberikan keuntungan tersendiri karena dapat menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) di dalam hubungan internasional. Usaha Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan inilah yang oleh Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari sebut sebagai diplomasi kebudayaan. Adapun tujuannya adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (Negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu. Beginilah cara Indonesia berusaha menyampaikan kebudayaannya melalui pariwisata.

Industri Pariwisata

Pariwisata memberikan sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Selain itu pariwisata juga ikut di dalam memajukan kebudayaan. Pariwisata itu sendiri mengandung kegiatan-kegiatan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, yang mendefinisikan pariwisata sebagai beberapa macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Melalui pariwisata, masyarakat domestik dan internasional dapat mengenal lebih dalam kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga menjadi modal yang baik dalam meningkatkan kekuatan diplomasi kebudayaan di Indonesia. Di sisi lain Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang berkenaan dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk memperoleh kesenangan. Kesenangan itu dinikmati berkat adanya jasa yang diberikan oleh pihak tertentu. Dari jasa tersebut Indonesia dapat menunjukkan karakteristik serta nilai dari kebudayaannya, dan menjadi bahan utama diplomasi kebudayaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Negara.

Pariwisata itu sendiri adalah suatu industri. Sesuai dengan istilahnya, pengertian industri adalah *The quality of working hard, the production of goods, the creation of wealth by human efforts*. Industri pariwisata merupakan *stakeholder* pariwisata yang berupaya menciptakan pertumbuhan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menghapus kemiskinan terhadap masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. Sejak awal tahun 90-an sector pariwisata sudah menjadi sumber devisa terbesar keenam sesudah minyak bumi, gas, kayu, tekstil dan karet. Hal ini mempertegas posisi pariwisata dalam pengembangan perekonomian Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 mendefinisikan Industri pariwisata sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dapat dilakukan oleh Pemerintah ataupun

masyarakat sekitar. Sehingga semakin banyak masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan pariwisata, menjadi indikator pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Pariwisata Maritim

Industri pariwisata pada saat ini menjadi salah satu unggulan bagi negara-negara maju maupun negara maju. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan dunia dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan internasional di seluruh dunia, pada 2015, naik 4,4% atau menyentuh angka 1,18 miliar, kendati ada kekhawatiran atas aksi terorisme yang terjadi di beberapa bagian belahan dunia. Dari jumlah yang sangat signifikan memberikan peluang bagi beberapa negara yang memiliki potensi dalam industri pariwisata. John Naisbitt meramalkan bahwa dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Kondisi tersebut dapat memancing negara-negara maju maupun berkembang untuk meningkatkan industri pariwisatanya. Sehingga peluang tersebut dapat diambil untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dari sektor industri pariwisata.

Kontribusi dari sektor pariwisata harus mendapat penanganan yang serius bagi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dan peluang sektor pariwisata dunia dalam tahun 2015. Kondisi tersebut dapat dilihat dari laporan dari UNWTO (United Nation World Tourism Organization), yaitu :

- a) Kedatangan wisatawan internasional tumbuh sebesar 4,6% pada tahun 2015 ke 1,184 M. Pada 2015, pariwisata internasional yang dihasilkan US \$ 1,5 triliun pendapatan ekspor
- b) UNWTO memperkirakan pertumbuhan kedatangan wisatawan internasional antara 3,5% dan 4,5% pada tahun 2016
- c) Pada tahun 2030, UNWTO memperkirakan kedatangan wisatawan internasional untuk mencapai 1,8 miliar (Pariwisata UNWTO Menuju 2030)

Perkembangan industri pariwisata telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan di dunia. Sektor pariwisata dapat mendorong kemajuan dalam bidang ekonomi suatu negara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara diplomasi. Diplomasi dalam konteks industri pariwisata dapat melalui diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan menjadi salah satu instrumen untuk mencapai sebuah kepentingan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keunggulan dari sektor pariwisata khususnya dalam hasil sumber daya alamnya (*natural resources*). "Sebagaimana kita ketahui, wisata bahari saat ini menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan menjadi sektor ekonomi yang berkembang sangat pesat. Indonesia mendapatkan keuntungan dari luas wilayah yang sangat strategis. Dimana sebagian besar

wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan sehingga memiliki potensi wisata yang dapat menjadi daerah unggulan wisatawan mancanegara maupun domestik. Menjadi negara maritim artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan laut sebagai ruang hidup (*lebensraum*) untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, momentum ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan pariwisata maritim sebagai pilar ketiga poros maritim melalui diplomasi kebudayaan khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Meningkatkan Kerja Sama Industri Pariwisata di Tingkat Regional Asia Tenggara

Industri pariwisata merupakan salah satu aktifitas yang memiliki potensi di masa yang akan datang. Di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dari sisi pemasukan sektor pariwisata. Disisi lain, Indonesia berada di peringkat 4 dibawah Thailand, Malaysia dan Singapura dalam hal pendapatan dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dengan cara meningkatkan kerja sama dengan bilateral ataupun multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Apabila melihat potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk Indonesia kerja sama dengan beberapa negara dapat saling menguntungkan. Di lain pihak, kerja sama tersebut bisa dilakukan dengan beberapa pihak swasta yang memiliki ketertarikan dalam industri pariwisata.

Dalam forum resmi yang telah dibentuk oleh komunitas negara-negara ASEAN berkaitan dengan sektor pariwisata yaitu ASEAN Tourism Forum (ATF). Forum regional ASEAN tersebut dapat digunakan sebagai cara untuk mempromosikan Indonesia di tingkat regional. Disisi lain, Indonesia sampai saat ini masih tertinggal dari beberapa negara pesaing. Dimana, Thailand, Singapura dan Malaysia memiliki peringkat lebih baik dibanding dengan Indonesia. Forum-forum ini dapat menjadi salah satu nilai tambah bagi bangsa ini untuk mengelola industri pariwisatanya dengan lebih baik. Pendekatan yang digunakan oleh bangsa ini dengan cara pendekatan diplomasi budaya. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai kepentingan nasional.

ATF merupakan sebuah forum yang sangat penting untuk dipertahankan di masa yang akan datang. Dimana forum atau aktifitas yang bersifat non politik dari suatu negara dapat memberikan dampak terhadap kemajuan pembangunan suatu bangsa. Forum ini berdiri sejak tahun 1981 di Malaysia, dimana ATF ini menjadi salah satu pendorong yang utama bagi pembangunan pariwisata di kawasan ASEAN. Hal ini dapat dari tujuan pendirian ATF yaitu :

- a. Proyek ASEAN sebagai hal yang menarik, berbagai hal satu tujuan
- b. Menciptakan dan meningkatkan kesadaran ASEAN sebagai daerah tujuan

wisata yang sangat kompetitif di Asia Pasifik

- c. Menarik lebih banyak turis dari negara-negara anggota ASEAN
- d. Mempromosikan wisatawan antar negara ASEAN
- e. Memperkuat kerja sama antara berbagai sektor industri pariwisata ASEAN

Forum ATF menjadi salah satu wadah investasi Indonesia di tingkat regional melalui sektor pariwisata. Sektor ini dalam beberapa dekade memiliki tingkat pertumbuhan di setiap negara bahkan tingkat kawasan. Aktifitas wisata dapat dikatakan sebuah kebutuhan bagi setiap individu bahkan kelompok tertentu. Dimana dalam kajian hubungan internasional isu ini menjadi salah satu gambaran bahwa pariwisata menjadi salah satu fenomena. Perkembangan secara global maupun regional dari segi pembangunan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat suatu negara.

Mendirikan Pusat Studi Indonesia di Universitas Asia Tenggara

Agenda kerja sama dalam bidang pariwisata dapat dilakukan dengan secara bilateral maupun multilateral. Pada saat ini dalam era globalisasi dibutuhkan kerja sama untuk saling menguntungkan. Kerja sama antar negara menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas diplomasi. Diplomasi bilateral dan multilateral mempunyai dampak bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa khususnya dalam bidang pariwisata. Hubungan ini dapat diimplementasikan melalui pendirian beberapa Pusat Studi Indonesia di Universitas yang ada di Asia Tenggara atau *Indonesian Corner*. Pendirian pusat studi ini di masa yang akan datang dapat memberi dampak bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah dorongan yang positif untuk dapat menggerakkan berbagai sektor yang ada di Indonesia khususnya bidang industri pariwisata. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk melakukan tindakan yang konkrit dalam bidang budaya.

Adanya Pusat Studi Indonesia atau *Indonesia Corner* merupakan sebuah aset yang negara. Hal ini dapat membantu masyarakat Asia Tenggara untuk mengenal Indonesia lebih mendalam. Pendirian pusat studi yang ada di berbagai universitas di Indonesia memiliki dampak yang positif bagi masyarakat kampus. Dimana, civitas kampus dapat mempelajari bahasa, budaya, sosial dan politik negara tersebut. Universitas mempunyai posisi yang penting dalam percaturan diplomasi budaya antar negara di regional Asia Tenggara. Indonesia perlu menyiapkan strategi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya dalam bidang budaya.

Mendirikan Kantor Promosi Wisata di Kawasan Asia Tenggara

Pada saat ini perkembangan dunia pariwisata menjadi salah satu aspek

yang penting dalam hal perolehan dari devisa negara. Oleh karena itu membutuhkan suatu upaya untuk menarik wisatawan mancanegara. Kondisi tersebut dapat dilakukan oleh negara dengan cara mendirikan kantor promosi pariwisata di luar negeri. Pendirian kantor di luar negeri memberikan sebuah peluang untuk lebih dekat dengan masyarakat asing, sehingga akan lebih mudah untuk mengenalkan berbagai macam potensi lokal yang dimiliki oleh Indonesia. Di lain pihak, pendirian ini dapat diartikan sebagai kantor perwakilan khusus dalam bidang industri pariwisata. Di Asia Tenggara dapat kita lihat kemajuan dari negara Thailand, salah satu promosi yang dilakukan membuka kantor khusus penanganan pariwisata dengan total 21 di seluruh dunia.

Kemampuan negara sangat dibutuhkan dari segi pendanaan serta strategi yang akan dilakukan. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah industri pariwisata kita tidak akan pernah ada terobosan baru dalam menarik perhatian para wisatawan asing. Dukungan dana menjadi sangat penting dalam hal pembiayaan promosi pariwisata. Apabila industri ini dijadikan sebuah aset di masa depan, maka pemerintah wajib untuk meningkatkan anggaran pariwisata dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Anggaran pemerintah dalam industri pariwisata sangat kecil apabila dibandingkan dengan pengeluaran dari Thailand, Singapura atau Malaysia. Upaya ini menjadi sebuah cita-cita bangsa Indonesia untuk mengenalkan industri pariwisata kepada masyarakat internasional khususnya di Asia Tenggara. Dalam hal ini negara memiliki peran dalam membuka jalur diplomasi antar negara. Hubungan politik antar beberapa negara, dan kebijakan terhadap warga negara asing yang melakukan perjalanan ke, dari dan dalam negeri, hal ini sangat penting bagi wisatawan temporer untuk saling memahami.

Hubungan bilateral dan multilateral menjadi salah satu modal bagi Indonesia untuk meningkatkan promosi wisata. Dari hasil tersebut dapat menghasilkan sebuah kebijakan bersama. Dimana, hasil kerja sama tersebut diberikan sebuah ijin mendirikan kantor promosi pariwisata di negara-negara Asia Tenggara, sehingga dapat mendukung program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Keunggulan pariwisata maritim Indonesia harus diiringi dengan penyediaan infrastruktur serta aksesibilitas. Kedua hal tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung diplomasi Indonesia dalam bidang kebudayaan. Peningkatan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia salah satunya menikmati keindahan alam laut. Wisata maritim yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan sebuah hal yang perlu di kelola secara profesional. Untuk mendekatkan pariwisata maritim perlu adanya sebuah fasilitas yang mendukung berbagai jenis kapal wisata khususnya kapal pesiar.

Kapal pesiar ini memiliki daya tampung yang signifikan dalam membawa turis mancanegara. Kapasitas kapal pesiar ini memiliki daya tampung sebanyak 2000 orang, sehingga akan memberi dampak terhadap perekonomian suatu daerah. Akan tetapi permasalahan yang ada di Indonesia saat ini belum tersedianya pelabuhan yang dapat menampung kapal pesiar. Pelabuhan yang tersedia di Indonesia baru ada 6 yaitu Belawan, Tanjung Priuk, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Benoadan Makassar. Apabila melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia terkait potensi wisata maritim perlu adanya dukungan dari pemerintah. Dukungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu penambahan jumlah pelabuhan yang bertaraf internasional sehingga mampu disinggahi beberapa kapal pesiar. Hal tersebut merupakan peluang yang sangat signifikan dalam mendatangkan wistawan mancanegara.

Di berbagai daerah yang memiliki potensi wisata maritim seperti Bunaken, Pulau banda, Ambon dan Raja Ampat Papua Barat sampai saat ini belum terdapat pelabuhan khusus untuk kapal pesiar. Pembangunan pelabuhan skala internasional di bagian timur Indonesia memberikan pengaruh terhadap pemasukan dari sisi industri pariwisata. Hal ini dapat dibuktikan dengan daya tampung penumpang kapal pesiar mampu membawa sekitar lebih dari 2000 wisatawan asing selurh dunia. Sektor ini memiliki peluang yang signifikan dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Disisi lain, pemerintah dapat membangun infrastruktur beberapa bandara di daerah yang memimiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan dari sektor pariwisata khususnya wisata maritim. Pembangunan bandara diharapkan mampu menampung pesawat yang berskala besar di berbagai pulau yang tersebar di wilayah timur Indonesia.

Pertukaran Budaya

Pertukaran Budaya merupakan cara lain dari upaya Indonesia dalam meningkatkan kekuatan diplomasi kebudayaannya di bidang pariwisata. Hal ini terwujud dalam program PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) yang diselenggarakan oleh kementrian pemuda dan olahraga. Salah satu tujuan program tersebut adalah Memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk lebih mengenal adat-istiadat, kesenian, dan budaya di Negara tujuan, tukar-menukar pengalaman serta melakukan kegiatan bersama di negara lain akan menimbulkan saling pengertian, penghormatan dan toleransi di kalangan generasi muda. Generasi muda merupakan delegasi sekaligus sasaran terbaik bagi penyebaran kebudayaan pada tingkat internasional. Hal ini disadari oleh beberapa organisasi internasional dengan membuka peluang pertukaran pelajar ataupun kebudayaan melalui beasiswa dan program orang tua asuh.

Salah satu organisasi yang aktif dalam membuka kesempatan pertukaran

pelajar internasional adalah *Youth For Understanding* (YFU) pada program *Intercultural Exchange Programs*. Organisasi ini telah melihat potensi pada pemuda sebagai delegasi terbaik dalam membawa pesan perdamaian pada dunia internasional melalui pendekatan diplomasi kebudayaan. Dari sini para pemuda Indonesia dapat memperkenalkan kebudayaan sekaligus pariwisata nasional ketingkat dunia. Program ini tidak hanya memberdayakan para pemuda tetapi juga orang tua asuh yang berada di Negara Indonesia. Dengan menerima para pelajar asing dari Negara lain, orang tua asuh memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang kebudayaan yang ada di daerahnya. Sehingga semua pengetahuan yang mereka dapatkan dari orang tua asuh tersebut dapat mereka bawa dan mereka sebarkan di Negara asal mereka.

Eksepsi

Penampilan kebudayaan Indonesia di luar negeri menjadi senjata terakhir diplomasi pada tulisan ini. Penampilan kebudayaan yang ditampilkan secara langsung dapat memberikan kesan yang mendalam bagi para penonton. Mereka dapat menangkap dengan jelas pesan serta nilai yang ingin disampaikan melalui pertunjukan tersebut. Salah satu contoh penampilan yang paling sering ditampilkan adalah seni tari. Bahkan pada suatu cara workshop di Bulgaria, beberapa penonton dari Negara tersebut menyatakan minatnya untuk mempelajari tari kesenian Indonesia yang dipimpin oleh dosen tari dari Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Dwi Rahmani di Universitas Sofia. Hal ini menunjukkan kesuksesan peran budaya sebagai senjata baru diplomasi Indonesia di luar negeri. Yakni dengan membawa para warga Negara asing yang ingin belajar kesenian ke Indonesia serta mengenalkan segala hal yang berhubungan dengan kebudayaan tersebut termasuk tempat-tempat pariwisata yang sering menampilkan kekayaan budaya Indonesia.

Selain aktif pada eksepsi, delegasi Indonesia juga aktif dalam mengikuti perlombaan kebudayaan bahkan memenangkan beberapa kategorinya. Seperti pada kompetisi World Championship of Folklore "World Folk 2014" di Bulgaria, 21-31 Agustus 2014 lalu. Yang diikuti oleh Kelompok Gita Gantari Khatulistiwa (GGK) Jakarta dan Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Tari Universitas Hassanuddin, Makassar, serta meraih juara pertama dan kedua Golden Grand Prix Orpheus.

Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga memiliki kekuatan dalam bidang kemaritiman, khususnya dalam bidang pariwisata maritim. Melihat berbagai potensi yang ditawarkan oleh Indonesia melalui lautnya, hal tersebut dapat menjadi peluang besar untuk dapat mendatangkan wisatawan asing dan devisa bagi negara. Di lain pihak pemerintah

perlu meningkatkan berbagai upaya diplomasi dengan negara lain. Diplomasi kebudayaan menjadi salah satu instrumen bagi Indonesia untuk melakukan promosi di kawasan Asia Tenggara. Berbagai upaya promosi pariwisata Indonesia di luar negeri perlu diiringi dengan komitmen yang kuat dari pemerintah. Adanya komitmen dari pemerintah maka akan berdampak kepada menguatkan pembangunan di bidang pariwisata. Berbagai upaya yang dilakukan di tingkat domestik maupun tingkat regional Asia Tenggara. Adanya promosi di kawasan Asia Tenggara dengan berbagai cara yang ditempuh oleh pemerintah melalui kerja sama industri pariwisata dengan negara anggota ASEAN, mendirikan Pusat Studi Indonesia di Universitas yang ada di Asia Tenggara, mendirikan kantor promosi wisata di kawasan Asia Tenggara, pertukaran budaya ataupun melakukan Eksebitasi. Untuk mendukung adanya diplomasi kebudayaan di kawasan Asia Tenggara perlu adanya pembenahan dan pembangunan di dalam negeri. Hal tersebut dalam bidang infrastruktur dan aksesibilitas, kedua bidang ini sangat membantu untuk menarik perhatian wisatawan asing yang akan berkunjung di Indonesia. Infrastruktur dan aksesibilitas menjadi salah satu yang wajib disediakan oleh pemerintah. Dilihat dari ranking pariwisata dunia, Indonesia berada di ranking 50 masih berada di bawah Thailand, Singapura dan Malaysia. Hal ini menunjukkan kualitas industri pariwisata kita masih perlu diperbaiki, meskipun potensi alam kita lebih baik dibanding dengan negara tetangga. Sehingga diplomasi dalam bidang pariwisata mampu menjadi barometer kesuksesan Indonesia di tingkat Asia Tenggara.

Diplomasi Batik Indonesia di Era MEA

M. Syaprin Zahidi

Universitas Muhammadiyah Malang

syaprin123@gmail.com

Abstrak

Perkembangan diplomasi di abad ke-20 ini sangat berbeda dengan diplomasi di abad ke-18 dan ke-19. Perbedaan tersebut terletak pada peranan dari aktor non-negara yang semakin besar. Saat ini kita mengenalnya sebagai diplomasi publik dan seluruh pemerintahan negara di dunia ini menggunakannya sebagai sarana dalam meningkatkan *image* negaranya. Diplomasi publik juga merupakan instrumen *soft power* dari suatu negara sebagai sarana komunikasi dengan publik dari negara lain untuk menjelaskan mengenai sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional dan kebijakan yang diambil oleh negara tersebut. Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia yang ditetapkan sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tanggal 2 oktober 2009. Dengan disahkannya batik sebagai warisan budaya asli Indonesia, Pemerintah Indonesia melihat ini sebagai peluang untuk menjadikannya sebagai instrumen dalam menyebarkan budaya "batik" Indonesia di dunia internasional. Terutama dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dipandang oleh pemerintah Indonesia sebagai peluang dalam mengenalkan dan meningkatkan keuntungan negara secara ekonomi melalui ekspor batik ke negara-negara anggota ASEAN.

Kata Kunci

Batik, Diplomasi Publik, MEA, *Soft Power*

Latar Belakang

Diplomasi sebagaimana jamak dipahami merupakan suatu upaya dari pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain (Suryokusumo, 2004: 1). Dalam perkembangannya diplomasi tidak lagi hanya mengedepankan konteks *hard power*¹ tapi mulai bergeser ke arah

¹ *hard power* dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain melalui tekanan militer atau ekonomi (Henderson, 1998)

*soft power*². Perkembangan teknologi informasi merupakan suatu faktor yang mendorong negara lebih menggunakan *soft power* dalam berdiplomasi.

Salah satu aspek penting dari *soft power* suatu negara adalah budaya dimana suatu negara dapat memanfaatkan faktor budayanya sebagai instrumen pertukaran gagasan dan informasi dengan negara lain dengan harapan untuk menciptakan pengertian bersama. Munculnya pengertian bersama tersebut tentunya harus ditunjang dengan reputasi positif yang dimiliki oleh negara tersebut (Dewangga, 2012).

Penggunaan aspek budaya sebagai instrumen *soft power* menjadi populer digunakan oleh banyak negara karena penyebaran budaya dapat dilakukan dengan cara damai tanpa perlu menggunakan unsur paksaan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam prakteknya aktor yang menyebarkan aspek budaya suatu negara bukan hanya negara tersebut. Namun, banyak aktor non negara yang juga berperan dalam penyebaran budaya suatu negara baik itu masyarakat negara tersebut, LSM, NGO dan lain-lain. Peranan pemerintah suatu negara dalam konteks penyebaran budayanya dapat dikatakan hanya pada aspek penentu kebijakan yang harus diambil dalam konteks regulasi atau penyedia anggaran (Susanto, 2008).

Perkembangan diplomasi saat ini yang lebih mengutamakan penggunaan unsur *soft power* melalui budaya telah mendorong meredupnya eksistensi dari *hard power* melalui kekuatan militer dan ekonomi dalam diplomasi. Hal tersebut pada akhirnya akan mendorong suatu negara untuk memperkuat aspek budayanya yang akan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan terhadap negara lain sehingga membuat negara lain tersebut akan menuruti apa yang diinginkan oleh negara yang mengeluarkan kebijakan tersebut.

Hal terpenting disini sebagaimana penulis jabarkan diatas adalah reputasi positif dari negara tersebut yang akan mendorong negara-negara lain untuk bekerjasama baik dalam konteks bilateral maupun multilateral. Penggunaan *soft power* (budaya) dalam konteks diplomasi publik ini sejalan dengan tujuan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain sebagaimana dijabarkan oleh Presiden ke-6 Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono bahwa pemanfaatan *soft power* sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional Indonesia sangat penting untuk dilakukan karena Indonesia memiliki potensi *soft power* seperti Bali,

² *soft power* dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara dalam melakukan persuasi kepada negara lain untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan negara tersebut tanpa menggunakan paksaan (Baldwin, 2002)

Batik, Nasi Goreng, tarian, *Handycraft* dan musik yang dapat digunakan untuk meningkatkan *image* positif Indonesia di dunia internasional (TimRedaksi, 2010).

Batik merupakan salah satu industri kreatif Indonesia yang berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan sebagai instrument *soft power* Indonesia. Batik sendiri dalam pengertian umum dapat kita definisikan sebagai suatu kain bergambar yang pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menulis diatas kain dan diproses dengan cara-cara tertentu (Prasetyo, 2010). Ditetapkannya batik sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) milik Indonesia oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tanggal 2 oktober 2009 menjadi suatu peluang yang sangat besar bagi Indonesia dalam memaksimalkan keuntungannya melalui pengenalan batik ke masyarakat internasional sebagaimana pernah diutarakan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (dalam Kabinet Indonesia Bersatu I) Aburizal Bakrie bahwa usulan nominasi batik ke UNESCO adalah untuk kepentingan pengembangan batik Indonesia di pasar internasional (Ulum, 2016).

Apabila di tinjau dari data ekspor batik Indonesia ke luar negeri maka antara tahun 2010-2014 terjadi peningkatan yang signifikan dari ekspor batik Indonesia dimana pada tahun 2010 nilai ekspor batik Indonesia adalah 22 juta USD lalu meningkat menjadi 340 juta USD pada tahun 2014 yang artinya dalam lima tahun terakhir nilai ekspor batik Indonesia meningkat sebesar 1445%. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dapat dikatakan menjadi suatu peluang bagi Indonesia dalam memaksimalkan kepentingan nasional melalui upaya-upaya internasionalisasi batik baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aktor non pemerintah Indonesia (Hidayat, 2015).

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam tulisan ini penulis akan berupaya untuk menjabarkan tentang upaya-upaya Diplomasi Publik Indonesia dalam memaksimalkan potensi batik sebagai instrumen *soft power* Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Diplomasi Batik Indonesia di Era MEA?

Kerangka Konsep

Dalam upaya untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka dalam tulisan ini penulis akan menggunakan konsep Diplomasi Publik.

Diplomasi Publik

Perkembangan teknologi dan informasi, kondisi dunia internasional dan perkembangan aktor dalam hubungan internasional realitanya baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh juga pada perkembangan kajian diplomasi. Saat ini diplomasi bergeser dari konteks tradisional dimana negara adalah aktor yang monolit ke konteks modern dimana aktor dalam diplomasi tidak lagi hanya negara yang kita kenal sebagai diplomasi publik.

Pilihan-pilihan dalam menjalankan diplomasi saat ini sangat beragam dikarenakan perkembangan teknologi informasi namun perang sebagai jalan terakhir dalam diplomasi tidak sepenuhnya menghilang. Isu-isu yang diusung dalam diplomasi publik biasanya berkisar diantara isu lingkungan, pariwisata, budaya, terorisme, kesehatan dan hak asasi manusia.

J.B. Manheim menyebutkan bahwa diplomasi publik adalah:

"Effort by government of one nation to influence public or elite opinion in a second nation for the purpose of turning foreign policy of the target nation to advantage" (Bennet, 1994: 132).

Definisi berikutnya mengenai diplomasi publik dijabarkan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Indonesia A.M. Fachir yang mengatakan bahwa diplomasi publik adalah pemberdayaan segala sesuatu potensi yang dimiliki sebuah negara, dimana pemberdayaan potensi tersebut dapat meliputi keindahan alam dan keragaman budaya yang diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Pemberdayaan potensi tersebut untuk mencapai satu tujuan yaitu *to win hearts and mind, domestically and internationally* (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2013a).

Pada akhirnya diplomasi publik dapat disimpulkan sebagai upaya suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui proses *informing*, *understanding*, dan *influencing* publik di negara lain. Lebih jelasnya bisa dikatakan bahwa diplomasi tradisional menekankan hubungan melalui mekanisme *government to government relations* sedangkan diplomasi publik menekankan mekanisme hubungannya pada *government to people* atau bahkan *people to people relations* yang tujuannya adalah untuk membuat persepsi yang baik tentang suatu negara di publik negara lain yang dapat dijadikan landasan untuk mencapai kepentingan nasional yang lebih luas (Susetyo PR, 2008).

Proses *informing* dilakukan melalui penggunaan media cetak ataupun elektronik contohnya adalah pemberitaan mengenai penyelenggaraan kegiatan melalui surat kabar, *pamflet* atau memberdayakan dan menyebarkan informasi melalui instagram, twitter, facebook dan berbagai varian media

elektronik lainnya yang intinya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mengakses informasi tersebut.

Proses *understanding* merupakan suatu proses yang memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai suatu informasi yang dipromosikan agar sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat luas yang menerima informasi tersebut. terakhir *influencing* merupakan proses yang terakhir yang merupakan gambaran hasil dari respon publik dinegara lain terhadap informasi yang telah disampaikan. Cara yang biasa ditempuh dalam proses *influencing* ini antara lain dengan mengirimkan atau memperkenalkan misalnya budaya lokal negara yang berupaya melakukan *influencing* atau mendirikan perwakilan yang bertugas untuk menyebarkan kebudayaan dinegara tersebut.

Proses *Informing, Understanding dan Influencing* dalam diplomasi publik ini akan penulis gunakan untuk menjabarkan mengenai upaya diplomasi batik Indonesia di Asia Tenggara terutama pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Temuan- temuan dan Analisis: Upaya Diplomasi Batik Indonesia di Kawasan Asia Tenggara

Diplomasi Batik Indonesia di era MEA akan penulis jabarkan dalam dua pembahasan yang pertama, penulis akan menjabarkan mengenai upaya diplomasi batik Indonesia di Kawasan Asia Tenggara lalu yang kedua, penulis akan menjabarkan keuntungan yang didapat oleh Indonesia melalui diplomasi batiknya di Kawasan Asia Tenggara.

A. Informing

Pengenalan budaya batik yang dilakukan oleh Indonesia di negara-negara Asia Tenggara dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik pusat dan daerah maupun pemerhati dan pengusaha batik (NGO). Upaya penyebaran informasi mengenai batik ini dilakukan jauh sebelum MEA diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat dinegara-negara anggota ASEAN semakin familiar dengan batik Indonesia sehingga pada akhirnya nanti setelah MEA diberlakukan diharapkan publik ASEAN akan memilih untuk menggunakan batik dari Indonesia.

Upaya-upaya *Informing* yang dilakukan oleh Indonesia antara lain dengan menggelar acara *World Batik Summit (WBS) 2011* dengan tema "Indonesia: Global Home Batik" di Balai Sidang Jakarta Convention Center mulai 28 September-2 Oktober 2011. Acara ini diadakan oleh Kementerian Perdagangan serta beberapa kementerian lainnya yang bekerjasama dengan Yayasan Batik Indonesia (Pangestu, 2011).

Diselenggarakannya acara ini menurut salah satu pendiri Yayasan Batik Indonesia Dipo Alam adalah untuk membangun antusiasme batik secara internasional terutama sebagai persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Dari sisi pemerintah, Menteri Perdagangan waktu itu Mari Elka Pangestu mengungkapkan bahwa acara ini digunakan untuk memperluas informasi mengenai batik ke seluruh dunia terutama kawasan Asia Tenggara dalam persiapan menghadapi MEA. Ia mengatakan bahwa batik boleh saja dikembangkan dan dibuat dimana saja namun rumahnya harus tetap Indonesia (Pangestu, 2011).

Berkaitan dengan acara WBS tersebut di Batam Pemerintah Kota Batam melalui Kadin Batam juga menggelar acara yang dimaksudkan sebagai kelanjutan dari acara WBS di Jakarta yaitu Pameran Batik yang digelar dari tanggal 2-4 Desember di Mega Mall Batam Center dengan maksud untuk mempromosikan batik lokal di tingkat nasional dan Asia Tenggara. Adapun tema dari Pameran Batik tersebut adalah Batam Sebagai Pusat Promosi Batik untuk ASEAN ("Jadikan Batam Pusat Promosi Batik ASEAN," 2011).

Promosi Batik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam tersebut dihadiri oleh Gubernur Kepri, Menteri Perindustrian serta Duta Besar Negara-negara ASEAN di Indonesia. Panitia acara yang diwakili oleh Ketua Kadin Batam, Nada Soraya mengatakan bahwa promosi batik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam tidak hanya akan dilakukan di Batam namun juga akan dilakukan dengan mengadakan pameran di Negara-negara anggota ASEAN ("Jadikan Batam Pusat Promosi Batik ASEAN," 2011).

Kegiatan-kegiatan *Informing* lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di kawasa Asia Tenggara bisa dikatakan sudah sangat sering sekali dilakukan yang menurut penulis semua itu dilakukan agar batik menjadi sesuatu yang familiar di benak publik ASEAN. Pada pembahasan berikutnya penulis akan menjabarkan upaya-upaya *understanding* yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor non-pemerintah dikawasan Asia Tenggara

B. Understanding

Upaya-upaya *Understanding* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam konteks diplomasi batik di Kawasan Asia Tenggara antara lain dilakukan dengan mengadakan *workshop* membuat batik di beberapa negara Asia Tenggara seperti yang dilakukan di Singapura dengan menggelar acara *Diplomatic Coffe Morning and Batik Workshop* di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 19 Maret 2015. Acara tersebut diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura yang diketuai oleh Ibu Ferial Saad Hadi. Adapun tujuan diadakannya acara tersebut menurut Ibu Saad Hadi adalah

untuk memperkenalkan batik dan filosofi didalam membatik itu kepada para diplomat dan publik yang ada di Singapura (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2015).

Workshop membatik lainnya antara lain dilakukan oleh KBRI Indonesia di Thailand yang berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Komunitas Masyarakat Siam yang disupport oleh Garuda Indonesia dengan tema acara "Batik Heritage" tujuan dari acara ini adalah untuk mempromosikan keanekaragaman batik yang dimiliki oleh Indonesia dan juga mengajarkan publik Thailand mengenai cara membatik yang benar melalui worksop membatik (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2012)

Acara yang diadakan di Thailand tersebut dimulai dengan *workshop* membatik yang diikuti oleh kurang lebih 50 partisipan yang terdiri dari korps diplomatik, para pejabat publik di Thailand, Organisasi Wanita, Asosiasi Pengusaha Tekstil di Thailand, Dharma Wanita Persatuan di Thailand. Acara tersebut diawali dengan *cocktail party* dengan suguhan makanan tradisional dari Indonesia dan Thailand serta dilanjutkan dengan *fashion show* oleh 10 model Indonesia dengan menggunakan pakaian batik (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2012).

Di Brunei Darussalam juga diadakan *Workshop* Batik dengan Pewarna Alam pada tanggal 28-29 Agustus 2013 yang bertempat di Aula Gedung Kedutaan Besar RI Bandar Seri Begawan. *Workshop* tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Handriyo Kusumo Priyo yang dalam sambutannya beliau mengatakan melalui workshop ini KBRI ingin membawa batik Indonesia lebih dekat ke masyarakat Brunei. *Workshop* ini dihadiri juga oleh *Permanent Secretary* pada Kementerian Perindustrian dan Sumber-sumber Utama Negara Brunei Darussalam, Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Hj Awang Mohd Jamil Al-Sufri (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2013d).

Workshop membatik yang diadakan oleh KBRI tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta usaha kerajinan batik Brunei yaitu Batik Desamas. Adapun tujuan diadakannya *workshop* tersebut untuk menumbuhkan minat dikalangan generasi muda Brunei Darussalam dalam pembuatan batik dengan teknik pewarnaan alam. Pengenalan Batik Indonesia juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang ada di Brunei dan tergabung dalam organisasi PERMAI BRUNEI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei) (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2013d).

C. Influencing

Sebagai upaya terakhir dalam proses diplomasi batik Indonesia di

kawasan Asia Tenggara, *influencing* memegang peranan yang penting karena pada tahap ini pengenalan budaya batik tidak hanya selesai pada tahap pameran atau *workshop* namun lebih dari pada itu batik diupayakan untuk menjadi *soft power* Indonesia dikawasan Asia Tenggara.

Bentuk pengaruh diplomasi batik Indonesia dikawasan Asia Tenggara dapat dilihat dari munculnya akulturasi budaya batik Indonesia dikawasan Asia Tenggara yang memunculkan desainer-desainer batik dari kawasan Asia Tenggara serta model-model batik yang khas dari masing-masing negara di Kawasan Asia Tenggara contohnya adalah Batik Desamas yang menjadi ciri khas dari Brunei Darussalam yang tidak bisa dipungkiri merupakan hasil pengaruh dari kerajinan batik Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2013d).

Hasil lain yang didapatkan Indonesia dari diplomasi batik adalah dengan ditampilkannya secara reguler produk-produk batik Indonesia pada Can Tho Trade Fair di Kota Can Tho, Vietnam Selatan sejak tahun 2013. Hal ini menjadi suatu kesuksesan tersendiri bagi Indonesia dalam memasuki pasar domestik di Vietnam (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2013c).

Influencing kepada para desainer dari negara-negara Asia Tenggara juga sukses dicapai dalam diplomasi batik Indonesia ini. contohnya adalah desainer dari Thailand, Thawit Tangtien yang mengaku sangat menyukai style batik dari Indonesia yang memadukan rasa nasionalisme dan *fashion* sehingga ia akan berusaha untuk berkreasi dan menciptakan model busana batik dengan *stylenya* sendiri (Kompas, 2011b).

Keuntungan yang didapat oleh Indonesia melalui diplomasi batiknya di Kawasan Asia Tenggara

A. Peningkatan Citra Indonesia sebagai Negara Produsen Batik di Asia Tenggara

Diplomasi Batik Indonesia yang sudah dilakukan sebelum dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN memberikan efek positif pada citra batik Indonesia di publik negara-negara anggota ASEAN. sebagai contohnya adalah ketika diadakan acara ulang tahun *United Nation International School* (UNIS) di Vietnam yang ke-25 maka diadakan bazaar "Unis Spring Fair 2013". Pada bazaar tersebut KBRI memanfaatkannya untuk mempromosikan budaya Indonesia dan ternyata respon dari pengunjung di bazaar tersebut sangat tinggi terutama ketika di booth Indonesia disediakan makanan-makanan khas Indonesia dan pengenalan batik Indonesia yang sangat disukai oleh masyarakat Hanoi (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2013b)

Batik sebagai hasil karya cipta asli Indonesia menjadi suatu cerminan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang kreatif, terbuka dan menghargai perbedaan sehingga ini secara tidak langsung mempengaruhi persepsi dari masyarakat negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap citra Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan keanekaragaman budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi publik di Asia Tenggara. Citra batik Indonesia dapat dikatakan semakin meningkat ketika dalam beberapa kesempatan kegiatan-kegiatan ASEAN *dress code* yang digunakan adalah batik khas Indonesia misalnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Bali. KTT tersebut menarik perhatian karena seluruh kepala negara yang hadir menggunakan batik bahkan kepala negara Amerika Serikat Barack Obama juga mengenakannya. Ini menjadi suatu bentuk kesuksesan dari citra Indonesia dan pengakuan batik Indonesia sebagai negara produsen batik di kawasan Asia Tenggara (Kompas, 2011a).

Secara umum pengenalan budaya batik yang dilakukan oleh Indonesia di kawasan Asia Tenggara telah memberikan dampak yang baik bagi citra Indonesia sebagai negara produsen batik di Asia Tenggara. Pengetahuan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara terhadap Indonesia melalui batik secara perlahan-lahan akan membuat mereka memahami Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan budaya. Melalui batik pula mereka akan memahami bahwa Indonesia adalah negara yang dapat diandalkan dalam peningkatan kerjasama di segala bidang.

B. Keuntungan Ekonomi

Pasca ditetapkannya Batik sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia milik Indonesia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tanggal 2 oktober 2009, keuntungan Indonesia dari ekspor batik sangat besar. Mulai dari tahun 2010-2014 bisa dikatakan sebagai periode meningkatnya ekspor batik Indonesia. Berikut ini adalah data nilai ekspor batik Indonesia sejak tahun 2010-2014:

Tabel 1. Perkembangan Ekspor Industri Batik Nasional Tahun 2010-2014

Tahun	Nilai Ekspor	Pertumbuhan (%)
2010	22 Juta USD	
2011	58, 8 Juta USD	62,58 %
2012	278 Juta USD	78,84%
2013	320 juta USD	13,12%
2014	340 Juta USD	5,88%

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ekspor batik Indonesia mulai dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari tabel diatas maka nilai ekspor batik Indonesia pada tahun 2010 adalah 22 juta USD yang meningkat menjadi 340 juta USD pada tahun 2014. Artinya dalam lima tahun terakhir nilai ekspor batik nasional Indonesia tumbuh sebesar 1445% (Hidayat, 2015).

Secara umum jika dianalisis berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa ekspor batik Indonesia yang meningkat sebesar 1445% tersebut terjadi sebelum diberlakukannya MEA maka dapat dikalkulasi menurut penulis nilai ekspor batik Indonesia pasca diberlakukannya MEA yang akan semakin besar.

Optimisme bahwa batik Indonesia akan menjadi "raja" di era MEA ini diamini oleh Thomas Lembong, eks menteri perdagangan di era Jokowi yang sejak bulan Juli 2016 menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia menyebutkan bahwa batik akan menjadi primadona ketika MEA berlangsung alasannya menurut beliau karena telah terjadi pergeseran tren dimana produk-produk unik semakin diincar termasuk batik (Afriyadi, 2015).

Thomas Lembong menyebutkan bahwa dipasar internasional saat ini kecenderungan menunjukkan bahwa peminat barang yang diproduksi sedikit dan eksklusif meningkat sangat drastis. Berkenaan dengan hal tersebut maka batik memiliki potensi untuk menjadi barang primadona karena produksinya yang tidak dalam konteks manufaktur massal dan bentuknya yang unik (Afriyadi, 2015).

Data dari Kementerian Perindustrian juga menunjukkan bahwa ada peningkatan ekspor batik sebelum dan sesudah diberlakukannya MEA antara lain yaitu jumlah unit usaha batik selama lima tahun sejak 2011 hingga 2015 tumbuh 14,7% dari 41.623 unit menjadi 47.755 unit. Tenaga kerja pun sama, selama 2011-2015 tumbuh 14,7% dari 173.829 orang menjadi 199.444 orang (Pujiastuti, 2015).

Hal yang sama terjadi pada nilai pembelian bahan baku yang meningkat 12,8% dari tahun 2011 senilai Rp 4,137 triliun menjadi Rp 4,746 triliun pada tahun 2015. Nilai tambah batik tumbuh 14,7% dari tahun 2011 senilai Rp 1,909 triliun menjadi Rp 2,191 triliun. Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ekspor batik Indonesia mulai dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari tabel diatas maka nilai ekspor batik Indonesia pada tahun 2010 adalah 22 juta USD yang meningkat menjadi

340 juta USD pada tahun 2014. Artinya dalam lima tahun terakhir nilai ekspor batik nasional Indonesia tumbuh sebesar 1445% (Hidayat, 2015).

Secara umum jika dianalisis berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa ekspor batik Indonesia yang meningkat sebesar 1445% tersebut terjadi sebelum diberlakukannya MEA maka dapat dikalkulasi menurut penulis nilai ekspor batik Indonesia pasca diberlakukannya MEA yang akan semakin besar.

Optimisme bahwa batik Indonesia akan menjadi "raja" di era MEA ini diamini oleh Thomas Lembong, eks menteri perdagangan di era Jokowi yang sejak bulan Juli 2016 menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia menyebutkan bahwa batik akan menjadi primadona ketika MEA berlangsung alasannya menurut beliau karena telah terjadi pergeseran tren dimana produk-produk unik semakin diincar termasuk batik (Afriyadi, 2015).

Thomas Lembong menyebutkan bahwa dipasar internasional saat ini kecenderungan menunjukkan bahwa peminat barang yang diproduksi sedikit dan eksklusif meningkat sangat drastis. Berkenaan dengan hal tersebut maka batik memiliki potensi untuk menjadi barang primadona karena produksinya yang tidak dalam konteks manufaktur massal dan bentuknya yang unik (Afriyadi, 2015).

Data dari Kementerian Perindustrian juga menunjukkan bahwa ada peningkatan ekspor batik sebelum dan sesudah diberlakukannya MEA antara lain yaitu jumlah unit usaha batik selama lima tahun sejak 2011 hingga 2015 tumbuh 14,7% dari 41.623 unit menjadi 47.755 unit. Tenaga kerja pun sama, selama 2011-2015 tumbuh 14,7% dari 173.829 orang menjadi 199.444 orang (Pujiastuti, 2015)

Hal yang sama terjadi pada nilai pembelian bahan baku yang meningkat 12,8% dari tahun 2011 senilai Rp 4,137 triliun menjadi Rp 4,746 triliun pada tahun 2015. Nilai tambah batik tumbuh 14,7% dari tahun 2011 senilai Rp 1,909 triliun menjadi Rp 2,191 triliun. Peminat batik dari mancanegara yang meningkat pun tercermin dari nilai ekspor batik yang naik 14,7% dari tahun 2011 senilai Rp 43,96 triliun menjadi Rp 50,44 triliun pada 2015 (Pujiastuti, 2015).

Kesimpulan

Berkaitan dengan pembahasan diatas maka ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dalam tulisan ini antara lain yaitu bahwa dengan ditetapkannya Batik sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia milik Indonesia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) oleh *United Nations*

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) maka sejak saat itulah Indonesia berupaya untuk mengusahakan upaya diplomasi batiknya apalagi dengan diberlakukannya MEA yang dalam pandangan Indonesia sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya

Upaya Diplomasi Batik Indonesia inilah yang dalam kajian diplomasi dikenal sebagai diplomasi publik dimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan batik sebagai instrument soft powernya di Kawasan Asia Tenggara. Upaya Diplomasi Publik Indonesia ini ditempuh dengan melalui tiga tahapan yaitu informing, understanding dan influencing yang hasil akhirnya menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan baik secara immaterial maupun material. immaterialnya adalah citra Indonesia sebagai negara produsen batik di Kawasan Asia Tenggara semakin diakui dan keuntungan materialnya antara lain adalah nilai ekspor batik yang perlahan-lahan semakin meningkat ke negara-negara Asia Tenggara.

Referensi

Buku

- Bennet, W. L. and D. L. P. (1994). *Taken by Storm "The Media, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy in The Gulf War."* Chicago: The University of Chicago Press.
- Prasetyo, A. (2010). *Batik Karya Agung Warisan Budaya Dunia*. Yogyakarta: Pura Pustaka.
- Suryokusumo, S. (2004). *Praktik Diplomasi*. Jakarta: STIH IBLAM.

Jurnal

- Hidayat, A. (2015). Optimalisasi Ekspor Batik Cirebon, Pasca Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Pada Tahun 2015. *Journal and Proceeding Feb UNSOED*, 5(1).
- Ulum, I. (2016). Batik dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Bestari*, 0(42).

Internet

- Afriyadi, A. D. (2015). Batik Bakal Jadi Raja Saat Era Perdagangan Bebas ASEAN. Retrieved November 15, 2016, from <http://bisnis.liputan6.com/read/2396334/batik-bakal-jadi-raja-saat-era-perdagangan-bebas-asean>

- Dewangga, T. A. (2012). *Diplomasi Melalui Soft Power*. Retrieved November 9, 2016, from <http://www.setkab.go.id/artikel-6305-diplomasi-melalui-soft-power.html>.
- Jadikan Batam Pusat Promosi Batik ASEAN. (2011). Retrieved November 12, 2016, from <http://www.humasbatam.com/2011/08/05/jadikan-batam-pusat-promosi-batik-asean/>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2012). *Indonesian Batik Heritage held in Bangkok*. Retrieved November 12, 2016, from <http://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesian-Batik-Heritage-held-in-Bangkok.aspx>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2013a). *Diplomasi Publik Tidak Semata-mata milik Negara*. Retrieved November 11, 2016, from <http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=364&l=id>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2013b). *Indonesia Semarakkan "Unis Spring Fair 2013 di Hanoi"*. Retrieved November 15, 2016, from <http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Semarakkan-Unis-Spring-Fair-2013-di-Hanoi.aspx>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2013c). *Produk Indonesia Gencar Masuki Pasar Delta Mekong*. Retrieved November 13, 2016, from <http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Produk-Indonesia-Gencar-Masuki-Pasar-Delta-Mekong.aspx>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2013d). *Workshop Batik Dengan Pewarna Alam*. Retrieved November 13, 2016, from <http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Workshop-Batik-Dengan-Pewarna-Alam.aspx>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2015). *Diplomatic Coffe Morning and Batik Workshop in Indonesian Embassy*. Retrieved November 12, 2016, from <http://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/Diplomatic-Coffee-Morning-and-Batik-Workshop-in-Indonesian-Embassy.aspx>
- Kompas. (2011a). *Dipakai Obama, Batik "KTT" Bakal Jadi Tren*. Retrieved November 15, 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/19/09340141/Dipakai.Obama..Batik.KTT.Bakal.Jadi.Tren>
- Kompas. (2011b). *Perancang Thailand Terpesona Batik Indonesia*. Retrieved November 14, 2016, from <http://news.kompas.com/read/2011/11/14/17472668/perancang.thailand.terpesona.batik.indonesia>

- Pangestu, A. (2011). World Batik Summit 2011 di gelar di Jakarta. Retrieved November 12, 2016, from <http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/07/world-batik-summit-2011-digelar-di-jakarta>
- Pujiastuti, L. (2015). Diakui Dunia, Ekspor Batik RI Meningkatkan Setiap Tahun. Retrieved November 15, 2016, from <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3034083/diakui-dunia-ekspor-batik-ri-meningkat-setiap-tahun>
- Susanto, P. (2008). Masa Depan Diplomasi Kebudayaan. Retrieved November 9, 2016, from http://www.kongresbud.budpar.go.id/data/abstract/makalah_susanto_pudjomartono.pdf
- Susetyo PR, B. (2008). Peranan Diplomasi Publik. Retrieved November 11, 2016, from [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062_Peranan_Diplomasi_Publik_\(18_Desember_2008\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062_Peranan_Diplomasi_Publik_(18_Desember_2008).pdf)
- TimRedaksi. (2010). Soft Power Memperkuat Formula Diplomasi. Retrieved November 10, 2016, from http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/DIPLOMASI_Pebruari_2010.pdf

Penegakan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara, Piagam ASEAN Serta Upaya Mewujudkan Komunitas ASEAN 2015: Kasus Peradilan Khmer Merah di Kamboja (2005-2015)

Nazaruddin Nasution, SH, MA

Dosen HI FISIP

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Violations of human rights held in various regions of the world, including in Southeast Asia. Factors that trigger such human rights violations are as a result of oppression by the majority towards the minority, as a result of differences in ideology, religion or ethnicity, or due to the economic and social disparities.

There are at least three countries in Southeast Asia is striking occurrence of human rights violations, namely Myanmar, Indonesia and Cambodia. In Myanmar conducted by the military regime of General Than Shwe, as the continuation of the practices of human rights violations by the previous military regime. Groups who are victims of human rights violations are the minority group of Karen, one of the strongest and the eldest Myanmar's ethnic minorities. Besides that, there are also ethnic minority Rohingya, who are mostly Muslim. While in Indonesia, the human rights violations were practiced during the regime of Sukarno and Suharto in relations to areas dominate by the separatist groups in Aceh, East Timor and Papua. However, the most grave violation of human rights was dealing with the killing of around 2 million people by the Khmer Rouge regime in Cambodia in the period 1975-1979, known as "Killing Fields".

The formation of ASEAN in 1967 through the Bangkok Declaration proved that ASEAN is simply a loose regional organization. However, after more that 40 years, ASEAN then need to have a rigid and orderly organization through the forming of the ASEAN Charter in 2007, which came into force in 2009. ASEAN declared its organization as a *legal personality*, and emphasized the importance of the principles of democracy, human rights, rule of law and good governance, as stated in the Objective (article 1) and the Principles (article 2) of the Charter. As a consequences of the adoption of the ASEAN Charter, ASEAN countries established a number of national commission of human rights, the

establishment of the ASEAN Inter Governmental Commission of Human Rights (AICHR), the importance of the principle of Responsibility to Protect (R2P) to solve a number of grave violations of human rights in ASEAN, namely *genocide, ethnic cleansing, war crimes and crimes against humanity*. All ASEAN countries also have the commitment to the stability, peace and harmony in Southeast Asia region as a requirement to implement the ASEAN Community of 2015.

As a new member of ASEAN in 1999, Cambodia promised to fulfill its responsibility in line with the objective and the principles of ASEAN as stated in the primary documents of ASEAN. In this connection, the government of Cambodia and the United Nations in 2003 agreed to establish a human rights court to deal with those criminals who were responsible with the killings of the people of Cambodia.

Keywords:

human rights, ASEAN Charter, majority, minority, responsibility to protect, ideology, religion, ethnicity

Pendahuluan

Berbagai pemikiran dan teori tentang Hak Asasi Manusia muncul pertama kali di Inggris pada Abad Pertengahan, diawali dengan pemikiran John Locke (*Two Treatises on Civil Government*), Thomas Aquinas (*Summa Theologica*), Thomas Hobbes (*Leviathan*), dilanjutkan oleh Edmun Burke, Tom Paine dan seterusnya.¹ Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari Hukum Internasional adalah merupakan reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Manusia pada zaman tersebut terdiri dari dua lapisan besar, yakni lapisan atas yang minoritas dan lapisan bawah yang mayoritas jumlahnya. Lapisan bawah tidak mempunyai hak-hak dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa. Mereka diperlakukan sebagai budak sekehendak pemiliknya. Sebagai reaksi terhadap keadaan ini, timbullah gagasan untuk mempersamakan kedudukan lapisan bawah dan lapisan atas karena mereka sama-sama manusia. Muncullah ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan yang ditonjolkan oleh revolusi Perancis pada akhir abad Kedelapan belas.²

¹ Walther Laqueur and Barry Rubin, *The Human Rights Reader*, 1989. London: Penguin Books Ltd, h. 4-10.

² Ikhwan SH, M.Ag, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, 2004. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h. 41.

Terdapat banyak kesepakatan internasional mengenai HAM yang muncul setelah tahun 1945, seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel

The international protection of human rights: some key treaties, conventions, and declarations

Year	Agreement
1948	The Universal Declaration of Human Rights (United Nations General Assembly)
1948	The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
1950	The European Convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms
1965	The International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination
1966	The International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
1979	The American Convention on Human Rights
1979	The International Convention on the Elimination of Discrimination Againts Women (CEDAW)
1981	The African Charter on Human and People's Rights (the Bajul Charter)
1984	The Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
1984	The Convention on the Rights of the Child
1989	The Declaration of Principles of Indigenous Rights
1993	The Vienna Declarations and Action Programme

Sumber: *The Globalization of World Politics 4e*, p. 508

HAM dalam tataran global

Pemikiran tentang HAM yang bersifat kodrati, seperti hak untuk hidup, kemerdekaan, kepemilikan, keamanan, kebahagiaan dlsb berakar pada ajaran *John Locke, Montesquieu, Thomas Paine, Jean-Jacques Rousseau* dan para filsuf lainnya dari abad ke-17 dan ke-18, yang merupakan kekuatan yang mendorong revolusi Perancis dan revolusi Amerika. Menurut Locke (1690), manusia dilahirkan dengan hak kemerdekaan dan menikmati seluruh hak-hak

dan keistimewaan dari hukum alam sama dengan manusia lain. Sedangkan Montesquieu (1748) menyebutkan hukum pada umumnya adalah pertimbangan kemanusiaan, yang sebanyak mungkin mengatur tentang penduduk di bumi, yang diterima demikian rupa oleh manusia. Sementara Rousseau (1762) menegaskan bahwa mengingat tidak ada seorangpun manusia memiliki hak alami terhadap sesama manusia lainnya, dan mengingat kekerasan bukanlah sumber dari hak, konvensi tetap sebagai dasar bagi penguasa hukum di lingkungan manusia.³

Karel Vasak, pakar HAM Cekoslovakia menciptakan ungkapan 'generasi HAM'. Hak asasi manusia, kebebasan liberal didefinisikan sebagai hak-hak sipil pasif, sedangkan kebebasan demokratik didefinisikan sebagai hak-hak politik untuk berpartisipasi aktif. Pemikiran ini dikenal sebagai generasi pertama HAM. Adapun generasi kedua HAM berupa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang diperjuangkan oleh revolusi Rusia dan revolusi-revolusi kaum Sosialis lainnya sebagai alat untuk mencapai kebebasan. Sedangkan generasi ketiga HAM (dari kelompok Selatan) mencoba menambahkan dimensi yang mendekati pada konsep universalisme.⁴

Salah satu kelemahan dari sistem hak asasi manusia internasional adalah pemerintah, yang merupakan pelanggar utama dari HAM. Namun demikian, pemerintah adalah juga tempat terbaik untuk menjamin kepatuhan terhadap HAM. Paradoks ini menciptakan kelemahan dari sistem tersebut. Berbagai tatacara, yang disediakan oleh Komisi HAM PBB, terutama tergantung kepada pemerintah untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Tentu saja, peranan dari organisasi non-pemerintah adalah sangat penting. Mereka menyediakan informasi yang sangat diperlukan tentang pelanggaran HAM dan berusaha meyakinkan pemerintah untuk mengambil berbagai prakarsa. Hanya pemerintah lah yang dapat mengajukan resolusi pada Komisi HAM PBB, dan hanya pemerintah yang memiliki hak suara.⁵

Bukan hanya negara—artinya para elit penguasanya—saja yang mencari landasan pada dokumen-dokumen PBB. Para 'pembangkang' di banyak bagian dunia kerap kali mencoba memperkokoh perjuangan mereka untuk hak asasi manusia melalui otoritas moral dan intelektual dari deklarasi dan perjanjian PBB. Penetapan-standar hak asasi manusia merupakan salah

³ Walter Laquerer & Barry Rubin, *Human Rights Reader*, New York: A Meridian Book, 1989, p. 17, 62, 68, 69.

⁴ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003, h. 9-12, 24-25.

⁵ Kathleen E. Mahoney and Paul Mahoney, *Human Rights in the Twenty-First Century: A Global Challenge*, 1993, Dordrecht, The Netherlands, p.50.

satu capaian paling menonjol PBB. Dengan perkataan lain, ada norma-norma tertentu tindakan dalam melanggar hak asasi manusia yang dapat diterapkan pada umat manusia di manapun, tidak pandang latar belakang etnik, religius, ideologi, atau kebangsaannya. Sebagai dampak dari standar-standar universal ini, dan berdasarkan atas peran PBB sebagai forum internasional paling representatif di dunia sekarang ini, kegiatan-kegiatan hak asasi manusia PBB telah mendorong ke arah munculnya iklim moral global. Penindasan brutal mayoritas kulit hitam oleh minoritas kulit putih di Afrika Selatan pada masa kejayaan apartheid membangkitkan banyak perubahan moral di mana-mana. Demikian pula, pembasmian etnik—yang barbarik—yang dilakukan oleh orang Serbia terhadap orang Bosnia di bekas negara Yugoslavia menghasilkan sejenis kekejaman moral di tengah-tengah rakyat awam yang belum pernah kita saksikan dalam suatu jangka waktu yang panjang. Meragukan apakah akan ada reaksi-reaksi seperti itu apabila tidak ada iklim moral global.⁶

Tiga Kelompok Penentang HAM

Sejauh ini penerapan HAM baru dinilai efektif pada negara – negara maju, walaupun hampir semua negara yang tergabung dalam PBB pada tahun 1948 menandatangani Deklarasi Universal HAM, namun penerapannya di beberapa belahan dunia masih merupakan sesuatu yang kontroversi, terutama di negara berkembang, atau yang dikenal dengan istilah negara Dunia Ketiga. Konsep HAM mendapat tentangan dari tiga kelompok utama. Pertama dari kalangan akademisi tradisi pemikiran liberal Barat, tentangan ini dianggap sebagai tantangan internal, karena konsep HAM dipercaya bersumber dari pemikiran liberal. Tantangan kedua datang dari pemerintahan otoriter Timur, yang lebih dikenal sebagai “blok – Asia” dan juga pemerintahan Islam di kawasan Timur Tengah. HAM dianggap tidak sejalan dengan tradisi budaya dan juga hukum domestik mereka. Tantangan ketiga datang dari para akademisi, aktivis HAM, feminist, dan NGO dari kawasan Selatan dan Timur, yang beranggapan bahwa konsep HAM sekarang ini bersifat Eurosentris, sehingga tidak bisa di terapkan pada masyarakat non Barat. Konsep HAM sering kali dikaitkan dengan demokrasi yang secara agresif disebarkan oleh Barat ke seluruh dunia, dan rezim HAM yang dibangun berdasarkan asumsi setiap manusia merupakan bagian dari komunitas dunia, merupakan salah satu contoh yang baik bagi proses globalisasi yang sedang berlangsung. Di dunia yang sekarang berada dalam hegemoni Barat, setiap pelanggaran yang terjadi atas HAM dianggap sebagai sesuatu yang mengancam komunitas

⁶ Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995., h. 200.

internasional. Prinsip – prinsip yang dikemukakan oleh kaum liberal ini memang merupakan sesuatu yang secara teori bersifat universal, namun tidak begitu dalam penerapannya, karena batasan – batasan negara tidak bisa diabaikan begitu saja. Terlepas dari perdebatan apakah HAM bersifat universal atau tidak, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ide mengenai HAM telah membantu untuk menciptakan dunia yang aman bagi keberagaman.⁷

HAM vs prinsip Kedaulatan

Dalam konteks hubungan internasional pasca Perang Dingin, terdapat satu hal yang menjadi perdebatan hangat di masyarakat internasional, yakni "kedaulatan nasional" seperti yang tersurat dalam perjanjian Westphalia 1648. Dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa negara dengan segala kedaulatannya, berhak mengatur segala urusan dalam negerinya, termasuk yang berkaitan dengan perlakuan terhadap warganegaranya. Suatu negara juga dilarang campur tangan dalam urusan negara lain. Prinsip larangan campur tangan pihak asing dikenal sebagai prinsip non-intervention. Demikian pula dalam Piagam PBB yang ditandatangani pada 1945, yang menghormati kedaulatan setiap negara dan menghormati hal-hal yang termasuk *domestic jurisdiction* suatu negara.⁸

Piagam PBB sendiri pada dasarnya memang mengakui pentingnya kedaulatan nasional. Negara yang mungkin merupakan pelanggar keras hak-hak dasar rakyatnya senantiasa bisa mengklaim bahwa kesejahteraan warganya adalah tanggung jawabnya dan tidak ada institusi internasional yang boleh mencampurtangani urusan dalam negerinya. Dengan perkataan lain hanya negaralah yang mempunyai yurisdiksi (wewenang hukum dan perundang-undangan) mutlak dan sempurna atas hak asasi manusia rakyatnya. Dalam empat puluh tahun terakhir, sejumlah negara, besar maupun kecil, dengan berbagai orientasi ideologi masing-masing, telah menggunakan 'mantel' kedaulatan nasional guna melindungi diri mereka dari kritik-kritik terhadap catatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh PBB. Israel, Afrika Selatan, Cina, dan Indonesia, di antara banyak negara lainnya, pada kesempatan yang berbeda menuduh berbagai organ dan badan PBB, termasuk Dewan Keamanan dan Komisi Hak Asasi Manusia mencampuri urusan dalam negeri mereka. Ini seringkali menempatkan PBB dalam dilema. Bagaimana PBB mempertemukan komitmennya pada hak asasi manusia dan martabat umat

⁷ <http://debbyrizqie109.wordpress.com/2011/06/27/kajian-ham-di-asia-tenggara/> diakses tgl 14 Juni 2016.

⁸ M. Adian Firnas et.al. *Peranan ASEAN dalam Mendorong Penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar*. JISI, Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Volume 2 Nomor 1, Maret 2015.

manusia di manapun, sesuatu yang dengan tegas diartikulasikan dalam UDHR, dengan ‘janji’-nya untuk “tidak mencampuri urusan yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi dalam negeri suatu negara” sebagaimana tercantum di dalam Piagam PBB? Kendatipun menghadapi dilema seperti ini, PBB, dalam berbagai kesempatan, telah mengkritik pelanggaran hak asasi manusia oleh negara-negara anggota tertentu. Majelis Umum, misalnya, telah mengadopsi sejumlah besar resolusi yang mencela Israel karena memerkosa hak-hak rakyat Palestina. Mereka sulit memahami mengapa Dewan Keamanan PBB hampir tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan agresi Serbia atas Muslim Bosnia khususnya—agresi yang berusaha menyapu bersih seluruh komunitas, suatu agresi yang identik dengan pembasmian etnik.⁹

ASEAN dan Pelanggaran HAM

Isu HAM menjadi “bola panas” di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini terdiri dari negara – negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kawasan ini juga dikenal dengan kawasan diktator, karena mayoritas negara di kawasan ini dipimpin oleh seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan diktator atau otoriter. Sebelum terjadinya revolusi di Indonesia pada tahun 1998, tidak ada satu negara pun yang murni menganut paham demokrasi, bahkan beberapa negara sampai saat ini masih menganut sistem monarki, dan dipimpin oleh seorang Raja atau Sultan, seperti Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sebagai kawasan yang dihuni oleh mayoritas negara baru merdeka, maka tingkat stabilitas politik di kawasan masih rendah, dan masing – masing negara fokus pada pembangunan nasional mereka, sehingga isu HAM menjadi prioritas kesekian dibandingkan dengan kebutuhan – kebutuhan lain. Pada tahun 1967, lima negara di kawasan ini berinisiatif membentuk suatu organisasi regional kawasan, yang kemudian dikenal dengan ASEAN. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1967, melalui Deklarasi Bangkok, ASEAN resmi berdiri. Lima negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Isu HAM mulai menjadi perhatian di kawasan seiring sorotan yang diterima ASEAN dari negara – negara luar kawasan mengenai berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan ini. Beberapa kasus yang paling disoroti adalah pelanggaran HAM terhadap tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan juga kasus – kasus serupa yang terjadi di negara-negara

⁹ Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995., h. 205-206, 219-220.

anggota ASEAN lainnya, termasuk kasus yang terjadi selama era pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.¹⁰

Freedom House, suatu LSM internasional yang berpusat di Amerika Serikat, berusaha memberikan nilai mengenai ukuran HAM dari tingkat demokrasi dan kebebasan politik sejumlah negara di Asia Tenggara seperti daftar berikut ini :¹¹

Country	Freedom Ranking*	Human Development Index**	Press Freedom Ranking ***	Human Rights Ratifications
Brunei	Not Free	Very High	Difficult	3/22
Cambodia	Not Free	Medium	Difficult	11/22
Timor Leste	Partly Free	Medium	Satisfactory	11/22
Indonesia	Partly Free	Medium	Difficult	11/22
Laos	Not Free	Medium	Very Serious	9/22
Malaysia	Partly Free	High	Difficult	5/22
Myanmar	Not Free	Low	Difficult	4/22
Philippines	Partly Free	Medium	Difficult	14/22
Singapore	Partly Free	Very High	Difficult	3/22
Thailand	Partly Free	High	Difficult	11/22
Vietnam	Not Free	Medium	Very Serious	7/22

* FreedomHouse's 2014 ranking of Freedom in the World. Three ranking are awarded : Free, Partly Free or Not Free

** From the UNDP's 2014 Human Development Index, States can have very high, high, medium or ,ow human development

*** From Reporters Without Borders'2014 World Press Freedom Index. The situation can be good, satisfactory, noticeable problems, difficult, or very serious

Dari statistik di atas dapat disimpulkan, bahwa dari 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, kelimanya tidak sepenuhnya bebas (*freedom*), umumnya hanya memiliki sebagian kebebasan (*partly free*). Termasuk dalam kelompok ini negara yang belum bergabung dengan ASEAN, yaitu Timor Leste. Sedangkan negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) serta Brunei

¹⁰ <http://debbyrizqie109.wordpress.com/2011/06/27/kajian-ham-di-asia-tenggara/> diakses tgl 14 Juni 2016.

¹¹ Azmi Sharom et.al. *Human Rights in Southeast Asia*. SEAHN, Sida, Raoul Wallenberg Institute, p. 75-76.

Darussalam, yang belakangan bergabung dengan ASEAN, umumnya dikategorikan sebagai negara yang tidak bebas (*not free*).

Di lingkungan ASEAN, dua negara yang menghadapi pelanggaran HAM Berat antara lain adalah Thailand dan Philipina. Ke dua negara tersebut menghadapi situasi konflik antara kelompok minoritas Muslim dan kelompok mayoritas non-Muslim. Di Thailand Selatan timbul konflik antara penguasa, yang beraliran Budha, dengan rakyat yang umumnya adalah Muslim. Demikian juga di Philipina Selatan antara penguasa, yang beraliran Kristen/Katholik dengan rakyat yang umumnya adalah Muslim. Menurut Gordon P. Means (2009), Thailand menghadapi gerakan separatis dari minoritas Muslim yang terpusat di Thailand Selatan. Kelompok ini memiliki kesamaan identitas dengan etnis dan agama saudara-saudara mereka yang berada di perbatasan dengan Malaysia. Sebagian Muslim menerima kenyataan hidup sebagai minoritas di lingkungan Thailand, sedangkan yang lainnya menentang segala upaya untuk membaurkan mereka ke dalam sistem politik dan sosial di Thailand.¹² Kelompok ini, yang mengalami tekanan ekonomi dan politik, memperoleh simpati dari saudara-saudara mereka di Malaysia, yang berdiam di sepanjang perbatasan. Intensitas kekerasan semakin menjadi setelah pemerintah Thaksin gagal untuk mengatasi para demonstran. Lebih dari 4000 orang telah tewas akibat kekerasan yang berlangsung sejak tahun 2004, yang dikhawatirkan akan memburuk menjadi perang saudara yang berkepanjangan.¹³

Sedangkan di Philipina, menurut N. Ganesan dan Ramses Amer (2010), Philipina memberikan peluang kepada pihak luar, yaitu Organisasi Konperensi Islam (OKI) untuk memainkan peranan kunci dalam mengatasi konflik dengan salah satu faksi dari separatis Muslim, yaitu *Moro National Liberation Front* (MNLF). Bahkan Philipina mengundang pula Malaysia untuk menjadi penengah perundingan damai dengan kelompok separatis lainnya, *Moro Islamic Liberation Front* (MILF).¹⁴ Sesungguhnya hubungan antara Philipina dan Malaysia tidak selamanya harmonis. Sengketa Sabah, yang melibatkan ke dua negara, merupakan krisis politik-keamanan pertama yang dihadapi oleh ASEAN, yang dipicu oleh insiden pembantaian Jabidah, di mana sejumlah peserta pelatihan Muslim Philipina terbunuh.¹⁵

¹² Gordon P. Means, *Political Islam in Southeast Asia* (Selangor, Malaysia: Strategic Information and Reserach Development Centre, 2009), 149.

¹³ N. Ganesan and Ramses Amer, *International Relations in Southeast Asia. Between Bilateralism and Multilateralism* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 152.

¹⁴ *Ibid*, 226.

¹⁵ *Ibid*, 231.

Piagam ASEAN

Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) ini diakui oleh ASEAN, sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN, sebagai salah satu prinsip yang paling penting dan utama. Piagam ASEAN, baik Pasal 1 tentang Tujuan maupun Pasal 2 tentang Prinsip mencantumkan mengenai "memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN" serta "menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia".¹⁶ Menurut Bantarto Bandoro, integrasi kawasan Asia Tenggara tidak bisa terlihat terpisah dari keberadaan Piagam ASEAN. Piagam ini akan menjadi basis hukum bagi proses integrasi kawasan dan berperan sebagai semacam pemandu ASEAN dalam membangun komunitas Asia Tenggara yang bertumpu pada tiga pilar, yaitu politik-keamanan, ekonomi, dan sosial.¹⁷ Pentingnya Piagam ASEAN ini dibenarkan pula oleh Sjamsul Arifin, Rizal A. Djaafara dan Aida S. Budiman dengan menyatakan bahwa penandatanganan Piagam ASEAN menjadi prasasti hasil evolusi dari kerjasama yang bersifat "persaudaraan" menjadi organisasi yang berdasarkan suatu kerangka yang lebih kohesif berlandaskan *rule based framework*.¹⁸

Selama 15 tahun terakhir, keterlibatan ASEAN dengan Hak Asasi Manusia ditandai dengan tumbuhnya ketimpangan identitas. Saat ini HAM dilembagakan dalam Piagam ASEAN, dan di atas kertas, diawasi oleh ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). Hak-hak ini telah disebutkan dalam ASEAN *Human Rights Declaration*, dicetuskan November 2012. Ketimpangan identitas tersebut tidak memungkinkan bagi negara-negara anggota ASEAN, sebagai kelompok, untuk memperdebatkan norma-norma hak asasi, mengingat norma-norma tersebut telah dikonversi sebagai kehendak moral.¹⁹

Berbagai prinsip-prinsip penting mengenai HAM yang tercantum dalam Piagam PBB, juga termuat dalam Piagam ASEAN. Apabila dikaitkan dengan Piagam PBB, maka Piagam PBB menyebutkan bahwa salah satu tujuan

¹⁶ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *ASEAN Charter, PIAGAM ASEAN*, 2007. Jakarta: Kementerian Luar Negeri, h. 4,7.

¹⁷ Bantarto Bandoro, *Masa Depan ASEAN Bukan Ilusi*, Harian Seputar Indonesia, 3 Maret 2009.

¹⁸ Syamsul Arifin/Rizal A. Djaafara/Aida S. Budiman, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* (Jakarta: PT Elex MediaKomputindo, 2008), 13.

¹⁹ Mathew Davies, "ASEAN and human rights norms: constructivism, rational choice, and the action-identity gap," *International Relations of the Asia-Pacific*, Advance Access published March 19, 2013.

terpenting dari didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memajukan dan melindungi serta menghormati Hak Asasi Manusia.²⁰

Komunitas ASEAN 2015

Melalui pengalaman ASEAN di bidang politik dan keamanan, menghadapi berlangsungnya Perang Dingin antara blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Sosialis (Uni Soviet), ASEAN telah berperan dengan berusaha menciptakan perdamaian, stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara melalui berbagai gagasan seperti pertama, ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*, 1971) dan SEANWFZ (*South East Asia Nuclear Weapons Free Zone*, 1995). Kedua, dengan semakin luasnya kerjasama ASEAN dengan berbagai negara di luar kawasan, termasuk negara-negara besar, maka dibentuklah Mitra Wicara ASEAN. Bahkan, ketiga, ASEAN berhasil membentuk ARF (*ASEAN Regional Forum*, 1993) yang merupakan forum konsultasi politik dan keamanan antara ASEAN dan ke 17 negara peserta ARF. Keempat, ASEAN semakin mengokohkan organisasinya dengan bertekad untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang mencakup Komunitas Politik dan Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial-Budaya (*ASEAN Community*, 2015).²¹

Berkaitan dengan Stabilitas dan Perdamaian di lingkungan ASEAN, nampaknya sulit untuk diwujudkan selama masih berlangsung konflik etnis dan konflik agama antar negara atau di lingkungan internal negara ASEAN. Menarik pernyataan akhir-akhir ini dari Presiden Philipina, Rodrigo Duterte bahwa semua pasukan Amerika Serikat harus hengkang dari wilayah selatan negaranya. Duterte menganggap tentara AS telah mengobarkan ketegangan dengan penduduk Muslim di Philipina selatan. Alasannya, perdamaian tidak pernah tercipta selama lebih dari satu abad di wilayah itu sejak adanya pasukan AS. Dia mengatakan bahwa masalah itulah yang menyebabkan periode panjang kebencian dari minoritas penduduk Muslim terhadap mayoritas umat Katolik di wilayahnya. Selama kita tinggal dengan Amerika, kita tidak akan pernah memiliki damai di negeri itu, ucap Duterte.²²

Di samping memiliki Piagam, ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang beranggotakan 10 negara, mencita-citakan pula terwujudnya Komunitas ASEAN, sesuai dengan kesepakatan *Declaration of ASEAN Concord II* (2003) yang dicanangkan akan menjadi kenyataan tahun 2015. Menurut Rodolfo C.

²⁰ *UN Charter*, New York, United Nations Publications, 1945.

²¹ Ditjen KS ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, Kemlu, 2010.

²² www.mediapribumi.com/2016/09/heboh-duterte-usir-tentara-amerika.html, diakses 15 september 2016.

Severino (2006), inti dari Komunitas ASEAN adalah Komunitas Sosial-Budaya, apabila dianggap Komunitas Sosial-Budaya merupakan *a vehicle* untuk terbinanya kesamaan identitas, membangun kesadaran regional serta memajukan saling pengertian di kalangan rakyat ASEAN.²³

Responsibility to Protect

Konsep tentang Kewajiban untuk Melindungi (*Responsibility to Protect*) berakar dari sejumlah prakarsa yang dikembangkan pada 1990an sebagai jawaban terhadap kegagalan masyarakat internasional untuk mencegah genosida dan pembunuhan massal yang terjadi di Rwanda dan Bosnia, dan kegagalan untuk melindungi warga sipil dari kejahatan massal di bagian dunia yang lain. Krisis ini juga menciptakan krisis global berupa *internal displacement*, hingga tidak saja dua puluh juta orang diusir paksa dari tempat tinggal mereka, tetapi mereka juga tidak mampu untuk mengklaim hak perlindungan mereka yang diatur oleh Hukum Pengungsi Internasional (*International Refugee Law*) karena mereka tidak melintasi perbatasan internasional. Mencermati bahwa kegagalan untuk melindungi masyarakat dari genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional, Sekretaris Jendral PBB saat itu, Kofi Annan, menantang Majelis Umum PBB untuk menjalankan kewajibannya seraya tetap mematuhi prinsip-prinsip lainnya seperti kedaulatan negara. Dengan judul '*Responsibility to Protect*', paragraf 138-140 Dokumen Hasil KTT Dunia mendeklarasikan bahwa :

138. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan. Kewajiban ini mencakup pencegahan kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk faktor-faktor penyebabnya, melalui tindakan yang tepat dan perlu. Kami menerima tanggung jawab tersebut dan akan bertindak sesuai dengan tanggung jawab tersebut. Masyarakat internasional, sebagaimana layaknya mendorong dan membantu negara untuk menjalankan kewajibannya dan mendukung PBB dalam membentuk suatu kemampuan peringatan dini.

139. Komunitas internasional, melalui PBB, juga memiliki kewajiban untuk menggunakan diplomasi yang tepat, berprikemanusiaan dan cara-cara damai lainnya, sesuai dengan Bab VI dan VIII Piagam PBB, untuk melindungi masyarakat dari kejahatan perang, pembantaian etnis dan

²³ Severino, Rodolfo C, *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006), 368.

kejahatan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, kami siap mengambil tindakan kolektif, pada saat dan situasi yang menentukan, melalui Dewan Keamanan, dan sesuai dengan Piagam, termasuk Bab VII, atas dasar kasus-demi-kasus dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi regional yang relevan, dalam hal upaya damai sudah tidak memadai serta otoritas nasional secara nyata gagal untuk melindungi masyarakat mereka dari genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan. Kami menekankan perlunya Majelis Umum untuk melanjutkan pertimbangan mengenai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan berikut dampaknya, dengan mengingat kembali prinsip-prinsip Piagam dan hukum internasional. Kami juga memiliki komitmen, bila perlu dan layak untuk membantu negara-negara mengembangkan kemampuannya untuk melindungi masyarakatnya dari genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan, sebelum krisis dan konflik meletus.²⁴

Penerapan Responsibility to Protect (R2P) di Asia Tenggara dapat menciptakan suatu kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Komunitas ASEAN yang “saling berbagi dan peduli”, seperti yang dicita-citakan oleh negara-negara anggota Asosiasi yang dapat dicapai pada 2015. R2P tidak hanya berdasarkan hukum internasional dan komitmen global, yang dilakukan pada tingkat PBB oleh pemerintah-pemerintah di kawasan, tetapi juga dari komitmen yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN satu sama lain. Konsep dan norma-norma Kewajiban untuk Melindungi ini adalah sesuai dengan visi ASEAN yaitu perdamaian, keadilan, demokrasi, *people-centered* dan komunitas Asia Tenggara yang peduli. Untuk itu, Kewajiban untuk Melindungi ini membuka jalan bagi ASEAN menuju perwujudan visinya atas komunitas yang saling berbagi dan peduli di Asia Tenggara dan mendukung tanggung jawab ASEAN untuk menjaga dan memberikan perlindungan untuk masyarakatnya sendiri.²⁵

Pelanggaran HAM Berat oleh rezim Khmer Merah di Kamboja

Pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam 2 hal, yaitu Pelanggaran HAM biasa dan Pelanggaran HAM berat. Tulisan ini khusus akan meneliti pelanggaran HAM Berat di Kamboja. Hal ini semakin penting setelah diterimanya nilai-nilai HAM oleh ASEAN dan sejak 2009 nilai-nilai HAM

²⁴ Report of the High-Level Advisory Panel on the Responsibility to Protect in Southeast Asia “*Mainstreaming the Responsibility to Protect in Southeast Asia: Pathway Towards a Caring ASEAN Community*”, h.7.

²⁵ *Idem*, h.1.

tersebut secara resmi dicantumkan dalam Piagam ASEAN. Piagam merupakan panduan bagi negara-negara ASEAN dalam menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN. Kamboja menghebohkan dunia ketika komunis radikal Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot memproklamkan Kamboja sebagai sebuah negara baru. Ia menyebut tahun 1975 sebagai “Year Zero”. Segala sesuatunya ingin dibangun dari titik nol. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (*Liberation Day*) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Ternyata, pembebasan yang dijanjikan Pol Pot justru merupakan awal masa kegelapan bagi rakyat Kamboja. Saloth Sar, adalah nama kecil Pol Pot. Pada 1949, dengan bekal kefasihan berbahasa Perancis dan memiliki hubungan yang luas, Saloth Sar memperoleh beasiswa untuk studi di bidang radio dan elektro di Paris. Pada 1952 ia bergabung dengan Partai Komunis Perancis, karena tertarik akan sikap partai yang anti kolonial. Setelah Kamboja merdeka, Saloth Sar bekerja secara rahasia dalam suatu gerakan komunis. Ia menikmati kegiatan politik di bawah tanah dan membayangkan suatu saat akan berkuasa. Pada tahun 1963 ia mendirikan dan memimpin Partai Komunis Kamboja. Karena takut ditangkap polisi, ia meninggalkan Phnom Penh dan mencari tempat pengungsian bersama teman-temannya di markas militer Vietnam, yang bernama “Office 100” di perbatasan Kamboja-Vietnam. Pada 1965, Saloth Sar dipanggil ke Vietnam oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Le Duan, yang meminta Saloth Sar untuk menomorduakan kepentingan Kamboja, dan mendahulukan membantu Vietnam untuk mengalahkan AS, serta menunda perlawanan bersenjata sampai waktunya tepat.

Tidak lama setelah itu, Saloth Sar berkunjung ke Cina dan disambut dengan hangat oleh pejabat-pejabat Cina yang radikal. Terinspirasi oleh tahap awal dari Revolusi Kebudayaan, Saloth Sar tertarik pada model revolusi yang lebih bersemangat. Kunjungannya ke Cina merupakan titik balik dari perjalanan karirnya. Secara bijaksana ia tidak menyampaikan kepada pihak Vietnam mengenai perubahan dirinya yang bersikap dan berhaluan pro-Cina. Setelah kembali ke Kamboja, ia kemudian mendirikan pusat komando di daerah perbatasan yang berada di tengah hutan lebat. Dalam waktu 4 tahun kemudian, bersama teman-teman seperjuangan, ia mengemas idea utopianya dan memelihara perasaan bencinya terhadap pemerintahan Phnom Penh. Kesempatan terbuka, ketika Pangeran Sihanouk digulingkan oleh tentara Kamboja pimpinan Lon Nol yang didukung Amerika Serikat. Komunis Vietnam kemudian menyatukan diri dengan pasukan Pol Pot untuk melawan rejim baru Pnom Penh. Pihak Vietnam memberikan senjata dan pelatihan kepada pasukan Pol Pot. Ketika pasukan Vietnam mundur tahun 1972, Pol Pot merasa dikhianati. Namun kemudian, pasukan Phnom Penh berhasil dipukul mundur

dan pasukan Pol Pot berubah menjadi kekuatan gerilya yang tangguh. Perang berhenti pada 1975, ketika pasukan Pol Pot menduduki Phnom Penh dan mulai berkuasa di Kamboja.²⁶

Masa empat tahun Pol Pot dan Khmer Merah berkuasa di Kamboja, adalah masa yang membuat seluruh dunia geger. Khmer Merah berupaya mentransformasi Kamboja menjadi sebuah negara Maois dengan konsep agrarianisme. Kamboja diputus hubungannya dengan luar negeri. Inilah kejahatan manusia terbesar dengan pembantaian jutaan warga yang tidak berdosa yang dikenal dengan Pembunuhan Massal Kamboja. Rezim Khmer Merah dalam kurun waktu tersebut diperkirakan telah membantai sekitar dua juta orang Kamboja. Ada sekitar 343 "ladang pembantaian" yang tersebar di seluruh wilayah Kamboja. Choeung Ek adalah "ladang pembantaian" paling terkenal. Sebelum dibunuh, sebagian besar mereka didokumentasikan dan diinterogasi di kamp penyiksaan Tuol Sleng.²⁷

Hussin Muthalib dalam *Islam in Southeast Asia* menulis, jumlah Muslim Kamboja pada 1974 sebanyak 550 ribu. Sebagian besar terkonsentrasi di utara Phnom Penh, Provinsi Kompong, dan sepanjang Sungai Mekong. Jumlah itu berkurang drastis pada masa Khmer Merah. Salah satu versi menyebut, 70 persen dari total populasi Muslim dibantai. Sementara, menurut data *Minority Rights Group International*, sepertiga Muslim tewas di bawah kekuasaan rezim. Tidak dimungkiri, kekuasaan Khmer Merah menjadi sejarah kelam umat Islam Kamboja. Rezim Khmer Merah menghapus undang-undang keberagaman di Kamboja. Yang menderita tak hanya umat Islam, tapi juga umat beragama lain. Kekejaman meluas. Di bawah rezim Khmer Merah, semua agama dilarang. Tempat-tempat ibadah dan literatur keagamaan hancur. Khmer Merah melakukan penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, serta pembakaran Alquran. Seng Kuoy, saksi sejarah dari etnis Khmer, mengisahkan, kaum Cham di desa-desa tetangganya dipaksa untuk meninggalkan agama mereka.²⁸ Kehidupan beragama dilarang. Pagoda-pagoda dihancurkan secara sistematis. Kebijakan Pengosongan Kota oleh DK dilatarbelakangi pula oleh kenyataan bahwa kota-kota khususnya Phnom Penh adalah tempat kaum penindas (aristokrat dan tuan tanah) yang dianggap rakus, suka memeras, korup dan menjadi kaki tangan kapitalis asing. Tindakan eksekusi rejim Pol Pot terhadap mereka yang dianggap musuh revolusi dikategorikan sebagai Eksekusi Tanpa

²⁶ Nazaruddin Nasution, *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja*, KBRl Phnom Penh, 2002. h.69-71.

²⁷ <https://www.karnadilim.com/pembunuhan-massal-di-kamboja/>, diakses 3 Oktober 2016

²⁸ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/10/12/nw3yi9313-periode-kelam-muslim-champa-di-era-pol-pot>, diakses 3 Oktober 2016

Pengadilan Terbuka (*Summary Execution*). Eksekusi ini ditujukan kepada para mantan pejabat tinggi pemerintah, dan perwira militer rejim Lon Nol.²⁹

Selama pemerintahan Khmer Merah, Kamboja memutuskan hubungannya dengan kawasan dan dengan dunia luar, kecuali dengan Cina dan beberapa negara lain. Rejim Pol Pot tidak memiliki minat sama sekali dengan ASEAN, berdasar sikapnya yang mengasingkan diri dan sangat menentang pengaruh dari luar. Ada 5 alasan yang merupakan parameter kebijakan luar negeri yang menjelaskan sikap Kamboja terhadap ASEAN. Pertama, pemikiran strategis Khmer Merah yang bersifat destruktif dan mengasingkan diri ("isolasionist"). Hal ini dilatarbelakangi oleh sikapnya yang sangat curiga terhadap pihak luar dan pemikirannya yang *xenophobic*. Dengan kebijakannya yang sangat radikal komunis serta keberpihakannya kepada Cina, hal ini tidak memberikan peluang bagi Kamboja untuk bergabung dengan ASEAN. Kedua, faktor ekonomi tidak menopang bagi kesejahteraan rakyat maupun posisi pemerintahan Khmer Merah. Khmer Merah memaksa setiap rakyat Kamboja untuk bekerja di pertanian komunal. Kota-kota dikosongkan, dan seluruh penduduk yang tersisa dipaksa menjadi bagian dari suatu revolusi agraria. Ketiga, faktor diplomatik mempengaruhi Khmer Merah. Berbeda dengan pemerintahan Lon Nol, Khmer Merah tidak memberikan prioritas sama sekali terhadap kerangka kebijakan luar negerinya berkaitan dengan diplomasi dan hubungan internasional. Khmer Merah hanya memiliki hubungan diplomatik dengan beberapa negara, yaitu Cina, Vietnam dan Swedia. Keempat, tidak ada sama sekali pertimbangan "prestige" bagi pemerintah Khmer Merah. Rejim ini tidak peduli tentang citra publik dan reputasi negaranya. Kelima, Khmer Merah tidak memberikan perhatian sama sekali kepada faktor legitimasi, akibat disibukkan oleh masalah dalam negeri, hingga tidak memiliki hubungan positif, baik dengan Thailand maupun Vietnam.³⁰

Pada 1977, Pol Pot berkunjung ke Cina dan dijanjikan untuk diberikan bantuan militer guna melawan Vietnam. Pada 1978, ia meminta Cina untuk mengirimkan tentaranya guna membantunya, namun Cina menolak. Ketika Vietnam menyerang Kamboja dengan mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan, Pol Pot melarikan diri ke Thailand. Selama 18 tahun kemudian, ia tinggal di perkemahan di Thailand dan bagian utara Kamboja dan mendapat perlindungan dari kekuatan militer Thailand dan sisa-sisa tentara pendukungnya. Pada 1996, Ieng Sary, ipar Pol Pot, yang pernah menjabat

²⁹ Nazaruddin Nasution, *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja*, KBRI Phnom Penh, 2002. h. 77-78.

³⁰ Kao Kim Hourn, *Cambodia's Foreign Policy and ASEAN*, CICIP, 2002, p. 33-40.

sebagai Menteri Luar Negeri semasa pemerintahannya, menyerahkan diri kepada pemerintah Phnom Penh. Hal ini kemudian diikuti oleh ribuan tentara pengikutnya. Sisa gerakan Komunis selanjutnya dipimpin oleh pemimpin militer veteran, Ta Mok. Ta Mok adalah orang yang menangkap Pol Pot setelah Pol Pot memerintahkan untuk membunuh anak buah Ta Mok. Pada 15 April 1998, Pol Pot mendengar melalui siaran Radio Suara Amerika bahwa Ta Mok merencanakan untuk membawanya ke AS untuk diadili. Beberapa saat kemudian, ia memberitahu istrinya bahwa ia merasa pingsan, lalu berbaring. Pada pukul 22.00, Pol Pot meninggal. Menurut laporan, ia terkena serangan jantung. Namun ada kemungkinan ia bunuh diri.³¹

PBB merupakan bagian dari masalah dan solusi bagi tragedi Kamboja. Tumbangnya rejim genosida Khmer Merah oleh tentara Vietnam dan pasukan pemberontak Kamboja pada Januari 1979 tidak mengakhiri tragedi tersebut. PBB, Cina dan ASEAN dengan menuduh Vietnam melakukan invasi ke Kamboja, setiap tahun telah mempelopori dikeluarkannya Resolusi PBB yang tetap mengakui rejim Khmer Merah sebagai wakil Kamboja dan pemerintah *de facto* di Kamboja, dan bukan *People's Republic of Kamboja* yang didirikan oleh para pemberontak Kamboja. Situasi buntu ini terus berlanjut hingga 1980an saat Kamboja diperlakukan sebagai negara paria dengan pihak Barat melarang segala bantuan ke Kamboja – hingga memperpanjang penderitaan rakyat Kamboja untuk dasawarsa berikutnya. Hal tersebut hanya bisa diatasi dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Paris pada 23 Oktober 1991, yang menetapkan bahwa PBB lah yang mengawasi pemerintahan di Kamboja hingga dilaksanakannya pemilihan umum. *The United Nations Transitional Authority on Cambodia* (UNTAC) dibentuk untuk melaksanakan Perjanjian Paris.³²

Kamboja adalah negara di kawasan yang merupakan subyek dari banyak intervensi yang berasal dari luar, tidak hanya ASEAN, tetapi yang lebih penting adalah kekuatan dari luar kawasan, khususnya Cina, AS dan bekas Uni Soviet. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ASEAN menanggapi secara kolektif terhadap krisis regional, yaitu intervensi Vietnam ke Kamboja pada akhir 1978. Seraya menyuarakan penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja, ASEAN "sangat menyesalkan intervensi bersenjata terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Kamboja". Meskipun intervensi Vietnam di Kamboja menimbulkan sejumlah isu-isu penting, seperti pengertian "humanitarian intervention" dalam kasus genosida, penggunaan kekerasan

³¹ Nazaruddin Nasution, *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja*, KBRI Phnom Penh, 2002. h. 71-72.

³² Benny Widoyo, *Dancing in Shadows*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, New York, 2008, p.4.

dalam hubungan antar negara dan pentingnya untuk mematuhi hukum internasional, ASEAN berpendapat bahwa intervensi Vietnam di Kamboja tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan Kamboja. Karenanya, ASEAN menyerukan dengan sangat agar Vietnam menarik pasukannya keluar dari negara tersebut. Sebaliknya, Vietnam berpendapat intervensi itu adalah untuk membebaskan rakyat Kamboja dari rejim genosida Democratic Kampuchea, atau seperti yang lebih dikenal, Khmer Merah.³³ Perang dan konflik berlangsung selama 22 tahun di Kamboja, mengiringi kudeta pada tahun 1970, yang menghapuskan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Hal ini telah mendatangkan kehancuran dengan musnahnya ¼ penduduk Kamboja, pertama dan terutama kalangan elit dan terpelajar, yang menjadi korban praktek genosida dari rejim Khmer Merah. Selain itu, dampaknya sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara tersebut dengan isolasi secara internasional yang dihadapi oleh Kamboja, pada saat Kamboja sangat membutuhkannya.³⁴

Pembentukan Khmer Rouge Tribunal

Hun Sen telah berkuasa di Kamboja sejak 1980, saat Vietnam menduduki Kamboja (akhir 1979) dan mengangkatnya sebagai pejabat Pemerintahan Sementara Kamboja dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri. Untuk memperoleh dukungan masyarakat internasional, dan dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, Hun Sen mendirikan dua museum, yaitu *Museum Killing Fields* dan *Museum Toul Sleng*. Museum Killing Fields didirikan di kota Phnom Penh, di lapangan terbuka di mana rezim Pol Pot melakukan pembantaian massal. Tengkorak kepala dari korban-korban pembantaian itu diabadikan di museum tersebut. Tengkorak disusun secara bertingkat dari bangunan paling bawah museum hingga bangunan paling atas. Ribuan tengkorak kepala tersusun di museum tersebut untuk mengingatkan banyaknya korban yang dibantai oleh rezim Pol Pot. Korban kekejaman rezim Khmer Rouge tersebut, terdiri dari 3 kelompok, yaitu: bangsawan, cendekiawan dan rohaniwan. Diperkirakan sekitar 1,7 juta orang Kamboja, yang termasuk dalam ke-3 kategori tersebut telah disiksa dan dibunuh oleh rezim Pol Pot.

Tujuan dari didirikannya *Museum Killing Fields* di Choeung Ek adalah :

- a. Mendidik orang-orang Amerika, orang-orang Kamboja keturunan Amerika dan bangsa-bangsa lain tentang sejarah faktual dari kekejaman Khmer

³³ Kao Kim Hourn, *ASEAN's Non-Interference Policy: principles under pressure*, ASEAN Academic Press, London, 2000, p. 53-54.

³⁴ Kao Kim Hourn and Jeffrey A. Kaplan, *Dynamo or Dynamite ? Cambodia's Future in ASEAN*, ASEAN Academic Press, London, 1999, p. 125.

Merah dan membantu untuk mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan di masa depan.

- b. Memberikan para siswa, akademisi, wartawan dan akses publik terhadap informasi, foto, artefak dan dokumen yang berhubungan dengan kekejaman (*holocaust*) tersebut.
- c. Memberikan penghargaan dan selalu mengingat para korban maupun mereka yang selamat dari kekejaman *holocaust* Khmer Merah.
- d. Membantu melestarikan seni dan sastra Kamboja, yang hampir padam oleh kebijakan Khmer Merah melalui pameran, pertunjukan dan kuliah.
- e. Menyajikan sebagai jaringan penggalangan dana untuk proyek-proyek kemanusiaan, budaya dan pendidikan yang bermanfaat bagi orang-orang Kamboja, orang-orang Kamboja keturunan Amerika serta masyarakat pada umumnya. Museum lainnya disebut sebagai *Tuol Sleng Museum of Genocide*. Museum ini adalah bangunan dari sebuah Sekolah Menengah di Phnom Penh yang diubah menjadi sebuah rumah penahanan dan penyiksaan pusat dari Khmer Merah. Disebut sebagai S-21, Tuol Sleng Museum Kejahatan Genosida ini menampilkan pameran dan foto-foto kekejaman rejim Khmer Merah.

Berawal dengan tahun 1999, sejumlah pakar PBB menulis laporan yang menyerukan dibentuknya suatu pengadilan internasional untuk Kamboja, mengutip peradilan Kamboja yang kurang independen dan gagal untuk memperoleh kepercayaan publik. Laporan tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Menlu Kamboja, Hor Nam Hong pada saat penerimaan resmi Kamboja sebagai anggota ke-10 ASEAN 30 April 1999 menegaskan bahwa sebagai anggota ASEAN, Kamboja berjanji untuk memenuhi seluruh tanggung jawabnya sebagai anggota sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan yang tercantum dalam dokumen utama ASEAN. Kamboja secara ketat mentaati sikapnya yang senantiasa netral, tidak memihak, bersahabat dan bekerjasama secara aktif di berbagai fora serta hidup berdampingan secara damai dengan semua negara di dunia.³⁵

Pada bulan Mei 2000, PBB dan Kamboja sepakat untuk membentuk peradilan "campuran" kejahatan perang, dengan mencakup baik hakim dan jaksa Kamboja maupun internasional. Kesepakatan tersebut kemudian dicantumkan dalam hukum Kamboja. Pada tahun 2001, pemerintah Kamboja mengesahkan undang-undang baru yang membentuk Kamar Luar Biasa ("Extraordinary Chambers") di dalam sistem pengadilan Kamboja untuk

³⁵ Kao Kim Hourn, *ASEAN-10 is Born, Commemorating Cambodia's Entry into ASEAN*, CICP, 1999, p. 49.

mengadili para mantan pemimpin Khmer Merah. Dalam perkembangan selanjutnya, Hans Corell, Penasehat Hukum PBB dalam konperensi pers pada 8 Februari 2002 di PBB New York, menyatakan bahwa PBB memutuskan untuk menarik diri dari rencana pembentukan pengadilan bagi para mantan pemimpin Khmer Merah, karena UU Pengadilan Kamboja yang ada "tidak akan menjamin independensi, netralitas, dan objektivitas dari pengadilan Kamboja yang menjadi syarat bagi keikutsertaan dan dukungan PBB". Pemerintah Kamboja menolak untuk menyetujui MOU yang mengatur formasi dan pelaksanaan pengadilan tersebut (direncanakan hakim terdiri dari gabungan hakim asing dan hakim nasional). Sedangkan PBB menurut Hans Corell tidak dapat mengikatkan diri pada suatu hukum nasional.³⁶

Namun, pada akhir tahun 2003, akhirnya disepakati Agreement antara Pemerintah Kamboja dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembentukan suatu Peradilan Hak-Hak Asasi Manusia terhadap tokoh-tokoh yang bertanggung jawab se masa rejim Pol Pot berkuasa berupa kejahatan yang dilaksanakan secara berencana dan sistematis. Pemerintah Kamboja di bawah PM Hun Sen merencanakan untuk menggelar peradilan terhadap para mantan pemimpin DK (Khmer Merah) atas tuduhan kejahatan perang, *genocidal* dan kejahatan kemanusiaan pada masa pemerintahan Democratic Kampuchea di bawah Pol Pot (1975-1979). Penggelaran Peradilan Khmer Merah tersebut diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan sekaligus memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban kejahatan Khmer Merah serta menutup lembaran hitam Kamboja masa lalu (dikenal sebagai "*Killing Fields*"). Pemerintah Kamboja menyatakan secara tegas bahwa hukum Kamboja akan berlaku terhadap semua perjanjian yang dibuat antara pemerintah Kamboja dengan PBB mengenai peradilan terhadap Khmer Merah tersebut. UU Peradilan Khmer Merah ini telah disetujui oleh Majelis Nasional dan Senat Kamboja serta disahkan oleh Raja. Rancangan awal yang merujuk kepada hukuman mati dirubah atas usul Komisi Konstitusi, karena tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi Kamboja.³⁷

Peradilan tersebut disebut *Khmer Rouge Tribunal*. Peradilan Khmer Merah (Khmer Rouge Tribunal) dalam persidangannya selama 8 tahun ini mengadili empat kasus besar :

1. Kasus 001 terdakwa Kaing Guek Eav, yang lebih dikenal dengan nama Kamerad Duch, mantan Kepala Penjara S-21 di Phnom Penh, dihukum

³⁶ *Ibid*, h. 214.

³⁷ Nazaruddin Nasution, *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja*, KBRI Phnom Oenh, Kamboja, 2002, h. 213.

penjara seumur hidup karena bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berkaitan dengan lebih dari 15.000 kematian. Dia saat ini menjalani hukumannya.

2. Kasus 002 dengan empat orang terdakwa:
 - a. Nuon Chea (87 tahun), adalah tangan kanan Pol Pot dan dikenal sebagai "nomor saudara 2."
 - b. Khieu Samphan (82 tahun), adalah mantan Kepala Negara.
 - c. Ieng Sary, mantan Menteri Luar Negeri. Namun yang bersangkutan meninggal, sehingga proses hukumnya tidak dilanjutkan.
 - d. Ieng Thirit, isteri Ieng Sary, seorang yang dikenal sebagai salah seorang tokoh senior rezim Pol Pot. Dinyatakan tidak layak secara mental untuk diadili.
3. Sedangkan Kasus 003 dan 004, tidak pernah diungkapkan, meskipun nama-nama terdakwa tersebut sempat beredar.³⁸

Meski tidak begitu lama Pol Pot berkuasa, tetapi luka mendalam rakyat Kamboja masih terasa sampai sekarang. Apalagi kekejaman Khmer Merah di Kamboja kembali diungkap di Pengadilan Kamboja. Rakyat Kamboja seakan-akan dibawa ke masa lalu ketika Khmer Merah berkuasa. Adalah Meas Sokha (55), Rabu, 21 Januari 2015 memaparkan kembali tindakan kejam, termasuk praktik kanibalisme, yang dilakukan personel Khmer Merah di penjara. Meas berbicara sebagai saksi atas terdakwa Nuon Chea (88), tokoh Khmer Merah yang dikenal sebagai "Saudara Nomor Dua," dan mantan kepala negara Khieu Samphan (83). Mereka diadili atas tuduhan kejahatan genosida terhadap 100.000 hingga 500.000 warga etnis minoritas Muslim Cham serta 20.000 orang Vietnam di Kamboja saat itu. Meas pernah mendekam di sebuah penjara yang didirikan Khmer Merah, yakni penjara Kraing Ta Chan, di Provinsi Takeo, sekitar 80 kilometer selatan ibu kota Phnom Penh. "Saat sedang mengurus kerbau dan sapi," ujarnya "ia melihat sendiri bagaimana para tahanan dibunuh. Kebanyakan dengan cara dipenggal. Dua penjaga (Khmer Merah) memegang tahanan, sementara seorang lagi mengeksekusinya," ujar Meas. Ia mengungkapkan, saat mengeksekusi tahanan, para penjaga menyetel musik keras-keras untuk menyamarkan jeritan orang yang dibunuh. Meas ketika itu menjadi tahanan bersama 11 anggota keluarganya. Menurut Meas, praktiknya kanibalisme dilakukan penjaga penjara. Terdapat pula anak-anak dan bayi.³⁹

³⁸ <http://time.com/6997/cambodias-khmer-rouge-trials-are-a-shocking-failure/>, diakses 22 Oktober 2016

³⁹ http://www.kompasiana.com/dasmandjamaluddin/kekejaman-khmer-merah-terungkap-di-pengadilan_54f35bfd745513792b6c724b, diakses 7 november 2016, 03.30

Agustus tahun lalu, Nuon Chea dan Khieu Samphan divonis hukuman seumur hidup setelah menjalani 2 tahun persidangan untuk kasus kekejaman yang berbeda. Mereka tercatat menjadi tokoh Khmer Merah pertama yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan atas kasus genosida yang dimulai Juli tahun lalu tersebut kerap ditunda beberapa kali karena boikot yang dilakukan oleh penasihat hukum kedua terdakwa. Oleh karena begitu kompleksnya kasus ini, pengadilan memecah ke dalam persidangan kecil pada tahun 2011. Bagaimana pun Pemerintahan Kamboja sekarang ini yang menjadi Anggota ASEAN ke-10 berhasil mendukung mengungkap kekejaman yang dilakukan Khmer Merah.⁴⁰

Peradilan Khmer Merah di Kamboja, yang mencerminkan tekad dan iktikad pemerintah Kamboja untuk melaksanakan penegakan hak-hak asasi manusia terhadap pelanggaran HAM berat pada masa rejim Pol Pot di Kamboja, sekurangnya menunjukkan dua hal. Pertama, Kamboja terpanggil untuk turut melaksanakan Piagam ASEAN berkenaan dengan prinsip-prinsip penting dalam Piagam, yaitu prinsip HAM, demokrasi, *rule of law*, *good governance*. Upaya Kamboja ini dapat dijadikan sebagai model bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk melakukan penegakan HAM di Asia Tenggara, meskipun terdapat kesan bahwa penegakan HAM tersebut dilakukan oleh rejim Hun Sen yang berkuasa saat ini semata-mata sebagai dalih untuk melanggengkan kekuasaannya. Kedua, stabilitas, perdamaian dan harmoni di Asia Tenggara sebagai prasyarat untuk terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 tidak akan mungkin terlaksana apabila negara-negara anggota ASEAN tidak secara konsekuen mengatasi berbagai konflik etnis, konflik agama, konflik sosial, ekonomi dan lain-lain yang menjurus pada pelanggaran HAM biasa atau berat tetap berlangsung di Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

Buku

Arifin, Syamsul/Rizal A. Djaafara/Aida S. Budiman, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* (Jakarta: PT Elex MediaKomputindo, 2008), 13.

⁴⁰ http://www.kompasiana.com/dasmandjamaluddin/kekejaman-khmer-merah-terungkap-di-pengadilan_54f35bfd745513792b6c724b, diakses 7 november 2016, 03.30

- Bandoro, Bantarto. *Masa Depan ASEAN Bukan Ilusi*, Harian Seputar Indonesia, 3 Maret 2009.
- Davies, Mathew "ASEAN and human rights norms: constructivism, rational choice, and the action-identity gap," *International Relations of the Asia-Pacific*, Advance Access published March 19, 2013.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *ASEAN Charter, PIAGAM ASEAN*, 2007. Jakarta: Kementerian Luar Negeri
- Ditjen KS ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, Kemlu, 2010.
- Firnas, M. Adian et.al. *Peranan ASEAN dalam Mendorong Penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar*. JISI, Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Volume 2 Nomor 1, Maret 2015.
- Ganesan, N. and Ramses Amer, *International Relations in Southeast Asia. Between Bilateralism and Multilateralism*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Hourn, Kao Kim, *ASEAN-10 is Born, Commemorating Cambodia's Entry into ASEAN*, CICP, 1999.
- Hourn, Kao Kim, *ASEAN's Non-Interference Policy: principles under pressure*, ASEAN Academic Press, London, 2000
- Hourn, Kao Kim and Jeffrey A. Kaplan, *Dynamo or Dynamite ? Cambodia's Future in ASEAN*, ASEAN Academic Press, London, 1999.
- Hourn, Kao Kim, *Cambodia's Foreign Policy and ASEAN*, CICP, 2002
- Ikhwan SH, M.Ag, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, 2004. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Laqueur, Walther and Barry Rubin, *The Human Rights Reader*, 1989. London: Penguin Books Ltd.
- Means, Gordon P., *Political Islam in Southeast Asia*. Selangor, Malaysia: Strategic Information and Reserach Development Centre, 2009.
- Means, Gordon P. *Political Islam in Southeast Asia* (Selangor, Malaysia
- Muzaffar, Chandra, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Nazaruddin Nasution, *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja*, KBRI Phnom Oenh, Kamboja, 2002.
- Report of the High-Level Advisory Panel on the Responsibility to Protect in Southeast Asia "*Mainstreaming the Responsibility to Protect in Southeast Asia: Pathway Towards a Caring ASEAN Community*"
- Rodolfo, C Severino, *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community* . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006.

Sharom, Azmi et.al. *Human Rights in Southeast Asia*. SEAHN, Sida, Raoul Wallenberg Institute,

UN Charter, New York, United Nations Publications, 1945.

Widyono, Benny, *Dancing in Shadows*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, New York, 2008

Internet

<https://www.karnadilim.com/pembunuhan-massal-di-kamboja>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/10/12/nw3yi9313-periode-kelam-muslim-champa-di-era-pol-pot>

<http://www.mediapribumi.com/2016/09/heboh-duterte-usir-tentara-amerika.html>

<http://debbyrizqie109.wordpress.com/2011/06/27/kajian-ham-di-asia-tenggara/>
diakses tgl 14 Juni 2016.

http://www.kompasiana.com/dasmandjamaluddin/kekejaman-khmer-merah-terungkap-di-pengadilan_54f35bfd745513792b6c724b16, 03.30

<http://time.com/6997/cambodias-khmer-rouge-trials-are-a-shocking-failure>

Laut Indonesia Sebagai Magnet Asia dan Dunia

Sharon Patricia

Universitas Katolik Parahyangan

sharonpatricia95@gmail.com

Abstrak

Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia sebelum masa pemerintahan Joko Widodo dapat diibaratkan seperti raksasa yang sedang tidur panjang. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan di mana luas laut Indonesia mencapai 5.8 km², dikelilingi 17.504 pulau, dengan panjang garis pantai 81.000 km. Indonesia juga merupakan negara yang terletak di antara dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Posisi yang strategis ini memberikan keuntungan bagi Indonesia karena memiliki potensi hasil laut yang besar, seperti udang, ikan, karang, rumput laut, dan mangrove. Selain itu, posisi strategis ini juga menjadi daya tarik bagi negara-negara lain untuk mengadakan kerjasama dengan Indonesia. Namun sampai saat ini, kekayaan laut Indonesia belum dikembangkan secara maksimal dan masih banyak terjadi kerugian akibat dari pencurian ikan.

Oleh karena itu, sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kerjasama mengenai pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing), khususnya dalam hal penguatan kapasitas serta melakukan pertukaran informasi antar negara. Oleh karena itu, tidak hanya dengan negara anggota ASEAN namun bekerja sama juga dengan negara mitra dagang seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Taiwan. Melalui cara ini, Indonesia telah menerapkan politik luar negerinya yaitu bebas dan aktif. Di mana Indonesia bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara mana pun dan juga Indonesia berperan aktif dalam memberikan ide dan solusi yang efektif dalam menangani permasalahan yang ada.

Paper ini juga akan menggunakan kerangka konsep *Comparative Advantage* dari David Ricardo. Konsep yang berasal dari teori ekonomi liberal ini digunakan penulis karena akan membahas mengenai keunggulan produk dari negara-negara anggota ASEAN khususnya Indonesia dalam mengembangkan produk maritimnya. Bahwa meskipun ada negara yang tidak memiliki keunggulan absolut, namun setiap negara pasti memiliki produk lokal dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya.

Sehingga pada akhirnya, setiap negara yang terlibat akan tetap mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Tujuan dari paper ini adalah untuk memberikan pandangan mengenai permasalahan yang terjadi di laut Indonesia dan bagaimana menangani masalah tersebut. Lebih dari itu, paper ini pun akan memberikan ide-ide mengenai pengembangan potensi kekayaan maritim Indonesia untuk dibuat menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi. Sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia melalui kerjasama antar negara anggota ASEAN dan negara mitra dagang yang terlibat.

Kata kunci

Indonesia, ASEAN, politik bebas-aktif, kerjasama maritim, dan *comparative advantage*.

Latar Belakang

Archipelagic State, inilah salah satu sebutan lain bagi Tanah Air Indonesia yang memiliki arti "negara laut yang ditaburi pulau-pulau". Arti ini disampaikan oleh seorang maestro sejarah maritim Asia Tenggara, Adrian Bernard Lopian.¹ Dalam hal ini memanglah benar bahwa Indonesia merupakan "negara laut" dan pulau-pulau yang bertebaran di wilayah laut karena luas wilayah perairan Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia dan terdapat sebanyak 17.504 pulau.² Bukanlah hal yang baru mengetahui fakta ini namun kesadaran dari masyarakat Indonesia belumlah nyata untuk memajukan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itulah, Laut Indonesia dikatakan sebagai "raksasa yang sedang tidur panjang". Hingga terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia periode 2015-2019, maka ada harapan baru yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian Koordinator bidang Maritim dan adanya peningkatan anggaran untuk TNI Angkatan Laut. Kebijakan ini sesuai dalam visinya, di mana Jokowi bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia yang berdaulat, aman dan sejahtera.³

Selain itu, pada 14 Oktober 2014, pemerintah beserta DPR Republik

¹ Agus Prianto, (7 Juni 2016), *Mewujudkan Mimpi Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia*, diakses dari <http://maritim.go.id/mewujudkan-mimpi-indonesia-menjadi-poros-maritim-dunia/>.

² Dody Usodo Hargo, (23 Februari 2016), *Jumlah Pulau di Indonesia*, diakses dari <http://www.dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html>.

³ Giras Pasopati, (12 November 2014), *Inilah Perbedaan Nyata Pemerintahan SBY Dengan JOKOWI*, diakses dari <http://surabaya.bisnis.com/read/20141112/94/75943/inilah-perbe-pemerintahan-sby-dengan-jokowi>.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2015. APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya yaitu dari Rp 5,784,7 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 6,368,7 triliun.⁴ Peningkatan terhadap APBN KKP ini terus dilakukan hingga tahun 2016 ini yang kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 10,57 triliun. Meningkatnya APBN KKP ini telah menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintahan Jokowi ini telah menaruh fokus yang lebih besar terhadap sektor kelautan dan perikanan Indonesia.⁵ Mengenai pemberantasan IUU (*Illegal Unreported Inregulated*) Fishing, Jokowi pun mendasarkan pada Undang-Undang yang mengatur mengenai penenggelaman kapal yang sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ayat (1) dan (4). Aturan dalam ayat (1) berisi,⁶

"Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia."

Selain itu, dalam ayat (4) berbunyi,

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Dalam pemerintahannya ini, Presiden Jokowi ingin memberantas habis praktek *illegal fishing*. Kembali berfokus kepada laut memang menjadi pilihan yang tepat karena untuk menjadi Poros Maritim Dunia, maka Indonesia harus mampu untuk menjadikan laut ini sebagai pusat dari pelayaran dan perdagangan bagi negara-negara lain. Hal ini sangat mungkin untuk direalisasikan karena secara geografis, Indonesia terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera serta memiliki empat *choke points* yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia, meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Keempat *choke points* ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat industri perdagangan dan pelayaran maritim dunia. Letak yang strategis ini tentu saja mengundang negara-negara lain untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Sebagai anggota dari ASEAN, Indonesia

⁴ *Kiara Soroti 65% Anggaran KKP Tidak Pro Pemberdayaan Nelayan*, (6 Januari 2015), diakses dari <http://www.kiara.or.id/kiara-soroti-65-anggaran-kkp-tidak-pro-pemberdayaan-nelayan/>.

⁵ *DPR Sahkan APBN-P 2016 KKP Sebesar Rp 10,57 Triliun*, (28 Juni 2016), diakses dari <http://news.kkp.go.id/index.php/dpr-sahkan-apbn-p-2016-kkp-sebesar-rp-1057-triliun/>.

⁶ *Beberapa Negara Panik, Sabtu Lusa Jokowi Instruksikan Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan*, (4 Desember 2014), diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2014/12/04/beberapa-negara-panik-sabtu-lusa-jokowi-instruksikan-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-695347.html>

terus mempromosikan jati dirinya sebagai Poros Maritim Dunia.⁷

Menyuarakan pentingnya kerjasama maritim ini telah menjadi poin penting yang terus dibahas dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dengan Negara-negara Mitranya, yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, RRT, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Rusia. Hal ini didasarkan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka perlu adanya kerjasama untuk memajukan penjualan produk lokal serta meningkatkan keamanan wilayah dan juga perlu adanya bantuan dari negara-negara lain untuk menyelesaikan permasalahan global yang terjadi seperti pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia atau IUU (*Illegal Unreported Inregulated*) Fishing.⁸

Berdasarkan dari latar belakang ini maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari paper ini adalah **Bagaimana Indonesia dapat Kembali Menjadi Bangsa Pelaut seperti yang dikatakan Presiden RI Pertama, Soekarno?**

Permasalahan

Hanya pohon berbuahlah yang akan dilempari batu, begitu juga dengan Laut Indonesia. Hanya laut yang memiliki banyak kekayaanlah yang akan didatangi oleh "para pencuri". Permasalahan mengenai pencurian kekayaan Laut Indonesia sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkonsentrasikan dan memprioritaskan IUU (*Illegal Unreported Inregulated*) Fishing dikarenakan ada minimal sebanyak 5 juta ton ikan dicuri oleh kapal-kapal eks asing maupun kapal-kapal asing setiap tahunnya.⁹ Selain itu menurut Menteri Susi, dari 1.398 kapal eks asing sebesar 70% tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebesar 40% perusahaan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.¹⁰ *Illegal fishing* ini telah membuat pendapatan sektor perikanan laut Indonesia menjadi tidak maksimal dan menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan 2013, jika tidak terjadi *illegal fishing* maka pendapatan Indonesia

⁷ Son Diamar, 2015, *Lima Pilar Membangun Poros Maritim Dunia*, diakses dari <http://transformasi.org/id/pusatkajian/berita/kelautan-perikanan/736-lima-pilar-membangun-poros-maritim-dunia>).

⁸ Indonesia Dorong Mitra ASEAN Perkuat Kerja Sama Maritim dan UMKM, (8 September 2016), diakses dari <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/09/09/indonesia-dorong-mitra-asean-perkuat-kerja-sama-maritim-dan-umkm-id0-1473405314.pdf>.

⁹ Wiji Nurhayat, (30 Maret 2015), *Menteri Susi Sebut 5 Juta Ton/Tahun Ikan di Laut Indonesia Dicuri*, diakses dari <http://finance.detik.com/read/2015/03/30/164118/2873758/4/menteri-susi-sebut-5-juta-ton-tahun-ikan-di-laut-indonesia-dicuri>.

¹⁰ Ibid.

dapat mencapai Rp 365 triliun per tahun. Namun karena adanya tindakan pencurian ini, pendapatan Indonesia hanya berada pada kisaran Rp 65 triliun per tahun menurut perhitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011.¹¹

Dalam paper ini, penulis akan membahas mengenai masalah pencurian ikan tuna yang telah merugikan negara ini. Indonesia merupakan negara dengan potensi tuna terbesar di dunia dengan total produksi yang mencapai 613.575 ton per tahun.¹² Namun karena adanya *illegal fishing* maka pendapatan negara menjadi menurun. Filipina merupakan salah satu negara yang telah melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Menurut Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar), Prof DR Frans Ijong MSc, 70% ikan tuna di Filipina berasal dari Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Indonesia.¹³ Melalui perusahaan General Santos (kota paling selatan di Pulau Mindanao, Filipina yang memiliki pelabuhan perikanan), ekspor tuna dari Filipina dapat mencapai US\$ 2 miliar/tahun atau Rp 24 triliun/tahun. Sedangkan Indonesia yang merupakan negara pemilik tuna, hanya dapat memperoleh Rp 16 miliar/tahun dari ekspor tuna tersebut.¹⁴ Tentu saja aksi ilegal ini telah membuat kerugian besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, aksi *illegal fishing* ini harus ditangani negara-negara yang terlibat karena ini adalah kejahatan transnasional.

Permasalahan maritim yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengenai pencurian ikan, namun juga ada permasalahan dalam pembangunan infrastruktur khususnya di daerah pedesaan dan pesisir pantai. Pembangunan infrastruktur selama ini terlalu berfokus di Pulau Jawa dan seolah melupakan bagian lain dari Indonesia. Kurangnya infrastruktur yang merata di wilayah Indonesia ini menjadikan kondisi infrastruktur Indonesia secara keseluruhan masih tergolong buruk. Di antara negara-negara ASEAN, infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 9 negara menurut *World Economic Forum* 2014. Apabila dilihat dari kualitas jalan darat, Indonesia berada di posisi ke-5, kereta api ke-3, dan bandar udara urutan ke-5, dan pelabuhan Indonesia di urutan ke-6.¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka diperlukan

¹¹ Wiji Nurhayat, *Loc., cit.*

¹² *Potensi Ikan Tuna Indonesia Terbesar Di Dunia*, (17 Februari 2014), diakses dari <http://industri.bisnis.com/read/20140217/99/203721/potensi-ikan-tuna-indonesia-terbesar-di-dunia>.

¹³ *70 Persen Ikan Tuna di Filipina dari Sangihe*, (25 Februari 2015), diakses dari <http://beritakawana.com/berita/sangihe/70-persen-ikan-tuna-di-filipina-dari-sangihe#sthash.BzoRqptj.dpbs>

¹⁴ Wiji Nurhayat, *Loc., cit.*

¹⁵ Damar Budi Purnomo, (11 November 2014), *Infrastruktur Logistik Yang Efisien, Solusi Masalah Konektivitas Antar-Pulau*, diakses dari <http://jurnalmaritim.com/2014/11/infrastruktur-sistem-logistik-efisien-solusi-masalah-konektivitas-antar-pulau/>.

adanya bantuan serta kerjasama dari negara-negara lain termasuk negara anggota ASEAN untuk bersama-sama berkomitmen menghadapi dan memberantas kejahatan transnasional ini. Lebih dari itu, melalui berbagai persoalan ini juga diharapkan agar banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur maritim di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan untuk menekan biaya pengiriman hasil laut Indonesia dari satu pulau ke pulau lainnya. Sehingga untuk ke depannya diharapkan agar para nelayan dapat memperoleh keuntungan yang lebih dari hasil tangkapannya dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kerangka Konsep

Hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain didasarkan pada penerapan prinsip politik Bebas-Aktif sebagai suatu kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip ini membuat Indonesia sebagai aktor dalam hubungan internasional yang dapat secara bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara atau organisasi mana pun tanpa terpengaruh oleh ideologi dari pihak lain, serta aktif dimaknai bahwa dalam hubungannya dengan negara atau organisasi, maka Indonesia berperan secara aktif untuk memberikan pandangan-pandangannya dalam menemukan solusi yang tepat bagi suatu permasalahan internasional. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang banyak tergabung dalam organisasi-organisasi, salah satunya adalah ASEAN beserta Negara-negara Mitranya dan aktif dalam menyampaikan kerjasama serta permasalahan maritim. Menyangkut prinsip Bebas-Aktif tersebut, dasar bagi perwujudan nyata hal ini dapat dilihat dari Visi Kementerian Luar Negeri Indonesia 2014–2019, yaitu: *"Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat"*.

Berdasarkan visi tersebut, prinsip bebas tersirat dalam tujuan 'Memperkuat Jati Diri Bangsa', yakni penguatan identitas Indonesia untuk membedakan posisinya dengan negara-negara lain di dunia, sedangkan prinsip aktif terumuskan dalam tujuan 'Terwujudnya Wibawa Diplomasi', yaitu dengan pelaksanaan jalinan kerja sama dengan negara lain yang disegani dan dihormati oleh dunia internasional melalui peran aktif dan kepemimpinan Indonesia.¹⁶

Prinsip bebas berarti bahwa Indonesia tidak memihak dan mampu berdiri secara mandiri dalam politik internasional, sehingga dapat dikatakan Indonesia

¹⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (2015), *Rencana Strategis Kemlu 2015-2019*, diakses dari http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/RENSTRA%20KEMENLU%202015-2019%20FINAL%20DONE%20SK%20MENLU%20pdf%20version.pdf.



memiliki posisi yang jelas dan berhak menjalin hubungan kerja sama dengan negara mana pun termasuk negara anggota ASEAN. Di lain sisi, prinsip aktif ditunjukkan dengan peran Indonesia dalam ASEAN sebagai salah satu *founding fathers*, yaitu pada tahun 1967 bersama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.¹⁷ Selain itu, prinsip ini bermakna bahwa Indonesia juga turut berpartisipasi dalam usaha menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara serta meningkatkan kerjasama politik dan ekonomi yang diwujudkan melalui cara-cara diplomasi dan kerja sama. Sejalan dengan prinsip Bebas-Aktif tersebut, fokus pemerintah Indonesia yang kembali pada bidang maritim ini sesuai dengan misi pertama yang dicanangkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu sebagai berikut:¹⁸

"Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional"

Melalui kebijakan luar negeri Indonesia ini, maka Indonesia dapat meningkatkan hubungan kerjasamanya dengan negara-negara lain terkait pertukaran informasi intelijen non sensitif yang dapat dilakukan melalui berbagai *workshop* atau pun pertemuan-pertemuan internasional. Dari hal ini, maka Indonesia dapat mengambil kesempatan untuk mempromosikan cita-citanya sebagai Poros Maritim Dunia serta berkesempatan untuk memperoleh berbagai informasi terkait data mengenai buku putih setiap negara. Sehingga pada akhirnya, Indonesia mampu menjadikan kekayaan lautnya, khususnya tuna untuk menjadi produk lokal Indonesia yang berdaya saing global serta menjadi produk keunggulan komparatif dari Indonesia. Berbicara mengenai keunggulan komparatif, dalam paper ini penulis mengambil konsep dari David Ricardo, *comparative advantage*, yang berasal dari ekonomi liberal. Pada awalnya menurut ekonomi liberal, dikatakan bahwa setiap manusia pasti akan terlibat dalam suatu kerjasama secara alamiah. Kerjasama yang dijalin ini memungkinkan bagi setiap pihak untuk memperoleh keuntungan, baik meningkatkan kesejahteraan maupun memperluas kebebasan manusia yang tetap berada dibawah Undang-Undang. Dalam teori ini, aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat berkontribusi untuk mencapai kesejahteraan global serta masalah-masalah global (*trade wars, poverty, income inequalities, and boom-and-bust cycles*) dapat ditangani.¹⁹

Menurut Adam Smith, 1776, perdagangan antar negara dapat

¹⁷ *About ASEAN*, diakses dari <http://asean.org/asean/about-asean/overview/>.

¹⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Loc., cit.*

¹⁹ Charles W. Kegley and Shannon L. Blanton, (2014), *World Politics: Trend and Transformation, 2014-2015 Edition*, Kanada: Cengage Learning, p.249-351.

dikonsepkan melalui ide *absolute advantage* yang menjelaskan bahwa suatu negara harus berfokus untuk memproduksi pada satu produk yang memiliki biaya produksi terendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun hal ini menjadi pertanyaan bagi negara-negara yang tidak memiliki *absolute advantage*. Pada abad ke-18, seorang yang berfokus dalam bidang ekonomi politik, David Ricardo, menjelaskan konsep mengenai *comparative advantage*. Konsep ini menjelaskan bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki *absolute advantage* dalam produk-produk yang dihasilkannya, negara tersebut dapat tetap memperoleh keuntungan jika melakukan spesialisasi terhadap berbagai produknya yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara-negara lain sehingga dapat tetap bersaing dan memperoleh keuntungan. Sehingga, perdagangan antar negara dapat berjalan dengan baik apabila setiap negara mampu menemukan produk unggulannya dengan biaya produksi yang rendah serta berdaya saing global yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat.²⁰

Temuan-Temuan

Dari seluruh wilayah perairan Indonesia, masih ada sejumlah wilayah yang belum digunakan untuk pengembangan hasil laut, khususnya ikan. Sebesar 11,8 juta hektar untuk budidaya ikan di air laut, 2,3 juta hektar dialokasikan untuk budidaya ikan di air payau, serta seluas 2,5 juta hektar untuk budidaya ikan di air tawar. Dengan kata lain, menurut Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Endah Murniningtyas, dari total PDB Indonesia, kontribusi sektor kelautan dan kemaritiman baru mencapai 11,8% di tahun 2016 ini. Peningkatan akan terus diupayakan dan ditargetkan dapat mencapai 20% pada tahun 2020 nanti.²¹ Sampai saat ini, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik, sektor perikanan Indonesia berkembang sebesar 8,37% pada kuartal ketiga tahun 2015. Perkembangan ini melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan yaitu sebesar 4,73%. Perkembangan sektor perikanan ini pun diikuti dengan surplus perdagangan yang mencapai 232,04 juta dollar AS di mana besarnya ekspor mencapai 244,6 juta dollar AS sedangkan impor hanya sebesar 12,5 juta dollar AS pada tahun 2015.²²

²⁰ Ibid.

²¹ *Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, (8 Maret 2016), diakses dari <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/>.

²² Thomas Darmawan, (30 Desember 2015), *Pertumbuhan Sektor Perikanan Indonesia Melampaui Pertumbuhan Ekonomi*, diakses dari <http://www.indonesia-investments.com/id/berita/berita-hari-ini/pertumbuhan-sektor-perikanan-indonesia-melampaui-pertumbuhan-ekonomi/item6324>.

Perkembangan pada sektor perikanan ini pun terjadi dikarenakan adanya peningkatan hasil tangkapan ikan, khususnya tuna, yang naik sebesar 5,03% dari sebelumnya atau sekitar 4,72 juta ton. Produksi ikan hasil budidaya pun naik sebesar 3,98% atau sekitar 10,07 juta ton pada tahun 2015. Sebagian besar, hasil laut Indonesia ini diekspor ke Amerika Serikat, yaitu sebesar 41% dari total ekspor yang dilakukan oleh Indonesia. Negara berikutnya adalah Jepang sebesar 16% dan Eropa sebesar 12% serta negara-negara anggota ASEAN sebesar 11%. Indonesia telah menjadi pengeksport tuna utama bagi negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Thailand dan Uni Eropa. Namun perlu diperhatikan oleh Indonesia bahwa ada negara-negara lain yang juga memproduksi tuna, yaitu Filipina, China, Jepang, Korea, Taiwan, dan Spanyol.²³

Tergabungnya Indonesia dalam ASEAN menjadikan peluang yang menjanjikan bagi perkembangan sektor maritim Indonesia khususnya di bidang perikanan. Dalam hal ini, Indonesia telah menggunakan kesempatannya di berbagai pertemuan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara mitranya. Hal ini sejalan dengan pilar keempat dari lima pilar utama yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu mengenai diplomasi maritim yang dijalankan dengan mengajak semua mitra Indonesia untuk terlibat dalam kerjasama maritim yaitu dengan menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.²⁴ Tercatat dalam beberapa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN beserta negara-negara mitra, Indonesia senantiasa mengangkat isu mengenai sektor maritim ini. Dalam KTT ASEAN ke-4 bersama Amerika Serikat (AS), Indonesia berfokus pada usaha untuk memberantas *illegal, unreported, dan unregulated fishing* (IUU Fishing), khususnya dalam hal penguatan kapasitas serta pertukaran informasi intelijen non-sensitif antar negara. Dalam KTT ini pun, Indonesia mengajak negara anggota ASEAN dan AS untuk meningkatkan sektor UMKM melalui ASEAN-US Connect. Berikutnya adalah KTT ke-11 atau KTT *East Asia Summit* (EAS) yang diikuti oleh 18 Negara (10 ASEAN, 6 Mitra Dagang, AS dan Rusia). Dalam kesempatan ini, dengan jumlah populasi EAS yang mencapai 54% populasi dunia, diharapkan dapat bersama-sama merealisasikan kerjasama maritim dalam menangani permasalahan bersama sehingga dapat meningkatkan

²³ *Fishing Industry Indonesia: Leading Tuna Producer, Concern about Overfishing*, (20 Mei 2016), diakses dari <http://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/fishing-industry-indonesia-leading-tuna-producer-concern-about-overfishing/item6835>.

²⁴ *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, (13 November 2015), diakses dari <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>.

perekonomian setiap negara. KTT selanjutnya dilakukan bersama dengan India dalam KTT ke-14. Dalam KTT ini, Indonesia berfokus pada pengembangan UMKM karena sebesar 80% ekonomi ASEAN maupun India adalah berupa UMKM. Sehingga dapat menjalin kerjasama untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM di negara-negara ASEAN.²⁵

Teknologi saat ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, transaksi perdagangan pun tidak hanya dilakukan di pasar namun sudah dapat dilakukan melalui jaringan internet atau dikenal dengan *e-Commerce*. Sebagai salah satu *founding fathers* dari ASEAN yang memiliki wilayah terluas dengan jumlah penduduk terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan transaksi perdagangannya dengan negara-negara lain. Berdasarkan hal ini, Indonesia telah menjadi pasar terbesar bagi negara-negara di dunia, khususnya bagi ASEAN. Tidak hanya perdagangan melalui pasar tradisional, namun sektor *e-Commerce* di Indonesia pun berkembang sangat pesat di mana nilai transaksi mencapai US\$ 130 juta atau setara dengan Rp 1,7 triliun (kurs: Rp 13.114 per dolar AS). Nilai transaksi ini menjadikan Indonesia sebagai pasar *e-Commerce* terbesar di Asia Tenggara.²⁶ Dengan demikian, Indonesia memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan sektor *e-Commerce* dalam usaha mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama di daerah pedesaan dan pesisir pantai yang menjadi lahan subur bagi perkembangan *e-Commerce*.

Analisis

Presiden Jokowi bertekad untuk memberantas habis praktek *illegal fishing*. Untuk merealisasikan harapannya tersebut, bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengeluarkan kebijakan mengenai moratorium perizinan usaha perikanan tangkap kapal eks asing yang diatur dalam Permen KP No. 56/Permen-KP/2014 tentang dan larangan *transshipment* atau bongkar muat ikan di tengah laut yang diatur dalam Permen KP No. 57 Tahun 2014.²⁷ Kebijakan ini bertujuan untuk menekan *illegal fishing* bahkan mematikan usaha ekspor ikan di negara-negara lain. Dengan adanya pelarangan bongkar muat ikan di tengah laut maka populasi ikan-ikan di

²⁵ Indonesia Dorong Mitra ASEAN Perkuat Kerja Sama Maritim dan UMKM , diakses dari <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/09/09/indonesia-dorong-mitra-asean-perkuat-kerja-sama-maritim-dan-umkm-id0-1473405314.pdf>.

²⁶ Aldo Lim, (6 Agustus 2016), *4 Bukti Indonesia Jadi Pasar e-Commerce Terbesar di ASEAN*, diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2569801/4-bukti-indonesia-jadi-pasar-e-commerce-terbesar-di-asean>.

²⁷ *Kebijakan Menteri Susi Matikan Ekspor Ikan Terbesar Asal Filipina*, (12 Februari 2015), diakses dari <http://www.jitunews.com/read/9239/kebijakan-menteri-susi-matikan-eksportir-ikan-terbesar-asal-filipina#ixzz3ae9GjLIA> .

Indonesia tidak akan dicuri kembali oleh kapal-kapal ilegal. Sehingga Indonesia akan kembali mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik Indonesia. Kebijakan yang diterapkan Susi ini, selain untuk memberantas *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, juga untuk membangun perekonomiannya, khususnya dalam bersaing di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam hal ini, Menteri Susi ingin agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar tujuan bagi negara-negara lain, namun menjadi pemain aktif dalam MEA.²⁸ Oleh karena itu, selain berfokus pada pemberantasan *illegal fishing*, KKP juga memiliki komitmen untuk menata kembali pengelolaan perikanan yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan sehingga usaha perikanan dapat terus berlanjut.²⁹ Komitmen ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Melalui kebijakan ini, Indonesia pun mulai merasakan keuntungannya. Kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Susi tersebut bertujuan untuk memberikan *multiplier effect* yaitu mengosongkan pasokan ikan dunia dan Indonesia mendapatkan untung dengan kembali mengeksport ikan-ikan dan hasil laut lainnya. Hal ini terbukti dengan berkurangnya stok ikan tuna di dunia namun pendapatan Indonesia cenderung meningkat. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus, walaupun volume tangkapan tuna menurun sebesar 35 persen, namun pendapatan yang diperoleh cenderung meningkat sebesar 12,8 persen sejak bulan Januari 2015.³⁰

Berdasarkan konsep *Comparative Advantage* yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa setiap negara memiliki produk lokal yang dapat diunggulkan dan dapat bersaing di pasar global dengan biaya yang tergolong rendah dan memperoleh keuntungan yang lebih. Sehingga melalui spesialisasi suatu produk, diharapkan dapat meningkatkan GDP negara tersebut dan memperluas kerjasama dengan negara-negara lain.³¹ Tuna telah menjadi salah satu produk unggulan dari Indonesia yang mampu bersaing dalam pasar global. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), Saut

²⁸ *Hari Pers Nasional: Menteri Susi Ingin Pers Bisa Lebih Bijak*, (8 Februari 2015), diakses dari <http://kkp.go.id/index.php/berita/hari-pers-nasional-menteri-susi-ingin-pers-bisa-lebih-bijak/>.

²⁹ *Kebijakan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Mulai Diberlakukan*, (21 Januari 2015), diakses dari <http://www.jokowinomics.com/2015/01/21/berita-kabinet/kebijakan-tata-kelola-perikanan-berkelanjutan-mulai-diberlakukan/>.

³⁰ Stefano Reinnard Sulaiman, (7 Maret 2015), *Kebijakan Susi Bikin Stok Tuna di Pasaran Dunia Berkurang*, diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/07/094333326/Kebijakan.Susi.Bikin.Stok.Tuna.di.Pasaran.Dunia.Berkurang>.

³¹ Robert Gilpin, (2001), *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*, New Jersey: Princeton University Press.

P Hutagalung yang mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia berhasil menjadi salah satu negara penghasil tuna terbesar di dunia dengan memasok lebih dari 16 persen total produksi tuna dunia.³²

Dengan pemberlakuan kebijakan dari Menteri Susi, maka terjadi penurunan pasokan tuna seperti ke Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara pengimpor tuna lainnya. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengambil alih kembali sebagai pemasok tuna terbesar. Dalam menangani masalah ini, Menteri Susi terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor perikanan. Usaha beliau akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan karena saat ini Amerika Serikat telah membebaskan biaya impor untuk produk Indonesia khususnya perikanan dengan memberikan fasilitas *Generalized System of Preference (GSP)*. Fasilitas ini berlaku sejak 29 Juli 2015-31 Desember 2017.³³ Tak berhenti sampai di sana, Menteri Susi terus berusaha meningkatkan ekspor perikanan Indonesia dengan terus melakukan diplomasi yang baik. Saat ini, Menteri Susi akan terus mendesak negara-negara Eropa agar menghapuskan tarif impor seperti yang dilakukan AS terhadap Indonesia.

Pemberantasan *illegal fishing* saat ini semakin diperkuat dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang telah menetapkan Peraturan Presiden No. 43 tahun 2016 tentang pengesahan *agreement on port state measures to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing*. Penetapan Peraturan Presiden ini pun mendapatkan penghargaan dari FAO yang menyatakan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara terdepan dalam penerapan *Port State Measures to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing Agreement*. Usaha yang dilakukan Menteri Susi pun telah menunjukkan hasil yang baik, di mana saat ini, Indonesia terus melakukan pemberantasan *illegal fishing* dan jika hal ini senantiasa dilakukan maka Indonesia dapat menjadi eksportir tuna terbesar di dunia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh menko maritim, Rizal Ramli, dalam Forum Bali Tuna Conference ke-2 dan *International Coastal Tuna Business Forum* ke-5 di Bali. Beliau mengatakan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penghasil tuna terbesar dunia dengan

³² Siti Nurasiyah Dewi dan Bobby Andalan, *Kuartal I-2015, Ekspor Tuna Sumbang US\$89,41 Juta*, (26 Mei 2015), diakses dari <http://m.news.viva.co.id/news/read/630248-kuartal-i-2015--ekspor-tuna-sumbang-us-89-41-juta>.

³³ Daurina Lestari dan Arie Dwi Budiawati, (31 Juli 2015), *Menteri Susi Desak Eropa Bebaskan Bea Impor Perikanan RI*, diakses dari <http://m.news.viva.co.id/news/read/655502-menteri-susi-desak-eropa-bebaskan-bea-impor-perikanan-ri>.

memperhatikan *sustainability, traceability, dan accountability*.³⁴

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia pun telah menerapkan prinsip politik Bebas-Aktif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa Indonesia berhak untuk menjalin kerjasama dengan negara mana pun dan tetap berpegang pada prinsipnya. Dalam usaha peningkatan keamanan wilayah maritim, Indonesia mengajak Malaysia untuk bekerjasama dengan melakukan patroli *illegal fishing* yang rencananya akan dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Kerjasama ini pun terus ditingkatkan yaitu dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua negara untuk mengadakan pertukaran data satelit dan radar.³⁵

Dalam hal ini, untuk terus memberantas *illegal fishing*, maka Indonesia pun mengajak Malaysia serta Filipina untuk bersama-sama mengawasi dan mengamankan wilayah maritim, khususnya di Sulawesi, Zamboanga, dan Sulu. Ketiga negara ini telah bersepakat untuk melakukan kerjasama patroli maritim yang terkoordinasi untuk menghadapi tantangan keamanan perairan perbatasan guna menjaga stabilitas dan perdamaian regional maupun internasional. Pertemuan yang diadakan di Manila, Filipina ini masing-masing diwakili oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, Menhan Filipina Gazmin T Voltaire dan Menhan Malaysia Dato Hishamuddin. Kerjasama ini direalisasikan dengan adanya penandatanganan kerangka kerja dan harmonisasi antara kegiatan patroli dengan pertukaran informasi intelijen non sensitif, serta akan diadakan juga latihan gabungan di laut dan pembentukan Posko Militer Bersama (PMB).³⁶

Selain peningkatan keamanan wilayah, UMKM pun menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan Jokowi ini. Dalam pertemuan KTT ASEAN bersama dengan negara-negara Mitra, Indonesia mengajak untuk mengembangkan sektor UMKM ini dikarenakan pasar ASEAN yang sebagian besar bergerak di bidang UMKM. Diharapkan agar Indonesia dapat mengembangkan sektor UMKM khususnya bagi para nelayan yaitu dengan melakukan tata kelola tuna Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut maka diharapkan adanya kerjasama

³⁴ *Jika Sukses Berantas Illegal Fishing, RI Jadi Eksportir Tuna Terbesar Dunia*, (29 Mei 2016), diakses dari <http://jurnalmaritim.com/2016/05/jika-sukses-berantas-illegal-fishing-ri-jadi-eksportir-tuna-terbesar-dunia/>.

³⁵ *Indonesia dan Malaysia Kerja Sama Patroli Illegal Fishing*, (30 April 2016), diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/30/090767243/indonesia-dan-malaysia-kerja-sama-patroli-illegal->

³⁶ *Tiga Negara Bahas Kerja Sama Pengamanan Wilayah Maritim*, (21 Juni 2016), diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/06/21/090781885/tiga-negara-bahas-kerja-sama-pengamanan-wilayah-maritim>.

dari para *stakeholders* komoditi tuna untuk membantu para nelayan. Seperti halnya peran pemerintah dan bank yang sangat dibutuhkan terkait pemberian modal serta kredit dan pelatihan secara teknis mengenai bagaimana mengelola UMKM ini. Selain itu juga diperlukan penerapan *traceability*, yaitu sertifikasi hasil tangkapan ikan yang menjadi prasyarat negara-negara pasar produk perikanan Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya jual komoditas tuna. Dalam pengimplementasiannya pun Indonesia dapat mengembangkan *e-Commerce* untuk memperluas pasar Indonesia. Yaitu tidak hanya menjual ke pasar lokal saja dengan cara yang biasa namun dapat menjualnya melalui jejaring internet sehingga siapa pun dapat mengakses “pasar ikan Indonesia”. Untuk melaksanakan UMKM ini, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mengenai infrastruktur untuk pembangunan pelabuhan dan kemudian juga perlu adanya pengembangan industri yang menghubungkan antar pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya transportasi dalam proses perdagangan. Sehingga dalam prosesnya pun, Indonesia dapat secara mandiri untuk mengeksport hasil lautnya tanpa harus mengandalkan pelayaran asing. Teknologi pun harus terus dikembangkan untuk membuat biaya penangkapan serta pengiriman ikan menjadi efisien. Dengan demikian maka diharapkan dapat membangun pelabuhan-pelabuhan di berbagai daerah di Indonesia yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sana.³⁷

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan maritim yang dihadapi oleh Indonesia serta bagaimana upaya Indonesia untuk menjadi “Bangsa Pelaut” kembali, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Hal yang perlu ditekankan adalah usaha dari masyarakat dan pemerintah untuk terus berkomitmen dalam memberantas *illegal fishing* yang merupakan kejahatan transnasional dengan melibatkan berbagai negara yang telah bersepakat untuk menangani permasalahan ini. Kerjasama dalam hal patroli wilayah laut dan bertukar informasi intelijen dengan negara anggota ASEAN dan Negara-negara Mitra yang dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk senantiasa menangani permasalahan yang ada. Sehingga ketika *illegal fishing* ini bukan lagi menjadi hambatan, maka Indonesia dapat mengembangkan UMKM-nya dan menjadikan tuna serta hasil laut lainnya sebagai produk unggulan Indonesia

³⁷ *Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*, (Desember, 2014), diakses dari file:///E:/Mandiri_JURNALMU-Blast.pdf.

yang berdaya saing global untuk diekspor ke berbagai negara dan khususnya menjadi pemasok utama tuna di dunia. Sehingga untuk ke depannya, Laut Indonesia dapat menjadi Poros Maritim Dunia di mana perdagangan antar negara di dunia dapat melalui perairan Indonesia tanpa merugikan pihak Indonesia dengan berbagai tindakan ilegal.

Daftar Pustaka

Buku

Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy: Understanding The International*

Economic Order. New Jersey: Princeton University Press.

Kegley, Charles W. and Shannon L. Blanton. (2014). *World Politics: Trend and Transformation, 2014-2015 Edition*. Canada: Cengage Learning.

E-Journal

Indonesia Dorong Mitra ASEAN Perkuat Kerja Sama Maritim dan UMKM. (2016, September 8). Diakses dari <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/09/09/indonesia-dorong-mitra-asean-perkuat-kerja-sama-maritim-dan-umkm-id0-1473405314.pdf>.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Rencana Strategis Kemlu 2015-2019*. Diakses dari http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/RENSTRA%20KEMENLU%202015-2019%20FINAL%20DONE%20SK%20MENLU%20pdf%20version.pdf.

Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. (2014, Desember). Diakses dari file:///E:/Mandiri_JURNALMU-Blast.pdf.

Website

Darmawan, Thomas. (2015, Desember 30). *Pertumbuhan Sektor Perikanan Indonesia*

Melampaui Pertumbuhan Ekonomi. Diakses dari <http://www.indonesia-investments.com/id/berita/berita-hari-ini/pertumbuhan-sektor-perikanan-indonesia-melampaui-pertumbuhan-ekonomi/item6324>.

Dewi, Siti Nurasyiah dan Bobby Andalan. (2015, Mei 26). *Kuartal I-2015, Ekspor Tuna*

Sumbang US\$89,41 Juta, Diakses dari <http://m.news.viva.co.id/news/read/630248-kuartal-i-2015--ekspor-tuna-sumbang-us-89-41-juta>.

- Diamar, Son. (2015). *Lima Pilar Membangun Poros Maritim Dunia*. Diakses dari <http://transformasi.org/id/pusatkajian/berita/kelautan-perikanan/736-lima-pilar-membangun-poros-maritim-dunia>.
- Hargo, Dody Usodo. (2016, Februari 23). *Jumlah Pulau di Indonesia*. Diakses dari <http://www.dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html>.
- Lestari, Daurina dan Arie Dwi Budiawati. (2015, Juli 31). *Menteri Susi Desak Eropa Bebaskan Bea Impor Perikanan RI*. Diakses dari <http://m.news.viva.co.id/news/read/655502-menteri-susi-desak-eropa-bebaskan-bea-impor-perikanan-ri>.
- Lim, Aldo. (2016, Agustus 6). *4 Bukti Indonesia Jadi Pasar e-Commerce Terbesar di ASEAN*. Diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2569801/4-bukti-indonesia-jadi-pasar-e-commerce-terbesar-di-asean>.
- Nurhayat, Wiji. (2015, Maret 30). *Menteri Susi Sebut 5 Juta Ton/Tahun Ikan di Laut Indonesia Dicuri*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2015/03/30/164118/2873758/4/menteri-susi-sebut-5-juta-ton-tahun-ikan-di-laut-indonesia-dicuri>.
- Pasopati, Giras. (2014, November 12). *Inilah Perbedaan Nyata Pemerintahan SBY Dengan JOKOWI*. Diakses dari <http://surabaya.bisnis.com/read/20141112/94/75943/inilah-perbe-pemerintahan-sby-dengan-jokowi>.
- Prianto, Agus. (2016, Juni 7). *Mewujudkan Mimpi Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia*. Diakses dari <http://maritim.go.id/mewujudkan-mimpi-indonesia-menjadi-poros-maritim-dunia/>.
- Purnomo, Damar Budi. (2014, November 11). *Infrastruktur Logistik Yang Efisien, Solusi Masalah Konektivitas Antar-Pulau*. Diakses dari <http://jurnalmaritim.com/2014/11/infrastruktur-sistem-logistik-efisien-solusi-masalah-konektivitas-antar-pulau/>.
- Sulaiman, Stefano Reinnard. (2015, Maret 7). *Kebijakan Susi Bikin Stok Tuna di Pasaran Dunia Berkurang*. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/07/094333326/Kebijakan.Susi.Bikin.Stok.Tuna.di.Pasaran.Dunia.Berkurang>.

Website (No Author)

70 Persen Ikan Tuna di Filipina dari Sangihe. (2015, Februari 25). Diakses dari <http://beritakawanua.com/berita/sangihe/70-persen-ikan-tuna-di-filipina-dari-sangihe#sthash.BzoRqptj.dpbs>.

About ASEAN. Diakses dari <http://asean.org/asean/about-asean/overview/>.

- Beberapa Negara Panik, Sabtu Lusa Jokowi Instruksikan Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan.* (2014, Desember 4). Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2014/12/04/beberapa-negara-panik-sabtu-lusa-jokowi-instruksikan-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-695347.html>.
- DPR Sahkan APBN-P 2016 KKP Sebesar Rp 10,57 Triliun.* (2016, Juni 28). Diakses dari <http://news.kkp.go.id/index.php/dpr-sahkan-apbn-p-2016-kkp-sebesar-rp-1057-triliun/>.
- Fishing Industry Indonesia: Leading Tuna Producer, Concern about Overfishing.* (2016, Mei 20). Diakses dari <http://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/fishing-industry-indonesia-leading-tuna-producer-concern-about-overfishing/item6835>.
- Hari Pers Nasional: Menteri Susi Ingin Pers Bisa Lebih Bijak.* (2015, Februari 8). Diakses dari <http://kkp.go.id/index.php/berita/hari-pers-nasional-menteri-susi-ingin-pers-bisa-lebih-bijak/>.
- Indonesia dan Malaysia Kerja Sama Patroli Illegal Fishing.* (2016, April 30). Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/30/090767243/indonesia-dan-malaysia-kerja-sama-patroli-illegal-fishing>.
- Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.* (2015, November 13). <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>.
- Jika Sukses Berantas Illegal Fishing, RI Jadi Eksportir Tuna Terbesar Dunia.* (2016, Mei 29). Diakses dari <http://jurnalmaritim.com/2016/05/jika-sukses-berantas-illegal-fishing-ri-jadi-eksportir-tuna-terbesar-dunia/>.
- Kiara Soroti 65% Anggaran KKP Tidak Pro Pemberdayaan Nelayan.* (2015, Januari 6). Diakses dari <http://www.kiara.or.id/kiara-soroti-65-anggaran-kkp-tidak-pro-pemberdayaan-nelayan/>.
- Kebijakan Menteri Susi Matikan Eksportir Ikan Terbesar Asal Filipina.* (2015, Februari 12). Diakses dari <http://www.jitunews.com/read/9239/kebijakan-menteri-susi-matikan-eksportir-ikan-terbesar-asal-filipina#ixzz3ae9GjLIA>.
- Kebijakan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Mulai Diberlakukan.* (2015, Januari 21). Diakses dari <http://www.jokowinomics.com/2015/01/21/berita-kabinet/kebijakan-tata-kelola-perikanan-berkelanjutan-mulai-diberlakukan/>.
- Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.* (2016, Maret 8). <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/>.
- Potensi Ikan Tuna Indonesia Terbesar Di Dunia.* (2014, Februari 17). Diakses

dari <http://industri.bisnis.com/read/20140217/99/203721/potensi-ikan-tuna-indonesia-terbesar-di-dunia>.

Tiga Negara Bahas Kerja Sama Pengamanan Wilayah Maritim. (2016, Juni 21).

Diakses dari

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/06/21/090781885/tiga-negara-bahas-kerja-sama-pengamanan-wilayah-maritim>.



Strategi Indonesia dalam Menghadapi Kebangkitan Tiongkok pada era Presiden Joko Widodo Studi Kasus: Konflik Laut Tiongkok Selatan

Sofia Trisni, S.IP.,MA (IntRel) & Wiwiek Rukmi DA, S.IP.,M.Si

Universitas Andalas

Abstrak

Kebangkitan Tiongkok merupakan fenomena yang paling disorot pada abad ini. Tiongkok dengan luar biasanya berhasil menjadi kekuatan kedua perekonomian dunia dan Tiongkok pun berhasil menjadi partner dagang terbesar bagi banyak negara termasuk Indonesia, sehingga keterikatan terhadapnya menjadi cukup besar. Sekaitan dengan kebangkitan Tiongkok tersebut, kekhawatiran pun mencuat terkait bagaimana Tiongkok akan mempergunakan *power* nya dan akankah peningkatan perekonomian Tiongkok disertai perluasan ke bidang lainnya, seperti misalnya perluasan teritori. Pertanyaan kedua menjadi relevan jika dikaitkan dengan sikap asertif Tiongkok dalam mempertahankan Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah lautnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan oleh Indonesia dalam merespon kebangkitan Tiongkok diluar,- strategi ekonomi- pada masa pemerintahan presiden Jokowi masih sama dengan strategi yang digunakan Indonesia pada pemerintahan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan penelitian, tulisan ini menggunakan studi kasus konflik Laut Tiongkok Selatan. Pada pemerintahan SBY diketahui bahwa Indonesia menggunakan strategi *engagement* melalui ASEAN dan *hedging*,- strategi yang dianggap tepat oleh berbagai kalangan. Dengan menggunakan strategi *engagement* dan *hedging* ini, penulis mencoba meneliti strategi yang digunakan Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia tidak terlihat menggunakan strategi *engagement* melalui ASEAN, tetapi Indonesia masih konsisten menggunakan strategi *hedging* dalam merespon kebangkitan Tiongkok.

Kata kunci:

ASEAN, Kebijakan Luar Negeri RI, Two Level Games

Pendahuluan

Kebangkitan Tiongkok merupakan fenomena yang menarik untuk diamati, walaupun bangkit ataupun jatuhnya sebuah negara merupakan fenomena yang lumrah dalam sistem Internasional. Yang menjadikan fenomena ini menarik adalah ketika sebuah negara bangkit, maka negara sekitarnya akan berkeinginan untuk mengetahui bagaimana negara yang bangkit ini akan menggunakan kekuatannya. Hal itulah yang membuat Tiongkok menjadi sasaran pengamatan. Perekonomian Tiongkok yang melonjak drastis semenjak diberlakukannya *open door policy* dan peningkatan anggaran militernya dari tahun ke tahun menghasilkan pertanyaan apakah Tiongkok akan menjadi seperti Jepang ketika mereka bangkit pada tahun 1940-an,- dimana Jepang menjadi salah satu negara yang menyebabkan perang dunia ke dua. Kewaspadaan terhadap Tiongkok kemudian meningkat karena negara ini memperlihatkan pendekatannya yang agresif dalam penyelesaian Konflik Laut Tiongkok Selatan.

Konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan konflik yang melibatkan Tiongkok, Taiwan (bukan sebuah Negara secara teknis) dan empat negara ASEAN yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. LTS merupakan kawasan laut seluas 3.5 juta kilometre persegi, termasuk Teluk Thailand yang terbentang dari pantai barat daratan Asia Tenggara, Kalimantan dan Kepulauan Filipina. LTS menghubungkan Asia timur laut dan Pasifik bagian barat ke Samudera Hindia dan Timur Tengah, dimana jalur ini dilewati oleh sepertiga dari total kapal dunia. Disamping posisinya yang strategis, kawasan laut ini juga menyimpan sumber daya alam yang potensial didalamnya, yaitu hidrokarbon dan sumberdaya ikan yang sangat kaya. Selain bagi Indonesia, klaim Tiongkok di LTS juga mengganggu Amerika Serikat (AS) dan Australia. Kedua negara ini menginginkan LTS berstatus sebagai lautan internasional, yang memberikan kebebasan kepada setiap warga dunia untuk melewatinya, termasuk juga kebebasan dalam melaksanakan berbagai penelitian dan juga kebebasan untuk melakukan latihan perang. Jika wilayah ini di klaim oleh Tiongkok, kedua negara merasa *freedom of navigation* nya terganggu, sehingga penting sekali bagi mereka untuk memastikan bahwa LTS tetap berstatus sebagai lautan internasional.

Diluar permasalahan tumpang tindih klaim terhadap kawasan laut tersebut, LTS memiliki kekhususan bagi Indonesia. Ada dua hal khusus yang menjadi perhatian Indonesia berkaitan dengan konflik ini. Pertama, klaim Tiongkok yang terkenal dengan "9 dotted-lines" telah mengganggu wilayah ZEE Indonesia di utara kepulauan Natuna yang kaya akan Gas Alam, sehingga mau

tidak mau telah terjadi tumpang tindih teritorial di wilayah ZEE Indonesia ini. Kedua, konflik ini melibatkan lima negara anggota ASEAN, sementara Indonesia secara tradisional memiliki rasa *self of belonging* yang tinggi terhadap ASEAN. Menjaga stabilitas wilayah merupakan keinginan Indonesia, negara ini tidak menginginkan penjalaran konflik yang dapat mengganggu keamanan Indonesia.

Konflik panjang ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada masa pemerintahan presiden Jokowi yang memiliki fokus utama pada wilayah Maritim. Nawacita presiden Jokowi secara tegas menjelaskan bahwa Indonesia akan lebih hirau terhadap wilayah lautnya. Selanjutnya hirauan ini diaplikasikan dengan mengawal perbatasan Indonesia dan menangkap kapal-kapal yang tertangkap memasuki wilayah Indonesia secara ilegal dan termasuk yang melakukan pencurian sumber daya laut Indonesia. Keseriusan dalam menjaga perbatasan laut Indonesia terlihat dari pembakaran dan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan pencurian sumber daya laut Indonesia. Pemerintahan Indonesia yang baru dengan fokus hirauan yang berbeda, menghasilkan babak baru dalam konflik LTS. Beberapa insiden kerap terjadi di wilayah Natuna antara Indonesia dan Tiongkok seperti; kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok membantu kapal nelayannya yang ditahan oleh Indonesia disekitaran pulau Natuna karena dugaan pencurian ikan pada bulan Maret 2016, Protes keras Beijing pada bulan Mei 2016 atas penangkapan kapal Tiongkok yang kedapatan menangkap ikan secara ilegal disekitaran Natuna dan kembali Tiongkok melayangkan protes keras setelah ditangkapnya sebuah kapal Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal disekitaran Natuna pada 17 Juni 2016. Sedikit banyaknya, insiden-insiden yang terjadi memberikan pengaruh kepada hubungan Indonesia dan Tiongkok.

Perkembangan lain dari konflik ini adalah dikabulkannya tuntutan Filipina oleh Pengadilan Arbitrase Internasional pada 12 Juli 2016 yang lalu, yang menyatakan bahwa "9 dotted-lines" yang dikemukakan oleh Tiongkok telah mengganggu kedaulatan Filipina. Keputusan pengadilan ini mendapatkan reaksi keras dari Tiongkok yang bersikukuh bahwa kawasan LTS merupakan wilayah yang secara historis merupakan wilayah teritorialnya. Tiongkok menolak keputusan Pengadilan internasional ini dan meminta Filipina untuk mengabaikan keputusan tersebut. Penolakan Tiongkok atas keputusan Pengadilan Internasional membuat permasalahan ini tetap bergulir dan membuat tetap terbukanya potensi persengketaan di LTS.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya pada tahun 2015 yang berfokus kepada strategi Indonesia dalam merespon kebangkitan Tiongkok pada era Presiden SBY. Penelitian terdahulu menemukan bahwa ada

tiga strategi diluar strategi ekonomi,- yang digunakan oleh Indonesia dalam merespon kebangkitan Tiongkok dengan setting Laut Tiongkok Selatan, strategi tersebut adalah :

1. *Engagement* dengan menggunakan forum ASEAN
2. *Hedging* dengan mengundang banyak negara di kawasan
3. Diplomasi bilateral untuk memastikan bahwa Tiongkok akan tetap mau menyelesaikan permasalahan konflik Laut Tiongkok Selatan dengan *framework* multilateral / dengan menggunakan forum ASEAN

Engagement dengan menggunakan forum ASEAN dilakukan Indonesia melalui dua hal, yaitu dengan memastikan satu suara di ASEAN, dan dengan terus mengajak Tiongkok untuk menyelesaikan konflik LTS menggunakan *ASEAN Way*. Disini terlihat keinginan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan cara multilateral karena Indonesia tidak menginginkan Tiongkok menyelesaikan konflik ini dengan cara bilateral dengan memilih negara ASEAN yang dianggap lemah. Indonesia merasa dengan bingkai multilateral, negara ASEAN akan menjadi lebih kuat dan dapat mencari jalan keluar konflik yang tidak hanya menguntungkan Tiongkok. Untuk itu langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah dengan memastikan bahwa ASEAN mempunyai satu suara dalam menyelesaikan konflik ini.

Strategi kedua yang digunakan Indonesia pada masa presiden SBY adalah *hedging* dengan cara mengundang berbagai kekuatan di kawasan, sehingga Tiongkok tidak menjadi satu-satunya kekuatan besar di kawasan. Selain kedua strategi tersebut, penelitian ini melihat Indonesia melakukan pendekatan bilateral kepada Tiongkok melalui lobi-lobi terhadap presiden ataupun Menlu Tiongkok ketika mereka berkunjung ke Jakarta. Tidak hanya itu, lobi bilateral juga dilakukan ketika presiden SBY melakukan kunjungan kerjanya ke Tiongkok. Pendekatan bilateral ini pada dasarnya bertujuan untuk meminta Tiongkok menyelesaikan konflik ini melalui bingkai ASEAN.

Strategi yang digunakan oleh presiden SBY ini banyak mendapat pujian dari dunia internasional, sebut saja dari Hillary Clinton pada saat menjabat sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat, dari Sekjen ASEAN Le Luong Minh padatahun 2013 serta negara-negara lainnya.

Menilik pujian yang didapatkan oleh Indonesia pada masa pemerintahan SBY menarik untuk diketahui apakah presiden Jokowi masih melanjutkan strategi yang dikatakan sukses digunakan presiden SBY. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi Indonesia diluar strategi ekonomi dalam merespon kebangkitan Tiongkok pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penelitian ini menggunakan metode unik untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu dengan cara menguji dua argumen Rizal Sukma mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok. Dalam monografinya, Rizal Sukma berargumen bahwa: Reaksi Indonesia terhadap kebangkitan Tiongkok diluar bidang ekonomi dapat digolongkan menjadi dua : yang pertama, Indonesia mencoba meng-engage Tiongkok melalui ASEAN atau dengan kata lain mengelakkan penyelesaian secara bilateral dan yang kedua, ketidak pastian akan lamanya atensi Tiongkok terhadap Indonesia telah mendorong Indonesia untuk melakukan strategi *hedging*.

Penulis menggunakan sengketa di Laut Tiongkok Selatan sebagai fenomena untuk meneliti interaksi antara Indonesia dan Tiongkok. LTS penulis pilih sebagai kasus untuk diteliti karena pada sengketa LTS ini Indonesia berhadapan langsung dengan Tiongkok dan juga pada konflik ini negara dan kawasan ASEAN ikut terlibat, sehingga penulis merasa konflik ini merupakan studi kasus yang tepat untuk meneliti strategi Indonesia terhadap Tiongkok.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada riset pustaka. Riset ini meneliti jurnal-jurnal internasional yang terkait dengan konflik LTS, termasuk kejadian-kejadian aktual yang dimuat oleh harian berita terpercaya seperti CNN, BBC, New York Times dan Aljazeera untuk kemudian digunakan sebagai data yang dianalisis.

Respon terhadap the Rising Power

Tulisan ini menggunakan 2 strategi dalam merespon kekuatan baru menurut ilmu hubungan internasional, yaitu strategi *engagement* dan *hedging*. Berikut penjelasan mengenai kedua strategi secara singkat.

Strategi pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi *engagement*. Strategi ini menurut Schweller, merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam merespon kebangkitan sebuah kekuatan baru. Schweller mendefinisikan strategi ini sebagai : *Engagement refers to the use of non-coercive means to ameliorate the non-status quo elements of a rising major power's behaviour. The goal is to ensure that the growing power is used in ways that are consistent with peaceful change in regional and global order.*

Sementara itu, Cottey dan Foster mengartikan *engagement* sebagai "the use of defence diplomacy as a means of building confidence and cooperation between former or potential adversaries, thereby helping to prevent conflict. Sedangkan diplomasi pertahanan mereka artikan sebagai : *instrument for attempting to build cooperative relations with former or potential adversaries, and thereby helping to prevent potential conflicts.*

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi *engagement* ini

mengutamakan penyelesaian permasalahan dengan jalan damai, yang dapat dilakukan melalui negosiasi ataupun kompromis. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menghindari penggunaan kekerasan oleh negara target dalam menyelesaikan masalah, seperti penggunaan senjata yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara fisik ataupun mental.

Berdasarkan pemahaman oleh ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah negara dikatakan menggunakan strategi *engagement* jika negara tersebut :

1. Lebih memilih penyelesaian konflik secara damai dengan menggunakan berbagai forum internasional seperti konferensi, aliansi multilateral, integrasi regional atau penyelesaian melalui organisasi internasional.
2. Negara sebisa mungkin menghindari dirinya dari segala bentuk konflik bersenjata dengan pihak lain.

Selanjutnya strategi kedua dalam penelitian ini adalah *hedging*. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai apa yang dinamakan dengan *hedging*. Goh, dalam *Policies Studies no. 16* mendefinisikan *hedging* sebagai "a set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straight forward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality". Sementara Sukma mengartikan *hedging* sebagai "a strategy to prevent the worst (saiaku) while trying to construct the best". Selain itu, Roy berargumen bahwa "hedging implies a present condition of strategic uncertainty". Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, Ciorciari menambahkan negara-negara berkembang memilih untuk memiliki pilihan strategis yang terbuka (banyak pilihan). Lebih lanjut, Sukma menambahkan bahwa *hedging* terjadi ketika negara memutuskan untuk tidak menerapkan satu strategi saja di kawasan dimana terdapat kekuatan utama didalamnya. Sejalan dengan itu, Goh menambahkan bahwa negara-negara ini akan memilih untuk berada di posisi tengah, sehingga tidak harus mengambil resiko dalam berhadapan dengan kekuatan lainnya.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *hedging* merupakan sebuah strategi yang diterapkan ketika negara belum berani untuk memilih strategi yang *straight forward* karena takut akan resiko yang akan didapatkan jika Negara memilih untuk berpihak kepada salah satu negara, sehingga negara berusaha untuk tetap memiliki banyak pilihan. Untuk menghadapi dua kekuatan besar, negara memilih untuk berada ditengah-tengah, sehingga tidak satu negarapun merasa terganggu oleh negara tersebut. Jika Indonesia mengaplikasikan *hedging* strategi, maka akan terlihat perilaku Indonesia yang mencerminkan indikator-indikator diatas.

Kebangkitan Tiongkok dan Permasalahan berkaitan dengan Kebangkitan sebuah Negara

Abad ini ditandai dengan fenomena kebangkitan dua negara di Asia, yaitu Tiongkok dan India. Kebangkitan kedua negara ini kemudian menghasilkan berbagai debat dari para ahli, perbedatan ini berputar pada argumentasi apakah dua negara yang sedang bangkit ini akan dapat menggunakan *power* nya secara terkendali atau tidak. Asumsi ini sebenarnya wajar, jika kita menggunakan neorealisme sebagai perspektif untuk menganalisa fenomena kebangkitan tersebut. Neo Realisme adalah varian dari Realisme yang menganggap bahwa peningkatan *power*,-, baik dalam bidang ekonomi maupun militer- merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dimiliki oleh sebuah negara. Neorealisme juga berpendapat bahwa ketika sebuah negara telah mencapai kesejahteraan maka negara tersebut akan mencari pengaruh politik yang lebih luas lagi, baik secara regional maupun secara global.

Usaha untuk memperluas pengaruh ini akan mengakibatkan perubahan pada struktur *power* dikawasan. Perubahan struktur *power* ini diakibatkan oleh reaksi yang diberikan oleh *status quo*, yang terdiri dari negara-negara yang kuat dan negara-negara yang kecil. Negara-negara kuat akan berpikir apakah keberadaan negara yang bangkit ini akan mengancam status mereka sebagai negara adi daya, sementara negara-negara kecil akan lebih merisaukan strategi yang harus mereka ambil agar tetap bertahan.

Selanjutnya, John Mearsheimer menambahkan bahwa negara yang sedang bangkit ini bisa saja merupakan negara yang digolongkan sebagai negara yang *revisionist*, yaitu negara yang tidak segan untuk menggunakan kekerasan untuk mengubah *balance of power*. Disini Mearsheimer menyebutkan salah satu alternatif yang bisa diambil oleh negara adalah membentuk aliansi, untuk dapat mempertahankan *balance of power*.

Jika dikaitkan dengan kebangkitan Tiongkok, maka kebangkitan Tiongkok perlu diawasi, karena kebangkitan ini akan memberikan alarm bagi negara besar yang telah ada sebelumnya yaitu Amerika Serikat (AS), Jepang, Australia dan Rusia dan juga negara-negara berkembang disekitar mereka termasuk negara-negara Asia Tenggara. Khusus untuk negara Asia Tenggara, kebangkitan Tiongkok akan menimbulkan kewaspadaan apakah Tiongkok kemudian akan bersaing memperebutkan Asia Tenggara, sehingga Asia Tenggara menjadi sebuah arena pertempuran yang akan sangat merugikan negara-negara dikawasan ini.

Ahli yang telah dijabarkan diatas menyatakan bahwa ketika sebuah negara meningkat kesejahteraannya, maka negara tersebut akan memperluas kekuasaannya. Tiongkok sedang meningkat jika dilihat dari segi ekonomi dan

Tiongkok juga memperlihatkan kecenderungan untuk memperluas teritorinya yang terbukti dengan klaim negara ini terhadap seluruh wilayah di LTS yang sebenarnya merupakan wilayah yang saling tumpang tindih dengan perbatasan negara lain. Menilik semua fenomena ini secara keseluruhan maka wajar jika kebangkitan Tiongkok kemudian memberikan kewaspadaan bagi negara sekitarnya dan juga negara super power yang telah ada sebelumnya.

Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo atau yang lebih populer dengan sebutan Jokowi dilantik sebagai presiden Indonesia yang ke tujuh pada bulan Oktober tahun 2014 yang lalu. Sejak awal kampanyenya, Jokowi telah memperlihatkan ketertarikannya yang berbeda dengan presiden SBY dalam hal kebijakan luar negeri. Jika banyak ahli menyatakan bahwa presiden SBY menerapkan kebijakan luar negeri yang *high profile*, *outward looking* dan *internationalist*, maka presiden Jokowi cenderung lebih *low profile* dan *inward looking*. Maksudnya disini adalah Jokowi lebih beorientasi pada reformasi domestik, mempertahankan kedaulatan Indonesia dan berfokus pada hal-hal yang diperlukan level domestik. Visi misi Jokowi—JK dengan jelas menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang digunakan Indonesia akan sangat berorientasi pada kepentingan nasional dan lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan visi misinya yang telah dipublikasi secara umum tersebut, presiden Jokowi mencoba untuk menerapkan kebijakan yang disebutnya sebagai kebijakan yang *down to earth* , yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

Pada pidato perdananya sebagai presiden, Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap melanjutkan amanat pembukaan UUD 1945, yang salah satunya adalah ikut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, yang juga dapat dipahami sebagai keinginan sang presiden untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif. Selain itu, dalam pidato perdananya tersebut Jokowi juga menegaskan hirauannya terhadap wilayah maritim Indonesia. Keinginan untuk memperkuat maritim Indonesia telah dikemukakan oleh Presiden semenjak kampanyenya tahun lalu. Dalam sembilan butir visi dan misi yang diusung oleh Jokowi – JK yang terkenal dengan sebutan Nawacita, kata Maritim disebutkan pada poin pertama. "Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim". Dari sinilah keinginan untuk

menjadikan Indonesia sebagai poros maritim lahir.

Apakah Jokowi menggunakan strategi yang sama dengan SBY?

Dua bagian terakhir membahas mengenai strategi yang digunakan Jokowi dan mengidentifikasi apakah strategi yang digunakan dalam merespon kebangkitan Tiongkok masih sama dengan strategi yang digunakan oleh presiden SBY.

Engagement melalui ASEAN

Engagement seperti yang telah dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka merupakan sebuah strategi yang lebih mengutamakan penggunaan cara-cara yang damai dalam menyelesaikan konflik. Kata *engagement* ini tidak memiliki arti yang cocok jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, sehingga penulis akan tetap menggunakan terminologi asing ini untuk menjelaskan strategi Indonesia. Lebih lanjut, khusus untuk hubungan Indonesia dengan Tiongkok, Leifer menjelaskan bahwa : "*Indonesia's version of engaging China has been distinguished in the main by participation in multilateral dialogues with a view to encouraging the government in Beijing of the advantages of regional cooperation and good citizenship*". Artinya, dalam mencoba melakukan *engagement* terhadap Tiongkok Indonesia melakukannya dengan memberikan gambaran kepada Beijing mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh negara tersebut jika bekerja sama dengan kawasan Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan strategi *engagement* secara konseptual yang memang lebih mengutamakan *reward* daripada *punishment*. Dalam pelaksanaannya, *engagement* yang dilakukan Indonesia pada pemerintahan terdahulu adalah *engagement* melalui forum ASEAN.

Mungkin sebagian orang masih bingung kenapa Indonesia seakan-akan selalu terkait dengan ASEAN. Hal ini tidaklah aneh, karena Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang juga merupakan pendiri ASEAN bersama Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. ASEAN telah lama menjadi *corner stone* bagi kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga dalam setiap langkah dan kebijakannya Indonesia akan selalu mempertimbangkan grup regional ini.

Pada dasarnya secara kontekstual, presiden Jokowi memiliki niat yang sama dengan pendahulunya untuk tetap menjadikan ASEAN sebagai *corner stone* dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam visi misinya, Jokowi meletakkan prioritas ke tiga yang disebut sebagai memperluas mandala keterlibatan regional dikawasan Asia-Pasifik. Prioritas ketiga ini kemudian dibagi menjadi 5 poin, dan meletakkan fokus pada ASEAN di poin yang pertama; "Jokowi – JK berjanji akan mementingkan konsolidalitas di ASEAN,

mengutamakan *ASEAN centrality* dan memperkuat arsitektur regional".

Akan tetapi, ketidak konsistenan dari visi misi tersebut terus terlihat sampai hari ini. Salah satu bentuk ketidak konsistenan ini adalah pendekatan yang berbeda yang digunakan presiden Jokowi terkait dengan konflik LTS, seiring meningkatnya tensi konflik ini pada tahun 2014 lalu. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tiongkok kemudian dibalas dengan kekerasan yang sama oleh Indonesia di sekitaran wilayah laut Natuna,- yang seperti telah menggeser posisi Indonesia dari *non-claimant states* menjadi *claimant states* karena telah terlibat langsung dalam kontak perebutan kedaulatan. Pernyataan-pernyataan yang kemudian dibuat oleh pejabat negara memperlihatkan perbedaan strategi yang digunakan oleh Indonesia.

Salah satu pernyataan yang memperlihatkan perbedaan antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan SBY adalah pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada bulan Oktober 2015 yang menyatakan bahwa tidak perlu melibatkan banyak pihak dalam mencari solusi penyelesaian konflik LTS. Pernyataan ini jika dilaksanakan, akan berbeda dengan pendekatan tradisional Indonesia dalam sengketa LTS yang biasanya secara tindak langsung mengundang kehadiran banyak negara termasuk negara *super power* untuk ikut terlibat. Penulis beramsumsi jika banyak pihak yang dimaksudkan disini termasuk ASEAN, maka telah terjadi perubahan strategi dalam merespon Tiongkok dikonflik LTS.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Jokowi berfokus pada poros maritim, yang pada aplikasinya dilaksanakan dengan mengawal wilayah perbatasan Indonesia dari segala aksi ilegal yang terjadi di kawasan laut ini, yang beberapa kali membuat memanasnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Salah satu titik memanasnya sengketa LTS yang melibatkan Indonesia adalah insiden pada bulan Maret 2016 yang melibatkan kapal Indonesia dan Tiongkok di wilayah laut sekitar pulau Natuna yang menghasilkan protes dari Indonesia.

Insiden penembakan selanjutnya kembali terjadi pada bulan Mei dan Juni 2016 disekitaran wilayah Natuna. Kapal perang Indonesia menembaki 12 kapal asing yang didapati memasuki wilayah teritori Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016, Angkatan Laut menangkap satu kapal Tiongkok dengan tujuh orang kru didalamnya. Perlakuan Indonesia ini kemudian menghasilkan protes dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok karena menganggap Indonesia telah melakukan praktek "kekerasan" di wilayah yang secara tradisional merupakan wilayah penangkapan ikan bagi Tiongkok. Kejadian ini kemudian direspon oleh Jokowi dengan berkunjung ke wilayah Natuna, yang oleh kabinet

kementrian disebut sebagai sinyalemen dari Jokowi bahwa Natuna adalah wilayah teritorial Indonesia. Sementara itu Menteri Pertahanan memberikan pernyataan bahwa dia akan segera memanggil Duta Besar Tiogkok untuk Indonesia dan memberitahukan bahwa insiden yang terjadi merupakan "ancaman yang nyata" bagi Indonesia. Dua respon ini tidak memperlihatkan keinginan Indonesia untuk menggunakan forum ASEAN sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan, tampaknya penyelesaian bilateral lebih menjadi pilihan dari para petinggi negara.

Selanjutnya ketika Filipina mengajukan permasalahan konflik LTS ke Pengadilan internasional, tidak terlihat respon aktif dari Indonesia. Juru bicara ASEAN menyatakan bahwa sekretariat organisasi itu tidak menerima pernyataan bersama (*joint statement*) dari negara anggota ASEAN berkaitan dengan insiden tersebut. Kejadian ini sebenarnya cukup aneh, karena Indonesia yang secara tradisional memposisikan dirinya sebagai pemimpin di ASEAN selalu akan mengambil sikap melalui ASEAN terhadap setiap kejadian yang dirasa dapat mengganggu stabilitas ASEAN. Biasanya, Indonesia akan mensponsori terbentuknya pernyataan bersama yang akan memperlihatkan sikap ASEAN. Tetapi pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada tanggal 15 Juni 2016 memperlihatkan kenyataan bahwa tidak ada sikap ASEAN secara khusus mengenai beberapa kejadian di LTS beberapa waktu belakangan. Kenyataan ini berbeda dengan yang biasa terjadi, presiden Jokowi malah memilih untuk bersikap secara bilateral daripada bersikap sebagai grup regional.

Selanjutnya, ketika pada akhirnya ASEAN mengadakan *foreign minister meeting* pada bulan Juli 2016 di Vientiane, kembali tidak terlihat usaha khusus Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini secara aktif seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Pada masa pemerintahan SBY, jika terdapat permasalahan di lingkungan ASEAN maka Indonesia akan secara aktif berpartisipasi dalam membentuk berbagai forum diskusi untuk membangun rasa saling percaya diantara negara yang bersengketa,- keaktifan semacam inilah yang membuat Indonesia diasumsikan sebagai *natural leader* ASEAN. Tidaklah aneh jika kemudian banyak pihak merasa bahwa Indonesia telah meninggalkan ASEAN sehubungan dengan berkurangnya 'perhatian' negara ini terhadap ASEAN. Diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal dalam tulisannya di koran lokal berbahasa inggris *the Jakarta Post* menghimbau pemerintahan Jokowi untuk lebih aktif dalam ASEAN termasuk mempersatukan ASEAN, Indonesia haruslah berusaha untuk mencari respek ASEAN bukan meminta respek dari ASEAN. Sepertinya pernyataan Djalal ini berkaitan erat dengan peran Kementerian Luar Negeri saat ini yang lebih banyak memberikan

pernyataan yang mengecilkan konflik ini dari pada memfasilitasi forum dialog antar negara.

Terdapat inkonsistensi pernyataan dan aplikasi dari kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan konflik LTS ini. Dalam berbagai pernyataan, mulai dari visi misi, sampai kepada berbagai pidato, Jokowi selalu menekankan pentingnya ASEAN bagi Indonesia dan betapa inginnya Indonesia mencari solusi bagi konflik ini. Contohnya adalah pernyataan presiden pada tanggal 16 Agustus 2016 yang lalu yang meyakinkan bahwa Indonesia akan terus berpartisipasi aktif dalam mencari solusi bagi konflik LTS dengan cara damai paska keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah arbitrase internasional terkait konflik antara Tiongkok dan Filipina. Menlu Marsudi pun selalu menyebutkan bahwa ASEAN tetaplah merupakan *corner stone* dari kebijakan luar negeri Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada tempat khusus bagi ASEAN dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Presiden Jokowi sepertinya tidak begitu tertarik terhadap pertemuan tingkat tinggi dan menganggap bahwa acara semacam ini hanya membuang-buang waktu saja, karena tidak berdampak secara langsung terhadap Indonesia.

Selain itu, ketidak konsistenan terlihat dari "tugas" yang diberikan kepada Menlu Marsudi yang tidak mengindikasikan ASEAN sebagai *cornerstone* bagi Indonesia tersebut. Sebut saja dua Menlu sebelumnya yaitu Menlu Natalegawa dan Menlu Wirajuda memiliki tugas khusus terhadap ASEAN. Menlu Wirajuda berhasil melahirkan ASEAN Charter berkaitan dengan permasalahan demokrasi dan hak azazi manusia, sedangkan Menlu Natalegawa merupakan sosok yang sangat aktif dalam mencari solusi bagi permasalahan sengketa LTS. Hal serupa tidak ditemukan dalam agenda menlu Marsudi. Satu-satunya komitmen ASEAN yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Indonesia adalah mengenai masyarakat Ekonomi ASEAN.

Peran minim Indonesia dalam ASEAN juga dirasakan oleh Connelly yang dalam tulisannya di *contemporary southeast asia* menyatakan bahwa "*under Jokowi, then we are likely to see a less clear, less conciliatory dan less cooperative foreign policy, offering less leadership in Southeast Asia and the world*". Pernyataan Connelly ini sejalan dengan penemuan riset ini, bahwa peran Indonesia di ASEAN terkait konflik LTS tidak seperti peranan Indonesia pada pemerintahan sebelumnya.

Ada berbagai alasan yang mungkin bisa menjelaskan berkurangnya perhatian Indonesia terhadap ASEAN yang lebih lanjut berdampak pada tidak terjadinya *engagement* melalui ASEAN dalam konflik LTS ini. Alasan pertama berkaitan dengan presiden Jokowi sendiri yang sedari awal telah

mendeklarasikan fokus utama pemerintahannya adalah terhadap isu domestik yang dia laksanakan dengan mencanangkan poros maritim. Jokowi pada dasarnya bukanlah presiden yang tertarik terhadap isu-isu internasional dan menganggap bahwa keikutsertaan dalam forum internasional merupakan kegiatan tidak produktif yang tidak memberikan dampak secara langsung pada Indonesia. Bisa jadi sikap ini merupakan manifestasi dari latar belakang kehidupan sang presiden yang memulai karirnya sebagai pengusaha furnitur dari usaha yang telah diturunkan keluarganya. Latar belakang ini sepertinya berpengaruh pada pola pikir sang presiden yang mengutamakan kerja, yang sepertinya diartikan dengan kerja diluar kegiatan rapat.

Alasan kedua berkaitan erat dengan para penasehat kebijakan luar negeri Jokowi, yang salah satunya adalah ahli kebijakan luar negeri Rizal Sukma. Pada suatu kesempatan, ketika ditanyai apakah sang presiden akan menghadiri *meeting* G20 di Brisbane pada tahun 2014 yang lalu, dia menjawab sambil menunjuk Sukma yang duduk tepat disebelahnya "jika dia mengatakan saya harus pergi, maka saya akan pergi". Pernyataan ini sedikit banyaknya memperkuat dugaan mengenai pengaruh Sukma dalam setiap kebijakan luar negeri Jokowi. Sukma sendiri terkenal dengan berbagai sarannya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dan salah satu tulisannya di *the Jakarta Post* menyarankan agar Indonesia keluar dari sangkar emas ASEAN. Pada suatu kesempatan di pemerintahan Jokowi ini, Sukma pernah berargumen bahwa ASEAN adalah satu dari sekian banyak *corner stone* yang dimiliki oleh kebijakan luar negeri Indonesia. Pada kesempatan lain, Sukma juga pernah menyatakan bahwa : *the purpose of foreign policy is to secure national interest, and where ASEAN fails to do this, other avenues should be pursued*". Pernyataan tadi seakan menyiratkan bahwa jika ASEAN tidak dapat memberikan keuntungan yang nyata bagi kebijakan luar negeri Indonesia, maka selayaknya Indonesia beralih dari ASEAN., Sikap ini dapat dikatakan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang memberikan kontribusi penuh pada ASEAN walaupun ASEAN tidak dapat memberikan keuntungan pada Indonesia secara langsung.

Kedua alasan tersebut penulis rasa merupakan alasan tidak terlihat pelaksanaan strategi *engagement* terhadap Tiongkok dengan menggunakan forum ASEAN yang penulis temukan.

Hedging

Strategi kedua yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada masa SBY adalah strategi *hedging* yang sebagaimana dijelaskan diatas merupakan sebuah strategi yang diambil oleh sebuah negara ketika negara tersebut belum bisa menentukan kebijakan *straight forward*. *Hedging* juga dapat diartikan

sebagai "melakukan perbuatan yang saling bertentangan untuk mempertahankan kepentingan dengan memaksimalkan keuntungan sementara yang bisa didapatkan, yang secara bersamaan mengurangi risiko jangka panjang akan potensi ancaman". Dalam periode pemerintahan SBY, *hedging* dilakukan dengan memelihara sebanyak mungkin opsi yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari menjaga hubungan baik dengan AS dan juga Tiongkok serta mengundang berbagai negara untuk terlibat aktif dalam berbagai forum diskusi konflik LTS. Strategi Indonesia ini dapat dikatakan berhasil karena Indonesia berhasil menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak dan dapat mengurangi tensi konflik. Pertanyaan selanjutnya dalam riset ini adalah apakah presiden Jokowi masih menggunakan strategi yang sama dengan pendahulunya.

Kepentingan Indonesia di Tiongkok

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada bulan Maret 2015, Indonesia dan Tiongkok mengalami ketegangan di sekitar perairan kepulauan Natuna yang terkait masalah wilayah penangkapan ikan oleh nelayan Tiongkok. Dalam menanggapi kejadian di Kepulauan Natuna tersebut, pada Maret 2015, Presiden Jokowi, pertama kali mengambil posisi dalam sengketa LTS sejak menjabat sebagai presiden pada Oktober 2014 lalu. Jokowi menyampaikan bahwa klaim Tiongkok untuk sebagian besar LTS dengan klaim "9 dotted-lines" tidak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional.

Sementara itu, dari sisi Tiongkok, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, menyatakan bahwa Tiongkok menolak untuk melihat kontroversi antara Tiongkok-Indonesia sebagai suatu permasalahan.

"The Indonesian side has no territorial claim to China's Nansha [Spratly] Islands. The Chinese side has no objection to Indonesia's sovereignty over the Natuna islands... China-Indonesia comprehensive strategic partnership is making steady and sound progress."

Tampaknya yang dimaksudkan oleh Tiongkok adalah bahwa hubungan ekonomi Tiongkok-Indonesia berada dalam keadaan yang strategis dan saling membutuhkan. Pasalnya, pasca pernyataan Jokowi di Jepang, ia melanjutkan perjalanan kenegaraannya ke Tiongkok dan kemudian justru menyepakati untuk menjalin kerjasama terkait *China's 21st Century Maritime Silk Road* atau jalur sutra maritim Tiongkok. Program jalur sutra maritim Tiongkok dianggap mempunyai benang merah dengan program tol laut Indonesia, yang sama-sama bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan mengintegrasikan ekonomi di jalur yang dipilih. Oleh karena itu, Indonesia menginginkan agar

investor Tiongkok akan ramai berinvestasi demi mewujudkan cita-cita tersebut. Bahkan, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, telah menyatakan komitmen Tiongkok untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur maritim melalui bantuan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan *Silk Road Fund*.

Dari dua kondisi di atas, yaitu pernyataan Presiden Indonesia terkait “9 dotted-lines” memberikan kesan bahwa Indonesia menyampaikan pesan yang bertentangan dengan Tiongkok, sambil juga mencoba membangun hubungan ekonomi yang lebih dekat melalui kerjasama maritim. Penelitian ini melihat bahwa strategi *hedging* yang dilakukan Indonesia adalah dengan mengakomodir kepentingan namun di saat bersamaan juga mengonfrontasi kebangkitan Tiongkok.

Oleh karena itu, hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia saat ini dapat dikatakan unik. Di satu sisi, berbagai insiden kerap terjadi di wilayah Natuna melibatkan nelayan Tiongkok dan petugas patroli laut dari kedua negara, yang kemudian memunculkan protes dari negara, baik Tiongkok maupun Indonesia. Di sisi lain, Indonesia senantiasa mengindikasikan keinginan untuk menjalin kemitrakan ekonomi yang erat dengan Tiongkok untuk memaksimalkan ekspektasi keuntungan dari sektor perdagangan dan investasi. Bahkan, di tahun pertama masa pemerintahan Jokowi, ia telah melakukan kunjungan ke Beijing sebanyak tiga kali, yaitu dalam pertemuan bilateral diselang pertemuan APEC; kunjungan resmi kepresidenan, pertemuan *China-Indonesia Economic Cooperation Forum*.

Kuik mendefinisikan *hedging* sebagai posisi yang berlawanan atau bertentangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara melalui memaksimalkan keuntungan sementara secara bersamaan mengurangi risiko jangka panjang dari potensi ancaman. Maka, berangkat dari teori *hedging*, penelitian ini melihat bahwa terdapat ekuilibrium yang ingin dijaga Indonesia dalam melaksanakan strateginya menghadapi Tiongkok.

Selanjutnya, strategi *hedging* juga dapat diidentifikasi melalui upaya Indonesia dalam melakukan pendekatan kepada AS dan Australia, sebagai aktor ekstra regional, yang akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

Indonesia diantara Amerika Serikat dan Tiongkok

Kepentingan nasional AS yang jelas terbaca oleh dunia, dimanfaatkan oleh Indonesia dengan mengintensifkan kerjasamanya dengan negara adidaya tersebut. Dalam sektor militer, latihan reguler bagi militer kedua negara terus ditingkatkan dan bahkan dilaksanakan di perairan Natuna. Sejak 2014, Indonesia telah menjadi tuan rumah *Excercise Komodo*, yaitu multilateral *joint*

naval exercise yang juga melibatkan AS, di Provinsi Kepulauan Riau. Strategi Indonesia ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah melihat Tiongkok sebagai ancaman, sehingga diperlukan kekuatan besar untuk melawan sikap asertif Tiongkok di LTS yang semakin meningkat.

Bagi Tiongkok, keberadaan kehadiran militer AS di LTS, selain untuk mempertahankan kedudukannya di wilayah pasifik, AS bermaksud untuk meredam ambisi kekuatan maritim Tiongkok, yang dideklarasikan oleh di masa pemerintahan Presiden Tiongkok, Hu Jintao, pada tahun 2012. Kekuatan maritim yang dicita-citakan Tiongkok meliputi Angkatan Laut, penjaga pantai, milisi maritim, perdagangan via jalur laut, dan pembuatan kapal dan industri perikanan. Bagi Beijing, untuk memenuhi tujuan sebagai negara berkekuatan maritim, Tiongkok harus mampu mempertahankan semua hak maritim Tiongkok dan kepentingan di sekitar wilayah laut, terlepas dari kehadiran militer dan komitmen aliansi negara-negara Asia Tenggara dengan AS.

Sementara itu, posisi Indonesia seakan-akan terjepit di antara dua kekuatan besar yang mendominasi wilayah Pasifik. Jika pada Indonesia di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seakan-akan memanfaatkan kondisi tersebut sebagai aji mumpung, pada pemerintahan Jokowi terlihat bahwa Indonesia lebih terlibat aktif karena telah bersinggungan dengan masalah kedaulatan wilayah di Indonesia.

Australia sebagai Aktor Ekstra Regional Baru dalam Konflik LTS

Australia dan AS telah beraliansi sejak Perang Dunia Kedua (1941-1945). Pada tahun 2005, Kongres AS mengumumkan bahwa Australia merupakan negara aliansi yang paling setia bagi AS. Layaknya negara yang beraliansi, maka tidak mengherankan jika Australia memutuskan untuk mulai terjun ke dalam konflik LTS.

Australia pertama kali terjun ke dalam lingkaran konflik melalui desakannya kepada Tiongkok agar tunduk kepada keputusan peradilan Mahkamah Arbitrase (PCA) di Den Hagg yang keluar pada 12 Juli 2015 lalu. Putusan tersebut memenangkan gugatan Filipina pada tahun 2013 atas Tiongkok sehingga "9 dotted-lines" yang diklaim Tiongkok tidak berlaku.

Desakan dari Australia tersebut dibalas dengan ancaman Tiongkok agar Australia berhati-hati dalam berpihak kepada AS. Ancaman tersebut kebanyakan dirilis oleh media asal Tiongkok, yang juga menyatakan bahwa jika diperlukan, Tiongkok akan memutuskan hubungan investasinya di Australia. "*Canberra must choose between economic interests, toeing US line*" adalah salah satu judul berita yang dimuat dalam *China Daily*.

Permintaan dari Indonesia menggambarkan strategi *hedging* yaitu dengan memasukkan negara besar di luar kawasan untuk mengurangi resiko pecahnya konflik di LTS. Pada prinsipnya, posisi Australia dan AS dalam isu LTS sangat dekat. Australia, seperti AS, tidak berada dalam posisi yang bersinggungan dengan klaim wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel. Kedua pemerintahan, seperti kebanyakan negara lainnya, meyakini bahwa hukum internasional mengatur hak lintas damai kapal perang di wilayah teritorial negara lain tanpa suatu pemberitahuan lebih awal. Oleh karena itu, angkatan laut dan udara kedua negara terus mempraktikkan *freedom of navigation* sesuai hukum internasional, baik untuk transit kapal dan overflight pesawat.

Insentif dalam *hedging* dipandang lazim dalam sistem unipolar yang "dalam proses dekonsentrasi kekuasaan". Brock Tessman berpendapat bahwa perilaku strategi *hedging* membantu negara lapis kedua mengatasi ancaman dan kendala yang mungkin mereka hadapi di bawah kondisi unipolar, sementara secara bersamaan bersiap-siap untuk ancaman baru dan peluang yang mungkin muncul apabila pemimpin sistem terjatuh atau menurun. Bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, AS dilihat sebagai penjamin keamanan di wilayah mereka, sehingga strategi *hedging* merupakan kebijakan yang tepat untuk mengatasi potensi kerugian. Dengan terlibatnya Australia dalam patroli laut di Kepulauan Natuna, tentu Tiongkok akan berpikir ulang untuk mengkonfrontasi langsung karena akan berakibat negatif kepada hubungan Tiongkok - Indonesia, namun juga Australia dan Amerika Serikat.

Pelaksanaan strategi *hedging* ini sebenarnya terkait erat dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menyiratkan bahwa Indonesia akan berperan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi melalui berbagai macam pendekatan. Dalam hal ini "aktif" dilaksanakan Indonesia dengan mensponsori berbagai bentuk kerja sama yang kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia tidaklah sendiri dalam menghadapi permasalahan sengketa laut dengan Tiongkok. Selain itu, semboyan *non alignment* telah memosisikan Indonesia sebagai negara yang mencoba menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terlihat jelas melalui usaha Indonesia untuk tetap berhubungan baik dengan Tiongkok dan memaksimalkan setiap keuntungan yang bisa didapat dari negara ini.

Kesimpulan

Dua sub bab diatas telah menjelaskan strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk merespon kebangkitan Tiongkok dengan setting konflik Laut Tiongkok Selatan. Pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Indonesia sedikit berbeda dengan strategi yang

diterapkan oleh Presiden SBY. Penulis belum menemukan indikasi bahwa Indonesia berusaha untuk melakukan *engagement* terhadap Tiongkok dengan menggunakan ASEAN, dengan alasan dan rasionalisasi yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Kecenderungan penyelesaian sengketa lebih banyak terlihat pada konteks bilateral. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa Indonesia konsisten menggunakan strategi *hedging* dengan cara menjaga sebanyak mungkin opsi yang dimiliki dengan berhubungan secara intens dengan negara-negara seperti AS dan Australia. Indonesia juga tetap memelihara hubungan baik dengan Tiongkok dalam bidang ekonomi, walaupun dalam bidang keamanan pada kenyataannya Indonesia dan Tiongkok saling melakukan kekerasan. Semua sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia masih menerapkan strategi hedging.

Daftar Pustaka

- Adam, "Indonesia key to Resolving tension in South China Sea", *Epoch Times*, 7 September 2012
- Anwar, *Mapping out Jokowi's Foreign Policy* (Interview with Jakarta Globe)
- Amindoni, "Jokowi continues to push for settlement in South China Sea Disputes", *the Jakarta Post*, 17 Agustus 2016
- Aredy, "Indonesian Warship Fires on Foreign Fishing Boats in South China Sea", *The Wall Street Journal*, 20 Juni 2016 view online <http://www.wsj.com/articles/indonesian-warship-fires-on-foreign-fishing-boats-in-south-china-sea-1466350384>, 10 Nov 2016
- Austin, "Australia's Careful Dance in the South China Sea", 10 Juni 2016, view online <https://www.eastwest.ngo/idea/australia%E2%80%99s-careful-dance-south-china-sea> 12 November 2016
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Benang Merah Program Tol Laut dan One Belt One Road, Daya Dorong Investasi Tiongkok ke Indonesia", Siaran Pers, 18 Juni 2016, view online http://www8.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_B_KPM_180616_-_Benang_Merah_Program_Tol_Laut_dan_One_Belt_One_Road,_Daya_Dorong_Investasi_Tiongkok_ke_Indonesia.pdf
- Baviera. 'The South China Sea Disputes after the 2002 Declaration : Beyond Confident Building' in Saw Swee-Hock, Sheng Lijun & Chin Kin wah (ed), *ASEAN –China Relations Realities and Prospect*, ISEAS, Singapore 2005

- BBC Indonesia, *Tiongkok protes penembakan kapal nelayan, TNI AL : "Kami tidak brutal"*, diakses secara online http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160620_indonesia_tnial_bantah_kapalTiongkok, 21.08.16, 4:54 wib
- BBC Indonesia, *Tiongkok serukan Filipina abaikan putusan Mahkamah Arbitrase*, 19 Juli 2016, diakses secara online http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160719_dunia_filipina_laut_Tiongkok_selatan, 21.08.16, 5:07 wib
- Ciorciari, *The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers since 1975*, Georgetown University Press, Washington D.C., 2010
- Connelly, "sovereignty of the Sea : President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges", *Contemporary Southeast Asia* 37 no.1 2016
- Cottey and Anthony Forster *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance* 2004, Rotledge, 2006
- Djalal, "Indonesian foreign policy : Raising the game in 2016", *the Jakarta Post*, 5 Januari 2016
- Goh, *Meeting the China Challenge : The US in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Centre, Washington ,2005
- Hongfang, "South China Sea Issue in China-ASEAN Relations : An Alternative Approach to Ease the Tension", *International Journal of China Studies*, V.2, No.3, Dec 2011, pp. 585-600
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Jokowi: Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Tak Berdasar", 25 Maret 2015, view online <https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/03/25/jokowi-klaim-Tiongkok-di-laut-Tiongkok-selatan-tak-berdasar.html> 12 November 2016
- Leifer, *Indonesia's Encounters with China and the Dilemmas of Engagement*, in *Engaging China : the Management of an Emerging Power*, A.I Johnston dan R.S Ross , Routledge, 1999, New York 1999
- Marthinus, "See no China : Indonesia's South China Sea PolicyS", *The Jakarta Post*, 17 June 2016, view online <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/06/17/see-no-china-indonesias-south-china-sea-policy.html>, view online 10 Nov 2016
- McDevitt, "Becoming a Great "Maritime Power": A Chinese Dream", Report of CNA Strategic Studies, June 2016, view online https://www.cna.org/cna_files/pdf/IRM-2016-U-013646.pdf 13 November 2016.
- Mersheimer, "Structural Realism" in T. Dunne, M. Kurki & S. Smith (eds),

International Relations Theories : Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2010, pp.77-94

Muhaimin, "Insiden Indonesia dan Tiongkok di Natunasudah 3Kali", *Sindonews*, 20 Juni 2016, diakses online <http://international.sindonews.com/read/1118077/40/insiden-indonesia-dan-china-di-natuna-sudah-3-kali-1466385708>, 21 Agustus 2016, 4:46 wib

BBC Indonesia, *Tiongkok protes penangkapan delapan ABK di perairan Natuna*, 31 Mei 2016, diakses online http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160530_dunia_kapal_Tiongkok_natuna_protes, 21.08.16, 4:50 Wib

Otto, "Indonesia's Widodo wades into South China Sea Dispute", *The Wall Street Journal*, 23 Juni 2016, view online <http://www.wsj.com/articles/indonesias-widodo-wades-into-south-china-sea-dispute-1466683527>, 10 Nov 2016

Parameswaran, "What's behind Indonesia's South China Sea Rhetoric Amid US China tension?", *the Diplomat*, 30 Oktober 2016

Parameswaran, "Indonesia's South China Sea Policy : A delicate Equilibrium", *The Diplomat*, 24 Maret 2016, view online <http://thediplomat.com/2016/03/indonesias-south-china-sea-policy-a-delicate-equilibrium/> 25 Juni 2016

President Yudhoyono as quoted by Antara, "Presiden soroti potensi konflik perbatasan sebagai tantangan" President highlighted the potential of the border conflict as a challenge, *SHNews*, 16 August 2012, view online <http://www.shnews.co/detile-6473-presiden-soroti-potensi-konflik-perbatasan-sebagai-tantangan.html> 22 October 2012

Rahman dan B. Otto, "Indonesia to step up Maritime Security After Run-In with Chinese Coast Guard", *The Wall Street Journal*, 21 Marret 2016

Roza, "Indonesia di Tengah Peningkatan Ketegangan di Laut China Selatan", *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VIII, Juni 2016, view online http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-11-I-P3DI-Juni-2016-75.pdf 10 November 2016

Saragih, "ASEAN chief pushes RI to act on South China Sea dispute", *The Jakarta Post*, 9 April 2013

Schweller, "Managing the rise of great powers : history an theory" in A.I. Johnston an R.S. Ross (eds), *Engaging China*, Routledge, 199

Sindonews.com, "Alasan Australia Jadi Target Empuk Beijing di Laut China

Selatan", 1 Agustus 2016, view online
<http://international.sindonews.com/read/1127922/40/alasan-australia-jadi-target-empuk-beijing-di-laut-china-selatan-1470048474> 12 November 2016

Tashandra, "Putusan Arbitrase Internasional soal Laut China Selatan Dinilai Berdampak Positif bagi Indonesia", *Kompas*, 14 Juli 2016, view online 20 Juli 2016, 14:30
<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/14/12502321/putusan.arbitrase.internasional.soal.laut.china.selatan.dinilai.berdampak.positif.bagi.indonesia>

The Jakarta Post, RI to sink boats from China, Thailand, Malaysia on Wednesday, 19 Mei 2015 - See more at:
<http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/19/ri-sink-boats-china-thailand-malaysia-wednesday.html#sthash.u9OtiViQ.dpuf> 27.05.15 11.40 wib

Visi Misi Jokowi -JK

Weasley. "What's at stake in the South China Sea", *Lowy Institute for International Policy*, 2012,
<http://www.lowyinstitute.org/publications/whats-stake-south-china-view-6-Sep-2012>

Zhiguo, "South China Sea : Turning Suspicion into Mutual Understanding and Cooperation" in Saw Swee-Hock, Sheng Lijun & Chin Kin wah (eds), *ASEAN –China Relations Realities and Prospect*, ISEAS, Singapore 2005

Quo Vadis Organisasi Internasional? Studi Kasus Peran ASEAN dalam Pencemaran Udara Lintas Batas di Asia Tenggara

Verdinand Robertua

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai peran dan fungsi organisasi internasional di dalam menyelesaikan masalah negara anggota dengan studi kasus pencemaran udara lintas batas di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN memiliki perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) untuk mengatasi dan menanggulangi masalah pencemaran udara lintas batas. Pertanyaan penelitian adalah mengapa bagaimana peran ASEAN di dalam menyelesaikan masalah pencemaran udara lintas batas dengan menggunakan teori realisme. Konsep yang digunakan adalah konsep organisasi internasional. Terdapat dua kesimpulan yang dicapai dalam penelitian ini. Pertama, kelahiran AATHP menjadi simbol keberhasilan ASEAN di dalam menjalankan fungsi organisasi internasional sebagai tempat artikulasi dan agregasi kepentingan. Kedua, implementasi AATHP tidak efektif karena ASEAN krisis kepercayaan antara Indonesia dan Malaysia terhadap peran ASEAN sebagai aktor yang memiliki legitimasi di dalam mengatur masalah domestik Indonesia terkait pencemaran udara lintas batas.

Kata kunci

ASEAN, pencemaran udara lintas batas, realisme, organisasi internasional, AATHP

Latar Belakang

Setelah Konferensi Tingkat Tinggi UNHE di Stockholm pada tahun 1972 dan Konferensi Tingkat Tinggi UNCED di Rio de Janeiro pada tahun 1992, masalah-masalah lingkungan hidup menjadi kajian penting dalam hubungan internasional. Masalah kebakaran hutan, kelangkaan sumber daya alam, dan pemanasan global berdampak luas bagi kehidupan manusia dan melewati batas-batas negara. Pemikir-pemikir hubungan internasional merumuskan kembali teori hubungan internasional di dalam merespons isu-isu lingkungan. Sebagai hasilnya, begitu banyak buku dan jurnal internasional terkait interkoneksi antara lingkungan hidup dan ilmu hubungan internasional muncul ke publik. Sebagai contoh, Haas (1992) membahas mengenai peran komunitas akademik dalam negosiasi perjanjian lingkungan internasional, Deudney dan Matthew (1999) membahas mengenai sekuritisasi masalah lingkungan

transnasional, Laferrière dan Stoett (1999) membahas sintesis teori ekologi dengan teori hubungan internasional dan Clapp dan Dauvergne (2005) membahas dimensi ekonomi politik internasional dari lingkungan hidup.

Kebakaran hutan adalah sebuah fenomena yang terjadi di berbagai negara dan mendapat perhatian serius dari berbagai negara dan organisasi internasional. Sejak tahun 1980, lebih dari 180 juta hektar hutan telah hilang atau setara dengan enam kali luas wilayah Filipina (Clapp and Dauvergne 2005, 35). Berdasarkan estimasi Bank Dunia (2016), 60% dari hutan gambut musnah akibat terbakar dalam periode 1985 hingga 2002.

Kebakaran hutan merupakan faktor utama dari pencemaran udara lintas batas. Pencemaran udara lintas batas adalah pencemaran atau polusi yang terjadi dalam suatu negara atau daerah, namun akibat dari pengaruh cuaca, atmosfer, dan biosfer menyebabkan polusi atau pencemaran tersebut menyebar dan memasuki wilayah negara atau daerah lain serta mengganggu aktivitas, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya di negara yang terkena dampak. Pencemaran udara ini berdampak sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Permasalahan pencemaran udara mendapat perhatian khusus dalam hubungan internasional karena memiliki potensi melintasi batas negara. Menurut Elliot (2003), pencemaran udara lintas batas bukan masalah baru dalam politik internasional. Masalah ini telah menjadi pembicaraan dalam level global sejak tahun 1960 dan menjadi salah satu agenda yang diangkat dalam Konferensi Stockholm 1972. Internasionalisasi masalah pencemaran udara dianggap penting karena mengganggu stabilitas ekonomi, sosial dan ekologi di dalam negeri maupun negara tetangga.

Salah satu negara yang menjadi sumber pencemaran udara di Asia Tenggara adalah Indonesia. Sumber penyebab dominan pencemaran udara di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan. Indikasi ini terlihat nyata sejak Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar sekitar 161.798 hektar lahan pada tahun 1982 (Barber and Schweithelm 2000, 34). Kebakaran tersebut tersebar di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Kemudian, tercatat beberapa kebakaran hutan dan lainnya yang cukup besar pada tahun 1997 hingga 2006. Pada periode tersebut, setidaknya terjadi sepuluh kali kebakaran hutan dan lahan dengan kerugian sekitar 526.945 hektar lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang paling besar terjadi pada tahun 1997 yang membakar sekitar setengah dari total keseluruhan lahan di Indonesia yakni 263.991 hektar.

Menurut penelitian David Glover dan Timothy Jessup (2006), pencemaran udara dan kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 telah membawa kerugian sangat besar bagi Indonesia yaitu sekitar US\$ 4 milyar.

Kerugian tersebut mencakup kerugian kayu, pertanian, perkebunan, produksi hutan, keanekaragaman hayati, pelepasan karbon, biaya pemadaman kebakaran, kesehatan, transportasi dan pariwisata. Bukan hanya Indonesia, negara-negara tetangga Indonesia pun merasakan dampak negatif dari kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Glover dan Jessup juga memperkirakan kerugian ekonomi yang diderita Singapura lebih dari 69 juta USD dan Malaysia 321 juta USD. Beberapa kegiatan internasional yang dilaksanakan di Singapura seperti penyelenggaraan balap mobil F1 dan APEC pada tahun 2009 harus ditunda karena kabut asap yang begitu tebal yang mengganggu jarak pandang dan kesehatan penduduk Singapura.

Tabel 2. Perbandingan Dampak Kabut Asap di Indonesia dan Singapura

Tahun	Negara	
	Indonesia	Singapura
1997-1998	<ul style="list-style-type: none"> Total kerugian biaya ekonomi sekitar USD 1,62 – 2,7 milyar Biaya pencemaran asap sekitar USD 674 – 799 juta Hilangnya kunjungan wisata mencapai 187.000 sampai 281.000 wisatawan Presiden Soeharto meminta maaf kepada negara tetangga atas terjadinya kabut asap lintas negara 	<ul style="list-style-type: none"> Kabut asap terjadi selama tiga bulan (Agustus – Oktober) Berdasarkan pemantauan harian ISPU, rentang "tidak sehat" terjadi selama 14 hari Kerugian pada industri pariwisata sebesar SGD 81,8 juta atau USD 58,4 juta
2005-2006	<ul style="list-style-type: none"> Tercatat jumlah titik panas terbanyak sepanjang terjadinya kebakaran, khususnya pada provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat Pemerintah Singapura membantu dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di daerah provinsi Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> Kerugian dalam bidang bisnis sekitar USD 50 juta Jumlah titik panas di Riau dan Kalimantan Barat tercatat paling banyak terjadi tahun ini Total kerugian ekonomi, khususnya bidang pariwisata tentunya jauh lebih besar dibanding tahun 1997 dikarenakan nilai produksi industri pada tahun ini jauh lebih tinggi.
2013-2014	<ul style="list-style-type: none"> Kabut asap menyebabkan 30.249 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut, 562 orang menderita pneumonia, asma 1.109 orang, iritasi mata 895 orang, dan iritasi kulit 1.490 orang Di Provinsi Riau, pada bulan Maret-April 2014 tercatat kerugian sebesar IDR 481,23 milyar dengan total 39.239 orang terkena ISPA Kabut asap menimbulkan total kerugian ekonomi mencapai IDR 20 trilyun Presiden SBY meminta maaf kepada negara tetangga atas kembali terjadinya kabut asap lintas negara 	<ul style="list-style-type: none"> Kabut asap terjadi selama satu bulan sejak bulan Juni-Juli Tercatat pada tanggal 21 Juni 2013, terjadi indeks ISPU tertinggi di Singapura, yakni 401. Kabut asap menimbulkan total kerugian ekonomi sekitar SGD 342.000.000 atau USD 249.901.435,84 dan diperkirakan mencapai USD 1 milyar dalam seminggu.

Sumber: (Glover and Jessup 2006)

Beberapa kota di Malaysia juga terkena dampak pencemaran udara lintas batas. Dengan menggunakan standar Air Pollution Index (API) yang dipantau Peter Dauvergne (1998), beberapa kota Malaysia seperti Kuala Lumpur, Serawak, Johor dan Melaka berada di atas standar mengkhawatirkan pada tahun 1997-1998. API telah mencapai tingkat membahayakan yaitu pada angka 300-500 dengan standar yang baik yaitu 0-50. Kondisi ini akan mengganggu kesehatan penduduk karena pencemaran udara akan menghasilkan zat berbahaya bagi manusia yang menghirupnya dan aktivitas penduduk pun akan terganggu akibat adanya pencemaran udara ini.

Realisme

Realisme adalah salah satu pandangan dalam ilmu Hubungan Internasional yang paling awal dan dianggap klasik karena pondasi – pondasi dan diktumnya yang masih relevan hingga saat ini. Berangkat dari pernyataan tersebut, maka realisme pun dapat digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisa organisasi internasional.

Dalam memandang bagaimana terbentuknya Organisasi Internasional terdapat beberapa asumsi realisme dalam melihat pembentukan organisasi internasional, dan yang pertama dapat dilihat dengan merujuk pada pernyataan dari John Mearsheimer (1994:10) yang menyatakan bahwa “*International institutions are reflections of the power distribution in the anarchical system*” atau organisasi internasional tidak lebih dari cerminan distribusi kekuatan dalam sistem yang anarki.

Peran organisasi internasional secara umum sebenarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas internasional baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Dalam menjaga stabilitas internasional, organisasi internasional pada dasarnya dituntut untuk transparan dalam segala tindakannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan oleh anggotanya. Sayangnya hingga saat ini transparansi organisasi internasional terbilang masih kurang terlihat dari masih adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Contohnya saja di sini bisa dilihat pada PBB yang mana kekuasaan Amerika Serikat sebagai negara *superpower* masih saja membayangi sepak terjang PBB.

Pada kacamata realis, organisasi Internasional berperan sebagai perpanjangan tangan dari suatu negara. Negara lebih lanjut, seperti pada gambaran umumnya terhadap pandangan kaum realis mengenai interaksi negara di ranah internasional, bahwa negara akan melakukan interaksi dengan negara lain guna mencapai kepentingannya sendiri, hal ini juga berlaku pada Organisasi Internasional pada kacamata realis. Guna mencapai

kepentingannya, negara menggunakan Organisasi Internasional sebagai media atau 'perpanjangan tangan' negara guna mencapai kepentingan negara tersebut. Sehingga, selama Organisasi Internasional dianggap masih berperan dalam pencapaian kepentingan nasional suatu negara, maka Organisasi Internasional tetap terjaga keberadaannya di dalam pandangan realis. Selain itu pula, peran Organisasi Internasional menurut kaca mata realis juga sebagai refleksi dari distribusi kekuatan yang ada di dunia seperti perhitungan *self-interested* negara-negara yang terlibat didalam organisasi internasional tersebut.

John Mearsheimer yang merupakan salah satu pemikir realis bahkan menyatakan bahwa institusi pada dasarnya memiliki kekuasaan yang bersifat terbatas. Hal ini dikarenakan institusi yang seharusnya mempersatukan negara berdasarkan suatu kepentingan internasional justru malah menjadi ajang adu kekuatan antar negara. Sebaliknya negara malah melihat organisasi internasional sebagai wadah untuk menjaga stabilitas kekuasaannya atau bahkan meningkatkan kekuasaan maupun pengaruhnya. Contohnya saja dapat dilihat pada saat terjadi persaingan antara NATO dan Pakta Warsawa yang mana disini terselip kepentingan dari negara-negara yang bersangkutan terutama dengan masih adanya Blok Barat dan Blok Timur.

Organisasi Internasional

Untuk menterjemahkan teori realis dalam studi kasus ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, diperlukan pembahasan mengenai definisi, fungsi dan tujuan dari organisasi internasional. Bagi Ian Hurd (2011,7), organisasi internasional didefinisikan sebagai organisasi yang dibangun oleh negara dengan perjanjian tertulis dan bersifat berbeda dengan negara yang membentuk organisasi. Bennett (1977,3) memperluas definisi tersebut dengan lima karakter umum sebuah OI yaitu organisasi permanen yang memiliki serangkaian fungsi, adanya sebuah sekretariat, keanggotaan bersifat sukarela, pernyataan tujuan dan standar operasi perusahaan dan memiliki organ-organ pendukung. Barkin (2006, 16) mengatakan bahwa OI terdiri atas tiga karakteristik yaitu peran minimalisasi penyelesaian masalah via kekuatan militer, jalur komunikasi yang melimpah dan tidak ada hierarki yang konsisten. Kekuatan IO diperoleh sebagian besar dari negara dalam bentuk kekuatan militer dan kekuatan finansial yang disumbangkan oleh negara. Namun menurut Barnett dan Finnemore (2004, 23-24), IO dapat juga memiliki kekuatan yang diperoleh secara mandiri dalam bidang moral dan informasi. Dalam bidang moral, IO berperan memberikan nasihat dan pertimbangan nilai yang menjadi prioritas bagi masyarakat sedangkan dalam bidang informasi, OI dapat

berperan memberikan solusi teknis terkait pekerjaan umum yang dilakukan masyarakat.

Menurut Hurd (2011, 7), terdapat tiga tujuan organisasi internasional yaitu sebagai instrumen, forum dan aktor. Pertama, organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Apabila organisasi internasional sebagai instrumen, organisasi internasional merupakan bagian dari kebijakan negara untuk mencapai kepentingan nasional. Negara menggunakan pernyataan dan kebijakan organisasi internasional untuk mendukung posisi negara. Negara memperjuangkan kebijakan mereka untuk diadopsi sebagai kebijakan organisasi internasional.

Myrdal mengatakan:

"When an intergovernmental organization is set up, this implies nothing more than that between the states a limited agreement has been reached upon an institutional form for multilateral conduct of state activity in a certain field. The organization becomes important for the pursuance of national policies precisely to the extent that such a multilateral coordination is the real and continuous aim of national governments." (Myrdal 1955, 4-5)

Negara-negara berkembang menggunakan organisasi internasional seperti PBB sebagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri karena lebih efektif dibandingkan diplomasi bilateral. Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold mengatakan bahwa organisasi internasional telah dijadikan instrumen baru bagi diplomat sebagai arena implementasi diplomasi. Ketika melihat OI sebagai instrumen, kalkulasi negara terhadap untung rugi keanggotaan dalam OI menjadi sangat vital. Apabila negara tidak melihat keuntungan dan bahkan berpotensi menghambat kepentingan nasional maka negara menambahkan hak veto untuk membatasi ruang gerak OI. Apabila negara melihat potensi keuntungan yang signifikan dari keanggotaan OI maka negara memberikan ruang gerak yang luas dengan kewenangan yang besar bagi OI.

Kedua, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya yang membahas dan membicarakan masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun mengangkat masalah dalam negeri orang lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. Fasilitas yang dimiliki organisasi internasional seperti gedung dan ruang pertemuan digunakan oleh berbagai negara untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan internasional seperti konferensi dan rapat tingkat tinggi.

Perwakilan negara mendiskusikan dan membahas topik dan isu yang dianggap penting bagi mereka dan mencapai kesepakatan melalui fasilitas yang dimiliki organisasi internasional. Selain gedung, organisasi internasional juga memiliki sumber daya manusia untuk mendukung berbagai kegiatan tersebut

Sebagai sebuah forum, organisasi internasional mewadahi kepentingan berbagai negara yang berbeda-beda. Perdebatan kebijakan dapat terjadi dalam sebuah organisasi internasional baik dalam konstruksi kewenangan OI, penyusunan agenda kegiatan atau pembangunan birokrasi OI. Pertarungan kepentingan ini melibatkan kekuatan masing-masing negara yang menentukan arah kebijakan OI tersebut. Pertarungan ini terjadi dengan syarat OI tersebut tidak membatasi permohonan keanggotaan negara. Sebagai contoh, Majelis Umum PBB memfasilitasi negara untuk membahas topik sensitif dengan negara lain. Majelis Umum PBB menyusun jadwal dan tempat pertemuan, protokol dan metode pengambilan suara yang disepakati dan kode etik negosiasi.

Ketiga, organisasi internasional dilihat sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Meskipun dibentuk negara, organisasi internasional bertransformasi menjadi organisasi independen dan lebih berpengaruh dari negara. Organisasi internasional memiliki kedudukan hukum, hak dan kewajiban serta sumber daya. Kewenangan yang dimiliki organisasi internasional tertulis dalam perjanjian internasional yang menciptakan kewenangan organisasi tersebut. Ketika ini terjadi, organisasi internasional menjadi aktor di arena internasional dan pesaing dari negara-bangsa. Kemampuan mereka untuk beroperasi sebagai aktor internasional dapat ditelusuri dengan fakta bahwa organisasi internasional mengidentifikasi diri mereka dan kepentingan mereka dengan badan usaha lain selain negara-bangsa.

Kemampuan OI dalam mempengaruhi negara dapat dilihat dari perubahan sikap negara dari kondisi normal. Perbedaan kebijakan negara dan organisasi internasional menjadi indikator bagaimana OI menjadi lebih berkuasa dari negara yang membentuk OI tersebut. Selain itu, OI memiliki tambahan kekuatan lebih besar dari jumlah kontribusi yang diberikan negara dan menjadi aktor yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. The International Committee of the Red Cross menyediakan bantuan bagi negara yang terdampak bencana alam dan perang serta menjadi mediator konflik seperti di Libanon dan Korea. Banyak sekali OI yang solid dan koheren menyerukan transformasi sikap negara dari posisi normal ke posisi yang diadopsi OI. International Court of Justice dan Uni Eropa adalah contoh OI

yang diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk memutuskan kebijakan secara independen. Struktur ICJ didesain tahan dari intervensi negara yang dapat mengacaukan independensi ICJ. Hukum internasional yang diadopsi ICJ tidak sama dengan hukum negara dan ICJ memiliki hukum internasional.

Setelah sebuah organisasi terbentuk dan setelah itu mulai membangun birokrasi, modus operandi dan independensi peran tidak bergantung kepada negara maka menjadi lebih sulit bagi anggota negara secara efektif untuk menghentikan kegiatan IGO ini. Setiap usaha untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan oleh organisasi internasional risiko mengasingkan negara-negara lain serta mengakhiri manfaat bahwa IGO dapat memberikan. Hal ini memberikan organisasi dengan berbagai anggota dan kegiatan dan layanan pusat berkembang dengan baik tingkat tertentu otonomi dalam tindakan mereka.

Terdapat tiga fungsi dari OI. Pertama, OI berfungsi sebagai lembaga mengartikulasikan dan agregasi kepentingan. Serikat buruh menyatukan semua orang yang bekerja di industri pertambangan batu bara untuk menyuarakan tuntutan mereka dalam berhadapan dengan majikan mereka (misalnya, untuk upah yang lebih baik dan kondisi kerja) dan sistem politik (untuk lebih negara kesejahteraan canggih, pengaturan pensiun yang lebih baik, kompensasi untuk penyakit yang berhubungan dengan batubara,) dan untuk agregat kepentingan masing-masing penambang individu, masing-masing perusahaan, masing-masing daerah, setiap keterampilan atau pekerjaan menjadi suara nasional. Kadang-kadang beberapa kelompok mungkin tidak setuju dengan kebijakan organisasi dan jika kekecewaan ini cukup konsisten, mereka mungkin memisahkan diri dari kepemimpinan organisasi dan membentuk asosiasi mereka sendiri. Kesepakatan yang dicapai dalam OI diimplementasikan oleh organ-organ OI terkait. Operasi Penjaga Perdamaian PBB ditugaskan untuk melaksanakan mandat yang diberikan negara melalui OI. WTO ditugaskan untuk mengadili konflik perdagangan sesuai dengan mandatnya. OI bukan hanya sebagai tempat agregasi dan artikulasi kepentingan tetapi juga implementasi kepentingan.

Fungsi OI kedua adalah sebagai lembaga sosialisasi dan komunikasi. Sosialisasi kebijakan dan kesepakatan dalam OI disosialisasikan oleh negara melalui kementerian terkait. Klub olahraga, gereja atau sekolah dapat menjadi agen sosialisasi. Sosialisasi kesepakatan dalam OI menjadi alat untuk meningkatkan loyalitas terhadap organisasi yang melakukan sosialisasi sehingga monopoli negara dalam sosialisasi tidak mutlak. Dalam bidang komunikasi, negara kini memiliki pilihan tidak hanya dengan pendekatan tradisional dengan menggunakan protokol diplomatik tetapi juga melalui

organisasi internasional. PBB dan organ-organ PBB membantu negara untuk menerima informasi dan menyebarkan informasi. OI dengan cakupan tugas terbatas seperti the World Meteorological Organization atau World Health Organization menyediakan informasi-informasi penting terkait pelayanan kepentingan umum. Transformasi teknologi informasi melalui telpon genggam dan internet juga membantu negara untuk memperoleh informasi penting dan menyebarkan informasi tersebut.

Fungsi OI yang ketiga adalah membuat peraturan. Sebelum membuat peraturan maka harus ada norma yang disepakati. Sikkink dan Finnemore (1999, 896) mengatakan bahwa OI memiliki kewirausahaan norma dimana OI dapat mengusulkan ide dan norma baru untuk diadopsi oleh negara meskipun norma tersebut belum tentu disetujui oleh negara. Norma-norma tersebut muncul dari berbagai aktor seperti perusahaan transnasional atau koalisi masyarakat sipil. Misalnya IMF memiliki program Structural Adjustment Program yang mengurangi anggaran pembangunan sosial bagi masyarakat miskin. Program IMF ini semula ditentang oleh negara anggota dan akhirnya disepakati sebagai kebijakan yang harus dipatuhi negara. Pengurangan gas emisi rumah kaca semula ditentang oleh Amerika Serikat dan kini disepakati menjadi program global dan PBB. Setelah norma terbentuk, OI merealisasikan dalam bentuk kebijakan dengan landasan hukum. International Atomic Energy Agency memiliki landasan hukum untuk mengawasi kepemilikan pembangkit listrik tenaga nuklir di berbagai negara. Hukum tersebut dapat bersifat mengikat sehingga dibutuhkan lembaga baru untuk memastikan penegakan hukum seperti kepolisian di dalam sistem politik domestik. Uni Eropa dan WTO memiliki berbagai instrumen sanksi untuk memastikan hukum perdagangan yang sudah diterapkan dapat diimplementasikan secara efektif. OI membutuhkan pengadilan untuk menerima aduan dari pihak-pihak yang dirugikan dari penegakan hukum tersebut. International Court of Justice, WTO Settlement of Dispute dan European Court of Justice adalah OI yang dibentuk untuk mengadili kasus-kasus terkait pelanggaran hukum internasional. Semua keputusan lembaga pengadilan internasional ini bersifat mengikat. Hakim yang dipilih untuk mengadili kasus-kasus ini diambil dari kalangan independen untuk memastikan objektivitas dari keputusan lembaga tersebut.

Pembahasan

Penyelesaian pencemaran asap lintas batas mulai didiskusikan dalam level ASEAN pada tahun 1985 ditandai dengan penandatanganan Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources. Dalam perjanjian ini tertulis secara khusus mengenai polusi udara dan dampaknya terhadap negara-



negara di sekitar. Perjanjian ini diikuti oleh beberapa kesepakatan mengenai pencemaran udara lintas batas seperti Kuala Lumpur Accord on Environment and Development pada tahun 1990 dan Singapore Resolution on Environment and Development pada tahun 1992 (Mushkat 2012, 140). Selain kesepakatan antar negara, permasalahan polusi udara lintas negara juga diselesaikan melalui sosialisasi teknis dalam ASEAN Workshop on Transboundary Pollution and Haze di Balikpapan, Indonesia pada September 1992 (Varkkey 2012, 84). Kegiatan ini spesifik membahas polusi udara yang dihadapi negara-negara ASEAN. Pertemuan informal antar menteri lingkungan hidup pun dilakukan di Kuching, Sarawak pada tahun 1994. Para menteri lingkungan se-ASEAN bertemu mendiskusikan masalah pencemaran udara dan strategi penyelesaiannya melalui forum ASEAN. Pertemuan ini adalah pertemuan informal pertama untuk membahas masalah pencemaran lintas batas. Di dalam pertemuan ini disepakati mekanisme kerjasama untuk mengatur sumber daya alam dan kontrol terhadap polusi udara lintas batas di ASEAN dan pengembangan sistem deteksi dini dan sistem respons serta pengembangan kapasitas negara anggota (Tan 1999).

Sebagai kelanjutannya, pada tahun 1995, negara-negara anggota setuju untuk mengadopsi ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution. Kesepakatan ini berisi strategi kebijakan yang berkenaan dengan polusi lintas batas termasuk kebijakan pencegahan kebakaran dan pencemaran udara, sosialisasi pelarangan pemakaian praktik pembakaran hutan seutuhnya dan penggunaan tenaga ahli untuk mendeteksi kebakaran hutan dan penyusunan Titik Fokal Nasional untuk memperkuat koordinasi dalam tingkat kawasan (Elliott 2003, 33).

Sebagai kelanjutan dari rencana ini, pada tahun 1995 ASEAN Senior Officials on the Environment Meeting (ASOEN) membentuk Haze Technical Task Force (HTTF) dengan tujuan implementasi ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution. Pertemuan ini menyetujui pembentukan indeks ASEAN untuk kualitas udara dan sistem deteksi bahaya kebakaran. Mereka juga bersepakat untuk membagi teknologi dan pengetahuan mengenai tindakan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan mekanisme kerjasama dalam pemadaman kebakaran hutan.

Pada tahun 1997, ASEAN berinisiatif untuk membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Haze. Pertemuan tahunan tingkat Menteri membahas pencemaran udara ini menjadi tonggak sejarah pertemuan menteri yang membahas masalah khusus dalam kerangka kerja ASEAN. Pertemuan yang pertama berhasil memformulasikan Regional Haze Action Plan (RHAP) dengan butir-butir kesepakatan yang lebih detail dari HTTF. RHAP memiliki wewenang

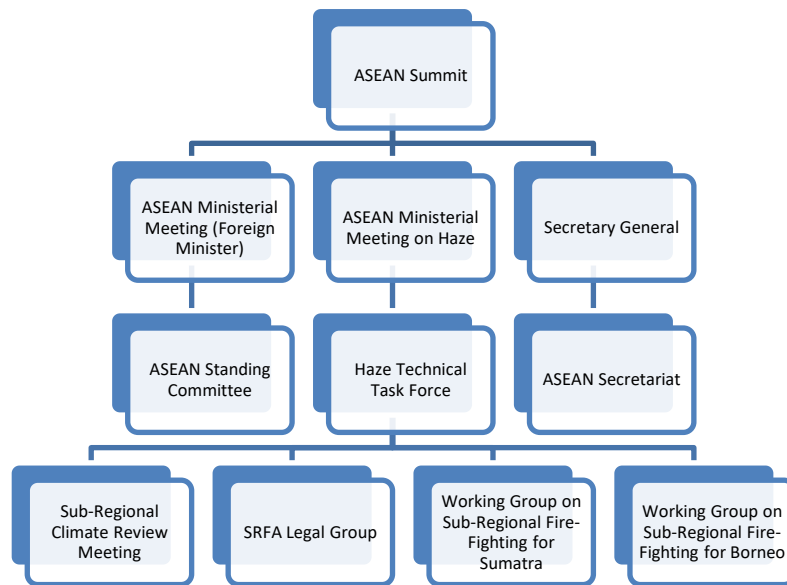
untuk menyusun kegiatan yang berkaitan dengan pencemaran udara lintas batas dari aspek budaya, ekonomi dan sistem politik masing-masing negara anggota. RHAP bersifat *soft law*, tidak mengikat dan sukarela dalam implementasi butir-butir kesepakatan (Lian and Robinson 2002, 105). RHAP bertujuan negara-negara anggota ASEAN lebih aktif di dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan dengan menyusun rencana kegiatan, pedoman dan tindakan terkait pencemaran udara lintas batas.

RHAP terdiri atas tiga bagian besar. Pertama, RHAP mendorong negara anggota untuk mengajukan kebijakan nasional terkait RHAP. Kedua, skema penguatan ASEAN Specialised Meteorological Center (ASMC) yang berfungsi untuk mengawasi jumlah titik api di Asia Tenggara. Ketiga, skema penguatan kemampuan pemadaman kebakaran. RHAP juga menyepakati ASEAN Policy on Zero Burning. Aspek-aspek lain yang terkandung di dalam RHAP yaitu identifikasi mobilisasi sumber daya, pertukaran informasi dan pengembangan pasar biomassa dan sampah industri pertanian. Selanjutnya, RHAP memberikan penugasan kepada beberapa negara anggota ASEAN untuk mengembangkan teknologi dan keahlian dalam bidang tertentu, seperti Malaysia dalam bidang pencegahan, Malaysia dalam bidang pengawasan dan Indonesia untuk pemadaman kebakaran (Varkkey 2011, 89).

ASEAN Summit di Vietnam pada tahun 1998 menghasilkan Hanoi Plan of Action (HPA) yang menegaskan pelaksanaan RHAP. Hanoi Plan of Action (HPA) memberikan tenggat waktu pelaksanaan RHAP paling lambat pada tahun 2001. HPA juga meresmikan dua Sub-Regional Fire-Fighting Arrangements (SRFA) untuk wilayah Kalimantan dan Sumatra. SRFA ini akan berfungsi sebagai fasilitator pergerakan sumber daya dari sebuah negara ke negara lain untuk menanggulangi dampak dari kebakaran hutan. Selain SRFA, dibentuk pula SRFA Legal Group yang bertugas untuk mengidentifikasi isu-isu potensial terkait penyelesaian dampak kebakaran hutan (Florano 2003, 137).

Seperti dalam gambar 1, semua badan-badan yang dibentuk oleh RHAP berada di bawah kendali Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN. Pemimpin negara ASEAN dalam ASEAN Summit akan berkoordinasi dengan ASEAN Ministerial Meeting dan Secretary General untuk membahas kinerja penanggulangan kebakaran hutan dan pencemaran udara.

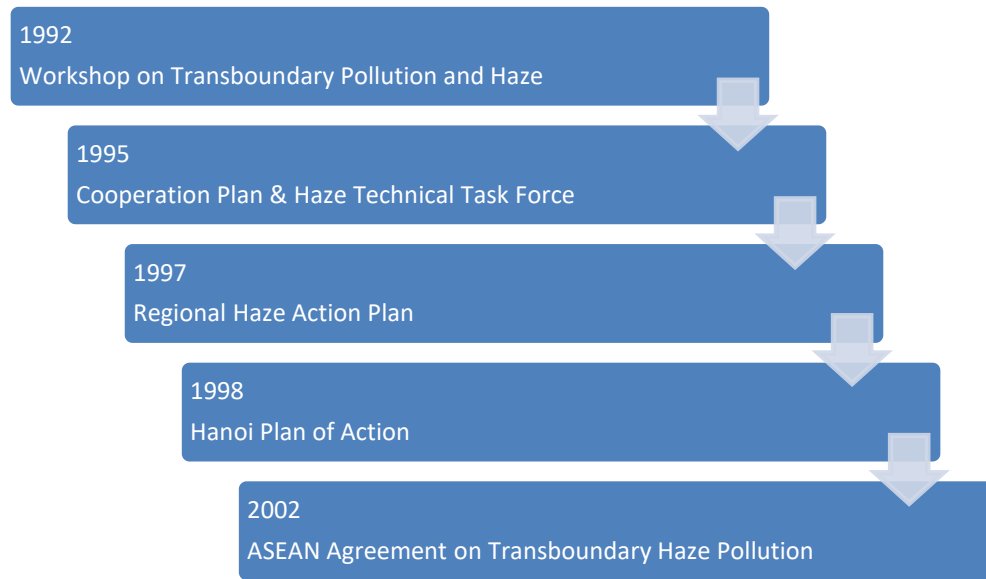
Gambar 1. Organisasi Regional Haze Action Plan



Sumber: Penulis

Pada tahun 2001, ASEAN mengusulkan penguatan RHAP melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (ATHP). ATHP ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2002 di Kuala Lumpur. ATHP harus diratifikasi oleh negara-negara yang menandatangani ATHP agar RHAP menjadi hukum yang mengikat. Kelanjutan dari penandatanganan ATHP adalah pembentukan Kelompok Kerja Ahli (Technical Working Groups) yang bertugas mengembangkan Comprehensive ASEAN Plan of Action on Transboundary Haze Pollution. Plan of Action ini menghasilkan skema kerjasama bagi negara anggota untuk membantu Indonesia di dalam mencegah kebakaran hutan dalam bentuk pembangunan sistem deteksi dini, pertukaran teknologi informasi dan bantuan teknis lainnya. Selanjutnya panel ahli dibentuk untuk menyediakan penilaian cepat secara independen dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait mobilisasi sumber daya. ATHP juga mengamankan negara-negara ASEAN untuk membentuk ASEAN Coordinating Center for Haze di Indonesia dan ASEAN Haze Fund (Quah 2002, 433).

Gambar 2. Proses Menuju ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution



Sumber: Penulis

Implementasi ATHP terganjal oleh beberapa masalah. Pertama, Indonesia meratifikasi ATHP pada tahun 2014, sepuluh tahun dari penandatanganan AATHP pada tahun 2004. Peran Indonesia dalam efektivitas ATHP sangat besar dalam menentukan jumlah bantuan yang diinginkan, program sosialisasi yang tepat sasaran dan penegakan hukum (Nurhidayah, Alam and Lipman 2015, 191). Kelambanan Indonesia meratifikasi ATHP menjadi salah satu faktor kegagalan implementasi ATHP. Kedua, tidak adanya mekanisme hukuman dalam ATHP. Hukum yang dilaksanakan dalam tataran ASEAN bersifat tidak mengikat. Prinsip ASEAN Way yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya memperlemah komitmen negara-negara anggota melaksanakan ATHP karena kecenderungan negara-negara anggota untuk berbuat curang. Selain itu, Sekretariat ASEAN seharusnya berperan lebih besar di dalam mengevaluasi implementasi ATHP. Peran pihak ketiga menjadi faktor utama keberhasilan perjanjian penanggulangan hujan asam di Eropa. Birokrasi Sekretariat ASEAN masih dibandingkan Uni Eropa di Brussels. Sebagian besar pekerjaan koordinasi di ASEAN ditangani langsung oleh kementerian luar negeri masing-masing negara anggota, terutama negara tuan pertemuan tingkat menteri tahunan.

Dalam perjanjian ini setiap negara yang meratifikasi berkomitmen untuk ikut menyelesaikan masalah polusi asap di kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar akibat kebakaran hutan di Indonesia. Komitmen tersebut

termasuk komitmen asistensi teknis penanggulangan kebakaran hutan dan bantuan dana. Perjanjian tersebut berlaku efektif sejak 25 November 2003 setelah Thailand sebagai negara keenam- menandatangani perjanjian tersebut. Enam negara merupakan syarat minimum bagi perjanjian tersebut untuk dapat berlaku efektif. Negara-negara ASEAN yang telah menandatangani perjanjian tersebut adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam dan Thailand. Hingga tahun 2006 telah 7 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut, setelah Laos meratifikasinya pada tahun 2004 (Tacconi, Jotzo and Grafton 2007, 7).

Namun perjanjian tersebut seolah tidak bermakna, karena pada tahun berikutnya kebakaran dan bencana asap masih saja terjadi. Pada tahun 2005, 2006 dan 2007 bencana kabut asap ini kembali memicu persoalan. Kebutuhan dasar masyarakat Malaysia sebagai manusia terganggu oleh udara yang mereka hirup tercemari oleh kabut asap dan bahkan mengakibatkan kematian bagi masyarakat Malaysia. Dalam beberapa kasus Indeks Polusi Udara (air pollution index/API) Kamis, 11 Agustus 2005 mencapai 529 di Port Klang, pusat perkapalan penting di Malaysia, dan 531 di Kuala Selangor. Tingkat API berada di atas 300 dapat dikategorikan berbahaya sementara 500 dapat memicu keadaan darurat. Jumat, 12 Agustus 2005 kabut asap agak bersih di pantai barat, tetapi di Kuala Lumpur API meningkat dari 321 menjadi 365 (Glover and Jessup 2006, 100). Departemen Lingkungan Malaysia mengatakan bahwa kualitas udara akibat kabut asap yang terjadi pada tahun 2006 lebih buruk untuk kesehatan manusia dibandingkan akibat kabut asap pada tahun 1997. Kualitas udara yang buruk ini tersebar di 32 wilayah Malaysia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia menyatakan keadaan darurat di daerah sekitar Kuala Lumpur, setelah kabut asap tebal menyelimuti kawasan itu. Malaysia mengumumkan langkah-langkah darurat termasuk menutup sekolah-sekolah dan meminta warga untuk mengenakan masker. Di sisi lain, kabut asap mengakibatkan banyaknya para investor asing takut untuk berinvestasi di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Karena dengan adanya kabut asap mengakibatkan banyaknya biaya dan resiko yang harus mereka tanggung.

Transparansi dan Verifikasi

Salah satu faktor kegagalan AATHP adalah krisis kepercayaan internal ASEAN yang berujung kepada kegagalan fungsi-fungsi organisasi internasional. Indonesia dan Singapura tidak memiliki kepercayaan bahwa masing-masing negara memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara lintas batas. Organisasi internasional dapat menjadi bagian dari solusi masalah internasional apabila organisasi tersebut dapat memiliki

legitimasi hukum dan politik yang diberikan oleh negara anggota. Legitimasi dan kepercayaan tersebut diperlukan untuk memastikan efektivitas organisasi internasional sebagai fasilitator komunikasi antar negara, mengurangi ketegangan di dalam sebuah konflik, mempromosikan transparansi, stabilitas dan keamanan. Organisasi internasional ditujukan untuk membangun kepercayaan pihak lawan terhadap niat baik untuk berdialog. OI dapat bersifat formal dan informal, bilateral atau multilateral. Agar dapat berjalan dengan efektif, OI harus memiliki beberapa karakter seperti holistik, timbal balik (*reciprocity*), tumbuh bertahap, bersifat jangka panjang, dapat diprediksi, transparansi, reliabilitas, konsisten dan dilaksanakan dalam berbagai level. Apabila berhasil, OI menjadi bagian dari solusi masalah internasional, menambah kepastian, memperkuat keamanan dan membuka jalur komunikasi di antara pihak yang bertikai. Selain itu, OI membangun interaksi berbasis kerjasama.

Kesimpulan

Fungsi ASEAN sebagai organisasi internasional diuji dalam kasus pencemaran udara lintas batas di Asia Tenggara. Penyelesaian pencemaran asap lintas batas mulai didiskusikan dalam level ASEAN pada tahun 1985 ditandai dengan penandatanganan Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources. Pada tahun 2001, ASEAN memiliki ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2002 di Kuala Lumpur. Penandatanganan AATHP menjadi bagian dari fungsi organisasi internasional di dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan negara anggota. Tetapi perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution tidak menjadi bagian dari solusi masalah pencemaran udara karena krisis kepercayaan di dalam ASEAN itu sendiri. Krisis kepercayaan ini menggagalkan fungsi ASEAN di dalam menjalankan fungsi organisasi internasional sebagai organisasi yang meminimalisasi konflik.

Referensi

- Anthoni, Mohammad. "gradschool.paramadina.ac.id." November 10, 2016. <http://gradschool.paramadina.ac.id/en/news/334-vietnam-pertanyakan-komitmen-china-atasi-perselisihan-wilayah-.html> (accessed November 3, 2016).
- ASEAN. Home: ASEAN.org. Oktober 17, 2012. http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2 (accessed November 10, 2016).



- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Home: International Relations: Regional Architecture DFAT.Gov. November 17, 2016. <http://dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/asean/pages/association-of-southeast-asian-nations-asean.aspx>.
- Baliga, Ananth. "China thanks Cambodia for efforts to water down ASEAN SCS statement." Juli 26, 2016.
- Barber, Charles Victor, and James Schweithelm. *Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia's Era of Crisis and Reform*. Washington DC: World Resource Institute, 2000.
- Barkin, Samuel. *International Organizations: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Barnett, Michael, and Martha Finnemore. *Rules for the World: International Organizations in Global Politics*. Ithaca: Cornell University Press, 2004.
- Batongbacal, Jay L. "Batongbacal, Jay L." AMTI CSIS. <https://amti.csis.org/arbitration-101-philippines-v-china/> (accessed November 10, 2016).
- BBC Indonesia. [bbc.com. Juli 21, 2011.](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyc_onflict) http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyc_onflict.
- Bennett, A. Le Roy. *International Organizations: Principles and Issues*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977.
- Bishop, Julie. [releases:foreignminister.gov. Juli 12, 2016.](http://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2016/jb_mr_160712a.aspx) http://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2016/jb_mr_160712a.aspx.
- Clapp, Jennifer, and Peter Dauvergne. *Path to a Green World: the Political Economy of Global Environment*. Masschusetts: MIT Press, 2005.
- Clark, Helen. *World Post: Huffington Post.com. Juli 16, 2016.* http://www.huffingtonpost.com/helen_clark/vietnam-south-china-sea-ruling_b_11022864.html (accessed November 14, 2016).
- Dauvergne, Peter. "The Political Economy of Indonesia's 1997 Forest Fires." *Australian Journal of International Affairs* 52, no. 1 (1998): 13-17.
- Deudney, Daniel, and Richard Matthew. *Contested grounds: security and conflict in the new environmental politics*. Albany, NY: State University of New York Press, 1999.
- Edwards, Sue-Lin Wong and Terrence. Article: Reuters.com. Juli 15, 2016.

- <http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-idUSKCN0ZV06F> (accessed November 14, 2016).
- Elliott, Lorainne. "ASEAN and Environmental Cooperation: norms, interests and identity." *The Pacific Review* 16, no. 1 (2003): 29-52.
- Emmott, Robin. "EU's statement on South China Sea reflects divisions." Juli 12, 2016.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization*, 1998: 887-917.
- Florano, Ebinezer. "Assesment of the Strengths of the New ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution." *International Review for Environmental Strategies*, 2003: 127-147.
- Gady, Franz-Stefan. "South China Sea Verdict: US Reactions." Juli 13, 2016.
- Glover, David, and Timothy Jessup. *Indonesia's Fires and Haze: The Cost of Catastrophe*. Singapura: ISEAS, 2006.
- Gloystein, Henning, and Keith Wallis. "Oil and shipping markets on edge after South China Sea ruling." Juli 12, 2016, United States ed.
- Haas, Peter M. "Knowledge, Power, and International Policy." *International Organization*, 1992: 1-35.
- Hellendorff, Bruno, and Thierry Kellner. "Indonesia: A Bigger Role in the South China Sea?" Juli 09, 2014.
- Huang Nan, Zhang Juan, Shannon Tiezzi. "the Diplomat." *the Diplomat.com*. July 06, 2016. <http://thediplomat.com/2016/07/interview-xue-li-on-the-south-china-sea/>.
- Hurd, Ian. "Choices and Methods in the Study of International Organizations." *Journal of International Organization Studies*, 2011: 7-22.
- . *International Organizations: Politics, Law, Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Kyodo News. *Overseas*: abs-cbn.com. Juli 13, 2016. <http://news.abs-cbn.com/overseas/07/13/16/malaysia-singapore-indonesia-react-to-s-china-sea-ruling> (accessed November 15, 2016).
- Laferrière, Eric, and Peter Stoett. *International Relations Theory and Ecological Thought: Towards Synthesis*. London: Routledge, 1999.
- Lian, Koh Kheng, and Nicholas A. Robinson. "Regional Environmental Governance: Examining the Association of Southeast Asian Nations

- (ASEAN) Model." In *Global Environmental Governance: Options and Opportunities*, by Daniel C. Esty and Maria H. Ivanova, 101-121. Connecticut: Yale School of Forestry & Environmental Studies, 2002.
- Luhulima, CPF. "Toward a Code of Conduct on The South China Sea." *The Jakarta Post*. June 30, 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/30/toward-a-code-conduct-south-china-sea.html> (accessed November 10, 2016).
- Manhit, Dindo. *Headline: Philstar.com*. JuLi 19, 2016. <http://www.philstar.com/headlines/2016/07/19/1604482/keeping-peace-post-arbitration>.
- Marsheimer, John. "The False Promise of International Institution." *International Security*, 1994: 5-49.
- Mills, Chris. *The United States' Asia-Pacific Policy and the Rise of the Dragon*. Australian Defence Institute, Australia: The Centre for Defence and Strategic Studies, 2015, 1.
- Muhammad, Simela Victor. "Isu Laut China Selatan Pasca-Putusan Mahkamah Arbitrase: Tantangan ASEAN." *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, Juli 2016.
- Mushkat, Roda. "Creating Regional Environmental Governance Regimes: Implications of Southeast Asian Responses to Transboundary Haze Pollution." *Washington and Lee Journal of Energy, Climate and the Environment* 4, no. 1 (2012): 103-160.
- Myrdal, Gunnar. *Realities and Illusions in Regard to Intergovernmental Organisations*. Oxford: Oxford University Press, 1955.
- Nurhidayah, Laely, Shawkat Alam, and Zada Lipman. "The Influence of International Law upon ASEAN Approaches in Addressing Transboundary Pollution in Southeast Asia." *Contemporary Southeast Asia* 37, no. 2 (2015): 183-210.
- Permanent Court of Arbitration. "PCA-CPA.Org." pca-cpa.org. Juli 12, 2016. <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>.
- Quah, Euston. "Transboundary Pollution in Southeast Asia: Indonesian Fires." *World Development*, 2002: 429-441.
- Roach, J. Ashley. *CNA Corporation Files*. August 2014. https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IOP-2014-U-008434.pdf.

- Rosen, Mark E. "cna.org." www.cna.org. 2014. https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008435.pdf (accessed 11 01, 2016).
- So, Levi A. "World leaders react to South China Sea ruling." Juli 13, 2016.
- Sokheng, Ananth Baliga and Vong. "Cambodia again blocks ASEAN statement on South China Sea." Juli 25, 2016.
- Sokheng, Vong. "Namhong, Australia envoy talk South China Sea." Juli 19, 2016.
- Tacconi, Luca, Frank Jotzo, and Quentin Grafton. "Local causes, regional co-operation and global financing for environmental problems: the case of Southeast Asian Haze pollution." *International Environmental Agreements*, 2007: 1-16.
- Tan, Esther. "ASEAN to push for zero burning." *New Straits Times*, April 7, 1999: 8.
- Thayer, Carlyle A. "ASEAN, China and the Code of Conduct in the South China Sea." *SAIS Review of International Affairs* 33, no. Summer-Fall (2013): 77.
- TODAY. "Singapore urges respect for court ruling on South China Sea." Singapore, Juli 12, 2016.
- Varkkey, Helena Muhammad. "Addressing Transboundary Haze through ASEAN: Singapore's Normative Constraints." *Journal of International Studies*, 2011: 83-101.
- Varkkey, Helena Muhammad. "The ASEAN Way and Haze Mitigation Efforts." *Journal of International Studies* 8 (2012): 77-97.
- Wibisono, Makarim. "ASEAN and The South China Sea." Juli 3, 2016.
- World Bank. *The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis*. Jakarta: World Bank, 2016.
- World Politic Review. "Brunei Maintains a Low Profile in Pressing Its South China Sea Claims." *WPR Series on the South China Sea Territorial Disputes*, January 28, 2016.
- Zehfuss, Maja. *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Panel 5: National Integrity System and Global Anti-corruption



Diplomasi Anti Korupsi: Kerja Sama Internasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Asriana Issa Sofia, MA & Very Aziz, Lc., M.Si.

Universitas Paramadina,

Abstrak

Dalam beberapa dekade terakhir, isu korupsi kian mengemuka di tingkat global dan terus menjadi pembahasan yang krusial di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dampak masif korupsi, persoalan keberadaan asset negara dan perlindungan koruptor di luar negeri, sudah tersedianya landasan hukum internasional, dan didukung oleh menguatnya komitmen anti-korupsi pada lembaga-lembaga internasional – berhasil menggarisbawahi urgensi dari diplomasi dan kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula dengan Indonesia, digawangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menggalang kerjasama dan perluasan jaringan internasional dalam strategi pemberantasan korupsinya.

Tulisan ini bertujuan mengkaji sejauh mana KPK menjalankan kerjasama dan perluasan jaringan internasional di bidang penindakan maupun pencegahan korupsi, dengan kemitraan yang bersifat bilateral maupun multilateral dan dalam beragam kegiatan implementasinya. Hasil kajian adalah pemetaan terhadap aspek-aspek kerjasama tersebut, beserta temuan bahwa KPK berkinerja baik dalam strategi tersebut, dengan hasil yang berpulang pada raihan peningkatan pemberantasan korupsi di Indonesia, berdasarkan parameter Corruption Perception Index.

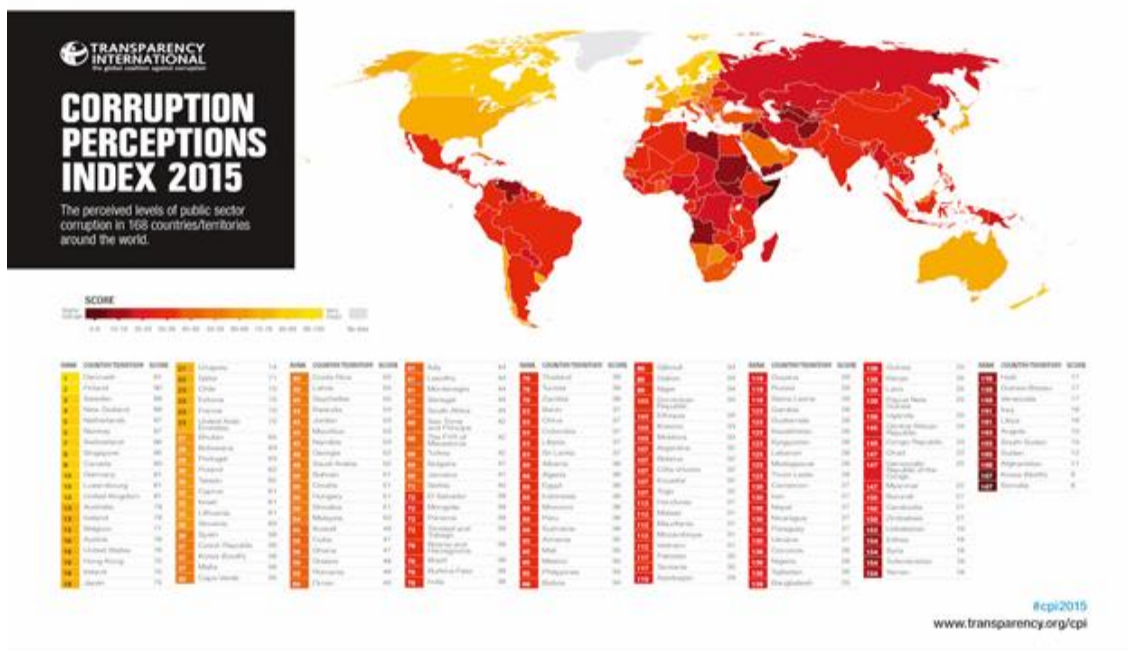
Kata kunci

anti-korupsi, diplomasi, kerjasama, KPK

Pendahuluan

Kejahatan korupsi merupakan persoalan besar di negara berkembang maupun negara maju. Seberapa besar perbandingan tingkat korupsi antar negara antara lain dapat diketahui dari Corruption Perceptions Index (CPI) yang sejauh ini masih merupakan parameter yang dipercaya oleh masyarakat, dirilis tahunan oleh INGO Transparency International. CPI merupakan hasil survey terhadap tingkat korupsi di sektor publik negara-negara dengan ukuran skor

antara 0 (*highly corrupt*) hingga 100 (*very clean*). Data CPI setiap tahun mempresentasikan realitas bahwa mayoritas negara berkembang berada pada keterpurukan parahnya korupsi. Terakhir, peta korupsi CPI 2015 (Transperancy International CPI, 2016) masih menyapukan merah pada negara-negara berkembang sebagai penanda tingginya tingkat korupsi, dengan 11 negara terburuk adalah : Guinea Bissou (Skor 17 / peringkat korupsi ke-158 dari 168 negara), Haiti (17/158), Venezuela (17/158), Irak (16/161), Libya (16/161), Angola (15/163), Sudan Selatan (15 /163), Sudan (12/165), Afghanistan (11/166), Korea Utara (8/167) dan Somalia (8/167). Indonesia menerima skor 36/peringkat 88. Secara global, rerata skor CPI di tahun 2015 ada pada angka 43.



Urgensi Diplomasi dan Kerjasama Internasional dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Di satu sisi, gambaran kondisi korupsi global memang cenderung tidak beranjak membaik secepat yang diharapkan, bahkan nyaris memadamkan optimism banyak pihak. Akan tetapi di sisi lain, kemajuan upaya pemberantasan korupsi di tingkat global dari waktu ke waktu terus memperlihatkan kemajuan, ditunjukkan dengan semakin banyaknya kerjasama lintas negara khusus di bidang anti-korupsi. Faktor-faktor yang diidentifikasi melandasi terjadinya perkembangan kerjasama internasional tersebut terjadi adalah sebagai berikut.

1. Fakta di lapangan

a. Dampak Global Korupsi

Korupsi selalu menimbulkan dampak yang bersifat masif dan destruktif. Kerugian negara akibat korupsi, secara langsung ataupun tidak langsung, cepat atau lambat, ditanggung oleh seluruh masyarakat. Korupsi menjadi bahaya laten bagi semua sektor kehidupan bernegara, baik sektor ekonomi, sosial-kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan-keamanan, serta kerusakan lingkungan (Kemendikbud, 2011). Tidak hanya berpotensi mempengaruhi pengambilan kebijakan ekonomi, korupsi dapat menghambat investasi dan merusak iklim ekonomi yang kompetitif sehingga melemahkan pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga merusak legitimasi pemerintah dan nilai-nilai demokrasi, serta melemahkan negara dengan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara akibat korupsi. Bagi negara yang demokrasinya masih berusia muda dan rapuh, korupsi bahkan mejadi ancaman bagi roda pemerintahan dan stabilitas negara (Sajdik, 2012).

Dampak serius akibat korupsi ini tidak hanya terjadi di tingkat domestik namun juga internasional, karena dampak buruk korupsi di suatu negara sangat mungkin berpengaruh terhadap negara lain juga, mengingat saat ini segala sesuatu terhubung secara global. Kepentingan pihak-pihak asing terhadap suatu negara yang kental dengan korupsi di semua lini hampir bisa dipastikan akan terganggu, misalnya investasi asing, kenyamanan dan kemandirian ekspatriat yang hidup disuatu negara, dampak kerusakan lingkungan yang menyeberang ke negara tetangga, dan lain sebagainya. Artinya, terdapat kepentingan negara lain terhadap bersihnya negara lain dari korupsi dan dampaknya.

b. Keberadaan asset dan perlindungan koruptor di luar negeri

Dewasa ini tidak lagi cukup menindak pelaku tindak pidana korupsi dengan memenjarakannya. Dalam memberantas korupsi dan pencucian uang (money laundering), pelacakan dan pengembalian aset negara yang dikorupsi dan disembunyikan di negara lain menjadi sangat penting. Harta hasil korupsi seringkali dilarikan dan disimpan di negara lain dengan perlindungan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. (Suprapdiono, 2012). Selain harta hasil korupsi, koruptor menyadari bahwa yurisdiksi negara lain menjadi tempat perlindungan yang nyaman bagi mereka. Dengan demikian maka pemberantasan korupsi cenderung melibatkan yurisdiksi beberapa negara sekaligus (multi yurisdiksi),

memerlukan penegakan hukum yang cepat, efektif dan bersifat lintas batas negara.

Bagi negara berkembang yang sebagian besarnya masih dihadapkan pada permasalahan korupsi dengan tingkat yang parah, di mana dana negara digelapkan dan tidak jarang dilarikan dan disimpan di negara lain, perkembangan kerja sama internasional disertai dengan instrumen hukumnya memberikan harapan bagi pemberantasan korupsi di negara-negara tersebut. Kerangka kerja sama global memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang untuk mendapatkan dan memberikan bantuan dari dan kepada negara lain, baik dalam bentuk dana, pelatihan, pendidikan, pengiriman tenaga ahli, pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dan lain sebagainya. Melalui kerja sama ini suatu negara dapat mengupayakan - meskipun tidak mudah - pengembalian dana/aset negara yang dikorupsi, dilarikan dan disimpan di negara asing.

2. Instrumen Hukum Internasional

Keseriusan masyarakat internasional dalam memberantas korupsi didukung oleh dibuatnya instrumen United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 sebagai persetujuan internasional pertama yang mengikat secara hukum mengenai anti korupsi (*the first legally binding global anticorruption agreement*). Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima UNCAC 2003 pada tanggal 31 Oktober 2003 melalui Resolusi Sidang Majelis Umum PBB A/58/4. Dan sejak 14 Desember 2005 UNCAC mulai berlaku efektif dalam pemberantasan korupsi secara global (Ginting, 2011). Konvensi ini memberikan *enforcement* bagi negara-negara pihak (*contracting states*) untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum di dalamnya, termasuk sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban.

Sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi secara global, UNCAC 2003 mengutamakan langkah-langkah pencegahan, baik yang diarahkan ke sektor publik maupun swasta. Terkait kriminalisasi korupsi, konvensi ini memberikan perhatian serius terhadap bentuk korupsi yang mendasar, seperti suap-menyuap, penggelapan dana publik, *trading in influence* dan pencucian dana hasil korupsi. Konvensi ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara para pihak dalam segala aspek pemberantasan korupsi, mengingat korupsi merupakan masalah transnasional. Kerja sama ini merupakan modal utama dalam mewujudkan berbagai bentuk *mutual legal assistance* (MLA), seperti dalam

mengumpulkan dan mentransfer bukti untuk kebutuhan proses pengadilan, dan juga dibutuhkan dalam mendukung langkah pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan harta hasil korupsi. Negara-negara pihak dalam konvensi juga menyepakati pengembalian harta sebagai prinsip mendasar yang ada dalam konvensi (Sajdik, 2012).

UNCAC sebagai kerangka kerja sama global memiliki potensi besar dalam memberantas korupsi mengingat konvensi ini melibatkan 140 negara penandatanganan yang terdiri dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Isu yang dicakup dalam konvensi ini juga luas: suap-menyuap, pemerasan, baik pada sektor swasta maupun publik, juga mencakup korupsi domestik dan korupsi dana asing. Sejumlah langkah pencegahan juga tercakup dalam konvensi ini, termasuk mendirikan lembaga anti korupsi, aturan-aturan tentang anti-money-laundering, hukum yang mengatur *conflict of interest*, bantuan hukum di antara sesama negara pihak untuk ekstradisi tersangka dan pengumpulan bukti yang berada di luar negeri, dan cara-cara untuk pengembalian dana yang disimpan di bank asing oleh pelaku tindak korupsi (Heineman, Jr., and Heimann. 2006).

Terkait kewajiban sebuah negara peratifikasi UNCAC, sebuah contoh dapat dilihat pada kasus Indonesia. Saat ini KPK terus mendorong penuntasan tiga regulasi yang masih menjadi hutang Indonesia setelah meratifikasi UNCAC, yaitu ekstradisi, asset recovery (penyelamatan asset), serta bantuan hukum timbal balik (MLA), yang akan membantu Indonesia dalam menyelamatkan asset yang dilarikan ke luar negeri oleh koruptor. KPK mendorong dengan mulai membahas usulan ketiga regulasi ke instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Momentum ini sangat tepat karena Indonesia sedang bersiap menghadapi review tahap kedua pelaksanaan UNCAC, dimana Indonesia akan dinilai dalam dua aspek, pencegahan korupsi dan penyelamatan asset. Untuk itu pemerintah perlu menyegerakan untuk menguatkan pengadilan Tipikor dan KPK dengan adanya ketersediaan regulasi dan UU. (www.kpk.go.id 2016)

3. Komitmen anti-korupsi pada lembaga-lembaga internasional

Sejak pertengahan era 1990-an, isu korupsi menjadi sorotan internasional dan mengemuka dalam agenda global. (Heineman, Jr., and Heimann. 2006). Sejumlah organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), mengadopsi konvensi-konvensi yang menghendaki negara-negara anggotanya membuat hukum yang melarang korupsi. Lembaga-lembaga keuangan internasional, terutama Bank Dunia, menempatkan anti korupsi sebagai prioritas pada tingkat operasional, dan

menerapkan kontrol yang efektif, baik di internal organisasi maupun dalam proyek yang mereka danai. Banyak negara yang membuat hukum anti korupsi. Organisasi internasional non-pemerintah, seperti Transparency International, melakukan analisis dan advokasi pada isu anti korupsi di banyak negara. Kasus korupsi juga menjadi sorotan berbagai media lokal dan internasional. Kesemua hal tadi menegaskan semakin tumbuhnya pengakuan bahwa korupsi (dengan beragam bentuknya) telah menimbulkan akibat yang sangat destruktif dan merugikan.

Semakin menguatnya intoleransi terhadap korupsi di antaranya ditunjukkan dengan deklarasi politis secara konsensus dalam *the first High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the national and International levels*. Melalui deklarasi tersebut, para kepala negara, kepala pemerintahan dan kepada delegasi negara-negara anggota PBB menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aturan hukum (*the rule of law*) dan pentingnya dialog dan kerja sama politis antar semua negara, serta pentingnya perkembangan ketiga pilar PBB, yaitu: perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia dan pembangunan. (Sajdik, 2012) Secara khusus, deklarasi tersebut juga menyinggung isu korupsi:

"We are convinced of the negative impact of corruption, which obstructs economic growth and development, erodes public confidence, legitimacy and transparency and hinders the making of fair and effective laws, as well as their administration, enforcement and adjudication, and therefore stress the importance of the rule of law as an essential element in addressing and preventing corruption, including through strengthening cooperation among States concerning criminal matters."

Di samping mengakui dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, deklarasi tersebut juga menegaskan pentingnya aturan hukum dan penguatan kerja sama antar negara sebagai elemen penting dalam penanganan dan pencegahan korupsi.

Fakta di lapangan, adanya landasan instrument hukum internasional, dan menguatnya komitmen anti-korupsi pada lembaga-lembaga internasional sebagaimana dijelaskan di atas telah menguatkan kesadaran akan urgensi dari kerjasama internasional untuk diupayakan oleh negara-negara dalam pemberantasan korupsi di negaranya. Pemerintah-pemerintah banyak negara mulai menunjukkan *political will* untuk diplomasi anti korupsi, menekankan pentingnya dialog politik dan kerja sama antar negara dalam memberantas korupsi. Tentu saja upaya eksternal ini harus diiringi dengan pembenahan di dalam negeri, dalam bentuk penindakan maupun pencegahan korupsi.

Kerjasama Internasional dan Kemajuan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Cukup mengejutkan bagi beberapa pihak bahwa Indonesia berhasil meningkatkan prestasinya pada Corruption Perception Index (CPI) dalam beberapa tahun terakhir, dari peringkat ke-107 tahun lalu menjadi ke-88 tahun ini. Kemajuan dalam nilai skor Indonesia : 2015 skor 36, 2014 skor 34, 2013 skor 32, 2012 skor 32 (Transperancy International, 2015). Bagi negara besar dengan permasalahan korupsi sekomples yang dialami Indonesia, setiap digit dalam indeks survei sangatlah berarti karena menunjukkan hasil kerja keras perlawanan terhadap korupsi dan kemajuan dalam birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia, meskipun ada juga faktor terjadinya peningkatan korupsi di negara-negara lain. Yang jelas, laporan hasil survey tersebut membuat catatan penting bahwa Indonesia akan terus mampu melakukan langkah besar jika memberdayakan agen anti-korupsinya yang reputasinya sudah dikenal secara internasional. (The Diplomat, 2016)

Demikian pula halnya di tingkat regional ASEAN, meskipun masih tetap di bawah posisi Singapura (85), Malaysia (50) dan Thailand (38, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengalami kenaikan ganda : kenaikan skor dan kenaikan peringkat. Indonesia berada pada posisi 88 (naik 19 posisi) dari 168 negara yang diukur, dengan skor 36 (naik 2 poin) dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan skor tersebut, Indonesia semakin mendekati dengan rerata skor CPI regional ASEAN (skor 40), Asia Pasifik (43) dan G20 (54).

Peringkat dan Skor Corruption Perception Index 2015

Peringkat Regional	Peringkat Global	Negara	Skor
2	8	Singapore (Ranking Turun, Skor Turun)	85
9	54	Malaysia (Ranking Turun, Skor Turun)	50
11	76	Thailand (Ranking Turun, Skor Tetap)	38
15	88	Indonesia (Ranking Naik, Skor Naik)	36
16	95	Philippines (Ranking Turun, Skor Turun)	35
17	112	Vietnam (Ranking Naik, Skor Tetap)	31
24	147	Myanmar (Ranking Turun, Skor Naik)	22

Sumber: Corruption Perception Index 2015

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Anti Corruption Summit 2016 di Yogyakarta mengemukakan bahwa Indonesia unggul dalam rekor penindakan hukum koruptor (pejabat negara) dan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap berhasil menekan angka korupsi, terlepas dari masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi atau belum terungkap. (www.kpk.go.id, 2016). Prestasi KPK juga terbukti dengan diterimanya penghargaan Ramon Magsasay di Manila pada tahun 2013.

Dari segala upaya komprehensif dalam membasmi korupsi di Indonesia, diplomasi dan kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama melalui KPK, juga merupakan suatu faktor penting yang tidak bisa diabaikan dan oleh karenanya terus gencar dioptimalkan. Penelitian ini bertujuan membuat pemetaan pola kerjasama internasional dan implementasinya, yang dilakukan oleh KPK sejauh ini.

Landasan Teori

David Remmert (Remmert, 2015) mendorong perlunya anti korupsi masuk sebagai fokus penting dari politik luar negeri. Remmert mengajukan tiga argumentasi untuk mendukung idenya. Pertama, Reformasi teknis semata tidak akan membuat anti korupsi efektif dalam global governance. Berbagai studi terbaru justru menjelaskan kemajuan pemberantasan korupsi melalui proses politik. Dalam hal ini, politik luar negeri dapat memunculkan political will dan mendesak tindakan multilateral sekaligus menambah kekuatan internasional dalam pemberantasan korupsi. Kedua, Korupsi merupakan tantangan langsung bagi kepentingan luar negeri dari negara-negara di dunia, terutama negara *normative powers*. Korupsi merusak tatanan internasional yang didasarkan pada aturan dan mengganggu stabilitas regional yang diperjuangkan di tengah tantangan yang terus meningkat. Korupsi juga menjadi ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, serta merugikan perusahaan yang ingin berinvestasi di luar negeri. Studi yang dilakukan oleh Transparency Internasional di tahun 2014 menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi terparah juga merupakan negara yang paling beresiko mengalami kekerasan masal dan *state failure*. Ketiga, diplomasi dapat mengatasi korupsi. Para diplomat dan organisasi internasional memberikan pengaruh efektif dan praktis dalam pemberantasan korupsi.

Politik luar negeri sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional suatu negara. Chris Brown mengemukakan bahwa politik luar negeri merupakan cara mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap negara luar. (Suryandaru, 2008). Dalam melaksanakan politik luar negerinya, negara menggunakan diplomasi sebagai sarana utama dalam

memanfaatkan power-nya untuk mencapai tujuan dan mengamankan kepentingan nasionalnya. Dalam bukunya, Viotti dan Kauppi (Viotti and Kauppi, 2001) menjelaskan luasnya alternatif yang dapat digunakan oleh negara dalam melaksanakan diplomasi. Dalam diplomasi dan kerja sama internasional anti-korupsi, *Compromise or finding common ground* menjadi alternatif diplomasi yang sesuai, di mana negara-negara memiliki kesamaan pandangan akan bahaya korupsi. Korupsi bukan hanya menghambat pembangunan negara, tetapi juga menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas keamanan dan perdamaian di suatu kawasan, dan bagi kepentingan masing-masing negara.

Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi secara global dapat menggunakan dua tipe kerangka hukum: treaty based dan non-treaty based. (Suprapdiono, 2012) Treaty based dapat dibagi menjadi konvensi dan perjanjian multilateral, seperti UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), OECD Anti-Bribery Convention, AMLAT (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty); dan perjanjian bilateral (bilateral treaties), di mana dua negara tertentu menyepakati kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Penggunaan konvensi dan perjanjian, baik multilateral maupun bilateral, seringkali menghabiskan waktu dan sumber daya yang banyak serta membutuhkan formalitas legal yang rumit sehingga membuat lambatnya penyelesaian kasus. Karenanya, kerja sama pemberantasan korupsi juga perlu menggunakan pendekatan informal terutama berkenaan dengan investigasi kasus yang bersifat multi yurisdiksi (di mana melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara). Pendekatan informal ini juga dapat digunakan dalam pertukaran informasi dan bukti yang mendukung investigasi, menyediakan data yang bersifat tidak rahasia dan tidak sensitif, melacak kepemilikan harta benda (*property*) dan catatan non finansial, menginformasikan lokasi orang yang diburu, dan langkah-langkah yang bersifat non-coercive. Suprapdiono juga menjelaskan bahwa penggunaan saluran-saluran formal dan informal erat kaitannya dengan *level of coerciveness* yang dibutuhkan. Semakin koersif tindakan yang akan diambil, semakin dibutuhkan prosedur formal yang harus ditempuh. Sebaliknya, semakin tidak koersif langkah yang akan diambil, semakin dibutuhkan penggunaan saluran informal. Dalam prakteknya, kedua pendekatan tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan dan saling melengkapi.

Kerjasama Strategis Dan Jaringan Internasional Kpk

Pengembangan jaringan dan kerjasama internasional merupakan strategi KPK untuk memperoleh manfaat optimal bagi kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia, memfasilitasi bantuan internasional untuk upaya

pengecahan (*preventive*) maupun penindakan (*repression*). Strategi ini sudah dilakukan sejak tahun pertama beroperasinya KPK pada 2003, dan dari waktu ke waktu terus berkembang dalam lingkup dan kemitraan kerjasamanya.

Berdasarkan kajian data, kerjasama internasional KPK dapat dipetakan berdasarkan tingkat keterikatan secara hukum, luas lingkup kemitraan, dan bidang kerjasama.

1. Keterikatan secara hukum dan lingkup kerjasama

Kerjasama internasional yang dilakukan KPK dapat bersifat mengikat secara hukum berdasarkan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MOU) ataupun tidak mengikat (*non MOU*), baik pada lingkup kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral.

Kerjasama multilateral biasanya tidak berbasis MOU, kecuali ASEAN Multilateral Cooperation Treaty ASEAN Multilateral Cooperation Treaty (kerjasama KPK se-ASEAN) yang merupakan forum kerjasama lembaga anti-korupsi se-ASEAN. Namun sejauh ini baru empat negara yang terangkum dalam satu MOU kerjasama, yaitu KPK RI, BMR Brunei, BPR Malaysia dan CPIB Singapura, sedangkan lembaga anti-korupsi negara anggota lain saling bekerjasama secara bilateral dengan MOU terpisah masing-masing.

Menurut penjelasan Divisi Kerjasama Internasional KPK, terdapat pertimbangan strategis dalam menentukan sifat suatu kerjasama. Jika terkait bidang penindakan misalnya Mutual Legal Assistance (MLA) maka sangat diperlukan kerjasama yang bersifat bilateral, bahkan terikat MOU untuk memastikan keterikatan secara hukumnya; sedangkan kerjasama multilateral lebih mengarah kepada isu atau regulasi terkait anti-korupsi. Contoh terdekat adalah ASEAN, yang menjadi forum bagi Indonesia untuk terus aktif mendorong penguatan komitmen negara-negara anggota terhadap isu korupsi dan antikorupsi. Hal tersebut ditandai oleh beberapa penyelenggaraan kegiatan seperti ASEAN Expert Meeting on Anti Corruption Forum yang memperjuangkan korupsi sebagai area kejahatan lintas negara yang dikerjasamakan dalam ASEAN ; atau seminar internasional Conflict of Interest untuk menyepakati bahwa *conflict of interest* adalah masalah mendasar yg harus dipecahkan secara sistemik dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. Mitra kerjasama internasional

KPK menjalin sinergi dengan pihak-pihak di luar negeri yang memiliki peran dalam pemberantasan korupsi, utamanya adalah penegak hukum. Tidak hanya menjalin kerjasama dengan eksekutif, legislative dan yudikatif,

tetapi juga dengan lembaga anti-korupsi luar negeri. Sampai tahun 2015, KPK telah menjalin sinergi dengan 26 lembaga anti-korupsi luar negeri baik di tingkat Asia maupun Eropa. Tabel berikut memperlihatkan sejumlah variasi mitra kerjasama KPK.

Contoh Mitra Kerjasama Internasional KPK

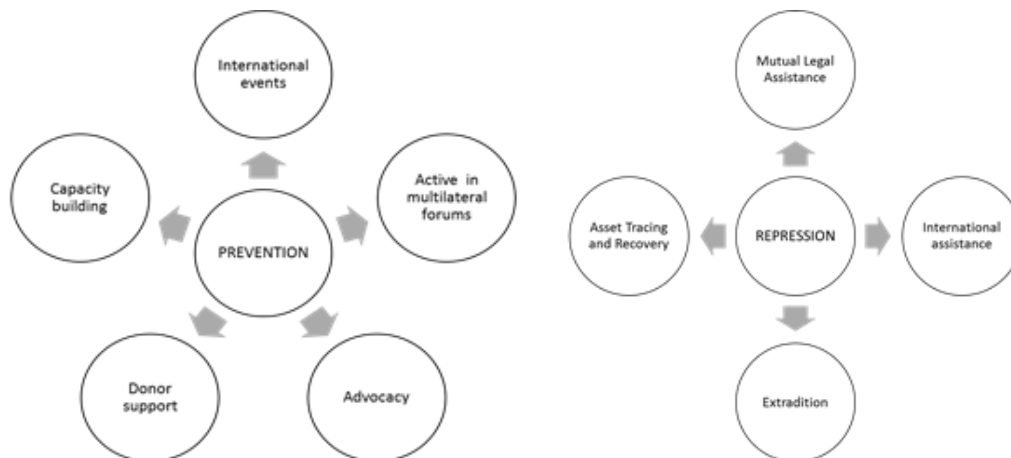
SCOPE	PARTNER
MULTILATERAL	<i>ASEAN Multilateral Cooperation Treaty (kerjasama KPK se-ASEAN) :</i>
	BMR (Badan Mencegah Rasuah) Brunei Darussalam
	BPR (Badan Pencegah Rasuah) Malaysia
	CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) Singapura
	UNODC (United Nations of Drugs and Crime)
	OKI (Organization of the Islamic Conference)
BILATERAL	IG (Inspectorate General) Vietnam
	NCCC (National Counter Corruption Commission) Thailand
	Inspektorat General Cambodia
	Ombudsman Philipina
	CAC (Commission of Anti-Corruption) Timor Leste
	Ministry of Supervision, China
	KICAC (Korea Independent Commission against Corruption)
	ACC (Anti Corruption Commissio) Bangladesh
	GIO (Government Inspectorate Office)Republik Islam Iran
	SNACC (Supreme Authority to Combat Corruption) Yaman
	Department of Justice Belanda
	Serious Fraud Office (SFO) Inggris
	EFCC (Economic and Financial Crimes Commission) Nigeria
	Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) SAR
	The Switzerland Federal Department of Justice
The Bhutan Anti-Corruption Commission	

*Data diambil dari Laporan Tahunan KPK 2004-2015

Dalam kemitraan dengan suatu negara tertentu, tidak menutup kemungkinan KPK menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berbeda sekaligus. Dengan Australia misalnya, KPK menjalin kerjasama berbasis MOU dengan Australian Public Service Commission, Australian Attorney General Department, dan Australian Commission of Law Enforcement Integrity, serta kerjasama non-MOU dengan The Australian Federal Police. Demikian pula KPK bekerja sama dengan National Counter Corruption Commission Thailand maupun The Thailand Department of Special Investigation. Ini merupakan strategi KPK untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa pihak yang saling melengkapi.

3. Bidang Kerjasama

Kerjasama internasional terus diperbanyak oleh KPK untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, baik pada bidang penindakan maupun pencegahan. Kedua bidang ini harus selaras dilakukan agar perlawanan terhadap korupsi bisa efektif. Konten yang dikerjakasikan dengan satu mitra bisa khusus pada bidang penindakan, namun sangat mungkin mencakup juga bidang pencegahan, mengingat negara lainpun membutuhkan hal yang sama. Berdasarkan data-data kerjasama dalam Laporan Tahunan KPK, konten kerjasama internasional pada kedua bidang tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.



Selain kerjasama internasional, KPK juga menggalang jaringan internasional (international network) seluas-luasnya, antara lain :

1. Aktif dalam Forum Internasional

KPK sangat aktif berpartisipasi dalam forum-forum multilateral di bidang anti-korupsi. Dari kajian data, sejumlah tujuan atau keuntungan yang diperoleh KPK melalui kegiatan internasional ini pertama. Memperluas jaringan internasional dengan sesama penegak hukum, yang dapat menjadi

pintu masuk bagi kerjasama selanjutnya terutama dalam bidang penindakan. Kedua, menjadikan forum untuk meningkatkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi global antara lain dengan mengarahkan penguatan komitmen anti-korupsi. Contoh terbaru adalah keterlibatan KPK dlm forum multilateral G-20, dimana KPK berperan memberi masukan dalam isu-isu pemberantasan korupsi yang dibahas di forum G-20. Saat ini sudah ada kesepakatan bahwa negara-negara G-20 tidak akan memberikan visa bagi koruptor untuk masuk ke negara anggota G-20. Selain itu disepakati pertukaran informasi demi transparansi yang akan membantu mencegah korupsi ataupun pemulihan asset. Termasuk bagaimana mencegah berpindahnya keuntungan dari Indonesia ke negara lain. (www.kpk.go.id, 2016)

2. Berbagi praktik terbaik (*the best practice sharing*)

Ini adalah bentuk kegiatan dimana satu pihak datang mempelajari pengalaman dan praktik terbaik dari pihak lain dalam memberantas korupsi, untuk dijadikan pembenahan diri. Kunjungan kerja yang demikian dapat memperkaya wawasan untuk menguatkan jaringan kerjasama ke depan untuk berbagi informasi (*information/data sharing*) diantara negara-negara.

PENERIMAAN KUNJUNGAN	PENGIRIMAN PEGAWAI KPK
Kunjungan delegasi Provedor-Timor Leste untuk belajar dari KPK dalam hal penanganan korupsi	Magang belajar sistem hukum dan yurisdiiksi Australia untuk memperkuat kemampuan manajemen MLA dan Central Authority di AGD Australia
Kunjungan kerja tim MACC Malaysia dan pejabat Kementerian Pelayanan Publik mempelajari KPK, untuk diterapkan di Malaysia	Mengikuti program peningkatan kemampuan pengawasan internal dan kepatuhan penegak hukum di AFP Australia
Kunjungan kerja tim Penindakan Delegasi MACC Malaysia	Magang di ACRC Korea untuk belajar sistem pencegahan korupsi, khususnya kerjasama internasional, manajemen gratifikasi, survey integritas, dll
Kunjungan delegasi magang HOO Afghanistan belajar penanganan LHKPN	Belajar dan praktik lapangan dalam kegiatan penindakan dan proaktif investigasi di Malaysia
Kunjungan Anti Corruption Kuwait	Mempelajari sistem perlindungan saksi, sistem manajemen SDM oleh FBI dan US Marshall

*Data diambil dari beberapa Laporan Tahunan KPK K

Setiap tahunnya tercatat cukup banyak negara, baik merupakan mitra kerjasama maupun bukan, berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari dan meniru strategi KPK dalam upaya pencegahan maupun penindakan korupsi;

mulai dari negara berkembang seperti Menurut pimpinan KPK Laode M. Syarief, ini menandakan bahwa kinerja KPK dinilai progresif, antara lain karena mampu menangani kasus2 besar. Pada bulan September 2016 yang lalu misalnya, sejumlah delegasi perwakilan pemerintah dan lembaga antikorupsi di Afrika (Nigeria, Kenya, Tunisia, Mozambik) berkunjung untuk belajar pemberantasan korupsi ke KPK. Sebaliknya, untuk tujuan yang sama KPK juga cukup sering mengirimkan pegawainya untuk belajar ke negara lain. Berikut adalah beberapa gambaran dari kegiatan sharing praktik terbaik.

Kesimpulan

Anti-korupsi telah menetap sebagai fokus penting dari politik luar negeri Indonesia, ditandai oleh perluasan kerjasama dan jaringan internasional sebagai strategi dalam pemberantasan korupsi, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh KPK. Adanya *compromise or finding common ground* di mana negara-negara memiliki kesamaan pandangan mengenai bahaya ancaman korupsi baik bagi ketahanan nasional maupun kepentingan negara lain terhadap si negara terkorupsi, menjadi pelumas dalam beroperasinya kerjasama internasional KPK. Kinerja KPK yang progresif dalam pemberantasan korupsi juga memosisikan lembaga anti-korupsi ini sebagai *the role model* bagi negara-negara lain, baik negara berkembang maupun negara maju. Dengan reputasi internasionalnya tersebut, KPK cukup mudah menuai kerjasama terutama dalam penindakan, tanpa mengabaikan bidang pencegahan. Hasil dari upaya tak henti menggalang kerjasama dan perluasan jaringan sebagai bentuk diplomasi anti-korupsi tersebut kembali kepada Indonesia sendiri, dengan menurunnya tingkat korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir.

Referensi

- Ginting, Jamin. "Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, September 2011.
- Heineman, Ben W. , and Heimann, Fritz , "The long War Against Corruption". Foreign Affairs, May/June 2006.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, 2011
- Remmert, David, "Diplomacy Matters: Why Anticorruption Belongs on the Foreign Policy Agenda and How to Convince the Skeptics", Discussion

paper for the Anti-Corruption Law interest Group (ACLIG) Inaugural Conference, University of Pennsylvania, October 2-3, 2015.

Sajdik, Martin "The Challenges of Fighting Corruption at The National and International Levels.". UN Chronicle; 2012

Suprapdiono, Giri, "Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance." Jurnal Opinio Juris, Vol.11 No. 01, Mei-Agustus 2012.

Suryandaru, Ganewati (ed.). Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Pustaka Pelajar – Yogyakarta, dan Pusat Penelitian Politik – LIPI Jakarta. 2008.

Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V. International Relations and World Politics: Security, Economy

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2004 – 2015 dalam www.kpk.go.id

Transperancy, International, Corruption Perception Index 2015 dalam <https://www.transparency.org/cpi2015/>

<http://thediplomat.com/2016/02/indonesias-anti-corruption-fight/>

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3745-wapres-pemberantasan-korupsi-kita-terbaik-di-dunia>

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3353-kpk-dorong-tiga-regulasi-dituntaskan>

Analisis Integritas Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus Liberalisasi Pelayanan Dalam Bidang Hukum di Indonesia

Azhar

Universitas Sriwijaya

aazhar_2000@yahoo.com

Abstrak

Salah satu program ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) adalah liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum. Paper ini membahas tentang integritas Indonesia dalam menghadapi liberalisasi pelayanan bidang hukum di ASEAN, yang fokus pada dasar liberalisasi dalam Piagam ASEAN, dan apa yang dimaksud dengan liberalisasi pelayanan bidang hukum. Paper ini juga membahas sejarah pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia, serta kualifikasi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan bidang hukum. Paper ini menganalisis integritas Indonesia dalam liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum dengan menggunakan analisis SWOT. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif analitis. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu aturan main sebelum membuka keran liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum, baik dalam hal infrastruktur, teknik beracara, ilmu dan sumber daya manusia.

Kata kunci:

Integritas, liberalisasi, pelayanan hukum, ASEAN, Indonesia

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang berbunyi bahwa salah satu tujuan dibentuknya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara bertujuan "menciptakan pasar tunggal dan berbasis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; serta arus modal yang lebih bebas."^[1] Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN dalam perdagangan dan pelayanan telah dituangkan secara institusional oleh pemimpin ASEAN di dalam ASEAN

Framework Agreement on Services (AFAS) pada Pertemuan Puncak ASEAN di Bangkok, 15 Desember 1995, yang dihadiri oleh para menteri ekonomi ASEAN. Hal ini kemudian ditinjaulanjuti dan diperkuat dengan kesepakatan yang tertuang didalam paragraf empat ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint yang mengingatkan pemimpin ASEAN di pertemuan puncak pemimpin ASEAN yang ke-12 untuk memenuhi komitmen mereka dalam mempercepat pelaksanaan suatu komunitas negara-negara ASEAN yang telah ditetapkan pada tahun 2015.^[2]

Salah satu aspek liberalisasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah liberalisasi perdagangan dalam bidang pelayanan hukum. Dalam makalah ini secara khusus akan membahas profesi pelayanan hukum di Indonesia, yaitu profesi advokat. Pembahasan dilanjutkan dengan masalah advokat asing yang ingin berpraktik di Indonesia. Selanjutnya kita akan menganalisis liberalisasi pelayanan hukum di Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT. Di bagian akhir, kita akan mendiskusikan langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia dalam rangka mengantisipasi liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di lingkungan negara-negara ASEAN.

Liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum

Sebelum membahas lebih lanjut tentang liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum tersebut yang sudah ditetapkan dan diberlakukan sekarang. Liberalisasi secara umum adalah proses atau usaha untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan.^[3] Dalam hal ini, yang dimaksud dengan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum, yaitu kebebasan kepada para pelayan hukum atau advokat di negara-negara ASEAN untuk memberikan pelayanan dalam bidang hukum di seluruh negara-negara ASEAN.

Liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di negara-negara ASEAN dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Kebebasan untuk beracara hukum negara ketiga.
- Kebebasan untuk beracara hukum internasional.
- Kebebasan untuk beracara terhadap hukum negara tuan rumah yang bersangkutan.

Dari ketiga hal tersebut, komitmen yang ada di antara negara-negara ASEAN hingga saat ini adalah liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum negara ketiga dan hukum internasional. Hal ini berarti belum ada satu pun negara-negara ASEAN yang memberikan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum kepada advokat asing untuk dapat beracara hukum di negara

pengadilan tersebut berada. Pada umumnya, advokat asing hanya boleh beracara mengenai hukum negara ketiga dan hukum internasional, seperti yang telah dilakukan oleh Singapura. Satu-satunya negara anggota ASEAN yang telah melakukan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum adalah Brunei Darussalam yang meliberalisasikan advokat asing untuk beracara hukum Brunei di pengadilan Brunei. Namun, liberalisasi hukum di Brunei hanya terbatas bagi advokat yang berasal dari Singapura, Malaysia, Skotlandia, Inggris, Irlandia Utara dan Australia.^[4]

Pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan pelayanan di bidang jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat, yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.^[5]

Sebenarnya profesi advokat di Indonesia telah diakui secara formal pada pertengahan abad ke-19. Hal ini dapat dilihat dalam *Staatsblaad 1847-23 Regelement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* yang mengatur tentang profesi sebagai advokat di Indonesia. Sayangnya, undang-undang tersebut hanya mengatur advokat yang berkebangsaan Belanda.^[6] Dengan kata lain, undang-undang tersebut tidak memberikan dasar hukum bagi advokat bumiputera atau lokal (Warga Negara Indonesia) untuk ikut beracara di pengadilan. Namun, undang-undang itu sebenarnya juga tidak melarang Warga Negara Indonesia atau bumiputera untuk beracara di pengadilan di Indonesia. Hal ini terus berlangsung hingga Indonesia telah menikmati kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Profesi advokat di Indonesia justru secara tidak langsung diakui di dalam peraturan lain, yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana.^[7] Tidak diaturnya profesi advokat di Indonesia ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya aturan yang jelas dan perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya sehari-hari. Hal ini berlangsung hingga akhir abad ke-20.

Sejalan dengan kondisi tersebut, timbullah permasalahan yang lain, yaitu munculnya berbagai asosiasi advokat Indonesia dengan berbagai nama. Ada 7 (tujuh) asosiasi advokat di Indonesia, antara lain.^[8]

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

- Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Di samping itu, ada juga asosiasi advokat di Indonesia yang tidak diakui oleh pemerintah. Hal tersebut menambah lagi permasalahan yang sudah ada, yaitu manakah asosiasi advokat yang sebenarnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah Republik Indonesia pada 5 April tahun 2003 telah memutuskan, mengesahkan dan mengundang Undang-undang Tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang mulai diberlakukan pada bulan April 2004. Isinya meliputi:

- Persyaratan untuk dapat diakui sebagai advokat
- Persyaratan pelaporan
- Pendirian organisasi advokat
- Pembuatan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga
- Pembuatan Kode Etik dan Dewan Kehormatan dan lainnya.^[9]

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka secara resmi atau hukum profesi advokat telah diakui di bumi Indonesia, khususnya advokat pribumi/lokal/Warga Negara Indonesia. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan kepada advokat di Indonesia untuk membuat satu wadah organisasi advokat.^[10] Organisasi advokat inilah yang berwenang menentukan siapa yang layak dan dapat menjadi advokat, untuk beracara di pengadilan serta melakukan advokasi hukum di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.^[11] Hal ini berarti bahwa seseorang baru diakui sebagai advokat apabila dia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi advokat dan telah dilantik menjadi advokat oleh organisasi advokat di Indonesia dalam hal ini PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Jadi, dengan kata lain bahwa hanya advokatlah yang boleh melakukan pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Siapa yang dapat menjadi advokat di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang

untuk dapat diangkat menjadi advokat di Indonesia. Pasal 2 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi:

- 1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat;
- 2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 Ayat 1 dikatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat di Indonesia seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Di samping itu, ada tiga persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang advokat yaitu:

- a. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesia Advokat (PKPA).
- b. Ujian Profesi Advokat; dan
- c. Magang.^[12]

Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yaitu lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Yang dapat mengikuti ujian profesi Advokat adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.

Kemudian untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat wajib memenuhi ketentuan magang sekurang-kurangnya dua (2) tahun secara terus-menerus di kantor advokat.

PERADI telah mengeluarkan Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan PERADI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah warga Negara Republik Indonesia, bukan pegawai negeri atau pejabat, berusia minimal 25 tahun, sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan PERADI. Setelah itu, seorang calon advokat harus lulus ujian advokat dan mengikuti magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di kantor Advokat. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki lebih kurang 27.000 advokat lokal yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Sebelum didengungkannya liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum, ternyata sudah banyak advokat asing bekerja di Indonesia. Kehadiran advokat asing di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum diberlakukan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada bulan April 2004, sudah banyak *law firm* Indonesia mempekerjakan advokat asing. Mereka masuk sebagai *technical assistance*, padahal kerja mereka adalah memberikan layanan jasa dan menangani kontrak hukum yang berhubungan dengan luar negeri. Kehadiran advokat asing itu tidak terlepas tuntutan perkembangan hukum dalam kerangka transaksi antar negara yang tentunya melibatkan hukum asing ataupun hukum Internasional. Kehadiran mereka itu di dalam negeri hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman bagi advokat Indonesia, tapi lebih merupakan pemacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum.^[13]

Berdasarkan data dari PERADI pada tahun 2012 sebanyak 44 advokat asing diketahui telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk bekerja di Indonesia, kemudian meningkat menjadi 58 pada tahun 2014.^[14] Sedangkan menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi ada 47 advokat asing yang terdaftar pada tahun 2012. Hal ini dimungkinkan karena menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Kantor Advokat di Indonesia dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat. Jadi, dengan kata lain bahwa advokat asing dapat melakukan pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia sebatas sebagai tenaga ahli dalam bidang hukum internasional dan hukum negara ketiga.

Sedangkan menurut Pasal 23 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa "Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia." Ini berarti bahwa advokat asing tidak boleh/dilarang melakukan fungsinya sebagai advokat di Indonesia baik beracara hukum negara ketiga dan hukum Internasional di pengadilan Indonesia apalagi beracara hukum Indonesia di pengadilan Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa advokat asing dilarang untuk beracara di sidang pengadilan dan membuka kantor jasa pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia. Mereka boleh bekerja hanya sebatas sebagai tenaga ahli di kantor advokat milik orang Indonesia.

Analisis liberalisasi pelayanan bidang hukum di Indonesia

Selanjutnya kita akan membahas liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT.^[15] Analisis SWOT terdiri dari:

- **Strength** adalah karakteristik yang menguntungkan yang dimiliki Indonesia untuk liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya
- **Weakness** adalah karakteristik yang merugikan yang dimiliki Indonesia untuk liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum
- **Opportunity** adalah faktor eksternal yang sangat menguntungkan Indonesia untuk liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum
- **Threat** adalah faktor eksternal yang dapat menimbulkan masalah bagi Indonesia dalam liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum

Strength

Dilihat dari 'Strength', ada beberapa hal yang dimiliki oleh Indonesia pelayanan dalam bidang hukum ini antara lain:

- Banyaknya jumlah advokat lokal di Indonesia yang berjumlah lebih kurang 27,000 orang; belum lagi yang sedang magang dan menunggu

untuk dilantik menjadi advokat di berbagai kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Ini merupakan sumber daya manusia yang berlimpah di Indonesia dalam rangka menyongsong liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum.

- Di Indonesia hingga saat ini, setidaknya, terdapat 200 fakultas hukum dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Bila setiap tahunnya masing-masing fakultas hukum tersebut meluluskan 100 mahasiswa, maka dalam satu tahun ada sekitar 20.000 Sarjana Hukum baru se-Indonesia. Suatu jumlah yang luar biasa. Ini berarti Indonesia mempunyai sumber daya manusia pelayanan dalam bidang hukum yang berlimpah yang merupakan kekuatan yang bisa diandalkan dalam rangka menyongsong liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum.
- Anggota ASEAN yang menganut sistem hukum sama dengan Indonesia yaitu *civil law*, antara lain Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Ini akan mempermudah dan merupakan lahan bagi advokat Indonesia untuk beracara di negara-negara tersebut.

Weakness

Dilihat dari 'Weakness', ada beberapa hal yang menjadi faktor kelemahan:

- Sistem hukum yang berbeda di negara-negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Brunei, yang menganut *Common Law System*. Dimana terdapat perbedaan yang mendasar antara *Common Law System* dan *Civil Law System*. Pada *Common Law System* sumber hukumnya berdasarkan jurisprudensi atau case law dan peraturan, sedangkan pada *Civil Law System* semata-mata berdasarkan peraturan. Kemudian peranan advokat pada *Common Law* mengontrol persidangan dengan menerapkan adversarial system, sedangkan pada *Civil Law System*, hakim yang dominan dalam persidangan dengan menggunakan *inquisitorial system*. Kualifikasi untuk menjadi hakim di negara-negara yang menganut *Common Law System* adalah advokat yang berpengalaman, sedangkan di negara-negara yang menganut *Civil Law System* kualifikasi hakimnya merupakan hakim karir. Untuk itu, di fakultas hukum di Indonesia harus diberi muatan materi keterampilan dalam beracara di pengadilan, tidak hanya pada *Civil Law* tetapi juga dilengkapi dengan materi beracara berdasarkan *Common Law System*, karena ada beberapa perbedaan yang mendasar dalam beracara di peradilan *Common Law* dan *Civil Law System*.

Bahasa yang berbeda digunakan di pengadilan negara-negara anggota ASEAN yang menganut sistem hukum *Common Law* pada umumnya bahasa Inggris, kecuali Myanmar, maka perlu dilengkapi pula sarjana hukum Indonesia dengan kemampuan berbahasa Inggris yang fasih dan mengerti bahasa teknis hukum yang digunakan dalam *Common Law System*. Disamping itu, harus dilengkapi dengan kemampuan bahasa asing lainnya seperti Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja dan Laos.

- Penguasaan praktik profesi hukum di Indonesia masih dipertanyakan. Seperti kemampuan teknis dalam beracara maupun negosiasi dan mediasi yang dimiliki rata-rata advokat kita harus ditingkatkan berdasarkan standard yang berlaku secara global. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan teknis beracara di pengadilan, melakukan negosiasi dan mediasi diluar pengadilan.

Opportunity

'Opportunity' meliputi antara lain:

- Dengan sumber daya manusia yang banyak dan fakultas hukum yang berlimpah, Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia sarjana hukum yang handal untuk menjadi advokat yang berkualitas dan berkemampuan yang tinggi.
- Terbuka peluang bagi para advokat Indonesia untuk melebarkan sayapnya keberbagai negara-negara ASEAN khususnya Malaysia, Singapura, Brunei dan di negara-negara ASEAN lainnya. Sehingga dapat mengangkat nama, martabat dan harkat bangsa Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN. Kalau sekarang Indonesia terkenal dengan negara pengekspor tenaga kerja kasar dan pembantu, diharapkan setelah tahun 2015 nanti Indonesia bisa menguasai pelayanan dalam bidang hukum di negara-negara ASEAN, khususnya Singapura, Malaysia dan Brunei. Mengingat banyaknya warga negara Indonesia di tiga negara anggota ASEAN tersebut. Di Malaysia saja menurut Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur ada sekitar dua juta warga negara Indonesia di sana. Jumlah TKI yang legal sekitar 1.2 juta orang, mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia sekitar 14.000 orang, ekspatriat Indonesia di Malaysia ada sekitar 5.000 orang.

Belum lagi warga Aceh yang memegang kartu tsunami ada sekitar 24,000 orang, kemudian yang pegang *permanent resident* (PR) juga ada ratusan ribu termasuk di Sabah dan Sarawak. Dari jumlah total dua juta tersebut, sekitar 500,000 yang merupakan TKI ilegal, 1,300 ratus orang sedang dipenjara di penjara Penang dan 233 orang warga Indonesia

terancam hukuman mati.^[16] Menurut Duta Besar Indonesia di Bandar Seri Begawan terdapat 52,457 Warga Negara Indonesia yang terdiri dari TKI informal 28,302 orang. Sebagian besar TKI itu bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) dan sebagian menjadi sopir pribadi. Sementara itu, jumlah TKI formal di Brunei itu sebanyak 18,348 orang yang terdiri atas pekerja perminyakan 1,053 orang, konstruksi 10,806, industri perawat enam, perkebunan 343, sopir perusahaan 368, dan pekerjaan lainnya sebanyak 5,735 orang.^[17] Sedangkan menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bahwa jumlah WNI/TKI yang tinggal di Singapura sekitar 167 ribu orang, antara Lain; 92 ribu orang bekerja sebagai PLRT, 20 ribu orang tenaga profesional, dan 16 ribu sebagai pelaut di Singapura.^[18]

- Para advokat Indonesia dapat menimba pengalaman dan meningkatkan kemampuan beracara di pengadilan negara-negara ASEAN maupun didalam negeri. Dapat membuka mata dan pola pikir (*mindset*) para advokat Indonesia bahwa profesi advokat profesi yang mulia, terhormat dan disegani oleh para penegak hukum lainnya dalam bidang penegakan hukum dan keadilan.
- Dengan semakin banyaknya kasus hukum asing di Indonesia maupun hukum internasional dapat menambah pendapatan, ilmu dan kemampuan advokat Indonesia untuk menangani hukum negara ketiga dan hukum internasional.
- Para advokat Indonesia dapat meningkatkan kemampuan dan pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar.

Threat

Threats meliputi beberapa hal, antara lain:

- Ketidaksiapan lembaga perguruan tinggi Indonesia untuk menghasilkan sumber daya advokat yang menguasai praktik profesi hukum dan sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Hal ini akan berdampak kepada kurang siapnya advokat Indonesia untuk berkompetisi dengan advokat-advokat dari luar negeri. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012 saja lebih kurang 70 advokat asing yang mengajukan permohonan rekomendasi kepada PERADI untuk bekerja di Indonesia.^[19] Sebaliknya belum ada advokat Indonesia mengajukan permohonan ke negara anggota ASEAN.
- Kemampuan bahasa asing yang minim dapat menyebabkan advokat kita kalah dalam persaingan dengan advokat asing dalam memberikan

pelayanan hukum baik di negara-negara anggota ASEAN maupun di dalam negeri sendiri.^[20]

- Lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia sehingga dikhawatirkan banyak advokat asing yang melakukan hal-hal yang merugikan konsumen dalam negeri.

Dari analisis *SWOT* di atas, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya negara Indonesia mengantisipasi hal-hal tersebut diatas sebelum melakukan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum. Jangan dipaksakan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia, kalau Indonesia belum siap karena akan merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Kesimpulan

Liberalisasi sekarang ini tidak dapat ditunda dan dihalangi; setuju terhadap liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum atau tidak; suka terhadap liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum atau tidak; cepat atau lambat hal tersebut akan tiba masanya. Indonesia perlu mengantisipasi liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum. Indonesia harus mempersiapkan fakultas hukum yang dapat menghasilkan sarjana hukum yang menguasai *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Hal ini secara otomatis akan mengubah kurikulum yang ada di berbagai fakultas hukum di Indonesia dan juga mendidik tenaga pengajar di bidang hukum tentang *Common law*. Selanjutnya, Indonesia harus membekali sarjana hukum yang menguasai bahasa Inggris dan bahasa yang dipakai di negara-negara ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos dan Myanmar. Mempersiapkan hal ini memerlukan perencanaan, biaya, waktu dan kerja keras. Sementara melakukan perbaikan, revisi kurikulum dan meningkatkan tenaga pengajar di fakultas hukum di Indonesia yang menguasai *Common Law System*, Indonesia sudah saatnya mengirimkan para pemuda-pemudanya untuk belajar hukum di negara-negara yang menganut *Common Law System*, sehingga bisa menguasai keterampilan dan keahlian sistem hukum tersebut dengan diberlakukannya liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di negara-negara ASEAN.

Indonesia juga harus melakukan penegakan hukum secara serius dan sungguh-sungguh khususnya pelayanan dalam bidang hukum dan perlindungan konsumen. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, bukan tidak mungkin para advokat Indonesia hanya akan menjadi penonton di negara sendiri atau menjadi pesuruh para advokat asing. Indikasi mengenai hal itu telah ada dengan telah banyaknya advokat asing yang bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli.

Referensi

1. Pasal 1 Paragraph 5 ASEAN Charter (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).
2. Paragraph 4 ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008.
4. Laws of Brunei Darussalam. Under Section 3 Legal Profession Act Chapter 13, Revised Edition, 2006.
5. Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Republik Indonesia, 2003.
6. Staatsblaad 1847-23 Regelement op de Rechtterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, 1847.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), 1981.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-undang No. 18/2003 Tentang Advokat, 2006.
9. Undang-undang Tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Republik Indonesia, 2003.
10. Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Republik Indonesia, 2003.
11. Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Republik Indonesia, 2003.
12. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, 2006.
13. Suwantin Oemar, Wartawan Bisnis Indonesia, http://www.bisnis.com/servlet/page?_page_id=439506 diakses tanggal 10 April 2010.
14. Suwantin Oemar, Wartawan Bisnis Indonesia, http://www.bisnis.com/servlet/page?_page_id=439506 diakses tanggal 10 April 2010
15. Lawrence G. Fine. The SWOT Analysis: Using your Strength to overcome Weaknesses, Using Opportunities to overcome Threats. Kick It, LLC, 2010.
16. <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/365-ribuan-wni-dibui-di-malaysia.html> dilihat pada tanggal 30 Juli 2011.
17. <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/07/243875/277/2/Perlu-MoU-TKI-Antara-RI-Bruneidilihat> pada tanggal 30 Juli 2011.
18. http://www.investor.co.id/national/bnp2tki-peluang-kerja-di-singapura-terbuka/16758#Scene_1 dilihat pada tanggal 30 Juli 2011.
19. Suwantin Oemar, Wartawan Bisnis Indonesia, [http://www.bisnis.com/servlet/page?_pag ...](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pag)
20. <http://www.antarabali.com/berita/30500/indonesia-masih-kurang-pengacara>





Diterbitkan oleh:

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin
Gedung FISIP UNHAS, Lt. 3
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90243
Telp/Fax: +62 411 585024 | e-mail: vennas7aiihii@gmail.com

Supervisi oleh: **Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII)**